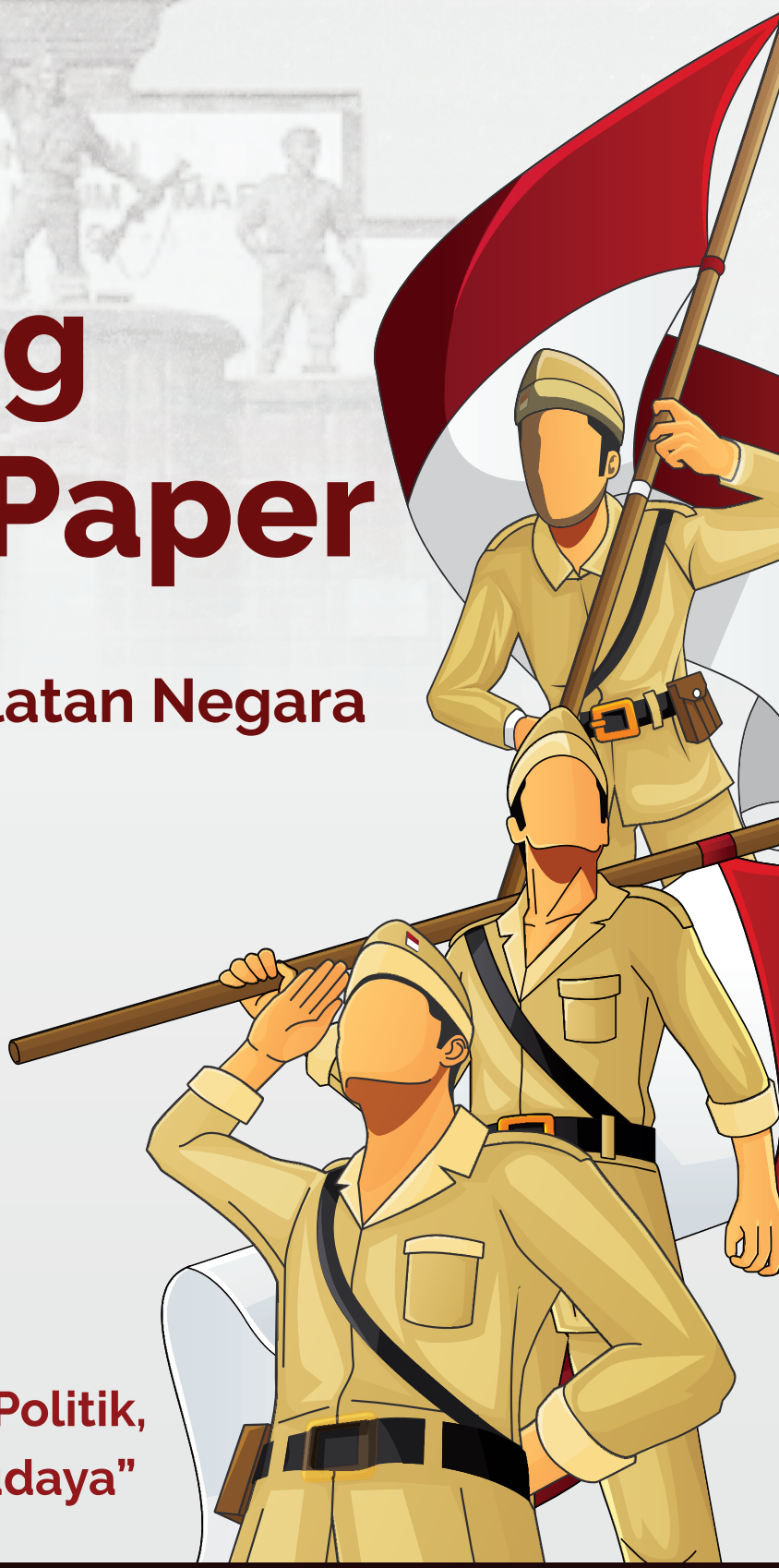
Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*
ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦏꦼꦧꦸꦢꦪꦪꦤ꧀ (ꦏꦸꦤ꧀ꦝꦲ ꦏꦧꦸꦢꦪꦪꦤ꧀)
Daerah Istimewa Yogyakarta

DANA KEISTIMEWAAN

Prosiding Call for Paper

Simposium Penegakan Kedaulatan Negara 2025



"Reorientasi Kedaulatan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Budaya"

Paper Content

No	Penulis	Karya
1	Abu Wafa	Dari Warisan ke Wawasan: Revitalisasi Aksara Jawa dan Peran Seniman Tipografi di Yogyakarta dalam Dinamika Kedaulatan Budaya Lokal pada Era Global
2	Achmad Syarif Rachmaji	Peran Arsip dalam membangun Kesadaran Kedaulatan Negara (*State Sovereignty Awareness*): Studi Kasus pada Kedaulatan Seni Budaya dan Kedaulatan Wilayah
3	Adif Rachmat Nugraha	Membumikan Kedaulatan: Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik sebagai Bentuk Artikulasi Kedaulatan Rakyat
4	Ahmad Al Wajieh	Studi Pustaka Reorientasi Kedaulatan Multidimensional melalui *Sustainibility Development Goals* yang Berbasis Kearifan Lokal
5	Anastasia Melati Listyorini	Reorientasi Kedaulatan Negara melalui Fenomena Tari: Kajian pada Program Dinas Kebudayaan Yogyakarta
6	Angga Pandu Wijaya	Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Keberlanjutan UMKM sebagai Bentuk Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
7	Apri Nabila Wardani	Keraton Yogyakarta sebagai Intermediari Kekuasaan: Sebuah Analisis Historis tentang Hubungan Pusat-Daerah
8	Ardian Mulyadi	Legitimasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Kemajuan dan Perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang Berkelanjutan
9	Bambang Haryo Suseno	Pengasingan Para Tokoh Republik di Bangka: Titik Balik Kemenangan Diplomasi Republik Indonesia.
10	Baskoro Wicaksono	Paradoks Glokalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Deliberatif
11	Bayu Adiputro	Manunggal Rasa, Mbangun Jiwa: Menemukenali Nilai Gotong Royong dalam Membangun Sistem Dukungan Kesehatan Mental Berbasis Komunitas Di Yogyakarta
12	Cysakaren Diva Pratiwi	Hibriditas Budaya dalam Serial Netflix Gadis Kretek: Menelusuri Perubahan Sosial dalam Konteks Globalisasi
13	Dias Oktri Raka Setiadi	Kedaulatan Penghidupan Masyarakat Kalurahan: Risalah Kebijakan bagi Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta
14	Dwi Supatmi	Optimalisasi Usaha Mikro DIY melalui Klusterisasi dan Digitalisasi: Strategi Menuju Ekonomi Berdaya Saing
15	Fajar Wijanarko	‘Babar Wastra ing Sampiran’ Rangsangan Pendayagunaan ‘Repatriasi’ Naskah Keraton Yogyakarta
16	Frial Ramadhan Supratman	Media dan Revolusi: Warta Berita ANTARA dan Kedaulatan Negara pada Era Revolusi (1945-1949)
17	Galih Nugraha	*Rediscovery Our Sovereignty* (Analisis Teks Pidato Presiden Sukarno di Muka Sidang Umum PBB ke 15 Tanggal 30 September 1960)
18	Galih Pangestu Jati	Memori Kolektif dan Media Baru: Studi Kasus Video YouTube tentang Serangan Umum 1 Maret
19	Hendra	Bung Hatta dan Bahasa Indonesia: Kedaulatan Bahasa dan Relevansinya Pada Masa Kini
20	Hery Yanto	Perjuangan Kedaulatan Tanah dan Air dalam Lensa Jurnalisme Non-Profit: Analisis Isi Multimodal Teks Project Multatuli
21	Ika Fitri Andini	Strategi Indonesia dalam Mewujudkan *Blue Economy Roadmap* Melalui *Blue Finance Instruments Development*

No	Penulis	Karya
22	Latifah , Ary Budiyanto	Sastra Kuliner sebagai Ekspresi Kedaulatan Budaya: Studi pada Komunitas Lakoat Kujawas di Mollo, Nusa Tenggara Timur
23	Luthfi Azizah Azhar	Analisis Pembangunan Jalan Tol di Yogyakarta: Manfaat serta Kerugiannya dari Perspektif Budaya dan Hukum Terhadap Pelestarian Situs Budaya
24	M. Zikwan	Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Hilirisasi Ekonomi untuk Mewujudkan Keadilan dan Keberlanjutan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045
25	Masning Salamah	Inspirasi Kedaulatan Wilayah dan Politik dari Kakawin Nagarakretagama: Perspektif Reorientasi Kedaulatan Nusantara Masa Kini
26	Maylitha Luciona Demorezza	Meme Sebagai Media Inovatif Penuturan Sejarah: Studi Analisis Akun History Memes Nusantara
27	Muhaimin Yasin	Seni dan Budaya sebagai Alat Diplomasi: Belajar dari Sejarah Yogyakarta
28	Muhammad RM Fayasy Failaq	Konstitusi Kebudayaan dan Budaya sebagai Identitas Konstitusional di Indonesia
29	Muhammad Yaser Arafat	Genealogi “Pencurian” Sejarah KRT Sumodiningrat dan Tantangan Penyelamatan Kedaulatan Sejarah Bangsa Indonesia
30	Neng Marlina Efendi	Mencontoh Kedaulatan Tanah Yogyakarta Untuk Kedaulatan Pangan Indonesia (Kajian Historis dan Budaya)
31	Ratu Selvi Agnesia	Singo Barong Taiwan *Soft Diplomacy* dalam Warisan Budaya
32	Rio Fernando Alexander	Strategi Pelestarian Bahasa Daerah melalui Insentif Pajak bagi Industri Musik Modern: Membangun Keterhubungan Budaya dan Ekonomi Kreatif
33	Sekar Budi Dewani	Kedaulatan Budaya Indonesia melalui *Place Identity* pada Sumbu Filosofi Yogyakarta
34	Slamat Trisila	Diplomasi Peci Hitam: Identitas Budaya dan Simbol Nasionalisme dalam Meneguhkan Kedaulatan RI Pasca-Indonesia Merdeka
35	Terra Bajraghosa	Retorika Visual Penegakan Kedaulatan Negara dalam Cerita Gambar
36	Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo	Kerangka Hukum Pengelolaan Kedaulatan Ruang Siber Indonesia dalam Hukum Internasional: Studi Kasus Pemberantasan Judi *Online* di Indonesia

Dari Warisan ke Wawasan: Revitalisasi Aksara Jawa dan Peran Seniman Tipografi di Yogyakarta dalam Dinamika Kedaulatan Budaya Lokal pada Era Global

Abu Wafa

Magister Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

abuwafa@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Sebagai salah satu kota budaya, Yogyakarta menghadapi tantangan globalisasi yang mengikis identitas lokalnya, contohnya revitalisasi Aksara Jawa melalui seni tipografi. Penelitian ini mengeksplorasi peran seniman tipografi di Yogyakarta dalam merevitalisasi Aksara Jawa sebagai respons tantangan globalisasi yang berpotensi menggerus identitas budaya lokal. Revitalisasi ini bukan sekadar menggerakan seni, tetapi juga reorientasi kedaulatan Yogyakarta dalam bidang sejarah dan budaya. Aksara Jawa, yang sebelumnya cenderung terpinggirkan, kini dihidupkan kembali melalui karya-karya seni tipografi yang memadukan estetika tradisional dengan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan seniman dan perannya menggunakan tipografi sebagai medium memperjuangkan kedaulatan budaya lokal sekaligus mengangkat nilai ekonomi karya seni berbasis tradisi. Metode penelitian menggunakan etnografi visual (berdasarkan Sarah Pink, 2001). Data diperoleh melalui wawancara dengan seniman, pengamat budaya, dan komunitas literasi Aksara Jawa, serta analisis karya seni tipografi di ruang publik dan media digital yang mengusung tema lokal. Pendekatan penelitian menggunakan interdisipliner (berdasarkan Klein, 1990) menggabungkan studi budaya dan desain grafis untuk pemahaman relasi kuasa antara tradisi lokal, dinamika modernitas, dan tuntutan global. Paradigma penelitian menggunakan paradigma kritis untuk mencerminkan praktik kedaulatan lokal dalam era global. Pertanyaan penelitian terbagi ke tiga bagian. Pertama, bagaimana seniman tipografi di Yogyakarta menciptakan karya berbasis Aksara Jawa yang diterima generasi modern? Kedua, bagaimana seniman tipografi di Yogyakarta mengembangkan desain Aksara Jawa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kekinian? Ketiga, bagaimana revitalisasi ini berkontribusi pada kedaulatan budaya dan ekonomi Yogyakarta? Hasil penelitian mengungkapkan karya-karya tipografi Aksara Jawa bukan sekadar merepresentasikan simbolis identitas budaya lokal, tetapi juga sarana resistensi homogenisasi budaya global. Dengan kata lain, revitalisasi Aksara Jawa melalui seni tipografi bukan sekadar melestarikan warisan budaya, tetapi juga menguatkan posisi Yogyakarta sebagai pusat kreativitas. Karya-karya tipografi memberikan dampak signifikan pada diplomasi budaya, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di bidang seni dan desain. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi tradisi dan inovasi penjagaan eksistensi identitas lokal di tengah arus globalisasi.

Kata kunci: Revitalisasi, Aksara Jawa, Seniman Tipografi, Kedaulatan Budaya Lokal, Globalisasi

1. Pendahuluan

Seperti yang diketahui bersama, jenis bahasa berdasarkan dari media pengantarnya ada dua macam: bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam lingkup penelitian ini, hanya menyinggung mengenai bahasa tulis, terutama pada revitalisasi aksara Jawa di Yogyakarta. Meskipun demikian, terlebih dahulu akan diperlihatkan gambaran secara garis besar mengenai bahasa lokal di Indonesia untuk mengetahui posisi bahasa Jawa di Indonesia dan berlanjut ke aksara Jawa. Berdasarkan Ethnologue[1], Indonesia memiliki 704 bahasa lokal dengan empat level sebagai berikut. Pertama, institusional, bahasa yang telah berkembang ke titik di tempat ia digunakan dan dipertahankan oleh lembaga-lembaga di luar rumah dan masyarakat. Di level ini, ada sebanyak 17 bahasa lokal. Kedua, stabil, bahasa yang tidak dipertahankan oleh lembaga-lembaga formal, tetapi masih menjadi norma di rumah dan masyarakat bahwa semua anak mempelajari dan menggunakan bahasa ini. Di level ini, ada sebanyak 181 bahasa lokal. Ketiga, terancam punah, tidak lagi menjadi norma bahwa anak-anak mempelajari dan menggunakan bahasa tersebut. Di level ini, ada sebanyak 506 bahasa lokal. Terakhir, punah, bahasa bahasa tidak lagi digunakan dan tidak ada seorang pun yang mempertahankan rasa identitas etnis yang terkait dengan bahasa ini. Di level ini, ada sebanyak 14 bahasa lokal.

Sayangnya, pada akses gratis, Ethnologue tidak menunjukkan bahasa lokal apa saja yang tergolong pada masing-masing level tersebut. Namun, jika mengeklik bahasa Jawa pada temuan Ethnologue[2], maka bahasa Jawa (*Javanase*) berada di level institusional karena biasanya digunakan sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Bahasa Jawa yang levelnya tergolong penting dan sering digunakan juga diperkuat dengan hasil survei pada tahun 2010 bahwa bahasa Jawa berada di tingkatan teratas sebagai bahasa lokal yang sering digunakan sehari-hari.

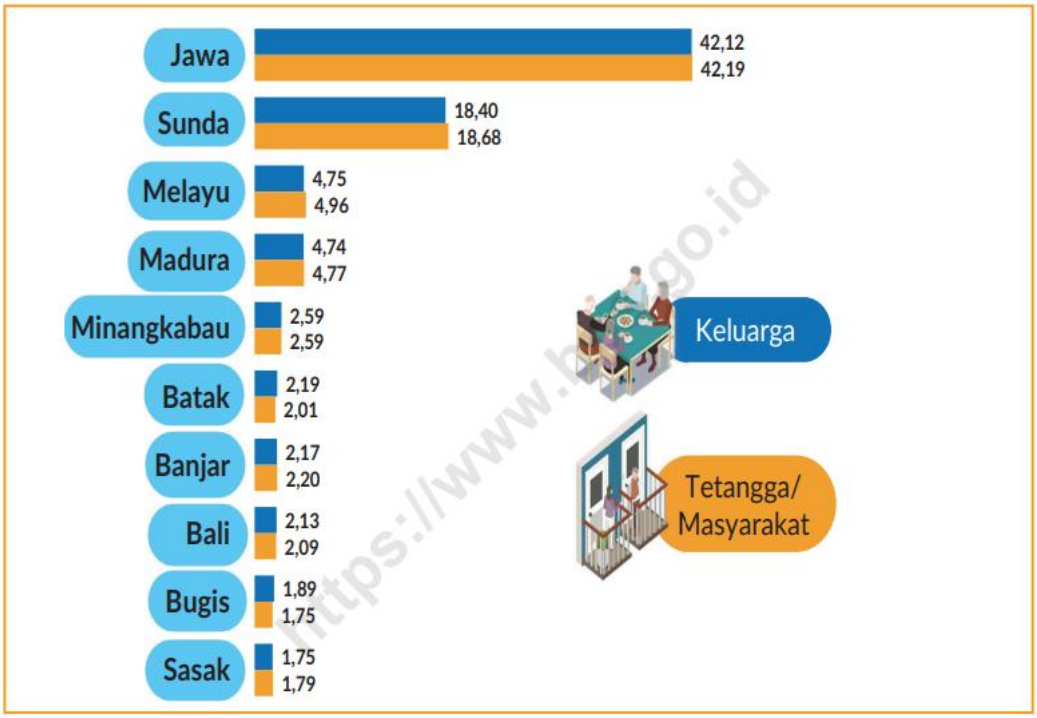
No.	Kelompok Bahasa Sehari-hari	Jumlah
1	Jawa	68.044.660
2	Indonesia	42.682.566
3	Sunda	32.412.752
4	Melayu	7.901.386
5	Madura	7.743.533
6	Minangkabau	4.232.226
7	Banjar	3.651.626
8	Bugis	3.510.249

[1] Bisa dilihat pada laman https://www.ethnologue.com/country/ID/#population , diakses pada tanggal 27 Januari 2025 (Republic of Indonesia, n.d.).
[2] Bisa dilihat pada laman https://www.ethnologue.com/language/jav/.

9	Bali	3.371.049
10	Batak	3.318.360

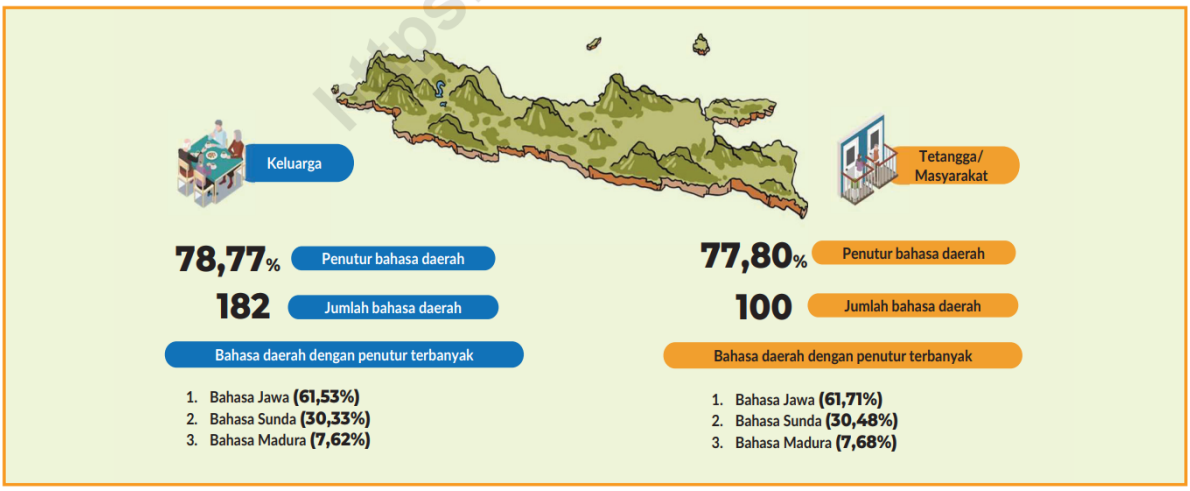
Tabel 1. Jumlah Penduduk Usia 5 tahun ke atas menurut Bahasa yang Dipakai Sehari-hari di rumah. (*Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*, 2012)

Begitu juga dengan hasil survei BPS tahun 2020 yang memperlihatkan bahasa Jawa sebagai bahasa di tingkat teratas digunakan di Indonesia maupun di Pulau Jawa.



Sumber: *Long Form* SP2020

Gambar 1. Sepuluh Bahasa Daerah dengan Persentase Penutur Terbanyak di Lingkungan Keluarga dan Tetangga/Masyarakat (*Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*, 2024)



Sumber: *Long Form* SP2020

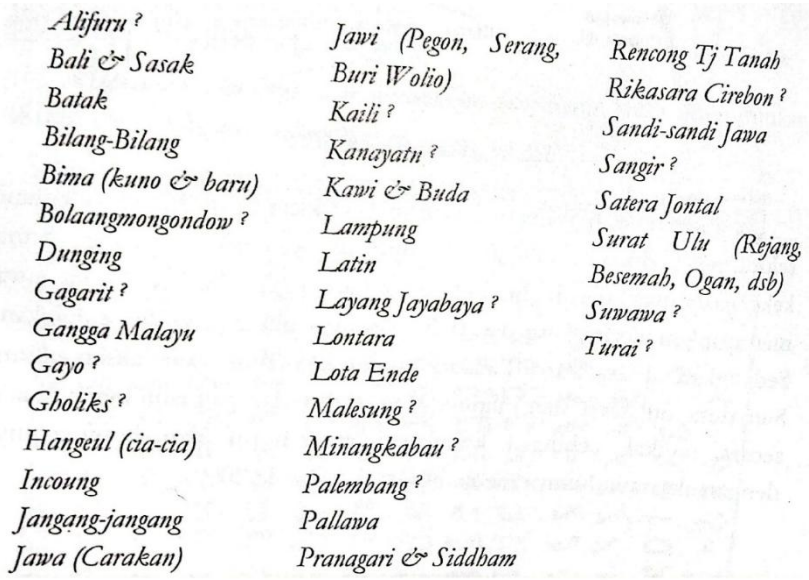
Gambar 2. Persentase Penutur Bahasa Daerah Berumur 5 Tahun ke Atas, Jumlah Bahasa Daerah, dan Bahasa Daerah dengan Penutur Terbanyak di Pulau Jawa (*Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*, 2024)

Dengan demikian, dari data tersebut, sebenarnya bahasa Jawa dalam lingkup seluruh Indonesia berada pada posisi penting dan memiliki penutur yang lebih banyak dari bahasa lokal lainnya. Namun, apakah tingginya penutur bahasa Jawa tersebut juga berpengaruh terhadap tingginya melek aksara Jawa? Sayangnya, penggunaan aksara Jawa akhir-akhir mulai terlupakan, meskipun penggunaan bahasa Jawa masih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan aksara Latin yang mudah dijumpai sekarang ini, sangat marak dan mengakomodasi bahasa tulis kita sehari-hari. Penggunaan aksara Latin ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari warisan kolonialisme.

> Selain itu, huruf Latin dipilih untuk pencetakan, yang membuat segalanya jauh lebih mudah bagi pengguna Eropa dan tidak menimbulkan masalah bagi pembaca asli, karena bahasa Jawa, sebagaimana telah dibuktikan oleh bahasa Melayu dan Sunda, tentu tidak kurang jelas dalam Tipe Latin. yang dapat ditulis dengan aksara Jawa. Selain itu, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar ⅓ dari biaya cetak aksara Jawa, karena cetak aksara Jawa yang juga tidak banyak tersedia di pasaran, biayanya 1½ hingga 2 kali lebih mahal (dan memakan waktu) dibandingkan cetak aksara Latin, salah satu alasannya adalah karena tidak bisa dicetak dengan aksara Jawa. dicetak pada mesin pembuat huruf, dan satu halaman huruf Jawa hanya memuat sekitar setengah kata dari satu halaman teks yang sama dalam huruf Latin. (Molen & Arps, 1993: 83)

Dalam artian, penggunaan aksara Jawa mulai dilupakan karena aksara Jawa dinilai memakan tempat daripada aksara Latin. Maulana (2024: 26–27) memaparkan data bahwa seluruh kepulauan di Indonesia—Pulau Sumatera dan sekitarnya, Pulau Jawa dan sekitarnya, Kepulauan Sunda kecil (Nusa Tenggara dan Bali), Pulau Sulawesi dan sekitarnya, Pulau Kalimantan dan sekitarnya—aktif menggunakan aksara Latin. Lebih lanjut, Maulana (2024: 28) melihat bahwa bahasa daerah paling banyak digunakan dalam konteks lisan (percakapan sehari-hari) dan jarang memiliki kebutuhan tulisan (selain untuk kebutuhan komunikasi perpesanan), dan sebaliknya, bahasa Indonesia digunakan untuk urusan korespondensi (tulis-menulis), pendidikan, media massa, sehingga diharuskan menggunakan aksara Latin.

Namun, jika menengok dengan membandingkan pada aksara di negara Asia Timur: Jepang (Hiragana, Katakana, dan Kanji), Cina (Hanzi), dan Korea (Hangeul), maka posisi aksara Jawa bisa dibilang terpinggirkan. Selain karena Indonesia tidak bisa hanya terwakili oleh aksara Jawa, juga karena aksara pada tiga negara tersebut mewakili negaranya masing-masing dan dipergunakan secara masif dan publik. Maulana (2024: 20) merincikan aksara Nusantara, dari yang pernah digunakan hingga yang masih bertahan saat ini di berbagai daerah di Nusantara.


Alifuru ?
Bali & Sasak
Batak
Bilang-Bilang
Bima (kuno & baru)
Bolaangmongondow ?
Dunging
Gagarit ?
Gangga Malayu
Gayo ?
Gholiks ?
Hangeul (cia-cia)
Incoung
Jangang-jangang
Jawa (Carakan)
Jawi (Pegon, Serang, Buri Wolio)
Kaili ?
Kanayatn ?
Kawi & Buda
Lampung
Latin
Layang Jayabaya ?
Lontara
Lota Ende
Malesung ?
Minangkabau ?
Palembang ?
Pallawa
Pranagari & Siddham
Rencong Tj Tanah
Rikasara Cirebon ?
Sandi-sandi Jawa
Sangir ?
Satera Jontal
Surat Ulu (Rejang, Besemah, Ogan, dsb)
Suwawa ?
Turai ?

Gambar 3. Hasil pindai di buku *Aksara-Aksara Nusantara* (hal. 20).

Meskipun aksara Jawa tidak digunakan secara masif di Indonesia di ruang publik, Yogyakarta dan Surakarta masih memegang teguh menyematkan aksara Jawa, terutama terlihat pada palang jalan. Dalam lingkup Yogyakarta, lewat Pergub DIY No. 43 (2023), DIY memberi peraturan tentang pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sehingga aksara Jawa bisa tetap hidup dan digunakan di ruang publik. Berikut adalah tampilan foto di ruang publik yang menggunakan aksara Jawa di Yogyakarta.



Gambar 8. Area Musem Sonobudoyo. Sumber Pencarian Google.



Gambar 8. Jalan Malioboro. Sumber pencarian Google



Gambar 8. Titik Nol Kilometer, Yogyakarta. Sumber pencarian Google.



Gambar 8. Legi Kotagede. Sumber Pencarian Google.



Gambar 8. Depan Pasar Beringharjo. Sumber pencarian Google.

Meski demikian, menurut Arpeni Rahmawati (2021), aksara Jawa semakin dilupakan karena tiga faktor. Pertama, masih minimnya diajarkan di sekolah, di DIY, dengan porsi pelajaran bahasa Jawa hanya dua jam dalam seminggu. Kedua, belum ada aturan baku mengenai aksara Jawa dari SD sampai SMA. Ketiga, sedikitnya kampus yang memiliki jurusan bahasa Jawa. Di DIY sendiri, hanya ada dua kampus yang memiliki jurusan tersebut: UGM dan UNY. Dalam artian, aksara Jawa kurang mendapat perhatian karena ada anggapan bahwa aksara Jawa tidak mendapatkan ‘tempat’ dalam pekerjaan. Padahal, lanjut Arpeni Rahmawati, kemahiran seseorang dalam baca-tulis aksara Jawa bisa berguna untuk membaca naskah-naskah

Jawa kuno yang masih tersimpan dan dijaga dengan baik di Jogja, tetapi naskah-naskah tersebut belum semua dieksplorasi dengan optimal.

Aksara Jawa pun mengalami kondisi dilematis. Di satu sisi, minat baca-tulis masyarakat terhadap aksara Jawa semakin rendah karena kurang adanya kebutuhan atas hal itu. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah aksara Jawa seperti terpisah dari kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga walaupun masyarakat tidak bisa baca-tulis, kehidupan mereka masih tetap bisa berjalan. Di sisi lain, aksara Jawa harus tetap hidup untuk mengeksplorasi yang terkandung di dalam naskah-naskah kuno yang berada di lingkup disiplin ilmu filologi. Naskah-naskah kuno tersebut tidak hanya memuat aksara Jawa, melainkan juga bisa aksara Nusantara yang lain, bergantung dengan naskahnya, semisal aksara Sansekerta, Arab, dan aksara lainnya. Dari mempelajari aksara Jawa untuk tujuan pembacaan naskah kuno, kekayaan dapat ditunjukkan oleh aneka ragam aspek kehidupan, misalnya masalah sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, bahasa, dan sastra yang ada di masa lampau (Baried dkk., 1985: 4).

Jika kurang adanya generasi penerus dalam meneliti naskah kuno atau yang mampu memahami aksara Jawa, maka berpotensi menciptakan *missing link* antara naskah kuno dengan generasi saat ini. Oleh sebab itu, perlu adanya revitalisasi aksara Jawa sehingga mampu menjangkau generasi saat ini, seperti yang tertuang pada lewat Pergub DIY No. 43 (2023), pasal 9 yakni: *pengembangan Bahasa Jawa oleh Masyarakat dan Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c dengan cara: a) penelitian, b) pengayaan kosa kata, c) penyusunan kurikulum, d) penyusunan bahan ajar, e) adaptasi, f) reaktualisasi, g) revitalisasi, h) rekayasa, i) diplomasi, j) publikasi hasil pengembangan Bahasa Jawa, k) penyediaan media online, l) penyusunan materi ajar Bahasa Jawa untuk penutur asing.*

Salah satu revitalisasi yang gencar dilakukan adalah lewat karya seni rupa dari seniman yang tinggal di Yogyakarta. Penelitian ini membatasi pada karya rupa yang menggunakan aksara Jawa di dalamnya sehingga terlihat peran seniman dalam merevitalisasi aksara Jawa sebagai respons tantangan globalisasi yang berpotensi menggerus identitas budaya lokal. Revitalisasi ini bukan sekadar menggerakkan seni, tetapi juga reorientasi kedaulatan Yogyakarta dalam bidang sejarah dan budaya. Aksara Jawa, yang sebelumnya cenderung terpinggirkan, kini dihidupkan kembali melalui karya-karya seni tipografi yang memadukan estetika tradisional dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dari fenomena yang telah dipaparkan di depan, maka rumusan masalah terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagaimana seniman tipografi di Yogyakarta menciptakan karya berbasis Aksara Jawa yang diterima generasi modern? Kedua, bagaimana seniman tipografi di Yogyakarta mengembangkan desain Aksara Jawa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat

kekinian? Ketiga, bagaimana revitalisasi ini berkontribusi pada kedaulatan budaya dan ekonomi Yogyakarta?

Penelitian terkait revitalisasi aksara Jawa masih belum banyak dilakukan. Meski demikian, ada sedikit penelitian yang bersinggungan dengan hal tersebut. Pertama, penelitian Tsany (2024) bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar aksara Jawa pada materi Bahasa Jawa melalui media Index Card Match pada siswa Kelas V SD Hasyim Asy'ari Surabaya. Kedua, penelitian Nugroho & Wulandari (2020) membahas mengenai pengembangan media pembelajaran aksara Jawa interaktif berbasis multimedia. Ketiga, penelitian Wiranti (2020) mengenai pengaruh pembelajaran daring menggunakan bahan ajar *sorogan hanacaraka* terhadap kemampuan menulis aksara Jawa pada siswa kelas III Sekolah Dasar dengan mengambil populasi siswa SD di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan lokasi penelitian di SDN Tegalsambi 01 dan SDN Tegalsambi 02.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Januari 2025. Lokasi penelitian terletak di Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan etnografi visual berdasarkan Sarah Pink. Metode etnografi visual (Pink, 2001: 18) digunakan untuk mengalami, menafsirkan, dan merepresentasikan budaya dan masyarakat yang menginformasikan oleh serangkaian agenda disiplin ilmu dan prinsip-prinsip teoretis yang berbeda. Lanjutnya, alih-alih metode etnografi visual hanya untuk 'pengumpulan data', etnografi adalah proses menciptakan dan merepresentasikan pengetahuan (tentang masyarakat, budaya, dan individu) yang didasarkan pada pengalaman etnografer sendiri.

> Etnografi tidak mengklaim menghasilkan laporan realitas yang objektif atau 'jujur', tetapi harus bertujuan untuk menawarkan versi pengalaman etnografer tentang realitas yang setepat mungkin terhadap konteks, negosiasi, dan intersubjektivitas yang melaluinya pengetahuan tersebut dihasilkan. Ini mungkin memerlukan metode refleksif, kolaboratif, atau partisipatif. Hal ini dapat melibatkan informan dalam berbagai cara di berbagai titik penelitian dan tahap representasi proyek. Hal ini harus memperhitungkan tidak hanya realitas yang dapat diamati dan direkam yang dapat diterjemahkan ke dalam catatan dan teks tertulis, tetapi juga objek, gambar visual, hal yang tidak berwujud, dan sifat indrawi dari pengalaman manusia dan mempertanyakan hak peneliti untuk mewakili orang lain, mengakui ketidakmungkinanan untuk 'mengetahui pikiran orang lain' dan mengakui bahwa makna yang kita buat dari kata-kata dan tindakan informan merupakan ekspresi dari kesadaran kita. (Pink, 2001: 18)

Metode etnografi visual yang diuraikan oleh Pink melibatkan beberapa tahapan. Pertama, penggunaan media visual dalam pengumpulan data menggunakan fotografi, video, dan media

digital lainnya untuk mendokumentasikan aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya dari kelompok yang diteliti. Media visual ini membantu dalam menangkap detail yang mungkin terlewatkan oleh metode tekstual tradisional. Kedua, analisis visual. Data visual yang dikumpulkan dianalisis untuk memahami makna budaya dan sosial yang terkandung di dalamnya. Analisis ini tidak hanya berfokus pada konten visual tetapi juga mempertimbangkan konteks di mana media tersebut diproduksi dan digunakan. Ketiga, representasi dan komunikasi temuan. Hasil penelitian disajikan melalui kombinasi teks dan media visual, memungkinkan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pentingnya representasi yang etis dan akurat dari budaya yang dipelajari. Pendekatan etnografi visual yang dikembangkan oleh Sarah Pink telah memberikan kontribusi signifikan dalam metodologi penelitian kualitatif, khususnya dalam memahami kompleksitas interaksi manusia dalam konteks budaya melalui lensa visual.

Mengacu pada pandangan Pink tersebut, metode etnografi visual digunakan dalam penelitian ini untuk menggali secara mendalam bagaimana seniman tipografi di Yogyakarta merevitalisasi aksara Jawa melalui seni. Penelitian ini hanya membatasi pada karya rupa dan seniman yang sanggup diwawancarai dengan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah. Meskipun banyak sekali seniman Yogyakarta yang memasukkan aksara Jawa di dalam karyanya, penelitian ini hanya menggunakan tiga seniman: Deddy Susanto, Ong Hari Wahyu, dan Prihatmoko Moki sebagai narasumber yang diwawancarai secara daring. Pertimbangan memilih tiga seniman tersebut selain berdasarkan rekomendasi dari Ayos Purwoaji dan Paksi Raras Alit, juga karena tiga seniman tersebut sudah memiliki banyak karya yang mengandung aksara Jawa di dalamnya.

Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner Klien. Klein (2021: 56) menganalogikan interdisipliner dengan "*architectonic art*" untuk menciptakan formasi baru. Istilah tersebut (Klein & Philipp, 2023: 195) menandai berbagai jenis kerja sama yang bermanfaat antara berbagai bentuk keahlian, termasuk kesetaraan di antara para partisipan dalam kerja sama tim, yang menyiratkan suatu proses yang dipahami sebagai proses yang beroperasi di antara (*inter*) dan lintas disiplin ilmu (*disciplinae*), bahkan dalam beberapa kasus secara independen. Lebih lanjut, pendekatan interdisipliner (Rokhyanto & Casmugiyono, 2023: 138) dilakukan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang serumpun yang relevan secara terpadu. Semisal, meneliti suatu permasalahan dalam satu rumpun ilmu (anggaplah di dalam ilmu humaniora) dengan disiplin ilmu yang berbeda.

Dalam konteks penelitian ini, permasalahan berpijak dari fenomena penutur bahasa Jawa yang tinggi tidak sebanding dengan pengguna (baik untuk baca maupun tulis) aksara Jawa yang

menurun minatnya. Oleh sebab itu, aksara Jawa perlu direvitalisasi, salah satunya lewat karya seni rupa. Dalam artian, penelitian ini tidak hanya melihat secara partial, antara sastra Jawa dengan perkembangannya dan seni rupa, melainkan melihatnya secara holistik sehingga kedua disiplin tersebut tidak saling menonjol satu sama lain.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan terbagi tiga sesuai dengan rumusan masalah dengan masing-masing berisi jawaban dari masing-masing seniman. Dari hasil wawancara kepada kedua seniman, kemudian diolah kembali sehingga bisa diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Setiap rumusan masalah memiliki dua pertanyaan kepada seniman. Pertanyaan pun bisa dijawab dengan per poin maupun secara keseluruhan sehingga lebih meringankan seniman dalam menjawab.

a. Proses Penciptaan Karya Seni oleh Seniman Tipografi di Yogyakarta Berbasis Aksara Jawa

Selama seniman berkarya menggunakan aksara Jawa pasti memiliki suatu pertimbangan tertentu dan mengalami tantangan teknis dan kultural. Eddy Susanto, seniman yang seringkali merespons kembali karya-karya klasik para maestro *old master* seni rupa dengan aksara Jawa, menuturkan bahwa tema dan makna dalam karya-karya *engraving old master* memiliki korelasi dengan tema dan makna, bahkan sisi temporal yang sama, yang terkandung dalam teks-teks babad Jawa, misalnya saja dalam konteks besar seperti seksualitas, epos kepahlawanan dan peperangan, hingga peristiwa-peristiwa alamiah. Dari sana, lanjut Eddy, bisa dimasuki teks Jawa, sehingga membentuk semacam interkoneksi antara dunia barat dan dunia timur.



Gambar 10. Artwork 1441810603 karya Eddy Susanto. Sumber: kiriman foto dari Ayos Purwoaji



Gambar 9. Hasil gambar sebelah kiri jika diperbesar, mengandung aksara Jawa yang berbentuk kecil. Sumber: kiriman foto dari Ayos Purwoaji.

Selain itu, Eddy mencoba mengangkat kembali tradisi-tradisi penulisan dan pengarsipan karya-karya sastra klasik Jawa untuk dihidupkan, dirayakan, dan diawetkan kembali. Sebuah tradisi yang nyaris punah dalam kultur Jawa diluar keraton bahkan di dalam keraton-keraton atau istana-istana Jawa yang dahulu penuh dengan para pujangga dan karyanya.

Sedikit berbeda dengan Eddy, Ong Hari Wahyu yang juga aktif mengurus Pasar Kangen Yogyakarta menganggap aksara mempunyai interpretasi tunggal. Ketika kita kehilangan aksara (dalam hal ini aksara Jawa), maka seperti kita menghilangkan peradaban. Ong pun memberikan contoh pada negara Cina, Korea, dan negara lain yang masih mempertahankan budaya aksaranya, sehingga persoalan ini adalah sebenarnya visi bangsa dalam menghargai peradaban budayanya.

Prihatmoko Moki yang karyanya cenderung mengusung isu politik dengan nuansa warna yang *colorful*, menganggap pilihannya terhadap aksara Jawa di dalam karyanya sebagai bagian dari konsep karya. Moki menyebutkan sejak tahun 2015 mulai memasukkan identitas Jawa/lokal sebagai bagian dari *statement* berkarya.

Terkait tantangan secara teknis dan kultural, Eddy merasa bukanlah sebuah masalah besar. Eddy yang menyukai seni, sejarah, *science*, dan sastra, mengatakan bahwa ingin membuat sebuah ruang untuk belajar seni rupa, membaca literatur, mempelajari dan mewarisi tradisi penulisan aksara-aksara arkais nusantara hingga dunia, serta mencipta karya-karya rupa. Dalam

kegiatannya, Eddy berada di antara posisi *science* dan *art*, menjadi jembatan langkah-langkah penelitian (terutama sastra, sejarah dan kajian budaya) dengan penciptaan seni rupa. Kemudian, Eddy menambahkan terkait teknis yang membutuhkan konteks dan juga data sehingga karya tersebut bisa berguna untuk memenuhi muatan pengetahuan seperti yang dia inginkan saat melahirkan setiap karya. Ong secara singkat menjawab bahwa dunia kontemporer aksara Jawa telah banyak dikembangkan dalam bentuk digital dan juga bentuk *font*-nya yang tidak selalu standard seperti masa lalu.

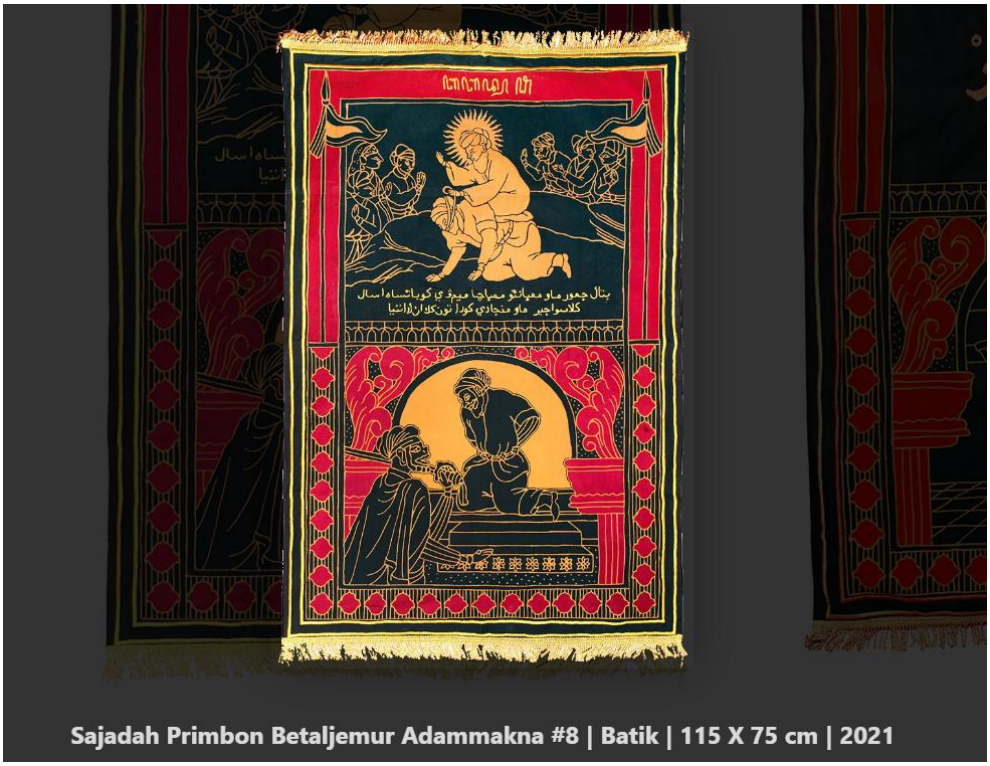


Gambar 11. Karya poster Ong Hari Wahyu. Sumber akun Instagram @ong.hariwahyu

Berbeda dengan dua seniman di atas, Moki merasa berjarak dengan aksara Jawa. Dia menyebutkan tidak tahu apa sebabnya, apakah karena aksara Jawa tidak dijadikan kurikulum di sekolah atau mungkin tidak adanya semangat untuk membicarakan identitas Jawa. Moki pun mengaku belajar tentang Jawa melalui kerja-kerja kesenian.



Gambar 12. Gunungan #1 karya Prihatmoko Moki.
Sumber indoartnow.com



Gambar 13. Sumber https://prihatmokomoki.com/sajadahbetaljemur/

b. Pengembangan Desain Aksara Jawa oleh Seniman Tipografi di Yogyakarta

Aksara Jawa pun berpotensi mengalami pengembangan desain di tangan seniman. Dari sana, seniman memiliki pilihan untuk memodifikasi aksara Jawa yang telah ada atau tidak, serta bentuk kekhawatiran masyarakat yang tidak bisa membaca aksara Jawa tersebut. Dalam hal modifikasi, Deddy menanggapinya sedikit melebar. Dia mengatakan bahwa telah menekuni dunia *fine art,* awalnya ingin mencoba hal-hal baru dalam berkarya. Selain mencoba memecah titik jenuh dalam dunia disain grafis yang telah saya tekuni selama ini, juga ingin menemukan kebebasan dalam berkarya lebih luas dalam dunia *fine art.* Deddy juga mengajak menengok negara di luar Barat, semisal India dan Cina, yang telah berkontribusi terhadap peradaban dunia. Dia juga berharap kita bisa melihat lebih banyak kontribusi terhadap peradaban dari luar Barat.

Ong sendiri menganggap bahwa penulisan aksara Jawa memiliki beberapa syarat teknis penulisan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Namun, imbuhnya, perkembangan aksara Jawa sekarang bisa dituliskan seperti halnya aksara atau huruf, sehingga tidak perlu lagi diterjemahkan dahulu ke bahasa Jawa. Ong meyakini bahwa aksara adalah peradaban. Ketika bangsa yang menghilangkan peradaban, maka bangsa tersebut tidak memiliki adab.

Kemudian, Moki menganggap hal yang paling penting adalah membawa aksara Jawa dulu ke dalam karya visual, sebagai bentuk pengenalan terhadap dunia seni indonesia maupun global dan modifikasinya masih sebatas pengembangan dalam visual dulu.

Terkait pengunjung yang tidak bisa membaca aksara Jawa, ketiga seniman serempak untuk tidak khawatir terhadap para pengunjung atau penikmat seni yang tidak bisa membaca aksara Jawa. Dalam artian, ketiga seniman menyerahkan sepenuhnya apresiasi terhadap para pengunjung atau penikmat seni.

c. Revitalisasi pada Kedaulatan Budaya dan Ekonomi Yogyakarta

Seniman yang menggunakan aksara Jawa di dalam karyanya otomatis turut merevitalisasi kedaulatan budaya dan ekonomi di Yogyakarta. Secara budaya, Eddy menjawab bahwa penciptaan terhadap karyanya pada akhirnya menghasilkan *knowledge art* sehingga karya tidak sekadar bermakna kuat secara visual, melainkan juga menampilkan kedalaman konseptual berdasarkan riset. Ong menjawab dengan tegas bahwa dia telah turut menjaga kedaulatan budaya di Yogyakarta, dengan memberi saran kepada pemerintah agar memberi regulasi setiap papan kantor dan nama jalan (sudah berlaku) ada harus ada huruf Jawanya, termasuk penunjuk arah di hotel-hotel, dan lain-lain. Ong juga membandingkan dengan Jepang dan Arab yang memiliki *public signage* yang menggunakan aksara dari negara tersebut. Moki menambahkan bahwa semua saling mempengaruhi, antara seni rupa, budaya lokal, dan masyarakatnya.

Secara ekonomi, Eddy bercerita sedikit tentang proses berkarya yang dibantu tim yang sudah lama dikenalnya. Selain membantu di bidang riset dan penulisan, mereka juga bisa menjadi teman diskusi dan pencari data. Selanjutnya, Ong kurang suka jika apa-apa dihubungkan langsung dengan ekonomi, karena bisa saja tidak ada hubungannya, kecuali membuat usaha privat menulis aksara Jawa. Secara singkat, Moki mengatakan bahwa dampak ekonomi bagi seniman akan terasa jika karya tersebut dibeli atau dipamerkan.

d. Profil Seniman

1) Eddy Susanto

Eddy Susanto[3] adalah pelukis kelahiran Jakarta, 12 Mei 1975. Ia menekuni desain grafis di Akademi Seni Rupa dan Desain, Yogyakarta, lulus pada 1994, dan di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, lulus pada 1996. Lukisan-lukisan Eddy Susanto kerap menggambarkan peristiwa bersejarah beserta tokoh-tokohnya. Berangkat dari sejarah daerah maupun dunia, mengolah budaya Timur dan khazanah Barat, ia bahkan meramu kedua topik tersebut. Ia pernah menciptakan lukisan yang meminjam goresan Albrecht Dürer dan memadukannya dengan teks Babad Tanah Jawi. Karya berjudul "Java of Dürer", 2011, itu mengantarkannya sebagai pemenang dalam Bandung Contemporary Art Award pada 2011.

Ia telah memamerkan sejumlah karyanya di dalam maupun luar negeri. Beberapa pameran tunggalnya, antara lain, adalah Oxidentalism: Asian influences on Western di Art Expo Malaysia, Kuala Lumpur, 2018; 10+3 Project: Small Narrative Paintings di Baik Art Gallery, Seoul, Korea Selatan, 2018; Kalatidha Towards Capitalism di Art Stage Singapore, 2017; dan Albrecht Dürer and the Old Testament of Java di Galerie Michael Janssen, Singapura, 2014. Sementara, beberapa pameran bersama yang ia ikuti, antara lain, adalah Spektrum Hendra Gunawan di Ciputra Artpreneur Museum, Jakarta, 2018; Java Art Energy di Institut des Cultures d'Islam, Paris, 2018; dan Singapore Biennale: An Atlas of Mirrors di Singapore Art Museum, Singapura, 2016. Ia pernah beroleh pemenang dalam Dharmawangsa Award di Museum Nyoman Gunarsa, Bali. Selain itu, karyanya adalah salah satu koleksi di Museum Kepresidenan Republik Indonesia, Bogor. Ia kini tinggal dan berkarya di Yogyakarta.

2) Ong Hari Wahyu

Lahir dan besar di Madiun, Jawa Timur, Ong Hari Wahyu[4] tertarik dengan seni rupa sejak kanak-kanak. Saat belajar di sekolah dasar, Ong sudah sering mengikuti lomba menggambar. "Sejak kecil, saya sudah senang menggambar," katanya saat ditemui di rumahnya di Kabupaten

[3] https://artsubs.co/artist/eddy-susanto/ 30 Maret 2024.
[4] https://www.kompas.id/baca/tokoh/2022/09/20/penjelajahan-seni-organik-ong-hari-wahyu 30 September 2022.

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai seniman, Ong Hari Wahyu leluasa menjelajahi berbagai medium seni. Dia tak hanya menjadi perupa yang menghasilkan karya personal, tetapi juga berkreasi membuat kover buku serta terlibat dalam produksi film dan teater. Semua peran itu dilakoninya dengan filosofi bahwa seni harus bersifat organik sehingga terus hidup dan berkembang.

Setelah lulus SMA, Ong kemudian belajar di jurusan seni grafis Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia (STSRI) ASRI, Yogyakarta, pada tahun 1980. Di lembaga yang kemudian berubah menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta itulah Ong menimba beragam ilmu mengenai seni rupa. Saat kuliah, Ong sudah nyambi bekerja dengan menggambar iklan produk komersial. Namun, sesudah beberapa tahun kuliah, Ong akhirnya drop out atau putus kuliah. Meski begitu, prosesnya sebagai seniman terus berlanjut. Saat itu, selain memproduksi karya seni, Ong juga bekerja di percetakan serta terlibat dalam penerbitan beberapa majalah yang dikelola mahasiswa di Yogyakarta.

Waktu itu, Ong juga bekerja di penerbitan buku Shalahudin Press. Di penerbit itulah Ong mulai membuat gambar untuk kover buku. Aktivitas memproduksi kover buku itu terus berlanjut hingga munculnya banyak penerbit buku di Yogyakarta pada akhir dekade 1990-an hingga tahun 2000-an. Menurut Ong, pada masa tersebut, hampir tiap hari ada perwakilan penerbit buku yang datang ke rumahnya untuk minta dibuatkan kover buku. ”Tahun 2000-an itu ramai-ramainya penerbit buku di Yogyakarta. Waktu itu, saya bisa bikin kover untuk lima judul buku dalam sehari. Kadang saya juga bikin logo penerbitnya sekalian,” tutur lelaki yang memiliki nama asli Hari Wahyu Widodo itu.

Salah satu pengalaman berkesan dialami Ong setelah membuat kover untuk buku-buku karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer. Suatu waktu, Pramoedya bersama keluarganya berkunjung ke rumah Ong di Bantul. Dalam pertemuan itu, Pramoedya memuji kover yang dibuat Ong untuk novel Gadis Pantai. ”Beliau bilang, kover Gadis Pantai itu sangat pas dengan cerita yang ditulisnya,” kata Ong. Hingga sekarang, Ong telah memproduksi lebih dari 1.000 kover buku. Bagi Ong, kover buku bukanlah sekadar pelengkap atau penghias buku, tetapi juga bisa menjadi karya seni yang berdiri sendiri.

3) Prihatmoko Moki

Prihatmoko Moki[5] sudah menekuni bidang visual art sejak lama. Pria yang lahir dan besar di Jogja ini sering diikutkan lomba-lomba menggambar tingkat kecamatan dan provinsi. Saat SMA, ia masuk sekolah kejuruan di Sekolah Menengah Seni Rupa, dan ia juga mengambil

[5] https://kopikeliling.com/artists/prihatmoko-moki.html 28 Maret 2013.

kuliah di Institut Seni Indonesia. Meskipun lama berkecimpung di visual art, Moki juga sering terlibat di beberapa proyek musik dan pertunjukan.

Sampai saat ini, Moki mempunyai 3 proyek untuk karya-karyanya: Mukamalas Silkscreen Project, KW2 Project, dan GEMATI Project. Mukamalas Silkscreen Project adalah proyek visual yang memakai medium silkscreen untuk berkarya. Sampai sekarang, karya yang dibuat adalah poster, dan proyeknya sendiri bersifat kolaboratif. Pihak ang berkolaborasi di proyek ini bermacam-macam, mulai dari band, seniman, dan event. Di proyek ini Moki ingin membuat karya yang bisa dijual dengan harga terjangkau.

KW2 Project adalah proyek seni yang mempunyai konsep besar menanyakan arti seni itu sendiri, khususnya di Indonesia. Karya-karyanya beragam, nggak terbatas di seni visual saja. Sementara itu, GEMATI Project adalah proyek yang menggambungkan seni musik dan visual. Proyek ini bercerita tentang jawa. Menurut Moki, ini adalah caranya untuk melihat Jawa itu seperti apa. GEMATI Project adalah proyek kelompok di mana Moki bekerja dan membuat karya bersama dengan 4 temannya. Karya-karya Moki sudah pernah dipamerkan di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Australia, dan Kuba. Semua pameran yang pernah ia ikuti berkesan di hatinya.

e. Proses Penciptaan Karya Seni oleh Seniman Tipografi di Yogyakarta Berbasis Aksara Jawa: Etnografi Visual Sara Pink (2001)

1) Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi partisipatif dengan mengunjungi berbagai ruang publik, studio seni, dan komunitas tipografi di Yogyakarta yang aktif dalam merevitalisasi Aksara Jawa. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana para seniman tipografi menciptakan dan menampilkan karya-karyanya dalam konteks modern. Hasil observasi menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, banyak seniman tipografi yang berusaha menghidupkan kembali Aksara Jawa melalui berbagai media, seperti mural, poster, hingga desain digital yang diunggah di media sosial. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan apresiasi masyarakat luas, terutama generasi muda, terhadap karya-karya tersebut. Kedua, komunitas tipografi di Yogyakarta memainkan peran strategis dalam mendukung revitalisasi ini dengan menyelenggarakan lokakarya, diskusi, serta pameran seni yang mengusung tema kedaulatan budaya lokal. Inisiatif ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam memastikan bahwa Aksara Jawa tetap relevan dan diterima oleh masyarakat modern.

2) Fotografi Partisipatif

Fotografi partisipatif digunakan untuk mendokumentasikan berbagai bentuk ekspresi seni tipografi Aksara Jawa yang tersebar di ruang publik dan media digital. *Participatory photography can help researchers in eliciting information and obtain better understanding of participants' context* (Gomez, 2020). Metode ini membantu peneliti dalam menggali informasi lebih mendalam mengenai bagaimana Aksara Jawa diadaptasi dalam berbagai konteks desain. Fokus fotografi partisipatif dalam penelitian ini adalah menangkap esensi kreativitas para seniman tipografi dalam mengolah Aksara Jawa menjadi lebih menarik dan mudah diakses oleh khalayak modern. Dokumentasi mencakup mural-mural dengan elemen Aksara Jawa di jalanan Yogyakarta, tipografi pada media cetak dan digital, serta instalasi seni yang menggabungkan unsur tradisional dan kontemporer. Setiap foto yang diambil bertujuan untuk merepresentasikan keberagaman pendekatan dalam menghidupkan kembali Aksara Jawa, baik melalui eksplorasi bentuk huruf, pemilihan warna, hingga integrasi dengan elemen budaya lokal lainnya.

3) Tipografi

Dalam berbagai media desain yang dihasilkan oleh seniman tipografi di Yogyakarta, pemilihan jenis huruf memainkan peran penting dalam memastikan keterbacaan dan daya tarik Aksara Jawa. Beberapa tipografi yang digunakan mengadaptasi gaya tradisional dengan sentuhan modern agar dapat lebih diterima oleh masyarakat luas. Sebagai contoh, seniman tipografi sering menggunakan gaya aksara yang lebih ramping dan minimalis untuk aplikasi digital, sementara bentuk huruf yang lebih dekoratif tetap dipertahankan dalam media seni konvensional seperti ukiran kayu atau batik. Prinsip kontras dalam desain tipografi juga diterapkan, seperti perbedaan ukuran dan ketebalan huruf untuk membedakan elemen utama dengan informasi tambahan. Pendekatan ini memastikan bahwa Aksara Jawa tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika tetapi juga memiliki peran komunikatif yang kuat dalam berbagai medium.

4) Wawancara Visual

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk menggali pemikiran, konsep, pengalaman pribadi dan cara pandang narasumber guna memperoleh informasi tentang kejadian yang tidak dapat diamati secara langsung oleh peneliti atau berkaitan dengan kejadian yang sudah berlalu (Soewardikoen, 2019). Wawancara visual dilakukan dengan para seniman tipografi, pengamat budaya, serta komunitas literasi Aksara Jawa untuk memahami lebih dalam makna dan simbolisme di balik karya-karya mereka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif lokal mengenai pentingnya revitalisasi Aksara Jawa sebagai bagian dari

upaya mempertahankan kedaulatan budaya di tengah arus globalisasi. Melalui wawancara dengan tokoh-tokoh seperti seniman tipografi berpengaruh di Yogyakarta dan kurator seni lokal, ditemukan bahwa revitalisasi Aksara Jawa tidak hanya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya, tetapi juga sebagai bentuk resistensi terhadap homogenisasi budaya global. Wawancara juga mengungkap bahwa integrasi Aksara Jawa dalam seni tipografi memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku seni, baik melalui produk komersial berbasis tipografi maupun kolaborasi dengan industri kreatif lainnya. Hal ini menegaskan bahwa revitalisasi Aksara Jawa bukan sekadar gerakan budaya, tetapi juga strategi ekonomi yang mendukung keberlanjutan ekosistem seni di Yogyakarta. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa revitalisasi Aksara Jawa melalui seni tipografi di Yogyakarta adalah proses yang melibatkan berbagai aktor dan pendekatan. Tidak hanya sebagai bentuk pelestarian budaya, tetapi juga sebagai sarana inovasi dan penguatan identitas lokal di era globalisasi.

5) Interpretasi Visual

Interpretasi visual dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana seni tipografi berbasis Aksara Jawa berkontribusi dalam membangun identitas budaya lokal Yogyakarta di tengah arus globalisasi. Interpretasi ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Gillian Rose (2016), yang menekankan bahwa interpretasi visual tidak hanya melibatkan elemen estetika, tetapi juga interaksi sosial serta makna historis dan kultural yang lebih dalam. Dalam konteks revitalisasi Aksara Jawa, interpretasi visual dilakukan dengan menganalisis bagaimana seniman tipografi mengolah aksara ini ke dalam berbagai medium, seperti mural di ruang publik, desain digital di media sosial, serta instalasi seni di pameran dan festival budaya. Fokus utama interpretasi ini adalah melihat bagaimana elemen visual dari Aksara Jawa dapat dikemas ulang agar tetap memiliki keterkaitan dengan akar budayanya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan selera estetika masyarakat modern. Rose juga mengungkapkan, interpretasi visual terbagi dalam dua bagian konsep, verbal dan visual.

Konsep Verbal

Konsep verbal dalam penelitian ini menyoroti bagaimana narasi tentang revitalisasi Aksara Jawa dikomunikasikan melalui seni tipografi. Narasi ini tidak hanya berupa teks yang tertulis dalam aksara, tetapi juga mencerminkan identitas budaya, nilai-nilai lokal, serta semangat resistensi terhadap homogenisasi budaya global. Dalam berbagai proyek seni yang diamati, seniman tipografi menggunakan berbagai pendekatan dalam membangun narasi verbal. Beberapa karya menghadirkan teks dalam bentuk puisi, kutipan dari sastra Jawa klasik, hingga slogan-slogan yang menggambarkan kebanggaan akan budaya lokal. Penggunaan

bahasa dalam karya tipografi ini juga menunjukkan dinamika menarik antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, yang sering kali dipadukan dalam satu komposisi untuk menarik perhatian audiens yang lebih luas. Selain itu, wawancara dengan seniman dan komunitas literasi Aksara Jawa mengungkap bahwa narasi dalam karya tipografi tidak hanya bertujuan untuk estetika, tetapi juga memiliki fungsi edukatif. Melalui karya mereka, seniman ingin menghidupkan kembali penggunaan Aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian aksara ini sebagai bagian dari identitas budaya Yogyakarta.

Konsep Visual

Konsep visual dalam penelitian ini mencakup analisis elemen desain yang digunakan dalam seni tipografi berbasis Aksara Jawa. Elemen-elemen ini meliputi pemilihan jenis huruf, warna, komposisi, serta integrasi dengan elemen visual lain seperti motif batik atau ornamen tradisional Jawa. Hasil observasi menunjukkan bahwa seniman tipografi di Yogyakarta menerapkan berbagai gaya visual untuk mengadaptasi Aksara Jawa agar lebih relevan dengan estetika kontemporer. Beberapa karya mempertahankan bentuk tradisional aksara dengan sedikit modifikasi untuk meningkatkan keterbacaan, sementara yang lain mengembangkan font digital baru yang lebih fleksibel untuk digunakan dalam desain grafis modern. Palet warna yang digunakan dalam karya tipografi Aksara Jawa juga bervariasi, mulai dari warna-warna klasik yang terinspirasi dari arsitektur dan tekstil tradisional Jawa, hingga palet warna yang lebih eksperimental dan kontras tinggi untuk menyesuaikan dengan desain grafis modern. Pemilihan warna ini berperan penting dalam menciptakan daya tarik visual sekaligus memperkuat identitas budaya yang ingin disampaikan melalui karya tersebut. Selain itu, dalam ranah desain digital, banyak seniman yang mulai mengembangkan font berbasis Aksara Jawa yang dapat diunduh dan digunakan oleh masyarakat luas. Upaya ini tidak hanya memperluas jangkauan penggunaan Aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi para desainer tipografi. Melalui pendekatan interpretasi visual yang mencakup konsep verbal dan konsep visual ini, penelitian ini mengungkap bahwa seni tipografi berbasis Aksara Jawa memiliki peran yang lebih dari sekadar estetika. Ia menjadi sarana komunikasi budaya, alat edukasi, sekaligus strategi untuk mempertahankan kedaulatan budaya Yogyakarta di tengah tantangan globalisasi.

Kesimpulan

Revitalisasi aksara Jawa di Yogyakarta menjadi sebuah kebutuhan mendesak di tengah arus globalisasi yang semakin mengikis identitas budaya lokal. Meskipun bahasa Jawa masih

menjadi salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbanyak di Indonesia, penggunaan aksara Jawa mengalami kemunduran yang signifikan. Faktor-faktor seperti dominasi aksara Latin, minimnya pembelajaran di institusi pendidikan, serta kurangnya kebijakan yang mendukung pemakaian aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan aksara ini semakin terpinggirkan. Namun, upaya untuk menghidupkan kembali aksara Jawa tidak terhenti. Salah satu pendekatan yang menarik adalah melalui seni tipografi yang dilakukan oleh para seniman di Yogyakarta. Seni tipografi ini bukan hanya sekadar bentuk ekspresi artistik, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan kebudayaan yang lebih luas untuk mempertahankan eksistensi aksara Jawa. Seniman tipografi berupaya mengintegrasikan aksara Jawa ke dalam karya-karya seni yang lebih relevan bagi masyarakat modern, sehingga aksara ini tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga bagian dari kehidupan kontemporer.

Penggunaan aksara Jawa dalam seni tipografi mencerminkan adanya kesadaran budaya yang kuat di kalangan seniman dan masyarakat Yogyakarta. Seni tipografi berbasis aksara Jawa tidak hanya mengangkat nilai estetika tradisional, tetapi juga memberikan peluang bagi aksara ini untuk terus berkembang di ranah publik. Dengan demikian, seni tipografi berperan sebagai medium strategis dalam memperjuangkan keberlanjutan aksara Jawa serta kedaulatan budaya Yogyakarta. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Pergub DIY No. 43 Tahun 2023, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi upaya revitalisasi aksara Jawa. Regulasi ini mendorong pengembangan aksara Jawa di berbagai sektor, termasuk pendidikan, media, dan ruang publik. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah, seniman, dan masyarakat dalam menjaga kelangsungan aksara Jawa.

Di tengah persaingan global, Yogyakarta membuktikan bahwa aksara Jawa masih memiliki daya tarik tersendiri, terutama ketika dipadukan dengan elemen desain modern. Karya seni tipografi yang mengusung aksara Jawa tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di bidang seni dan desain. Dengan meningkatnya minat terhadap karya berbasis kearifan lokal, aksara Jawa dapat menemukan tempatnya kembali dalam ekosistem budaya dan industri kreatif.

Revitalisasi aksara Jawa melalui seni tipografi juga menjadi bentuk resistensi terhadap homogenisasi budaya global. Dengan memanfaatkan medium seni, aksara Jawa dapat kembali dikenal oleh generasi muda dan diapresiasi dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan dan media digital. Ini membuktikan bahwa budaya lokal tidak harus tersingkir oleh globalisasi, tetapi dapat beradaptasi dan berkembang dalam konteks yang lebih luas. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam upaya pelestarian aksara Jawa, terutama dalam hal edukasi dan kesadaran masyarakat. Pendidikan aksara Jawa yang masih terbatas serta kurangnya minat generasi muda menjadi hambatan utama dalam memastikan keberlangsungan aksara ini. Oleh

karena itu, kolaborasi antara seniman, akademisi, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan serta meningkatkan daya tarik aksara Jawa.

Keberhasilan revitalisasi aksara Jawa di Yogyakarta dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mempertahankan warisan budaya mereka. Dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, aksara Jawa dapat terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Perpaduan antara tradisi dan modernitas menjadi faktor utama dalam memastikan aksara Jawa tetap relevan dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pada akhirnya, revitalisasi aksara Jawa bukan hanya sekadar upaya untuk menjaga sebuah sistem tulisan, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan kedaulatan budaya. Melalui seni tipografi, aksara Jawa dapat tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan menjadi simbol kebanggaan lokal di tengah tantangan globalisasi.

Revitalisasi aksara Jawa melalui seni tipografi membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam upaya pelestarian warisan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya sendiri. Dengan semakin banyaknya karya seni yang mengusung aksara Jawa, baik dalam bentuk mural, desain grafis, maupun instalasi seni di ruang publik, masyarakat menjadi lebih akrab dengan aksara ini dan mulai memahami pentingnya keberlanjutan identitas budaya. Selain itu, dengan dipadukannya aksara Jawa ke dalam seni modern, generasi muda yang sebelumnya kurang tertarik terhadap warisan budaya ini kini memiliki akses yang lebih menarik untuk mempelajarinya. Dalam konteks pendidikan, upaya ini juga dapat mendukung pengajaran aksara Jawa di sekolah-sekolah, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Dengan pendekatan seni yang lebih visual dan interaktif, pembelajaran aksara Jawa bisa menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh pelajar.

Selain aspek edukasi dan budaya, dampak positif lainnya adalah terbukanya peluang ekonomi baru di sektor kreatif. Seniman dan desainer yang mengintegrasikan aksara Jawa dalam karya mereka dapat menciptakan produk seni yang memiliki nilai jual tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Desain berbasis aksara Jawa dapat diterapkan pada berbagai produk, seperti pakaian, suvenir, poster, dan karya seni digital, yang kemudian dapat dipasarkan kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan yang mencari produk bernilai budaya tinggi. Dengan demikian, revitalisasi aksara Jawa tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian budaya, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi para pelaku industri kreatif. Yogyakarta, sebagai pusat seni dan budaya, semakin mengukuhkan dirinya sebagai kota yang memadukan nilai tradisional dan inovasi modern, menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan warisan budaya melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Namun, meskipun revitalisasi aksara Jawa melalui seni tipografi memiliki banyak manfaat, terdapat pula dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan terbesar adalah potensi komersialisasi yang berlebihan, di mana aksara Jawa hanya dijadikan sebagai elemen dekoratif tanpa memperhatikan nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Dalam beberapa kasus, penggunaan aksara Jawa dalam desain produk atau media digital dilakukan tanpa pemahaman mendalam mengenai struktur dan maknanya, sehingga menghasilkan representasi yang tidak akurat. Kesalahan dalam penggunaan aksara, baik dari segi bentuk maupun ejaan, dapat menyebabkan distorsi dalam pemahaman masyarakat terhadap aksara itu sendiri. Jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin revitalisasi yang diharapkan justru berujung pada degradasi nilai aksara Jawa, menjadikannya sekadar tren estetika tanpa substansi budaya yang kuat.

Selain itu, keterbatasan literasi aksara Jawa di masyarakat juga menjadi kendala dalam efektivitas revitalisasi ini. Meskipun seni tipografi mampu menarik perhatian, tidak semua orang yang melihat aksara Jawa dalam karya seni dapat memahami makna atau cara membacanya. Tanpa adanya upaya edukasi yang seimbang, revitalisasi aksara Jawa bisa berisiko hanya menjadi konsumsi visual tanpa membangun kemampuan literasi yang sesungguhnya. Tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi dari sebagian masyarakat yang menganggap penggunaan aksara Jawa tidak praktis dalam kehidupan sehari-hari. Aksara Latin yang lebih dominan dan lebih mudah digunakan dalam komunikasi modern sering kali membuat upaya revitalisasi aksara Jawa dianggap tidak relevan. Jika tidak ada strategi yang jelas untuk mengintegrasikan aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui digitalisasi atau penerapan dalam dokumen resmi, maka upaya revitalisasi ini berisiko hanya menjadi fenomena sesaat tanpa dampak jangka panjang yang nyata.

Daftar Pustaka

Baried, S. B., Soeratno, S. C., Sawoe, Sutrisno, S., & Syakir, M. (1985). *Pengantar Teori Filologi*. (N. Hasjim, Ed.). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Gomez, R. (2020). Photostories: A participatory photo elicitation visual research method in Information Science. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, *9*(1), 47–63. Diambil dari https://qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/588

Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. (2012). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diambil dari https://www.bps.go.id/id/publication/2012/05/23/55eca38b7fe0830834605b35/kewarganegaraan-suku-bangsa-agama-dan-bahasa-sehari-hari-penduduk-indonesia.html

Klein, J. T. (2021). *Beyond Interdisciplinarity: Boundary Work, Communication, and Collaboration*. New York: Oxford University Press.

Klein, J. T., & Philipp, T. (2023). Interdisciplinarity. In T. Philipp & T. Schmohl (Ed.), *Handbook Transdisciplinary Learning* (hal. 195–203). Bielefeld: transcript Verlag.

Maulana, R. (2024). *Aksara-Aksara di Nusantara* (Cet. 8). Yogyakarta: Samudra Biru.

Molen, W. van der, & Arps, B. (1993). *Woord en schrift in de oost. De betekenis van zending en missie voor de studie van taal en literatuur in Zuidoost-Azië.* Leiden: Universiteit Leiden.

Nugroho, S. A., & Wulandari, R. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Aksara Jawa Interaktif Berbasis Multimedia (Studi Kasus SD Mardi Rahayu 01 Ungaran). *Pixel :Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*, *13*(2), 21–36. https://doi.org/10.51903/pixel.v13i2.283

Pergub DIY. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemelihaaran dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (2023). Daerah Istimewa Yogyakarta. Diambil dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/270173/pergub-no-43-tahun-2023

Pink, S. (2001). *Doing Visual Ethnography* (3 ed.). London: Sage Publications.

Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. (2024). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diambil dari https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/6feb932e24186429686fb57b/profil-suku-dan-keragaman-bahasa-daerah-hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html

Rahmawati, A. (2021). Aksara Jawa Menolak Punah. Diambil 29 Januari 2025, dari https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/753-aksara-jawa-menolak-punah

Republic of Indonesia. (n.d.). Diambil 27 Januari 2025, dari https://www.ethnologue.com/country/ID/#languages

Rokhyanto, & Casmugiyono. (2023). Relasi Tokoh dalam Novel Sastra Indonesia Sebuah Pendekatan Multiinterdispliner. *PENEROKA : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, *3*(1), 136–153. https://doi.org/https://doi.org/10.30739/peneroka.v3i1.1969

Rose, G. (2016). *Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials*. London: Sage.

Soewardikoen, D. W. (2019). *Metodologi Penelitian Desain Komunikasi Visual*. Yogyakarta: Kanisius.

Tsany, L. N. (2024). Peningkatan Keterampilan Membaca Aksara Jawa Melalui Media Index Card Match Siswa Kelas V Sd Hasyim Asy'Ari Surabaya. *BEGIBUNG: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 167–177. https://doi.org/10.62667/begibung.v2i1.48

Wiranti, D. A., & Sutriyani, W. (2020). Pengaruh Pembelajaran Daring Menggunakan Sorogan Hanacaraka Terhadap Kemampuan Menulis Aksara Jawa Di Sekolah Dasar. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, *8*(2), 313–338. https://doi.org/10.21043/elementary.v8i2.8156

Peran Arsip dalam membangun Kesadaran Kedaulatan Negara (*State Sovereignty Awareness*):
Studi Kasus pada Kedaulatan Seni Budaya dan Kedaulatan Wilayah

Achmad Syarif Rachmaji[1]

[1]Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Email: achmadsyarifrachmaji@gmail.com

Abstrak:

Klaim seni budaya dan klaim wilayah adalah contoh nyata ancaman kedaulatan negara. Pada tahun 2000-2018 ada 44 klaim seni budaya Indonesia oleh 7 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Jepang, Belanda, Jerman, Perancis dan Amerika Serikat. Sementara itu, ada 5 sengketa wilayah Indonesia dengan negara lain, salah satunya adalah sengketa wilayah Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Namun, akhir dari sengketa Pulau Sipadan-Ligitan pada tahun 2002 bagi Indonesia adalah Indonesia harus kehilangan kedua pulau tersebut, dengan salah satu penyebabnya adalah tidak adanya catatan pengelolaan Pulau Sipadan-Ligitan dan bukti arsip (catatan pengelolaan) menjadi penentu kepemilikan kedua pulau tersebut. Keragaman seni budaya dan wilayah adalah kekayaan bangsa dan negara yang harus dilindungi dan dijaga, hal tesebut sebagaimana yang menjadi amanat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan kekayaan bangsa dan negara, dan segala bentuk atau upaya pengklaiman terhadap seni budaya dan wilayah Indonesia adalah bentuk ancaman ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (kedaulatan negara). Arsip sebagai rekaman kegiatan dapat berperan sebagai "alat" memperkuat kedaulatan negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana arsip berperan dalam menjaga kedaulatan negara? Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini, bahwa menjaga kedaulatan negara adalah tugas bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemerintah. Arsip sebagai catatan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi maupun perorangan merupakan bagian penting dalam kedaulatan negara dan dapat berperan untuk menghindari adanya ancaman hibrida. Kemudian, dengan menjadikan arsip sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah bentuk kekuatan negara dalam memberikan bukti-bukti kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan akan kekayaan bangsa dan negara, karena pengarsipan tidak terbatas hanya pada aktor negara (pemerintah), melainkan juga pada actor non negara (organisasi, perusahaan, perorangan). Kelompok aktor-aktor tersebut akan saling berkolaborasi dan bersinergi sebagai upaya membangun kesadaran kedaulatan negara. Selain itu, arsip dalam kesadaran kedaulatan negara juga dapat berperan memberikan ketegasan akan kepemilikan seni budaya dan wilayah, penerapan prinsip *effective occupancy* pada kedaulatan wilayah, dan *soft diplomacy* pada kedaulatan seni budaya dan wilayah. Oleh karena itu, arsip dapat juga menjadi bagian dalam membangun kesadaran kedaulatan negara baik secara intitusi, organisasi, maupun individu, dalam hal ini adalah kedaulatan seni budaya dan kedaulatan wilayah. Serta, hal tersebut juga dapat menjadi bentuk mitigasi dalam menghindari ancaman kedaulatan yang bersifat hibrida.

Kata Kunci: Kedaulatan, Pertahanan Negara, Arsip

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau dan membentang dari 6° Lintang Utara (LU) dan 11° Lintang Selatan (LS), serta 95° Bujur Timur (BT) sampai 141° BT, dengan luas wilayah Indonesia adalah 5.176.797 km^2, terdiri dari luas laut Indonesia sebesar 3.257.357 km^2 dan daratan sekitar 1.919.440 km^2. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan 16.771 pulau yang sudah dilaporkan ke UNGEGN (*United Nation Group of Expert on Geographical Names*)/PBB (Rachmaji, 2022). Secara geografis Indonesia berada dipertemuan antara 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua asia dan benua australia serta samudera pasifik dan samudera hindia. Selain itu, Indonesia juga berada di jalur persimpangan perdagangan dunia, ditandai dengan adanya 4 *choke points* dari 9 *choke points* strategis dunia dan 3 ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menghubungkan kawasan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, dan Asia Timur dengan Australia (Marsetio, 2014).

Wilayah Indonesia yang luas, terbentang Panjang, dan terdiri dari berbagai pulau menjadikan Indonesia kaya akan seni budaya dan memiliki batas wilayah yang panjang. Kekayaan seni budaya Indonesia dapat dilihat pada data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa sepanjang tahun 2013-2022 Indonesia memiliki 1.728 warisan budaya tak benda yang terbagi menjadi 5 kategori, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2013-2022

No	Domain	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1.	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan PerayaanPerayaan	4	18	26	50	39	71	79	67	94	43	491
2.	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	21	24	36	40	39	37	58	27	91	67	440
3.	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta	4	5	5	10	7	10	12	6	6	10	75
4.	Seni Pertunjukan	37	35	40	37	48	74	73	33	77	49	503
5.	Tradisi Lisan dan Ekspresi	11	14	14	13	17	33	45	20	21	31	219
	Total	**77**	**96**	**121**	**150**	**150**	**225**	**267**	**153**	**289**	**200**	**1.728**

Sumber: *Dokumentasi dan Publikasi Direktorat Pelindungan* Kebudayaan (Direktorat Perlindungan Kebudayaan, 2022)

Sedangkan, dari sisi batas wilayah, Indonesia mempunyai 2 jenis batas wilayah yaitu: batas wilayah darat, yang berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste; dan batas wilayah laut, yang berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, Timor Leste, India, dan Thailand. Dan, batas wilayah Indonesia sangatlah panjang dengan Sebagian besar merupakan batas wilayah laut.

Gambar 1. Peta Batas Wilayah Indonesia



Sumber: (kumparan.com, 2020)

Namun, dengan banyaknya seni budaya dan luasnya wilayah Indonesia bahwa kedua hal tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu masalah klaim terhadap seni budaya Indonesia dan wilayah Indonesia atau disebut juga sebagai sengketa wilayah perbatasan. Permasalahan klaim terhadap seni budaya Indonesia seringkali terjadi dan klaim tersebut dilakukan oleh negara, perusahan, maupun perorangan, seperti: Kopi Gayo yang berasal dari Aceh dan didaftarkan sebagai merek dagang oleh *Holland Coffee*, sebuah perusahaan multinasional (MNC) Belanda dan berakibat petani tidak bisa lagi memakai merek Kopi Gayo (Leonardo, Kopi Gayo Dari Aceh Oleh Perusahaan Multinasional (mnc) Belanda, 2011)[1]; Desain Kerajinan Perak Desa Suwarti Dari Bali Oleh Oknum Warga Negara Amerika Serikat, sehingga dituduh melanggar Hak Kekayaan Intelektual (Haki) atau Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs),

[1] Leonardo, V. (2011, Oktober 28). *Kopi Gayo Dari Aceh Oleh Perusahaan Multinasional (mnc) Belanda*. Retrieved Januari 19, 2025, from budaya-indonesia.org: https://budaya-indonesia.org/Kopi-Gayo-dari-Aceh-oleh-perusahaan-multinasional-MNC-Belanda

karena menjual kepada orang lain (Leonardo, 2011)[2]; Reog Ponorogo, alat music angklung, lagu Rasa Sayang Sayange, Beras Adan Krayan dan Tari Pendet yang diklaim oleh Malaysia (detikNews, 2012)[3]. Jika merujuk pada data yang dikumpulkan oleh https://budaya-indonesia.org bahwa ada 7 negara yang telah melakukan klaim terhadap seni budaya Indonesia, yaitu:

Tabel 2. Daftar Negara yang Mengklaim Seni Budaya Indonesia

No	Negara	Jumlah Seni Budaya yang Diklaim
1.	Malaysia	30
2.	Singapura	1
3.	Jepang	4
4.	Belanda	5
5.	Perancis	1
6.	Jerman	2
7.	Amerika Serikat	3

Sedangkan, pada permasalahan batas wilayah, klaim wilayah oleh negara lain juga terjadi sehingga menimbulkan masalah sengketa wilayah antara Indonesia dengan negara tetangga. Setidaknya, sampai saat ini Indonesia menghadapi sengketa wilayah dengan 3 negara, yaitu: Malaysia dan Timor Leste[4], serta Singapura[5].

Banyaknya permasalahan klaim seni budaya dan wilayah di Indonesia secara langsung akan mempengaruhi kedaulatan negara, karena seni budaya dan wilayah negara merupakan bagian penting dari sebuah negara, dimana seni budaya dan wilayah negara merupakan identitas bangsa dan negara, sekaligus menjadi bukti akan keberadaan suatu bangsa dan negara. Sehingga, upaya klaim terhadap seni budaya dan

[2] Leonardo, V. (2011, Oktober 18). *Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti Dari Bali Oleh Oknum Wn Amerika*. Retrieved Januari 19, 2025, from budaya-indonesia.org: https://budaya-indonesia.org/Desain-Kerajinan-Perak-Desak-Suwarti-dari-Bali-oleh-Oknum-WN-Amerika

[3] detikNews. (2012, Januari 14). *Klaim Malaysia, Dari Reog, Angklung Hingga Beras*. Retrieved Januari 19, 2025, from news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-1815444/klaim-malaysia-dari-reog-angklung-hingga-beras

[4] Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2024, November 1). *Mendagri Ungkap RI - Malaysia Segera Teken MoU dari 3 Sengketa Batas Wilayah Negara*. Retrieved Januari 19, 2025, from bnpp.go.id: https://bnpp.go.id/berita/mendagri-ungkap-ri-malaysia-segera-teken-mou-dari-3-wilayah-sengketa-batas-negara

[5] Adryamarthanino, V., & Nailufar, N. N. (2021, Mei 22). *Sengketa Indonesia-Singapura*. Retrieved Januari 19, 2025, from kompas.com: https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/22/144114379/sengketa-indonesia-singapura

wilayah tidak boleh terjadi, dan negara bertanggungjawab terhadap permasalahan klaim tersebut.

Menjaga kedaulatan negara adalah tugas utama dari sebuah pemerintahan, hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Tafsir terhadap kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan kekayaan bangsa dan negara, termasuk seni budaya dan wilayah dari segala bentuk atau upaya pengklaiman oleh negara lain, organisasi/kelompok lain, dan perorangan, karena segala bentuk atau upaya pengklaiman adalah ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (kedaulatan negara).

Salah satu Langkah yang dapat dilakukan oleh negara/pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara adalah melalui kegiatan peng-arsip-an atau kearsipan, karena definisi arsip dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan peng-arsip-an atau kearsipan merupakan kegiatan yang resmi dilakukan oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah (Pemerintah), lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam berinteraksi satu sama lainnya. Artinya, hasil dari peng-arsip-an yang dilakukan oleh mereka mendapatkan jaminan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan, tentunya sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku.

Hal tersebut termuat dalam bagian pertimbangan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah (1) dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antara

kedaulatan negara (dalam hal ini seni budaya dan wilayah) dengan arsip sebagai bukti rekaman kegiatan.

2. Permasalahan

Adanya klaim seni budaya dan wilayah suatu negara oleh negara lain merupakan suatu permasalahan yang seringkali terjadi, tidak hanya seni budaya dan wilayah Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kepemilikan, dan menjaga keberlangsungan dan keutuhan kekayaan bangsa dan negara, termasuk seni budaya dan wilayah. dalam beberapa peristiwa, Indonesia sudah mengalami beberapa seni budaya yang telah didaftarkan oleh perusahaan dan perorangan, seperti: Kopi Gayo dari Aceh dan Desain Kerajinan Perak Desa Suwarti Dari Bali. Sedangkan, dalam konteks klaim wilayah, Indonesia kehilangan Pulau Sipadan-Ligitan pada tahun 2002 dengan salah satu penyebabnya adalah tidak adanya catatan pengelolaan Pulau Sipadan-Ligitan dan bukti arsip (catatan pengelolaan) menjadi penentu kepemilikan kedua pulau tersebut. Singkat cerita bahwa Indonesia and Malaysia mempunyai peta Pulau Sipadan-Ligitan, namun Malaysia mempunyai bukti pengelolaan wilayah tersebut, sehingga pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memenangkan kendali kedua pulau tersebut kepada Malaysia (Rachmaji, 2023)[6]. Dan, dari total 17 hakim hanya satu hakim yang memenangkan Indonesia dan 16 hakim lainnya memenangkan Malaysia (Rachmaji, 2018). Peristiwa tersebut menjadi catatan penting bagi Indonesia mengenai pentingnya arsip sebagai bukti kepemilikan dan pengelolaan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Arsip sebagai rekaman kegiatan dapat berperan sebagai "alat" untuk memperkuat kedaulatan negara, dalam hal ini adalah kedaulatan seni budaya dan kedaulatan wilayah, sekaligus dapat juga untuk membangun *state sovereignty awareness* dalam perspektif arsip. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana arsip berperan dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya pada kedaulatan seni budaya dan wilayah?

[6] Terjemahan dari: "both have maps of the two islands, but Malaysia has evidence of management of the area so on December 17, 2002, the International Court of Justice won Malaysia over control of the two islands**".**

B. Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian

1. Tinjauan Pustaka

- **Arsip**

  Pengertian arsip dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- **Pertahanan Negara**

  Pengertian Pertahanan Negara dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menghadapi berbagai macam ancaman, maka bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

- **Kedaulatan**

  Merujuk pada doktrin mengenai konsep kedaulatan negara yang diistilahkan dengan *Act of State Doctrine* dalam tulisan Sigit Riyanto (2012) bahwa setiap setiap Negara berdaulat wajib mengormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya (Rachmaji, 2022). Kemudian menurut Boer Muna (2002) dalam Jean Elvardi bahwa dalam hukum internasional, kedaulatan memiliki 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

  1) Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok–kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.
  2) Aspek intern kedaulatan adalah hak dan wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembagalembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya, serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

3) Aspek territorial kedaulatan adalah berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut (Rachmaji, 2022).

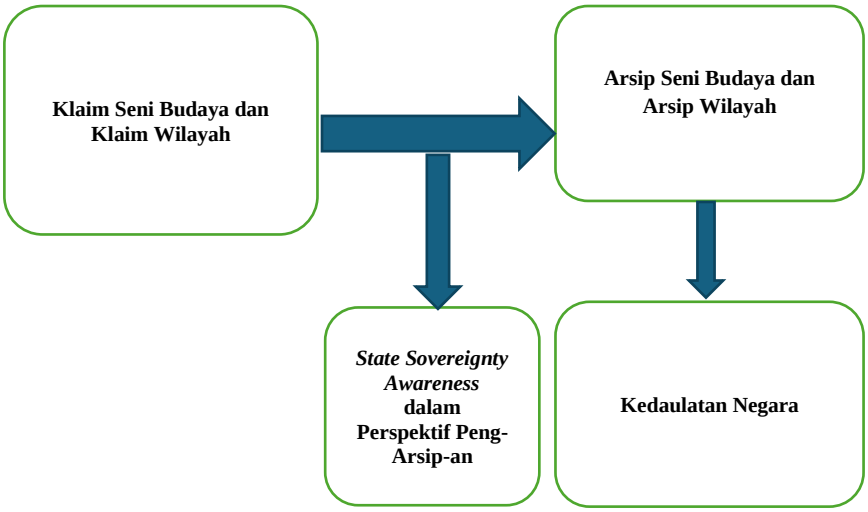
2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, sehingga dalam penelitian ini akan menghasilkan rangkaian kalimat yang mendeskripsikan dan membahas fokus penelitian. Adapun, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus terhadap permasalahan klaim seni budaya dan klaim wilayah yang terjadi di Indonesia. Mudjia Rahardjo mengemukakan, case study ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Sehingga, Penelitian studi kasus (case study) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis mengenai kejadian atau situasi pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia (Ilhami, Nurfajriani, Mahendra, Sirodj, & Afgani, 2024).

3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah permasalahan klaim seni budaya dan klaim wilayah sebagai ancaman kedaulatan negara, yang perlu dicari tahu bagaimana mengatasi ancaman kedaulatan tersebut dengan menggunakan arsip yang berperan sebagai alat pertahanan negara dengan menjadikan arsip seni budaya dan arsip wilayah sebagai bukti kepemilikan.

Gambar 2. Kerangka Berpikir



C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Kuantifikasi Klaim Seni Budaya dan Wilayah di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang besar dengan kaya akan seni budaya dan wilayah yang luas ditandai dengan banyaknya batas wilayah dengan negara lain, menjadi suatu hal yang harus disyukuri sebagai anugrah kepada bangsa dan negara Indonesia. Sehingga, anugrah tersebut harus dilindungi dan dijaga oleh pemerintah, Masyarakat, dan seluruh elemen bangsa.

Klaim merupakan permasalahan yang seringkali terjadi pada dua hal tersebut (klaim seni budaya dan klaim wilayah). Pada klaim seni budaya, sebagaimana yang sudah dituliskan pada bagian latar belakang bahwa ada 7 negara yang melakukan klaim seni budaya Indonesia sepanjang tahun 2000-2018, yang berjumlah 44 klaim seni budaya Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Klaim Seni dan Budaya Indonesia oleh Negara Lain

Tahun	Negara	Budaya Indonesia yang Diklaim	Jumlah
2000	Malaysia	Lagu Injit-Injit Semut, Tari Zapin	2
2001	Belanda	Sambal Petai, Sambal Bajak, Sambal Nanas	3
2002	Jepang	Produk Berbahan Rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia	1
2004	Jepang	Kopi Toraja	1
2005	Perancis	Ukiran Kursi Taman Cermin Khas Jepara	1
	Malaysia	Badik Tumbuk Lada	1
2006	Jepang, Jerman	Kunyit	1
	Malaysia	Batik Parang	1
2007	Malaysia	Tari Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange, Naskah Kuno Sulawesi Selatan, Naskah Kuno Sulawesi Tenggara, Naskah Kuno Sumatra Barat, Tari Indang, Lagu Jali-Jali, Lagu Burung Kakak Tua, Cendol, Lagu Soleram	10
2008	Amerika Serikat	Kerajinan Perak Bali	1
	Malaysia	Ulos, Hambo Batu, Tari Folaya	3
	Belanda	Kopi Gayo	1
	Inggris	Ukiran Pigura Cermin Khas Jepara	1
	Jerman	Batik Adidas	1
2009	Malaysia	Naskah Kuno, Tari Pendet, Wayang	3

2010	Malaysia	Angklung	1
	Belanda	Lagu Bengawan Solo	1
	Amerika Serikat	Temulawak	1
2011	Jepang & Amerika Serikat	Tempe	1
	Malaysia	Beras Krayan	1
2012	Malaysia	Tari Tor Tor dan Gondang Sambilan, Rendang	2
	Singapura & Malaysia	Lagu Anak Kambing Saya	1
2015	Malaysia	Gamelan, Tari Piring, Lumpia Semarang	3
2017	Malaysia	Tari Kuda Lumping	1
2018	Malaysia	Pencak Silat	1
	Jumlah		**44**

Sumber: https://budaya-indonesia.org/Klaim-Budaya (data dikelompokkan pertahun dan negara)

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa adanya klaim seni budaya Indonesia terjadi hamper setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2003 dan 2016. Dan, negara yang banyak melakukan klaim seni budaya Indonesia adalah Malaysia dengan jumlah 30 klaim, Belanda dengan jumlah 5 klaim, Jepang dengan jumlah 4 klaim, Amerika Serikat dengan jumlah 3 klaim, Jerman dengan jumlah 2 klaim, Perancis dan Singapura dengan masing-masing 1 klaim. Kemudian, jika dirinci berdasarkan kategori warisan budaya takbenda, maka dari 44 data seni budaya yang diklaim (pada tabel x.) tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi berdasarkan Kategori Warisan Budaya Takbenda

No	Kategori	Jumlah	Rincian yang Diklaim
1.	kategori Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	1	Hambo Batu
2.	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	23	Ukiran Kursi Taman Cermin Khas Jepara, Badik Tumbuk Lada, Kunyit, Batik Parang, Kerajinan Perak Bali, Ulos, Ukiran Pigura Cermin Khas Jepara, Batik Adidas, Wayang,

			Angklung, Gamelan; Sambal Petai, Sambal Bajak, Sambal Nanas, Produk Berbahan Rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia, Kopi Toraja, Cendol, Kopi Gayo, Temulawak, Tempe, Beras Krayan, Rendang, Lumpia Semarang
3.	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta	-	-
4.	Seni Pertunjukan	9	Tari Zapin, Tari Reog Ponorogo, Tari Indang, Tari Tor Tor dan Gondang Sambilan, Tari Piring, Tari Kuda Lumping, Tari Folaya, Tari Pendet
5.	Tradisi Lisan dan Ekspresi	4	Naskah Kuno Sulawesi Selatan, Naskah Kuno Sulawesi Tenggara, Naskah Kuno Sumatra Barat, Naskah Kuno
6.	Lagu	7	Lagu Injit-Injit Semut, Lagu Rasa Sayange, Lagu Jali-Jali, Lagu Burung Kakak Tua, Lagu Soleram, Lagu Bengawan Solo, Lagu Anak Kambing Saya

Data diolah oleh Penulis dengan merujuk pada data klaim seni budaya di https://budaya-indonesia.org/Klaim-Budaya dan untuk kategori lagu adalah kategori tambahan.

Dari tabel diatas juga didapat bahwa kategori "Kemahiran dan Kerajinan Tradisional" banyak diklaim oleh 7 negara yang telah disebutkan sebelumnya, dengan di dominasi dari unsur makanan seperti: sambal, kopi, obat herbal dll.

Sedangkan, pada klaim wilayah tidak sebanyak dengan apa yang terjadi pada permasalahan klaim seni budaya Indonesia, namun permasalahan klaim wilayah mempunyai dampak yang besar terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Klaim wilayah tidak hanya menyangkut terkait dengan sengketa atau outstanding boundary

problem (OBP)[7], namun juga terkait dengan permasalahan pelanggaran batas wilayah. Sampai dengan saat ini permasalahan perbatasan Indonesia dengan 3 negara tetangga masih berlangsung, sebagaimana data pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Rekapitulasi Klaim Wilayah/Sengketa Indonesia dengan Negara Lain

No	Negara	Jumlah	Kasus Sengketa
1.	Malaysia	9	5 OBP Di Sektor Timur (Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara), antara lain: Pulau Sebatik; Sungai Semantipal; Patok /segment C500-C600; Sungai Sinapad; dan segment B 2700-B 3100. 4 OBP Di Sektor Barat (Kalimantan Barat), antara lain: Segmen D 400 dan Sungai Buan (Kabupaten Sambas); Segment Batu Aum (Kabupaten Bengkayang); dan Gunung Raya (Kabupaten Sintang)[8]
2.	Singapura	1	Selat Singapura[9]
3.	Timor Leste	3	Noelbesi Citrana di Desa Netemnanu Utara, Dongan Fuang, Kabupaten Kupang, dan Distrik Oecusee di Timor Timur, distrik Bijaelsunan dan Oecusee Oban di utara-tengah Kabupaten Timor, Delomir Memo di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Kecamatan Pobonaro[10]

[7] OBP merupakan ikatan kesepakatan antara kedua negara yang bersengketa batas negaranya, sebagai dasar memulai suatu proses penyelesaian terlebih dahulu disepakati wilayah dimaksud merupakan wilayah sengketa kedua negara yang berada dalam "Status Quo" yang dalam pengertiannya wilayah sengketa tersebut secara kepemilikannya belum punya kejelasan hukum karena belum terdapat kesepakatan final yang dituangkan dalam suatu perjanjian batas negara oleh kedua negara yang bersengketa batas negaranya. (Abidin dan Priyatna , 2015) dikutip dari Putrayasha, A. Y. (2017). Permasalahan perbatasan indonesia-malaysia: kasus eksodus warga tiga desa di nunukan. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 6*(1), 77-86.

[8] Sasmita, P. (2021, November 1). *Mengenal Sengketa Batas Negara ketika Dua Negara Saling Klaim*. Retrieved Januari 28, 2025, from www.sonora.id: https://www.sonora.id/read/422971482/mengenal-sengketa-batas-negara-ketika-dua-negara-saling-klaim

[9] Firdaus, A. Y., & Mutmainah, I. (2020). LANGKAH DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA WILATAH REKLAMASI SINGAPURA. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5*(9), 739-750. doi:http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.1604

[10] Mangku, D. G., & Dimaswari, N. P. (2021). Problematika Di Daerah Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste. *Justitia Jurnal Hukum, 6*(2), 143-151. doi:https://doi.org/10.30651/justitia.v6i02.9532

Pada tabel diatas menggambarkan adanya klaim wilayah antara Indonesia dan 3 negara tetangga, baik pada wilayah darat maupun laut. Dan, dalam satu peristiwa, Indonesia pernah kalah dalam mempertahankan batas wilayahnya yaitu pada sengketa Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Yang akhirnya, Indonesia harus kehilangan wilayah Pulau Sipadan-Ligitan. Oleh karena itu, kuantifikasi klaim seni budaya Indonesia dalam kurun waktu 18 tahun (tahun 2000-2018) yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Dan, adanya klaim wilayah dalam permasalahan sengketa batas negara harus dapat dihindari untuk kehilangan akan kepemilikan terhadap seni budaya dan wilayah di Indonesia.

b. Kebijakan Pengelolaan Arsip Seni Budaya dan Wilayah di Indonesia

Arsip secara singkat merupakan rekaman kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi maupun perorangan. Dan, seni budaya dan wilayah adalah obyek kegiatan yang di-arsip-kan melalui serangkaian pencatatan dan pendokumentasian yang dapat disebut dengan peng-arsip-an atau kegiatan kearsipan. Peng-arsip-an atau kegiatan kearsipan merupakan amanat Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan salah satu tujuannya adalah menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat.

Konsekuensi dari tujuan kearsipan tersebut adalah negara/pemerintah membuat kebijakan kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan dibidang kearsipan, sehingga berbagai kebijakan kearsipan merujuk pada peraturan yang dibuat oleh ANRI, termasuk peng-arsip-an di bidang seni budaya dan wilayah.

Seni budaya dan wilayah sebagai obyek dari kegiatan pengelolaan arsip perlu juga untuk dilakukan pengelolaan arsip. Secara definisi, pengelolaan arsip proses pengendalian arsip secara efesien, efektif, dan sistematis, untuk menjamin ketersedian arsip dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, serta menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Nainggolan, Masari, & Novita, 2022).

Kebijakan pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah dapat merujuk pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga, karena dalam pasal 1 poin 2 dalam peraturan tersebut bahwa arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan

negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Sehingga, kebijakan pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah dapat merujuk pada pengelolaan arsip terjaga, terdiri dari kegiatan:

1. Identifikasi arsip terjaga, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga.
2. Pemberkasan arsip terjaga, yaitu penataan arsip berdasarkan subjek dengan menggunakan klasifikasi arsip sebagai panduan pengelompokannya.
3. Pelaporan arsip terjaga, yaitu penyiapan daftar berkas arsip terjaga dan daftar isi berkas arsip terjaga.
4. Penyerahan arsip terjaga yaitu penyerahan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga oleh Pencipta Arsip kepada ANRI dilengkapi dengan berita acara penyerahan salinan autentik arsip terjaga.

Gambar 3. Alur Pengelolaan Arsip Terjaga berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga



Sedangkan, pada konteks implementasi kebijakan peng-arsip-an seni budaya dan wilayah merupakan bentuk realisasi dari kebijakan pengelolaan arsip, yang terutama dilakukan oleh pemerintah/negara yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kearsipan. Dalam struktur organisasi kearsipan di Indonesia disebut dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Hal tersebut, sebagaimana yang tercantum

dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 16 ayat 1 bahwa organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

2. Pembahasan

Berdasarkan penjelasan pada subbab hasil, maka terdapat gambaran mengenai banyaknya permasalahan klain seni budaya dan wilayah yang terjadi di Indonesia. Dan, seni budaya dan wilayah menjadi obyek dari kegiatan kearsipan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan bidang kearsipan, serta adanya pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah terutama merupakan tanggungjawab dari negara/pemerintah melalui institusi negara/pemerintah dibidang kearsipan. Dalam subbab pembahasan ini akan ada 3 pembahasan, yaitu:

a. Klaim Seni Budaya dan Wilayah sebagai Ancaman Terhadap Pertahanan dan Kedaulatan Negara

Klaim merupakan upaya untuk mengakui akan kepemilikan dari pihak lain. Klaim juga merupakan ancaman bagi pihak yang diklaim. Oleh karena itu, adanya klaim seni budaya dan wilayah yang terjadi di Indonesia merupakan suatu ancaman terhadap negara. Ancaman tersebut merupakan bentuk ancaman hibrida, yaitu ancaman yang bersifat campuran yang merupakan ketepaduan antara ancaman militer dan nonmiliter (Kementerian Pertahanan RI, 2015)[11]. Adanya ancaman hibrida dapat menjadi ancaman yang bersifat *multi dimensional* yang dapat menghancurkan kekukuhan dan eksistensi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rusman, 2022)[12]. Adapun pelaku dari ancaman tersebut dapat dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, yang bersifat nasional, regional dan internasional (Kementerian Pertahanan RI, 2015)[13].

Permasalahan klaim seni budaya dan wilayah dalam tulisan ini banyak dilakukan oleh actor negara dan nonnegara yang bersifat internasional, seperti: pelaku klaim seni budaya dari actor negara berjumlah 7 negara (lihat tabel 3) dan ada juga pelaku actor nonnegara baik perusahaan maupun perorangan, seperti: klaim terhadap Kopi Gayo (Aceh) oleh sebuah perusahaan multinasional (MNC) Belanda dan desain kerajinan perak Desa Suwarti Dari Bali Oleh Oknum Warga Negara

[11] Buku putih
[12] Konsepsi strategi menghadapi perang hibrida
[13] Buku putih

Amerika Serikat. Sedangkan, pada klaim wilayah (dalam hal ini adalah sengketa wilayah) hanya terjadi pada actor negara, seperti: sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara) dengan Malaysia (Sarawak dan Sabah), dan sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia (Nusa Tenggara Timur) dengan Timor Leste.

Dengan adanya klaim sebagai ancaman hibrida dan dilakukan oleh pelaku yang bersifat internasional akan menganggu pertahanan dan kedaulatan negara. Dampak dari adanya klaim tersebut juga sudah pernah dirasakan oleh Indonesia, yaitu Ketika Indonesia kehilangan wilayah Pulau Sipadan-Ligitan, dengan luas Pulau Sipadan memiliki luas 50000 m2 dan luas 10,4 ha terletak 15 mil laut (sekitar 24 km) dari pantai sabah (malaysia) dan 40 mil laut (sekitar 64 km) dari pantai pulau sebatik (Indonesia). Sementara Pulau Ligitan merupakan gugus pulau karang seluas 18.000m2 dan luas 7,9 ha yang terletak 21 mil laut (34 km) dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil (93 km) dari pantai Pulau Sebatik diujung timur laut pulau Kalimantan/Borneo (Novitasari, 2021). Artinya, wilayah Indonesia berkurang dengan luasnya Pulau Sipadan-Ligitan, dengan kehilangan wilayah tersebut Indonesia juga kehilangan dengan berbagai potensi sumber daya baik yang ada di permukaan maupun didalam laut, termasuk wilayah pertahanan negara.

Begitu pula, dengan apa yang terjadi pada permasalahan klaim seni budaya, bahwa jika tidak dilindungi dan dijaga akan kehilangan berbagai potensi baik dari segi ekonomi, warisan budaya, dan identitas bangsa dan negara. Hal tersebut dapat dilihat pada 2 contoh yang sudah dijelaskan pada bab latar belakang pada permasalahan klaim Kopi Gayo dari Aceh dan desain kerajinan perak Desa Suwarti Dari Bali. Akibat dari permasalahan tersebut warga negara Indonesia tidak dapat lagi menggunakan identitas Kopi Gayo dan desain kerajinan perak Desa Suwarti, karena akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, klaim seni budaya dan wilayah dapat menganggu pertahanan dan kedaulatan negara. Sehingga, negara/pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengantisipasi terhadap segala potensi ancaman, termasuk potensi ancaman hibrida pada klaim seni budaya dan wilayah.

b. Aktor dan Model Pengelolaan Arsip Seni Budaya dan Wilayah sebagai Bentuk Pertahanan Negara dalam Kerangka Kedaulatan Negara

Permasalahan klaim seni budaya dan wilayah yang mengancam akan pertahanan dan kedaulatan negara merupakan suatu hal yang harus diantisipasi

secepat dan sedini mungkin, agar berbagai dampak yang disebabkan oleh terlambatnya mengantisipasi ancaman tersebut dapat dihindari, 3 contoh kasus yang disebutkan pada subbab sebelumnya dapat menjadi Pelajaran bagi pemerintah dan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya melakukan pengelolaan seni budaya dan wilayah melalui kegiatan peng-arsip-an.

Upaya implementasi kebijakan kearsipan guna mencapai tujuan kebijakan kearsipan, maka perlu didukung oleh aktor-aktor yang terlibat dalam melakukan pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah. adanya keterlibatan actor-aktor dalam pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah dapat dianalisis menggunakan 2 pendekatan actor, yaitu:

1) Konsep MDA (Maritime Domain Awareness) sebagai desain politik dalam melihat relasi antara aktor negara dengan aktor non-negara. Aktor negara dalam konsep MDA diasumsikan sebagai pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah; dan aktor non-negara diasumsikan dengan masyarakat secara luas, jika dalam konteks pembahasan ini terdiri dari warga negara, organisasi, dan perorangan.
2) Struktur organisasi kearsipan sebagai entitas yang mempunyai fungsi dalam bidang kearsipan, terdiri dari lembaga kearsipan dan pencipta arsip. Lembaga kearsipan sebagai penyimpan arsip bernilaiguna sekunder dan pencipta arsip sebagai pembuat arsip.

Berdasarkan, 2 pendekatan actor tersebut maka dapat dilakukan analisis mengenai actor yang terlibat dalam melakukan pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah, yaitu:

1) Actor negara sebagai lembaga kearsipan, merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Dalam konteks pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah berperan sebagai pengumpul arsip-arsip seni budaya dan wilayah dan disimpan sesuai dengan prinsip, norma dan kaidah kearsipan.

No	Actor negara sebagai lembaga kearsipan	Instansi Pemerintah
1.	Pada level Nasional	Arsip Nasional Republik Indonesia
2.	Pada level Provinsi	Dinas Kearsipan Tingkat Provinsi

3.	Pada level Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota

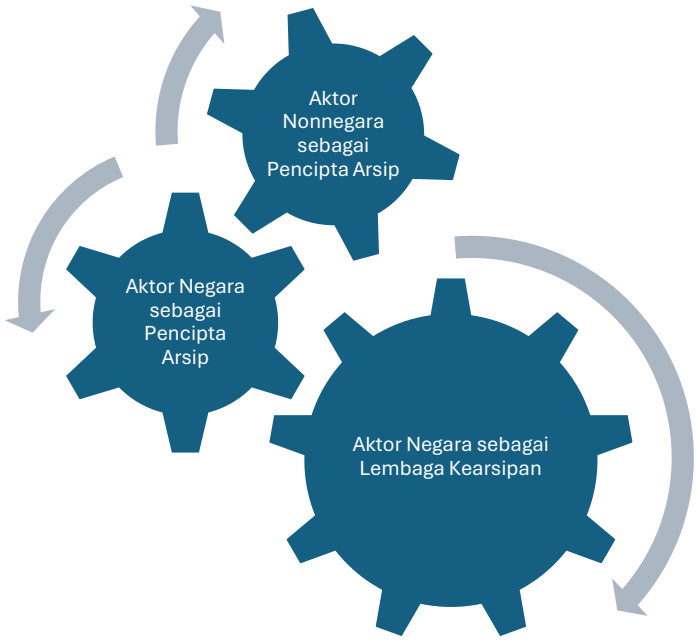
2) Actor negara sebagai pencipta arsip, merupakan instansi pemerintah yang kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Pada kelompok ini, instansi pemerintah disesuaikan berdasarkan kategori arsipnya, apakah arsip seni budaya atau arsip wilayah.

No	**Actor negara sebagai Pencipta Arsip**	**Instansi Pemerintah terkait dengan Pengelolaan Arsip Seni Budaya**	**Instansi Pemerintah terkait dengan Pengelolaan Arsip Seni Budaya**
1.	Pada level Nasional	Kementerian Kebudayaan, Kementerian Koperasi; Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Kementerian Pariwisata; Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;	TNI Angkatan Laut; Bakamla; Basarnas; Polairud; Imigrasi; Kementerian Perhubungan; Bea Cukai; BRIN; KLHK; KKP; Kemenlu; ESDM; Kemendagri
2.	Pada level Provinsi	Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Perikanan dan Kelautan
3.	Pada level Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Perikanan dan Kelautan

3) Actor non negara sebagai pencipta arsip, merupakan pencipta arsip yang bukan instansi pemerintah, terdiri dari: lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang berpartisipasi dalam bidang seni budaya dan berada di wilayah perbatasan.

Keterkaitan diantara ketiga kelompok diatas dapat di ilustrasikan sebagai berikut (lihat Gambar 2.)

Gambar 4. Model Pengelolaan Arsip Seni Budaya dan Wilayah



Gambar diatas merupakan gambaran secara umum yang akan terjadi dalam pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah. gambar tersebut menggambarkan adanya interaksi dan relasi diantara ketiga kelompok dalam melakukan kegiatan pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah. Sehingga, gambar diatas akan menghasilkan model pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

c. Membangun Gerakan *State Sovereignty Awareness* (SSA) dalam Perspektif Kearsipan

Satu hal yang penting dalam menjaga kedaulatan negara adalah kesadaran, yaitu kesadaran akan pentingnya kekayaan bangsa dan negara untuk dijaga dan dilindungi. Sehingga, *State Sovereignty Awareness* dapat menjadi suatu gerakan yang dapat

menjaga dan melindungi kekayaan bangsa dan negara. Dan, dalam membangun Gerakan SSA dapat ditinjau dari perspektif kearsipan, dengan tujuan untuk membuktikan akan kepemilikan terhadap segala kekayaan bangsa dan negara.

Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa kegiatan peng-arsip-an atau kearsipan merupakan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian sebagai bentuk rekaman kegiatan mengenai pengelolaan seni budaya dan wilayah di Indonesia. Berdasarkan fungsi/peran arsip menurut Agus Sugiarto and Teguh Wahyono dalam buku "Manajemen Kearsipan Modern: dari Konvensional ke Basis Komputer" bahwa ada 4 fungsi/peran arsip, yaitu:

1) Arsip sebagai sumber ingatan atau memori. Arsip yang disimpan merupakan bank data yang dapat dijadikan rujukan pencarian informasi apabila diperlukan, dengan demikian kita bisa mengingat atau menemukan kembali informasiinformasi yang terekam dalam arsip tersebut.
2) Arsip sebagai bahan pengambilan keputusan. Pihak manajemen dalam kegiatannya tentu memerlukan berbagai data atau informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembilan keputusan. Data dan informasi tersebut dapat ditemukan dalam arsip yang disimpan dalam berbagai media, baik media elektronik ataupun nonelektronik.
3) Sebagai bukti atau legalitas. Arsip yang dimiliki organisasi memiliki fungsi sebagai pendukung legalitas atau bukti-bukti apabila diperlukan.
4) Sebagai rujukan historis. Arsip yang merekam informasi masa lalu dan menyediakan informasi untuk masa yang akan datang. Sehingga arsip dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui perkembangan sejarah atau dinamika kegiatan organisasi.

Dengan adanya 4 fungsi/peran arsip tersebut dapat mendukung upaya membangun SSA sebagai bentuk pertahanan negara dalam kerangka kedaulatan negara. Selain itu, hubungan kesinambungan dan keberlanjutan pada interaksi/relasi diantara actor-aktor yang terkait dengan pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah, juga diharapkan dapat menciptakan kesadaran akan kedaulatan negara (*State Sovereignty Awareness/*SSA).

Sehingga, upaya membangun SSA dalam perspektif kearsipan dapat memaksimalkan model pengelolaan arsip seni budaya dan wilayah, serta dapat berperan memberikan ketegasan akan kepemilikan seni budaya dan wilayah,

penerapan prinsip *effective occupancy* pada kedaulatan wilayah, dan *soft diplomacy* pada kedaulatan seni budaya dan wilayah.

D. Kesimpulan

Menjaga kedaulatan negara merupakan tanggung jawab bersama, yaitu seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun Masyarakat. Dan, salah satu bentuk kedaulatan negara terdapat pada kedaulatan seni budaya dan kedaulatan wilayah. pada dasarnya kedua kedaulatan tersebut juga merupakan bentuk identitas bangsa dan negara. Sehingga, menjaga kedaulatan seni budaya dan wilayah menjadi sangat penting. Namun, permasalahan akan klaim terhadap seni budaya dan wilayah di Indonesia merupakan suatu ancaman yang nyata dan harus dihadapi oleh Indonesia. Sehingga, pemerintah/negara perlu mengantisipasi terhadap ancaman tersebut, jangan sampai peristiwa yang pernah terjadi pada sengketa Pulau Sipadan-Ligitan, Kopi Gayo dan desain kerajinan Perak Desa Suwarti terjadi lagi.

Kesadaran akan pentingnya kedaulatan negara dan penggunaan perspektif kearsipan dalam menjaga kedaulatan negara dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran kedaulatan negara baik secara intitusi, organisasi, maupun individu, dalam hal ini adalah kedaulatan seni budaya dan kedaulatan wilayah. Serta, hal tersebut juga dapat menjadi bentuk mitigasi dalam menghindari ancaman kedaulatan yang bersifat hibrida.

E. Daftar Pustaka

Bibliography

Adryamarthanino, V., & Nailufar, N. N. (2021, Mei 22). *Sengketa Indonesia-Singapura*. Retrieved Januari 19, 2025, from kompas.com: https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/22/144114379/sengketa-indonesia-singapura

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2024, November 1). *Mendagri Ungkap RI - Malaysia Segera Teken MoU dari 3 Sengketa Batas Wilayah Negara*. Retrieved Januari 19, 2025, from bnpp.go.id: https://bnpp.go.id/berita/mendagri-ungkap-ri-malaysia-segera-teken-mou-dari-3-wilayah-sengketa-batas-negara

detikNews. (2012, Januari 14). *Klaim Malaysia, Dari Reog, Angklung Hingga Beras*. Retrieved Januari 19, 2025, from news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-1815444/klaim-malaysia-dari-reog-angklung-hingga-beras

Direktorat Perlindungan Kebudayaan. (2022, Desember 15). *Sebanyak 1728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia Ditetapkan*. Retrieved Januari 20, 2025, from https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/sebanyak-1728-warisan-budaya-takbenda-wbtb-indonesia-ditetapkan

Firdaus, A. Y., & Mutmainah, I. (2020). LANGKAH DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA WILATAH REKLAMASI SINGAPURA. *Syntax*

Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(9), 739-750. doi:http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.1604

Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(9), 462-469. doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129

indonesia.go.id. (2023, Juli 26). *Menyiapkan Tata Kelola Laut Berkelanjutan*. Retrieved Januari 16, 2025, from https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7295/menyiapkan-tata-kelola-laut-berkelanjutan?lang=1

Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia.* Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

kumparan.com. (2020, Juli 24). *Batas-Batas Wilayah Indonesia Secara Geografis*. Retrieved Januari 16, 2025, from https://kumparan.com/berita-hari-ini/batas-batas-wilayah-indonesia-secara-geografis-1trfxzZMyBE

Leonardo, V. (2011, Oktober 18). *Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti Dari Bali Oleh Oknum Wn Amerika*. Retrieved Januari 19, 2025, from budaya-indonesia.org: https://budaya-indonesia.org/Desain-Kerajinan-Perak-Desak-Suwarti-dari-Bali-oleh-Oknum-WN-Amerika

Leonardo, V. (2011, Oktober 28). *Kopi Gayo Dari Aceh Oleh Perusahaan Multinasional (mnc) Belanda*. Retrieved Januari 19, 2025, from budaya-indonesia.org: https://budaya-indonesia.org/Kopi-Gayo-dari-Aceh-oleh-perusahaan-multinasional-MNC-Belanda

Mangku, D. G., & Dimaswari, N. P. (2021). Problematika Di Daerah Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste. *Justitia Jurnal Hukum, 6*(2), 143-151. doi:https://doi.org/10.30651/justitia.v6i02.9532

Margono. (2015). AKTOR NON-NEGARA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 28*(2), 105-110. doi:http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5450

Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia.* Jakarta: Universitas Pertahanan.

Nainggolan, C. M., Masari, & Novita, V. (2022). SISTEM PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA PT SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO) MEDAN. *Home / Archives / Vol. 3 No. 1 (2022): Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP) 2022 /, 3*(1), 175-183. doi:https://doi.org/10.51510/konsep.v3i1.923

Nickyriaazizman, N. (2018, Oktober 17). *Klaim Budaya*. Retrieved Januari 23, 2025, from budaya-indonesia.org: https://budaya-indonesia.org/Klaim-Budaya

Novitasari, C. N. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 2*(2), 231-261. doi:https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638

Peraturan Kepala ANRI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga.

Putrayasha, A. Y. (2017). Permasalahan perbatasan indonesia-malaysia: kasus eksodus warga tiga desa di nunukan. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 6*(1), 77-86.

Rachmaji, A. S. (n.d.).

Rachmaji, A. S. (2018). Arsip Seni dan Budaya Indonesia: Strategi Memperkuat Nasionalisme dan Identitas Bangsa di Era Global. In A. S. Ariyani, & A. Harimurti

(Ed.), *Nasionalisme di Tengah Kewargaan Budaya dan Ekstrenisme* (pp. 39-54). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Press.

Rachmaji, A. S. (2022). *Thesis: Kebijakan Politik Pertahanan Nasional dalam Konsep Maritime Domain Awaraness (MDA) Era Presiden Jokowi: Studi Kasus Laut Cina Selatan.* Jakarta: Magister Ilmu Politik-Sekolah Pasca Sarjana-Universitas Nasional.

Rachmaji, A. S. (2023). Maritime Domain Awareness (MDA) and Archives: the Role of Archives in Sovereignty. *Journal Khizanah Al Hikmah, 11*(2), 242-253. doi:https://doi.org/10.24252/kah.v11i2a9

Rusman, D. (2022). Konsep Strategi Menghadapi Perang Hibrida Guna Menjaga Kedaulatan NKRI. Retrieved Januari 30, 2025, from http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-102200000000026/swf/7585/22%20DATO%20RUSMAN%20S%20N.pdf

Sasmita, P. (2021, November 1). *Mengenal Sengketa Batas Negara ketika Dua Negara Saling Klaim*. Retrieved Januari 28, 2025, from www.sonora.id: https://www.sonora.id/read/422971482/mengenal-sengketa-batas-negara-ketika-dua-negara-saling-klaim

Sugiarto, A., & Wahyono, T. (2005). *Manajemen Kearsipan Modern: dari Konvensional ke Basis Komputer.* Yogyakarta: Gava Media.

Undang Undang Dasar 1945 .

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Daftar Riwayat Hidup

Nama saya adalah Achmad Syarif Rachmaji, S.IP., M.Sos. saya dilahir pada tanggal 12 Februari 1985 di Jakarta. Riwayat Pendidikan formal saya adalah Sarjana Ilmu Politik (Strata 1) dari Universitas Jenderal Sudirman (2005-2010) dan Magister Ilmu Politik (Strata 2) dari Universitas Nasional (2020-2022). Dan, saat ini menjadi peneliti di Pusat Penelitian Ilmu Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelumnya, saya adalah peneliti di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pada tahun 2014 hingga 2021. Kegiatan penelitian saya saat ini banyak terkait dengan Arsip dan Pertahanan Keamanan khususnya Keamanan Maritim. Kedua focus penelitian saya tersebut menjadi instrument dalam mengkaji berbagai hal yang terkait dengan Kedaulatan.

Membumikan Kedaulatan: Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik sebagai Bentuk Artikulasi Kedaulatan Rakyat

Adif Rachmat Nugraha

Manggala Nusantara Stratejik

Abstrak

Dalam pintasan sejarah, diskursus mengenai kedaulatan seringkali dilekatkan dengan konsep negara Westphalia yang dibatasi pada prinsip teritorialitas dan nonintervensi, yang acapkali meminggirkan hak, kedudukan, dan posisi rakyat sebagai salah satu sumber dari kedaulatan itu sendiri. Pada perjalanannya, pembacaan atas kedaulatan rakyat pun kemudian tereduksi sebatas pada mekanisme pemilihan umum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk sekadar memilih para pemimpinnya pada posisi eksekutif maupun para wakilnya untuk duduk pada posisi legislatif. Maka di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif rakyat seiring dengan menguatnya tuntutan akan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara, pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik menjadi ruang terbaik untuk mengartikulasikan kedaulatan rakyat dimana rakyat memiliki kuasa untuk memantau, mengawasi, dan mengendalikan jalannya pelayanan publik yang merupakan alasan keberadaan (*raison d'etre*) dari muncul dan hidupnya negara. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, makalah ini menyoroti bentuk, strategi, dan tantangan pengawasan partisipatif pelayanan publik yang diselenggarakan, pertama, secara institusional dimana laporan atau aduan rakyat atas penyelenggaraan pelayanan publik ditindaklanjuti oleh lembaga pengawas internal seperti antara lain unit kerja inspektorat di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta melalui sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang terselenggara secara nasional, dan lembaga pengawas eksternal seperti antara lain Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga ombudsman daerah, juga berbagai organisasi masyarakat sipil, serta yang kedua, secara mandiri dimana rakyat menggunakan sumberdaya yang ada untuk menyuarakan kritik, masukan, dan saran atas penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka dapatkan ketika mekanisme pengawasan yang bersifat formal-institusional dipandang tidak bekerja secara optimal. Mengambil lokus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tercatat dalam tinta emas

sejarah sebagai lokasi kedaulatan Republik Indonesia yang berusia muda diperjuangkan dan dipertaruhkan, serta di masa kini menjadi salah satu pemerintah daerah dengan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terbaik di Indonesia, makalah ini menemukan bahwa sinergi pengawasan oleh berbagai aktor pengawas dan penyediaan berbagai kanal pengaduan (*omnichannel*) bagi rakyat menjadi kunci keberhasilan pengawasan partisipatif pelayanan publik di Provinsi DIY, meskipun rekomendasi dan saran perbaikan yang diberikan lembaga pengawas kepada penyelenggara pelayanan publik tidak selalu mengikat secara hukum, melainkan lebih mengikat secara moral. Komitmen politik lewat dukungan regulasi dan kebijakan, partisipasi rakyat, kapasitas dan profesionalisme lembaga pengawas, pemanfaatan teknologi, dan pemantauan serta evaluasi berkala menjadi prasyarat penting suksesnya pengawasan partisipatif pelayanan publik.

Kata Kunci: *Kedaulatan Rakyat, Partisipasi, Pengawasan, Pelayanan Publik*

I. PENDAHULUAN

Negara dan kedaulatan (*sovereignty*), dua konsep yang seringkali digunakan secara beriringan maupun bergantian, yang menunjukkan betapa besar—sekaligus angkernya—kekuasaan yang terinstitusionalisasi dalam batas-batas geografis dan kewilayahan tertentu, yang bahkan berkuasa pula dalam mengelola pemerintahan serta populasi yang berada di dalam batas-batas tersebut. Lahirnya negara sebagai sebuah inovasi politik muncul setelah disepakatinya Perjanjian Westhphalia dari tataran Eropa pada tahun 1648, yang menekankan bahwa sebagai pemilik kedaulatan, tidak ada otoritas yang lebih tinggi dibanding negara, dan kelangsungan hidup negara harus dilakukan atas usaha negara itu sendiri lewat kekuasaan yang dimilikinya[1]. Aktualisasi kuasa (*power*) negara tersebut tercermin dalam fungsi keamanan dan kesejahteraan yang dijalankannya, yang tak hanya memonopoli penggunaan kekerasan guna menjamin keamanan dan ketertiban, melainkan juga menggunakan perangkat kenegaraan yang ada dalam mendistribusikan sumberdaya nasional untuk menciptakan kesetaraan dalam masyarakat[2].

Namun demikian, seiring berkembangnya zaman dan semakin meluasnya pengaruh demokrasi sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai determinan kunci, lahirlah konsepsi kewargaan (*citizenship*) yang memandang bahwa rakyat sebagai warga negara (*citizen*) pun memiliki kuasa yang melekat untuk tak sekadar tunduk pada hukum tetapi juga mengambil peran dalam menciptakan hukum[3], termasuk turut serta dalam penyelenggaraan negara. Negara yang kuat, justru dibangun dari karakter yang kuat dari warga negara di dalamnya, bukan semata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa[4]. Dalam hal ini, pembacaan atas konsepsi kewargaan, alih-alih sebatas status, justru merupakan proses formatif-politis yang tergambar dalam hubungan antara institusi politik—dalam hal ini negara—dengan anggota dalam institusi tersebut dimana keduanya terikat atas beragam hak dan tanggungjawab yang bersifat timbal balik[5]. Ia menghendaki adanya kontrol publik terhadap distribusi sumberdaya dan pelaksanaan urusan-urusan publik, juga tak mengharamkan adanya situasi tawar-menawar, tarik-menarik, bahkan ketegangan serta konflik.

---

[1] Widjajanto, Andi., Lay, Cornelis., & Keliat, Makmur. 2006. *Intelijen: Velox et exactus*. Jakarta: Pacivis (h. 10-11).
[2] Keliat, Makmur., Aryanti, Agus Catur., Hikmah, Cuti Nury., Hanifah, Hana., & Yuniarini, Rizki. 2014. *Tanggungjawab Negara*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (h. 12).
[3] *Keliat* et al. (h. 32).
[4] *Ibid* (h. 33).
[5] Hanif, Hasrul. 2012. "Dibawah Bayang-Bayang Kewargaan Pasar (Market Citizenship): Menegaskan Politik Inklusi, Mengabaikan Politik Redistribusi", makalah disampaikan dalam *Seminar Internasional ke-13 'Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal'* di Salatiga, 10-13 Juli (https://www.academia.edu/4503514/Dibawah_Bayang_Bayang_Kewargaan_Pasar_Market_Citizenship_), diakses 21 Januari 2025.

Premis di atas kemudian menjadi dasar analisis dari makalah ini, dimana rakyat memiliki kuasa untuk turut serta terlibat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di dalamnya. Kedaulatan milik rakyat teraktualisasi melalui keyakinan konstitutif bahwa suara maupun kepentingan rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi. Sayangnya dalam konteks Indonesia selama ini, gagasan kedaulatan rakyat tereduksi sebatas pada pemberian mandat kepada para penyelenggara negara yang dipilih (*elected officials*) baik pada cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif melalui sistem pemilihan umum yang acapkali menghasilkan para kepala daerah maupun anggota legislatif yang memandang sebelah mata akuntabilitas atas cara maupun hasil kerjanya kepada masyarakat, dan nahasnya di sisi lain, tidak tersedia mekanisme pemberhentian (*recall*) atas usul masyarakat apabila terdapat ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap para pejabat tersebut[6].

Maka, upaya merevitalisasi dan membumikan makna kedaulatan rakyat diupayakan pada jalan lain yang lebih visibel namun berdampak, yakni melalui pengawasan pelayanan publik, dimana masyarakat tidak hanya berperan sebatas penerima manfaat dari layanan yang diberikan oleh para penyelenggaranya, tetapi juga berperan aktif memantau, mengawasi, dan mengendalikan jalannya pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) telah memandatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan tak terkecuali, partisipatif[7]. Adanya berbagai mata yang turut mengamati jalannya pelayanan publik menjadi amat dibutuhkan mengingat masih hidup-makmurnya berbagai patologi dalam gerak birokrasi seperti inefisiensi, maladministrasi, dan korupsi yang tak hanya menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan, tetapi juga melemahkan kapasitas negara dalam melaksanakan tanggungjawabnya dihadapan masyarakat. Dalam hal ini, tanggungjawab negara atas penyelenggaraan pelayanan publik ditempatkan di atas prinsip kewargaan-demokratik, dimana negara menjamin pemenuhan kualitas substantif yang menjawab hak dan kebutuhan masyarakat, serta pemenuhan kualitas proses yang partisipatif dan terdesentralisir sebagai usaha menegakkan penghormatan atas prinsip kewargaan dan pemerintahan yang baik[8].

---

[6] Fahmi, Khairul. 2010. "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 (3): 148-153.

[7] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038).

[8] Jaweng, Robert Na Endi. 2020. "Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi", dalam Riris Katharina (ed), *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia (h. 2).

Oleh karenanya, berangkat dari koridor ideal di atas, makalah ini akan menganalisis lebih jauh terkait bentuk, strategi, tantangan, dan hambatan pengawasan partisipatif pelayanan publik sebagai bentuk artikulasi kedaulatan rakyat kiwari dengan merujuk pada tiga aspek kunci, yakni kapasitas masyarakat, kesiapan kelembagaan penyelenggara dan pengawas pelayanan publik, serta ekosistem dan budaya pelayanan publik. Mengambil lokus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang di masa lalu merupakan saksi sejarah dimana kedaulatan Republik Indonesia yang berusia balita dipertaruhkan dan diperjuangkan pada jam-jam pertama kemerdekaannya, dan kini menjelma menjadi salah satu daerah dengan capaian reformasi birokrasi terbaik di Indonesia, makalah ini juga akan meletakkan konsep dan praktik keistimewaan Yogyakarta sebagai kacamata analisis dalam melihat efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik serta peranan partisipatif masyarakat di dalamnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam makalah ini menggunakan metode kualitatif berjenis deskriptif, dengan maksud membuat telaah atas fenomena sosial tertentu secara sistematis dan faktual melalui studi kepustakaan (*desk research*) yang diperoleh dari berbagai penelitian dan publikasi, pemberitaan media massa cetak dan daring, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan tema terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi DIY pada umumnya dan pengawasan partisipatif pelayanan publik oleh masyarakat di Provinsi DIY pada khususnya.

III. PEMBAHASAN

3.1. Kerangka Ideal Penyelenggaraan Pelayanan Publik

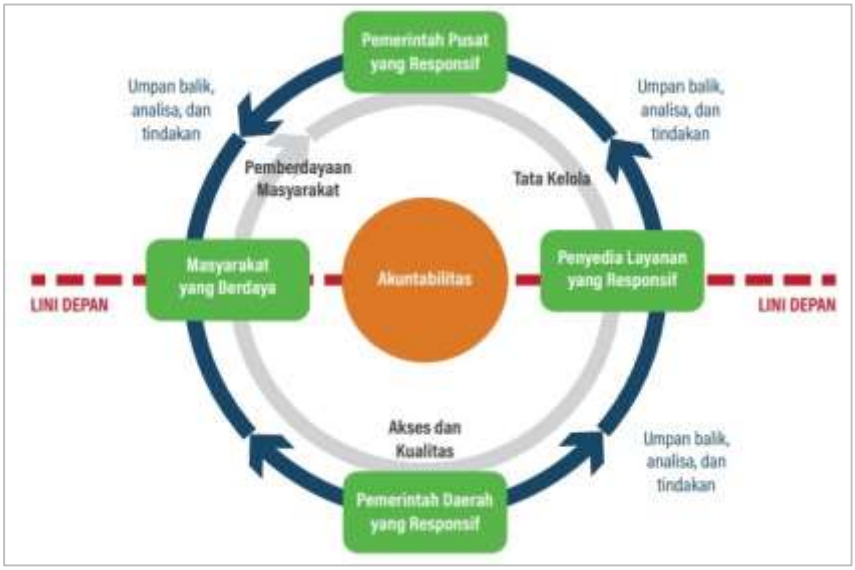
Sebagaimana terkandung pada namanya, pelayanan publik sejatinya berkutat tentang upaya penyelenggaraan pelayanan dan berbagai usaha peningkatan serta pengembangan kualitasnya yang terbaik untuk ‘publik’. Publik, yang dimaknai sebagai masyarakat penerima layanan tak lagi semata didudukkan sebagai pengguna (*customer*) melainkan sebagai warga negara (*citizen*) yang menyadari hak dan kewajibannya, mengembalikan semangat untuk ‘membawa publik kembali’ (*bringing the public back in*) ke dalam arena teoritik dan praktik administrasi publik[9].

[9] Kartasasmita, Pius Suratman. 2006. *“Bringing the Public Back In”: Revitalisasi Konsep Publik dalam Pemikiran dan Praktek Administrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu (h. 5).

Revitalisasi makna publik tersebut merupakan buah dari perjalanan panjang pergulatan paradigma administrasi publik, dari semula berpijak pada paradigma *Old Public Administration* yang mengasumsikan birokrasi pelayanan publik bekerja dalam logika kerja mesin yang dituntut untuk bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan, ditopang oleh organisasi hirarkis yang terstruktur, dengan formalisasi, instrumentalisasi, dan otoritas legal-rasional[10], kemudian bergerak ke arah paradigma *New Public Management* yang diwarnai dengan tegaknya prinsip-prinsip persaingan, kepemimpinan wirausaha, dan manajemen organisasi bisnis dalam cara kerja birokrasi yang sedikit-banyak memperkuat sentralisme pasar dalam penyelenggaraan urusan publik[11], dan terakhir ke arah paradigma *New Public Service* yang memandang bahwa reformasi pelayanan publik tak hanya berhenti pada upaya mencapai efisiensi dan efektivitas khas pasar, melainkan juga diarahkan pada usaha meraih inklusivitas, memperkuat pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman birokrat atas pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara ketimbang sebatas pelanggan[12].

Pada pemaknaan baru tersebut, penyelenggaraan pelayanan publik setidaknya memprasyaratkan tiga aktor kunci, yakni pertama, *pemerintah yang responsif*, lalu kedua, *penyedia layanan yang responsif*, dan ketiga, *masyarakat yang berdaya*, sebagaimana termuat pada Gambar 1. di bawah ini:

Gambar 1. Kerangka Ideal Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2017

[10] Purwanto, Erwan Agus., & Novianto, Arif. 2021. "Ilmu Administrasi Modern dan Kekuasaan: Dari Administrasi Negara ke Manajemen dan Kebijakan Publik", dalam Lele, Gabriel., & Kumorotomo, Wahyudi (eds), *Tinjauan Studi Manajemen dan Kebijakan Publik di Indonesia: Menegaskan Identitas dan Meneguhkan Relevansi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (h. 42).
[11] *Ibid* (h. 44-45).
[12] *Ibid* (h. 46).

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa penyedia layanan berada pada garis depan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tak hanya sekadar menerima, tetapi juga berdaya dalam memberikan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peran pemerintah—baik pusat maupun daerah—berada pada dua ranah, yakni pertama, melaksanakan manajemen kualitas (*quality management*) untuk memastikan terbinanya tata kelola serta responsivitas penyedia layanan secara berkelanjutan yang di antaranya berasal dari mekanisme umpan balik dari masyarakat, dan kedua, melakukan pemberdayaan masyarakat dengan membuka ruang deliberatif bagi mereka untuk turut serta dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.[13].

Dalam hal ini, akuntabilitas menjadi jantung penyelenggaraan pelayanan publik, yang menuntut tanggungjawab penyedia layanan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyediakan ruang bagi umpan balik baik berupa masukan, saran, maupun kritik dari pihak internal dan eksternal serta jaminan utilisasinya bagi perbaikan pelayanan ke depan, dan sisi lain membutuhkan suara (*voice*) dan peran masyarakat yang aktif dalam berbagai bentuk. Dikaitkan dengan konteks organisasional, akuntabilitas antara lain dijaga melalui kegiatan pelaporan (*reporting*) sebagai bagian dari fungsi manajemen yang dikenal lewat akronim POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting,* dan *Budgeting*)*,* dimana pelaporan setiap kejadian, lancar-tidaknya aktivitas, maupun maju-mundurnya kegiatan lewat laporan lisan atau tertulis, penelitian, dan kunjungan atau inspeksi lapangan berperan penting untuk mengetahui ada-tidaknya kesenjangan antara rencana yang telah digariskan dengan kondisi riil di lapangan, yang ditindaklanjuti melalui upaya perbaikan apabila terdapat penyimpangan[14]. Pada perjalanannya, pengawasan melalui mekanisme pelaporan tersebut berevolusi dari semata berbasis kuasa (*power-driven*) yang bersifat atas-ke-bawah (*bottom-up*) antara atasan dan bawahan, menjadi berbasis tujuan (*purpose-driven*) yang didasarkan pada kontraktual serta kinerja[15]. Dalam situasi tersebut, peran pengawasan tidak hanya dilakukan atasan langsung atau pihak internal saja, tetapi pihak eksternal pun dapat turut serta mengambil peranan khususnya pada organisasi sektor publik.

Maka, untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan tetap pada standar yang baik, pembudayaan kinerja unggul bagi penyedia layanan menjadi penting yang dilakukan pada tiga ranah, yakni pertama, komitmen terhadap kualitas pelayanan dengan mengembangan

---

[13] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. *Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan: Strategi Lini Depan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas (h. 2-4).

[14] Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media (h. 112).

[15] Berry, A. J., Coad, A. F., Harris, E. P., Otley, D. T., & Stringer, C. 2009. "Emerging Themes in Management Control: A Review of Recent Literature". *The British Accounting Review* Vol. 41(1): 15.

manajemen kualitas mulai dari perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas, lalu kedua, penghargaan terhadap kinerja sebagai langkah penting agar termotivasi untuk memberikan hasil terbaik melalui strategi "*pay for performance*", dan ketiga, perhatian terhadap penerima layanan melalui pengenalan terhadap kebutuhan penerima layanan yang bersifat unik, penanganan keluhan secara menyeluruh, dan perumusan indikator kinerja yang berorientasi pada kebutuhan mereka[16].

3.2. Potret Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi DIY

Seiring dengan ditetapkannya UU 25/2009 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, pemerintah daerah turut mengambil langkah tindaklanjut berupa penyusunan dasar hukum sebagai peraturan pelaksanaan atas UU di atas, tak terkecuali Pemerintah Provinsi DIY. Terdapat beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi DIY, yakni Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Perda 5/2014)[17], Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Pergub 4/2016)[18], dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rincian Jenis Pelayanan Publik (Pergub 7/2024)[19]. Di luar rezim pengaturan pelayanan publik, terdapat pula pengaturan lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan wajib dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yakni Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 (Pergub 57/2022)[20] dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Pergub 76/2023)[21].

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi DIY merinci jenis-jenis pelayanan publik yang diselenggarakan olehnya melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 154/KEP/2024 tentang Rincian Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah

---

[16] Wijayanti, Sri Wahyu. 2013. "Budaya Kinerja Lembaga Pelayanan Publik: Analisis Budaya Kinerja Kementerian dan LPNK di Indonesia", *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 9 (2): 126-127.
[17] Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5).
[18] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4).
[19] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rincian Jenis Pelayanan Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 7).
[20] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 58).
[21] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 76).

Daerah Istimewa Yogyakarta (Kepgub 154/2024), yang di dalamnya mengatur layanan pada 97 Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, yang terbagi atas pelayanan barang publik yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh masyarakat[22], lalu pelayanan jasa publik yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat[23], dan pelayanan administratif yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat[24]. Adapun sebagai contoh, beberapa jenis layanan yang diselenggarakan oleh para penyelenggara layanan yang dicuplik dari Lampiran Kepgub 154/2024 termuat pada Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh Rincian Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY

No	Penyelenggara Pelayanan	Nama Layanan	Jenis Pelayanan Publik
1	**Biro Hukum Setda Provinsi DIY**	1. Layanan Informasi Publik 2. Layanan Pengaduan 3. Pelayanan Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pembulatan Produk Hukum Daerah 4. Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah DIY 5. Pelayanan Penyelesaian Masalah Nonlitigasi dan HAM	1. Jasa Publik/Administratif 2. Jasa Publik/Administratif 3. Jasa Publik 4. Jasa Publik 5. Jasa Publik
2	**Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak, dan Diagnostik Kehewanan Provinsi DIY**	1. Layanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan 2. Layanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Layanan Penjualan Bibit Ternak	1. Jasa Publik 2. Jasa Publik 3. Barang Publik 4. Barang Publik 5. Jasa Publik 6. Jasa Publik

[22] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rincian Jenis Pelayanan Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 7).
[23] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rincian Jenis Pelayanan Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 7).
[24] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rincian Jenis Pelayanan Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakar1ta Tahun 2024 Nomor 7).

No	Penyelenggara Pelayanan	Nama Layanan	Jenis Pelayanan Publik
		4. Layanan Penjualan Semen Beku 5. Layanan Informasi 6. Layanan Pengaduan Keluhan	
3	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY**	1. Layanan Informasi Publik 2. Layanan Pengaduan 3. Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4. Perizinan Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan 5. Rekomendasi Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai	1. Jasa Publik/Administratif 2. Jasa Publik/Administratif 3. Administratif 4. Administratif 5. Administratif
4	**Rumah Sakit Grhasia**	1. Pelayanan Kegawatdaruratan 2. Pelayanan Pendaftaran 3. Pelayanan Rawat Jalan 4. Pelayanan Rawat Inap 5. Pelayanan Penanganan Korban NAPZA 6. Pelayanan Laboratorium 7. Pelayanan Radiologi 8. Pelayanan Farmasi 9. Pelayanan Rehabilitasi Medik 10. Pelayanan Diklatlitbang 11. Pelayanan Informasi Publik 12. Pelayanan Pengaduan	1. Jasa Publik 2. Jasa Publik 3. Jasa Publik 4. Jasa Publik 5. Jasa Publik 6. Jasa Publik 7. Jasa Publik 8. Jasa Publik 9. Jasa Publik 10. Jasa Publik 11. Jasa Publik/Administratif 12. Jasa Publik/Administratif
5	**Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta**	1. Layanan Informasi Publik 2. Layanan Pengaduan	1. Jasa Publik/Administratif

No	Penyelenggara Pelayanan	Nama Layanan	Jenis Pelayanan Publik
		3. Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru 4. Layanan Kesehatan 5. Layanan Ijin Penelitian dan Observasi	2. Jasa Publik/Administratif 3. Administratif 4. Jasa Publik 5. Jasa Publik

Sumber: Lampiran Kepgub 154/2024

Pada Tabel 1. di atas, dapat dilihat bahwa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan OPD di Pemerintah Provinsi DIY sangatlah beragam, mulai dari layanan yang bersifat internal bagi kalangan Pemerintah Provinsi DIY hingga pelayanan yang menyasar masyarakat luas, mulai dari pelayanan administratif yang jamak disediakan seperti layanan informasi publik dan layanan pengaduan, kemudian pelayanan jasa publik seperti layanan kesehatan dan layanan pendidikan, hingga pelayanan barang publik seperti layanan penjualan bibit ternak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan sesungguhnya merupakan inti dari kerja-kerja organisasi sektor publik, tanpa membedakan nomenklatur maupun urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

Selain itu, yang unik dari penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi DIY adalah meskipun bersifat inkremental—dalam artian hanya mengatur ulang muatan yang sudah diatur dalam UU 25/2009—Perda 5/2014 juga memuat aspek lokal (*local content*) terkait kode etik pelayanan publik yang berpedoman pada nilai dan kearifan lokal di bumi Yogyakarta, yakni "*hamemayu hayuning bawono*" yang meliputi "*rahayuning bawana kapurba waskithaning manungsa*" dan "*darmaning satriya mahanani rahayuning nagara*", yang dimaknai sebagai 'kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia serta lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi'[25], serta "*sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*", yang berarti 'konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggungjawab'[26]. Sebelumnya, nilai-nilai tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub 72/2008) yang mengakui bahwa kekhasan dan keluruhan budaya Jawa di atas perlu diinternalisasi oleh setiap aparatur di Provinsi DIY yang

[25] Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5).
[26] Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5).

salah satunya dilakukan melalui sikap SATRIYA sebagai singkatan dari *S*elaras, *A*kal budi luhur-jatidiri, *T*eladan-keteladanan, *R*ela melayani, *I*novatif, *Y*akin dan percaya diri, dan *A*hli-profesional[27]. Nilai dan sikap tersebutlah yang dibumikan dalam komitmen pelayanan, cara bersikap, dan bertingkah laku kepada masyarakat.

Masih dalam kerangka keistimewaan DIY, salah satu upaya khas yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di tingkat Desa maupun Kecamatan adalah melalui Reformasi Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan[28], yang mana hingga tahun 2023, terdapat 64 Kapanewon, 14 Kemantren[29], 46 Kelurahan, dan 392 Kalurahan[30] di Provinsi DIY. Banyaknya jumlah di atas berbanding lurus dengan beragam karakteristik, potensi, sekaligus permasalahan yang terdapat pada tiap-tiap wilayah tersebut, sehingga reformasi Kalurahan diarahkan pada dua upaya kunci, yakni pertama, reformasi birokrasi Kalurahan melalui pembenahan pada aspek tata kelola, keuangan, sumberdaya manusia, regulasi, dan budaya pelayanan agar tercipta tata pemerintahan Kalurahan yang lebih kapabel serts melayani[31], dan kedua, reformasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan melalui peningkatan pembinaan dan pendampingan teknis yang bekerjasama dengan OPD tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta akademia agar mampu mendorong kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan baik secara individu maupun dalam wadah lembaga kemasyarakatan[32]. Selain itu, upaya reformasi di atas juga menggarisbawahi penguatan peran Kapanewon sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus pembina langsung dari Kalurahan yang ada di bawahnya[33].

3.3. Anatomi Pengawasan Pelayanan Publik di Provinsi DIY

---

[27] Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73).
[28] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40).
[29] Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2024. "Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta", 17 Februari (https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/S3pkSVdHdG1iVU50TXlzdlNYY3pZVzFVV1haVlFUMDkjMw==/jumlah-kecamatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023), diakses 25 Januari 2025.
[30] Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2023. "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta", 17 Februari (https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023), diakses 25 Januari 2025.
[31] Pasal 10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40).
[32] Pasal 11 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40).
[33] Pasal 10 ayat (2) huruf m Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40).

Pengawasan sebagai aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik turut menjadi titik tekan yang diatur secara spesifik di dalam Perda 5/2014, yang mana pengawasan dapat dilakukan oleh pertama, *pengawas internal* yang merupakan atasan langsung dan pengawas fungsional[34]—dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdiri dari unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan unsur Inspektorat Pemerintah Daerah, dan kedua, *pengawas eksternal* yang merupakan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ombudsman, Badan Permusyawaran Desa, dan masyarakat[35]. Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan yang disampaikan secara langsung kepada penyelenggara layanan secara tatap muka ataupun tidak langsung lewat kanal pengaduan yang tersedia di setiap unit pelayanan publik dan melalui lembaga-lembaga pengawasan yang ada di atas[36].

Pada perkembangannya, kanal pengaduan merupakan hal yang wajib disediakan oleh para penyelenggara layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Permendagri 8/2023), yang di antaranya menetapkan bahwa pengaduan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui multikanal (*omnichannel*) seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang terselenggara secara nasional, surat, *website*, surat elektronik, faksimile, *call center*, SMS, media sosial, *whistle-blowing system*, dan aplikasi pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan LAPOR![37]. Dalam praktik di Provinsi DIY, selain keberadaan aplikasi LAPOR!, juga tersedia aplikasi digital e-Lapor DIY yang dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY.

Di luar yang diatur secara formil di atas, terdapat instansi dan mekanisme lainnya yang bergerak dalam memantau penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi DIY, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III[38]

---

[34] Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5).

[35] Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5).

[36] Pasal 39 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5).

[37] Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499).

[38] Direktorat Korsup Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi area kerja meliputi Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DIY, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Lihat Hukumonline. 2022. "Ini Capaian Kinerja KPK Bidang Koordinasi dan Supervisi Semester I 2022", 12 Agustus (https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-capaian-kinerja-kpk-bidang-koordinasi-dan-supervisi-semester-i-2022-lt62f580f26db5c/?page=2), diakses 25 Januari 2025.

yang di antaranya menyelenggarakan penilaian *Monitoring Center for Prevention* pada delapan area intervensi yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pelayanan publik, mencakup (i) perencanaan dan penganggaran APBD, (ii) pengadaan barang dan jasa, (iii) perizinan dan layanan publik, (iv) pengawasan APIP, (v) manajemen ASN, (vi) optimalisasi pajak daerah, (vii) pengelolaan barang milik daerah, dan (viii) tata kelola dana desa[39].

Penekanan pada peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya dalam melakukan pengawasan juga diatur tersendiri dalam Perda 5/2014, dimana aktualisasi peran masyarakat dilakukan melalui keikutsertaan dalam merumuskan standar pelayanan publik, pemberian saran dan/atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik ,dan pembentukan lembaga pengawasan pelayanan publik, di samping upaya-upaya lainnya seperti kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta pemberian penghargaan atau apresiasi kepada penyelenggara yang memberikan pelayanan berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan[40]. Jika dalam perjalanannya diketahui bahwa penyelenggara layanan tidak melaksanakan kewajibannya, maka terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyelenggara oleh pembina pelayanan publik, mencakup peringatan lisan dan tertulis, penundaan dan penurunan kenaikan pangkat, pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu, hingga pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat[41].

3.4. Tantangan Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik di Provinsi DIY

Secara formal-institusional, pengaturan dan tata lembaga yang tersedia telah secara ideal menggambarkan visi mengenai pengawasan pelayanan publik di Provinsi DIY, namun demikian, pada praktiknya masih ditemukan beberapa tantangan yang menunjukkan betapa tidak mudah mendorong pengawasan pelayanan publik yang partisipatif. Adapun beberapa tantangan tersebut disintesakan pada beberapa jabaran di bawah ini:

3.4.1. Derajat Partisipasi Masyarakat

[39] Pada penilaian MCP tahun 2023 yang dilakukan di wilayah Provinsi DIY, tercatat Pemerintah Provinsi DIY meraih nilai 92, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat nilai 92, dan Pemerintah Kabupaten Bantul mendapat nilai 94. Lihat InfoPublik. 2024. "KPK Pantau Sektor Perizinan di DIY: Nilai MCP Terjaga, Implementasi Harus Nyata", 5 November (https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/883418/index.html), diakses 25 Januari 2025.

[40] Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5).

[41] Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5).

Merujuk pada konsepsi Tangga Partisipasi Publik (*Ladder of Citizen Participation*) yang digagas Sherry Arnstein[42], partisipasi masyarakat dipandang sebagai akumulasi dari dinamika kuasa, daya tawar, dan negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam menentukan berjalannya suatu kegiatan maupun produk yang dikeluarkan pemerintah, yang terdiri atas derajat (i) Tidak Partisipatif (*Non-Participation*) mencakup (a) *Manipulation*, dan (b) *Therapy*, lalu (ii) Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) meliputi (a) *Informing*, (b) *Consultation*, dan (c) *Placation*, dan (iii) Kekuatan Masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*) mencakup (a) *Partnership*, (b) *Delegation*, dan (c) *Citizen Control*[43]. Arnstein memberikan catatan tebal bahwa kegiatan-kegiatan bertema partisipasi tanpa adanya redistribusi kuasa (*redistribution of power*) hanya pepesan kosong semata, tanpa menghasilkan keuntungan apapun bagi lapisan yang masyarakat paling lemah dan rentan selain sebatas perasaan dilibatkan dan diikutsertakan[44].

Berkaca pada konsepsi tersebut, sejauh mana partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik benar-benar melibatkan publik? Secara formal, selain mekanisme pengawasan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, juga tersedia mekanisme partisipasi berupa Forum Konsultasi Publik (FKP) dimana penyelenggara layanan membuka ruang bagi masyarakat dalam menyusun kebijakan dan standar pelayanan sekaligus mengevaluasi pelayanan yang terselenggara sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pediman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PermenPANRB 16/2017)[45]. Karena sifatnya yang wajib diselenggarakan[46], maka semua penyelenggara layanan melaksanakan FKP tak terkecuali yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Salah satu contoh dapat dilihat adalah kegiatan FKP tahun 2024 yang diselenggarakan Balai Perbenihan Kehutanan yang berada di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY[47], dengan rincian agenda kegiatan dan daftar hadir peserta pada Gambar 2. sebagai berikut:

---

[42] Arnstein, Sherry R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of American Institute of Planners* Vol. 35 (4): 216.
[43] *Ibid* (h. 217).
[44] *Ibid* (h. 216-217).
[45] Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765).
[46] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765).
[47] Balai Perbenihan Kehutanan DIY. 2024. "Laporan Forum Konsultasi Publik", 23 Februari (https://dlhk.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2024/08/LAPORAN-FKP-BBH-TAHUN-2024-_KIRIM-BIRO.pdf), diakses 26 Januari 2025.

Gambar 2. Agenda Kegiatan dan Daftar Hadir Peserta FKP BBH DIY Tahun 2024

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Narasumber	Penanggungjawab
1.	09.00 – 09.15	Registrasi peserta		Panitia
2.	09.15 – 09.30	Pembukaan Acara	Kepala BBH	Panitia
3.	09.15 – 09.30	Sambutan	Kepala DLHK	Moderator
4.	09.30 – 10.00	Paparan I Peningkatan Standar Pelayanan Pengaduan/Saran/Masukan dengan sistem online	Ka Sub Bag Tata Usaha BBH	Moderator
5.	10.00 – 10.30	Paparan II Peningkatan Standar Pelayanan Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan dengan sistem online	Ka Seksi Pengembangan Perbenihan BBH	Moderator
6.	10.30 – 11.00	Paparan III Peningkatan Standar Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih Tanaman Kehutanan dengan sistem online	Ka Seksi Sertifikasi Benih Tanaman Kehutanan BBH	Moderator
7.	11.00 – 11.30	Paparan IV Pengenalan Mekanisme dan Prosedur Layanan berbasis online	Staf BBH	Moderator
8.	11.30 – 12.30	Diskusi		Moderator
9.	12.30 – 13.00	Penyusunan dan Penandatanganan Berita Acara		Panitia
10	13.00 – 13.15	Penutupan	Kepala BBH	Panitia



Sumber: Balai Perbenihan Kehutanan DIY, 2024

Pada Gambar 2. di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan FKP terselenggara dalam waktu lebih kurang empat jam, dan dari waktu tersebut, mayoritas tersita oleh kegiatan pemaparan yang disampaikan oleh penyelenggara layanan, dengan menyisakan waktu hanya satu jam untuk kegiatan diskusi dengan 25 orang peserta, yang jika dicek kembali, hanya 15 orang peserta yang benar-benar berasal dari luar instansi Balai Perbenihan Kehutanan. Dalam hal ini, dorongan dan desakan kepada penyelenggara layanan untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sayangnya masih terjerembab dalam godaan prosedural untuk sekadar menggugurkan kewajiban, atau dalam bahasa yang digunakan Arnstein yakni sebatas '*window-dressing ritual*'[48]. Hadir dan diikutsertakannya masyarakat baru dilihat sebatas sebagai abstraksi statistik: Jumlah peserta yang hadir, dokumen yang dihasilkan, dan anggaran yang terserap.

3.4.2. Dinamika Tata Kelola Lembaga Pengawasan

Salah satu institusi penting yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik adalah ombudsman, yang dalam tradisi governansi di tataran Skandinavia merupakan lembaga independen yang menyelidiki pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan solusi alternatif di luar sistem yudisial yang ada[49]. Secara nasional, Indonesia turut mengadopsi kelembagaan serupa dengan nama

[48] *Arnstein*, 1969 (h. 219).
[49] Pambudi, Andi Setyo., & Hidayat, Rahmat. 2022. "Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional", *Bappenas Working Papers* Vol. V (2): 271.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37/2008), yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh para penyelenggara negara termasuk di antaranya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, hingga badan swasta atau perseirangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik[50]. Dalam upaya untuk menjangkau pengawasan hingga tingkat daerah, ORI mendirikan perwakilan di tingkat Provinsi, yang salah satunya berada di wilayah Provinsi DIY dengan nama ORI Perwakilan Provinsi DIY.

Namun, selain keberadaan ORI Perwakilan Provinsi DIY, saat ini juga terdapat Lembaga Ombudsman (LO) DIY yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DIY melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub 72/2022) dengan tugas yang persis sama, yakni mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha khususnya pada bidang pelayanan publik di wilayah Provinsi DIY, dengan cakupan Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan, dan badan usaha[51]. Jika ditilik sejarah, keberadaan LO DIY berakar dari pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) di DIY yang masing-masing dibentuk melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004 dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2004, yang mana dilakukan jauh sebelum adanya mandat pengaturan mengenai pembentukan perwakilan di tingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam UU 37/2008[52]. Menilik sejarah, ternyata DIY bukan satu-satunya daerah yang memiliki kelembagaan ombudsman pemerintah di luar ORI, ada pula Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan yang dibentuk pada tahun 2004 dan Ombudsman Kota Makassar yang dibentuk pada tahun 2007, meskipun hingga saat ini, hanya LO DIY dan Ombudsman Kota Makassar yang tetap eksis menjalankan fungsinya[53]. Ketiga lembaga ombudsman tersebut jugalah yang mengajukan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas UU 37/2008 khususnya terkait muatan Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang menggariskan eksklusivitas penggunaan istilah ‘ombudsman’ hanya pada ORI, yang mana pada

[50] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
[51] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 73).
[52] Abdullah, Muhammad. 2022. “Dualisme Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik (Ombudsman) di Yogyakarta”, Tesis pada Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tidak Diterbitkan (h. 5).
[53] *Ibid* (h. 4).

perkembangannya, MK memutuskan bahwa Pasal terseut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[54].

Maka, jejak sejarah yang menggariskan keberadaan dua kelembagaan dengan fokus tugas serupa dan di wilayah kerja yang sama tersebut dapat menimbulkan dua pandangan, yakni pertama, kedua lembaga ombudsman bahu-membahu dan saling melengkapi dalam menghimpun berbagai laporan masyarakat terkait praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, atau kedua, justru kedua lembaga ombusdman tersebut berjalan masing-masing, tanpa koordinasi dan komunikasi, yang berimplikasi pada kebingungan masyarakat atas eksistensinya. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2023, ORI Perwakilan Provinsi DIY menerima 190 laporan masyarakat dengan persentase 62,23 persen laporan diselesaikan[55], dan pada periode yang sama, LO DIY menerima 68 pengaduan masyarakat dengan produk akhir 105 dokumen, baik surat rekomendasi maupun laporan penyelesaian kasus[56], yang mana pengaduan atau laporan masyarakat pada kedua lembaga tersebut didominasi oleh isu terkait pendidikan seperti penerima peserta didik baru dan transparansi dana pendidikan. Oleh karenanya, kerja sama erat antarkedua lembaga tersebut menjadi penting untuk memperkuat daya dorong perubahan pelayanan publik ke arah yang lebih baik serta meningkatkan daya tawar keduanya, karena karakter kelembagaan ombudsman sebagai pemberi pengaruh (*magistrature of influence*) menjadikan temuan maupun rekomendasi yang dikeluarkan hanya mengikat secara moral, bahkan tidak wajib dipatuhi[57].

3.4.3. Respons Penyelenggara Layanan atas Aduan dan Temuan Masyarakat

Respons cepat, tepat, dan terukur dari penyelenggara layanan atas masukan, temuan, tanggapan, dan keluhan masyarakat atas penyelenggaan pelayanan publik merupakan prasyarat mutlak keberhasilan pelayanan publik, sehingga kecepatan, di samping visibilitas dan aksesibilitas menjadi aspek kunci penyelenggaraan manajemen pengaduan[58]. Dalam konteks DIY, keberadaan e-Lapor DIY sejak tahun 2018 telah menjadi pelengkap keberadaan LAPOR! yang terselenggara secara nasional, yang tersedia melalui website (www. lapor.jogjaprov.go.id)

---

[54] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-VIII/2010 (h. 83-84).
[55] Ombusdman Republik Indonesia. 2024. "Ombudsman DIY Terima 792 Pengaduan Sepanjang 2023", 2 Januari (https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--ombudsman-diy-terima-792-pengaduan-sepanjang-2023#:~:text=Total%20Ombudsman%20RI%20DIY%20melayani,memberikan%20informasi%20melalui%20tembusan%20surat.), diakses 26 Januari 2025.
[56] Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. 2023. "Laporan Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta", 29 Desember (https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan-kinerja-lembaga-ombudsman-daerah-istimewa-yogyakarta-lo-diyperiode-2021-2024/), diakses 26 Januari 2025.
[57] Kanisius, Ola Mangu. 2020. "Dua Dekade Ombudsman RI sebagai Magistrature of Influence", *Ombusdman Republik Indonesia*, 10 Maret (https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-sebagai-magistrature-of-influence), diakses 26 Januari 2025. D
[58] Mursalim, Sitti Widhiaretno. 2018. "Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Kota Bandung", *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. XV (1): 5.

dan sebagai submenu dalam aplikasi terpadu Jogja Istimewa. Sepanjang semester satu tahun 2024, terdapat 81 aduan masyarakat dengan rincian masalah infrastruktur 29 aduan, pelanggaran ketertiban 12 aduan, lampu merah dan penerangan jalan 8 aduan, kondisi jalan 4 aduan, dan lain-lain 9 aduan, dengan persentase respon sebesar 100 persen[59]. Dengan waktu respon oleh OPD paling lambat selama 2x24 jam[60], dapat dikatakan bahwa e-Lapor DIY telah secara cepat melakukan respon atas aduan dan temuan masyarakat.

Tetapi, respon cepat perlu diiringi dengan perbaikan nyata pada objek yang dikeluhkan guna menunjukkan itikad penyelenggara layanan bahwa aduan maupun temuan yang disampaikan membawa manfaat perbaikan bagi objek tersebut, selain juga sebagai bentuk pengakuan dan tanggungjawab dari penyelenggara layanan[61]. Dengan angka respon sempurna, justru akan muncul pertanyaan lanjutan, apakah respon yang diberikan hanya sekadar menjawab aduan atau tuntas hingga sumber masalah berhasil dientaskan. Dalam hal ini, tanpa adanya upaya tindak lanjut yang bersifat substansial, maka masyarakat akan merasa bahwa aduan dan temuan yang mereka sampaikan tidak berarti serta berdampak apapun bagi penyelenggaraan pelayanan publik, yang apabila ditelusuri lebih jauh, akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara layanan bahkan pemerintah secara keseluruhan[62].

Mengambil contoh manajemen pengaduan yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) pada 13 kanal pengaduan yang tersedia, integrasi antara proses penanganan aduan dan temuan masyarakat dengan capaian kinerja yang berpengaruh terhadap perhitungan besaran tunjangan kinerja daerah yang diberikan kepada pejabat dan pegawai pelayanan terkait[63] dinilai menjadi kunci keberhasilan kecepatan respon sekaligus perbaikan kualitas pelayanan yang dikeluhkan. Menggunakan logika dasar "*pay for performance*", para penyelenggara layanan akan berlomba menunjukkan kualitas pelayanan yang terbaik karena berpengaruh terhadap remunerasi yang diberikan.

---

[59] Lapor DIY (@lapordiy). (2024, 31 Agustus). "*Rekapitulasi Aduan e-Lapor DIY Semester 1 Tahun 2024*", Instagram. (https://www.instagram.com/p/C_VSymMSzw6/?img_index=1), diakses 28 Januari 2025.

[60] Wiki Pemda DIY. 2022. "SOP Pengelolaan Aduan Melalui E-Lapor DIY", 21 Januari (https://wiki.jogjaprov.go.id/en/diskominfo/SOP/InformasidanKomunikasiPublik/PengelolaanAduanMelaluiE-LaporDIY), diakses 28 Januari 2025.

[61] Widowati, Yumna Rizki., & Nugroho, Alih Aji. 2022. "Analisis Pelayanan Pengaduan melalui Sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) di Provinsi DKI Jakarta", *Prosiding Konferensi Nasional llmu Administrasi VI Politeknik STIA LAN Bandung*: 170.

[62] Dewi, Chiquita Puspa Annisa., & Purwaningtyas, Kartika. 2023. "Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Pengarustamaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Perangkat Daerah", *Ombudsman Republik Indonesia*, 30 November (https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--meningkatkan-kepercayaan-publik-melalui-pengarustamaan-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-di-perangkatdaerah), diakses 28 Januari 2025.

[63] Kahfi, Muhammad Raedyan. 2023. "Mengenal Lebih Dekat Cepat Respon Masyarakat", *Jakarta Smart City*, 20 Juni (https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/mengenal-lebih-dekat-cepat-respon-masyarakat/), diakses 28 Januari 2025.

IV. KESIMPULAN

Makalah ini menemukan bahwa secara formal-institusional, Pemerintah Provinsi DIY telah dilengkapi dengan pranata hukum dan kelembagaan yang mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pengawasan partisipatif pelayanan publik secara optimal, bahkan dalam beberapa hal, acapkali berada satu langkah di depan Pusat seperti pembentukan LO DIY yang melampaui zamannya kala itu, dan mengutilisasi khazanah nilai dan prinsip adiluhung sebagai bagian dari kerja pelayanan publik seperti internalisasi budaya SATRIYA. Namun, masih terdapat tantangan strategis yang penting untuk ditindaklanjuti, yakni *pertama*, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih rentan berada dalam ruang partisipasi semu ketimbang deliberatif, lalu *kedua*, beragamnya lembaga pengawasan pelayanan publik belum diikuti dengan sinergi substantif dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, dan *ketiga*, kecepatan respon penyelenggara layanan atas aduan dan temuan masyarakat rawan terjerat pada bentuk-bentuk prosedural alih-alih secara tuntas menyelesaikan sumber permasalahan.

Oleh karenanya, makalah ini memandang perlu adanya upaya akselerasi untuk mendorong, mengembangkan, dan membudayakan pengawasan partisipatif pelayanan publik sebagai usaha merevitalisasi makna kedaulatan rakyat, yang menyasar beberapa ranah, yakni *pertama*, penguatan komitmen politik melalui keberadaan kebijakan dan strategi implementasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelibatan masyarakat secara luas. *Kedua*, diversifikasi kanal-kanal pengaduan yang dapat dijangkau secara mudah oleh masyarakat, baik secara luring seperti pemanfaatan Kantor Kalurahan/Kelurahan, Kapanewon/Kemantren, Kantor Bupati/Walikota, hingga Kantor Gubernur, maupun secara daring lewat medium teknologi informasi dan komunikasi yang kini makin beragam. *Ketiga*, peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara layanan dan lembaga pengawasan, yang diiringi dengan mekanisme remunerasi yang mampu mengikat orientasi kerja mereka ke arah yang makin efektif serta berkualitas. *Keempat*, penguatan strategi pemantauan dan evaluasi lewat penyusunan peta jalan pengawasan partisipatif pelayanan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, dan Dokumen Lainnya

Abdullah, Muhammad. 2022. "Dualisme Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik (Ombudsman) di Yogyakarta", Tesis pada Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.

Arnstein, Sherry R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of American Institute of Planners* Vol. 35 (4): 216-224.

Berry, A. J., Coad, A. F., Harris, E. P., Otley, D. T., & Stringer, C. 2009. "Emerging Themes in Management Control: A Review of Recent Literature". *The British Accounting Review* Vol. 41(1): 2-20.

Fahmi, Khairul. 2010. "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 (3): 119-160.

Jaweng, Robert Na Endi. 2020. "Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi", dalam Riris Katharina (ed), *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kartasasmita, Pius Suratman. 2006. *"Bringing the Public Back In": Revitalisasi Konsep Publik dalam Pemikiran dan Praktek Administrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Keliat, Makmur., Aryanti, Agus Catur., Hikmah, Cuti Nury., Hanifah, Hana., & Yuniarini, Rizki. 2014. *Tanggungjawab Negara*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. *Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan: Strategi Lini Depan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Mursalim, Sitti Widhiaretno. 2018. "Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Kota Bandung", *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. XV (1): 1-17.

Pambudi, Andi Setyo., & Hidayat, Rahmat. 2022. "Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional", *Bappenas Working Papers* Vol. V (2): 270-289.

Purwanto, Erwan Agus., & Novianto, Arif. 2021. "Ilmu Administrasi Modern dan Kekuasaan: Dari Administrasi Negara ke Manajemen dan Kebijakan Publik", dalam Lele, Gabriel., & Kumorotomo, Wahyudi (eds), *Tinjauan Studi Manajemen dan Kebijakan Publik di Indonesia: Menegaskan Identitas dan Meneguhkan Relevansi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Widjajanto, Andi., Lay, Cornelis., & Keliat, Makmur. 2006. *Intelijen: Velox et exactus*. Jakarta: Pacivis.

Widowati, Yumna Rizki., & Nugroho, Alih Aji. 2022. "Analisis Pelayanan Pengaduan melalui Sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) di Provinsi DKI Jakarta", *Prosiding Konferensi Nasional llmu Administrasi VI Politeknik STIA LAN Bandung*: 169-174.

Wijayanti, Sri Wahyu. 2013. "Budaya Kinerja Lembaga Pelayanan Publik: Analisis Budaya Kinerja Kementerian dan LPNK di Indonesia", *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 9 (2): 118-136.

B. Website

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2023. "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta", 17 Februari (https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023), diakses 25 Januari 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2024. "Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta", 17 Februari (https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/S3pkSVdHdG1iVU50TXlzdlNYY3pZVzFVV1haVlFUMDkjMw==/jumlah-kecamatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023), diakses 25 Januari 2025.

Balai Perbenihan Kehutanan DIY. 2024. "Laporan Forum Konsultasi Publik", 23 Februari (https://dlhk.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2024/08/LAPORAN-FKP-BBH-TAHUN-2024-_KIRIM-BIRO.pdf), diakses 26 Januari 2025.

Dewi, Chiquita Puspa Annisa., & Purwaningtyas, Kartika. 2023. "Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Pengarustamaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Perangkat Daerah", *Ombudsman Republik Indonesia*, 30 November (https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--meningkatkan-kepercayaan-publik-melalui-pengarustamaan-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-di-perangkatdaerah), diakses 28 Januari 2025.

Hanif, Hasrul. 2012. "Dibawah Bayang-Bayang Kewargaan Pasar (Market Citizenship): Menegaskan Politik Inklusi, Mengabaikan Politik Redistribusi", makalah disampaikan dalam *Seminar Internasional ke-13 'Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal'* di Salatiga, 10-13 Juli (https://www.academia.edu/4503514/Dibawah_Bayang_Bayang_Kewargaan_Pasar_Market_Citizenship_), diakses 21 Januari 2025.

Hukumonline. 2022. "Ini Capaian Kinerja KPK Bidang Koordinasi dan Supervisi Semester I 2022", 12 Agustus (https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-capaian-kinerja-kpk-bidang-koordinasi-dan-supervisi-semester-i-2022-lt62f580f26db5c/?page=2), diakses 25 Januari 2025.

InfoPublik. 2024. “KPK Pantau Sektor Perizinan di DIY: Nilai MCP Terjaga, Implementasi Harus Nyata”, 5 November (https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/883418/index.html), diakses 25 Januari 2025.

Kanisius, Ola Mangu. 2020. “Dua Dekade Ombudsman RI sebagai Magistrature of Influence”, *Ombusdman Republik Indonesia*, 10 Maret (https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-sebagai-magistrature-of-influence), diakses 26 Januari 2025.

Lapor DIY (@lapordiy). (2024, 31 Agustus). “*Rekapitulasi Aduan e-Lapor DIY Semester 1 Tahun 2024*”, Instagram. https://www.instagram.com/p/C_VSymMSzw6/?img_index=1), diakses 28 Januari 2025.

Kahfi, Muhammad Raedyan. 2023. “Mengenal Lebih Dekat Cepat Respon Masyarakat”, *Jakarta Smart City*, 20 Juni (https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/mengenal-lebih-dekat-cepat-respon-masyarakat/), diakses 28 Januari 2025.

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. 2023. “Laporan Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta”, 29 Desember (https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan-kinerja-lembaga-ombudsman-daerah-istimewa-yogyakarta-lo-diyperiode-2021-2024/), diakses 26 Januari 2025.

Ombusdman Republik Indonesia. 2024. “Ombudsman DIY Terima 792 Pengaduan Sepanjang 2023”, 2 Januari (https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--ombudsman-diy-terima-792-pengaduan-sepanjang-2023#:~:text=Total%20Ombudsman%20RI%20DIY%20melayani,memberikan%20informasi%20melalui%20tembusan%20surat.), diakses 26 Januari 2025.

Wiki Pemda DIY. 2022. “SOP Pengelolaan Aduan Melalui E-Lapor DIY”, 21 Januari (https://wiki.jogjaprov.go.id/en/diskominfo/SOP/InformasidanKomunikasiPublik/PengelolaanAduanMelaluiE-LaporDIY), diakses 28 Januari 2025.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-VIII/2010.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 58).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 73).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 76).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rincian Jenis Pelayanan Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 7).

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 154/KEP/2024 tentang Rincian Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Biodata Penulis

Adif Rachmat Nugraha, S.I.P., menyelesaikan pendidikan sarjana pada Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2018. Selepas pendidikan, mengikuti magang singkat pada Kantor Staf Presiden, lalu bekerja sebagai Tenaga Ahli dan Konsultan pada Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sembari mendirikan serta mengembangkan Manggala Nusantara Stratejik, sebuah lembaga pengkajian kebijakan publik yang berfokus pada isu-isu seputar governansi sektor publik, reformasi sektor keamanan, dan urbanisme. Kerap menulis esai dan opini, yang dapat ditemukan pada media massa cetak serta daring antara lain Radar Cirebon, Fajar Cirebon, kompas.com, detiknews.com. kumparan.com, ayobandung.com, netralnews.com, birokratmenulis.org, dan lainnya.

Reorientasi Kedaulatan Multidimensional Melalui Sustainibility Development Goals yang Berbasis Kearifan Lokal

Ahmad Al Wajieh
kakangmas89@gmail.com

Abstrak
Reorientasi kedaulatan multidimensional menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengintegrasikan pendekatan politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang menekankan kedaulatan negara dengan nilai-nilai tradisional yang diwariskan masyarakat lokal. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan pembangunan, tetapi juga memperkuat identitas lokal sebagai fondasi utama keberlanjutan. Melalui analisis konseptual studi kepustakaan, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal mampu memberikan solusi atas tantangan global, seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan degradasi sosial-budaya. Implementasi nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, kemandirian ekonomi, dan harmoni lingkungan, menjadi jembatan antara kebijakan internasional dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kedaulatan multidimensional tidak hanya menjadi simbol kekuatan negara, tetapi juga alat transformasi menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip SDG's. Artikel ini mencoba menganalisis bahwa reorientasi berbasis kearifan lokal adalah pendekatan holistik yang menjawab kebutuhan lokal tanpa meninggalkan komitmen global, sehingga menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas.

Kata Kunci:
Kedaulatan multidimensional, SDG's, kearifan lokal, pembangunan keberlanjutan, pembangunan inklusif.

Pendahuluan

Ada tiga agenda besar yang menarik pada Muktamar Pengetahuan yang diselenggarakan PWNU Jawa Tengah pada 7 Desember 2023 kemarin. pertama, ketahanan pangan. kedua, pemberdayaan masyarakat. ketiga, geopolitik di Indonesia. Peneliti membaca bahwa NU bisa dibilang representasi dari komunitas akar rumput yang masih menggenggam kuat kearifan lokal. Sementara pokok pembahasannya adalah manifestasi kegelisahan global maupun nasional. Jika dirangkum, benang merahnya terletak pada ekonomi politik bangsa Indonesia hari ini (jateng.nu.or.id).

Berdasarkan data dari Global Food Security Index (GFSI), Indonesia berada dalam kondisi ketersediaan pangan yang mengalami peningkatan dari peringkat 58 dengan skor 58,2 pada tahun 2018 menjadi peringkat 48 dengan skor 61,3 pada tahun 2019. Produksi pertanian selama periode 2001 hingga 2021 tumbuh sebesar 54%, dengan total produksi mencapai 9,5 miliar ton pada tahun 2021 (Izraelov, 2019).

Di sisi lain, jika menengok angka kelaparan global pada tahun 2019, sekitar 690 juta orang di dunia mengalami kelaparan. Pemerintah Indonesia pada tahun 2024 memiliki inisiatif pangan nasional dengan meluncurkan program makan gratis yang diperkirakan senilai $28 miliar yang ditujukan untuk memberi makan 90 juta anak dan

wanita hamil guna memerangi malnutrisi sekaligus menekan angka kelaparan global (Simanjuntak, 2025).

Kebijakan tersebut memang bias populis. Landasan hukumnya antara lain: amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan, termasuk cadangan pangan nasional dan peran serta masyarakat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menetapkan kebijakan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan melindungi lahan pertanian pangan agar tidak dialihfungsikan, dengan jaminan ketersediaan lahan untuk produksi pangan secara berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat desa (peraturan.bpk.go.id).

Data dan regulasi di atas menunjukkan upaya Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan dan program, serta tantangan yang masih dihadapi baik di tingkat nasional maupun global. Meskipun demikian, masih terdapat sorotan tajam yang dapat disampaikan terhadap data maupun implementasi regulasi di atas.

Pertama, ketahanan pangan yang belum berakar pada kearifan lokal. Data Global Food Security Index (GFSI) menunjukkan peningkatan peringkat ketahanan pangan Indonesia, tetapi indikator yang digunakan masih berbasis standar global, seperti ketersediaan impor dan aksesibilitas pangan modern. Hal ini tentunya tidak merepresentasikan potensi kearifan lokal, seperti praktik pertanian tradisional yang berkelanjutan. Sebagai contoh Subak di Bali atau ladang berpindah masyarakat adat. Peningkatan ketahanan pangan berbasis teknologi dan impor memang menjawab kebutuhan dengan cepat, tetapi jika berlangsung lama dapat berpotensi mengikis kemampuan masyarakat lokal dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati dan budaya pangan tradisional, yang seharusnya menjadi modal utama dalam membangun kedaulatan pangan (Budiasa, 2010).

Kedua, ketergantungan rakyat pada solusi *top-down*. Program makanan gratis senilai kurang lebih $28 miliar menunjukkan komitmen besar pemerintah untuk memerangi malnutrisi, tetapi sayangnya pendekatan ini masih bersifat top-down dan kurang memberdayakan masyarakat lokal. Padahal, penguatan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal akan lebih berkelanjutan jika solusi berasal dari akar rumput, seperti mendukung pertanian organik lokal atau melibatkan komunitas adat dalam perencanaan program. Dengan kata lain, mengesampingkan solusi bottom-top (Nabila, 2023).

Ketiga, menindaklanjuti dua sorotan di atas terkait regulasi yang masih minim akan unsur kearifan lokal. Dalam hal ini implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi belum secara eksplisit menyebutkan pentingnya kearifan lokal sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Pemerintah Indonesia masih terlalu fokus pada stabilitas dan distribusi pangan skala besar yang cenderung

memanfaatkan pendekatan industrialisasi. Sama halnya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum memberikan perhatian khusus pada lahan-lahan tradisional yang dikelola masyarakat adat. Alih fungsi lahan masih menjadi ancaman besar bagi praktik pertanian berbasis adat setempat (Prasada, 2018).

Keempat, peneliti mengamati kurangnya integrasi antara agenda lokal dan SDGs. Data nasional dan global menunjukkan bahwa SDGs menjadi kerangka utama pembangunan. Namun, riset dan implementasi SDGs sering kali mengabaikan konteks lokal, baik dari segi budaya, keanekaragaman hayati, maupun cara pandang masyarakat adat terhadap pembangunan. Sebagai contoh, target SDGs terkait ketahanan pangan (Goal 2) atau pengelolaan ekosistem (Goal 15) lebih banyak mengacu pada indikator kuantitatif yang tidak kompatibel dengan praktik-praktik tradisional. Akibatnya, kontribusi masyarakat lokal sering kali tidak terukur atau justru diabaikan sama sekali (Sofianto, 2019).

Kelima, kesadaran global, tapi minim kemandirian lokal. Meski terdapat dorongan kuat untuk melaksanakan agenda global seperti SDGs, data menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada solusi-solusi global, seperti teknologi impor dan pendekatan modern yang kurang mendukung atau bahkan menggantikan kemampuan lokal. Ini menjadi pengingat bahwa visi pembangunan belum benar-benar berasal dari dalam dan belum memberdayakan potensi lokal secara optimal (Safarullah, 2021).

Kelima hal di atas menunjukkan bahwa visi maupun kebijakan pemerintah belum sepenuhnya tumbuh dari dalam. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal yang justru masih membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Kiranya inilah urgensi dari penyusunan artikel ini. Pertama pada aspek akademik, SDGs dan kearifan lokal perlu terus digali secara ilmiah. Peneliti melihat berbagai upaya serius yang mencoba mengaitkan SDGs dan kearifan lokal selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang perlu ditindaklanjuti (Hannan, 2018).

Kedua, pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang mendesak, terutama dalam menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan degradasi sosial-budaya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan global (Yu, 2020).

Dalam konteks ini, kedaulatan multidimensional—yang mencakup aspek politik, hukum, ekonomi, dan budaya—merupakan elan vital dalam mendukung pencapaian SDGs. Pendekatan ini menekankan pentingnya negara dalam mengelola sumber daya dan kebijakan secara mandiri, namun tetap beradaptasi dengan dinamika global. Namun, implementasi kedaulatan multidimensional sering kali menghadapi tantangan dalam menjembatani kebijakan global dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

Ketiga, kearifan lokal, yang mencakup nilai-nilai seperti spiritualitas, gotong royong, harmoni dengan alam, dan kemandirian ekonomi, sebenarnya memiliki potensi besar sebagai solusi strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan global dan kebutuhan lokal. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam

strategi pembangunan sebenarnya dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program pembangunan pemerintah.

Dalam menguraikan analisis, penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. peneliti menyajikan analisis dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu terkait kedaulatan multidimensional, SDGs, dan kearifan lokal. Pendekatan ini memberikan ruang yang lega untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap konsep-konsep tersebut dan relevansinya dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Darmalaksana, 2020).

Dengan demikian, penelitian ini dengan sendirinya bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kerangka kedaulatan multidimensional guna mendukung pencapaian SDGs. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menjembatani tradisi lokal dengan kebijakan internasional, sehingga menciptakan harmoni antara kebutuhan lokal dan komitmen global.

Pembahasan

Konsep Dasar Kedaulatan Multidimensional dan Pembangunan Berkelanjutan

Kedaulatan multidimensional dapat diartikan sebagai konsep yang menekankan kemampuan suatu negara untuk mengelola dan mengarahkan berbagai aspek kehidupannya secara mandiri, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kedaulatan ini menuntut integrasi yang harmonis antara berbagai dimensi tersebut untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat (Noveria, 2017).

Sementara pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berikut ini merupakan 17 poin utama yang menjadi tujuan besar dalam SDGs. Pertama, Tanpa Kemiskinan (No Poverty) bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun. Hal ini mencakup peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, dan jaminan sosial agar mereka dapat keluar dari siklus kemiskinan. Kedua, Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) bertujuan untuk menghapus kelaparan dengan memastikan akses pangan yang cukup, aman, dan bernutrisi untuk semua orang, terutama kelompok rentan, serta mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Ketiga, Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being) berfokus pada memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia, termasuk melalui pengurangan angka kematian bayi dan ibu serta pengendalian penyakit menular (Safitri, 2016).

Keempat, Pendidikan Berkualitas (Quality Education) menargetkan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua, termasuk kelompok yang terpinggirkan. Kelima, Kesetaraan Gender (Gender Equality) berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta memastikan partisipasi penuh mereka dalam pengambilan keputusan. Keenam, Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation) bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua,

termasuk pengurangan polusi air dan peningkatan efisiensi penggunaan air (Safitri, 2016).

Ketujuh, Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy) mendukung akses universal terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern, serta peningkatan porsi energi terbarukan. Kedelapan, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth) berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan layak untuk semua. Kesembilan, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure) mengembangkan infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi (Safitri, 2016).

Kesepuluh, Mengurangi Ketimpangan (Reduced Inequalities) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan peluang di dalam maupun antarnegara, termasuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua. Kesebelas, Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities) mendukung pengembangan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan infrastruktur dan perumahan yang layak. Kedua belas, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production) mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, termasuk pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang (Safitri, 2016).

Ketiga belas, Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action) berfokus pada pengambilan langkah-langkah mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, termasuk melalui adaptasi dan mitigasi risiko bencana. Keempat belas, Ekosistem Lautan (Life Below Water) bertujuan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut, termasuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan pengurangan polusi laut. Kelima belas, Ekosistem Daratan (Life on Land) mendukung pelestarian ekosistem darat, termasuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan, pencegahan desertifikasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati (Safitri, 2016).

Keenam belas, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice, and Strong Institutions) bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Ketujuh belas, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals) berfokus pada penguatan kemitraan global untuk mendukung pencapaian SDGs, termasuk melalui mobilisasi sumber daya, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas di negara berkembang (Safitri, 2016).

Integrasi kedaulatan multidimensional dengan pembangunan berkelanjutan menuntut pendekatan yang mempertimbangkan interaksi antara berbagai dimensi kehidupan. Misalnya, dalam konteks urbanisasi, pendekatan multidimensional diperlukan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dengan mempertimbangkan aspek populasi, penggunaan lahan, ekonomi, dan sosial. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan berkelanjutan menjadi krusial. Pendekatan kemitraan multipihak dapat meningkatkan efektivitas implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan terwakili dalam pengambilan keputusan. Namun, implementasi

kedaulatan multidimensional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan signifikan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan sebagian kecil populasi tetapi juga inklusif dan berkeadilan (Widiastuti, 2022).

Oleh karena itu, pemerintah tentunya dituntut mampu untuk mengembangkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan adaptif, yang mampu mengakomodasi dinamika global sekaligus mempertahankan kedaulatan nasional. Hal ini mencakup penguatan kapasitas institusional, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai tanpa mengorbankan kedaulatan dalam berbagai dimensi kehidupan.

B. Eksplorasi Kearifan Lokal

Ketika melihat 17 tujuan utama SDGs, keseluruhannya bisa dikatakan prinsip ideal. namun, penulis melihat absennya konsep spiritualitas dari sana - sesuatu yang khas dalam khasanah kearifan lokal. Pengertian spiritualitas tidak jarang bercampur baur dengan agama. Pada hakikatnya sama saja, yaitu sistem kepercayaan pada entitas tertinggi, apapun suatu komunitas memberi nama, untuk menjadi pedoman bersama (Faaz, 2021). Sejauh penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan, ada empat sumber yang bisa menjadi referensi konseptual dan peneliti anggap relevan dengan tujuan artikel ini.

Pertama, dari Hindu Bali terdapat konsep Tri Hita Karana: Harmoni Tiga Penyebab Kebahagiaan. Tri Hita Karana adalah filosofi hidup yang berasal dari ajaran Hindu di Bali. Secara harfiah, "Tri Hita Karana" berarti "tiga penyebab kebahagiaan." Konsep ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat tercapai ketika manusia mampu menjaga keharmonisan antara tiga elemen utama kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), hubungan manusia dengan sesama (Pawongan), dan hubungan manusia dengan lingkungan (Palemahan). Ketiga elemen ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, karena harmonisasi di antara mereka menciptakan keseimbangan yang menjadi dasar kehidupan yang sejahtera. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang setiap elemen tersebut (Pradana, 2021).

Parahyangan, yaitu menekankan pentingnya hubungan spiritual antara manusia dan Sang Pencipta. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan ini diwujudkan melalui ibadah, doa, upacara keagamaan, dan berbagai ritual yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat Bali. Sebagai contoh, upacara odalan di pura-pura atau persembahan canang sari setiap hari adalah bentuk nyata penghormatan kepada Tuhan. Melalui Parahyangan, manusia diingatkan untuk selalu bersyukur atas anugerah kehidupan dan menjaga keseimbangan rohani. Keyakinan ini juga menanamkan sikap rendah hati, penghormatan terhadap kekuatan ilahi, dan pengakuan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada kehendak Tuhan (Pradana, 2021).

Pawongan, yaitu berfokus pada keharmonisan hubungan antarmanusia dalam sebuah komunitas. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik, bekerja sama, saling membantu, dan menghormati satu sama lain. Dalam masyarakat Bali, hal ini terlihat dari kuatnya sistem gotong-royong, seperti dalam kegiatan subak

(sistem irigasi tradisional), kegiatan adat, atau saat melaksanakan upacara keagamaan bersama. Pawongan mengajarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bersama. Selain itu, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antarindividu atau kelompok menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan keharmonisan sosial (Pradana, 2021).

Palemahan mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam dan lingkungan. Dalam pandangan Tri Hita Karana, alam adalah bagian integral dari kehidupan manusia, sehingga manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Hal ini diwujudkan melalui pelestarian hutan, sungai, laut, dan lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan konsep "tumpek uduh," yaitu upacara penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan. Palemahan juga mengajarkan bahwa eksploitasi lingkungan secara berlebihan akan merusak keseimbangan alam, yang pada akhirnya membawa bencana bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, konsep ini mendorong pola hidup berkelanjutan yang menghormati alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan (Pradana, 2021).

Tri Hita Karana tidak hanya menjadi panduan hidup bagi masyarakat Bali, tetapi juga memiliki relevansi universal. Konsep ini mengajarkan bahwa keharmonisan antara spiritualitas, hubungan sosial, dan kelestarian alam adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dalam dunia modern, penerapan Tri Hita Karana juga dapat diterjemahkan ke dalam berbagai aspek, seperti menjaga integritas spiritual, memperkuat solidaritas sosial, dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan (Padet, 2020).

Kedua, kosmologi Jawa menurut pemikiran Ranggawarsita. Ranggawarsita, seorang pujangga besar dari Keraton Surakarta, adalah tokoh yang berperan penting dalam merumuskan berbagai pemikiran mengenai kosmologi Jawa. Dalam pandangannya, kosmologi Jawa merupakan cara pandang orang Jawa tentang alam semesta, kehidupan, dan keterhubungan antara manusia, alam, dan dimensi spiritual. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa kehidupan manusia adalah bagian dari tatanan semesta yang harmonis dan penuh keseimbangan (Sodikin, 2013)

Kosmologi Jawa yang dirumuskan oleh Ranggawarsita bertumpu pada hubungan tiga dimensi utama, yaitu makrokosmos (alam semesta besar), mikrokosmos (manusia sebagai alam semesta kecil), dan hubungan dengan kekuatan ilahi. Harmoni di antara ketiga elemen ini diyakini sebagai kunci utama untuk mencapai ketentraman batin dan kesejahteraan hidup. Dalam pandangan Ranggawarsita, alam semesta atau makrokosmos merupakan sebuah tatanan yang diciptakan oleh Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa) untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk. Alam semesta ini terdiri atas empat unsur utama, yaitu tanah, air, udara, dan api, yang saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan. Orang Jawa percaya bahwa alam semesta memiliki tata tertib (keseimbangan kosmis) yang harus dijaga, karena ketidakseimbangan akan membawa bencana (Sodikin, 2013).

Makrokosmos tidak hanya mencakup unsur-unsur fisik, tetapi juga dunia gaib yang dihuni oleh makhluk halus seperti roh nenek moyang dan makhluk supranatural. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Jawa meyakini bahwa hubungan harmonis dengan dunia gaib dapat mendatangkan berkah, sedangkan ketidakharmonisan dapat

membawa malapetaka. Oleh karena itu, berbagai ritual, seperti slametan dan sesaji, dilakukan sebagai tetenger (*penanda*) untuk menjaga keharmonisan ini (Sodikin, 2013).

Manusia, dalam kosmologi Jawa, dipandang sebagai mikrokosmos atau alam semesta kecil yang merupakan cerminan dari makrokosmos. Tubuh manusia terdiri dari unsur-unsur yang sama dengan alam, yaitu tanah (fisik tubuh), air (darah), udara (napas), dan api (semangat hidup). Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan dirinya agar selaras dengan alam semesta (Bakri, 2014).

Ranggawarsita menekankan bahwa manusia harus memahami dirinya sendiri melalui refleksi, meditasi, dan pengendalian hawa nafsu. Dalam ajaran kejawen, terdapat konsep "manunggaling kawula lan Gusti," yaitu penyatuan antara manusia dan Tuhan. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia tidak hanya berperan sebagai makhluk individual, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan ilahi yang lebih besar (Bakri, 2014).

Kosmologi Jawa menurut Ranggawarsita sangat menekankan pentingnya hubungan dengan Sang Hyang Widhi. Hubungan ini tidak hanya bersifat vertikal melalui doa dan ritual keagamaan, tetapi juga horizontal melalui tindakan menjaga hubungan baik dengan sesama dan alam. Tuhan dianggap sebagai pusat dari segala sesuatu, dan seluruh ciptaan-Nya merupakan manifestasi dari kehendak ilahi (Bakri, 2014).

Dalam pandangan ini, segala sesuatu di alam semesta memiliki "kawula" (pengabdian) kepada Tuhan. Manusia, sebagai bagian dari ciptaan-Nya, juga harus hidup dalam pengabdian dan menjalankan dharma (tugas hidup) sesuai dengan kodratnya. Dengan menjalankan kehidupan yang seimbang, manusia dapat mencapai "kasampurnan" atau kesempurnaan hidup, yaitu keadaan di mana jiwa manusia kembali kepada Sang Pencipta.

Ranggawarsita melihat kosmologi Jawa sebagai sistem kehidupan yang bertumpu pada harmoni. Ketika manusia mampu menjaga keseimbangan antara dirinya, alam, dan kekuatan ilahi, maka ia akan mencapai hidup yang tentram dan damai. Sebaliknya, ketidakharmonisan, baik dalam hubungan sosial, lingkungan, maupun spiritual, akan membawa ketidakseimbangan yang dapat memengaruhi seluruh tatanan kosmis (Bakri, 2014).

Kosmologi ini juga tercermin dalam ajaran "Kejawen," yang menekankan nilai-nilai seperti toleransi, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap alam. Prinsip ini menjadikan kosmologi Jawa relevan tidak hanya dalam konteks tradisional, tetapi juga dalam kehidupan modern, di mana tantangan global seperti kerusakan lingkungan dan krisis spiritual membutuhkan pendekatan harmoni ala kosmologi Jawa.

Ketiga, kosmologi Jawa dari Ki Ageng Suryomentaram, yang menekankan pada pemahaman diri dan keharmonisan hidup. Ki Ageng Suryomentaram, seorang filsuf dan pemikir Jawa terkenal dari era modern, mengembangkan pandangan mendalam tentang kosmologi Jawa yang berpusat pada pemahaman diri dan harmoni kehidupan. Pemikirannya menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari hubungan manusia dengan dunia luar, tetapi juga dari kesadaran mendalam tentang jati diri. Dalam kosmologi Ki Ageng Suryomentaram, kehidupan manusia dipahami

sebagai bagian dari tatanan besar semesta yang saling terkait, di mana keseimbangan batin menjadi kunci utama dalam mencapai harmoni (Marhamah, 2021).

Bagi Ki Ageng Suryomentaram, pusat dari kosmologi adalah manusia itu sendiri. Ia mengajarkan "Kawruh Jiwa" atau ilmu tentang jiwa, yang merupakan proses memahami diri manusia secara mendalam. Dalam pemahaman ini, jiwa manusia memiliki tiga lapisan utama yaitu: Rasa Senang: Perasaan yang muncul ketika keinginan terpenuhi. Rasa Susah: Perasaan yang muncul ketika harapan tidak tercapai. Rasa Sejati: Keadaan jiwa yang bebas dari keterikatan pada rasa senang dan susah, atau yang dikenal sebagai rasa "legawa" (ikhlas) dan sumeleh (berserah kepada Yang Maha Kuasa) (Marhamah, 2021).

Dalam konsep kosmologi ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki dualitas, yaitu raga (tubuh) dan jiwa (batin). Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menjaga harmoni. Raga memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makan, minum, dan tempat tinggal, sedangkan jiwa memerlukan ketenangan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan batin. Jika salah satu aspek ini diabaikan, maka manusia akan kehilangan keseimbangan dalam hidupnya.

Ki Ageng Suryomentaram juga mengajarkan bahwa penderitaan sering kali muncul karena manusia terlalu terikat pada keinginan duniawi. Oleh karena itu, pengendalian hawa nafsu dan penerimaan terhadap apa yang terjadi adalah cara untuk mencapai ketenangan batin. Dalam kosmologi Ki Ageng Suryomentaram, manusia tidak terpisah dari alam semesta. Manusia dipandang sebagai bagian kecil dari tatanan kosmis yang lebih besar. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang harmonis dengan alam adalah kewajiban setiap individu. Dalam ajaran ini, manusia harus menghormati alam, tidak merusaknya, dan memahami bahwa segala sesuatu di alam memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi (Marhamah, 2021).

Konsep ini sejalan dengan pandangan tradisional Jawa yang memandang alam sebagai cerminan jiwa manusia. Jika manusia mampu menjaga keseimbangan dalam dirinya, maka ia juga mampu menjaga keseimbangan di alam sekitarnya. Ki Ageng Suryomentaram menekankan pentingnya hubungan antarindividu yang didasarkan pada kemanusiaan universal. Dalam pandangannya, manusia seharusnya hidup dalam semangat kebersamaan dan saling menghormati, tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, atau status sosial. Ia juga mengkritik keserakahan, iri hati, dan permusuhan yang sering kali menjadi akar konflik antarindividu. Dalam kosmologi Ki Ageng Suryomentaram, kebahagiaan sejati hanya dapat tercapai jika manusia mampu hidup rukun dengan sesama dan menjalankan nilai-nilai kemanusiaan (Marhamah, 2021).

Inti dari kosmologi Jawa menurut Ki Ageng Suryomentaram adalah harmoni. Harmoni tidak hanya berarti ketenangan dalam hubungan manusia dengan alam dan sesama, tetapi juga ketenangan batin dalam diri manusia. Konsep "legawa" atau penerimaan dengan ikhlas menjadi inti dari pandangan ini. Ki Ageng Suryomentaram mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari pencapaian materi atau kekuasaan, melainkan dari pemahaman diri yang mendalam. Ketika manusia mampu menerima dirinya apa adanya, hidup tanpa rasa iri, dan menjaga keseimbangan antara raga, jiwa, dan lingkungannya, maka ia telah mencapai harmoni sejati.

Pandangan Ki Ageng Suryomentaram tentang kosmologi Jawa tetap relevan dalam kehidupan modern. Dalam dunia yang sering kali diwarnai oleh stres, kompetisi, dan kerusakan lingkungan, ajaran ini menawarkan panduan untuk hidup lebih damai, selaras, dan bermakna. Dengan menekankan pentingnya pemahaman diri, harmoni dengan alam, dan hubungan yang baik dengan sesama, kosmologi ini mengajarkan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan oleh siapa saja, di mana saja (Ngatawi, 2020)

Keempat, dari khasanah pesantren, peneliti menemukan satu kitab menarik berjudul *Fununus Sa'adah* (Filsafat Kebahagiaan Abadi) karya KH Abdullah Umar Fayumi. Kitab ini menjelaskan relasi tiga hal yang tertuang dalam lima prinsip besar. tidak sekedar dikaji, tapi mulai dilaksanakan sebagai *amaliyah* (kebiasaan) di beberapa *halaqah* (komunitas) di lingkar Pati dan sekitarnya mencakup berbagai bidang, misalnya melalui komunitas Tani Semesta (pertanian), Pesantren Karya dan Kampus Wirausaha Pati (ekonomi), Pesantren Laras Jagad (pendidikan), kelompok budaya Ki Ageng Qithmir (kebudayaan), Tafsir Saintifik (penelitian dan pengembangan), dan masih banyak lagi. Konsep yang juga disebut 5 Kesadaran Panca Triastika ini dijabarkan dalam *muqaddimah* (pendahuluan) sebagai berikut (Fayumi, 2023)

pertama kali yaitu kesadaran mengenal hakikat realitas, yakni menyadari adanya Tuhan, semesta, dan manusia. kedua merupakan makrifat, yaitu kesadaran akan harmoni, cinta, dan kebajikan dalam tiap penciptaan. ketiga merupakan tarekat, yaitu menyadari bahwa diri adalah hamba Tuhan, bagian dari keluarga besar semesta, dan merupakan duta ketuhanan di dunia. keempat syariat, yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu memiliki keberadaan, fungsi, dan manfaat. kelima kearifan yaitu kesadaran tertinggi untuk mampu memandang, berpikir, dan bersikap dengan nilai-nilai Ketuhanan (Fayumi, 2023)

Menurut KH Abdullah Umar Fayumi, terdapat 7 tingkatan ruang lingkup kesadaran spiritual. tingkatan pertama ruang lingkup personal, yaitu ketika seseorang mampu mengelola medan naluri atau biasa disebut nafsu. tingkatan kedua ruang lingkup interpersonal atau marital, yaitu melakukan penataan spiritual di dalam keluarga. tingkatan ketiga disebut sosial, yaitu penataan pada tingkat relasi antar keluarga di ruang lingkup lokal. tingkatan keempat lebih luas lagi yaitu penataan spiritual pada ruang lingkup antar lokal antar komunitas wilayah. tingkatan kelima pada ruang lingkup global, artinya penataan spiritual di level antar negara. tingkatan keenam merupakan universal, yaitu penataan spiritual yang tidak hanya memperhatikan kepentingan manusia, tetapi seluruh makhluk hidup. tingkatan ketujuh, penataan spiritual terkait dengan seluruh alam raya (Fayumi, 2023)

Selanjutnya, dalam kitab tersebut juga tersurat bahwa akar dari kesejahteraan, kemakmuran, dan kebermanfaatan semesta terletak pada keselarasan. Pencapaian spiritual tertinggi bukanlah kemampuan supernatural yang tidak bisa dijangkau nalar sehat. Namun, ketika seseorang mampu menjadi duta kerahmatan yang dapat menebarkan nilai keberkahan, kemanfaatan, dan kebaikan yang sebesar-besarnya kepada seluruh makhluk, sembari selaras dengan hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan.

C. Integrasi kearifan lokal dalam kerangka kedaulatan multidimensional

Tiga agenda Muktamar Pengetahuan sebenarnya bisa menjadi pintu masuk strategis untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). terlebih jika dilandasi kearifan lokal, yang mencakup pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketahanan Pangan: Menemukan Sinergi antara Modernitas dan Tradisi

Ketahanan pangan berbasis kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Banyak komunitas adat yang telah lama mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi. Studi yang dilakukan oleh Gan et al. (2017) dalam kajian indikator sustainability menunjukkan bahwa sistem pertanian tradisional berbasis komunitas memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan petani lokal dengan memperkuat akses terhadap sumber daya alam dan pasar. Integrasi sistem ini dalam kebijakan pangan nasional dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga hingga nasional.

Namun, modernisasi sektor pertanian sering kali mengabaikan potensi kearifan lokal dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Penerapan teknologi pertanian modern yang berorientasi pada produktivitas tinggi telah menyebabkan ketergantungan terhadap bahan kimia sintetis dan monokultur yang justru merusak kesuburan tanah serta mengancam keanekaragaman pangan. Menurut laporan UNDP (2021), praktik monokultur yang berlebihan telah meningkatkan risiko gagal panen akibat perubahan iklim, sehingga memperburuk ketidakstabilan pangan di banyak negara berkembang. Oleh karena itu, menemukan sinergi antara modernitas dan tradisi dalam sistem pangan menjadi suatu keharusan untuk mencapai keberlanjutan yang lebih luas.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk membangun sinergi ini adalah dengan memperkuat penelitian dan pengembangan sistem pertanian berbasis kearifan lokal. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kombinasi teknologi modern dengan metode tradisional dapat menghasilkan solusi inovatif yang lebih berkelanjutan. Misalnya, pemanfaatan teknologi sensor tanah untuk mendukung praktik pertanian organik berbasis komunitas telah terbukti meningkatkan produktivitas tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah jauh dilakukan oleh Martínez et al. (2012) dalam jurnal Agroecology and Sustainable Food Systems yang menegaskan bahwa pendekatan agroekologi berbasis teknologi mampu meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dalam distribusi pangan juga dapat menjadi solusi dalam memperkuat ketahanan pangan. Pasar lokal yang memberdayakan petani kecil dapat membantu memastikan harga yang adil serta mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global yang rentan terhadap gangguan. Sebagai contoh, sistem pasar tani yang berkembang di beberapa negara telah berhasil memperpendek rantai distribusi pangan, mengurangi jejak karbon, dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dalam konteks Indonesia, penguatan pasar tradisional dan skema koperasi berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung kedaulatan pangan nasional (Aliyah, 2017).

Di sisi lain, kebijakan pangan nasional perlu lebih fleksibel dalam mengakomodasi praktik pertanian lokal. Banyak kebijakan yang masih berorientasi pada pertanian industri skala besar tanpa mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat adat. Dengan memberikan insentif bagi petani yang menerapkan praktik berkelanjutan, pemerintah dapat mendorong transisi menuju sistem pangan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Patel et al. (2015) dalam kajian seputar Agricultural Policy, yang menegaskan bahwa kebijakan inklusif yang menghargai praktik pertanian tradisional mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional secara signifikan.

Secara keseluruhan, ketahanan pangan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan teknologi modern atau sistem pertanian industri semata. Integrasi antara inovasi teknologi dan praktik pertanian berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, Indonesia dapat membangun sistem pangan yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dalam SDGs.

Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Bottom-Up untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan bottom-up menjadi strategi yang semakin diakui dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi bersifat top-down yang hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat, tetapi lebih adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di tingkat komunitas. Penelitian yang dilakukan oleh Brown et al. (2015) yang mengkaji Sustainable Development menunjukkan bahwa pembangunan berbasis komunitas mampu meningkatkan efektivitas program pemerintah hingga 50% dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat terpusat. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa kepemilikan dan keterlibatan langsung masyarakat dalam merancang serta melaksanakan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Salah satu aspek utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kapasitas ekonomi melalui penguatan usaha berbasis komunitas. Banyak daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan, seperti industri rumah tangga, pertanian organik, dan ekowisata berbasis masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Lee et al. (2012) dalam ruang lingkup studi tentang Community Economic Development Review menunjukkan bahwa model koperasi yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga hingga 30% dalam lima tahun pertama operasionalnya. Di beberapa desa di Jawa Tengah, koperasi petani berbasis agroekologi telah membuktikan bahwa sistem ekonomi lokal yang berorientasi pada keberlanjutan dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain aspek ekonomi, pemberdayaan masyarakat juga mencakup penguatan pendidikan berbasis lokal. Pendidikan yang berakar pada budaya dan kearifan lokal mampu membangun identitas serta meningkatkan relevansi kurikulum dengan

kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal. Sebuah penelitian oleh Gonzalez et al. (2013) dalam kajiannya seputar Educational Studies in Sustainability menemukan bahwa pendidikan berbasis komunitas yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal mampu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah hingga 25% di daerah pedesaan. Di beberapa daerah di Kalimantan, program sekolah adat yang mengajarkan keterampilan berbasis ekosistem hutan terbukti mampu meningkatkan literasi dan keterampilan hidup generasi muda tanpa mengabaikan warisan budaya leluhur mereka.

Namun, meskipun pemberdayaan masyarakat memiliki banyak manfaat, tantangan utama dalam implementasinya adalah kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Regulasi yang lebih berpihak pada korporasi besar sering kali menghambat akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan ekonomi. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Patel et al. (2015) dalam Journal of Public Policy and Governance menunjukkan bahwa hanya 30% dari kebijakan pembangunan di negara berkembang yang memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Padahal, keterlibatan aktif komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terbukti mampu meningkatkan keberlanjutan program pembangunan jangka panjang.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, perlu ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merancang program pembangunan yang lebih inklusif. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan dialog antara berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi langkah efektif untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana desa untuk mendukung inisiatif berbasis komunitas, sehingga masyarakat memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya mereka secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan bottom-up bukan hanya tentang memberikan akses ekonomi atau pendidikan, tetapi juga tentang membangun sistem sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memberikan ruang lebih besar bagi komunitas untuk menentukan arah pembangunan mereka sendiri, akan tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya serta lingkungan. Keberhasilan pendekatan ini dapat menjadi model bagi pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif, di mana setiap individu dan komunitas berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik.

Geopolitik: Kedaulatan Nasional dalam Konteks Global

Dalam dinamika geopolitik modern, kedaulatan nasional bukan hanya mengenai kontrol teritorial, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara menavigasi kompleksitas hubungan global dengan tetap mempertahankan identitas dan kepentingan nasionalnya. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, memiliki potensi besar untuk menggunakan kearifan lokal sebagai instrumen dalam diplomasi global. Dengan menonjolkan budaya lokal dalam interaksi internasional, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya dalam arena global tetapi juga memastikan bahwa implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

tetap relevan dengan realitas domestik. Konsep ini sejalan dengan temuan Lee & Chang (2013) dalam studinya yang menunjukkan bahwa negara berkembang yang mengedepankan budaya lokal dalam diplomasi global cenderung mendapatkan legitimasi lebih besar dalam negosiasi internasional.

Salah satu aspek utama dalam diplomasi berbasis kearifan lokal adalah penerapan prinsip musyawarah mufakat dalam resolusi konflik dan diplomasi regional. Sebagai negara yang sering menjadi mediator dalam sengketa kawasan, Indonesia dapat menawarkan pendekatan deliberatif yang berakar pada nilai-nilai lokal sebagai alternatif bagi diplomasi konvensional yang sering kali bersifat koersif. Studi oleh Rodriguez et al. (2012) dalam Global Policy Journal mengungkapkan bahwa model penyelesaian konflik berbasis komunitas memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan berbasis tekanan politik atau ekonomi. Dengan mengadaptasi tradisi musyawarah dalam forum diplomasi ASEAN dan organisasi multilateral lainnya, Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai pemimpin regional dalam membangun stabilitas dan kerja sama internasional.

Selain itu, kedaulatan nasional dalam konteks global juga berkaitan dengan bagaimana Indonesia mengelola sumber daya alamnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan eksploitasi ekonomi global. Model pengelolaan sumber daya berbasis komunitas adat dapat menjadi solusi inovatif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Patel et al. (2015) dalam Journal of Environmental Policy, yang menyoroti bahwa kebijakan berbasis komunitas dalam konservasi hutan telah terbukti lebih efektif dalam mengurangi deforestasi dibandingkan pendekatan berbasis regulasi yang bersifat sentralistik. Oleh karena itu, integrasi sistem pengelolaan sumber daya berbasis adat ke dalam kebijakan nasional dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional terkait perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.

Namun, meskipun potensi kearifan lokal sebagai alat diplomasi sangat besar, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menyelaraskan standar global dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam banyak kasus, implementasi SDGs di Indonesia masih terlalu bergantung pada standar internasional yang tidak selalu sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi di tingkat lokal. Misalnya, kebijakan pembangunan hijau yang dipromosikan oleh organisasi internasional sering kali mengabaikan realitas ekonomi masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan lahan pertanian tradisional. Menurut penelitian oleh Nakamura et al. (2013) dalam Sustainability Science, banyak inisiatif pembangunan berkelanjutan di negara berkembang gagal mencapai tujuan mereka karena tidak mempertimbangkan dimensi budaya dan sosial yang melekat dalam masyarakat lokal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan adaptif yang memungkinkan integrasi antara standar global dan praktik lokal. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah model diplomasi inklusif yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga komunitas adat dan aktor non-negara dalam proses perumusan kebijakan luar negeri dan strategi pembangunan. Misalnya, dengan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat adat dalam forum internasional seperti UNFCCC (Konferensi Perubahan Iklim PBB), Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang memperjuangkan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Studi oleh Harris & Wong (2012) dalam kajiannya di International Studies Quarterly menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi pendekatan diplomasi inklusif memiliki daya tawar lebih besar dalam negosiasi global karena dianggap lebih representatif terhadap keberagaman kepentingan domestik mereka.

Secara keseluruhan, geopolitik dalam konteks kedaulatan nasional menuntut strategi yang tidak hanya defensif, tetapi juga proaktif dalam membangun pengaruh di panggung internasional. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai bagian integral dari diplomasi dan kebijakan luar negeri, Indonesia dapat memperkuat kedaulatannya di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Pendekatan ini tidak hanya mendukung implementasi SDGs secara lebih kontekstual, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap berpihak pada kepentingan nasional dan keberlanjutan jangka panjang.

Strategi Integrasi Kearifan Lokal dan SDGs: Jalan Menuju Kedaulatan Multidimensional

Strategi integrasi kearifan lokal dalam implementasi SDGs merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengikuti standar global, tetapi juga selaras dengan kebutuhan dan realitas lokal. Meskipun SDGs telah menjadi kerangka utama pembangunan global, pelaksanaannya di berbagai negara sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan indikator yang bersifat kuantitatif dengan nilai-nilai lokal yang lebih menekankan keseimbangan ekologis dan sosial. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada angka dan target jangka pendek cenderung mengabaikan proses panjang yang telah berlangsung dalam masyarakat tradisional, di mana keberlanjutan dipraktikkan secara alami melalui mekanisme budaya dan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks ini, penelitian Carter et al. (2022) dalam Sustainability Science menunjukkan bahwa pendekatan berbasis proyek dalam implementasi SDGs sering kali gagal melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan sistem pengetahuan tradisional, yang sebenarnya memiliki kontribusi besar dalam keberlanjutan lingkungan dan sosial. Contohnya adalah pengelolaan hutan adat di Kalimantan, yang telah terbukti efektif dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan mengurangi deforestasi. Meskipun praktik ini mendukung pencapaian Tujuan 15 (Ekosistem Daratan) dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), pendekatan pembangunan modern masih sering mengabaikan model konservasi berbasis komunitas ini. Laporan Mongabay Indonesia (2023) mengonfirmasi bahwa masyarakat adat di Kalimantan berhasil menjaga hutan mereka dari ancaman deforestasi melalui mekanisme tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Keberhasilan ini menegaskan bahwa kearifan lokal harus diakui sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai reorientasi kedaulatan multidimensional yang berbasis kearifan lokal, diperlukan strategi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs dengan nilai-nilai dan praktik yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Salah satu strategi utama adalah redefinisi indikator pembangunan agar lebih inklusif dan adaptif terhadap tradisi lokal. Saat ini, banyak indikator pembangunan yang hanya mengukur aspek

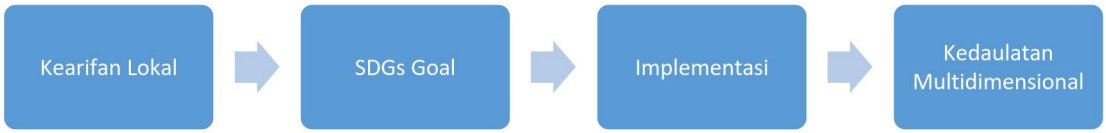
ekonomi dan infrastruktur, sementara aspek sosial, budaya, dan ekologi yang dijalankan oleh komunitas lokal sering diabaikan. Kumar et al. (2023) dalam Agricultural Systems menyarankan pendekatan berbasis wilayah dalam mengukur keberlanjutan pangan, di mana keanekaragaman hayati pangan dan keberlanjutan lahan adat dijadikan indikator utama dalam menilai ketahanan pangan suatu daerah. Pendekatan ini dapat diterapkan lebih luas untuk berbagai sektor pembangunan lainnya agar lebih mencerminkan realitas lokal.

Selain redefinisi indikator, penguatan regulasi berbasis lokalitas juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar mengakomodasi hak-hak masyarakat adat. Regulasi nasional yang ada sering kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, banyak komunitas adat yang kehilangan hak atas tanah dan sumber daya mereka karena adanya kebijakan yang lebih mendukung industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam berskala besar. Dengan merevisi regulasi agar lebih menghormati dan mengakomodasi praktik pengelolaan berbasis komunitas, Indonesia dapat memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekologi.

Kolaborasi antara aktor nasional dan global juga menjadi bagian penting dalam strategi integrasi ini. Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai aset diplomasi dalam kerangka SDGs untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan menunjukkan bahwa model pembangunan berbasis komunitas dapat menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan konvensional yang eksploitatif, Indonesia dapat mendorong kemitraan global yang lebih adil dan inklusif. Studi oleh Tan et al. (2023) dalam World Development menyoroti bahwa pelibatan komunitas adat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan secara signifikan. Pendekatan ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan global mengenai perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan strategi ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh dalam implementasi SDGs yang berbasis lokal, sekaligus menjawab tantangan pembangunan global. Pendekatan yang mengutamakan keterlibatan komunitas, penyesuaian kebijakan, serta integrasi nilai-nilai tradisional dengan standar internasional akan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi wacana global, tetapi juga realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jika dituangkan ke dalam mind mapping, maka seluruh temuan penelitian ini digambarkan melalui skema berikut.



Gambar 1. Kedaulatan Multidimensional dengan Bottom to Top

Penutup: Tantangan dan Peluang Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kedaulatan multidimensional berbasis kearifan lokal dapat dipahami sebagai pendekatan strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan lokal tetapi juga berkontribusi pada komitmen global. Implementasi nilai-nilai lokal mampu menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas, sehingga menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, pemerintah dan pemangku kebijakan perlu lebih aktif dalam mengintegrasikan nilai lokal ke dalam kebijakan pembangunan. Regulasi yang berpihak pada komunitas adat, pendidikan berbasis lokal, dan promosi budaya dalam diplomasi global adalah langkah konkret yang harus segera diambil. Selain itu, pentingnya kerja sama antara komunitas lokal dan lembaga internasional perlu terus ditekankan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Meskipun integrasi kearifan lokal dalam SDGs memiliki potensi besar, peluang dan tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis lokal. Selain itu, tekanan ekonomi global sering kali mendorong industrialisasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan.

Namun, peluang juga terbuka lebar. Liu et al. (2023) dalam Environmental Policy and Governance menyebutkan bahwa meningkatnya kesadaran global terhadap praktik berbasis lokal memberikan ruang lebih besar bagi negara berkembang untuk menunjukkan inovasi berbasis kearifan lokal. Misalnya, diplomasi lingkungan berbasis komunitas adat dapat menjadi aset penting dalam negosiasi global terkait perubahan iklim.

Berita dari UN News (2023) menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam diplomasi lingkungan berbasis komunitas adat. Dengan memanfaatkan peluang ini, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam implementasi SDGs yang berbasis kearifan lokal, sekaligus menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Reorientasi kedaulatan multidimensional berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk menjembatani kebutuhan lokal dengan komitmen global dalam

mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai tradisional, seperti gotong royong, harmoni lingkungan, dan kemandirian ekonomi, ke dalam kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui metode studi kepustakaan, artikel ini telah menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya memperkuat identitas budaya dan sosial masyarakat, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan degradasi sosial-budaya. Dalam kerangka kedaulatan multidimensional, nilai-nilai lokal menjadi fondasi yang memperkuat partisipasi komunitas dan memastikan relevansi kebijakan pembangunan terhadap konteks lokal.

Namun, untuk mengoptimalkan kontribusi kearifan lokal, diperlukan pengakuan formal, perlindungan hak masyarakat adat, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Selain itu, penting bagi pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mendorong sinergi antara tradisi lokal dan inovasi modern dalam berbagai sektor pembangunan.

Dengan demikian, reorientasi ini tidak hanya menjadi alat untuk mencapai SDGs, tetapi juga membangun harmoni antara tradisi dan modernitas. Hal ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs. Rekomendasi lain yang tidak kalah penting adalah perlunya penelitian lebih lanjut terkait dampak jangka panjang integrasi nilai lokal dalam pembangunan global. Dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam pencapaian 17 tujuan SDGs secara komprehensif, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan seiring untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Baumann, F. (2021). The next frontier—human development and the anthropocene: UNDP human development report 2020. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 63(3), 34-40.

Ajie Najmuddin. 2024. "Lakpesdam PWNU Jateng Gelar Muktamar Pengetahuan Ke-2 Di Surakarta." 2024. https://jateng.nu.or.id/nasional/lakpesdam-pwnu-jateng-gelar-muktamar-ilmu-pengetahuan-ke-2-di-surakarta-zm0cL.

Aliyah, Istijabatul. n.d. "STRATEGI PENGUATAN PERAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PRODUK BUDAYA DI KOTA SURAKARTA."

Berkelanjutan Melalui, Yang, and Abd Hannan Magister Sosiologi. n.d. "STRATEGI PENGUATAN PEMBANGUNAN MADURA PEMBERDAYAAN NILAI KEARIFAN LOKAL."

Gan, Xiaoyu, Ignacio C. Fernandez, Jie Guo, Maxwell Wilson, Yuanyuan Zhao, Bingbing Zhou, and Jianguo Wu. 2017. "When to Use What: Methods for Weighting and Aggregating Sustainability Indicators." Ecological Indicators. Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.05.068.

Greenwald, Noah. 2015. "We Must Save All We Can." BioScience 65 (10): 1025–27. https://doi.org/10.1093/biosci/biv115.

Izraelov, Meital, and Jacques Silber. 2019. "An Assessment of the Global Food Security Index." Food Security 11 (5): 1135–52. https://doi.org/10.1007/s12571-019-00941-y.

Lee, Youngmi, and Richard C Feiock. 2011. "A Micro-Level Analysis of Regional Economic Development Collaboration Networks 253 In-Won Lee Dankook University." Public Administration Review 72 (2): 253–62. https://doi.org/10.111/j.1540-6210.2011.02501.x.

M Noveria. 2017. Kedaulatan Indonesia Di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi.

Marhamah. 2021. Indigenous Konseling: Pemikiran Ki Ageng Suryomentaram Dalam Kawruh Jiwa.

Panuluh Meila Riskia Fitri, Sekar. 2015. "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia." www.infid.org.

Patel, Kirit, Hom Gartaula, Derek Johnson, and M. Karthikeyan. 2015. "The Interplay between Household Food Security and Wellbeing among Small-Scale Farmers in the Context of Rapid Agrarian Change in India." Agriculture and Food Security 4 (1). https://doi.org/10.1186/s40066-015-0036-2.

Pendidikan Sejarah, Jurusan, and Fakultas Ilmu Sosial. 2013. "SINKRETISME JAWA-ISLAM DALAM SERAT WIRID HIDAYAT JATI DAN PENGARUHNYA

TERHADAP AJARAN TASAWUF DI JAWA ABAD KE-19 Mokhamad Sodikin Sumarno.” Journal Pendidikan Sejarah. Vol. 1.

“PERAN GANDA SUBAK UNTUK PERTANIAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI BALI (The Double Roles of Subak For Sustainable Agriculture in Bali Province).” n.d.

Persetujuan Bersama, Dengan. n.d. “DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.”

Rosset, Peter M., and Maria Elena Martínez-Torres. 2012. “Rural Social Movements and Agroecology: Context, Theory, and Process.” Ecology and Society 17 (3). https://doi.org/10.5751/ES-05000-170317.

Sofianto Badan Perencanaan Pembangunan, Arif, and Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. n.d. “Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah-Arif Sofianto INTEGRASI TARGET DAN INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH INTEGRATION OF SDGs TARGET AND INDICATORS INTO REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING IN CENTRAL JAVA.”

Sosial, Jurnal, and Ekonomi Pertanian. 2018. “The Impact Of Wetland Conversion On Food Security In Daerah Istimewa Yogyakarta.” Vol. 14.

Surya Dua Artha Simanjuntak. 2025. “Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun Di Tengah Penghematan Belanja ASN.” 2025.

Thifal Nabila, Fairuz, D Ghulam, and Laila Kholid. n.d. “POLITIK INOVASI DAERAH: PENDEKATAN TOP DOWN DAN KETIDAKBERLANJUTAN PROGRAM (Studi Penelitian Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data Dan Informasi) Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung).”

Widiastuti, Wida, Achmad Fauzi, Bagus Firmansyah, and Novia Permatasari. n.d. “Penyusunan Derajat Urbanisasi Untuk Perhitungan Indikator Suistainable Development Goals Studi Kasus: Kepulauan Nusa Tenggara (Degree of Urbanization Development for Calculating Indicator of Suistainable Development Goals-Case Study: Nusa Tenggara Island).”

Curriculum Vitae Ahmad Al Wajieh

Nama : Ahmad Al Wajieh
Telepon : +62 85608152129
Email : kakangmas89@gmail.com
Alamat : PP Kulon Banon RT 02 RW 02, Kajen, Margoyoso, Pati 59154

Riwayat Pekerjaan

Wakil Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan
Pondok Pesantren Kulon Banon
2016 – Sekarang
Mengawasi administrasi dan operasional keuangan, memastikan manajemen yang efisien di dalam lembaga.

Ketua dan Dosen Tetap
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya
2017 – 2021
Memimpin inisiatif akademik dan mengajar berbagai mata kuliah, dengan penekanan pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Sekretaris
Yayasan Pendidikan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya
2019 – 2024
Mendukung tata kelola organisasi dan program pendidikan di bawah yayasan.

Ketua
Yayasan Wakaf Pondok Kulon Banon
2020 – Sekarang
Memimpin yayasan untuk memastikan alokasi sumber daya dan pengembangan yang efektif.

Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Olahraga
PC Ansor Kabupaten Pati
2022 – Sekarang
Mempromosikan inisiatif budaya dan olahraga, serta mendorong keterlibatan masyarakat lokal.

Ketua
Yayasan Kecerdasan Semesta
2023 – Sekarang
Mengatur arah strategis yayasan dalam mendukung pendidikan dan program sosial-ekonomi.

Sekretaris
Yayasan Mbah Ahmad Mutamakkin Kajen
2024 – Sekarang
Mengkoordinasikan perencanaan administratif dan strategis yayasan.

Anggota Divisi Pendidikan dan Pelatihan
LAKPESDAM PWNU Jawa Tengah
2024 – Sekarang
Mendukung program pelatihan dengan fokus pada pendidikan dan pengembangan komunitas.

Pengalaman Relevan Lainnya

2016: Memfasilitasi Gerakan Literasi Perpustakaan Mutamakkin Kajen bagi pemuda dan pelajar melalui publikasi buku, seminar, dan diskusi.

2019: Membimbing pemuda dan pelajar dalam mendirikan museum dan tim eksplorasi warisan Mbah Ahmad Mutamakkin Kajen.

2020: Mendukung pelestarian warisan Mbah Ahmad Mutamakkin Kajen melalui e-buletin Kanjengan.

2021: Memperkuat pengembangan ekonomi warga Perum Joyo melalui program berbasis masjid bersama Yayasan Kecerdasan Semesta.

2024: Memberdayakan nelayan di Bakaran Juwana untuk menghadapi krisis ekologi melalui Tasawuf Peradaban di bawah Yayasan Kecerdasan Semesta.

2024: Mendukung penulisan biografi para pendiri dan sejarah 300 tahun Pondok Pesantren Kulon Banon.

2024: Membimbing pelajar dalam mendokumentasikan biografi pendiri Darut Ta'lim An Nawawi, KH Nawawi Mohammad di Ampeldenta.

Kualifikasi Pendidikan

Sarjana Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Indonesia – 2012

Magister Ilmu Komunikasi
Universitas Gajah Mada – 2014

Publikasi

2016: Narasi Kajen Jilid 2: Sejarah Mbah Ahmad Mutamakkin (Video Dokumenter).

2020: Wacana Identitas Muslim Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Reformasi: Analisis Wacana Kritis Cheng Hoo – Komunitas Magazine. Diterbitkan dalam Asian Journal of Media and Communications.

2023: Editor Ampeldenta: Potret Dari Masa Ke Masa. Buku dokumenter yang berisi sejarah, foto, dan arsip Masjid Ampel.

Reorientasi Kedaulatan Negara melalui Fenomena Tari: Kajian pada Program Dinas Kebudayaan Yogyakarta[1]

Anastasia Melati Listyorini[2]

Thesis Statement:

Seni tari yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta berperan sebagai instrumen strategis dalam menegakkan kedaulatan negara dengan memperkuat diplomasi budaya, melindungi warisan tak benda melalui kebijakan hukum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri kreatif. Namun, tantangan seperti komersialisasi dan homogenisasi budaya harus diatasi agar tari tetap menjadi medium autentik dalam membangun identitas nasional yang berkelanjutan.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, kedaulatan negara tidak hanya diukur dari kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana negara tersebut mampu mempertahankan identitasnya di tengah arus perubahan yang datang dari luar. Kedaulatan budaya, sebagai bagian dari kedaulatan negara, menjadi salah satu pilar penting yang harus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan homogenisasi budaya yang sering kali disebabkan oleh pengaruh budaya global. Dalam bukunya *Globalization and Culture,* John Tomlinson mengupas mengenai bagaimana globalisasi mempengaruhi keberagaman budaya dan kemungkinan homogenisasi.[3] Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, perlu mempertahankan dan memperkuat kedaulatan budayanya agar dapat mempertahankan jati dirinya di dunia internasional. Salah satu cara untuk mencapai hal

[1] Disampaikan dalam Simposium Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Daerah Istimewa Yogyakarta, 19-21 Februari 2025

[2] Mahasiswa S3 bidang Kajian Tari, di Taipei National University of the Arts (TNUA), di Taiwan

[3] John Tomlinson (1999). *Globalization and Culture*. Chicago: Chicago University Press.

tersebut adalah dengan memanfaatkan seni sebagai instrumen diplomasi dan pelestarian budaya yang dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah global.

Budaya memainkan peran sentral dalam memperkuat identitas nasional suatu negara. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, seni, termasuk seni tari, telah lama menjadi sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai, sejarah, dan filosofi bangsa. Seni tari, dengan segala keindahannya, tidak hanya mencerminkan kekayaan tradisi, tetapi juga menunjukkan daya kreatif masyarakat Indonesia dalam mengembangkan dan mempertahankan warisan budaya. Dalam menghadapi globalisasi yang sering kali mengarah pada penyatuan budaya dunia, seni tari menjadi medium yang efektif untuk menunjukkan keberagaman budaya Indonesia kepada dunia. Seni tari juga menjadi bagian penting dalam membangun jembatan antara Indonesia dan negara-negara lain, melalui diplomasi budaya yang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia dalam bentuk yang dapat diterima oleh berbagai kalangan internasional.

Seni tari, khususnya yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga budaya seperti Dinas Kebudayaan Yogyakarta, memainkan peran strategis dalam kebijakan budaya Indonesia. Dinas Kebudayaan Yogyakarta, sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan budaya daerah, telah menciptakan program-program yang tidak hanya berfokus pada pelestarian seni tari tradisional, tetapi juga pada pengembangan tari kontemporer yang menggabungkan elemen-elemen tradisi dengan inovasi baru. Dalam konteks ini, seni tari menjadi bagian dari strategi kebijakan budaya yang lebih luas, yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya, tetapi juga untuk mengoptimalkan peran budaya dalam memperkuat kedaulatan negara. Melalui program-program yang melibatkan masyarakat dan seniman, Dinas Kebudayaan Yogyakarta tidak hanya memelihara warisan budaya yang ada, tetapi juga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam industri kreatif yang berkaitan dengan seni tari, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal dan nasional.

Namun, tantangan besar yang dihadapi dalam mempertahankan seni tari sebagai medium autentik dalam membangun identitas nasional adalah ancaman komersialisasi dan homogenisasi budaya. Komersialisasi seni tari, yang sering kali mengutamakan keuntungan finansial daripada nilai-nilai budaya, berpotensi mereduksi makna dan kedalaman dari seni tari itu sendiri. Di sisi lain, globalisasi yang terus berkembang dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana budaya lokal yang unik dan khas dapat tergerus oleh budaya global yang lebih dominan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah,

melalui lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Kebudayaan Yogyakarta, untuk merancang kebijakan yang dapat melindungi seni tari sebagai warisan budaya yang tak ternilai, sambil tetap membuka peluang bagi pengembangan industri kreatif yang berbasis pada budaya lokal.

Seni tari yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta memiliki peran strategis yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan negara, khususnya dalam tiga aspek utama: diplomasi budaya, pelestarian warisan budaya tak benda, dan pertumbuhan ekonomi berbasis industri kreatif. Dalam konteks diplomasi budaya, seni tari menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan tradisi dan keanekaragaman budaya, sekaligus memperkuat hubungan internasional. Melalui berbagai festival, pertunjukan, dan pertukaran budaya, tari Indonesia, yang diwakili oleh seni tari Yogyakarta, dapat menunjukkan kedalaman filosofi dan nilai-nilai luhur bangsa, yang memperkaya interaksi antarbangsa. Selain itu, seni tari juga berperan dalam melindungi warisan budaya tak benda melalui kebijakan hukum yang memastikan pelestarian dan penghargaan terhadap seni tari sebagai bagian dari identitas nasional. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan Yogyakarta memainkan peran penting dalam meregulasi dan melindungi seni tari sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga kelestariannya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berbasis industri kreatif, yang melibatkan seni tari, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional, menciptakan lapangan kerja bagi seniman, pengrajin, dan berbagai pihak terkait.

Namun, untuk memastikan bahwa seni tari tetap menjadi medium autentik dalam membangun identitas nasional yang berkelanjutan, tantangan-tantangan seperti komersialisasi dan homogenisasi budaya harus diatasi. Dalam hal ini, kebijakan yang bijaksana dan terencana dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seni tari dapat terus berkembang tanpa kehilangan esensi dan makna budaya yang terkandung di dalamnya. Hanya dengan cara ini, seni tari dapat tetap menjadi instrumen yang kuat dalam memperkuat kedaulatan budaya Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penguatan kedaulatan negara secara keseluruhan.

Dengan demikian, dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana seni tari yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta berperan sebagai instrumen strategis dalam menegakkan kedaulatan negara. Pembahasan akan mencakup aspek diplomasi budaya, pelestarian warisan budaya tak benda, dan pengembangan ekonomi berbasis industri kreatif. Selain itu, akan dikaji juga tantangan yang

dihadapi dalam menghadapi komersialisasi dan homogenisasi budaya, serta bagaimana kebijakan yang tepat dapat memastikan keberlanjutan seni tari sebagai bagian dari identitas nasional yang berkelanjutan.

I. Diplomasi Budaya melalui Seni Tari: Membangun Citra Indonesia di Kancah Global

Diplomasi budaya merupakan strategi penting yang digunakan oleh negara untuk memperkenalkan identitas nasionalnya dan membangun hubungan internasional melalui seni dan budaya. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, budaya menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan tentang suatu negara, tidak hanya kepada audiens domestik, tetapi juga di panggung internasional. Salah satu bentuk diplomasi budaya yang memiliki peran strategis adalah seni tari, yang dapat menyampaikan makna, nilai, dan identitas bangsa dengan cara yang universal dan penuh ekspresi. Indonesia, dengan kekayaan budaya yang melimpah, menjadikan seni tari sebagai instrumen utama dalam memperkenalkan dirinya kepada dunia internasional, sekaligus memperkuat *soft power* negara. Menurut ilmuwan politik Joseph Nye dalam bukunya *Soft Power: The Means to Success in World Politics* mengatakan bahwa yang dimaksud *soft power* adalah kemampuan suatu negara atau aktor untuk mempengaruhi pihak lain tanpa paksaan atau kekuatan militer (*hard power*), melainkan melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah dan menarik. Ia berargumen bahwa dalam era globalisasi, keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan militernya, tetapi juga oleh sejauh mana negara tersebut dapat membangun citra positif dan menarik simpati dari komunitas internasional.[4] *Soft power*, yang diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menarik simpati tanpa paksaan, telah menjadi strategi penting dalam diplomasi global, dan seni tari Indonesia telah berperan besar dalam memperkenalkan kebudayaan Indonesia secara positif di mata dunia.

Salah satu contoh konkret dari penggunaan seni tari dalam diplomasi budaya Indonesia adalah melalui program seni tari Yogyakarta, yang telah menjadi bagian integral dari upaya memperkenalkan Indonesia sebagai negara dengan budaya yang kaya dan beragam. Yogyakarta, sebagai pusat kebudayaan tradisional dan modern di Indonesia, memiliki tradisi seni tari yang sangat kuat dan dihargai baik di dalam negeri maupun luar negeri. Melalui berbagai program dan festival seni tari, Yogyakarta telah berhasil memperkenalkan seni tari tradisional dan kontemporer Indonesia di berbagai penjuru dunia.

[4] Joseph Nye (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics.* United States: PublicAffairs

Salah satunya adalah Festival Gamelan Internasional, yang diadakan secara berkala di berbagai negara. Festival ini menjadi ajang penting bagi seniman tari Yogyakarta untuk memperkenalkan seni tari dan musik tradisional Indonesia. Festival Gamelan, yang menyatukan berbagai elemen seni Indonesia, termasuk tari, musik, dan budaya, menjadi sarana yang efektif untuk mendekatkan budaya Indonesia dengan audiens internasional. Selain itu, festival ini juga menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kekayaan tradisi tari Indonesia, seperti tari Bedhaya, Srimpi dan tari kerakyatan lainnya yang tidak hanya menonjolkan keindahan estetika, tetapi juga filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Selain Festival Gamelan Internasional, pertunjukan tari tradisional Indonesia juga sering kali digelar di kota-kota besar dunia, seperti New York, London, dan juga Kyoto dengan program *Sister City Agreement*.

> "Kyoto Prefecture has established friendly ties with regions abroad for the promotion of international exchange in order to foster mutual understanding and contribute to peace in the world through interaction with people who have their own unique language, customs, and culture. Kyoto Prefecture has established friendly ties … the Yogyakarta Special Territory in the Republic of Indonesia, …, to promote exchange and joint projects in a variety of fields such as culture, art, young people, education, environment and industry."[5]

Pertunjukan ini tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga untuk menampilkan keanekaragaman budaya Indonesia. Dalam setiap pertunjukan, seniman tari Yoyakarta Indonesia memperkenalkan berbagai bentuk tari tradisional yang kaya akan makna filosofis. Melalui pertunjukan-pertunjukan ini, tari Indonesia tidak hanya dilihat sebagai hiburan, tetapi juga sebagai representasi identitas budaya yang mendalam. Pertunjukan tari tradisional Indonesia di panggung internasional juga menjadi sarana penting untuk menjelaskan kedalaman sejarah dan budaya Indonesia kepada dunia luar, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan seni dan budaya yang harus dihargai dan dilestarikan.

Selain itu, keberadaan Yogyakarta sebagai *ASEAN City of Culture*[6] menambah peran kota ini sebagai pusat kebudayaan yang mempromosikan seni tari Indonesia ke tingkat yang lebih luas. Yogyakarta menjadi tuan rumah bagi berbagai pertunjukan tari tradisional dan kontemporer yang melibatkan seniman dari seluruh Indonesia dan negara-negara ASEAN. Sebagai simbol diplomasi regional, Yogyakarta bukan hanya menyajikan pertunjukan tari, tetapi juga menciptakan ruang bagi

[5] https://www.pref.kyoto.jp/en/
[6] https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/culture-and-information/

pertukaran budaya antarnegara yang dapat mempererat hubungan antarbangsa di kawasan ASEAN. Dengan menjadikan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan, ASEAN memperlihatkan betapa pentingnya seni tari dalam membangun identitas budaya bersama dan menjaga keberagaman seni tradisional di kawasan tersebut.

Selanjutnya, tari tradisional dan kontemporer menjadi sarana yang sangat efektif dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional. Tari-tari klasik seperti Bedhaya, Srimpi, Tari Angguk yang sering kali dipentaskan dalam pertemuan diplomatik, bukan hanya berfungsi sebagai pertunjukan seni, tetapi juga sebagai representasi dari budaya adiluhung Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsepsi Clifford Geertz tentang budaya sebagai sistem simbol yang terorganisasi, yang mengarahkan manusia ke lingkungannya. Selain itu, desakannya bahwa tujuan utama adalah menafsirkan makna simbol-simbol tersebut dapat diterapkan dalam analisis konkret mengenai pembentukan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat manusia.[7] Bedhaya, dengan kedalaman filosofi dan simbolisme yang terkandung di dalamnya, sering kali dipilih sebagai pertunjukan untuk menunjukkan kedewasaan budaya Indonesia di mata dunia. Pertunjukan ini tidak hanya menggambarkan keindahan gerakan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai luhur tentang kebijaksanaan, keharmonisan, dan kedamaian yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Tari Srimpi, yang merupakan simbol dari kerukunan dan keseimbangan, juga memiliki kedalaman filosofis yang dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki tradisi yang sangat kuat dalam menjaga keharmonisan sosial. Tari Angguk merupakan tarian tradisional dari Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki akar dalam tradisi Islam dan budaya lokal.[8]

Namun, seni tari Indonesia tidak hanya terfokus pada tari-tari klasik. Tari kontemporer dari Yogyakarta, yang merupakan sintesis antara tradisi dan inovasi, juga turut berperan dalam diplomasi budaya Indonesia. Tari kontemporer Yogyakarta, yang tetap mempertahankan unsur tradisional tetapi juga mengadaptasi elemen-elemen modern, telah menarik perhatian publik internasional.[9] Dengan menggabungkan teknik-teknik tradisional dengan bahasa tubuh yang lebih bebas dan ekspresif, tari kontemporer dari Yogyakarta dapat berbicara kepada audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda dan masyarakat internasional yang tertarik pada bentuk seni yang lebih eksperimental. Ini membuktikan

[7] Geertz, Clifford (1973). *The Interpretation of Cultures.* New York City: Basic Books

[8] https://pusdok.sv.ugm.ac.id/2019/10/04/generasi-milenial-dan-eksistensi-tari-angguk-kulon-progo/

[9] Wawancara dengan Pulung Jati Ronggo Murti, abdi dalem penari kraton Yogyakarta dan koreografer muda. Pulung bersama-sama dengan beberapa teman membangun sebuah ruang, Pulung Dance Studio, untuk berproses dengan basis tari tradisi yang kuat.

bahwa tari Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari tradisi yang kaya.[10]

Selain itu, partisipasi Indonesia dalam festival seni internasional juga memberikan dampak besar dalam membangun citra negara. Melalui partisipasi dalam festival-festival seni ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan betapa kaya dan beragamnya kebudayaan seni tari yang dimiliki, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara lain. Festival seni internasional ini memungkinkan Indonesia untuk berinteraksi dengan seniman dari berbagai belahan dunia, sekaligus memperkenalkan tari Indonesia sebagai simbol budaya yang hidup dan berkembang. Partisipasi Indonesia dalam festival seni internasional juga membantu membangun citra Indonesia sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, tetapi juga progresif dalam seni pertunjukan.[11]

Tidak hanya melalui pertunjukan tari, partisipasi seniman tari Indonesia dalam pertukaran budaya internasional juga menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan seni tari Indonesia ke dunia. Beberapa seniman tari Yogyakarta telah berpartisipasi dalam program pertukaran budaya di Eropa dan Asia, yang memungkinkan mereka untuk memperkenalkan teknik dan filosofi tari Indonesia kepada khalayak internasional sekaligus belajar pengetahuan tari dari pergaulan internasional tersebut.[12] Melalui program ini, seniman tari Indonesia tidak hanya mengajarkan teknik tari, tetapi juga berbagi pengetahuan tentang filosofi dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap gerakan. Pertukaran budaya ini tidak hanya menguntungkan seniman tari Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif bagi negara karena menciptakan hubungan yang lebih kuat antara Indonesia dan negara-negara lain.

Selain itu, kolaborasi antara seniman Indonesia dengan koreografer asing juga memberikan kontribusi besar dalam memperkenalkan seni tari Indonesia kepada audiens global. Kolaborasi ini

---

[10] Dengan kematangan teknik tari klasik gaya Yogyakarta, Pulung membawa keklasikannya bergaul dengan seni dan seniman dari luar negeri, bukan dalam bentuk ragam teknik gerak tari klasik, tetapi nilai (*value*) sebuah gerakan yang disebutnya sebagai *attitude*. *Attitude* ini antara lain di dalamnya terdiri dari bersihnya suatu gerak, *mulih*-nya suatu gerak yang tidak terpaku pada suatu hitungan (*counting*) yang berdasar pada hafalan tetapi imajinasi rasa.

[11] Hal ini pernah dinyatakan oleh Bambang Paningron, seorang produser dan budayawan, yang mengelola sebuah festival yang merupakan bentuk bekerja sama antara seniman di Jepang, Korea, dan Yogyakarta, bernama Asiatri. Beberapa seniman Yogyakarta diajaknya untuk berpartisipasi bersama seniman-seniman dari luar negeri melalui pertunjukan tari agar karya-karya mereka semakin berkembang.

[12] Agung Gunawan belajar tari klasik gaya Yogyakarta secara formal di Sekolah Menengah Kejuruan 1 Yogyakarta (dulu bernama Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau disingkat SMKI) dan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, ia juga belajar menari secara langsung (*nyantrik)* di Paguyuban Seni Suryo Kencono kepada tokoh tari klasik, R.M. Ywanjana Suryobrongto (almarhum) di Ndalem Suryowijayan, Yogyakarta.

menciptakan bentuk seni baru yang tetap mempertahankan unsur lokal tetapi juga relevan dengan perkembangan global. Kolaborasi ini menghasilkan karya-karya yang inovatif dan menarik, yang dapat diapresiasi oleh penonton internasional.[13] Kegiatan residensi seniman tari Indonesia di luar negeri juga memberikan kesempatan bagi seniman untuk membangun jejaring dan memperluas pengaruh budaya Indonesia di tingkat global. Melalui residensi ini, seniman tari Indonesia dapat berinteraksi dengan seniman dari berbagai negara, berbagi pengalaman, dan mempelajari teknik baru yang dapat mereka bawa kembali ke Indonesia, sekaligus memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia.[14]

Secara keseluruhan, seni tari Indonesia, terutama yang berasal dari Yogyakarta, memainkan peran penting dalam diplomasi budaya Indonesia di tingkat global. Melalui pertunjukan, festival, pertukaran budaya, dan kolaborasi internasional, seni tari Indonesia telah berhasil memperkenalkan identitas budaya bangsa kepada dunia, memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang kaya akan warisan budaya dan progresif dalam seni pertunjukan. Diplomasi budaya melalui seni tari bukan hanya memperkenalkan keindahan budaya Indonesia, tetapi juga membangun hubungan internasional yang lebih kuat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan *soft power* negara Indonesia di kancah global.

II. Perlindungan Tari sebagai Warisan Budaya dalam Kebijakan Hukum

Tari sebagai salah satu unsur budaya Indonesia memiliki nilai yang sangat tinggi, baik dari segi estetika, historis, maupun filosofis. Sebagai warisan budaya tak benda, tari bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bagian dari identitas dan sejarah bangsa. Oleh karena itu, penting untuk melindungi dan melestarikan seni tari melalui kebijakan hukum yang efektif. Dalam konteks ini, penguatan perlindungan terhadap tari sebagai warisan budaya dilakukan melalui beberapa mekanisme, salah satunya adalah melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017), yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan warisan budaya tak benda, termasuk seni tari. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta dalam registrasi dan dokumentasi seni tari juga berperan penting dalam upaya pelestarian. Lebih jauh lagi, konservasi dan revitalisasi tari klasik dan kerakyatan serta

[13] Wawancara dengan Ayu Permatasari, alumnus Jurusan Tari ISI Yogyakarta, yang melakukan kolaborasi seni pertunjukan dengan seniman-seniman dengan latar belakang keilmuan yang bervariasi dari berbagai negara, seperti Taiwan, Jepang, Jerman, Swiss. Kolaborasi ini memperkaya cara pandangnya yang mempengaruhi proses kreatif koreografinya.
[14] Menurut Pulung, seorang penari klasik yang matang sekaligus koreografer ternama Yogyakarta yaitu Anter Asmarateja merupakan salah satu gurunya yang membawa pengaruh dalam pergaulan internasional melalui tari klasik gaya Yogyakarta. Sebagai seorang penari sekaligus koreografer, Anter memberikan gagasan untuk mengolah tari tradisional tidak melalui ragam gerak, tetapi filosofi gerakan tari klasik.

upaya pelestarian tradisi melalui pendidikan dan komunitas seni turut memperkuat keberlanjutan seni tari dalam masyarakat.

Peran Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dalam Melindungi Seni Tari sebagai Warisan Budaya Tak Benda

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi seni tari sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. UU ini mengakui dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelestarian budaya Indonesia, termasuk seni tari, yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Undang-Undang ini menetapkan bahwa kebudayaan Indonesia merupakan aset yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan oleh negara dan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur dalam UU ini adalah pengakuan terhadap warisan budaya tak benda, yang meliputi seni tari, musik, adat istiadat, dan berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya yang berkembang dalam masyarakat.

Salah satu tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk memastikan bahwa warisan budaya tak benda seperti seni tari tidak hilang atau punah akibat pengaruh globalisasi, modernisasi, atau kurangnya perhatian terhadap pelestarian budaya. Dalam UU No. 5 Tahun 2017, seni tari diakui sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilindungi dengan cara yang lebih sistematis dan terencana. Melalui undang-undang ini, seni tari diberikan status hukum yang memungkinkan pengakuan dan perlindungan dari ancaman kepunahan, serta upaya-upaya untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya seni tari sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. UU ini juga menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan.[15]

Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah juga memberikan ruang bagi setiap daerah untuk menyusun kebijakan dan program yang mendukung pelestarian seni tari. Salah satu contoh konkret dari implementasi UU ini adalah upaya untuk mendaftarkan dan mendokumentasikan seni tari tradisional di dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum, seni tari yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sehingga dapat berkembang dan dipelajari

[15] https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/06/rayakan-tujuh-tahun-uu-pemajuan-kebudayaan-kemendikbudristek-gelar-jalan-kebudayaan

oleh generasi mendatang. Masyarakat pemilik seni tari tersebut juga semakin mengembangkan atau memajukan kebudayaannya dengan mempelajarinya kembali. Di Yogyakarta, salah satu yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia UNESCO adalah Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan konsep tata ruang yang menghubungkan Panggung Krapyak, Kraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Pangeran Mangkubumi, Raja Pertama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.[16] Seperti dinyatakan dalam laporan UNESCO pada tahun 2023 mengenai ditetapkannya Sumbu Filosofi Yogyakarta[17]:

> … Yogyakarta's "Cosmological Axis" was recognized as a World Heritage Site, highlighting its unique blend of tangible and intangible cultural heritage, including practices related to the life cycle, ancestor veneration, and ceremonies that reflect a complex interplay between Javanese animism, Hinduism, Buddhism, and Islam; effectively placing Yogyakarta's cultural traditions on the global stage as a significant intangible cultural heritage site.

Upaya Dinas Kebudayaan Yogyakarta dalam Registrasi dan Dokumentasi Seni Tari sebagai Aset Nasional

Di tingkat daerah, Dinas Kebudayaan Yogyakarta telah mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi dan melestarikan seni tari sebagai aset budaya yang berharga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah registrasi dan dokumentasi seni tari yang ada di Yogyakarta sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya dan seni di Indonesia memiliki tradisi tari yang sangat kaya dan beragam, mulai dari tari klasik hingga tari kontemporer. Untuk memastikan bahwa seni tari yang berkembang di daerah ini dapat dilestarikan dan tidak hilang seiring berjalannya waktu, Dinas Kebudayaan Yogyakarta telah mengambil langkah penting dengan mendokumentasikan berbagai bentuk seni tari tradisional dan mengajukan pendaftaran ke dalam daftar warisan budaya tak benda. Majalah Mata Budaya[18] dan Majalah Mata Jendela[19] dan penerbitan buku-buku yang berkaitan dengan tari dan tokoh tari di Yogyakarta merupakan salah satu bentuk pendokumentasian tersebut.

---

[16] https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/1638-penetapan-sumbu-filosofi-yogyakarta-sebagai-warisa-budaya-dunia-oleh-unesco

[17] UNESCO Reports on Intangible Cultural Heritage

[18] Majalah ini diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan serta membangun kebudayaan di Yogyakarta. Setiap edisinya mengangkat tema-tema yang relevan dengan perkembangan kebudayaan dan peristiwa penting di Yogyakarta.

[19] Pengelolaan Majalah Mata Jendela di bawah Taman Budaya Yogyakarta (TBY).

Dokumentasi seni tari ini tidak hanya berupa rekaman pertunjukan tari, tetapi juga mencakup informasi tentang makna, simbolisme, sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap gerakan tari. Dengan dokumentasi yang lengkap, seni tari tradisional di Yogyakarta dapat terus dipelajari dan diajarkan kepada generasi mendatang. Hal ini juga memungkinkan seni tari untuk tetap relevan dalam perkembangan zaman, tanpa kehilangan akar budaya yang mendasarinya.

Selain itu, registrasi seni tari sebagai warisan budaya tak benda juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan tari tradisional kepada masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mendaftarkan seni tari sebagai aset budaya nasional, seni tari tradisional dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, baik sebagai media pembelajaran, rekreasi, maupun sebagai sumber inspirasi dalam berkarya seni. Upaya ini juga membuka peluang bagi seni tari untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas di tingkat global, sekaligus memperkuat posisi tari sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia.

Konservasi dan Revitalisasi Tari Klasik serta Upaya Pelestarian Tradisi Melalui Pendidikan dan Komunitas Seni

Selain kebijakan hukum dan registrasi, konservasi dan revitalisasi tari klasik dan kerakyatan di Yogyakarta merupakan langkah penting dalam upaya pelestarian seni tari. Tari Indonesia memiliki nilai yang sangat tinggi, baik dari segi teknik, bentuk, maupun filosofinya. Konservasi tari ini bertujuan untuk menjaga agar tari-tari tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ada, tetapi juga tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, revitalisasi tari ini bukan berarti mengubah esensi dan tradisi yang ada, tetapi lebih kepada memperbarui dan menyegarkan pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap tari klasik.

Upaya konservasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengadakan pertunjukan rutin, festival seni, dan kompetisi tari yang menampilkan tari klasik. Selain itu, konservasi juga melibatkan pendidikan formal dan non-formal, di mana generasi muda diajarkan tentang seni tari tradisional melalui sekolah seni, kursus tari,[20] serta melalui komunitas seni tari yang ada di

[20] Beberapa kursus tari di sanggar tari klasik gaya Yogyakarta yang sudah lama berdiri namun masih aktif sampai sekarang, antara lain Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa (YPBSM) di Ndalem Pujokusuman, Paguyuban Kesenian Suryo Kencono di Ndalem Suryowijayan, Perkumpulan Kesenian Irama Citra yang mengadakan latihan rutin di Pendopo Wiyotoprodjo Kompleks Kepatihan Danurejan, Sanggar Tari Wilaga Apuletan, Sanggar Tari Sekar Kinanti dan Mila Art Dance (MAD) School, dan masih banyak lagi.

masyarakat. Dengan pendidikan yang memadai, generasi muda dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tari tradisional dan meneruskan warisan budaya tersebut ke generasi berikutnya.

Komunitas seni tari juga memainkan peran penting dalam pelestarian tradisi tari. Komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bagi para seniman untuk berkarya, tetapi juga sebagai wadah untuk menyebarluaskan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian seni tari sebagai bagian dari identitas budaya. Komunitas-komunitas seni tari dapat berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga budaya, dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program-program yang mendukung pengajaran dan pelatihan tari tradisional. Dengan kolaborasi ini, pelestarian tari dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pelestarian melalui pendidikan dan komunitas seni tari juga menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat tentang pentingnya melindungi dan memelihara warisan budaya, termasuk seni tari. Dengan meningkatnya kesadaran ini, masyarakat akan lebih mendukung upaya pelestarian seni tari dan turut berperan aktif dalam menjaga agar seni tari tetap hidup dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini sejalan dengan yang dinarasikan oleh Edward Said mengenai adanya kesempatan yang dimiliki oleh komunitas seni yang memiliki kapasitas untuk menafsirkan ulang, menentang, dan menciptakan narasi budaya mereka sendiri. Dalam konteks globalisasi, ini bisa dilihat dalam bagaimana komunitas lokal menggunakan diplomasi budaya untuk mengartikulasikan identitas mereka di panggung global, bukan hanya sebagai penerima pasif budaya dominan tetapi sebagai aktor yang aktif dalam membentuk wacana global.[21]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan tari sebagai warisan budaya tak benda dalam kebijakan hukum memiliki dampak yang sangat besar dalam menjaga kelestarian seni tari sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, seni tari mendapatkan pengakuan hukum yang memadai untuk dilindungi dan dipelihara. Upaya Dinas Kebudayaan Yogyakarta dalam registrasi dan dokumentasi seni tari sebagai aset nasional juga menjadi langkah konkret dalam melestarikan tari sebagai warisan budaya. Selain itu, konservasi dan revitalisasi tari klasik dan tari kerakyatan di Yogyakarta serta upaya pelestarian melalui pendidikan dan komunitas seni turut memperkuat keberlanjutan seni tari dalam masyarakat. Dengan perlindungan yang efektif, seni

[21] Said, Edward (1993). *Culture and Imperialism.* London: Chatto Windus

tari dapat terus berkembang dan menjadi bagian penting dari warisan budaya yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 yang bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina keragaman budaya Indonesia.

III. Dampak Ekonomi dari Penguatan Tari sebagai Industri Kreatif

Industri kreatif telah menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi global, terutama di negara-negara yang memiliki kekayaan budaya yang khas. Tari, sebagai bagian integral dari warisan budaya Indonesia, memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi industri kreatif yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Dalam konteks ini, penguatan tari sebagai bagian dari industri kreatif dapat memiliki dampak ekonomi yang luas, terutama melalui tiga aspek utama: tari sebagai daya tarik wisata budaya, keterlibatan masyarakat dalam produksi tari, dan program pemberdayaan ekonomi berbasis seni tari yang dapat meningkatkan kesejahteraan seniman dan komunitas lokal.

Tari sebagai Daya Tarik Wisata Budaya yang Mendukung Ekonomi Lokal

Salah satu dampak paling signifikan dari penguatan tari sebagai industri kreatif adalah perannya sebagai daya tarik wisata budaya yang mendukung ekonomi lokal. Indonesia, dengan beragam budaya dan tradisi yang dimiliki, telah lama dikenal sebagai destinasi wisata budaya yang menarik minat wisatawan mancanegara. Tari, sebagai bagian dari budaya tersebut, memiliki potensi besar untuk menarik perhatian wisatawan. Sebagai contoh, Festival Kesenian Yogyakarta yang diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1989 merupakan salah satu acara budaya yang menampilkan kekayaan seni tari dari berbagai daerah. Festival ini tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni, tetapi juga berfungsi sebagai promosi wisata budaya yang mendatangkan ribuan wisatawan.[22] Menurut Ki Nayono, Festival kesenian Yogyakarta mempunyai sifat yang dinamis dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kekinian yang berkaitan seni, budaya, sosial, dan ekonomi.[23]

[22] https://fky.id/
[23] Gilang Cahyo Gumilar (2016) hlmn.197

Tari juga dapat dilihat sebagai elemen penting dalam paket wisata budaya, seperti yang terjadi di Kraton Yogyakarta dan Museum Sonobudoyo. Di sana, pengunjung dapat menikmati pertunjukan tari tradisional yang menceritakan kisah-kisah sejarah dan mitologi Jawa. Paket wisata yang melibatkan pertunjukan tari ini memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi para wisatawan, sekaligus mendukung perekonomian lokal. Dalam hal ini, penguatan tari sebagai daya tarik wisata memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, perhotelan, dan layanan transportasi, yang semuanya mendapatkan manfaat dari keberadaan wisatawan yang datang untuk menikmati pertunjukan tari.

Melalui penguatan tari sebagai daya tarik wisata, tidak hanya wisatawan yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat lokal. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, ada potensi untuk meningkatkan pendapatan bagi para pedagang lokal, pengrajin, dan sektor usaha kecil lainnya yang terkait dengan industri pariwisata. Oleh karena itu, tari bukan hanya menjadi ekspresi budaya, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Produksi Tari

Dampak ekonomi lainnya yang tidak kalah penting dari penguatan tari sebagai industri kreatif adalah keterlibatan masyarakat dalam produksi tari. Tari bukan hanya tentang para penari yang tampil di panggung, tetapi juga melibatkan banyak pihak lain dalam proses produksinya. Dalam sebuah pertunjukan tari, ada berbagai elemen yang harus dipersiapkan, mulai dari pembuatan dan penyewaan kostum, musik pengiring, hingga pengaturan panggung dan desain pencahayaan. Semua elemen ini melibatkan berbagai keterampilan dan profesi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sebagai contoh, pengrajin kostum tari adalah salah satu pihak yang sangat terlibat dalam produksi tari. Mereka tidak hanya membuat kostum untuk para penari, tetapi juga menciptakan karya seni yang sangat bernilai dan memiliki nilai jual. Pengrajin ini seringkali menggunakan bahan-bahan lokal, yang mendukung industri kerajinan dan mempromosikan keunikan budaya daerah. Selain itu, musisi pengiring juga memainkan peran yang sangat penting dalam setiap pertunjukan tari. Mereka tidak hanya menyediakan musik, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan atmosfer yang khas dalam pertunjukan tersebut. Musisi yang terlibat dalam pertunjukan tari tradisional biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang musik tradisional, yang juga mendukung pelestarian seni budaya lokal.

Tari sebagai industri kreatif juga membuka peluang bagi para pelaku seni lainnya untuk terlibat dalam produksi. Pekerja kreatif seperti desainer grafis, fotografer, dan pengelola acara juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam industri tari. Dalam produksi tari yang melibatkan banyak pihak, semakin besar pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari keterlibatan mereka dalam berbagai aspek produksi seni tari.

Dalam hal ini, produksi tari sebagai bagian dari industri kreatif dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Dengan semakin banyaknya pertunjukan tari yang diadakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, semakin banyak pula peluang kerja yang tercipta. Keterlibatan berbagai pihak dalam produksi tari tidak hanya meningkatkan kualitas seni tari itu sendiri, tetapi juga memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Seni Tari untuk Meningkatkan Kesejahteraan Seniman dan Komunitas Lokal

Program pemberdayaan ekonomi berbasis seni tari juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan seniman dan komunitas lokal. Salah satu contoh konkret dari program ini adalah inisiatif yang mendukung pengembangan seni tari melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, dan pendampingan terhadap seniman. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas seni tari itu sendiri, tetapi juga untuk menciptakan peluang ekonomi bagi para seniman dan komunitas yang terlibat dalam produksi tari.

Banyak seniman tari, terutama yang berasal dari daerah-daerah terpencil, sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan keterampilan mereka dan memperoleh penghidupan yang layak dari seni tari. Program pemberdayaan ekonomi berbasis seni tari dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan menyediakan pelatihan yang lebih terstruktur, meningkatkan akses ke pasar (*market*), dan memberikan kesempatan bagi seniman untuk memamerkan karya mereka dalam berbagai acara dan festival. Melalui program ini, seniman tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka, tetapi juga untuk memperoleh pendapatan yang lebih stabil dari seni tari.

Selain itu, program pemberdayaan ini juga mencakup upaya untuk membangun kemitraan antara seniman dengan sektor-sektor lain yang terlibat dalam industri kreatif, seperti sektor pariwisata, media, dan teknologi. Dengan adanya kolaborasi antara seniman tari dan sektor-sektor ini, peluang untuk mengembangkan industri tari sebagai bagian dari ekonomi kreatif akan semakin besar. Dalam bukunya

Culture, Development and Social Theory: Towards an Integrated Social Development (2012), John Clammer menyoroti hubungan erat antara budaya dan ekonomi kreatif dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Ia berargumen bahwa budaya bukan sekadar elemen tambahan dalam pembangunan, tetapi merupakan inti dari inovasi, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan sosial.[24] Dalam konteks ini, seniman tari tidak hanya menjadi pelaku seni, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan ekonomi yang lebih luas yang mencakup berbagai sektor yang saling mendukung.

Dengan penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis seni tari, seniman dan komunitas lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan memperluas jaringan sosial mereka. Program ini juga berkontribusi pada pelestarian budaya tari tradisional, karena seniman diberikan kesempatan untuk terus berkarya dan mengembangkan seni tari sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

Secara keseluruhan, penguatan tari sebagai industri kreatif memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, baik dalam aspek pengembangan pariwisata, keterlibatan masyarakat dalam produksi seni, maupun pemberdayaan ekonomi berbasis seni tari. Tari bukan hanya sekadar ekspresi budaya, tetapi juga dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan mendukung penguatan industri tari, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan seniman, dan memperkuat identitas budaya bangsa. Dalam konteks ini, tari sebagai industri kreatif merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

IV. *Counterarguments* dan Refutasi terhadap Perlindungan dan Perkembangan Seni Tari

Seni tari sebagai salah satu ekspresi budaya memiliki posisi yang sangat penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai hiburan atau bentuk seni, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga dan memperkenalkan nilai-nilai budaya. Namun, dalam perjalanannya, seni tari seringkali menghadapi tantangan yang berkaitan dengan komersialisasi, globalisasi, dan peranannya dalam kebijakan negara. Tiga isu utama yang sering muncul dalam diskusi mengenai perkembangan dan perlindungan seni tari adalah komersialisasi yang dapat mengurangi makna spiritual dan filosofisnya, homogenisasi budaya akibat globalisasi yang dapat mengikis keberagaman tari tradisional, serta pandangan bahwa seni tari

[24] John Clammer (2012). *Culture, Development and Social Theory: Towards an Integrated Social Development.* London: Zed Books

memiliki dampak terbatas dalam kebijakan negara dibandingkan sektor ekonomi dan politik. Dalam tulisan ini, saya akan mengemukakan tiga argumen yang melawan pandangan-pandangan tersebut dan memberikan refutasi untuk menunjukkan bahwa seni tari tetap dapat berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya dan perannya dalam kebijakan negara.

Komersialisasi Seni Tari dan Pengaruh terhadap Makna Spiritual dan Filosofisnya

Salah satu argumen yang sering diajukan adalah bahwa komersialisasi seni tari dapat mereduksi makna spiritual dan filosofisnya. Seni tari, yang dalam banyak tradisi budaya memiliki dimensi spiritual dan simbolik yang mendalam, dianggap dapat kehilangan nilai-nilai tersebut ketika dijadikan objek komoditas yang dipertontonkan semata untuk tujuan hiburan dan keuntungan finansial. Hal ini menjadi kekhawatiran yang sah, terutama di era modern yang kerap melihat seni lebih sebagai produk yang dapat dijual daripada sebagai medium ekspresi budaya yang mendalam. Banyak pihak berpendapat bahwa dengan semakin komersialnya pertunjukan tari, makna asli dari tari sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan alam atau Tuhan bisa tergerus.

Namun, refutasi terhadap argumen ini adalah bahwa regulasi yang tepat dan kurasi ketat oleh lembaga budaya dapat menjaga keseimbangan antara ekonomi dan pelestarian nilai budaya. Dalam hal ini, lembaga-lembaga budaya seperti pemerintah, komunitas seni, dan institusi pendidikan berperan penting dalam menetapkan standar kualitas dan nilai-nilai yang harus dijaga dalam setiap pertunjukan tari. Melalui regulasi yang tepat, seperti pendaftaran tari sebagai warisan budaya tak benda, serta kurasi yang bijaksana terhadap pertunjukan tari yang bersifat komersial, nilai spiritual dan filosofis dari tari dapat dipertahankan.

Sebagai contoh, festival seni tari yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga seni dapat memiliki kurasi yang memastikan bahwa pertunjukan tari yang dipentaskan tidak hanya berfokus pada daya tarik komersial tetapi juga mengedepankan makna budaya dan nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya. Regulasi yang memisahkan seni tari yang bersifat komersial dari seni tari yang lebih mendalam dan penuh makna dapat memastikan bahwa kedua jenis tari ini dapat berjalan beriringan tanpa saling mengurangi kualitas dan tujuan masing-masing. Dengan adanya kebijakan ini, seni tari tetap bisa berkembang dalam konteks ekonomi yang sehat tanpa mengorbankan nilai spiritual dan filosofis yang dimilikinya.

Homogenisasi Budaya Akibat Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Keberagaman Tari Tradisional

Isu lain yang sering muncul adalah dampak globalisasi yang menyebabkan homogenisasi budaya, yang dapat mengikis keberagaman tari tradisional. Seiring dengan masuknya budaya global, banyak bentuk seni, termasuk tari, mengalami pergeseran yang cenderung menuju keseragaman. Berakar pada pengamatan dunia nyata, arsitek sekaligus sejarahwan urban Nezar Alsayyad mempertanyakan konsep tradisi - apakah globalisasi kontemporer akan membuktikan kehancurannya atau apakah ada proses berakhirnya dan pembaruan secara bersamaan.[25] Tari tradisional yang kaya akan nilai-nilai lokal dan karakteristik budaya dapat terancam terpinggirkan karena lebih banyaknya permintaan untuk bentuk seni yang lebih modern atau populer secara internasional. Dalam pandangan ini, globalisasi dapat menyebabkan tari tradisional kehilangan eksistensinya atau bahkan mengalami perubahan besar yang mengubah esensi dari bentuk tari tersebut.

Namun, refutasi terhadap argumen ini adalah bahwa adaptasi dan inovasi tari justru dapat menjaga relevansi budaya tanpa kehilangan esensi tradisionalnya. Seni tari bukanlah bentuk yang statis; ia selalu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Tari tradisional dapat mengalami transformasi dengan cara yang memperkaya nilai budaya dan estetika yang terkandung di dalamnya, tanpa mengubah inti dari tradisi tersebut. Misalnya, beberapa seniman tari telah berhasil menggabungkan elemen-elemen tari tradisional dengan tari kontemporer, menciptakan bentuk-bentuk baru yang tetap mempertahankan akar budaya tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman.

Adaptasi ini tidak berarti mengorbankan esensi dari tari tradisional, tetapi justru memberinya ruang untuk berkembang dan bertahan. Dalam beberapa kasus, tari tradisional yang dipadukan dengan elemen-elemen global, seperti teknologi atau genre musik yang lebih kontemporer, justru membawa tarian tersebut ke audiens yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini juga membuka kesempatan bagi generasi muda untuk lebih tertarik mempelajari tari tradisional, karena mereka melihat bagaimana tari tersebut dapat diterima dan dihargai dalam konteks modern. Dengan demikian, globalisasi tidak selalu membawa dampak negatif terhadap tari tradisional, melainkan dapat

[25] Nezar Alsayyad (2004). *The End of Tradition.* New York: Routledge.

menjadi kesempatan untuk memperkenalkan dan melestarikan tari sebagai bagian dari keberagaman budaya. Di sisi lain, ada pendapat John Tomlinson mengenai globalisasi dan homogenisasi ini. Ia menolak pandangan reduksionis bahwa globalisasi semata-mata menghasilkan homogenisasi budaya global melalui dominasi budaya Barat atau Amerika. Sebaliknya, ia menyoroti bagaimana globalisasi juga berkontribusi pada hibridisasi budaya dan pembentukan identitas yang lebih kompleks.[26] Tomlinson lebih lanjut menguraikan bahwa globalisasi tidak hanya menyebarkan produk dan nilai budaya tertentu secara luas tetapi juga menciptakan interaksi dinamis antara budaya lokal dan global. Ia memperkenalkan konsep *complex connectivity*, yakni keterhubungan sosial, ekonomi, dan budaya yang semakin intens akibat globalisasi. Keterhubungan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan mengadopsi unsur-unsur budaya yang berbeda, yang dapat menghasilkan transformasi budaya tanpa harus mengarah pada keseragaman total.

Peran Seni Tari dalam Kebijakan Negara yang Terbatas Dibandingkan dengan Sektor Ekonomi dan Politik

Argumen ketiga yang sering diajukan adalah bahwa seni tari hanya memiliki dampak terbatas dalam kebijakan negara, terutama jika dibandingkan dengan sektor ekonomi dan politik yang lebih dominan. Seni tari sering dianggap sebagai sektor yang kurang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara dan tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan nasional, yang lebih fokus pada sektor-sektor yang lebih langsung berhubungan dengan pembangunan ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan politik. Dalam pandangan ini, seni tari dianggap sebagai bagian dari sektor kebudayaan yang lebih marginal dan tidak seberapa berperan dalam menentukan arah kebijakan negara.

Namun, refutasi terhadap pandangan ini adalah bahwa seni tari memiliki dimensi multidisiplin yang mempengaruhi berbagai sektor penting dalam kebijakan negara, seperti diplomasi, hukum, ekonomi, dan identitas nasional. Pertama, seni tari memiliki peran yang sangat besar dalam diplomasi budaya, di mana pertunjukan seni tari sering digunakan sebagai alat untuk membangun hubungan internasional dan memperkenalkan budaya suatu negara ke dunia internasional. Pertunjukan tari Indonesia yang ditampilkan di luar negeri, misalnya, bukan hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia dan membangun citra positif negara di mata dunia.

[26] John Tomlinson, (1999). *Globalization and Culture*. Chicago: Chicago University Press.

Selain itu, seni tari juga berperan dalam sektor ekonomi kreatif yang semakin berkembang. Tari tidak hanya memberikan kontribusi pada sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang kerja dalam industri kreatif, seperti produksi kostum, musik, dan pengelolaan acara. Oleh karena itu, seni tari memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, seni tari juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional. Dalam konteks kebijakan negara, seni tari menjadi salah satu simbol yang menggambarkan keberagaman budaya Indonesia dan menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat.

Seni tari, dengan segala dimensinya, memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada yang sering dipersepsikan. Melalui pendekatan yang lebih holistik, kita dapat melihat bahwa seni tari bukan hanya menjadi bagian dari sektor budaya, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk dalam pembangunan ekonomi, diplomasi, dan pembentukan identitas bangsa.

Bisa disimpulkan bahwa dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, argumen-argumen yang meragukan pentingnya perlindungan dan pengembangan seni tari dapat direspons dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada pemahaman terhadap dimensi budaya, ekonomi, dan sosial dari seni tari. Dengan regulasi yang tepat, inovasi yang bijaksana, serta pengakuan terhadap kontribusi seni tari dalam kebijakan negara, kita dapat memastikan bahwa seni tari tetap memainkan peran penting dalam menjaga dan memperkenalkan keberagaman budaya, baik di tingkat lokal maupun global. Seni tari tidak hanya berfungsi sebagai media ekspresi budaya, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi, diplomasi, dan identitas nasional yang kuat.

Kesimpulan

Seni tari Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kedaulatan budaya Indonesia. Sebagai bagian dari tradisi yang kaya dan beragam, tari di Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi seni semata, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkenalkan dan mempertahankan identitas budaya Indonesia di kancah global. Melalui diplomasi budaya, seni tari dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjalin hubungan internasional dan membangun citra positif negara. Pertunjukan tari tradisional, yang disertai dengan makna filosofis dan simbolisme yang mendalam, menjadi jembatan bagi dunia luar untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia. Di sisi lain, seni tari juga berperan dalam sektor hukum dan ekonomi, di mana pengakuan terhadap tari sebagai warisan budaya tak

benda dapat melindungi dan memelihara nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Selain itu, seni tari berkontribusi pada sektor ekonomi kreatif, terutama melalui industri pariwisata dan kegiatan yang melibatkan seniman, pengrajin, dan komunitas terkait.

Namun, tantangan besar yang dihadapi dalam mempertahankan peran strategis seni tari Yogyakarta adalah ancaman komersialisasi dan homogenisasi budaya. Di tengah globalisasi yang terus berkembang, seni tari bisa saja kehilangan esensi dan makna aslinya jika tidak dikelola dengan kebijakan yang bijaksana. Komersialisasi yang berlebihan, yang lebih mementingkan aspek keuntungan finansial daripada pelestarian nilai-nilai budaya, dapat merusak integritas tari sebagai bagian dari warisan budaya. Begitu pula, globalisasi yang mendorong homogenisasi budaya dapat menyebabkan tari tradisional terpinggirkan dan kurang dihargai, terutama ketika budaya global yang lebih dominan memasuki ranah lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi melalui industri kreatif dan pelestarian nilai-nilai budaya yang terkandung dalam seni tari. Regulasi yang mengatur komersialisasi seni tari dan kurasi yang bijaksana terhadap pertunjukan seni akan memastikan bahwa budaya tetap terlindungi tanpa menghambat potensi ekonomi yang ditawarkan oleh seni tari.

Keberlanjutan seni tari sebagai instrumen kedaulatan budaya memerlukan sinergi antara pemerintah, seniman, dan masyarakat. Pemerintah, melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pelestarian seni tari sebagai warisan budaya tak benda, memiliki peran penting dalam memberikan dukungan hukum dan kelembagaan. Seniman, sebagai pelaku utama, harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tari tradisional. Masyarakat juga memiliki peran vital dalam memastikan bahwa seni tari tetap hidup dan dihargai sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Kolaborasi antara ketiga elemen ini—pemerintah, seniman, dan masyarakat—akan menciptakan ekosistem yang mendukung kelangsungan dan pengembangan seni tari sebagai instrumen yang memperkuat kedaulatan budaya Indonesia.

Dengan demikian, peran seni tari Yogyakarta dalam memperkuat kedaulatan budaya Indonesia adalah suatu hal yang tak terelakkan. Seni tari bukan hanya sebagai hiburan atau ekspresi budaya semata, tetapi sebagai bagian integral dari diplomasi budaya, pelestarian hukum, dan penggerak ekonomi kreatif. Tantangan yang dihadapi, seperti komersialisasi dan homogenisasi budaya, harus dikelola dengan kebijakan yang bijaksana, sementara keberlanjutan tari sebagai instrumen kedaulatan budaya memerlukan kerjasama antara pemerintah, seniman, dan masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai

budaya tetap terjaga. Dengan adanya sinergi ini, seni tari Yogyakarta dapat terus berkembang dan berkontribusi pada penguatan identitas nasional dan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam.

Daftar Sumber

Alsayyad, Nezar (2004). *The End of Tradition.* New York: Routledge

Clammer, John (2012). *Culture, Development and Social Theory* London: Zed Books

Geertz, Clifford (1973). *The Interpretation of Cultures.* New York City: Basic Books

Nye, Joseph (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics.* United States: PublicAffairs

Said, Edward (1993). *Culture and Imperialism.* London: Chatto Windus

Tomlinson, John (1999). *Globalization and Culture*. Chicago: Chicago University Press.

Sumber lain:

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

UNESCO Reports on Intangible Cultural Heritage

Gilang Cahyo Gumilar. Festival Kesenian Yogyakarta Tahun 1989 – 1994. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 4, No. 1, Maret 2016

https://www.pref.kyoto.jp/en/01-04-02.html
https://pusdok.sv.ugm.ac.id/2019/10/04/generasi-milenial-dan-eksistensi-tari-angguk-kulon-progo/
https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/culture-and-information/
https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/1638-penetapan-sumbu-filosofi-yogyakarta-sebagai-warisa-budaya-dunia-oleh-unesco
https://fky.id/

Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Keberlanjutan UMKM sebagai Bentuk Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Angga Pandu Wijaya
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Semarang
apwijaya@mail.unnes.ac.id

Pada era saat ini UMKM merupakan elemen penting dalam perekonomian dan mampu mendorong *multiplier effect*. UMKM mampu memberikan dukungan pada pemberdayaan masyarakat, melalui pembukaan lapangan kerja, sehingga menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Kadin pada Tahun 2023, Kontribusi UMKM sebanyak 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun demikian, keberlanjutan bisnis UMKM dalam jangka panjang masih menghadapi risiko kegagalan bisnis. Pada Tahun 2022, UMKM mengalami pertumbuhan -0,70% yang menandai bahwa UMKM masih mengalami risiko kegagalan bisnis. Masih terbatasnya riset yang mengeksplorasi *business continuity*, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberlanjutan bisnis UMKM.
Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif melalui fenomenologi, yaitu menempatkan pengalaman narasumber sebagai sumber data. Narasumber penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu pemilik usaha dengan pengalaman minimal lima tahun. Pertimbangan kriteria tersebut adalah mampu menjelaskan keberlanjutan usaha yang telah dilakukan. Teknik pengambilan data adalah dengan mempergunakan wawancara mendalam. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan mempergunakan Nvivo. Interpretasi data faktor-faktor penentu keberlanjutan bisnis UMKM dilakukan dengan *social network analysis*.

Hasil penelitian melalui *social network analysis* menemukan bahwa faktor-faktor penentu keberlanjutan UMKM, yaitu (a) kemampuan adaptasi, (b) tata kelola keuangan, (c) kualitas, hubungan pelanggan, dan penciptaan nilai perusahaan, dan (c) inovasi, kemampuan media sosial, dan orientasi pasar. Temuan lain dalam penelitian ini adalah pemanfaatan digitalisasi yang memperkuat faktor internal dan eksternal mampu mengakselerasi pertumbuhan usaha. Ketiga faktor, yaitu internal, eksternal, dan teknologi menegaskan pentingnya pandangan tentang sumber daya dalam sebuah usaha, sehingga hasil penelitian ini memperkuat teori *Resource-Based View* (RBV).

Penelitian ini telah mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyusun *business continuity*, serta peran penting digitalisasi dalam menentukan keberlanjutan bisnis UMKM. Implikasi penelitian ini adalah sebagai landasan penelitian selanjutnya dalam menentukan faktor-faktor keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan dalam memperkuat perekonomian di masyarakat. Kebijakan dalam bentuk pelatihan keterampilan adalah aspek penting dalam memperkuat sumber daya wirausaha yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Keberlanjutan Bisnis, UMKM, *Resource-Based View*

LATAR BELAKANG

Business continuity merupakan komponen yang penting untuk menilai kemampuan bisnis dalam melakukan adaptasi, inovasi, dan tata kelola yang efektif serta efisien (Chatzistelios et al., 2022). Usaha yang mempunyai orientasi pada jangka panjang membutuhkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan efisien. Pada era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, *business continuity* menjadi faktor kunci bagi perusahaan untuk tetap bertahan dan berkembang. *Business continuity* merupakan kemampuan sebuah bisnis untuk bertahan dan berkembang ditengah persaingan yang ketat (Schmid et al., 2021). *Business continuity* tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi turut mencakup strategi pengelolaan jangka panjang yang memungkinkan perusahaan tetap kompetitif. Konsep ini menekankan pentingnya efisiensi operasional, perencanaan strategis, serta pengambilan keputusan berbasis data untuk mendorong bisnis senantiasa relevan dan berkembang dalam jangka panjang.

Salah satu faktor utama dalam *business continuity* adalah inovasi. Keberadaan inovasi memungkinkan perusahaan untuk terus berkembang dengan menciptakan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta memanfaatkan teknologi yang lebih efisien. Selain itu, bisnis yang berkelanjutan juga menuntut tata kelola yang baik, termasuk dalam aspek transparansi, kesesuaian terhadap regulasi, serta pengelolaan risiko bisnis yang terukur (Steen et al., 2024). Perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan bisnis dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti peningkatan *brand image* di masyarakat, loyalitas pelanggan, serta daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, pengelolaan jangka panjang yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk memasuki tantangan pasar dengan lebih fleksibel dan adaptif. *Business continuity* tidak hanya sebatas tren, melainkan kebutuhan strategis bagi perusahaan untuk menghadapi tantangan masa depan. Terdapat pengelolaan sumber daya secara terukur, kemampuan berinovasi, serta menerapkan tata kelola yang efektif, perusahaan dapat memastikan kelangsungan bisnisnya sekaligus mempertahankan posisi kompetitif di industri yang terus berkembang (Corrales-Estrada et al., 2021).

Salah satu bentuk bisnis adalah UMKM, yang merupakan bisnis dengan sumber daya yang terbatas. Di Indonesia, UMKM menjadi menarik karena jumlahnya yang sangat banyak meskipun memiliki berbagai keterbatasan, namun tetap mampu dalam menggerakkan perekonomian. UMKM memiliki keterbatasan finansial, sumber daya manusia yang terbatas, serta tidak memiliki visi dan misi sebagaimana perusahaan besar (Prabawanti et al., 2023). Namun demikian, banyak usaha di Indonesia berbentuk UMKM dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kadin pada Tahun 2023, Kontribusi

UMKM sebanyak 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun demikian, keberlanjutan bisnis UMKM dalam jangka panjang masih menghadapi risiko kegagalan bisnis. Pada Tahun 2022, UMKM mengalami pertumbuhan -0,70% yang menandai bahwa UMKM masih mengalami risiko kegagalan bisnis.

UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong inovasi di sektor bisnis lokal. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan seperti akses terbatas terhadap pendanaan pada sektor perbankan, kurangnya literasi digital, dan keterbatasan dalam pemasaran, UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM dibayangi oleh kegagalan yang tinggi karena keterbatasan tersebut, sehingga masih diperlukan strategi yang tepat dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM, seperti dukungan teknologi, akses keuangan yang lebih luas, serta peningkatan kapasitas manajerial bagi para pelaku UMKM. UMKM dapat berkembang dan tetap relevan dalam persaingan pasar yang semakin ketat ketika mempunyai strategi yang tepat. Pengelolaan yang baik, inovasi, serta adaptasi terhadap perubahan pasar menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan UMKM (Asrol et al., 2022). Dengan demikian, memperkuat UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan bisnis individu, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional.

Masih belum diketahui secara jelas bagaimana UMKM bisa bertahan di tengah ketidakpastian bisnis. Kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor utama yang memungkinkan UMKM tetap eksis meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya menjadi perhatian penting dalam studi keberlanjutan bisnis. Beberapa UMKM mampu bertahan dalam jangka panjang, sementara yang lain mengalami kesulitan untuk berkembang atau bahkan bertahan dalam persaingan. Salah satu aspek yang perlu diteliti lebih lanjut adalah identifikasi faktor-faktor yang diterapkan oleh UMKM untuk mengatasi tantangan yang ada. Banyak UMKM dianggap bertahan melalui fleksibilitas operasional, serta kreativitas dalam pemasaran. Faktor lain yang diduga adalah kepemimpinan dan kemampuan pengelolaan bisnis juga menjadi elemen penting menentukan keberhasilan UMKM.

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis *Business continuity* di UMKM. *Business continuity* diperlukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, sehingga mampu menopang perekonomian pada tingkat lokal. Perputaran ekonomi semakin kuat dengan munculnya UMKM. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai strategi bagi UMKM dan landasan kebijakan bagi pemangku kepentingan. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat ketidakpastian ekonomi yang terus berlangsung, terutama dalam menghadapi perubahan pasar global dan tantangan digitalisasi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana UMKM dapat meningkatkan daya

saing dan mempertahankan keberadaannya dalam jangka panjang dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Memahami aspek *Business continuity* di UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi langkah penting dalam membangun fondasi yang lebih kuat bagi sektor UMKM agar dapat terus berkembang dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji melalui perspektif narasumber (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Dengan demikian, penelitian ini lebih berfokus pada proses interpretatif dan deskriptif dibandingkan dengan pengukuran numerik. Jenis penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu dalam kehidupan mereka. Fenomenologi berusaha mengungkap makna yang tersembunyi di balik pengalaman seseorang serta bagaimana individu menginterpretasikan realitas (Van Manen, 2017). Dalam penelitian ini, fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman narasumber secara mendalam melalui wawancara mendetail, observasi, dan analisis reflektif terhadap data yang diperoleh.

Tujuan penelitian fenomenologi adalah untuk memahami esensi dari suatu pengalaman sebagaimana yang dialami oleh individu tanpa intervensi asumsi atau teori yang sudah ada sebelumnya (van Manen, 2016). Penelitian ini berupaya menggali struktur pengalaman manusia serta menemukan pola-pola yang muncul dalam persepsi dan interpretasi narasumber terhadap fenomena tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana individu memberi makna terhadap pengalaman mereka, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena yang diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dengan lama usaha minimal 5 tahun. Kriteria ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pemilik usaha yang telah menjalankan bisnisnya dalam jangka waktu tersebut diyakini memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Selain itu, mereka telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan pasar, persaingan bisnis, serta krisis ekonomi seperti pandemi. Oleh karena itu, UMKM yang bertahan lebih dari 5 tahun dapat

dikategorikan sebagai bisnis yang *survive*, sehingga pengalaman dan wawasan mereka menjadi relevan untuk penelitian ini.

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber guna mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai strategi, tantangan, dan faktor keberlanjutan bisnis mereka. Kedua, hasil wawancara ditranskripsi secara verbatim untuk memastikan akurasi data. Ketiga, dilakukan proses coding, yaitu pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggali makna pengalaman narasumber. Proses analisis ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Nvivo, yang memungkinkan peneliti mengorganisir, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data secara sistematis. Terakhir, dilakukan validasi data melalui triangulasi, yakni membandingkan hasil wawancara dengan sumber lain atau melakukan konfirmasi kepada narasumber guna memastikan keabsahan temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini dianalisis dengan Nvivo, yang menghasilkan *word frequency* yang signifikan dan menemukan bahwa fokus dari narasumber adalah pelanggan dan bisnis sebagaimana tampak pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Word Frequency

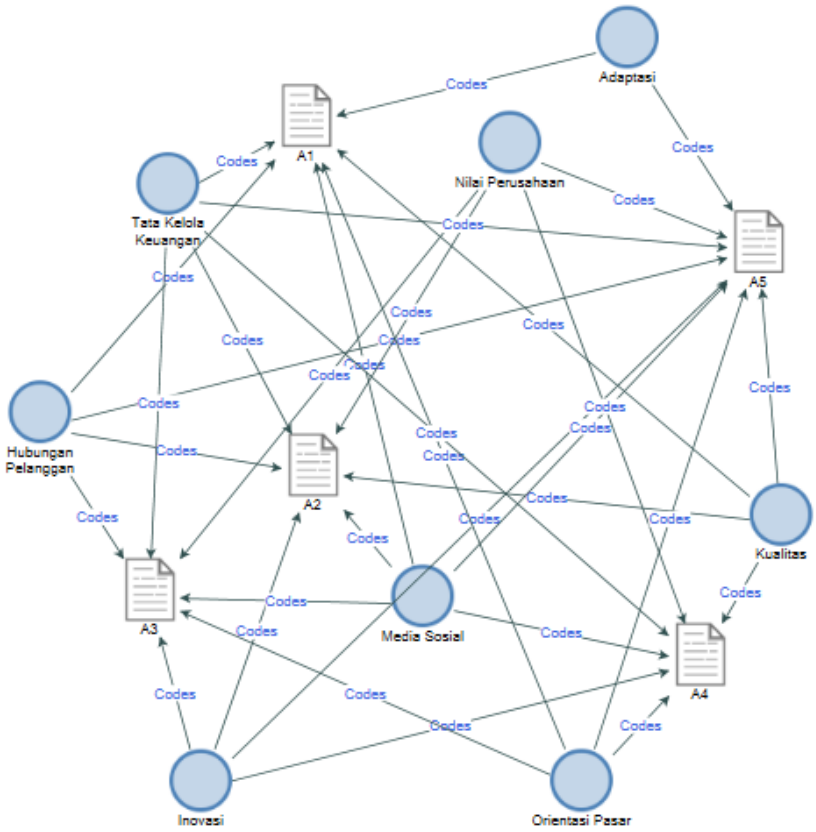
Hasil wawancara sejalan dengan temuan penelitian bahwa orientasi yang dilakukan UMKM yang mempunyai *business continuity* adalah yang berorientasi pelanggan. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya orientasi pelanggan, yaitu pendekatan strategis yang mengedepankan kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan. Dengan menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian, UMKM

dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan harapan konsumen, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pentingnya orientasi pelanggan adalah untuk memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang ditawarkan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga relevan dengan tren dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Dalam konteks UMKM, orientasi pelanggan berperan dalam menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan antara bisnis dan pelanggan. Dengan memahami preferensi dan umpan balik pelanggan, UMKM dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Hal ini juga berkontribusi pada pengembangan inovasi yang didasarkan pada masukan langsung dari pelanggan.

Orientasi pelanggan membantu UMKM dalam membangun reputasi yang baik di pasar. Pelanggan yang puas tidak hanya akan kembali untuk membeli produk atau layanan, tetapi juga akan merekomendasikan bisnis kepada orang lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan basis pelanggan dan penjualan. Dengan memprioritaskan orientasi pelanggan, UMKM tidak hanya dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang ketat, tetapi juga dapat berkembang dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Orientasi pelanggan turut berdampak pada keputusan strategis yang diambil oleh UMKM. UMKM dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan merancang kampanye yang dapat menarik perhatian pelanggan baru. Penelitian ini menekankan bahwa UMKM yang berhasil adalah mereka yang mampu menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, orientasi pelanggan bukan hanya sekadar pendekatan bisnis, tetapi juga merupakan fondasi yang penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang UMKM.

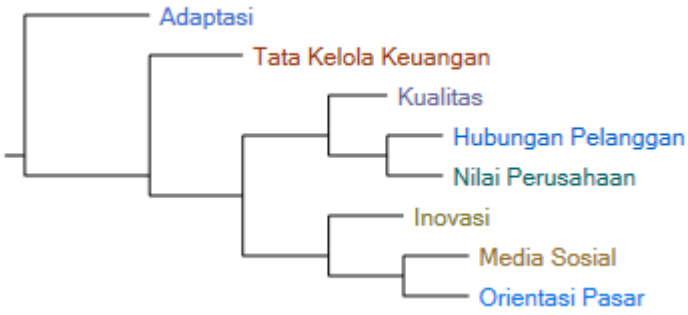
Penelitian ini turut melakukan analisis project map di Nvivo, yaitu alat yang digunakan untuk mengorganisasi dan menganalisis data kualitatif secara sistematis. Dengan menggunakan project map, peneliti dapat menghubungkan antara jawaban narasumber dengan coding yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga mempermudah dalam memahami pola-pola yang muncul dari data yang diperoleh. Proses ini melibatkan pengelompokan informasi berdasarkan tema dan subtema yang relevan, yang mencerminkan perspektif narasumber terkait dengan fenomena yang diteliti. Hasil project map sebagaimana Gambar 2 menemukan bahwa jawaban narasumber telah konsisten dan memasuki fase jenuh (*saturated*), yang berarti bahwa peneliti tidak lagi menemukan informasi baru yang signifikan dari wawancara yang dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa data yang telah dikumpulkan cukup untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian fenomenologi ini, fase jenuh menjadi indikator bahwa penelitian telah berhasil menemukan hal-hal yang saling terkait,

seperti adaptasi, tata kelola yang baik, kualitas produk atau layanan, hubungan dengan pelanggan, nilai perusahaan, inovasi, dan pemanfaatan media sosial.



Gambar 2. Project Map

Faktor-faktor ini saling berhubungan dalam konteks *Business continuity* UMKM. Misalnya, orientasi pelanggan yang kuat mendukung inovasi produk, sementara tata kelola yang baik memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien untuk adaptasi terhadap perubahan pasar. Selain itu, kualitas produk yang tinggi dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan nilai perusahaan dan reputasi di pasar. Dengan demikian, analisis project map tidak hanya berfungsi untuk memvisualisasikan data, tetapi juga untuk mengkonfirmasi bahwa faktor-faktor yang berkontribusi pada keberlanjutan bisnis UMKM saling terkait dan saling mendukung. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan kualitatif dalam menggali pengalaman subjektif dan konteks yang mempengaruhi keputusan serta strategi UMKM dalam mencapai keberlanjutan.



Gambar 3. Hasil Cluster Map

Penelitian ini menghasilkan cluster analisis di Nvivo pada Gambar 3, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tema dan pola yang muncul dari jawaban narasumber. Dengan menggunakan cluster analisis, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi *Business continuity* UMKM secara lebih mendalam. Melalui proses ini, data yang telah dikumpulkan dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang mewakili tema utama yang relevan dengan penelitian, seperti adaptasi, tata kelola, kualitas produk atau layanan, hubungan dengan pelanggan, nilai perusahaan, inovasi, dan pemanfaatan media sosial.

Penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang saling terkait, yaitu orientasi pelanggan yang kuat berkontribusi pada inovasi produk dan layanan, sementara tata kelola yang baik memungkinkan UMKM untuk mengelola keuangan secara efektif dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Kualitas produk atau layanan yang tinggi tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan mereka, yang berdampak positif pada nilai perusahaan. Di sisi lain, pemanfaatan media sosial sebagai alat pemasaran dan komunikasi dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan, sehingga memperkuat orientasi pelanggan yang telah dibangun. Dengan demikian, hasil cluster analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM dalam mencapai sustainability bisnis sangat bergantung pada integrasi faktor-faktor tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana UMKM dapat memanfaatkan keterkaitan antar faktor ini untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan di pasar yang semakin kompetitif. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi, UMKM dapat menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

DISKUSI

Hasil penelitian ini menemukan bahwa adaptasi merupakan faktor penting dalam *Business continuity*. Adaptasi merupakan kemampuan UMKM dalam menyesuaikan diri

dengan berbagai perubahan, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Kemampuan ini mencakup fleksibilitas dalam menghadapi tantangan ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan preferensi konsumen, serta kebijakan pemerintah yang terus berkembang. Tanpa adanya adaptasi, UMKM akan kesulitan bertahan di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adaptasi bagi UMKM berbentuk kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebijakan serta peraturan. Kebijakan pemerintah terkait perpajakan, izin usaha, dan regulasi lingkungan bisnis sering kali mengalami perubahan, sehingga UMKM didorong selalu memperbarui informasi dan menyesuaikan operasional mereka agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku (Colclough et al., 2019). Selain itu, adaptasi terhadap kebijakan juga mencakup kemampuan untuk memanfaatkan program bantuan atau insentif dari pemerintah yang dapat mendukung pertumbuhan usaha.

Adaptasi turut berkaitan dengan strategi UMKM dalam berbagai bidang, seperti pemasaran, inovasi produk, manajemen keuangan, dan operasional bisnis (Kim, 2021). Dalam pemasaran, UMKM harus mampu mengikuti tren digitalisasi dengan memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Dari sisi inovasi, UMKM yang dapat menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pasar akan lebih mudah bertahan dan berkembang. Manajemen keuangan yang fleksibel juga menjadi bagian dari adaptasi, yaitu UMKM mampu mengelola kas dengan baik, menyesuaikan harga jual, serta mencari sumber pendanaan alternatif saat menghadapi kendala modal. Selain itu, adaptasi juga mencakup kesiapan UMKM dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi atau pandemi. UMKM yang dapat dengan cepat mengubah strategi bisnis, seperti beralih ke layanan online atau mengembangkan model usaha baru, cenderung lebih mampu bertahan dibandingkan yang tidak melakukan perubahan signifikan (Morgan et al., 2020). Oleh karena itu, adaptasi bukan hanya menjadi pilihan, tetapi juga kebutuhan utama bagi UMKM agar tetap kompetitif dan mencapai keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola UMKM merupakan komponen penting dalam *Business continuity*. Tata kelola yang dimaksud di sini merujuk pada kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dengan baik, yang mencakup manajemen keuangan yang terencana, pemisahan antara uang bisnis dan pribadi, serta manajemen risiko yang efektif. Kemampuan untuk mengelola keuangan secara efisien sangat krusial bagi UMKM untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis mereka. Dalam praktiknya, ini berarti UMKM harus memiliki sistem pencatatan yang akurat dan teratur untuk memantau pemasukan dan pengeluaran. Dengan adanya catatan keuangan yang baik, pemilik usaha dapat melakukan analisis terhadap kinerja keuangan, mengambil keputusan yang lebih tepat, dan merencanakan

strategi masa depan dengan lebih baik. Selain itu, pemisahan uang bisnis dan pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah kebingungan dalam pengelolaan keuangan. Ketika pemilik usaha mencampurkan kedua jenis uang ini, sulit untuk mengetahui seberapa sehat kondisi keuangan bisnis yang sebenarnya. Dengan memisahkan keuangan, pemilik dapat lebih mudah mengawasi arus kas, mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin muncul, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Prasetyo et al., 2023).

Manajemen risiko juga menjadi bagian integral dari tata kelola yang baik. UMKM perlu mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi operasional dan keberlanjutan bisnis mereka, baik itu risiko finansial, operasional, maupun pasar. Dengan melakukan analisis risiko dan merancang strategi mitigasi yang tepat, UMKM dapat meminimalkan dampak negatif dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Melalui tata kelola yang baik, UMKM tidak hanya dapat menjaga kesehatan finansial, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan (Reuter et al., 2022). Dengan manajemen keuangan yang efektif, pemisahan keuangan yang jelas, dan strategi manajemen risiko yang solid, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memastikan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tata kelola yang baik menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai *Business continuity* bagi UMKM.

Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas produk atau layanan berperan penting dalam *Business continuity* UMKM. Kualitas yang tinggi tidak hanya menjadi daya tarik bagi konsumen, tetapi juga merupakan salah satu faktor penentu dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Ketika konsumen merasa puas dengan produk atau layanan yang mereka terima, mereka lebih cenderung untuk kembali dan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. Mempertahankan kualitas produk atau layanan adalah langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan dan keberlangsungan usaha (Tirtayasa et al., 2021). Kualitas meliputi berbagai aspek, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, hingga pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya, dalam industri makanan, menggunakan bahan baku segar dan berkualitas akan mempengaruhi rasa serta keamanan produk. Di sisi lain, dalam sektor jasa, seperti salon kecantikan atau layanan kebersihan, keahlian dan profesionalisme karyawan sangat berpengaruh terhadap pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, UMKM perlu berinvestasi dalam pelatihan karyawan dan pengadaan bahan baku yang berkualitas untuk memastikan standar produk atau layanan tetap terjaga.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa inovasi dalam produk atau layanan sangat penting untuk mempertahankan kualitas. UMKM yang mampu beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar, serta terus melakukan perbaikan dan pengembangan produk, akan lebih mudah bersaing dan tetap relevan. Hal ini bisa berupa peluncuran varian produk baru,

peningkatan kemasan, atau pengembangan fitur layanan yang lebih baik. UMKM yang berkelanjutan aktif mendengarkan umpan balik dari pelanggan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan cara ini, mereka dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menjaga kepuasan pelanggan, tetapi juga mendorong inovasi dan perkembangan yang berkelanjutan.

Kualitas produk dan layanan yang tinggi berkontribusi pada reputasi bisnis di pasar. Dalam era informasi saat ini, reputasi yang baik dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform online, sehingga menarik lebih banyak pelanggan baru. Sebaliknya, produk atau layanan berkualitas rendah dapat merusak reputasi dan mengakibatkan penurunan penjualan serta kehilangan pelanggan. Fokus pada kualitas produk atau layanan adalah elemen kunci dalam strategi keberlanjutan UMKM. Dalam jangka panjang, investasi dalam kualitas akan menghasilkan pengembalian yang signifikan, baik dalam bentuk peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, maupun reputasi positif di mata masyarakat (Ruslaini, 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan dengan pelanggan serta nilai perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam *Business continuity* UMKM. Hubungan yang baik dengan pelanggan bukan hanya tentang transaksi, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas yang kuat. Dalam konteks UMKM, interaksi yang positif dengan pelanggan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong mereka untuk kembali menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Salah satu aspek penting dalam membangun hubungan ini adalah komunikasi yang efektif. UMKM perlu aktif mendengarkan kebutuhan dan umpan balik dari pelanggan, serta merespons dengan cepat dan tepat. Dengan memahami harapan pelanggan, UMKM dapat menyesuaikan penawaran mereka agar lebih relevan dan memenuhi ekspektasi pasar. Selain itu, keterlibatan pelanggan dalam proses pengembangan produk atau layanan, seperti melalui survei atau focus group discussions, juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan pelanggan terhadap merek, sehingga menciptakan ikatan yang lebih kuat.

Nilai perusahaan juga memainkan peran krusial dalam hubungan dengan pelanggan. Nilai-nilai yang dipegang oleh UMKM, seperti kejujuran, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang semakin sadar akan isu-isu sosial dan lingkungan. UMKM yang mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam praktik bisnis mereka tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga dapat menciptakan citra merek yang positif. Selain itu, penerapan nilai perusahaan dalam setiap aspek operasional, dari produksi hingga layanan purna jual, menunjukkan komitmen UMKM terhadap prinsip-prinsip yang mereka anut. Misalnya, UMKM yang fokus pada keberlanjutan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi limbah dan menggunakan bahan ramah lingkungan, yang

tidak hanya bermanfaat bagi planet ini tetapi juga menarik pelanggan yang peduli dengan lingkungan. Pentingnya hubungan dengan pelanggan dan nilai perusahaan juga terwujud dalam kemampuan UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan pasar (Utami et al., 2021). Dengan membangun hubungan yang kuat, UMKM dapat lebih mudah mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan yang berubah, serta menyesuaikan produk atau layanan mereka sesuai kebutuhan. Hubungan yang baik dengan pelanggan dan nilai perusahaan yang solid merupakan fondasi yang kuat bagi UMKM untuk mencapai keberlanjutan bisnis. Dengan fokus pada pengembangan hubungan yang positif dan penerapan nilai-nilai yang relevan, UMKM tidak hanya akan meningkatkan daya saing mereka, tetapi juga menciptakan basis pelanggan yang setia dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi UMKM, baik produk maupun proses, merupakan faktor kunci dalam mencapai *Business continuity*. Inovasi tidak hanya membantu UMKM untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang terus berkembang, tetapi juga memungkinkan mereka untuk tetap bersaing dalam pasar yang semakin ketat. Dalam konteks produk, inovasi dapat mencakup pengembangan varian baru, peningkatan kualitas, atau penerapan teknologi terkini untuk menciptakan produk yang lebih efisien dan menarik. Pentingnya inovasi produk terletak pada kemampuannya untuk menarik perhatian pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. UMKM yang rutin memperkenalkan produk baru atau memperbarui produk yang sudah ada akan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang dinamis. Misalnya, sebuah UMKM di sektor makanan dapat menciptakan menu baru yang sesuai dengan tren kesehatan atau diet tertentu, sementara UMKM di sektor fashion dapat menghadirkan koleksi yang terinspirasi oleh tren terbaru. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik produk, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Di sisi lain, inovasi proses juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya (Wahid & Zulkifli, 2021). Proses yang lebih efisien memungkinkan UMKM untuk mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang atau memberikan layanan. Efisiensi bisa meliputi penerapan teknologi baru, seperti otomatisasi, penggunaan perangkat lunak manajemen, atau penerapan praktik lean untuk meminimalkan pemborosan. Dengan mengoptimalkan proses, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.

Inovasi dalam manajemen juga dapat memperkuat posisi UMKM di pasar. Menerapkan metode baru dalam pengelolaan tim, penggunaan teknologi komunikasi yang lebih baik, atau pendekatan yang lebih fleksibel terhadap pekerjaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan mendorong kolaborasi. Ketika karyawan merasa terlibat dan dihargai, mereka cenderung lebih produktif dan berkontribusi pada inovasi perusahaan. Inovasi juga membantu

UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan eksternal, seperti tren pasar, regulasi, dan kondisi ekonomi yang tidak terduga. UMKM yang memiliki budaya inovasi yang kuat cenderung lebih cepat merespons perubahan dan mampu menyesuaikan strategi bisnis (Luu, 2023). Dalam konteks yang lebih luas, inovasi dapat membantu UMKM dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, misalnya dengan mengembangkan produk ramah lingkungan atau mengadopsi praktik produksi yang lebih berkelanjutan. Inovasi, baik produk maupun proses, adalah elemen penting yang mendukung *Business continuity* UMKM. Dengan terus berinovasi, UMKM dapat meningkatkan daya saing, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dalam dunia yang terus berubah ini, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi akan menjadi kunci sukses bagi UMKM.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam membentuk *Business continuity* UMKM. Di era digital ini, media sosial telah menjadi salah satu saluran utama bagi UMKM untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan produk, dan membangun merek. Media sosial memungkinkan UMKM untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Melalui *platform online*, UMKM dapat berkomunikasi secara langsung dengan audiens mereka, mendengarkan umpan balik, dan menanggapi pertanyaan atau kekhawatiran dengan cepat. Interaksi yang aktif ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan tetapi juga menciptakan rasa komunitas di sekitar merek. Ketika pelanggan merasa terhubung dengan bisnis, mereka lebih cenderung untuk kembali dan merekomendasikan produk kepada orang lain.

Media sosial juga menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan produk dan layanan. UMKM dapat memanfaatkan konten visual yang menarik, seperti foto dan video, untuk menunjukkan kualitas dan keunikan produk mereka. Kampanye pemasaran yang kreatif dan menarik di media sosial dapat menarik perhatian pelanggan baru dan memperkuat posisi merek di pasar (Jeza & Lekhanya, 2022). Dengan memanfaatkan fitur iklan berbayar yang ditawarkan oleh platform media sosial, UMKM juga dapat menargetkan audiens spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran mereka. Media sosial juga berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga untuk memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Dengan menganalisis data dan metrik yang tersedia di platform media sosial, UMKM dapat mengidentifikasi preferensi pelanggan dan menyesuaikan strategi bisnis mereka sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Selain itu, media sosial memberikan ruang bagi UMKM untuk memantau kompetitor dan mengevaluasi strategi. Media sosial merupakan alat yang sangat berharga bagi UMKM dalam mencapai *Business continuity*. Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif, UMKM dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan, memperkuat merek, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Keberadaan yang

kuat di media sosial akan membantu UMKM tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang dalam lanskap bisnis yang semakin kompetitif.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada *Business continuity* UMKM. Adaptasi, tata kelola yang baik, kualitas produk atau layanan, hubungan dengan pelanggan, nilai perusahaan, inovasi, dan pemanfaatan media sosial memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan usaha. UMKM yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, mengelola keuangan dengan baik, serta menjaga kualitas dan hubungan yang erat dengan pelanggan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Selain itu, inovasi dalam produk dan proses, serta pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi dan pemasaran, semakin memperkuat posisi UMKM di pasar yang kompetitif. Dengan fokus pada faktor-faktor ini, UMKM dapat menciptakan fondasi yang solid untuk keberlanjutan jangka panjang.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sustainability UMKM, serta melakukan studi longitudinal untuk memahami dampak jangka panjang dari strategi yang diterapkan. Penelitian lebih lanjut juga bisa menginvestigasi perbedaan faktor-faktor tersebut di berbagai sektor industri UMKM, guna mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif.

Implikasi praktis bagi UMKM dan stakeholder terkait mencakup pentingnya meningkatkan kemampuan adaptasi dan tata kelola keuangan, yang dapat membantu UMKM dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Stakeholder, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan, sebaiknya menyediakan pelatihan dan dukungan untuk membantu UMKM mengembangkan kemampuan manajerial dan keuangan. Selain itu, menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi dan akses ke teknologi informasi dapat memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem bisnis. Membangun kemitraan antara UMKM dan stakeholder juga dapat membuka peluang baru untuk kolaborasi dalam pengembangan produk, pemasaran, dan berbagi sumber daya, sehingga mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif bagi ekonomi lokal.

REFERENSI

Asrol, S., Lidyah, R., Hartini, T., & Muhammadinah, M. (2022). Peran Percepatan Transformasi Digital untuk Keberlanjutan Bisnis dan Pemulihan Ekonomi Pelaku UMKM di Kota Palembang Pascapandemi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*,

11(2). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14685

Chatzistelios, G., Kechagias, E. P., Gayialis, S. P., Papadopoulos, G. A., & Spyridonakos, N. E. (2022). Business Continuity During the COVID-19 Pandemic Era: Surviving and Improving the Quality Process Management System. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, *18*. https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.60

Colclough, S. N., Moen, Ø., Hovd, N. S., & Chan, A. (2019). SME innovation orientation: Evidence from Norwegian exporting SMEs. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, *37*(8). https://doi.org/10.1177/0266242619870731

Corrales-Estrada, A. M., Gómez-Santos, L. L., Bernal-Torres, C. A., & Rodriguez-López, J. E. (2021). Sustainability and resilience organizational capabilities to enhance business continuity management: A literature review. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(15). https://doi.org/10.3390/su13158196

Jeza, S., & Lekhanya, L. (2022). The influence of digital transformation on the growth of small and medium enterprises in South Africa. *Problems and Perspectives in Management*, *20*(3). https://doi.org/10.21511/ppm.20(3).2022.24

Kim, S. S. (2021). Sustainable growth variables by industry sectors and their influence on changes in business models of smes in the era of digital transformation. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(13). https://doi.org/10.3390/su13137114

Luu, T. D. (2023). Fostering strategic entrepreneurship of SMEs: the role of organisational change forces. *Management Decision*, *61*(3). https://doi.org/10.1108/MD-08-2021-1024

Morgan, T., Anokhin, S., Ofstein, L., & Friske, W. (2020). SME response to major exogenous shocks: The bright and dark sides of business model pivoting. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, *38*(5). https://doi.org/10.1177/0266242620936590

Prabawanti, B. E., Tarigan, T. M., & Handayani, P. (2023). DUKNGAN SOSIAL UNTUK KEBERLANJUTAN BISNIS KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN. *Share : Social Work Journal*, *13*(1). https://doi.org/10.24198/share.v13i1.42617

Prasetyo, M. H., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Bandung, E. (2023). Implementasi Konsep Smart Goal Setting Pada Bisnis M-Prod Demi Meningkatkan Business Value Implementation of the Smart Goal Setting Concept in the M-Prod to Increase Business Value. *Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri*, *2*(4).

Reuter, J., Dias, M. F., Sousa, M. J., Soobhany, A. R., & Hendi, A. (2022). Unlock Financial

Knowledge in Managers Through Games. *Proceedings of the European Conference on Games-Based Learning*, *2022-October*. https://doi.org/10.34190/ecgbl.16.1.842

Ruslaini, R. (2021). Establishing Sustainable Practices on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to Advance Indonesia's Economic Growth]. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3787801

Schmid, B., Raju, E., & Jensen, P. K. M. (2021). COVID-19 and business continuity - learning from the private sector and humanitarian actors in Kenya. *Progress in Disaster Science*, *11*. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2021.100181

Steen, R., Haug, O. J., & Patriarca, R. (2024). Business continuity and resilience management: A conceptual framework. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, *32*(1). https://doi.org/10.1111/1468-5973.12501

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Tirtayasa, S., Januri, J., Khair, H., & Kartaatmaja, R. S. (2021). Analysis of Resilience Priorities for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Deli Serdang District. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*. https://doi.org/10.17358/jma.18.2.215

Utami, D., Mutiah, M., & Sudrajat, A. (2021). Adaptation Strategy of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) Actors in The Middle of Covid Pandemic (Study in Surabaya and Sidoarjo). *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal*, *5*(1). https://doi.org/10.26740/metafora.v5n1.p52-57

van Manen, M. (2016). Phenomenology of Practice. In *Phenomenology of Practice*. https://doi.org/10.4324/9781315422657

Van Manen, M. (2017). But Is It Phenomenology? In *Qualitative Health Research*. https://doi.org/10.1177/1049732317699570

Wahid, R. A., & Zulkifli, N. A. (2021). Factors Affecting the Adoption of Digital Transformation among SME's in Malaysia. *Journal of Information Technology Management*, *13*(3). https://doi.org/10.22059/JITM.2021.83233

BIODATA

Angga Pandu Wijaya, merupakan dosen pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dan melanjutkan pada jenjang S2 di Program Studi Sains Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Dalam kesehariannya, penulis mengampu mata kuliah seminar manajemen pemasaran, kewirausahaan, dan pemasaran internasional. Penelitian yang banyak penulis lakukan adalah di bidang manajemen pemasaran dan kewirausahaan. Beberapa artikel penulis telah dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus dengan H-index 4, serta artikel yang terindeks SINTA. Kolaborasi penelitian telah banyak dilakukan penulis dengan peneliti dari beberapa universitas di Malaysia, Thailand, dan Taiwan. Penulis turut aktif dalam kegiatan ilmiah dalam bentuk konferensi, salah satunya di Saxion University of Applied Sciences, Belanda. Penulis turut berkontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diantaranya di Kabupaten Semarang, kabupaten Klaten, dan Kota Semarang dalam bentuk penguatan pemasaran bagi UMKM. Penulis turut membuat karya dalam bentuk buku, diantaranya Buku Ajar Perilaku Konsumen dan Pemasaran Global. Selain itu, penulis turut aktif menjadi konsultan bisnis pada beberapa usaha di Kota Semarang dan Kota Samarinda.

KERATON YOGYAKARTA SEBAGAI INTERMEDIARI KEKUASAAN: SEBUAH ANALISIS HISTORIS TENTANG HUBUNGAN PUSAT-DAERAH

Apri Nabila Wardani

SMA Negeri 9 Yogyakarta

Jalan Sagan 1, Yogyakarta Telepon (0274) 513434 Faksimile (0274) 520346 Laman; www.sma9jogja.com E-mail:info@sma9jogja.sch.id Kode Pos 55223 Hotline SMS Sekolah: 08112676078

Email: apriwardani11540@sma9jogja.sch.id

Abstrak

Penelitian menganalisis dinamika hubungan antara pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pihak pemerintah Republik Indonesia secara sudut pandang historis. Dengan mengkaji pada acuan peristiwa-peristiwa krusial seperti pemindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta dan peristiwa 1 Maret 1949, penelitian ini menganalisis peran aktif Keraton dalam mendukung perjuangan kemerdekaan dan memperkokoh kedaulatan negara. Melalui pendekatan historiografis, penelitian ini berusaha mengungkap kontribusi diplomasi Keraton, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, dalam membangun relasi yang harmonis antara kedua institusi. Lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisis peran Keraton sebagai representasi identitas Jawa dan pusat kebudayaan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memahami bagaimana nilai-nilai budaya Jawa turut membentuk dinamika politik nasional, serta bagaimana Keraton menjaga keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas hubungan antara institusi kerajaan dengan negara modern, serta kontribusi Keraton dalam pembentukan identitas nasional Indonesia.

Kata kunci: *Sejarah, Budaya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Amanat 5 September 1945, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nasionalisme, Identitas lokal, Kekuasaan, Otonomi daerah, Diplomatik, Republik Indonesia, Kedaulatan*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keraton Yogyakarta merepresentasikan institusi yang memiliki kompleksitas peran, tidak hanya sebagai pusat kekuasaan tradisional tetapi juga sebagai entitas yang mampu beradaptasi dalam berbagai fase sejarah Indonesia. Dalam perspektif tradisional Jawa, sebagaimana dikemukakan Magnis-Suseno (2001: 103), Keraton merupakan manifestasi kekuasaan yang bersumber dari wahyu ilahiah, di mana Sultan dipandang sebagai penerima pulung, ndaru, dan cahya nurbuat. Konsepsi ini meletakkan dasar legitimasi kultural yang kuat bagi peran Keraton dalam struktur sosial-politik Jawa. Posisi kekuasaan dalam lingkup adat istiadat masyarakat Jawa meyakini bahwa suksesi kepemimpinan Keraton umumnya mengikuti garis patrilineal yang mengakar kuat. Seseorang yang diangkat menjadi putra mahkota kemudian naik tahta bergelar Sultan haruslah putra tertua raja yang berasal dari permaisuri atau garwa padmi[1]. Hal ini bertujuan sebagai legitimasi mutlak bahwa Sultan yang memiliki supremasi terhadap Keraton dan keseluruhannya merupakan pemimpin murni keturunan garis biru yang dinaungi wahyu tumurun[2]. Konsep kedudukan Sultan kemudian ditafsirkan sebagai jiwa yang menghidupi Keraton atau dikenal sebagai konsep mikrokosmos[3]. Raja dan kerajaannya sebagai replika skala kecil dari pusat alam semesta. Pada Keraton, sentralisasi kedudukan baik secara politik ataupun filosofis mengacu kepada sang Sinuhun[4] Sultan.

Subanar (2006: 66) lebih lanjut mengelaborasi bahwa Sultan, sebagai sang Sinuhun, tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik tetapi juga institusi kultural yang menjadi sumber nilai-nilai kebijaksanaan. Dalam kapasitas ini, Keraton berfungsi sebagai pusat pembinaan karakter kepemimpinan yang menekankan prinsip-prinsip berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta, dan memayu hayuning bawana. Nilai-nilai filosofis ini kemudian menjadi landasan penting bagi peran intermediari Keraton dalam lingkup yang lebih luas.

Signifikansi kedudukan Keraton Yogyakarta sebagai monarki yang digdaya secara politik dan kultural semakin tampak dalam dinamika kolonialisme dan imperialisme. Di era

---

[1] Garwa Padmi diartikan sebagai istri utama.
[2] Kemuliaan.
[3] Dalam kosmologi (pensejajaran) dikenal dua konsep yaitu konsep makrokosmos dan mikrokosmos. Pemahaman tentang kedua konsep ini adalah tentang adanya jalinan keselarasan antara alam semesta dengan manusia didalamnya. Makrokosmos bermakna bentuk tatanan jagat raya yang memusatkan kekuatan terbesar sebagai inti yang dikelilingi bagian-bagian lain yang lebih kecil. Sementara mikrokosmos adalah bentuk penganalogian makrokosmos dalam skala yang lebih kecil, tepatnya dunia manusia. Dua konsep ini yang kemudian mengasumsikan bahwa posisi seorang raja dan kerajaannya dapat diartikan seperti gunung (meru).
[4] Baginda.

kolonial Belanda, Yogyakarta menyandang status Vorstenlanden, yang mencerminkan pengakuan atas otonomi relatif wilayah ini. Kemampuan Keraton mempertahankan eksistensi dan tata birokrasinya di tengah tekanan kolonial menunjukkan resiliensi institusional yang kuat. Momentum penting kemudian terjadi pada 1939, ketika GRM Dorodjatun naik tahta sebagai Sultan Hamengku Buwono IX dan melakukan penandatangan kontrak politik pemerintah Belanda berdasarkan pertimbangan spiritual[5].

Reorganisasi birokrasi Keraton terjadi secara signifikan, termasuk pembubaran institusi Pepatih Dalem pada tanggal 1 Agustus 1945. Sultan Hamengku Buwono IX selaku pembaharu Keraton tak serta merta mau terkungkung dalam protekoler pengaruh kolonial Belanda melalui kontrol kontrak politik dan Pepatih Dalem. Anggapan raja sebagai pucuk birokrasi yang hanya dapat menurut patuh pada bangsa penjajah mempengaruhi gagasan pemikiran dan tekad Sultan mengambil keputusan untuk bertindak merdeka dalam menjalankan dan mengorganisir jalan pemerintahan sesuai dengan kehendaknya; perpaduan unsur tradisional dan birokrasi modern, sejalan dengan ilmu serta pengalaman di Leiden.

Demikian dengan ditiadakannya jabatan Patih yang sudah ada sejak era pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I tersebut, Sultan Hamengku Buwono IX sepenuhnya memegang kendali parentah nagari dengan parentah luhur yang dipimpin oleh dua orang saudara Sultan yaitu B.P.H. Puruboyo dan B.P.H. Bintoro. Keduanya kemudian hari pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). B.P.H. Puruboyo selanjutnya akan diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dengan demikian Sultan selalu mendapat keterangan dari tangan pertama mengenai perkembangan politik di Jakarta sampai saat proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia[6].

Transformasi peran Keraton memasuki fase baru pada era pendudukan Jepang (1942-1945), ketika Yogyakarta diberi status Kooti (daerah istimewa). Secara birokrasi, Keraton pada masa pra kedatangan Jepang nyatanya telah mengalami perombakan strukturisasi peran dengan baik dibawah instruksi Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Namun demikian Jepang mengeluarkan peraturan tentang Pelaksanaan Pemerintahan Militer[7] merubah posisi Gubernur Hindia Belanda di Yogyakarta turun menjadi Residen Yogyakarta tepat pada tanggal 23 Maret 1942. Sesuai dengan posisi yang diberikan Jepang, Residen sementara bertindak mengawasi

[5] Atmakusumah (ed). (1982) Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: PT. Gramedia. p. 301.

[6] Iswantoro. "Peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia." JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 3.2 (2020): 158-181.

[7] Pasal 2 Peraturan tentang Pelaksanaan Pemerintah Militer, 7 Maret 1942, berbunyi: Komandan Militer Jepang akan menggunakan kekuasaan resmi Gubernul Jenderal.

wilayahnya serta bertanggungjawab atas ketenteraman kota selagi Jepang mengganyang sumber daya. Kondisi perlahan memasuki babak monopoli Jepang melalui propoganda perekonomian Yogyakarta. Manuver yang dilakukan Jepang guna mengambil hati rakyat tak cukup melalui jalur perekonomian, maka kemudian dibarengi dengan tinjauan secara kesenian dan aktivitas melobi pada kalangan pangreh praja dan rakyat[8]. Menyikapi tindakan Jepang, secara pribadi Sultan bersama saudara-saudaranya menggunakan strategi pendekatan pada rakyat dengan berkuda mengunjungi desa-desa setiap hari Minggu guna mempererat hubungan penguasa dengan kawulanya[9].

Pasca berakhirnya pendudukan Jepang, Sultan menyatakan kesediaannya bergabung dengan NKRI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kurang dari satu bulan kemudian, pihak Keraton Yogyakarta diikuti Kadipaten Pakualaman secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia, kulminasi dari adaptabilitas politik Keraton ini tercermin dalam Amanat 5 September 1945. Deklarasi yang dilaksanakan ini tak hanya menandai perubahan orientasi politik Keraton, tetapi juga meletakkan dasar bagi peran barunya sebagai pialang antara kepentingan pusat dan daerah dalam konteks negara modern Indonesia.

Berbagai sikap dan kebijakan modern nan demokratis yang dikeluarkan Sultan Hamengku Buwono IX pada akhirnya menghantarkan kota Yogyakarta beralih status menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah kotapraja yang bersifat otonom. Evolusi peran Keraton dari institusi tradisional yang berdaulat menuju entitas bergelar daerah otonomi khusus yang mampu berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas mencerminkan kompleksitas hubungan pusat-daerah dalam konteks Indonesia merdeka. Kemampuan Keraton untuk mempertahankan relevansinya sembari beradaptasi dengan perubahan sistem politik nasional melalui pergerakan peran para tokohnya, menjadikannya subjek yang menarik untuk dikaji dalam konteks intermediasi kekuasaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang diatas, penulis akan membatasi fokus penelitian pada beberapa pokok masalah berikut:

1. Bagaimana dinamika relasi Keraton Yogyakarta dengan Pemerintah RI dalam kacamata historis-yuridis?
2. Apa strategi Keraton sebagai penghubung pemerintahan pusat dan daerah?

[8] Asia Raya, 26 Juni 2602.
[9] Sinar Matahari, 27 Juli 2602.

3. Apa implikasi yuridis-politis dari hubungan Keraton-RI terhadap otonomi daerah?
4. Bagaimana manifestasi nilai-nilai tradisional Keraton dalam konteks negara modern?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis evolusi hubungan Keraton-RI secara kronologis.
2. Mengidentifikasi pola-pola intermediasi kekuasaan.
3. Menelisik peran kompleks tokoh kunci Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam pemerintahan pusat dan daerah.
4. Menelusur refleksi timbal balik dua pemerintahan melalui privillege paten.
5. Mengkaji implikasi nilai tradisional terhadap governance kontemporer.

D. Metodologi

Pada penelitian ini akan digunakan metode studi pustaka sebagai proses analisis yang berpatokan pada kaidah-kaidah dalam penelitian sejarah yaitu:

1. Pendekatan historiografis yang berpedoman pada kaidah penelitian sejarah.
2. Analisis dokumen yuridis.
3. Studi literatur komprehensif.

II. PEMBAHASAN

A. Perspektif Histori-Yuridis Dinamika Relasi Keraton Yogyakarta Dan Pemerintah Republik Indonesia

Legitimasi Historis Keraton Sebagai Entitas Politik: Vorstenlanden

Keraton Yogyakarta yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi merupakan entitas politik sovereign terkonstruksi melalui Perjanjian Giyanti 1755, yang menjadi landasan yuridis-formal pengakuan wilayah Yogyakarta sebagai Vorstenlanden di bawah administrasi kolonial Belanda. Secara administratif diketahui sebelumnya bahwa wilayah pemerintahan Sultan meliputi Karesidenan Madiun: 1) Madiun Kota, 2) Magetan, 3) Caruban, dan 4) separoh Pacitan; Karesidenan Kediri terdiri atas 1) Kertosono, 2) Kalangbret, dan 3) Ngrowo (Tulung Agung); Surabaya: Japan (Mojokerto); Rembang: Jipang (Bo- jonegoro) dan Teras Karas (Ngawen); Semarang: 1) Selo a- tau Seselo (tempat makam nenek moyang raja-raja Mataram), 2) Warung (Kuwu-Wirosari?), dan 3) sebagian Grobogan[10]. Wilayah kasultanan (Negara Agung dan Mancanegara) tersebut terhitung luas total sebanyak 87.050 karya.

Pada tanggal 17 Maret 1813 sempat terjadi pengurangan wilayah oleh pemerintah Inggris untuk diserahkan kepada pihak Pangeran Notokusumo (Paku Alam I). Luas tanah tersebut semakin berkurang setelah timbul peperangan Diponegoro dengan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan Perjanjian Klaten pada tanggal 27 September 1830. Dalam perjanjian ini masing- masing raja diwakili oleh pepatih dalem dan disaksikan oleh pihak Belanda. Perjanjian ini ditandatangani Sunan Paku Buwono VII pada tanggal 1 Oktober, dan oleh Sultan Hamengku Buwono V pada tanggal 24 Oktober 1830. Perjanjian Klaten ini menegaskan wilayah Yogyakarta dan Surakarta serta batas-batasnya. Wilayah Yogyakarta meli- puti Mataram serta Gunungkidul, dan wilayah Surakarta meliputi Pajang dan Sokowati. Batas yang ditentukan semula sungai Opak, tetapi karena alirannya tidak tentu, maka akan dibuat batas berupa jalan di Prambanan bujur ke utara sampai ke gunung Merapi dan ke selatan sampai ke Gunungkidul di kaki gunung sebelah utara. Kecuali itu Sunan masih berhak memiliki juga tanah makam di Imogiri dan Kotagede beserta tanah 500 karya di sekitar makam untuk pemeliharaan. Demikian juga Sultan masih berhak atas tanah makam Seselo beserta tanah seluas 12 jung di sekitarnya

[10] M.C. Ricklefs, op. cit., hlm. 70-72.

untuk pemeliharaan. Para bupati dan kepala desa di wilayah dua kerajaan itu bebas mengikuti Sunan atau Sultan. Kedua penguasa itu tidak boleh memaksa atau melarangnya[11].

Berlanjut pada pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII pada tahun 1927 wilayah administrasi kembali diubah pembagiannya. Kasultanan Yogyakarta yang semula terdapat enam kabupaten dikurangi setidaknya menjadi empat kabupaten: Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Masing-masing dibagi menjadi distrik yang dikepalai oleh Panji, dan distrik dibagi menjadi onderdistrik yang dikepalai oleh Asisten Panji. Panji dan Asisten Panji diganti menjadi Wedana dan Asisten Wedana sebutan yang digunakan di wilayah Gubernemen[12]. Dengan demikian wilayah Yogyakarta menjadi permanen sampai Sultan Hamengku Buwono IX memerintah dengan legalitas Rijksblad van Jogjakarta 1940 No. 13.

Legitimasi teritorial keraton oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut menciptakan preseden historis bagi status keistimewaan Yogyakarta dalam konteks negara kasultanan dan kemudian negara modern Indonesia kelak kemudian hari. Perjanjian tersebut tidak hanya membelah wilayah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, tetapi juga meletakkan dasar bagi otonomi relatif keraton dalam mengelola wilayah kekuasaannya dalam petak-petak tertentu. Mengukuhkan Keraton Yogyakarta sebagai institusi yang memiliki otonomi dalam tata kelola internal, adanya status Vorstenlanden tersebut memberikan privilege berupa self-governance yang memungkinkan keraton sebagai vasal untuk mempertahankan struktur pemerintahan tradisionalnya tetap dalam pengawasan kolonial melalui kontrak politik dan institusi Pepatih Dalem.

Transformasi Institusional Era 1939-1945

Dalam struktur pemerintah di Kasultanan Yogyakarta, sultan merupakan pimpinan tertinggi yang memiliki kedudukan sentral, khususnya berkaitan dengan kehidupan di kerajaan seperti bidang sosial dan budaya. Pemikiran Sultan yang menjadi dasar perubahan pemerintahan Yogyakarta dimulai dengan peristiwa penting yang terjadi selama tiga hari di Batavia, Dorodjatun tepatnya di Hotel des Indes tanggal 18–21 Oktober 1939 menerima pusaka karaton

[11] Toeroenan Serat Pradjandjian Tatepangan Kangdjeng Raden Adipati Sasradiningrat ing Soerakarta Hadiningrat kalijan Kangdjeng Adipati Dhanoeredja ing Ngajogjakarta Hadiningrat atas namanipoen Soenan Pakoe Boewono VII lan Soeltan Hamengkoe Boewono V, Klaten, 27 September 1830 2 (Arsip Karaton Yogyakarta). 1 jung = ± 23.386 m².

[12] Rijksblad 1927-1 seperti dikutip Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985: Kasultanan Yogyakarta Suatu Tinjauan tentang Kontrak Politik (1877-1940), Terjemah- an E. Suherman, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, hlm. 61.

Kyahi Jaka Piturun dari Sultan Hamengku Buwana VIII. Keris pusaka yang sampai sekarang tersimpan di keraton ini, selalu diserahkan oleh raja kepada seseorang yang diinginkannya menjadi putra mahkota yang kelak akan menjadi Sultan Keraton Yogyakarta (Mochtar dalam Atmakusumah 1982:37).

Adapun di bidang politik, sebagaimana yang diuraikan di atas, kekuasaan sultan dibatasi oleh berbagai kontrak politik dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Dalam kontrak politik yang umumnya disebut sebagai kontrak panjang (lange contract) disebutkan bahwa sultan diberi kedudukan lebih tinggi daripada swapraja yang disebut dengan pernyataan pendek (korte verklaring). Kemudian dari itu, segala aktivitas administrasi dipimpin oleh Pepatih Dalem. Jabatan pepatih dalem dimulai sejak era Pangeran Mangkubumi yang menunjuk Bupati Banyumas Yudonegoro untuk menjadi patihnya setelah dikukuhkan menjadi Hamangku buwono I[13].

Sistem birokrasi Yogyakarta sejatinya mengikuti tatanan sistem pemerintahan kerajaan mataram. Disamping itu, semenjak dicetuskannya perjanjian Giyanti, keraton seolah terikat janji kesetiaan dan ketaatan pada pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial mempertegas ikatan itu dengan ditempatkannya seorang residen di Yogyakarta untuk mengawasi dan mengontrol pejabat-pejabat keraton. Residen pertama ialah C. Donkel yang bertugas dari tahun 1755-1761. Oleh karena kedudukan Belanda tidak begitu kuat maka pengawasan Residen ini juga tidak begitu ketat dan kedudukannya berada di bawah Sultan sejajar dengan Pepatih Dalem (Mochtar dalam Atmakusumah 1982: 44,49–50).

Momentum krusial kemudian terjadi ketika Sultan Hamengku Buwono IX melakukan reorganisasi birokrasi pada 1939 melalui penandatanganan kontrak politik dengan pemerintah Belanda. Sultan sempat bersitegang dengan Gubernur Dr. Lucien Adam selama empat bulan sebelum penobatan Sultan. Hingga akhirnya, ditanda-tangani Dorodjatun setelah mendapat bisikan gaib dari nenek moyangnya. Bisikan dalam bahasa Jawa itu, isinya merupakan petunjuk berharga, yakni: "Tolé, tèkena waé, Landa bakal lunga saka bumi kéné"[14]. Perundingan dengan Dr. Lucien Adam tersebut merupakan keinginan Belanda untuk tetap mempertahankan kuasa birokrasi kolonialisnya melalui fungsi pepatih dalem.

[13] Yudonegoro menolaknya karena kabupaten Banyumas dalam perselisihan itu membantu Sura- karta. Akan tetapi atas desakan istrinya, adik Mangkubumi, akhirnya Yudonegoro mau menerima jabatan itu dengan gelar Danurejo I. Mangkubumi minta Hartingh mengangkatnya secara resmi sebagai Pepatih Dalem., karena dia dianggap Mangkubumi sebagai penguasa pantai utara Jawa, tetapi Hartingh tetap tidak mau dengan alasan patih nantinya akan bertanggungjawab kepada raja sendiri.

Sekitar seminggu setelah penandatanganan kontrak politik tersebut acara penobatan dilaksanakan yaitu pada hari Senin Pon tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871 dan bertepatan dengan tanggal 18 Maret 1940. Pada hari penobatan Sultan Hamengku Buwono IX ada dua wartawan Indonesia yang diundang dan duduk sejajar dengan para pejabat Belanda. Mereka adalah R. Roedjito dan Bramono dari majalah Pustaka Timur dan Mardi Mulyo. Sebelumnya pada upacara-upacara kenegaraan pemerintah Belanda tidak perlu mengundang pers nasional (Tim Penyusun, 2017, p. 163).

Kecuali itu, keinginan Sultan untuk mengadakan perubahan tampak pula dalam pidatonya yang terdengar progresif ketika dinobatkan menjadi raja 18 Maret 1940 (hari Senin Pon tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871), yakni:

"Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebihlebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka selama tidak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Keraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya" (Mochtar dalam Atmakusumah 1982: 53).

Pernyataan tersebut menunjukkan Sultan dapat mempersatukan dua dunia dalam dirinya dengan berhasil. Di dunia yang satu, ia adalah raja yang menjunjung tinggi adat keraton dan pemegang gelar dalam deretan silsilah raja-raja Mataram yang disembah kawulanya. Di dunia yang kedua, ia adalah pria modern yang ingin mengabdi pada nusa dan bangsa, tegas, santai, sederhana, berpikiran modern, dan selektif terhadap tradisi yang menghambat kemajuan (Mochtar dalam Atmakusumah 1982:19).

Langkah ini merepresentasikan upaya emansipasi keraton dari hagemoni kolonial serta meletakkan dasar bagi transformasi intitusional yang lebih mandiri. Di bawah kepemimpinan langsung Sultan, restrukturisasi ini berkonsolidasi membentuk parentah nagari dan parentah luhur yang dipimpin oleh B.P.H. Purboyo dan B.P.H. Bintoro menciptakan komunikasi langsung dengan politik nasional. Transisi dari pemerintah kolonial ke era pendudukan Jepang (1942-1945) menghadirkan dinamika baru dengan pemberian status Kooti kepada Yogyakarta. Meski Jepang sempat merestrukturisasi posisi administratif dengan menurunkan status

Gubernur Hindia Belanda menjadi Residen, Keraton di bawah Sultan Hamengku Buwono IX berhasil mempertahankan otonominya melalui strategi diplomasi dan pendekatan grassroots kepada masyarakat.

Sultan dalam agenda mengganyang pemikirannya dalam perubahan turut didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat dari pemimpin nasionalis, tokoh agama, pengusaha, serta kalangan masyarakat sendiri. Pada tanggal 19 Mei 1942 Sultan menerima tujuh ratus orang dari bermacam-macam golongan yang masuk ke karaton di bawah pengurus perkumpulan batik. Mereka bermaksud menyatakan kesetiaannya kepada Sultan dan mendoakan panjang usia dan tetap menduduki tahtanya. Mereka juga mengharapkan dalam zaman baru ini Sultan menjadi pelindung kerajaan Yogyakarta khususnya. Kurang dari satu bulan datang lagi delapan ratus orang yang terdiri atas anggota dan pengurus Persekutuan Pengusaha Batik Bumi Putera (PPBBP), pemuda PPBBP, Kemajuan Ekonomi Indonesia (KKEI), Persatuan Wanita Indonesia, Wanita Utama, Istri Indonesia, Ikatan Muhammadiyah cabang Mataram, dan sebagainya. Kelompok ini dipimpin oleh Jayengkarso, Ketua PPBBP, Sultan menerima mereka dengan sangat gembira dan setiap perkumpulan diminta untuk menceritakan tentang perkembangan perkumpulannya (Suwarno, 1994, p. 93).

B. Peran Intermediari Keraton Dalam Hubungan Pusat-Daerah

Evolusi peran Keraton dari institusi tradisional yang berdaulat menuju entitas bergelar daerah otonomi khusus yang mampu berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas mencerminkan kompleksitas hubungan pusat-daerah dalam konteks Indonesia merdeka. Kemampuan Keraton untuk mempertahankan relevansinya sejalan dengan adaptasi kondisi politik dan lingkungan masyarakat.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kiprah kepemimpinan Adipati Paku Alam VIII dan Sultan HB IX dikenal oleh masyarakat Jogjakarta dengan sebutan "Loro-loroning atunggal" atau kepemimpinan Dwi Tunggal semakin tampak dalam pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) di Yogyakarta pada tanggal 1 September 1945. Sultan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh politik dari Yogyakarta dan Pusat (Jakarta), karena sebetulnya keduanya selalu bekerjasama baik secara langsung maupun tak langsung. Mengenai pembentukan KNID Yogyakarta dilatarbelakangi dengan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidato itu intinya memerintahkan kepada rakyat di daerah-daerah untuk membentuk KNI, PNI, dan BKR. KNID Yogyakarta yang diprakarsai kelompok nasionalis tua seperti Moh. Asrar bersama R. M. Sosrosudirdjo dan tokoh-tokoh sentral Kooti

Hookookai berhasil membentuk 32 orang anggota kemudian menjadi 84 serta 3 penasehat atas dasar kebutuhan yang menghendaki banyak kelompok masyarakat masuk. Sultan mengadakan pembicaraan dengan Paku Alam, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh lain termasuk Sudarisman Purwokusumo setelah terbentuknya KNID dan BKR. Dari pembicaraan itu Sultan dapat menyimpulkan bahwa rakyat Yogyakarta menyambut hangat proklamasi kemerdekaan itu. Dengan demikian barulah Sultan siap bicara atas nama rakyat dengan mengeluarkan Amanat 5 September 1945 yang berisi tiga pernyataan.

Kolaborasi keduanya membawa orientasi nyata sebagai pemimpin yang melayani dan mengayomi rakyat. Amanat 5 September 1945 menjadi titik balik yang menentukan dalam relasi keraton-RI. Deklarasi ini tidak hanya menegaskan dukungan terhadap republik, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigmatik dalam memposisikan keraton dan pakualaman sebagai bagian integral dari negara kesatuan. Hal ini semakin diperkuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi mengenai pemerintahan daerah beserta isinya. Peran Sultan Hamengku Buwono IX dibersamai Paku Alam VIII secara stimulan menjabat sebagai raja dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, menciptakan sudut pandang baru dalam tata kelola hubungan pusat-daerah yang terjadi di Yogyakarta.

C. Implikasi Yuridis-Politis Otonomi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berstatus sebagai daerah istimewa, salah satu indikasi penting keistimewaan DIY ditunjukkan dengan tidak adanya Keppres penetapan Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Satu-satunya landasan hukum yang menjadi dasar penetapan adalah Piagam Kedudukan yang diberikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945. Sehingga dalam hal Gubernur DIY tidak terikat oleh syarat.

Pernyataan yang disampaikan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII dalam Amanat 5 September 1945 kemudian hari mendapat sambutan hangat dari pemerintah Republik Indonesia. Laksana gayung bersambut, Ir. Soekarno selaku Presiden RI mengutus dua orang menteri untuk berkunjung ke Yogyakarta, tertanggal 6 September 1945 dengan hal ihwal menyerahkan piagam kedudukan Sultan dan Paku Alam. Piagam itu berisi pengakuan bahwa Sultan dan Paku Alam tetap pada kedudukannya serta Yogyakarta merupakan bagian RI.

Hak Sultan dan Adipati yang bertahta untuk menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur berlandaskan pada Filosofis Kepemimpinan Legal Rasional-Kultural atau Kultur-Legal-Rasional. Secara historis pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang

berlangsung selama ini adalah melekat dengan kedudukan Sultan Hamengku Buwono sebagai pemimpin kultural (raja) Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Sri Paku Alam pemimpin kultural (adipati) Negeri Pakualaman.

Pada 27 September 1945 resmi diberitahukan bahwa semenjak saat itu pemerintahan Yogyakarta berada dalam genggaman Republik Indonesia. Kekuasaan pemerintah Yogyakarta berada dalam kendali Sultan, Paku Alam, dan KNID. Selanjutnya, pemerintahan RI terjadi perubahan sistem pemerintahan yang diatur dengan maklumat pemerintah No. X yang ditandatangani wakil presiden. Maklumat ini mengubah kedudukan KNIP dari pembantu presiden menjadi badan legislatif dan bersama-sama presiden menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Sesuai dengan perubahan itu KNID membentuk badan pekerta tanggal 29 Oktober 1945. Sultan menyerahkan kekuasaan membuat undang-undang dan menetapkan haluan kasultanan Yogyakarta kepada BPKNID, wakil rakyat Yogyakarta, supaya jalan pemerintahan sesuai UUD RI (Suwarno, 1994, p. 186).

Kedudukan KNID Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menggantikan kedudukan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, tetapi sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan dengan semangat dan jiwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Oleh karena itu, kedudukan KNID Daerah Istimewa Yogyakarta dalam organisasi atau struktur pemerintahan sejajar dengan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Pentingnya KNID di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penataan kembali pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta agar selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Oktavianti, 2019. hlm. 139).

Kembali dikeluarkan sebuah maklumat pada tanggal 18 Mei 1946, tertanda maklumat No. 18 yang mengatur tentang kekuasaan Legeslatif dan Eksekutif. Maklumat ini merupakan realisasi dari putusan sidang KNI daerah Yogyakarta tanggal 24 April 1946. Setelah menyetujui maklumat tersebut, KNID bubar dan digantikan oleh Dewan Daerah yang dibentuk berdasarkan maklumat tersebut. Pada sidang pertama DPR DIY mengesahkan maklumat No. 18 yang sebelumnya telah disetujui dalam sidang KNI daerah Yogyakarta. Dalam maklumat ini secara resmi digunakan nama Daerah Istimewa Yogyakarta yang menandai dua kerajaan yaitu Kasultanan dan Pakualaman dalam satu daerah istimewa. Pemerintahan daerah istimewa juga didukung oleh pemerintah pusat karena jasa-jasa yang diberikan Jogja kepada Republik Indonesia (Darban, 1998).

Terjadinya aksi terror dan pertempuran-pertempuran kecil yang disebabkan oleh ketidakpuasan pihak Belanda mengakibatkan pusat ibukota negara mengakibatkan kegamangan

dalam diri para tokoh politik bangsa. Sultan memberikan penawaran kepada kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta apabila menghendaki Yogyakarta dijadikan ibukota RI. Sidang cabinet 3 Januari 1946 memutuskan memindahkan pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta mulai tanggal 4 Januari 1946 guna menghindari ancaman Belanda serta mengamankan tokoh-tokoh negara.

Berbagai upaya kebijakan demokratis dan moderat yang dikerahkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX kenyataannya mampu membawa transisi status Kota Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), wilayah kotapraja yang bersifat otonom semenjak ditetapkannya Undang-undang No. 17 Tahun 1947. Ketetapan tersebut dibarengi dengan diadakannya DPR haminte kota (Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pemerintah kota praja), dewan pemerintahan kota, serta walikota.

D. Refleksi Nilai Tradisional Terhadap Governance Kontemporer

Secara langsung maupun tersirat, dinamika kemerdekaan Republik Indonesia membawa keraton pada runtutan kejadian historis dalam usaha mempertahankan identitas kultural dan modernitas yang kemudian melahirkan sebuah perubahan yang memengaruhi tata kelola birokrasi Yogyakarta dalam wujud pemerintahan yang baru. Yogyakarta yang bersistem monarki kemudian bertranformasi menuju masyarakat demokratis dengan instrumen utamanya berupa pemilihan lokal pada 1951. Konsep tranformasi ini menekankan bahwa dalam perubahan sosial senantiasa terjadinya reproduksi dan transformasi. Dalan proses pelembagaan birokrasi pemerintahan Yogyakarta periode 1946-1949 ini tampak proses peleburan antara pemerintahan patrimonial yang berdasarkan kekuasaan pribadi yang karismatis sekaligus tradisional dan birokrasi yang sedang tumbuh berdasarkan kekuasaan rakyat yang legal-rasional.

Pada praktek transformasi yang lebih luas, DIY telah mengumandangkan identitas kulturalnya melalui sejumlah Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) sesuai dengan urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan DIY. Butir-butir peraturan yang dikeluarkan tersebut menjadi semacam acuan bagi DIY untuk merefleksikan wilayahnya sebagai otonomi dengan identitas khusus yang merdeka dalam tata kelola pengembangannya. Sehubung dengan adanya hal tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun berikut macam-macam Perdais dengan kandungan penekanan kepentingan dalam kolaborasi kepemimpinan tradisional dan modern:

1. Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusau Keistimewaan DIY, sebagaimana diubah dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY.
2. Perdais Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur
3. Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
4. Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten; dan
5. Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten

Secara khusus dalam kasus ini, Pemerintah RI dan Pemerintah DIY menempatkan posisi pada penggunaan asas lex specialis derogat legi generalis (hukum khusus menyampingkan hukum umum). Asas ini merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait terdapat beberapa peraturan. Demikian ini, Purbacaraka dan Soekanto mengatakan bahwa:

"Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut". (Agustina, 2015: 504)

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Sintesis Temuan Utama
    - Keraton Yogyakarta telah menunjukkan kemampuan adaptasi institusional yang signifikan, bertransformasi dari monarki tradisional menjadi entitas modern dalam kerangka NKRI melalui serangkaian transformasi sistematis, terutama di bawah kepemimpinan Sultan HB IX.
    - Peran intermediari Keraton termanifestasi melalui harmonisasi nilai tradisional dengan tuntutan modernitas, yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan progresif seperti Amanat 5 September 1945 dan reorganisasi birokrasi.
    - Legitimasi historis-yuridis Keraton mengalami evolusi dari Vorstenlanden hingga Daerah Istimewa, mendemonstrasikan kontinuitas sekaligus adaptabilitas institusional.
2. Refleksi Teoritis
    - Model governance Keraton Yogyakarta merepresentasikan sintesis unik antara sistem monarki konstitusional dengan demokrasi modern, menciptakan paradigma hybrid dalam tata kelola pemerintahan.
    - Konsep intermediari kekuasaan yang dijalankan Keraton menawarkan perspektif teoretis baru dalam memahami relasi pusat-daerah dalam konteks negara kesatuan.
    - Transformasi institusional Keraton menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional dapat direvitalisasi untuk menjawab tantangan modernitas.
3. Implementasi Praktis
    - Keberhasilan model otonomi khusus DIY memberikan pembelajaran berharga tentang harmonisasi kepentingan lokal-nasional dalam konteks NKRI.
    - Mekanisme tata kelola yang menggabungkan legitimasi kultural dengan rasionalitas modern terbukti efektif dalam konteks DIY.
    - Peran ganda Sultan sebagai raja dan gubernur menciptakan model kepemimpinan yang mengakomodasi aspek kultural dan administratif.

B. REKOMENDASI

1. Aspek Kebijakan

- Perlu penguatan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mengatur relasi pusat-daerah dalam konteks keistimewaan DIY, terutama terkait mekanisme suksesi dan tata kelola pemerintahan.
- Diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Keistimewaan dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
- Pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam mengakomodasi partisipasi publik dalam tata kelola DIY.

2. Pengembangan Institusional
    - Modernisasi birokrasi Keraton perlu dilanjutkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kultural yang menjadi fondasi legitimasinya.
    - Penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola aset budaya dan ekonomi Keraton untuk kesejahteraan masyarakat.
    - Pengembangan sistem dokumentasi dan preservasi warisan budaya Keraton yang lebih sistematis dan terdigitalisasi.
3. Agenda Penelitian Lanjutan
    - Kajian komparatif tentang model tata kelola keistimewaan DIY dengan daerah istimewa lain di Indonesia maupun monarki konstitusional di negara lain.
    - Penelitian mendalam tentang implikasi sosio-kultural transformasi Keraton terhadap dinamika masyarakat Yogyakarta kontemporer.
    - Studi prospektif tentang keberlanjutan model governance DIY dalam menghadapi tantangan globalisasi dan demokratisasi.

REFERENSI

Agustina, S. (2015). Implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 503-510.

Atmakusumah (ed). (1982) Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: PT. Gramedia. p. 301.

Darban, A. A., Sutjiatiningsih, S., Nurcahyono, A. L., Setyawati, N. A., & Nurdiyanto, N. (1998). Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

G. Moedjanto. (1994). Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta: Kanisius.

https://dpad.jogjaprov.go.id/article/library/vieww/pembentukan-komite-nasional-indonesia-daerah-di-daerah-istimewa-635#:~:text=Mengenai%20pembentukan%20KNID%20Yogyakarta%20berawal,kawan%2Dkawannya%20dengan%20persetujuan%20Hatta, diunduh pada Senin, 20 Januari 2024, pukul 16.14 WIB

Iswantoro. "Peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia." JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 3.2 (2020): 158-181.

Magnis-Suseno F (2001) Etika Jawa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Poerwokoesoemo, S. (1985). Kasultanan Yogyakarta: suatu tinjauan tentang kontrak politik, 1877-1940. (No Title).

Poerwokoesoemo, Soedarisman. (1981). Sebuah Tinjauan tentaang Pepatih Dalem. Yogyakarta: Proyek Javanologi.

Roem, M. (2011). Takhta untuk rakyat: celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Gramedia Pustaka Utama.

Soemardjan S (1991) Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Subanar GB (2006) Manunggaling Kawula-Gusti Dalam Transisi. Dalam: I Wibowo & Herry Priyono (eds). Esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno: Sesudah Filsafat. Yogyakarta: Kanisius. 59–86.

Suwarno (1994) Sultan Hemengku Buwana IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942–1974. Yogyakarta: Kanisius.

Suwarno, P. Y. (1993). Hamengkubuwono IX dan sistem birokrasi pemerintahan Yogyakarta 1942-1974:: Sebuah tinjauan historis (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Tim Penyusun. (2017). Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta tanpa penerbit.

LAMPIRAN



AMANAT.

SERI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG SULTAN.

Kami Hamengku Buwana IX, Sultan Negeri Ngajogyokarto Hadiningrat, menjatakan:

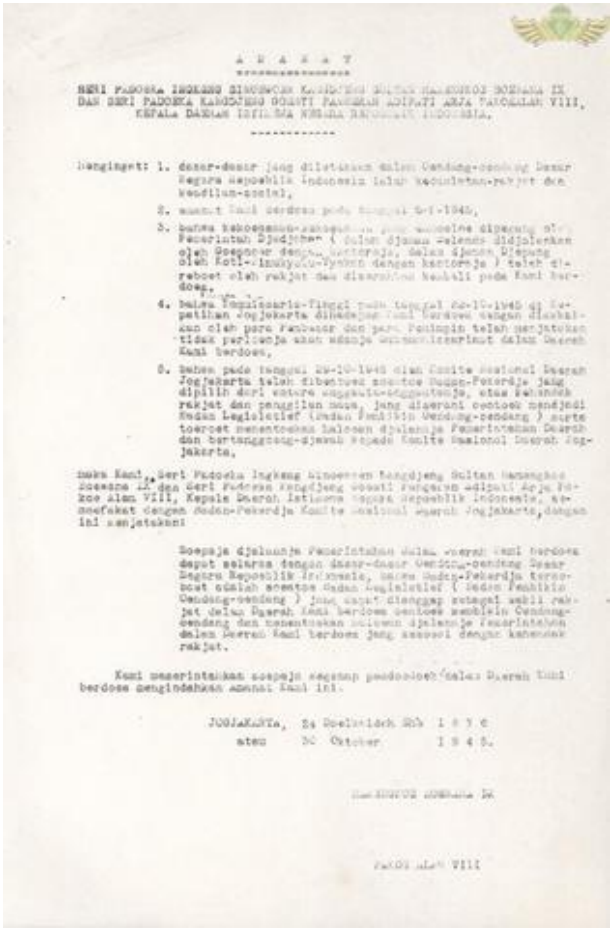
1. Bahwa Negeri Ngajogyokarto Hadiningrat, jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogyokarto Hadiningrat dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan Pemerintahan dalam Negeri Ngajogyokarto Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogyokarto Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogyokarto Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngajogyokarta Hadiningrat, 28 Puasa - Ehé 1876.

HAMENGKU BUWANA IX.

Amanat 5 September 1945(Arsip Perpustakaan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Sumber: kompas.com



A M A N A T

Mengingat: 1. dasar-dasar ...

2. ...

3. bahwa ...

4. bahwa ...

5. bahwa pada tanggal ... di Kepatihan Jogjakarta ...

Maka Kami, ... dan ... Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, bermufakat dengan Badan-Pekerdja Komite Nasional Daerah Jogjakarta, dengan ini menjatakan:

Soesoenan pemerintahan dalam ... Kami berdoa dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan-Pekerdja tersebut adalah semetara Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-undang) jang dapat dianggap sebagai wakil rakjat dalam Daerah Kami berhoek membikin Undang-undang dan menentukan soesoenan pemerintahan dalam Daerah Kami berdoek jang sesoeai dengan kehendak rakjat.

Kami memerintahkan soepaja segenap pendoedoek dalam Daerah Kami berdoek mengindahkan amanat Kami ini.

JOGJAKARTA, ... Oktober 1945.

atau ... Oktober 1945.

Amanat Sri Sultan HB IX, dan SP Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara RI, tanggal 24 Dulkaidah Ehe 1876/30 Oktober 1945, tentang Pemberitahuan bahwa Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Jogjakarta merupakan Badan Legislatif (Badan Pembuat UU) sebagai Wakil Rakyat Daerah Jogjakarta. Sumber: https://arsip.jogjaprov.go.id/uploads/r/badan-perpustakaan-dan-arsip-daerah-diy/8/f/6/8f6cefa47f1a96c029f2701eeb140fefa6ad8d4b545d214cc6a60d4fd0db8e6c/J.PEN00035.jpg



Ucapan selamat kepada Presiden RI Bung Karno atas penyerahan kedaulatan RI dari Diplomat luar negeri. Sumber: https://arsip.jogjaprov.go.id/uploads/r/badan-perpustakaan-dan-arsip-daerah-diy/1/f/2/1f21efdf56bb9654466bee9a9ea758725150c09542e65d079be17c55230e2c26/J.PEN00032.jpg

BIOGRAFI PENULIS



Apri Nabila Wardani lahir di Madiun, Jawa Timur pada 24 April 2006, putri dari pasangan Maryati dan Waryanto. Ia mengawali pendidikannya di Yogyakarta sejak taman kanak-kanak. Pada 2018, ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta, dilanjutkan dengan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 15 Yogyakarta hingga lulus pada 2022. Saat ini, ia masih menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 9 Yogyakarta.

Tumbuh dalam lingkungan keluarga Veteran membentuk karakternya untuk aktif dalam bidang kesejarahan dan pengembangan kebudayaan. Beberapa karya tulisnya yang menonjol antara lain: Pemimpin Redaksi Majalah Sekolah Sandyakala (2024); Kewek: Dari Viaduk Lajur Sepur Sampai Nyawa Mabur (Juara 2 Kompetisi Artikel Feature NNC Hype, 2024); Esai Tafsir Filosofis Hikayat Hidup-Mati Sepetak Situs Morangan (Kundha Kabudayan DIY, 2024); dan Esai Jelajah Desa Wana Lestari Pemuda Pionir Hutan Hidrologis (UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Jawa Timur, 2024).

Minatnya yang besar terhadap sejarah dan budaya tercermin dalam karya-karyanya yang kerap mengangkat tema kearifan lokal dan pelestarian warisan budaya. Melalui tulisan-tulisannya, ia berupaya menghadirkan perspektif baru dalam memahami dinamika sejarah dan budaya, khususnya di wilayah Yogyakarta.

LEGITIMASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG BERKELANJUTAN

ARDIAN MULYADI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
aamud44@gmail.com

Abstrak

Legitimasi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan sebuah upaya untuk mengatur dan memperkuat status istimewa yang dimiliki oleh DIY sebagai provinsi dengan status khusus. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak-hak istimewa DIY, serta kewajiban pemerintah untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya, politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Dimana juga DIY sebagai sebuah kota sentral mulai dari letak geografis serta sejarah yang ada. Berkaca dari sejarah DIY pernah menjadi ibukota Indonesia, hal ini bisa dijadikan sebuah bentuk bahwa sumbangsih DIY tidak hanya sedikit. Selain dinilai dari sejarah DIY juga perlu di lihat dari aspek sebagai kota pelajarnya, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) DIY per 03 Oktober 2024 jumlah pelajar di DIY berjumlah sekitar 604.611 orang. Hal ini juga harusnya menjadi perhatikan khusus pemerintah pusat. Selain sebagai kota pelajar DIY juga sebagai daerah dengan minat wisatawan yang tinggi, dimana sejak Januari hingga September 2024 tercatat 28.483.392 wisatawan nusantara dan 82.074 wisawatan mancanegara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Ini membuktikan bahwa pemasukan negara dari DIY lumayan besar. Untuk itu perlu perhatian yang lebih khusus terkait pengelolaan DIY. Untuk mengelola itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi DIY sebagai daerah yang tingkat kemajuan dan perkembanganya terus berlanjut. Dengan adanya legitimasi UU Nomor 13 Tahun 2012 yang memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan dan perkembangan wilayah DIY yang berkelanjutan. Hal ini menjadi trend positif yang bagi bagi kemajuan dan perkembangan DIY. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana legitimasi undang-undang ini berkontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan DIY, khususnya dalam aspek pengelolaan pemerintahan, ekonomi, dan identitas budaya yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*libary research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum yang kuat bagi

pengelolaan keistimewaan. Implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan publik. Namun demikian, legitimasi undang-undang ini tetap memiliki dampak positif dalam memperkuat posisi Yogyakarta sebagai daerah dengan keistimewaan budaya yang diakui secara nasional, sekaligus memberikan peluang untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di DIY.

Kata Kunci: Legitimasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

PENDAHULUAN

Yogyakarta merupakan daerah yang mendapatkan otonomi daerah khusus. Otonomi daerah ini memberikan kewenangan kepada Yogyakarta untuk mengelola daerah secara berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peraturan ini memuat mulai dari batas dan pembagian wilayah hingga pendanaan untuk daerah Yogyakarta. Selain itu peraturan ini menjadikan landasan hukum bagi Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang dimana memiliki otonomi daerah yang lebih khusus. Hal ini menjadikan Yogyakarta memiliki sistem pemerintahan daerah tersendiri, terbukti dengan adanya sistem pemerintahan kerajaan daerah atau monarki daerah.[1] Sistem ini menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang berbeda dengan daerah lain pada umumnya, dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 juga menjadi landasan hukum yang menjaga, mengembangkan dan memperkuat identitas, serta nilai-nilai budaya, sosial, politik dan ekonomi Yogyakarta agar tetap berkelanjutan dalam dinamika nasional yang bersumber pada unsur menimbang dan mengingat dalam menetapkan aturan ini.

Status Yogyakarta sebagai daerah istimewa tidak serta merta tanpa alasan yang jelas. Status keistimewaan Yogyakarta merupakan hasil dari sumber historis yang mengakar dengan kuat, hal ini berdasar pada peran Yogyakarta yang krusial dalam perjalanan sejarah Indonesia hingga saat ini. Bersumber dari historis Yogyakarta pernah menjadi ibukota negara pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pemindahan ini dimulai pada 4 April 1946 sampai 28 Desember 1949.[2] Selain historis sebagai Ibukota Negara, Yogyakarta menjadi salah satu saksi

[1] Milenia Ramadhani, B Hestu Cipto Handoyo, and Syukron Abdul Kadir, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Kearifan Lokal," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (2024), https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1125.

[2] Nur Kholik, "Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 2, no. 2 (2022), https://doi.org/10.12928/adlp.v2i2.6693.

bisu dari agresi militer yang dilakukan oleh Belanda pada 19 Desember 1948. Keistimewaan Yogyakarta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 juga terlihat dari unsur menimbang dan mengingat dalam mengesahkan aturan ini. Yogyakarta dalam segi historis tak akan pernah habis untuk dibahas, apabila melihat status Yogyakarta sebagai daerah Istimewa.

Unsur pendidikan juga menjadi salah satu pilihan yang tepat penetapan status Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Terlihat dari julukan Yogyakarta sebagai kota pelajar yang di dukung oleh data Badan Perencanaan Pembangun, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) DIY per 03 Oktober 2024 jumlah pelajar di DIY berjumlah sekitar 604.611 orang. Hal ini memang memiliki penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, dimana per tahun 2023 jumlah pelajar di Yogyakarta berjumlah 638.345 orang.[3] Penurunan ini memang tidak memberikan dampak signifikan dalam kualitas pendidikan di Yogyakarta sebagai kota pelajar. Tetapi sebagai sebuah daerah yang memiliki legitimasi hukum yang berbeda dengan daerah lainnya, maka Yogyakarta harus lebih mengendepankan aspek kemajuan dan perkembangan yang berkelanjutan. Karena Yogyakarta bukan daerah yang memiliki legitimasi hukum saja, tetapi legitimasi simbolis dan karismatik sultan menjadi sebuah daya tarik untuk meningkatkan Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan jumlah pelajar mencapai lebih dari satu juta orang pada tahun-tahun sebelumnya.

Legitimasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 kepada Yogyakarta, bukan hanya berbentuk legitimasi hukum, tetapi juga pada legitimasi simbolik dan karismatik sultan yang dipandang sebagai pemimpin yang harus ditaati. Yogyakarta dengan Kerajaan daerah atau monarki daerah, memiliki daya tarik khusus dalam aturan ini. Kerajaan daerah atau monarki daerah di Yogyakarta dipanggil dengan Kesultanan.[4] Pasal 5 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Kesultanan memiliki hak untuk melakukan pemeliharaan, pendayagunaan, pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat dan tradisi luhur yang mengakar dalam Masyarakat DIY. Selain diberikan wewenang untuk melakukan tahapan seperti yang dijelaskan pada pasal tersebut, dalam aturan ini juga Kesultanan yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono memiliki peran sebagai gubernur. Hal ini tertuang dalam pasal 18 ayat 1 huruf c, keistimewaan ini bukan semerta merta tanpa dasar tetapi sudah diatur dalam aturan ini.

Unsur-unsur tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa dengan historis yang panjang dan harus dipertahankan. Pemanfaatan budaya yang harus dijaga ketat langsung

---

[3] Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Daerah Istimewa Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan, "Jumlah Peserta Didik," December 31, 2024, https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/482-jumlah-peserta-didik.

[4] Bpkp, "Sejarah Keistimewaan Yogyakarta," Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DIY, 2023.

oleh Kesultanan, merupakan tindakan yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini bersumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY sejak Januari hingga September 2024 tercatat 28.483.392 wisatawan nusantara dan 82.074 wisawatan mancanegara.[5] Pemanfaatan dan penjagaan nilai-nilai budaya di Yogyakarta sudah sepantasnya untuk langsung diberikan wewenang secara langsung kepada kesultanan. Kegunaan ini memberikan adanya dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Sehingga pemasukan Yogyakarta guna untuk pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan dapat tetap terorganisir dengan baik. Maka, pemerintah pusat diharapkan dapat mampu untuk terus memperhitungkan Yogyakarta sebagai sebuah daerah yang penting selain kota-kota besar lainnya.

Pemberian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 memiliki banyak sekali menuai pro dan kontra. Pihak kontra pastinya menilik dari pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Artinya harus adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk menunjuk siapa yang menjadi kepala daerah pada daerahnya termasuk Yogyakarta. Hal kontra ini kemudian dibantah oleh tekanan oleh rakyat dengan kekuatannya sebagai rakyat atau bisa dikatakan *people power*. Dorongan ini kemudian yang melegitimasikan bahwa pengangkatan Gubernur dan Wakil Guber melalui amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 sudah berdasarkan pengakuan dan penerimaan oleh rakyat Yogyakarta. Kemudian, bisa diartikan demokrasi sebagai bentuk universal tidak dipandang sebagai kewajiban harus melalui pemilihan untuk memilih pemimpinnya, tetapi dengan kekuatan dan dorongan dari rakyat sepenuhnya akan terciptanya demokrasi juga.[6]

Berbagai macam hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 pastinya memiliki fungsi dan arti yang sangat luas untuk Yogyakarta. Hal ini bisa dilihat dari pemanfaatan budaya dan pendidikan yang terus berkembang. Apalagi ditambah dengan pendanaan kepada Yogyakarta dari pusat dengan amanat aturan ini pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Pendanaan ini harusnya memberikan perkembangan Yogyakarta sebagai sebuah daerah yang lebih maju dari daerah lainnya dan tingkat pemahaman sumber daya manusia serta pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan ini juga dibuktikan dengan data BPS DIY bahwa adanya pertumbuhan 0,53 poin dari tahun sebelumnya. Selain itu

---

[5] Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Perkembangan Pariwisata," September 30, 2024, https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/01/1572/perkembangan-pariwisata-di-yogyakarta-september-2024.html.

[6] Rahmat Robuan, "Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus Dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (2022), https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.30.

juga Yogyakarta secara Nasional meraih peringkat kedua setelah Jakarta sebagai Ibukota.[7] Artinya pentingnya aturan ini salah satunya dana istimewa untuk Yogyakarta sebagai daerah demi keberlanjutan pembangunan yang lebih baik dengan berlatar belakang pada berbagai macam bidang.

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dapat disimpulkan dan dikaji dengan mengangkat permasalahan legitimasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 kepada kemajuan dan perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkelanjutan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan analisis secara kualitatif, dimana memahami fenomena dalam sebuah permasalahan yang diteliti.[8] Kemudian, penelitian ini mencoba mengkaji dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*libary research*).[9] Pengunaan pendekatan ini adalah untuk memahami fennomena dengan kajian-kajian dan literatur terdahulu yang kemudian dipahamai secara teoritis dan dikonversi dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu penggunaan sumber hukum sekunder juga diperlukan sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer berupa buku, jurnal, internet dan tulisan ilmiah lainnya.[10]

PEMBAHASAN

Legitimasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Kemajuan Dan Perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Berkelanjutan

Membahas letimigasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan DIY), tidak terlepas dari pembahasan arti legitimasi. Legitimasi berasal dari Bahasa latin yaitu *lex* yang artinya hukum.[11] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) legitimasi adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud, kesahan, pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang) atau

---

[7] Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta, "IPM Provinsi DIY Meningkat," December 4, 2024, Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta.

[8] Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)," *CV. Alfabeta*, 2023, 1–274, http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/.

[9] Amir Hamzah, "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)," *Literasi Nusantara Abadi* 5, no. 1 (2020).

[10] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta*, *Sinar Grafika*, 2022.

[11] Nur'aini Dewi Kumala et al., "Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 6, no. 2 (2021), https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i2.625.

pengesahan.[12] Beberapa para ahli juga memberikan pengertian dari kata legitimasi, Max Weber yang mengartikan legitimasi adalah dasar di mana kekuasaan memperoleh kepatuhan dari masyarakat. Kemudian, David Beetham mengartikan legitimasi sebagai sesuatu yang tidak hanya bergantung pada kepercayaan rakyat, tetapi juga pada kesesuaian kekuasaan dengan aturan hukum, nilai-nilai moral, dan persetujuan masyarakat. Berbeda pendapat Jean-Jacques Rousseau yang mengartikan legitimasi adalah suatu pemerintahan muncul dari kontrak sosial, yaitu kesepakatan antara rakyat dan pemerintah untuk membentuk suatu sistem yang adil.[13] Legitimasi bila diartikan secara umum dari beberapa pengertian tersebut yang bisa diambil kesimpulan sebagai hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyat tetapi harus berdasarkan pertimbangan dan kemauan rakyat.

UU Nomor 13 Tahun 2012 merupakan regulasi yang memberikan pengakuan hukum terhadap status khusus Yogyakarta dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keistimewaan ini berakar pada sejarah panjang Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak proklamasi kemerdekaan.[14] Dengan dasar tersebut, legitimasi UU ini tidak hanya bersumber dari aspek hukum positif tetapi juga dari sejarah dan sosial budaya yang kuat. UU Keistimewaan DIY memberikan Yogyakarta otonomi khusus dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan kebudayaan. Hal ini menjadikan Yogyakarta sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih memiliki monarki. Keberadaan monarki di Yogyakarta memberikan nilai tambah dalam mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang khas, serta memperkuat identitas lokal masyarakat.[15] Selain itu, sistem pemerintahan yang unik ini juga menjadi daya tarik wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan demikian, keberadaan monarki di Yogyakarta tidak hanya menjadi simbol keistimewaan budaya, tetapi juga menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Dukungan terhadap institusi monarki oleh pemerintah dan masyarakat setempat juga menunjukkan bahwa tradisi dan nilai-nilai lokal masih sangat dihargai dan dilestarikan.

Legitimasi UU Keistimewaan DIY secara hukum didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini, DIY memiliki hak istimewa dalam mengatur sistem

---

[12] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Legitimasi," 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legitimasi.

[13] Kumala et al., "Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan."

[14] Cornelis Lay et al., *Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta*, *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM & Program S2 Politik Lokal Dan Otonomi Daerah UGM*, vol. 2, 2008.

[15] Muchamad Zaenuri, Muhammad Iqbal, and Yunita Elianda, "Tata Kelembagaan Dan Nomenklatur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal MODERAT: Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2021).

pemerintahan daerahnya, termasuk mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang berbeda dari daerah lain.[16] Hal ini memperlihatkan bahwa UU tersebut memiliki landasan konstitusional yang sah dan diakui oleh negara. Dengan demikian, legitimasi UU Keistimewaan DIY tidak dapat dipertanyakan karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pengaturan hak istimewa DIY dalam mengatur sistem pemerintahan daerahnya juga merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberagaman dan keistimewaan daerah-daerah di Indonesia.[17] Pengakuan terhadap keberagaman dan keistimewaan daerah merupakan salah satu upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, UU Keistimewaan DIY menjadi landasan yang penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonom.

UU Keistimewaan DIY selain legitimasi hukum, juga memperoleh legitimasi sosiologis, yaitu penerimaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Masyarakat Yogyakarta umumnya mendukung keistimewaan yang diberikan, terutama dalam hal penetapan Sultan sebagai gubernur dan Adipati Pakualaman sebagai wakil gubernur tanpa melalui pemilihan umum. Dukungan ini didasarkan pada nilai budaya dan tradisi yang telah mengakar, di mana Kesultanan dan Pakualaman dianggap sebagai simbol pemersatu masyarakat.[18] Masyarakat Yogyakarta juga percaya bahwa keberadaan Sultan dan Adipati Pakualaman dapat memperkuat identitas dan keberagaman budaya di DIY. Hal ini membuat keistimewaan DIY tidak hanya dilihat sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai elemen penting dalam mempertahankan keharmonisan sosial di wilayah tersebut. Keputusan ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional yang telah ada sejak lama di masyarakat Yogyakarta. Masyarakat DIY percaya bahwa dengan tetap mempertahankan sistem ini, keberlangsungan harmoni dan persatuan di wilayah tersebut dapat terjaga dengan baik.

Keberadaan UU ini dari segi legitimasi politik juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Perumusan undang-undang ini melibatkan perdebatan yang cukup panjang di DPR, tetapi akhirnya disetujui sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan kontribusi Yogyakarta dalam menjaga stabilitas nasional.[19] Keputusan politik ini menunjukkan bahwa negara mengakui peran DIY sebagai bagian integral dari NKRI

---

[16] Ratna Dewi and Eko Nuriyatman, "Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018), https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444.

[17] Anom Wahyu Asmorojati, "Dinamika Pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tinjauan Negara Kesatuan," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta*, no. p-ISSN 2598-5973 (2017).

[18] Firly Annisa, "Civic of Culture: Media, Kaum Muda, Dan Mengenali Ke- Istimewaan Yogyakarta," *Jurnal Komunikator* Vol. 7, No (2015).

[19] Dwinanta Nugroho, Hani Subagio, and Hari Rachmadi, "Birokrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Adaptive Dalam Bingkai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta," *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 3 (2023), https://doi.org/10.37329/metta.v3i3.2788.

dengan karakteristik pemerintahan yang unik. Hal ini juga menunjukkan bahwa DIY dianggap memiliki legitimasi politik yang kuat dalam struktur pemerintahan Indonesia. Keberadaan UU tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonom ini. Dengan demikian, DIY dapat terus berperan aktif dalam pembangunan dan pengelolaan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keberadaan undang-undang ini juga memberikan jaminan keberlangsungan otonomi khusus bagi DIY di masa depan.

Bidang sosial dan pendidikan, keistimewaan yang diberikan melalui UU ini turut mendukung kemajuan DIY sebagai pusat pendidikan nasional. Yogyakarta yang dikenal sebagai "Kota Pelajar" dapat lebih leluasa dalam merancang kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mempertahankan kualitas institusi pendidikan yang telah berkembang pesat.[20] Dengan demikian, legitimasi UU ini turut berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan UU ini juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak sosial masyarakat DIY, seperti hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas.[21] Hal ini akan semakin memperkuat posisi DIY sebagai salah satu daerah yang berperan penting dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, UU ini menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan perlindungan hak-hak sosial masyarakat DIY. Ini akan membantu DIY dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di masa depan.

Aspek tata ruang dan pertanahan, UU Keistimewaan DIY memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola tanah kesultanan (Sultan Ground) dan tanah kadipaten (Pakualaman Ground) dengan prinsip keberlanjutan.[22] Hal ini memungkinkan Yogyakarta untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, sehingga perkembangan wilayah dapat tetap selaras dengan prinsip kelestarian alam. Regulasi ini juga menghindarkan Yogyakarta dari eksploitasi lahan yang berlebihan serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat setempat.[23] Dengan demikian, DIY mampu mempertahankan identitas budaya dan sejarahnya

---

[20] M. Mustaqim, Z. N. Rizqulloh, and R. Aditya, "Mewujudkan Kota Inklusi: Studi Kasus Dari Kota Pelajar Yogyakarta," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 11, no. 1 (2023).

[21] Sri Suharti, Rifqi Risnadyatul H., and Nani Purwati, "Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Pada Pidato Sri Sultan HB X Dalam Rangka Peringatan Satu Dasawarsa UU Keistimewaan DIY," *Jurnal Bastrindo* 4, no. 1 (2023), https://doi.org/10.29303/jb.v4i1.957.

[22] Rangga Alfiandri Hasim, "Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah," *Jurnal Arena Hukum* volume 9, no. 2 (2016).

[23] Muhammad Iqbal et al., "KEISTIMEWAAN PENATAAN RUANG MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA," *Jurnal Caraka Prabu* 4, no. 1 (2020), https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.221.

yang kaya, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Keistimewaan DIY dalam mengatur tanah kesultanan dan kadipaten juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan sejarah, Yogyakarta memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian alamnya.[24] Dengan regulasi yang ketat, DIY dapat terus menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemberian legitimasi kepada Yogyakarta sebagai sebuah daerah yang istimewa memiliki dampak positif bila dilihat dari peran sebagai sebuah bentuk untuk mengembangkan dan memajukan daerah dalam proses yang berkelanjutan. Aspek-aspek yang terlihat justru memberikan gambaran bahwa Yogyakarta sangat membutuhkan adanya regulasi yang tepat. Hal ini sebagai sebuah media bahwa Yogyakarta bukan dinilai sebagai daerah yang tak memiliki latar belakang terarah. Selain itu keistimewaan Yogyakarta merupakan bukti bahwa masyarakat dan kesultanan serta pemerintahan ikut andil dalam pembangunan dan perkembangan Yogyakarta demi kemajuan yang berkelanjutan.

Dampak Dan Peran Legitimasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Kemajuan Dan Perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Berkelanjutan

Salah satu dampak utama dari UU Keistimewaan DIY adalah penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis pada nilai-nilai lokal. DIY memiliki mekanisme khusus dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, yaitu melalui penetapan Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualaman sebagai pemimpin daerah. Model pemerintahan ini memberikan stabilitas politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pemilihan langsung di daerah lain, sehingga memungkinkan fokus yang lebih besar pada pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan.[25] Selain itu, keberadaan Sultan dan Adipati sebagai pemimpin daerah juga memberikan kontinuitas dalam kebijakan pembangunan di DIY. Hal ini membuat DIY mampu menjaga kelestarian budaya dan tradisi lokalnya tanpa terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan yang sering terjadi di daerah lain. Dengan demikian, DIY dapat mempertahankan identitasnya yang unik dan keberlanjutan pembangunannya. Kehadiran Sultan dan Adipati juga memberikan rasa kepercayaan dan kestabilan bagi masyarakat DIY.

---

[24] Antonio Tilman, Dian Aries Mujiburohman, and Asih Retno Dewi, "Legalisasi Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Riau Law Journal* 5, no. 1 (2021), https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852.

[25] Bramanda shafa baqda Pandita, "YOGYAKARTA MENJAGA KEUTUHAN BUDAYA JAWA DI ERA MODERNISASI DAN GLOBALISASI," *Universitas Sebelas Maret*, 2022.

Keistimewaan DIY juga berdampak positif terhadap sektor ekonomi dan sosial, khususnya dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta pendidikan. Dengan legitimasi hukum yang kuat, DIY dapat mengelola sumber daya lokal secara lebih mandiri dan berkelanjutan.[26] Pengelolaan tanah kesultanan dan kadipaten, misalnya, dimanfaatkan untuk mendukung investasi yang tetap memperhatikan aspek kelestarian budaya dan lingkungan. Selain itu, sektor pendidikan di DIY tetap berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan yang menarik mahasiswa dari berbagai daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, DIY memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Selain itu, upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pendidikan yang berkelanjutan akan semakin memperkuat posisi DIY sebagai salah satu provinsi yang maju dan berdaya saing. Dengan dukungan berbagai sektor tersebut, DIY dapat terus mengoptimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatifnya, menjadikannya sebagai contoh provinsi yang berhasil menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat serta menarik minat investor dan wisatawan untuk terus berinvestasi di DIY.

Bidang pelestarian budaya dan lingkungan dalam UU ini memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa modernisasi di DIY tidak menghilangkan identitas lokal. Dengan perlindungan hukum yang jelas, warisan budaya seperti seni, tradisi, dan sistem sosial masyarakat tetap dapat dipertahankan dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam aspek lingkungan, pengelolaan tata ruang yang didasarkan pada sistem pertanahan kesultanan dan kadipaten membantu mencegah eksploitasi lahan yang berlebihan serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.[27] Dengan demikian, UU ini tidak hanya melindungi kekayaan budaya dan lingkungan DIY, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Melalui implementasi yang tepat, DIY dapat tetap mempertahankan identitasnya sambil tetap berkembang secara modern. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kemajuan teknologi agar DIY tetap relevan dan berdaya saing di era globalisasi. Dengan demikian, DIY dapat terus menjadi destinasi wisata yang menarik tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan warisan budayanya.

---

[26] Fenny Mufidta and Dekar Urumsah, "Determinan Kesenjangan Ekspektasi Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Keistimewaan Model Konseptual," *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting Dan Finance* 6 (2024).

[27] Cindy Aprilia Palupi, "KEISTIMEWAAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA DALAM ASPEK NILAI BUDAYA LOKAL," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2021), https://doi.org/10.55606/jebaku.v1i2.167.

Dampak-dampak positif diperlukan oleh Yogyakarta untuk menjadikan sebuah daerah yang kuat dan penggunaan dana keistimewaan yang tepat sasaran dan terarah dalam pembangunan dan perkembangan. Apalagi dampak positif dikaitkan dan dikuatkan dengan teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi yang terus dibarengi dengan dampak yang ada, akan memberikan efek yang terus bekelanjutan untuk Yogyakarta dalam kemajuan dan perkembangannya.[28] Ditambah dengan tuntutan zaman saat ini yang serba cepat dengan perkembangan teknologi yang terus maju, maka Yogyakarta sebagai sebuah daerah yang memiliki keistimewaan dan juga pemanfaatan teknologi dalam setiap aspek dan dampak pada daerahnya bisa menjadi sebuah percontohan kepada daerah lainnya. Hal ini agar perkembangan di Indonesia dapat merata bukan hanya tertimpang pada satu daerah saja.

Tantangan dan Hambatan Legitimasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Kemajuan Dan Perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan khusus bagi DIY dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk kebudayaan, pertanahan, tata ruang, serta tata kelola pemerintahan daerah. Meskipun telah mendapatkan legitimasi hukum, implementasi undang-undang ini tetap menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mendorong kemajuan dan pembangunan berkelanjutan di Yogyakarta.[29] Tantangan tersebut meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, hingga lingkungan yang menuntut adaptasi dan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, DIY perlu terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi undang-undang keistimewaan.[30] Dengan demikian, DIY dapat memaksimalkan potensi dan keunggulan yang dimiliki untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayahnya. Hal ini akan membantu DIY untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika pembangunan yang terus berubah. Selain itu, kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Yogyakarta.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU Keistimewaan DIY adalah harmonisasi antara keistimewaan daerah dengan sistem demokrasi nasional. Mekanisme penetapan gubernur dan wakil gubernur yang bersifat turun-temurun berbeda dengan sistem

[28] Novi Irawati, "Analisis Kepuasan Wisatawan Terhadap Kualitas Fasilitas Public Space Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta Paska Revitalisasi," *Jurnal Kepariwisataan* 13, no. 1 (2019).

[29] Ramadhani, Cipto Handoyo, and Abdul Kadir, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Kearifan Lokal."

[30] Fitri Trisnawati, Puji Lestari, and Prayudi Prayudi, "Audit Komunikasi Program Jogja Belajar Budaya," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 17, no. 3 (2020), https://doi.org/10.31315/jik.v17i3.3772.

pemilihan langsung yang berlaku di daerah lain di Indonesia.[31] Hal ini sering kali menjadi perdebatan dalam konteks demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, adanya potensi ketidakseimbangan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional dapat menghambat efektivitas pelaksanaan UU ini, terutama dalam hal regulasi pertanahan dan tata ruang. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi UU Keistimewaan DIY berjalan lancar tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.[32] Selain itu, perlu adanya mekanisme evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keistimewaan daerah tetap terjaga tanpa merugikan kepentingan nasional. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk memastikan bahwa keistimewaan DIY dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat. Evaluasi yang berkala juga diperlukan untuk mengevaluasi dampak dari implementasi UU Keistimewaan DIY terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan terbesar dari sisi ekonomi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian nilai-nilai keistimewaan DIY. Meskipun DIY memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif, masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[33] Selain itu, permasalahan seperti alih fungsi lahan, ketimpangan investasi, serta ketidakpastian regulasi dalam pengelolaan tanah kesultanan dan kadipaten menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.[34] Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini agar DIY dapat tetap maju secara ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya dan lingkungan. Upaya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di DIY. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dapat membantu mengoptimalkan penggunaan lahan, mengurangi ketimpangan investasi, dan menciptakan regulasi yang lebih pasti. Dengan demikian, DIY dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan sambil tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan lingkungan.

---

[31] Pandita, "YOGYAKARTA MENJAGA KEUTUHAN BUDAYA JAWA DI ERA MODERNISASI DAN GLOBALISASI."

[32] Kevin Andrian, Arti Wulandari, and Oscar Samaratungga, "SIMULACRA YOGYAKARTA DENGAN DRONE PHOTOGRAPHY," *Spectā: Journal of Photography, Arts, and Media* 1, no. 2 (2018), https://doi.org/10.24821/specta.v1i2.1903.

[33] Yudan Hermawan and Rita Nur Wahyuni, "Peningkatan Ekonomi Dan Kompetensi Abad 21 Melalui Gejok Lesung," *Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 1 (2020), https://doi.org/10.19184/jlc.v4i1.17577.

[34] Khofifah Hany Amaria and Roma Ulinnuha, "Transformasi Kesejahteraan Pelaku UMKM Melalui Digitalisasi Pembinaan Dalam Program 'Sibakul Jogja' Di Yogyakarta," *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* 4, no. 2 (2023), https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9899.

Tantangan sosial juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul pergeseran nilai dalam masyarakat yang berpotensi mempengaruhi legitimasi sistem pemerintahan berbasis keistimewaan. Generasi muda DIY yang lebih terbuka terhadap sistem demokrasi modern mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap mekanisme pemerintahan berbasis monarki.[35] Selain itu, arus urbanisasi dan migrasi yang tinggi di Yogyakarta menyebabkan perubahan sosial yang dapat mempengaruhi dukungan terhadap kebijakan keistimewaan, terutama dalam hal hak kepemilikan tanah dan tata ruang kota. Perubahan ini menunjukkan perlunya adaptasi sistem pemerintahan keistimewaan agar tetap relevan dan diterima oleh masyarakat.[36] Oleh karena itu, penting bagi pemerintah DIY untuk terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat guna memperkuat legitimasi sistem pemerintahan yang ada. Dengan demikian, dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan DIY. Upaya untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan juga perlu ditingkatkan guna memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga DIY.

Keberlanjutan pembangunan di DIY dalam aspek lingkungan juga menghadapi tantangan besar akibat eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan sektor pariwisata dan properti yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan regulasi yang ketat dalam perlindungan lingkungan.[37] Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ingin dijaga dalam UU Keistimewaan DIY. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam pengelolaan tata ruang yang tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan implementasi kebijakan lingkungan juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Daerah Istimewa Yogyakarta.[38] Dengan demikian, upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini.

---

[35] Zaenuri, Iqbal, and Elianda, "Tata Kelembagaan Dan Nomenklatur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta."

[36] Amalia Tafakurniawati, Agus Dwi Wicaksono, and Aris Subagiyo, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penentuan Harga Lahan Permukiman Di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun," *Planning for Urban Region and Environment* 9, no. 1 (2020).

[37] Archi Rafferti Kriswandanu, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Wilayah Yogyakarta: Sebuah Analisis Hukum Komparatif," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023), https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.443.

[38] Serlina Candra Wardina Sari, Samsuri Samsuri, and Darto Wahidin, "Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi Di Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 1 (2020), https://doi.org/10.22146/jkn.53816.

Partisipasi aktif dari semua pihak terkait akan memperkuat implementasi kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, meskipun UU Nomor 13 Tahun 2012 telah memberikan legitimasi bagi DIY dalam menjalankan keistimewaannya, tantangan dan hambatan dalam implementasinya masih cukup kompleks. Harmonisasi kebijakan dengan sistem nasional, ketimpangan ekonomi, perubahan sosial, serta ancaman terhadap lingkungan menjadi faktor-faktor yang harus segera diatasi agar keistimewaan DIY tetap relevan dalam mendukung kemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan inovatif agar nilai-nilai keistimewaan DIY dapat terus dijaga tanpa menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi dinamika tersebut, DIY perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik juga menjadi kunci dalam menjaga keistimewaan DIY. Dengan demikian, DIY dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakatnya.

Reomendasi dan Rancangan Dalam Pemanfaatan Legitimasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Guna Kemajuan Dan Perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan dasar hukum yang kuat bagi DIY dalam mengelola pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang secara mandiri. Agar keistimewaan ini dapat lebih optimal dalam mendorong kemajuan yang berkelanjutan, perlu adanya strategi pemanfaatan yang efektif dan adaptif terhadap tantangan zaman.[39] Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, institusi kebudayaan, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal serta berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan.[40] Dengan demikian, DIY dapat terus mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya sambil tetap berkembang secara modern. Kolaborasi lintas sektor juga dapat membantu DIY untuk menghadapi perubahan zaman dan mengoptimalkan potensi daerah secara holistik.

[39] Ramadhani, Cipto Handoyo, and Abdul Kadir, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Kearifan Lokal."

[40] SANDY WIFAQAH, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2020, https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1039.

Pemanfaatan UU Keistimewaan DIY dalam bidang ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal, sekaligus menjaga keseimbangan antara investasi dan pelestarian lingkungan.[41] Selain itu, sistem pengelolaan tanah kesultanan dan kadipaten harus lebih transparan dan adaptif agar dapat dimanfaatkan untuk mendorong investasi yang berkelanjutan tanpa mengancam kearifan lokal serta hak masyarakat dalam memperoleh akses terhadap lahan.[42] Hal ini akan membantu menjaga keberlanjutan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif DIY, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Dengan demikian, DIY dapat tetap menjadi destinasi wisata yang unik dan berkelanjutan bagi para pengunjung. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku-pelaku yang melanggar regulasi lingkungan.[43] Dengan langkah-langkah ini, DIY dapat terus mempertahankan keindahan alamnya dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Aspek sosial dan tata kelola pemerintahan sangat diperlukan dalam pendekatan yang inklusif untuk memastikan bahwa keistimewaan DIY tetap relevan bagi seluruh masyarakat, termasuk generasi muda. Rancangan kebijakan yang memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap sistem pemerintahan berbasis keistimewaan.[44] Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berbasis nilai keistimewaan DIY juga penting agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam memajukan daerahnya secara mandiri dan berkelanjutan.[45] Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pembangunan daerah. Hal ini akan memastikan bahwa keistimewaan DIY tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang tetapi benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara

---

[41] Muhammad Gilang Al Fariz and Fitrie Arianti, "PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH OBJEK WISATA, DAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PAD SEKTOR PARIWISATA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 - 2019," *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)* 6, no. 2 (2023), https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.430.

[42] Hasim, "Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah."

[43] Tri Pranadji and Endang Lestari Hastuti, "Transformasi Sosio-Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan," *Analisis Kebijakan Pertanian* 2, no. 1 (2004).

[44] Robertus Belarminus Suharta and Serafin Wisni Septiarti, "Pengembangan Perlindungan Sosial Kampung Ramah Anak Di Kota Yogyakarta," *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 1 (2018), https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.11313.

[45] Ahmad Sahide, Ahdiana Yuni Lestari, and Rezki Satris, "PEMBERDAYAAN KOMUNITAS BELAJAR MENULIS (KBM) MELALUI KONSEP MULTIKULTURALISME UNTUK MEMBENTUK KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA," *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2021, https://doi.org/10.18196/ppm.32.213.

berbagai pihak akan memperkuat implementasi kebijakan dan program-program pembangunan di DIY. Dengan demikian, potensi daerah dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan bersama.

Terakhir dalam aspek lingkungan, pemanfaatan legitimasi UU ini harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan tata ruang yang lebih ketat untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.[46] Pengembangan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta pelestarian kawasan hijau harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan DIY.[47] Dengan rekomendasi dan rancangan yang tepat, legitimasi UU Keistimewaan DIY dapat terus dimanfaatkan untuk memastikan keseimbangan antara kemajuan, pelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan di masa depan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam implementasi kebijakan tersebut agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, edukasi dan kesadaran lingkungan juga perlu ditingkatkan agar seluruh stakeholders dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan DIY. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan DIY tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara holistik. Dengan demikian, DIY dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Legitimasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memainkan peran krusial dalam memastikan keberlanjutan tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta pelestarian budaya dan lingkungan di DIY. Dengan memberikan kewenangan khusus dalam bidang pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang, UU ini memungkinkan DIY untuk mempertahankan identitas serta kearifan lokalnya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Stabilitas pemerintahan yang dihasilkan dari sistem penetapan kepemimpinan berbasis kesultanan juga berkontribusi pada kesinambungan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan daerah. Dengan demikian, DIY dapat terus menjaga keseimbangan antara tradisi

[46] Riant Nugroho, "Kebijakan Publik Sebagai Komunikasi," *Konferensi Nasional Komunikasi* 02, no. 01 (2018).

[47] Fransisca Kiki Fajarwati, Suwarno Hadisusanto, and Hartono Hartono, "HUBUNGAN KERAPATAN PENDUDUK DENGAN KEANEKARAGAMAN TANAMAN BUAH PEKARANGAN DI KECAMATAN GODEAN, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA (Relationship between Population Density and Diversity of Yard Fruit Plants in Godean Sub-District, Sleman District, Yogyakarta)," *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 27, no. 2 (2020), https://doi.org/10.22146/jml.53401.

dan modernitas, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini juga mencerminkan komitmen DIY dalam mengembangkan potensi lokalnya untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, upaya DIY dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan juga menjadi bagian dari strategi pembangunan yang holistik. Dengan demikian, DIY dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Meskipun memiliki dampak positif yang signifikan, implementasi UU Keistimewaan DIY tetap menghadapi berbagai tantangan, termasuk harmonisasi dengan sistem pemerintahan nasional, keseimbangan antara modernisasi dan tradisi, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan legitimasi UU ini perlu dirancang secara strategis dengan memperkuat partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, serta inovasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pengelolaan pertanahan dan tata ruang harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan agar keistimewaan DIY dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pengelolaan pertanahan dan tata ruang harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini penting agar keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, DIY dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakatnya. Keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pengelolaan pertanahan dan tata ruang juga akan memperkuat keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.

Dengan strategi implementasi yang adaptif dan berbasis nilai-nilai keistimewaan, UU Nomor 13 Tahun 2012 dapat terus menjadi pilar utama dalam mendorong kemajuan DIY yang berkelanjutan. Keberlanjutan pembangunan di Yogyakarta dapat tercapai dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian budaya, serta kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keistimewaan DIY tetap relevan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga dan meningkatkan keistimewaan DIY. Melalui upaya bersama, DIY dapat terus berkembang sebagai daerah yang berdaya, berbudaya, dan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, Jakarta*. *Sinar Grafika*, 2022.

Andrian, Kevin, Arti Wulandari, and Oscar Samaratungga. “SIMULACRA YOGYAKARTA DENGAN DRONE PHOTOGRAPHY.” *Spectā: Journal of Photography, Arts, and*

Media 1, no. 2 (2018). https://doi.org/10.24821/specta.v1i2.1903.

Annisa, Firly. "Civic of Culture: Media, Kaum Muda, Dan Mengenali Ke- Istimewaan Yogyakarta." *Jurnal Komunikator* Vol. 7, No (2015).

Anom Wahyu Asmorojati. "Dinamika Pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tinjauan Negara Kesatuan." *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta*, no. p-ISSN 2598-5973 (2017).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Legitimasi," 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legitimasi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Daerah Istimewa Yogyakarta. "Jumlah Peserta Didik," December 31, 2024. https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/482-jumlah-peserta-didik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. "Perkembangan Pariwisata," September 30, 2024. https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/01/1572/perkembangan-pariwisata-di-yogyakarta-september-2024.html.

Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta. "IPM Provinsi DIY Meningkat," December 4, 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta.

Bpkp. "Sejarah Keistimewaan Yogyakarta." Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DIY, 2023.

Dewi, Ratna, and Eko Nuriyatman. "Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018). https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444.

Fajarwati, Fransisca Kiki, Suwarno Hadisusanto, and Hartono Hartono. "HUBUNGAN KERAPATAN PENDUDUK DENGAN KEANEKARAGAMAN TANAMAN BUAH PEKARANGAN DI KECAMATAN GODEAN, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA (Relationship between Population Density and Diversity of Yard Fruit Plants in Godean Sub-District, Sleman District, Yogyakarta)." *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 27, no. 2 (2020). https://doi.org/10.22146/jml.53401.

Fariz, Muhammad Gilang Al, and Fitrie Arianti. "PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH OBJEK WISATA, DAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PAD SEKTOR PARIWISATA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 - 2019." *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)* 6, no. 2 (2023). https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.430.

Hamzah, Amir. “Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research).” *Literasi Nusantara Abadi* 5, no. 1 (2020).

Hasim, Rangga Alfiandri. “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah.” *Jurnal Arena Hukum* volume 9, no. 2 (2016).

Hermawan, Yudan, and Rita Nur Wahyuni. “Peningkatan Ekonomi Dan Kompetensi Abad 21 Melalui Gejok Lesung.” *Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 1 (2020). https://doi.org/10.19184/jlc.v4i1.17577.

Iqbal, Muhammad, Yunita Elianda, Ali Akbar, and Nurhadiyanti Nurhadiyanti. “KEISTIMEWAAN PENATAAN RUANG MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.” *Jurnal Caraka Prabu* 4, no. 1 (2020). https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.221.

Irawati, Novi. “Analisis Kepuasan Wisatawan Terhadap Kualitas Fasilitas Public Space Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta Paska Revitalisasi.” *Jurnal Kepariwisataan* 13, no. 1 (2019).

Khofifah Hany Amaria, and Roma Ulinnuha. “Transformasi Kesejahteraan Pelaku UMKM Melalui Digitalisasi Pembinaan Dalam Program ‘Sibakul Jogja’ Di Yogyakarta.” *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* 4, no. 2 (2023). https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9899.

Kholik, Nur. “Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 2, no. 2 (2022). https://doi.org/10.12928/adlp.v2i2.6693.

Kriswandanu, Archi Rafferti. “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Wilayah Yogyakarta: Sebuah Analisis Hukum Komparatif.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023). https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.443.

Kumala, Nur’aini Dewi, Farid Setiawan, Rahmadin Munauwarah, Eni Wulandari, and Tramidzi Tramidzi. “Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 6, no. 2 (2021). https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i2.625.

Lay, Cornelis, Pratikno, AAGN Ari Dwipayana, Purwo Santoso, Haryanto, Wawan Mas’udi, Bambang Purwoko, et al. *Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta*. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM & Program S2 Politik Lokal Dan Otonomi Daerah UGM*. Vol. 2, 2008.

Mufidta, Fenny, and Dekar Urumsah. “Determinan Kesenjangan Ekspektasi Terhadap

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Keistimewaan Model Konseptual." *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting Dan Finance* 6 (2024).

Mustaqim, M., Z. N. Rizqulloh, and R. Aditya. "Mewujudkan Kota Inklusi: Studi Kasus Dari Kota Pelajar Yogyakarta." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 11, no. 1 (2023).

Nugroho, Dwinanta, Hani Subagio, and Hari Rachmadi. "Birokrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Adaptive Dalam Bingkai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 3 (2023). https://doi.org/10.37329/metta.v3i3.2788.

Nugroho, Riant. "Kebijakan Publik Sebagai Komunikasi." *Konferensi Nasional Komunikasi* 02, no. 01 (2018).

Palupi, Cindy Aprilia. "KEISTIMEWAAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA DALAM ASPEK NILAI BUDAYA LOKAL." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2021). https://doi.org/10.55606/jebaku.v1i2.167.

Pandita, Bramanda shafa baqda. "YOGYAKARTA MENJAGA KEUTUHAN BUDAYA JAWA DI ERA MODERNISASI DAN GLOBALISASI." *Universitas Sebelas Maret*, 2022.

Pranadji, Tri, and Endang Lestari Hastuti. "Transformasi Sosio-Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan." *Analisis Kebijakan Pertanian* 2, no. 1 (2004).

Ramadhani, Milenia, B Hestu Cipto Handoyo, and Syukron Abdul Kadir. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Kearifan Lokal." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (2024). https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1125.

Robuan, Rahmat. "Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus Dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (2022). https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.30.

Sahide, Ahmad, Ahdiana Yuni Lestari, and Rezki Satris. "PEMBERDAYAAN KOMUNITAS BELAJAR MENULIS (KBM) MELALUI KONSEP MULTIKULTURALISME UNTUK MEMBENTUK KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2021. https://doi.org/10.18196/ppm.32.213.

Sari, Serlina Candra Wardina, Samsuri Samsuri, and Darto Wahidin. "Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi Di

Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 1 (2020). https://doi.org/10.22146/jkn.53816.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif).” *CV. Alfabeta*, 2023, 1–274. http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/.

Suharta, Robertus Belarminus, and Serafin Wisni Septiarti. “Pengembangan Perlindungan Sosial Kampung Ramah Anak Di Kota Yogyakarta.” *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 1 (2018). https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.11313.

Suharti, Sri, Rifqi Risnadyatul H., and Nani Purwati. “Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Pada Pidato Sri Sultan HB X Dalam Rangka Peringatan Satu Dasawarsa UU Keistimewaan DIY.” *Jurnal Bastrindo* 4, no. 1 (2023). https://doi.org/10.29303/jb.v4i1.957.

Tafakurniawati, Amalia, Agus Dwi Wicaksono, and Aris Subagiyo. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penentuan Harga Lahan Permukiman Di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.” *Planning for Urban Region and Environment* 9, no. 1 (2020).

Tilman, Antonio, Dian Aries Mujiburohman, and Asih Retno Dewi. “Legalisasi Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Riau Law Journal* 5, no. 1 (2021). https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852.

Trisnawati, Fitri, Puji Lestari, and Prayudi Prayudi. “Audit Komunikasi Program Jogja Belajar Budaya.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 17, no. 3 (2020). https://doi.org/10.31315/jik.v17i3.3772.

WIFAQAH, SANDY. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2020. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1039.

Zaenuri, Muchamad, Muhammad Iqbal, and Yunita Elianda. “Tata Kelembagaan Dan Nomenklatur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal MODERAT: Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2021).

BIODATA SINGKAT

Penulis bernama Ardian Mulyadi, menamatkan jenjang pendidikan Sarjana Hukum di IAIN Syaikh Abdurrachman Siddik Bangka Belitung pada program studi Hukum Keluarga Islam. Saat ini penulis melanjutkan studi Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program studi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara. Penulis merupakan awardee Beasiswa Indonesia Bangkit yang merupakan kerjasama Kementerian Agama Republik

Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dalam melanjutkan jenjang pendidikan Magister. Penulis saat ini masih dalam tahap proses pembelajaran dalam mengikuti beberapa simposium dan seminar internasional. Motto penulis adalah “Tidak aka nada yang dapat merubah nasib diri sendiri kecuali diri sendiri yang memulai”.

"Narasi Kuliner dan Kedaulatan Budaya:

Analisis Esai Komunitas Lakoat Kujawas di Mollo, Nusa Tenggara Timur"

Latifah
STAB Kertarajasa
efi.latifah@gmail.com

Ary Budiyanto
Antropologi, FIB, Universitas Brawijaya
arybudhi@ub.ac.id

Abstrak

Narasi kuliner menawarkan perspektif unik dalam memahami dinamika kedaulatan pangan melalui dimensi budaya, khususnya dalam konteks politik, hukum, dan ekonomi. Kajian ini berfokus pada ekspresi kreatif komunitas Lakoat Kujawas dari Mollo, Nusa Tenggara Timur, yang diwujudkan melalui berbagai bentuk karya seperti puisi, cerita, esai, dan gambar dalam buku *Surat-Surat dari Mollo* (2023) dan *Mnahat, Otes, Ma Nuni* (2024). Ekspresi ini memuat narasi yang menggambarkan hubungan erat antara kearifan dan kepercayaan terhadap pangan lokal, biodiversitas, dan identitas diri masyarakat Mollo.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis tematik dan isi, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana karya-karya tersebut merefleksikan nilai-nilai lokal sekaligus menjadi bentuk resistensi terhadap pengaruh eksternal yang mengancam kearifan lokal dan keberlanjutan ekosistem mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya-karya ini tidak hanya mencerminkan kesadaran masyarakat Mollo terhadap diri dan lingkungannya tetapi juga menghidupkan kembali memori kolektif tentang tradisi pangan sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka. Memori ini berfungsi sebagai panduan moral dan strategi bertahan hidup di tengah dinamika globalisasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa narasi kuliner dapat berperan sebagai medium narasi strategis yang mengintegrasikan berbagai dimensi—dari diplomasi budaya hingga advokasi kedaulatan pangan. Dalam konteks yang lebih luas, karya-karya komunitas Lakoat Kujawas menunjukkan potensi kuliner dalam memperkuat posisi Indonesia di percaturan global dengan menonjolkan identitas lokal sebagai aset budaya yang bernilai tinggi. Ekspresi kreatif mereka juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pentingnya biodiversitas dan kedaulatan pangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal.

Melalui penelitian ini, narasi kuliner diidentifikasi tidak hanya sebagai refleksi budaya, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting seperti kedaulatan pangan dan keberlanjutan. Kajian ini merekomendasikan penguatan peran

literasi kuliner dalam platform pendidikan dan diplomasi budaya untuk lebih menegaskan identitas nasional di tengah arus globalisasi.

Kata kunci: budaya kuliner, Lakoat Kujawas, kedaulatan budaya, pangan lokal, identitas budaya

Pendahuluan

Kedaulatan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek politik dan keamanan, tetapi juga mencakup kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan nilai-nilai lokal yang menopang identitas dan keberlanjutan masyarakatnya (Armawi, 2020). Pangan lokal berperan sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan ini karena tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan budaya dan ekonomi (Safa`at, 2013). Di Mollo, tradisi pangan, seperti pamali makanan mencerminkan hubungan mendalam antara masyarakat dan ekosistem sekitarnya, menunjukkan bahwa pangan lokal adalah bentuk perlindungan terhadap eksploitasi berlebihan serta pengingat akan tanggung jawab manusia terhadap alam. Hal ini sejalan dengan peran biodiversitas yang tidak hanya mendukung kedaulatan pangan, tetapi juga menjadi penopang utama bagi pelestarian budaya dan identitas bangsa melalui hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan.

Biodiversitas memiliki peran strategis dalam mendukung kedaulatan negara melalui kedaulatan pangan dan budaya dengan menyediakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup masyarakat sekaligus memperkuat identitas nasional. Keanekaragaman hayati, yang mencakup variasi spesies, genetik, dan ekosistem, memastikan ketersediaan sumber pangan lokal yang mandiri, seperti tanaman pangan tradisional dan produk hewani. (Buckles et al., 2023). Sumber daya ini tidak hanya bergizi tetapi juga meningkatkan ketahanan negara terhadap ancaman perubahan iklim dan hama melalui keberagaman genetik dan praktik pertanian yang berkelanjutan (Kassam & Bernardo, 2022; Noor, 2023).

Selain itu, biodiversitas berperan dalam melestarikan pengetahuan tradisional dan praktik budaya yang menjadi bagian dari warisan nasional (Erythriana et al., 2023; Purnomo, 2024). Dalam konteks komunitas Mollo, misalnya, sistem marga yang terkait dengan elemen alam mencerminkan hubungan erat antara manusia dan lingkungan, menciptakan harmoni antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem (Nati et al., 2023; Ratnasari, 2023). Hal ini selaras dengan budaya-budaya lain di Indonesia, di mana spesies tertentu memiliki nilai spiritual dan budaya yang mengukuhkan identitas suku bangsa, baik melalui tradisi kuliner, ritual, maupun narasi kultural.

Manfaat biodiversitas juga tercermin dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional melalui praktik berkelanjutan, seperti ekowisata dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Dengan menjaga biodiversitas, negara tidak hanya menjamin ketahanan pangan, tetapi juga mempertahankan kedaulatan budaya, melindungi warisan lokal, dan mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks Mollo, sistem marga yang terkait dengan elemen alam (tanah, rumah, hutan, batu, dan air) memperkuat hubungan manusia dengan lingkungan, menciptakan keseimbangan yang harmonis antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian alam (Nati et al., 2023).

Identitas budaya, yang sering kali diwujudkan melalui tradisi pangan dan nilai-nilai lokal, memainkan peran strategis dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Ketika budaya lokal dihormati dan dilestarikan, masyarakat memiliki pijakan kuat untuk menghadapi tantangan globalisasi. Ekspresi kreatif seperti karya sastra kuliner komunitas Lakoat Kujawas menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat menjadi alat resistensi terhadap pengaruh luar yang merugikan, sekaligus memperkuat identitas nasional. Dengan demikian, hubungan erat antara pangan lokal, biodiversitas, dan identitas budaya tidak hanya mendukung keberlanjutan komunitas tetapi juga memperkuat posisi bangsa dalam menghadapi dinamika global (Safa`at, 2013; Sasongko, 2006).

Di era globalisasi, narasi lokal memainkan peran penting dalam mengeksplorasi dan merefleksikan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks dalam masyarakat. Narasi lokal berfungsi sebagai lensa untuk mengkaji hubungan antara budaya dan perubahan ekonomi, mengungkap bagaimana barang dan jasa budaya diproduksi dan dikonsumsi dalam konteks globalisasi (Cunningham, Banks, & Potts, 2008). Dalam hal ini, Marquis & Battilana (2007) berpendapat bahwa komunitas lokal tetap berperan penting dalam membentuk organisasi, bahkan ketika globalisasi semakin intensif. Narasi lokal memainkan peran penting dalam mencerminkan dan membentuk dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di era globalisasi dengan budaya berpartisipasi aktif dalam beradaptasi, melawan, dan mentransformasikan pengaruh global (Iwabuchi, 2002; Marquis & Battilana, 2007; Magu, 2015; Chow et al, 1996).

Komodifikasi budaya dan dampaknya terhadap ekspresi budaya menjadi tema yang sering muncul, yang di dalamnya narasi lokal mengkritik efek globalisasi ekonomi terhadap identitas dan praktik budaya (Ziyan, 2023). Selain itu, globalisasi sering kali menyebabkan homogenisasi ekspresi budaya, yang di dalamnya identitas lokal terancam. Narasi lokal menangkap ketegangan ini dengan menyoroti erosi identitas tradisional sekaligus mengadvokasi pelestarian budaya. Lebih jauh, narasi lokal melampaui batas-batas nasional dengan menciptakan koneksi transnasional yang mengeksplorasi pengalaman manusia yang

bersifat universal dan kompleksitas identitas dalam dunia yang terhubung secara global (Gautam, 2020). Melalui penceritaan, narasi lokal juga mengkritik ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang muncul dari globalisasi, memberikan wawasan tentang pengalaman komunitas yang terpinggirkan dan mendorong empati serta kesadaran (Altun, 2023; Crisp, 2021). Dengan demikian, narasi lokal di era globalisasi tidak hanya mencerminkan kompleksitas ini, tetapi juga bertindak sebagai bentuk perlawanan dan seruan untuk melestarikan identitas budaya. Komunitas Lakoat Kujawas di Mollo, Nusa Tenggara Timur, memberikan contoh bagaimana narasi kuliner dapat menjadi alat untuk merefleksikan kedaulatan budaya sekaligus resistensi terhadap pengaruh eksternal yang mengancam nilai-nilai lokal. Buku *Surat-Surat dari Mollo* (2023) dan *Mnahat, Otes, Ma Nuni* (2024) merupakan manifestasi dari usaha komunitas ini dalam mendokumentasikan dan menyuarakan nilai-nilai lokal melalui ekspresi kreatif dalam bentuk visual dan cerita naratif.

Kedua buku ini memuat puisi, cerita, esai, dan gambar yang tidak hanya mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat Mollo tetapi juga menggali memori kolektif terkait tradisi pangan lokal. Melalui karya-karya ini, komunitas Lakoat Kujawas menggambarkan hubungan erat antara pangan lokal, biodiversitas, dan identitas budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sastra kuliner yang dihasilkan oleh komunitas Lakoat Kujawas mencerminkan identitas budaya masyarakat Mollo serta menjadi alat resistensi dan peneguhan jati diri menghadapi ancaman globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik dan analisis isi terhadap karya-karya yang terdapat dalam buku *Surat-Surat dari Mollo* (2023) dan *Mnahat, Otes, Ma Nuni* (2024). Proses analisis dilakukan melalui enam tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah familiarisasi dengan data, yaitu peneliti membaca dan memahami karya secara mendalam dengan mencatat dan menandai bagian-bagian yang relevan. Tahap kedua melibatkan pengkodean awal untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam teks. Selanjutnya, pada tahap pencarian tema, kode-kode yang telah diidentifikasi dikelompokkan untuk menemukan pola-pola yang signifikan. Pada tahap keempat, tema yang telah ditemukan ditinjau kembali guna memastikan relevansinya terhadap data. Tahap kelima adalah penamaan tema, yaitu setiap tema diberi nama yang mencerminkan makna unik yang terkandung di dalamnya. Akhirnya, tahap keenam adalah produksi laporan, yang menghasilkan temuan dalam bentuk narasi yang koheren dan sistematis. Proses ini bertujuan untuk memastikan analisis data yang mendalam dan bermakna.

Hasil dan Pembahasan

Lakoat Kujawas: Inisiatif Budaya dan Literasi di Mollo

Lakoat Kujawas merupakan komunitas budaya di kawasan pegunungan Mollo yang berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif, seperti literasi, fotografi, dan videografi (Nati et al., 2023; Wutun, 2021). Komunitas ini memulai kegiatannya dari ruang lingkup terdekat, yakni rumah dan lingkungan sekitar, sebelum membawa anak-anak untuk menjelajahi ruang eksplorasi budaya yang lebih luas, seperti hutan, mata air, dan batu-batu dengan nilai sejarah penting. Salah satu lokasi utama yang dihidupkan kembali melalui program pendidikan kontekstual mereka adalah Napjam, sebuah hutan kecil dengan mata air dan situs batu yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat setempat, namun hampir terlupakan (Wutun, 2021).

Dalam upaya menghidupkan kembali budaya Mollo, Lakoat Kujawas menyelenggarakan berbagai program literasi, termasuk lokakarya menulis dan fotografi seperti Ketong Biso, yang melibatkan anak-anak dalam eksplorasi alam dan budaya mereka (Nati et al., 2023). Hasil dari program ini, seperti buku puisi *Tubuhku Batu, Rumahku Bulan*, tidak hanya menjadi dokumentasi tetapi juga mendapat pengakuan internasional setelah beberapa puisinya diterjemahkan dan diadaptasi menjadi lagu oleh musisi muda (Nati et al., 2023). Selain itu, komunitas ini turut berperan dalam melestarikan tradisi tutur masyarakat Mollo, seperti yang terlihat dalam kumpulan cerpen Dongeng dari Kap Na'm To Fena, yang mendokumentasikan legenda, sejarah lokal, dan hubungan masyarakat dengan alam (Wutun, 2021).

Sebagai bentuk perlawanan terhadap eksploitasi lingkungan dan marginalisasi pengetahuan adat, Lakoat Kujawas mengembangkan berbagai model pendidikan kontekstual dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (Wutun, 2021). Program seperti Skal Tamalok dan Mnahat Fe'u Heritage Trail membuka ruang bagi komunitas untuk merevitalisasi praktik adat dan memperkuat kesadaran generasi muda akan pentingnya budaya lokal (Nati et al., 2023). Selain itu, Ume Fotumour Food Lab menjadi ruang eksperimentasi pangan lokal yang bertujuan memperkuat kedaulatan komunitas dalam menghadapi kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat (Ariestanty, 2022; Nati et al., 2023).

Dalam buku *Surat-Surat dari Mollo*, peran perempuan Mollo dalam menjaga ekosistem dan budaya mendapatkan perhatian utama. Perspektif ekofeminisme dalam buku ini menyoroti bagaimana perempuan menjadi penjaga utama lingkungan melalui ritual, tenunan, serta aksi kolektif dalam melawan eksploitasi sumber daya alam (Nati et al., 2023; Ratnasari, 2023; Wutun, 2021). Narasi dalam buku ini memberikan interpretasi baru tentang Mollo, yang

sebelumnya lebih banyak dituturkan oleh laki-laki, kini diceritakan dari sudut pandang perempuan untuk memperkuat identitas budaya mereka di tengah ancaman modernisasi (Nati et al., 2023; Ratnasari, 2023).

Lakoat Kujawas terus berkembang dengan mengintegrasikan berbagai medium kreatif, dari film pendek, dokumentasi seni, hingga musik dan tari, sebagai bagian dari strategi pemberdayaan berbasis adat dan literasi digital (Wutun, 2021). Dengan pendekatan ini, komunitas ini tidak hanya berusaha melawan arus homogenisasi budaya tetapi juga menjadi contoh gerakan berbasis akar rumput yang mandiri dan berkelanjutan (Ariestanty, 2022; Nati et al., 2023).

Narasi tentang Pangan Lokal

Dalam tulisannya yang berjudul "Surat Mama Fun" dalam buku *Surat-Surat dari Mollo: Sekumpulan Resep dan Cerita* (Nati et al., 2023), Marlinda Nau menceritakan perjalanannya di dalam komunitas Lakoat Kujawas. Pada awal tahun 2019, Marlinda Nau bersama rekan-rekannya memulai kegiatan heritage trail Mnahat Fe'u, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mempromosikan pangan lokal. Dalam kesempatan ini, ia diberi tanggung jawab untuk mengelola bagian makanan dengan fokus pada bahan pangan yang berasal dari daerah setempat. Kelompok tersebut tidak hanya berinovasi dan bereksperimen dengan bahan-bahan lokal untuk menciptakan hidangan lezat, tetapi juga berusaha menggali narasi di balik setiap bahan makanan atau resep yang digunakan. Bagi Marlinda, setiap hidangan bukan hanya tentang rasa, melainkan tentang cerita yang mendalam dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Bahkan, untuk resep baru yang mereka ciptakan, mereka berusaha memberi makna dan cerita yang menggambarkan karakter dan asal usul bahan tersebut. Menurutnya, makanan seharusnya tidak hanya enak, tetapi juga harus memiliki cerita, identitas, dan ciri khas yang mencerminkan asalnya, sebagai cara untuk melestarikan warisan budaya yang terkandung dalam setiap bahan dan resep.

Kekayaan pangan lokal dalam komunitas Mollo sangat tampak dalam berbagai tulisan yang menggambarkan keragaman dan makna mendalam dari hidangan tradisional mereka. Seperti yang diungkapkan dalam "Surat dari Masa Lalu", makanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber nutrisi tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Tradisi kuliner dalam komunitas ini mencerminkan hubungan erat antara manusia, leluhur, dan alam. Hidangan seperti kopi Mollo yang dicampur dengan madu hutan, tobe, pisang rebus dengan sambal lu'at, se'i (daging kering), pinang, dan sopi (minuman tradisional) bukan hanya kuliner khas tetapi juga memiliki makna spiritual. Dalam esai Resi Neti (Nati et al., 2023, p. 21)

berjudul Surat Wejangan, penulis mengungkapkan, “Aku ingin bertemu kalian. Duduk bersama, minum kopi Mollo bercampur madu hutan dengan sepiring lauk tobe, pisang luan rebus dengan sambal lu'at kulit lemun yang kalian simpan setahun di dalam tuke.” Kutipan ini menyoroti bagaimana makanan menjadi medium untuk menjalin kebersamaan sekaligus menghormati leluhur.

Makanan dalam komunitas Mollo juga melibatkan ritual dan doa. Proses memasak, seperti pembuatan sambal lu'at, digambarkan sebagai "ritual dan doa", menekankan aspek spiritual dalam memasak. Selain itu, kunci sukses fermentasi sambal lu'at disebut bergantung pada penggunaan garam, sementara kelezatannya terletak pada bawang putih dan kulit lemun. Pengetahuan kuliner ini diwariskan secara turun-temurun; orang tua tidak hanya mewariskan resep, tetapi juga makna spiritual di balik setiap hidangan kepada anak-anak mereka.

Namun, lanskap pangan lokal juga mengalami perubahan. Pengaruh masakan tionghoa mulai memengaruhi cara tradisional dalam menyiapkan se'i yang menjadikannya mirip dendeng tionghoa, sementara pengiriman ternak hidup ke Jawa menyebabkan kelangkaan se'i sapi tradisional. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Se'i (Nati et al., 2023, pp. 79–80), se'i kering yang dulu menjadi ciri khas Mollo kini semakin sulit didapatkan, yang menunjukkan bagaimana tradisi kuliner bisa terpengaruh oleh faktor eksternal. Meski demikian, makanan tradisional seperti se'i tetap memegang peranan penting dalam sejarah dan identitas masyarakat Mollo.

Selain itu, dalam perjalanan heritage trail Mnahat Fe'u yang dilakukan oleh Marlinda dan timnya, mereka menemukan tantangan lain, yakni penyempitan hutan dan tanah ulayat akibat konversi lahan menjadi industri atau tambang. Hal ini menyebabkan banyak bahan pangan lokal semakin sulit ditemukan. Hilangnya benih-benih lokal yang digantikan oleh benih hibrida juga memperburuk situasi, mengingat benih hibrida hanya bisa digunakan sekali dan tidak dapat ditanam kembali di musim berikutnya. Marlinda mencatat bahwa masyarakat mulai menganggap pangan lokal kurang bergengsi dibandingkan pangan komersial, yang diperparah oleh kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pemberdayaan pangan lokal.

Ekspresi kreatif dalam buku *Mnahat, Otes, Ma Nuni* (2024) juga mengangkat nilai-nilai tradisional tentang pangan lokal sebagai identitas budaya dan strategi bertahan hidup. Makanan lokal, seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan, bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan juga simbol hubungan antara manusia, leluhur, dan alam. Nilai ini tercermin dalam kepercayaan pamali yang mengajarkan keseimbangan ekosistem. Konsep adat Mollo memandang makanan sebagai bagian dari hubungan trinitas, yaitu hubungan manusia dengan leluhur, penguasa tanah,

dan penguasa langit. Sebagai contoh, hubungan marga tertentu dengan umbi-umbian atau kacang-kacangan menjadi bagian inheren dari identitas, sapaan, dan larangan adat mereka.

Dalam hal ini, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat Mollo, terutama dalam mengelola pangan. Perempuan tidak hanya bertanggung jawab dalam memilih benih, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam mencari makanan, terutama saat musim hujan berkepanjangan yang menyebabkan kebun rusak. Jika terjadi gagal panen, perempuanlah yang harus menanggung beban terberat. Oleh karena itu, perempuan juga memainkan peran penting dalam inovasi pangan lokal. Melalui Lakoat Kujawas, perempuan di komunitas Mollo mempromosikan makanan lokal sebagai solusi untuk mengatasi malnutrisi dan krisis pangan akibat perubahan iklim.

Upaya untuk mengembangkan dan melestarikan pangan lokal juga diwujudkan dalam pembangunan ruang fermentasi, Ume Fatumfaun, yang bertujuan untuk menyimpan hasil fermentasi seperti pikel (acar), liker (fermentasi buah lokal), dan bubuk bawang putih. Foodlab ini tidak hanya menjadi penopang pangan lokal, tetapi juga berperan dalam memperkenalkan kreasi pangan lokal yang lebih menarik dan bergizi. Ruang ini juga menjadi pusat edukasi bagi generasi muda agar mereka bangga dengan identitas, adat, dan budaya mereka sendiri.

Secara keseluruhan, ini menggambarkan bahwa pangan lokal dalam komunitas Mollo lebih dari sekadar konsumsi fisik, tetapi juga bagian dari tradisi, spiritualitas, dan identitas budaya. Makanan yang disajikan dalam konteks ibadah, ritual, dan pertemuan keluarga menciptakan ruang bagi transfer pengetahuan kuliner antargenerasi, sekaligus mempertahankan nilai-nilai yang membentuk kohesi sosial dan kebudayaan dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, melestarikan dan mengembangkan pangan lokal bukan hanya menjadi tanggung jawab komunitas, melainkan juga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak agar warisan budaya ini tetap lestari di tengah arus perubahan zaman.

Kebijakan negara yang tidak berpihak pada pengetahuan dan kearifan lokal, terutama dalam hal ketahanan pangan turut menjadi fpenyebab warisan yang terancam menghilang. Dalam berbagai kesempatan, hal ini diungkapkan terutama oleh Dicky Senda dan Mama Fun di *Counter Internationalism and Beyond Local, Biennale Forum* 2021, Yogyakarta, sebagaimana ditulis oleh Ariestanty (2022):

> Dicky merasa ia dan kawan-kawan di lingkungannya dicerabut dari identitas secara sistemis. “Kami dipaksa menjadi Indonesia,” katanya. Tumbuh menjadi anak Mollo yang tak bisa berbahasa Mollo karena diharuskan berbahasa Indonesia. Jika kedapatan berbahasa daerah di sekolah, guru-guru akan memukuli. Wajib belajar tentang Jawa dan pusat, dikucuri buku-buku bermuatan pengetahuan jawasentris dan tak tahu apa-apa tentang konteks serta sejarah sendiri. Masih pula dituntut makan beras, padahal padi

> tidak tumbuh di tanah kering mereka. “Aku merasa jadi orang asing di kampung halamanku sendiri,” ia merasa pendidikan justru menjauhkannya dari ‘rumah’.
>
> “Tak makan nasi bukan berarti miskin.” Kata-katanya menghunjam. Membuat yang menyimak terdiam. Standarisasi kehidupan modern, sebutlah seperti mengonsumsi nasi, berbelanja kebutuhan pangan dengan kas keras, mendiami rumah berdinding batu dan tidak beratap rumput, membuat mereka yang bisa memenuhi kebutuhan pangan hanya dari pekarangannya ataupun tinggal di rumah tradisional dikesankan sebagai orang miskin.

Perubahan iklim, gaya hidup modern, ekonomi eksploitatif, serta kebijakan pangan yang Jawasentris turut mempercepat hilangnya pengetahuan tentang pangan lokal, yang pada gilirannya juga mengikis kekayaan bahasa mereka. Tren ini tidak hanya mengancam bahkan bahasa-bahasa yang digunakan, tetapi juga merenggut identitas budaya. Di sisi lain, urbanisasi dan perubahan gaya hidup telah menyebabkan kemunduran dalam pengetahuan tentang tanaman dan makanan tradisional, terutama di kalangan generasi muda (Soemarwoto & Iskandar, 2021). Di Indonesia Timur, politik pangan yang berpusat di Jawa telah menjauhkan siswa dari warisan pangan lokal, sehingga diperlukan ketergantungan pada generasi tua untuk menemukan kembali pengetahuan tradisional (Wijaya & Sanubari, 2024). Studi-studi ini menekankan urgensi untuk lebih serius menangani pemeliharaan bahasa dan kedaulatan pangan guna melestarikan identitas budaya serta melawan hegemoni global di tengah modernisasi dan kebijakan pembangunan nasional.

Biodiversitas dan Identitas Budaya

Hubungan erat antara masyarakat Mollo dan alam tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem marga yang tidak hanya merepresentasikan identitas budaya tetapi juga mencerminkan keterkaitan dengan biodiversitas lingkungan sekitar. Buku *Mnahat, Otes, Ma Nuni* (2024) memuat narasi yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Mollo memandang alam sebagai bagian integral dari identitas mereka. Sistem marga yang terkait dengan elemen alam menunjukkan hubungan erat antara manusia dan lingkungan. Dalam kajian mengenai biodiversitas dan identitas budaya, penting untuk memahami bagaimana hubungan antara nama marga dengan alam sekitar dan kepercayaan leluhur terjalin erat. Buku ini menguraikan bahwa nama marga sering kali terkait dengan elemen alam seperti batu (fatu), air (oe), dan pohon/kayu (hau). Setiap marga memiliki lambang visual yang disebut malak, yang dapat ditemukan dalam berbagai simbol, seperti yang terlukis pada hewan ternak atau tato. Lambang ini tidak hanya menunjukkan identitas marga secara visual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan turun-temurun.

Dalam budaya ini, marga juga menentukan pantangan atau larangan terkait konsumsi makanan, seperti kacang atau umbi tertentu, yang dipercaya berhubungan dengan asal-usul

nenek moyang yang diyakini berasal dari binatang atau tanaman tertentu. Sebagai contoh, marga Seran memiliki pantangan untuk mengonsumsi belut dan pisang tembaga merah, yang diyakini berhubungan dengan nenek moyang mereka. Selain pantangan, marga juga mengandung ritual penyembuhan, seperti yang terjadi pada marga Bessi yang melarang konsumsi pohon silu dan kacang turis/tunis. Jika pantangan tersebut dilanggar, dapat menyebabkan luka-luka di tubuh, namun mereka memiliki ramuan penyembuh yang terbuat dari kulit atau daun anonak, kemiri, dan kulit batang damar. Lebih jauh lagi, marga-marga ini juga saling berinteraksi dalam kehidupan sosial mereka, terutama melalui perkawinan, yang sering kali menghasilkan cerita-cerita yang saling berkaitan di antara mereka. Interaksi ini memperkaya tradisi budaya yang tercermin dalam setiap marga, yang menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat tersebut.

Di samping itu, dalam konteks biodiversitas dan identitas budaya, kain tenun menjadi lebih dari sekadar produk tekstil, melainkan simbol dari perjuangan melawan ancaman terhadap lingkungan dan identitas budaya. Mama Anaci, seorang figur perempuan yang berperan aktif dalam perlawanan terhadap perusahaan tambang di Mollo, menyampaikan dengan tegas, "Dari kain tenun kita sudah tahu dia siapa, asal dari mana" (Talan et al., 2024). Pernyataan ini menggambarkan bagaimana kain tenun bukan hanya sebagai hasil karya tangan, tetapi juga sebagai wujud dari sejarah, adat, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam setiap helainya. Keterlibatan perempuan, seperti Mama Anaci, dalam mempertahankan kain tenun sebagai simbol budaya yang kaya, turut berkontribusi pada perlawanan terhadap berbagai ancaman eksternal, termasuk kerusakan lingkungan dan marginalisasi budaya. Komunitas Lakoat Kujawas telah menjadikan menenun sebagai bentuk ketahanan, baik terhadap eksistensi budaya mereka maupun terhadap tekanan modernitas yang seringkali mengabaikan nilai-nilai tradisional. Melalui menenun, mereka tidak hanya merawat tradisi, tetapi juga memelihara keberagaman alam yang telah menjadi bagian integral dari identitas mereka. Hal ini menegaskan bahwa perempuan dalam konteks ini tidak hanya berperan dalam menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memperkuat hubungan antara budaya dan alam.

Komunitas Mollo memiliki keterikatan yang erat dengan alam dan tanah, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber kehidupan tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Narasi Surat Gunung karya Kanuku Leon (Nati et al., 2023, pp. 9–10) menggambarkan hubungan sakral ini melalui folklor tentang kelahiran Ibu Bumi. Dalam cerita tersebut, seorang perempuan bungsu yang mendapat tugas ke tanah tertinggi di utara akhirnya menjelma menjadi bongkahan batu tinggi, dari kakinya muncul mata air yang mengalir ke berbagai arah. Generasi

berikutnya menetap di tempat tersebut dan menamainya Nausus, yang berarti "ibu yang memberi banyak susu." Kisah ini tidak hanya menunjukkan bagaimana lanskap alam Mollo terbentuk, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana tanah, air, dan batu menjadi bagian dari kehidupan dan perlindungan komunitas.

Filosofi tanah sebagai ibu juga tercermin dalam Surat Tanah karya Toni Oematan dan Ani Naben (Nati et al., 2023, pp. 12–13), yang menegaskan bahwa tanah itu media penghubung manusia dan leluhur. “Tanah itu Ibu." Konsep ini lebih jauh dipertegas melalui ungkapan dalam bahasa Mollo: "Mpafah sin pah, ma panola sin pah, naskou sin ma naifsin." Artinya, ‘Tanah itu merawat, tanah menjaga, juga memangku dan itu menggendong.’

Pemaknaan ini tidak hanya mencerminkan hubungan spiritual masyarakat Mollo dengan tanah, tetapi juga membentuk prinsip mereka dalam mengelola sumber daya alam. Dalam praktik pertanian, komunitas Mollo menggunakan alat tradisional seperti tofa untuk memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Seperti yang dinyatakan dalam Surat Tanah, "Pakai na hoka atau tofa, bukan rundup dan zat-zat kimia mematikan." Metode ini memungkinkan petani memilih dan memilah tanaman yang perlu dijaga, sehingga anak pohon dapat tumbuh rimbun, sementara daun-daun yang gugur memberikan kehidupan bagi tanah dan organisme kecil yang menyuburkannya.

Kesadaran akan pentingnya pelestarian tanah juga diwujudkan dalam prinsip "hanya menjual hasil bumi, bukan tanahnya." Bagi komunitas Mollo, tanah bukan sekadar aset ekonomi yang bisa diperjualbelikan, melainkan bagian dari kehidupan yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Dalam “Surat Tanah” ditekankan bahwa, "Orang Mollo selalu punya prinsip, jual apa yang bisa kamu tanam dan rawat, apa yang bisa kau ciptakan dan perbanyak. Karena kau tidak bisa menciptakan dan memperbanyak tanah maka jangan jual tanah." Prinsip ini merupakan bentuk resistensi terhadap eksploitasi sumber daya alam dan upaya mempertahankan kedaulatan budaya mereka di tengah arus modernisasi yang semakin mengancam.

Selain dalam pengelolaan sumber daya, pelestarian budaya juga terwujud dalam praktik-praktik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ritual-ritual yang berkaitan dengan tanah dan pertanian memperkuat ikatan komunitas dengan leluhur mencerminkan sistem pengetahuan yang berakar pada pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan alam. Pengetahuan lokal ini tidak hanya menjadi alat bertahan di tengah perubahan lingkungan, tetapi juga memperkokoh jati diri komunitas di tengah tekanan globalisasi.

Namun, komunitas Mollo menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan praktik-praktik tradisional di tengah arus modernisasi. Perkembangan infrastruktur, urbanisasi, dan komersialisasi lahan mengancam sistem nilai yang telah lama mereka pegang. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan modern dan pelestarian nilai-nilai tradisional menjadi kunci keberlanjutan budaya mereka. Adaptasi terhadap perubahan zaman perlu dilakukan tanpa mengorbankan prinsip dasar yang telah menjaga keberlangsungan komunitas ini selama berabad-abad.

Kajian ini menunjukkan bahwa biodiversitas dan identitas budaya dalam komunitas Mollo merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan. Praktik-praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat identitas budaya. Kedaulatan budaya yang tercermin dalam praktik pertanian dan narasi ekologis mereka menjadi bentuk resistensi terhadap homogenisasi budaya dan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, pelestarian kearifan lokal menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan warisan budaya, demi memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka junjung tetap hidup di masa depan.

Resistensi terhadap Ancaman Eksternal

Karya-karya dalam kedua buku ini mencerminkan resistensi terhadap pengaruh modernisasi, seperti eksploitasi tambang dan invasi makanan ultra-proses. Narasi ini juga memperlihatkan peran perempuan Mollo dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Buku *Mnahat, Otes, Ma Nuni* (Talan et al., 2024) yang mengangkat tema ketahanan masyarakat terhadap ancaman eksternal dan internal, menyorot bagaimana masyarakat Mollo, terutama perempuan, menunjukkan resistensi terhadap ancaman terhadap sumber daya alam, khususnya mata air. Bagi orang Mollo, mata air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi simbol keberlanjutan yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam keyakinan mereka, terdapat pepatah yang menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam: "Niun Oel Panat He Naekan Te Tepas, Meuk Homan Panat He Naekan te Balat," yang berarti "airnya boleh diminum tapi jaga supaya tidak tenggelam dan hilang, hutannya boleh dimanfaatkan tetapi jaga supaya tidak habis sampai akar-akarnya." Perempuan di Mollo, yang memegang peran utama dalam mengelola air bersih dan bahan pangan, memiliki perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan (Talan et al., 2024). Ketika ancaman eksternal, seperti pertambangan, datang mengancam, perempuan menjadi garda terdepan dalam perlawanan. Mereka memahami bahwa kerusakan alam akan langsung berdampak pada kelangsungan hidup keluarga mereka. Dalam konteks ini, menenun menjadi sarana penting bagi perempuan untuk menyuarakan perlawanan mereka terhadap tambang yang merusak alam.

Narasi kuliner dan kedaulatan budaya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas suatu komunitas. Dalam konteks Mollo, Nusa Tenggara Timur (NTT), esai-esai dari Komunitas Lakoat Kujawas merefleksikan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan alam sebagai bagian dari tubuh budaya mereka. Esai "Sajak Surat" karya Resi Neti, "Perempuan" karya Indi Seran, dan "Surat Wejangan" karya Resi Neti, serta lainnya dalam buku *Surat-Surat dari Mollo: Sekumpulan Resep dan Cerita* (Nati et al., 2023) menegaskan keterkaitan erat antara alam, perempuan, kuliner, dan perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya. Di samping sebagai catatan historis, tulisan-tulisan ini menjadi bentuk perlawanan kolektif terhadap ancaman luar dan dalam yang mengancam kedaulatan budaya Mollo.

Ancaman luar terhadap kedaulatan budaya di Mollo terutama datang dari sistem ekonomi kapitalistik yang berusaha mengeksploitasi alam dan mengikis nilai-nilai lokal. Eksploitasi batu, hutan, dan mata air untuk kepentingan komersial mengancam keseimbangan ekosistem yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Mollo. Dalam esai "Perempuan", ditegaskan bahwa perempuan menjadi garda terdepan dalam mempertahankan tanah dan batu mereka dari perampasan. Ini menunjukkan bagaimana ekologi lokal tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang terus dilawan agar tetap utuh. Degradasi ekologis yang terjadi akibat eksploitasi ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan praktik budaya yang berakar pada alam.

Narasi kuliner dalam tulisan bertajuk surat-surat ini juga menunjukkan bagaimana kuliner lokal menjadi sarana menjaga ingatan kolektif dan hubungan dengan leluhur. Dalam "Surat Wejangan", disebutkan tentang kopi Mollo, lauk tobe, pisang luan rebus, sambal lu'at, dan se'i. Namun, di tengah arus globalisasi, budaya pangan tradisional semakin terancam oleh masuknya makanan cepat saji, modernisasi pola konsumsi, serta perubahan cara bertani akibat sistem pertanian industri. Jika kuliner lokal yang kaya dengan nilai spiritual dan ekologis ini mulai ditinggalkan, maka salah satu pilar penting dari kedaulatan budaya Mollo juga akan runtuh.

Ancaman dalam terhadap kedaulatan budaya di Mollo tidak hanya berasal dari pihak luar tetapi juga dari dalam komunitas sendiri. Hal ini, antara lain, terkuak dalam esai "Sajak Surat", yang menegaskan, "Menjaga tanah dan batu yang hendak dijual oleh para pemimpin dari kampung sendiri." Perusahaan besar sering kali masuk dengan dalih investasi, tetapi justru mengorbankan kedaulatan masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya mereka. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak hanya kehilangan hak kepemilikan atas tanahnya, tetapi juga kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menopang kehidupan mereka.

Pemimpin yang seharusnya melindungi masyarakat justru mengkhianati nilai-nilai adat demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Ketika pemimpin lokal lebih berpihak kepada kepentingan modal dibandingkan kesejahteraan rakyatnya, perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi semakin berat.

Esai-esai tersebut juga memperlihatkan bagaimana perlawanan terhadap eksploitasi dilakukan melalui warisan nilai dari generasi ke generasi. Namun, ancaman internal bisa muncul dari generasi muda yang terpengaruh oleh budaya konsumtif dan mulai kehilangan keterikatan dengan warisan leluhur. “Surat Wejangan” menyoroti pentingnya menenun sebagai bentuk perlawanan, tetapi jika praktik ini mulai ditinggalkan, nilai-nilai perlawanan budaya pun ikut terkikis. Dalam konteks ini, keberlanjutan warisan budaya sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilai tradisional ini ditanamkan kepada generasi muda.

Kapitalisme tidak hanya menciptakan ketimpangan antara korporasi dan masyarakat adat, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial di dalam komunitas itu sendiri. Perempuan dalam esai “Perempuan” menyatakan bahwa gerakan mereka tidak memiliki pemimpin tunggal, melainkan berbasis kolektivisme. Namun, fragmentasi sosial akibat perbedaan akses terhadap ekonomi modern dapat merusak solidaritas ini. Ketika sebagian masyarakat mendapatkan manfaat dari modernisasi sementara yang lain semakin termarjinalkan, maka kebersamaan dalam mempertahankan budaya dan alam bisa melemah.

Esai-esai dari Komunitas Lakoat Kujawas menggambarkan bagaimana masyarakat Mollo menghadapi ancaman terhadap kedaulatan budaya, dari luar dan dalam. Kapitalisme, eksploitasi sumber daya, dan globalisasi menjadi ancaman eksternal yang mencoba merusak hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sementara itu, ancaman internal datang dari pemimpin lokal yang berpihak pada korporasi, perubahan pola pikir generasi muda, dan ketimpangan sosial yang dapat melemahkan semangat kolektivisme.

Perlawanan yang dilakukan masyarakat Mollo melalui praktik budaya seperti menenun, memasak makanan tradisional, dan mempertahankan ekosistem adalah bentuk nyata dari perjuangan kedaulatan budaya. Sebagaimana ditegaskan dalam “Surat Wejangan”, “Cinta kalian kepada alam semesta melebihi kekuatan peluru.” Ini menunjukkan bahwa narasi kuliner tidak sekadar soal makanan tetapi juga soal perlawanan terhadap kapitalisme yang mengancam warisan budaya dan lingkungan mereka.

Kunci keberlanjutan perjuangan ini adalah menjaga kesadaran kolektif melalui pendidikan budaya, memperkuat ekonomi berbasis komunitas, dan melawan segala bentuk

eksploitasi yang menggerogoti kedaulatan masyarakat adat. Dengan demikian, masyarakat Mollo dapat terus mempertahankan identitas dan budaya mereka di tengah tantangan zaman.

Namun demikian ada sisi lain yang masih perlu dikritisi dalam kasus perjuangan komunitas Lakoat Kujawas ini yang perlu dikaji lebih holistik, misalnya peran perempuan dalam perjuangan komunitas Mollo ini terasa sangat dominan. Sebagaimana dituturkan oleh Dicky Senda yang ditulis Ariestanty (2022):

> Mollo juga berarti perempuan dari gunung. Sayangnya, narasi perempuan tak pernah lagi dimunculkan karena masuknya cara pikir patriarki lewat penyebaran agama dan praktik kolonialisme. … Perempuan punya peran strategis dalam tatanan masyarakat adat Mollo. Seorang bife ainaf—*mama*—bertugas memanajemeni keluar-masuk bahan pangan. Dialah yang mengatur hajat hidup satu keluarga dan merancang strategi agar bisa bertahan melewati musim dengan bahan pangan yang dimiliki.
>
> Seorang bife ainaf cermat berhitung berapa banyak bahan pangan bisa disimpan dalam satu uem bubu agar cukup untuk seluruh anggota keluarga sepanjang musim. "Hanya dia yang berhak mengeluarkan bahan pangan," terang Dicky. Jika mereka pergi, bahan pangan untuk keperluan satu keluarga telah disiapkan. Semisal ia lupa, anggota keluarga tidak boleh mengambil sendiri ke lumbung, tetapi meminjam ke keluarga lain, yang nanti akan diganti oleh bife ainaf setelah ia kembali. "Bapak ataupun anak tidak boleh, tidak punya hak.

Kajian ini akan semakin kaya dengan analisis yang mendalam tentang beragam peran yang dimainkan oleh individu dari berbagai identitas gender dalam pelestarian budaya komunitas Mollo. Perspektif ini akan melengkapi pemahaman kita tentang bagaimana laki-laki, perempuan, dan mereka yang mengidentifikasi diri di luar biner gender berkontribusi pada upaya kolektif ini.

Selain itu, narasi yang mengesankan anti-kebijakan Jawa sentrisme memang tidak bisa disalahkan. Namun dalam realitasnya, kebudayaan Jawa, yang termasuk di dalamnya sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, ekonomi, politik dan dalam pembahasan tentang ketahanan pangan dan kuliner ini, bisa dikatakan adalah korban pertama dari kebijakan yang tidak berpihak dan berperspektif karifan lokal. Sama dengan Mollo agama baru, gaya hidup kapitalisme modern. Karena itu, semua yang dikeluhkan oleh Dicky Senda dan kawan-kawan itu sudah dan masih dialami oleh orang Jawa. Keragaman hayati seperti yang ada di zaman Borobudur serta cerita-cerita dari kakawin dan babad atas kekayaan kuliner dan tradisi sudah banyak yang punah. Bahkan, tak jarang dikeluhkan di media massa semakin hilang dan redupnya kuliner lokal, yang kalah dengan kuliner global kapitalis seperti tampak di mall-mall dan jajana-jajanan di depan SD. Jawa kini hanya mengenal beras, tidak banyak yang mengenal jagung, sorgum, cantel, dan umbi serta kacang-kacangan lokal. Khazanah beras ketan pun tidak lagi dominan, apalagi mengolah bahan pangan itu semua menjadi kuliner yang enak dan

menyehatkan. Banyak kosa kata tentang makanan dan pahan pangannya yang sudah tidak terwariskan karena hilangnya bahan dan pengetahuan lokal. Bahkan, bahasa Jawa sengaja tidak dipakai lagi atas inisiatif pemimpin-pemimpin Jawa sendiri di masa perjuangan kemerdekaan (Syahrain, 2021). Dalam sisi ini, Dicky Senda dan masyarakat Mollo boleh dibilang masih beruntung.

Melihat dan melacak secara historis, sebenarnya bahan pangan lokal yang diperjuangkan Mollo sejatinya juga berasal dari luar Mollo. Sorghum dan cantel berasal dari Afrika dan Mediterania; jagung, singkong, cabai, kacang tanah dari benua Amerika dibawa Portugis dan Belanda; lokuat dan jeruk-jerukan dari Tiongkok dan lain sebagiannya. Jadi, ketahanan pangan lokal sejatinya bermakna kemampuan lokal memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dari benih dan panen pangan mereka, termasuk pengetahuan mengolah bahan makan dengan rerempahan yang juga diupayakan sendiri. Ketidak-ketergantungan bahan pangan dari pihak luar menjadi ukuran, namun menyesuaikan dan meningkatkan citarasa agar bisa selera adalah keniscayaan yang boleh diambil darimana saja (Arif, 2021; Armawi, 2020).

Narasi lokal dalam komunitas Mollo memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi akibat pengaruh globalisasi. Dalam konteks Lakoat Kujawas, kita dapat melihat bagaimana komunitas ini berperan dalam menghidupkan kembali budaya lokal melalui berbagai program literasi dan eksplorasi budaya yang melibatkan generasi muda. Melalui narasi lokal yang mereka bangun, mereka tidak hanya melestarikan makanan tradisional dan praktik budaya, tetapi juga memperkuat kedaulatan mereka terhadap ancaman eksternal seperti eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung keberlanjutan kearifan lokal.

Seperti yang dijelaskan oleh Cunningham et al. (2008), narasi lokal memainkan peran penting dalam memproduksi dan mengonsumsi barang dan jasa budaya di tingkat lokal. Lakoat Kujawas memanfaatkan narasi lokal ini untuk mendokumentasikan sejarah dan tradisi mereka, baik melalui cerita rakyat maupun makanan tradisional, yang berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap homogenisasi budaya akibat globalisasi. Mereka menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk melestarikan keberagaman budaya mereka, yang berfungsi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan untuk menciptakan kohesi sosial (Huang, 2024).

Melalui kegiatan seperti heritage trail dan pengembangan ruang fermentasi pangan lokal, komunitas Mollo menunjukkan bagaimana praktik budaya dapat mendukung

pembangunan ekonomi berbasis adat, yang di dalamnya budaya tidak hanya berfungsi untuk melestarikan warisan, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi lokal. Hal ini sesuai dengan pendapat Goodman (2007) yang menyatakan bahwa budaya lokal dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan struktur kepemilikan di tingkat lokal. Di sini, upaya untuk melestarikan pangan lokal dan menenun kain menjadi bagian dari identitas budaya yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai bentuk ekonomi kreatif yang mendukung keberlanjutan komunitas Mollo.

Selain itu, Wheatley (2024) menyoroti bagaimana globalisasi bisa menciptakan peluang untuk pertukaran budaya dan hibridisasi. Meskipun tantangan dari modernisasi dan sistem kapitalistik yang memperkenalkan pola konsumsi baru yang lebih mengarah ke makanan cepat saji dan bahan pangan komersial, Lakoat Kujawas berhasil mengadaptasi pengaruh ini dengan mengembangkan kuliner lokal yang tetap menjaga nilai budaya, sekaligus menawarkan inovasi dalam produk makanan agar lebih menarik dan bergizi bagi generasi muda.

Secara keseluruhan, narasi lokal yang dibangun oleh Lakoat Kujawas dalam melestarikan makanan lokal dan budaya mereka sangat selaras dengan teori yang menyatakan bahwa masyarakat harus berusaha mempertahankan esensi budaya mereka sambil beradaptasi dengan kebutuhan zaman (Huang, 2024; Wheatley, 2024). Meskipun ada tantangan besar, seperti ancaman dari kebijakan yang tidak mendukung kearifan lokal dan modernisasi yang mengancam keberlanjutan budaya, perjuangan komunitas Mollo melalui narasi pangan lokal, kebudayaan, dan pendidikan berbasis adat menjadi contoh bagaimana budaya lokal dapat bertahan dan bahkan berkembang di tengah arus globalisasi yang kuat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kajian ini mengungkap bahwa narasi kuliner dan ekspresi kreatif komunitas Lakoat Kujawas di Mollo, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya menjadi cerminan identitas budaya, tetapi juga alat resistensi terhadap ancaman eksternal dan internal yang menggerogoti kedaulatan budaya mereka. Melalui karya-karya seperti *Surat-Surat dari Mollo* (2023) dan *Mnahat, Otes, Ma Nuni* (2024), komunitas ini berhasil menghidupkan kembali memori kolektif tentang tradisi pangan lokal, biodiversitas, dan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Narasi kuliner yang mereka bangun tidak hanya sekadar tentang makanan, tetapi juga tentang nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang menjadi fondasi identitas budaya mereka. Komunitas Lakoat Kujawas menunjukkan bahwa pangan lokal bukan hanya sumber nutrisi, tetapi juga simbol kedaulatan budaya dan perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam. Peran

perempuan dalam menjaga ekosistem, melestarikan tradisi tenun, dan mengelola pangan lokal menjadi kunci penting dalam mempertahankan keberlanjutan budaya dan lingkungan. Namun, tantangan seperti modernisasi, perubahan iklim, kebijakan pangan yang tidak berpihak, dan pengaruh budaya global terus mengancam keberlangsungan tradisi ini. Karya-karya komunitas Lakoat Kujawas juga mengungkapkan bagaimana narasi kuliner dapat menjadi medium strategis untuk diplomasi budaya dan advokasi kedaulatan pangan. Dengan menonjolkan kekayaan biodiversitas dan kearifan lokal, mereka tidak hanya memperkuat identitas budaya Mollo, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman global tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Hal terpenting dalam ketahanan pangan adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk benih, hasil panen, dan pengetahuan mengolah bahan makanan dengan rempah-rempah yang juga mereka usahakan sendiri. Ketahanan pangan lokal lebih menekankan pada kemandirian dan kemampuan untuk menyesuaikan serta meningkatkan cita rasa makanan agar sesuai dengan selera masyarakat, tanpa harus terpaku pada asal-usul bahan pangan tersebut.

Di luar itu, penting untuk menekankan bahwa perjuangan komunitas Lakoat Kujawas, terutama dalam konteks budaya Mollo, adalah bidang yang kaya untuk penelitian lebih lanjut. Peran perempuan yang signifikan, seperti yang telah ditunjukkan, menggarisbawahi perlunya penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana laki-laki berkontribusi pada pelestarian budaya dan perlawanan terhadap ancaman eksternal. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi dinamika gender secara lebih rinci, memberikan wawasan yang lebih berharga tentang strategi adaptasi dan ketahanan komunitas ini.

Selain melebarkan fokus pada peran gender dalam komunitas Mollo, penting juga untuk melihat bagaimana faktor-faktor lain, seperti kebijakan dan pengaruh eksternal, memengaruhi upaya pelestarian budaya dan ketahanan pangan. Meskipun kritik terhadap kebijakan Jawa sentrisme tidak dapat disangkal, perlu diingat bahwa kebudayaan Jawa, termasuk dalam aspek ketahanan pangan dan kuliner, juga mengalami kemunduran akibat kebijakan yang tidak berperspektif pada kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam hilangnya keragaman bahan pangan tradisional Jawa dan pergeseran kuliner lokal menuju dominasi makanan global yang kapitalistis. Di sisi lain, meskipun banyak budaya kuliner lokal yang tergerus, seperti yang dihadapi oleh masyarakat Jawa, komunitas Mollo masih lebih beruntung karena mereka berupaya melestarikan bahan pangan lokal dan pengetahuan tradisional yang mendukung ketahanan pangan.

Saran

Untuk memastikan keberlanjutan narasi kuliner dan kearifan lokal, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, penguatan literasi kuliner dalam pendidikan formal dan nonformal dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya pangan lokal dan biodiversitas. Program literasi budaya yang melibatkan komunitas lokal, seperti lokakarya menulis dan dokumentasi tradisi kuliner, perlu digalakkan.

Kedua, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan pangan lokal dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam mereka. Praktik eksploitasi sumber daya alam yang merugikan komunitas lokal, seperti pertambangan dan konversi lahan, harus dihentikan. Ketiga, promosi dan diplomasi budaya melalui festival, pameran, dan platform digital dapat memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada dunia. Narasi kuliner juga dapat menjadi alat diplomasi budaya untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Keempat, pemberdayaan perempuan dan komunitas lokal perlu ditingkatkan dengan memberikan akses terhadap sumber daya dan pelatihan kewirausahaan. Pembangunan ruang-ruang kreatif seperti food lab dan pusat dokumentasi budaya juga penting untuk mendukung inovasi dan pelestarian tradisi kuliner. Terakhir, kolaborasi antar-lembaga, termasuk pemerintah, akademisi, LSM, dan komunitas lokal, perlu diperkuat untuk mengembangkan strategi pelestarian budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, narasi kuliner dan kearifan lokal dapat menjadi kekuatan strategis dalam mempertahankan kedaulatan budaya, memperkuat identitas nasional, dan menjawab tantangan globalisasi. Komunitas Lakoat Kujawas telah menunjukkan bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tetapi juga tentang membangun masa depan yang berkelanjutan dan bermartabat. Hal ini yang bisa ditiru dan diterapkan di masyarakat suku-suku bangsa Nusantara ini, sebelum semuanya terlambat.

Pustaka Rujukan

Altun, M. (2023). Literature and Social Change: Exploring the Transformative Power of Words. *International Journal of Social Sciences and Educational Studies*, *10*, 386–391. https://doi.org/10.23918/ijsses.v10i3p386

Ariestanty, W. (2022, January 7). Lakoat.Kujawas: Masyarakat Adat Mollo Melawan Pemiskinan Negara Indonesia. *Project Multatuli*. https://projectmultatuli.org/lakoat-kujawas-masyarakat-adat-mollo-melawan-pemiskinan-negara-indonesia/

Arif, A. (2021). *Masyarakat Adat & Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Armawi, A. (2020). *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: UGM Press.

Buckles, D., Mazhar, F., Akhter, F., & Satheesh, p. v. (2023). *Food Sovereignty and Uncultivated Biodiversity in South Asia*. International Development Research Centre.

Chow, R., Harootunian, H., & Miyoshi, M. (1996). Global/local: Cultural production and the transnational imaginary. Duke University Press.

Crisp, H. A. (2021). *Writing Indigenous Literature in Indonesia: The Case of Lakoat.Kujawas* [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/204002

Cunningham, S., Banks, J., & Potts, J. (2008). Cultural economy: the shape of the field. *The cultural economy*, 15-26.

Erythriana, C. N., Utomo, A. P., & Usman, A. (2023). Pemanfaatan Tumbuhan dalam Upacara Nyepi di Pura Luhur Giri Salaka Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. *Jurnal Biologi*, *1*(2), 1–10. https://doi.org/10.47134/biology.v1i2.1961

Gautam, S. (2020, July 8). *How literature transcends national boundaries and builds connections*. https://thekootneeti.in/2020/07/08/how-literature-transcends-national-boundaries-and-builds-connections/

Goodman, D.S. (2007).Narratives of Change. *Portal: Journal Of Multidisciplinary International* Studies, 4.

Huang, J. (2024). Echoes of Folk Culture: an Ethnographic Analysis of Local Narratives in Zhanjiang Communities. *Journal of Social Science and Humanities.*

Iwabuchi, K. (2002). R*ecentering globalization: Popular culture and Japanese Transnationalism*. Duke UP.

Kassam, K.-A. S., & Bernardo, J. (2022). Role of Biodiversity in Ecological Calendars and Its Implications for Food Sovereignty: Empirical Assessment of the Resilience of

Indicator Species to Anthropogenic Climate Change. *GeoHealth*, *6*(10), e2022GH000614. https://doi.org/10.1029/2022GH000614

Magu, S.M. (2015). Reconceptualizing Cultural Globalization: Connecting the "Cultural Global" and the "Cultural Local". *The Social Sciences*, 4, 630-645.

Marquis, C., & Battilana, J. (2009). Acting globally but thinking locally? The enduring influence of local communities on organizations. *Research in organizational behavior*, 29, 283-302.

Nati, R., Seran, I., Nau, M., Lengga,et al. (2023). *Surat-surat dari Mollo: Sekumpulan Resep dan Cerita*. Lakoat.Kujawas.

Noor, I. A. (2023). Peran Keanekaragaman Hayati Di Indonesia Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Global. *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, *3*(2), Article 2. https://doi.org/10.24036/prosemnasbio/vol3/722

Purnomo, H. (2024). “SEGO KUCING” MBOK MISNATI UPAYA MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN NASIONAL MELALUI REVITALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, *3*(1), Article 1. https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/179

Ratnasari, S. (2023). Membaca Mitos Perempuan Dalam Buku Surat-Surat Dari Mollo, Suatu Analisis Semiotika. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *7*(3), Article 3. https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i3.3411

Safa`at, R. (2013). *Rekonstruksi politik hukum pangan: Dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan*. Universitas Brawijaya Press. https://lib.ui.ac.id

Sasongko, T. H. (2006). Jeratan Pangan Global. *Jurnal Analisis Sosial*, 57–81.

Soemarwoto, R., & Iskandar, J. (2021). Plant knowledge richness in the Sundanese upland village: A case study in Sindangsari, West Java, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity.*

Syahrain, A. R. (2021, June 28). Mengapa Bahasa Jawa Tidak Menjadi Bahasa Persatuan Negara Republik Indonesia? Balai Bahasa Provinsi Aceh.

https://bbaceh.kemdikbud.go.id/2021/06/28/mengapa-bahasa-jawa-tidak-menjadi-bahasa-persatuan-negara-republik-indonesia/

Wijaya, F. A., & Sanubari, T. P. E. (2024). Negotiating “Local” Food: Eastern Part Indonesia Narratives and Perspectives. *Society*, 12(2), 883-893.

Talan, E. M., Lofa, E., Seran, I., Lengga, F., Liufeto, Y., Senda, D., Nati, R., Nati, S., Salomuwa, A., Sonbai, V., Seran, V., Seran, I., Otemusu, D., Lopis, V. S., Tualaka, F., Sa’u, R., Mamoh, U., Moruk, A., Liu, C., … Mnanu, D. (2024). *Mnahat, Otes, Ma Nuni* (E. Lofa & D. Senda, Eds.). Lakoat.Kujawas.

Wheatley, M. (2024). Globalization and Local Cultures: A Complex Coexistence. *Premier Journal of Social Science.*

Wutun, R. R. (2021). *Dongeng dari Nunuh Haumeni: Kumpulan cerpen Komunitas Lakoat.Kujawas*. Perkumpulan KOmunitas Sastra Dusun Flobamora.

Ziyan, J. (2023, February 26). Globalization and its Impact on Cultural Identity: An Analysis. *Medium*. https://jihaneziyan.medium.com/globalization-and-its-impact-on-cultural-identity-an-analysis-9e531b22f66e

Short Bio

Latifah,S.S.,M.A., lulus dari S-1, Sastra Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Melanjutkan studi S-2-nya di Asian Studies, University of Hawaii at Manoa. Mengajar di Prodi Kependidikan Agama Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa di Batu, Malang sejak 2012. Sebelumnya, berpengalaman menjadi editor dan jurnalis kontributor sejak 2001. Minat kajiannya luas mencakup studi agama, media, gender, dan budaya.

Ary Budiyanto, saat ini adalah dosen Antropologi di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya di Malang, Indonesia. Ia memperoleh gelar Magister Kajian Agama dan Budaya dari Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia juga beruntung pernah mencicip kelas PhD di ICRS dan IIH-History di universitas yang sama, namun tak tuntas. Dia salah satu pendiri Center for Cultural Studies and Frontier Pages (CCFS) di Universitas Brawijaya. Ia tertarik pada isu-isu agama dan studi lintas budaya, khususnya terkait Peranakan, Islam, Buddha, dan budaya Jawa di Indonesia dalam perjumpaannya dengan

"modernitas" melalui studi visual, material, dan makanan. Buku karyanya antara lain buku biografi Hadinegoro & B.R.Ay. Ismusiratun : Dua Bangsawan Laskar Kesultanan Yogyakarta (Aprinus, Salam, Ary Budiyanto dkk. Ikatan Keluarga G.P. Hadinegoro 2012); buku ritual Buka Luwur Kangjeng Sunan Kudus (YMMSK, 2012); Rendang, Balado, Bafado, Gulai dan Kari: jejak kuliner Luso-Asia di Minangkabau (Kendi, 2022), dan “Katjang Tjina” dalam Kuliner Nusantara : Sejarah Kultural Pecel, Pecak, Rujak, Gado-Gado, dan Sambal Kacangnya (PBK, 2023), dan masih mengerjakan draf buku "Budaya Minum Kopi Orang Jawa” dan “EthnoSotogarphy - Sejarah Sosial Soto".

Pengasingan Para Tokoh Republik di Bangka dan Titik Balik Kemenangan Perjuangan Diplomasi Indonesia : Sebuah Refleksi Bagi Arah Diplomasi Kedaulatan di Sepanjang Nafas Republik Indonesia.

Bambang Haryo Suseno
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Abstrak

Pengasingan pemimpin Republik Indonesia ke Pulau Bangka setelah Agresi Militer II Belanda atas Yogyakarta pada Desember 1948 merupakan blunder Belanda dalam usaha mempertahankan kolonialisme. Alih-alih ingin menghapus Republik Indonesia dari muka bumi, hal itu justru memperpanjang langkah perjuangan. Periode ini adalah penyambung nyawa republik. Pengasingan para tokoh seperti Ir. Sukarno dan Dr. Moh. Hatta ke Bangka justru memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata internasional.

Tulisan bersumber kajian pustaka dengan metode heuristik ini menyoroti bagaimana Pulau Bangka yang awalnya dipilih Belanda sebagai tempat isolasi aman dan minim pengaruh *republikein*, justru menjadi episentrum aktivitas diplomasi yang dinamis. Kunjungan para penghubung, diplomat, tokoh penting dari dalam dan luar negeri untuk bertemu dengan para pemimpin republik menjadikan Bangka sebagai pusat perhatian. Para tokoh dalam pengasingan mampu memainkan peran krusial menjaga marwah republik. Ketajaman analisa atas pembacaan situasi politik dan kecerdasan para tokoh republik di Bangka mempercepat terbentuknya tekanan internasional terhadap Belanda dan mendesak penyelesaian konflik secara damai. Tak lama kemudian, Perundingan Roem-Royen pada Mei 1949 berhasil membuka jalan menuju Konferensi Meja Bundar di Den Haag, di mana kedaulatan Indonesia akhirnya diakui pada 27 Desember 1949.

Pengasingan di Bangka menjadi momentum kunci arah kemenangan diplomasi Indonesia. Pengasingan ini menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya bertumpu pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kecerdasan diplomasi dan kolektivitas kepemimpinan. Kemauan dan kesadaran untuk merdeka dan berdaulat serta kepiawaian para pemimpin menentukan sikap politik di situasi genting dengan mengedepankan kepentingan bangsa patut menjadi referensi bagi perjalanan negara ini di masa depan. Kisah tentang kegigihan, patriotisme, pantang menyerah, kepandaian, serta kecerdikan para pemimpin menemukan

celah yang solutif bagi cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk berdaulat dan setara dengan bangsa lain ini adalah warisan untuk kembali mengenali kekuatan kita sebagai bangsa. Termasuk memahami dan memaknai keterbatasan serta kekurangan di masa lalu menjadi refleksi dan arah perbaikan bagi diplomasi kedaulatan Indonesia sepanjang nafas republik ini.

Kata Kunci: Pengasingan di Pulau Bangka, Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia, Diplomasi Kedaulatan Republik Indonesia.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah awal dari perubahan besar yang terjadi di Nusantara dan masa antara Tahun 1945-1950 adalah periode paling heroik yang sering disebut dengan kronik revolusi Indonesia. Sebagai waktu yang penting bagi sejarah sebuah negara, dirasakan perlu untuk menggali arti penting peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa itu. Periode ini menyimpan kekayaan yang dapat dijadikan materi pembelajaran, evaluasi, dan refleksi bagi perjalanan bangsa ini di masa depan. Kita membutuhkan upaya yang tiada henti untuk terus mengenapi wawasan atas perubahan yang terjadi agar dapat menentukan sikap yang tepat sebagai negara dalam semangat melanjutkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Adalah Bangka, sebuah pulau di sebelah timur Sumatera yang sering terlupakan dalam hiruk pikuk kemeriahan perayaan kemerdekaan Indonesia. Padahal, alih-alih berusia 80 tahun pada Tahun 2025 ini, tanpa langkah-langkah diplomasi yang dirumuskan dari Bangka, Republik Indonesia berakhir di 1948 oleh agresi militer dan hanya berusia tiga Tahun! Peran Bangka dalam peta sejarah perjuangan diplomasi Indonesia dipicu oleh Agresi Militer II Belanda pada 19 Desember 1948 yang berhasil menduduki Yogyakarta; Ibukota Republik Indonesia saat itu. Para pemimpin ditangkap. Militer bergerilya melawan. Tiga hari setelah itu, 22 Desember 1948, tujuh Pemimpin RI diterbangkan dari Yogyakarta. Ditawan di Bangka dan Sumatera. Sejak saat itu, para penghubung, duta besar, diplomat, tokoh politik dalam dan luar negeri datang dan pergi ke Bangka untuk bertemu Sukarno – Hatta. Bangka menjadi pusat aktivitas diplomasi yang penting. Pertemuan, diskusi, dan rapat-rapat menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan kordinasi menggagas dan menentukan langkah strategis untuk menyelesaikan perselisihan antara RI - Belanda.

Semangat pemajuan kebudayaan di Indonesia dalam beberapa tahun ini yang mendorong upaya revitalisasi kekayaan sejarah bagi penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme untuk dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi menarik untuk dilakukan. Membaca, mengenali, merekontruksi, dan memahami kembali peristiwa-peristiwa itu sebagai kekayaan pengetahuan dan referensi bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini masih sangat relevan. Peristiwa sejarah itu adalah warisan bagi manusia Indonesia mengenali kembali semangat cita-cita merdeka, menjadi berdaulat, juga upaya yang telah dilakukan untuk merawatnya tetap berdaulat. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas hal itu. Mengurai arti penting tindakan dan perjuangan para pemimpin RI yang diasingkan di Bangka memperjuangkan kemerdekaan RI lewat jalur diplomasi.

2. Metodologi

Metode yang digunakan adalah metode heuristik, dimana penulis mengumpulkan sumber-sumber (kepustakaan), melakukan pengkajian, menguji dan menafsirkan data, melakukan analisa, dan menyajikan dalam sintesa untuk mengkonstruksi dan mendeskripsikan peristiwa masa lampau sebagai informasi.

B. Pembahasan dan analisa

1. Pengasingan di Bangka: blunder Belanda mempertahankan kolonialisme.

Serangan kilat pasukan udara Belanda dari Semarang pada 19 Desember 1948 bergerak sejak dini hari merangsek langit Yogyakarta. Tentara republik sedang tidak ada di kota. [1] Pangkalan Udara Maguwo yang telah dibersihkan dari penghalang terkondisikan mudah untuk disinggahi pesawat Belanda.[2]

Hari ini juga pemimpin RI bertindak cepat dengan menyelenggarakan sidang yang memutuskan memberi mandat kepada Syafruddin Prawiranegara; Menteri Kemakmuran Rakyat yang saat itu sedang berada di Sumatera Barat untuk membentuk

[1] Mengantisipasi serangan militer Belanda, TNI diperintahkan untuk berada dalam keadaan waspada. Latihan-latihan terhadap kemungkinan serangan telah dipersiapkan. Sebelum tanggal 19 Desember 1948, Kolonel AH Nasution sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD) dan perwira dari Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang bermarkas di Yogyakarta telah diberangkatkan ke Jawa Timur. (sumber: buku "Laporan dari Banaran. Kisah Pengalaman Seorang Prajurit selama perang kemerdekaan", TB Simatupang, Penerbit Sinar Harapan, terbitan ulang, cetakan pertama, 1980, halaman 5)

[2] Dalam buku Bapak Angkatan Udara Suryadi Suryadarma, tulisan Adityawarman Suryadarma, penerbit buku Kompas, 2017, Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Udara TNI telah memasang bom ranjau disekitar lapangan udara Maguwo. Namun karena delegasi Komite Tiga Negara (KTN) tidak bersedia datang ke Yogyakarta selama Landasan Maguwo masih terdapat ranjau, maka atas instruksi dari Bung Hatta seluruh bom yang telah tertanam di pangkalan tersebut kemudian dibersihkan kembali.

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)[3]. Sidang juga memutuskan jika pembentukan Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, memberikan mandat kepada Dr. Sudarsono, Palar, Mr. Maramis di New Delhi untuk *exile-goverment* Republik Indonesia di India.[4]

Perintah Kilat Panglima Besar Sudirman pada pukul 08.00 tanggal 19 Desember 1948 berisikan informasi bahwa telah terjadi serangan terhadap Yogyakarta, Belanda telah membatalkan gencatan senjata dan diperintahkan kepada semua angkatan perang Republik Indonesia untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk melawan musuh.

Serangan besar-besaran Belanda ini dikenal dengan Agresi Militer II Belanda /*Class II* atau *Operatie Kraai*/operasi Gagak, yang dipimpin oleh Jenderal Spoor, berhasil menguasai Ibukota Republik Indonesia, menawan Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa Pejabat Negara Republik Indonesia.

Tanggal 22 Desember 1948, Ir Sukarno, Drs. M. Hatta, Sjahrir, H Agus Salim, AG Pringgadidjo, Mr Assa'at, dan Komodor Suryadarma yang sebelumnya telah dikumpulkan di Istana Agung Yogyakarta dibawa menuju Pelabuhan Udara Maguwo untuk kemudian dipindahkan ke Bangka. Di Pangkalan udara Kampung Dul Pangkalpinang (sekarang Bandara Depati Amir), Drs. M Hatta, AG Pringgadidjo, Mr. Assa'at, dan Komodor Suryadi Suryadarma diturunkan, lalu dibawa ke Mentok dan ditempatkan di Menumbing[5]. Sementara Ir Sukarno, Sjahrir, dan H Agus Salim tetap di pesawat, melanjutkan penerbangan ke Sumatera, ditawan di Brastagi lalu dipindahkan lagi ke Prapat. Tanggal 31 Desember 1948, tawanan di Menumbing bertambah menjadi 6 orang. Ketua Juru Runding RI, Mr Moh Roem dan Wakil Ketua Juru Runding RI, Mr Ali Sastroamidjojo dibawa dari Yogyakarta ke Bangka, bergabung dengan Hatta dkk.

---

[3] 30 Tahun Indonesia Merdeka, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jilid I, cetakan ketiga Tahun 1980, Hal. 192. Mr Syafuddin Prawiranegara tidak pernah menerima mandat secara tertulis. Surat tersebut tidak pernah sampai kepadanya selama di berpindah-pindah tempat di Sumatera.

[4] Setelah memutuskan hal penting tersebut, dalam pengakuan Bung Hatta beliau pulang ke rumahnya hingga pada pukul 15.00 datangkan Abdul Gafar Pringggodigdo dikawal serdadu KNIL menjemputnya untuk dikumpulkan bersama yang lain di Kepresidenan (Istana agung Yogyakarta) selama tiga hari, kemudian dipindahkan ke Bangka. (Drs. Mohammad Hatta; idem. Halaman 200-201)

[5] Menumbing merupakan bukit dengan ketinggian 445 DPL terletak 12 Km dari Kota Mentok. Fasilitas akomodasi di Menumbing yang menjadi tempat pengasingan merupakan bangunan yang dibangun oleh *Banka Tin Winning* (BTW) pada Tahun 1927. Pemilihan Pulau Bangka sebagai tempat pengasingan selain terisolir dan memiliki fasilitas, Pulau Bangka dianggap jauh dari kekuatan pro republik pasca Bangka berhasil dikuasai pasukan Belanda sejak Februari 1946.

Tujuan dari agresi militer tanggal 19 Desember 1948 atas Ibukota RI di Yogyakarta bersifat ganda. Pertama menghancurkan Republik Indonesia sebagai suatu satuan ketatanegaraan. Kedua, untuk membentuk pemerintahan federal sementara tanpa perlu melibatkan Republik Indonesia.[6] Langkah ini dilanjutkan dengan mengasingkan tokoh penting RI keluar Yogyakarta.

Bung Hatta memandang situasi ini malah akan menguntungkan pihak republik. Kondisi ini akan mempercepat campur tangan Dewan Keamanan PBB dan negara-negara lain yang tidak dapat menerima keadaan yang tidak stabil di Asia Tenggara dan membahayakan perdamaian pasca Perang Dunia II.

Keyakinan Bung Hatta itu terbukti. Reaksi luar negeri atas aksi militer tidak menguntungkan Belanda. Negara Arab dan negara yang baru merdeka di Asia, bereaksi mengecam. Australia mendesak sanksi PBB atas Belanda. Perdana Menteri India Nehru mengambil inisiatif mengadakan konperensi di New Delhi dan mengundang negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Media massa di Amerika Serikat, perkumpulan gereja dan serikat buruh di Amerika Serikat menentang aksi militer itu. Situasi ini mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bersidang pada tanggal 22 – 24 Desember 1948. Mengeluarkan resolusi yang menyerukan menghentikan pertempuran dan membebaskan tahanan. Perselisihan Indonesia-Belanda menjadi perhatian dunia. Dewan Keamanan PBB melanjutkan sidang membahas konflik ini pada 27-28 Desember 1948, lalu secara marathon pada 7 – 28 Januari 1949.

Sementara itu, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda di Jakarta Dr. L.J.M. Beel, kukuh berpendapat bahwa republik sudah tidak ada dan tidak diperlukan lagi diadakan perundingan-perundingan dengan republik. Pemerintah Belanda mengikuti pendapat itu, sehingga pada tanggal 3 Januari 1949, Menteri urusan koloni Belanda Maan Sassen mengirim pesan kepada Beel yang mengabarkan persetujuan kabinet atas kebijakan Beel dan sepakat dengan rencana membentuk federasi di Indonesia.[7]

Keputusan kabinet itu menegaskan sikap Pemerintah Belanda yang ingin menyingkirkan Republik Indonesia dalam pembentukan Pemerintah Federal Sementara atas dasar republik yang telah tidak ada lagi oleh aksi militer pada 19 Desember 1948. Apabila ada kemungkinan untuk membujuk beberapa tokoh dari republik untuk bekerjasama di dalam pembentukan Pemerintah Federal Sementara,

[6] Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, PT. Pustaka Sinar Harapan, cetakan kedua, 1991, halaman 237
[7] Ide Anak Agung Gde Agung, idem, Halaman 237-238

maka mereka akan bertindak tidak sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia (sebagai organisasi negara) tetapi sebagai orang-orang yang berasal dari daerah-daerah yang dulu termasuk wilayah kekuasaan yuridiksi Republik.

Sementara itu di Bangka, masa awal pengasingan di Menumbing penuh dengan ketidakpastian. Komunikasi terputus. Perkembangan di Pulau Jawa dan Sumatera tidak diketahui oleh para tawanan di Menumbing. Perkembangan informasi terkait situasi internasional pasca agresi militer diduga tidak diketahui oleh para pemimpin RI di Menumbing. Tanggal 1 Januari 1949 justru kawat berduri dipasang mengelilingi bangunan tinggal mereka. Kesan "penjara" seakan sengaja digunakan untuk meneror.[8] Di masa genting ini insting dan kepiawaian para tokoh di Menumbing sebagai negarawan dalam mengambil sikap terbaik bagi kepentingan republik terlihat. Drs Moh Hatta memiliki pandangan pihak Belanda akan terdesak secara politik akibat agresi militer yang mereka lakukan dan beliau teguh dengan sikap menolak berunding dengan Belanda sebelum dipulihkan kedaulatannya.

Tanggal 7 Januari 1949, Sidang Keamanan kembali membicarakan persoalan Belanda dengan Indonesia yang dilaksanakan di Lake Success-Amerika Serikat. Dr.H.H. Van Roijen, diplomat ulung yang memimpin delegasi Belanda, kembali menekankan bahwa upaya menertibkan suasana di pulau Jawa dan Sumatera sejak 19 Desember 1948 hingga 5 Januari 1949 oleh Pemerintah Belanda telah berakhir. Van Roijen menyatakan para pembesar pemerintah Republik telah dibebaskan, hanya Sukarno, Hatta, dan Agus Salim yang masih ditahan. Tetapi mereka dapat bergerak bebas dengan syarat tidak akan membahayakan ketentraman umum.[9] Padahal kenyataannya para pemimpin Republik Indonesia di Prapat dan Bangka masih dalam tahanan, tidak bisa keluar ruangan, apalagi berpergian ke wilayah lain. Perlakuan menyedihkan harus diterima Hatta dan lainnya di Bangka yang hanya bisa bergerak di ruangan seluas kamar 6x6 meter dan kerangkeng 4x10 meter.

Pidato Van Roijen akhirnya akan menjadi kesalahan fatal dan menjadi olok-olok di dunia diplomasi setelah diketahui perlakuan buruk Belanda terhadap para pemimpin RI, memberikan pengaruh berubahnya dukungan beralih ke Indonesia terutama

[8] Bung Hatta meledek Mr M Roem yang menjabat sebagai ketua delegasi Indonesia " *Bagaimana Saudara Roem, Ketua Delegasi dahulu Sjahrir menandatangani Perjanjian Linggarjati bahwa pada 1 Januari 1949 Indonesia Serikat akan merdeka, tetapi sekarang 1 Januari 1949 Ketua Delegasi dikurung Belanda dalam kerangken*g" Drs. Mohammad Hatta, idem. Halaman 204

[9] Ide Anak Agung Gde Agung, idem, Halaman 228.

Amerika Serikat. Pada sidang itu juga, Sri Rama Rau, wakil dari India menyampaikan bahwa Perdana Menteri India Nehru sangat terkejut atas tindakan Belanda melakukan aksi militer terhadap Indonesia. ia menyebutnya dengan istilah "*agresi yang tidak tahu malu untuk menindas suatu bangsa dan pemerintah*". Nehru telah mengundang 15 negara Arab dan negara-negara di Asia Tenggara termasuk Australia dan Selandia Baru untuk menghadiri konferensi di New Delhi untuk membicarakan persoalan Indonesia.[10]

Tanggal 10 Januari 1949, Mr Brouwer; Komisaris Mahkota Belanda di Sumatera Timur datang ke Menumbing membawa pesan Dr Beel dimana sebelumnya pada tanggal 9 Januari, mengunjungi Presiden Sukarno dan H Agus Salim di Prapat.

Mr Brouwer atas nama Dr Beel menyampaikan bahwa Pemerintah Hindia Belanda tidak mengakui Republik Indonesia lagi sebagai suatu organisasi kenegaraan yang mempunyai wilayah dan pemerintah sendiri. Sebab itu Mr Brouwer bicara dengan Bung Hatta dan lainnya tidak sebagai pejabat resmi, melainkan sebagai tokoh masyarakat Indonesia. selanjutnya Mr Brouwer menyampaikan pesan Dr Beel bahwa Bung Hatta dan lainnya akan diperkenankan bergerak bebas di seluruh Pulau Bangka apabila mau berjanji tidak akan menjalankan kegiatan politik. Bung Hatta dengan tegas menolak tawaran itu karena mereka lebih baik tetap ditawan dan tidak bebas bergerak daripada berjanji tidak akan menjalankan tindakan politik.[11]

Mr Brouwer mencoba membujuk Hatta dengan menawarkan waktu lebih panjang untuk berpikir dan memberikan jawaban tetapi ditolak Hatta dengan mengatakan: "*itu tidak perlu karena jawaban kami tidak akan berubah. sekarang, besok atau kapan pun juga!*" Utusan Dr Beel itu segera meninggalkan Menumbing dan tokoh republik tetap tinggal di dalam kerangkeng kawat berduri.

Tanggal 15 Januari 1949, Komisi Tiga Negara (KTN) melakukan kunjungan ke Pulau Bangka bertemu dengan para tokoh RI di Menumbing. Menyaksikan sendiri bagaimana keadaan mereka sebagai tahanan dan menerima keterangan langsung dari Bung Hatta dan lainnya. Mereka heran melihat kerangkeng kawat berduri itu, yang berdasarkan pernyataan Van Rojen tidak ada. Hal ini menjadi candaan oleh Mr AG Pringgodigdo, bahwa Van Rojen pada saat memberikan keterangan itu "keseleo lidahnya". Ia mengatakan bahwa tokoh di Menumbing bisa bergerak bebas di daerah

[10] Ide Anak Agung Gde Agung, idem, Halaman 228-229.
[11] Ali Sastroamidjojo, idem, halaman 249

yang “4.500 *square miles*” luasnya, sedangkan yang dimaksudkan sebenarnya adalah “*square tiles*” (ubin)![12]

Dalam pembicaraan dengan anggota KTN itu Bung Hatta mengemukakan dengan tegas pendirian pihak Republik untuk menolak rencana Beel untuk membentuk pemerintah federal sementara secara sepihak dan menolak ajakan Beel untuk turut serta dalam pemerintah federal sementara itu sebagai orang perorangan, tokoh masyarakat saja. Bung Hatta menegaskan bahwa pihak republik tetap menyetujui konsep Negara Indonesia Serikat tetapi dengan syarat bahwa pemerintah Republik Indonesia ikut serta dalam pembentukannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, melewati perundingan. Tetapi selama anggota pemerintah masih dalam pengasingan dan belum dipulihkan kekuasaanya di Yogyakarta, Bung Hatta menolak untuk berunding dengan pihak Belanda.

Pendirian tegas Bung Hatta yang disampaikan berdasarkan bukti dan fakta bahwa agresi militer Belanda hanya berhasil menguasai kota-kota saja, sedangkan TNI masih tetap mempertahankan daerah pedesaan dan terus menjalankan serangan gerilya terhadap tentara Belanda. Mr Sjafruddin Prawiranegara juga berhasil membentuk pemerintahan darurat di Sumatera dan bisa mengadakan hubungan dengan pemimpin tentara republik sehingga koordinasi di dalam siasat perlawanan terus dapat dilakukan.

Fakta lainnya adalah reaksi beberapa pemimpin penting dari negara-negara federal (BFO) misalnya Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur yang meletakkan jabatan sebagai bentuk protes atas tindakan kekerasan pihak Belanda dalam Agresi militer terhadap RI. Lewat radio juga diketahui bahwa reaksi negara-negara sahabat sangat menguntungkan RI. Keadaan saat ini tidaklah membuat RI di posisi yang kalah meskipun ibukota telah diduduki Belanda dan para pemimpinnya berada dalam tawanan. Herremans dan Critchley (Anggota KTN) sepertinya juga menyadari hal itu. Mereka berkesimpulan bahwa kedudukan pihak Republik Indonesia tidaklah lemah atau bahkan sudah hilang seperti yang digambarkan oleh pihak Belanda.[13]

Hal ini yang nanti akan memperkuat dukungan atas Republik dari Komisi Jasa Jasa Baik di Dewan Keamanan. Kunjungan dan pembicaraan tanggal 15 Januari ini menjadi penting bagi pandangan Dewan Keamanan atas kedudukan Republik.

---

[12] Mohamad Roem, Bungai Rampai Dari Sejarah, Buku I, Penerbit Bulan Bintang Jakarta, cetakan pertama, 1972, Halaman 104.

[13] Ali Sastroamidjojo, idem, Halaman 250-251

Bung Hatta sempat melontarkan pertanyaan bagaimana status republik dilihat dari sudut pandang internasional, dijawab oleh Critchley dan Herremans, bahwa pemerintah Republik masih diakui oleh Dewan Keamanan dan Komisi Jasa-Jasa Baik.[14] Bung Hatta mengajukan pertanyaan itu untuk mengkonfirmasi sikap resmi Belanda yang disampaikan kepada Bung Hatta oleh Wakil Tinggi Mahkota untuk Sumatera Timur; Brouwer pada tanggal 10 Januari yang memberitahukan bahwa Pemerintah Belanda tidak mengakui lagi republik dan bahwa Hatta dan lainnya tidak diakui lagi sebagai pejabat resmi republik.[15]

Pada tanggal 17 Januari, Mr Gieben; penasehat umum kementerian kehakiman dan Kolonel Thomson dikirim ke Bangka membawa pesan dari PM Dess yang meminta Bung Hatta untuk datang ke Jakarta, bertemu PM Drees. Mr Gieben menguraikan kebijakan pemerintah Belanda dan menegaskan kebebasan bergerak di Pulau Bangka. Kolonel Thomson merayu dengan akan memerintahkan persiapan rumah untuk setiap keluarga para pemimpin. Hatta tetap menolak dengan pendiriannya; jika PM Drees ingin bertemu, ia yang harus datang ke Bangka..[16]

Ide Anak Agung Gde Agung berpendapat, sikap Hatta yang menolak undangan tersebut adalah bagian dari pertimbangan Hatta bahwa jika Hatta sebagai Pemimpin Republik Indonesia datang ke Jakarta di dalam keadaan itu, dapat ditafsirkan sebagai suatu penyerahan kalahnya Republik. Padahal posisi Republik Indonesia di pandangan Dewan Keamanan pada saat itu sedang dalam keadaan yang menguntungkan.[17]

17 Januari 1949 merupakan hari sial bagi delegasi Belanda. Pada hari itu beredar laporan Komisi jasa Baik tertanggal 16 Januari 1949. Dalam laporan itu dilaporkan tentang kunjungan Komisi Jasa Baik yang dipimpin oleh Herremans tanggal 15 Januari 1949 di Bangka. isinya memberikan gambaran yang berlainan sekali tentang keadaan tawanan dengan pernyataan Van Roijen kepada Dewan Keamanan.

Hal itu menyulitkan Van Roijen. Ia menjelaskan bahwa keadaan di Bangka itu adalah kesalahan para pegawai pemerintah setempat yang tidak mengikuti instruksi pemerintah di Jakarta. Tetapi atas kenyataan itu, Pemerintah Belanda menjadi kurang dipercaya oleh Dewan Keamanan. [18]

---

[14] Ide Anak Agung Gde Agung, idem, Halaman 244
[15] Ide Anak Agung Gde Agung, idem, Halaman 244
[16] Drs. Mohammad Hatta, idem. Halaman 206.
[17] Ide Anak Agung Gde Agung, Halaman 239
[18] Ide Anak Agung Gde Agung, idem, Halaman 231-232

20 - 23 Januari 1949 PM India Nehru mengadakan Konferensi Asia mengenai Indonesia untuk mendukung Indonesia. Berita itu diterima oleh tokoh di Menumbing lewat radio, dimana Mr AG Pringgodigdo secara berkala mendengarkan dan mencatat berita penting dari dalam dan luar negeri. Konferensi itu dihadiri oleh Afganistan, Australia, Arab Saudi, Birma, Ethiopia, India, Irak, Mesir, Lebanon, Pakistan, Philipina, Sri Langka, Suriah, dan Yaman. RRC, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand hadir sebagai peninjau.

Mr AA. Maramis yang (telah berada di luar negeri sebelum agresi milter Belanda kedua atas Yogyakarta), diangkat oleh Mr Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Luar Negeri dalam pengasingan, kebetulan sedang berada di India bersama dengan Dr Sudarsono yang lebih dahulu ada disana sebagai wakil RI di India. Kedua pejabat inilah yang memberikan keterangan lengkap tentang keadaan Indonesia pada waktu itu dan politik pemerintah RI dalam menghadapi pihak Belanda. Sikap Pemerintah RI disampaikan kepada ketua konferensi; Jawaharlal Nehru dengan suatu memorandum tertanggal 19 Januari 1949, dan disebarkan juga kepada para delegasi yang hadir. Mr AA Maramis dan Dr Sudarsono mempergunakan kesempatan emas itu untuk menjalankan lobi terhadap peserta konferensi. Oleh sebab itu dalam resolusi konferensi tertanggal 22 Januari 1949 tercermin sekali sikap politik dan tuntutan pemerintah RI.

Sidang PBB Tanggal 21 Januari 1949 di Lake Success berada di titik puncak. Amerika bersama negara anggota Dewan Keamanan lainnya mengajukan sebuah resolusi yang isinya terkait dengan tata cara dan tindakan untuk pemecahan menyeluruh persoalan Indonesia dan jadwal pembentukan tertib hukum baru yang harus diterapkan.

Belanda-Indonesia harus berunding, agresi militer Belanda yang bersifat sepihak harus ditolak, Dewan Keamanan mengambil peran untuk mengawasi Belanda menarik mundur pasukan dari Yogyakarta, dan para pemimpin RI dikembalikan ke Yogyakarta. Dikarenakan pandangan atas permasalahan Indonesia semakin rumit dan meluas, maka Komisi Jasa-Jasa Baik diberikan kewenangan baru menjadi *United Nations for Indonesia* (UNCI), dengan tugas memberikan saran atas nama Dewan Keamanan kepada pihak yang bersengketa untuk memecahkan persoalan yang ada.[19]

Tanggal 23 Januari 1949, hasil resolusi New Delhi oleh Koperensi negara-negara Asia Selatan diterima oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang satu semangat dengan

[19] Ide Anak Agung Gde Agung, idem, Halaman 233

resolusi Dewan Keamanan, bahkan lebih besar dengan menunjukkan solidaritas dan kesetiakawanan negara-negara Asia dalam melawan kolonialisme.

Delegasi Belanda berada dalam masalah yang besar. Mereka sadar dukungan dunia internasional sangat besar dan kuat mendukung kedudukan Republik Indonesia. Kedudukan Belanda menjadi sangat sulit dihadapan Dewan Keamanan. Hal-hal penting dalam resolusi seperti mengembalikan para pemimpin RI ke Yogyakarta, jelas sama dengan memulihkan pemerintah Republik Indonesia yang berhasil mereka tiadakan lewat agresi militer jelas merugikan kepentingan Belanda. Juga perluasan kewenangan Komisi Jasa-Jasa Baik menjadi UNCI, jelas akan merumitkan sikap politik yang telah diambil oleh Belanda.

28 Januari 1949 adalah tanggal sakral dimana Dewan Keamanan PBB mengadakan pemungutan suara mengenai resolusi itu. Resolusi diterima oleh tujuh suara setuju dan blangko empat suara. Secara resmi Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi atas permasalahan Indonesia-Belanda sesuai dengan usulan tertanggal 21 Januari 1949. Termasuk merubah Komisi Jasa-Jasa Baik/KTN (Komisi Tiga Negara) menjadi *United Nation Commision For Indonesia* (UNCI)/Komisi PBB untuk Indonesia.

Resolusi Dewan Keamanan ini juga tidak dilewatkan dan menjadi perhatian besar bagi para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan di Bangka dan pemimpin lain di daerah federal. Menyadari hal bahwa dunia internasional dan Dewan Keamanan berada di belakang Republik sementara kedudukan Belanda sangat lemah, sikap politik Hatta berada di jalan yang benar dan berpegang secara seksama pada resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 adalah sikap yang terbaik. Hatta dan lainnya berpandangan bahwa pemulihan kekuasaan republik hanya menunggu waktu saja, dan posisi Belanda yang lemah atas tekanan dan desakan internasional dengan terpaksa akan melaksanakan resolusi itu.

Di mata pemimpin daerah federal (BFO), fakta yang berkembang ini menjadi keyakinan politik bahwa walaupun Yogyakarta dapat ditaklukan dan pemimpin republik berhasil ditangkap, Republik Indonesia tidak dapat dimusnahkan. Republik adalah cita-cita paling kongkret atas kemerdekaan Indonesia. Resolusi 28 Januari 1949

telah memperkuat keyakinan daerah federal untuk menolak usaha Belanda membentuk Pemerintah Federal Sementara tanpa melibatkan Republik Indonesia.[20]

Bell sangat kecewa dengan perkembangan yang terjadi dan menganggap sikap Pemerintah Belanda sangat lembek. Beel memahami bahwa rencana Belanda mengenai Indonesia tidak dapat dilaksanakan lagi akibat perubahan situasi politik ini. Harus ada rencana baru. Ia mengusulkan "rencana Beel" yang isinya adalah mempercepat penyerahan kedaulatan. Tanggal 28 Januari 1949, Beel mengirimkan pesan kepada Menteri Wilayah Seberang Lautan terkait usulannya itu. 1 Februari 1949, reaksi atas rencana Beel tersebut mendapat respon negatif. Menteri Sassen membalas pesan kawat Beel dengan memberitahukan bahwa ia baik secara prosedur maupun secara pokok bahasan tidak dapat menyetujui rencana itu.

Akhir bulan Januari 1949, dalam pengasingan di Bangka para pemimpin RI di Menumbing dapat bernafas lega. Babak pertaruhan atas hidup mati republik telah melewati masa kritisnya. Kemenangan diplomasi Republik Indonesia nyata didapat dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 28 Januari 1949 yang isinya sangat membela kepentingan Indonesia.

2. Fakta dalam pengasingan: Dukungan rakyat Bangka & episentrum aktivitas diplomasi

Pembatasan gerak para tokoh RI di Menumbing semakin berkurang setelah mendapat protes dan tekanan internasional. Bung Hatta dan lainnya mulai dapat beraktivitas dan membangun komunikasi. 19 Januari 1949, untuk pertama kali Bung Hatta berinteraksi dengan masyarakat Bangka di pasar Pangkalpinang dan mendengar pekik Merdeka. Kunjungan Hatta dan tokoh lainnya ke beberapa kota di Bangka seperti Belinyu, Sungailiat, Koba, Toboali, di awal bulan Februari 1949 menebarkan antusiasme masyarakat atas perjuangan kemerdekaan. Salam "*Merdeka*!" dan ucapan "*Selamat Berjuang*" memenuhi setiap pertemuan. Dukungan orang Bangka mulai nyata dirasakan oleh para pemimpin RI.

Kehadiran Bung Karno dan H Agus Salim di Bangka semakin memicu antusias orang Bangka tentang perjuangan kemerdekaan republik. Sejak kedatangannya di Pelabuhan Pangkalbalam-Pangkalpinang, ribuan orang menyambutnya dengan teriakan "Merdeka!". Sepanjang perjalanan, keramaian orang berdiri di sisi jalan untuk

[20] Ide Anak Agung Gde Agung, idem, Halaman 245

mengelu-elukan Bung Karno. Dalam bulan-bulan berikutnya, dengan kepiawaian seorang Bung Karno dan pemimpin republik lainnya, Pulau Bangka dianggap Belanda sebagai wilayah yang jauh dari pengaruh kelompok republik dalam waktu singkat terlihat sangat pro republik!

Kesempatan demi kesempatan dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan rakyat Bangka. Di Bangka, kedekatan para pemimpin republik dengan rakyat itu menjadi kisah romantis yang dibanggakan hingga saat ini. Mulai dari piknik bersama, beraktivitas bersama Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) dan Persatuan Wanita Indonesia (Perwani), mengunjungi yayasan Yatim, Sekolah, menghadiri undangan tokoh masyarakat, menikahkan pemuda-pemudi, adalah bagian dari ingatan orang Bangka atas kedekatannya dengan para pemimpin di masa itu. Di setiap kehadiran mereka mengunjungi banyak tempat di Bangka, keramahan bertemu dengan semangat nasionalisme menghasilkan gelora perjuangan. Moh Roem mengungkapkan situasi itu dalam kalimat: *"pengasingan di Bangka seperti berjuang di lingkungan yang mendukung kami. Rakyat Bangka mendukung dan memelihara semangat kami"*[21]

Dukungan rakyat Bangka juga berbentuk sumbangan uang. Dalam buku *Kisah, Kultur, dan Tradisi Tionghoa Bangka* (Rika Theo & Fennie Lie, 2014), menuliskan dukungan tokoh Tionghoa Bangka bernama Tony Wen. Tanggal 7 April 1949, Mr Ali Sastroamidjojo menuliskan surat dan mengucapkan terimakasih atas simpati dan sokongan bagi perjuangan Republik Indonesia. Di surat itu ia menjelaskan bahwa ia telah menerima uang sebesar tiga ribu rupiah yang merupakan pemberian dari Tony Wen kepada pemimpin Republik Indonesia untuk keperluan mereka selama diasingkan di Pulau Bangka. Menjelang berakhirnya masa pengasingan di Bangka, 5 Juli 1949, Rakyat Bangka menyumbang f 90.170,18 kepada Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Presiden Sukarno dihadapan 3.000 peserta perpisahan di Balai Pangkalpinang. Hebatnya itu bukan hasil dari penambangan timah, tetapi hasil banting tulang orang Bangka dari berkebun, nelayan, berdagang dan pekerjaan lainnya. Penggalangan dana se-antero kota (Pangkalpinang, Mentok, Toboali, Koba, Sungaiselan, Petaling, Baturusa, Sungailiat, Belinyu, Jebus) dengan menerima sumbangan dari 225 dermawan, penjualan barang dan bunga, penjualan karcis olahraga

[21] Mohamad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*, Penerbit PT Gramedia, 1989, Halaman 65

dan bioskop, dan ngamen keroncong di pasar-pasar. Setiap sen bukti nasionalisme orang Bangka dan kecintaan terhadap Republik Indonesia.[22]

Sejak bulan Februari 1949, komunikasi baik dengan pihak republik atau dengan pihak lain seperti UNCI dan BFO[23] mulai intens terjadi. Tanggal 3 Februari, Pihak BFO (Sultan Hamid II), mengirimkan telegram kepada Sukarno di Prapat dan Hatta di Bangka. Di hari itu juga, untuk kedua kalinya delegasi RI datang ke Bangka dan membahas perkembangan politik pasca keluarnya Resolusi 67 Dewan Keamanan PBB.

Telegram dari Sultan Hamid II Tanggal 3 Februari 1949 terkait dengan permintaan untuk mengadakan pertemuan antara BFO dengan Pemimpin Republik di Bangka untuk membicarakan penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda dijawab Bung Hatta pada Tanggal 4 Februari 1949 dengan pernyataan tegas bahwa Pemerintah RI tetap berpegang pada resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949. Bung Hatta menolak ajakan BFO untuk mengadakan pertemuan atas dasar pendirian pihak Belanda tersebut meskipun sangat besar keinginannya untuk bertukar pikiran dengan teman-teman sebangsa tentang nasib tanah air kita.[24]

Sementara Bung Karno menanggapi ajuan dari BFO itu dengan mengajukan permintaan kepada Sultan Hamid II untuk mengusahakan agar ia dan H. Agus Salim dapat pergi ke Bangka guna memungkinkan perundingan dengan Bung Hatta.

Balasan dari Bung Karno tersebut memberikan pengharapan bagi BFO bahwa Bung Karno dapat melunakkan pendirian Bung Hatta. Sejalan dengan rencana Beel, BFO ingin sekali mendapat kesamaan pendapat dengan para pemimpin Republik Indonesia (Sukarno-Hatta) tentang pelaksanaan rencana Belanda itu. Maka segeralah disediakan pesawat terbang Catalina untuk membawa Bung Karno dan Agus Salim ke Bangka.

Hari Minggu tanggal 6 Februari 1949, Bung Karno dan H Agus Salim tiba di Bangka, untuk mengadakan pembicaraan dengan Bung Hatta dan lainnya tentang permintaan BFO. Dalam pembicaraan itu tokoh republik memiliki pendapat yang sama tentang

---

[22] https://historia.id/politik/articles/sumbangan-rakyat-bangka-untuk-republik-indonesia-6jk5m/page/1

[23] *Bijeenkomst Federaal Overleg* (BFO) atau Perhimpunan Musyawarah Federal yang terbentuk pada Juli 1948 beranggotakan 15 negara dan daerah otonom bentukan Belanda dan mengusung Federalisme di Indonesia. Karena itu BFO dianggap sebagai kolaborator Belanda oleh Republik Indonesia yang memilih konsep negara kesatuan. Pasca Perundingan Renville, BFO memiliki peranan signifikan dan menjelma menjadi kekuatan ketiga yang berkontribusi dalam penyelesaian konflik RI-Belanda. Lihat RZ Leirissa, Kekuatan Ketiga dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Pustaka Sejarah, Cetakan Pertama, 2006.

[24] Ali Sastroamidjojo, idem, Halaman 258

politik pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Hatta kepada Sultan Hamid II tanggal 4 Februari 1949. Kebulatan sikap itu disampaikan kepada BFO dan UNCI (juga tentu diketahui oleh pihak Belanda).
Penolakan untuk mengupayakan sebuah pembicaraan lebih lanjut tentang penyelesaikan sengketa yang diinginkan oleh BFO jelas mengecewakan BFO yang telah susah payah mengadakan persiapan untuk mempermudah pertemuan itu.

Setelah perundingan di Menumbing, sebetulnya Bung Karno dan Agus Salim boleh kembali ke Prapat lagi. Tetapi atas keputusan rapat Bung Karno dan Agus Salim diminta lebih baik tetap di Bangka untuk lebih mudah bersama-sama menghadapi perkembangan keadaan politik seterusnya.[25]

7 Februari 1949, Pertemuan Musyawarah Federal memutuskan untuk mengadakan hubungan yang pertama dengan para pemimpin republik. Komisi penghubung dipimpin oleh Perdana Menteri Indonesia Timur. Sebelum berangkat ke Bangka, pemimpin komisi penghubung membicarakan hal perkembangan politik terakhir di Belanda dengan Beel. Beel mengarisbawahi rencana mengenai penyerahan kedaulatan yang dipercepat sebagai dasar bagi langkah untuk mewujudkan tertib hukum yang baru. Beel menjadikan BFO sebagai bagian dari rencananya untuk membujuk pemimpin republik.
Komisi penghubung diterima oleh Sukarno, Hatta, Haji Agus salim, dan lainnya pada tanggal 7 Februari untuk bertukar pikiran secara tidak resmi. Secara prinsip, para pemimpin republik hanya ingin melanjutkan perundingan termasuk dengan Pertemuan Musyawarah Federal jika status mereka sebagai pemimpin republik dipulihkan dahulu. Pada akhir pembicaraan telah diputuskan bahwa komisi penghubung Pertemuan Musyawarah federal akan mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan pemimpin republik di Bangka mengenai pembentukan pemerintah federal sementara.

23 Februari 1949 Pemerintah Belanda mengeluarkan pengumuman pemerintah di Jakata mengenai rencana penyerahan kedaulatan yang dipercepat, memutuskan penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 12 Maret 1949 dimana utusan republik dan BFO akan diundang. UNCI juga diundang dan di dalam undangannya Beel menguraikan tujuan konperensi yang ingin mempercepat penyerahan kedaulatan dengan mempersingkat masa peralihan agar terhindar dari gesekan-gesekan yang menyulitkan

[25] Ali Sastroamidjojo, idem, Halaman 265

tujuan. Rencana Beel ini merupakan jalan terakhir Belanda. Secara intens, Belanda mengirimkan wakilnya ke Bangka untuk menggiring kebijakan itu.

Setelah 70 hari berada di pulau Bangka, para pemimpin Republik Indonesia dikejutkan kabar dari Jogja bahwa pada 1 Maret 1949 Tentara Republik Indonesia melakukan Serangan Umum selama 6 jam. Kabar ini mematahkan anggapan pemerintah RI sudah tiada, mengabarkan kepada dunia bahwa tentara Republik masih ada, dan menimbulkan ketakutan yang luar biasa di kalangan militer Belanda. Pemerintah Belanda meminta para pemimpin di Bangka untuk mengeluarkan perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya di Jogjakarta dan tentunya ditolak mentah-mentah.

Dalam suasana itu, pada 2 Maret 1949, Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung datang ke Bangka. Sultan Hamid II, Ide Anak Agung Gde Agung dan beberapa tokoh BFO yang datang untuk kedua kalinya ke Bangka begitu terkesan melihat dukungan rakyat Bangka terhadap pemimpin Republik Indonesia. Pekik Merdeka di mana-mana, keteguhan hati para pemimpin RI dan keramahan masyarakat Bangka. Para pemimpin BFO pulang ke Jakarta dengan keyakinan baru; siapa yang lebih pantas dibela! Peran BFO yang diawal menjadi bagian dari rencana Beel perlahan bergeser memihak kepentingan republik. Walau pertentangan antara pro Belanda dan pro Indonesia terus terjadi di dalam tubuh BFO, tetapi perubahan sikap dari awalnya membujuk pihak RI malah terbujuk oleh sikap RI selama pembicaraan dari hati ke hati di Bangka. Lalu keluarlah Resolusi BFO tanggal 4 Maret 1949 yang mendesak untuk membebaskan pemimpin RI, mengembalikan kekuasaan RI di Yogyakarta sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan, dan menghadirkan UNCI dalam konferensi.

Resolusi itu menimbulkan kemarahan Beel yang merasa dikhianati BFO yang selama ini dianggap mendukung kebijakan pemerintah Belanda. Akhirnya Belanda harus menyadari rencana untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dengan mengadakan konferensi tanpa melibatkan RI gagal total. Kini justru Belanda harus menghadapi RI yang didukung oleh negara-negara penggagas Resolusi New Delhi, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan ditambah BFO.

4 Maret 1949, Sukarno mengirimkan jawaban resmi kepada dr. L.J.M. Beel atas undangan konferensi. Senada dengan desakan Resolusi BFO, Republik Indonesia tidak akan hadir dalam Konferensi Meja Bundar jika pemerintahan RI di Yogyakarta belum

dipulihkan. Lagi-lagi sikap politik pemimpin RI ini berada di momentum yang tepat. Tanggal 10 Maret 1949, Sidang Dewan Keamanan membahas penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda kembali digelar. Laporan UNCI yang dengan lengkap memaparkan rencana Beel, siasat Pemerintah Belanda dan pendirian pemerintah RI atas jawaban siasat Belanda itu menimbulkan amarah diantara anggota Dewan Keamanan sehingga menjadi perdebatan sengit. Akhirnya tanggal 23 Maret Ruling Dewan Keamanan PBB yang menekankan kembali kepada pihak yang berselisih untuk taat pada pelaksanaan Resolusi Nomor 67 tanggal 28 Januari 1949 dengan UNCI sebagai fasilisatornya. Maka berakhirlah rencana Beel. Ruling dewan keamanan sangat bertentangan dengan pandangan Belanda, tak ada jalan selain duduk berunding dengan pihak RI.

Peran UNCI sebagai fasilitator semakin kuat di kalangan Republik Indonesia dan Belanda, terutama setelah keluar Ruling/petunjuk teknis Dewan Keamanan PBB tanggal 23 Maret 1949. Mereka melakukan pendekatan kedua belah pihak seperti melakukan kunjungan ke Bangka pada tanggal 24 Maret dan 28 Maret 1949. Pihak Belanda menjawab bersedia mengikuti Ruling dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda pada tanggal 29 Maret 1949. Sementara Republik Indonesia menjawab bersedia mengikuti Ruling pada tanggal 2 April 1949.

Tahapan perundingan Indonesia – Belanda dibawah pengawasan UNCI efektif dimulai sejak bulan April 1949. Tanggal 2 April 1949, Mr Roem Mengirimkan surat kepada KTN dan menyatakan bersedia untuk melangsungkan perundingan di Jakarta. 11 April 1949, UNCI menginisiasi pertemuan awal antara pemerintah RI dan Belanda di Jakarta mulai tanggal 14 April 1949. Delegasi-delegasi peserta perundingan mulai berdatangan pada tanggal 11-12 April 1949. Dimulai delegasi RI yang berangkat dari Yogyakarta. Mereka akan bergabung dengan delegasi Republik Indonesia yang diketuai Mohamad Roem. Tanggal 12 April 1949, Moh Natsir dan Dr Leimena datang ke Bangka dengan pesawat UNCI untuk menjemput M Roem. delegasi Republik Indonesia dan Belanda tiba di Lapangan Udara Kemayoran Jakarta. 14 April 1949, perundingan Indonesia-Belanda mulai dilaksanakan di Hotel Des Indies, Batavia (Roem-Royen). Perundingan Rum-Royen dimulai pada hari Kamis, berlangsung selama 24 hari dan menghasilkan kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Republik Indonesia bolak balik Jakarta-Bangka untuk melaporkan progres perundingan ke Sukarno-Hatta.

3. Titik balik perjuangan diplomasi menuju pengakuan kedaulatan Indonesia: Sebuah refleksi bagi arah diplomasi kedaulatan di sepanjang nafas Republik Indonesia.

Perjuangan kemerdekaan dan diplomasi kedaulatan Indonesia merupakan klimaks dari proses panjang Bangsa Indonesia menentukan sendiri nasibnya. 17 Agustus 1945, negara yang baru diproklamasikan ini berbentuk republik dan berdasarkan konstitusi merupakan negara kesatuan dengan pertimbangan bahwa Indonesia masih harus mengalami suatu proses penyatuan dan dalam tahap itu bahaya perpecahan sangat besar sehingga akan mudah bagi negara kesatuan meminimalisir resiko itu serta lebih efisien dari sisi aparat pemerintahan ketimbang sebuah negara federal.[26]

Sementara Belanda, sebagai anggota Sekutu yang menang Perang Dunia II, menganggap kedudukan Indonesia harus dikembalikan seperti sebelum perang. Sikap Belanda untuk tidak mau berunding dengan Republik Indonesia didasari oleh hakikat itu. Walaupun atas desakan Inggris, Belanda tak dapat menolak untuk berunding dengan Indonesia.[27]

Selain itu, Van Mook memiliki pandangan yang berbeda atas ketatanegaraan Indonesia. Ia mengusulkan agar Pemerintah Belanda beralih pada susunan negara federal di Indonesia dan federalisme harus menjadi dasar bagi kesatuan tata negara yang meliputi seluruh Indonesia sehingga terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS). Pertentangan mengenai konsep susunan negara ini menjadi permasalahan utama pada awal perundingan Belanda – Indonesia.

Perundingan pertama terjadi pada Maret 1946 di Hooge Veluwe, Belanda. Kabinet Sjahrir yang mulai berkuasa sejak November 1945 mengirim Delegasi Indonesia untuk berunding dengan delegasi Belanda. Pembicaraan dalam perundingan ini diakhiri dengan kegagalan menyeluruh.

Perundingan Linggarjati menjadi perundingan kedua yang dilaksanakan pada November 1946. Persetujuan itu diparaf pada 15 November 1946, ditandatangani pada 25 Maret 1947. Perundingan Linggarjati menjadi tahapan kemenangan awal dimana pengakuan atas Republik Indonesia diakui oleh negara lain. Walau pada akhirnya kesepakatan

[26] Ide Anak Agung Gde Agung, idem, Halaman 18

[27] Mohamad Roem, Diplomasi: *Ujung Tombak Perjuangan RI*, Penerbit PT Gramedia, 1989. Halaman 6. Inggris adalah negara Sekutu yang menjalankan tugas ke Indonesia setelah Jepang menyerah. Sebelum perang dunia berakhir, Inggris sudah mengambil keputusan untuk melepaskan negara jajahannya. Berbeda sikap dengan Belanda. Oleh karena itu Inggris mendesak perselisihan Belanda-Indonesia diselesaikan dengan cara damai.

Linggarjati terciderai oleh Agresi Militer yang mereka sebut sebagai *plotionele actie* pada Juli-Agustus 1947.

Perundingan Renville pada 1948 muncul dengan campur tangan Dewan Keamanan PBB yang melahirkan Panitia Jasa-Jasa Baik yang populer dengan Komisi Tiga Negara (KTN) yang bertugas memantau dan memberikan bantuan-bantuan dalam upaya penyelesaian perselisihan Belanda – Indonesia secara damai. Campur tangan Dewan Keamanan PBB dalam dalam penyelesaian konflik Belanda – Indonesia dicatat memakan waktu sekitar 3,5 tahun dan telah mengadakan sidang sekitar 90 kali.

Perundingan Renville kembali bernasib sama dengan perjalanan Perundingan Linggarjati, sebuah agresi militer pada 19 Desember 1948 mengakhiri kesepakatan itu. Dalam uraian panjang diatas, sampai pada awal Tahun 1949, posisi Indonesia selalu "kalah" dalam meja perundingan. Pilihan untuk berharap kepada perjuangan diplomasi untuk merdeka dan berdaulat menjadi tidak dipercaya.

Namun sejarah berjalan linier. Perubahan terjadi atas kontribusi positif yang dialektik. Pasca perundingan Renville, Kabinet dipimpin oleh Drs Mohammad Hatta. Wakil Presiden RI sekaligus menteri pertahanan. Hatta yang dikenal dengan kehati-hatian serta sikapnya yang kukuh ikut mempengaruhi perjalanan berikutnya. Kepemimpinan Hatta ini yang kemudian berakumulasi dengan tindakan penting lainnya berujung kepada posisi tawar Indonesia yang menarik dukungan internasional dan membalik arah.
H Agus Salim berhasil menarik simpati dan keberpihakan negara-negara Arab dalam misi diplomasi di Tahun 1947. Inilah yang kemudian berbuah dukungan negara Asia dengan Konferensi New Delhi. Keberhasilan Hatta menumpas pemberontakan PKI di Madiun di Tahun 1948 juga sedikit banyak menjawab sikap politik RI yang sebelumnya dikhawatirkan Amerika Serikat.

Kepiawaian para pemimpin di masa krisis adalah kata kunci keberhasilan perjuangan diplomasi Indonesia. Pada masa pengasingan di Bangka berkembang tiga kelompok yang mewakili Indonesia; PDRI, Bangka Trace, dan TNI. Ini tidak mudah untuk diabaikan. Perbedaan pandangan antara para pemimpin Republik Indonesia yang berada di Bangka dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra dalam menyikapi Resolusi Dewan Keamanan no 67 tanggal 28 Januari 1949 dan pertemuan dengan UNCI, Pejabat Belanda dan BFO pun terjadi. Terkesan dua pemerintah Republik

Indonesia mengeluarkan penyataan yang berlawanan. Untuk itu, Mohammad Hatta menjelaskan hubungan Bangka dan Sumatra kepada UNCI saat berkunjung ke Bangka dan ditulis oleh Surat Kabar untuk meredakan perbedaan pemahaman.
Hal ini didasarkan pada sikap Belanda dan BFO yang tidak pernah mengakui keberadaan PDRI, hal itu juga yang menjadi sikap KTN maupun UNCI yang hanya mengakui pemerintah RI dibawah kepemimpinan Sukarno – Hatta walaupun notabene berada dalam pengasingan di Bangka.

Bung Hatta berpendapat bahwa Kabinet Hatta masih merupakan pemerintah resmi, sedangkan PDRI adalah pemerintahan yang menjalankan pekerjaan sehari-hari. Pertimbangan itu diambil atas kekhawatiran jika kekuasaan sepenuhnya berada ditangan PDRI akan diartikan oleh dunia internasional bahwa kekuasaan republik telah berpindah ke pemerintah yang belum diakui oleh Dewan Keamanan PBB dan memberikan kesempatan bagi pihak yang ingin menyingkirkan republik dalam perundingan internasional. Seperti sikap Belanda yang tidak mengakui TNI dengan menyebutnya sebagai “pengikut republik yang bersenjata”. Belum lagi pertimbangan pemerintahan PDRI yang berpindah-pindah selama di Sumatera bukanlah hal yang mudah untuk ditemui apalagi berunding.

Roem Roijen Statement, adalah keterangan dua pihak; Indonesia dan Belanda terkait dengan upaya penyelesaian perselisihan Indonesia dengan Belanda atas dasar pengakuan Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949. Titik tekan atas pengembalian para pemimpin yang diasingkan di Bangka untuk kembali ke Yogyakarta dan memulihkan pemerintahan RI serta ikut serta dalam konferensi Meja Bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat menjadi titik balik kemenangan diplomasi RI.
Namun kekhawatiran berbagai pihak atas Roem Roijen Statement tetap ada. Walaupun Roem Roijen Statement menjadi kuat secara politik karena berada dalam pengawasan UNCI dan menjadi perhatian dunia tetap apakah kesepakatan ini benar-benar akan dilaksanakan ataukah sama nasibnya dengan Perundingan Linggarjati dan Renville?

Keteguhan para Pemimpin Republik Indonesia teruji dalam godaan dan tekanan. Dalam pengasingan di Bangka, upaya sadar untuk merawat kesatuan diupayakan secara serius. Pasca kesepakatan Roem- Roijen tanggal 7 Mei 1949, terjadi penolakan dari berbagai kalangan RI, seperti PDRI, TNI dan partai oposisi. Untuk meredakan suhu perpolitikan

nasional, berbagai pendekatan dilakukan demi kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia. Tanggal 23 Mei 1949, Surat Sukarno-Hatta kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Menjelaskan situasi dan meminta dukungan untuk mempersiapkan langkah penting setelah kembali ke Yogyakarta.

Mohammad Hatta mencoba membangun komunikasi dengan PDRI untuk menjelaskan Roem-Roijen Statement dengan mengunjungi pimpinan PDRI ke Sumatera (Kotaraja Aceh) pada tanggal 5-11 Juni 1949 namun Sjafrudin Prawiranegara tidak muncul setelah ditunggu 6 hari dan akhirnya rombongan Moh Hatta kembali ke Bangka.

Pasca kesepakatan Rum-Royen 7 Mei 1949, kondisi kota Jogja mengkhawatirkan. Belanda berusaha mengulur-ulur penarikan pasukannya dari Jogja, TNI masih berada di luar Jogja dan berusaha mematuhi genjatan senjata. Sementara antek-antek PKI menebar teror dan pamflet menjelekkan para pemimpin RI. Untuk itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berinisiatif berangkat ke Jakarta dan Bangka untuk mendorong percepatan pemulihan pemerintahan Republik Indonesia di Jogjakarta.
18 Juni 1949, Sultan Hamengkubuwono IX atas nama pemerintah mengeluarkan perintah untuk penghentian tembak-menembak kepada TNI. Perintah itu langsung ditaati, sehingga segera pula penarikan pasukan-pasukan Belanda dapat dimulai pada 24 Juni 1949. Tanggal 27 Juni 1949, Berita Radio mengatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 30 Juni akan mengambil alih kekuasaan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Dan 29 Juni 1949, TNI masuk kota Yogya.

Kegetiran semakin hilang. Roem Roijen Statement yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 terbukti nyata dapat dilaksanakan dengan merealisasikan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Langkah berikutnya semakin terang. Konferensi Meja Bundar di Den Haag dimulai sejak 23 Agustus dan selesai pada 2 November 1949, dilanjutkan dengan penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Mengakhiri kisah panjang penjajahan kolonial Belanda di Indonesia.

Titik balik kemenangan diplomasi Indonesia ini sekali lagi merupakan kerja kolektif para pemimpin yang tidak saja piawai membangun kerjasama, berani, memiliki kepandaian yang setara dengan pemimpin dari negara lain, tetapi yang tak kalah penting adalah kekuatan semangat dan kebesaran jiwa untuk berkorban demi cita-cita bangsa. Djoeir Moehammad, dalam bukunya “Memoar Seorang Sosialis” menuliskan peran

seorang Sultan Hamengkubowono IX dari Yogyakarta yang sangat menggugah. Setelah penandatanganan Roem Roijen Statement, Sultan mengunjungi Bangka untuk menemui Sukarno-Hatta dan tokoh lainnya terkait dengan langkah-langkah pemulihan Yogyakarta sebagai ibukota RI sebagai salah satu pelaksanaan Roem Roijen Statement. Ditengah optimisme atas posisi RI, Sukarno dan Hatta mengutarakan keprihatinan tentang situasi pemerintah yang tidak memiliki dana untuk kembali ke Yogyakarta, membiayai pegawai pemerintah, dan melanjutkan perjuangan yang belum selesai. Beberapa saran dikemukan, namun akhirnya Sultan Hamengkubuwono bebicara. Dengan tenang beliau menyatakan bahwa ia akan menyerahkan 6 juta Gulden dari kekayaan keraton Yogyakarta untuk membantu hal itu.[28]

Kita disuguhkan atas kebesaran jiwa pemimpin di era kronik revolusi Indonesia yang mengharukan dan tak tertandingi. Kisah para pemimpin di masa pengasingan pun tak kalah menginspirasi. Kisah tentang karakter Bung Hatta misalnya. Sehari setelah kedatangan Mr Ali Sastroamidjojo dan Mr Mohammad Roem di Menumbing, Bung Hatta mengadakan "*Briefing*" bagi penghuni Menumbing agar tetap bersikap sebagai Pemimpin RI. Meskipun berada dalam pengasingan, Bung Hatta menekankan mereka tetap sebagai petugas resmi dari Republik Indonesia.

Bung Hatta yang terkenal disiplin mengingatkan untuk tetap berpakaian dengan rapi kalau keluar kamar tidur, tidak mengenakan piyama dan sarung. Azas-azas Demokrasi tetap dipegang teguh. Misalnya, kata Hatta; "*kalau mandi janganlah memakai air sesukanya sendiri saja. Saya sudah mengukur isi tempat air mandi dan ternyata airnya cukup kalau saudara-saudara masing-masing hanya memakai 10 gayung tiap-tiap kali mandi*"

Peraturan air Bung Hatta sempat membuat mereka tertawa tetapi tetap mereka taati. Itulah watak Bung Hatta. Cara hidupnya selalu serba teratur dan disiplin. Padahal mereka berada di puncak bukit Menumbing yang terpencil! Dalam pengasingan, jauh dari masyarakat ramai. Hanya bertemu dengan para penjaga saja.

C. Kesimpulan

Perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dikenang sebagai upaya perjuangan bersama dengan pengerahan sumberdaya yang sangat besar. Darah, air mata, tenaga, harta benda,

[28] Djoeir Mohammad, *Memoar Seorang Sosialis*, Yayasan Obor Indonesia, 1997. Halaman 307-308.

bahkan nyawa manusia Indonesia yang tidak sedikit. Dan karenanya, pengorbanan besar itu menjadi bekal sekaligus semangat mengelorakan kesadaran kebangsaan untuk terus memelihara nasionalisme Indonesia. Namun selain perjuangan fisik, perjuangan diplomasi jarang diketengahkan dan menjadi perhatian untuk ditelisik. Beberapa peristiwa seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Roem-Royen Statement tidak begitu memperoleh perhatian besar untuk dikemas sebagai bagian dari penguatan nilai kebangsaan. Roem Royen Statement adalah karya kolektif yang menjadi pijakan kuat bagi langkah menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Roem Royen Statement yang justru digagas dalam situasi pengasingan di Bangka, tampil gemilang menepis kekhawatiran beberapa pihak atas kerugian pihak republik seperti Perundingan Linggarjati dan Renville yang ternyata dilanggar sendiri oleh Belanda dengan agresi militer. Roem Royen Statement mengantarkan para pemimpin kembali ke Yogyakarta dan memulihkan hak republik, menghentikan kontak senjata dan mempercepat tahapan perundingan Belanda – Indonesia. Roem Royen Statement adalah titik balik kemenangan perjuangan diplomasi Indonesia dan periode pengasingan tokoh RI di Bangka adalah penyambung nyawa republik.

Babak pengasingan para tokoh RI di Pulau Bangka memperlihatkan bagian menarik tentang kepiawaian tokoh RI memainkan peran bagi kepentingan bangsa. Merubah tekanan Belanda (Agresi militer II) menjadi simpati bagi dunia internasional dan menjadi titik balik upaya diplomasi atas kemerdekaan republik.

Peran Bangka menjadi penting pada fase perjuangan ini. Penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda secara jalur diplomasi menempatkan posisi Bangka pada posisi yang krusial. Dalam Memoir Mohammad Hatta dituliskan, pada suatu waktu Mr Abdul Gafar Pringgodigdo berkata "*aku merasa ada dua sumber percaturan international di dunia ini, yaitu (di) United Nations dan Bangka*". Mr Mohamad Roem juga menganggap peran Bangka memiliki kesan yang tak terlupakan dan menyebut arti penting itu sebagai "*Van Bangka Begint Victorie*"[29]

Keberhasilan misi diplomasi Republik Indonesia ini dipengaruhi beberapa hal. Pertama keberhasilan pemerintah Republik Indonesia menempatkan para diplomatnya di beberapa negara sahabat dan PBB. Para diplomat berhasil mempengaruhi komunitas dunia menggalang dukungan negara sahabat dan Dewan Keamanan PBB. Kedua, kepandaian bertindak atas pemetaan situasi. Di saat kredibilitas Belanda diragukan disebabkan

[29] Mohamad Roem, idem, Halaman 63

pelanggaran perjanjian Linggarjati dan Renville, melakukan Agresi Militer I-II, dan kebohongan para pemimpin Republik Indonesia telah dibebaskan, hal ini kemudian digunakan sebagai tekanan dalam diplomasi.

Kita harus melihat perjalanan perjuangan diplomasi ini sebagai refleksi atas perjuangan diplomasi RI yang terus berlangsung hingga hari ini. Permasalahan tentang perbatasan wilayah RI, permasalahan tentang tenaga kerja di luar negeri, masalah pengelolaan sumber daya dan permasalahan diplomasi lain yang kita hadapi hari ini sebagai negara merdeka sedang terus berjuang untuk seutuhnya berdaulat. Dari pengasingan di Bangka, kita bisa memetik pembelajaran tentang semangat berjuang. Pelajaran tentang keteguhan, kepiawaian, keberanian, kemampuan berkorban, dan kesejatian pemimpin dalam alam demokrasi.

Gagasan merawat demokrasi dengan pendidikan politik yang inklusif kita temukan surat Bung Hatta yang ditulisnya di Bangka. Bung Hatta menulis "Kesan dan Pendapat" di Menumbing tertanggal 2 Juli 1949. Sebuah pesan bagi rakyat Bangka atas kebersamaannya bersama orang Bangka selama hampir 7 bulan yang ditutup dengan sebuah motto diakhir tulisannya: "*Jauh daripada mencari kedudukan untuk selama-lamanya, kewajiban seorang pemimpin dalam Demokrasi ialah mendidik dan mencarikan penggantinya sendiri. Hanya dengan begitu terjamin kelanjutan organisasi!*"

Daftar Pustaka

Buku Cetak

- Adityawarman Suryadarma; *Bapak Angkatan Udara Suryadi Suryadarma*, Kompas Media Nusantara, 2017
- Akhmad Elvian & Ali Usman, *Kenang Mengenang Meraih Kemenangan*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi, 2022
- Ali Sastroamidjojo; *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Penerbit PT Kinta, cetakan pertama, 1972.
- Djoeir Moehamad, *Memoar Seorang Sosialis*, Yayasan Obor Indonesia, 1997
- Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, edisi kedua, Pustaka Sinar Harapan, 1991
- Mohammad Hatta; U*ntuk Negeriku - buku III: Menuju Gerbang Kemerdekaan, sebuah Otobiografi*, Penerbit Buku Kompas, cetakan keenam, 2015
- Mohamad Roem; *Bunga Rampai dari Sejarah*, buku I, Penerbit Bulan Bintang Jakarta, cetakan pertama, 1972

- Mohamad Roem; *Bunga Rampai dari Sejarah*, buku III, Penerbit Bulan Bintang Jakarta, cetakan pertama, 1983
- Mohamad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*, Penerbit PT Gramedia, 1989
- Rika Theo & Fennie Lie, *Kisah, Kulutr, dan Tradisi Tionghoa Bangka*, Kompas Media Nusantara, 2014
- RZ Leirissa, *Kekuatan Ketiga dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia*, Pustaka Sejarah, Cetakan Pertama, 2006
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid I, cetakan ketiga 1980
- TB Simatupang, *Laporan dari banaran kisah pengalaman seorang prajurit selama perang kemerdekaan*, Penerbit Sinar Harapan, terbitan ulang 1980.

Arsip/dokumen:

- National Archief Nederland (www.nationaalarchief.nl), kode No_2.10.14, Inventarisasi arsip Sekjen Pemerintah Hindia Belanda dan arsip yang disimpan di dalamnya periode Tahun 1944-1950., Nomor 3159, perihal catatan dan laporan periode Januari 1948 - Oktober 1949 dan Nomor inventaris: 3162, tentang Dokumen Sukarno dkk di Bangka.
- Arsip PBB (*United of Nation*) https://search.archives.un.org/
- https://historia.id/politik/articles/sumbangan-rakyat-bangka-untuk-republik-indonesia-6jk5m/page/1

Biografi Penulis

Bambang Haryo Suseno Lahir di Mentok-Bangka pada 6 Mei 1981. Lulusan *Magister Economic Development* (M.Ec.Dev) FEB UGM pada Tahun 2011, aktif melakukan kegiatan pemajuan kebudayaan di Pulau Bangka berupa penelitian, menulis, mengadakan diskusi, seminar, sarasehan, pameran, dan pertunjukan bersama dengan komunitas lokal. Berkeluarga dan menetap di Mentok, bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Kontak. Tlp: 0811717649. Ig: senomerah.
Email: seno_merah@yahoo.com/ senomerah@gmail.com

PARADOKS GLOKALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DELIBERATIF

Baskoro Wicaksono[1], Muhammad Ihsan[2]
[1] Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
[2] Sosiologi, Universitas Riau

Email: baskoro.wicaksono@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Paradoks glokalisasi dalam demokrasi deliberatif mencerminkan ketegangan antara dinamika globalisasi dan kebutuhan lokal dalam praktik deliberasi demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai demokrasi deliberatif seperti inklusivitas, kesetaraan, dan partisipasi warga berinteraksi dalam konteks glokalisasi, di mana ide dan praktik global diadaptasi ke dalam kondisi lokal. Dalam konteks globalisasi, nilai-nilai demokrasi deliberatif sering dipromosikan sebagai standar universal yang dapat diterapkan di berbagai negara. Namun, proses glokalisasi menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ini tidak sepenuhnya homogen, melainkan dipengaruhi oleh budaya, norma, dan kebutuhan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan wawancara mendalam kepada informan dengan teknik purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses glokalisasi, adaptasi lokal seringkali menghasilkan praktik yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip universal demokrasi deliberatif. Sisi positif glokalisasi membuka peluang bagi integrasi norma-norma lokal ke dalam kerangka demokrasi deliberatif global, namun pada sisi lain juga menciptakan tantangan besar. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai global seperti keterbukaan dan kesetaraan ditafsirkan ulang untuk disesuaikan dengan tradisi dan hierarki lokal, yang dapat mengarah pada distorsi prinsip dasar deliberasi. Mekanisme deliberasi berbasis konsensus yang didasarkan pada nilai tradisional sering kali menggantikan proses debat terbuka yang dianjurkan oleh paradigma global, Hal ini menciptakan paradoks, di mana keberhasilan penerapan nilai demokrasi deliberatif justru tergantung pada sejauh mana praktek tersebut dapat diintegrasikan dengan norma-norma lokal, meskipun hal ini dapat menyandingkan aspek-aspek tertentu dari standar global. Selain itu, glokalisasi juga menghadirkan tantangan baru, seperti risiko kooptasi nilai demokrasi oleh elit lokal untuk melegitimasi kekuasaan, yang bertentangan dengan tujuan utama demokrasi deliberatif untuk memberdayakan masyarakat. Paradoks lainnya terletak pada peran elite lokal yang sering menggunakan demokrasi deliberatif sebagai alat legitimasi politik, yang justru bertentangan dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, glokalisasi juga memungkinkan munculnya praktik-praktik inovatif yang memperkaya demokrasi deliberatif dengan menambahkan dimensi keadilan sosial berbasis komunitas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberhasilan demokrasi deliberatif di era glokalisasi memerlukan strategi yang mengakui pluralitas budaya tanpa mengorbankan nilai-nilai inti seperti inklusivitas dan keadilan. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual untuk memahami dinamika lokal sekaligus mempertahankan relevansi nilai-nilai demokrasi deliberatif dalam arus globalisasi.

Kata kunci: demokrasi deliberatif, glokalisasi, globalisasi, nilai demokrasi, adaptasi lokal

Pendahuluan

Gagasan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi paradoks yang muncul akibat glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat adat Batak Tapanuli Selatan dan Melayu Riau. Glokalisasi yang merupakan perpaduan antara globalisasi dan lokalitas, menciptakan dinamika baru dalam penerapan nilai-

nilai demokrasi yang seharusnya bersifat universal namun seringkali dihadapkan pada realitas sosial dan budaya lokal yang beragam. Menurut Held (2006) demokrasi deliberatif adalah proses di mana warga negara terlibat dalam diskusi yang terbuka dan rasional untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, dalam konteks glokalisasi, nilai-nilai ini sering kali mengalami distorsi yang mengarah pada konflik antara norma global dan praktik lokal (Suartina & Lan, 2023).

Budaya masyarakat pada setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang kemudian berkontribusi terhadap praktik demokrasi di wilayahnya masing-masing. Kegiatan kemasyarakatan dilakukan mengacu pada kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan terus dilestarikan sampai sekarang ini pada setiap aspek kehidupan masyarakat termasuk sistem demokrasi. Kemajemukan masyarakat Indonesia berperan penting dalam membentuk sistem demokrasi di tingkat lokal. Demokrasi yang diterapkan di daerah tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Terdapat sekitar 300 etnis yang hidup di Indonesia, keberagaman ini membentuk fondasi demokrasi nasional yang berakar dari berbagai tradisi dan nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat (Asrinaldi & Azwar, 2018).

Sistem sosial budaya yang dipraktikkan oleh suatu etnis tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga melahirkan peradaban yang memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri. Peradaban ini dapat dipelajari untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal berkontribusi terhadap sistem pemerintahan yang ada. Misalnya, etnis Melayu Riau yang pada abad pertengahan dikenal sebagai pusat kerajaan Melayu di Nusantara. Sistem pemerintahan yang diterapkan saat itu mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang hingga kini masih dapat ditemukan dalam kebudayaan masyarakat Melayu di Riau (Ishak, 2015). Pengaruh budaya Melayu tetap terlihat dalam simbol-simbol adat dan tata pemerintahan di Provinsi Riau. Kejayaan etnis Melayu dapat ditelusuri dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, mulai dari sistem adat, bahasa, hingga tradisi politik yang masih mempertahankan unsur-unsur budaya Melayu.

Kondisi budaya Melayu ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang melalui integrasi antara sistem politik modern dengan nilai-nilai sosial budaya yang diwarisi dari generasi ke generasi. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh keberagaman etnis dan budaya yang ada (Asrinaldi, 2017). Selain pada masyarakat adat Melayu Riau kondisi yang sama pada masyarakat Batak di Tapanuli Selatan dengan sistem *Dalihan Natolu* merupakan sistem sosial budaya tradisional masyarakatnya. Sistem menekankan prinsip kesetaraan serta demokrasi yang kuat (Nababan, 2023). Sistem ini memuat nilai-nilai saling menghargai dan peduli

terhadap sesama diajarkan kepada anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau marga. Hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan diberikan kepada setiap individu di dalam kelompok tersebut.

Kesetaraan yang terkandung dalam *Dalihan Natolu* memungkinkan setiap anggota marga untuk mengekspresikan gagasan dan pandangan mereka tanpa khawatir akan diremehkan atau diabaikan oleh anggota lainnya. Selain itu, sistem ini juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu diharapkan untuk memberikan bantuan dan perhatian kepada sesama anggota marga. Melalui konsep solidaritas yang diterapkan dalam dalihan natolu, keterikatan antaranggota marga dapat terjalin secara kuat (Siregar, 2018). Dengan adanya sistem ini, individu dalam kelompok merasa memiliki hubungan erat satu sama lain, sehingga kehidupan sosial dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai demokrasi deliberatif diadaptasi dan diterapkan dalam konteks lokal, serta dampak yang ditimbulkan dari proses glokalisasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi glokalisasi nilai-nilai demokrasi di masyarakat adat, serta untuk mendokumentasikan pengalaman dan pandangan masyarakat terkait hal ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang interaksi antara nilai-nilai demokrasi dan budaya lokal, serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan praktik demokrasi yang lebih inklusif.

Tinjauan Pustaka

Studi terdahulu menunjukkan bahwa glokalisasi memiliki dampak yang kompleks terhadap nilai-nilai demokrasi . Ritzer (2011) menyebutkan bahwa globalisasi tidak hanya membawa nilai-nilai baru, tetapi juga memicu reaksi lokal yang berupaya mempertahankan identitas budaya. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Hisyam & Pamungkas (2016) yang menyatakan bahwa globalisasi menciptakan "keterhubungan yang tidak merata", di mana beberapa komunitas dapat mengambil manfaat dari nilai-nilai demokrasi, sementara yang lain terpinggirkan. Dinamika ini menunjukkan bahwa proses glokalisasi tidak selalu memperkuat demokrasi secara universal, tetapi dapat menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap nilai-nilai demokratis.

Beberapa kelompok mampu mengadaptasi nilai-nilai global dengan tetap mempertahankan tradisi lokal sementara yang lain mengalami tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Peran kebijakan pemerintah dan lembaga sosial menjadi krusial untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berkembang dalam kelompok tertentu,

tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian oleh Nababan (2023) menekankan pentingnya komunitas lokal dalam membentuk identitas dan praktik demokrasi, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak dapat dipaksakan dari luar tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Penelitian oleh Nainggolan (2016) juga menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, praktik lokal sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori glokalisasi yang dikembangkan oleh Robertson (2018). Menurut Robertson, glokalisasi adalah proses di mana praktik global diadaptasi dan ditransformasikan oleh konteks lokal. Demokrasi deliberatif berarti bahwa nilai-nilai demokrasi yang berasal dari sumber global harus disesuaikan dengan norma dan praktik lokal agar dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif (Jovanoski & Sharlamanov, 2021). Interaksi antara nilai-nilai global dan lokal sering kali menghasilkan bentuk demokrasi hibrida yang unik di setiap komunitas. Adaptasi terhadap nilai-nilai global dapat memperkaya praktik demokrasi lokal akan tetapi juga dapat menimbulkan konflik antara modernitas dan tradisi. Pemahaman terhadap cara masyarakat merespons globalisasi menjadi penting dalam menganalisis perkembangan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi menggunakan analisis literatur (Neuman, 2003). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan masyarakat terkait glokalisasi nilai-nilai demokrasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang dipilih melalui teknik purposive (Moleong, 2017). Teknik ini memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan praktek glokalisasi demokrasi deliberatif. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang lebih luas dan mendalam dari berbagai perspektif.

Unit analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Batak Tapanuli Selatan dan Melayu Riau. Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada kekayaan budaya dan tradisi yang ada di kedua masyarakat tersebut, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman Metode yang dilakukan dalam tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Verifikasi data menggunakan triangulasi yaitu validasi data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk menguji keabsahan informasi.

Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu metode tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel dan objektif (Marvasti, 2004).

Hasil Penelitian Pembahasan

Proses glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif di masyarakat Batak Tapanuli Selatan dan Melayu Riau menunjukkan dinamika yang kompleks. Terdapat upaya untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi yang lebih luas, seperti partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Praktik lokal yang kuat sering kali mendominasi proses ini, menciptakan ketegangan antara nilai-nilai global dan lokal. musyawarah adat sering kali menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan di Masyarakat Batak yang tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang lebih inklusif (Neva et al., 2021). Tokoh adat Batak Tapanuli Selatan Muhammad Nasir menyatakan bahwa sistem demokrasi di dalam budaya Batak Tapanuli Selatan adalah merujuk pada konsep *Dalihan Na Tolu* yang pada intinya musyawarah antara tiga pihak dalam menentukan suatu keputusan.

Keputusan tersebut adalah untuk hal yang suka cita dan duka cita, tapi pada saat ini terjadi pergeseran kecenderungan melihat status sosial masyarakat. Ketika kelas menengah dan atas yang dimusyawarahkan maka akan mengikuti pendapat dari mereka tapi ketika dari kelas menengah ke bawah akan menyesuaikan dengan hasil musyawarah tokoh adat dan masyarakat untuk menentukan suatu hal dalam kegiatan kemasyarakatan baik itu juga cita dan duka cita. Temuan ini juga diperkuat oleh Harahap (2016) yang menyatakan bahwa terjadi pergeseran sistem kekerabatan *Dalihan Natolu* di tengah-tengah masyarakat saat ini disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi.

Penelitian Neva dkk (2021) menemukan bahwa demokrasi dalam masyarakat Batak Mandailing dan Tapanuli Selatan dikenal dengan istilah *Dalihan Natolu*, merupakan proses demokrasi tradisional yang telah ada dan berkembang di komunitas tersebut. Proses ini berfungsi untuk menjaga harmoni dan kontinuitas antara demokrasi Pancasila yang diusung oleh pemerintah dan demokrasi tradisional yang ada di masyarakat. Pada pemilihan umum, masyarakat Mandailing Batak masih mengedepankan nilai-nilai adat yang dipimpin oleh pemimpin adat, yang berperan dalam mengorganisir pemilihan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan aman dan damai. Meskipun ada perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat dalam lima dekade terakhir, demokrasi dalam bentuk aslinya masih dipertahankan dan berfungsi dalam konteks lokal.

Temuan Putnam menyatakan bahwa keterlibatan dalam praktik demokrasi seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Sosial budaya tersebut adalah membangun interaksi yang kental, baik bersifat formal maupun informal (Putnam, 1993). Putnam (1993)

berargumen bahwa jaringan- jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerja sama para anggotanya serta manfaat- manfaat dari partisipasinya itu (Kurniawan, 2018). Glokalisasi nilai-nilai demokrasi juga membawa dampak positif bagi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dapat dilihat sebagai hasil dari pengaruh nilai-nilai demokrasi yang lebih luas. Masyarakat mulai mengadopsi mekanisme baru untuk melibatkan warga dalam diskusi publik, meskipun tetap dalam kerangka adat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa glokalisasi dapat menciptakan ruang bagi inovasi dalam praktik demokrasi (Nababan, 2023).

Sisi negatif dari proses glokalisasi nilai-nilai demokrasi seringkali dihadapkan pada tantangan berupa resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh perubahan. Observasi pada kegiatan musyawarah adat terlihat beberapa tokoh adat yang memiliki kekuasaan tradisional merasa bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi modern akan mengurangi otoritas mereka dalam kegiatan adat. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana nilai-nilai demokrasi yang seharusnya memperkuat partisipasi masyarakat justru dapat menimbulkan konflik internal dalam komunitas. Wawancara dengan Rodinar salah satu warga masyarakat batak Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi deliberatif yang lebih luas dan praktik lokal yang ada. Keadaan yang berlangsung di masyarakat adat Batak Tapanuli Selatan ini menuntut adanya dialog yang konstruktif antara berbagai pihak dalam masyarakat, termasuk tokoh adat, pemimpin komunitas atau pemerintahan, dan warga biasa.

Masyarakat Melayu Riau juga memiliki tradisi yang kaya dan memberi pengaruh cara mereka berinteraksi dan mengambil keputusan. Membahas demokrasi deliberatif penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal, seperti yang terdapat dalam budaya Melayu, dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan partisipatif. Budaya Melayu menekankan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Islami, di mana pemimpin diharapkan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Syamsuadi, 2018). Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang mengutamakan dialog dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan juga menjadi landasan penting dalam membangun tata pemerintahan yang baik.

Nilai-nilai budaya lokal dapat berfungsi sebagai pendorong untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi praktik korupsi dan nepotisme yang sering kali menghambat kemajuan (Ishak, 2015). Mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu dalam kerangka demokrasi deliberatif dapat menciptakan sinergi yang positif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan,

tetapi juga subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau Datuk Seri Al Azhar mengatakan nilai-nilai adat Melayu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin harus didukung oleh masyarakat untuk mencapai kemajuan bersama. Menurutnya, penting menjaga dan melestarikan adat istiadat Melayu sebagai identitas budaya yang harus diwariskan kepada generasi muda dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal (Sam, 2024).

Penelitian Guntur & Karim (2004) menemukan bahwa proses desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan politik lokal, termasuk di Riau yaitu tanah Melayu yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan heterogenitas etnis. Dinamika ini menyebabkan terjadi kontestasi nilai antara nilai lokal (adat istiadat) dan nilai global (demokrasi) yang memunculkan paradoks glokalisasi. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menjadi salah satu aktor kunci dalam proses ini, terutama dalam memperluas kontestasi politik identitas etnis Melayu. LAMR yang didominasi oleh elite birokrasi Melayu, menggunakan sandaran hukum seperti Perda No. 39 Tahun 2001 untuk memperkuat posisinya dalam ranah politik lokal. Langkah-langkah kontroversial seperti pembelaan terhadap tokoh Melayu dan penolakan terhadap calon non-Melayu menunjukkan bagaimana desentralisasi dan demokratisasi diterjemahkan melalui lensa identitas etnis.

Fenomena ini tidak terjadi secara merata karena Lembaga Adat Melayu Pekanbaru (LAMP) cenderung kehilangan makna sebagai organisasi karena heterogenitas masyarakat urban dan kurangnya ruang politik di tingkat kota (Guntur & Karim, 2004). Paradoks glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif terlihat dari bagaimana desentralisasi membuka ruang bagi lokalitas (adat, etnisitas, dan penduduk asli) untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berpotensi memicu etnonasionalisme jika tidak dikelola dengan baik. Kontestasi nilai dan identitas dapat memperkaya proses demokrasi dengan memperkenalkan nilai-nilai lokal ke dalam ruang publik. Kontestasi ini berisiko memicu konflik etnis dan tirani mayoritas tanpa penguatan konsep multikulturalisme dan peran negara yang adil.

Proses ini menegaskan bahwa demokrasi deliberatif tidak hanya tentang partisipasi, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai lokal dan global dapat bersinergi tanpa mengorbankan keadilan dan harmoni sosial. Proses glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif dalam konteks masyarakat Melayu Riau juga berpeluang untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Peran perempuan dalam tradisi Melayu sering kali kurang mendapat perhatian dalam wacana demokrasi deliberatif. Meskipun budaya Melayu dikenal patriarkis, terdapat ruang untuk mengintegrasikan peran perempuan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan (Ishak, 2015). Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang

menekankan inklusivitas dan kesetaraan. Melibatkan perempuan lembaga adat seperti LAMR dan LAMP dapat memperluas perspektif dan memperkaya proses deliberasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Generasi muda Melayu juga memegang peran kunci dalam memastikan keberlanjutan nilai-nilai adat dalam era demokrasi modern. Tantangan terbesar adalah bagaimana memadukan nilai-nilai tradisional dengan dinamika global yang terus berubah. Generasi muda perlu didorong untuk tidak hanya memahami dan menghargai adat istiadat, tetapi juga mengadaptasikannya dalam konteks kekinian. Penggunaan teknologi digital dapat menjadi alat untuk mempromosikan nilai-nilai Melayu dan melibatkan lebih banyak orang, terutama generasi muda, dalam proses deliberasi. Media sosial dan platform digital dapat menjadi ruang baru untuk musyawarah dan dialog, memperluas partisipasi masyarakat tanpa terbatas oleh ruang dan waktu (Aisyah, 2024). Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan etnis Melayu sebagai penduduk asli dengan etnis pendatang dalam proses demokrasi deliberatif.

Paradoks glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif dalam konteks masyarakat Melayu Riau tidak hanya menawarkan tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan praktik demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, nilai-nilai adat Melayu dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tanpa mengorbankan keadilan dan harmoni sosial. Penelitian ini menggambarkan bahwa glokalisasi nilai-nilai demokrasi tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan praktik demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa paradoks glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif di masyarakat Batak Tapanuli Selatan dan Melayu Riau menciptakan dinamika yang kompleks. Meskipun ada upaya untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi yang lebih luas, praktik lokal sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan, menciptakan ketegangan antara norma global dan budaya lokal. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya memahami konteks lokal dalam penerapan nilai-nilai demokrasi, serta perlunya dialog antara berbagai pihak untuk menciptakan praktik demokrasi yang lebih inklusif. Penelitian ini juga memiliki limitasi, terutama dalam hal jumlah informan yang terlibat dan konteks geografis yang terbatas. Oleh karena itu, agenda riset ke depan perlu memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak komunitas adat di Indonesia, serta mengkaji dampak jangka panjang dari glokalisasi nilai-nilai demokrasi terhadap praktik sosial dan politik. Penelitian lebih lanjut diharapkan

dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat diintegrasikan dengan budaya lokal secara harmonis.

Referensi

Aisyah. (2024). *Implementasi Fungsi Lembaga Adat dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Demokrasi pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai*. Skripsi. UIN Suska Riau.

Asrinaldi. (2017). *Demokrasi Lokal di Indonesia*. Padang: Erka Publishing.

Asrinaldi, A., & Azwar, A. (2018). Dimensi Kekuasaan Penghulu Adat Melayu Riau Dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, *20*(1), 57–69. https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p57-69.2018

Guntur, M., & Karim, A. G. (2004). *Pelembagaan Adat Melayu Riau dan Perlakuan Kontestasi Politik Identitas Etnis Melayu Riau pada Ranah Politik Lokal: Studi Komparasi Lembaga Adat Melayu Bengkalis dengan Lembaga Adat Melayu Pekanbaru* [Tesis. Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/25706

Harahap, D. (2016). Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu (Studi Pada Keluarga Urban Muslim Batak Angkola di Yogyakarta). *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, *12*(1), 121–134.

Held, D. (2006). *Models of Democracy*. Stanford University Press.

Hisyam, M., & Pamungkas, C. (2016). *Indonesia, Globalisasi, dan Global Village* (M. Hisyam & C. Pamungkas (eds.); 1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ishak. (2015). Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau : Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *12*(2), 83. https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2903

Jovanoski, A., & Sharlamanov, K. (2021). Jurgen Habermas And His Contribution to The Theory of Deliberative Democracy. *American International Journal of Social Science Research*, *7*(1), 36–47. https://doi.org/10.46281/aijssr.v7i1.1296

Kurniawan, I. D. (2018). Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial. *Integralistik*, *29*(1). https://core.ac.uk/download/pdf/148617855.pdf

Marvasti, A. B. (2004). *Qualitative Research in Sociology* (First Edit). SAGE Publication.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.

Nababan, K. R. (2023). Mandok Hata Sebagai Pendidikan Demokrasi dalam Kebudayaan Batak. *Jurnal Politik Profetik*, *11*(1), 23–40. https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a2

Nainggolan, R. A. (2016). Penerapan Dalihan Na Tolu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Padang Sidimpuan Provinsi Sumatera Utara. *Perpustakaan IPDN*, 1–15.

Neuman, W. L. (2003). Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.

Neva, C. F., Gunawati, D., & Triyanto. (2021). Existency of Mandailing Batak Democracy in Maintain the Harmonization of Indigenous Communities. *1st International Conference on Social Sciences and Education*, *1*, 63–70.

Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:153485206

Ritzer, G. (2011). Sociological Theory. In *McGraw-Hill,* (8th ed.). University of Maryland.

Robertson, R. (2018). Glocalization. In *The International Encyclopedia of Anthropology* (pp. 1–8). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118924396.wbiea2275

Sam. (2024). *DPH LAM Riau: Pemimpin Harus Didukung*. Mediacenter.Riau.Go.Id. https://mediacenter.riau.go.id/read/84279/dph-lam-riau-pemimpin-harus-didukung.html

Siregar, I. R. (2018). *Peranan Dalihan Natolu dalam Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas*

Utara Tahun 2015 [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. http://repository.uinsu.ac.id/4898/

Suartina, T., & Lan, T. J. (2023). Deliberasi sebagai Konsep dan Praksis. In T. J. Lan (Ed.), *Demokrasi di Tingkat Lokal: Mendorong Proses Deliberasi* (pp. 149–157). Penerbit BRIN. https://doi.org/10.55981/brin.744.c586

Syamsuadi, A. (2018). Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, *1*(Januari), 1–10.

PARADOKS GLOKALISASI NILAI DEMOKRASI DELIBERASI.pdf

by - -

Submission date: 31-Jan-2025 09:11AM (UTC+0530)
Submission ID: 2574400001
File name: PARADOKS_GLOKALISASI_NILAI_DEMOKRASI_DELIBERASI.pdf (263.5K)
Word count: 3486
Character count: 23918

PARADOKS GLOKALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DELIBERATIF

Baskoro Wicaksono[1], Muhammad Ihsan[2]
[1] Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
[2] Sosiologi, Universitas Riau

Email: baskoro.wicaksono@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Paradoks glokalisasi dalam demokrasi deliberatif mencerminkan ketegangan antara dinamika globalisasi dan kebutuhan lokal dalam praktik deliberasi demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai demokrasi deliberatif seperti inklusivitas, kesetaraan, dan partisipasi warga berinteraksi dalam konteks glokalisasi, di mana ide dan praktik global diadaptasi ke dalam kondisi lokal. Dalam konteks globalisasi, nilai-nilai demokrasi deliberatif sering dipromosikan sebagai standar universal yang dapat diterapkan di berbagai negara. Namun, proses glokalisasi menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ini tidak sepenuhnya homogen, melainkan dipengaruhi oleh budaya, norma, dan kebutuhan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan wawancara mendalam kepada informan dengan teknik purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses glokalisasi, adaptasi lokal seringkali menghasilkan praktik yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip universal demokrasi deliberatif. Sisi positif glokalisasi membuka peluang bagi integrasi norma-norma lokal ke dalam kerangka demokrasi deliberatif global, namun pada sisi lain juga menciptakan tantangan besar. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai global seperti keterbukaan dan kesetaraan ditafsirkan ulang untuk disesuaikan dengan tradisi dan hierarki lokal, yang dapat mengarah pada distorsi prinsip dasar deliberasi. Mekanisme deliberasi berbasis konsensus yang didasarkan pada nilai tradisional sering kali menggantikan proses debat terbuka yang dianjurkan oleh paradigma global, Hal ini menciptakan paradoks, di mana keberhasilan penerapan nilai demokrasi deliberatif justru tergantung pada sejauh mana praktek tersebut dapat diintegrasikan dengan norma-norma lokal, meskipun hal ini dapat menyandingkan aspek-aspek tertentu dari standar global. Selain itu, glokalisasi juga menghadirkan tantangan baru, seperti risiko kooptasi nilai demokrasi oleh elit lokal untuk melegitimasi kekuasaan, yang bertentangan dengan tujuan utama demokrasi deliberatif untuk memberdayakan masyarakat. Paradoks lainnya terletak pada peran elite lokal yang sering menggunakan demokrasi deliberatif sebagai alat legitimasi politik, yang justru bertentangan dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, glokalisasi juga memungkinkan munculnya praktik-praktik inovatif yang memperkaya demokrasi deliberatif dengan menambahkan dimensi keadilan sosial berbasis komunitas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberhasilan demokrasi deliberatif di era glokalisasi memerlukan strategi yang mengakui pluralitas budaya tanpa mengorbankan nilai-nilai inti seperti inklusivitas dan keadilan. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual untuk memahami dinamika lokal sekaligus mempertahankan relevansi nilai-nilai demokrasi deliberatif dalam arus globalisasi.

Kata kunci: demokrasi deliberatif, glokalisasi, globalisasi, nilai demokrasi, adaptasi lokal

Pendahuluan

Gagasan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi paradoks yang muncul akibat glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat adat Batak Tapanuli Selatan dan Melayu Riau. Glokalisasi yang merupakan perpaduan antara globalisasi dan lokalitas, menciptakan dinamika baru dalam penerapan nilai-

nilai demokrasi yang seharusnya bersifat universal namun seringkali dihadapkan pada realitas sosial dan budaya lokal yang beragam. Menurut Held (2006) demokrasi deliberatif adalah proses di mana warga negara terlibat dalam diskusi yang terbuka dan rasional untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, dalam konteks glokalisasi, nilai-nilai ini sering kali mengalami distorsi yang mengarah pada konflik antara norma global dan praktik lokal (Suartina & Lan, 2023).

Budaya masyarakat pada setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang kemudian berkontribusi terhadap praktik demokrasi di wilayahnya masing-masing. Kegiatan kemasyarakatan dilakukan mengacu pada kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan terus dilestarikan sampai sekarang ini pada setiap aspek kehidupan masyarakat termasuk sistem demokrasi. Kemajemukan masyarakat Indonesia berperan penting dalam membentuk sistem demokrasi di tingkat lokal. Demokrasi yang diterapkan di daerah tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Terdapat sekitar 300 etnis yang hidup di Indonesia, keberagaman ini membentuk fondasi demokrasi nasional yang berakar dari berbagai tradisi dan nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat (Asrinaldi & Azwar, 2018).

Sistem sosial budaya yang dipraktikkan oleh suatu etnis tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga melahirkan peradaban yang memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri. Peradaban ini dapat dipelajari untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal berkontribusi terhadap sistem pemerintahan yang ada. Misalnya, etnis Melayu Riau yang pada abad pertengahan dikenal sebagai pusat kerajaan Melayu di Nusantara. Sistem pemerintahan yang diterapkan saat itu mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang hingga kini masih dapat ditemukan dalam kebudayaan masyarakat Melayu di Riau (Ishak, 2015). Pengaruh budaya Melayu tetap terlihat dalam simbol-simbol adat dan tata pemerintahan di Provinsi Riau. Kejayaan etnis Melayu dapat ditelusuri dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, mulai dari sistem adat, bahasa, hingga tradisi politik yang masih mempertahankan unsur-unsur budaya Melayu.

Kondisi budaya Melayu ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang melalui integrasi antara sistem politik modern dengan nilai-nilai sosial budaya yang diwarisi dari generasi ke generasi. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh keberagaman etnis dan budaya yang ada (Asrinaldi, 2017). Selain pada masyarakat adat Melayu Riau kondisi yang sama pada masyarakat Batak di Tapanuli Selatan dengan sistem *Dalihan Natolu* merupakan sistem sosial budaya tradisional masyarakatnya. Sistem menekankan prinsip kesetaraan serta demokrasi yang kuat (Nababan, 2023). Sistem ini memuat nilai-nilai saling menghargai dan peduli

terhadap sesama diajarkan kepada anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau marga. Hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan diberikan kepada setiap individu di dalam kelompok tersebut.

Kesetaraan yang terkandung dalam *Dalihan Natolu* memungkinkan setiap anggota marga untuk mengekspresikan gagasan dan pandangan mereka tanpa khawatir akan diremehkan atau diabaikan oleh anggota lainnya. Selain itu, sistem ini juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu diharapkan untuk memberikan bantuan dan perhatian kepada sesama anggota marga. Melalui konsep solidaritas yang diterapkan dalam dalihan natolu, keterikatan antaranggota marga dapat terjalin secara kuat (Siregar, 2018). Dengan adanya sistem ini, individu dalam kelompok merasa memiliki hubungan erat satu sama lain, sehingga kehidupan sosial dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai demokrasi deliberatif diadaptasi dan diterapkan dalam konteks lokal, serta dampak yang ditimbulkan dari proses glokalisasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi glokalisasi nilai-nilai demokrasi di masyarakat adat, serta untuk mendokumentasikan pengalaman dan pandangan masyarakat terkait hal ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang interaksi antara nilai-nilai demokrasi dan budaya lokal, serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan praktik demokrasi yang lebih inklusif.

Tinjauan Pustaka

Studi terdahulu menunjukkan bahwa glokalisasi memiliki dampak yang kompleks terhadap nilai-nilai demokrasi . Ritzer (2011) menyebutkan bahwa globalisasi tidak hanya membawa nilai-nilai baru, tetapi juga memicu reaksi lokal yang berupaya mempertahankan identitas budaya. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Hisyam & Pamungkas (2016) yang menyatakan bahwa globalisasi menciptakan "keterhubungan yang tidak merata", di mana beberapa komunitas dapat mengambil manfaat dari nilai-nilai demokrasi, sementara yang lain terpinggirkan. Dinamika ini menunjukkan bahwa proses glokalisasi tidak selalu memperkuat demokrasi secara universal, tetapi dapat menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap nilai-nilai demokratis.

Beberapa kelompok mampu mengadaptasi nilai-nilai global dengan tetap mempertahankan tradisi lokal sementara yang lain mengalami tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Peran kebijakan pemerintah dan lembaga sosial menjadi krusial untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berkembang dalam kelompok tertentu,

tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian oleh Nababan (2023) menekankan pentingnya komunitas lokal dalam membentuk identitas dan praktik demokrasi, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak dapat dipaksakan dari luar tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Penelitian oleh Nainggolan (2016) juga menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, praktik lokal sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori glokalisasi yang dikembangkan oleh Robertson (2018). Menurut Robertson, glokalisasi adalah proses di mana praktik global diadaptasi dan ditransformasikan oleh konteks lokal. Demokrasi deliberatif berarti bahwa nilai-nilai demokrasi yang berasal dari sumber global harus disesuaikan dengan norma dan praktik lokal agar dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif (Jovanoski & Sharlamanov, 2021). Interaksi antara nilai-nilai global dan lokal sering kali menghasilkan bentuk demokrasi hibrida yang unik di setiap komunitas. Adaptasi terhadap nilai-nilai global dapat memperkaya praktik demokrasi lokal akan tetapi juga dapat menimbulkan konflik antara modernitas dan tradisi. Pemahaman terhadap cara masyarakat merespons globalisasi menjadi penting dalam menganalisis perkembangan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi menggunakan analisis literatur (Neuman, 2003). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan masyarakat terkait glokalisasi nilai-nilai demokrasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang dipilih melalui teknik purposive (Moleong, 2017). Teknik ini memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan praktek glokalisasi demokrasi deliberatif. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang lebih luas dan mendalam dari berbagai perspektif.

Unit analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Batak Tapanuli Selatan dan Melayu Riau. Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada kekayaan budaya dan tradisi yang ada di kedua masyarakat tersebut, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman Metode yang dilakukan dalam tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Verifikasi data menggunakan triangulasi yaitu validasi data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk menguji keabsahan informasi.

Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu metode tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel dan objektif (Marvasti, 2004).

Hasil Penelitian Pembahasan

Proses glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif di masyarakat Batak Tapanuli Selatan dan Melayu Riau menunjukkan dinamika yang kompleks. Terdapat upaya untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi yang lebih luas, seperti partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Praktik lokal yang kuat sering kali mendominasi proses ini, menciptakan ketegangan antara nilai-nilai global dan lokal. musyawarah adat sering kali menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan di Masyarakat Batak yang tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang lebih inklusif (Neva et al., 2021). Tokoh adat Batak Tapanuli Selatan Muhammad Nasir menyatakan bahwa sistem demokrasi di dalam budaya Batak Tapanuli Selatan adalah merujuk pada konsep *Dalihan Na Tolu* yang pada intinya musyawarah antara tiga pihak dalam menentukan suatu keputusan.

Keputusan tersebut adalah untuk hal yang suka cita dan duka cita, tapi pada saat ini terjadi pergeseran kecenderungan melihat status sosial masyarakat. Ketika kelas menengah dan atas yang dimusyawarahkan maka akan mengikuti pendapat dari mereka tapi ketika dari kelas menengah ke bawah akan menyesuaikan dengan hasil musyawarah tokoh adat dan masyarakat untuk menentukan suatu hal dalam kegiatan kemasyarakatan baik itu juga cita dan duka cita. Temuan ini juga diperkuat oleh Harahap (2016) yang menyatakan bahwa terjadi pergeseran sistem kekerabatan *Dalihan Natolu* di tengah-tengah masyarakat saat ini disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi.

Penelitian Neva dkk (2021) menemukan bahwa demokrasi dalam masyarakat Batak Mandailing dan Tapanuli Selatan dikenal dengan istilah *Dalihan Natolu*, merupakan proses demokrasi tradisional yang telah ada dan berkembang di komunitas tersebut. Proses ini berfungsi untuk menjaga harmoni dan kontinuitas antara demokrasi Pancasila yang diusung oleh pemerintah dan demokrasi tradisional yang ada di masyarakat. Pada pemilihan umum, masyarakat Mandailing Batak masih mengedepankan nilai-nilai adat yang dipimpin oleh pemimpin adat, yang berperan dalam mengorganisir pemilihan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan aman dan damai. Meskipun ada perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat dalam lima dekade terakhir, demokrasi dalam bentuk aslinya masih dipertahankan dan berfungsi dalam konteks lokal.

Temuan Putnam menyatakan bahwa keterlibatan dalam praktik demokrasi seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Sosial budaya tersebut adalah membangun interaksi yang kental, baik bersifat formal maupun informal (Putnam, 1993). Putnam (1993)

berargumen bahwa jaringan- jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerja sama para anggotanya serta manfaat- manfaat dari partisipasinya itu (Kurniawan, 2018). Glokalisasi nilai-nilai demokrasi juga membawa dampak positif bagi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dapat dilihat sebagai hasil dari pengaruh nilai-nilai demokrasi yang lebih luas. Masyarakat mulai mengadopsi mekanisme baru untuk melibatkan warga dalam diskusi publik, meskipun tetap dalam kerangka adat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa glokalisasi dapat menciptakan ruang bagi inovasi dalam praktik demokrasi (Nababan, 2023).

Sisi negatif dari proses glokalisasi nilai-nilai demokrasi seringkali dihadapkan pada tantangan berupa resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh perubahan. Observasi pada kegiatan musyawarah adat terlihat beberapa tokoh adat yang memiliki kekuasaan tradisional merasa bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi modern akan mengurangi otoritas mereka dalam kegiatan adat. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana nilai-nilai demokrasi yang seharusnya memperkuat partisipasi masyarakat justru dapat menimbulkan konflik internal dalam komunitas. Wawancara dengan Rodinar salah satu warga masyarakat batak Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi deliberatif yang lebih luas dan praktik lokal yang ada. Keadaan yang berlangsung di masyarakat adat Batak Tapanuli Selatan ini menuntut adanya dialog yang konstruktif antara berbagai pihak dalam masyarakat, termasuk tokoh adat, pemimpin komunitas atau pemerintahan, dan warga biasa.

Masyarakat Melayu Riau juga memiliki tradisi yang kaya dan memberi pengaruh cara mereka berinteraksi dan mengambil keputusan. Membahas demokrasi deliberatif penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal, seperti yang terdapat dalam budaya Melayu, dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan partisipatif. Budaya Melayu menekankan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Islami, di mana pemimpin diharapkan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Syamsuadi, 2018). Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang mengutamakan dialog dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan juga menjadi landasan penting dalam membangun tata pemerintahan yang baik.

Nilai-nilai budaya lokal dapat berfungsi sebagai pendorong untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi praktik korupsi dan nepotisme yang sering kali menghambat kemajuan (Ishak, 2015). Mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu dalam kerangka demokrasi deliberatif dapat menciptakan sinergi yang positif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan,

tetapi juga subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau Datuk Seri Al Azhar mengatakan nilai-nilai adat Melayu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin harus didukung oleh masyarakat untuk mencapai kemajuan bersama. Menurutnya, penting menjaga dan melestarikan adat istiadat Melayu sebagai identitas budaya yang harus diwariskan kepada generasi muda dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal (Sam, 2024).

Penelitian Guntur & Karim (2004) menemukan bahwa proses desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan politik lokal, termasuk di Riau yaitu tanah Melayu yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan heterogenitas etnis. Dinamika ini menyebabkan terjadi kontestasi nilai antara nilai lokal (adat istiadat) dan nilai global (demokrasi) yang memunculkan paradoks glokalisasi. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menjadi salah satu aktor kunci dalam proses ini, terutama dalam memperluas kontestasi politik identitas etnis Melayu. LAMR yang didominasi oleh elite birokrasi Melayu, menggunakan sandaran hukum seperti Perda No. 39 Tahun 2001 untuk memperkuat posisinya dalam ranah politik lokal. Langkah-langkah kontroversial seperti pembelaan terhadap tokoh Melayu dan penolakan terhadap calon non-Melayu menunjukkan bagaimana desentralisasi dan demokratisasi diterjemahkan melalui lensa identitas etnis.

Fenomena ini tidak terjadi secara merata karena Lembaga Adat Melayu Pekanbaru (LAMP) cenderung kehilangan makna sebagai organisasi karena heterogenitas masyarakat urban dan kurangnya ruang politik di tingkat kota (Guntur & Karim, 2004). Paradoks glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif terlihat dari bagaimana desentralisasi membuka ruang bagi lokalitas (adat, etnisitas, dan penduduk asli) untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berpotensi memicu etnonasionalisme jika tidak dikelola dengan baik. Kontestasi nilai dan identitas dapat memperkaya proses demokrasi dengan memperkenalkan nilai-nilai lokal ke dalam ruang publik. Kontestasi ini berisiko memicu konflik etnis dan tirani mayoritas tanpa penguatan konsep multikulturalisme dan peran negara yang adil.

Proses ini menegaskan bahwa demokrasi deliberatif tidak hanya tentang partisipasi, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai lokal dan global dapat bersinergi tanpa mengorbankan keadilan dan harmoni sosial. Proses glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif dalam konteks masyarakat Melayu Riau juga berpeluang untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Peran perempuan dalam tradisi Melayu sering kali kurang mendapat perhatian dalam wacana demokrasi deliberatif. Meskipun budaya Melayu dikenal patriarkis, terdapat ruang untuk mengintegrasikan peran perempuan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan (Ishak, 2015). Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang

menekankan inklusivitas dan kesetaraan. Melibatkan perempuan lembaga adat seperti LAMR dan LAMP dapat memperluas perspektif dan memperkaya proses deliberasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Generasi muda Melayu juga memegang peran kunci dalam memastikan keberlanjutan nilai-nilai adat dalam era demokrasi modern. Tantangan terbesar adalah bagaimana memadukan nilai-nilai tradisional dengan dinamika global yang terus berubah. Generasi muda perlu didorong untuk tidak hanya memahami dan menghargai adat istiadat, tetapi juga mengadaptasikannya dalam konteks kekinian. Penggunaan teknologi digital dapat menjadi alat untuk mempromosikan nilai-nilai Melayu dan melibatkan lebih banyak orang, terutama generasi muda, dalam proses deliberasi. Media sosial dan platform digital dapat menjadi ruang baru untuk musyawarah dan dialog, memperluas partisipasi masyarakat tanpa terbatas oleh ruang dan waktu (Aisyah, 2024). Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan etnis Melayu sebagai penduduk asli dengan etnis pendatang dalam proses demokrasi deliberatif.

Paradoks glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif dalam konteks masyarakat Melayu Riau tidak hanya menawarkan tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan praktik demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, nilai-nilai adat Melayu dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tanpa mengorbankan keadilan dan harmoni sosial. Penelitian ini menggambarkan bahwa glokalisasi nilai-nilai demokrasi tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan praktik demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa paradoks glokalisasi nilai-nilai demokrasi deliberatif di masyarakat Batak Tapanuli Selatan dan Melayu Riau menciptakan dinamika yang kompleks. Meskipun ada upaya untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi yang lebih luas, praktik lokal sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan, menciptakan ketegangan antara norma global dan budaya lokal. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya memahami konteks lokal dalam penerapan nilai-nilai demokrasi, serta perlunya dialog antara berbagai pihak untuk menciptakan praktik demokrasi yang lebih inklusif. Penelitian ini juga memiliki limitasi, terutama dalam hal jumlah informan yang terlibat dan konteks geografis yang terbatas. Oleh karena itu, agenda riset ke depan perlu memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak komunitas adat di Indonesia, serta mengkaji dampak jangka panjang dari glokalisasi nilai-nilai demokrasi terhadap praktik sosial dan politik. Penelitian lebih lanjut diharapkan

dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat diintegrasikan dengan budaya lokal secara harmonis.

Referensi

Aisyah. (2024). *Implementasi Fungsi Lembaga Adat dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Demokrasi pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai*. Skripsi. UIN Suska Riau.

Asrinaldi. (2017). *Demokrasi Lokal di Indonesia*. Padang: Erka Publishing.

Asrinaldi, A., & Azwar, A. (2018). Dimensi Kekuasaan Penghulu Adat Melayu Riau Dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, *20*(1), 57–69. https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p57-69.2018

Guntur, M., & Karim, A. G. (2004). *Pelembagaan Adat Melayu Riau dan Perlakuan Kontestasi Politik Identitas Etnis Melayu Riau pada Ranah Politik Lokal: Studi Komparasi Lembaga Adat Melayu Bengkalis dengan Lembaga Adat Melayu Pekanbaru* [Tesis. Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/25706

Harahap, D. (2016). Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu (Studi Pada Keluarga Urban Muslim Batak Angkola di Yogyakarta). *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, *12*(1), 121–134.

Held, D. (2006). *Models of Democracy*. Stanford University Press.

Hisyam, M., & Pamungkas, C. (2016). *Indonesia, Globalisasi, dan Global Village* (M. Hisyam & C. Pamungkas (eds.); 1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ishak. (2015). Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau : Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *12*(2), 83. https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2903

Jovanoski, A., & Sharlamanov, K. (2021). Jurgen Habermas And His Contribution to The Theory of Deliberative Democracy. *American International Journal of Social Science Research*, *7*(1), 36–47. https://doi.org/10.46281/aijssr.v7i1.1296

Kurniawan, I. D. (2018). Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial. *Integralistik*, *29*(1). https://core.ac.uk/download/pdf/148617855.pdf

Marvasti, A. B. (2004). *Qualitative Research in Sociology* (First Edit). SAGE Publication.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.

Nababan, K. R. (2023). Mandok Hata Sebagai Pendidikan Demokrasi dalam Kebudayaan Batak. *Jurnal Politik Profetik*, *11*(1), 23–40. https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a2

Nainggolan, R. A. (2016). Penerapan Dalihan Na Tolu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Padang Sidimpuan Provinsi Sumatera Utara. *Perpustakaan IPDN*, 1–15.

Neuman, W. L. (2003). Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.

Neva, C. F., Gunawati, D., & Triyanto. (2021). Existency of Mandailing Batak Democracy in Maintain the Harmonization of Indigenous Communities. *1st International Conference on Social Sciences and Education*, *1*, 63–70.

Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:153485206

Ritzer, G. (2011). Sociological Theory. In *McGraw-Hill,* (8th ed.). University of Maryland.

Robertson, R. (2018). Glocalization. In *The International Encyclopedia of Anthropology* (pp. 1–8). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118924396.wbiea2275

Sam. (2024). *DPH LAM Riau: Pemimpin Harus Didukung*. Mediacenter.Riau.Go.Id. https://mediacenter.riau.go.id/read/84279/dph-lam-riau-pemimpin-harus-didukung.html

Siregar, I. R. (2018). *Peranan Dalihan Natolu dalam Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas*

Utara Tahun 2015 [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. http://repository.uinsu.ac.id/4898/

Suartina, T., & Lan, T. J. (2023). Deliberasi sebagai Konsep dan Praksis. In T. J. Lan (Ed.), *Demokrasi di Tingkat Lokal: Mendorong Proses Deliberasi* (pp. 149–157). Penerbit BRIN. https://doi.org/10.55981/brin.744.c586

Syamsuadi, A. (2018). Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, *1*(Januari), 1–10.

PARADOKS GLOKALISASI NILAI DEMOKRASI DELIBERASI.pdf

ORIGINALITY REPORT

12%	11%	4%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
2	repo.unand.ac.id Internet Source	1%
3	es.scribd.com Internet Source	1%
4	text-id.123dok.com Internet Source	1%
5	ejournal.unma.ac.id Internet Source	1%
6	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	1%
7	Tanti, Hak Denny Mim Shot. "Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Calon Kepala Desa Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
8	journal-stiayappimakassar.ac.id Internet Source	<1%

9	mahasiswaindonesia.id Internet Source	<1 %
10	riau.harianhaluan.com Internet Source	<1 %
11	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
13	rosyidaokta.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
15	www.jurnalp4i.com Internet Source	<1 %
16	Abdur Rozak, Lucky Nurhadiyanto. "Implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Cases in Sukabumi City Viewed from Reintegrative Shaming Theory", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024 Publication	<1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
18	id.scribd.com Internet Source	<1 %

19	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
20	journal.bakrie.ac.id Internet Source	<1 %
21	adoc.pub Internet Source	<1 %
22	e-journal.uac.ac.id Internet Source	<1 %
23	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
25	media.neliti.com Internet Source	<1 %
26	nasional.okezone.com Internet Source	<1 %
27	jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Manunggal Rasa, Mbangun Jiwa:

Menemukenali Nilai *Gotong Royong* dalam Membangun Sistem Dukungan Kesehatan Mental Berbasis Komunitas di Yogyakarta

Bayu Adiputro*, Carla R. Marchira, Sumarni DW****

*Residen Departemen Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**Staf Pengajar Departemen Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstrak

Latar Belakang: Peringatan Kedaulatan Negara, yang diawali dari peristiwa bersejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta menunjukkan semangat gotong royong, solidaritas, dan kerjasama lintas elemen masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mempertahankan kedaulatan bangsa. Nilai kolektivisme ini relevan untuk membangun sistem dukungan kesehatan mental berbasis komunitas, di mana solidaritas dan kebersamaan menjadi fondasi dalam membantu individu yang mengalami masalah psikologis, terutama dalam situasi krisis. Sejarah tersebut mengajarkan bahwa kekuatan komunitas yang bersatu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan emosional dan kesejahteraan bersama. Pada tahun 2024, Kota Yogyakarta mencatatkan angka Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mencapai lebih dari tiga ribu kasus, dengan prevalensi sekitar 0,78%. Pendekatan terpadu diperlukan dalam menangani hal ini dengan melibatkan kerja sama antara komunitas dan tenaga medis. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, sebab gangguan jiwa tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, namun juga pada lingkungan sosial mereka.

Tujuan: Tulisan ini bertujuan menjelaskan implementasi nilai *gotong royong* dalam sistem dukungan kesehatan mental berbasis komunitas di Yogyakarta.

Metode: Telaah ini dilakukan dengan metode tinjauan literatur dari berbagai portal ilmiah, serta narasi klasik mengenai nilai gotong-royong. Selanjutnya, dilakukaan telaah kritis dari sumber literatur tersebut untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil: Filosofi gotong royong, yang menekankan solidaritas dan kerja sama, sangat relevan dalam mendukung penanganan kesehatan mental di Yogyakarta. Pendekatan berbasis komunitas ini efektif untuk mendeteksi dini masalah psikologis, mengurangi stigma terhadap

gangguan jiwa, dan menyediakan dukungan sosial yang esensial bagi pemulihan ODGJ. Program seperti Kelompok Siaga Sehat Jiwa (KSSJ) menjadi contoh konkret integrasi nilai gotong royong dengan intervensi berbasis komunitas. Selain itu, kegiatan berbasis budaya lokal membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis melalui pendekatan yang holistik dan inklusif. Dengan kombinasi ini, Yogyakarta berpotensi menjadi model nasional untuk sistem kesehatan mental yang berbasis kearifan lokal dan dukungan masyarakat.

Diskusi: Implementasi prinsip gotong royong dalam mendukung kesehatan mental menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma terhadap gangguan jiwa, yang menghambat partisipasi aktif masyarakat. Kurangnya sumber daya manusia dan finansial, serta kesenjangan koordinasi antara layanan medis formal dan komunitas, juga menjadi hambatan. Beban kerja yang tinggi pada kader kesehatan sering kali mengurangi keberlanjutan kontribusi mereka. Selain itu, dinamika sosial yang semakin individualistis di beberapa lingkungan dapat menyulitkan penerapan kolektivisme gotong royong.

Kesimpulan: Gotong royong memungkinkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dengan program kesehatan mental, yang menciptakan pendekatan holistik dan lebih inklusif. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan, seperti stigma sosial, keterbatasan sumber daya, kesenjangan koordinasi antara layanan medis formal dan komunitas, serta beban kerja tinggi pada kader kesehatan. Mengatasi tantangan ini membutuhkan upaya terpadu, termasuk edukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi kesehatan mental, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta dukungan lebih baik kepada relawan komunitas. Dengan strategi ini, gotong royong dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan sistem kesehatan mental berbasis komunitas yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal di Yogyakarta.

Kata kunci: *gotong royong, dukungan, kesehatan mental, komunitas*

LATAR BELAKANG

Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan salah satu momen penting dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan. Dilancarkan di Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia, serangan ini bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih memiliki eksistensi dan kekuatan. Dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX bersama TNI di bawah Panglima Besar Jenderal Sudirman, serangan mendadak selama enam jam berhasil mengguncang pasukan Belanda. Keberhasilan ini menjadi modal diplomasi penting, yang kemudian mendukung posisi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (Cribb, 2011; Reid, 2014).

Nilai gotong royong tercermin kuat dalam peristiwa ini, terutama dalam kolaborasi antara militer dan masyarakat sipil. Rakyat Yogyakarta berperan menyediakan logistik, menyampaikan informasi, dan menjadi penghubung komunikasi antara pasukan. Kerja sama erat ini mencerminkan persatuan antar elemen bangsa yang bersatu menghadapi ancaman besar terhadap kedaulatan. Informasi lokal yang diberikan oleh masyarakat juga menjadi penentu strategi yang efektif dalam menyerang posisi Belanda (Anderson, 1972). Semangat gotong royong yang menjadi kunci keberhasilan serangan tersebut masih relevan hingga kini, termasuk dalam penanganan tantangan sosial seperti kesehatan mental di Yogyakarta, di mana solidaritas dan kebersamaan diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan (Koentjaraningrat, 2009).

Lirik "Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya" dalam lagu Indonesia Raya menegaskan pentingnya membangun kesejahteraan manusia secara holistik, mencakup kesehatan mental (jiwa) dan fisik (badan). Makna ini mencerminkan kesadaran bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental yang memadai. Dalam konteks sistem kesehatan jiwa, hal ini menekankan perlunya layanan kesehatan mental yang komprehensif, inklusif, dan berbasis komunitas untuk mendukung potensi masyarakat secara keseluruhan.

Pelaksanaan nilai ini dengan menerapkan gotong royong menjadi strategi efektif untuk membangun sistem kesehatan jiwa yang mumpuni. Melalui gotong royong, masyarakat dapat bekerja sama dalam meningkatkan literasi kesehatan mental, mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa, dan menciptakan lingkungan suportif. Dengan integrasi nilai gotong royong, seperti kerja sama lintas sektor dan kolaborasi masyarakat, cita-cita membangun jiwa dan badan bangsa sesuai dengan makna Indonesia Raya dapat lebih mudah tercapai (Koentjaraningrat, 2009; Thornicroft et al., 2016).

Nilai gotong royong dapat menjadi landasan kuat dalam membangun sistem kesehatan jiwa yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sistem ini dapat mengoptimalkan deteksi dini masalah kesehatan mental. Program berbasis komunitas, seperti posyandu jiwa dan kader kesehatan mental, memungkinkan identifikasi tanda-tanda awal gangguan jiwa sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius (Thornicroft et al., 2016). Partisipasi masyarakat juga mampu menciptakan pendekatan upaya kesehatan jiwa yang berbasis kebutuhan lokal.

Gotong royong juga berperan penting dalam mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Melalui edukasi kolektif yang melibatkan masyarakat, diskusi terbuka dapat membantu mengubah persepsi negatif dan meningkatkan penerimaan terhadap ODGJ. Literasi kesehatan mental yang lebih baik akan mendorong individu untuk mencari bantuan tanpa rasa takut atau malu (Kohrt et al., 2018). Pendekatan berbasis komunitas ini juga memungkinkan dukungan psikososial yang berkelanjutan bagi individu yang membutuhkan.

Selain itu, nilai gotong royong menuntut keterlibatan dan sinergi antar sektor, seperti kesehatan, pendidikan, agama, dan budaya, untuk membangun sistem kesehatan mental yang relevan dengan konteks sosial masyarakat. Kolaborasi multisektoral ini membantu merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan kesehatan jiwa (Jacob et al., 2020). Dengan keterlibatan berbagai pihak, program kesehatan mental dapat berjalan lebih terintegrasi dan sangkil.

Di tingkat komunitas, gotong royong juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan mental meningkatkan keberlanjutan, karena mereka merasa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Rasa tanggung jawab ini memastikan bahwa program tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan sumber daya eksternal (Patel et al., 2018).

Menurut data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi rumah tangga di Indonesia yang memiliki anggota dengan gangguan jiwa berat, seperti psikosis atau skizofrenia, mencapai 4 per mil. Hal ini berarti terdapat 4 rumah tangga dengan anggota yang mengalami gangguan jiwa berat dari setiap 1.000 rumah tangga di Indonesia (Katadata, 2023).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki angka prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun yang sama, DIY menjadi provinsi dengan prevalensi skizofrenia tertinggi di Indonesia, yaitu 9,3 per mil rumah tangga. Ini berarti dari setiap 1.000 rumah tangga di DIY, sekitar 9 rumah tangga memiliki anggota yang mengalami gangguan jiwa berat (Katadata, 2023).

Secara spesifik, di Kota Yogyakarta pada tahun 2024, tercatat 3.239 orang mengalami gangguan jiwa, yang mencakup 0,78% dari total populasi. Dari jumlah tersebut, 1.285 orang di antaranya merupakan penderita gangguan jiwa berat (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2024).

Situasi di atas menunjukkan perlunya upaya terpadu dari berbagai pihak untuk menangani masalah kesehatan jiwa di DIY. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan layanan kesehatan mental, mengurangi stigma, dan memberikan dukungan bagi individu yang terdampak (Katadata, 2023; Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2024).

Tingginya prevalensi gangguan jiwa di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari sisi sosial, stigma dan diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa masih menjadi hambatan utama. Banyak pasien yang menghadapi isolasi sosial akibat kurangnya penerimaan masyarakat, sehingga memperburuk kondisi mereka, termasuk kondisi fisiknya (Kohrt et al., 2018). Selain itu, keluarga ODGJ sering kali menghadapi tekanan emosional dan konflik internal akibat beban perawatan yang berat. Pada tingkat komunitas, gangguan jiwa dapat mengganggu harmoni sosial, terutama jika masyarakat tidak memiliki pemahaman atau dukungan yang memadai terhadap masalah ini (Thornicroft et al., 2016).

Secara ekonomi, dampaknya juga tidak kalah besar. Sebagian besar penderita gangguan jiwa berat tidak mampu mengambil peran dalam aktivitas ekonomi, sehingga produktivitas individu dan keluarga menurun (Jacob et al., 2020). Keluarga juga sering kali menghadapi beban finansial yang berat, termasuk biaya perawatan, terapi, dan pengobatan, yang dapat memperburuk kemiskinan (Patel et al., 2018). Badan Kesehatan Dunia/WHO dalam artikelnya pada tahun 2021 juga menyebutkan bahwa tingginya angka gangguan jiwa memberikan tekanan besar pada sistem jaminan kesehatan, yang memaksa pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk layanan kesehatan mental.

Di sisi lain, dampak sosial dan ekonomi ini saling terkait dan memperparah kondisi masyarakat secara keseluruhan. Ketidakhadiran intervensi yang tepat dapat menyebabkan lingkaran masalah yang berulang, di mana stigma sosial memperburuk gangguan jiwa dan beban ekonomi menambah tekanan bagi keluarga. Oleh karena itu, pendekatan terpadu yang melibatkan pengurangan stigma, dukungan komunitas, dan investasi dalam layanan kesehatan mental sangat diperlukan (Thornicroft et al., 2016).

Sistem dukungan kesehatan mental dengan pendekatan nilai gotong royong diharapkan mampu menciptakan sistem kesehatan jiwa yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, individu

dengan gangguan jiwa dapat pulih dan berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi, sementara masyarakat secara keseluruhan mendapatkan manfaat dari lingkungan yang lebih harmonis dan produktif (Kohrt et al., 2018; Patel et al., 2018).

METODOLOGI

Untuk penulisan kepustakaan ini, penulis melakukan penelusuran literatur secara daring dalam kurun periode November 2024 hingga Januari 2025. Penelusuran dilakukan pada situs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ dan https://scholar.google.com/ dengan menggunakan kata kunci atau kombinasi kata kunci berikut: *gotong royong, dukungan, kesehatan mental,* dan *komunitas.*

Kriteria yang digunakan dalam memilih literatur yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

- Publikasi dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia,
- Dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir (2015-2024),
- Apabila jumlah publikasi terbatas, pencarian literatur diperluas dengan literatur yang terbit di luar sepuluh tahun terakhir, selama publikasi tersebut dirasa relevan,
- Naskah lengkapnya dapat diperoleh (bukan hanya abstrak).

Seluruh sumber literatur yang didapatkan kemudian dikaji dan disaring berdasarkan judul, metodologi penelitian, kemudian dilakukan kajian kritis untuk didapatkan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah referat ini.

HASIL

Gotong royong sebagai memori kolektif bangsa

Nilai gotong royong dalam budaya Jawa telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Secara etimologis, "*gotong*" berasal dari kata Jawa Kuno *gugat*, yang berarti mengangkat atau memindahkan, sedangkan "*royong*" berasal dari kata *rayung*, yang berarti bersama-sama. Penggabungan kedua kata ini mencerminkan konsep kerja kolektif yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan bersama. Dalam tradisi masyarakat agraris Jawa, nilai ini tumbuh sebagai respons terhadap kebutuhan hidup yang memerlukan kerja sama, seperti pengelolaan sawah, pembangunan irigasi, dan pelaksanaan upacara adat. Nilai gotong royong ini juga tercermin dalam berbagai serat klasik Jawa, seperti Serat Wulang Reh karya Sri Pakubuwono IV, yang mengajarkan bahwa tindakan utama dalam kehidupan

adalah berbuat baik kepada sesama dan berusaha mencapai kemakmuran bersama (Koentjaraningrat, 1993).

Selain itu, nilai gotong royong tidak hanya hadir dalam masyarakat Jawa, tetapi juga menjadi ciri khas masyarakat Austronesia, yang meliputi wilayah yang lebih luas. Dalam budaya kolektif ini, kerja sama dianggap sebagai cara bertahan hidup dalam komunitas yang sering kali harus menghadapi tantangan alam dan sosial. Pola kehidupan yang menekankan pentingnya gotong royong dapat ditemukan di berbagai budaya Austronesia, seperti *hui* di Filipina dan *mutual help* di Polinesia (Ricklefs, 2001). Tradisi ini menyatukan masyarakat dalam menjalankan kegiatan bersama, baik untuk kegiatan sehari-hari, seperti pertanian, maupun dalam menghadapi bencana atau perubahan sosial. Di Jawa, ini tercermin dalam tradisi sambatan dan rewang, di mana anggota masyarakat saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga atau acara adat, yang mempererat hubungan sosial dan memastikan keadilan ekonomi dalam komunitas (Pigeaud, 1967).

Pada masa perjuangan kemerdekaan, gotong royong menjadi salah satu elemen kunci dalam menyatukan masyarakat melawan penjajahan. Contohnya adalah kerja sama dalam memobilisasi logistik, persenjataan, dan strategi perang selama masa revolusi fisik. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, misalnya, mencerminkan gotong royong antara militer, pemimpin masyarakat, dan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa (Soeharto, 1989).

Memasuki masa modern, nilai gotong royong terus diterapkan dalam pembangunan nasional. Presiden Sukarno, dalam pidatonya tentang Pancasila pada 1 Juni 1945, menjadikan gotong royong sebagai inti sari nilai Pancasila. Beliau menegaskan bahwa "gotong royong" mencerminkan asas kebersamaan dan kerja kolektif demi kesejahteraan bersama. Nilai ini kemudian terintegrasi dalam berbagai kebijakan, seperti *program pembangunan desa*, koperasi, dan proyek infrastruktur nasional.

Filosofi gotong royong ini juga memiliki dimensi spiritual yang kuat dalam budaya Jawa. Dalam banyak ritual adat, seperti slametan, nilai gotong royong tidak hanya diterapkan dalam aspek material, tetapi juga dalam konteks memperkuat ikatan spiritual dengan leluhur dan alam. Masyarakat Jawa meyakini bahwa kebersamaan dalam melakukan sesuatu yang baik akan membawa kesejahteraan dan keberkahan bagi seluruh komunitas (Koentjaraningrat, 1993). Misalnya, dalam upacara slametan, masyarakat bekerja bersama untuk menyelenggarakan acara yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan alam dan sosial, yang dalam pandangan mereka akan membawa kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

Hingga saat ini, nilai ini tetap memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks, termasuk kesehatan mental dan kemiskinan. Dalam konteks ini, gotong royong dapat menjadi dasar untuk penyusunan berbagai upaya dalam mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan solidaritas dalam masyarakat untuk membantu individu yang mengalami gangguan jiwa (Ricklefs, 2001).

Gotong royong dalam perspektif kedokteran jiwa komunitas

Gotong royong adalah nilai budaya khas Indonesia yang dapat menjadi fondasi penting dalam kedokteran jiwa komunitas. Dalam konteks ini, gotong royong mencerminkan kerja kolektif yang bertujuan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan menangani masalah kesehatan jiwa secara menyeluruh. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan multidisiplin dalam kesehatan mental komunitas, di mana keterlibatan berbagai pihak seperti tenaga medis, keluarga, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal sangat diperlukan (Keliat et al., 2018). Selain sebagai mekanisme sosial, gotong royong juga menjadi alat untuk mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa dengan meningkatkan literasi kesehatan mental dan memberdayakan komunitas untuk mendukung individu yang mengalami masalah psikologis (Setyoadi & Kusumawati, 2021).

Implementasi nilai gotong royong dalam kedokteran jiwa komunitas dapat ditemukan dalam berbagai program berbasis masyarakat. Contohnya adalah Pos Kesehatan Jiwa Desa (Poskeswa), kelompok pendukung sebaya, dan kegiatan rehabilitasi berbasis komunitas. Pendekatan ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat untuk mendeteksi dini gangguan jiwa, mendukung proses pemulihan pasien, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Studi oleh Purnamasari et al. (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam program kesehatan mental berbasis desa dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan jiwa dan mempercepat reintegrasi pasien ke dalam masyarakat.

Nilai gotong royong juga menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya di bidang kesehatan mental, terutama di daerah yang minim akses layanan kesehatan. Di beberapa wilayah, masyarakat bekerja sama dengan tenaga medis dan pemerintah untuk mengembangkan layanan kesehatan berbasis komunitas, termasuk pembangunan pusat rehabilitasi sederhana dan pelatihan caregiver. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pengelolaan kesehatan mental (Utami et al.,

2019). Dengan cara ini, nilai gotong royong mendukung keberlanjutan layanan kesehatan jiwa meskipun sumber daya terbatas.

Melalui pendekatan berbasis gotong royong, kedokteran jiwa komunitas dapat menciptakan sistem kesehatan mental yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat reintegrasi pasien ke dalam masyarakat. Sebagai nilai budaya yang mendalam, gotong royong terus relevan dan dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan kesehatan jiwa di era modern.

Tahapan layanan kesehatan secara umum terdiri atas empat pendekatan utama: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Setiap tahap memiliki peran spesifik dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan individu maupun masyarakat.

1. Promotif

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kegiatan promotif melibatkan edukasi, kampanye kesehatan, dan penguatan perilaku hidup sehat. Contohnya adalah penyuluhan tentang pola makan sehat, pentingnya aktivitas fisik, atau kampanye literasi kesehatan jiwa. Dalam konteks kesehatan jiwa, tahap promotif dapat mencakup kegiatan yang mengurangi stigma terhadap gangguan mental dan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kesejahteraan emosional.

2. Preventif

Tahap preventif berfokus pada pencegahan penyakit atau gangguan sebelum muncul. Upaya ini mencakup tindakan untuk mengurangi risiko penyakit melalui imunisasi, skrining kesehatan, dan penyediaan lingkungan yang sehat. Dalam bidang kesehatan jiwa, tindakan preventif dapat berupa pelatihan untuk mendeteksi tanda awal gangguan mental, peningkatan akses ke layanan konseling, atau pembentukan komunitas pendukung untuk mengurangi risiko isolasi sosial.

3. Kuratif

Tahap ini berfokus pada pengobatan dan penyembuhan penyakit atau gangguan yang sudah terjadi. Layanan kuratif mencakup diagnosis, terapi, pengobatan medis, hingga tindakan bedah jika diperlukan. Dalam kesehatan jiwa, layanan kuratif meliputi terapi psikologis, penggunaan obat psikotropika, atau perawatan intensif untuk kondisi seperti depresi berat atau skizofrenia. Peran tenaga medis dan fasilitas kesehatan sangat dominan dalam tahap ini.

4. Rehabilitatif

Tahap rehabilitatif bertujuan untuk mengembalikan fungsi individu secara optimal setelah mengalami penyakit atau gangguan. Dalam konteks kesehatan jiwa, layanan rehabilitatif mencakup terapi okupasi, program reintegrasi sosial, dan dukungan kerja bagi individu dengan gangguan mental. Pendekatan ini membantu pasien untuk kembali menjalankan perannya dalam masyarakat dengan percaya diri dan kemandirian.

Keempat tahapan ini saling terkait dan membentuk sistem layanan kesehatan yang komprehensif. Implementasi yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat.

- Upaya Promotif Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas dengan Nilai Gotong Royong

Upaya promotif kesehatan jiwa berbasis komunitas menekankan pada pencegahan masalah mental melalui edukasi, peningkatan kesadaran, dan penguatan solidaritas masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai gotong royong, masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam mendukung kesejahteraan mental, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan mencegah diskriminasi terhadap individu dengan masalah kesehatan jiwa. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks Indonesia, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam komunitas lokal.

Salah satu implementasi nilai gotong royong dalam upaya promotif adalah penyelenggaraan program literasi kesehatan mental berbasis komunitas. Program ini melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan organisasi lokal untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Sebagai contoh, kegiatan seperti seminar, penyuluhan, atau pelatihan untuk mengenali gejala gangguan jiwa dapat dilakukan secara kolektif. Penelitian oleh Kusuma et al. (2021) menunjukkan bahwa edukasi berbasis budaya lokal yang melibatkan tokoh masyarakat efektif dalam meningkatkan pemahaman kesehatan mental di daerah pedesaan.

Selain itu, gotong royong dapat diterapkan melalui kegiatan komunitas seperti pengajian, arisan, atau kegiatan olahraga bersama yang dirancang untuk memperkuat hubungan sosial. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan emosional individu, tetapi juga menciptakan jejaring dukungan sosial yang dapat mencegah isolasi, salah satu faktor risiko utama gangguan jiwa. Studi Purnamasari et al. (2020) menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan kolektif berkontribusi pada pengurangan stigma dan peningkatan solidaritas komunitas terhadap isu kesehatan jiwa.

Penyelenggaraan kampanye anti-stigma juga merupakan bentuk promotif yang berbasis gotong royong. Dalam pendekatan ini, komunitas dapat bekerja sama untuk mengurangi diskriminasi terhadap individu dengan gangguan jiwa melalui dialog terbuka, seni, atau pertunjukan budaya

yang mengangkat tema kesehatan mental. Kampanye ini dapat memperkuat kepercayaan diri individu yang mengalami masalah kesehatan jiwa, sekaligus meningkatkan rasa empati masyarakat (Setyoadi & Kusumawati, 2021).

Secara keseluruhan, upaya promotif kesehatan jiwa berbasis komunitas dengan nilai gotong royong menawarkan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari solusi, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik tentang kesehatan mental, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Nilai gotong royong yang mendasari upaya ini menjadikannya relevan dan efektif dalam menciptakan sistem kesehatan jiwa yang berbasis komunitas.

- Upaya Preventif Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas dengan Nilai Gotong Royong

Upaya preventif kesehatan jiwa bertujuan mencegah munculnya gangguan mental melalui **identifikasi dini, pengurangan risiko,** dan **pembentukan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental**. Dalam pendekatan berbasis komunitas, nilai gotong royong memainkan peran penting untuk menciptakan solidaritas dan mendukung individu rentan terhadap gangguan jiwa. Gotong royong memungkinkan masyarakat untuk secara kolektif menangani faktor risiko kesehatan mental, seperti isolasi sosial, tekanan ekonomi, dan akses terbatas ke layanan kesehatan.

1. Pembentukan Kelompok Dukungan Psikososial

Komunitas dapat membentuk kelompok dukungan psikososial yang berbasis nilai gotong royong, di mana anggota saling membantu melalui berbagi pengalaman dan memberi dukungan emosional. Sebagai contoh, di Yogyakarta, kelompok warga dapat secara rutin menyelenggarakan kegiatan diskusi kelompok kecil yang fokus pada pengelolaan stres dan teknik relaksasi. Studi Purnamasari et al. (2020) menunjukkan bahwa kelompok dukungan berbasis komunitas mampu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan rasa kebermaknaan hidup anggota kelompok.

2. Edukasi dan Pelatihan Deteksi Dini

Edukasi komunitas yang melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal dapat membantu deteksi dini gejala gangguan jiwa. Contohnya, penyuluhan kepada masyarakat tentang tanda awal depresi atau kecemasan dapat mendorong individu untuk mencari bantuan lebih cepat. Selain itu, pelatihan bagi relawan lokal untuk memberikan pertolongan pertama psikologis memperkuat jaringan perlindungan mental di masyarakat. Kusuma et al. (2021)

mencatat bahwa program pelatihan berbasis nilai budaya lokal lebih efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan mental.

3. Penciptaan Ruang Aman dan Inklusif

Ruang-ruang komunitas seperti balai desa atau pusat kegiatan warga dapat dijadikan tempat untuk membangun interaksi sosial yang positif. Aktivitas seperti olahraga bersama, seni, atau kegiatan budaya lainnya dapat membantu individu mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan hubungan sosial. Hal ini penting untuk mencegah isolasi sosial, yang sering menjadi pemicu gangguan mental.

Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks kesehatan jiwa, tetapi juga membangun modal sosial yang kuat di masyarakat. Dengan kolaborasi berbagai pihak, seperti pemerintah, tenaga kesehatan, dan komunitas, nilai gotong royong dapat menjadi pilar utama dalam pencegahan gangguan jiwa yang berkelanjutan.

- Upaya Kuratif Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas dengan Nilai Gotong Royong

Upaya kuratif kesehatan jiwa berbasis komunitas melibatkan **tindakan pengobatan dan pemulihan individu yang sudah mengalami gangguan mental**, dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk implementasi nilai gotong royong. Pendekatan ini berfokus pada **kolaborasi antara layanan kesehatan formal dan dukungan komunitas** untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pemulihan pasien jiwa.

1. Pengelolaan Kasus oleh Tim Kesehatan dan Komunitas

Dalam pendekatan kuratif berbasis komunitas, tim kesehatan seperti tenaga medis dan pekerja sosial bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mendukung pasien dalam proses pengobatan. Contohnya adalah program pendampingan bagi pasien gangguan jiwa berat dengan kontribusi kader kesehatan, keluarga, dan tetangga guna memastikan pasien mengikuti program terapi dan minum obat secara teratur. Menurut penelitian Setyoadi & Kusumawati (2021), pendekatan berbasis komunitas ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien dengan skizofrenia.

2. Reintegrasi Sosial Melalui Program Produktif Komunitas

Nilai gotong royong juga diwujudkan dalam program reintegrasi sosial yang melibatkan pasien dalam kegiatan produktif berbasis komunitas. Misalnya, kelompok tani atau koperasi lokal dapat mengintegrasikan pasien jiwa yang sudah stabil ke dalam aktivitas ekonomi komunitas. Dengan dukungan warga, pasien dapat merasa diterima dan memiliki kontribusi dalam

masyarakat. Studi Purnamasari et al. (2020) mencatat bahwa program berbasis aktivitas kolektif ini mengurangi tingkat stigma sekaligus meningkatkan rasa percaya diri pasien.

3. Dukungan Emosional dan Pemantauan Berkelanjutan

Komunitas dapat menyediakan dukungan emosional melalui kelompok dukungan yang melibatkan keluarga dan teman pasien. Relawan lokal juga dapat dilatih untuk memantau kondisi pasien, memberikan laporan kepada tenaga kesehatan jika terdapat tanda-tanda kekambuhan, dan membantu pasien mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan. Hal ini membangun jejaring sosial yang kokoh dan mengurangi risiko pengabaian pasien.

Dengan pendekatan berbasis nilai gotong royong, pengobatan tidak hanya bergantung pada institusi medis, tetapi juga pada kekuatan solidaritas komunitas. Strategi ini memungkinkan pasien untuk menerima perawatan yang berkelanjutan sekaligus mendorong inklusi sosial mereka dalam masyarakat.

- Upaya Rehabilitatif Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas dengan Nilai Gotong Royong

Upaya rehabilitatif dalam kesehatan jiwa bertujuan memulihkan fungsi sosial, emosional, dan ekonomi pasien yang telah mengalami gangguan mental, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat. Dalam pendekatan berbasis komunitas, nilai gotong royong menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan pasien secara menyeluruh.

1. Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Komunitas

Nilai gotong royong diwujudkan melalui program rehabilitasi sosial, di mana komunitas membantu pasien jiwa untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Contohnya adalah kelompok usaha bersama atau koperasi yang melibatkan pasien dalam kegiatan produktif seperti kerajinan, pertanian, atau pengelolaan usaha kecil. Studi Utami et al. (2019) menunjukkan bahwa program berbasis aktivitas kolektif ini meningkatkan rasa percaya diri pasien dan mengurangi risiko kekambuhan. Dengan dukungan komunitas, pasien merasa diterima dan kembali memiliki peran di masyarakat.

2. Dukungan Psikososial dan Pendampingan Jangka Panjang

Komunitas dapat berperan dalam menyediakan dukungan psikososial melalui kelompok dukungan atau program mentoring. Relawan lokal atau kader kesehatan bekerja sama dengan tenaga profesional untuk memberikan pendampingan jangka panjang bagi pasien, termasuk pemantauan kondisi emosional, membantu mereka dalam mencari pekerjaan, dan melibatkan keluarga dalam proses pemulihan. Pendekatan ini membangun jejaring dukungan yang

membantu pasien menjalani hidup yang lebih mandiri dan bermakna (Setyoadi & Kusumawati, 2021).

3. Pemanfaatan Kearifan Lokal dalam Rehabilitasi

Gotong royong juga tercermin dalam pemanfaatan kearifan lokal yang mendukung pemulihan kesehatan jiwa. Misalnya, tradisi berkumpul di balai desa atau kegiatan budaya seperti kesenian dan olahraga bersama dapat menjadi sarana rehabilitasi sosial yang inklusif. Aktivitas ini memperkuat hubungan sosial sekaligus mengurangi stigma terhadap pasien jiwa. Kusuma et al. (2021) mencatat bahwa pendekatan berbasis budaya lokal dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan kesejahteraan mental pasien.

Dengan pendekatan berbasis komunitas yang berlandaskan nilai gotong royong, proses rehabilitasi tidak hanya melibatkan pasien, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif, mendukung keberlanjutan pemulihan, serta mendorong pasien agar kembali berdaya, sebagai bagian aktif dalam komunitasnya.

Integrasi layanan kesehatan jiwa masyarakat berbentuk sistem

Penerapan sistem kesehatan jiwa berbasis komunitas dengan semangat gotong royong mengintegrasikan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini memanfaatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan layanan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi pasien. Sistem ini menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan institusi lokal.

Model berbasis klaster komunitas dapat membagi masyarakat menjadi kelompok kecil seperti RT/RW atau desa. Setiap klaster memiliki tim penggerak yang terdiri dari kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan tenaga medis untuk mengelola edukasi kesehatan jiwa, deteksi dini, pendampingan pasien, dan program rehabilitasi lokal. Studi menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas seperti ini berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan mental di pedesaan (Utami et al., 2019; Tjandrarini et al., 2020).

Penggunaan platform digital berbasis komunitas dapat mendukung penyebaran informasi, pemantauan kondisi pasien, dan pelaporan kebutuhan bantuan. Misalnya, aplikasi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat terhubung dengan tenaga kesehatan profesional telah terbukti meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan mental berbasis komunitas (Purnamasari et al., 2020; WHO, 2021).

Pelatihan relawan lokal menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan sistem ini. Relawan dilatih untuk memberikan pertolongan pertama psikologis, mendampingi pasien, dan memfasilitasi program kesehatan mental berbasis masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Setyoadi dan Kusumawati (2021) serta Mulder et al. (2021) menunjukkan bahwa pelibatan relawan terlatih dapat mengurangi stigma, meningkatkan literasi kesehatan mental, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

Program rehabilitasi berbasis lokal memanfaatkan potensi budaya dan ekonomi setempat. Pasien dapat dilibatkan dalam kegiatan produktif seperti usaha bersama atau seni budaya. Rehabilitasi berbasis komunitas ini tidak hanya mempercepat pemulihan tetapi juga mendorong reintegrasi sosial pasien. Pendekatan ini mengurangi stigma sosial terhadap pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Tjandrarini et al., 2020; Subandi et al., 2021).

Manfaat implementasi nilai gotong royong

Integrasi nilai gotong royong dalam program pelayanan kesehatan jiwa memberikan dampak signifikan pada dimensi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pendekatan ini selaras dengan tujuan meningkatkan inklusivitas, mengurangi stigma, dan memastikan keberlanjutan melalui kekuatan kolaborasi komunitas.

1. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Jiwa

Sifat kolektif dari gotong royong mengurangi hambatan akses terhadap layanan kesehatan jiwa, terutama di wilayah terpencil atau kurang terlayani. Inisiatif berbasis komunitas memberdayakan pemimpin lokal, pekerja kesehatan, dan relawan untuk menyebarkan informasi kesehatan jiwa serta menyediakan layanan dasar di lingkungan sekitar. Dengan demikian, individu dari berbagai lapisan sosial ekonomi dapat mengakses sumber daya kesehatan jiwa secara setara. Misalnya, kampanye kesehatan yang difasilitasi oleh relawan terlatih meningkatkan deteksi dini dan intervensi tepat waktu, sehingga mengurangi beban pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut (Utami et al., 2019; WHO, 2021).

2. Mengurangi Stigma dan Diskriminasi

Penerapan gotong royong menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran bersama dalam menangani tantangan kesehatan jiwa, sehingga mendukung normalisasi diskusi tentang isu ini. Upaya kolektif ini mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering dialami oleh individu dengan gangguan kesehatan jiwa. Program berbasis komunitas, seperti kelompok dukungan dan lokakarya edukasi, menciptakan ruang untuk dialog terbuka. Platform ini mendorong

pemahaman, mengurangi bias, dan membangun penerimaan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, upaya tersebut menghasilkan pergeseran budaya di mana isu kesehatan jiwa tidak lagi dianggap sebagai kegagalan individu, melainkan tantangan bersama (Setyoadi & Kusumawati, 2021).

3. Memperkuat Jejaring Dukungan Sosial

Jaringan dukungan sosial sangat penting bagi individu yang sedang dalam pemulihan dari masalah kesehatan jiwa, karena memberikan stabilitas emosional dan bantuan praktis. Melalui gotong royong, anggota komunitas berpartisipasi aktif dalam perawatan dan rehabilitasi. Pasien mendapatkan dukungan emosional yang konsisten, mengurangi rasa terisolasi, dan meningkatkan rasa memiliki. Jejaring ini juga berfungsi sebagai penyangga terhadap stresor, sehingga mengurangi kemungkinan kambuh. Selain itu, jejaring yang kuat juga memudahkan ketika terjadi peningkatan gejala, sehingga pasien bisa memperoleh penatalaksanaan lebih lanjut pada fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas dengan kohesi sosial yang kuat memiliki hasil kesehatan yang lebih baik dan tingkat tekanan psikologis yang lebih rendah (Purnamasari et al., 2020).

4. Memberdayakan Komunitas Lokal

Salah satu hasil paling signifikan dari gotong royong adalah pemberdayaan komunitas lokal untuk menangani masalah kesehatan jiwa. Program pelatihan untuk pemimpin lokal, relawan, dan pengasuh meningkatkan kapasitas mereka dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mendukung masalah kesehatan jiwa di komunitas mereka. Individu yang terlatih ini bertindak sebagai garis pertahanan pertama, menjembatani kesenjangan antara komunitas dan tenaga kesehatan profesional. Pendekatan berbasis lokal ini mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan memastikan sistem kesehatan jiwa yang lebih mandiri (Mulder et al., 2021).

5. Membangun Sistem Kesehatan Jiwa yang Berkelanjutan

Model gotong royong mengintegrasikan inisiatif kesehatan jiwa ke dalam struktur komunitas yang sudah ada, sehingga memastikan keberlanjutan jangka panjang. Tanggung jawab yang dibagi di antara pemangku kepentingan—seperti tenaga kesehatan, pemimpin lokal, dan keluarga—mendistribusikan beban kerja dan biaya secara merata. Kepemilikan komunitas terhadap program kesehatan jiwa mendorong akuntabilitas dan kesinambungan, bahkan tanpa adanya pendanaan eksternal. Selain itu, mengintegrasikan praktik tradisional dan nilai budaya dalam intervensi meningkatkan penerimaan dan efektivitas program (Tjandrarini et al., 2020).

6. Dampak Ekonomi

Integrasi nilai gotong royong juga membawa dampak ekonomi yang positif. Dengan mengurangi ketergantungan pada perawatan berbasis rumah sakit dan intervensi eksternal, program kesehatan jiwa berbasis komunitas dapat menurunkan biaya layanan kesehatan. Langkah preventif, seperti deteksi dini dan edukasi, mengurangi prevalensi gangguan kesehatan jiwa berat yang memerlukan perawatan mahal.

Selain itu, program rehabilitasi yang melibatkan pasien dalam aktivitas produktif, seperti usaha komunitas atau pelatihan keterampilan, meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Sebagai contoh, pasien skizofrenia yang sudah stabil dapat berkontribusi pada perekonomian lokal melalui usaha kecil, pertanian, atau kerajinan tangan. Inisiatif seperti ini tidak hanya mengurangi beban ekonomi pada keluarga dan komunitas, tetapi juga memulihkan martabat dan tujuan hidup pasien (Purnamasari et al., 2020; Subandi et al., 2021).

Pada tingkat makroekonomi, peningkatan kesehatan jiwa berdampak pada peningkatan produktivitas dan partisipasi tenaga kerja. Penanganan isu kesehatan jiwa yang efektif mengurangi ketidakhadiran kerja dan kehadiran non-produktif, yang keduanya memiliki biaya ekonomi substansial. Penelitian WHO (2021) menunjukkan bahwa investasi dalam kesehatan jiwa menghasilkan pengembalian sebesar $4 untuk setiap $1 yang diinvestasikan, terutama melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya layanan kesehatan.

Integrasi nilai gotong royong dalam program layanan kesehatan jiwa menciptakan sistem holistik yang mengatasi dimensi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Hasil yang dicapai meliputi peningkatan aksesibilitas, pengurangan stigma, penguatan jaringan sosial, dan pemberdayaan komunitas. Secara ekonomi, pendekatan ini menurunkan biaya layanan kesehatan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemandirian ekonomi pasien. Dengan menyelaraskan inisiatif kesehatan jiwa dengan nilai budaya lokal dan memanfaatkan kolaborasi komunitas, gotong royong memberikan model yang berkelanjutan untuk meningkatkan hasil kesehatan jiwa di Indonesia dan sekitarnya.

DISKUSI

Integrasi nilai gotong royong ke dalam layanan kesehatan jiwa merupakan peluang transformasi yang dapat mengatasi tantangan kesehatan mental melalui pendekatan berbasis komunitas. Namun, implementasi pendekatan ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang bersumber dari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan sistemik. Tantangan utama meliputi stigma terhadap gangguan jiwa, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta pengaruh dinamika sosial individualistik yang semakin berkembang.

Stigma terhadap Gangguan Jiwa

Salah satu hambatan terbesar dalam mengintegrasikan gotong royong dalam layanan kesehatan jiwa adalah stigma terhadap gangguan jiwa. Di banyak masyarakat, termasuk Indonesia, gangguan jiwa sering kali dianggap sebagai kelemahan atau akibat dari kesalahan moral maupun spiritual. Keyakinan budaya yang menghubungkan gangguan jiwa dengan penyebab supranatural, seperti kerasukan atau kutukan, semakin memperparah kondisi ini. Akibatnya, individu dengan gangguan jiwa sering kali mengalami pengucilan sosial, diskriminasi, dan penilaian negatif dari komunitasnya.

Stigma ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengalami gangguan jiwa, tetapi juga pada keluarga mereka, yang sering kali mengalami isolasi sosial akibat asosiasi dengan kondisi tersebut. Dalam kerangka gotong royong, stigma ini dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam inisiatif kesehatan jiwa. Banyak orang enggan terlibat karena takut dianggap mendukung sesuatu yang dianggap tabu atau tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk memberikan dukungan. Oleh karena itu, edukasi dan kampanye kesadaran yang luas menjadi penting untuk mengurangi stigma ini, mempromosikan diskusi terbuka, dan menyoroti manfaat pendekatan kolaboratif.

Strategi pengurangan stigma yang efektif mencakup pendekatan yang sensitif secara budaya, seperti menggunakan cerita, dialog komunitas, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang dihormati. Misalnya, melibatkan pemuka agama dalam program edukasi kesehatan jiwa dapat menjembatani kesenjangan antara keyakinan tradisional dan pemahaman ilmiah, sehingga mendorong penerimaan dan partisipasi yang lebih luas (Setyoadi & Kusumawati, 2021).

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan menjadi tantangan krusial yang memengaruhi keberlanjutan layanan kesehatan jiwa berbasis gotong royong. Indonesia, seperti banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya, menghadapi kekurangan signifikan tenaga profesional kesehatan jiwa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terdapat kurang dari 1 psikiater dan 1 psikolog per 100.000 penduduk di Indonesia, jauh di bawah rekomendasi global (WHO, 2021).

Dalam inisiatif kesehatan jiwa berbasis komunitas, keterbatasan ini menyebabkan banyak tanggung jawab jatuh pada relawan, pengasuh informal, dan anggota komunitas yang tidak terlatih. Meski semangat gotong royong mendorong aksi kolektif, hal ini tidak dapat menggantikan keahlian yang dibutuhkan untuk menangani kondisi kesehatan jiwa yang kompleks. Tanpa pelatihan yang memadai, para individu ini mungkin kesulitan memberikan dukungan yang efektif, sehingga menciptakan kesenjangan dalam layanan.

Dari sisi keuangan, keterbatasan anggaran menjadi kendala yang signifikan. Meski gotong royong dapat mengurangi biaya melalui usaha bersama, pelaksanaan program yang berkelanjutan tetap membutuhkan pendanaan untuk pelatihan, fasilitas, obat-obatan, dan kegiatan penyuluhan. Anggaran pemerintah untuk layanan kesehatan jiwa masih terbatas, dengan alokasi kurang dari 2% dari total pengeluaran kesehatan (Tjandrarini et al., 2020). Kekurangan ini membatasi skala dan keberlanjutan inisiatif berbasis komunitas, membuat banyak program bergantung pada hibah jangka pendek atau pendanaan eksternal.

Mengatasi tantangan ini membutuhkan solusi inovatif, termasuk kemitraan publik-swasta, mobilisasi sumber daya lokal, dan integrasi kesehatan jiwa ke dalam program kesehatan dan sosial yang sudah ada. Misalnya, memanfaatkan infrastruktur kesehatan komunitas yang sudah ada, seperti Posyandu, dapat meningkatkan pelayanan tanpa memerlukan investasi tambahan yang besar.

Dinamika Sosial Individualistik

Perubahan menuju individualisme, terutama di perkotaan, menjadi tantangan signifikan lainnya dalam mengintegrasikan nilai gotong royong dalam layanan kesehatan jiwa. Urbanisasi, globalisasi, dan tekanan ekonomi telah menyebabkan erosi nilai-nilai komunal tradisional, karena masyarakat semakin memprioritaskan kesuksesan pribadi dan kemandirian dibandingkan kesejahteraan kolektif. Perubahan ini menyebabkan lemahnya ikatan sosial dan berkurangnya keterlibatan komunitas, yang merupakan elemen penting bagi keberhasilan model gotong royong.

Di daerah perkotaan, gaya hidup yang serba cepat dan kompetisi untuk stabilitas ekonomi sering kali mengurangi ruang untuk keterlibatan komunitas. Individu cenderung lebih memilih layanan kesehatan jiwa profesional, seperti terapi privat, dibandingkan pendekatan berbasis komunitas karena pertimbangan kerahasiaan, kenyamanan, atau kualitas layanan yang dirasakan. Dinamika ini menantang kelangsungan inisiatif kesehatan jiwa kolektif, terutama dalam mendorong rasa tanggung jawab bersama yang menjadi inti gotong royong.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengadaptasi prinsip gotong royong ke dalam dinamika sosial modern. Pemanfaatan teknologi dan media sosial dapat memfasilitasi komunitas virtual yang mendorong kolaborasi dan dukungan. Misalnya, kelompok dukungan online dan forum kesehatan jiwa dapat menciptakan ruang bagi individu untuk terhubung, berbagi pengalaman, dan mengakses sumber daya, bahkan di lingkungan yang urban atau individualistik (Mulder et al., 2021).

Integrasi nilai gotong royong dalam layanan kesehatan jiwa menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks. Meskipun stigma, keterbatasan sumber daya, dan dinamika sosial individualistik menjadi hambatan utama, solusi berbasis edukasi, pengembangan kapasitas, pendanaan berkelanjutan, dan adaptasi nilai tradisional ke dalam dinamika modern dapat mengatasi kendala ini. Selain meningkatkan hasil kesehatan jiwa, pendekatan ini juga memiliki manfaat ekonomi yang signifikan, seperti pengurangan biaya kesehatan dan peningkatan produktivitas. Dengan mengadopsi prinsip gotong royong, masyarakat dapat membangun sistem kesehatan jiwa yang inklusif, berkelanjutan, dan efektif.

KESIMPULAN

Gotong royong sebagai sebuah nilai budaya memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan kearifan lokal dengan program kesehatan mental. Pendekatan ini memungkinkan penciptaan sistem yang lebih holistik dan inklusif karena didasarkan pada prinsip solidaritas, kerja sama, dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks Yogyakarta, nilai gotong royong sejalan dengan semangat budaya Jawa yang mengedepankan harmoni sosial dan kebersamaan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam program kesehatan mental, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktif terlibat sebagai pelaku dalam mendukung individu dengan masalah kesehatan jiwa. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih suportif, di mana pasien dapat menerima dukungan sosial yang stabil dari keluarga, tetangga, dan komunitasnya.

Namun, implementasi nilai gotong royong dalam program kesehatan mental menghadapi berbagai tantangan. Stigma sosial terhadap gangguan jiwa tetap menjadi salah satu hambatan utama. Banyak individu yang mengalami gangguan mental dihindari atau dianggap tabu oleh masyarakat, yang dapat menghambat partisipasi aktif komunitas dalam program kesehatan mental. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga kesehatan profesional maupun pendanaan, membuat banyak program bergantung pada relawan komunitas atau kader kesehatan. Relawan ini sering kali tidak memiliki pelatihan yang memadai, sehingga menciptakan kesenjangan dalam kualitas layanan.

Selain itu, kesenjangan koordinasi antara layanan medis formal dan komunitas menjadi masalah lain. Layanan medis formal sering kali tidak memiliki mekanisme untuk melibatkan komunitas secara aktif dalam mendukung pasien. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesinambungan antara intervensi klinis dan dukungan berbasis komunitas. Beban kerja yang tinggi pada kader kesehatan, yang biasanya menjalankan banyak peran di masyarakat, juga memperburuk situasi ini. Beban ini dapat menyebabkan kelelahan dan menurunkan efektivitas mereka dalam mendukung pasien dengan masalah kesehatan jiwa.

Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan strategi yang terpadu. Edukasi masyarakat adalah langkah pertama yang penting untuk meningkatkan literasi kesehatan mental dan mengurangi stigma. Program pendidikan harus dirancang secara inklusif dan menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal. Misalnya, cerita atau kisah yang relevan secara budaya dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan mental secara efektif. Penguatan koordinasi antar pihak terkait, termasuk layanan kesehatan formal, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, diperlukan untuk memastikan kesinambungan layanan. Pelibatan pemimpin komunitas atau tokoh adat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga dapat meningkatkan efektivitas koordinasi ini.

Dukungan yang lebih baik kepada relawan komunitas, seperti melalui pelatihan dan insentif yang memadai, juga menjadi kunci untuk keberhasilan program berbasis gotong royong. Relawan yang merasa dihargai dan dilengkapi dengan keterampilan yang tepat akan lebih termotivasi dan mampu memberikan dukungan yang berkualitas. Selain itu, program kesehatan mental berbasis komunitas juga harus disertai dengan upaya advokasi kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pengembangan layanan kesehatan mental berbasis masyarakat.

Dengan strategi-strategi tersebut, gotong royong dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan sistem kesehatan mental berbasis komunitas yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal di Yogyakarta. Sistem ini tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mental, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan suportif bagi semua anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. R. (1972). Java in a time of revolution: Occupation and resistance, 1944–1946. Cornell University Press.

Cribb, R. (2011). The Indonesian killings of 1965–1966: Studies from Java and Bali. KITLV Press.

Jacob, K. S., Sharan, P., Mirza, I., Garrido-Cumbrera, M., Seedat, S., Mari, J. J., & Saxena, S. (2020). Mental health systems in countries: Where are we now? The Lancet, 382(9907), 1586-1596.

Keliat, B. A., Nurhaeni, N., & Helmi, A. F. (2018). Community mental health nursing model to increase family ability to treat people with mental disorder. International Journal of Nursing Science Practice and Research, 4(1), 12–18.

Koentjaraningrat. (2009). Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan. Gramedia Pustaka Utama.

Kohrt, B. A., Mendenhall, E., et al. (2018). Advancing community mental health using global frameworks. Annual Review of Public Health, 39, 215-230.

Kusuma, A., Subandi, M. A., & Utami, R. A. (2021). Role of local wisdom in improving mental health literacy in rural areas: A qualitative study. Journal of Community Mental Health, 5(3), 142–152.

Mulder, N., Davidson, G., & Ellis, R. (2021). Community-based mental health care: Strengthening support networks for vulnerable populations. Global Mental Health Review, 9(2), 230–245.

Patel, V., Saxena, S., Lund, C., et al. (2018). The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. The Lancet, 392(10157), 1553-1598.

Pigeaud, T. G. (1967). Java in the 14th century: A study in cultural history. The Hague: Martinus Nijhoff.

Purnamasari, S. D., Hartini, T., & Wijayanti, D. (2020). The role of community participation in enhancing access to mental health services in rural Indonesia. Asian Journal of Psychiatry, 50(3), 101–110.

Reid, A. (1988). *Southeast Asia in the age of commerce, 1450–1680: Volume One, The Lands Below the Winds*. New Haven: Yale University Press.

Reid, A. (2014). The blood of the people: Revolution and the end of traditional rule in northern Sumatra. NUS Press.

Ricklefs, M. C. (2001). A history of modern Indonesia since c. 1200. Stanford: Stanford University Press.

Setyoadi, A., & Kusumawati, A. (2021). Addressing mental health stigma through community empowerment: Lessons from Indonesia. Global Public Health, 16(4), 455–468.

Subandi, M. A., Utami, R. A., & Hardjono, S. (2021). Local cultural interventions for mental health recovery in Indonesian communities. Asian Journal of Mental Health, 11(1), 45–62.

Thornicroft, G., Deb, T., & Henderson, C. (2016). Community mental health care worldwide: Current status and future directions. *World Psychiatry*, 15(3), 276-286. https://doi.org/10.1002/wps.20349.

Tjandrarini, D. H., Astari, R., & Wijayanti, A. (2020). Mental health services in Indonesian primary care: Challenges and opportunities. International Journal of Public Health, 65(5), 720–730.

Utami, R. A., Subandi, M. A., & Hardjono, S. (2019). Development of a community-based rehabilitation model for chronic mental illness in Indonesia. Indonesian Journal of Mental Health, 8(2), 97–105.

World Health Organization (WHO). (2021). Community-based mental health care: Global perspectives and practices. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2021). Mental health atlas 2020. Geneva: WHO.

Biografi Penulis Utama

dr. Bayu Adiputro, MARS

Lahir di Jakarta, dr. Bayu adalah seorang residen psikiatri (kedokteran jiwa) di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM), Yogyakarta. Dengan latar belakang pendidikan sebagai dokter dari Universitas Trisakti dan gelar magister administrasi rumah sakit (MARS) dari Universitas Respati Indonesia, ia memiliki menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan kesehatan mental berbasis komunitas dan budaya.

Minatnya meliputi psikiatri komunitas, psikiatri budaya, kesehatan mental dalam kehidupan urban, serta dukungan psikologis bagi pasien dengan populasi khusus Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Dalam praktik dan penelitian, ia fokus pada pendekatan holistik yang mempertimbangkan kearifan lokal, seperti tradisi slametan dan ritual adat di tengah tantangan kesehatan mental di lingkungan perkotaan yang kompleks.

Sebagai profesional yang peduli pada kesejahteraan psikologis, ia aktif menggali cara-cara inovatif untuk mendukung individu dan komunitas menghadapi tekanan sosial dan stigma. Di tengah kesibukannya, ia juga berbagi wawasan melalui media sosial untuk meningkatkan literasi kesehatan mental masyarakat luas melalui media sosial instagram dengan akun @mindinthecity.id

Dengan perpaduan pengalaman klinis, akademis, dan komitmen pada isu-isu lintas budaya, ia terus berkontribusi dalam menciptakan pendekatan psikiatri yang relevan, inklusif, berwawasan kebudayaan, serta berbasis komunitas.

Hibriditas Budaya dalam Serial Netflix Gadis Kretek: Menelusuri Perubahan Sosial dalam Konteks Globalisasi

Cysakaren Diva Pratiwi
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Indonesia
cysakaren.divapratiwi-2021@fib.unair.ac.id

BIOGRAFI PENULIS:

Cysakaren Diva Pratiwi adalah seorang mahasiswi *fast track* S2 di Program Studi Magister Kajian Sastra dan Budaya, Universitas Airlangga yang memiliki pengalaman dalam *Public Speaking,* keterampilan organisasi dan acara, serta menguasai beberapa bahasa asing (Inggris, Korea, Jepang). Dilahirkan di Surabaya pada 22 Januari 2003, gadis yang akrab disapa Karen ini aktif sebagai pewara, penulis, peneliti, dan pengajar Bahasa Inggris. Memiliki sebuah komunitas bernama *The Spirit of Bahasa.* yang bertujuan untuk mengajarkan Bahasa dan Kebudayaan Indonesia kepada Warga Negeri Asing (WNA).

1. PENGANTAR

Pola hidup masyarakat saat ini sangat berbeda dengan pola hidup di masa lalu, hal ini disebabkan oleh pengaruh arus globalisasi yang juga memerlukan penanganan yang lebih efektif (Nahak, H. M., 2019). Selain itu, globalisasi juga membawa dampak berupa perkembangan teknologi canggih yang sangat mendukung aktivitas manusia. Globalisasi menghadirkan berbagai tantangan dan masalah baru yang perlu dihadapi dan diselesaikan dalam usaha memanfaatkan globalisasi untuk kemajuan kehidupan (Musa, M. I., 2017). Sebagai sebuah istilah, globalisasi dengan cepat diterima dan dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia. Proses globalisasi ditandai oleh kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan perubahan besar di dunia. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam dimensi budaya. Proses globalisasi ini tidak hanya memengaruhi ekonomi dan politik, tetapi juga struktur sosial dan identitas budaya lokal. Di Indonesia, perubahan ini terlihat jelas dalam cara masyarakat berinteraksi dengan budaya global yang datang melalui berbagai

media, termasuk film dan serial televisi. Salah satu fenomena menarik dalam hal ini adalah bagaimana serial televisi, seperti *Gadis Kretek* yang diproduksi oleh Netflix, menggambarkan proses hibriditas budaya sebagai respons terhadap pengaruh globalisasi.

Gadis Kretek adalah serial web asal Indonesia yang dirilis pada tahun 2023, hasil produksi dari BASE Entertainment dan Fourcolours Films. Serial ini ditayangkan di Netflix, sebuah layanan penayangan film dan serial yang berbasis di Amerika Serikat dan berskala internasional. Serial ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, disutradarai oleh Kamila Andini dan Ifa Isfansyah, serta dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Ario Bayu, Arya Saloka, dan Putri Marino. Cerita ini berfokus pada kisah hidup seorang gadis muda yang terjerat dalam dunia kretek, serial ini menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dan budaya lokal berhadapan dengan pengaruh budaya global yang semakin dominan. Serial ini juga memuat unsur-unsur budaya global yang membentuk kehidupan sosial dan karakter-karakter di dalamnya. Dalam konteks ini, *Gadis Kretek* tidak hanya berfungsi sebagai karya fiksi, tetapi juga sebagai refleksi dari fenomena sosial yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu pertemuan antara budaya lokal dan budaya global yang saling memengaruhi dan berinteraksi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses hibriditas budaya serta perubahan sosial dalam konteks tersebut. Penelitian ini mengadopsi teori hibriditas budaya dari Homi K. Bhabha sebagai dasar untuk menganalisis interaksi antara elemen-elemen budaya Indonesia dan global dalam *Gadis Kretek*. Homi K. Bhabha, sebagai seorang kritikus sastra dan budaya, memiliki konsep "Ruang Ketiga" yang memberikan kerangka yang penting untuk memahami sifat hibriditas identitas budaya dalam konteks global. Bhabha menyatakan bahwa hibriditas budaya muncul di area peralihan ini, di mana berbagai budaya saling bertemu dan berinteraksi, yang pada akhirnya menghasilkan terbentuknya identitas-identitas hibrid baru (Aanayo, C., 2023). Salah satu cara signifikan globalisasi mempengaruhi hibriditas budaya adalah melalui penyebaran media global. Penyebaran televisi, film, dan internet memungkinkan transmisi cepat produk budaya melintasi batas-batas negara, membentuk persepsi dan preferensi. Produk budaya Barat, khususnya, telah meresap ke dalam berbagai masyarakat, mempengaruhi pilihan gaya hidup, tren mode, dan budaya pop. Bhabha juga mengemukakan bahwa hibriditas muncul di ruang antarbudaya, yaitu tempat di mana budaya-budaya saling bercampur dan bertemu. Ruang-ruang peralihan ini menantang pembagian biner antara penjajah dan terjajah, pusat dan pinggiran, serta mengganggu kategori identitas yang telah mapan.

Netflix sebagai sebuah perusahaan tunggal yang memiliki hubungan langganan langsung dengan 150 juta pelanggan di seluruh dunia, membuatnya bisa dibilang lebih global daripada produsen dan distributor layar mana pun sebelumnya (Lobato, R., & Lotz, A. D., 2020). Dengan jangkauan yang sangat luas, Netflix tidak hanya mendistribusikan konten ke berbagai negara, tetapi juga menghasilkan produksi lokal yang mencerminkan beragam budaya, menciptakan pengalaman menonton yang lebih personal dan inklusif bagi audiens di berbagai belahan dunia. Hal ini menjadikan Netflix sebagai salah satu contoh utama bagaimana media digital dapat menghubungkan berbagai budaya secara langsung, melintasi batas geografis dan budaya.

Pencapaian serial web *Gadis Kretek* yang menempati peringkat ke-10 dalam daftar TV Non-Inggris global dengan 1,6 juta penayangan hanya dalam satu minggu yang berakhir pada 12 November 2023 di Netflix dan berhasil masuk 10 besar mingguan di enam negara, termasuk mempertahankan posisi teratas selama dua minggu berturut-turut di Indonesia pada waktu penanganannya, menjadi bukti Netflix berhasil menjangkau audiens global dengan konten lokal yang mampu menarik perhatian lintas budaya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun *Gadis Kretek* merupakan produk lokal Indonesia, juga dapar memenuhi selera internasional, menggabungkan elemen-elemen budaya yang relevan dan universal dalam cerita dan produksinya. Dibuktikan lagi dengan *Gadis Kretek* yang berhasil memenangkan penghargaan *Best Miniseries* dalam kategori International Competition Program di Seoul International Drama Awards 2024.

Seiring majunya teknologi di masa kini, adanya kehadiran era media baru (new media) mewujudkan beberapa bentuk perubahan sosial. Budaya populer (*pop culture*) muncul bersamaan dengan masuknya era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan teknologi media baru. Bhabha (1994) dalam karyanya *Location of Culture* mengkaji fenomena ini dari perspektif poskolonial. Menurutnya, budaya pada dasarnya adalah bentuk dialog antara stereotip, komunikasi, diskriminasi, dan wacana kolonialisme. Konsep Bhabha mengenai masyarakat poskolonial dapat dikenali melalui dua aspek utama, yaitu fetishisme dan hibriditas (Rakhmawati, Y., 2016). Hibriditas, sebagai salah satu konsep yang dikemukakan Bhabha, merujuk pada pertemuan dua budaya yang menghasilkan bentuk-bentuk baru yang kompleks dan ambivalen. Proses hibriditas ini tidak hanya mengarah pada penggabungan dua elemen budaya yang berbeda, tetapi juga menciptakan identitas baru yang sering kali mengaburkan batas-batas antara yang lokal dan global. Dalam konteks ini, budaya populer

menjadi sarana yang sangat efektif dalam menghadirkan interaksi antara budaya lokal dan budaya global, karena media baru memungkinkan penyebaran budaya dengan lebih cepat dan lebih luas.

Pengaruh media baru terhadap budaya populer juga terlihat dalam cara penggambaran budaya dalam film, musik, dan hiburan lainnya yang beredar di pasar global. Produk budaya yang dihasilkan, seperti dalam serial-serial yang ditayangkan di platform streaming seperti Netflix, menggambarkan interaksi antara elemen-elemen lokal dan global, menciptakan representasi baru yang dapat diterima oleh audiens dari berbagai latar belakang budaya. Serial yang menggabungkan elemen budaya lokal dengan format dan estetika global menjadi contoh nyata dari proses hibriditas ini, di mana identitas budaya lokal dipertahankan namun dipadukan dengan elemen-elemen yang lebih universal. Proses hibriditas budaya ini juga tidak lepas dari dinamika perubahan sosial yang terjadi. Media baru tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menghubungkan masyarakat domestik dengan masyarakat internasional. Melalui media, identitas budaya lokal dapat lebih dikenal dan diterima oleh audiens global, sekaligus membuka ruang untuk perdebatan mengenai representasi, identitas, dan kekuasaan dalam budaya populer. Budaya pop adalah salah satu akibat dari dampak invasif teknologi, karena teknologi memasuki berbagai institusi yang menyediakan dasar untuk menciptakan makna dan ekspresi budaya baru (Istiqomah, A., & Widiyanto, D., 2020). Dengan demikian, budaya populer dalam era globalisasi tidak hanya mencerminkan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat tersebut bernegosiasi dengan pengaruh-pengaruh eksternal yang datang dari luar.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi teks untuk menganalisis proses hibriditas budaya yang terjadi dalam serial *Gadis Kretek* di platform Netflix. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana serial ini menggambarkan perubahan sosial dalam konteks globalisasi, dengan fokus utama pada interaksi antara elemen budaya lokal Indonesia dan budaya global yang dihadirkan melalui media modern. Pendekatan studi teks memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang terkandung dalam teks visual dan naratif dari serial *Gadis Kretek*, yang mencakup representasi budaya Indonesia, nilai-nilai tradisional, serta pengaruh budaya global dalam bentuk format naratif

dan estetika visual. Proses hibriditas budaya dianalisis menggunakan teori hibriditas budaya dari Homi K. Bhabha, yang menyatakan bahwa hibriditas adalah interaksi antara dua budaya yang berbeda, menghasilkan ruang baru yang kompleks dan ambivalen. Dalam konteks ini, hibriditas menciptakan representasi budaya yang baru, mengubah pemahaman tradisional tentang budaya dan kekuasaan.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi terhadap elemen-elemen budaya yang muncul dalam serial, seperti tema kretek, peran perempuan, serta penggunaan teknik naratif dan visual yang mencerminkan pengaruh budaya global. Fokus analisis ini terletak pada bagaimana nilai-nilai lokal, seperti tradisi kretek dan peran perempuan, tetap dipertahankan dalam narasi yang dihadirkan dengan gaya dan teknik global. Selain itu, peneliti juga memeriksa bagaimana narasi dan estetika visual bertransformasi untuk menyesuaikan dengan pasar global, tetapi tetap mempertahankan ciri khas Indonesia.

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana *Gadis Kretek* menciptakan ruang hibriditas budaya yang memungkinkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, dengan memperlihatkan dampak globalisasi terhadap budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana media dapat berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai budaya Indonesia kepada audiens internasional, sekaligus membuka ruang bagi penerimaan terhadap identitas budaya yang lebih plural.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep hibriditas budaya dalam kajian poskolonial yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha menekankan bahwa dalam pertemuan antara dua budaya yang berbeda, akan tercipta ruang baru yang bersifat kompleks dan ambivalen. Ruang ini menjadi tempat interaksi budaya yang menghasilkan identitas baru yang tidak sepenuhnya berasal dari budaya asli maupun budaya luar, tetapi merupakan perpaduan keduanya. Dalam konteks serial *Gadis Kretek*, proses hibriditas budaya dapat dilihat dalam beberapa aspek, di antaranya adalah penggambaran tradisi lokal yang dibingkai dalam estetika global, narasi yang menggabungkan unsur historis dengan pendekatan sinematik modern, serta representasi karakter yang memperlihatkan negosiasi antara nilai tradisional dan modern.

3.1. Hibriditas Budaya dalam Serial Gadis Kretek

Hibriditas budaya merupakan konsep yang menyoroti percampuran budaya yang terjadi akibat pertemuan antara budaya lokal dan budaya global. Dalam kajian poskolonial, Homi K. Bhabha menjelaskan bahwa ruang hibrid ini tidak hanya menciptakan bentuk budaya baru, tetapi juga mengguncang kategori identitas yang selama ini dianggap tetap. Dalam *Gadis Kretek*, hibriditas budaya tidak hanya terlihat dalam representasi visual dan naratif, tetapi juga dalam bagaimana serial ini mengolah sejarah lokal dengan pendekatan yang dapat diterima oleh audiens global.

Serial *Gadis Kretek* menghadirkan budaya Indonesia, khususnya industri kretek, sebagai bagian utama dari narasi. Kretek, yang telah menjadi bagian dari sejarah industri dan sosial Indonesia sejak awal abad ke-20, tidak hanya direpresentasikan sebagai produk tembakau khas, tetapi juga sebagai simbol dari nilai-nilai budaya yang terus berkembang. Namun, yang menarik dari serial ini adalah bagaimana tradisi lokal dikemas dalam estetika global. Penggunaan teknik sinematografi yang mendekati standar produksi Hollywood dan pendekatan naratif yang kompleks menunjukkan bahwa *Gadis Kretek* tidak hanya bertujuan untuk menyajikan kisah lokal, tetapi juga untuk menarik perhatian audiens internasional. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya lokal dapat tetap bertahan, tetapi dengan format yang lebih mudah diakses oleh penonton dari berbagai latar belakang budaya.

Selain itu, serial ini juga memanfaatkan elemen visual yang menggambarkan budaya Indonesia dengan cara yang estetis dan berorientasi pada sinema global. Penggunaan palet warna yang khas, pencahayaan yang dramatis, serta desain produksi yang mengutamakan keautentikan sejarah, semuanya menunjukkan bahwa *Gadis Kretek* tidak sekadar mempertahankan tradisi, tetapi juga menyesuaikannya dengan selera global. Ini sejalan dengan gagasan Bhabha tentang hibriditas sebagai proses di mana budaya lokal tidak sepenuhnya kehilangan identitasnya, tetapi juga tidak terisolasi dari pengaruh luar.

Salah satu aspek menarik dari *Gadis Kretek* adalah bagaimana serial ini mengolah sejarah Indonesia dengan pendekatan yang modern. Dengan menggunakan alur maju-mundur, serial ini memperlihatkan keterkaitan antara masa lalu dan masa kini, sesuatu yang umum dalam sinema global tetapi jarang ditemukan dalam produksi lokal. Pendekatan ini memungkinkan penonton untuk memahami bagaimana peristiwa sejarah membentuk kehidupan karakter di masa kini. Dalam konteks hibriditas budaya, ini menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya menjadi sesuatu yang tetap, tetapi terus mengalami interpretasi ulang dalam berbagai bentuk ekspresi budaya. Teknik naratif seperti penggunaan *montase*, *flashback*, dan struktur cerita non-linear menunjukkan bahwa *Gadis Kretek* mengadopsi

strategi penceritaan yang telah banyak digunakan dalam industri film dan televisi global. Hal ini semakin memperkuat gagasan bahwa budaya lokal dapat tetap bertahan dalam era globalisasi dengan mengadopsi format yang lebih universal tanpa kehilangan identitasnya.

Dalam *Gadis Kretek*, karakter-karakter yang ditampilkan bukan hanya merepresentasikan individu-individu dalam cerita, tetapi juga mencerminkan negosiasi budaya yang lebih luas. Tokoh utama dalam serial ini dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi keluarganya dan menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Dalam perspektif Bhabha, negosiasi ini merupakan bagian dari proses hibriditas yang tidak hanya menciptakan identitas baru, tetapi juga mengguncang pemahaman lama tentang apa yang disebut sebagai budaya asli dan budaya asing. Tokoh utama tidak digambarkan sebagai seseorang yang sepenuhnya mengikuti tradisi, tetapi juga tidak sepenuhnya menerima modernitas tanpa kritik. Sebaliknya, ia berada di antara dua dunia, mencoba menyeimbangkan nilai-nilai yang diwariskan dengan realitas zaman yang terus berubah.

Konflik yang dialami oleh karakter dalam serial ini juga mencerminkan bagaimana identitas gender dalam budaya Indonesia mengalami transformasi. Dalam banyak masyarakat tradisional, peran perempuan sering kali terbatas pada ranah domestik, tetapi dalam *Gadis Kretek*, tokoh perempuan digambarkan sebagai individu yang berusaha untuk memiliki agensi atas hidupnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa hibriditas budaya juga berkaitan dengan perubahan dalam struktur sosial, bukan hanya dalam bentuk estetika atau simbolik semata.

Hibriditas budaya dalam *Gadis Kretek* tidak hanya tercermin dalam tema dan estetika visualnya, tetapi juga dalam struktur naratif yang mengadopsi teknik penceritaan modern. Serial ini menggunakan alur maju-mundur untuk menghubungkan peristiwa masa lalu dengan masa kini, sebuah pendekatan yang umum ditemukan dalam produksi film dan serial global. Teknik ini memberikan kompleksitas pada penceritaan sekaligus menyoroti bagaimana sejarah tidak pernah benar-benar terputus dari masa kini, tetapi terus mengalami reinterpretasi dalam berbagai bentuk ekspresi budaya. Dengan adanya alur non-linear, penonton dapat melihat bagaimana berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi dalam industri kretek dan masyarakat Indonesia pada umumnya membentuk jalan hidup karakter-karakternya.

Penggunaan teknik *montase, flashback*, dan dialog retrospektif semakin memperkuat dimensi sinematik yang berorientasi global. Teknik ini tidak hanya berfungsi sebagai alat estetika, tetapi juga sebagai cara untuk menunjukkan bagaimana sejarah dan identitas budaya

terus mengalami perubahan. Dalam konteks hibriditas budaya, ini menunjukkan bahwa budaya tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan kondisi sosial yang terus berubah. Dengan demikian, *Gadis Kretek* berhasil memanfaatkan pendekatan global dalam cara bercerita tanpa harus kehilangan esensi budaya yang ingin disampaikan. Dalam serial ini, karakter-karakternya tidak hanya merepresentasikan individu dalam cerita, tetapi juga simbol dari pergeseran budaya yang terjadi dalam masyarakat. Tokoh utama dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi yang telah diwariskan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang semakin berubah. Dalam konteks hibriditas budaya, negosiasi antara tradisi dan modernitas ini mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat mengalami proses adaptasi dalam menghadapi globalisasi. Homi K. Bhabha menjelaskan bahwa dalam ruang hibrid, individu tidak sepenuhnya mengikuti salah satu budaya, tetapi berada dalam posisi ambivalen yang terus menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapinya. Tokoh utama dalam *Gadis Kretek* menjadi perwujudan dari proses ini, di mana ia tidak sepenuhnya menolak atau menerima salah satu budaya, melainkan mencari keseimbangan antara keduanya.

Proses negosiasi ini semakin diperkuat dengan representasi peran gender yang mengalami perubahan dalam serial ini. Dalam banyak masyarakat tradisional, perempuan sering kali ditempatkan dalam peran domestik, sedangkan laki-laki mendominasi sektor ekonomi dan industri. Namun, dalam *Gadis Kretek*, tokoh perempuan digambarkan sebagai individu yang memiliki agensi atas hidupnya sendiri. Dengan menunjukkan bagaimana perempuan dapat mengambil peran aktif dalam industri kretek, serial ini menyoroti bagaimana struktur sosial mengalami pergeseran, sebuah fenomena yang juga merupakan bagian dari hibriditas budaya. Perubahan dalam representasi gender ini juga dapat dilihat sebagai respons terhadap standar global dalam industri hiburan, di mana karakter perempuan yang kuat dan mandiri semakin menjadi bagian dari narasi arus utama. Selain itu, hibriditas budaya dalam *Gadis Kretek* juga terlihat dalam aspek simbolik dan visual yang digunakan dalam serial ini. Misalnya, penggunaan simbol-simbol tradisional seperti batik, arsitektur khas Indonesia, serta ritual-ritual yang berkaitan dengan industri kretek dipadukan dengan elemen-elemen modern yang lebih akrab bagi penonton global. Kombinasi antara yang tradisional dan yang modern ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat bertahan dan berkembang tanpa harus terisolasi dari pengaruh luar. Dengan kata lain, *Gadis Kretek* tidak hanya mempertahankan unsur budaya lokal, tetapi juga menyesuaikannya agar dapat diterima oleh audiens yang lebih luas.

Globalisasi memungkinkan budaya lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama, juga berisiko membuat budaya lokal kehilangan keunikannya. Dalam *Gadis Kretek*, globalisasi tidak hanya terlihat dalam cara serial ini diproduksi dan didistribusikan melalui Netflix, tetapi juga dalam bagaimana budaya lokal dikemas agar dapat diterima oleh penonton internasional. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan tetap mempertahankan esensi budaya Indonesia dalam cerita dan visualnya, tetapi menyajikannya dalam format yang lebih mudah diakses oleh audiens global. Ini terlihat dari penggunaan sinematografi berkualitas tinggi, gaya penceritaan yang lebih modern, serta dialog yang tetap menggunakan bahasa Indonesia tetapi didukung dengan subtitle dalam berbagai bahasa. Strategi ini menunjukkan bahwa dalam era globalisasi, budaya lokal tidak harus kehilangan identitasnya agar dapat diterima oleh audiens yang lebih luas. Sebaliknya, budaya lokal dapat tetap bertahan dengan menyesuaikan diri dalam format yang lebih universal. Konsep ini dikenal sebagai glokalisasi, yaitu bagaimana budaya lokal dapat berkembang dalam konteks global dengan tetap mempertahankan ciri khasnya. Dalam konteks *Gadis Kretek*, ini berarti bahwa serial ini tetap mengangkat kisah yang berakar pada budaya Indonesia, tetapi dengan pendekatan sinematik yang lebih akrab bagi audiens internasional.

Dalam industri hiburan global, terdapat kecenderungan bahwa budaya yang dapat diterima oleh audiens internasional adalah budaya yang telah mengalami proses adaptasi agar sesuai dengan selera global. Namun, *Gadis Kretek* menunjukkan bahwa budaya lokal dapat tetap dipertahankan tanpa harus kehilangan keasliannya. Dengan menghadirkan kisah yang kuat, produksi berkualitas tinggi, serta distribusi melalui platform global, serial ini menjadi contoh bagaimana budaya Indonesia dapat bersaing di pasar internasional tanpa harus sepenuhnya mengikuti standar budaya luar.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa hibriditas budaya tidak selalu berarti hilangnya identitas lokal, tetapi justru dapat menjadi alat untuk memperkenalkan budaya tersebut kepada dunia. Dengan tetap mempertahankan elemen-elemen khas Indonesia dalam ceritanya, *Gadis Kretek* berhasil menghadirkan narasi yang tidak hanya relevan bagi penonton domestik, tetapi juga memiliki daya tarik bagi audiens internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era globalisasi, budaya lokal tidak harus menjadi korban dari arus global, tetapi dapat menjadi bagian dari dinamika budaya global yang lebih luas. Keberhasilan *Gadis Kretek* juga memberikan implikasi bagi industri kreatif di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap konten-konten lokal yang memiliki daya tarik global, industri film dan televisi di Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Dengan memanfaatkan platform seperti Netflix, sineas Indonesia dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan

menunjukkan bahwa budaya Indonesia memiliki tempat dalam industri hiburan global. Namun, dalam proses ini, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara adaptasi terhadap standar global dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Salah satu tantangan utama dari globalisasi budaya adalah bagaimana memastikan bahwa budaya lokal tidak hanya menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh audiens internasional, tetapi tetap memiliki makna bagi masyarakat asalnya. Dalam hal ini, peran pembuat konten sangat penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang ditampilkan dalam media tetap memiliki kedalaman dan tidak hanya sekadar memenuhi ekspektasi pasar global. Dengan menjaga keseimbangan antara adaptasi terhadap standar internasional dan pelestarian identitas budaya, industri kreatif di Indonesia dapat berkontribusi dalam membangun pemahaman yang lebih kaya tentang budaya Indonesia di panggung dunia. Sebagai contoh, dalam *Gadis Kretek*, industri kretek yang selama ini mungkin hanya dikenal dalam lingkup nasional kini dapat diperkenalkan kepada audiens global. Ini bukan hanya memperluas wawasan penonton internasional tentang budaya Indonesia, tetapi juga memberikan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia sendiri bahwa warisan budaya mereka dapat diapresiasi di tingkat dunia. Dengan demikian, hibriditas budaya dalam *Gadis Kretek* tidak hanya mencerminkan percampuran antara budaya lokal dan global, tetapi juga menunjukkan bagaimana budaya Indonesia dapat bertahan, berkembang, dan mendapatkan tempat di industri hiburan global yang semakin kompetitif.

3.2. Peran Media Baru dalam Proses Hibriditas Budaya

Media baru, khususnya platform streaming seperti Netflix, memainkan peran penting dalam mempercepat proses hibriditas budaya. Kehadiran *Gadis Kretek* di Netflix tidak hanya membuat serial ini lebih mudah diakses oleh audiens internasional, tetapi juga memungkinkan budaya Indonesia untuk dilihat dalam skala global. Dengan kehadiran media digital, produk budaya yang sebelumnya bersifat lokal kini dapat menjangkau audiens global dengan lebih mudah. Roland Robertson dalam konsep *glokalisasi* menekankan bahwa budaya lokal dapat bertahan dalam era globalisasi dengan menyesuaikan diri dengan format dan distribusi yang lebih luas. Dalam konteks *Gadis Kretek*, ini berarti bahwa cerita yang berlatar budaya Indonesia tetap bisa dinikmati oleh audiens di luar negeri karena disajikan dalam format yang familiar bagi mereka. Strategi pemasaran yang digunakan Netflix juga turut berkontribusi dalam memperkenalkan serial ini kepada audiens global, misalnya dengan menampilkan trailer dalam berbagai bahasa dan menggunakan algoritma rekomendasi yang menyesuaikan dengan preferensi pengguna.

Netflix sebagai platform global telah menjadi salah satu faktor utama dalam penyebaran budaya lintas batas. Dengan menyediakan konten dari berbagai negara dalam satu platform, Netflix memungkinkan terjadinya pertemuan antara budaya yang sebelumnya mungkin tidak memiliki hubungan langsung. Dalam kasus *Gadis Kretek*, kehadiran serial ini di Netflix memungkinkan budaya Indonesia untuk dikenal oleh audiens internasional. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu mengarah pada homogenisasi budaya, tetapi justru membuka ruang bagi bentuk-bentuk baru dari ekspresi budaya yang lebih beragam. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa dalam proses ini, representasi budaya tidak selalu bersifat netral. Seperti yang dikemukakan oleh Stuart Hall, representasi dalam media selalu dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dalam proses hibriditas budaya, budaya lokal tidak hanya menjadi objek yang dikomodifikasi, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai yang menjadi identitasnya.

Media baru telah membawa perubahan besar dalam cara budaya dikonsumsi dan disebarluaskan. Sebelum era digital, distribusi produk budaya lebih terbatas pada jalur konvensional seperti televisi, bioskop, atau festival film, yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau audiens internasional. Namun, dengan hadirnya platform streaming seperti Netflix, batasan geografis dalam distribusi konten menjadi semakin kabur. *Gadis Kretek*, sebagai bagian dari budaya populer Indonesia, mengalami perluasan jangkauan yang signifikan berkat platform digital ini. Netflix memungkinkan serial ini diakses oleh audiens di berbagai negara dengan terjemahan dalam berbagai bahasa, menjadikannya lebih mudah dipahami dan diterima oleh penonton yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.

Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep glokalisasi yang dikemukakan oleh Roland Robertson. Dalam era globalisasi, budaya lokal tidak serta-merta hilang atau tergantikan oleh budaya global, melainkan mengalami adaptasi agar dapat bertahan dalam lingkungan yang lebih luas. Dalam konteks *Gadis Kretek*, ini terlihat dari bagaimana cerita yang mengakar pada budaya Indonesia dikemas dengan pendekatan sinematik yang lebih modern dan universal. Alih-alih menjadi sekadar produk lokal yang hanya relevan bagi penonton domestik, serial ini dapat menjangkau audiens global dengan tetap mempertahankan identitas budayanya. Glokalisasi dalam *Gadis Kretek* terjadi tidak hanya dalam aspek visual dan naratif, tetapi juga dalam strategi distribusi dan pemasaran yang dilakukan oleh Netflix.

Netflix, sebagai platform global, menggunakan algoritma yang memungkinkan konten direkomendasikan kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Ini berarti bahwa *Gadis*

Kretek dapat muncul di beranda pengguna yang mungkin sebelumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya Indonesia, tetapi memiliki minat terhadap genre atau tema yang serupa. Dengan cara ini, Netflix tidak hanya menjadi platform distribusi, tetapi juga bertindak sebagai kurator budaya yang menghubungkan audiens dengan konten dari berbagai belahan dunia. Selain itu, Netflix juga memanfaatkan strategi pemasaran yang dirancang untuk menarik perhatian audiens global. *Trailer* dan materi promosi dalam berbagai bahasa membantu memperkenalkan serial ini kepada penonton internasional, sementara fitur seperti *top ten ranking* di setiap negara memberikan insentif bagi audiens untuk menonton konten yang sedang populer di wilayah mereka.

Keberadaan *Gadis Kretek* di Netflix juga menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu berdampak negatif terhadap budaya lokal. Salah satu kekhawatiran yang sering muncul dalam diskusi mengenai globalisasi budaya adalah ancaman homogenisasi, di mana budaya lokal dianggap akan tenggelam oleh dominasi budaya global. Namun, dalam kasus *Gadis Kretek*, yang terjadi justru sebaliknya. Serial ini memperlihatkan bahwa produk budaya lokal dapat beradaptasi dalam lingkungan global tanpa kehilangan esensinya. Dengan menampilkan kisah yang berakar pada sejarah Indonesia, serial ini bukan hanya menjadi representasi dari budaya lokal, tetapi juga menjadi bagian dari diskursus budaya global yang lebih luas. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam proses globalisasi budaya ini, tidak semua bentuk representasi bersifat netral. Seperti yang dikemukakan oleh Stuart Hall, representasi dalam media selalu dipengaruhi oleh ideologi tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam konteks Netflix sebagai platform global, terdapat dinamika kekuasaan yang memengaruhi bagaimana suatu budaya direpresentasikan kepada audiens yang lebih luas. Representasi budaya Indonesia dalam *Gadis Kretek* tidak terlepas dari bagaimana Netflix sebagai perusahaan media mengkurasi konten untuk memenuhi ekspektasi pasar global. Ini berarti bahwa dalam beberapa kasus, ada kemungkinan bahwa elemen-elemen tertentu dari budaya lokal disesuaikan agar lebih mudah diterima oleh audiens internasional.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana penerimaan audiens global terhadap *Gadis Kretek* dapat membentuk persepsi mereka terhadap budaya Indonesia. Serial ini dapat menjadi salah satu referensi utama bagi penonton internasional dalam memahami sejarah dan budaya Indonesia, tetapi pada saat yang sama, hal ini juga dapat menimbulkan reduksi atau stereotip tertentu jika tidak diimbangi dengan representasi yang lebih beragam dalam produk-produk budaya lainnya. Oleh karena itu, keberadaan *Gadis Kretek* di Netflix seharusnya tidak dilihat sebagai satu-satunya bentuk representasi budaya Indonesia, melainkan sebagai bagian dari ekosistem budaya yang lebih luas yang terus berkembang.

Dalam lanskap media digital yang semakin kompleks, peran audiens dalam menginterpretasikan dan mendiskusikan konten budaya juga semakin penting. Media sosial menjadi ruang di mana penonton dapat memberikan tanggapan mereka terhadap *Gadis Kretek*, baik dalam bentuk ulasan, kritik, maupun diskusi lebih lanjut mengenai tema-tema yang diangkat dalam serial ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi budaya di era digital tidak lagi bersifat satu arah, di mana penonton hanya menerima apa yang disajikan oleh media, tetapi lebih bersifat partisipatif. Dengan demikian, *Gadis Kretek* tidak hanya menjadi produk budaya yang dikonsumsi secara pasif, tetapi juga menjadi subjek diskusi yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun global.

Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana media baru telah mengubah pola produksi dan konsumsi budaya. Dalam era pra-digital, distribusi konten lebih banyak dikendalikan oleh industri hiburan tradisional, di mana akses terhadap pasar internasional sangat terbatas dan bergantung pada jalur distribusi konvensional seperti bioskop dan televisi kabel. Namun, dengan kehadiran platform digital seperti Netflix, pembuat konten dari berbagai negara memiliki peluang yang lebih besar untuk menjangkau audiens global. Ini berarti bahwa produk budaya dari negara-negara yang sebelumnya kurang terwakili dalam industri hiburan global kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas.

Namun, meskipun Netflix memberikan kesempatan bagi budaya lokal untuk diperkenalkan ke dunia, platform ini tetap beroperasi dalam kerangka kapitalisme global, di mana faktor ekonomi memainkan peran besar dalam menentukan konten apa yang mendapatkan eksposur lebih luas. Algoritma yang digunakan Netflix untuk merekomendasikan konten kepada pengguna didasarkan pada data konsumsi yang dikumpulkan dari jutaan pelanggan di seluruh dunia. Ini berarti bahwa meskipun *Gadis Kretek* memiliki nilai budaya yang tinggi, kesuksesannya dalam menjangkau audiens global juga bergantung pada sejauh mana serial ini dapat memenuhi preferensi dan selera pasar global. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan industri media digital dapat memengaruhi cara budaya direpresentasikan dan dikonsumsi di tingkat global. Sementara Netflix dan platform serupa memberikan peluang bagi budaya lokal untuk lebih dikenal, mereka juga memiliki kendali yang besar dalam menentukan konten mana yang mendapatkan promosi lebih luas dan konten mana yang kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, dalam melihat peran Netflix dalam menyebarluaskan budaya Indonesia melalui *Gadis Kretek*, perlu ada kesadaran bahwa proses ini tidak sepenuhnya bersifat organik, tetapi juga dipengaruhi oleh logika bisnis dan algoritma media digital.

Terlepas dari dinamika kekuasaan yang ada dalam industri media global, *Gadis Kretek* tetap menunjukkan bahwa budaya lokal dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan digital yang semakin terhubung. Dengan menggabungkan elemen tradisional dengan pendekatan sinematik modern, serial ini membuktikan bahwa budaya Indonesia memiliki daya tarik yang dapat diapresiasi oleh audiens global. Lebih jauh lagi, keberadaan *Gadis Kretek* di Netflix dapat menjadi awal dari semakin banyaknya produk budaya Indonesia yang mendapatkan eksposur di kancah internasional, sekaligus membuka peluang bagi pembuat konten lokal untuk terus mengeksplorasi cara-cara baru dalam merepresentasikan budaya mereka kepada dunia.

Keberhasilan *Gadis Kretek* juga menunjukkan bahwa ada permintaan yang meningkat terhadap narasi yang lebih beragam dalam industri hiburan global. Dengan semakin banyaknya audiens yang tertarik untuk mengenal budaya dari berbagai belahan dunia, ini memberikan peluang bagi sineas dan pembuat konten dari Indonesia untuk lebih aktif dalam memproduksi karya yang dapat bersaing di pasar global. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga agar representasi budaya tetap autentik tanpa harus mengikuti standar yang ditentukan oleh pasar global semata. Dalam hal ini, penting bagi industri kreatif di Indonesia untuk terus memperjuangkan keberagaman narasi dan memastikan bahwa budaya lokal tidak hanya menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh audiens internasional, tetapi tetap memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat asalnya.

3.3. Implikasi Hibriditas Budaya dalam Budaya Populer Indonesia

Keberhasilan *Gadis Kretek* menunjukkan bahwa produk budaya Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di pasar global. Namun, ini juga membawa implikasi yang lebih luas terhadap bagaimana budaya populer di Indonesia berkembang dalam konteks globalisasi.

Budaya populer sering kali menjadi ruang utama bagi terjadinya hibriditas budaya. Dalam era digital, budaya populer tidak hanya mencerminkan tren global, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk identitas budaya yang baru.

Dalam konteks *Gadis Kretek*, serial ini memperlihatkan bagaimana budaya Indonesia dapat dikemas dalam format yang lebih global tanpa kehilangan esensinya. Ini menunjukkan bahwa identitas budaya bukan sesuatu yang tetap, tetapi terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial dan teknologi yang berkembang. Kesuksesan *Gadis Kretek* juga membuka peluang bagi industri kreatif di Indonesia untuk lebih aktif dalam memproduksi konten yang dapat bersaing di pasar global. Namun, dalam proses ini, perlu adanya keseimbangan antara adaptasi terhadap standar global dan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang autentik. Salah satu tantangan utama dalam globalisasi budaya adalah bagaimana menjaga agar budaya lokal tidak hanya menjadi komoditas yang dijual kepada audiens internasional, tetapi tetap menjadi bagian dari identitas yang bermakna bagi masyarakat lokal. Dalam hal ini, peran pembuat konten sangat penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang ditampilkan dalam media tetap memiliki kedalaman dan relevansi bagi komunitas asalnya.

Salah satu aspek yang paling mencolok dalam *Gadis Kretek* adalah bagaimana serial ini menampilkan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam industri kretek, dalam format yang dapat diterima oleh audiens global. Industri kretek yang telah menjadi bagian dari sejarah sosial dan ekonomi Indonesia mendapatkan porsi signifikan dalam narasi serial ini. Kretek tidak hanya direpresentasikan sebagai produk tembakau khas Indonesia, tetapi juga sebagai simbol dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang dalam sejarah bangsa.

Dalam hal ini, penggunaan sinematografi yang didasarkan pada standar produksi global memberikan pengalaman menonton yang tidak hanya menarik bagi penonton domestik tetapi juga bagi audiens internasional. Pemilihan warna, pencahayaan, serta komposisi gambar yang digunakan dalam serial ini memperlihatkan adanya pengaruh estetika sinema global yang telah disesuaikan dengan nilai lokal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bhabha bahwa dalam proses hibridisasi, budaya lokal dapat dipertahankan namun direpresentasikan dalam format yang lebih universal sehingga dapat diterima oleh audiens yang lebih luas.

Selain itu, penggunaan bahasa juga menjadi salah satu elemen yang mencerminkan hibriditas budaya dalam *Gadis Kretek*. Meskipun mayoritas dialog menggunakan bahasa Indonesia, terdapat beberapa elemen bahasa lain yang dimasukkan untuk menyesuaikan dengan pasar global. Penggunaan subtitle dalam berbagai bahasa di platform Netflix menunjukkan bagaimana produk budaya lokal dikemas agar dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Ini menjadi bukti bahwa hibriditas budaya tidak hanya terjadi dalam level estetika visual tetapi juga dalam aspek linguistik.

Keberhasilan *Gadis Kretek* dalam meraih popularitas di pasar global menjadi contoh nyata bagaimana budaya Indonesia mampu menembus batas-batas geografis dan bersaing dengan produk budaya internasional. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana kekuatan budaya lokal dapat dipresentasikan dalam kerangka globalisasi yang semakin mendalam. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak hanya sekadar memperkenalkan elemen-elemen budaya Indonesia kepada dunia, tetapi juga mengundang pertanyaan tentang bagaimana budaya lokal dapat bertahan dan berkembang dalam dunia yang semakin terhubung ini. *Gadis Kretek* tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, melainkan juga sebagai medium untuk menggali dan merepresentasikan identitas budaya Indonesia. Dalam serial ini, kebudayaan Indonesia tidak disajikan dalam bentuk yang kaku, tetapi melalui adaptasi yang memperlihatkan bahwa identitas budaya tersebut terus berkembang seiring waktu dan perubahan sosial. Hal ini menandakan bahwa budaya Indonesia tidak perlu bersaing dengan produk budaya global dalam pengertian mengalahkan atau menyaingi, melainkan bagaimana produk budaya tersebut beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan akar budayanya.

Penting untuk dicatat bahwa globalisasi bukanlah sebuah fenomena yang dapat dihindari, tetapi merupakan kenyataan yang harus dihadapi dengan strategi yang bijak dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal. *Gadis Kretek*, sebagai salah satu bentuk budaya populer, menunjukkan bahwa produk budaya lokal dapat menanggapi tantangan globalisasi ini dengan cara yang kreatif dan inovatif. Namun, di sisi lain, keberhasilan ini juga membuka peluang bagi diskusi mengenai batas-batas antara globalisasi yang membawa pengaruh positif dan potensi hilangnya keunikan budaya lokal.

Keberhasilan *Gadis Kretek* juga menunjukkan bahwa industri kreatif Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh di panggung dunia, terutama dengan mengembangkan konten yang lebih relevan dan dapat diterima oleh audiens global. Namun, di balik kesuksesan tersebut, terdapat tantangan untuk menjaga agar produk budaya yang dihasilkan tetap mengakar pada nilai-nilai lokal dan bukan sekadar menjadi konsumsi pasar global. Bagi pembuat konten, hal ini menuntut kecermatan dalam menyeimbangkan antara menanggapi selera global dan tetap menjaga keaslian dan nilai budaya yang dimiliki. Sebagai contoh, meskipun *Gadis Kretek* mengadaptasi berbagai elemen global dalam produksinya, serial ini tetap menyuguhkan kebudayaan Indonesia dengan cara yang sangat kontekstual dan relevan bagi penonton lokal. Proses hibridisasi budaya yang terjadi dalam *Gadis Kretek* bukan hanya sekadar menyatukan elemen-elemen budaya yang berbeda, tetapi juga menciptakan suatu bentuk budaya baru yang merefleksikan perkembangan zaman. Penyampaian budaya

Indonesia dalam format global tidak berarti menghapuskan elemen-elemen khas yang ada, melainkan lebih pada bagaimana elemen-elemen tersebut dapat disajikan dengan cara yang lebih universal. Kebudayaan Indonesia dalam serial ini tidak hanya direpresentasikan sebagai bagian dari masa lalu, tetapi juga sebagai elemen yang hidup dan berkembang dalam konteks modern yang melibatkan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Di dalam *Gadis Kretek*, industri kretek menjadi simbol penting yang menghubungkan antara budaya lokal dengan dinamika global. Kretek, sebagai produk khas Indonesia, tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga berfungsi sebagai simbol yang menggambarkan perjalanan panjang bangsa ini. Dalam hal ini, kretek tidak hanya berfungsi sebagai produk tembakau semata, tetapi menjadi cerminan dari perjalanan sejarah sosial dan ekonomi Indonesia, yang telah melalui berbagai perubahan dan tantangan dalam menghadapi modernitas. Seiring dengan berkembangnya industri kretek, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya mempertahankan produk budaya ini, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga sebagai identitas budaya yang terus hidup.

Keberadaan kretek dalam *Gadis Kretek* memberi kesempatan untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana kebudayaan Indonesia dapat berkembang dalam berbagai bentuk, sekaligus menjaga kesinambungannya dengan sejarah masa lalu. Dalam serial ini, kretek tidak hanya menjadi objek yang digambarkan, tetapi juga menjadi bagian integral dari narasi yang membentuk identitas karakter-karakter di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk budaya lokal tidak harus terjebak dalam nostalgia atau konservatisme, melainkan dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih relevan dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan makna budaya yang mendalam. Estetika visual yang digunakan dalam serial ini juga memperlihatkan bagaimana elemen-elemen global dapat diadaptasi tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal. Pemilihan warna, komposisi gambar, dan pencahayaan yang digunakan dalam produksi *Gadis Kretek* menunjukkan bahwa estetika sinema global dapat disesuaikan dengan konten lokal untuk menciptakan pengalaman menonton yang lebih universal namun tetap kaya dengan konteks budaya Indonesia. Bhabha dalam teori hibriditasnya menekankan bahwa penggabungan budaya tidak harus berarti penghapusan identitas asli, tetapi justru menciptakan bentuk baru yang saling menghormati dan memperkaya satu sama lain. *Gadis Kretek* berhasil menunjukkan bagaimana penggabungan ini dapat menciptakan sebuah karya yang tetap memiliki kedalaman dan makna yang kuat baik bagi penonton lokal maupun internasional.

Selain itu, aspek linguistik dalam *Gadis Kretek* juga memainkan peran penting dalam menunjukkan hibriditas budaya. Walaupun sebagian besar dialog dalam serial ini menggunakan bahasa Indonesia, penggunaan elemen-elemen bahasa lain, baik dalam bentuk subtitle maupun interaksi karakter, menunjukkan bagaimana bahasa dapat menjadi salah satu saluran untuk menyampaikan pesan budaya kepada audiens global. Melalui terjemahan dalam berbagai bahasa, produk budaya Indonesia dapat diakses lebih luas, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengenal dan memahami konteks budaya yang ada di balik cerita yang disajikan. Dalam hal ini, hibriditas tidak hanya terjadi pada level visual, tetapi juga pada aspek bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan budaya kepada audiens yang lebih beragam.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun globalisasi memberikan tantangan tersendiri bagi keberlanjutan budaya lokal, globalisasi juga dapat menjadi peluang untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia kepada dunia. Namun, dalam proses ini, sangat diperlukan kesadaran untuk tidak mengkomodifikasi budaya lokal hanya demi memenuhi selera pasar global. Sebaliknya, hibriditas yang terjadi harus dilihat sebagai suatu proses kreatif yang menghargai keberagaman budaya sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti yang ada dalam masyarakat lokal. *Gadis Kretek*, dengan segala kompleksitas dan keunikan budaya yang ditampilkannya, menjadi contoh nyata bahwa budaya Indonesia dapat tetap relevan dan berharga di panggung global, asalkan diproses dan dikemas dengan penuh kehati-hatian dan integritas.

3.4. Narasi Sejarah dan Pendekatan Sinematik Modern

Serial *Gadis Kretek* tidak hanya mengisahkan kehidupan seorang perempuan dalam industri kretek, tetapi juga mengangkat tema sejarah dan perubahan sosial di Indonesia. Melalui latar waktu yang berlatar belakang pada periode 1960-an hingga masa kini, serial ini menunjukkan bagaimana berbagai peristiwa sosial-politik berdampak pada kehidupan individu dan keluarga yang terlibat dalam industri kretek. Salah satu strategi yang digunakan dalam penyajian narasi ini adalah melalui pendekatan non-linear, yaitu dengan memanfaatkan alur maju-mundur yang memperlihatkan fragmen-fragmen kehidupan tokoh utama dalam dua periode waktu yang berbeda. Teknik ini merupakan salah satu strategi yang umum digunakan

dalam produksi film dan serial global untuk memberikan pengalaman mendalam bagi penonton. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Gadis Kretek* memanfaatkan teknik naratif yang telah berkembang dalam sinema global tetapi tetap mempertahankan konteks lokal dalam isi ceritanya. Pendekatan ini juga memungkinkan penonton untuk melihat bagaimana transformasi sosial berlangsung dari masa ke masa. Melalui penggunaan *flashback* dan teknik *cross-cutting*, serial ini membangun keterhubungan antara sejarah dan kondisi sosial yang terus berkembang. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya tidak bersifat statis, tetapi terus mengalami perubahan sebagai respons terhadap dinamika sosial yang lebih luas.

Serial *Gadis Kretek* tidak hanya sekadar menceritakan kehidupan seorang perempuan dalam industri kretek, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai sejarah dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Melalui narasi yang bergerak dari periode 1960-an hingga masa kini, serial ini memberikan gambaran tentang bagaimana berbagai peristiwa sosial-politik, termasuk perubahan sosial dan ekonomi, memengaruhi kehidupan individu dan keluarga yang terlibat dalam industri kretek. Penyajian tersebut memungkinkan penonton untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana sejarah berperan dalam membentuk dinamika sosial dan budaya dalam konteks lokal.

Salah satu teknik naratif yang digunakan dalam *Gadis Kretek* adalah pendekatan non-linear yang menghadirkan alur maju-mundur. Dengan teknik ini, penonton tidak hanya diberikan gambaran mengenai masa lalu tokoh utama, tetapi juga melihat bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi perjalanan hidupnya di masa kini. Strategi ini memberikan pengalaman mendalam, yang tidak hanya memperkaya pemahaman penonton terhadap cerita, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melihat keterhubungan antara masa lalu dan masa kini dalam membentuk identitas dan kehidupan tokoh-tokoh dalam serial ini. Pendekatan non-linear ini juga memungkinkan penonton untuk melihat bagaimana transformasi sosial berlangsung dari masa ke masa. Melalui penggunaan *flashback* dan teknik *cross-cutting*, serial ini membangun keterhubungan antara sejarah dan kondisi sosial yang terus berkembang. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya tidak bersifat statis, tetapi terus mengalami perubahan sebagai respons terhadap dinamika sosial yang lebih luas. Teknik tersebut memberikan kesan bahwa perubahan dalam kehidupan karakter-karakter dalam serial ini tidak terjadi secara terisolasi, tetapi selalu terkait dengan perubahan sosial yang lebih besar, yang mencerminkan proses transisi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dari masa ke masa.

Penggunaan teknik naratif seperti ini juga mencerminkan kemampuan produksi film dan serial global dalam menggabungkan elemen-elemen sinematik yang canggih dengan cerita yang memiliki kedalaman lokal. *Gadis Kretek* memanfaatkan teknik naratif yang telah berkembang dalam sinema global tetapi tetap mempertahankan konteks lokal dalam isi ceritanya. Dalam hal ini, meskipun serial ini mengadaptasi pendekatan yang umum digunakan dalam produksi film dan serial internasional, narasi yang dihadirkan tetap mempertahankan akar budaya Indonesia, dengan menampilkan elemen-elemen sosial dan politik yang berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain itu, teknik non-linear ini juga memungkinkan *Gadis Kretek* untuk mengeksplorasi tema-tema besar, seperti peran perempuan dalam masyarakat Indonesia dan dampak industri kretek terhadap kehidupan sosial-ekonomi keluarga. Dengan memanfaatkan alur yang bergerak mundur dan maju, serial ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana sejarah industri kretek dan posisi perempuan di dalamnya berkembang dari waktu ke waktu. Ini memberikan ruang bagi penonton untuk lebih mendalami latar belakang sosial dan kultural yang membentuk keputusan dan tindakan para tokoh utama, serta bagaimana faktor-faktor eksternal, seperti politik dan ekonomi, memengaruhi kehidupan mereka.

Teknik *cross-cutting*, yang digunakan untuk menyajikan momen-momen penting dalam dua periode waktu yang berbeda, juga menciptakan ketegangan naratif yang menarik. Hal ini membantu penonton untuk mengaitkan peristiwa-peristiwa masa lalu dengan dampaknya di masa kini, serta menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak hanya terjadi dalam waktu yang terpisah, tetapi saling terkait dan membentuk satu sama lain. Dengan cara ini, *Gadis Kretek* tidak hanya menceritakan sebuah kisah tentang individu atau keluarga, tetapi juga menggambarkan bagaimana peristiwa-peristiwa sosial-politik besar memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Serial ini mengingatkan bahwa budaya selalu berada dalam proses transformasi yang dinamis, dan tidak ada budaya yang benar-benar terisolasi dari pengaruh eksternal. Melalui penggunaan teknik sinematik yang menggabungkan elemen-elemen global dengan cerita lokal, *Gadis Kretek* mampu memperlihatkan bagaimana budaya Indonesia tetap relevan meskipun dalam menghadapi arus globalisasi yang kuat. Hibriditas yang terjadi dalam serial ini mencerminkan kenyataan bahwa identitas budaya tidak pernah tetap, melainkan selalu berkembang, menyerap pengaruh-pengaruh baru, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Secara keseluruhan, pendekatan naratif non-linear dalam *Gadis Kretek* bukan hanya menjadi teknik sinematik yang menarik, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam dalam konteks budaya dan sosial. Dengan memperlihatkan bagaimana sejarah dan perubahan sosial berinteraksi dalam kehidupan karakter-karakternya, serial ini mengajarkan bahwa budaya selalu hidup dalam konteks yang berubah dan terus berevolusi. Proses hibridisasi budaya yang terjadi dalam Gadis Kretek dapat dilihat sebagai sebuah refleksi dari dinamika sosial yang lebih besar, yang terjadi di Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi sambil tetap mempertahankan nilai-nilai lokal yang ada.

3.5. Negosiasi Identitas dalam Karakter Tokoh

Aspek menarik dari serial *Gadis Kretek* adalah bagaimana karakter-karakternya merepresentasikan proses negosiasi antara nilai-nilai tradisional dan modern. Tokoh utama dalam serial ini dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dengan keinginannya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Dalam analisis poskolonial, negosiasi identitas ini merupakan salah satu manifestasi dari hibriditas budaya yang muncul akibat interaksi antara budaya lokal dan budaya global. Karakter utama tidak digambarkan sebagai individu yang sepenuhnya mengikuti tradisi, tetapi juga tidak sepenuhnya menerima modernitas tanpa kritik. Sebaliknya, ia menjadi representasi dari individu yang mencoba menemukan keseimbangan antara keduanya.

Konflik yang terjadi dalam proses pencarian identitas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya, tetapi juga menyentuh persoalan gender. Dalam masyarakat tradisional, peran perempuan sering kali terbatas pada ruang domestik dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sering kali ditentukan oleh norma-norma sosial yang ada. Namun, dalam serial ini, tokoh utama memperlihatkan bagaimana perempuan juga dapat menjadi agen perubahan sosial yang aktif. Dengan demikian, serial *Gadis Kretek* tidak hanya membahas persoalan hibriditas budaya dalam konteks globalisasi, tetapi juga dalam konteks gender dan dinamika sosial yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

Dalam era globalisasi, interaksi antara budaya lokal dan global semakin intensif, menciptakan fenomena hibriditas budaya. Serial *Gadis Kretek* yang ditayangkan di Netflix menjadi salah satu contoh konkret bagaimana media modern dapat merepresentasikan pertemuan budaya ini. Melalui cerita yang mengangkat tradisi kretek di Indonesia, serial ini

tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal tetapi juga menyesuaikan diri dengan format global untuk menjangkau audiens internasional.

Pendekatan teori hibriditas budaya Homi K. Bhabha menjelaskan bahwa identitas budaya tidaklah statis, melainkan terus berkembang melalui proses percampuran budaya. Konsep *Ruang Ketiga* yang dikemukakan Bhabha menggambarkan bagaimana budaya lokal dan global bertemu dalam suatu wilayah transisi, menghasilkan identitas baru yang bersifat dinamis dan ambivalen. Dalam konteks ini, *Gadis Kretek* menunjukkan bagaimana unsur budaya tradisional Indonesia, seperti industri kretek dan peran perempuan dalam masyarakat, dipadukan dengan gaya penceritaan dan sinematografi yang berorientasi pada audiens global.

Keberhasilan *Gadis Kretek* dalam menembus pasar internasional juga mencerminkan peran media digital sebagai agen perubahan sosial. Netflix, sebagai platform global, memungkinkan konten lokal diakses oleh penonton di berbagai belahan dunia. Dengan lebih dari 150 juta pelanggan di seluruh dunia, Netflix tidak hanya mendistribusikan konten tetapi juga mengakomodasi keberagaman budaya melalui produksi lokal yang disesuaikan dengan standar internasional. Hal ini membuktikan bahwa media baru memiliki kekuatan dalam membentuk pemahaman lintas budaya dan memperluas cakupan representasi budaya lokal dalam ruang global.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana budaya populer berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap identitas budaya mereka sendiri. Budaya populer yang berkembang melalui media digital dapat menjadi alat untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal ke audiens yang lebih luas. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan, seperti homogenisasi budaya yang dapat mengancam keunikan budaya lokal. Dalam kasus *Gadis Kretek*, meskipun budaya lokal tetap menjadi inti narasi, unsur-unsur global dalam teknis penceritaan dan visual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk akhir.

Dengan demikian, hibriditas budaya dalam *Gadis Kretek* menunjukkan bagaimana budaya lokal dan global dapat berinteraksi secara harmonis tanpa menghilangkan identitas aslinya. Di satu sisi, globalisasi dan media digital membuka peluang bagi budaya lokal untuk dikenal secara lebih luas, namun di sisi lain juga menuntut adaptasi agar tetap relevan dalam lanskap budaya yang terus berubah. Kajian ini menegaskan bahwa dalam era globalisasi, budaya bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan terus bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi dan interaksi antarbudaya.

5. REFERENSI

Aanayo, C. (2023). Globalization's Influence on Cultural Hybridity and Identity Formation. *Journal Social Humanity Perspective*, *1*(2), 60-66.

Istiqomah, A., & Widiyanto, D. (2020). Ancaman budaya pop (pop culture) terhadap penguatan identitas nasional masyarakat urban. *Jurnal Politik Walisongo*, *2*(1), 47-54.

Lobato, R., & Lotz, A. D. (2020). Imagining global video: The challenge of Netflix. *JCMS: Journal of Cinema and Media Studies*, *59*(3), 132-136.

Musa, M. I. (2017). Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. *Pesona Dasar: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Humaniora*, *3*(1).

Nahak, H. M. (2019). Upaya melestarikan budaya indonesia di era globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, *5*(1), 65-76.

Rakhmawati, Y. (2016). Hibriditas new media komunikasi dan homogenisasi budaya. *Jurnal Komunikasi*, *10*(2), 117-128.

Kedaulatan Penghidupan Masyarakat Kalurahan: Risalah Kebijakan bagi Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dias Oktri Raka Setiadi
Minat Studi Pembangunan Wilayah, Prodi Magister Geografi UGM
dias.oktri.r@mail.ugm.ac.id

Keistimewaan Yogyakarta berdasarkan asal usul menyebut desa yang berada di wilayah kabupaten sebagai kalurahan. Tata kelola kalurahan, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir menjadi fokus pembahasan di tingkat daerah hingga pusat berupa adanya berbagai kebijakan dalam rangka mendorong kemandirian pembangunan di tingkat desa. Salah satu upaya pembangunan tersebut melalui peningkatan modal sosial berupa pemberdayaan masyarakat kalurahan, hal ini intensif dilakukan dengan harapan mampu menjadikan kalurahan menjadi agen perubahan dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Perwujudan upaya tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperkuat dengan adanya kewenangan keistimewaan DIY berupa kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang relevan bagi pengembangan penghidupan masyarakat kalurahan. Tulisan ini bermaksud menjabarkan upaya konkret dalam mewujudkan kedaulatan penghidupan masyarakat kalurahan yang berwawasan keberlanjutan mengacu pendekatan *compass sustainability*. Metode penelitian kombinasi model *sequential explanatory* bersumber dari studi literatur dan observasi. Statistik deskriptif untuk mengetahui arah *compass sustainability* pengelolaan penghidupan masyarakat kalurahan yang telah berjalan. Sedangkan pengelompokkan kualitatif untuk mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan peran kalurahan dalam mewujudkan kedaulatan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Pendekatan *compass sustainability* menunjukkan berbagai indikator dan penilaian yang dibutuhkan stakeholder dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan. Layaknya arah mata angin dalam kompas, pendekatan ini akan menunjukkan dominasi dan perbandingan setiap indikator pembangunan yaitu mengarah atau terjadi kesetimbangan dalam aspek *nature, economy, society,* atau *wellbeing*. Dewasa ini arah pembangunan masyarakat kalurahan di DIY lebih kuat di aspek *economy* dan *well-being*, kalurahan dan masyarakatnya yang telah mampu bergerak mandiri mengandalkan kekuatan potensi ekonomi dan akses yang mudah dalam proses penghidupannya. Aspek *nature* dan *society* perlu diperkuat dalam rangka kesetimbangan pembangunan, peningkatan peran kalurahan khusunya dalam pengelolaan tanah kalurahan untuk pengelolaan sampah, ketahanan pangan, wisata, pelestarian keanekaragaman hayati serta kearifan lokal. Upaya pemerataan kekuatan perlu adanya intervensi dari pemerintah daerah dalam pemerataan akses infrastruktur

dan layanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kalurahan. Pendekatan ini, memberikan gambaran perbandingan porsi pembangunan kalurahan di DIY berdasarkan nilai-nilai alam, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan, sehingga diharapkan dalam proses penentuan kebijakan dapat lebih seimbang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai sebuah kedaulatan berbasis kearifan lokal.
Kata kunci : kedaulatan, penghidupan masyarakat, kalurahan, *sustainability compass*

PENDAHULUAN

Kalurahan dalam Bingkai Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

Desa menempati peran strategis sebagai agen pembangunan negara. Keberadaannya dihirarki terendah dalam tata pemerintahan, memberikan peran pelayanan secara langsung dengan masyarakat. Peran tersebut diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan pembangunan di tingkat masyarakat secara tepat dan cepat sesuai dengan karakteristik lokal wilayah. Kurun waktu 15 tahun terakhir peran desa menjadi salah satu fokus pembahasan di tingkat daerah hingga pusat, salah satunya berupa berbagai kebijakan dalam rangka mendorong kemandirian pembangunan di tingkat desa. Tataran perundangan nasional mengukuhkan peran desa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan keberadaan desa telah ada sebelum Negara Kesaturan Republik Indonesia, sehingga mempunyai susunan dan sistem pemerintahan yang asli. Berdasarkan hak asal-usul, hal tersebut tetap diakui dan diberikan keberlangsungan hidupnya dengan menyesuaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelembagaan pemerintah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari bentuk dan susunan pemerintahan istimewa yang mengakui atas asal-usul bentuk pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai keberlanjutan dari pemerintahan Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Sehingga kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berupa kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang relevan dengan pembahasan mengenai tata kelola desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kalurahan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Menilik tata kelola pemerintahan masa lalu, bentuk organisasi sosial aparatur pemerintahan di Jawa termasuk Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat tidak sebatas sebagai sebuah jaringan kerja tetapi juga berperan sebagai pembagian wilayah kekuasaan (Haspel, 1985). Sehingga pemerintah yang memimpin wilayah tertentu juga memiliki tanggungjawab untuk menggerakan dan mengoptimalkan potensi di wilayahnya dalam rangka pembangunan wilayahnya. Kedudukan tersebut juga berlaku bagi pemerintah kalurahan dengan dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 – 2027 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 yaitu Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Pelaksanaan kebijakan tersebut melalui berbagai strategi penguatan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk a) penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan; b) penanganan stunting, pengarusutamaan gender, inklusi sosial dan disabilitas; c) untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; d) pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan; e) pemberdayaan perekonomian rakyat; dan f) perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Urgensi Kedaulatan Penghidupan Masyarakat Kalurahan

Pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berkaitan erat dengan penghidupan masyarakat wilayah tersebut. Pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan beberapa aspek penghidupan masyarakatnya. Aspek tersebut meliputi kapabilitas, modal, dan aktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Modal dapat secara fisik tampak secara fisik penguasaannya maupun berupa klaim dan akses yang diperlukan oleh individu atau rumah tangga agar mampu memperoleh manfaat atas sumberdaya atau jasa (Chambers & Conway, 1991). Kepemilikan modal tersebut dapat berupa modal alam, modal manusia, modal, fisik, modal finansial, dan modal sosial (DFID, 1999). Modal alam, modal finansial, dan modal fisik merupakan modal berwujud yang dapat dikuasai oleh berbagai pihak. Sedangkan modal manusia dan modal sosial merupakan modal tak berwujud yang umumnya bersifat spesifik dan

melekat pada diri seseorang atau lembaga. Identifikasi kepemilikan modal merupakan bagian penting dalam rangka mengetahui potensi yang dimiliki untuk digunakan secara langsung maupun tidak langsung (Ellis, 2000).

Kepemilikan akses bagi masyarakat Kalurahan mempengaruhi perbedaan kemampuan setiap orang untuk memiliki, mengontrol, bahkan mengklaim atau menggunakan sumberdaya (Scoones, 1998). Struktur organisasi dan keberadaan kebijakan mempengaruhi penghidupan di masyarakat. Penghidupan masyarakat sebagai suatu pendekatan yang memiliki berbagai komponen yang saling memiliki keterkaitan. Keterkaitan antara aset dan akses memunculkan bentuk aktivitas penghidupan dan alternatifnya yang mampu menghasilkan pendapatan. Aktivitas penghidupan yang dilakukan secara terus menerus oleh individu atau rumah tangga akan menjadi penghidupan yang berkelanjutan.

Kalurahan sebagai suatu wilayah memiliki karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang beragam. Keragaman karakteristik tersebut tentunya menimbulkan kerentanan yang beragam pula. Kerentanan dapat berupa kecenderungan peristiwa yang sedang berkembang (tren), adanya guncangan (*shock*) secara tiba-tiba dan tidak terkontrol, atau kejadian yang bersifat musiman (*seasonality*) (DFID, 1999). Hal tersebut merupakan salah satu indikator yang menjadi pertimbangan dalam suatu perencanaan pembangunan yang dapat dilihat berdasarkan kebijakan atau permasalahan yang ada berdasarkan sejarah, situasi politik, kondisi ekonomi makro, situasi perdagangan, iklim, ekologi pertanian, demografi, dan perbedaan kondisi sosial (Scoones, 1998).

Kedaulatan bermakna dasar adanya kemampuan untuk melakukan otonomi domestik dan memiliki otonomi domestik. Sehingga pihak yang berdaulat merupakan pihak yang memiliki kapasitas berupa cakupan wilayah, kewenangan kebijakan, dan sosial masyarakat atau penduduk. (Howland & White, 2009). Pandangan kedaulatan dewasa ini merupakan sebuah tanggung jawab. Adanya tanggung jawab berarti memberikan kewajiban terhadap pihak yang berdaulat untuk menjalankan tata kelola tertentu (Nrangwesti, 2022). Perlunya kedaulatan dalam penghidupan pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagai upaya mengoptimalkan peran berbagai modal dan upaya untuk mengurangi kerentanan di kalurahan dalam rangka pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua upaya tersebut diharapkan mampu memberikan ukuran pembangunan dan pemberdayaan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.

Mengukur Penghidupan Masyakarat Kalurahan yang Berkelanjutan

Kebijakan pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi momentum yang tepat dalam rangka menerapkan sendi-sendi pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu tolok ukur yang dapat diterapkan menggunakan konsep analisis *sustainability compass*. Konsep ini mengklasifikan berbagai aspek atau indikator dalam pembangunan yang diibartkan seperti kompas mata angin (Widodo, Cholidah, Isnaeni, Wibowo, & Abriandi, 2019). Arah kompas mata angin dapat menunjukkan nilai setiap aspek atau indikator. Nilai tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan. Sehingga tidak terdapat indikator yang ditinggalkan karena terdapat upaya untuk menstabilkan pembangunan dari berbagai aspek penghidupan. Indikator tersebut antara lain, a) N (*nature*) untuk aspek alam meliputi seluruh sistem ekologi alami dan kepedulian lingkungan hidup, mulai dari kesehatan ekosistem dan konservasi alam hingga penggunaan sumberdaya dan limbah; b) E (*economy*) untuk aspek ekonomi berupa sistem manusia yang mengubah sumberdaya alam menjadi makanan, tempat tinggal, gagasan, teknologi, industri, jasa, uang, dan pekerjaan; c) S (*society*) untuk aspek masyarakat meliputi institusi, organisasi, budaya, norma, dan kondisi sosial yang membentuk kehidupan kolektif manusia; dan d) W (*well-being*) untuk aspek kesejahteraan meliputi kebahagiaan dan kualitas hidup setiap individu maupun kelompok masyarakat (AtKisson, 1997). Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan potensi kalurahan dalam rangka upaya konkret mewujudkan kedaulatan penghidupan masyarakat kalurahan yang berwawasan keberlanjutan.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan pendekatan metode penelitian kombinasi kuantitatif dengan kualitatif. Metode ini dipilih karena mengkaji fenomena sosial yang membutuhkan membutuhkan perspektif berbeda atau lebih luas dan menjelaskan hasil kuantitatif (Cresswell, 2013). Model penelitian kombinasi yang digunakan berupa model *sequential explanatory* urutan pembuktian atau kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Metode kuantitatif berperan dalam analisis data kuantitatif secara statistik deskriptif untuk mendeskripsikan arah kompas keberlanjutan atau *sustainability compass*. Sedangkan metode kualitatif berperan untuk memperdalam dan menjelaskan data kuantitatif yang telah diperoleh (Sugiyono, 2011). Hasil pendalaman data kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan peran kalurahan dalam mewujudkan kedaulatan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Unit analisis yang dikaji adalah kalurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kalurahan yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon. Hal ini berbeda dengan kelurahan yang merupakan bagian wilayah dari Kapanewon/Kemantren sebagai perangkat Kapanewon/Kemantren. Pemilihan unit analisis kalurahan didasarkan pada kalurahan sebagai institusi pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan dalam mengelola tata pemerintahan secara langsung sesuai dengan potensi yang dimiliki. Adapun jumlah kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 392 kalurahan yang terbagi dalam 4 kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo sebanyak 87 kalurahan, Kabupaten Bantul sebanyak 75 kalurahan, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 144 kalurahan, dan Kabupaten Sleman sebanyak 86 kalurahan.

Pengumpulan data yang dilakukan berupa studi literatur dan observasi sehingga diperoleh data sekunder dan data primer. Sumber utama data sekunder berasal dari dokumen Statistik Potensi Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Statistik Potensi Desa Kabupaten Kulon Progo, Statistik Potensi Desa Kabupaten Bantul, Statistik Potensi Desa Gunungkidul, dan Statistik Potensi Desa Kabupaten Sleman yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten pada tahun 2024. Adapun dokumen pendukung lainnya berupa berbagai dokumen perencanaan daerah, peraturan atau kebijakan daerah, dan laporan pembangunan daerah. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap beberapa fenomena yang menjadi tren setelah mengkaji dari hasil studi literatur. Pengolahan dan analisis data terdiri dari dua tahap yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Tahap pertama adalah pengolahan data kuantitatif secara statistik deskriptif. Penyajian data menggunakan grafik untuk ditelaah pola *sustainability compass*. Pola *sustainability compass* yang terbentuk dilakukan pendalaman dan penjelasan hasil untuk merumuskan kebijakan yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan pemberdayaan penghidupan masyarakah kalurahan. Penyajiannya berupa matriks strategi pembangunan yang berkelanjutan. Adapun variabel data yang dalam tulisan ini dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1 Daftar Variabel Data

Indikator	Variabel Data
Nature (Alam)	Jenis Tempat Pembuangan Sampah
	Kegiatan Pelestarian Lingkungan dan Pengolahan Sampah
	Keberadaan Sungai, Saluran Irigasi, Danau/Waduk/Situ/Bendungan, Embung, dan Mata Air
	Jenis Penggunaan Sungai
	Jenis Penggunaan Embung
	Keberadaan Permukiman di Puncak/Tebing
	Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai
	Keberadaan Permukiman di Bawah SUTET/SUTT/SUTTAS
	Keberadaan Permukiman Kumuh
	Kalurahan yang Mempunyai Sungai
	Kalurahan yang Mempunyai Sungai yang Tercemar Limbah
	Kalurahan menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup
	Sumber Utama Pencemaran Air, Pencemaran Tanah, dan Pencemaran Udara
	Kebiasaan Masyarakat Membakar Ladang/Kebun
	Keberadaan Penggalian Golongan C
	Jenis Bencana Alam
Economy (Ekonomi)	Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk
	Sebagian Besar Penduduk Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Jenis Sub Sektor Utama
	Keberadaan Sarana Perdagangan
	Keberadaan Sarana Akomodasi
	Keberadaan Kelompok Pertokoan dan Pasar
	Keberadaan Toko/Kios Produksi Pertanian
	Jenis Bank
	Keberadaan Koperasi
	Keberadaan Fasilitas Perkreditan
	Jenis Industri Kecil dan Mikro
	Keberadaan Produk Barang Unggulan
	Keberadaan Produk Unggulan Diekspor ke Negara Lain
	Sistem Keuangan Kalurahan
	Keberadaan Badan Usaha dan Aset Kalurahan
Society (Masyarakat)	Keragaman Agama
	Keragaman Suku/ Etnis
	Keragaman Bahasa
	Keberadaan Tempat Ibadah
	Kebiasaan Gotong Royong untuk Kepentingan Umum
	Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan
	Keberadaan Pos Polisi (Polsek, Polres, Polda)

Indikator	Variabel Data
	Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Kalurahan yang Tidak Ada Pos Polisi)
	Keberadaan Korban Bunuh Diri
	Keberadaan Lokasi Berkumpul Anak Jalanan
	Keberadaan Lokasi Gelandangan
	Keberadaan Lokasi Pekerja Seks Komersial (PSK)
	Jenis Perkelahian Massal
	Kalurahan yang Mengalami Perkelahian Massal
	Kategori Korban Perkelahian Massal
	Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal Paling Sering Terjadi
	Jenis Tindak Kejahatan
	Jenis Tindak Kejahatan Paling Sering Terjadi
Well-being (Kesejahteraan)	Keluarga Pengguna Listrik
	Sumber Penerangan Jalan Utama Desa
	Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga
	Sumber Air Minum sebagian Besar Keluarga
	Penggunaan Fasilitas Tempat BAB sebagian Besar Keluarga
	Keberadaan Sarana Pendidikan
	Keberadaan Lembaga Keterampilan
	Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara, Pendidikan Paket A/B/C, Taman Bacaan Masyarakat
	Keberadaan Sarana Kesehatan
	Keberadaan Posyandu dan Posbindu
	Keberadaan Ruang Publik Terbuka
	Keberadaan Fasilitas/Lapangan Olahraga
	Prasarana Transportasi Darat/Darat dan Air menurut Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas
	Keberadaan *Base Transceiver Station* (BTS)
	Keberadaan Sinyal Telepon Seluler
	Keberadaan Sinyal Internet
	Keberadaan Sarana Komunikasi
	Keberadaan Program Televisi
	Keberadaan Program Radio
	Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai Desa
	Paket Layanan Stunting
	Tingkat Pendidikan Tertinggi Lurah
	Keberadaan Kejadian Luar Biasa/Wabah Penyakit
	Keberadaan Penderita Kekurangan Gizi
	Keberadaan Orang yang Dipasung
	Keberadaan Warga Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu

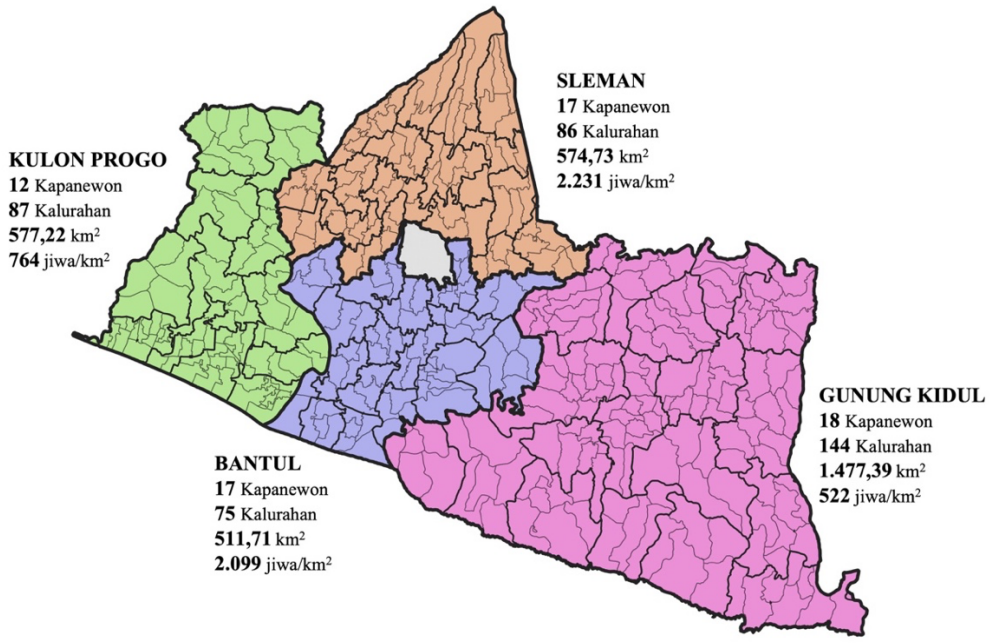
Sumber : Penulis, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

DIY terdiri dari 392 kalurahan yang tersebar di 4 kabupaten dan 64 kapanewon. Banyaknya kalurahan di Kabupaten Kulon Progo adalah 87 kalurahan dari 12 kapanewon. Kabupaten Bantul memiliki 75 kalurahan dari 17 kapanewon, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 144 kalurahan dari 18 kapanewon, dan Kabupaten Sleman sebanyak 86 kalurahan dari 17 kapanewon. Rata-rata satu kapanewon terdiri dari 4 sampai 5 kalurahan. Kapanewon dengan jumlah kalurahan terbanyak adalah Kapanewon Temon di Kabupaten Kulon Progo dengan 15 kalurahan dan Kapanewon Wonosari di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 14 kalurahan. Sedangkan kapanewon dengan jumlah kalurahan tersedikit adalah Kapanewon Srandakan dengan 2 kalurahan dan Kapanewon Pundong, Bambanglipuro, Piyungan, Pajangan di Kabupaten Bantul serta Kapanewon Depok di Kabupaten Sleman yang masing-masing sebanyak 3 kalurahan.

Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah kalurahan terbanyak yaitu 37% dari total kalurahan di DIY. Meskipun memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 522 jiwa per km² pada tahun 2022 berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Hal ini berkaitan dengan karakteristik wilayah yaitu seluas 1.477,39 km² atau 46,55% dari luas DIY. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya perkembangan penduduk yang lebih menyebar. Kabupaten Sleman, meskipun dengan luas wilayah lebih kecil, memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 2.231 jiwa/km², menunjukkan potensi perkotaan yang tinggi dan pemukiman yang lebih terpusat.



Gambar 1 Peta Sebaran Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Sumber : Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 dan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 (diolah), 2024

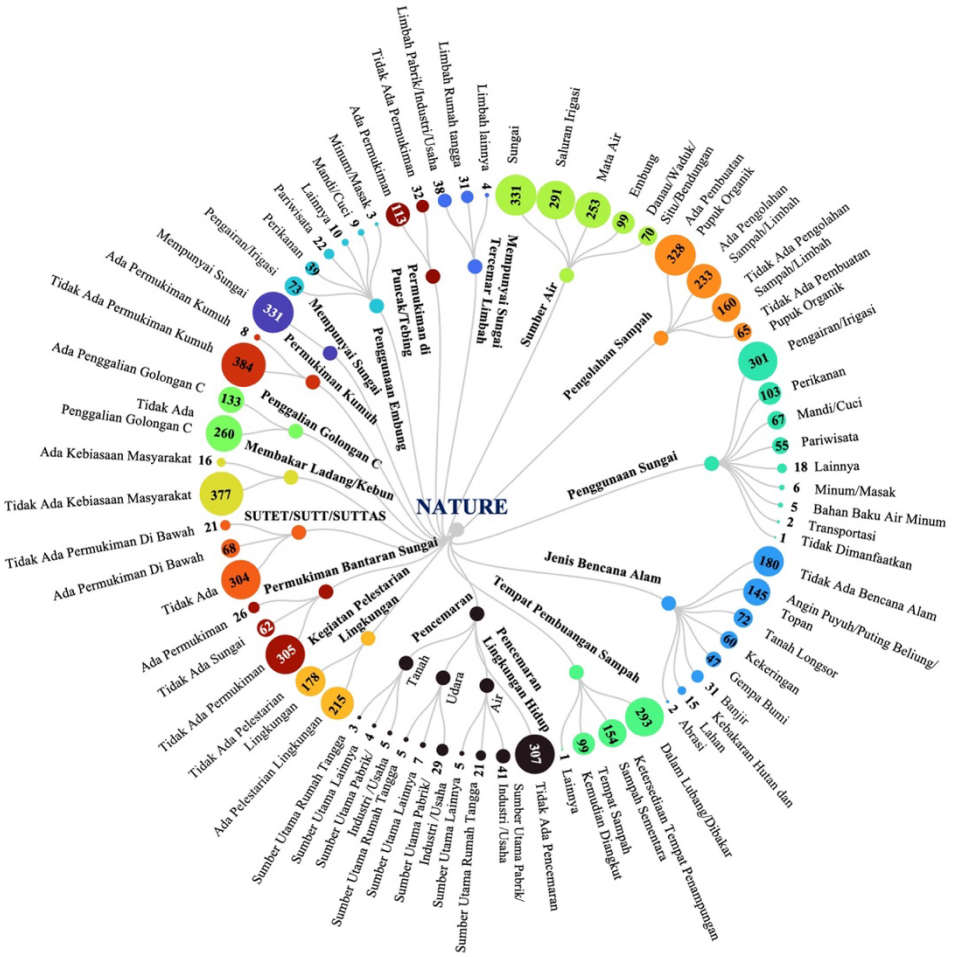
Berdasarkan topografi wilayah, sebaran kalurahan di DIY dibagi menjadi kalurahan yang berada di puncak/ tebing, lereng, dan dataran sedangkan tidak terdapat kalurahan yang berada di lembah. Kalurahan yang berada di puncak/ tebing hanya terdapat di Gunungkidul yaitu 1 kalurahan tepatnya di Kapanewon Nglipar. Pada kawasan lereng Perbukitan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 26 kalurahan yang tersebar hampir di seluruh kapanewon kecuali Kapanewon Temon, Panjatan, Galur, Sentolo, dan Nanggulan. Kalurahan di Kabupaten Bantul dan Sleman yang berada di kawasan lereng sebanyak 21 kalurahan. Kabupaten Bantuk tersebar di Kapanewon Pundong, Pandak, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Kasihan, dan Pajangan yang merupakan bagian dari Pegunungan Sewu, Pegunungan Batur Agung, dan Perbukitan Pajangan . Kabupaten Sleman tersebar di Kapanewon Gamping bagian dari Perbukitan Pajangan, Prambanan Pegunungan Batur Agung, serta Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan yang merupakan bagian dari kawasan kaki Gunung Merapi. Sementara Kabupaten Gunungkidul tercatat jumlah yang jauh lebih tinggi yaitu 76 kalurahan yang tersebar di hampir seluruh kapanewon yang berada di kawasan Pegunungan Sewu dan Batur Agung kecuali Kapanewon Wonosari dan Karangmojo. Hal ini mencerminkan area lereng lebih mudah diakses untuk pemukiman. Kawasan dataran yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 62 kalurahan, diikuti oleh Bantul 54 kalurahan, Gunungkidul 67 kalurahan, dan Sleman 65 kalurahan. Kawasan dataran ini umumnya merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi karena memungkinkan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.

Letak kalurahan terhadap kawasan hutan dan keberadaan tanaman mangrove menunjukkan seluruh kalurahan di DIY tidak terdapat di dalam kawasan hutan. Kalurahan yang berada di tepi/ sekitar hutan terdapat di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki jumlah tertinggi yaitu 38 kalurahan yang tersebar di 12 kapanewon. Kabupaten Sleman terdapat di 5 kalurahan yang berada di Kapanewon Pakem dan Cangkringan. Kapanewon Dlingo di Kabupaten Bantul terdapat 5 kalurahan, sedangkan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 4 kalurahan yang berada di Kapanewon Lendah, Pengasih, dan Kokap. Sebagian besar kalurahan berada di kawasan luar hutan, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 84 kalurahan, Bantul sebanyak 70 kalurahan, Gunungkidul sebanyak 106 kalurahan, dan Sleman sejumlah 81 kalurahan. Berkaitan dengan tanaman mangrove Kulon Progo, terdapat 4 kalurahan yang memiliki tanaman mangrove, sedangkan Bantul memiliki 3 kalurahan. Tanaman mangrove tumbuh di Kapanewon Temon, Wates, Galur, Srandakan, Sanden, dan Kretek yang berada di kawasan pesisir pantai selatan.

Potensi Penghidupan Masyarakat Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Nature

Indikator *Nature* atau alam terdiri dari 16 variabel dengan masing-masing memiliki karakteristik sebagai keunggulan, potensi, permasalahan, atau sumber kerentanan suatu wilayah. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu parameter tingkat kesadaran dan langkah konkret dalam mengimplementasikan praktik konservasi lingkungan. Kalurahan di DIY yang telah menyelenggarakan hal tersebut sebanyak 305 kalurahan atau setara dengan 78%. Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 71 kalurahan telah melakukan kegiatan tersebut, diikuti Kabupaten Sleman sebanyak 65 Kalurahan. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 52 kalurahan dan Bantul sebanyak 43 kalurahan.



Gambar 2 Indikator *Nature* dalam *Sustainability Compass*
Sumber : Statistik Potensi Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (diolah), 2024

Kegiatan pengelolaan sampah masyarakat yang dikubur dalam lubang atau dibakar masih cukup tinggi yaitu sekitar 293 kalurahan atau sebesar 74%. Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah tertinggi yaitu 130 kalurahan yang membuang sampah di lubang atau membakarnya, Kabupaten Kulon Progo juga menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 85

kalurahan atau hampir seluruh kalurahan, sementara Kabupaten Bantul dan Sleman relatif lebih baik. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Berkaitan dengan pengolahan sampah menjadi pupuk organik 84% kalurahan terdapat kegiatan tersebut. Pencemaran lingkungan menunjukkan Kabupaten Bantul memiliki proporsi kalurahan tertinggi yang mengalami pencemaran air dari industri yaitu sebanyak 22 Kalurahan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan industri. Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah kalurahan tertinggi yang tidak mengalami pencemaran.

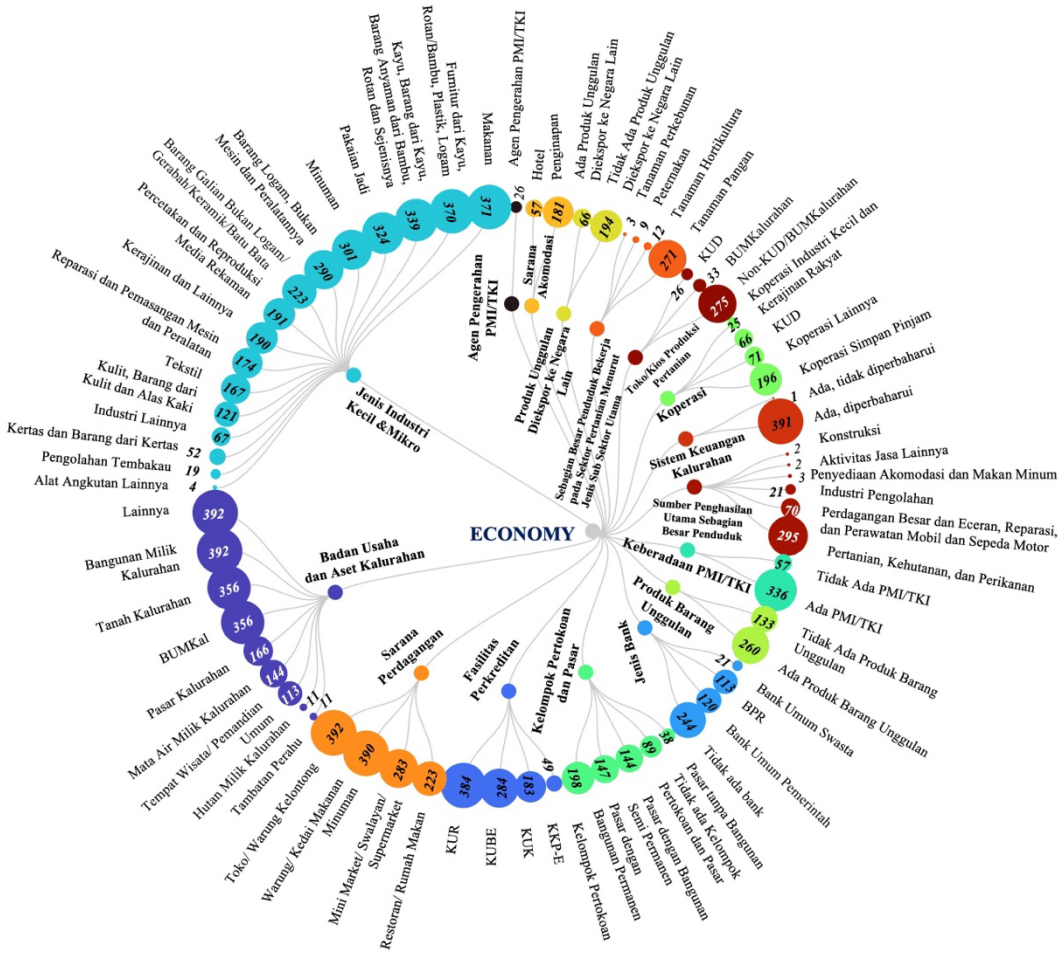
Keberadaan sumberdaya air menunjukkan seluruh kabupaten memiliki sungai dan saluran irigasi yang melimpah dengan Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah Kalurahan terbanyak dengan mata air yaitu sebanyak 91 Kalurahan, yang merupakan aset berharga yang memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan berkaitan dengan kondisi geografis wilayahnya yang tidak mampu menyimpan air permukaan secara baik. Pemanfaatan sumberdaya air berupa pengairan/irigasi merupakan penggunaan utama sungai di semua kabupaten khususnya pemanfaatannya pertanian. Sebanyak 8 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan sungai untuk kegiatan mandi atau cuci, hal ini dapat menimbulan masalah kesehatan dan sanitasi. Pemanfaatan embung untuk pengairan atau irigasi dominan di seluruh kabupaten. Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah kalurahan terbanyak dengan embung yang digunakan untuk pariwisata.

Berdasarkan pola pemukiman Kabupaten Gunungkidul memiliki proporsi kalurahan terbanyak dengan pemukiman di puncak atau tebing yaitu sebanyak 52 kalurahan, menunjukkan kerentanan terhadap bencana pergerakan tanah. Begitu juga di Kabupaten Kulon Progo yang tersebar di 26 kalurahan. Kabupaten Bantul memiliki kalurahan terbanyak dengan pemukiman di bantaran sungai yaitu 13 kalurahan. Hal ini berkaitan dengan letak geografisnya yang berada dataran Gunung Merapi yang menghubungkan dengan pantai selatan, sehingga memiliki potensi meningkatnya risiko banjir. Potensi kejadian bencana alam menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki proporsi tertinggi kalurahan yang memiliki potensi bencana angin puyuh/puting beliung/topan yaitu 64 Kalurahan, kekeringan tersebar di 33 Kalurahan, dan gempa bumi yang tersebar di 29 kalurahan. Hal ini, menunjukkan kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam.

Indikator Economy

Indikator *Economy* atau ekonomi terdiri dari 14 variabel dengan masing-masing memiliki karakteristik sebagai keunggulan, potensi, permasalahan, atau sumber kerentanan suatu wilayah. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk setiap kalurahan yaitu sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut mendominasi terutama di Kabupaten Gunungkidul yaitu 137 kalurahan atau tersebar di 95%. Dominasi tersebut menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada sektor primer. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian menurut jenis sub sektor utama adalah subsektor pertanian menunjukkan tanaman pangan merupakan subsektor yang dominan di seluruh DIY yaitu sebanyak 271 kalurahan. Adapun penghasilan penduduk yang melakukan kegiatan perdagangan besar dan eceran juga signifikan, khususnya di Bantul yaitu sebanyak 28 Kalurahan. Adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai salah satu mata pencaharian penduduk tersebar hampir di seluruh kalurahan di DIY. Jumlah kalurahan dengan PMI cukup tinggi di seluruh DIY yaitu tersebar di 336 kalurahan atau 86%, yang tertinggi di Gunungkidul. Tren tersebut memberikan tantangan untuk mengembangkan program dukungan dan perlindungan bagi PMI, serta memanfaatkan remitansi untuk pembangunan ekonomi lokal.



Gambar 3 Indikator *Economy* dalam *Sustainability Compass*
Sumber : Statistik Potensi Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (diolah), 2024

Sendi-sendi perekonomian di setiap kalurahan beragam. Sebaran sarana perdagangan warung/kedai makanan minuman tersebar luas di seluruh DIY yaitu 390 kalurahan, hal ini

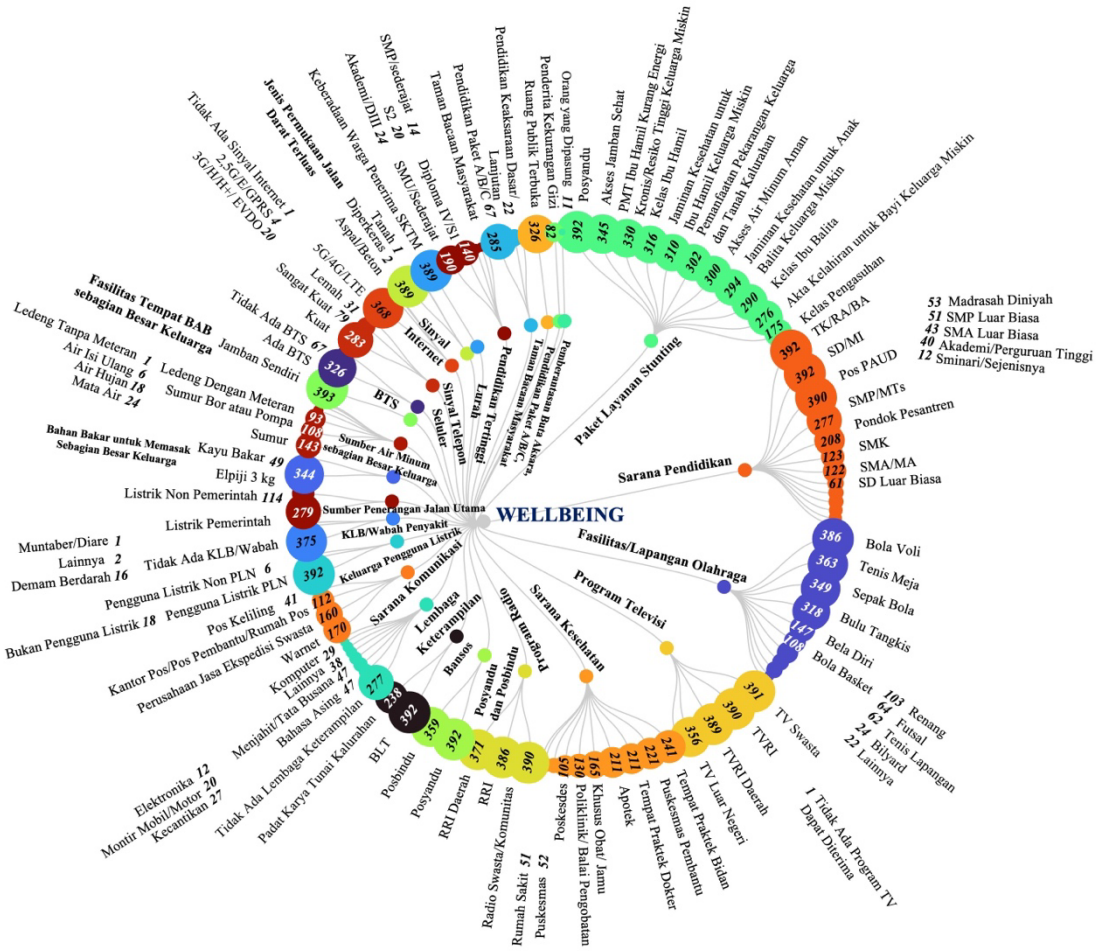
menunjukkan vitalitas ekonomi lokal di tingkat kalurahan. Keberadaan minimarket atau supermarket juga tersebar signifikan yaitu tersebar di 283 kalurahan, menunjukan adanya penetrasi ritel modern. Sarana akomodasi berupa penginapan lebih banyak daripada hotel, mengindikasikan potensi pengembangan pariwisata lokal yang lebih berbasis masyarakat. Adapun Kabupaten Sleman memiliki jumlah hotel dan penginapan yang paling banyak. Adanya kelompok pertokoan dan pasar menunjukkan pasar dengan bangunan semi permanen dan tanpa bangunan cukup banyak di beberapa kabupaten. Ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur pasar untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal. Toko atau kios produksi pertanian didominasi toko kios non-KUD/BUMDes hal ini menunjukkan sektor swasta lebih berperan dalam penyediaan sarana prasarana pertanian, perlu adanya upaya optimalisasi peran KUD/BUMDes berkaitan dengan hal tersebut. Jenis industri kecil dan mikro terdiri dari industri furnitur, makanan, dan pakaian jadi merupakan jenis industri yang paling dominan, menunjukkan potensi untuk pengembangan sektor manufaktur berbasis sumberdaya lokal. Sebagian besar kalurahan memiliki produk barang unggulan, tetapi ekspor produk unggulan relatif rendah. Perlu adanya upaya untuk peningkatan pemasaran dan pengembangan produk ekspor.

Lembaga jasa keuangan tersebar beragam seuai dengan tingkat perkembangan wilayah. Keberadaan bank umum pemerintah lebih dominan dibandingkan jenis bank lainnya di DIY, tetapi jumlah kalurahan tanpa bank juga tinggi yaitu 244 kalurahan. Ini menunjukkan perlunya perluasan akses keuangan di daerah terpencil. Keberadaan koperasi simpan pinjam paling banyak tersebar di DIY, mengindikasikan potensi untuk meningkatkan akses keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun fasilitas perkreditan menempatkan KUR paling banyak diakses, hal ini memberikan potensi untuk meningkatkan akses modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berkaitan dengan kelembagaan ekonomi kalurahan. Sebagian besar kalurahan sudah memiliki sistem keuangan desa dan BUMDes/BUMKal, mengindikasikan kemajuan dalam pengelolaan keuangan dan perekonomian desa.

Indikator Well-being

Indikator *Well-being* atau kesejahteraan terdiri dari 26 variabel dengan masing-masing memiliki karakteristik sebagai keunggulan, potensi, permasalahan, atau sumber kerentanan suatu wilayah. Akses listrik saat ini menjadi salah satu kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hampir semua kalurahan di DIY terjangkau akses listrik dari PLN yaitu 392 kalurahan. Namun, masih ada beberapa kalurahan yang menggunakan listrik non-PLN atau tidak memiliki akses listrik sama sekali, terutama di Kulonprogo dan Gunungkidul yaitu masing-masing 9 kalurahan dan 11 kalurahan. Akses listrik juga berhubungan dengan

penerangan jalan guna kenyamanan dan keamanan lingkungan. Akses listrik pemerintah merupakan sumber penerangan jalan utama di sebagian besar kalurahan tetapi di Kabupaten Gunungkidul memiliki proporsi yang signifikan yang menggunakan listrik non-pemerintah yaitu sebanyak 74 kalurahan. Jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh sebagian besar keluarga setiap kalurahan adalah gas elpiji 3 kg, tetapi kayu bakar masih digunakan di beberapa kalurahan, terutama di Kabupaten Gunungkidul. Tren ini menunjukkan perbedaan tingkat ekonomi dan akses ke energi modern.



Gambar 4 Indikator *Well-being* dalam *Sustainability Compass*
Sumber : Statistik Potensi Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (diolah), 2024

Sumber air minum yang berasal dari sumur merupakan sumber air minum utama di sebagian besar kalurahan, diikuti oleh air ledeng (dengan dan tanpa meteran), dan sumur bor. Kabupaten Gunungkidul memiliki proporsi yang signifikan yang menggunakan air hujan, yang mungkin menunjukkan keterbatasan akses ke sumber air bersih. Sedangkan berkaitan dengan sanitasi keluarga, hampir semua Kalurahan memiliki jamban sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa akses sanitasi dasar telah baik.

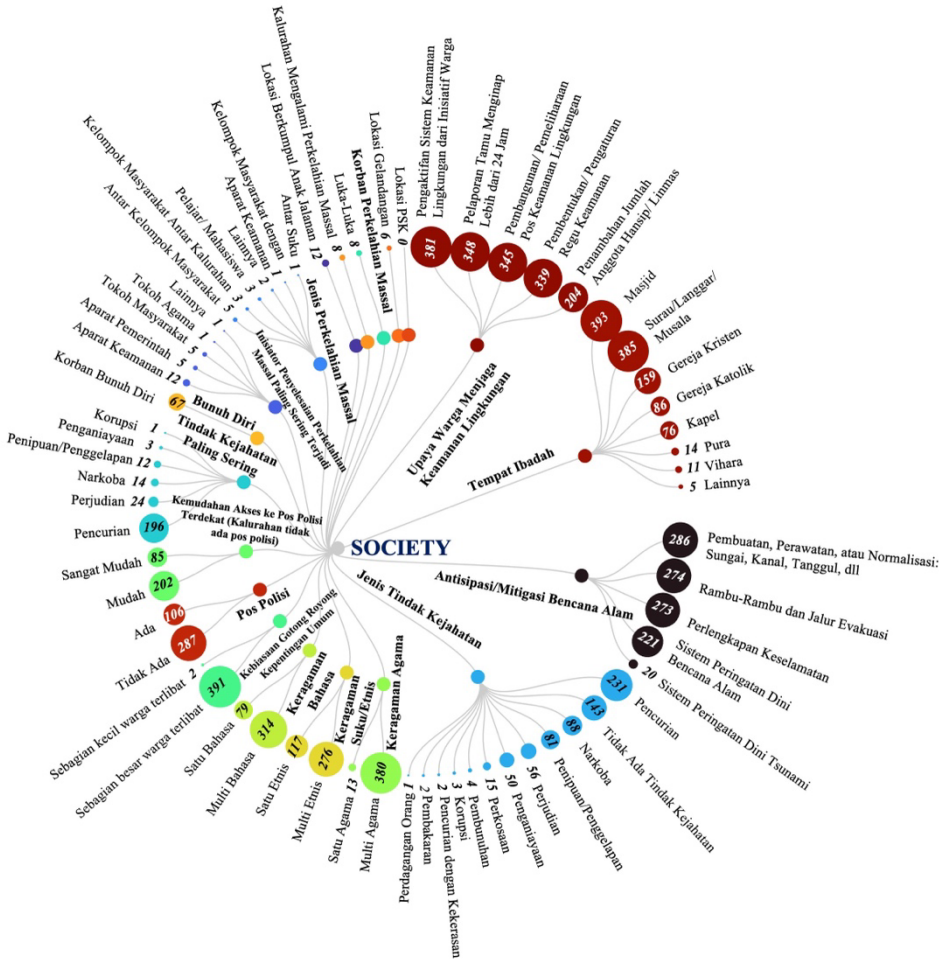
Upaya pengentasan kebodohan melalui tersebar meratanya sarana pendidikan. Akses ke pendidikan dasar (PAUD, TK, SD) sangat baik di seluruh kalurahan. Namun, akses ke pendidikan menengah dan tinggi lebih bervariasi antar kabupaten. Pendidikan luar biasa juga tersebar di semua kabupaten, tetapi proporsi terbanyak di Sleman. Pendidikan keterampilan kerja atau vokasional difasilitasi melalui lembaga keterampilan. Lembaga keterampilan tersebar di semua kabupaten, tetapi Gunungkidul memiliki jumlah kalurahan tertinggi tanpa lembaga keterampilan. Program pemberantasan buta aksara melalui taman bacaan masyarakat tersebar luas, tantangan saat ini buta aksara tidak hanya berkaitan dengan baca tulis. Akan tetapi, upaya meningkatkan kesadaran gemar literasi. Tingkat pendidikan lurah memberikan motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan. Proporsi lurah dengan pendidikan SMA/sederajat dan Diploma IV/S1 paling tinggi, namun masih terdapat lurah lulusan SMP/sederajat. Sedangkan, lurah yang telah menempuh pendidikan S2 sebanyak 20 orang.

Sarana kesehatan berupa Puskesmas pembantu tersebar paling banyak, tetapi variasi akses ke fasilitas kesehatan lainnya (rumah sakit, tempat praktik dokter/bidan) ada di antara kabupaten. Posyandu dan Posbindu tersebar luas, menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Paket layanan stunting telah menerapkan berbagai program untuk mengurangi stunting, tetapi cakupannya masih bervariasi antar kalurahan. Adanya kejadian luar biasa atau wabah penyakit jumlah kasus yang terjadi relatif rendah di setiap kalurahan. Kejadian adanya penderita kekurangan gizi di Kabupaten Gunungkidul memiliki proporsi tertinggi, menunjukkan perlunya intervensi kesehatan yang lebih intensif. Sedangkan, jumlah orang yang di pasung relatif rendah di seluruh DIY. Pelayanan terhadap warga penerima surat keterangan tidak mampu tersebar di seluruh kalurahan. Adapun program bagi masyarakat tidak mampu berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan padat karya tunai desa tersebar cukup luas, hal ini sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

Sarana ruang publik terbuka dan fasilitas olahraga tersebar cukup luas, tetapi bervariasi di setiap kalurahan. Sarana transportasi sebagian besar kalurahan memiliki akses jalan beraspal atau beton. Akses telekomunikasi berupa akses ke BTS dan sinyal telepon seluler dan internet relatif baik di seluruh DIY, meskipun kalurahan di Kabupaten Gunungkidul masih tertinggi dalam ketidakadaan akses BTS. Sarana komunikasi berupa warnet, kantor pos, ekspedisi tersebar di semua kabupaten, tetapi aksesnya lebih terbatas di beberapa kalurahan yang memiliki kendala medan geografis dan jumlah penduduk. Jangkauan siaran program TV dan radio memiliki akses relatif baik di seluruh kalurahan.

Indikator Society

Indikator *Society* atau alam terdiri dari 18 variabel dengan masing-masing memiliki karakteristik sebagai keunggulan, potensi, permasalahan, atau sumber kerentanan suatu wilayah Berdasarkan kelompok kepercayaan dan kelompok masyarakat, dominasi kalurahan memiliki penduduk dengan latar belakang multiagama dan multietnis, namun di Kabupaten Gunungkidul memiliki proporsi kalurahan dengan satu etnis yang lebih tinggi daripada multi etnis. Berkaitan dengan keragaman bahasa, sebagian besar kalurahan menggunakan multi bahasa, hal ini mengindikasikan adanya interaksi sosial yang beragam. Tempat ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan menunjukkan sebaran yang merata khususnya agama yang diyakini oleh mayoritas masyarakat. Masjid dan mushola serta sejenisnya tersebar merata hampir di setiap kalurahan. Adapun gereja kristen dan katolik juga tersebar merata.



Gambar 5 Indikator *Society* dalam *Sustainability Compass*
Sumber : Statistik Potensi Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (diolah), 2024

Kebiasaan gotong-royong merupakan tradisi masyarakat Indonesia. Sebagian besar kalurahan memiliki kebiasaan gotong royong untuk kepentingan umum yang tinggi, hal ini menunjukkan keaktifan masyarakat dalam kegiatan sosial. Berbagai upaya untuk menjaga keamanan lingkungan dilakukan di seluruh kalurahan dan bervariasi kegiatan yang dilakukan

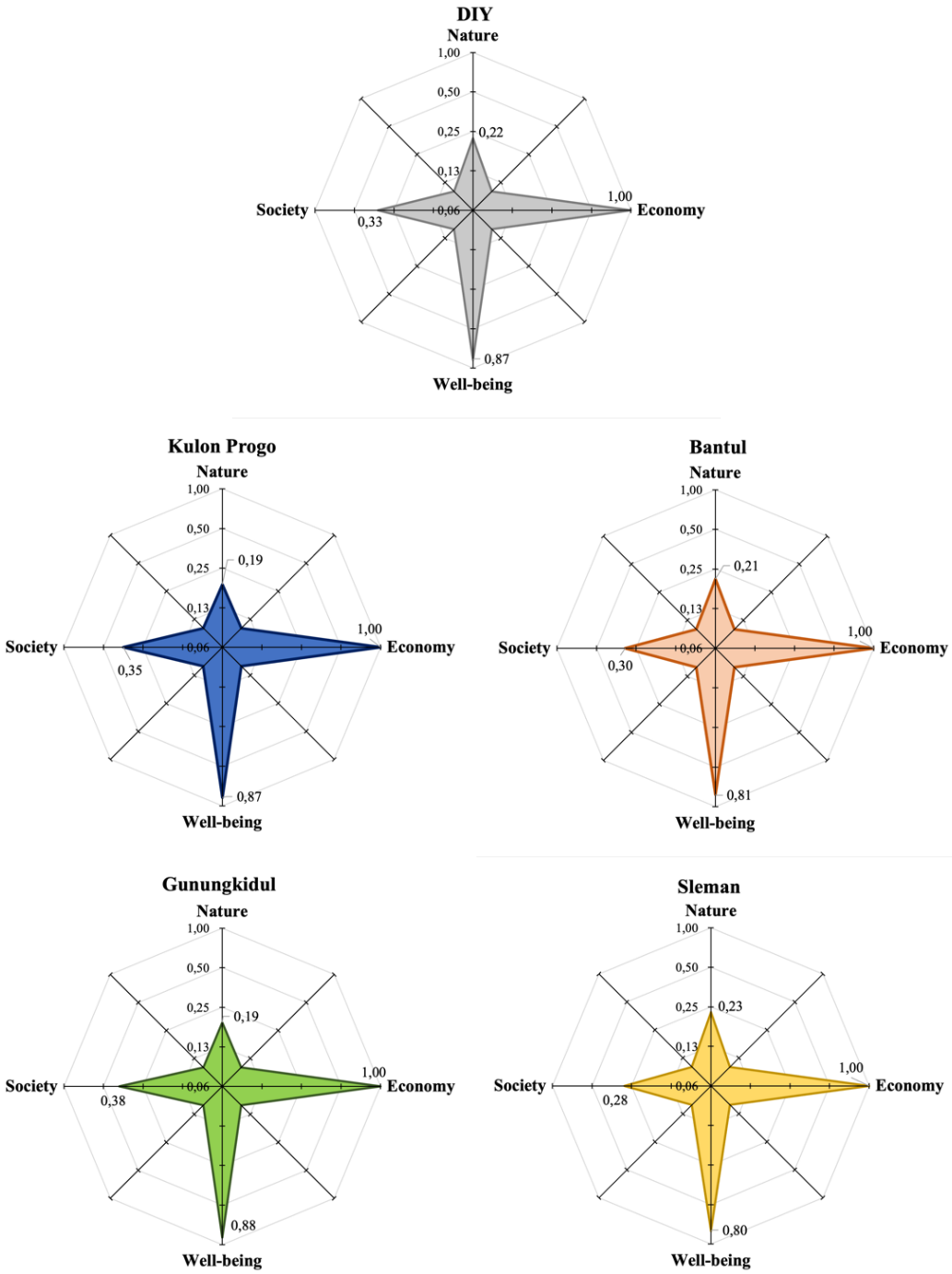
antar kalurahan. Penjaminan keamanan oleh pemerintah telah diupayakan mampu mengakomodir pelayanan bagi seluruh masyarakat. Sebagian besar kalurahan memiliki akses mudah ke pos polisi, tetapi di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat kalurahan yang tidak memiliki akses pos polisi terdekat yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan upaya menjaga ketentraman wilayah terhadap risiko bencana telah dilakukan. Berbagai upaya antisipasi dan mitigasi bencana bervariasi antar kalurahan, hal ini dimungkinkan karena perbedaan jenis dan tingkat risiko dalam upaya kesiapsiagaan. Jumlah kalurahan dengan kasus bunuh diri bervariasi antar kalurahan. Jumlah kalurahan yang mengalami perkelahian massal relatif rendah di seluruh DIY, tetapi Sleman memiliki angka tertinggi. Perkelahian massal di Kabupaten Sleman terutama antar pelajar atau mahasiswa, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap potensi tersebut. Pencurian merupakan jenis tindak kejahatan yang paling sering terjadi di seluruh DIY, diikuti oleh penipuan atau penggelapan dan penyalahgunaan atau pengedaran narkoba.

Arah Kecenderungan *Sustainability Compass* Potensi Penghidupan Masyarakat Kalurahan masing-masing Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sustainabilitity Compass mengadaptasi dari konsep grafik pentagon modal atau aset yang di kembangkan oleh DFID (1999). Arah mata angin pada kompas memberikan gambaran dari variasi modal atau aset. Titik tengah pertemuan garis yang menggambarkan *zero access* sedangkan garis terluar merepresentasikan akses maksimum ke aset. Skor potensi penghidupan masyarakat kalurahan di DIY masing-masing adalah sebagai berikut, skor lingkungan (0,22), skor ekonomi 1,00, skor kesejahteraan (0,87, dan skor sosial (0,33).

Pembangunan penghidupan masyarakat kalurahan pada bidang ekonomi harus memanfaatkan potensi sektor unggulan masing-masing agar terjadi proses diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian. Keberadaan kalurahan di Kabupaten Sleman yang mempunyai kedekatan dan kekuatan dengan dengan sektor pendidikan dan riset, memiliki potensi pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan yang terus berkembang. Kalurahan di Kabupaten Bantul memiliki kekuatan dalam pengoptimalan sektor perdagangan, terutama dalam mengembangkan UMKM dan pariwisata. Kulon Progo memiliki fokus pada kegiatan pertanian organik dan wisata alam yang berbasis masyarakat termasuk pengelolaannya. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul, meskipun dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian, memiliki potensi besar dalam pariwisata dan pemanfaatan remitansi PMI.



Gambar 6 Arah Kecenderungan *Sustainability Compass* Potensi Penghidupan Masyarakat Kalurahan

Sumber : Statistik Potensi Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (diolah), 2024

Pendekatan yang berkelanjutan memerlukan integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan mitigasi bencana. Terdapat hal yang menarik yaitu adanya disparitas skor lingkungan pada tataran kabupaten dengan kalurahan di Kabupaten Sleman menunjukkan pengelolaan lingkungan yang relatif baik. Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul menunjukkan tantangan yang signifikan, terutama dalam pengelolaan sampah dan mitigasi bencana. Kabupaten Gunungkidul memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam.

Sehingga diperlukan intervensi untuk mengoptimalkan pengelolaan lingkungan di kedua kabupaten tersebut.

Skor kesejahteraan yang tinggi (0,87) merupakan rata-rata dari kinerja yang beragam. Kabupaten Gunungkidul (0,88) memiliki skor tertinggi, sementara Sleman (0,80). Disparitas ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan akses layanan dasar, terutama di Sleman, seperti akses air bersih, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Strategi pembangunan kesejahteraan harus memastikan pemerataan akses layanan dasar di semua kalurahan sesuai dengan kondisi kependudukan. Skor sosial (0,33) rata-rata kalurahan di DIY dan Kabupaten Gunungkidul (0,38) menunjukkan keharmonisan sosial yang lebih baik dibandingkan Bantul dan Sleman (0,30 dan 0,28). Strategi pembangunan sosial harus memperkuat kerukunan dan keamanan di semua kabupaten, dengan fokus pada peningkatan kerjasama antar-kelompok masyarakat dan peningkatan akses layanan keamanan, terutama di daerah yang rawan konflik akibat terjadinya urbanisasi.

Strategi Optimalisasi Potensi Penghidupan Masyarakat Kalurahan masing-masing Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Arah Kecenderungan *Sustainability Compass*

Pendekatan *compass sustainability* menunjukkan berbagai indikator dan penilaian yang dibutuhkan stakeholder dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan. Layaknya arah mata angin dalam kompas, pendekatan ini akan menunjukkan dominasi dan perbandingan setiap indikator pembangunan yaitu mengarah atau terjadi kesetimbangan dalam aspek *nature, economy, society,* atau *wellbeing*. Dewasa ini arah pembangunan masyarakat kalurahan di DIY lebih kuat di aspek *economy* dan *well-being*, kalurahan dan masyarakatnya yang telah mampu bergerak mandiri mengandalkan kekuatan potensi ekonomi dan akses yang mudah dalam proses penghidupannya. Aspek *nature* dan *society* perlu diperkuat dalam rangka kesetimbangan pembangunan, peningkatan peran kalurahan khusunya dalam pengelolaan tanah kalurahan untuk pengelolaan sampah, ketahanan pangan, wisata, pelestarian keanekaragaman hayati serta kearifan lokal. Upaya pemerataan kekuatan perlu adanya intervensi dari pemerintah daerah dalam pemerataan akses infrastruktur dan layanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kalurahan.

Upaya optimalisasi potensi penghidupan masyarakat kalurahan untuk mencapai kedaulatan kalurahan harus mengintegrasikan berbagai aspek kearifan lokal, termasuk kelembagaan, pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang. Berkaitan dengan aspek alam, penting untuk dapat mengintegrasikan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam dengan pelestarian

lingkungan. Hal ini sesuai dengan prinsip keberlanjutan yaitu *hamemayu hayuning bawana.* Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan lingkungan melalui pembentukan kelompok atau komunitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dengan tetap memperhatikan potensi kearifan lokal. Pemanfaatan tanah kalurahan secara berkelanjutan adalah usaha memanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung akses pengelolaan sampah, air bersih, dan pengolahan limbah juga sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan yang sehat.Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan sarana untuk memastikan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi mendatang.

Tabel 2 Strategi Optimalisasi Potensi Penghidupan Masyarakat Kalurahan berdasarkan Arah Kecenderungan *Sustainability Compass*

Indikator	**Strategi**
Nature (Alam)	1. Menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan mendukung upaya pelestarian kearifan lokal. 2. Menerapkan praktik dan inovasi pelestarian lingkungan hidup di seluruh kalurahan. 3. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan lingkungan seperti edukasi dan pemantauan. 4. Memanfaatkan tanah kalurahan untuk kegiatan pertanian berkelanjutan dan kegiatan ramah lingkungan. 5. Membangun infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah, air, dan sanitasi di tingkat kalurahan.
Economy (Ekonomi)	1. Mendorong pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal dan produk khas masing-masing kalurahan. 2. Meningkatkan akses masyarakat khususnya generasi muda terhadap kegiatan kewirausahaan. 3. Mengoptimalkan potensi pariwisata dengan mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik. 4. Mengembangkan sistem koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Membangun jaringan distribusi dan pemasaran untuk mempromosikan produk lokal.
Society (Sosial)	1. Memperkuat nilai gotong-royong dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum-forum komunitas terkait kebudayaan, keamanan, dan kepedulian sosial. 3. Mengadakan kegiatan budaya dan tradisi lokal untuk memperkuat identitas masyarakat. 4. Mendorong pembentukan grup-grup masyarakat untuk kerjasama dalam penyelesaian masalah sosial.

Indikator	Strategi
	5. Mengintegrasikan program-program sosial dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan guna memberikan wadah terhadap pemuda agar tidak menimbulkan potensi perilaku menyimpang.
Well-being (Kesejahteraan)	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. 2. Mengadakan program-program kesehatan masyarakat yang mendukung gizi dan sanitasi. 3. Mengembangkan fasilitas publik yang mendukung kesehatan, seperti posyandu dan ruang terbuka hijau. 4. Meningkatkan distribusi akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. 5. Menggelar edukasi kesehatan yang melibatkan masyarakat dan institusi kesehatan setempat.

Sumber : Penulis, 2024

Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM yang sesuai dengan kearifan lokal dan produk khas daerah dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi pengangguran di perdesaan. Koperasi sebagai wadah usaha bersama bisa menjadi mekanisme penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelatihan kewirausahaan, masyarakat dapat belajar cara memaksimalkan potensi lokal dan memasarkan produk mereka. Pariwisata yang mengedepankan budaya lokal berpotensi besar dalam menarik wisatawan, sekaligus memperkuat identitas budaya daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat krusial. Dengan mempromosikan nilai gotong-royong, masyarakat akan lebih berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan komunitas. Sehingga diharapkan mampu membangun semangat *nyawiji, greget, sengguh, lan ora mingkuh.* Kegiatan-kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat dapat memperkuat solidaritas dan identitas budaya lokal. Pembentukan kelompok masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelesaian masalah sosial dapat menggugah semangat kolektif. Hal ini, sejalan dengan upaya untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai kebudayaan serta kearifan lokal. Pendidikan masyarakat tentang keragaman budaya penting untuk menciptakan toleransi dan saling menghargai, yang mana berkontribusi langsung terhadap keharmonisan sosial di kalurahan.

Konteks kesejahteraan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan adalah kunci dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Program-program kesehatan seperti penyuluhan gizi dan sanitasi yang melibatkan partisipasi masyarakat harus diadakan untuk

menjamin kesehatan yang baik di kalangan penduduk. Pembangunan fasilitas publik, termasuk posyandu dan akses terhadap air bersih, merupakan langkah konkret yang dapat diambil untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan teknologi, tradisi, dan keahlian lokal, masyarakat di DIY berpotensi untuk membangun kedaulatan penghidupan yang berkelanjutan. Fokus pada nilai-nilai kearifan lokal, budaya gotong-royong, serta pelestarian lingkungan hidup seharusnya dijadikan landasan dalam setiap proses perencanaan dan implementasi program di kalurahan.

REFLEKSI KEBERLANJUTAN

Analisis terhadap indikator alam, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan menunjukkan bahwa kalurahan memiliki beragam potensi yang dapat dioptimalkan sesuai karakteristik wilayahnya. Keseluruhan potensi kalurahan di DIY terlihat menjanjikan untuk mencapai kedaulatan penghidupan masyarakat yang berwawasan keberlanjutan. Melalui sinergi antara pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi, penguatan sosial, dan peningkatan kesejahteraan, masyarakat dapat membangun penghidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Melihat dari perspektif kebijakan pembangunan, perbedaan sebaran kalurahan dan perbedaan karakteristik wilayah ini harus diperhatikan dalam perencanaan yang lebih besar. Ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan pengembangan infrastruktur harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kalurahan. Pembangunan yang bersifat inklusif dan terarah dapat membantu menciptakan keseimbangan dalam pertumbuhan antar daerah, serta memenuhi kebutuhan penduduk yang berbeda. Strategi yang tepat akan mendukung tata kelola yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

AtKisson, A. 1997. *About The Sustainability Compass*.

Chambers, R., & Conway, R. 199. *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concept for the 21st Century*. IDS Discussion 296.

Cresswell, J. W. 2013. *Steps in Conducting a Scholarly Mixed Methods Study*. DBER Speaker Series 48.

DFID. 1999. *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. London : DFID.

Ellis, F. 2000. *Rural Livelihood and Diversity in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.

Haspel, C. v. 1985. *Overwicht in Overleg : Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930*. Dordrecht: Foris Publications.

Howland, D., & White, L. 2009. *The State of Sovereignity Territories, Laws, Populations*. Bloomington: Indiana University Press.

Nrangwesti, A. 2022. Konsep Kedaulatan dalam Perspektif Hukum Internasional. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, *5(1),* 11-24.

Scoones, I. 1998. *Sustainable Rural Livelihoods: a framework for analysis*. Institute of Development Studies (IDS).

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, W. E., Cholidah, S. N., Isnaeni, A. P., Wibowo, K. T., & Abriandi, E. (2019). Mengukur Kepuasan Masyarakat Pada Program CSR di Desa Kertajaya: Sebuah Analisis Menggunakan Metode Sustainability Compass. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, 3(1), 31-54.

Publikasi Statistik

BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2024. *Statistik Potensi Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

BPS Kabupaten Kulon Progo. 2024. *Statistik Potensi Desa Kabupaten Kulon Progo.*

BPS Kabupaten Bantul. 2024. *Statistik Potensi Desa Kabupaten Bantul.*

BPS Kabupaten Gunungkidul. 2024. *Statistik Potensi Desa Gunungkidul.*

BPS Kabupaten Sleman. 2024. *Statistik Potensi Desa Kabupaten Sleman.*

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

PROFIL SINGKAT PENULIS

Saya Dias Oktri Raka Setiadi, S.Si. merupakan pria kelahiran Sleman, 02 Oktober 1997. Sejak taman kanak-kanak hingga sarjana penulis selesaikan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di SD Negeri Kentungan, SMP Negeri 4 Pakem, dan Departemen Geografi Pembangunan Fakultas Geografi UGM. Aktivitas ilmiah penulis tekuni mulai dari menjadi asisten praktikum kuliah pemberdayaan masyarakat dan perencanaan proyek, menjadi asisten peneliti di Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional UGM dan Fakultas Geografi UGM , serta berbagai kegiatan perlombaan karya tulis dan seminar. Pengalaman bekerja pernah menjadi fasilitator peningkatan kapasitas desa wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan tenaga fasilitator lapangan optimalisasi kelompok pengelola sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Aktivitas organisasi berkecimpung dalam kegiatan Pramuka sebagai Ketua Dewan Satuan Karya Pramuka Pariwisata Kwarcab Sleman masa bakti 2016-2020 dan Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kwarcab Sleman masa bakti 2019-2024. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan Magister Geografi di Universitas Gadjah Mada. Korespondensi kepada penulis dapat melalui email diaswreksa@gmail.com.

Optimalisasi Usaha Mikro DIY melalui Klasterisasi dan Digitalisasi: Strategi Menuju Ekonomi Berdaya Saing

Dwi Supatmi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi Indonesia dengan penopang utama dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bappeda DIY mencatatkan bahwa pada tahun 2017 setidaknya 98,4 persen perekonomian Yogyakarta dikontribusi oleh UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 79 persen dari total lapangan kerja. Yang kemudian menjadi perhatian adalah bahwa dari ketiga jenis usaha ini, Usaha Mikro memiliki porsi terbanyak dibandingkan Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Kenaikan pesat Usaha Mikro dibandingkan Usaha Kecil dan Usaha Menengah pada tahun 2021 mengindikasikan adanya usaha yang turun kelas atau adanya pemain baru pada Usaha Mikro. Sebagaimana diketahui, Usaha Mikro cenderung kecil dengan permodalan dan hasil penjualan yang lebih rendah dibandingkan jenis usaha lain. Perlu adanya upaya peningkatan kelas Usaha Mikro agar lebih berdaya saing dan berkontribusi bagi perekonomian. Upaya ini seringkali dihadapkan pada kendala struktural seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, akses pasar yang terbatas, dan persaingan yang semakin ketat dalam perdagangan bebas (Bappeda DIY, 2022). Studi ini mengusulkan pendekatan berbasis klasterisasi dan digitalisasi untuk membantu UMKM DIY meningkatkan skala usahanya. Melalui analisis data UMKM DIY pasca-implementasi Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019, data Potensi Desa (PODES) dan data makro ekonomi DIY serta studi literatur, penelitian ini menyusun pemetaan jenis usaha dan sektor usaha DIY, klasterisasi usaha berdasar produk atau industri unggulan agar bisa mencapai skala ekonomi, peningkatan akses pasar melalui digitalisasi, kolaborasi multipihak sebagaimana praktik-praktik baik pada berbagai negara di dunia untuk meningkatkan daya saing. Hasil analisis berupa rekomendasi pemetaan klaster usaha atau industri DIY strategi terpadu aplikatif untuk peningkatan daya saing dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan pada setiap klaster usaha. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung transformasi UMKM DIY.

Kata Kunci: UMKM, Usaha Mikro, pemetaan, klasterisasi, digitalisasi, kolaborasi

Pendahuluan

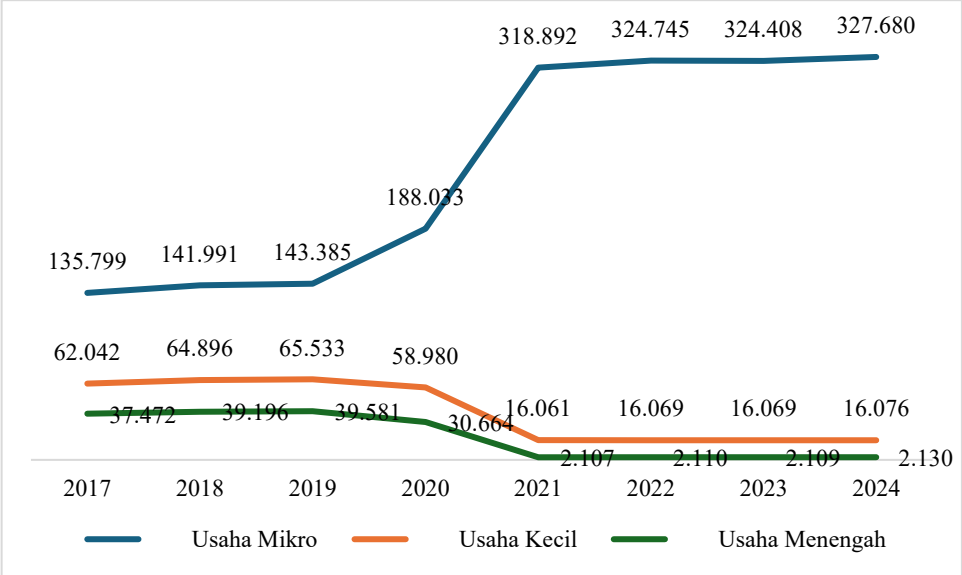
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang strategis baik di Indonesia maupun di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peranan ini tercermin dari kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan kontribusinya pada perekonomian. Pada tahun 2017, mengacu pada publikasi Badan Perencanaan Pembangunan DIY, UMKM mampu menyerap 79 persen dari total lapangan kerja dan berkontribusi sebanyak 98,4 persen pada perekonomian Yogyakarta (Bappeda DIY, 2017).

Dalam 8 tahun terakhir, jumlah UMKM mengalami peningkatan siginifikan dari 135.799 (2017) menjadi 327.680 (2024). Di sisi lain, jumlah Usaha Kecil menurun signifikan

dari 62.042 (2017) menjadi 16.076 (2024). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah Usaha Menengah juga turun signifikan dari 37.472 (2017) menjadi 2.130 (2024). Peningkatan Usaha Mikro dan penurunan Usaha Kecil dan Usaha Menengah secara drastis terjadi selama periode 2019-2021 yang menunjukkan terjadinya pukulan besar pada UMKM akibat pandemi Covid-19.

Menariknya, jumlah penurunan Usaha Kecil dan Usaha Menengah lebih sedikit dibandingkan dengan peningkatan jumlah Usaha Mikro. Meski peningkatan jumlah ini salah satunya dikontribusi kebijakan UMKM DIY yang meningkatkan kategori sektor-sektor UMKM, hal ini juga mengindikasikan masuknya pelaku Usaha Mikro baru karena peningkatannya sangat signifikan. Peningkatan terbesar Usaha Mikro terjadi pada tahun 2021 dengan kenaikan mencapai 130.859 ketika di saat yang sama Usaha Kecil mengalami penurunan 42.919 dan Usaha Menengah menurun 28.557. Situasi ini tidak lepas dari fakta bahwa hingga saat ini, UMKM masih menjadi tumpuan pencaharian masyarakat dan jaring pengaman bagi masyarakat menengah ke bawah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produkif (KemenkopUKM, 2024). Dan hal ini relevan karena pada tahun tersebut, pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia.

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2024

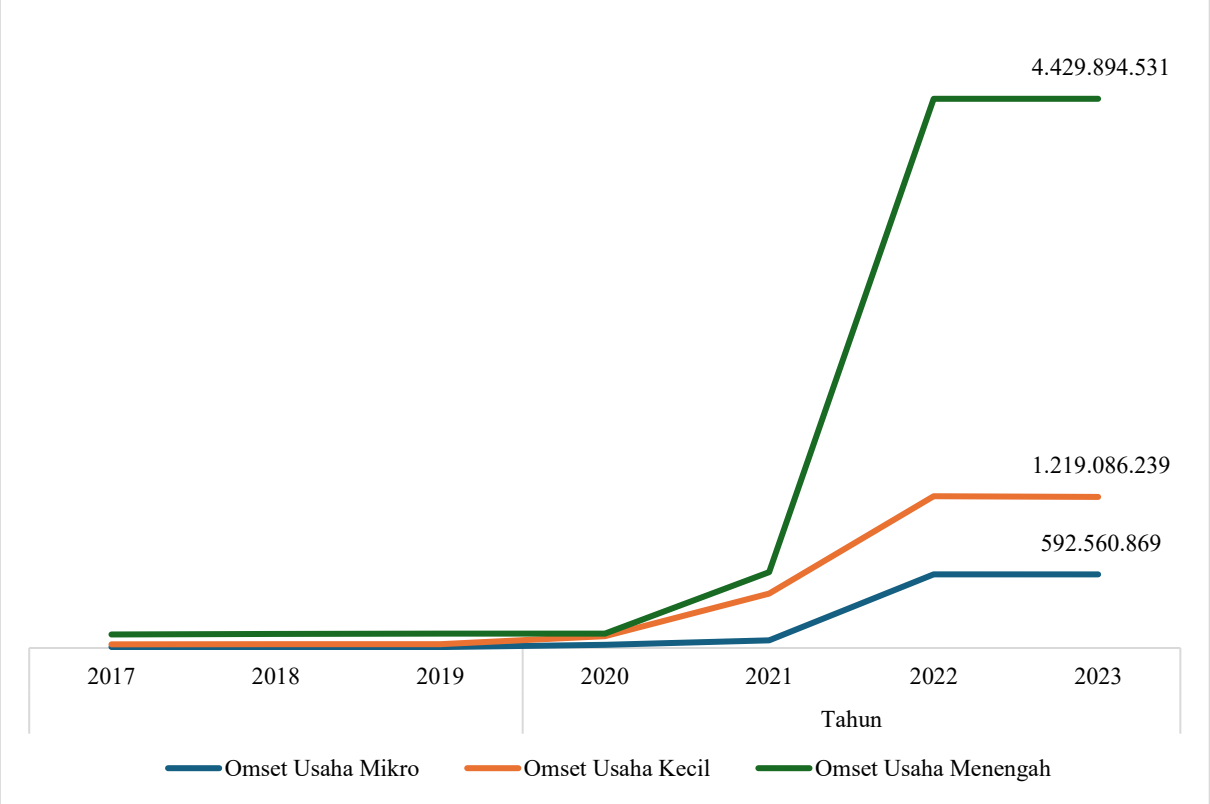


Sumber: Bappeda DIY

Aspek yang perlu menjadi perhatian adalah selama periode pemulihan pasca pandemi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah menunjukkan perkembangan yang cukup stagnan. Di sisi lain, Usaha Mikro jumlahnya terus meningkat. Perlu adanya peningkatan daya saing agar Usaha Mikro yang jumlahnya banyak dan terus meningkat ini dapat naik kelas dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat. Peningkatan kelas penting karena kontribusinya pada

perekonomian akan semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari capaian omset tahunan dari masing-masing Usaha. Meski jumlah Usaha Mikro sangat banyak bila dibandingkan dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah, nilai omset yang diperoleh jauh di bawah Usaha Menengah. Data menunjukkan bahwa meski jumlah Usaha Mikro mencapai 150 kali lipat dari Usaha Menengah, omset Usaha Mikro hanya 13 persen dari omset Usaha Menengah.

Grafik 2. Perkembangan Nilai Omset Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (Rp Juta), 2017-2024



Sumber: Bappeda DIY

Di sisi lain, dalam hal penyerapan tenaga kerja, Usaha Mikro memiliki kontribusi tinggi. Pada tahun 2023, Usaha Mikro mampu menyerap 22,79 juta pekerja. Sementara itu, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berturut-turut hanya mampu menyerap 1 juta dan 139 ribu pekerja. Bila dilakukan kalkulasi sederhana maka akan terlihat bahwa kontribusi dari Usaha Mikro sangat timpang bila dibandingkan dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Omset per tenaga kerja Usaha Mikro per tahun sebesar 26 juta Rupiah sedangkan omset Usaha Mikro mencapai 1,21 Miliar Rupiah dan Usaha Menengah sebesar 31,87 Miliar Rupiah.

Meski demikian, masuknya para pengusaha Mikro menjadi peluang positif bagi pemerintah DIY untuk mengembangkan perekonomiannya. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana dalam pengelolaannya agar Usaha Mikro tidak hanya menjadi tumpuan atau "kecelakaan" saat terjadi guncangan ekonomi (krisis, pandemi, bencana, dst) namun justru jadi batu loncatan untuk menjadi Usaha Kecil, Usaha Menengah dan seterusnya. Oleh karena itu,

penelitian ini akan menganalisis persebaran usaha, potensi, dan aspek pendukung lain di DIY serta strategi peningkatan kapabalitas Usaha Mikro agar naik kelas dan berdaya saing. Harapannya, dengan identifikasi potensi dan aspek pendukung lainnya, UMKM DIY dapat didorong pengembangannya melalui klaster-klaster usaha yang berdaya saing.

Kajian Pustaka

UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut. **Usaha Mikro** merupakan usaha produktif miliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. **Usaha Kecil** merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau abdan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam aturan. **Usaha Menengah** merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Tabel 1. Kriteria UMKM

	Modal usaha*	**Hasil penjualan tahunan**
Usaha Mikro	< 1 miliar rupiah	< 2 miliar
Usaha Kecil	1-5 miliar rupiah	2 – 15 miliar
Usaha Menengah	5 – 10 miliar rupiah	15 – 50 miliar

Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

Dalam rangka peningkatan tata kelola UMKM, Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui kebijakan ini, pemerintah DIY memperluas klasifikasi sektor usaha UMKM dari yang awalnya hanya 4 sektor (Perdagangan, Aneka Usaha, Industri Pertanian dan Industri non Pertanian) menjadi 15 sektor sehingga jangkauannya lebih luas dan terperinci. Sektor tersebut meliputi sektor Pertanian; Perdagangan; Kelautan dan Perikanan; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Transportasi; Komunikasi; Pariwisata; Konstruksi; Real Estate dan Persewaan; Jasa

Pendidikan; Industri Pengolahan; Ekonomi Kreatif; dan Sektor Perorangan yang Melayani Rumah Tangga.

Klasterisasi

Porter (1998) mendefinisikan klaster sebagai kumpulan perusahaan dalam bidang tertentu (mencakup perusahaan, pemasok komponen khusus, industri terkait, serta institusi pendukung seperti universitas dan asosiasi dagang) yang terlokalisasi di area geografis tertentu. Keberadaan klaster ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, dan mengurangi hambatan pembentukan bisnis baru melalui akses ke input khusus, informasi, dan infrastruktur bersama. Kebijakan ini dinilai lebih efektif karena berfokus pada pengurangan hambatan produktivitas.

Dalam konteks UNIDO, klaster merujuk pada kumpulan perusahaan yang saling terhubung secara geografis, bersama dengan institusi terkait, yang menghadapi tantangan dan peluang yang sama. Klaster memiliki dua karakteristik utama yaitu terdiri dari sejumlah perusahaan dalam suatu wilayah yang berdekatan dan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki banyak kesamaan. Selain perusahaan, klaster juga mencakup berbagai institusi pendukung, seperti asosiasi bisnis, penyedia layanan pengembangan bisnis, penyedia layanan keuangan, termasuk bank, otoritas publik (seperti pemerintah daerah, regional, nasional, serta lembaga regulasi), dan lembaga pelatihan, seperti sekolah kejuruan dan universitas.

Klaster memberikan peluang bagi UKM dalam mencapai skala ekonomi, mengakses pasar yang membutuhkan produk dalam jumlah besar dan standar internasional, serta memiliki daya tawar yang lemah dalam pembelian input dan kebijakan dukungan. Melalui klaster, UKM dapat memperoleh manfaat bersama dengan berkolaborasi, misalnya untuk pembelian bahan baku secara kolektif, pemasaran bersama, atau berbagi peralatan. Selain itu, dukungan dari asosiasi bisnis atau investasi infrastruktur oleh sektor publik juga meningkatkan daya saing. Keuntungan dari upaya bersama ini disebut sebagai efisiensi kolektif (UNIDO, 2013).

Studi pada 29 UMKM otomotif Serbia menunjukkan bahwa selama periode 2016-2018 UMKM dalam klaster memiliki daya saing lebih tinggi serta profitabilitas yang lebih baik dibandingkan non-klaster (Beraha et al., 2023). Sejalan dengan studi tersebut, studi perkembangan klaster di India juga menunjukkan hasil yang positif akibat adanya klaster. Klasterisasi membantu peningkatan daya saing melalui pengurangan biaya transportasi, akses ke input khusus, peningkatan kesehatan keuangan, dan peningkatan peluang pemasaran. Keuntungan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan daerah di mana klaster didirikan (Mahendran et al., 2020).

Industri Besar dan Sedang

Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengubah bahan baku secara mekanis, kimia, atau dengan tangan, sehingga menjadi barang jadi dan atau mengubah dari bahan baku yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya menjadi lebih dekat kepada pemakai akhir. Kategorisasi Industri Pengolahan dilakukan berdasarkan tenaga kerja dan nilai investasinya. Industri Besar terdiri atas perusahaan-perusahaan dengan tenaga kerja lebih atau sama dengan 20 orang dengan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah. Industri menengah terdiri atas perusahaan-perusahaan dengan tenanga kerja kurang dari atau sama dengan 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah.

Metode Penelitian

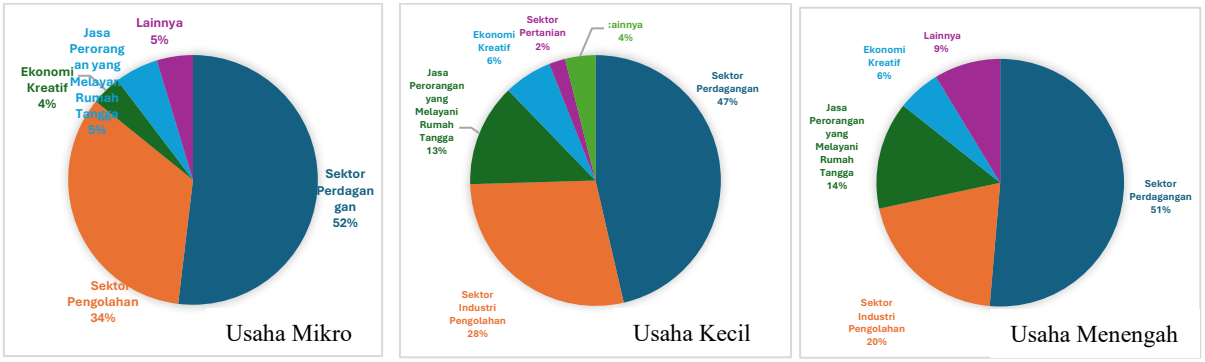
Penelitian ini menggunakan metode gabungan (*mixed method*) kuantitatif dan kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik seperti PODES 2021, Bappeda DIY, serta sumber lain terkait dengan rentang waktu disesuaikan dengan ketersediaan data. Data kemudian diolah dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Besar dan Sedang (IBS) Yogyakarta beserta kondisi infrastruktur pendukung. Analisis kualitatif dilakukan dengan menghubungkan antara potensi dan industri serta keberadaan pendukung lain dalam mengembangkan Usaha Mikro agar naik kelas menggunakan berbagai sumber data dan literatur.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi UMKM

Sementara itu, menurut sektornya, dari 15 sektor yang ada mayoritas UMKM Yogyakarta bergerak pada sektor Perdagangan, Industri Pengolahan dan Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga. Sektor Perdagangan ini berupa segala usaha yang berkaitan dengan aktivitas jual-beli barang secara umum. Sektor Industri Pengolahan berisi segala jenis usaha yang mengubah bentuk bahan baku/mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan seperti Industri Makanan dan Minuman, Kerajinan Kayu dan anyaman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Barang Galian bukan Logam seperti tepung dan furnitur. Sementara itu, sektor Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga dapat berupa penyediaan jasa sebagai juru masak, pelayan, asisten rumah tangga, pengasuh anak, sopir dst.

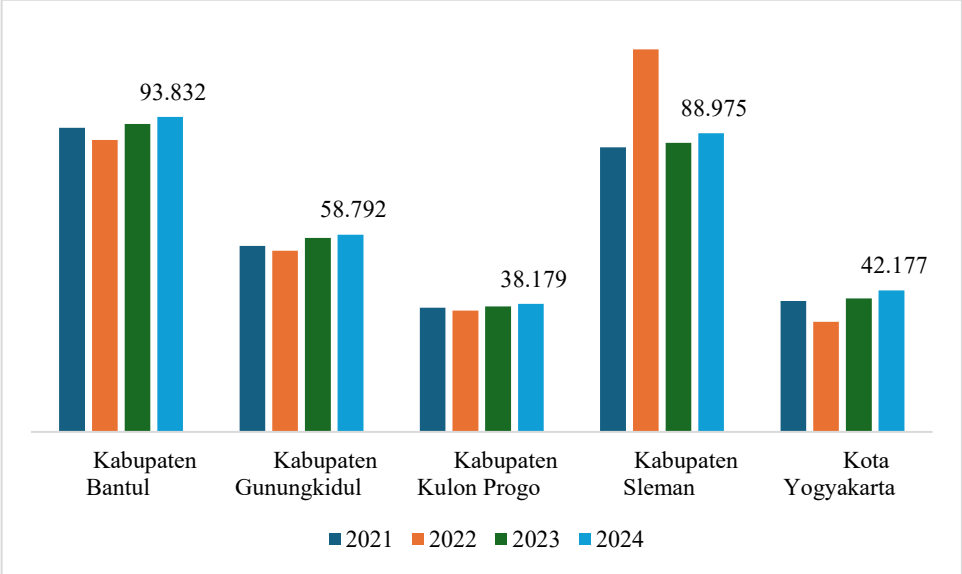
Grafik 4. Persentase UMKM DIY menurut Sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta , 2024



Sumber: diolah dari Bappeda DIY

Jumlah UMKM Yogyakarta cenderung meningkat dengan persebaran yang kurang merata pada 4 Kabupaten dan 1 kota. Mayoritas UMKM berada di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman.

Grafik 3. Persebaran UMKM Menurut Kabupaten/Kota di Yogyakarta, 2021-2024



Sumber: Bappeda DIY

Selanjutnya dalam menganalisis UMKM secara lebih terperinci, penelitian ini mengasumsikan bahwa produk utama UMKM akan seiring dengan produk unggulan makanan dan non makanan menurut data PODES 2021 sehubungan belum tersedianya data rinci terkait UMKM *by name by address by product*. Data ini kemudian dikaitkan dengan industri besar dan sedang Yogyakarta sebagai calon mitra potensial dalam pengembangan usaha. Penelitian ini secara umum berpandangan bahwa cara sederhana untuk meningkatkan kelas Usaha Mikro adalah dengan meningkatkan penjualan yang akan berimbas pada asetnya sehingga pada titik tertentu akan mencapai batas standar menjadi Usaha Kecil dan berlanjut menjadi Usaha Menengah. Salah satu strateginya adalah dengan membentuk klaster dalam satu wilayah agar mencapai skala ekonomi dalam berproduksi. Selanjutnya, berkaitan dengan Industri Besar dan

Sedang, UMKM dapat melakukan kemitraan baik dalam bentuk penyediaan bahan baku maupun bahan hasil olahan menyesuaikan standar perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha membangun permodalan dan *knowledge spillover* dari perusahaan.

Sesuai kerangka klasterisasi UNIDO, maka selain bermitra dengan bisnis, UMKM juga perlu dipetakan untuk bekerjasama dengan penyedia layanan keuangan termasuk bank, otoritas publik (seperti pemerintah daerah, regional, nasional, serta lembaga regulasi), dan lembaga pelatihan, seperti sekolah kejuruan dan universitas. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan sumber daya dalam melakukan inovasi produk. Tujuan ini sejalan dengan hasil penelitian pada UKM Rusia yang menunjukkan bahwa peranan asosiasi atau mitra dalam klaster sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing UKM (Sheina, 2024). Bentuk pelatihan dapat berupa pelatihan kewirausahaan untuk mengasah skill berbisnis dan skill manajemen hubungan pelanggan (Sembiring et.al, 2023)

Hasil Pemetaan

Sejalan dengan kondisi UMKMnya, jumlah perusahaan Industri Besar dan Sedang (IBS) Yogyakarta didominasi oleh Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Pada tahun 2024, jumlah perusahaan IBS Sleman sebanyak 247 diikuti dengan IBS Bantul sebanyak 229. Sementara itu, jumlah perusahaan IBS Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul secara berturut-turut sebanyak 79, 34, dan 28.

Adapun untuk potensi desa, tidak seluruh desa dalam setiap Kabupaten/Kota memiliki produk unggulan tertentu. Di sisi lain, terdapat pula desa dengan keunggulan beragam. Artinya, potensi unggulan tidak ditentukan oleh jumlah desa namun kemampuan masing-masing desa tersebut dalam menghasilkan suatu produk unggulan. Meski demikian, sebagai gambaran umum, berdasar data PODES 2021, jumlah desa dari yang terbanyak secara berturut-turut adalah Gunung Kidul (144), Kulon Progo (88), Sleman (86), Bantul (75) dan Kota Yogyakarta (45). Produk Unggulan Makanan dan Non Makanan yang dicantumkan dalam penelitian ini merupakan hasil sortir data Potensi Desa 2021 dengan ketentuan setidaknya ada lebih dari 1 desa yang memproduksi komoditas tersebut.

Tabel 2. Pemetaan Potensi, Industri, Klaster dan Mitra Potensial

Kab	Potensi Desa (2021)		IBS (2024)	Klaster	Mitra Potensial
	Makanan	Non makanan			
Gunung Kidul	aneka olahan ikan (abon, ikan bakar),	kerajinan bambu, kerajinan perak,	Barang Galian Bukan Logam (12), Pakaian jadi	Kesenian batu, pemasok batu tempel	ISI, Fakultas Teknologi Pangan,

	krecek, emping melinjo, aneka olahan emping, jenang, bakpia	kerajinan dari akar, batik tulis, batu alam/putih, ukir batu	(4), Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (3), Makanan (2), Minuman (2)	(bangunan), olahan ikan	Fakultas Perikanan, Dinas Pertanian, Disperindagkop
Bantul	padi, bakpia, jamu, emping melinjo/garut/ ketela, gula jawa/semut, ingkung	batik, produk seni, gerabah, mebel, sepatu kulit, daun pintu	Furnitur (43), Kayu, Barang dari Kayu, Gabus, dan Anyaman (26), Makanan (26), Pakaian Jadi (21), Barang Galian Bukan Logam (20), Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (14), Kulit, Barang dari Kulit, Alas Kaki (12), Tekstil (11)	Furnitur/mebel , makanan (gula), produk dari kulit Local: mie lethek	ISI, Fakultas Teknologi Pangan berbagai kampus, Dinas Pertanian, Disperindagkop
Sleman	Bakpia, salak, emping melinjo, susu kambing/sapi, keripik belut, manisan salak, nila krispi, ikan nila	Kerajinan bambu, benih nila, batik, bambu, tas kulit, tanaman hias aglonema, mebel	Makanan (53), Pakaian Jadi (40), Furnitur (25), Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman (17), Barang Galian bukan Logam (17), Tekstil (12), Pengolahan Lainnya (12)	Sentra bakpia, roti basah dan kering, pakaian/kain batik, mebel	Fakultas Teknologi Pangan, Teknik Sipil, pendidikan tata busana pada berbagai kampus DIY, Dinas Pertanian, Disperindagkop
Kulon Progo	Wingko, peyek, gula kelapa/aren/semut, tahu, padi/beras, geblek, enting-enting jahe	Batik, kain batik, kerajinan tangan (aksesoris ruangan, rajutan), wayang kulit	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia (6); tekstil (4); Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional (4); kayu, barang dari	Kesenian anyaman, gula semut Kearifan lokal : gebleg	Fakultas Teknologi Pangan, ISI, agribisnis pada berbagai kampus DIY, Dinas Pertanian, Disperindagkop

			kayu, gabus, dan anyaman (4); makanan (4); pakaian jadi (2); dan Barang galian bukan logam (2).		
Kota Yogyakarta	Bakpia, jamu, gudeg, tahu, tempe, abon nabati, bir pletok, serabi gulung, yangko, kembang waru	Batik, kerajinan kulit, kerajinan kuningan/logam, perak, tas goni/rajut, karangan bunga, percetakan	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman (21), Makanan (16), Pengolahan Lainnya (10), Tekstil (9)	Percetakan, makanan (bakpia, roti basah dan kering), tekstil (batik dan kain batik)	Fakultas Teknologi Pangan, ISI, agribisnis, tata busana pada berbagai kampus DIY, Dinas Pertanian, Disperindagkop

Sumber: diolah dari data BPS (PODES 2021, Statistik IBS 2024)

Gunung Kidul

Keterhubungan antara potensi daerah yang dimiliki dengan Industri Besar dan Sedang di Gunung Kidul secara garis besar adalah untuk sektor utama berupa barang galian bukan logam, pakaian jadi, makanan dan minuman. Jumlah Industri Besar dan Sedang terbanyak di Gunung Kidul adalah industri barang galian bukan logam. Produk utama dari industri ini meliputi batu tempel (4 perusahaan), mill (4 perusahaan), kalsium (2 perusahaan) dan relief (1 perusahaan). Ini seiring dengan produk unggulan non makanan Gunung Kidul berupa batu alam/batu putih dan ukiran batu. Usaha Mikro dapat memulai langkah awal dengan menjadi pemasok bahan baku industri untuk meningkatkan nilai penjualan yang dapat meningkatkan modal sehingga bisa naik kelas ke Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Sembari meningkatkan modal, pengusaha Mikro dapat belajar cara berbisnis dan inovasi dan kreasi produk hingga akhirnya bisa mandiri. Sementara itu, untuk industri makanan, produk utama dari perusahaan makanan berupa tahu bakso tuna dan bolu yang seiring dengan potensi unggulan berupa porduksi aneka olahan ikan. Usaha Mikro dapat kerjasama dengan industri makanan agar dapat turut serta memasok hasil olahan yang dibuat. Pemerintah Daerah setempat dapat memberikan asistensi pelatihan kewirausahaan dan menghubungkan pengusaha mikro dengan sekolah kejuruan atau perguruan tinggi seperti ISI untuk pengembangan kesenian batu, perguruan tinggi lain yang berfokus pada pengembangan pangan dan perikanan.

Bantul

Kabupaten Bantul termasuk salah satu kabupaten dengan jumlah UMKM dan IBS terbanyak di Yogyakarta. Dari pencocokan antara produk unggulan dan IBS, klaster yang dapat dibentuk adalah dalam kaitannya pengusahaan furnitur dan makanan dalam bentuk aneka ragam gula (gula jawa/semut/kristal). Untuk mengupayakan hal ini, Usaha Mikro dapat menjadi pemasok bahan baku atau produk jadi ke perusahaan terkait. Selain itu, dalam upaya pengembangan usaha dan kapasitas SDMnya, Usaha Mikro dapat bermitra dengan kampus seperti kampus ISI dalam hal kesenian furnitur serta kampus lainnya yang berfokus pada pengembangan teknologi pangan dan manajemen bisnis. Adapun untuk pengembangan produk gula, Pemda setempat dapat menghubungkan pengusaha mikro agar bisa melakukan pengembangan produk baik dengan fakultas-fakultas teknologi pangan maupun agribisnis berkaitan dengan *branding, packaging*, dan pengelolaan bisnis secara umum. Selain itu, Bantul juga memiliki produk lokal utama mie lethek yang dapat menjadi branding kearifan lokal setempat.

Sleman

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan jumlah IBS terbanyak. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim berusaha pada kabupaten ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain. Lokasinya yang menauangi beragam perguruan tinggi menjadikan potensi kolaborasi semakin tinggi meski UMKMnya juga masih tinggi. Dari hasil pemetaan potensi dan kondisi IBS, wilayah Sleman dapat menjadi klaster sentra bakpia, roti basah dan kering, pakaian/kain batik, mebel. Sebagai usaha mikro, pengusaha dapat memasarkan produknya melalui IBS sembari meningkatkan kapasitas dalam berbisnis, berinovasi, dan promosi produk. Mitra potensial lain yang dapat dikerjasamakan melalui Pemda setempat antara lain perguruan-perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan pangan melalui teknologi, tata busana, kesenian, maupun teknik untuk mendukung pengembangan usaha furnitur dan mebel. Selain itu, dinas setempat bisa menjalin kerjasama lebih erat dengan kampus sebagai laboratorium pengembangan pengetahuan sehingga saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo memiliki produk unggulan berupa gula semut dan kesenian anyaman. Hal ini selaras dengan kondisi IBS yang bergerak di sektor sama. Usaha Mikro dapat bermitra dengan IBS dalam memasarkan produk sebelum akhirnya ketika penjualan dan permodalan meningkat dapat mandiri menjalankan usahanya dengan skala yang lebih besar. Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut, pengusaha mikro bersama pemerintah setempat dapat menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi terkait yang bergerak di bidang kesenian,

teknologi pangan, dan agribisnis untuk memastikan peningkatan skill kewirausahaan dan inovasi produk. Selain itu, Kulon Progo memiliki produk lokal berupa gebleg yang berpotensi dikembangkan sebagai oleh-oleh lokal yang unik.

Yogyakarta

Meski jumlah UMKM dan IBS Yogyakarta relatif tidak sebesar Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, namun produknya secara umum lebih spesifik (tidak seberagam kedua kabupaten Sleman dan Bantul). Pada kota Yogyakarta ini, usahanya dapat diklaster dalam usaha percetakan, makanan, dan tekstil. Untuk makanan, secara spesifik dapat berupa makanan bakpia serta roti basah dan kering sedangkan untuk tekstil mayoritas berupa batik dan kain batik. Usaha mikro dapat mengembangkan skill inovasi produk dan kewirausahaan (branding, marketing, dst) melalui kerjasama yang difasilitasi pemerintah daerah dengan Fakultas Teknologi Pangan, ISI, agribisnis, tata busana pada berbagai kampus DIY.

Strategi

Dalam meningkatkan daya saing, Usaha Mikro perlu diberikan pendampingan selain dalam hal peningkatan kewirausahaan dan inovasi produk, yaitu penyiapan dalam kemitraan. Sebagai Usaha Mikro yang masih kecil maka kemitraan memiliki peranan penting dalam peningkatan daya saing dan skal usahanya. Untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan dalam 3 hal yaitu pada aspek legalitas, kapabilitas, dan penyerasian dengan mitra terkait.

a. Kepemilikan legalitas formal melalui pendaftaran Nomor Induks Berusaha (NIB). Menurut ketentuan terbaru, terdapat sedikit perbedaan persyaratan menyesuaikan Tingkat risiko usaha dari rendah, sedang dan tinggi. Kepemilikan NIB ini perlu dilakukan agar usaha dapat secara legal dan tercatat sehingga mudah dalam mendapatkan kepercayaan konsumen dan mitra, tercatat dan terlibat dalam program pemerintah, kemudahan dalam mengakses pembiayaan. Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa sosialisasi dan pendampingan atas pendaftaran Monor Induk Berushaa (NIB) serta memastikan bahwa UMKM DIY sudah terdaftar seluruhnya.
b. Kompetensi sumber daya. Pemerintah Daerah mutlak perlu memberikan peningkatan kapasitas sumber daya pengusaha agar memiliki skill bisnis dan inovasi produk yang mumpuni. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya maka Pemerintah Daerah dapat tetap optimal menjalankan tugasnya dengan mempertemukan antara para pengusaha mikro dengan Perusahaan/balai pelatihan/vokasi/perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan.

c. Rekomendasi dan penyerasian oleh dinas/instansi dengan mitra-mitra yang dapat mendukung pengembangan usaha seperti lembaga pembiayaan, lembaga pelatihan, asosiasi bisnis, pemasaran, dst.

Sebagai tindaklanjut atas legalitas NIB sesuai dengan tingkat risiko usaha, maka Pemerintah Daerah selaku pemegang data dapat menyusun kebijakan berbasis data dalam memetakan kemitraan, intervensi dan mitigasinya. Terlebih dalam hal permodalan atau kemitraan dengan lembaga pembiayaan. Pada usaha dengan risiko menengah dan tinggi, pemerintah perlu lebih aktif dalam mendampingi agar tidak terjadi risiko gagal bayar.

Digitalisasi

Salah satu langkah penting dalam menjangkau konsumen yang lebih luas adalah melalui digitalisasi. Studi Wulan dan Reni (2024) menunjukkan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan produktivitas UKM hingga 30% dan meningkatkan profitabilitas 35%. Pemerintah Provinsi Yogyakarta sudah menginisiasi digitalisasi ini salahsatunya melalui penyediaan platform SiBakul Jogja. Alur pendaftaran yang relatif mudah dengan persyaratan yang tidak sulit menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan digitalisasi ini (DiskopUKM, 2023). Modal digitalisasi dari aspek ketersediaan sinyal sebenarnya sudah cukup bila mendukung mengacu pada data BPS tahun 2021 dimana hampir tidak ada wilayah DIY yang tidak tersambung internet. Mayoritas wilayah sudah mendapatkan sinyal internet 4G/LTE dan 3G/H/H+/ EVDO yang relatif cepat.

Tabel 3. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi DI Yogyakarta, 2021

Kabupaten/Kota	Sinyal Internet – 4G/LTE	Sinyal Internet – 3G/H/H+/ EVDO	Sinyal Internet – 2,5G/E/ GPRS	Sinyal Internet – Tidak Ada
Kulon Progo	74	11	3	–
Bantul	71	4	–	–
Gunung Kidul	113	27	3	1
Sleman	79	7	–	–
Kota Yogyakarta	45	–	–	–
DI Yogyakarta	382	49	6	

Sumber: BPS

Namun aspek lain yang perlu dicermati adalah dari sisi para pelaku usaha. Data BPS terkait s*urvey E-Commerce* tahun 2022 menunjukkan bahwa di Provinsi Yogyakarta masih banyak usaha yang offline (non-eCommerce). Pada tahun 2022, persentase usaha non-eCommerce mencapai 55,36 persen. Dari usaha yang non-eCommerce ini, alasan utamanya tidak yang tidak menerima pesanan/melakukan transaksi melalui internet karena lebih nyaman berjualan offline (66,6%). Sementara itu, sisanya tidak tertarik berjualan online (37,15%), khawatir tentang keamanan (0,82%), dan khawatir tentang privasi (1,26%).

Terdapat dugaan bahwa kesuksesan digitalisasi ini tidak semata hanya dari infrastruktur pendukung seperti pendampingan pemerintah dan infrastruktur lainnya. Kondisi jumlah usaha dan omset yang cenderung tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam 2 tahun terakhir mempertegas argumen bahwa digitalisasi ini masih memiliki banyak ruang perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti. Studi pada UMKM Spanyol relevan dengan situasi ini. Pada UMKM Spanyol, faktor penting tercapainya trasnformasi digital pada UMKM antara lain dari pendidikan manajer usaha, ukuran usaha, dan profesionalisasi UMKM. Manajer dengan tingkat pendidikan tinggi lebih cenderung merangkul inisiatif transformasi digital sedangkan UKM yang lebih besar umumnya memiliki posisi yang lebih baik untuk menerapkan transformasi digital karena lebih banyak sumber daya dan kemampuan namun hal ini dapat dimoderasi dengan tingkat pendidikan manajer usaha. Sedangkan dalam hal profesionalisasi, aspek ini dapat dicapai melalui pendidikan manajerial (gelar formal, sertifikasi, lokakarya), pelatihan berkelanjutan baik itu melalui konferensi industri, maupun kursus online (Clemente et.al, 2024). Kedua hal ini dapat mendorong tercapainya peningkatan usaha sehingga keuntungan dari digitalisasi bisa berlipat.

Oleh karena itu, dari aspek digitalisasi, DIY memiliki potensi besar namun perlu peningkatan dari aspek kapailitas sumber dayanya. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan kapasitas para pelaku usaha sebanyak-banyaknya melalui beragam cara pada tiap-tiap klaster usaha di masing-masing Kabupaten/Kota DIY. Agar pemerintah daerah tidak kewalahan menangani sendiri, maka kemitraan menjadi faktor penting dalam hal ini. Kemitraan ini dapat dibangun melalui kerjasama dengan sekolah vokasi/perguruan tinggi maupun dengan pihak swasta misalnya melalui program Klaster Binaan. Pihak swasta yang berpotensi digandeng antara lain HIMBARA (Sekaligus untuk pendanaan), CSR perusahaan, maupun asosiasi bisnis.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa klasterisasi usaha di setiap Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan produk unggulan dan industri lokal. Penguatan jejaring dengan berbagai mitra, seperti institusi pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah, menjadi kunci dalam meningkatkan skala dan daya saing UMKM. Selain itu, digitalisasi berpotensi besar dalam meningkatkan daya saing usaha, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek kapabilitas dan motivasi pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, penelitian ini merekomendasikan dua hal sebagai berikut.

1. Penguatan klasterisasi dan kemitraan strategis. Pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan klasterisasi usaha yang berbasis pada potensi unggulan daerah. Upaya ini harus didukung oleh sinergi lintas sektor dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya guna membangun ekosistem bisnis yang lebih kokoh.

Dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap jaringan pasar menjadi langkah krusial dalam memperkuat daya saing UMKM di tingkat lokal maupun nasional.

2. Optimalisasi digitalisasi dan peningkatan kapabilitas dan motivasi penggunaan teknologi. Infrastruktur digital yang telah tersedia perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi. Diperlukan strategi komprehensif berupa pelatihan berkelanjutan, sosialisasi manfaat digitalisasi, serta insentif bagi UMKM yang berinovasi dalam transformasi digital. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi peluang, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Referensi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA DIY). 2022. Data Statistik Sektoral perencanaan dan Pengendalian: Profil UMKM DIY.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA DIY). UMKM: Koperasi dan UKM. https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm#12 diakses pada 30 Desember 2024

Badan Pusat Statistik. 2024. Direktori Industri Pengolahan Besar dan Sedang Daerah Istimewa Yogyakarta 2023/2024.

Badan Pusat Statistik. Potensi Desa 2021

Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik eCommerce 2022/2023.

Badan Pusat Statistik. 2022. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi DI Yogyakarta, 2021 https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/TDJsTlFXOXhXVW81VEZoa1EwUk1iRUphZEVkRFVUMDkjMw==/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-dan-penerimaan-sinyal-internet-telepon-seluler-di-provinsi-di-yogyakarta.html?year=2021

Beraha, I., Đuričin, S., & Lazarević, M. (2023). The Impact Of Klastering On Competitiveness And Business Performance Of Smes: Evidence From The Serbian Automotive Industry. *SCIENCE International Journal*, *2*(4), 147–152. https://doi.org/10.35120/sciencej0204147b

Clemente-Almendros, J. A., Popescu-Nicoara, D., & Pastor-Sanz, I. (2024). Digital transformation in SMEs: Understanding its determinants and size heterogeneity. *Technology and Society*. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102483

Diskopukm. (2023, December 27). *Layanan Dinas Koperasi dan UKM DIY: "Pendataan Koperasi dan UMKM melalui Platform SiBakul Jogja."* DISKOPUKM DIY. https://diskopukm.jogjaprov.go.id/?p=2871

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM). 2024. Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023.

Mahendran, K., Olive, P. F., & Lavanya, S. M. (2020). A Review on Perspectives of Klaster Formation in Promoting Competitive Advantage for Small and Medium Enterprises and Sustainable Economic Growth. *Artificial Intelligence Review*, 115–121. https://doi.org/10.9734/AIR/2020/V21I1030257

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Porter, Michael E. 1998. The Adam Smith Address: Location, Klasters, and the "New" Microeconomics of Competition. National Association of Business Economics.

Sembiring, L. D., Setyawati, A., Indajang, K., Doloksaribu, W. S. A., & Sudirman, A. (2023). Analysis of Increasing The Competitiveness of MSME Business through Entrepreneurial Competence, Entrepreneurial Orientation, and Customers Relationship Management. *Firm Journal of Management Studies*, *8*(2), 250. https://doi.org/10.33021/firm.v8i2.4575

Sheina, E. G. (2024). Approaches to Business Interaction in the context of Klaster Associations of Small and Medium-Sized Enterprises. *Теория И Практика Общественного Развития*, *6*. https://doi.org/10.24158/tipor.2024.6.16

UNIDO. 2013. The UNIDO Approach to Klaster Development: Key Principles and Project Experiences for Inclusive Growth technical penelitian.

Wulan, T. S., & Reni, R. (2024). Digital Transformation as a Catalyst for SMEs Productivity and Profitability in the Digital Era. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, *5*(4). https://doi.org/10.62794/je3s.v5i4.4543

Dwi Supatmi merupakan mahasiswa program Magister Manajemen dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki ketertarikan tinggi pada isu-isu pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketenagakerjaan, serta isu lingkungan terkait pembangunan berkelanjutan. Fokus penelitiannya saat ini mencakup peran kebijakan publik dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. Ia dapat dihubungi melalui dwi.supatmi@mail.ugm.ac.id.

'Babar Wastra ing Sampiran'

Mendaya-gunakan Repatriasi Manuskrip Keraton Yogyakarta

Fajar Wijanarko
Kawedanan Tandha Yekti, Keraton Yogyakarta
widjanarko.fajar@gmail.com

Abstrak

Lebih dari 30.000 gambar digital manuskrip Jawa dari Yogyakarta kini dapat diakses sepenuhnya secara daring melalui laman milik perpustakaan Inggris. Proyek yang didukung penuh oleh Sri Prakash Lohia ini telah mendigitalkan manuskrip Jawa yang disimpan di Perpustakaan Inggris dari koleksi John Crawfurd dan Colin Mackenzie. Crawfurd dan Mackenzie merupakan perwira perang Inggris bawahan Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur dari tahun 1811 hingga 1816 yang turut dalam invasi Inggris di Jawa. Peter Carey menyebut bahwa dalam invasi tersebut, Raffles dan kedua perwiranya tertarik dengan kemampuan orang Jawa dalam mencatat pengetahuannya dalam bentuk manuskrip. Pada saat peristiwa Geger Sepehi (1812), para pejabat Inggris tersebut membawa-paksa manuskrip dari Keraton Yogyakarta sebagai pampasan perang. Para perwira perang tersebut merupakan cikal-bakal dari berpindahnya kekayaan intelektual bangsawan Jawa ke tanah Inggris.

Berdasarkan kurasi sejarah M.C Ricklefs, P. Voorhoeve, dan Annabel Teh Gallop, dari banyaknya naskah Jawa di perpustakaan Inggris, teridentifikasi 75 manuskrip. Ketujuh puluh lima manuskrip yang berhasil diidentifikasi secara khusus berhubungan dengan sejarah, tradisi, serta tatanan politik di Keraton Yogyakarta sejak pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I. Kurasi Ricklefs terhadap manuskrip dilakukan dengan meninjau corak aksara (paleografi), ornamen hias (iluminasi dan ilustrasi), serta informasi internal dari teks. Carey membenarkan dengan memberikan catatan bahwa manuskrip yang berhasil diidentifikasi tersebut merupakan data sejarah dari kehidupan adat dan pemerintahan di keraton Jawa bagian selatan yang dirampas setelah serangan Inggris, pada 20 Juni 1812

Puncak dari digitalisasi manuskrip tersebut adalah repatriasi digital. Keraton Yogyakarta menerima 75 manuskrip digital pada tahun 2019. Manuskrip digital tersebut selanjutnya menjadi mozaik data sejarah dan pengetahuan baru dari Yogyakarta yang sempat hilang. Di sisi lain, manuskrip digital tersebut sebatas menjadi data mentah apabila tidak ditindaklanjuti sebagai bentuk pelestarian dan pengembangannya. Melalui pendekatan filologi, kehadiran manuskrip

digital dari perpustakaan Inggris memberi angin segar terhadap upaya revitalisasi budaya yang banyak direduksi semasa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX (1940-1989) karena alasan politik dan kepentingan negara.

Pendekatan filologi lantas menjadi tahap awal dalam merespon manuskrip digital tersebut. Pasalnya, melalui metode alih aksara dan alih bahasa, lembar demi lembar manuskrip beraksara Jawa dapat digunakan sebagai modal pengetahuan sekaligus proses alih wahana. Beberapa capaian yang telah dilakukan Keraton Yogyakarta untuk mendaya-gunakan hasil repatriasi manuskrip dari Inggris antara lain: 1) alih aksara Serat Menak, 2) revitalisasi busana adat dan edukasi publik melalui pameran temporer, 3) alih media teks Jawa dalam seni pertunjukan. Kegiatan revitalisasi tersebut dilakukan dengan menggunakan data manuskrip Yogyakarta (1780-1811) dan membandingkannya dengan data yang diperoleh pasca perang Jawa (1830). Tinjauan manuskrip dari masa pemerintahan sultan yang berbeda dibarengi pula dengan interpretasi arsip sehingga menemukan data yang akurat.

Sampai saat ini, Keraton Yogyakarta terus melakukan intepretasi manuskrip sebagai bahan bakar dalam penyelenggaraan kegiatan. Perihal tersebut dilakukan keraton sebagai upaya membuka diri sekaligus merelevansikan tradisi yang dicatat semasa pembangunan awal Yogyakarta dengan kenyataan yang muncul saat ini. Pada saat bersamaan, keraton juga melakukan auto-kritik terhadap eksklusivitas pengetahuan dari dalam tembok keraton yang kerap dianggap berjarak secara umum dengan masyarakat. Institusi keraton juga menghindari alenisasi pada akses data manuskrip sebagai aset pengetahuan kompendium sejarah Yogyakarta yang sempat hilang. Langkah tersebut merupakan ejawantah dari penolakan atas peribahasa *wastra lungsed ing sampiran* atau pengetahuan yang hilang tanpa disebarluaskan.

Dari pengamatan sejak 2019, riset ini bertujuan untuk menyajikan kembali data publik berupa digitalisasi 75 manuskrip digital sekaligus hasil kerja pelestarian yang telah dilakukan oleh Keraton Yogyakarta. Melalui pendekatan antropologi, respons Keraton Yogyakarta terhadap repatriasi manuskrip digital dilakukan. Revitalisasi tersebut kemudian mampu menjadi rangsangan pada semua pihak untuk membaca ulang sejarah Yogyakarta dan mereorientasi kedaulatan budaya dengan tidak terbatas. Luaran dari riset ini diwujudkan dalam bentuk data deskriptif dari hasil pendaya-gunaan repatriasi manuskrip dalam 3 hal, antara lain: hasil revitalisasi busana adat, pameran temporer, dan alih media teks Jawa dalam seni pertunjukan.

Kata kunci: Keraton Yogyakarta, Manuskrip Jawa, Repatriasi, Alih Wahana.

Pengantar Awal: Keraton Yogyakarta dan Geger Sepehi

Kadya wastra lungset ing sampiran 'bagaikan kain kusut di sampaian', sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang menggambarkan ilmu pengetahuan tidak akan bermanfaat apabila hanya disimpan sendiri. Ungkapan tersebut menjadi refleksi awal dalam penyusunan riset ini pasca repatriasi manuskrip Keraton Yogyakarta dari perpustakaan Inggris, tahun 2019. Pasalnya, dalam merespon repatriasi manuskrip yang setidaknya berangka tahun 1780-1811, keraton menggelar pameran manuskrip Yogyakarta serta simposium budaya Jawa. Agar gambaran tentang kedudukan Keraton Yogyakarta dan hubungan dengan perpustakaan Inggris lebih jelas, maka lebih dahulu tulisan ini memaparkan sejarah awal Yogyakarta hingga peristiwa Geger Sepehi, tahun 1812.

Yogyakarta sebagai kota kerajaan yang merdeka hadir setelah perjuangan panjang dari Pangeran Mangkubumi. Perjuangan sang *pangeran kraman* yang *mardika*[1] sudah diawali sejak 1747, saat Mangkubumi dinobatkan oleh seluruh pengikutnya sebagai *pangeran adipati sokawati* Berawal dari Sokawati, para pengikut Pangeran Mangkubumi terus mendorong penobatan beliau sebagai seorang sunan. Saat tiba di Kabanaran, Pangeran Mangkubumi kembali dinobatkan dengan menyandang *Susuhunan Adi Senapati Ngalaga ing Banaran* atau *Susuhunan Banaran*[2] dan membangun pesanggrahan di Giyantipura[3]. Di kemudian hari, Mangkubumi[4] justru menjadi ancaman besar bagi Surakarta dan pihak Kumpeni.

Nicholas Hartingh sebagai utusan VOC berupaya meredam sepak terjang Mangkubumi dengan menawarkan pembagian kekuasaan atas tanah Mataram. Pada akhirnya disepakatilah pakta antara Pangeran Mangkubumi dan Nicholas Hartigh di Desa Giyanti, di kaki Gunung Lawu, sebelah tenggara Surakarta. Kesepakatan tersebut memberi kemerdekaan baru terhadap Mataram menjadi Kerato Jawa Bagian Selatan. Di dalam *Serat Prajanjianipun Para Nata Kartasura Tuwin Surakarta Kaliyan Kumpeni* dituliskan bahwa Pangeran Mangkubumi lebih dahulu dinobatkan

---

[1] Peristiwa ini tercatat dalam *Serat Rerenggan Kraton* yang menyebutkan bahwa *Pangeran Mangkubumi saklebeting andon yuda ngagem asma Pangeran Sokawati* (Aryono, 1981:6). Istilah *kraman* atau *ngraman* diartikan sebagai orang-orang yang membangkang dan ingin merebut kekuasaan (Poerwadarminta, 1939: 248).

[2] *"Kangjeng Rama sun junjung jumeneng nata, jejuluk Sunan Adi, mangku ing Banaran, Senapati Ngalaga"* (Aryono, 1981: 106). Sementara dalam Babad Giyanti (S93a/ SB.81) disebutkan bahwa proklamasi Pangeran Mangkubumi sebagai raja dilakukan pada hari Ruwah, 1 Sura, Alip 1675 dengan sengkalan berbunyi *Tata Pandhita Rasaning Bumi* atau 11 Desember 1749 (Babad Giyanti, h.418).

[3] "*Punika Serat Babad Pagiyanti: lolosipun Pangeran Mangkubumi dhateng tanah Sukawati ngantos saged Jumeneng Sultan wonten ing dhusun Kabanaran lajeng damel pesanggrahan wonten ing Giyantipura*" (Babad Giyanti, S90/ PBA. 83)

[4] Secara konfrontatif, Pangeran Mangkubumi yang telah bergelar *Susuhunan Banaran* mengubah gelar kebangsawanannya menjadi *Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Pakubuwono ing Mataram* menandingi keponakannya *Susuhunan Paku Buwono III* sebagai pewaris takhta Keraton Surakarta (Mandoyokusumo, 1988:7).

menjadi raja atau setidaknya diakui secara resmi oleh VOC pada Tahun Jimakir, 1682 (1755)[5]. Barulah setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, Pangeran Mangkubumi benar-benar ditasbihkan sebagai raja di Keraton Yogyakarta dan membangun peradaban Mataram di atas tanah pacetokan.

Selama 37 tahun, Pangeran Mangkubumi bertakhta di Yogyakarta. Di samping membangun keraton secara fisik sebagai pusat pemerintahan, Pangeran Mangkubumi yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hamengku Buwono membangun pula kebudayaan yang sebelumnya telah disepakati dalam Perjanjian Jatisari, 15 Februari 1755[6]. Memasuki masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II (1792-1812), keraton mengalami berbagai transisi yang bertubi-tubi sebagai konsekuensi konstelasi politik yang terjadi di dataran Eropa pada penghujung abad ke-18. Di mulai dengan perseteruan politik Sultan dengan Pemerintah Kolonial terkait dengan protokoler penyambutan para pejabat VOC yang berakhir dengan penolakan tegas dari pihak keraton. Klimaksnya, pada 31 Desember 1810, Daendels menuju Keraton Yogyakarta untuk mereduksi kekuasaan dari Sultan Hamengku Buwono II dan melimpahkannya pada Raden Mas Surojo, putra makhkota yang berperan sebagai *pangeran wali* atau wakil raja[7]. Tidak ada pilihan lain bagi Sultan Hamengku Buwono II selain menyerahkan takhtanya kepada putra makhkota, Raden Mas Surojo. Jika sultan tidak bersedia maka konsekuensi pahit harus diterimanya, yaitu pengasingan ke luar Yogyakarta[8]. Kurang dari setahun, pada November 1811, Sultan Hamengku Buwono II telah diakui kembali kekuasaannya sebagai raja oleh Raffles melalui John Crawfurd yang bertindak sebagai residen di Yogyakarta[9]. Akan tetapi hal ini justru menjadi awal mula dari kondisi yang semakin

---

[5] '*Kajeng Pangeran Mangkubumi kajumenengaken Sultan dening Kumpeni, wonten ing dhusun ing Giyanti, sawetan praja Surakarta nalika nuju taun Jimakir angkanipun warsa 1682, taun ongka 1755*' (Teks Prajanjianipun Para Nata Kartasura Tuwin Surakarta Kalitan Kumpeni, h.137).

[6] Ricklefs tidak membenarkan adanya pembagian kebudayaan secara terperinci di dalam Perjanjian Jatisari yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Sunan Paku Buwono III. Hanya saja, sumber-sumber tradisi lisan serta sumber arsip yang dirujuk oleh Ricklefs menyebutkan bahwa kedua raja tersebut memang bertemu dengan mediator Hartingh. Perihal protokoler antar kerajaan nampaknya yang lebih menjadi perhatian sehingga formalitas terkait pemisahan wilayah sudah berhasil dilengkapi (Ricklefs, 2002: 120-121).

[7] Tidak hanya persoalan protokoler, berbagai rentetan peristiwa yang ditimbulkan dari kehadiran Daendels di Tanah Jawa seperti halnya pemaksaan perjanjian-perjanjian baru yang berkaitan dengan pengambil-alihan kekuasaan ats tanah pesisir kerajaan, monopoli kayu di wilayah *mancanegara*, krisis ekonomi di kalangan elit istana dan masyarakat kelas bawah, hingga pemberontakan Rangga Prawiradirja yang menyeret Pangeran Natakusuma dan putranya Tumenggung Natadiningrat sehingga harus mengalami pengasingan (Margana, 2019: 46).

[8] Pada kenyataannya, Raden Mas Surojo tidak pernah dinobatkan oleh Daendels sebagai Sultan Hamengku Buwono III pada tahun 1810. Hanya saja, secara formal, putra mahkota ini menjadi estafet dari tampuk pemerintahan Keraton Yogyakarta, sehingga segala bentuk perjanjian kenegaraan dilakukan oleh Raden Mas Surojo dengan Daendels (Marihandono, 2008: 132).

[9] Meski Raden Mas Surojo sudah diturunkan kembali sebagai putra mahkota dan mengalami ancaman dari pengikut Sultan Hamengku Buwono II, namun pemerintah Inggris menjamin agar sultan tidak mengganggu kedudukan dan keselamatan putra mahkota (Marihandono, 2008: 143).

tidak stabil di Yogyakarta. Tidak perlu menunggu lama, pada Juni 1812 Yogyakarta mengalami carut-marut yang begitu besar. Peristiwa Geger Sepehi tidak bisa dielakkan. Peperangan antara prajurit Keraton Yogyakarta dengan infantri Inggris harus dihadapi dengan segala konsekuensinya. Yogyakarta harus menghadapi kekalahan bahkan dalam kutipan *Serat Bêdhahipun Karaton Ngayogyakarta* tertulis perintah Raffles untuk menangkap Sultan Kedua dan membawanya ke kediaman residen sebagai tawanan:

> *Kangjêng Tuwan ingkang agêng dhawuh dhatêng para opisir anyêpêng kangjêng sultan, sang prabu nutut kemawon, lajêng katumpakakên kareta kabêkta dhatêng loji agêng*
>
> Terjemahan:
> Tuan Besar (Raffles) memerintahkan pada pasukan militer untuk menangkap Sultan. *Sang Prabu* menurut saja, lalu dibawa ke loji dengan naik kereta[10].

Baik dalam sumber sejarah lokal maupun Kolonial, puncak dari letusan perang Inggris di Jawa adalah ditangkapnya Sultan Hamengku Buwono II oleh Pasukan Sepoy. Seketika, sultan menjadi tawanan perang yang berharga. Ia pun dilengserkan dari kursi kekuasaannya pada 20 Juni 1812. Keesokan harinya, Raffles mengangkat Putra Mahkota sebagai Sultan Hamengku Buwono III. Pedihnya, dalam upacara pelantikan tersebut sang Sultan diminta menandatangani kontrak baru yang merugikan keraton. Sementara itu, aksi penjarahan harta istana pasca ditangkapnya sultan terus berlangsung, setidaknya selama 4 hari berturut-turut. Selepas pelantikan sultan baru, misteri siapa yang duduk di kursi kekuasaan sudah terjawab, dan rakyat tidak lagi menerka-nerka. Hanya saja, muncul persoalan baru, yakni upacara pelantikan di kantor residen tersebut mirip dengan ritual penghinaan ketimbang perhelatan penobatan agung. Pasalnya, gelaran sakral ini lazim dilakukan di Siti Hinggil, di satu bangsal bernama Manguntur Tangkil tidak lagi dilakukan. Tekanan kuasa Kolonial dan kondisi kalah perang menjadi alasan utama dari pengangkatan Sultan Surojo di kediaman Residen Yogyakarta.

Pada sesi pemberian ucapan selamat, sang raja baru disalami Pangeran Notokusumo yang berjalan paling depan. Lalu, Raffles dengan gaya Eropa menjabat hangat tangan raja. Selanjutnya Sultan Rojo menerima ucapan selamat dari Pangeran Prangwedono bergaya Eropa, lalu menyalami letnan gubernur (Carey, 2012:403). Kemudian, Pangeran Kusumoyudo sebagai paman raja menghampiri dan menyalaminya juga. Crawfurd mendapati pemandangan itu merasa tidak puas,

---

[10] *Sêrat Bêdhahipun Karaton Nagari Ngayogyakarta, saha Kendhangipun Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana Ingkang Kaping VI, Narendra Nagari Surakarta Adiningrat*.

lantas Kusumoyudo diminta mencium lutut raja. Kusumoyudo pun terkejut atas perintah itu, sebab dianggap menghina. Terlebih ia merupakan paman raja yang dianggap lebih tua. Tambah bingung saat dia dipaksa Crawfurd menundukkan kepala memberi salam setia yang sama terhadap Raffles.

Giliran berikutnya adalah Pangeran Sontokusumo, paman sultan, mengalami penghinaan serupa Kusumoyudo. Ketika ia menyalami Raffles dengan gaya Eropa, Crawfurd marah mencengkeram leher Notokusumo dan meminta berlutut menunjukkan rasa rendah hati kepada sang letnan gubernur. Seluruh bupati turut menghadiri acara pelantikan raja baru itu. Sementara Pangeran Adikusumo, Pangeran Panengah, Pangeran Butakar, Pangeran Dipasana, Pangeran Mangkualam, Pangeran Sindurejo, serta Pangeran Jayanungrat tidak menampakkan batang hidungnya. Sebagian dari mereka diduga telah mati atau melarikan diri (Irawan, 2017:18). Tiada pernah bangsawan istana dipermalukan sedemikian rupa oleh Belanda menjajah negeri selama dua abad. Tiada cerita bangsawan dipaksa secara kasar untuk berlutut dan menyembah seorang Eropa yang pangkatnya letnan gubernur. Para pangeran antri menuju panggung berlutut kepada Sultan Rojo, meski masih terhitung sebagai paman, saudara lelaki, dan sepupu raja. Di luar, terdengar keras suara tembakan penghormatan dan bergemuruh yang berasal dari 19 meriam benteng.

Acara penobatan raja di kantor Residen Crawfurd rampung, Raffles mengajak Sultan Hamengku Buwono III bersama pengiringnya memeriksa barisan pasukan Inggris dan Sepoy di tempat kehormatan, yang letaknya di antara kediaman residen dengan Benteng Vredeburg (kini Jalan Malioboro). Acara tersebut merupakan *defile* sekaligus atraksi militer pasukan Inggris, Sepoy dan pasukan Prangwedono. Serdadu Sepoy diminta tampil pertama melakukan *defile*. Rombongan yang mengenakan helm bertombol dibingkai nikel kuningan ini berbusana kemeja merah, kamisol putih, celana warna hijau, serta celana panjang. Bayonet dan tombak trisula merupakan senjata pasukan itu. Sesampainya di depan Raffles dan Sultan Rojo, tentara ini dengan langkah tegap berbaris memberi hormat. Senjatanya diajukan serta mata mereka menoleh ke arah kiri, tempat kehormatan. Dengan senapan tetap miring di bahu, mereka memberi selamat sembari berbaris ke utara (Carey, 2012:405)

Pasukan kavaleri resimen ke-22 Lingh Dragoons berada di barisan kedua. Mereka naik kuda mengenakan pakaian kemeja merah tua, celana hijau, serta kaos kaki putih. Prajurit ini menyeret pedang kavaleri. Tatkala di depan Raffles dan raja, mereka memberi hormat dengan pedang, lalu kudanya sedikit berjingkrak menoleh ke arah Raffles dan raja di sisi kiri seakan memberi salam. Hamengku Buwono III kagum mendapati kepawaian pasukan asing itu. Ia membatin bahwa wajar jika mereka bisa menggempur istana Yogyakarta. Barisan terakhir regu

campuran dari prajurit berkuda Jawa dan kuda Bima, kuda kore yang besar. Disusul serdadu artileri Sepoy Benggala. Paling belakang ada 500 orang bersenjata tombak dari legiun Prangwedono berjalan kaki. Penghormatan diberikan dengan gaya Jawa prajurit Jawa, dipimpin mayor dan kapten yang masih kerabat Prangwedono. Atraksi mengandung maksud, yakni merayakan penunjukan Hamengku Buwono III, dan memamerkan kepada pendukung maupun musuh Sultan Rojo bahwa Inggris berada di belakang pemerintahan berdaulat sultan.

Dukungan Inggris tidaklah cuma-cuma, sebab dalam tatanan baru tersebut, Sultan disodori perjanjian politik oleh John Crawfurd. Perjanjian tersebut mewajibkan Sultan untuk menanggung ongkos ekspedisi militer Inggris ke Yogyakarta. Selain itu, pemborongan bandar, gerbang tol, pajak pasar, pajak sarang burung, cukai penjualan candu, dan rumah judi diserahkan raja kepada Pemerintah Inggris. Pengelolaan hutan jati di wilayah kasultanan diambil alih oleh Inggris. Kawasan *negaragung* di Kedu, Pacitan, Blora, Grobogan, Japan, Jipan, dan Wirosobo pun diserahkan pula ke Inggris. Mulai detik itu, seluruh daerah bekas tanah apanage Kasultanan diaku milik Inggris. Di sisi lain, Inggris memaksa Sultan menyerahkan tanah seluas 400 *cacah* di Adikarto, daerah Kulon Progo kepada Pangeran Notokusumo yang berjasa membantu Inggris. Pangeran Notokusumo diangkat sebagai *pangeran merdika* bagi Keraton Yogyakarta dan *pangeran miji* bagi Inggris. Statusnya disamakan seperti raja yang merdeka.

Mengingat kembali penjarahan di Keraton Yogyakarta setelah Sultan Hamengku Buwono II ditangkap. Rupanya, pasukan dari Kolonel R.R. Gillespie dan pasukan Sepoy menjadi penyebab hilangnya kekayaan keraton dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, peristiwa serupa penjarahan tersebut merupakan hal biasa di India. Bagi mereka, barang jarahan merupakan salah satu imbalan besar bagi para perwira dari perusahaan dagang India-Inggris atau *East Indian Company* (EIC). Di dalam salinan surat-surat antara Raffles dan Lord Minto, tertulis sebuah kutipan langsung yang menyebutkan bahwa "semua barang berharga milik Djocjakarta [Yogyakarta] jatuh ke tangan para penakluk, tetapi dalam pembagian langsung di tempat, mereka mengambil untuk diri sendiri lebih banyak daripada sepatutnya. Sudah merupakan pendapat umum bahwa di tempat-tempat yang direbut dengan penyerbuan, tentara berhak membagi langsung harta dan perhiasan (Carey, 2012: 401). Gillespie sempat diperingatkan oleh Raffles tentang harta jarahannya dan terus melakukan pembagian langsung atas sekitar 800.000 dolar Spanyol yang dirampasnya dari Yogyakarta[11].

[11] Setidaknya dari 800.000 dolar Spanyol, Gillespie mengambil untuk dirinya sendiri sebesar 74.000 dolar Spanyol atau sekitar 15.000 poundsterling. Sementara harta sisanya dibagi-bagi pada rekan-rekannya sesama perwira (Carey, 2012: 402)

Penjarahan keraton berlanjut meski telah terjadi selama empat hari penuh. Berbagai barang rampasan terus diangkut ke kediaman residen dengan pedati dan para kuli panggul. Bahkan hal yang sangat menyakitkan adalah dipaksanya para perwira keraton untuk mengangkut barang-barang jarahan menggunakan peti besar yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang pusaka keraton. Dari catatan sejarawan Peter Carey, yang paling banyak diangkut adalah alat persenjataan, satuan-satuan wayang, semua gamelan keraton, dan arsip serta naskah-naskah[12]. Carey mencatat pula bahwa rampasan naskah keraton paling banyak berada di tangan perwira Inggris bernama Kolonel Colin Mackenzie. Sekurang-kurangnya terdapat 66 naskah berbahasa Jawa yang dibawanya pulang ke Benggala pada Juli 1813. Koleksi tersebut kemudian hari dikenal sebagai *The Mackenzie Privat Collection* yang tersimpan di London. Selain itu, John Crawfurd disebut-sebut sebagai residen yang turut menjarah perpustakaan keraton. Sedikitnya 45 naskah berbahasa Jawa dibawa olehnya. Kemudian pada 1842, naskah-naskah tersebut dijual kepada British Museum. Sementara Raffles sebagai Gubernur Jendral saat peristiwa Geger Spehi, turut membawa naskah keraton dengan jumlah lebih banyak yaitu 55 naskah. Pada tahun 1830, pasca Raffles meninggal, istrinya yang bernama Lady Shopia Raffles menyerahkan koleksi naskah-naskah tersebut kepada *Royal Asiatic Society*[13].

Dari kertas kerja Ricklefs dan Voorhoeve, diketahui hanya ditemukan 75 manuskrip yang merupakan bagian dari harta rampasan Raffles dan beberapa perwira Inggris saat peristiwa Geger Sepehi. Ketujuhpuluh-lima naskah tersebut telah dikatalogisasi dalam katalog naskah *Indonesian Manuscript in Great Britain*. Di dalam katalog tersebut tercatat Arsip-arsip Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono II yang merekam catatan mengenai aturan busana bagi para bangsawan di Keraton Yogyakarta. Arsip-arsip tersebut dikeluarkan oleh keraton antara tahun 1780 hingga 1812[14].

---

[12] Naskah-naskah ini mencakup karya sastra babad dan juga surat pendaftaran tanah berisi rincian tanah-jabatan yang diberikan kepada anggota keluarga sultan dan para pejabat di wilayah *negaragung* (Carey, 2012: 405). Banyaknya naskah yang menjadi harta rampasan tidak terlepas dari perhatian Sultan Hamengku Buwono II sebagai pemerhati karya sastra. Pada tahun 1774, R.M. Sundoro (saat menjadi putra mahkota) telah menyusun karya sastra pertamanya, berjudul *Babad Mangkubumi*. Sastra babad ini oleh R.M. Sundoro dimaksudkan untuk menopang keabsahan kekuasaan Sultan HB I. Sastra kedua yang ditulis oleh R.M. Sundoro adalah *Serat Suryaraja* yang mengisahkan perang raja-raja Jawa dengan penguasa sebrang. Barulah setelah naik takhta, R.M. Sundoro kembali menulis *Serat Baron Sekonder* (*Sekender*) antara tahun 1808-1812 (Marihadono, 2008).

[13] *Kangjeng Kyai Al Quran* yang ditulis pada tahun 1797 selamat tidak dibawa oleh Raffles saat itu. Ia beranggapan bahwa Al-Quran tidak termasuk bagian dari warisan adiluhung Hindu-Buddha Jawa, sehingga tidak turut dibawa (Lindsay, 1994, Carey, 2012).

[14] Di dalam kertas kerjanya, Ricklefs dan Annabel mengidentifikasi 75 naskah yang berasal dari Keraton Yogyakarta sebagai peninggalan Raffles. Di antara naskah-naskah yang mengandung piwulang, terdapat pula arsip-arsip Yogyakarta yang mengatur urusan internal keraton seperti hukum dan aturan adat, hubungan dengan Pemerintah Kolonial, urusan agama, hingga hukum perdagangan (Ricklefs, 2014: 45-84).

Pra-Repatriasi hingga Resepsi

Mengutip laman blogs.bl.uk/asian-and-african/[15] yang menulis berita kunjungan Sultan Hamengku Buwono X yang dirilis pada 21 Maret 2018. Pada berita tersebut ditulis bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengunjungi perpustakaan Inggris untuk meluncurkan proyek digitalisasi manuskrip Jawa dari Yogyakarta. Melalui dukungan penuh dari Sri Parkash Lohia, selama dua belas bulan ke depan, 75 naskah Jawa dari Yogyakarta yang kini disimpan di perpustakaan Inggris akan didigitalkan, dan akan dapat diakses sepenuhnya dan bebas secara daring melalui situs web Naskah Digital British Library. Setelah proyek selesai pada bulan Maret 2019, set lengkap dari 30.000 gambar digital akan dipresentasikan kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perpustakaan Nasional Indonesia di Jakarta. Naskah-naskah tersebut juga dapat diakses melalui situs web Bapak Lohia, splrarebooks.com. Tujuh puluh lima manuskrip Jawa yang akan didigitalkan termasuk 70 yang diketahui dan diyakini telah diambil oleh pasukan infantri Inggris setelah serangan bersenjata di Keraton Yogyakarta pada bulan Juni 1812 di bawah komando Letnan Gubernur Jawa, Thomas Stamford Raffles. Ditambah 5 manuskrip lainnya yang terkait dengan Yogyakarta, terutama terdiri dari karya-karya tentang sejarah, sastra, dan etika Jawa, cerita-cerita Islam dan kompilasi cerita wayang, serta dokumen-dokumen pengadilan, yang ditulis dalam bahasa Jawa baik dalam aksara Jawa (hanacaraka) maupun dalam aksara Arab yang dimodifikasi (pegon), pada kertas Jawa buatan Eropa dan lokal (dluwang).

Pada Maret 2019, Keraton Yogyakarta merespon kembalinya 75 manuskrip digital melalui kegiatan simposium dan pameran temporer. Pada momen tersebut, Keraton Yogyakarta untuk kali pertama menggelar pameran dan mempertontonkan warisan kekayaan intelektual dari para pendahulu keraton dalam bentuk manuskrip fisik. Pada pidato pembukaan simposium, Gusti Kanjeng Ratu Hayu menyampaikan bahwa bahkan setelah musibah Juni 1812 - yang dikenang di Yogyakarta sebagai Geger Sepehi, serangan kaum Sepoy, setelah pasukan India yang dipimpin oleh Inggris - Kraton tidak pernah berhenti menjadi pusat produksi dan reproduksi pengetahuan. Meskipun demikian, dengan hilangnya perpustakaan kerajaan, telah terjadi pemutusan yang pasti dalam rantai transmisi pengetahuan (ada mata rantai yang terputus) (GKR Hayu, 2019)[16].

---

[15] https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2018/03/javanese-manuscripts-from-yogyakarta-digitisation-project-launched-by-sri-sultan-hamengku-buwono-x.html?_ga=2.54359208.1878179324.1521544911-1913566032.1450280032 (diakses pada 26 Januari 2025, pukul 20:11).

[16] https://www.kratonjogja.id/peristiwa/64-simposium-budaya-jawa-dan-pameran-manuskrip-keraton-yogyakarta/ (diakses pada 28 Januari 2025, pukul 23:01).

Mendukung apa yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hayu, ketua penyelenggara pameran, Gusti Kanjeng Ratu Bendara menyampaikan bahwa pameran temporer ini merupakan kali pertama bagi Keraton Yogyakarta memerkan 21 koleksi manuskrip kraton, 2 koleksi dari Pura Pakualaman, 2 koleksi dari Balai Pelestarian Nilai dan Budaya, dan 2 koleksi dari Museum Sonobudoyo. Koleksi yang dipilih dalam pameran ini yang menunjukkan perjalanan sejarah dan ajaran-ajaran keraton dari masa Sultan Hamengku Buwono I hingga Sultan Hamengku Buwono IX (GKR Bendara, 2019)[17]. Menutup seluruh narasi panjang tentang perjuangan pasca Geger Sepehi, Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi epilog dalam sambutan resepsi perayaan 30 tahun bertakhta, bahwa Yogyakarta telah menemukan titik balik kebangkitan yakni sebuah renaisans Jawa yang dimaknai dengan padanan gumregah. Gumregah merupakan kata kerja untuk membangkitkan gerakan kebudayaan sebagai akselerator demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Pada kompendium kebudayaan Jawa, ibaratnya Yogyakarta sebagai rahim budaya disokong oleh aspek pendidikan. Pendidikan terkait erat dengan simbol kebudayaan dan keistimewaan. Keraton Yogyakarta menurut sosiolog Selo Sumarjan telah mencerminkan hal itu sejak dibukanya Universitas Gadjah Mada di Siti Hinggil. Di titik inilah renaisans Jawa mengerucut sebagai renaisans Yogyakarta (Sri Sultan Hamengku Buwono X, 2019)[18].

Renaisans yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sejatinya telah dimulai sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V. Di dalam catatan kuratorial pameran yang ditulis oleh Fajar Wijanarko, disebut bahwa perpustakaan keraton kembali dibangun secara bertahap semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V. Sultan juga mendorong penulisan karya sastra, termasuk menulis beberapa bukunya sendiri (Wijanarko, 2019:11). Ditinjau dari sejarah Yogyakarta dalam prespekti negara pasca perang --sebab setelah Geger Sepehi, Yogyakarta dihadapkan pada satu peristiwa Perang Jawa—pembangunan pada masa pemerintahan Sultan Kelima berkonsentrasi pada pembangembangan kebudayaan rohani (Simuh, 1984). Perihal tersebut dibuktikan dengan banyaknya koleksi sastra suluk di keraton yang diproduksi antara tahun 1840-an, seperti Suluk Dewaruci, Suluk Insan Kamil, Suluk Sarengat, Suluk Sembah Puji, dan beberapa teks bernuansa religi lainnya (Lindsay, 1994).

Renaisans pada pemerintahan Sultan Kelima bukan menjadi jawaban atas mata ranti sejarah yang terputus. Akan tetapi, dari pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V, para pujangga dan carik-carik di Keraton Yogyakarta memiliki pijakan dan orientasi pembangunan. Fajar Wijanarko

[17] https://www.youtube.com/watch?v=fN8n2FA14Ic&t=6915s (diakses pada 28 Januari 2025, pukul 23:10).
[18] https://www.youtube.com/watch?v=fN8n2FA14Ic&t=6915s (diakses pada 28 Januari 2025, pukul 23:10).

menuliskan dalam catatan kuratorial bahwa meski peristiwa Geger Sepehi memberi ruang kosong pada pengetahuan, namun Keraton Yogyakarta tetap mampu merangkainya sebagai keterkaitan peradaban. Misalnya *Babad Ngayogyakarta*: *Hamengku Buwono I dumugi Hamengku Buwono III* (1817) menjadi sastra sejarah pertama dari masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IV yang ditulis untuk memberi gambaran tentang memori kolektif dari Pangeran Mangkubumi mampu menjadi sumber rujukan primer dari prespektif keraton dalam menarasikan perjuangan *founding father* dari Yogyakarta. Sementara *Babad Giyanti dumugi Geger Inggrisan Jumenengan Hamengku Buwono III* (1847) hingga *Serat Kandha Bedhaya utawi Srimpi* (1930an) mampu menggambarkan situasi sastra elite yang bertumbuh dan berubah haluan tulisannya seiring dengan kemapanan ekonomi, politik, serta sosial. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, banyaknya manuskrip bedaya maupun wayang wong berkelindan dengan kegemaran sultan dalam menggelar seni pertunjukan sebagai suguhan perjamuan kenegaraan. Dari sastra babad yang ditulis tersebut, dengan begitu kentara bahwa secara diakronis 'lambang kekuasaan' sultan dari segi kesusastraan tidak benar-benar hilang. Baik serat maupun babad, keduanya memberi gambaran tentang legitimasi prominen dari kuasa sultan (Wijanarko, 2019:12-13).

Mendaya-gunakan Naskah Repatriasi

Diserahkannya 75 manuskrip digital oleh Perpustakaan Inggris ke Keraton Yogyakarta menjadi persoalan baru, jika hanya sekadar menjadi data digital saja. Praktik mendaya-gunakan kembali manuskrip tersebut dilakukan oleh keraton melalui beberapa tahapan, seperti alih aksara manuskrip Serat Menak yang ditulis oleh Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten, permaisuri dari Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga upaya untuk merevitalisasi busana adat, membangun ruang edukasi publik melalui pameran temporer, dan alih media teks Jawa dalam seni pertunjukan.

1. **Alih-aksara Serat Menak**

   Berdasarkan katalog *Indonesian Manuscripts in Great Britain* (Ricklefs, dkk. 2014) sedikit diterangkan bahwa manuskrip berkode koleksi Add. 12309 tersebut ditulis menggunakan aksara Pegon dengan kertas daluwang '*Javanese paper*' dengan ukuran 28x21 cm dan terdiri dari 3000 lebih halaman, semula merupakan koleksi dari John Crawfurd. Keterangan lebih jelas lagi disampaikan oleh Annabel Teh Gallop melalui laman perpustakaan Inggris[19] yang menyebut bahwa cerita Amir Hamzah berhubungan dengan Hamzanama, kisah Muhammad Hanafiah saudara tiri dari cucu Nabi yang mengambil latar

[19] https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2018/09/menak-amir-hamza-the-javanese-version-of-the-hamzanama.html

cerita awal agama Islam. Hamzanama kemungkinan menyebar ke seluruh Asia Tenggara awalnya dalam bahasa Melayu sebelum diterjemahkan ke bahasa daerah lain, termasuk Jawa, Bugis, dan Makassar. Meski demikian, kisah Amir Hamzah yang lebih populer dalam ekosistem kehidupan sastra Jawa. Di Jawa, pahlawan Amir Hamzah diberi gelar Jawa kuno Menak, dan gelar ini sekarang diterapkan pada seluruh siklus kisah epik Islam, yang segera dilokalisasi menurut konvensi sastra Jawa, sehingga dalam siklus cerita Menak, tokoh Amir Hamzah diberi dua pendamping panakawan, Umarmaya dan Umarmadi[20].

Di perpustakaan Inggris terdapat 3 manuskrip berjudul Menak Amiz Hamzah. Pertama, teks Menak berkode MSS Jav 45 yang ditulis dalam aksara Jawa yang berasal dari prototipe India (akhir Brahmi selatan), sehingga dibaca dari kiri ke kanan. Naskah ini disalin oleh Mas Ajĕng Wongsaleksana dari Jipang, dan bertanggal 9 Rabingulakir, dengan kronogram panca tri pandita jalma yang menyebutkan tahun pada era Jawa sebagai 1735, yang setara dengan 4 Juni 1808 M. Teks ini ditulis dalam bentuk syair dan terdiri dari 85 bait. Sementara teks Menak kedua berkode MSS Jav 72, ditulis dalam aksara pegon, yaitu aksara Arab dengan tambahan tujuh huruf yang mewakili bunyi konsonan yang dibutuhkan untuk bahasa Jawa tetapi tidak ditemukan dalam bahasa Arab, dan dengan demikian dibaca dari kanan ke kiri. Salinan teks Menak Amir Hamza ketiga berkode Add. 12309 inilah yang ditulis oleh Ratu Ageng (sekitar 1730-1803), permaisuri dari Sri Sultan Hamengku Buwono I dan ibu dari Sri Sultan Hamengku Buwono II. Salinan teks Menak Amir Hamzah inilah yang saat ini dikerjakan alih-aksaranya oleh Keraton Yogyakarta guna mengungkap khazanah isi dari ajaran di dalamnya.

[20] Keterangan tambahan mengenai teks Amir Hamza yang semula ditulis dalam sastra Melayu dan kemudian mendapat sambutan secara luas di dalam berbagai sastra Nusantara yang lain, di antaranya sastra Jawa, Sunda, Bali, Lombok, Bugis, Madura, Palembang, dan Aceh. Teks Amir Hamzah yang terdapat dalam beberapa daerah di Nusantara antara lain: dalam bahasa Melayu dikenal dengan judul Hikayat Amir, dalam bahasa Jawa dikenal dengan judul Serat Ménak, dalam bahasa Sunda dikenal dengan judul Wawacan Amir Hamzah dalam bahasa Bugis Makasar dikenal dengan judul Hikayat Amir Hamzah, dalam bahasa Bali dikenal dengan judul Geguritan Amir Amsyah, dalam bahasa Aceh dikenal dengan judul Hikayat Sayidina Amdah, dan dalam bahasa Sasak dikenal dengan judul Amir (Istanti, 2006: 114).



Gambar 1:
Serat Menak Amir Hamzah (Add. 12309) karya Ratu Ageng Tegalreja, koleksi Perpustakaan Inggris dengan tebal lebih dari 3000 halaman

(sumber: https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2018/09/menak-amir-hamza-the-javanese-version-of-the-hamzanama.html)

Berikut kutipan *pupuh* pertama, tembang Asmaradana (bait 1-4):

(1) *Ingsung amiwiti muji, anêbut namaning suksma, kang murah ing dunya mangko, ingkang asih ing akherat, kang pinuji tan pegat, angganjar kawelasan ayun, kang apura ingkang dosa.*
(2) *Têtkala wiwit tinulis, ing dina Saptu punika, nênggih Lêgi pasarane, apan nuju wulan Ruwah, tanggalipun ping tiga, nuju Êdal taunipun, anênggih angkanipun warsa.*
(3) *Anênggih ingkang anulis, abdi dalêm saking desa, Amad Bênari wêstane, kinen dhatêng gustinira, nenggih Prabu Wanodya, kang jumênêng Ratu Agung, kang ngêdhaton Têgalreja.*
(4) *Milane sang prabu estri, ngêdhaton ing Têgalreja, nênêdha Hyang Sukma mangko, sêlamete kang sarira, myang putra wayah sdaya, denapura mring Hyang Agung, ing dunya rawuh ngaherat.*

Berdasarkan kutipan awal teks Menak Amir Hamzah yang ditulis oleh Ratu Ageng, diketahui beberapa informasi bahwa teks mulai ditulis pada hari Sabtu Legi, tanggal 3 Ruwah, antara tahun 1792-1812. Ratu Ageng rupanya tidak menulis teks tersebut sendiri, melainkan dibantu oleh seorang juru tulis dari desa bernama Amad Benari. Diceritakan dalam permulaan teks bahwa Ratu Ageng (dahulu bernama Ratu Kadhipaten) memilih keluar dari keraton dan tinggal di Tegalreja '*ngêdhaton Têgalreja*' dengan tujuan untuk memohon keselamatan pada sang Pencipta '*Hyang Agung'* bagi dirinya, anak, cucu, dan seluruh keturunannya. Hasil dari alih aksara Serat Menah Amir Hamzah dicetak masal oleh Keraton Yogyakarta dan sempat dibagikan pada masyarakat umum, tahun 2020.

2. Revitalisasi Busana dan Pameran Abalakuswa, Hadibusana Keraton Yogyakarta

Pada praktik revitalisasi busana, setidaknya Keraton Yogyakarta mengetengahkan pendekatan antropologi sebagai upaya membaca sejarah dan merelevansikan dengan kondisi saat ini. Kartodirdjo (2014) menyebut bahwa melalui pendekatan antropologi, daya sebuah institusi untuk mengungkapkan nilai-nilai mendasar dari kompleksitas sejarah, status, dan gaya hidup, hingga sistem kepercayaan pada sekelompok masyarakat dapat dilakukan (Kartodirdjo (2014:5). Di sisi lain, pendekatan ini mampu memberi gambaran tentang masyarakat pemilik kebudayaan yang terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan sosial dan kesesuaian zmaan (Abdurrahman, 2011:15).

Pada kasus revitalisasi busana adat, Keraton Yogyakarta pada manuskrip *Archive of Yogyakarta,* 1780-1811 (kode Add MS. 12303). Di dalam Arsip Yogyakarta 1788[21], ditemukan catatan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono I menggunakan busana *prajuritan* saat menjemput Tuwan Ideler Jan Grefe menuju ke pesanggrahan Resanegara[22]. Pada arsip tahun 1798, Sri Sultan Hamengku Buwono II mencatat lebih lengkap tentang busana yang disebut *rasukan, amben, kampuh[23],* dan *celana cindhe[24]*. Disebutkan pula tentang larangan penggunaan motif-motif batik tertentu, seperti motif *sawat, parang-rusak, kawung sari, cumengkirang, udan-riris,* dan *cuwiri kothong*. Pada arsip tahun 1801, Sri Sultan Hamengku Buwono II menerbitkan aturan tentang *rasukan* 'pakaian' yang merupakan *awisan-Dalem[25]* (Carey, 1980: 180). Berdasarkan arsip-arsip demikian, tidak mengherankan jika Crawfurd menyebut Orang Jawa sebagai pelopor dalam hal berbusana

---

[21]The order list the clothes (*prajuritan-fighting dress)* which are to be worn by Sultan Hamengku Buwana I and the Yogya Crown Prince (the future HB II) […]. (Archieve of Yogyakarta, (BL Add. MS. 12303), Koleksi British Library).

[22] *Kanjeng Sinuhun agagem prajuritan, alancingan baludru cemeng lugas, pinasih ing kencana, tinaretes ing inten boten mawi mojah, angagem rasukan baludru cemeng lugas, angagem songkok cememng gegerusan baten mawi renda […]* (Carey, 1980: 160).

[23] *Kampuh* agaknya menempati peran khusus dalam tata busana kerajaan. Busana *kampuh* dengan kain *dodot* yang terbuat dari sutra atau katun memiliki ukuran 3-4 kali dari *jarit*. Busana ini hanya digunakan pada acara resmi kerajaan (Raffles, 2014: 54).

[24] Di dalam Kidung Harsawijaya *patawala* 'kain patola' merupakan cikal bakal dari motif *cindhe* di Jawa. Raffles dalam catatannya tentang sejarah Jawa menyebutkan pula *chindi* atau *patole* sebagai motif pada kain sutra yang digunakan sebagai sabuk pengikat *jarit* atau *kampuh* (Raffles, 2014: 54).

[25] *Rasukan aleja pethak, rasukan baludru wungu sepuh, rasukan baludru cemeng sawit, rasukan keling jawi, rasukan lurik ginggang kenthing, rasukan lurik dhasar cemeng, rasukan sultani pethak, rasukan pranakan pethak, rasukan sikepan pethak, rasukan mawi kancing lengen* (Arsip Yogyakarta, 1801).

(Crawfurd, 2017: 141)[26]. Bangsawan Yogyakarta nampaknya mencatat aturan berbusana dalam arsip-arsip tahun 1771-1813 sebagai dokumen legitimasi[27].

Temuan dari arsip tersebut kemudian dipadukan dengan pemerintahan sultan-sultan berikutnya, terutama Pasca peristiwa Geger Spehi (1813). Pada kasus arsip busana, catatan mengenai aturan ditemukan lagi pada akhir pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V (1823-1855). Pada masa yang sama, terjadi pula perubahan tata busana kerajaan secara besar-besaran. Penggunaan lurik (tenun) masif digunakan oleh *Abdi Dalem*. Aturan berbusana kembali muncul pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VI (1855-1877)[28]. Sementara pembakuan tata busana bagi keluarga, kerabat, prajurit, hingga *Abdi Dalem* muncul pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921)[29].

Pada akhir pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII (1920), pengaruh busana Eropa mulai terlihat. Perubahan paling kentara terjadi pada tata busana tari *bedhaya*. Semula para penari menggunakan busana *dodot* dengan *paes ageng*, kemudian berubah menjadi busana *rompen* dengan *jamang* berhias bulu kasuari. Penggunaan bulu ini menyerupai tatanan rambut bangsawan perempuan Eropa pada abad XIX (Soeharto, 1997: 2)[30]. Pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), perubahan busana justru terjadi pada *Wayang Wong*. Tata busana tokoh-tokoh dalam *Wayang Wong* mulai dibakukan berdasarkan visual ikonografi wayang kulit[31]. Peradaban busana di Keraton Yogyakarta mengalami perubahan secara signifikan pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1940-1988). Berbagai penyederhanaan dilakukan di sana-sini, termasuk hilangnya busana *kampuh* pada *Pangeran* dan *Abdi Dalem*[32]. Keadaan inilah yang

---

[26] Di dalam tulisan Crawfurd (1783-1868), busana Bangsawan Jawa dibagi menjadi 3 jenis, di antaranya *rajaputra* 'busana para raja' , *pisowanan* 'busana bangsawan saat menuju kerajaan', dan *prajuritan* 'busana militer' (Crawfurd, 2017: 141-142)..

[27] Arsip Yogyakarta (Archieve of Yogyakarta) koleksi British Library telah diterbitkan oleh Peter Carey (1980). Carey mengalihaksarakan arsip-arsip Yogyakarta tahun 1772-1813, periode awal dari pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga akhir Sri Sultan Hamengku Buwono II sebelum diasingkan ke Penang.

[28] Sri Sultan Hamengku Buwono VI mengeluarkan aturan berbusana melalui *Pranatan Garebeg Mulud Dal 1839; Pranatan Dalem yen sami sowan wonten Plataran Kedhaton* pada Sabtu, 5 Desember 1855.

[29] Salah satu babad yang mencatat pembakuan busana pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII berjudul *Babad Ngayogyakarta: Sultan Hamengku Buwono V-VII* (SB 141a), yang ditulis pada 4 Agustus 1886, koleksi Museum Sonobudoyo.

[30] Busana *kampuh* yang digunakan pun turut berubah menjadi kain batik *seredan* yang menjuntai di sisi sebelah kiri penari (Soeharto, 1997: 2).

[31] Sri Sultan Hamengku Buwono VIII menunjuk K.R.T. Jayadipura untuk merancang ulang busana *wayang wong* agar sesuai dengan ikonografi wayang kulit. K.R.T. Jayadipura juga membuat berbagai kostum hewan, salah satunya kostum burung garuda (Tim Penyusun, 2014: 12-34).

[32] Alasan politik menjadi latar belakang dari menghilangnya berbagai tata busana para bangsawan keraton. Terlebih lagi, penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang membuat kondisi keraton tidak kondusif dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri.

diwarisi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dokumentasi busana keraton akhir abad XIX selanjutnya hanya dapat dinikmati dalam seni 2 dimensi.

Praksis dari temuan dan upaya komparasi arsip, Keraton Yogyakarta menggelar satu pameran bertajuk Abalakuswa untuk memberi gambaran tentang berbagai aturan busana. Di sisi lain, Keraton Yogyakarta juga membuktikan bahwa arsip dari masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I memiliki keterkaitan dengan aturan-aturan busana yang masih dilestarikan saat ini. Pada kasus busana *prajuritan* yang dikenakan Sultan Hamengku Buwono I saat menjamu Gubernur Jan Greefe tahun 1788 di Pesanggrahan Resanegaran, rupanya kelengkapan busana tersebut juga ditemukan sebagai busana kebesaran sultan.



Gambar 2: Busana Prajuritan yang dikenakan oleh beberapa sultan, di antaranya: a) Sri Sultan Hamengku Buwono VI, b) Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, c) Putra Mahkota, GRM Akhadiyat, d) Sri Sultan Hamengku Buwono IX. (sumber: KITLV)

Pada revitalisasi aturan busana, Keraton Yogyakarta mengeluarkan buku pedoman *Awisan Dalm Bathik*, yang menerangkan motif batik parang dan beberapa aturan spesifik mengenai penggunaannya. Buku pedoman mengenai aturan batik tersebut merujuk pada arsip yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono II, tahun 1801.

> *"[...] ingkang ingkang warni sinjang ingkang awisan,* ***bathik sawat****, sawarnine ingkang nama sawat awisan,* ***bathik parang-rusak****,* ***bathik semen, bathik kawungsari, bathik udan-riris, bathik cumĕngkirang, bathik huk, bathik sĕmbagen ombaking toya****, udhĕng ingkang awisan, bathik sawat, samubarang sawat awisan, bathik semen, bathik huk, bathik udan-riris, bathik cumĕngkirang, samubarang bathik yen tĕngah mawi pĕthak awisan,* (Archive of Yogyakarta 1801, f.106v).



Gambar 3: Halaman depan buku pedoan *Awisan Dalem Bathik* motif Parang Rusak yang diterbitkan oleh Keraton Yogyakarta tahun 2022.

(sumber: dokumen pribadi)

Pada sisi busana, Keraton Yogyakarta benar-benar memanfaatkan kembalinya manuskrip digital dari perpustakaan Inggris dengan begitu cermat. Bukan sekadar memanfaatkan manuskrip dari perpustakaan Inggris sebagai sumber tunggal, namun komparasi sumber-sumber (litografi, arsip, dan foto) dari pemerintahan sultan berikutnya dilakukan guna menentukan keabsahan informasi Luaran dalam bentuk buku pedoman batik menjadi bukti keseriusan keraton dalam merespon proyek panjang repatriasi tersebut.

3. Alih Wahana: Teks Sastra dan Seni Pertunjukan

Alih wahana menjadi pilihan lain dalam merespon repatriasi manuskrip. Perihal ini dipilih pula oleh Keraton Yogyakarta untuk merekonstruksi arsip-arsip tari dalam seni pertunjukan yang mudah dinikmati oleh masyarakat umum. Pada kasus ini, Keraton Yogyakarta melakukan upaya rekonstruksi tari yang tercatat pada *Klangenan Beksan Lawung Ringgit*. Dari manuskrip tersebut, keraton yang menghasilkan 2 rekonstruksi tari yaitu *Beksan Lawung Ringgit* dan *Beksan Panji Laleyan*.



Gambar 4: Beksan Lawung Ringgit karya Sri Sultan Hamengku Buwono I, direkonstruksi dan dipentaskan saat pembukaan International Symposium Internasional Budaya Jawa yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta, tahun 2020.

(sumber: kratonjogja.id)



Gambar 5: Beksan Panji Laleyan karya Sri Sultan Hamengku Buwono I, direkonstruksi dan dipentaskan saat gelaran Uyon-uyon Hadiluhung 2021.

(sumber: kratonjogja.id)

Sementara pada upaya pemanfaatan Keraton Yogyakarta menggunakan manuskrip sebagai sumber rujukan penciptaan tari. Beberapa tari putra yang diciptakan semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono X bersumber dari teks Baratayudha kawi miring (kode koleksi MSS Jav 4), yang semula merupakan koleksi pribadi dari kolonel Mackenzie. Manuskrip tersebut ditulis pada tahun 1792 menggunakan aksara Jawa. Beberapa tari putra yang diciptakan berdasarkan latar cerita dari teks Baratayudha kawi miring yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1: Daftar Tari Ciptaan Sri Sultan Hamengku Buwono X

No	Nama Tari	Keterangan
1	Beksan Dasakusuma	Beksan Dasakusuma merupakan *beksan kakung* (tari putra) keempat Yasan Dalem (karya) Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10 yang pertama kali ditampilkan dalam Uyon-Uyon Hadiluhung pada 6 Juni 2022. Tari ini menggambarkan pertempuran antara Prabu Dasakusuma dan Raden Panji Laleyan. Kisah tersebut menukil dari narasi Wayang Gedhog dalam manuskrip *Serat Kandha Kalangenan Dalem Beksan Lawung Ringgit*
2	Beksan Punggawa	Beksan Punggawa merupakan *beksan kakung* (tari putra) Yasan Dalem (karya) kelima Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Tarian bernuansa kisah Panji ini pertama kali dipentaskan pada pergelaran Uyon-Uyon Hadiluhung Selasa Wage 19 September 2022. Beksan Punggawa mengisahkan peperangan antara Raden Jaya Wiruta dan Kiai Patih Jaya Surangga. Babak tersebut diambil dari naskah Wayang Gedhog manuskrip *Serat Kandha Kalangenan Dalem Beksan Lawung Ringgit*.

3	Beksan Jayengrana	Beksan Jayengrana tampil perdana pada gelaran Uyon-Uyon Hadiluhung 28 November 2022. *Beksan kakung* (tari putra) keenam ini merupakan Yasan Dalem (karya) Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Nama Jayengrana berasal dari 'Jaya ing Rananggana yang berarti unggul dalam peperangan. Intisari cerita Beksan Jayengrana diambil dari adegan pertempuran antara Raden Jayengrana dan Prabu Pancakusuma dalam naskah Wayang Gedhog, manuskrip *Serat Kandha Kalangenan Dalem Beksan Lawung Ringgit*.
4	Beksan Jayenglaga	Beksan Jayenglaga merupakan *beksan kakung* (tari putra) Yasan Dalem (karya) ketujuh Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Bernuansa lakon Panji, tarian ini perdana digelar dalam pertunjukan Uyon-Uyon Hadiluhung 6 Februari 2023. Tarian bertemakan pertempuran ini menceritakan perseteruan Raden Jayenglaga dari Kerajaan Jenggala dengan Prabu Mandrasena dari Kerajaan Puserangin. Fragmen ini menyalin dari kisah Wayang Gedhog dalam manuskrip *Serat Kandha Kalangenan Dalem Beksan Lawung Ringgit*.
5	Beksan Suryawijaya	Tarian *Yasan Dalem* (karya) Sri Sultan Hamengku Bawono Ka-10 yang pertama kali dipentaskan dalam pertunjukan Uyon-Uyon Hadiluhung 22 Mei 2023. Tarian yang menggambarkan pertarungan antara Prabu Suryawijaya dari Kerajaan Ngurawan dengan Prabu Sukmaningkara dari Kerajaan Simbar Kencana ini terinspirasi dari naskah Wayang Gedhog manuskrip Serat Kandha Kalangenan Dalem Beksan Lawung Ringgit.
6	Beksan Jayengkusuma	Tarian *Yasan Dalem* (karya) Sri Sultan Hamengku Bawono Ka-10 yang pertama kali dipentaskan dalam pertunjukan Uyon-Uyon Hadiluhung 31 Juli 2023. Beksan Jayengkusuma menyadur kisah pertempuran empat tokoh cerita Panji, yaitu Jaya Wiruta dan Jayengrana dari Kediri melawan Jaya Surangga dan Pancakusuma dari Parangkencana. Adegan tersebut tercantum dalam naskah Wayang Gedhog manuskrip *Serat Kandha Kalangenan Dalem Beksan Lawung Ringgit*.

Berdasarkan temuan data penciptaan tari semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10, dapat dipahami bahwa institusi keraton secara serius merespon kembalinya 75 manuskrip dari perpustakaan Inggris, meski dalam bentuk digital. Di sisi lain penciptaan tari tersebut memberi wahana baru pada masyarakat dalam membaca

sejarah dengan konten yang sudah dipadatkan, bukan sumber primer yang begitu berlapis informasi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta untuk mendekatkan sumber-sumber sejarah dalam wahana baru merupakan wujud dari kerja pelestarian yang adaptif. Dengan demikian, sejarah tidak sebatas sumber tertulis maupun visual 2 dimensi, namun dapat diwujudkan dalam alih wahana seni pertunjukan maupun pameran.

Epilog: Awal dari Kesimpulan

Repatriasi 75 manuskrip Jawa dari Keraton Yogyakarta dalam bentuk digital oleh perpustakan Inggris merupakan pintu awal dari upaya merekonstruksi kembali rantai pengetahuan di Yogyakarta. Pasalnya, dengan data-data yang tercatat sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono II (1780-1812), keraton mampu memperdalam sejarah sekaligus identitas budaya 'Yogyakarta'. Akan tetapi, persoalan baru akan timbul apabila Keraton Yogyakarta sebagai institusi gagal untuk memanfaatkannya. Terlebih lagi, keraton sebagai institusi yang menggawangi kembalinya ilmu pengetahuan tersebut memiliki hak otoritas dalam pendaya-gunaan manuskrip secara maksimal.

Dugaan atas mandeknya pengetahuan yang dapat direproduksi dari 75 manuskrip tidak tepat. Keraton Yogyakarta secara tegas merespon kembalinya ke-75 manuskrip melalui beberapa hal: 1) alih aksara Serat Menak, 2) revitalisasi busana adat dan edukasi publik melalui pameran temporer, 3) alih media teks Jawa dalam seni pertunjukan. Pada kegiatan revitalisasi busana adat, Keraton Yogyakarta mengeluarkan buku pedoman penggunaan batik motif parang. Pedoman tersebut mampu menjadi gambaran tentang batik sebagai simbol dari kuasa seorang sultan. Sementara pada bidang seni pertunjukan, terjadi proses alih wahana teks sastra menjadi bentuk tari. Terdapat 2 karya tari yang direkonstruksi dari teks semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I dan 6 karya tari yang diciptakan mengacu pada latar cerita teks Baratayudha kawi miring, 1792.

Kerja revitalisasi yang dilakukan Keraton Yogyakarta merupakan upaya dari keraton sebagai institusi budaya untuk membuka diri sekaligus merelevansikan tradisi yang dicatat semasa pembangunan awal Yogyakarta. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan keraton saat ini merupakan wujud dari auto-kritik terhadap eksklusivitas pengetahuan yang kerap dianggap berjarak secara umum dengan masyarakat. Dari hasil tersebut, rasanya institusi keraton telah mampu menghindari alenisasi pada akses data manuskrip sebagai aset pengetahuan sekaligus mengejawantahkan ungkapan *babar wastra sampiran*.

Daftar Pustaka

Aryono. 1981. *Serat Rerenggan Kraton* (Alih Aksara). Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.

Behrend. T.E. 1990. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 1: Museum Sonobudoyo Yogyakarta*. Jakarta: Djambatan. Crawfurd, John. 2017. *Sejarah Kepulauan Nusantara: Kajian Budaya, Agama, Politik, Hukum, dan Ekonomi (terjemahan)*. Yogyakarta: Ombak.

Carey, Peter. 1980. *The Archieve of Yogyakarta, Vol. 1 Document Relating to Politics and Internal Court Affairs. London: Oxford University Press*.

_____. 2012. *Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*. Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta.

_____. tanpa tahun. *Koleksi Naskah-naskah Jawa John Crawfurd di British Library: Sebuah Pengantar*: Diunggah dalam laman academia.edu.

Istanti, Kun Zachrun. 2006. "Warna Lokal Teks Amir Hamzah dalam Serat Menak" dalam *Humaniora*. Vol. 18 No. 2, hal 114-124.

Lindsay, Jenifer., dkk. 1994. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 2, Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mandoyokusumo. 1988. *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat*. Yogyakarta; Bebadan Museum Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Marihandono, Djoko dan Juwono, Harto. 2008. *Sultan Hamengku Buwono II Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Banjar Aji Production.

Poerwadarminta. 1939. *Baoesastra Djawa*. Batavia: J.B. Wolters Uitgebers Maatschappij.

Raffles, Thomas Stamford. 2014. *The History of Java (terjemahan*). Yogyakarta: Narasi.

Ricklefs. 2002. *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792*. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Ricklefs, Voorhoeve, dan Annabel T. Gallop. 2014. *Indonesian Manuscript in Great Britain*: *A Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in British Public Collection*. Jakarta: Ecole francaise de'Extreme-Orient, PNRI, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Soeharto, Ben. 1997. *Paes Ageng dan Beksan Bedhaya "Sebuah Kajian Estetika dalam Makna yang Berlapis Ganda"*. Yogyakarta: FSP ISI Yogyakarta.

Tim Penyusun. 2014. *Penulisan Inventarisasi Busana Wayang Wong Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

Wijanarko, Fajar. 2019. "Yogyakarta dalam Sastra Sejarah" dalam *Katalog Pameran Naskah Kraton Jogja Merangkai Jejak Peradaban Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat*, 7 Maret-7 April 2019.

Manuskrip

Archive of Yogyakarta vol. 1, Add MS 12303, Koleksi British Library, London.

Archive of Yogyakarta vol. 2, Add MS 12341, Koleksi British Library, London.

Babad Ngayogyakarta: HB V dumugi HB VII, SB 141a/ S116, Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

Babad Ngayogyakarta: Kanjeng Gusti Adipati Anom Hamengkunegara, S110/ SK.113, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Prajanjianipun Para Nata Kartasura Tuwin Surakarta Kalitan Kumpeni, PBC.38/H12, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Media dan Revolusi: Buletin ANTARA dan Kedaulatan Negara pada Era Revolusi (1945-1949)

Frial Ramadhan Supratman

Perpustakaan Nasional RI

ANTARA merupakan media resmi milik pemerintah yang memiliki peran penting pada era revolusi. Media ini merupakan sumber berita yang digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi selama era revolusi. Surat kabar Indonesia yang terbit pada masa revolusi banyak mengambil berita dari ANTARA sebagai sumber berita. Pada masa itu, tentu saja, berbagai surat kabar Indonesia mendapatkan tantangan dalam menerbitkan berita. Banyak dari surat kabar-surat kabar yang terbit pada masa revolusi (1945-1949) hanya berumur pendek karena suasana revolusi yang serba sulit. Beberapa surat kabar hanya terbit sebentar saja. Surat kabar *Al-Djihad*, misalnya, merupakan surat kabar yang dimiliki oleh Masjumi dan hanya terbit sebentar saja pada era revolusi. Kendati demikian, ada juga surat kabar yang berhasil bertahan melewati era revolusi, seperti *Berita Indonesia*. Berbagai surat kabar Indonesia pada masa itu tentu saja terbit sebagai upaya melawan propaganda kolonial Belanda yang ingin menjatuhkan citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dengan demikian, pada masa itu, konflik tidak saja terjadi pada medan pertempuran, tetapi juga pada medan informasi. Beberapa surat kabar pro-Belanda pun diterbitkan untuk membela dan membenarkan invasi Belanda ke Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Surat kabar yang membela Belanda tentu saja berusaha sekuat mungkin menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan mengenai keadaan negara Indonesia. Mereka juga seringkali menyebarkan berita yang bertujuan memfitnah para petinggi negara Indonesia. Dengan demikian, kehadiran Buletin ANTARA sebagai sumber berita yang paling terpercaya di kalangan kaum pro-Republik sangatlah penting. Sebagai media yang didirikan sejak era kolonial Belanda, ANTARA merupakan kantor berita yang didirikan oleh para tokoh Indonesia, seperti Adam Malik, AM. Sipahoetar, Someanang, Armijn Pane, Sanoesi Pane dan tokoh lainnya. Pada era revolusi, Buletin ANTARA menjadi sumber berita terpercaya di kalangan republik. Di masa ini ANTARA memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi-informasi yang membela kedaulatan Indonesia. Beberapa informasi mengenai kekajaman tentara kolonial Belanda juga banyak disorot oleh ANTARA untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia telah melanggar kedaulatan negara. Makalah ini membahas mengenai peran Buletin ANTARA dalam menyebarkan informasi yang berpihak pada kaum pro-Republik untuk menjaga kedaulatan negara dari disinformasi dan berita bohong. Saya menggunakan media buletin ANTARA yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional sebagai sumber primer dalam penulisan makalah ini. Dalam makalah ini, saya berargumen bahwa kehadiran buletin ANTARA pada era revolusi memainkan peran penting dalam menghadapi disinformasi dan berita bohong yang mengancam kedaulatan negara pascakemerdekaan.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi internet yang berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-20 telah memberikan revolusi besar-besaran dalam bidang telekomunikasi. Internet pun membuat pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Jika pada abad ke-19 Sultan Aceh harus menunggu kabar berbulan-bulan lamanya untuk memastikan suratnya dibaca oleh elite pemerintahan di Istanbul, maka dengan teknologi internet, kita dapat mengirimkan pesan dengan menggunakan email atau fitur chat dengan hitungan detik saja. Berita Revolusi Musim Semi Arab (*Arab Spring*) yang terjadi di Timur Tengah dapat tersebar dengan hitungan detik ke masyarakat di seluruh dunia. Percobaan kudeta terhadap pemerintah Turki yang terjadi pada tahun 2016 pun tersebar dengan cepat berkat kekuatan *share* dari media sosial. Respon dari masyarakat pun dapat ditangkap dengan begitu cepat. Kendati demikian, teknologi komunikasi dengan menggunakan internet dan media sosial pun banyak menuai kritik. Salah satunya adalah tiadanya "filter" yang memadai sehingga informasi dapat masuk tanpa disertai editorial dan kritik dari seorang ahli. Hal ini memicu munculnya gelombang disinformasi alias *hoax* yang berbahaya bagi masyarakat. Ini juga membuktikan bahwa informasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Teknologi internet dan media sosial bukanlah satu-satunya media informasi yang pernah menuai apresiasi dan kritik. Sebelumnya, media massa cetak pun menjadi bagian penting dalam sejarah komunikasi dan informasi. Media massa cetak hadir bersamaan dengan terjadinya perubahan global, yakni mencuatnya kolonialisme, imperialisme sekaligus nasionalisme dan internasionalisme. Dengan demikian, dapat dikatakan, jika media massa telah mengalami ujian yang begitu berat dengan penyebaran berbagai ideologi besar yang mendominasi manusia hingga hari ini. Berbagai informasi yang memuat mengenai ideologi, pemikiran dan wacana tentu saja mengalami pemilihan, penyaringan hingga klasifikasi sebelum akhirnya disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, peran dari "penyaring" berbagai informasi sangatlah penting. Pemerintah yang otoriter pasti bertindak dengan tangan besi untuk menutup seluruh kanal informasi yang dianggap membahayakan kedudukannya. Sementara, pemerintah yang demokratis cenderung memberikan kebebasan untuk masuknya beragam informasi, meskipun ini pun datang bersamaan dengan disinformasi yang berbahaya.

Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang dalam bergelut dengan kemunculan dan kemunduran media massa. Masuknya kolonialisme memang telah membawa dampak yang besar bagi perkembangan media massa. Salah satu

dampak penting adalah masuknya teknologi mesin cetak yang pada awalnya digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Namun lambar laun, mesin cetak pun dipelajari dan digunakan oleh kalangan intelektual Indonesia untuk menyalurkan aspirasi intelektual dan berkomunikasi dengan masyarakat. Hampir semua kalangan intelektual Indonesia di awal abad ke-20 selalu bersentuhan dengan media massa. Salah satu guru bangsa Indonesia, Haji Omar Said Cokroaminoto, juga memanfaatkan media massa untuk menyalurkan ide dan gagasannya mengenai nasionalisme, sosialisme dan Islam. Bahkan, Cokroaminoto juga merupakan pemimpin redaksi dari surat kabar *Oetoesan Hindia* yang terbit di Surabaya pada awal abad ke-20. Para intelektual lain, seperti Mohammad Hatta, Sukarno, Haji Agus Salim, Hamka dan lain-lain juga merupakan para pemimpin redaksi yang handal. Tulisan-tulisan mereka di surat kabar Melayu yang terbit pada awal abad ke-20 merupakan benih-benih intelektual yang sangat bermanfaat dalam mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Dalam makalah ini saya membahas mengenai peran Warta Berita ANTARA dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada era revolusi fisik yang terjadi antara tahun 1945 hingga 1949. Seperti yang kita ketahui bahwa ANTARA merupakan Kantor Berita Nasional Indonesia yang bertugas dalam menghimpun informasi dan menyalurkannya kepada berbagai media massa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, peran ANTARA sangatlah penting dan esensial dalam menyebarkan informasi dan berita. Peran ANTARA menjadi semakin esensial setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, pemerintah kolonial Belanda hendak kembali ke Indonesia dan mengklaim bahwa Indonesia (Hindia Belanda) masih merupakan bagian dari jajahan mereka. Kolonial Belanda merespon kemerdekaan Indonesia dengan mengirimkan pasukan militernya untuk mengambil alih Indonesia dari pimpinan Republik. Dalam proses invasi ini terjadi perang informasi antara pihak kolonial Belanda dan pihak Republik Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda berusaha meyakinkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan sah dan hanyalah perpanjangan dari fasisme Jepang. Sementara, pihak Republik Indonesia meyakinkan publik bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang sah dan Belanda datang ke Indonesia sebagai agresor terhadap negara yang berdaulat. Dalam hal ini, ANTARA memainkan peran yang signifikan dalam menyebarkan informasi pada era revolusi. Dalam hal ini, saya ingin mengetahui mengapa perang informasi begitu penting pada era revolusi? Bagaimana ANTARA menghadapi disinformasi dan mengelola

informasi pada era revolusi? Bagaimana ANTARA menemukan, menyusun dan mengklasifikasikan wacana dan informasi pada era revolusi?

Kajian mengenai sejarah media massa pada masa revolusi memang belum banyak menjadi perhatian dari para sarjana. Banyak kajian memang sudah ditulis seputar sejarah kemunculan pers sebelum era kemerdekaan. Kajian dari Ahmat Adam mengenai sejarah pers dan kemunculan ide kebangsaan Indonesia merupakan suatu kajian yang penting (Adam 2003). Hal ini juga diperkuat dengan kajian dari Bennedict Anderson yang melihat peran pers sebagai penyalur ide nasionalisme. Anderson menilai bahwa nasionalisme tumbuh berkat adanya kapital yang masuk sehingga mendorong bisnis penerbitan media massa. Media massa inilah yang berperan besar dalam membentuk ide-ide mengenai nasionalisme (Anderson 1991). Kendati demikian, kajian mengenai sejarah pers seolah-olah meminggirkan kelompok keagamaan. Mereka dianggap sebagai kaum pinggiran yang tidak memainkan peran penting. Untuk itu, Deliar Noer dan Michael Laffan melakukan kajian yang sangat baik mengenai peran ulama dan santri dalam mendorong perkembangan pers. Keduanya memperlihatkan bahwa nasionalisme tidak hanya datang dari Barat, tetapi juga darii dinamika pembaharuan Islam yang terjadi di Timur Tengah. Para ulama dan murid-murid Jawi yang belajar di Timur Tengah, khususnya Kairo, membawa pembaharuan Islam melalui surat kabar dan majalah yang kemudian mendorong rasa kebangsaan (Noer 1991, Laffan 2003).

Para sarjana maupun jurnalis pun sudah mengkaji mengenai pers Indonesia yang tumbuh pascakemerdekaan. Tribuana Said menulis buku yang sangat penting dalam melihat sejarah pers Indonesia. Dalam buku yang berjudul *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, Tribuana Said memberikan banyak informasi berharga mengenai sejarah pers dalam narasi besar bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut dasar negara Pancasila. Dalam subbab yang berjudul "Pers Nasional Sejak Proklamasi," Tribuana Said menjelaskan kemunculan pers-pers nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan dari Jepang (Said 1988, 66). Berdasarkan penelitian dari Tribuana Said, maka kita dapat melihat bagaimana pers Indonesia yang terbit pada era revolusi berusaha untu melakukan perlawanan terhadap propaganda yang dapat membahayakan kedaulatan Indonesia. Surat kabar *Berita Indonesia*, misalnya, dianggap sebagai salah satu pers yang isinya melawan propaganda Jepang dan seruan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Said 1988, 68). Selain itu, saya juga pernah menulis mengenai koleksi surat kabar Indonesia yang terbit pada era revolusi, seperti *Berita Indonesia, Al-Djihad* dan *Ra'jat*. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam

pers tersebut banyak memuat mengenai diplomasi, perang, keadaan sosial dan berita luar negeri (Supratman 2022).

Selain itu, kajian mengenai surat kabar pascakemerdekaan lebih banyak yang membahas pada periode 1950'an dan setelahnya. Ignatius Haryanto memperlihatkan bangkit dan mundurnya surat kabar Indonesia yang legendaris bernama *Indonesia Raya*. Dalam kajiannya, Haryanto memperlihatkan ideologi dari *Indonesia Raya* yang mengusung nilai-nilai demokrasi dan humanisme yang sejalan dengan tokoh-tokoh didalamnya, seperti Mochtar Lubis (Haryanto 1974). Dalam hal ini, surat kabar *Indonesia Raya* merupakan suatu studi kasus bagaimana perkembangan surat kabar non-partisan di Indonesia. Tentu saja, tidak mudah untuk para jurnalis dalam mendirikan surat kabar non-partisan di Indonesia pada tahun 1950'an karena pada masa itu kebanyakan surat kabar merupakan corong ideologi daripada partai-partai politik. Selain itu, saya pun menulis Master Tesis mengenai ideologi internasionalisme dalam pers Indonesia. Dalam Tesis ini, saya menganalisis perkembangan ide internasionalisme dalam pers Indonesia pada era Demokrasi Parlementer (Supratman 2023). Dalam hal ini saya ingin memperlihatkan bahwa kontestasi ideologi yang ada dalam pers Indonesia pada era pascakemerdekaan bukan hanya pada narasi nasionalisme dan anti-kolonialisme saja, tetapi juga internasionalisme. Karya David Hill mengenai biografi jurnalis Mochtar Lubis, misalnya, memberikan gambaran yang baik bagaimana situasi surat kabar setelah Indonesia merdeka. Hill memperlihatkan kehidupan intelektual Mochtar Lubis yang sangat penting untuk memahami sejarah pers di Indonesia (Hill 2010).

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana mengenai sejarah pers, maka saya melihat belum banyak kajian yang membahas mengenai peran Warta Berita ANTARA. Hal ini tentu saja cukup mengejutkan karena ANTARA bukan hanya penting dalam menyebarkan informasi kepada pers-pers Indonesia, tetapi juga esensial dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia pada era revolusi. Selain itu, tema-tema sejarah mengenai revolusi tentu saja lebih banyak menjelaskan mengenai perjuangan fisik dan diplomasi (Smail 2011, Cribb 2010, S. Said 1991). Terlebih lagi, era revolusi dianggap sebagai fase penting dalam sejarah Indonesia karena pada era ini kedaulatan Indonesia sedang diuji dengan berbagai serangan fisik dan intelektual. Narasi mengenai perlawanan fisik memang telah banyak ditulis pada era Orde Baru dengan menekankan peran militer dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia (McGregor 2008). Untuk itu, penulisan sejarah pada era revolusi memang banyak diarahkan untuk melihat peran dari "Kaum Perjuangan" yang direpresentasikan oleh militer dan "Kaum Diplomasi" yang direpresentasikan oleh para

birokrat. Namun nampaknya peran media massa dan jurnalis pada masa tersebut kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian, makalah ini mengulas mengenai peran Warta Berita ANTARA dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia pada era revolusi.

Penulisan makalah ini banyak menggunakan sumber-sumber primer dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional merupakan salah satu lembaga negara yang banyak menyimpan koleksi pers Indonesia sejak era kolonial. Warta Berita ANTARA merupakan salah satu koleksi Perpustakaan Nasional. Dengan demikian, sumber primer dalam tulisan ini adalah koleksi Warta Berita ANTARA yang masih tersimpan di Perpustakaan Nasional. Selain itu, saya juga akan menggunakan berbagai sumber primer berupa buku memoar dari kalangan jurnalis maupun tokoh-tokoh Indonesia yang hidup pada era revolusi. Buku memoar merupakan salah satu sumber primer yang baik untuk melihat kesaksian orang-orang pada zamannya. Selain itu, tulisan Soebagijo Ilham Notodidjojo mengenai sejarah dan perjuangan ANTARA juga sangat penting. Soebagijo merupakan mantan Kepala Perpustakaan, Riset dan Dokumentasi ANTARA dan sudah bekerja di ANTARA sejak era penjajahan Jepang (Soebagijo-IN 1978). Tulisan Soebagijo mengenai sejarah ANTARA tentu saja merupakan sumber primer yang sangat penting. Di sini Soebagijo membagikan informasi dan data-data mengenai ANTARA yang sulit sekali ditemuka di sumber lain. Kendati demikian, unsur subyektivitas dari Soebagijo pun perlu diperhatikan agar makalah ini mampu merekonstruksi sejarah ANTARA dengan obyektif.

Revolusi Indonesia

Revolusi Indonesia merupakan fase yang penting dan menentukan dalam berdirinya Republik Indonesia. Sejarawan M.C. Ricklefs menyatakan bahwa “Revolusi yang mana kemerdekaan itu dimenangkan tidak hanya suatu episode sentral dalam sejarah Indonesia, tetapi elemen kuat dalam persepsi negara Indonesia itu sendiri. Semua kelompok-kelompok yang tak pasti muncul di tahun-tahun setelah Perang Dunia II untuk suatu identitas baru, kesatuan untuk menghadapi kekuasaan asing, untuk tatanan keadilan sosial” (Ricklefs 2001, 261). Pada masa ini memang Indonesia sedang mengahdapi situasi genting. Tentu saja ini bukan hanya ancaman bagi serangan fisik dari militer kolonial Belanda, tetapi juga urgensi dari pembentukan identitas keindonesiaan yang belum sempurna. Memang pada era kolonial telah ada upaya-upaya untuk merumuskan identitas keindonesiaan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Selain itu, para intelektual Indonesia pun telah gigih menyusun ide-ide mengenai Indonesia melalui pers-pers Melayu. Bahkan, pada era penjajahan Jepang, unsur nasionalisme

pun lebih memiliki kesempatan untuk tampil secara vulgar di ruang publik berkat dewesternisasi oleh pemerintah Jepang. Namun hal-hal tersebut ternyata tidak cukup untuk menghadapi gelombang ketidakpastian setelah Perang Dunia II berakhir.

Kelompok pemuda yang mendesak Sukarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah terjadinya kekosongan kekuasaan pada pertengahan Agustus 1945 pun nampaknya tidak akan menyangka bahwa situasi pascakemerdekaan akan jauh lebih kompleks daripada sekedar merayakan kedaulatan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pembentukan identitas, jati diri dan kohesi politik ternyata jauh lebih sulit daripada sekedar mendeklarasikan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu, maka situasi di Indonesia memang membingungkan. Kelompok nasionalis menganggap bahwa kekosongan kekuasaan artinya Indonesia tidak berada di bawah kekuasaan pemerintahan asing mana pun sehingga memiliki hak untuk mendeklarasikan kekuasaan. Sementara, Jepang menganggap bahwa status quo atas daerah kekuasaan Jepang harus dipertahankan sambil menunggu kedatangan Sekutu. Kendati demikian, ada juga figur Jepang seperti Laksamana Maeda yang simpatik terhadap kemerdekaan Indonesia dan membiarkan rumahnya menjadi tempat penyusunan naskah proklamasi. Sementara itu, Sekutu, dalam hal ini termasuk Kerajaan Belanda, menganggap bahwa mereka berhak kembali ke tanah jajahan Indonesia. Di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri ternyata situasinya cukup rumit karena ada unsur-unsur masyarakat yang tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia, terutama bagi mereka yang banyak memperoleh keuntungan saat era kolonialisme Belanda. Meskipun demikian, kelompok terakhir inilah yang paling menderita kerugian selama dan setelah era revolusi.

Situasi di luar Jakarta tentu sangatlah menegangkan karena belum berita mengenai kemerdekaan Indonesia tidak dapat tersebar dengan cepat. Para wartawan tentu saja bekerja keras untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke daerah-daerah. Kemerdekaan Indonesia pun pertama kali disiarkan oleh para wartawan yang bekerja di Domei yang dipimpin oleh Adam Malik. Mereka berhasil menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia yang saat itu masih dijaga ketat oleh Jepang (T. Said 1988, 64). Meskipun demikian, masyarakat pun masih mempertimbangkan kebenaran kemerdekaan Indonesia tersebut. Terlebih lagi, proklamasi dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan, militer Jepang pun masih memegang kendali di banyak wilayah. Jepang kemudian melucuti senjata-senjata dari PETA/Giyugun dan Heiho. Kekuasaan komando terstruktur pun dibubarkan sehingga pada awal kemerdekaan, Indonesia tidak memiliki basis untuk tentara nasional (Ricklefs 2001,

263). Pelucutan senjata ini tentu saja disebabkan oleh lambatnya informasi mengenai kemerdekaan Indonesia. Bahkan, informasi mengenai kemerdekaan Indonesia baru diketahui oleh penduduk di wilayah terpencil Indonesia pada September 1945 (Ricklefs 2001, 263). Meskipun demikian, para elite politik Indonesia di Jakarta tetap meneruskan pekerjaan politik dan konstitusional segera setelah proklamasi dibacakan. Tiga minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia sudah memiliki presiden dan wakil presiden, konstitusi sementara, Komite Nasional Pusat yang terdiri dari 135 anggota, kabinet yang bertanggungjawab kepada presiden, termasuk dukungan dari kelompok anti-Jepang yang bergerak secara diam-diam (Feith 1962, 8).

Republik Indonesia yang baru lahir kemudian dengan cepat dapat mengorganisir kedaulatan negara dengan menguasai senjata-senjata Jepang. Bentrokan antara pejuang dengan militer Jepang pun tidak dapat dihindari. Para pejuang tersebut terdiri dari kelompok-kelompok pemuda militan. Mereka merupakan orang-orang yang pernah dididik dalam pelatihan dan indoktrinisasi pada era penjajahan Jepang yang singkat (Smail 2011). Mereka mampu melucuti senjata-senjata Jepang dengan segala resikonya. Selain itu, para pemuda pun melakukan perebutan terhadap kantor-kantor pemerintah. Di Bandung para pemuda mengambil alih kantor-kantor, seperti Departemen Kereta Api dan PTT Pusat (Kantor Pos, Telegraf dan Telepon) (Smail 2011). Kemudian para pemuda pun melakukan perampasan kembali senjata-senjata dari Jepang. Aksi perampasan senjata meningkat pada akhir September dan awal Oktober 1945 (Smail 2011). Situasi ini tentu saja memperlihatkan ketidakmampuan Jepang dalam menjaga status quo hingga kedatangan South East Asian Command (SEAC) pada 29 September yang kemudian diikuti oleh Batalion Inggris Divisi India ke-23 ke Jawa empat minggu setelahnya (Smail 2011). Setelah kedatangan SEAC, diikuti dengan tentara NICA Belanda, maka situasi semakin genting. Benturan fisik antara pemuda dan tentara asing tidak dapat dihindari lagi. Hal ini diperlihatkan dengan peristiwa-peristiwa perlawanan pemuda terhadap Sekutu dan NICA di berbagai daerah, seperti Medan, Bandung, Surabaya, dan lain-lain (Ricklefs 2001).

Kedatangan agresor Belanda tentu saja merupakan faktor yang paling memberatkan dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda tentu menilai kedatangan agresor Belanda ke Indonesia harus direspon dengan perlawanan fisik. Sedangkan, elite politik terbelah. Sukarno, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir merupakan bagian dari elite politik yang mencoba mencegah terjadinya bentrokan fisik antara pemuda dan agresor Belanda. Mereka hendak meyakinkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah

hasil dari negosiasi dengan fasisme Jepang. Bahkan, Sutan Sjahrir pun diangkat sebagai perdana menteri pertama Indonesia untuk meyakinkan Sekutu bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah warisan dari fasisme Jepang. Sjahrir merupakan tokoh Indonesia yang dihormati oleh Sekutu karena posisinya yang tegas sebagai anti-Jepang pada tahun 1942-1945. Hal ini berbeda dengan Sukarno dan Hatta yang dianggap lebih lunak terhadap Jepang, bahkan dianggap sebagai kolaborator Jepang (B. R. Anderson 1968, 8). Kendati demikian, mereka pun gagal dalam mencegah kedatangan agresor Belanda sepanjang tahun 1946. Kelompok Republik hanya dapat mengontrol Jawa dan Sumatra, sedangkan wilayah luar Jawa lebih banyak dikuasai oleh Belanda. Herbert Feith menilai bahwa keberhasilan Belanda dalam mengontrol wilayah luar Jawa disebabkan oleh dukungan dari kaum arsitokrat lokal (Feith 1962, 9). Dukungan dari kelompok aristokrat ini tentu saja merupakan perjudian besar dalam sejarah Indonesia. Mereka memahami dinamika lokal, namun nampaknya mereka buta terhadap situasi internasional. Mereka lebih mendukung kembalinya agresor Belanda karena keuntungan yang mereka dapatkan di masa lalu. Namun mereka tidak memperhitungkan situasi semangat pemuda yang sedang berkobar.

Kajian dari Anthony Reid dan Anton Lucas memperlihatkan betapa rapuhnya posisi aristokrat lokal di Sumatra dan Jawa yang hendak mempertahankan pendiriannya (Lucas 1989, Reid 2012). Kebencian kelompok nasionalis radikal terhadap aristokrat lokal tidak terjadi dengan tiba-tiba. Susunan untuk menelanjangi aristokrat lokal sudah dimulai pada awal abad ke-20 ketika para intelektual Indonesia memiliki peluang untuk mempropagandakan kampanye anti-feodalisme di pers-pers Melayu. Kebencian intelektual Indonesia terhadap aristokrat lokal disebabkan oleh keengganan mereka untuk keluar dari tatanan kolonial yang menempatkan masyarakat sebagai korban dari eksploitasi. Para intelektual sudah menyusun kampanye anti-feodalisme dengan mempromosikan cara pandang yang egaliter, seperti dalam penggunaan bahasa Indonesia yang lebih cocok dalam nuansa modern (Alisjahbana 1969). Pamflet *Perjuangan Kita* yang ditulis oleh Sutan Sjahrir pada November 1945 juga memperlihatkan semangat perjuangan Indonesia yang demokratis, anti-aristokratis dan anti-fasis. Meskipun demikian, Ricklefs menilai ide dari *Perjuangan Kita* menunjukkan pikiran Sjahrir yang ter-Eropanisasi dengan dalam (Ricklefs 2001, Sjahrir 1968). Situasi revolusi menjadi semakin kompleks ketika sedikitnya kanal informasi yang mampu didapatkan oleh masyarakat. Walau bagaimana pun, aristokrat lokal merupakan pemimpin tradisional yang telah lama dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat yang mampu mengakses informasi dari media modern, seperti radio dan media massa tentunya akan lebih

kritis terhadap pendirian para aristokrat lokal ini. Para pemuda merupakan tipe kelompok yang kritis karena mereka pun mendapatkan pelatihan pada era Jepang dan mampu mengakses informasi melalui radio dan media cetak. Dengan demikian, ketika para aristokrat lokal ini menunjukkan suatu dukungan terhadap kembalinya tatanan kolonial, maka para pemuda memberikan respon yang sangat keras. Para bupati di "Tiga Daerah," yakni Tegal, Brebes dan Pekalongan, pun harus menyerahkan kekuasaannya melalui 'revolusi sosial' yang keras pada akhir November 1945 (Lucas 1989).

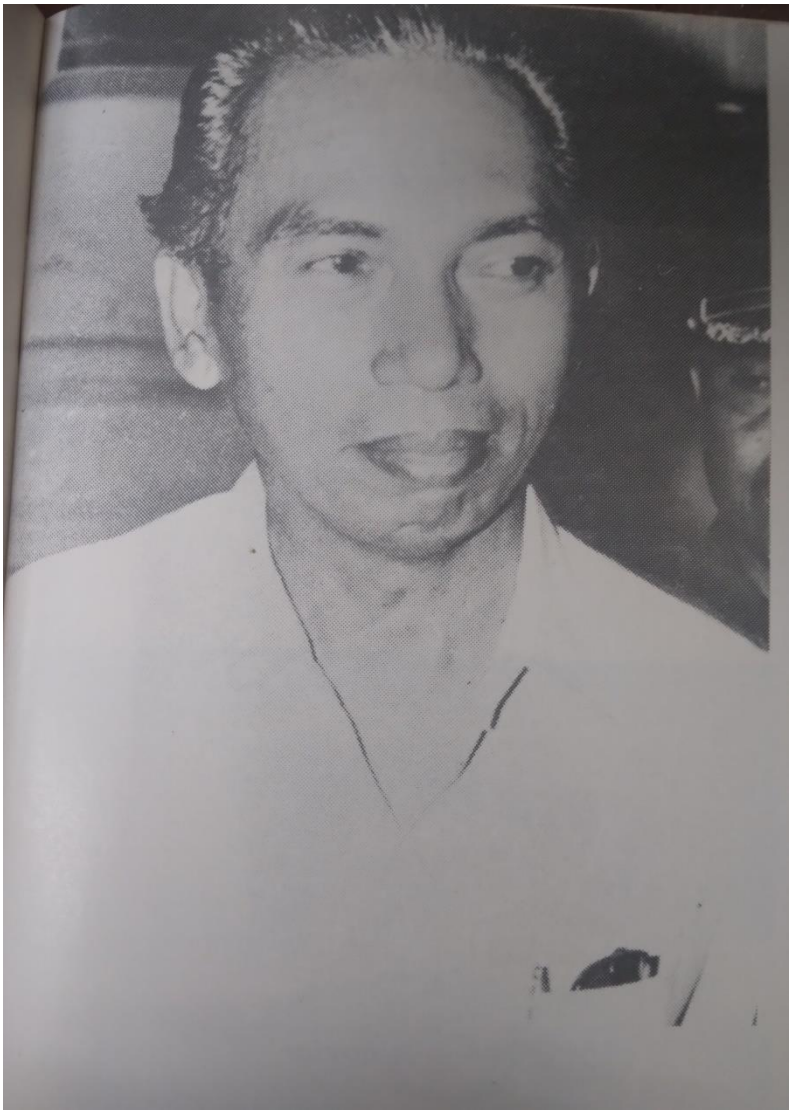
Tentunya peristiwa revolusi sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini benar-benar memperlihatkan bahwa proklamasi kemerdekaan hanyalah awal dari proses dekolonisasi yang panjang. Kepercayaan elite-elite tradisional kepada "elite baru" atau "elite Republik" ini tidaklah dapat dilakukan dengan cepat. Artinya, kohesi nasional antarelite belum dapat terbentuk dengan mudah. Para aristokrat lokal yang tidak dapat membaca situasi sosial politik tentunya akan dirugikan. Sedangkan ada juga kepemimpinan tradisional yang dapat merespon kemunculan elite Republik di era baru dengan positif. Kesultanan Yogyakarta, misalnya, justru membuka wilayahnya untuk para elite Republik yang terusir dari Jakarta antara tahun 1946 hingga 1949. Antara tahun tersebut ibu kota Republik Indonesia pun dipindahkan ke Yogyakarta.

Dalam situasi tersebut, keterbelahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Rapuhnya komunikasi antarelite, serta hasutan yang dilakukan Belanda dan aristokrat di level daerah pun menjadi faktor yang menyulitkan untuk terciptanya kohesi nasional. Keterbelahan antarelite sebenarnya sudah terjadi sejak era kolonial. Namun tidak ada yang menyangka bahwa situasi pada era revolusi membuat perbedaan ideologi ini semakin keruh. Jika diksusi antara kelompok Islam dan nasionalis sekular dapat mereda sejenak akibat dari invasi Belanda, maka situasi di antara kelompok komunis dan nasionalis pun nampak tidak dapat dijembatani dengan mudah. Kelompok komunis mencoba bermanuver dengan melawan pada pemerintah Republik Indonesia. Revolusi komunis yang dipimpin oleh Muso dan Amir Sjarifoeddin di Madiun pada 1948 pun gagal. Keduanya dieksekusi (Feith 1962, 11). Kendati demikian, pemberantasan terhadap komunisme justru membuktikan bahwa pemerintahan Sukarno-Hatta memegang prinsip demokratis. Hal ini menimbulkan reaksi positif dari Barat yang selama ini menuding elite Republik sebagai bagian dari gerakan fasisme.

Berdirinya Kantor Berita ANTARA

Saluran berita dan informasi tentu saja merupakan aspek yang sangat penting selama era revolusi. Ketika Jepang berkuasa maka informasi sepenuhnya dikontrol oleh Jepang melalui Kantor Berita Domei. Para jurnalis Indonesia pun banyak yang bekerja di kantor ini. Hal ini merupakan keuntungan bagi Indonesia karena mereka memiliki orang-orang yang kompeten dalam bidang jurnalistik. Keberadaan dari Kantor Berita Domei ini menjadi sangat penting untuk menyalurkan informasi ke berbagai pelosok Indonesia. Setelah Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para jurnalis di Domei segera menyelundupkan informasi kemerdekaan ini dan menyiarkannya melalui Domei tanpa diketahui oleh pihak Jepang. Ketika itu para jurnalis Domei dipimpin oleh Adam Malik. Atas usaha para jurnalis Indonesia ini maka informasi mengenai kemerdekaan Indonesia dapat didengar melalui radio (T. Said 1988, 64). Setelah itu, Domei pun kembali dinamakan dengan Antara.

Berdirinya Kantor Berita ANTARA sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kantor berita ini didirikan oleh beberapa tokoh Indonesia, diantaranya adalah Adam Malik, Soemanang dan A.R. Sipahoetar pada tahun 1937. Buletin ANTARA edisi pertama pun terbit pada 13 Desember 1937. Saat itu para pendiri ANTARA tersebut memiliki kantor di Buitentijgerstraat (sekarang Jalan Pinangsia) No.30, Batavia (Soebagijo-IN 1978, 21). Kendati demikian, ANTARA bukanlah satu-satunya kantor berita nasional yang didirikan oleh orang Indonesia. Sebelumnya orang-orang Indonesia sudah mendirikan beberapa kantor berita, seperti Alpena, Nicork, HIPA dan NIPA. Namun sayangnya kantor-kantor berita tersebut tidak dapat berkembang (Soebagijo-IN 1978, 11). Pers Indonesia saat itu menyambut baik pendirian Kantor Berita ANTARA. Bahkan, para mahasiswa Indonesia di Belanda pun bersedia membantu ANTARA dengan mengirimkan berbagai tulisan. Para mahasiswa yang membantu ANTARA diantaranya adalah Soedjarwo Tjondronegoro dan Setijadi. Sedangkan mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah, Setijadi, juga sering menulis di Buletin ANTARA. Selain itu, para mahasiswa Indonesia di Filipina, Jepang, Amerika Sertikat dan Mesir juga mengirimkan tulisan-tulisan mereka ke buletin ANTARA (Soebagijo-IN 1978, 25).



Gambar 1. Adam Malik adalah salah satu pendiri Kantor Berita ANTARA (Sumber: Soebaijo IN, 1978)

Setelah Jepang masuk ke Indonesia, maka Kantor Berita ANETA pun ditinggalkan. Pada saat itu Adam Malik pun menduduki kantor ANETA dan diubahnya menjadi Kantor Berita ANTARA sehingga alamat kantor berita ini berubah menjadi di Jalan Pos Utara No.53 (Soebagijo-IN 1978, 37). Pada masa pemerintahan Jepang segala sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia dipusatkan untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Pemerintahan Jepang yang militeristik cenderung menyukai keseragaman sehingga segala sesuatu harus melalui persetujuan administrator Jepang. Pada awalnya ANTARA dibiarkan untuk beroperasi, namun harus berganti nama menggunakan nama Jepang, yaitu Yashima (artinya "semesta"). Pergantian nama dari ANTARA ke Yashima tidak berlangsung lama karena

penguasa Jepang menginginkan agar seluruh kantor berita dilebur ke dalam Kantor Berita Domei (Soebagijo-IN 1978, 48).

Kantor Berita Domei merupakan wujud dari sentralisasi informasi yang dilakukan oleh penguasa Jepang untuk mengatur lalu lintas berita agar semua melalui sensor yang ketat. Selain itu, Jepang juga melarang semua surat kabar Belanda dan Cina, serta mengubah nama-nama surat kabar Indonesia sesuai dengan keinginan panglima militer Jepang. Sensor ketat pun dilakukan agar seluruh arus informasi sesuai dengan propaganda yang diinginkan panglima militer Jepang. Menurut Tribuana Said "sensor dilakukan atas segala cetakan, bahkan berita-berita dan karangan-karangan disaring lebih dahulu oleh petugas sensor. Sebelum suatu surat kabar dicetak, petugas sensor resmi melakukan sensor pertama dan selanjutnya petugas dari Domei mengadakan pemeriksaan kedua dan membubuhi paraf" (T. Said 1988, 48). Kendati demikian, pemerintah militer Jepang pun mengizinkan para jurnalis Indonesia untuk mendirikan surat kabar asalkan sesuai dengan misi propaganda Jepang. Pada masa itu berdirilah beberapa surat kabar, seperti *Asia Raja, Kung Yung Pao-Indonesia, Pandji Pustaka, Soeara Moeslimin Indonesia, Djawa Baroe, Tjahaja, Nicork Express, Sipatahoenan, Sinar Pasoendan, Kaoem Moeda, Sinar Matahari, Sinar Baru, Soeara Asia, Pembangoen, Kita Sumatra Shimbun, Semangat Islam, Padang Nippo, Sumatra Shimbun, Lampung Shimbun, Sinar Matahari, Borneo Shimbun* hingga *Selebes Shimbun* (T. Said 1988, 49-50).

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka ANTARA pun kembali berdiri dan menggantikan Domei. Para jurnalis yang pernah bekerja di Domei pun memperkuat tim di Kantor Berita ANTARA. Beberapa tokoh jurnalis, seperti Adam Malik, Pandoe Kartawigoena, Abdul Hakim, Pangulu Nasution, Syahruddin, Asa Bafagih, Mohammad Basri, Soendoro, Syamsuddin Sutan Makmur dan Rinto Alwi, merupakan orang-orang yang ikut dalam membangun ANTARA pada periode awal kemerdekaan (Soebagijo-IN 1978, 54-55). ANTARA secara resmi mengumumkan kembali beroperasi pada 3 September 1945. Namun pada saat itu ANTARA tidak dapat menyiarkan ke seluruh negeri, hanya terbatas pada Jawa saja. Beberapa kantor cabang ANTARA pun berdiri di kota Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang serta memiliki jurnalis di setiap kabupaten (Soebagijo-IN 1978, 59).



Gambar 2. Kantor Antara di Jakarta (Sumber gambar: Soebaijo I.N, 1978)

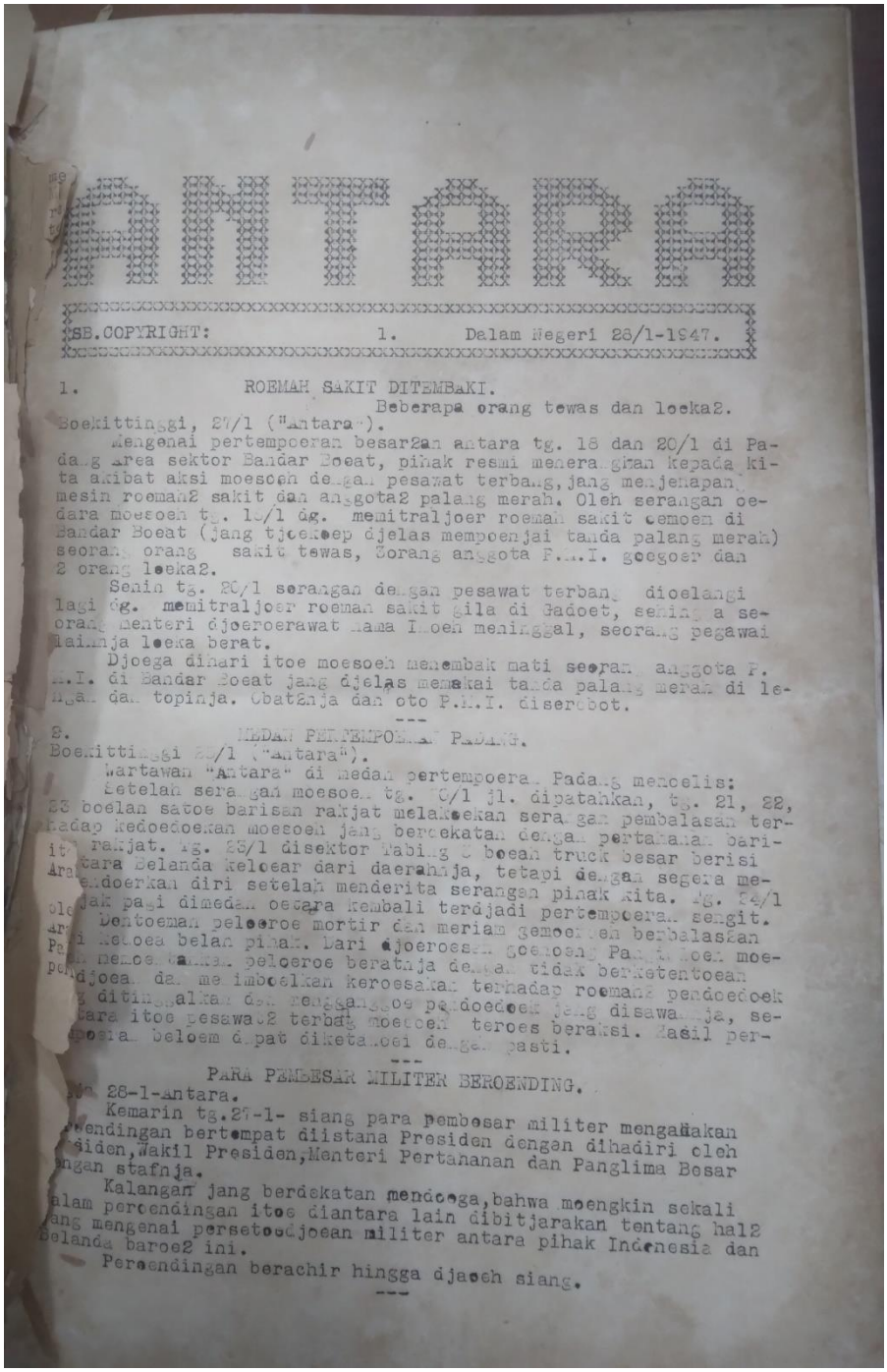
Berdirinya Kantor Berita ANTARA pada September 1945 merupakan titik balik bagi bidang komunikasi dan informasi Indonesia. Selama periode penjajahan Jepang orang-orang Indonesia hanya mendapatkan informasi yang sesuai dengan selera Jepang. Dengan kembalinya Kantor Berita ANTARA maka Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Selain itu, berdirinya Kantor Berita ANTARA pun menunjukkan keinginan orang-orang Indonesia untuk berdaulat mendapatkan informasi, tidak lagi tergantung pada kantor berita asing. Hal ini juga memberikan keuntungan bagi pers-pers Indonesia yang terbit pada era revolusi, meskipun banyak dari pers tersebut yang hanya berumur pendek. Mereka tidak dapat menerbitkan banyak edisi karena situasi revolusi yang tidak stabil.

ANTARA dan Kedaulatan Indonesia

Kantor Berita ANTARA kemudian menerbitkan kembali buletin Warta Berita ANTARA yang menjadi rujukan bagi pers-pers Indonesia. Penerbitan buletin ANTARA menjadi penting untuk meneruskan informasi-informasi mengenai perjuangan fisik dan diplomasi.

Selain itu, yang paling penting, Buletin ANTARA juga diterbitkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan agresi militer Belanda ke Indonesia merupakan suatu tindakan ilegal yang tidak dapat dibenarkan. Selain itu, Buletin ANTARA juga banyak memberitakan situasi di luar negeri agar orang Indonesia dapat membaca situasi geopolitik terbaru. Hal ini tentu saja sangat penting bagi elite-elite Indonesia yang sedang berjuang dalam jalan diplomasi. Keberhasilan mereka dalam mengolah dan menganalisis situasi luar negeri merupakan hal yang esensial dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Hadirnya Buletin ANTARA merupakan suatu upaya untuk memperkuat kedaulatan Indonesia. Salah satu unsur dari negara yang merdeka dan berdaulat adalah rakyat itu sendiri. Pada era revolusi rakyat pun mengalami kebimbingan mengenai situasi kepemimpinan nasional. Bahkan, aristokrat lokal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak yang masih mengharapkan kembalinya tatanan kolonial (Feith 1962, 9). Pihak Belanda pun sudah siap dengan berbagai narasi jika mereka harus menghadapi perlawanan keras dari rakyat Indonesia. Bahkan, Kolonel Santoso yang menjadi penasehat Van Mook menyatakan jika ada rakyat yang melawan Perdana Menteri Sjahrir, maka mereka akan segera dilabeli dengan "teroris" (ANTARA 1946). Pelabelan teroris kepada rakyat merupakan salah satu cara Belanda untuk melegitimasi agresi militernya. Para petinggi Belanda nampak tidak ragu lagi dalam menggunakan istilah "teroris" untuk "kaum perjuangan" yang menghendaki revolusi fisik. Menteru Urusan Seberang Lautan Belanda, Professor Logemann, pun tidak segan-segan menyebut rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan fisik dengan "teroris." Logeman menyatakan bahwa pasukan bersenjata boleh dikerahkan "untuk melawan kaum teroris dan kaum perusak keamanan" (ANTARA 1946). Tentu saja narasi "teroris" dan "kaum perusak keamanan" ini sangatlah berbahaya bagi citra Indonesia di mata publik internasional karena seakan-akan Indonesia masih berada di bawah jajahan Belanda dan upaya melawannya dianggap sebagai usaha inkonstitusional.



ANTARA

SB.COPYRIGHT: 1. Dalam Negeri 28/1-1947.

1. ROEMAH SAKIT DITEMBAKI.
Beberapa orang tewas dan loeka2.

Boekittinggi, 27/1 ("Antara").
Mengenai pertempoeran besar2an antara tg. 18 dan 20/1 di Padang area sektor Bandar Boeat, pihak resmi menerangkan kepada kita akibat aksi moesoeh dengan pesawat terbang, jang menjerang mesin roeman2 sakit dan anggota2 palang merah. Oleh serangan oedara moesoeh tg. 18/1 dg. memitraljoer roeman sakit oemoem di Bandar Boeat (jang tjoekoep djelas mempoenjai tanda palang merah) seorang orang sakit tewas, 3orang anggota P.M.I. goegoer dan 2 orang loeka2.
Senin tg. 20/1 serangan dengan pesawat terbang dioelangi lagi dg. memitraljoer roeman sakit gila di Gadoet, sehingga seorang menteri djoeroerawat nama Imoen meninggal, seorang pegawai lainja loeka berat.
Djoega dihari itoe moesoeh menembak mati seorang anggota P.M.I. di Bandar Boeat jang djelas memakai tanda palang merah di lengan dan topinja. Obatnja dan oto P.M.I. diserbot.

---

2. MEDAN PERTEMPOERAN PADANG.
Boekittinggi 28/1 ("Antara").
Wartawan "Antara" di medan pertempoeran Padang mentjatat:
Setelah serangan moesoeh tg. 20/1 jl. dipatahkan, tg. 21, 22, 23 boelan satoe barisan rakjat melantjarkan serangan pembalasan terhadap kedoedoekan moesoeh jang berdekatan dengan pertahanan barisan rakjat. Tg. 23/1 disektor Padang 3 boean truck besar berisi tentara Belanda keloear dari daerahnja, tetapi dengan segera mendoerkan diri setelah menderita serangan pihak kita. Tg. 24/1 djam pagi dimedan oetara kembali terdjadi pertempoeran sengit. Dentoeman peloeroe mortir dan meriam gemoeroeh berbalasan dengan kedoea belah pihak. Lari djoeroesan goenoeng Padang moemoentah peloeroe beratnja dengan tidak berketentoean mendjoeal dan memboelkan kerosakan terhadap roemah2 pendoedoek jang ditinggalkan dan penggangoe pendoedoek jang disawah2nja, sedangkan itoe pesawat2 terbang moesoeh teroes beraksi. Hasil perang belum dapat diketahoei dengan pasti.

PARA PEMBESAR MILITER BERUNDING.
Jogja 28-1-antara.
Kemarin tg.27-1- siang para pembesar militer mengadakan perundingan bertempat diistana Presiden dengan dihadiri oleh Presiden,Wakil Presiden,Menteri Pertahanan dan Panglima Besar dengan stafnja.
Kalangan jang berdekatan mendoega,bahwa moengkin sekali dalam perundingan itoe diantara lain dibitjarakan tentang hal2 jang mengenai persetoedjoean militer antara pihak Indonesia dan Belanda baroe2 ini.
Perundingan berachir hingga djaoeh siang.

Gambar 3. Halaman depan buletin ANTARA (Sumber gambar: Koleksi pribadi).

ANTARA tentu saja berkepentingan untuk membantah narasi-narasi yang dibuat oleh penjajah Belanda. ANTARA pun harus selalu siap untuk menyitir pendapat-pendapat kalangan pro-Republik yang dapat memperkuat legitimasi kedaulatn Indonesia. Pendapat Dr. Sudarsono, dalam Buletin ANTARA, menyatakan bahwa “rakyat Indonesia sama sekali tidak bersifat memusuhi Republik, bahkan sebalinya. Berita-berita tentang permusuhan yang

dikatakan bahwa semua ini adalah infiltrasi ekstremis, sangat berbau propaganda sehingga mudah dibantah" (ANTARA 1946). Dengan demikian ANTARA tentu saja membutuhkan opini-opini seperti yang dikeluarkan oleh Dr. Sudarsono untuk memperkuat keyakinan bahwa rakyat Indonesia sudah setuju untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Beberapa organisasi masyarakat pun diberikan tempat untuk menyampaikan gagasannya mengenai kedaulatan dan persatuan. ANTARA, misalnya, banyak juga mengutip pendapat para aktivis di Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).[1] Ketua KRIS cabang Malang, misalnya, mengutarakan pendapatnya mengenai "pentingnya persatuan untuk mempererat perhubungan pulau-pulau yang merupakan Kesatuan Republik Indonesia" (ANTARA 1946, 3).

Selain itu, Buletin ANTARA berperan penting untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh militer Belanda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan demikian upaya infiltrasi dari militer Belanda ke Indonesia merupakan upaya ilegal karena upaya tersebut sama dengan melanggar kedaulatan suatu negara yang merdeka. Dalam hal ini ANTARA banyak melaporkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh militer Belanda. Dalam berita pada 1 Juni 1946 jurnalis ANTARA, misalnya, menulis kejahatan militer Belanda yang melakukan tembak menembak secara serampangan. Berikut adalah beritanya:

> Pada tanggal 30-5-1946 jam 7 pagi terdengar tembakan mitraljoer darii pihak Belanda di Gilimanoek ke arah pantai Banyuwangi. Kejadian jam 8 pagi oleh mereka dilepaskan 12 tembakan senjata berat di selat Bali sebelah selatan. Sebelum peristiwa tersebut sebuah kapal terbang Belanda melayang-layang rendah sekali di atas lain. Penyelidikan hal tersebut sedang dilakukan (ANTARA 1946, 4).

Tentu saja ANTARA mendapatkan banyak sekali upaya-upaya militer Belanda dalam mengganggu kedaualatan Indonesia. Militer Belanda banyak melakukan tindakan-tindakan anarkis dan merusakan keamanan kota-kota Indonesia yang berada di dalam naungan Republik. ANTARA mencatat berita-berita mengenai tentara Belanda yang melakukan perampokan dan perampasan secara sembarangan. Di Kota Bandung, misalnya, ANTARA mendapati tentara Belanda melakukan perampokan dan perampasan. Dalam hal ini banyak orang-orang Tionghoa yang menjadi korban dari perampokan yang dilakukan oleh serdadu Belanda (ANTARA 1946, 6). Keberadaan para jurnalis ANTARA yang tersebar di luar Jawa

[1] Menurut Ilham Daeng Makkelo, KRIS merupakan hasil dari "peleburan organisasi masyarakat Sulawesi di Pulau jawa, seperti Pertolongan Kaum Celebes (PKC), Angkata Pemuda Indonesia Sulawesi (APIS), dan Gerakan Pemuda Sulawesi Selatan (GPSS) (Makkelo Tanpa Tahun).

juga membuat buletin ANTARA mampu mengungkap kejahatan yang dilakukan militer Belanda di luar Jawa, seperti serangan kapal terbang Belanda yang menembaki rumah sakit di Bandar Buat, Sumatra Barat. Pada 28 Januari 1947 ANTARA menerbitkan berita mengenai adanya pesawat terbang Belanda yang menembaki rumah sakit di Bandar Buat, Sumatra Barat. Selain itu pesawat terbang Belanda juga menembaki Rumah Sakit Jiwa di Gadut. Serangan tersebut tentu saja menimbulkan korban jiwa dan luka-luka (ANTARA 1947, 1).

Sebagai negara yang berdaulat maka Republik Indonesia pun harus menunjukkan bahwa negara ini mampu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada rakyatnya. Pada era revolusi perlindungan dan pelayanan kepada rakyat sangatlah esensial untuk menunjukkan kepada publik internasional bahwa Indonesia memang memiliki kelayakan untuk merdeka. Wartawan-wartawan internasional yang hilir mudik, keluar-masuk ke dalam Republik Indonesia tentu akan memberitakan hal-hal positif mengenai Indonesia jika mereka mengetahui bahwa pemerintah mampu mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, ANTARA pun membagikan berita-berita yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar kepada rakyatnya. Berita mengenai pendirian sekolah, layanan kesehatan hingga pasar merupakan wacana yang terus diberitakan oleh ANTARA. Salah satu berita di dalam Buletin ANTARA, misalnya, memperlihatkan berdirinya Sekolah Guru Islam untuk laki-laki dan perempuan Malang (ANTARA 1946, 17). Selain itu ada juga berita-berita mengenai kebangkitan ekonomi dengan dibukanya pabrik-pabrik yang sempat tutup pada era Jepang. Salah satu berita memperlihatkan pembukaan pabrik gula di Waringin Anom, Uluan, Panji, Besuki, Asembagus, Prajekan dan Sukawedi atas usaha dari BPPGN (ANTARA 1947, 8). Keadaan rakyat pada masa revolusi memang sangat memprihatinkan. Situasi perang yang tidak menentu membuat rakyat banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti rumah, pakaian dan pangan. Jika pemerintah Indonesia tidak dapat mengatasi keadaan ini tentu saja akan membuat dukungan internasional kepada Indonesia semakin kecil. Tugas dari ANTARA tentu saja untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih dapat mengurus rakyatnya meskipun dalam situasi yang serba sulit. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan publik di dalam dan luar negeri bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan pilihan yang sangat tepat.

Selain itu ANTARA pun menunjukkan kedaulatan Indonesia dengan banyak memberitakan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain tentu menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh ANTARA untuk memperkuat narasi mereka mengenai kedaulatan Indonesia. Suatu negara yang berdaulat

pasti memiliki kemampuan untuk membangun hubungan dengan negara berdaulat lainnya. Salah satu isu penting yang diterbitkan oleh ANTARA adalah hubungan Indonesia-India. Kedua negara banyak mengadakan hubungan persahabatan. Salah satu hubungan keduanya terjalin sejak era revolusi. Pada 28 Januari 1947 ANTARA memberitakan adanya pengiriman pakaian dari India untuk rakyat Indonesia di Kedu. Menurut ANTARA, India mengirimkan 10.000 yard kepada 5.000 penduduk (ANTARA 1947, 5). Selain itu, ANTARA juga memberitakan menegani kedatangan para delegasi Indonesia ke Konferensi Antar-Asia yang dilaksanakan di Delhi pada Maret 1947. Para jurnalis ANTARA yang meliput konferensi tersebut menuliskan banyaknya dukungan orang-orang Indonesia yang ada di Delhi ketika delegasi dari Indonesia datang. Mereka bahkan berteriak "merdeka" kepada para delegasi Indonesia (ANTARA 1947, 12). Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lain, khususnya India, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat karena mampu membangun hubungan diplomasi. Negara yang tidak berdaulat tentu saja tidak akan mampu melakukan ini. Dengan demikian tugas dari ANTARA pun sudah jelas, yaitu memberitakan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Kesimpulan

Berdirinya Kantor Berita ANTARA pada tahun 1937 merupakan suatu terobosan yang brilian dari para pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Adam Malik dan Soemanang. Meskipun pada saat berdirinya ANTARA mengalami banyak hambatan, namun kantor berita ini sukses menjadi kantor berita nasional yang banyak berperan dalam menegakkan kedaulatan Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa ANTARA berbeda dengan beberapa kantor berita sebelumnya yang didirikan oleh orang-orang Indonesia, seperti Alpena yang didirikan oleh W.R. Supratman. Buletin ANTARA yang terbit pertama kali pada 1937 merupakan media yang mampu memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan kepentingan orang Indonesia. Meskipun demikian, pada zaman Jepang, ANTARA pun harus dilebur bersama dengan Kantor Berita Domei agar Jepang dapat mengawasi informasi dengan ketat. Setelah Jepang kalah dari Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka ANTARA kembali muncul dalam panggung sejarah sebagai kantor berita yang penting bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Tugas penting dari ANTARA pada era revolusi adalah menciptakan wacana dan narasi yang memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Untuk itu, berita-berita yang diterbitkan oleh buletin ANTARA banyak mengandung informasi yang berpihak pada suara, opini dan tulisan dari orang-orang Indonesia yang menginginkan Indonesia tetap menjadi bangsa yang merdeka dan menolak segala bentuk penjajahan. Dengan demikian buletin Warta Berita ANTARA banyak memperlihatkan adanya kesatuan dari rakyat Indonesia. Selain itu, buletin ANTARA juga banyak menunjukkan upaya-upaya ilegal dari militer Belanda yang menyerang negara Indonesia sebagai negara berdaulat. Terakhir, buletin ANTARA banyak memberitakan mengenai hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat, seperti India, untuk menunjukkan bahwa sebagai negara yang berdaulat, maka Indonesia memiliki posisi yang setara dengan negara-negara berdaulat lainnya. Selain itu, berita-berita yang diterbitkan oleh ANTARA juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Referensi

Adam, Ahmat. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan.* Jakarta: Hasta Mitra, 2003.

Alisjahbana, Sutan Takdir. *Indonesia: Social and cultural revolution.* Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969.

Anderson, Benedict R. O. G. "Introduction." In *Our struggle*, by Sutan Sjahrir, 1-16. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University, 1968.

Anderson, Bennedict. *Imagined Communities.* London: Verso, 1991.

ANTARA. "5.000 pendoedoek Dieng menerima pakaian." *ANTARA*, Januari 28, 1947.

—. "Belanda menembak-nembak setjara serampangan." *ANTARA*, Juni 1, 1946.

—. "Keadaan di Kota Bandoeng." *ANTARA*, Juni 1, 1946.

—. "Keterangan Logemann tentang Indonesia di Parlemen Belanda." *ANTARA*, Mei 3, 1946.

—. "Mempekerdjakan pabrik goela kembali." *ANTARA*, Januari 27, 1947.

—. "Pengalaman delegasi Indonesia di New Delhi." *ANTARA*, Maret 24, 1947.

—. "Roemah sakit ditembaki." *ANTARA*, Januari 28, 1947.

—. "Sekolah goeroe Islam laki-laki dan perempoean akan diboeka di Malang." *ANTARA*, Juni 3, 1946.

—. "Soelawesi tidak maoe ditjeraikan dari lain-lain kepoelauan Indonesia." *ANTARA*, Juni 1, 1946.

—. "Tidak ada hasilnja?" *ANTARA*, April 26, 1946.

Cribb, Robert. *Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949.* Jakarta: Masup, 2010.

Feith, Herbert. *The Deline of Constitutional Democracy in Indonesia.* Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962.

Haryanto, Ignatius. *Pembredelan pers di Indonesia: Kasus koran Indonesia Raya.* Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1974.

Hill, David. *Journalism and politics in Indonesia: A critical biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as editor and author.* Abingdon, Oxon: Routledge, 2010.

Laffan, Michael Francis. *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds.* New York: Routledge, 2003.

Lucas, Anton. *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Makkelo, Ilham Daeng. *Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).* Tanpa Tahun. esi.kemdikbud.go.id/wiki/Kebaktian_Rakyat_Indonesia_Sulawesi_(KRIS) (accessed Januari 31, 2023).

McGregor, Katherine E. *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia.* Jakarta: Syarikat, 2008.

Noer, Deliar. *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942.* Jakarta: LP3ES, 1991.

Reid, Anthony. *Sumatera: Revolusi dan elite tradisional.* Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia since c. 1200.* Hampshire: Palgrave, 2001.

Said, Salim. *Genesis of Power: General Sudirman and The Indonesian Military Politics, 1945-49.* Singapore dan Jakarta: Institute of Southeast Asian Studies dan Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Said, Tribuana. *Sejarah pers nasional dan pembangunan pers pancasila.* Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.

Sjahrir, Sutan. *Our struggle.* Translated by Benedict R. O. G. Anderson. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1968.

Smail, John R.W. *Bandung awal revolusi 1945-1946.* Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Soebagijo-IN. *Lima Windu ANTARA: Sejarah dan Perjuangannya.* Jakarta: Lembaga Kantor Berita Nasional "ANTARA", 1978.

Supratman, Frial Ramadhan. *Internasionalisme dalam Pers Indonesia: Studi Kasus Surat Kabar Indonesia Raya, Harian Rakjat dan Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA (1950-1959).* Jakarta: Master Tesis Tidak Diterbitkan di Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina., 2023.

Supratman, Frial Ramadhan. "Koleksi Surat Kabar Langka Perpustakaan Nasional RI sebagai Sumber Informasi Sejarah Indonesia pada Masa Revolusi (1949-1950): Surat Kabar Berita Indonesia, Al-Djihad dan Ra'jat." *Tadwin: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 3, no. 2 (2022): 99-108.

Biodata Singkat

Frial Ramadhan Supratman merupakan pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Gelar sarjana (S. Hum) didapatkan dari jurusan ilmu sejarah Universitas Indonesia (UI). Pada tahun 2016 mendapatkan gelar Master of Arts (M.A.) dalam bidang ilmu sejarah dari Universitas Istanbul, Turki. Pada tahun 2023 Frial juga mendapatkan gelar Master of Sosial (M.Sos) dari Universitas Paramadina dalam bidang hubungan internasional. Beberapa tulisannya sudah dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah dan media massa, seperti *Studia Islamika*, *Aljami'ah Journal of Islamic Studies*, *Afkaruna Journal of Islamic Studies, Jurnal Sejarah, Jurnal Tamaddun, Jurnal Al-Tsaqafa, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Record and Library Journal, Kompas, IBTimes, Islami.co, Fajar Cirebon, Bandung Express* dan lain-lain. Frial juga pernah melakukan resensi buku di berbagai jurnal ilmiah dan media, seperti *Lembaran Sejarah UGM, Jurnal Sejarah,* dan *Koran Jakarta*. Frial pernah tampil presentasi dalam konferensi internasional dan nasional, baik dalam bidang ilmu sejarah maupun ilmu perpustakaan.

Rediscovery Our Sovereignty (Analisis Teks Pidato Presiden Sukarno di Muka Sidang Umum PBB ke 15 Tanggal 30 September 1960)[1]

Galih Nugraha, S.Pd.[2] Perguruan "Cikini" Daerah Khusus Jakarta

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menemukan kembali ide kedaulatan negara yang terdapat dalam pidato Presiden Sukarno di muka sidang umum PPB ke 15 pada hari Jumat tanggal 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat dengan berusaha untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut; (1) menjelaskan makna kedaulatan negara dan (2) merekonstruksi ide kedaulatan negara melalui analisis teks pidato Presiden Sukarno yang berjudul *"To Build the World a New"*. Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis konsep dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan maka penelitian menemukan jawaban bahwa; (1) lahirnya ide kedaulatan dari setiap negara yang akan, baru atau sudah merdeka memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri tanpa pengaruh dan campur tangan dari negara lain. (2) tantangan imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk penguasaan bangsa lain pada wilayah tertentu mulai dari mempengaruhi pikiran, membuat tekanan batin dan lahir serta menguasai kekayaan sumber daya alam yang mengancam kedaulatan seluruh bangsa di dunia. (3) menguatnya kedaulatan negara dipengaruhi tumbuhnya nasionalisme seluruh umat manusia ditandai hidupnya nilai-nilai kebebasan akan hak-hak asasi manusia dalam bentuk diplomasi perseorangan dan hak-hak asasi nasional dalam bentuk diplomasi umum dengan bangsa-bangsa lainnya. (4) kedaulatan adalah tanggungjawab seluruh masyarakat dunia dan organisasi internasional (PBB) dalam mengambil setiap keputusan secara bebas, dengan suara bulat, dan sederajat oleh semua bangsa-bangsa di dunia maka jika kita menemukan pelanggaran terhadap kedaulatan sesuatu bangsa tertentu maka itu akan menjadi ancaman yang besar bagi kedaulatan bangsa-bangsa di dunia ini.

Kata kunci: *Rediscovery, Sovereignty,* Sukarno.

[1] Makalah diseminarkan pada Simposium Penegakan Kedaulatan Negara Yogyakarta 19-21 Feb 2025.
[2] Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMKS 2 Perguruan "Cikini" Daerah Khusus Jakarta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan negara merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik dan hukum internasional yang merujuk pada kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari pihak luar. Istilah "kedaulatan" berasal dari bahasa Arab "daulah" atau “daulat” yang berarti kekuasaan tertinggi, dan dalam konteks kenegaraan. Istilah ini juga disamakan dengan *souvereignty/sovereignty* dalam bahasa Inggris.[3] Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat dan melaksanakan hukum. Jean Bodin, seorang filsuf politik Perancis abad ke-16, dalam *bukunya Les Six Livres de la Republique* (1576) menyatakan bahwa kedaulatan adalah *"la puissance absolue et perpetuelle d’une république,"* yang berarti kekuasaan absolut dan berlangsung terus menerus dalam sebuah republik.[4] Dalam konteks ini, kedaulatan tidak hanya mencakup kekuasaan untuk mengatur urusan domestik, tetapi juga hak untuk berinteraksi dengan negara lain secara independen.

Pada hakikatnya kedaulatan terdiri dari tiga macam yaitu kedaulatan internal, kedaulatan eksternal dan kedaulatan territorial. Kedaulatan internal mencakup kewenangan suatu negara untuk membentuk hukum, mengatur lembaga-lembaga pemerintahan, dan menentukan kebijakan dalam negeri. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur kehidupan warganya tanpa intervensi dari pihak luar.[5] Sementara itu kedaulatan eksternal merujuk pada hak negara untuk berhubungan dengan negara lain dan berpartisipasi dalam komunitas internasional tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain.[6] Hal ini meliputi kemampuan untuk membuat perjanjian internasional dan berpartisipasi dalam organisasi global. Kedaulatan territorial berarti bahwa negara memiliki kekuasaan penuh atas wilayah geografisnya, termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kedaulatan territorial menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk mengontrol individu dan benda-benda yang berada di wilayahnya.[7] Kedaulatan negara adalah prinsip dasar yang mendasari keberadaan suatu negara sebagai entitas mandiri dan berdaulat. Konsep ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Dalam konteks global saat ini, pemahaman

[3] Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Bandung: Yapemdo, 2006, hlm. 41-42.
[4] Ibid. hlm. 45.
[5] Boer Maulana, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 23.
[6] Ibid. hlm. 24.
[7] Ibid. hlm. 24.

tentang kedaulatan menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti globalisasi dan intervensi negara asing dalam pergaulan internasional.[8]

Konsep territori menjadi unsur yang begitu penting menurut konsep dalam Ilmu Politik dimana harus memenuhi unsur, yakno: penduduk, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kedaulatan.[9] Sukarno memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat mempersatukan kedua ideologi yang disampaikan oleh Russel. "Sesuatu" itu kami namakan "Panca Sila". Ya, "Panca Sila" atau Lima Sendi Negara kami. Lima Sendi itu tidaklah langsung berpangkal pada Manifesto Komunis ataupun *Declaration of Independence*.[10] Memang, gagasan-gagasan dan cita-cita itu, mungkin sudah ada sejak berabad-abad telah terkandung dalam bangsa karni. Dan memang tidak mengherankan bahwa paham-paham mengenai kekuatan yang besar dan kejantanan itu telah timbul dalam bangsa kami selama dua ribu tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional" demikian kata Bung Karno.[11] Dengan pidato tersebut, Sukarno sesungguhnya menunjukkan bahwa bangsa Asia dan Afrika adalah bangsa yang harus memiliki kedaulatan penuh seperti bangsa-bangsa lain di Amerika dan Eropa. Sukarno juga menunjukkan diri sebagai pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan. Dia tidak hanya memikirkan nasib bangsa dan rakyat Indonesia, tetapi juga seluruh bangsa yang terjajah. Oleh karena itu, pidato yang berjudul *To Build The World a New* (Membangun Dunia Kembali) tersebut memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga dunia.[12]

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha menemukan kembali ide kedaulatan negara dalam pidato Presiden Sukarno di muka sidang umum PPB ke 15 pada hari Jumat tanggal 30 September 1960 di New York Amerika Serikat yang berjudul *To Build the World a New* dilakukan untuk;

1. menjelaskan makna kedaulatan negara.
2. merekonstruksi ide kedaulatan negara dalam pidato Presiden Sukarno di muka sidang umum PPB ke 15 pada hari Jumat tanggal 30 September 1960 di New York Amerika Serikat.

[8] David Doresta Wijaya dan Nurul Mubin, "Teori Kedaulatan Negara". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2 No. 4 November 2024, hlm. 114-121.
[9] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 51.
[10] Sarkawi, To Build The World a New, https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/To_Build_The_World_a_New diakses pada 15 Januari 2025, pukul 15.00.
[11] Ibid.
[12] Ibid.

C. Relevansi Penelitian

Relevansi penelitian berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya kemudian oleh peneliti dianggap memiliki keterkaitan dengan pilihan topik penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pengulangan penelitian dengan topik yang sama. Maka dari itu, peneliti memandang bahwa relevansi penelitian ini penting untuk dilakukan karena melalui relevansi penelitian terdahulu membantu peneliti dalam menuliskan makalahnya dengan membuka sudut pandang baru dan materi yang lebih komprehensif.
Pada makalah ini, peneliti memilih salah satu judul penelitian yang pertama adalah;

Penelitian pertama yang ditulis oleh Lusy berjudul "Pemikiran Soekarno Tentang Internasionalisme Dalam Pancasila (Analisis Wacana Kritis Pidato Soekarno pada Sidang Umum PBB Ke-XV)", penelitian ini berbentuk karya ilmiah Skripsi yang dibuat pada tahun 2018 dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UPI Bandung. Penelitian ini membahas mengenai Soekarno yang menawarkan pancasila sebagai ideologi alternatif di PBB, ideologi pancasila digunakan untuk mengakhiri Blok Barat dan Blok Timur, usulan tersebut Soekarno bahas dalam pidato Soekarno pada Sidang Majelis Umum PBB ke-XV yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1960, dengan pidatonya yang berjudul "To Build The World a New". Lusy Dwi Desia memaparkan pemikiran ideologi pancasila pada pidato To Build The World a New.

Penelitian selanjutnya oleh Nuke Karlitasari Ristuningtias dengan judul "Pemikiran Politik Soekarno Tentang Tata Dunia (Analisa Pidato Soekarno To Build The World a New)". Penelitian ini berbentuk karya ilmiah Skripsi yang dibuat pada tahun 2002 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Pada penelitian ini membahas tentang pengaruh personality Soekarno pada pemikirannya tentang tata dunia dan kebijakan politik luar negeri Soekarno sekitar tahun 1960-1965. Penelitian Nuke membahas mengenai pemikiran Soekarno pada kurun waktu 1960-1965 ditinjau dari muatan materi Pidato *To Build The World a New*.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Sulfachriadi ini berjudul "Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1949-1966)", penelitian ini berbentuk skripsi yang dibuat pada tahun 2015 dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pada penelitian ini membahas latar belakang dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. kajian yang dilakukan Sulfachriadi membahas mengenai politik luar negeri bebas aktif

Penelitian-penelitian terhadulu ini membantu peneliti dalam mengutarakan ide dan perspektif yang sama dalam menuliskan mengenai pidato Soekarno yakni *To Build The World a New* yang menjadikan Indonesia memiliki standing position sebagai negara pelopor hadirnya negara baru yang bebas dan independen. Keunikan penelitian ini terletak pada usaha peneliti

yang ingin menemukan kembali ide kedaulatan negara dalam pidato Presiden Sukarno di muka sidang umum PPB ke 15 pada hari Jumat tanggal 30 September 1960 di New York Amerika Serikat yang berjudul *To Build the World a New* dengan mengolah data melalui studi literatur atau studi pustaka secara bertahap, menyeluruh, dan mendalam.

KAJIAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Hakikat Kedaulatan Negara

Jika dijabarkan lebih lanjut terdapat dua landasan ilmu yang berbeda mengenai dasar kedaulatan negara *(sovereignty)* dan hak menentukan nasib sendiri *(self determination)*. Landasan teoritik tersebut dikenal dengan istilah atau pendekatan *"sovereignty first"* dan "self-determination first". Pendekatan yang mengutamakan suatu kedaulatan *("sovereignty first")*, terutama dilandasi oleh prinsip kedaulatan negara *(sovereignty)*, integritas teritorial (territorial integrity) dan kemerdekaan politik *(political independence)*. Pendekatan *sovereignty first*, pada umumnya didasari oleh keinginan negara untuk menjaga dan mempertahankan integritas teritorialnya, atau oleh pihak ketiga yang khawatir bahwa jika muncul terlalu banyak negara dalam masyarakat internasional dapat menimbulkan instabilitas internasional. Pendekatan yang mengutamakan hak menentukan nasib sendiri *(self determination first)* didasari oleh prinsip hukum yang berkaitan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dan perlindungan hak-hak asasi manusia *(protection of human rights)*.[13] Dalam sejarah internasional, pendekatan *"self-determination first"* yang muncul terutama dalam konteks dekolonisasi didasari oleh argumen bahwa sekelompok orang yang memiliki kesamaan identifikasi, berhak secara kolektif untuk menentukan nasibnya sendiri dengan cara demokratik dan bebas dari tindakan penyiksaan dan penganiayaan secara sistematis. menjadi dasar bekerjanya sistem Hukum Internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat.[14]

Menjadi berdaulat berarti memiliki kekuasaan. Pengertian kekuasaan mutlak dalam suatu negara dikenal dengan kedaulatan. Jean Bodin pada abad ke-16 mengemukakan doktrin atau ajaran bahwa kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum.[15] Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hirarki hukum

[13] Sigit Riyanto. "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer". *Jurnal Yustisia* Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm. 5-14.
[14] Ibid.
[15] Sudikno Mertokusumo, *Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Edisi Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 33.

atau *legal hierarchy*.[16] Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan atau *independence* dan vice versa. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain.[17]

2. Makna Kedaulatan Negara

Kedaulatan menjadi sesuatu yang begitu bermakna bagi negara yang baru merdeka. Secara historis Indonesia menjadi bangsa yang begitu mengupayakan adanya kedaulatan dalam wilayahnya yang berbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan yang lazim dialami oleh negara penyintas kolonialisme dan imperialisme. Bangsa Indonesia menghidupkan kedaulatannya sendiri di atas keruntuhan bangsa penguasa yang secara yuridis tidak memiliki wewenang untuk mendirikan kekuasaanya di tanah air. Tercapainya Proklamasi 1945 yang menandai Indonesia merdeka tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bebas kependudukan bangsa asing, karena nyatanya setelah 1945-1950 bangsa Indonesia masih harus jatuh bangun untuk mempertahankan kedaulatan bangsanya agar tidak lagi diduduki bangsa asing.

3. Arti Penting Pidato Sukarno, To Build the World a New Terhadap Pemaknaan Kembali Kedaulatan Bangsa Indonesia

Pidato Sukarno yang berjudul *To Build the World a New* pada Sidang Umum PBB ada tanggal 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat merupakan sebuah pidato yang akan selalu diingat sebagai sebuah pidato standing position bangsa Indonesia khususnya saat dipimpin oleh Sukarno. Setelah melalui perjuangan historis yang panjang akan kolonialisme dan imperialisme, bangsa Indonesia akhirnya dapat meraih kemerdekaannya walaupun di situasi yang sulit. Sukarno sang Proklamator naik tahtah menjadi Presiden dengan semangat revolusionernya. Semangat ini yang kemudian salah satunya beliau tuangkan dalam Sidang Umum PBB 1960. Semangat revolusioner yang Soekarno sampaikan adalah mengenai kebengisan kolonialisme dan imperialisme, serta mendorong negara-negara yang belum merdeka untuk meraih kemerdekaannya secara mandiri dan independen. Dalam pidatonya, Sukarno menguraikan pemikiran konseptualnya tentang nasionalisme, anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, solidaritas dan keadilan sosial antar bangsa, kebijakan hidup berdampingan secara damai dan perlucutan senjata, rekonstruksi/penguatan PBB, dan Pancasila (lima prinsip dasar) sebagai ideologi alternatif.[18] Dengan menguraikan konsep-

[16] Jens Bartelson, "The Concept of Sovereignty Revisited", *European Journal of International Law*, Vol. 17. No.2. 2006, Oxford: Oxford University Press.
[17] Ibid.
[18] Sukarno's Speech: To Build the World Anew September 30, 1960, https://www.unesco.org/en/memory-world/sukarnos-speech-build-world-anew-september-30-1960, diakses pada 16 Januari pukul 10.00.

konsep ini, Sukarno mengutarakan keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk diakui sebagai anggota masyarakat internasional yang setara. Konsep Sukarno juga mendorong negara-negara lain di dunia untuk lebih aktif dalam menciptakan perdamaian dan kesetaraan dunia, yang diwujudkan dalam Gerakan Non-Blok pada tahun 1961.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konsep dan pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Pada dasarnya penelitian kualitatif menurut Sugiyono diartikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data yang di peroleh dan dengan demikian tidak mengahasilkan angka-angka.[19] Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto, dapat dipahami sebagai cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara sistematis dibutuhkan metodologi yang tepat.[20] Sugiyono mengemukakan definisi teknik pengumpulan data sebagai langkah strategis dan sistematis yang dilakukan dalam penelitian. [21] Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara akurat dari berbagai sumber untuk memberikan wawasan dan jawaban, seperti menguji hipotesis atau mengevaluasi suatu hasil. Selanjutnya Juliansyah, Noor menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data adalah anggapan dasar yang digunakan oleh peneliti tentang suatu hal, anggapan ini kemudian dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.[22] Dalam mencari sumber data penelitian dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan dari buku, teori, catatan, dan dokumen foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian dan penulisan. Studi pustaka dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang diambil, hal ini berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.[23]

Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.[24] Sumber data primer menggunakan teks “Membangun Dunia Kembali (To Build the World New)”. Pidato Presiden Republik Indonesia di muka Sidang

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afabeta, 2011, hlm. 3.
[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013, hlm. 11.
[21] Ibid. hlm. 7.
[22] Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 15.
[23] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 13-14.
[24] Nuopponen, A., Methods of Concept Analysis-A Comparative Study. *LSP Journal-Language for Special Purposes, Professional Communication, Knowledge Management and Cognition*. Vol.1 No. 1, 2010, hlm. 4 12.

Umum P B.B. ke-XV tanggal 30 September 1960. Kemudian sumber data sekunder yang digunakan artikel dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan kedaulatan negara, Sukarno, Hukum Internasional, dan wacana-wacana baru mengenai Pancasila serta keterkaitannya memberikan bingkai NKRI melalui Bhinneka Tunggal Ika, mengikat bangsa Indonesia menjadi kesatuan wilayah yang berdaulat. Penulis menggunakan teknik kepustakaan (literature research) untuk mendapatkan bahan yang sesuai pembahasan yang diangkat oleh Penulis, seperti melalui jurnal, situs-situs internet yang dapat dipercaya, dan sumber-sumber lainnya.

PEMBAHASAN

A. Makna Kedaulatan Bangsa Indonesia Pasca Kemerdekaaan

Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki dari pada negara, bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulat dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi, Negara berdaulat berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri dengan kata lain negara memiliki monopoli dari pada kekuasaan. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya.[25] Istilah kedaulatan atau *sovereignty* sering dipergunakan untuk mengambarkan kedudukan sebagai subjek hukum internasional (legal personality of a state) dari suatu negara. Istilah kedaulatan juga mengambarkan suatu kompetensi hukum yang dimiliki suatu negara pada umumnya. Kedaulatan (Souvereignty) dapat dipakai sebagai sinonim untuk istilah kemerdekaan (independent).[26]

Hak menentukan nasib sendiri bersifat revolusioner, digerakkan oleh komitmen dan kohesi kelompok penduduk yang berada di wilayah tertentu dan merasa memiliki kesamaan identitas.[27] Upaya penyatuan konsep kewargaan Indonesia dalam lingkup politik kebangsaan yang keluar dari wacana kolonialisme dan menolak stratifikasi sosial berbasis feodalisme dan kolonialisme.[28] Selama gelombag dekolonialisasi di seluruh dunia di pertengahan abad ke-20, perjuangan kemerdekaan telah menciptakan negara-negara pascakolonial baru dengan banyak warisan kolonial. Karena warisan kolonial ini dibingkai dalam antagonisme internasional akibat perang dingin, penciptaan Masyarakat baru dengan manusia baru tetap menjadi ilusi.[29]

---

[25] Mochtar Kusumaatmadja, *Pembaharuan Pendidikan Hukum Dan Pembinaan Profesi*, Bandung: Lemlit, Hukum Dan Kriminal, FH-Unpad, 1996, hlm.16-17.
[26] Chairul Anwar, *Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Jakarta: Djambatan, 1989, hlm. 32-33.
[27] Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Jurnal Yustisia* Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm. 5-14.
[28] Rhoma Dwi Aria Yuliantri, *Manusia Baru Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2023 hlm. xi-xii.
[29] Ibid. hlm. xiv.

Transisi dari rezim kolonial yang represif dan tidak memercayai rakyatnya, menuju negara-bangsa yang mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Sayangnya, demokrasi dalam negara-bangsa itu rapuh. Perbedaan struktural rasa etnis yang menjadi ciri negara kolonial harus diberantas untuk membuka jalan bagi inklusi dan kesetaraan. Transisi utama berkaitan dengan pergeseran dari subjek menjadi warga negara.[30]

Penafsiran tentang Pancasila mengedepankan keadilan sosial dan nasionalisme, sementara ketuhanan yang maha esa diubah menjadi kekebasan beragama.[31] Ia juga melihat bahwa revolusi sebagai upaca berkelanjutan. Soekarno adalah seorang nasionalis dengan gagasan nativis tentang identitas kolektif bangsa. dia membingkai identitas kolektif itu dalam nilai-nilai inti seperti musyawarah, gotong royong, dll yang berakar kuat di masa lalu Jawa.[32] Pencarian identitas bangsa adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti, yang melibatkan bukan saja jejak masa lalu, melainkan juga cita-cita masa depan. Upaya menemukan identitas kolektif di dalam masyarakat pascakolonial bersifat kompleks, antara lain karena sulitnya melepaskan diri dari bayang-bayang kolonial dan feodalisme.[33]

B. Merekonsruksi Ide Kedaulatan Negara ala Sukarno melalui Analisis Teks Pidato Presiden Sukarno yang berjudul *"To Build the World a New"*.

Pidato Sukarno pada dalam sidang Majelis umum PBB mendapat sorotan dunia sebagai bentuk diplomasi internasional dalam memperjuangkan penghapusan kolonialisme dan imperialisme yang masih dilaksanakan pada kurun waktu tahun 1960. PBB berperan sebagai forum untuk manuver anti-kolonial internasional. Kritik terberat terhadap "kolonialisme" datang dari perwakilan negara-negara merdeka di negara berkembang salah satunya Indonesia. Delegasi Indonesia yang diwakilkan oleh presiden Sukarno, Sukarno menyuarakan dukungan penuh untuk semua orang yang hidup di bawah penjajahan. Delegasi anti-kolonial ini berguna dalam mempercepat berakhirnya kolonialisme pada periode pasca-perang Dunia ke-II. Muncul suatu usaha-usaha yang kuat yang dilakukan oleh Sukarno melalui pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB tanggal Tahun 1960, untuk menghentikan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara barat terhadap negara-negara lain. Dalam menjalankan komitmennya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia telah memegang teguh kebijakan luar negerinya yang aktif dan independen dan telah berkontribusi besar dalam mewujudkan

[30] Ibid. hlm. xv.
[31] Ibid. hlm. xviii
[32] Ibid. hlm. xvii
[33] Ibid. hlm. hlm. 1.

tujuan dan sasaran tersebut.[34] Tekad ini diwujudkan dalam partisipasi aktif Indonesia dalam diplomasi mengenai isu-isu besar saat itu termasuk, antara lain, perjuangan melawan kolonialisme, apartheid dan pemberantasan momok kemiskinan yang tidak manusiawi. Pencapaian cita-cita dan prinsip tersebut juga sebagian besar menggemakan politik luar negeri Indonesia yang disuarakan oleh Sukarno. Indonesia melalui pemikiran ideologi Soekarno konsisten menjunjung prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pergaulan antar bangsa.[35] Prinsip kemanusiaan Indonesia termaktub dalam Pancasila, prinsip ini menjadikan setiap bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai bentuk hak yang harus dimiliki oleh setiap bangsa dan warganya.

Pidato Presiden Sukarno di depan Sidang Umum PBB ke-15 pada 30 September 1960, berjudul *To Build the World a New* yang artinya Membangun Dunia Kembali, merupakan salah satu momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia dan dunia. Dalam pidato berdurasi 90 menit ini, Sukarno tidak hanya berbicara sebagai pemimpin Indonesia, tetapi juga sebagai suara bagi negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Ingatan kolektif dunia yang didorong dari kesadaran akan perawatan dan akses terhadap warisan dokumenter di berbagai belahan dunia. Selain pidato dalam Konferensi Asia Afrika, pidato-pidato lain Bung Karno juga dinilai telah memberikan perubahan signifikan dalam percaturan politik dunia. Pidato *berjudul To Build The World a New* yang disampaikan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1960 merupakan gagasan Soekarno yang menyentak dunia. Ia menawarkan Pancasila sebagai ideologi dunia.[36] Naskah Sukarno sedikitnya memuat lima pokok permasalahan, yaitu tentang kritik terhadap kolonialisme-imperialisme, perkembangan senjata nuklir, hubungan penjajah dan negeri jajahan, ideologi-ideologi dunia, dan pemikiran kembali badan-badan di dalam PBB.[37] Perode setelah Perang Dunia II yakni 1945 hingga masa 1960-an banyak negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang berusaha untuk memerdekakan negerinya, melepaskan diri dari sistem kolonialisme dan imperialisme yang mengakar begitu kuat sejak abad ke-19. Dalam pidatonya, Sukarno menyebut zaman ini sebagai zaman "pembangunan bangsa-bangsa". Seperti juga digambarkannya dalam pidato,

[34] Lusy Dwi Desia. (2018). "Pemikiran Soekarno Tentang Internasionalisme Dalam Pancasila (Analisis Wacana Kritis Pidato Soekarno Pada Sidang Umum PBB Ke-XV)." Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
[35] Alifa Cantika Dewi. (2023). "Pengaruh Pidato Soekarno To Build The World a New pada Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1960". Skripsi. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
[36] Kristantyo Wisnubroto, https://indonesia.go.id/kategori/feature/7170/pidato-soekarno-kini-jadi-milik-dunia?lang=1 diakses pada 16 Januari pukul 19.00.
[37] "Membangun Dunia Kembali (To Build the World New)". Pidato Presiden Republik Indonesia di muka Sidang Umum P B.B. ke-XV tanggal 30 September 1960.

zaman baru itu adalah takdir atau jalan dari sejarah. telah terdapat tren dekolonisasi di Asia Tenggara sejak permulaan abad.[38]

Melalui pidato tersebut, Sukarno menyampaikan bahwa kunci terciptaya kedamaian dunia adalah dengan menghilangkan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apapun, termasuk berbagai bentuk campur tangan negara penjajah terhadap segala aturan baru di negara baru tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang nyata terjadi di Indonesia setelah merdeka, dengan masih adanya campur tangan dari Belanda melalui NICA. Dekolonisasi adalah proses yang panjang dan melelahkan tidak saja bagi bangsa terjajah, tetapi juga bagi bangsa penjajah.[39] Memori kolonial menghadirkan kebimbangan dan kebungkaman dari sisi masyarakat penjajah. Sukarno menampar dasar-dasar itu dan menekankan betapa ketinggalan zamannya sistem kolonial dan segala alasannya. Dampak dan Warisan Pidato "Membangun Dunia Kembali" tidak hanya menjadi sorotan pada saat itu tetapi juga diakui secara internasional sebagai salah satu pidato penting dalam sejarah PBB. Pada 18 Mei 2023, arsip pidato ini ditetapkan sebagai *Memory of the World* oleh UNESCO, menegaskan signifikansinya dalam konteks global.[40] Sukarno ini menjadi bagian dari diplomasi internasional untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang membangun perdamaian dunia. Penetapan UNESCO tersebut juga mencerminkan pengakuan dunia terhadap jasa Bung Karno yang harus kita pahami makna dan signifikansinya, Sukarno berhasil mengartikulasikan aspirasi negara-negara baru merdeka untuk diakui sebagai entitas yang setara dalam komunitas internasional. Pidato ini juga menjadi salah satu pendorong lahirnya Gerakan Non-Blok pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan di dunia yang terpolarisasi antara blok Barat dan Timur.

C. Korelasi Pidato Sukarno: to Build the World a New Terhadap Pancasila Sebagai Pemaknaan Kedaulatan Negara

Pidato Sukarno dengan judul “To Build The World A New” atau “Membangun Dunia Kembali” pada tanggal 30 September 1960, memiliki arti penting dalam memahami pandangan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, terhadap dunia. Sukarno menyampaikan pidatonya dengan penuh semangat revolusioner, mengupas sistem atau konsep yang dibangun

[38] Christopher Reinhart, “Pidato Sukarno di PBB: Zaman Baru Datang, Penjajahan Telah Usang”, https://tirto.id/pidato-sukarno-di-pbb-zaman-baru-datang-penjajahan-telah-usang-gjUz diakses pada 16 Januari pukul 19.00.
[39] Ibid.
[40] Ahmad Basarah: Dunia Mengakui Pancasila Sebagai Ideologi Internasional, Penetapan Pidato Bung Karno di PBB Sebagai Memory of the World. Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi. MPR Rumah Kebangsaan. Edisi No. 06/TH.XVII/Juni. hlm. 26-27.

oleh barat selama berabad-abad serta dampaknya pada keberlangsungan dunia.[41] Dengan demikian, pandangan Sukarno untuk menyerukan perdamaian dunia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi tawaran yang dibalut dengan istilah *To Build The World A New*. suatu rumusan bilamana dunia ingin damai, maka hanya Pancasila yang dapat dijadikan konsepsi bukan konsepsi seperti Kolonialisme dan Imperialisme. Menurut Sukarno, PBB gagal merespon perkembangan zaman baru itu. Misalnya, pengambil keputusan terpenting di PBB masih tetap di tangan "Big Four": Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Perancis. Akibatnya, sikap dan kebijakan PBB selalu berat sebelah alias tidak netral. Sukarno mengeritik sikap PBB yang gagal menjadi "juru damai" di sejumlah negara yang dikoyak konflik, seperti perang Vietnam, Aljazair, Kongo, dan Korea. Indonesia sendiri punya nasib serupa. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat itu, masalah Irian Barat mulai mencuat. Belanda tak punya itikad baik untuk merundingkan masalah tersebut. Terkait benturan ideologi perang dingin yang seakan tak terdamaikan itu, Sukarno menawarkan jalan ideologi alternatif, Pancasila. Menurutnya, Pancasila lebih mencerminkan kondisi kekinian ketimbang Piagam PBB. menyinggung imperialisme dan kolonialisme sebagai sistem jahat yang telah menggiring dunia ketiga ke dalam kemiskinan dan perang. Menurut Sukarno dunia tidak akan pernah tenang dan damai selama masih ada imperialisme dan kolonialisme. Menurutnya, perbaikan terhadap PBB haruslah senapas dengan semangat membangun dunia baru yang lebih aman, damai, adil dan makmur.[42]

"Membangun Dunia Kembali (To Build The World A New)" yang berisi kritik pedas terhadap ketidakadilan dan ketidakberesan dunia saat itu. Soekarno mengecam imperialisme dan kolonialisme yang masih merajalela di Asia dan Afrika. Sukarno pun mengejek PBB sebagai lembaga yang gagal melindungi hak-hak bangsa-bangsa yang tertindas dan menghindari perang. menawarkan solusi.[43]

Sukarno memperkenalkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang dapat menjadi inspirasi bagi dunia. Pancasila adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia selama berabad-abad melawan penjajahan. Pancasila bukanlah chauvinisme atau fanatisme, tetapi adalah sikap toleran dan terbuka terhadap perbedaan agama, ras, budaya, dan ideologi. Pidato Soekarno itu mengguncang dunia. Banyak pemimpin dan delegasi negara-

[41] Refleksi 62 Tahun Pidato Sukarno di PBB: BPIP Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Pembumian Pancasila dan Pembangunan Bangsa, https://bpip.go.id/berita/refleksi-62-tahun-pidato-sukarno-di-pbb:-bpip-dorong-mahasiswa-jadi-agen-perubahan-pembumian-pancasila-dan-pembangunan-bangsa diakses pada 16 Januari pukul 19.00.
[42] Rio Pujakesuma, Ketika Sukarno Mengkritik PBB, https://www.berdikarionline.com/ketika-sukarno-mengkritik-pbb/ diakses pada 16 Januari pukul 19.00.
[43] M.F. Mukthi, Sukarno Tantang PBB, http://historia.id/politik/articles/sukarno-tantang-pbb-Py02v diakses pada 16 Januari pukul 19.00.

negara yang hadir terkesima dan terpukau oleh keberanian dan kecerdasan Soekarno. Mereka menganggap pidato Sukarno sebagai representasi dari aspirasi dan harapan mereka untuk hidup bebas dari penjajahan dan eksploitasi.[44]

PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan dunia setelah tahun 1960 menyaksikan kemerdekaan berbagai bangsa dari belenggu kolonialisme. Pada benua Afrika saja, terdapat lebih dari 30 negara yang merdeka terhitung sejak ditutupnya pidato Sukarno di muka Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960 itu. Pidato Sukarno di PBB bukan hanya sekadar pernyataan politik; ia merupakan manifesto bagi kebangkitan bangsa-bangsa terjajah dan penegasan akan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Melalui pesan-pesannya tentang anti-imperialisme, kedaulatan bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi universal, Sukarno meninggalkan warisan penting yang terus relevan hingga saat ini. Dengan demikian, kritik Sukarno bertujuan untuk memperbaiki struktur dan perilaku PBB sehingga organisasi internasional tersebut lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan keadilan bagi semua bangsa. Pidato Soekarno di sidang umum PBB pada 1960 itu menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia dan dunia. Pidato itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, berdikari, dan berwibawa di mata dunia. Pidato itu juga menunjukkan bahwa Pancasila adalah falsafah hidup yang dapat menjadi inspirasi bagi dunia yang sedang dilanda ketegangan dan konflik. Namun demikian, pidato Soekarno itu menjadi salah satu pidato yang paling bersejarah dan berpengaruh dalam sejarah sidang umum PBB. Soekarno juga berhasil menyuarakan aspirasi dan harapan bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang sedang berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan. Sekaligus menawarkan Pancasila sebagai alternatif bagi dunia yang sedang dilanda ketegangan dan konflik, menuju dunia yang damai, aman, dan tentram.

Saran

Penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menggali dan merekonstruksi peristiwa masa lampau yang begitu berarti bagi bangsa ini. Persitiwa pidato Sukarno dalam Sidang Umum PBB 1960 merupakan suatu *standing position* bangsa Indonesia untuk aktif di kancah diplomasi internasional guna mendorong semangat kemerdekaan dan menggenggam kedaulatan bangsanya. Semoga melalui penelitian

[44] Afif Khoirul M, Mental Baja Presiden Soekarno Mengguncang Dunia dengan Aksi Gertakannya di Sidang Umum PBB, https://intisari.grid.id/read/033754347/mental-baja-presiden-soekarno-mengguncang-dunia-dengan-aksi-gertakannya-di-sidang-umum-pbb diakses pada 15 Januari 2025 pukul 10.00.

singkat ini generasi penerus bangsa Indonesia tidak terbuai dengan kecanggihan duniawi dan serta merta mengingat apa yang Sukarno sebut sebagai "Jasmerah", jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena itulah jadi diri kita agar dapat menjadi manusia Indonesia yang berdaulat bagi dirinya, pikirannya, dan bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

"Membangun Dunia Kembali (To Build the World New)". Pidato Presiden Republik Indonesia di muka Sidang Umum P B.B. ke-XV tanggal 30 September 1960.

Buku

Anwar, Chairul. (1989). *Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Djambatan.

Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Astim Riyanto. (2006). *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung: Yapemdo.

Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Christopher Reinhart. (2021). *Mempertahankan Imperium: Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan Akhir Hindia Belanda*. Jakarta: Marjin Kiri.

Juliansyah, Noor. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Kansil, C. S. T. (1977). *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Kusumaatmadja,Mochtar. (1996). *Pembaharuan Pendidikan Hukum Dan Pembinaan Profesi, Bandung: Lemlit, Hukum Dan Kriminal*. FH-Unpad.

Maulana, Boer. (2000). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. (Edisi Kelima). Yogyakarta: Liberty.

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Yuliantri, Rhoma Dwi Aria. (2023). *Manusia Baru Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Skripsi

Ristuningtias, N. K. (2002). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Tata Dunia (Analisa Pidato Soekarno To Build The World a New). Skripsi. Jawa Timur: Universitas Negeri Jember.

Rosalia, H. (2004). Perpustakaan Kepresidenan (Presidential Library) Bung Karno di Blitar. Skripsi. Yogyakrta: Universitas Islam Indonesia.

Sulfachriadi, S. (2016). Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1949-1966). Doctoral dissertation. Makasar: Universitas Negeri Makassar.

Desia, Lusy Dwi. (2018). "Pemikiran Soekarno Tentang Internasionalisme Dalam Pancasila (Analisis Wacana Kritis Pidato Soekarno Pada Sidang Umum PBB Ke-XV)." Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Jurnal

Ahmad Basarah: Dunia Mengakui Pancasila Sebagai Ideologi Internasional, Penetapan Pidato Bung Karno di PBB Sebagai Memory of the World. Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi. MPR Rumah Kebangsaan. Edisi No. 06/TH.XVII/Juni. hlm. 26-27.

Noventari, W. (2016). "Peran Diplomasi Politik Luar Negeri dan Angkatan Perang Dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(2), 122–128.

Nugroho, A. S. (2016). "Soekarno dan Diplomasi Indonesia. Sejarah dan Budaya". *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, Vol.10 No. (2), hlm. 125–130.

Wisnumurti, N. (1998). "Politik Luar Negeri Indonesia Bagi Terciptanya Perdamaian dan Keamanan Dunia Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa." *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.3 No.(1), hlm. 75–92.

Riyanto, Sigit, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", Jurnal Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm. 5-14.

Nuopponen, A., "Methods of Concept Analysis-A Comparative Study." *LSP Journal-Language for Special Purposes, Professional Communication, Knowledge Management and Cognition.* Vol.1 No. 1, 2010, hlm. 4 12.

Jens Bartelson, "The Concept of Sovereignty Revisited", *European Journal of International Law*, Vol. 17. No.2. 2006, Oxford: Oxford University Press.

David Doresta Wijaya dan Nurul Mubin, "Teori Kedaulatan Negara". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 4 November 2024, hlm. 114-121.

Internet

Afif Khoirul M, Mental Baja Presiden Soekarno Mengguncang Dunia dengan Aksi Gertakannya di Sidang Umum PBB, https://intisari.grid.id/read/033754347/mental-baja-presiden-soekarno-mengguncang-dunia-dengan-aksi-gertakannya-di-sidang-umum-pbb diakses pada 15 Januari 2025 pukul 10.00.

Kristantyo Wisnubroto, https://indonesia.go.id/kategori/feature/7170/pidato-soekarno-kini-jadi-milik-dunia?lang=1 diakses pada 16 Januari pukul 19.00.

M.F. Mukthi, Sukarno Tantang PBB, http://historia.id/politik/articles/sukarno-tantang-pbb-Py02v diakses pada 16 Januari pukul 19.00.

Refleksi 62 Tahun Pidato Sukarno di PBB: BPIP Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Pembumian Pancasila dan Pembangunan Bangsa, https://bpip.go.id/berita/refleksi-62-tahun-pidato-sukarno-di-pbb:-bpip-dorong-mahasiswa-jadi-agen-perubahan-pembumian-pancasila-dan-pembangunan-bangsa diakses pada 16 Januari pukul 19.00.

Rio Pujakesuma, Ketika Sukarno Mengkritik PBB, https://www.berdikarionline.com/ketika-sukarno-mengkritik-pbb/ diakses pada 16 Januari pukul 19.00.

Christopher Reinhart, "Pidato Sukarno di PBB: Zaman Baru Datang, Penjajahan Telah Usang", https://tirto.id/pidato-sukarno-di-pbb-zaman-baru-datang-penjajahan-telah-usang-gjUz diakses pada 16 Januari pukul 19.00.

Sukarno's Speech: To Build the World Anew September 30, 1960, https://www.unesco.org/en/memory-world/sukarnos-speech-build-world-anew-september-30-1960 , diakses pada 16 Januari pukul 10.00.

Sarkawi, To Build The World a New, https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/To_Build_The_World_a_New diakses pada 15 Januari 2025, pukul 15.00.

Memori Kolektif dan Media Baru: Studi Kasus Video YouTube tentang Serangan Umum 1 Maret

Galih Pangestu Jati
Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Abstrak

Perkembangan media digital telah menghadirkan peluang baru dalam merepresentasikan dan melestarikan memori kolektif suatu bangsa. YouTube, sebagai salah satu *platform* video terbesar, memainkan peran penting dalam memvisualisasikan peristiwa sejarah dan membangun narasi kultural. Youtube pun dimanfaatkan oleh para kreator untuk mereproduksi dan mentransmisikan memori kultural tentang peristiwa di Indonesia, salah satunya adalah peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Di platform Youtube, ada banyak video yang membicarakan peristiwa tersebut dalam berbagai narasi. Hal ini tentu menjadi hal yang menarik mengingat beberapa penelitian mengenai memori kolektif Serangan Umum 1 Maret menunjukkan adanya *grand narration* dari pemerintah Orde Baru. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana narasi yang dibuat dalam beberapa video YouTube Serangan Umum 1 Maret sebagai bagian dari memori kolektif Indonesia. Dengan Metode Penelitian kualitatif, studi ini berfokus pada beberapa konten video yang membahas peristiwa tersebut. Penelitian ini akan menganalisis konten video, narasi, dan komentar pengguna internet. Dengan teknik *purposive sampling*, video yang digunakan sebagai objek penelitian ada 5. Selain narasi, pemilihan kelima video tersebut dilatarbelakangi oleh popularitas dengan mempertimbangkan jumlah *viewer*-nya. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa narasi tentang Serangan Umum 1 Maret di dalam video-video tersebut. Ada yang melanjutkan *grand narration* Orde Baru, ada pula yang melakukan *countering* terhadapnya. Selain itu, warganet pun memberikan tanggapan yang bermacam-macam. Kondisi ini menunjukkan bahwa video YouTube tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi sejarah, tetapi juga sebagai ruang interaktif bagi masyarakat untuk membangun, mempertahankan, dan memperdebatkan memori kolektif. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara media baru dan pelestarian memori kolektif, serta implikasinya terhadap identitas kultural dan kedaulatan bangsa di tengah era digitalisasi.

Kata kunci: memori kolektif, media baru, YouTube, Serangan Umum 1 Maret, narasi digital

Pendahuluan

Memori kolektif merupakan konsep yang merujuk pada ingatan bersama yang dibentuk oleh kelompok sosial mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah mereka. Memori ini tidak hanya bersifat individu, melainkan dikonstruksi melalui narasi yang dibagikan secara kolektif dan dipertahankan dalam bentuk budaya, simbol, dan tradisi. Dalam konteks Indonesia, Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi salah satu peristiwa yang diingat sebagai bagian penting dari perjuangan kemerdekaan. Peristiwa ini, yang terjadi di Yogyakarta, merupakan aksi militer

besar-besaran yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk menunjukkan eksistensi negara Republik Indonesia kepada dunia internasional, meskipun pada saat itu Indonesia sedang dalam keadaan terjajah oleh Belanda.

Pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan memori kolektif mengenai peristiwa tersebut. Salah satunya adalah dengan memasukkan materi mengenai peristiwa Serangan Umum 1 Maret dalam kurikulum sejarah sekolah. Hal ini dapat dilihat dari buku *Sejarah* karya Safitry, dkk (2022). Dalam buku ini, dibahas secara singkat mengenai peristiwa tersebut. Selain itu, pada masa Orde Baru, atas prakarsa Pangdam VII/Diponegoro Mayjen Widodo, pemerintah membangun Monumen Serangan Umum 1 Maret yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973. Monumen tersebut terdiri dari tembok beton putih dan lima patung perunggu yang dibuat oleh seniman Saptoto. Tiga patung merepresentasikan tentara, sedangkan dua patung lainnya menggambarkan rakyat jelata. Di sekitar monumen dibangun relief yang menarasikan peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Tidak hanya itu, pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres yang menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Akan tetapi, narasi memori kolektif tentang peristiwa tersebut tidaklah tunggal dan apolitis. Sontag (2003) mengatakan bahwa memori kolektif bukan hanya perkara mengingat, tetapi “menetapkan”. Maksudnya, ada kesepakatan dalam kelompok untuk mengidentifikasi dirinya sendiri dan menetapkan narasinya sendiri. Kondisi ini tentu saja menyebabkan adanya pengabaian terhadap narasi yang jamak. Meski demikian, gesekan karena perbedaan narasi ini sering kali tidak bisa dihindari yang menyebabkan berbagai kontestasi terus-menerus. Dengan demikian, memori kolektif juga tidak bersifat statis, tetapi ditentukan oleh narasi dominan. Hal ini dapat dilihat dari narasi tentang peristiwa tersebut pada masa Orde Baru yang diungkap dalam penelitian Setiawan (2019). Penelitian tersebut menggambarkan kuatnya narasi militeristik dalam Monumen Serangan Umum 1 Maret yang menarasikan peran kuat Soeharto di dalamnya. Selain itu, dalam buku *Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta, Latar Belakang dan Pengaruhnya* (SESKOAD, 1991) pun demikian. Buku ini juga menonjolkan peran Soeharto dalam peristiwa tersebut.

Kondisi ini berbeda dengan narasi yang muncul saat Orde Baru tumbang. Dalam Keppres yang dikeluarkan oleh Joko Widodo pada tahun 2022, nama Soeharto tidak dicantumkan di dalamnya. Hal ini seperti terlihat dalam poin C berikut:

> bahwa peristiwa Serangan Umum I Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui

> dan digerakkan oleh presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

Dari kutipan di atas, dapat dilihat ada beberapa nama yang disebutkan dalam Keppres. Namun, nama Soeharto tidak disebutkan di dalamnya. Hal ini sempat memunculkan polemik saat Fadli Zon memprotes absennya nama Soeharto tersebut. Namun, pihak pemerintah menjelaskan, Keppres tidak bisa memuat semua nama yang berperan dalam peristiwa tersebut (Wirayudha, 2022).

Perbedaan narasi dalam memori kolektif tentang Serangan Umum 1 Maret ini mencerminkan dinamika politik dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terutama setelah era Orde Baru. Ketidakhadiran nama Soeharto dalam Keppres yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan bagaimana narasi sejarah dapat dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan dan upaya untuk membentuk identitas politik yang baru. Keputusan ini juga mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan narasi sejarah dengan memasukkan kontribusi berbagai pihak, tanpa mendominasi satu sosok tertentu. Polemik yang muncul terkait dengan absennya nama Soeharto dalam Keppres ini juga menunjukkan bagaimana memori kolektif tetap menjadi arena perdebatan dan kontestasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, media baru, seperti YouTube, telah menjadi *platform* yang memungkinkan kontestasi narasi sejarah ini semakin meluas. YouTube memberikan ruang bagi individu, kelompok, atau lembaga untuk menyebarkan narasi versi mereka tentang peristiwa-peristiwa sejarah, termasuk Serangan Umum 1 Maret. Berbeda dengan narasi yang dibangun melalui media *mainstream* atau dokumentasi resmi, video di YouTube cenderung lebih bebas dan beragam dalam interpretasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi audiens untuk mengakses berbagai versi dan perspektif mengenai peristiwa tersebut. Selain itu, Youtube memungkinkan dapat menjadi wadah untuk terbentuknya pemahaman yang lebih dinamis tentang memori kolektif.

Video-video di YouTube yang membahas Serangan Umum 1 Maret sering kali mencampurkan unsur dokumentasi sejarah dengan interpretasi pribadi atau komunitas yang mengunggahnya. Beberapa video mengangkat sudut pandang yang lebih personal, seperti kisah-kisah saksi mata, atau pengalaman individu yang terlibat langsung dalam peristiwa

tersebut. Dalam beberapa kasus, video-video ini juga menggunakan narasi yang lebih emosional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap perjuangan kemerdekaan. Dengan demikian, YouTube berperan penting dalam membentuk cara masyarakat mengingat dan memahami peristiwa sejarah yang telah lama berlalu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana narasi video-video YouTube tentang Serangan Umum 1 Maret. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji peran media baru dalam mengubah cara audiens merespons dan mengingat peristiwa-peristiwa sejarah. Di era digital ini, media sosial dan *platform* berbagi video menjadi saluran penting dalam memperkuat memori kolektif dan menghubungkan generasi-generasi yang berbeda dengan masa lalu mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh media baru terhadap memori kolektif dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika sejarah dalam masyarakat kontemporer.

Tinjauan pustaka

Penelitian mengenai memori kolektif tentang Serangan Umum 1 Maret pernah dilakukan sebelumnya meskipun jumlahnya tidak banyak. Setiawan (2019) menulis artikel berjudul "Ruang Tanpa Batas: Sejarah dan Politik Memori pada *Public Space* Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949". Dalam artikel tersebut, Setiawan mencoba untuk menggali hubungan antara kekuasaan dengan memori kolektif berupa monumen. Dengan menggunakan metode penelitian kritis, Setiawan melihat bahwa monumen Serangan Umum 1 Maret merupakan mnemonik untuk mengingat peristiwa terkait. Selain itu, ia melihat bahwa narasi yang dibuat pun didasarkan pada kepentingan penguasa saat itu, yakni Soeharto. Narasi itu pun tetap hidup meskipun Orde Baru telah lengser. Ada kesamaan objek formal antara penelitian Setiawan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni memori kolektif tentang Serangan Umum 1 Maret. Meski demikian, ruang penelitiannya bisa dikatakan berbeda. Penelitian ini akan membahas memori kolektif di ruang internet yang memiliki sifat lebih cair dan lebih dinamis.

Selain itu, penelitian terkait yang membahas hubungan memori kolektif dan media baru juga telah dilakukan sebelumnya. Hakimul Ikhwan, dkk (2019) mencoba meneliti kontestasi memori tentang Peristiwa 1965 dalam media baru. Dengan pendekatan *mixed-methods,* studi ini menemukan bahwa media baru menjadi ruang alternatif untuk memediasi narasi kolektif tentang peristiwa terkait. Ada pula penelitian Parahita dan Yulianto (2020) yang membahas bagaimana YouTube berhubungan dengan politik ingatan tentang Peristiwa 1965 di Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa meskipun menjadi media baru dan arena untuk menentang memori

vernakular tentang pembantaian 1965/66, YouTube juga sering digunakan untuk memajukan narasi Negara. Secara lebih luas, memori monumental 1965/66 di YouTube melibatkan tiga aktor, yakni aktor negara, komunitas film, dan *vigilante*. Kedua penelitian tersebut juga memiliki kedekatan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni berkaitan dengan media baru sebagai ruang kontestasi memori kolektif di internet. Namun, penelitian ini memiliki objek formal yang berbeda, yakni peristiwa Serangan Umum 1 Maret, dengan menekankan pada peran media baru dalam membangun, mempertahankan, dan memperdebatkan memori kolektif warganet sebagai audiens. Karena itu, penelitian ini akan mencoba mengisi kekosongan penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan tiga tahapan utama, yakni pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri video yang memuat peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Youtube. Penulis memasukkan kata kunci "serangan umum 1 Maret" di kolom pencarian, kemudian mengaktifkan filter *view count* untuk mendapatkan video dengan jumlah penonton terbanyak. Pencarian dilakukan pada kurun waktu 1 Januari sampai 20 Januari 2025 dan didapat 30 video teratas dengan berbagai narasi.

Penulis pun melakukan reduksi data untuk menentukan 5 video sebagai sampel. Reduksi dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman narasi video. Adapun lima video tersebut adalah "Letnan Komarudin, pahlawan yang akhirnya jadi preman Tanjung Priok", "Janur Kuning", "Dutch vs Indonesian Army 🇮🇩v🇳🇱 | Serangan Umum 1 Maret 1949", "Dimanakah Beliau saat Perang Berlangsung? Serangan Umum 1 Maret 1949", dan "Menepis Argumen Fadli Zon: Soeharto Telah Memanipulasi Sejarah Serangan Umum 1 Maret". Untuk melengkapi data, penulis pun mengumpulkan berbagai komentar teratas pada video-video tersebut. Kemudian, penulis melakukan analisis konten deskriptif dan analisis naratif terhadap data yang telah diperoleh terkait memori kolektif Serangan Umum 1 Maret. Cara ini dilakukan untuk melihat bagaimana kontestasi narasi yang terbentuk dan dampaknya bagi audiens dalam digital baru.

Pembahasan

Memori Kolektif dan Media Baru

Memori kolektif merupakan ingatan yang dimiliki oleh suatu kelompok mengenai masa lalunya dan bagaimana suatu kelompok memberi makna terhadap masa lalunya. Menurut

Halbwachs (1980), memori bukanlah ingatan yang dimiliki oleh individu semata, melainkan terbentuk melalui berbagai kerangka sosial, seperti keluarga, agama, dan institusi. Dengan kata lain, individu mengingat dalam konteks kolektif. Ingatan mereka dikonstruksi melalui interaksi sosial, seperti dialog, narasi budaya, dan tradisi (Halbwachs, 1992). Institusi sosial berperan penting dalam menjaga dan memperkuat memori kolektif. Sekolah, organisasi keagamaan, pemerintah, dan media menjadi media utama dalam mentransmisikan memori kolektif, baik dalam satu generasi maupun lintas generasi. Buku pelajaran, monumen, peringatan, dan ritual digunakan untuk membentuk pemahaman publik terhadap suatu peristiwa sejarah tertentu (Halbwachs, 1980).

Melalui cara-cara tersebut, masyarakat membangun identitas dan rasa kebersamaan. Namun, Halbwachs menekankan bahwa memori kolektif tidak bersifat netral, melainkan selektif. Masyarakat cenderung menyoroti aspek tertentu dari masa lalu dan mengabaikan yang lain. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi. Oleh karena itu, memori kolektif bukan hanya sekadar rekaman masa lalu yang objektif, melainkan konstruksi sosial. Pandangan ini sejalan dengan Sontag (2003), yang menyatakan bahwa memori kolektif bukan sekadar tentang apa yang diingat, tetapi juga tentang apa yang telah "ditetapkan" oleh masyarakat. Maksudnya, masyarakat menentukan ingatan mana yang perlu dilestarikan dan mana yang tidak.

Munculnya media baru menyebabkan adanya perubahan terhadap bagaimana memori kolektif dikonstruksi. Media baru, seperti YouTube, menjadi arena untuk kontestasi antara narasi dominan terhadap berbagai narasi alternatif melalui berbagai video (Hakimul Ikhwan, dkk, 2019; Parahita dan Yulianto, 2020). Dengan kata lain, *platform* ini mampu menciptakan narasi yang lebih terdesentralisasi sehingga memungkinkan audiens untuk menafsirkan kembali narasi dominan yang ada (Hoskins, 2011). Karena semua orang bisa mengunggah narasi apa pun, proses penciptaan memori kolektif pun lebih bersifat partisipatif dan terfragmentasi. Dengan demikian, tak heran apabila media baru menjadi ruang munculnya berbagai perspektif dan narasi alternatif (Assmann, 2010). Van Dijck (2007) memperkenalkan terma *mediated memory* atau memori yang termediasi. Dalam konteks ini, video memiliki peran untuk menghubungkan individu dengan memori kolektif yang nantinya akan membuatnya memikirkan ulang tentang konstruksi identitasnya.

Landsberg (2004) memperkenalkan konsep yang disebut *prosthetic memory* atau memori prostetik. Konsep ini mengacu pada memori budaya publik yang muncul ketika audiens terlibat dalam narasi sejarah yang tidak mereka alami. Memori ini tidak diwariskan, tetapi dimediasi

melalui berbagai representasi, seperti fotografi, museum, dan film. Representasi ini memungkinkan audiens untuk mengalami keterhubungan terhadap masa lalu (Dresler, 2023). Saat keterhubungan tersebut terjadi, audiens menempatkan dirinya pada momen sejarah yang lebih besar. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa YouTube memiliki kemiripan dengan museum karena menyimpan berbagai video tentang memori kolektif. Melalui *platform* ini, warganet bisa mengakses berbagai memori kolektif, termasuk memori tentang Serangan Umum 1 Maret. Siapa saja pun bisa menonton video dengan berbagai narasi dan bisa menjadi ajang untuk terhubung dengan masa lalu. Namun, audiens juga bukan agen yang pasif hanya memahami narasi semata, melain aktif membentuk subjektivitas diri dan pandangan politik tertentu (Landsberg, 2004).

Grand narration Serangan Umum 1 Maret

Sebagai pihak penguasa, pemerintah selalu mengeluarkan *grand narration* atau narasi besar tentang memori kolektif mengenai peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Narasi-narasi tersebut tersebar dalam berbagai teks budaya, mulai dari film, teks sejarah, monumen, hingga hari peringatan. Namun, *grand narration* yang ada tidak bersifat statis dan selalu ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa. Pada masa Orde Baru, narasi utama yang dibuat oleh pemerintah hadir dalam film berjudul *Janur Kuning*. Film tersebut dirilis pada tahun 1979 dan disutradarai oleh Alam Rengga Surawidjaja. Secara garis besar, film ini menceritakan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari tangan Belanda dan sekutu. Meskipun demikian, cerita yang ditonjolkan ada pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Judul *Janur Kuning* diambil dari tanda yang dikenakan oleh para pejuang ketika itu.

Film ini dibuka dengan Jenderal Sudirman yang ditandu oleh para prajuritnya karena sakit keras saat melakukan perang gerilya melawan Belanda. Jenderal Sudirman pun memanggil Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Komandan Brigade X dan menyampaikan kekhawatirannya atas Perjanjian Roem Royen yang mungkin tidak akan berhasil. Karena itu, Jenderal Sudirman pun mengusulkan untuk terus melakukan perang gerilya sampai Belanda dan sekutu pergi dari Indonesia. Namun, Soeharto melihat peluang untuk masuk ke ibu kota yang saat itu Yogyakarta karena Belanda telah angkat kaki. Jenderal Sudirman pun bersedia untuk kembali ke ibu kota dengan ditandu. Dalam film ini, sosok Soeharto digambarkan sebagai sosok pahlawan di balik Serangan Umum 1 Maret. Dalam penelitian Ashrianto (2016), dapat dilihat bahwa film ini merepresentasikan ideologi kekuasaan Soeharto yang digambarkan melalui karakter sosok Soeharto. Karakter Soeharto di dalam film memiliki sifat-sifat yang positif, seperti sebagai

pengambil keputusan, pejuang sejati, suri tauladan, dan pengayom rakyat kecil. Film ini pun diputar selama bertahun-tahun dan menjadi sumber sejarah bagi para pelajar.

Selain film *Janur Kuning,* narasi utama tentang Serangan Umum 1 Maret yang menonjolkan sosok Soeharto juga terlihat dalam buku yang ditulis oleh Seskoad. Buku yang berjudul *Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta, Latar Belakang dan Pengaruhnya* ini diterbitkan pada tahun 1991. Menurut Sri Margana, dkk (2022), buku tersebut digagas oleh Sekolah Staf dan Komando TNI AD. Dari 41 sumber utama, 21 di antaranya bersumber dari arsip militer. Karena itu tak heran jika buku ini cukup kental dengan sisi militeristik. Beberapa tokoh utama yang dibahas di dalamnya adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, Jenderal Soedirman, Jenderal Mayor A.H.Nasution, Letkol Soeharto, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sosok Soeharto juga cukup menonjol. Ia digambarkan mampu melakukan berbagai langkah praktis yang didukung oleh rakyat dan pamong praja (Sri Margana, dkk, 2022).

Akan tetapi, selepas Orde Baru tumbang, narasi mengenai Serangan Umum 1 Maret pun mengalami pergeseran. Empat bulan setelah Orde Tumbang, Menteri Penerangan saat itu, Yunus Yosfiah, mengumumkan bahwa film *Janur Kuning* tidak lagi dijadikan tontonan wajib. Ia berpendapat bahwa film tersebut tidak lagi relevan terhadap zaman reformasi (Matanasi, 2020). Berbagai teks sejarah alternatif pun diterbitkan oleh para peneliti untuk "mengoreksi" narasi mengenai Serangan Umum 1 Maret (Hutagalung, 2010; Pour, 2010). Terbaru, Sri Margana, dkk (2022) menyusun naskah akademik *Serangan Umum 1 Maret 1949.* Naskah ini dibuat sebagai dasar untuk penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 lalu. Dalam naskah akademis tersebut, secara eksplisit Sri Margana dkk (2022) mengatakan bahwa penulisan tersebut bertujuan untuk mengoreksi sejarah lama yang cenderung menonjolkan atau mengkultuskan tokoh tertentu. Mereka memang tidak menunjuk langsung bahwa tokoh yang dimaksud adalah Soeharto. Namun, apabila melihat beberapa tokoh utama yang disebutkan di dalamnya, nama Soeharto tidak tercantum. Begitu pula dalam Keppres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Keppres tersebut juga absen nama Soeharto.

Secara garis besar, narasi yang dibangun dalam naskah akademik tersebut dibagi menjadi ide dan pemantapan penyerangan dan serangan umum. Pemantapan penyerangan menggambarkan bagaimana rakyat bahu-membahu bekerja keras untuk mempersiapkan serangan tersebut. Dana didapat dari patungan dari berbagai pihak, termasuk Soeharto yang memimpin penyerangan tersebut. Selain itu, dalam buku tersebut dijelaskan juga peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam penyerangan tersebut. Sebagai Raja di Yogyakarta, Sri Sultan

Hamengkubuwono IX memberikan harta bendanya untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Ia juga menolak untuk bekerja sama dengan Belanda. Beberapa kutipan dari para tokoh kunci yang memuji Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun dibubuhkan di dalam buku ini.

Bagian penyerangan ini pun dibagi menjadi tiga subbab, yakni persiapan, pelaksanaan penyerangan, dan akhir serangan. Tahap persiapan menggambarkan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh serangan tersebut, mulai dari pasukan, logistik, hingga strategi penyerangan yang akan dilakukan. Sementara itu, pelaksanaan penyerangan menggambarkan penyerangan terhadap Belanda secara detail. Dalam buku tersebut digambarkan bagaimana penyerangan dimulai hingga membuat pihak Belanda melemah. Subbab ini menjelaskan kegigihan pasukan TNI hingga berhasil mengalahkan tentara Belanda. Kemudian, subbab akhir serangan membahas tentang Belanda yang kewalahan menghadapi tentara Indonesia. Akibatnya, Belanda pun mengirimkan pasukan tambahan dari Magelang dan Semarang. Kemudian, tentara Indonesia pun mulai meninggalkan Kota Yogyakarta karena tujuan dari penyerangan tersebut memang tidak untuk menduduknya. Serangan tersebut memang mengejutkan Belanda dan menuduh Sri Sultan Hamengkubuwono turut serta dalam penyerangan tersebut. Tudingan itu pun langsung ditepis. Keberhasilan penyerangan ini pun diapresiasi oleh banyak pihak.

Narasi Serangan Umum 1 Maret dalam Media Baru

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam metode penelitian. Video yang didapat melalui pencarian di YouTube ada 30 video. Meski demikian, sampel yang diambil hanya 5 video dengan mempertimbangkan keberagaman narasi. Kelima video tersebut adalah "Letnan Komarudin, pahlawan yang akhirnya jadi preman Tanjung Priok", "Janur Kuning", "Dutch vs Indonesian Army 🇮🇩v🇳🇱 | Serangan Umum 1 Maret 1949", "Dimanakah Beliau saat Perang Berlangsung? Serangan Umum 1 Maret 1949", dan "Menepis Argumen Fadli Zon: Soeharto Telah Memanipulasi Sejarah Serangan Umum 1 Maret". Video-video tersebut diunggah dalam waktu yang berbeda-beda, yakni sekitar 3 bulan hingga 8 tahun yang lalu. Selain itu, tiap video juga memiliki narasi dan bentuk yang berbeda-beda.



Gambar 1. Poster *Janur Kuning*
Sumber:
https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220305152149-220-767160/janur-kuning-film-citra-soeharto-berlatar-serangan-umum-1-maret-1949

Dari video yang dijadikan sampel, ada beberapa video yang masih memuat narasi yang dibuat oleh Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari video yang berjudul "Janur Kuning". Video tersebut diunggah oleh akun Nusantara Kreatif dan telah ditonton sebanyak 2,8 juta kali. Sejak diunggah pertama kali, video tersebut telah mendapatkan komentar sebanyak 2469 komentar per 20 Januari 2025. Video ini merupakan versi lengkap dari film *Janur Kuning* yang dirilis pada tahun 1979. Meski demikian, ada perbedaan durasi dari versi yang asli. Dalam versi YouTube ini, ada pemotongan durasi sekitar 24 menit dari aslinya. Pemotongan yang kentara terlihat pada *opening* dan *credit title* di bagian akhir. Meski demikian, pemotongan tersebut tidak mengubah substansi dari film. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, film ini menonjolkan narasi mengenai peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret. Karena itu, bisa dikatakan bahwa narasi yang dimuat menggunakan perspektif pemerintah Orde Baru. Meskipun demikian, film tersebut diminati. Hal ini terbukti dengan jumlah penayangan yang mencapai 2,8 juta kali, padahal film tersebut memiliki durasi yang cukup panjang. Fenomena ini terjadi karena film propaganda memang menjadi komoditas populer di YouTube (bdk. Hakimul Ikhwan, dkk, 2019).



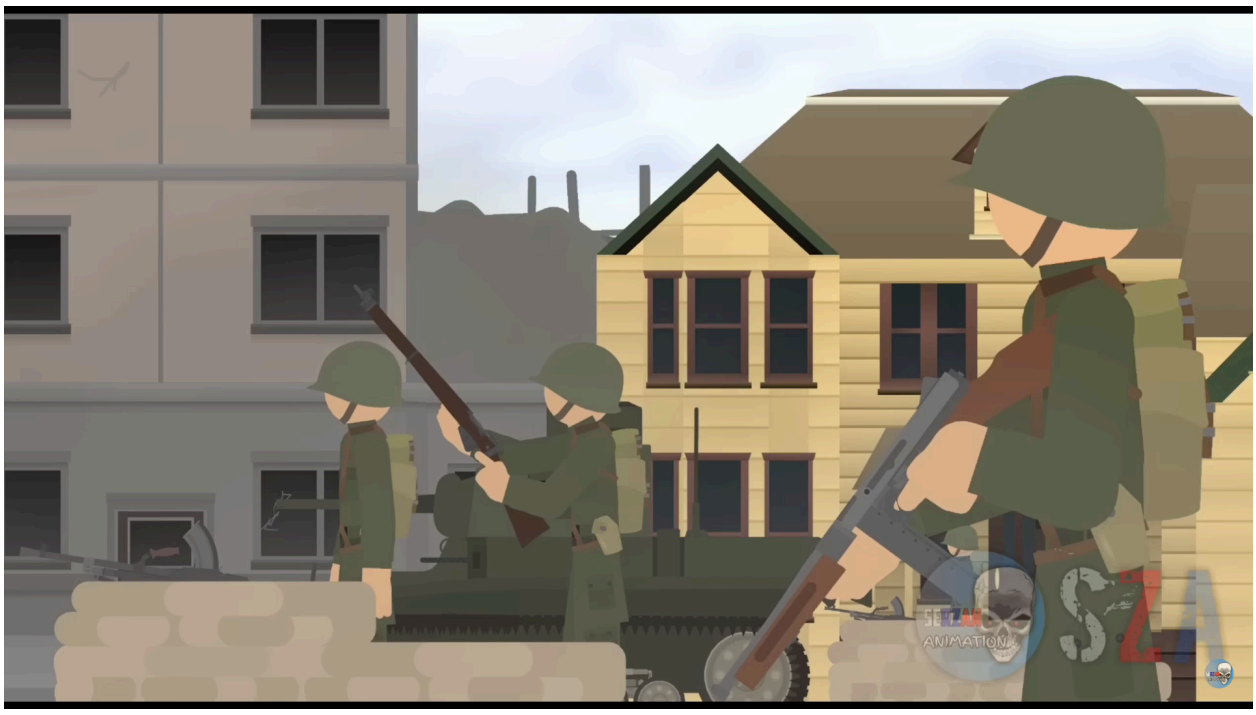
Gambar 2. Tangkapan layar video *Di Manakah Beliau saat Perang Berlangsung? Serangan Umum 1 Maret 1949*
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=rcnw-n_WQJc

Video lain yang memuat narasi dari perspektif lainnya adalah video berjudul "Di Manakah Beliau saat Perang Berlangsung? Serangan Umum 1 Maret 1949". Video tersebut diunggah oleh akun Pegawai Jalanan dan diunggah pada 24 Agustus 2021. Sejak diunggah pertama kali, video ini telah ditonton sebanyak 173 ribuan kali dan mendapatkan komentar sebanyak 876 komentar. Dari segi judul, kata "beliau" mengacu pada sosok Soeharto. Karena itu, video ini memang berfokus membahas peran Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret tersebut. Secara garis besar, video tersebut menggabungkan narasi berupa tulisan dan audio dengan beberapa *footage* yang membahas Agresi Militer II. Kemudian, narasi menjelaskan secara singkat kondisi saat terjadi penyerangan dan pentingnya peristiwa tersebut bagi sejarah Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, narasi pun mulai mengarah pada peran Soeharto dalam peristiwa tersebut. Uniknya, narasi video memperdebatkan peran Soeharto menurut versi Orde Baru dan beberapa versi yang bertentangan. Meski demikian, pada akhirnya, narator menjadikan buku biografi Soeharto, *Pak Harto: The Untold Story*, sebagai narasi yang dipilih. Menurut buku tersebut, Soeharto memiliki peran penting dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Soeharto digambarkan telah bergerilya di hutan untuk melawan Belanda sebelum peristiwa tersebut pecah. Buku tersebut juga mengatakan bahwa narasi yang berseberangan muncul dari orang-orang yang tidak menyukai Soeharto.



Gambar 3. Tangkapan layar video *Menepis Argumen Fadli Zon: Soeharto Telah Memanipulasi Sejarah Serangan Umum 1 Maret*
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=gazqIwaTTUg

Video berjudul "Menepis Argumen Fadli Zon: Soeharto Telah Memanipulasi Sejarah Serangan Umum 1 Maret" memuat narasi yang berseberangan dengan narasi versi Orde Baru. Video tersebut diunggah oleh akun Kanal Anak Bangsa dan telah ditonton 169 ribuan kali. Sejak diunggah pada tahun 2022 lalu, komentar yang masuk ada 1269 komentar. Video ini sebenarnya merespons polemik yang muncul saat Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah muncul Keppres tersebut, politikus Fadli Zon memberikan komentar melalui akun Twitter. Ia memprotes absennya nama Soeharto dalam Keppres tersebut, padahal ia menilai Soeharto memiliki peran penting di dalamnya. Konsep video ini memiliki format *talkshow* sehingga berbeda dengan format video lainnya. Video tersebut memuat seorang *host* dan narasumber Batara R Hutagalung, sejarawan asal Indonesia. Dalam video ini, narasi yang dibangun menyebutkan bahwa penggagas dari Serangan Umum 1 Maret bukanlah Soeharto, seperti yang dinarasikan oleh pemerintah Orde Baru. Namun, penggagas utamanya adalah Jenderal Sudirman. Meski demikian, Soeharto juga tetap berperan sebagai pelaksana penyerangan di Yogyakarta.



Gambar 4. Tangkapan Layar video Dutch vs Indonesian Army 🇮🇩v🇳🇱 | Serangan Umum 1 Maret 1949 | Stickman animation
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=MfKHryHqyAo

Kemudian, narasi lain juga digambarkan dalam video berjudul "Dutch vs Indonesian Army 🇮🇩v🇳🇱 | Serangan Umum 1 Maret 1949". Video tersebut diunggah oleh akun Serzan Animation dan telah ditonton sebanyak 218 ribuan kali. Video ini juga memiliki format yang berbeda jika dibandingkan dengan video-video lainnya, yakni memilih format animasi, dan memilih tidak membicarakan peran Soeharto di dalamnya. Secara singkat, video ini berfokus pada detik-detik penyerangan yang dilakukan pada 1 Maret 1949 tersebut. Atmosfer saat perang menjadi narasi utama. Selain itu, video ini juga menitikberatkan heroisme para pejuang Indonesia yang berhasil memukul mundur tentara Belanda. Peristiwa ini menegaskan posisi Indonesia di mata dunia.



Gambar 5. Tangkapan layar video *Letnan Komarudin, pahlawan yang akhirnya jadi preman Tanjung Priok*
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=dk_5XfFNGck

Narasi lain juga digambarkan pada video "Letnan Komarudin, pahlawan yang akhirnya jadi preman Tanjung Priok". Alih-alih membicarakan Soeharto, video ini membawa narasi salah satu prajurit yang berperan dalam penyerangan tersebut, yakni Letnan Komarudin. Diceritakan bahwa saat persiapan untuk melakukan penyerangan, Letnan Komarudin lupa bahwa hari tersebut tanggal 28 Februari. Saat sirine berbunyi, tiba-tiba ia dan pasukannya melakukan penyerangan dan terjadi pertempuran hebat dengan Belanda. Hal ini pun sempat membuat Soeharto marah dan memerintahkan pengawalnya untuk mendatangi Letnan Komarudin dan memberitahu bahwa ia salah tanggal. Namun, kesalahan tanggal itu malah menjadi keuntungan bagi Indonesia. Belanda berpikir bahwa serangan yang dilakukan hanya kecil seperti yang dilakukan oleh Letnan Komarudin. Lalu, narasi banyak membicarakan tentang Letnan Komarudin. Misalnya, adanya narasi bahwa Letnan Komarudin adalah sosok yang nyentrik dan memiliki kesaksian kebal terhadap peluru. Namun, nasib Letnan Komarudin setelahnya cukup menyedihkan. Ia dituding terlibat dalam Pemberontakan Darul Islam hingga akhirnya, ia pun menjadi preman di Tanjung Priok. Video yang memuat mengenai sosok Letnan Komarudin ini menjadi video yang paling populer di Youtube dalam pencarian. Sejak diunggah pertama kali pada 2 Maret 2016, video ini telah ditonton sebanyak 5,79 juta kali. Selain itu, video ini juga telah mendapat 1876 komentar.

Media baru sebagai ruang partisipatif

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kelima video yang dijadikan sampel penelitian memiliki berbagai narasi. Ada video yang melanjutkan narasi yang dibuat oleh Orde Baru (*Janur Kuning, Dimanakah Beliau saat Perang Berlangsung? Serangan Umum 1 Maret 1949*), ada yang menentangnya (*Menepis Argumen Fadli Zon: Soeharto Telah Memanipulasi Sejarah Serangan Umum 1 Maret*), ada pula yang memberikan alternatif memori kolektif dengan menitikberatkan aktor lain dan sudut pandang lain (*Letnan Komarudin, pahlawan yang akhirnya jadi preman Tanjung Priok, Dutch vs Indonesian Army 🇮🇩v🇳🇱 | Serangan Umum 1 Maret 1949*). Berbagai memori kolektif yang dinarasikan dalam video-video tersebut menimbulkan berbagai respons dari para penonton. Aktivitas menonton video yang dilakukan oleh audiens tersebut disebut oleh Landsberg (2004) sebagai "tindakan prostetik", yakni mengakses berbagai memori kolektif yang tidak pernah dialami audiens secara langsung.

Memori ini disebut prostetik karena seperti anggota tubuh buatan. Memori ini berasal dari luar pengalaman hidup audiens, tetapi diambil dan dipakai melalui teknologi memori budaya massa (Landsberg, 2004). Namun, perlu dicatat bahwa ada subjektivitas yang memainkan peran bagi para audiens. Audiens tidak hanya menerima secara pasif, tetapi ada negosiasi dan kontestasi secara politis. Memori ini pun tidak bergantung pada pengalaman hidup individu atau kelompok tertentu sehingga bisa diakses oleh kelompok yang lebih luas dan besar. Dengan demikian, memori prostetik tidak dibatasi oleh kepemilikan kelompok tertentu seperti memori kolektif pada umumnya (Dresler, 2024). Karena itu, dalam subbab ini, penulis akan membahas bagaimana subjektivitas warganet dalam membangun, mempertahankan, dan memperdebatkan memori kolektif tentang Serangan Umum 1 Maret.

YouTube tidak hanya menjadi *platform* untuk menonton video-video tersebut. Namun, fitur komentar di dalamnya juga dimanfaatkan oleh para warganet sebagai arena kontestasi memori kolektif tentang memori terkait. Fitur ini memberikan partisipasi aktif warganet untuk terlibat dalam memori tersebut. Dalam video *Dimanakah Beliau saat Perang Berlangsung? Serangan Umum 1 Maret 1949,* terdapat banyak komentar yang mencerminkan adanya kerinduan terhadap rezim Orde Baru dan merayakan heroisme kepemimpinan Soeharto. Hal ini terlihat dalam komentar-komentar berikut.

> Jika kalian mencari kesalahan Pak Harto, ya Pak Harto punya kesalahan. Karena beliau manusia biasa yang tak luput dari salah. Jika kalian mencari kebaikan Pak Harto maka kebaikannya sangat banyak. Jika kalian mencari jasanya maka jasanya tak terhingga. Begitulah manusia, yang benci dan berseberangan akan selalu fokus pada kesalahan dan

> keburukan, dan yang mencintai akan fokus pada kelebihan dan kebaikan, begitulah dunia ini. (@Elangpengembara-l6k)
>
> Kami seluruh generasi transmigrasi Kalbar, khususnya Kab. Ketapang, mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang telah memperhatikan orang susah dan sekaligus mengangkat orang susah menjadi lebih baik seperti saat ini. Alfatihah untuk beliau dan seluruh petinggi negara dan para pejuang yang telah wafat. Amin Ya Allah. (@zhainelzago1335)
>
> Yogyakarta selain ibu kota negara Indonesia saat itu juga tempat kelahiran Pak Harto. Tentu dengan segala kemampuan, daya upaya, Pak Harto dengan pasukannya melawan tentara Belanda, guna mempertahankan kemerdekaan tanah air, tanah kelahirannya. Itulah bukti nyata Pak Harto itu pejuang, patriot, pembela negara, dan bangsa sejati. (@sarahyulia3540)
>
> Pak Harto adalah pahlawan nasional. Aktor keberhasilan serangan umum 1 Maret yang membuat dunia internasional mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. Terima kasih Pak Harto atas jasamu. (@valensivcc7840)
>
> Orang hebat. Tidak mungkin terlahir kembali. Kalaupun ada, masih mimpi. Buktinya sampai saat ini, belum ada sosok yang bisa menyamai kehebatan Jenderal satu ini. Soeharto is the best. (@satrionazula748)

Dari beberapa komentar di atas dapat dilihat bahwa narasi yang diingat oleh para warganet adalah tentang sosok Soeharto alih-alih peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Bagi mereka, Soeharto merupakan sosok ideal yang memiliki jasa penting dalam Serangan Umum 1 Maret. Kondisi ini mengindikasikan adanya pengkultusan Soeharto, sesuai dengan narasi yang dibuat oleh rezim Orde Baru.

Meski demikian, tidak semua warganet mengkultuskan Soeharto setelah menonton video Serangan Umum 1 Maret yang sesuai dengan narasi Orde Baru. Hal ini terlihat dari berbagai komentar yang ditulis oleh para warganet dalam video *Janur Kuning*. Seperti disebutkan sebelumnya, video tersebut merupakan film propaganda yang dibuat rezim Orde Baru untuk mengkultuskan sosok Soeharto. Namun, film tersebut meningkatkan nasionalisme para warganet, seperti tampak pada komentar berikut.

> Lama enggak nonton. Terakhir nonton masih SD. Rencananya besok malam nonton bareng di depan rumah pakai proyektor. Biar anak-anak milenial enggak buta sejarah bangsa Indonesia. Semoga arwah para pahlawan. Perjuangan nasional diterima di sisi Allah SWT, diangkat segala dosa-dosanya, dan diterima amal ibadahnya. (@onceduatujuhcustom657)
>
> Sangat hebat Letnan Komarudin, semua pejuang sangat hebat. Semoga pejuang-pejuang yang sudah meninggal diterima di sisi Allah. (@muhamadyasinirmadia194)

> Mantap ini. Supaya tidak lupa dengan perjuangan para pahlawan. Untuk refleksi menghadapi tantangan ke depan. Salam Perjuangan. (@donatusbagusrusmadhani3809)
>
> Terima kasih banyak buat para pahlawan Indonesia yang telah berjuang untuk Kemerdekaan Indonesia. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah. (@qiasarrsmn9012)

Apabila dilihat dari komentarnya, memori yang dibentuk tidak lagi berfokus pada Soeharto meskipun video tersebut berisi propaganda Orde Baru. Warganet memilih untuk mengingat peristiwa Serangan Umum 1 Maret bukan sebagai keberhasilan satu sosok, tetapi semua pejuang. Kondisi ini memunculkan subjektivitas kolektif sebagai rakyat Indonesia yang berterima kasih terhadap pejuang.

Meski demikian, tidak berarti memori tentang Soeharto tidak ada. Masih ada beberapa warganet yang mengingat Soeharto dalam peristiwa tersebut meskipun jumlahnya sedikit. Walaupun ada perbedaan bagaimana peristiwa tersebut diingat oleh warganet, tidak ada kontestasi wacana di dalamnya. Hal ini dapat dilihat secara positif sebagai langkah toleransi akan keberagaman wacana. Lansberg (2004) berpendapat bahwa dalam memori prostetik, identifikasi dibangun dari praktik empati. Dari situ memori individu mengidentifikasi dirinya secara menyeluruh melalui alur cerita atau sehingga ia terbawa dari tren perilaku yang biasa. Dari penjelasan di atas, rasa terima kasih yang diberikan merupakan bentuk praktik etis atas perjuangan yang diberikan kepada para pejuang yang terlibat. Hal yang sama juga terlihat dalam video *Menepis Argumen Fadli Zon: Soeharto Telah Memanipulasi Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949*. Video ini memang berisi narasi yang mencoba mengoreksi narasi Orde Baru. Warganet pun banyak yang menerima narasi yang dibuat di dalam video sebagai koreksi yang baru. Penerimaan yang dilakukan warganet disebabkan narasumber di dalamnya yang memang dikenal kredibel, yakni Batara R. Hutagalung. Ia juga memberikan berbagai referensi yang memperkuat validitas narasi yang dibuat.

Video "Letnan Komarudin, pahlawan yang akhirnya jadi preman Tanjung Priok" pun ditanggapi secara sama oleh warganet. Banyak komentar yang menyetujui narasi yang dibuat dalam video. Uniknya, video ini merupakan video yang paling populer. Popularitas tersebut tidak bisa lepas dari narasi alternatif yang ditawarkan oleh pembuat video. Alih-alih hanya membicarakan perkara penyerangan atau tokoh-tokoh besar, seperti Soeharto dan Jenderal Sudirman, video ini membahas tokoh yang jarang dibicarakan, yakni Letnan Komarudin. Dalam narasi yang dibuat, Letnan Komarudin digambarkan sebagai sosok yang "dilupakan" jasanya karena dianggap terlibat dalam Pemberontakan Darul Islam. Hal ini membuat nasib Letnan

Komarudin pun berakhir sebagai preman di Tanjung Priok. Kondisi inilah yang menarik warganet dan mengundang empati. Warganet berhasil melakukan identifikasi imajinatif sehingga menimbulkan empati terhadap tokoh yang dibicarakan, yakni Letnan Komarudin. Peran empati dalam memori prostetik cukup penting dalam proses identifikasi (Landsberg, 2004).

Hal berbeda ditemukan dalam video *Dutch vs Indonesian Army 🇮🇩v🇳🇱 | Serangan Umum 1 Maret 1949*. Video tersebut berfokus pada perang saat Serangan Umum 1 Maret. Pembuat video mencoba memberikan gambaran atmosfer saat perang dan kondisi imajinatif melalui animasi menarik. Apabila dilihat dari formatnya, dapat dilihat bahwa video tersebut memang dibuat untuk segmentasi anak-anak. Akibatnya, warganet hanya melihat video tersebut hanya sebagai hiburan semata. Komentar yang muncul pun tidak membicarakan narasi yang dibangun, tetapi berfokus pada kualitas animasinya. Melalui format ini, warganet gagal melakukan identifikasi terhadap masa lalunya.

Penutup

Media baru, khususnya Youtube, menjadi ruang kontestasi memori kolektif tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret. *Platform* ini memiliki peran penting dalam pelestarian memori kolektif. Memori kolektif tersebut dapat dilihat dari beragamnya narasi video yang hadir di dalamnya. Dari sampel video yang diambil, dapat dilihat adanya narasi versi Orde Baru yang dipertahankan, ada pula narasi yang mencoba untuk mengoreksi narasi orde baru. Selain itu, narasi lain berkutat pada narasi alternatif tokoh dan peristiwa yang lebih umum. Narasi-narasi tersebut menjadi memori prostetik yang digunakan oleh warganet untuk mengidentifikasikan diri terhadap masa lalu. Dalam proses identifikasi tersebut, empati menjadi kunci penting yang bisa membangun keterhubungan dan menentukan subjektivitas warganet.

Kondisi ini pun membuat warganet memiliki keberpihakan terhadap pihak yang terpinggirkan, seperti yang terlihat dalam video *Letnan Komarudin, pahlawan yang akhirnya jadi preman Tanjung Priok*. Selain itu, format video yang dibuat juga bisa memengaruhi proses identifikasi yang dilakukan. Pada video *Dutch vs Indonesian Army 🇮🇩v🇳🇱 | Serangan Umum 1 Maret 1949* terlihat bahwa format animasi gagal menumbuhkan empati. Di sisi lain, *platform* Youtube menjadi ruang bebas untuk membuat narasi tentang Serangan Umum 1 Maret. Beragamnya narasi di sini juga bisa berpotensi mengalami keterpecahan. Hal ini sebenarnya sudah terlihat dari warganet yang terkelompokkan berdasarkan narasi masing-masing. Karena itu, pemerintah bisa memanfaatkan Youtube sebagai langkah praktis untuk memproduksi narasi resmi melalui pendekatan empati tentang peristiwa terkait. Namun, perlu diingat bahwa narasi yang

dibuat setidaknya harus mempertimbangkan etika memori prostetik yang disampaikan oleh Landsberg (2004), yakni kemajemukan dan mengutamakan pihak-pihak terpinggirkan.

Referensi

Ashrianto, Panji Dwi. 2016. "Analisis Semiotika Film Janur Kuning sebagai Representasi Ideologi Kekuasaan Soeharto" *NIRMANA*, Vol. 16, No. 1, Januari, 1-11

Assmann, A. 2010. *Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives*. Cambridge University Press.

Batara R. Hutagalung. 2010. *Serangan Umum 1 Maret 1949 Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: LKiS

Dresler, E. 2024. "Prosthetic Memory: Children Remembering the Remnants of Suffering". *Visitor Studies*, 1–16. https://doi.org/10.1080/10645578.2024.2413336

Halbwachs, M. 1992. *On Collective Memory*. University of Chicago Press.

Halbwachs, M. 1980. *The Collective Memory.* Harper & Row.

Hoskins, A. 2011. "Media, Memory, Metaphor: Remembering and the Connective Turn." *Parallax*, 17(4), 19-31.

Ikhwan, H., Yulianto, V. I., & Parahita, G. D. 2019. "The contestation of social memory in the new media: a case study of the 1965 killings in Indonesia". *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 12(1), 3-16. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0010

Julius Pour. 2010. *Daarstoot Naar Djokja*, Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer. Jakarta: Kompas

Landsberg, A. 2004. *Prosthetic memory: The transformation of American remembrance in the age of mass culture.* Columbia University Press.

Löytömäki, S. 2013. "The law and collective memory of colonialism: France and the case of 'belated' transitional justice". *International Journal of Transitional Justice*, 7(2), 205–223. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijt005

Martina Safitry, dkk. 2022. *Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII*. Jakarta: Pusat Perbukuan

Matanasi, Petrik. 2020. "Reformasi Menghentikan Pemutaran Wajib Film Pengkhianatan G30S/PKI" https://tirto.id/reformasi-menghentikan-pemutaran-wajib-film-pengkhianatan-g30s-pki-f5kg

Olick, J.K., & Robbins, J. 1998. “Social Memory Studies: From 'Collective Memory' to the Historical Sociology of Mnemonic Practices.” *Annual Review of Sociology,* 24(1), 105-140.

Parahita, Gilang Desti dan Vissia Ita Yulianto. 2020. “The Treachery on YouTube: The Politics of Memory on New Media in Indonesia”, *Archipel*, 99 DOI: https://doi.org/10.4000/archipel.1677

Setiawan, Nanang. 2009. “Ruang Tanpa Batas: Sejarah dan Politik Memori pada Public Space Monumen Umum 1 Maret 1949”. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah* Vol. 11 (2), 184-203. https://doi.org/10.21831/moz.v11i2.45212

Sontag, S. 2003. Regarding the pain of others. Picador.

Sri Margana, dkk. 2022. *Naskah Akademik Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Van Dijck, J. 2007. *Mediated Memories in the Digital Age*. Stanford University Press.

Wirayudha, Randy. 2022. “Peran Soeharto dan Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara” https://historia.id/politik/articles/peran-soeharto-dan-keppres-hari-penegakan-kedaulatan-negara-vg83N

Sumber video:

https://www.youtube.com/watch?v=LaaUlGKp4Zs

https://www.youtube.com/watch?v=rcnw-n_WQJc

https://www.youtube.com/watch?v=gazqIwaTTUg

https://www.youtube.com/watch?v=MfKHryHqyAo

https://www.youtube.com/watch?v=dk_5XfFNGck

Biodata penulis

Galih Pangestu Jati lahir kini bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Untuk keperluan korespondensi, bisa dihubungi melalui surel Galih.pangestu@isi.ac.id.

Bung Hatta dan Bahasa Indonesia:

Kedaulatan Bahasa dan Relevansinya Pada Masa Kini

Hendra

Universitas Jambi

Abstrak

Era globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi dan informasi selalu membawa sisi positif dan negatif. Selain memudahkan kehidupan manusia, salah satu sisi negatif yang muncul adalah kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dengan ditandai banyaknya bahasa asing dan bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu menjadi kebanggaan dan menggambarkan rasa cinta tanah air. Padahal di masa lalu, para tokoh bangsa gigih memperjuangkan persatuan bangsa Indonesia yang ditunjukkan dengan menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan berdaulat. Salah satu tokoh terkenal yang memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia adalah Muhammad Hatta. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemikiran dan perjuangan Bung Hatta tentang bahasa Indonesia dan relevansinya di masa sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Data dikumpulkan dengan menelaah dan menganalisis secara mendalam berbagai buku, hasil penelitian, artikel, catatan, dan literatur lainnya. Data dianalisis secara deskriptif dan dibatasi pada topik pemikiran Bung Hatta dan kedaulatan bahasa Indonesia. Hasil telaah menunjukkan bahwa: 1) Bung Hatta selalu mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berdaulat. Hal ini terwujud dalam beberapa tindakan seperti selalu konsisten menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap tulisannya, dan mengkritik penggunaan istilah asing untuk orang Indonesia, 2) tantangan penggunaan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran perjuangan Bung Hatta dalam mencintai dan memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sekaligus bahasa yang berdaulat sehingga dapat menumbuhkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang tantangan penggunaan bahasa Indonesia, factor yang mempengaruhi penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul, dan solusi mengatasi hal tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak dalam merekonstruksikan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan.

Kata kunci: Kedaulatan, politik, sosial, budaya, Bung Hatta

Pendahuluan

Bahasa menjadi alat komunikasi yang sangat efektif dalam kehidupan. Sebagai makhluk social, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan ini menuntut manusia untuk berkomunikasi dalam memenuhi segala keperluan dan kebutuhan. Untuk mendapatkan kebutuhan ini, maka manusia membutuhkan alat bernama bahasa. Melalui bahasa, sesuatu bisa diungkapkan dan dibahas bersama dengan jelas baik yang dirasakan maupun yang tidak (S. L. Putri et al., 2023). Bahasa sendiri secara umum memiliki empat macam fungsi, yaitu sebagai media ekspresi diri, alat berkomunikasi, alat interaksi social dan sebagai kontrol sosial (Khuzaemah & Nurpadillah, 2022). Seiring berjalan waktu, bahasa tidak hanya sekadar menjadi alat komunikasi, namun menjadi identitas nasional. Identitas nasional tidak hanya sekadar bermakna simbol Negara atau ciri khas Negara saja, namun juga bernilai sejarah dan perjuangan dalam penciptaan bahasa itu sendiri hingga berkembang menjadi satu identitas.

Indonesia sebagai Negara berdaulat memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa ialah bahasa Indonesia. Pasal 36 ini kemudian dirincikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2019 mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia sehingga harus diimplementasikan dengan baik. Sebagai bahasa yang lahir dari perjuangan, bangsa Indonesia perlu melestarikan bahasa Indonesia dengan menggunakannya sesuai kaidah bahasa yang baik dan benar (Rani Gustiasari, 2018). Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, bahasa pemersatu, dan bahasa pengantar dalam pendidikan. (Astriyani, 2022)

Namun, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menghadapi tantangan di era globalisasi. Arus globalisasi yang ditandai dengan pesatnya pertukaran teknologi, informasi dan komunikasi memberikan semacam pisau bermata dua dalam peggunaan bahasa Indonesia. Satu sisi, budaya asing memberikan kesempatan untuk masyarakat menggali pengetahuan positif dari berbagai belahan dunia. Di sisi lain, globalisasi dapat memberikan dampak negatif. Dalam konteks budaya, dampak negatif ini berupa pengikisan budaya bangsa Indonesia yang disebabkan masuknya budaya asing tanpa filtrasi oleh masyarakat (Ramadhani et al., 2024).

Pengaruh negatif ini berdampak pula pada penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat. Menurut Madina et al., (2019), penggunaan bahasa Indonesia yang benar saat ini sangat

mengkhawatirkan. Perkembangan teknologi yang pesat membuat generasi muda saat ini kurang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Generasi muda lebih memilih untuk menggunakan istilah atau frasa yang sedang populer di berbagai belahan dunia. Bahasa asing yang masuk dalam budaya kita digunakan secara sepenuhnya tanpa mempertimbangkan apakah cocok dengan budaya Indonesia. Penggunaan bahasa asing ini membuat generasi muda akan lebih familiar dengan istilah-istilah asing ketimbang bahasa Indonesia sehingga jika dibiarkan dapat menyebabkan terkikisnya rasa kebanggan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia (Rachmawati et al., 2023).

Seyogyanya, Penguasaan terhadap bahasa asing di era sekarang menjadi satu hal yang harus dilakukan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan seperti bisa mengetahui budaya asing, memperoleh pengetahuan baru dan mempelajari seluk beluk dunia dngan bahasa tersebut. Namun penggunaannya tentu diharapkan tidak bercampurbaur dengan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing seharusnya tidak melupakan kaidah dan tata bahasa Indonesia. Sayangnya, justru hal inilah yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang berkomunikasi menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari didalam masyarakat.

Tidak hanya bahasa asing, dikalangan generasi muda muncul bahasa baru yang membuat mereka merasa lebih percaya diri dan sering digunakan. Bahasa tersebut yakni bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bahasa yang memiliki karakteristik khusus, menyimpang, aneh, tidak lazim dan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia (Suleman & Islamiyah, 2018). Salah satu contohnya seperti penggunaan kata-kata gue, lu, goblok dan sejenisnya yang tidak hanya aneh namun bertentangan dengan bahasa yang benar. Kebiasaan berbicara dengan bahasa gaul ini tentu lama-lama akan mengikis kebakuan bahasa Indonesia. Dampak buruknya bahasa Indonesia menjadi tidak sesuai aturan sehingga generasi kedepannya tidak paham tata bahasa yang baku dan benar (Riadoh, 2021). Keberadaan bahasa gaul ditengah masyarakat bisa mengancam posisi bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa informal yang dianggap lebih kontemporer dan sesuai dengan perkembangan zaman bisa mengikis kebiasaan masyarakat dalam berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar. Situasi ini dapat memunculkan sejumlah dampak buruk lainnya terkait penggunaan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari (Gaspersz et al., 2023).

Bahasa Indonesia seharusnya menjadi identitas bangsa yang harus dijunjung tinggi. Di era globalisasi, penting bagi masyarakat untuk memahami bahasa sebagai budaya yang harus dilestarikan. Pengaruh globalisasi seharusnya dapat diimbangi dengan pengetahuan tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga bahasa Indonesia menjadi sebuah kebanggaan bagi generasi muda. Hal ini penting karena masih banyak orang Indonesia yang melakukan kesalahan dalam berbahasa (Anggraini & Fauziyah, 2023). Tidak ada yang salah dengan menguasai bahasa asing, tetapi penting untuk tidak melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang lahir dari perjuangan tokoh bangsa yang gigih dalam mendaulatkan bahasa Indonesia. Banyak tokoh bangsa yang berjuang dan mencintai bahasa Indonesia dengan tetap menguasai bahasa asing.

Mohammad Hatta, yang dalam banyak buku sejarah akrab dipanggil Bung Hatta adalah salah satu sosok yang terkenal gigih memberdaulatkan bahasa Indonesia. Dalam berbagai literatur, Bung Hatta mencintai bahasa Indonesia dalam bentuk tindakan nyata. Selain konsisten menggunakan bahasa yang benar, tidak mencampuradukkan penggunaan bahasa Indonesia dan asing dalam berkomunikasi, Bung Hatta menujukkan kecintaan tersebut lewat berbagai tulisan beliau yang memperhatikan struktur bahasa Indonesia.

Artikel ini mengulas dan menggali kisah hidup Bung Hatta dalam menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran perjuangan Bung Hatta dalam mencintai dan memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sekaligus bahasa yang berdaulat. Selain itu artikel ini juga memberikan gambaran tentang tantangan penggunaan bahasa Indonesia, faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul, dan solusi mengatasi hal tersebut. Melalui ulasan ini diharapkan dapat memberikan referensi baru sekaligus menambah kecintaan kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas nasional.

Metode

Artikel ditulis dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian studi pustaka merupakan metode penelitian yang pemerolehan datanya didapat dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori dari berbagai literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian yang dimaksud (Adlini et al., 2022). Langkah-langkah yang dilakukan dalam studi pustaka menurut Zed dalam Sari dan Asmendri (2020) adalah menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, menyusun bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat hasil penelitian. Data dikumpulkan dengan menelaah dan menganalisis berbagai literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil

penelitian yang relevan dengan topik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman dengan prosedur: a) pengumpulan data; b) reduksi data; c) penyajian data; dan d) penarikan kesimpulan (Saleh, 2017).

Pada tahap pengumpulan data, penulis mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai literatur seperti jurnal, buku dan hasil penelitian dengan kategorisasi Bung Hatta, perkembangan bahasa Indonesia, pengaruh globalisasi, pengaruh bahasa asing, dan pengaruh bahasa gaul. Data kemudian diklasifikasikan dan direduksi untuk memilih informasi yang dianggap sesuai dengan tema tulisan. Data yang sudah direduksi kemudian disajikan untuk disusun hubungan antar tulisan secara terorganisir seperti penyajian data tentang kehidupan Bung Hatta, bagaimana ia menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tindakan nyata yang dilakukan dalam mendaulatkan bahasa Indonesia, menghubungkan perjuangan tersebut dengan bahasa Indonesia masa kini, dan lain sebagainya. Setelahnya, penarikan kesimpulan berupa hasil dan pembahasan tentang bagaimana bung Hatta mencintai dan mendaulatkan bahasa Indonesia serta relevansinya masa kini.

Hasil dan Pembahasan

1. Bung Hatta Memperjuangkan Bahasa Indonesia

Bung Hatta lahir di Bukttinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama asli Muhammad Athar. Ayahny, seorang keturuan ulama Batuhampar bernama Muhammad Djamil. Sedangkan sang ibu bernama Siti Saleha. Semasa kecil Bung Hatta didik dalam lingkungan pendidikan yang agamis. Ia belajar langsung pada salah satu ulama terkenal Minangkabau, Syekh Mohammad Djamil Djambek. Setiap hari ia belajar agama dan bahasa Arab di surau Tak heran ia tumbuh menjadi sosok yang religius, sederhana, rendah hati dan pribadi pemikir (Tempo, 2010). Sementara di rumah, ia dididik oleh keluarganya dengan tegas dan disiplin. Kecerdasannya membawa Bung Hatta dapat menempuh pendidikan di Belanda. Hatta kemudian menjadi salah satu tokoh utama kaum pergerakan nasionalisme pada tahun 1920-an (Sitompul, 2023). Ia aktif menyuarakan kemerdekaan Indonesia saat di Belanda dan dilanjutkan saat pulang ke Indonesia.

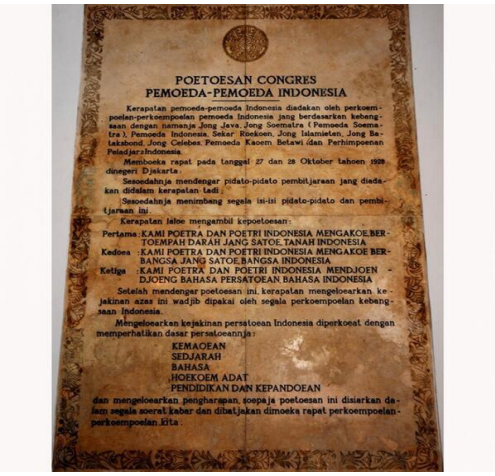
Bung Hatta dikenal sebagai pribadi yang gemar membaca dan menulis. Baginya buku adalah media untuk membuka cakrawala berpikir dan melihat situasi secara luas. Hasil baca kemudian diolah dan dituangkan menjadi gagasan-gasan kritis yang menggambarkan ketajaman berpikir. Kegemaran membaca dan menulis ini membawa Bung Hatta menjadi pribadi yang kritis dalam

memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini secara langsung menjadi senjata Bung Hatta dalam menentang kolonialisme saat itu. Bung Hatta yang kelak menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia memilih cara yang berbeda dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Ia memilih berjuang lewat goresan tinta yang menggugah pikiran-pikiran bayak orang tentang pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan. Pemikiran-pemikirannya yang dituangkan dalam berbagai tulisan mampu menggerakkan dan mengobarkan semangat juang dan nasionalisme (S. H. Putri, 2024).

Sejak era pergerakan nasional pada tahun 1908, gelora kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan mulai digalakan. Usaha-usaha yang bersifat kesukuan dan perjuangan fisik sebelumnya mulai beralih menjadi bersifat nasional dan non-fisik. Salah satu usaha yang dilakukan untuk menggelorakan semangat tersebut adalah memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini dapat dipahami mengingat pada masa itu meskipun kesadaran nasional sudah mulai nampak, namun sebagian besar masyarakat masih dalam sistem kesukuan sehingga perlu pemantik untuk menyatukan masyarakat secara nasional (Dwijaya et al., 2024).

Pemerintah Hindia Belanda sendiri pada masa kolonialisme menerapkan politik bahasa dan politik pendidikan. Menurut G.L. Cleintuar, politik bahasa dan pendidikan yang dilakukan membuat penduduk Indonesia pada masa itu terbagi menjadi beberapa kelompok yang diukur oleh Belanda cocok atau tidak mendapat pendidikan Belanda dan Bahasa Belanda. Dengan demikian orang Indonesia-Kristen (Ambon, Manado, Cina Kristen, dan lain) sebagainya menjadi lebih Indonesia dari orang Indonesia yang lain (Groeneboer, 1999).

Penyatuan visi perjuangan secara bersama menemukan momentum pada Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober 1928 di Jakarta yang dihadiri oleh banyak organisasi pemuda berbagai daerah di Indonesia. Hasil Kongres Pemuda II adalah lahirnya sumpah pemuda yang menyepakati pengakuan penyatuan kesepakatan secara nasional akan tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia untuk pertama kalinya diakui sebagai bahasa nasional pada momen bersejarah tersebut. Lahirnya bahasa Indonesia secara langsung mempersatukan bahasa-bahasa berbagai daerah yang ada di Indonesia (Repelita, 2018).



POETOESAN CONGRES
PEMOEDA-PEMOEDA INDONESIA

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan dengan namanja Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten, Jong Batakbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar2 Indonesia.

Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahoen 1928 dinegeri Djakarta.

Sesoedahnja mendengar pidato-pidato pembitjaraan jang diadakan didalam kerapatan tadi.

Sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini.

Kerapatan laloe mengambil kepoetoesan :

Pertama :KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.

Kedoea :KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA

Ketiga :KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wadjib dipakai oleh segala perkoempoelan kebangsaan Indonesia.

Mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannja :

KEMAOEAN
SEDJARAH
BAHASA
HOEKOEM ADAT
PENDIDIKAN DAN KEPANDOEAN

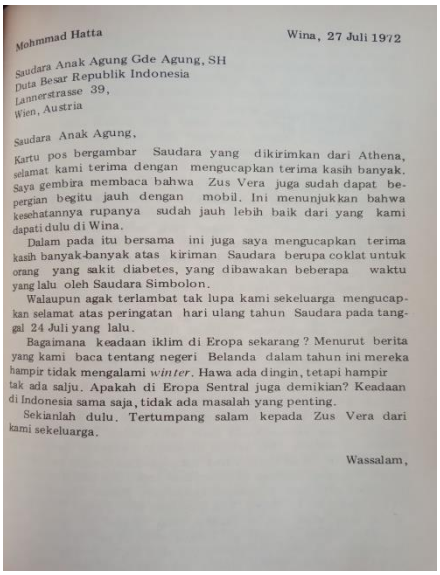
dan mengeloearkan pengharapan, soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita.

Gambar. Putusan sumpah pemuda (foto: tribunnews.com)

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tentu perlu diperjuangkan agar tidak hanya menjadi menjadi simbol perjuangan, tapi sarana komunikasi yang merekatkan berbagai suku bangsa Indonesia. Bung Hatta tentu termasuk dalam orang-orang yang memperjuangkan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa yang berdaulat. Semangat dan perjuangan Bung Hatta dalam mendaulatkan bahasa Indonesia setidaknya dapat dilihat dari dua tindakannya yang beliau lakukan sebagai berikut.

a. Konsisten Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Lisan dan Tulisan

   Menempuh pendidikan di Belanda, tentu membuat Bung Hatta fasih berbahasa Belanda.Tidak hanya fasih berbahasa Belanda, ia juga mempelajari bahasa asing yang lain. Meskipun menempuh pendidikan di Negara asing, tentu membuat ia menguasai bahasa asing dan seluk beluk budaya negeri tersebut. Bung Hatta bisa saja terpengaruh dengan hal tersebut. Namun, pengaruh budaya asing tidak lantas membuat Bung Hatta mengadopsi pikiran dan pandangan dari Negara asing (Dinejad et al., 2022). Setiap berkomunikasi, Bung Hatta tidak serta merta berbahasa Belanda dalam keseharian. Beliau juga tidak mencampuradukkan penggunaan bahasa asing dengan bahasa Indonesia dalam sehari-hari. Kecintaan terhadap bahasa Indonesia juga terlihat dari pidato-pidato beliau yang sangat memperhatikan struktur kalimat. Perhatian pada struktur-struktur ini membuat kalimat dalam pidatonya menjadi penuh makna meskipun terasa kurang memukau (Hanani & Sari, 2018). Penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan tepat dapat dilihat dari berbagai surat-surat beliau yang selalu konsisten menjunjung tinggi Bahasa Indonesia. Salah satunya dapat terlihat dalam surat-surat beliau kepada banyak tokoh yang sangat memperhatikan tata penggunaan Bahasa Indonesia.



Mohmmad Hatta

Wina, 27 Juli 1972

Saudara Anak Agung Gde Agung, SH
Duta Besar Republik Indonesia
Lannerstrasse 39,
Wien, Austria

Saudara Anak Agung,

Kartu pos bergambar Saudara yang dikirimkan dari Athena, selamat kami terima dengan mengucapkan terima kasih banyak. Saya gembira membaca bahwa Zus Vera juga sudah dapat bepergian begitu jauh dengan mobil. Ini menunjukkan bahwa kesehatannya rupanya sudah jauh lebih baik dari yang kami dapati dulu di Wina.

Dalam pada itu bersama ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kiriman Saudara berupa coklat untuk orang yang sakit diabetes, yang dibawakan beberapa waktu yang lalu oleh Saudara Simbolon.

Walaupun agak terlambat tak lupa kami sekeluarga mengucapkan selamat atas peringatan hari ulang tahun Saudara pada tanggal 24 Juli yang lalu.

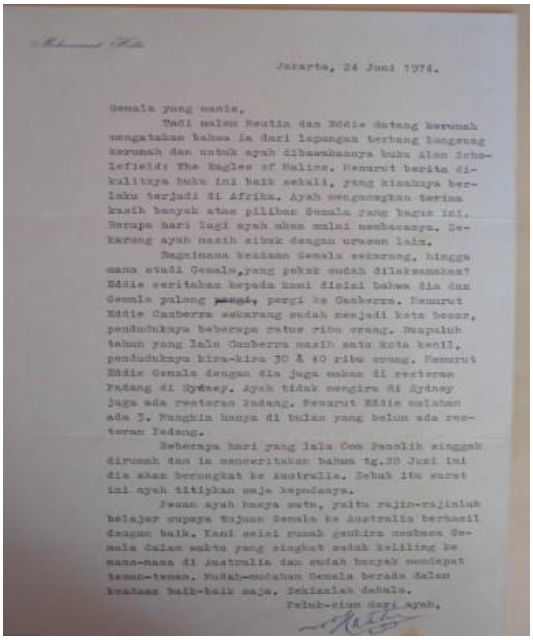
Bagaimana keadaan iklim di Eropa sekarang ? Menurut berita yang kami baca tentang negeri Belanda dalam tahun ini mereka hampir tidak mengalami *winter*. Hawa ada dingin, tetapi hampir tak ada salju. Apakah di Eropa Sentral juga demikian? Keadaan di Indonesia sama saja, tidak ada masalah yang penting.

Sekianlah dulu. Tertumpang salam kepada Zus Vera dari kami sekeluarga.

Wassalam,

Gambar. Surat Bung Hatta untuk Ide Anak Agung Gde Agung tahun 1972 (sumber: Buku Surat Menyurat Mohammad Hatta dan Ide Anak Agung Gde Agung)

Surat tersebut memang diketik ulang dengan mengganti bentuk ejaan lama menjadi ejaan yang disempurnakan, dengan substansi yang tidak berubah. Berdasarkan surat diatas, terlihat jelas penggunaan tata bahasa Indonesia yang rapi dan pemilihan kata yang menunjukkan perhatian beliau terhadap bahasa Indonesia. Tidak hanya surat-surat kepada tokoh-tokoh politik dan teman seperjuangan, kecintaan terhadap bahasa Indonesia juga beliau tunjukkan melalui surat-surat beliau untuk anaknya yang sedang berkuliah di Australia pada tahun 1974.



Jakarta, 24 Juni 1974.

Gemala yang manis,

Tadi malam Rentia dan Eddie datang kerumah mengatakan bahwa ia dari lapangan terbang langsung kerumah dan untuk ayah dibawahannya buku Alan Scholefield: The Eagles of Malise. Menurut berita dikulitnya buku ini baik sekali, yang kisahnya berlaku terjadi di Afrika. Ayah menguangkan terima kasih banyak atas pilihan Gemala yang bagus ini. Berapa hari lagi ayah akan mulai membacanya. Sekarang ayah masih sibuk dengan urusan lain.

Bagaimana keadaan Gemala sekarang, hingga mana studi Gemala, yang pokok sudah dilaksanakan? Eddie seritahan kepada kami dielsi bahwa dia dan Gemala pulang ~~pergi~~, pergi ke Canberra. Menurut Eddie Canberra sekarang sudah menjadi kota besar, penduduknya beberapa ratus ribu orang. Dupuluh tahun yang lalu Canberra masih satu kota kecil, penduduknya kira-kira 30 & 40 ribu orang. Menurut Eddie Gemala dengan dia juga sukan di restoran Padang di Sydney. Ayah tidak mengira di Sydney juga ada restoran Padang. Menurut Eddie sekalian ada 3. Mungkin hanya di bulan yang belum ada restoran Padang.

Beberapa hari yang lala Com Panolih singgah dirumah dan ia menceritakan bahwa tg.30 Juni ini dia akan berangkat ke Australia. Sebab itu surat ini ayah titipkan saja kepadanya.

Pesan ayah hanya satu, yaitu rajin-rajinlah belajar supaya tujuan Gemala ke Australia berhasil dengan baik. Kami selal rasah gembira membaca Gemala dalam waktu yang singkat sudah keliling ke mana-mana di Australia dan sudah banyak mendapat teman-teman. Pudah-mudahan Gemala berada dalam keadaan baik-baik saja. Sekianlah dahulu.

Peluk-cium dari ayah,

Hatta

Gambar. Surat Bung Hatta untuk anaknya, Gemala (sumber: historia.id)

Surat Bung Hatta untuk sang anak, Gemala Rabi'ah Hatta yang kala itu berkuliah di Australia menunjukkan bahwa Bung Hatta konsisten mendaulatkan bahasa Indonesia. Kendati hanya surat pribadi, surat tersebut ditulis dengan kata-kata baku. Penggunaan kata-kata dan kaidah pada surat tersebut mencerminkan bahwa Bung Hatta selalu mengedepankan bahasa Indonesia sebagai sarana berkomunikasi aktif kepada siapapun, termasuk anaknya.

b. Kritikan Istilah dalam Bahasa Asing untuk Orang Indonesia

Secara politis, sumpah pemuda tahun 1928 menjadi tonggak diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional (Sudaryanto, 2018). Namun perjuangan mendaulatkan bahasa Indonesia baru dimulai. Pada era setelah 1928, bahasa Indonesia memasuki fase darurat dalam politik dan jurnalistik. Bandung Mawardi dalam tulisannya 'Bumiputera dan Orang Indonesia', mengungkapkan bahwa pada masa tersebut, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa kotoran. Hal ini terjadi karena seringnya muncul istilah baru dalam bahasa Indonesia yang dipakai dalam beragam surat kabar. Istilah-istilah baru ini digunakan untuk mengimbangi isitlah-istilah dalam surat kabar Cina.

Sebagaimana proses kemunculannya sebagai bahasa nasional, Bung Hatta menganggap bahasa Indonesia tidak hanya sekadar bahasa pemersatu, namun juga identitas nasional, simbol perjuangan dan perekat budaya. Oleh karena itu, bahasa yang berdaulat adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Satu contoh yang pernah dikritik oleh Bung Hatta adalah penggunaan istilah *bumiputera* dalam media kala itu. Istilah ini merujuk pada orang Indonesia atau pribumi. Kritikan terhadap istilah ini berdasarkan alasan bahwa kata bumiputera tidak sesuai dengan pokok aturan bahasa Indonesia. Kritikan ini dituangkan dalam esai berjudul 'Soal Bahasa Indonesia' yang dimuat di majalah Pemandangan Nomor 239/240 edisi 26-27 Oktober 1941 (Hanani & Sari, 2018).

Tulisan kedua Bung Hatta yang mengkritik penggunaan istilah *bumiputera* adalah 'Bahasa Indonesia dan Orang Indonesia' yang termuat dalam Pemandangan Nomor 13 edisi 16 Januari 1942. Tulisan ini merupakan tanggapan dari argumentasi Siti Hawa dalam majalah Istri Indonesia pada Oktober 1942 yang lebih setuju penggunaan istilah *Indonesier* dibandingkan istilah *bumiputera* untuk penyebutan orang Indonesia. Menurut

Bung Hatta penggunaan istilah *bumiputera* bermakna mulia dibandingkan istilah *Indonesier* meskipun seharusnya kata bumiputera menjadi putera bumi dalam kaidah bahasa Indonesia. Istilah *Indonesioner* sendiri merupakan pengganti dari istilah *inlander* oleh pemerintah kolonial (Mawardi, 2011). Hatta memandang penggunaan istilah asing dalam bahasa Indonesia harus mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai hasil Kongres Bahasa Indonesia I, 25-27 Juli 1938 sehingga bahasa Indonesia mencerminkan identitas yang kuat sebagai jati diri bangsa Indonesia.

2. Tantangan Bahasa Indonesia Masa Kini

Semangat Bung Hatta dan tokoh-tokoh pejuang lain dalam mendaulatkan bahasa Indonesia sudah selayaknya ditiru dan dilanjutkan. Bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah bahasa pemersatu bangsa dan bahasa nasional. Menurut (Nurdjan, 2014), sebagai bahasa nasional yang sudah ada sejak tahun 1928, bahasa Indonesia memiliki beragam fungsi seperti sebagai lambing kebanggaan Negara, lambang identitas nasional, alat pemersatu beragam suku di Indonesia, dan sebagai penghubung beragam budaya dan daerah yang ada di Indonesia.

Arus globalisasi yang begitu kencang menjadi pintu masuk berbagai macam budaya yang ada diberbagai penjuru dunia. Satu sisi, tentu menjadi peluang memperkenalkan kebudayaan Indonesia pada dunia luar. Sebaliknya, jika arus globalisasi tidak difilterisasi, maka perkembangan pesat globalisasi ini akan membawa dampak buruk. Penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari pun lambat laun akan dipengaruhi oleh beragam bahasa asing dan bahasa gaul dalam komunikasi.

Saragih (2022) mengungkapkan bahwa beberapa dampak buruk akan terjadi jika penggunaan bahasa asing tidak dikontrol oleh Negara. Dampak tersebut yakni: a) budaya asli Indonesia akan tergerus dikarenakan masyarakat yang lebih penasaran dengan budaya asing ketimbang budaya sendiri; b) perlahan bahasa Indonesia akan meredup dengan sendirinya: c) berkurangnya pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar; d) pudarnya rasa cinta tanah air dalam diri individu masyarakat; e) munculnya pandangan remeh akan bahasa sendiri; dan f) bahasa dan budaya Indonesia akan menjadi lemah.

Perkembangan bahasa gaul dikalangan masyarakat, terutama remaja juga layak mendapat perhatian. Bahasa gaul cenderung merupakan pengembangan dari bahasa Indonesia menjadi lebih pendek, lincah namun tidak memiliki struktur yang jelas dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa

yang benar. Penggunaannya tak jarang berupa perubahan kata menjadi pelesetan, pengurangan satu atau dua huruf dalam kata yang benar, dan terkadang berupa singkatan. Mengutip pendapat Riadoh (2021), beberapa contoh kata tersebut adalah:

1. Pelesetan: lebay (berasal dari kata berlebihan), ngapain (berasal dari kata apa),
2. Singkatan: alay (singakatan dari anak layangan yang bermakna kampungan),
3. Pengurangan atau pergantian huruf huruf: emang (berasal dari kata memang), bener (berasal dari kata benar),
4. Kata yang berasal dari bahasa daerah dan belum diserap kedalam bahasa Indonesia, seperti gue (saya) atau lu (kamu) yang berasal dari betawi, dan lain sebagainya.

Penggunaan bahasa gaul ini terkadang membawa pada penggunaan kata-kata kotor yang kemudian dianggap lelucon. Kata-kata yang dianggap lelucon ini kemudian menjadi sesuatu yang diwajarkan karena konteksnya dipahami dalam candaan ataupun keakbraban. Tak heran kata-kata kasar seperti goblok, anjir dan sejenisnya sering digunakan dalam komunikasi dan diwajarkan dalam candaan (Purba et al., 2024). Penggunaan bahasa gaul semakin marak dengan adanya media sosial. Bahasa gaul tidak hanya diucapkan tapi dituliskan (diketik) menjadi satu kalimat atau ungkapan yang kemudian dibagikan dimedia sosial. Perkembangan yang masif ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut (Suleman & Islamiyah, 2018) dan (Annisa Muty Nur Ami et al., 2023), beberapa faktor yang mempengaruhi pesatnya penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing dimasyarakat adalah:

1. Perkembangan internet dan platform media sosial.
   Pesatnya internet, diikuti menjamurnya berbagai platform media sosial seperti instagram, tiktok, facebook dan lainnya memberikan kesempatan pada generasi muda menjadi agen penyebaran bahasa gaul. Media sosial yang bisa dilihat dan diakses oleh siapa saja membuat setiap postingan dapat ditiru oleh orang lain. Akibatnya terjadi pertukaran bahasa gaul melalu saling tiru antarorang dalam setiap postingan atau tulisan di media sosial.
2. Lingkungan sekitar. Lingkungan yang terbiasa menggunakan bahasa gaul lambat laun akan menjadi contoh bagi generasi muda, termasuk pembicaraan orang tua, teman, keluarga dan anggota masyarakat.
3. Pengaruh media. Banyaknya media yang menggunakan istilah gaul dengan tujuan menarik perhatian masyarakat. Media elektronik sering menggunakan istilah gaul dalam

setiap alur kontennya, seperti dalam sinema elektronik, acara kuis dan film-film. Sementara media cetak juga menyisipkan bahasa-bahasa ‘ringan’ dalam cerpen atau cerita-cerita tentang remaja agar terlihat lebih menarik.

4. Preferensi perpaduan dua bahasa. Ini terjadi karena adanya interaksi satu bahasa dengan bahasa lain sehingga unsur-unsur bahasa ini disatukan dalam satu percakapan.

Beragam faktor diatas mempengaruhi penggunaan bahasa gaul yang massif dan intens dimasyarakat terutama generasi muda. Pengaruh yang ditimbulkan cenderung buruk dalam konteks budaya karena dapat mengikis budaya dan bahasa Indonesia itu sendiri. Sementara (Siregar et al., 2024), melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul dalam konteks yang lebih positif. Menurutnya generasi muda, dalam hal ini remaja, menggunakan bahasa gaul untuk memudahkan mereka menyampaikan sesuatu yang dianggap rahasia bagi orang lain sehingga informasi itu tidak diketahui oleh orang lain tersebut. Kelompok ini ingin membentuk kelompok yang eksklusif yang merupakan bagian dari petualangan masa remaja. Bahasa gaul dianggap dapat memperkuat hubungan sehingga menjadi popular digunakan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi terkait penggunaan bahasa Indonesia ini tentu menjadi topik menarik yang perlu dicarikan langkah penyelesaiannya. Jika tidak, maka efeknya akan mengerus budaya dan bahasa Indonesia itu sendiri. Barus et al., (2024), memberikan solusi terkait solusi mendaulatkan bahasa Indonesia agar tidak tergerus bahasa asing dan bahasa gaul. Solusi tersebut berupa:

1. Mengadakan seminar atau workshop bertemakan bahasa Indonesia agar generasi muda paham akan pentingnya bahasa Indonesia serta dapat berpartisipasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam diskusi dan komunikasi sehari-hari.
2. Mendorong partisipasi generasi muda dalam diskusi akademik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pendidik dapat memberikan penghargaan berupa poin dalam setiap kegiatan.
3. Memfasilitasi program pelatihan bahasa Indonesia pada generasi muda agar mereka bisa tampil percaya diri dan berbahasa Indonesia yang benar.
4. Partisipasi aktif berbahsa Indonesia dalam lingkungan akademik oleh semua pihak, entah itu pendidik, tenaga pendidikan ataupun pihak lain dalam lingkungan pendidikan sehingga

menjadi contoh dan menciptakan atmosfer lingkungan berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

5. Pengembangan bahasa Indonesia yang efektif melalui media pembelajaran di kelas serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dengan kegiatan pengembangan sumber daya oleh berbagai pihak.

Bahasa asing maupun bahasa gaul yang berkembang sejatinya tidak akan merubah karakter bahasa Indonesia selama sang pengguna mampu menyesuaikan diri dan tidak terbawa arus bahasa asing atau bahasa gaul. Bung Hatta sudah membuktikan. Bung Hatta, meskipun menempuh pendidikan di Belanda dan mengetahui budaya barat, tidak terpengaruh mencampuradukkan bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia (Hanani & Sari, 2018). Meskipun bisa berbahasa asing, beliau menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia karena baginya bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, namun didalamnya terkandung identitas nasional sekaligus bagian dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu semangat perjuangan Bung Hatta mendaultkan bahasa Indonesia sudah sepatutnya menjadi teladan.

Kesimpulan

Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia perlu dilestarikan dan berdaulat. Bung Hatta, meskipun memahami budaya asing sangat mencintai dan mendaulatkan bahasa Indonesia. Tindakan beliau dalam mendaulatkan bahasa Indonesia dapat dilihat dari tindakannya yakni konsisten menggunakan bahasa Indonesia dalam lisan dan tulisan serta mengkritik penggunaan istilah asing untuk orang Indonesia.

Bahasa Indonesia dalam dinamikanya mengalami berbagai tantangan, terutama maraknya penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Faktor yang mempengaruhi pesatnya penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing dimasyarakat adalah: a) perkembangan internet dan platform media social; b) lingkungan sekitar; c) pengaruh media elektronik dan cetak, dan ; d) preferensi perpaduan dua bahasa. Adapun solusi yang bisa dilakukan untuk mendaulatkan bahasa Indonesia adalah: a) mengadakan workshop bertema bahasa Indonesia; b) mendorong partisipasi generasi muda dalam diskusi akademik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; c) memfasilitasi program pelatihan bahasa Indonesia pada generasi; d) partisipasi aktif berbahasa Indonesia dalam lingkungan akademik oleh semua pihak: dan e) pengembangan bahasa Indonesia yang efektif melalui media pembelajaran di kelas serta meningkatkan kesadaran tentang

pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dengan kegiatan pengembangan sumber daya oleh berbagai pihak.

Daftar Pustaka

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Anggraini, S., & Fauziyah, N. (2023). Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Media Sosial Facebook. *Pentas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *9*(1), 21–32. http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/rqbx2

Annisa Muty Nur Ami, Cindy Dwiana Putri, Fitriani Lubis, Nadia Indah Lestari, Sendari Felida Nababan, Shandy Hadrianus Saragih, & Silvia Diva Sari. (2023). Faktor-Faktor Yang Membuat Maraknya Penggunaan Bahasa Asing Maupun Bahasa Gaul Dikalangan Anak Muda. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, *1*(6), 117–121. https://doi.org/10.61132/morfologi.v1i6.117

Astriyani. (2022). Pudarnya Penggunaan Bahasa Indonesia pada Kalangan Generasi Millenial. *Jubah Raja: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran*, *1*(2), 103–108.

Barus, A. F. B., Pasaribu, A. T. A., & Tansliova, L. (2024). Tantangan dan Solusi Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Efektif Dalam Diskusi Akademik Untuk Meningkatkankan Kemampuan Berbahasa Mahasiswa Milenial. *Fonologi : Jurnal Ilmuan Bahasa Dan Sastra Inggris*, *2*(2), 162–171. https://doi.org/10.61132/fonologi.v2i2.689

Dinejad, A. F., Idris, A., Siswanti, A., & Nursasi, A. (2022). *Demokrasi, HAM, Antikorupsi Bung Hatta*. Bung Hatta Anti Corruption Award.

Dwijaya, G., Martini, S., & Kurniawati. (2024). Bahasa Indonesia (Bahasa Perjuangan Bangsa 1908-1938). *Periode: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, *6*(1), 58–75.

Gaspersz, S., Turot, N., Peloan, G. D., Azzahra, A., & Waisapy, C. (2023). Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Media Komunikasi bagi Masyarakat Moi Kota Sorong. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, *1*(4), 691–695.

https://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/999/880

Groeneboer, K. (1999). Politik Bahasa kolonial di Asia Bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris dan Prancis. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, *1*(2). https://doi.org/10.17510/wacana.v1i2.295

Hanani, S., & Sari, S. R. (2018). *Bung Hatta dan Pendidikan Karakter*. Ar-Ruzz Media.

Khuzaemah, E., & Nurpadillah, V. (2022). *Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia: Untuk Perguruan Tinggi*. CV. Brimedia Global.

Madina, L. O., Pattiwael, M., Lahallo, F. F., Rupilele, F., & Palilu, A. (2019). Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar Dalam Berkomunikasi. *J-DEPACE (Journal of Dedication to Papua Community) Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 157–170.

Mawardi, B. (2011). *"Bumiputera" dan Orang Indonesia*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/kolom/-bumiputera-dan-orang-indonesia-938742

Nurdjan, S. (2014). *Dasar-Dasar Memahami Bahasa Indonesia*. Read Institute Press.

Purba, M., Saputri, A. S., Hutagalung, G. V., & Anggie, M. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Era Digital Di Jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 2022. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, *8*(5), 454–459.

Putri, S. H. (2024). Nukilan Pena dan Keteladanan Bung Hatta. *Jurnal Pustaka*, *4*(2), 45–54.

Putri, S. L., Angraini, D., Alifa, N. Y., Nazurty, & Noviyanti, S. (2023). Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 11113–11123.

Rachmawati, T., Patimah, S., & Maspuroh, U. (2023). Analisis Sikap Berbahasa Indonesia Pada Mahasiswa Serta Pembinaannya Melalui Postingan Akun Facebook Ivan Lanin. *Bahtera Indonesia:Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *8*(1), 154–164. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/bi.v8i1.360

Ramadhani, S. I., Zahwan, N., & Sinaga, N. M. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Bahasa Daerah. *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*, *1*(2), 743–747.

Rani Gustiasari, D. (2018). Pengaruh Perkembangan Zaman Terhadap Pergeseran Tata Bahasa

Indonesia: Studi Kasus Pada Pengguna Instagram Tahun 2018. *Jurnal Renaissance*, *3*(02), 433–442. http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance

Repelita, T. (2018). Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia (Ditinjau dari Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia). *Jurnal Artefak: History and Education*, *5*(1), 45–48.

Riadoh. (2021). Pengaruh Bahasa Gaul Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalangan Remaja. *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, *1*(2), 148–155. http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/eunoia/index

Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. In *Analisis Data Kualitatif*. PUstaka Ramadhan. https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf

Saragih, D. K. (2022). Dampak Perkembangan Bahasa Asing terhadap Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(1), 2569–2577. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3312

Siregar, H., Tampubolon, Q. A., Ribreka, D., Pratama, O. J., & Tansliova, L. (2024). Pengaruh Bahasa Gaul Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalangan Gen Z. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, *2*(3), 40–53. https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i3.707

Sitompul, G. K. (2023). Nasionalisme Dalam Pemikiran Politik Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmiah Manazir*, *1*(1), 37–47. https://jurnal.uic.ac.id/index.php/manazir/article/view/155%0Ahttps://jurnal.uic.ac.id/index.php/manazir/article/download/155/89

Sudaryanto. (2018). Dari Sumpah Pemuda (1928) Sampai Kongres Bahasa Indonesia I (1938): Kajian Linguistik Historis Sekitar Masa-Masa Prakemerdekaan. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, *3*(2), 100–108. http://journals.ums.ac.id/index.php/KLS

Suleman, J., & Islamiyah, E. P. N. (2018). Dampak Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Terhadap Bahasa Indonesia. *Prosiding SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra)*, *3*, 153–158.

Tempo. (2010). *Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman*. Tempo. https://rowlandpasaribu.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/hatta-jejak-yang-melampaui-zaman.pdf

Biodata Singkat

Hendra, M.Pd

Lulus S1 di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Sosial Universitas Negeri Padang pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan S2 di program studi dan universitas yang sama. Saat ini adalah dosen PNS di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Berawal dari hobi sepak bola, tidak mahir bermain, sekadar membaca berita bola, dan berkeinginan menulis sendiri artikel tentang sepak bola. Saat ini sedang belajar membuat artikel dengan topik berbagai bidang terutama Kewarganegaraan. Bisa dihubungi di hendrafm7@gmail.com

Perjuangan Kedaulatan Tanah dan Air dalam Lensa Jurnalisme Non-Profit: Analisis Isi Multimodal Teks Project Multatuli

Hery Yanto The
heryyantothe@gmail.com
Institut Nalanda, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Project Multatuli, sebagai pelopor jurnalisme non-profit di Indonesia telah konsisten menyuarakan isu-isu yang menyangkut kedaulatan rakyat, khususnya terkait keadilan sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara Project Multatuli merepresentasikan perjuangan kedaulatan tanah dan air melalui artikel-artikelnya. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi multimodal, penelitian ini menganalisis sepuluh artikel teratas yang ditemukan dengan kata kunci "lahan" dalam basis data Project Multatuli. Proses analisis data dilakukan melalui dua tahap utama. Pertama, dilakukan pelabelan kalimat pada seluruh isi konten artikel menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif MAXQDA. Pelabelan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait kedaulatan tanah dan air, seperti konflik agraria, akses terhadap sumber air, dan dampak lingkungan. Kedua, dilakukan triangulasi data dengan menganalisis semiotik pada ilustrasi yang menyertai setiap artikel. Analisis multimodal ini memungkinkan untuk menginterpretasi makna terkait isu kedaulatan tanah dan air dari suara rakyat yang direpresentasikan dalam penulisan artikel-artikel tersebut. Hasil analisis menunjukkan adanya persoalan yang berhubungan dengan aspek konflik agraria, ketidaksetaraan akses pada sumber daya, degradasi lingkungan, dan ketidakadilan negara dan kebijakan. Artikel-artikel yang dianalisis secara intensif membahas konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, petani, dan perusahaan besar. Konflik ini seringkali dipicu oleh perampasan tanah, perizinan yang tidak transparan, dan lemahnya penegakan hukum. Isu akses terhadap sumber juga mengidentifikasi banyak persoalan sosial. Artikel-artikel mendokumentasikan bagaimana masyarakat di berbagai daerah menghadapi kesulitan dalam mengakses air bersih akibat eksploitasi sumber daya pada proyek-proyek besar. Penelitian ini juga mengungkap bagaimana perjuangan kedaulatan tanah dan air terkait erat dengan isu-isu lingkungan. Artikel-artikel menyoroti dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta upaya masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup. Tidak kalah pentingnya, analisis juga

menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan tindakan negara memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dinamika konflik agraria dan akses terhadap sumber daya alam. Melalui analisis multimodal ini, penelitian ini tidak hanya mengungkap representasi diskursif mengenai kedaulatan tanah dan air, tetapi juga memberikan informasi tentang suara masyarakat yang disampaikan melalui para penulis artikel di Project Multatuli. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi media alternatif, gerakan sosial, dan studi lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, aktivis, dan masyarakat luas dalam upaya memperjuangkan kedaulatan rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Project Multatuli, Kedaulatan Tanah dan Air, Suara Masyarakat

Pendahuluan

Persoalan penggunaan lahan dan kualitas air bagi keberlangsungan hidup manusia telah menjadi perhatian penting beberapa tahun ini (Abebe, 2024; Hao & Wang, 2024; Yeneneh et al., 2024). Perubahan fungsi lahan dan menurunnya kuantitas dan kualitas air yang merupakan persoalan umum di bidang ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia (Escallón, 2021; Hristov, 2021; Rowland, 2023). Penelitian terkait isu ini juga telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di Desa Wadas (Sibuea, 2022) menunjukkan bahwa peralihan fungsi lahan merugikan masyarakat karena tidak disertai dengan ganti rugi yang sesuai dengan nilai lahan. Demikian juga dengan terjadinya tumpang tindih aturan dan berbagai kebijakan pertanahan, sering menjadi akar konflik agraria di Aceh (Ramadhan, 2023). Kedua contoh kasus ini merupakan kondisi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Kepemilikan hak atas tanah dan air akan juga disertai dengan kepemilikan sumber daya alam di atasnya. Ketidakadilan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam menyebabkan perselisihan kepentingan yang melibatkan berbagai peran sosial. Peran sosial tersebut mencakup masyarakat adat yang berjuang untuk melindungi hak tanah mereka (Meiranda et al., 2023), petani yang bergantung pada akses tanah untuk mencari nafkah (Situmorang & Ketaren, 2022), dan pemerintah yang berusaha mengatur semua kepentingan penggunaan tanah (Nikmatia et al., 2022). Konflik yang terjadi terkait isu-isu agraria dan perairan juga menjadi informasi penting yang diberitakan oleh media massa. Media massa bukan hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik terkait konflik yang terjadi (Hartini Putri & Afranisa Yusian, 2018; Maulana et al., 2023). Penyajian secara transparan dan mudah dibaca oleh khalayak publik dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kedaulatan tanah dan air. Selanjutnya, pemahaman masyarakat tentang isu agraria dan ketersediaan air dapat dipengaruhi oleh cara media menyampaikan berita dan informasi terkait.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk membahas isu-isu kedaulatan tanah dan air, masih ada beberapa kesenjangan penting yang perlu diisi. Salah satu kesenjangan utama adalah keterbatasan penelitian yang fokus pada analisis representasi perjuangan kedaulatan tanah dan air dalam jurnalisme non-profit. Pemberitaan melalui jurnalisme non-profit memiliki potensi besar untuk mempengaruhi opini publik dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang mendesak (Barnett et al., 2022; Requejo-Alemán & Lugo-Ocando, 2014), namun kajian terkait hal ini masih sangat minim.

Kesenjangan lain terkait penelitian topik ini terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian. Analisis isi multimodal, yang menggabungkan teks dan elemen visual, belum banyak diterapkan dalam konteks isu kedaulatan tanah dan air. Pendekatan analisis teks multimodal sangat penting karena menganalisis bagaimana makna dibangun melalui kombinasi moda komunikasi, terutama tekstual dan visual (Moreno & Mayer, 2007; Norris, 2012). Penggunaan analisis multimodal akan membantu menunjukkan bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi representasi isu-isu tersebut. Penerapan desain penelitian multimodal juga bisa mengungkapkan cara-cara di mana berbagai media non-profit membingkai perjuangan ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong penelitian lebih lanjut yang fokus pada dua area ini guna menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan dinamika yang terjadi.

Secara khusus, penelitian ini menyoroti bagaimana perjuangan untuk kedaulatan tanah dan air direpresentasikan dalam jurnalisme non-profit. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada artikel-artikel yang diproduksi oleh Project Multatuli. Tujuan penelitian adalah untuk memahami cara Project Multatuli menyampaikan isu-isu terkait kedaulatan tanah dan air melalui tulisannya ditinjau dari analisis multimodal. Analisis hubungan antara teks dan elemen visual yang digunakan dalam artikel-artikel tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi interaksi yang berpotensi menciptakan makna yang lebih dalam bagi pembaca. Penelitian ini akan meneliti elemen-elemen yang terdapat dalam artikel, seperti gambar, grafik, dan foto, serta bagaimana elemen-elemen ini mendukung atau memperkuat pesan yang ingin disampaikan.

Dengan menelusuri pemberitaan Project Multatuli dalam merepresentasikan perjuangan kedaulatan ini, penelitian ini berupaya memberikan wawasan tentang pengaruh jurnalisme dalam membentuk persepsi publik mengenai isu-isu lingkungan dan hak masyarakat. Studi ini juga akan memberikan gambaran tentang dampak jurnalisme non-profit dalam mengangkat

suara kelompok masyarakat yang terdampak oleh konflik tanah dan air. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan pola-pola tertentu dalam representasi tersebut. Penelitian ini akan menjadi kontribusi penting dalam memahami peran jurnalisme dalam advokasi sosial dan lingkungan. Penelitian ini juga akan membantu menjelaskan bagaimana media dapat berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak komunitas yang terpinggirkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi multimodal untuk mengeksplorasi bagaimana Project Multatuli merepresentasikan perjuangan kedaulatan tanah dan air melalui artikel-artikelnya. Analisis isi multimodal dipilih karena pendekatan ini dapat menganalisis makna yang dihasilkan dari interaksi antara berbagai moda komunikasi, seperti teks dan visual, yang keduanya hadir dalam artikel berita (Jewitt, 2009). Pendekatan multimodal juga memungkinkan pemahaman tentang bagaimana isu kedaulatan tanah dan air dibangun dan direpresentasikan dalam wacana yang dipilih (O'Halloran, 2004).

Data penelitian ini terdiri dari sepuluh artikel teratas yang ditemukan dengan kata kunci "lahan" dalam basis data Project Multatuli. Pemilihan artikel dengan kata kunci "lahan" didasarkan pada asumsi bahwa kata kunci ini relevan dengan isu kedaulatan tanah dan air, dan dapat menghasilkan artikel-artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Artikel-artikel yang dipilih kemudian dianalisis isinya, baik dari aspek tekstual maupun visual, untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan bagaimana tema-tema tersebut direpresentasikan (Baldry & Thibault, 2006).

Proses analisis data dilakukan melalui dua tahap utama. Pertama-tama, dilakukan pelabelan kalimat pada seluruh isi konten artikel menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif MAXQDA. Pelabelan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait kedaulatan tanah dan air, seperti konflik agraria, akses terhadap sumber air, dan dampak lingkungan. Pelabelan dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dari isi artikel terakomodasi dalam analisis.

Selanjutnya dilakukan triangulasi data dengan menganalisis semiotik pada ilustrasi yang menyertai setiap artikel. Analisis semiotik ini bertujuan untuk memahami bagaimana makna visual, seperti foto, info-grafis, atau ilustrasi, berkontribusi pada representasi isu kedaulatan tanah dan air. Analisis ini melibatkan identifikasi tanda-tanda visual, simbol-simbol, dan bagaimana elemen-elemen visual tersebut berinteraksi dengan teks untuk menghasilkan makna yang lebih kompleks.

Setelah kedua tahap analisis selesai, data tekstual dan visual kemudian diintegrasikan melalui analisis multimodal. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi antara teks dan visual berkontribusi pada representasi isu kedaulatan tanah dan air. Analisis ini juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana artikel-artikel tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis teks dan visual secara terpisah, tetapi juga memahami bagaimana keduanya bersama-sama membangun makna bagi pembaca.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa strategi. Pemilihan artikel dilakukan secara sistematis berdasarkan kriteria yang jelas, yaitu relevansi dengan kata kunci "lahan". Langkah selanjutnya adalah pelabelan kalimat dilakukan secara cermat dan konsisten oleh peneliti mengacu pada definisi operasional yang ditetapkan. Penetapan definisi operasional menggunakan pencarian istilah menggunakan Co-pilot dan Gemini yang selanjutnya disintesis oleh peneliti. Kegiatan triangulasi data dilakukan dengan menganalisis semiotik pada ilustrasi yang menyertai artikel, sehingga data tekstual dan visual dapat saling melengkapi dan memperkuat temuan penelitian. Pada akhirnya interpretasi makna terkait isu kedaulatan tanah dan air didasarkan pada analisis yang mendalam dan kontekstual, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hasil Penelitian

Sebagaimana telah ditegaskan di pendahuluan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis cara perjuangan kedaulatan tanah dan air direpresentasikan dalam jurnalisme non-profit. Fokus utama dari penelitian ini adalah melakukan analisis isi multimodal pada teks-teks yang dipublikasikan oleh Project Multatuli. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti memilih sepuluh artikel dari Project Multatuli sebagai data utama yang akan dianalisis.

Proses analisis dilakukan dengan cara memberi kode pada konten tertulis dalam artikel-artikel yang terpilih. Pada tahap pemberian label awal, dihasilkan 17 label untuk konten tekstual. Jumlah label ini terlalu banyak untuk tujuan penemuan tema utama. Dengan membaca ulang data yang telah diberi label, label awal selanjutnya dikelompokkan ulang dan akhirnya diperoleh lima label utama. Kelima label utama tersebut dapat merepresentasikan ide utama yang tercakup pada kesepuluh artikel. Label-label kode tersebut pada proses selanjutnya dibuatkan definisi operasional dengan sintesis pemahaman penulis melalui penelusuran makna dari Co-pilot dan Gemini (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Label-Label Koding dan Definisi Operasional Data Tekstual

No.	Label Koding	Definisi Operasional
1.	Upaya Perlawanan	Tindakan atau strategi yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan air, termasuk protes, advokasi, negosiasi, atau bentuk perlawanan lainnya.
2.	Alih Fungsi Lahan	Perubahan penggunaan lahan dari fungsi aslinya (misalnya, lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan) yang berdampak pada hilangnya sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat.
3.	Intimidasi terhadap Warga	Tindakan kekerasan, ancaman, atau tekanan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak mereka atas tanah dan air.
4.	Ketidakadilan	Ketidakseimbangan kekuasaan dan diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya alam, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.
5.	Kondisi Sosial	Dampak dari berbagai permasalahan terkait kedaulatan tanah dan air terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan, konflik, atau perubahan budaya.

Label-label koding pada tabel 1 menunjukkan berbagai dimensi perjuangan jurnalisme untuk mendukung rakyat yang terekam dalam artikel-artikel Project Multatuli. Berdasarkan frekuensi kemunculannya, label "intimidasi terhadap warga" muncul sebagai tema yang paling dominan dengan 45 segmen, menandakan bahwa isu ini merupakan aspek krusial dalam perjuangan masyarakat mempertahankan hak atas tanah dan air mereka. Label ini menggambarkan bagaimana warga seringkali menghadapi ancaman dan tekanan dalam memperjuangkan hak-hak mereka, yang ditunjukkan dengan contoh-contoh segmen data berikut ini:

- *Karisma baru saja tiba di lahannya ketika menemukan alat berat menggunduli tanaman-tanamannya.*
- *Kapan pun ketika kepentingan atau keinginan politik pemerintah berubah, maka masyarakat bisa berada dalam posisi rentan. Pemerintah bisa bilang tanah tidak digarap dengan baik, lalu mengusir masyarakat.*

- *Andrias, suami Lily, pernah dipukul dengan popor senjata di rumah Sekretaris Desa, Frans Datang, yang tak lain saudara kandungnya, karena bersikukuh tidak terima tanahnya diambil tanpa penggantian yang adil.*

Selanjutnya, label "alih fungsi lahan" menempati urutan kedua dengan 37 segmen. Segmen data ini menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan dari kepentingan masyarakat menjadi kepentingan bisnis merupakan masalah yang signifikan dalam konteks kedaulatan tanah dan air. Persoalan yang dilabel dengan “alih fungsi lahan” menyoroti bagaimana alih fungsi lahan berdampak pada hilangnya sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat. Contoh-contoh segmen data pada label ini adalah:

- *Satu keluarga dijanjikan akan dapat 2 hektare, nanti hasilnya dijual ke TKA. Ternyata tidak, lokasi lahan kami digunduli semua. Pohon-pohon habis semua.*
- *Ketika kelima petani itu mengaso bukan di gubuk atau saung, melainkan sebuah beranda musala milik satu kedai kopi bernama Warung Hadji Gori.*
- *Untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, warga tak lagi mengambil air tanah. Air diambil dari Gunung Prau yang berjarak 8 kilometer.*

Label "kondisi sosial" muncul sebagai tema dominan ketiga dengan 30 segmen. Label ini mencerminkan dampak dari berbagai permasalahan terkait kedaulatan tanah dan air terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan, konflik, atau perubahan budaya. Contoh data dari segmen label ini adalah:

- *Namun bagi warga seperti Amak Saleh yang telah hidup lama di sekitar area sirkuit, ingar bingar moto GP itu tak membawa imbas positif. Warungnya tetap sepi, wisatawan tak datang ke Pantai Seger karena aksesnya ditutup panitia sirkuit.*
- *Warga bingung mengadu. Di Pantai Lango, lurah sudah berganti empat kali selama dua tahun terakhir.*
- *Karena perbedaan profesi inilah, penduduk asli dan pendatang jarang berinteraksi. Profesi para penduduk asli dekat dengan tempat mereka tinggal. Mereka juga umumnya mempekerjakan sanak saudara, teman dekat, atau tetangga. Sementara itu, para pendatang, yang berkantor jauh, tidak punya keterikatan dengan tempat mereka tinggal.*

Dua label lainnya, yaitu "upaya perlawanan" dan "ketidakadilan", masing-masing mencakup 25 dan 21 segmen. Label "upaya perlawanan" menggambarkan berbagai bentuk

resistensi masyarakat terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan kedaulatan mereka atas tanah dan air, seperti dinyatakan dalam satu segmen data, “Beberapa LSM menawarkan pendampingan untuk penyelesaian masalah.” Sementara itu, label "ketidakadilan" menyoroti adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berujung pada ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat terdampak. Contoh dari segmen yang dikode dengan label ini adalah, “Kami bertanda tangan bukan masalah reforma agraria. Itu hanya untuk menyetujui tanah tumbuh. Tapi setelah bubar, ada isu bahwa kami telah setuju ‘reforma agraria’.”

Temuan dari data memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana jurnalisme non-profit dapat berperan dalam mengangkat isu-isu penting terkait kedaulatan tanah dan air dari perspektif masyarakat yang mengalami persoalan tersebut. Dengan menelusuri konten yang dihasilkan oleh Project Multatuli, penelitian ini berharap dapat memberikan pandangan tentang bagaimana perjuangan ini direfleksikan dan diinterpretasikan dalam konteks kerja jurnalisme. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang hubungan antara media, masyarakat, dan isu-isu lingkungan yang kritis.

Struktur hasil yang dihasilkan melalui pemberian kode terhadap data menunjukkan bahwa isu-isu terkait kedaulatan tanah dan air dalam artikel Project Multatuli meliputi dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar aspek fisik atau legalitas lahan. Isu ini melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan satu sama lain dengan rumit. Label "upaya perlawanan" menggambarkan berbagai bentuk tindakan masyarakat yang berjuang melawan praktik-praktik yang dianggap merusak kedaulatan mereka atas tanah dan air. Ini termasuk demonstrasi, pengorganisasian komunitas, dan penguatan identitas lokal.

Di sisi lain, label "alih fungsi lahan" menyoroti berbagai perubahan dalam penggunaan lahan yang membawa dampak signifikan, termasuk hilangnya sumber daya alam yang vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Dapat dilihat bahwa banyak lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian atau keperluan lokal kini dialihkan untuk pengembangan industri atau proyek lain tanpa memperhatikan dampaknya terhadap penduduk setempat. Label "intimidasi terhadap warga" mengungkapkan fakta bahwa masyarakat seringkali menghadapi tindakan kekerasan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu saat mempertahankan hak mereka atas tanah dan air. Tindakan intimidasi ini bisa berupa ancaman, penangkapan, atau bahkan pengusiran dari tempat tinggal mereka.

Label "ketidakadilan" menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat lokal dengan pihak-pihak yang lebih kuat, seperti perusahaan besar atau pemerintah. Diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya alam juga menjadi sorotan.

Sementara sebagian kelompok menikmati manfaat dari pemanfaatan sumber daya, banyak warga lokal tidak mendapatkan akses yang adil.

Akhirnya, label "kondisi sosial" menggambarkan dampak dari berbagai permasalahan kedaulatan tanah dan air terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketidakadilan dalam penguasaan dan penggunaan lahan tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga merusak struktur sosial dan identitas komunitas. Kehidupan sosial masyarakat terancam ketika mereka kehilangan akses ke tanah yang merupakan sumber kehidupan mereka. Setiap label ini berkontribusi untuk memperlihatkan gambaran komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan kedaulatan tanah dan air, serta kompleksitas yang menyertai perjuangan mereka.

Dalam penelitian ini, terdapat perhatian khusus tidak hanya pada konten teks, tetapi juga pada elemen visual yang melengkapi artikel-artikel dari Project Multatuli. Elemen-elemen visual ini termasuk foto, video, info-grafis, dan ilustrasi. Semua ini berfungsi untuk memperkuat dan memperjelas pesan yang ingin disampaikan dalam tulisan. Dalam proses analisis, setiap elemen visual diberi kode yang menghasilkan tujuh label utama. Label-label tersebut adalah: video, data, perjuangan masyarakat, alat kerja atau fasilitas masyarakat, infrastruktur, lingkungan alam, dan Jokowi.

Pemilihan label ini tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap label dipilih berdasarkan relevansi dengan tema penelitian yang sedang diangkat. Kode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi elemen visual yang dapat memberikan konteks tambahan atau memberikan sudut pandang yang berbeda tentang isu kedaulatan tanah dan air. Dengan menganalisis elemen-elemen ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana aspek visual berperan dalam menyampaikan isu-isu yang penting bagi masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk memahami keterkaitan antara teks dan visual, serta bagaimana keduanya dapat saling mendukung dalam menceritakan kisah yang lebih besar tentang perjuangan masyarakat dan aspek lingkungan yang terkait.

Analisis terhadap aspek visual dalam artikel Project Multatuli menunjukkan bahwa representasi perjuangan kedaulatan tanah dan air dilakukan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan gambar dan video yang berdampak kuat. Penggunaan label "video" menunjukkan pemanfaatan media audiovisual untuk merekam dan menyampaikan kesaksian masyarakat. Ini mencakup dokumentasi aksi protes serta kondisi lingkungan yang berkaitan dengan isu agraria. Melalui video, penonton dapat melihat secara langsung bagaimana masyarakat berjuang untuk hak-hak mereka.

Selanjutnya, label "data" memberikan fokus pada penggunaan info-grafis dan visualisasi data. Ini membantu menyampaikan informasi statistik dan hasil penelitian yang relevan

dengan topik yang dibahas. Info-grafis dapat membawa pemahaman yang lebih baik dan memberikan konteks yang jelas. Visualisasi data menjadikan isu-isu kompleks lebih mudah dipahami oleh khalayak yang lebih luas.

Tabel 2. Label-Label Koding dan Definisi Operasional Data Visual

No.	Label Koding	Definisi Operasional
1.	Video	Rekaman audiovisual yang digunakan untuk merekam dan menyampaikan kesaksian masyarakat, aksi protes, atau kondisi lingkungan yang terkait dengan isu agraria.
2.	Data	Infografis atau visualisasi data yang digunakan untuk memaparkan informasi statistik atau hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian.
3.	Perjuangan Masyarakat	Visualisasi dari berbagai bentuk perlawanan masyarakat dalam mempertahankan hak mereka atas tanah dan air, seperti foto atau video saat aksi protes.
4.	Alat Kerja/Fasilitas Masyarakat	Visualisasi dari penggunaan alat-alat tradisional atau fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari mereka.
5.	Infrastruktur	Visualisasi dari kondisi infrastruktur yang ada di wilayah tempat masyarakat tinggal, seperti jalan, jembatan, atau irigasi.
6.	Lingkungan Alam	Visualisasi dari kondisi lingkungan alam yang terkait dengan isu kedaulatan tanah dan air, seperti hutan, sungai, atau lahan pertanian.
7.	Jokowi	Kehadiran Presiden Joko Widodo dan putrat-puterinya dalam beberapa visual sebagai representasi dari kekuasaan negara yang terkait dengan isu agraria.

Label "perjuangan masyarakat" menggambarkan berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan air. Ini bisa berupa demonstrasi, kampanye, atau aksi langsung. Visualisasi yang ditampilkan memperlihatkan semangat dan tekad masyarakat dalam menghadapi tantangan yang ada.

Terkait alat kerja dan fasilitas masyarakat, label "alat kerja/fasilitas masyarakat" menonjolkan penggunaan alat-alat tradisional serta fasilitas umum yang diandalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan fasilitas ini menjadi simbol perjuangan dan kemandirian

masyarakat, menunjukkan bagaimana mereka menggunakan sumber daya yang ada untuk mendukung aktivitas mereka.

Label "infrastruktur" menjelaskan kondisi infrastruktur di wilayah tempat tinggal masyarakat. Ini mencakup jalan, jembatan, dan sistem irigasi yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Infrastruktur yang baik berkontribusi pada keberlangsungan kehidupan dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya.

Bagian tentang "lingkungan alam" menyoroti keadaan lingkungan yang berhubungan dengan isu kedaulatan tanah dan air. Ini termasuk hutan, sungai, dan lahan pertanian yang menjadi vital bagi kehidupan masyarakat. Visualisasi ini memberikan gambaran jelas mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan untuk keberlangsungan hidup.

Akhirnya, label "Jokowi" menggambarkan kehadiran Presiden Joko Widodo dan putra-putrinya dalam beberapa visual. Kehadiran beliau menunjukkan hubungan antara kekuasaan negara dan isu agraria yang dihadapi. Visualisasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani konflik agraria yang ada.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bagaimana aspek visual berkontribusi dalam menyampaikan pesan yang kuat mengenai perjuangan kedaulatan tanah dan air. Penggunaan gambar dan video bukan hanya memperkaya narasi, tetapi juga menciptakan dampak emosional yang mendalam bagi penonton.

Hasil analisis dari kombinasi antara teks dan gambar dalam Project Multatuli menunjukkan hubungan yang kuat dalam menggambarkan perjuangan untuk kedaulatan tanah dan air. Label-label yang teridentifikasi, seperti "upaya perlawanan," "alih fungsi lahan," dan "intimidasi terhadap warga," tidak hanya ada dalam bentuk tulisan, tetapi juga diperjelas melalui visual yang menampilkan secara langsung kondisi di lapangan. Contohnya, label "upaya perlawanan" dapat diilustrasikan dengan foto-foto demonstrasi atau protes yang dilakukan oleh masyarakat. Gambar-gambar tersebut memberikan konteks yang lebih nyata mengenai ketidakpuasan dan keberanian masyarakat dalam melawan ketidakadilan.

Di sisi lain, label "alih fungsi lahan" dapat divisualisasikan dengan foto yang menunjukkan perubahan lahan dari area pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan. Gambar-gambar ini menekankan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akibat perubahan tersebut. Keterkaitan antara teks dan visual ini menambah dimensi yang lebih dalam dalam memahami isu kedaulatan tanah dan air. Isu ini tidak hanya sekadar terletak pada level teoretis, tetapi juga sangat nyata dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Melalui penyajian yang komprehensif antara teks dan visual, pembaca dapat lebih mudah memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah dan air. Ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar sebuah narasi, tetapi sebuah kenyataan hidup yang penuh dengan konflik dan harapan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan menginspirasi tindakan yang lebih luas di kalangan masyarakat dan pembuat kebijakan.

Prinsip-prinsip analisis multimodal sangat menekankan pentingnya untuk memahami makna yang muncul dari interaksi berbagai moda komunikasi. Ini mencakup elemen-elemen seperti teks, gambar, video, dan berbagai bentuk representasi visual lainnya. Dalam konteks penelitian ini, analisis multimodal memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Project Multatuli memanfaatkan kombinasi teks dan visual. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan yang lebih kuat dan efektif terkait perjuangan kedaulatan tanah dan air.
Sebagai contoh, penggunaan video yang merekam kesaksian warga yang terdampak oleh alih fungsi lahan memiliki dampak yang signifikan. Video ini tidak hanya menawarkan informasi faktual, tetapi juga menciptakan koneksi emosional dengan penonton. Ketika menyaksikan pengalaman langsung orang-orang yang terpengaruh, pembaca dapat merasakan empati dan keterlibatan yang lebih dalam terhadap isu tersebut.

Selain video, penggunaan infografis juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Infografis digunakan untuk memaparkan data statistik yang menunjukkan ketidakadilan agraria. Dengan menyajikan data secara visual, infografis membantu pembaca memahami skala dan kompleksitas masalah tersebut dengan lebih mudah. Pembaca tidak hanya diberikan angka dan fakta, tetapi juga konteks yang memungkinkan mereka untuk melihat hubungan antara data dan realitas sosial yang terjadi.

Analisis multimodal, oleh karena itu, memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana perjuangan kedaulatan tanah dan air direpresentasikan dalam konteks jurnalisme non-profit. Penyampaian pesan tidak hanya bergantung pada kata-kata tertulis, tetapi juga pada kekuatan dari elemen audio dan visual yang digunakan. Kombinasi ini menciptakan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat terkait tanah dan air. Melalui pendekatan ini, komunikasi menjadi lebih kaya dan berdampak, sehingga meningkatkan kesadaran serta mendorong tindakan dari audiens.

Analisis

Penelitian ini menelusuri secara intensif bagaimana Project Multatuli, sebagai pionir jurnalisme non-profit di Indonesia, menggambarkan perjuangan kedaulatan tanah dan air melalui karya jurnalistiknya. Isu kedaulatan tanah dan air di Indonesia merupakan masalah

yang kompleks, ditandai dengan konflik agraria yang berkepanjangan, ketidaksetaraan dalam akses sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan yang terus meningkat. Dalam konteks ini, jurnalisme memiliki peran krusial dalam merepresentasikan perspektif masyarakat terkait isu-isu ini, dan Project Multatuli, sebagai media alternatif, telah menunjukkan komitmennya untuk menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoretis utama: teori jurnalisme investigatif, teori pembangunan sosial, dan teori analisis multimodal media pemberitaan.

Teori jurnalisme investigatif menekankan peran jurnalisme dalam melakukan investigasi mendalam terhadap isu-isu yang tersembunyi atau sengaja ditutupi oleh pihak-pihak yang berkuasa (Müller & Wiik, 2023). Jurnalisme investigatif berupaya untuk mengungkap kebenaran, menyoroti ketidakadilan, dan mendorong akuntabilitas dari mereka yang memiliki kekuasaan (Carson & Farhall, 2018). Pada penelitian ini, teori ini relevan untuk memahami bagaimana Project Multatuli menggali informasi, melakukan verifikasi data, dan menyajikan fakta-fakta terkait perjuangan kedaulatan tanah dan air. Mereka berperan sebagai *watchdog* yang mengawasi dan mengkritisi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan (Cancela et al., 2021; Carson & Farhall, 2018).

Selanjutnya, teori pembangunan sosial menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Syafar, 2017). Pembangunan sosial yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan distribusi manfaat pembangunan (Anyualatha Haridison, 2021). Teori ini relevan untuk memahami bagaimana Project Multatuli memberitakan suara-suara masyarakat yang terlibat dalam perjuangan kedaulatan tanah dan air, serta bagaimana media ini berperan sebagai agen perubahan sosial. Mereka tidak hanya memaparkan masalah, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam mencari solusi dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Terakhir, teori analisis multimodal media pemberitaan menekankan pentingnya memahami makna yang dihasilkan dari interaksi antara berbagai moda komunikasi, seperti teks, gambar, suara, dan video (Ledin & Machin, 2020). Analisis multimodal memungkinkan kita untuk melihat bagaimana media membangun representasi realitas melalui kombinasi berbagai elemen semiotik (Caple et al., 2020). Dalam konteks penelitian ini, teori ini relevan untuk memahami bagaimana Project Multatuli menggunakan teks dan visual untuk merepresentasikan perjuangan kedaulatan tanah dan air, serta bagaimana interaksi antara kedua moda tersebut menghasilkan makna yang lebih kompleks dan mendalam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Project Multatuli secara konsisten mengangkat isu-isu kedaulatan tanah dan air dalam artikel-artikelnya. Beberapa tema utama yang muncul antara lain: konflik agraria, ketidaksetaraan akses sumber daya, degradasi lingkungan, dan

ketidakadilan negara dan kebijakan. Artikel-artikel Project Multatuli освещение konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, petani, dan perusahaan besar. Konflik ini seringkali dipicu oleh perampasan tanah, perizinan yang tidak transparan, dan lemahnya penegakan hukum. Project Multatuli memberikan platform bagi masyarakat yang terdampak konflik untuk menyampaikan suara mereka, serta mengungkap praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Hasil kerja jurnalisme ini memberikan ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan untuk didengar dan diperhatikan.

Selain itu, artikel-artikel Project Multatuli juga menyoroti masalah ketidaksetaraan akses masyarakat terhadap sumber daya alam, khususnya air. Media ini mendokumentasikan bagaimana masyarakat di berbagai daerah menghadapi kesulitan dalam mengakses air bersih akibat eksploitasi sumber daya pada proyek-proyek besar. Project Multatuli memperhatikan dampak dari ketidaksetaraan ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Arikel yang ditulis menunjukkan bagaimana ketidakadilan dalam penguasaan sumber daya alam dapat memperburuk kondisi kehidupan masyarakat yang rentan.

Project Multatuli juga mengangkat isu-isu terkait degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Artikel-artikelnya menyoroti dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup. Para jurnalis pada proyek ini menyuarakan bagaimana kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada kehidupan manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Tidak kalah penting, analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan tindakan negara memiliki peran signifikan dalam membentuk dinamika konflik agraria dan akses terhadap sumber daya alam. Project Multatuli mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan, serta mengungkap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Para jurnalis berperan sebagai pengawas kebijakan yang kritis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalisme investigatif. Project Multatuli secara aktif melakukan investigasi mendalam terhadap isu-isu kedaulatan tanah dan air, mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi, dan memberikan informasi yang akurat dan kredibel kepada publik. Media ini juga berperan sebagai pengawas terhadap kekuasaan, mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak adil, dan mendorong akuntabilitas dari pihak-pihak yang berwenang. Mereka tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga melakukan analisis yang mendalam dan kritis terhadap isu-isu yang para jurnalis temukan di lapangan.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan teori pembangunan sosial. Project Multatuli memberikan suara bagi masyarakat yang terpinggirkan, menyajikan pengalaman dan

perspektif mereka terkait isu-isu kedaulatan tanah dan air. Media ini juga berperan sebagai agen perubahan sosial, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hasil kerja jurnalisme ini jelas penting bagi perubahan sosial yang positif.

Analisis multimodal menunjukkan bahwa Project Multatuli menggunakan kombinasi teks dan visual untuk merepresentasikan perjuangan kedaulatan tanah dan air secara lebih efektif. Gambar dan video yang menyertai artikel-artikelnya tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari pesan yang ingin disampaikan. Visualisasi ini membantu pembaca untuk memahami kompleksitas isu-isu agraria secara lebih mendalam, serta membangun empati dan keterlibatan emosional dengan perjuangan masyarakat. Artikel dan reportase yang disajikan menggunakan kekuatan visual untuk memperkuat pesan mereka dan membuat isu-isu tersebut lebih mudah dipahami dan dirasakan oleh publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Project Multatuli sebagai media alternatif telah berhasil mengangkat isu-isu kedaulatan tanah dan air secara komprehensif dan mendalam. Melalui pendekatan jurnalisme investigatif, media ini mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi, memberikan suara bagi masyarakat yang terpinggirkan, dan mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Analisis multimodal menunjukkan bahwa kombinasi teks dan visual dalam artikel-artikel Project Multatuli mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan, serta membangun pemahaman dan keterlibatan pembaca terhadap isu-isu kedaulatan tanah dan air. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi studi media alternatif, gerakan sosial, dan studi lingkungan. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, aktivis, dan masyarakat luas dalam upaya memperjuangkan kedaulatan rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengungkap bagaimana Project Multatuli, sebagai media alternatif yang progresif, secara konsisten dan komprehensif mengangkat isu-isu krusial terkait kedaulatan tanah dan air di Indonesia. Melalui pendekatan jurnalisme investigatif, Project Multatuli tidak hanya mengungkapkan fakta-fakta yang tersembunyi, tetapi juga memberikan platform bagi suara-suara masyarakat yang terpinggirkan, yang seringkali diabaikan oleh media mainstream. Mereka berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Lebih dari sekadar menyajikan masalah, Project Multatuli juga mendorong perubahan sosial melalui advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Analisis multimodal yang dilakukan dalam penelitian ini juga menyoroti bagaimana kombinasi antara teks dan visual dalam artikel-

artikel Project Multatuli mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan, serta membangun pemahaman dan keterlibatan pembaca terhadap isu-isu kedaulatan tanah dan air.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi bagi studi media alternatif, gerakan sosial, dan studi lingkungan, serta memperkaya khazanah penelitian tentang representasi isu-isu agraria dalam media. Bagi jurnalis dan media, penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan praktik jurnalisme yang lebih kritis, investigatif, dan berpihak pada masyarakat. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan informasi yang berharga tentang kebijakan krusial terkait kedaulatan tanah dan air, serta pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang terpenting, bagi masyarakat luas, penelitian ini menyuarakan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan air, serta memberikan motivasi untuk terus berjuang demi keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

Referensi

Abebe, M. G. (2024). Impacts of urbanization on food security in Ethiopia. A review with empirical evidence. *Journal of Agriculture and Food Research, 15*, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.100997

Anyualatha Haridison. (2021). MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, *2*(2). https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.363

Baldry, A., & Thibault, P. J. (2006). Multimodal Transcription and Text Analysis. In *Equinox Publishing Limited*.

Barnett, S., Murdoch, T., & Townend, J. (2022). Where public interest and public benefit meet: the application of charity law to journalism. *Journal of Media Law*, *14*(2). https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2141225

Cancela, P., Gerber, D., & Dubied, A. (2021). “To Me, It’s Normal Journalism” Professional Perceptions of Investigative Journalism and Evaluations of Personal Commitment. *Journalism Practice*, *15*(6). https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1876525

Caple, H., Huan, C., & Bednarek, M. (2020). Multimodal news analysis across cultures. In *Multimodal News Analysis across Cultures*. https://doi.org/10.1017/9781108886048

Carson, A., & Farhall, K. (2018). Understanding Collaborative Investigative Journalism in a "Post-Truth" Age. *Journalism Studies*, *19*(13). https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1494515

Escallón, J. M. V. (2021). The historical relationship between agrarian reforms and internal armed conflicts: Relevant factors for the Colombian post-conflict scenario. *Land Use Policy*, *101*, 105–138. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105138

Hao, Q., & Wang, B. (2024). Landscape pattern changes in coal resource-based cities: A case study of Huainan City in China. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, *8*(2), 1–15. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i2.2946

Hartini Putri, S., & Afranisa Yusian, S. (2018). Fungsi Media Massa Dalam Hegemoni Media. *ArtComm : Jurnal Komunikasi Dan Desain*, *1*(2), 93–99. https://doi.org/10.37278/artcomm.v1i2.120

Hristov, J. (2021). Pro-capitalist violence and the great wave of dispossession: Armed actors and agrarian conflicts in Colombia, Mexico, and Honduras. *Sociology of Development*, *7*(2), 129–158. https://doi.org/10.1525/sod.2021.7.2.129

Jewitt, C. (2009). The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. In *Journal of Pragmatics* (Vol. 42, Issue 9).

Ledin, P., & Machin, D. (2020). Introduction to Multimodal Analysis. In *Introduction to Multimodal Analysis*. https://doi.org/10.5040/9781350069176

Maulana, A. S., Sari, D. P., Br Manik, N., Muliyani, S., & Kustiawan, W. (2023). Manajemen Produksi Siaran Pemberitaan Media Radio dan Televisi. *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, *2*(2), 1–8. https://doi.org/10.56832/mudabbir.v2i2.202

Meiranda, A., Syamsunasir, S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Analisis Hukum*, *6*(1), 99–114. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4232

Moreno, R., & Mayer, R. (2007). Interactive Multimodal Learning Environments. *Educational Psychology Review*, *19*(3). https://doi.org/10.1007/s10648-007-9047-2

Müller, N. C., & Wiik, J. (2023). From Gatekeeper to Gate-opener: Open-Source Spaces in Investigative Journalism. *Journalism Practice*, *17*(2). https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1919543

Nikmatia, W. O., Islamy, L. O. S., & Munafi, L. O. A. (2022). Konflik Pengurusan Kepemilikan Tanah di Kota Baubau. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *11*(2), 123–130. https://doi.org/10.55340/administratio.v11i2.1044

Norris, S. (2012). Multimodality in Practice: Investigating Theory-in-Practice-through-Methodology. In *Multimodality in Practice: Investigating Theory-in-Practice-through-Methodology*. https://doi.org/10.4324/9780203801246

O'Halloran, K. L. (2004). Multimodal Discourse Analysis: Systemic-Functional Perspectives. In *Multimodal Discourse Analysis: Systemic-Functional Perspectives*.

Ramadhan, A. (2023). Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, *13*(01), 1. https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247

Requejo-Alemán, J. L., & Lugo-Ocando, J. (2014). Assessing the sustainability of latin american investigative non-profit journalism. *Journalism Studies*, *15*(5). https://doi.org/10.1080/1461670X.2014.885269

Rowland, M. (2023). Shareholder cities: land transformations along urban corridors in India. *Eurasian Geography and Economics*, *64*(3). https://doi.org/10.1080/15387216.2021.1931906

Sibuea, H. Y. P. (2022). Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi. *Info Singkat*, *14*(4), 1–6.

Situmorang, R., & Ketaren, A. (2022). Konflik Perebutan Lahan Perkebunan PTPN IV dengan Masyarakat Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, *7*(2), 111–122. https://doi.org/10.29103/jsds.v1i2.5119

Syafar, M. (2017). Modal Sosial Dalam Pembangunan Sosial. *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, *9*.

Yeneneh, N., Elias, E., & Feyisa, G. L. (2024). Monitoring soil quality of different land use systems: a case study in Suha watershed, northwestern highlands of Ethiopia. *Environmental Systems Research*, *13*(1), 1–17. https://doi.org/10.1186/s40068-024-00336-9

Biografi Penulis

Hery Yanto The memiliki minat kajian dan penelitian pada bidang pembangunan sosial kemasyarakatan, layanan belajar sosial, dan kajian multimodal beragam jenis teks. Tamatan program doktoral Ilmu Pendidikan dari University of Hawaii at Manoa ini sempat bekerja selama 8 tahun di Universitas Bahasa Asing Zhejiang Yuexiu. Saat ini, Hery adalah pengajar dan peneliti di Institut Nalanda, Jakarta Indonesia.

Strategi Indonesia dalam Mewujudkan *Blue Economy Roadmap* Melalui *Blue Finance Instruments Development*

Ika Fitri Andini
Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstrak

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lautan Indonesia mencakup lebih dari dua pertiga wilayahnya dan merupakan komponen integral dari kesejahteraan, kekayaan budaya, dan kemakmuran. Untuk mewujudkan potensi ekonomi kelautan Indonesia yang besar, diperlukan pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum, kesiapan bisnis, standar lingkungan, investor, koordinasi para aktor, infrastruktur, mekanisme penyaluran dana, data, dan transparansi. Investasi publik dan swasta sangat penting. Investasi publik diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur, modal manusia, dan pengelolaan sumber daya alam. Investasi swasta yang memenuhi kriteria keberlanjutan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pengembangan rantai nilai. Indonesia melihat konsep ini sebagai peluang untuk memanfaatkan potensi yang ada melalui peluncuran Indonesia *blue economy roadmap*. Indonesia *blue economy roadmap* merupakan rancangan yang begitu kompleks dan tantangan kedepannya sangat berisiko terhadap tujuan yang ingin dicapai. Strategi pendanaan menjadi salah satu langkah Indonesia dalam mencapai tujuan Indonesia *blue economy roadmap*. Strategi pendanaan tersebut dikenal dengan *blue finance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) untuk melihat *blue finance* sebagai salah satu strategi dalam mendukung tercapainya Indonesia *blue economy roadmap*. Sumber-sumber untuk tinjauan literatur adalah publikasi, laporan, dan studi dengan topik *blue finance, sustainable finance* untuk ekonomi kelautan, pembiayaan kawasan konservasi laut, *blue economy*, dan *biodiversity finance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *blue finance* melalui instrumen seperti *blue bonds, blue sukuk*, dan pembayaran untuk layanan ekosistem sangat penting untuk menjembatani kesenjangan pendanaan sektor kelautan. Sumber pendanaan tambahan, termasuk kontribusi sektor swasta, hibah internasional, dan inovasi keuangan berbasis karbon biru, juga diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk mendorong keberlanjutan ekonomi biru. Namun, penelitian ini juga menemukan hambatan utama seperti kurangnya koordinasi kebijakan, kesenjangan data, dan risiko tinggi yang menghambat partisipasi investor. Peran mitra pembangunan internasional, seperti *Asian Development Bank* (ADB) dan *United Nations Development Program* (UNDP), menjadi signifikan dalam memberikan pendanaan, advokasi, dan pembangunan kapasitas teknis untuk

mendukung inisiatif ini. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya kerangka kerja yang terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, dan pelibatan aktif masyarakat lokal untuk memastikan keberlanjutan ekonomi biru di Indonesia. Dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model global dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: lingkungan, *blue economy, blue finance*

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang di wilayah tropis dengan luas laut mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Kondisi geografis ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Laut Indonesia tidak hanya menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, hingga energi terbarukan. Namun, pemanfaatan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan utama dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Blue economy atau ekonomi biru merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya laut secara bertanggung jawab. *Blue economy* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dari sektor kelautan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam agenda global untuk keberlanjutan, Indonesia telah menyusun peta jalan (*roadmap*) *blue economy* sebagai strategi jangka panjang dalam mengoptimalkan potensi laut sekaligus melestarikan ekosistemnya.

Konsep *blue economy* kemudian diadopsi oleh Indonesia melalui pengenalan pendekatan yang disebut Indonesia *blue economy*. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memuat kerangka pembangunan *blue economy* Indonesia (Musdalifah, et al., 2024). Kerangka ini dirumuskan dalam visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Kerangka pembangunan ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-14 yang berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan buku berjudul *Blue Economy Development Framework for*

Indonesia's Economic Transformation. Buku tersebut menjadi acuan dalam mendefinisikan *blue economy* sebagai pendekatan pertumbuhan ekonomi baru yang berorientasi pada keberlanjutan.

Untuk mewujudkan *blue economy roadmap*, salah satu elemen kunci yang perlu diperkuat yaitu pengembangan *blue finance instruments* atau instrumen keuangan biru. *Blue finance* merupakan pendekatan pembiayaan yang difokuskan pada kegiatan ekonomi yang mendukung kelestarian ekosistem laut, seperti konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan laut, dan pengelolaan sampah plastik di perairan. Penggunaan instrumen ini tidak hanya mendukung keberlanjutan proyek-proyek berbasis laut, tetapi juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi internasional.

Saat ini, berbagai tantangan masih menghambat implementasi *blue economy* melalui pengembangan *blue finance instruments*. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas keuangan pemerintah dalam mendanai program-program berbasis kelautan. Selain itu, masih minimnya kesadaran dan partisipasi sektor swasta dalam investasi hijau dan biru menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Pada tingkat regulasi, kurangnya kebijakan yang komprehensif dan insentif yang menarik bagi investor juga menjadi kendala dalam mendorong pengembangan instrumen keuangan ini.

Namun demikian, peluang untuk mengembangkan *blue finance* di Indonesia cukup besar. Posisi strategis Indonesia dalam peta perdagangan dunia, kekayaan sumberdaya laut, serta komitmen pemerintah terhadap agenda keberlanjutan melalui Dokumen *Nationally Determined Contributions* (NDC) dalam *Paris Agreement* menjadi landasan penting. Di sisi lain, tren global menunjukkan peningkatan minat terhadap investasi hijau, termasuk obligasi biru (*blue bonds*) dan mekanisme *blended finance* untuk proyek kelautan yang berkelanjutan.

Strategi Indonesia dalam mewujudkan *blue economy roadmap* melalui pengembangan *blue finance instruments* menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini akan menggali upaya yang dilakukan Indonesia untuk memperkuat instrumen keuangan biru, aktor-aktor yang berperan dalam implementasinya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan, sekaligus mendorong partisipasi sektor keuangan dalam mendukung agenda *blue economy* nasional.

KAJIAN TEORITIS

Konsep *Blue Economy*

Rani dan Cahyasari (2015) menjelaskan bahwa konsep ekonomi biru pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli, pendiri dan aktivis *Zero Emission Research Initiative* (ZERI), melalui bukunya yang berjudul *The Blue Economy*. Dalam buku tersebut, Pauli mengemukakan konsep *"The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, and 100 Million Jobs".* Model ekonomi biru ini bertujuan untuk menunjukkan kepada wirausahawan bahwa model bisnis ekonomi biru menawarkan peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sistem ini memanfaatkan sumberdaya alam secara lebih efisien tanpa merusak lingkungan, memiliki proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, menghasilkan produk yang lebih bernilai ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memberikan manfaat yang lebih adil kepada setiap kontributor.

Blue economy merupakan konsep pengelolaan sumberdaya perairan secara optimal dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan yang inovatif dan kreatif, sambil memastikan keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Konsep ini menekankan efisiensi yang mendorong pengembangan investasi dan bisnis perikanan tanpa merusak kelestarian lingkungan. Inti dari ekonomi biru adalah kegiatan yang mendukung ekosistem. Semua limbah yang dihasilkan dari aktivitas perikanan harus dikelola agar tidak mencemari tanah atau perairan. Limbah, baik kimia maupun organik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi habitat dan kehidupan ekosistem, sehingga dibutuhkan ilmu dan teknologi untuk mengelola limbah tersebut dengan tepat (Nanda, et al., 2024).

Yusuf (2012), seperti yang dikutip dalam Nurhayati (2013), mendukung pandangan bahwa ekonomi biru merupakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan ekonomi rakyat secara menyeluruh untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru selaras dengan pelaksanaan *triple track startegy*, yaitu program yang mencakup *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi), dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja), dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ekonomi biru ini mengadopsi logika ekosistem, di mana ekosistem bekerja secara efisien untuk mengalirkan energi dan nutrisi tanpa menghasilkan limbah, sehingga kebutuhan semua komponen dalam sistem dapat terpenuhi. Selain itu, ekonomi biru juga menitikberatkan pada kreativitas, inovasi, efisiensi dalam sistem produksi, serta pengelolaan sumberdaya yang terstruktur dengan baik.

Blue Finance Instruments Development

Pengembangan *blue finance instruments* atau instrumen keuangan biru, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Indonesia *Blue Finance Policy Note* yang diterbitkan oleh Indonesia *Climate Change Trust Fund* (ICCTF), merupakan pendekatan inovatif dalam pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung investasi berkelanjutan yang terkait dengan perlindungan laut dan pengelolaan air yang lebih baik. Instrumen ini dirancang untuk memobilisasi dana dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, donor internasional, investor swasta, dan masyarakat, untuk mendukung kegiatan yang mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan. Konsep *blue finance* didasari oleh kebutuhan untuk melindungi sumber daya laut yang penting bagi ekonomi global, termasuk perikanan, pariwisata pesisir, dan keanekaragaman hayati laut. Investasi dalam instrumen ini diarahkan untuk mendukung sektor prioritas seperti perikanan berkelanjutan, kawasan lindung laut, dan mitigasi limbah laut, termasuk plastik. Tujuannya adalah memastikan kelangsungan ekosistem laut yang sehat untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Instrumen keuangan biru mencakup alat seperti obligasi biru, sukuk biru, asuransi parametrik, dan pembiayaan berbasis dampak lingkungan. Misalnya, *blue bonds* adalah instrumen pendanaan berjangka tetap yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek konservasi laut atau pengelolaan sumber daya air. Pendekatan ini mengadopsi prinsip-prinsip obligasi hijau tetapi difokuskan pada sektor kelautan. Pada dokumen ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan instrumen ini, termasuk kebijakan yang mendukung, data dan pelacakan yang memadai, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan mitra internasional seperti Bank Dunia, telah memulai inisiatif untuk menciptakan kerangka kerja nasional dan membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan yang transparan guna meningkatkan kredibilitas dan menarik investor.

Pengembangan *blue finance* tidak hanya melibatkan instrumen baru, tetapi juga upaya untuk memperbaiki struktur pembiayaan yang ada. Ini mencakup memanfaatkan pembayaran untuk jasa ekosistem, penetapan harga karbon biru (seperti mangrove dan lamun), serta mendorong keterlibatan sektor swasta dalam investasi berbasis dampak. Instrumen ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan yang signifikan di sektor kelautan, yang sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan sektor darat. Keberhasilan pengembangan *blue finance instruments* membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk kementerian, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui pengembangan

strategi pembiayaan yang terintegrasi, Indonesia dapat memanfaatkan potensi penuh ekonomi biru, menciptakan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi *pustaka (library research).* Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mengandalkan narasi atau deskripsi untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai gejala, fenomena, dan situasi sosial. Pendekatan ini membantu peneliti memahami kerjasama yang dirancang oleh Indonesia, aktor-aktor yang terlibat, serta faktor-faktor pendukung dalam upaya mencapai Indonesia *Blue Economy Roadmap.* Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari buku, artikel ilmiah, situs web terpercaya, dan publikasi elektronik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang dianalisis bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan nasional dan internasional, serta publikasi dari organisasi pembangunan global. Pendekatan ini dirancang untuk mendapatkan pandangan holistik tentang konsep ekonomi biru, strategi pendanaan yang relevan, tantangan implementasi, serta peran berbagai aktor dalam mendukung agenda *blue economy.*

Data sekunder yang dikumpulkan difokuskan pada topik-topik seperti potensi dan tantangan ekonomi biru di Indonesia, instrumen keuangan biru seperti *blue bonds* dan *blue sukuk*, serta mekanisme pendanaan lainnya seperti *blended finance* dan pembayaran untuk layanan ekosistem. Selain itu, data juga mencakup informasi tentang kebijakan nasional yang relevan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menjadi kerangka utama peta jalan ekonomi biru Indonesia. Informasi dari sumber-sumber ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan pendanaan, risiko, dan peluang yang terkait dengan pengembangan sektor kelautan berkelanjutan.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif yang diperoleh dari literatur untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai strategi pengembangan *blue finance*. Fokus analisis mencakup identifikasi sektor prioritas yang membutuhkan pendanaan, seperti perikanan berkelanjutan, pariwisata pesisir, konservasi laut, dan pengelolaan limbah plastik. Selain tu, analisis juga mengeksplorasi peran aktor utama, termasuk pemerintah,

lembaga keuangan, organisasi internasional, dan sektor swasta, dalam mendukung implementasi *blue finance*. Hambatan utama, seperti kurangnya data ekosistem yang andal dan koordinasi kebijakan yang lemah, juga menjadi perhatian dalam analisis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia *Blue Economy Roadmap*

Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai negara maritim, Indonesia dapat mengadopsi konsep ekonomi biru (*blue economy*) untuk meningkatkan perekonomian di sektor kelautan. Potensi perairan Indonesia sangat besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor, seperti pariwisata, industri maritim, transportasi laut, dan sektor lainnya. Menurut data dari Bank Dunia, nilai ekonomi kelautan Indonesia mencapai USD 280 miliar setiap tahunnya, dengan fokus utama pada pengembangan sektor kelautan dan manufaktur. Meskipun praktik ekonomi biru sebenarnya telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia, pendekatannya masih bersifat konvensional. Pemanfaatan konvensional ini memberikan kontribusi sekitar 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam lima tahun terakhir, yang tergolong rendah. Namun, dalam periode 2012-2020, ekonomi biru di Indonesia mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 10,5 persen (Sambodo, et al., 2023). Data ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi biru memiliki potensi besar yang dapat dimaksimalkan melalui strategi eksekusi yang tepat.

Ekonomi biru di Indonesia sejalan dengan visi negara dalam mewujudkan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Beberapa tujuan yang relevan mencakup pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, akses energi bersih dan terjangkau, penyediaan pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Peta jalan ekonomi biru Indonesia dirancang untuk mempercepat pencapaian target SDGs. Transformasi ekonomi menuju ekonomi biru juga mendukung visi Indonesia 2045, yang bertujuan membawa Indonesia keluar dari kategori negara berpendapatan menengah (Sambodo, et al., 2023). Ekonomi biru ini memanfaatkan potensi Indonesia sebagai negara maritim melalui pengelolaan sumber daya laut yang terintegrasi dengan pembangunan sektor maritim yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan.

Keanekaragaman sumberdaya laut Indonesia membuka peluang bagi pengembangan berbagai sektor dalam peta jalan ekonomi biru. Namun, ada dua fokus utama dalam pembangunan, yaitu pengembangan sektor-sektor yang sudah mapan dan sektor-sektor yang masih baru dalam konteks ekonomi biru Indonesia. Sektor-sektor mapan dikembangkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang ada dengan perhatian khusus pada empat subsektor,

yaitu perikanan tangkap dan budidaya laut, manufaktur berbasis kelautan, perdagangan maritim, transportasi dan logistik, serta pariwisata (Sambodo, et al., 2023). Seluruh sektor ekonomi biru, perikanan tangkap dan budidaya laut merupakan yang terbesar dan memegang peranan penting dalam penyediaan pangan, baik untuk kebutuhan nasional maupun global. Potensi produksi perikanan tangkap dan budidaya laut di Indonesia diperkirakan mencapai 67 juta ton per tahun, dengan rincian 10,2 juta ton dari perikanan tangkap dan 56,8 juta ton dari perikanan budidaya. Negara ini juga memiliki sebelas wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi sektor perikanan tangkap dan budidaya, dengan potensi ekonomi mencapai USD 1,33 triliun per tahun (Humairoh, et, al., 2024). Meskipun memiliki potensi besar, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk praktik penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing), metode penangkapan yang tidak berkelanjutan, rendahnya kualitas teknologi dan tata kelola sumberdaya, serta lemahnya pengawasan dan sistem pendataan perikanan tangkap (Kusdiantoro, et al., 2019).

Subsektor kedua dalam ekonomi biru adalah manufaktur berbasis kelautan. Industri ini bertujuan untuk mengelola sumberdaya laut, sehingga dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi. Namun, subsektor ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesiapan Indonesia dalam menyediakan dan menguasai teknologi, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta menjaga keseimbangan ekosistem selama proses industrinya. Oleh karena itu, fokus pengembangannya terletak pada peningkatan teknologi, produktivitas dengan nilai tambah yang lebih besar, serta keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, subsektor perdagangan maritim, transportasi, dan logistik memiliki peran penting dalam mendukung alur perdagangan antar pulau, dengan fokus utama pada pengembangan transportasi laut. Untuk meningkatkan daya saing, transportasi laut dalam ekonomi biru dirancang agar terintegrasi dengan moda transportasi udara dan darat. Subsektor ini juga dapat memanfaatkan jalur perdagangan laut strategis seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Selat Malaka. Namun, infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan bahan bakar dalam proses perdagangan maritim, dan isu keamanan laut menjadi tantangan utama subsektor ini (Sambodo, et al., 2023).

Pengembangan pariwisata bahari menjadi salah satu prioritas utama dalam peta jalan ekonomi biru Indonesia. Kekayaan dan keindahan laut yang dimiliki negara ini menjadi aset penting dalam mendorong sektor pariwisata bahari. Namun, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, masalah polusi laut, dan rendahnya kapasitas sumberdaya manusia yang bertugas mengelola pariwisata bahari (Donesia, et al., 2023). Pengembangan sektor ini difokuskan pada konsep pariwisata, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Tujuannya adalah memastikan keindahan laut Indonesia tetap terjaga, sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Selain aktor-aktor yang sudah berjalan, peta jalan ekonomi biru Indonesia juga mempromosikan sejumlah sektor baru, seperti energi terbarukan, bioteknologi, dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, serta konservasi laut dan jasa ekosistem. Salah satu sektor yang sangat dibutuhkan adalah energi terbarukan lepas pantai, mengingat kondisi global saat ini. Meskipun bahan bakar fosil masih menjadi sumber energi utama di Indonesia, ketersediaannya terbatas. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan lepas pantai menjadi alternatif penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain berkontribusi hampir nol persen terhadap emisi gas rumah kaca dan polusi udara, energi terbarukan juga ramah lingkungan. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ini, termasuk sumber panas air laut melalui teknologi *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC) dan pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang ramah lingkungan. Namun, pengembangan sektor ini menghadapi tantangan signifikan, seperti terbatasnya investasi dalam energi terbarukan lepas pantai, kurangnya studi dan tenaga ahli di bidang ini, serta minimnya infrastruktur pendukung (Sidik & Sinaga, 2023).

Keanekaragaman hayati di laut Indonesia menawarkan peluang besar untuk pengembangan sektor bioteknologi dan bioekonomi berbasis kelautan. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya pemahaman dan kemajuan dalam teknologi kelautan di Indonesia. Untuk mendorong sektor ini, diperlukan strategi dan kebijakan yang terarah. Beberapa langkah yang perlu dilakukan mencakup penguatan ekosistem pendukung, seperti peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan komersialisasi teknologi, perbaikan infrastruktur penunjang, kolaborasi dengan lembaga internasional yang sudah maju di bidang bioteknologi kelautan, serta penerapan pengelolaan yang ramah lingkungan. Sektor ketiga yang menjadi fokus adalah penelitian dan pendidikan, yang memiliki peran penting dalam keberlanjutan maritim Indonesia. Pengembangan penelitian dan pendidikan di bidang kelautan bertujuan untuk mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memanfaatkan potensi maritim Indonesia secara optimal. Untuk mencapai peta jalan ekonomi biru, strategi yang dirancang mencakup peningkatan investasi di bidang penelitian dan pendidikan maritim serta penguatan sistem pendidikan (Sambodo, et al., 2023).

Sektor terakhir yang tak kalah penting adalah Konservasi Laut dan Jasa Ekosistem. Konservasi laut berfokus pada keberlanjutan ekosistem dan perlindungan kawasan laut. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mengelola kawasan konservasi laut seluas 32,5 juta hektar, yang setara dengan 10% dari luas perairan Indonesia, pada tahun 2030. Perluasan kawasan konservasi laut ini diharapkan dapat menjaga keanekaragaman hayati laut dan

meningkatkan jasa ekosistem, serta membuka peluang ekonomi, terutama bagi masyarakat pesisir. Konservasi laut akan mendukung terciptanya ekonomi biru yang berkelanjutan dan memastikan kesehatan ekosistem pesisir dan laut dalam jangka panjang. Untuk mendukung pengembangan sektor konservasi laut dan jasa ekosistem, Indonesia perlu melakukan beberapa upaya, antara lain, membangun kolaborasi dan kemitraan multi-pihak, memperkuat kebijakan dan penegakan hukum perlindungan laut, mengembangkan mekanisme keuangan dan pendanaan, mendorong penelitian tentang karbon biru, serta merencanakan tata ruang pesisir dan laut yang harmonis antara perlindungan lingkungan laut dan kegiatan masyarakat (Rusandi, et al., 2021).

Sektor-sektor yang ada dan dikembangkan dalam peta jalan ekonomi biru Indonesia sangat kompleks. Meskipun Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, ada beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan ekonomi biru. Secara umum, tantangan-tantangan tersebut mencakup keberlanjutan ekosistem, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, keterbatasan infrastruktur, kekurangan investasi dan pendanaan, ketersediaan teknologi yang masih terbatas, serta dampak kegiatan ekonomi biru terhadap lingkungan.

Blue Finance Instruments Development Sebagai Strategi Indonesia

Blue bonds adalah instrumen utang berjangka tetap yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang berkontribusi pada perlindungan ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya air. Prinsipnya mirip dengan *green bonds*, tetapi dengan fokus pada sektor kelautan. *Blue bonds* memberikan peluang untuk menarik modal dari investor yang tertarik pada keberlanjutan dan konservasi lingkungan laut. Proyek yang didanai meliputi perlindungan mangrove, lamun, dan terumbu karang, serta infrastruktur pesisir yang berkelanjutan. Misalnya, dana dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas pariwisata ramah lingkungan atau konservasi kawasan perlindungan laut untuk mendukung ekosistem lokal dan penghidupan masyarakat pesisir.

Blue sukuk adalah versi syariah dari *blue bonds*, mematuhi prinsip keuangan Islam yang melarang riba dan mensyaratkan penggunaan dana untuk tujuan halal dan bermanfaat. Instrumen ini berbasis aset nyata, seperti konservasi laut atau pembangunan infrastruktur pesisir berkelanjutan. *Blue sukuk* sangat relevan di Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk Muslim dan luas wilayah laut yang signifikan. Contoh penggunaannya termasuk pembiayaan kawasan perlindungan laut atau investasi dalam proyek-proyek ekonomi biru berbasis komunitas, seperti ekowisata, dan perikanan berkelanjutan.

Parametric insurance adalah mekanisme perlindungan risiko yang memberikan pembayaran berdasarkan parameter yang telah ditentukan, seperti intensitas badai atau

kerusakan ekosistem. Instrumen ini dirancang untuk memberikan dana dengan cepat setelah terjadinya bencana alam, seperti badai atau tsunami, sehingga dapat segera mendukung pemulihan ekosistem laut. Misalnya, jika mangrove atau terumbu karang rusak akibat badai, *parametric insurance* dapat menyediakan dana untuk restorasi ekosistem tersebut tanpa menunggu proses klaim yang panjang. Ini penting untuk mempercepat pemulihan fungsi ekosistem yang mendukung komunitas pesisir.

Environmental impact bonds (EIB) adalah instrumen berbasis hasil di mana pembayaran kepada investor bergantung pada pencapaian hasil lingkungan tertentu yang telah disepakati. Misalnya, proyek rehabilitasi pesisir dapat diukur keberhasilannya berdasarkan pengurangan erosi atau peningkatan keanekaragaman hayati. Pendekatan ini menarik bagi investor karena memberikan transparansi terhadap dampak yang dihasilkan. EIB juga memberikan insentif kepada pengelola proyek untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, karena pengembalian investasi bergantung pada hasil tersebut.

Debt-for-nature swaps adalah mekanisme di mana sebagian utang negara dihapuskan dengan imbalan komitmen untuk melaksanakan proyek konservasi lingkungan. Dalam konteks *blue finance*, mekanisme ini digunakan untuk mendanai proyek seperti perlindungan mangrove, lamun, atau terumbu karang. Negara-negara yang memiliki utang besar dan aset laut yang kaya, seperti Indonesia, dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk mengurangi tekanan fiskal sekaligus memperkuat upaya konservasi. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengalokasikan dana yang sebelumnya untuk membayar utang ke dalam proyek restorasi ekosistem pesisir yang mendukung ekonomi masyarakat lokal.

Selain instrumen utama, terdapat berbagai inovasi keuangan lain seperti *blended finance* atau *green funds* yang dapat mendukung ekonomi biru. *Blended finance* menggabungkan hibah atau pinjaman lunak dari donor internasional dengan investasi swasta untuk mendukung proyek-proyek berisiko tinggi, tetapi berdampak tinggi, seperti pembangunan fasilitas pengelolaan limbah di kawasan pesisir. *Green funds* dapat diarahkan untuk mendukung inovasi teknologi di sektor kelautan, seperti pengembangan energi terbarukan berbasis laut atau alat tangkap ramah lingkungan. Melalui penerapan berbagai instrumen ini, Indonesia dapat mengatasi tantangan pendanaan di sektor kelautan sambil mempercepat transisi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan.

Tabel 1. Instrumen *Blue Finance*

Instrumen	Deskripsi	Contoh Penggunaan
Blue Bonds	Instrumen utang berjangka tetap yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang berkontribusi pada perlindungan ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya air.	Pendanaan konservasi mangrove dan lamun dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan di kawasan pesisir.
Blue Sukuk	Instrumen serupa dengan obligasi biru tetapi berbasis syariah, di mana dana digunakan untuk proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ramah lingkungan.	Proyek pengelolaan kawasan lindung laut dan pembangunan fasilitas pariwisata pesisir yang berkelanjutan.
Parametric Insurance	Asuransi berbasis parameter yang menyediakan pembayaran cepat berdasarkan kondisi yang telah ditentukan, seperti kerusakan ekosistem laut akibat badai atau bencana lainnya.	Perlindungan terumbu karang dan mangrove dari dampak bencana alam.
Environmental Impact Bonds	Instrumen keuangan berbasis hasil, di mana pembayaran tergantung pada pencapaian hasil lingkungan yang telah disepakati sebelumnya.	Pembiayaan proyek rehabilitasi ekosistem pesisir dengan pengurangan dampak perubahan iklim sebagai hasil yang diukur.
Debt-for-Nature Swaps	Mekanisme di mana sebagian utang negara dikonversi menjadi investasi dalam proyek lingkungan, seperti konservasi laut atau pengurangan emisi karbon biru.	Penghapusan utang negara dengan imbalan komitmen untuk mendanai proyek konservasi mangrove dan lamun.
Lainnya	Instrumen tambahan yang mencakup kombinasi inovasi keuangan lainnya seperti blended finance atau green funds, yang digunakan untuk mendukung sektor ekonomi biru.	Pendanaan campuran (hibah dan pinjaman lunak) untuk pengelolaan kawasan pesisir dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk sektor kelautan.

Target Sektor Prioritas

Berdasarkan konteks *blue finance*, sektor prioritas yang perlu mendapatkan perhatian meliputi empat area utama yaitu, perikanan berkelanjutan, pariwisata pesisir dan laut, pengelolaan aset pesisir dan laut (khususnya kawasan konservasi laut), dan pengelolaan limbah, terutama plastik. Setiap sektor ini menghadapi tantangan dan peluang yang unik, serta memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia.

1. **Perikanan Berkelanjutan**

   Sektor perikanan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, terutama dari segi ekspor dan lapangan kerja. Namun, sektor ini menghadapi tantangan berupa penangkapan ikan yang berlebihan, degradasi ekosistem pesisir seperti terumbu karang, dan kurangnya investasi yang fokus pada keberlanjutan. Sebagian besar hasil tangkapan berasal dari perikanan skala kecil yang sangat tergantung pada kesehatan ekosistem pesisir.

Oleh karena itu, perikanan berkelanjutan menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan sumber daya, bersamaan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

2. **Pariwisata Pesisir dan Laut**

   Pariwisata berbasis pesisir dan laut, terutama yang melibatkan ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru. Pariwisata ini menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya, tetapi terkonsentrasi di daerah yang sudah memiliki infrastruktur. Salah satu tantangan utama adalah dampak negatif dari pariwisata yang tidak terkelola, seperti pembangunan berlebihan dan polusi. Untuk itu, pengelolaan berbasis keberlanjutan diperlukan agar pariwisata dapat berjalan seimbang dengan konservasi ekosistem.

3. **Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (*Marine Protected Areas* – MPA)**

   Kawasan konservasi laut memainkan peran sentral dalam menjaga keanekaragaman hayati dan menyediakan layanan ekosistem penting, seperti perlindungan pesisir, habitat ikan, dan penyimpangan karbon biru. Namun, pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi ini masih jauh dari kata cukup. Misalnya, biaya pengelolaan yang ideal diperkirakan mencapai enam ratus sembilan puluh miliar per tahun, tetapi saat ini hanya sekitar tujuh puluh lima miliar yang tersedia dari berbagai sumber (Pratama, et al., 2022). . Kesinambungan dana untuk operasi dan pemeliharaan kawasan konservasi menjadi fokus penting dalam *blue finance*.

4. **Penanganan Limbah (Terutama Plastik)**

   Limbah plastik merupakan ancaman besar bagi ekosistem laut di Indonesia. Sampah yang mencemari laut tidak hanya berdampak pada kesehatan ekosistem, tetapi juga pada sektor ekonomi seperti pariwisata dan perikanan. Upaya pengurangan limbah plastik melalui inovasi pengelolaan sampah, regulasi, dan pelibatan komunitas lokal sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Oleh karena itu, perlu adanya instrumen pembiayaan inovatif untuk menjawab kesenjangan pendanaan di sektor-sektor tersebut. Instrumen seperti *blue bonds*, *blue sukuk*, dan pembayaran untuk layanan ekosistem (seperti karbon biru dari mangrove dan lamun) diidentifikasi sebagai cara potensial untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Selain itu, kerja sama lintas sektor, seperti antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat lokal, sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang efektif.

Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk mendukung *blue finance* di Indonesia mencakup berbagai sumber dana yang berpotensi untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan pendanaan di sektor ekonomi biru. Sumber-sumber ini berasal dari kombinasi antara dana publik, kontribusi sektor swasta, dan instrumen pasar berbasis lingkungan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai sumber-sumber pendanaan tersebut:

1. **Dana Pemerintah (*Fees, Levies, and Penalties*)**

   Pemerintah dapat memanfaatkan sumber dana yang berasal dari biaya, pungutan, dan denda terkait aktivitas ekonomi yang berdampak pada ekosistem laut. Misalnya, pungutan dari industri perikanan, transportasi laut, dan pariwisata dapat diarahkan untuk mendukung konservasi laut. Selain itu, denda yang dikenakan atas pelanggaran lingkungan dapat digunakan untuk mendanai inisiatif pemulihan ekosistem. Biaya-biaya ini memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk mematuhi regulasi lingkungan sekaligus menciptakan dana berkelanjutan untuk pengelolaan sumber daya laut.

2. **Pembayaran untuk Layanan Ekosistem (*Payments for Ecosystem Services* – PES)**

   Sumber ini melibatkan mekanisme pembayaran yang diberikan kepada pihak-pihak yang menjaga atau meningkatkan layanan ekosistem. Contohnya adalah pembayaran karbon biru yang diperoleh dari konservasi mangrove dan lamun yang menyimpan karbon. Pendapatan ini dapat dimonetisasi untuk mendukung investasi berkelanjutan di ekosistem pesisir, baik untuk kebutuhan konservasi maupun pembangunan komunitas pesisir.

3. ***Biodiversity Offsets***

   Biodiversity offsets adalah skema di mana sektor industri, seperti perminyakan atau transportasi laut, memberikan kompensasi atas dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati melalui pendanaan kegiatan konservasi di tempat lain. misalnya, perusahaan yang membangun infrastruktur di kawasan pesisir dapat diwajibkan untuk mendanai rehabilitasi kawasan mangrove atau terumbu karang sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan.

4. **Pendanaan Berbasis Karbon (*Blue Carbon Payments*)**

   Sumber ini berasal dari nilai ekonomi karbon yang tersimpan dalam ekosistem laut, seperti mangrove, lamun, dan rawa-rawa pesisir. Pasar karbon yang terus berkembang, Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan ekosistem pesisirnya sebagai sumber pendanaan melalui perdagangan karbon. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan intervensi kebijakan yang mendukung pengelolaan pasar karbon dan memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

5. **Kontribusi Sektor Swasta dan Filantropi**

Sektor swasta dna organisasi filantropi juga dapat berperan sebagai sumber pendanaan melalui investasi langsung, hibah, atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Investasi dari sektor swasta sering diarahkan pada inisiatif berbasis keuntungan, seperti pariwisata berkelanjutan dan teknologi akuakultur, sementara filantropi cenderung mendukung proyek konservasi dan pendidikan lingkungan.

6. **Instrumen Pasar Keuangan**

Instrumen seperti *blue bonds* dan *blue sukuk* menawarkan peluang untuk menggalang dana dari pasar modal. Instrumen ini memungkinkan investor, baik domestik maupun internasional, untuk berkontribusi pada proyek-proyek berkelanjutan di sektor ekonomi biru. Selain itu, *blended finance* yang menggabungkan dana filantropi, pemerintah, dan investasi swasta juga menjadi alternatif yang semakin populer untuk mendukung pengembangan ekonomi biru. Berikut merupakan aktor-aktor dalam *blended finance*:

Tabel 2. Aktor dalam *Blended Finance*

Tipe Aktor	Peran
Public and Philanthropic Donors	Memberikan hibah untuk bantuan teknis, menggunakan instrumen de-risking untuk mengurangi risiko proyek, menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, mempromosikan agenda pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan dampak investasi terhadap pembangunan berkelanjutan.
Private-Philanthropic Investors	Aktor ini memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi dibandingkan lainnya, sehingga dapat bereksperimen pada proyek, sektor, atau wilayah dengan potensi dampak pembangunan yang tinggi. Mereka juga dapat memengaruhi aliran modal melalui demonstrasi dan mengambil posisi subordinasi untuk menarik lebih banyak investor.
Multilateral Development Banks (MDBs) dan *Development Financial Institutions* (DFIs)	Memberikan sinyal kepada pasar tentang potensi komersial investasi tertentu melalui demonstrasi, menyediakan tiket investasi berukuran besar, mengurangi risiko melalui jaminan, serta bertindak sebagai perantara kritis untuk melibatkan investor institusional melalui kapasitas memenuhi ukuran tiket dan harapan risiko-keuntungan.
Private-Commercial Investors	Mengisi kesenjangan pembiayaan untuk mencapai SDGs dengan sumber daya mereka, dapat mengelola investasi dari skala kecil hingga besar, serta memainkan peran penting dalam agregasi investasi.
Institutional Investors	Memiliki sumber daya besar untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs, namun kapasitas ini sering terbatas untuk proyek-proyek skala besar karena kebutuhan akan ukuran investasi yang signifikan. Mereka cenderung berfokus pada sektor atau negara dengan risiko rendah karena toleransi risiko mereka yang rendah.
Banks (terutama di pasar negara berkembang)	Berperan dalam agregasi pada tingkat nasional, sering terlibat dalam investasi skala kecil atau proyek besar melalui pinjaman sindikasi, dan biasanya berfokus pada sektor dengan risiko rendah. Instrumen jaminan yang dikombinasikan dengan bantuan teknis sering digunakan untuk mendemonstrasikan model bisnis baru.

Sumber: (Enclude, 2018)

Secara keseluruhan, sumber-sumber pendanaan ini memberikan kerangka kerja yang luas untuk mendukung kebutuhan finansial dalam transisi Indonesia menuju *blue economy* yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti pengembangan regulasi yang memadai, pengawasan yang transparan, dan pengelolaan yang efektif tetap menjadi fokus utama dalam memanfaatkan sumber-sumber pendanaan ini.

Mitra Pembangunan

Mitra pembangunan memiliki peran penting dalam mendukung inisiatif ekonomi biru di Indonesia melalui kontribusi dana, keahlian teknis, dan fasilitasi program-program strategis. Berikut adalah beberapa mitra pembangunan utama beserta perannya:

1. ***Asian Development Bank* (ADB)**

   ADB adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam bidang pembangunan sejak tahun 1966, dengan total komitmen pembiayaan mencapai USD 43,37 miliar. Melalui strategi kemitraan negara untuk periode 2020-2024, ADB mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Dalam konteks *blue finance*, ADB meluncurkan *blue sea finance hub* yang berbasis di Indonesia pada tahun 2021, bertujuan untuk mempercepat pengembangan proyek-proyek beroerientasi keberlanjutan, seperti pelestarian ekosistem laut dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Rencana aksi ADB untuk *healthy oceans and sustainable blue economies* mencakup pembiayaan hingga USD 5 miliar untuk proyek terkait perlindungan kesehatan laut, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan ekonomi laut hingga 2024.

2. ***United Nations Development Program* (UNDP)**

   UNDP mendukung berbagai inisiatif di Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi ketimpangan, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk SDG-14 yang berfokus pada kehidupan di bawah air. UNDP juga berkontribusi dalam pengembangan kerangka kerja teknis dan implementasi proyek berbasis ekonomi biru, seperti pendanaan SDG *bonds* untuk mendukung proyek-proyek sosial dan lingkungan.

3. ***Indonesia Climate Change Trust Fun*d (ICCTF)**

   ICCTF adalah lembaga pendanaan yang mengelola dana dari berbagai donor internasional untuk mendukung proyek-proyek terkait mitigasi perubahan iklim, adaptasi, dan ketahanan. Sejak 2018, ICCTF telah memperluas mandatnya untuk mencakup tema kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan terumbu karang dan inisiatif ekonomi biru. ICCTF telah mengelola dana dari *Global Environment Facility* (GEF) sebesar USD 11,4 juta untuk mendukung program seperti COREMAP-CTI di wilayah Indonesia Timur.

4. ***Blue Abadi Fund***

Blue abadi fund adalah dana konservasi yang didedikasikan untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan di Kawasan Kepala Burung, Indonesia Timur. Dana ini mneyediakan sumber pendapatan bagi komunitas lokal dan lembaga pemerintah untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Hingga saat ini, dana ini telah menerima dukungan dari organisasi internasional seperti *Conservation International* (CI) dan WWF.

Mitra-mitra ini berperan tidak hanya dalam pendanaan, tetapi juga dalam membangun kapasitas teknis, advokasi kebijakan, dan pengembangan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan ekonomi biru di Indonesia. Kolaborasi mereka memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai memiliki dampak jangka panjang yang positif pada lingkungan dan masyarakat pesisir.

Hambatan dan Kendala *Blue Finance* di Indonesia

Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi *blue finance* di Indonesia yang dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, kurangnya koordinasi dan kerangka kebijakan yang memadai. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar berbagai inisiatif yang mendukung pembiayaan biru. Banyaknya program, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi internasional, sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang memadai. Hal ini diperparah oleh kerangka kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta kurangnya taksonomi dan panduan operasional yang jelas terkait pembiayaan biru. Akibatnya, upaya untuk mengembangkan investasi berkelanjutan dalam sektor ini menjadi terfragmentasi, mengurangi dampak keseluruhan.

Kedua, adanya kesenjangan data dan pemantauan yang terbatas. Keterbatasan data yang dapat diandalkan serta kurangnya sistem pemantauan yang terstandarisasi menjadi hambatan signifikan dalam menarik investasi untuk proyek-proyek biru. Investor sering kali membutuhkan informasi yang transparan dan kredibel mengenai dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek yang didanai. Ketidakmampuan untuk menyediakan data yang relevan dan terukur mengenai ekosistem laut, seperti cadangan karbon biru atau keanekaragaman hayati, mengurangi daya tarik investasi dan menimbulkan ketidakpastian.

Ketiga, pendanaan yang terbatas atau investasi yang kecil untuk ekosistem laut. Pendanaan yang tersedia untuk sektor kelautan masih jauh dari memadai. Sebagian besar investasi global dalam ekonomi berkelanjutan lebih difokuskan pada sektor darat seperti kehutanan dan energi terbarukan. Sementara itu, sektor ekonomi biru di Indonesia, seperti perlindungan kawasan laut, pengelolaan limbah, dan pembangunan infrastruktur pesisir berkelanjutan, hanya mendapatkan sebagian kecil dari anggaran nasional maupun hibah

internasional. Hal ini menciptakan kesenjangan pendanaan yang besar untuk mengatasi ancaman lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

Terakhir, adanya risiko tinggi dan kurangnya lingkungan regulasi yang mendukung. Sektor kelautan dianggap memiliki risiko tinggi oleh banyak investor karena ketidakpastian hasil investasi, termasuk dari sisi pasar, teknis, dan lingkungan. Selain itu, regulasi yang mendukung instrumen seperti pembayaran untuk jasa ekosistem atau pasar karbon biru masih minim atau belum sepenuhnya diterapkan. Lingkungan regulasi yang belum matang ini meningkatkan ketidakpastian, membuat investor enggan berpartisipasi, dan membatasi pengembangan instrumen keuangan inovatif.

Tabel 3. Hambatan *Blue Finance* di Indonesia

1.	Komponen		*Key Barriers* Kurangnya koordinasi dan kerangka kebijakan yang memadai
	Ada kerangka kerja dan taksonomi untuk investasi hijau dan investasi berkelanjutan, atau sektor berbasis bentang alam, tetapi tidak ada untuk sektor biru.	Tidak ada kriteria perikanan berkelanjutan yang umum yang dapat memungkinkan organisasi untuk menggunakan metrik yang sama.	Taksonomi yang tepat diperlukan oleh bank-bank, lembaga keuangan, dan regulator di Indonesia.
2.	Komponen		*Key Barriers* Kesenjangan dan ketidaksesuaian informasi, kesadaran, kapasitas dan skala
	Kurangnya strategi yang teridentifikasi dengan jelas untuk menarik investasi, perawatan, dan retensi untuk perikanan berkelanjutan.	Kurangnya kesadaran akan pembiayaan instrumen pembiayaan dan nilainya proposisi.	Kurangnya layanan setelah perawatan dan advokasi kebijakan untuk investor lokal dan internasional.
	Kurangnya promosi investasi internasional yang tepat untuk promosi investasi dan program fasilitasi yang tepat.	Kurangnya "peta jalan investor" yang lengkap dan panduan investasi perikanan, serta investasi akuakultur, kurangnya dukungan untuk UKM dengan pengetahuan tentang cara mengekspor.	Investor membutuhkan kejelasan dan panduan tentang berbagai perikanan peluang yang berbeda
3.	Komponen		*Key Barriers* Jalur investasi yang lemah
	Kurangnya jaringan pipa: kurangnya peluang investasi yang cukup besar; fragmentasi; perusahaan sosial lebih memilih utang daripada investasi ekuitas.	Sulit untuk menemukan bisnis yang dapat diinvestasikan, kredibel, dan dapat diterima oleh pihak eksternal keuangan.	UKM tidak diorganisir sebagai bisnis (PT/PMA) dan tidak menarik dari segi ukuran, yang berarti bahwa hasil produksi mereka kecil, dan ada juga biaya transaksi yang tinggi untuk mendirikan PT/PMA karena prosesnya tidak terstandardisasi.

	Kekhawatiran investor terhadap umur panjang investasi dan tingkat pengembalian investasi.	Strategi keluar terbatas: ekuitas investor umumnya mengharapkan pembelian kembali oleh manajemen atau untuk menemukan pembeli strategis. Sulit untuk dibuktikan profitabilitas.	Faktor-faktor lain yang membatasi keuangan biru termasuk kurangnya perantara kapasitas perantara dan modal transisi.
4.	Komponen		*Key Barriers* Risiko tinggi dan kurangnya lingkungan regulasi yang mendukung
	Biaya peluang (dianggap lebih baik di pasar) dan kurangnya lokal atau LSM yang dapat bekerja sama dengan sektor swasta atau investor untuk mengajarkan praktik-praktik yang lebih baik.	Risiko pasar yang dirasakan (tantangan isu-isu lokal).	Kebiasaan sosial dan pasar sulit untuk berubah.
	Resistensi terhadap perubahan preferensi pasar, misalnya untuk mengembangkan rantai pasokan yang bernilai lebih tinggi.	Volatilitas harga (pasar).	Kurangnya data perikanan yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan investasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan, dengan laut yang mencakup 6,4 juta kilometer persegi dan keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti degradasi ekosistem laut, *overfishing*, polusi plastik, serta keterbatasan pendanaan dan regulasi. Konsep *blue economy*, yang menekankan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, telah diadopsi sebagai pendekatan utama dalam mengelola sumber daya kelautan secara bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia telah menyusun peta jalan ekonomi biru untuk mendukung transformasi ekonomi menuju keberlanjutan, sejalan dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG-14.

Pengembangan instrumen keuangan biru (*blue finance*) menjadi elemen kunci dalam implementasi ekonomi biru. Instrumen ini, seperti *blue bonds, blue sukuk*, dan pembayaran untuk jasa ekosistem, dirancang untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan yang mendukung konservasi laut, pengelolaan perikanan, pengurangan limbah plastik, serta pengembangan energi terbarukan berbasis laut. Meskipun potensi pasar untuk instrumen ini cukup besar, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya regulasi yang mendukung, kesenjangan data, dan rendahnya minat sektor swasta dalam investasi hijau.

Mitra pembangunan internasional seperti *Asian Development Bank* (ADB), *United Nations Development Program* (UNDP), *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), dan

blue abadi fund, memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan, membangun kapasitas teknis, serta mendorong kebijakan yang mendukung ekonomi biru. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, mitra pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan strategi ini.

Namun, ada berbagai hambatan yang perlu diatasi, termasuk fragmentasi program, kurangnya koordinasi, serta rendahnya kapasitas data dan monitoring. Risiko investasi yang tinggi di sektor kelautan juga menjadi tantangan besar dalam menarik investor. Oleh karena itu, pendekatan strategis yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi biru di Indonesia.

Saran

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

1. **Penguatan Kerangka Kebijakan dan Regulasi**

   Pemerintah perlu mempercepat pengembangan kerangka regulasi yang mendukung ekonomi biru. Ini termasuk taksonomi khusus untuk investasi biru, panduan operasional untuk pembiayaan biru, serta insentif pajak dan keuangan untuk menarik investor. Penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan laut juga harus diperkuat untuk mengurangi aktivitas yang merusak ekosistem.

2. **Peningkatan Kapasitas Data dan Monitoring**

   Penting untuk membangun sistem pemantauan yang terstandarisasi dan transparan guna mengukur dampak proyek-proyek biru. Data yang kredibel tentang ekosistem laut, seperti stok karbon biru atau keanekaragaman hayati, dapat meningkatkan daya tarik investasi. Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan universitas dapat membantu menghasilkan data yang akurat.

3. **Mendorong Partisipasi Sektor Swasta**

   Sektor swasta perlu dilibatkan secara lebih aktif melalui promosi peluang investasi yang jelas dan menguntungkan. Pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan publik-swasta untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Kampanye kesadaran tentang manfaat ekonomi biru juga dapat meningkatkan minat sektor swasta dalam berinvestasi di sektor ini.

4. **Diversifikasi Sumber Pendanaan**

   Selain mengandalkan mitra internasional, Indonesia perlu memperluas sumber pendanaan domestik dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan lokal dan filantropi. Instrumen inovatif seperti *blended finance* dapat digunakan untuk menggabungkan hibah dengan investasi swasta dalam proyek-proyek berisiko tinggi, tetapi berdampak besar.

5. **Penguatan Kapasitas Lokal**

   Masyarakat pesisir sebagai pemangku kepentingan utama harus diberdayakan melalui pelatihan, akses teknologi, dan pembiayaan mikro. Pelibatan komunitas lokal dalam proyek ekonomi biru, seperti konservasi mangrove atau ekowisata, dapat meningkatkan keberlanjutan proyek sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung.

6. **Promosi Energi Terbarukan Berbasis Laut**

   Indonesia perlu memprioritaskan pengembangan energi terbarukan seperti *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC) dan pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Meskipun investasi awalnya tinggi, sektor ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus menciptakan peluang kerja baru.

7. **Kolaborasi Internasional yang Lebih Intensif**

   Mengingat sifat tantangan kelautan yang lintas batas, Indonesia harus terus memperluas kolaborasi dengan organisasi internasional dan negara-negara lain. Kerja sama ini dapat mencakup transfer teknologi, pendanaan bersama, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Dengan mengatasi tantangan yang ada melalui langkah-langkah strategis ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin global dalam ekonomi biru yang berkelanjutan. Selain memberikan manfaat ekonomi, pendekatan ini akan memastikan kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Donesia, E. A., & dkk. (2023). Konsep Blue Economy dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1950-1959.

Enclude. (2018). *Blended Finance: How to get investors onboard.*

Humairoh, T. L., Setyaningrum, I., & Tanaya, O. (2024). Keberlanjutan Blue Economy Melalui Kontribusi Industri Ikan Tangkap dan Budidaya Ikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. COSTING: *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2), 3444-3452.

Kusdiantoro, Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14(2), 145-162.

Musdalifah, et al. (2024). Strategi Indonesia dalam Mencapai Blue Economy Roadmap Melalui National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP). *Student Scientific Creativity Journal*, 2(6), 53-65.

Nanda, et al. (2024). Komitmen Indonesia dalam Mewujudkan Ekonomi Kelautan Berbasis Blue Economy. *Civil and Military Cooperation Journal*, 1(2), 65-72.

Nurhayati, Siti. (2013). Blue and Economy Policy and The Impact to Indonesia Community Welfare. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1).

Pratama, et al. (2022). Indonesia *Blue Finance Policy Note*. Jakarta: Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

Rani, Faisyal dan Cahyasari, Wulandari. (2015). Motivasi Indonesia dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Ekonomi Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1).

Rusandi, A., Hakim, A., Wiryawan, B., & Sarmintohadi. (2021). Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di Indonesia. *Marine Fisheries*, 12(2), 137-147.

Sambodo, L. A., & dkk. (2023). Indonesia Blue Economy Roadmap. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS).

Sidik, M., & Sinaga, N. (2023). Potensi Pemanfaatan Gelombang Laut Menjadi Tenaga Listrik dengan Metoda Oscillating Water Column di Pulau Bawean Gresik. JEBT: *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 4(2), 132-144.

BIOGRAFI PENULIS

Ika Fitri Andini adalah seorang mahasiswa Magister Geografi Minat Studi Pembangunan Wilayah di Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan torehan IPK 3.93 (8th semester, 167 *credits*). Ika memiliki pengalaman profesional di beberapa bidang, termasuk pengembangan sumber daya manusia, moderasi *workshop*, dan kegiatan sosial yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Ia pernah tergabung dalam Tim Kewirausahaan Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS, *Local Project EduVaganza* 5.0 yang berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dipelopori oleh AIESEC in UNS, serta relawan di Yayasan Semangat Membara Bangun Indonesia untuk meningkatkan literasi anak-anak di Desa Batu Lotong, Kecamatan Rantekarua, Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, Ika juga pernah terlibat dalam kontribusinya sebagai enumerator untuk penilaian risiko kesehatan lingkungan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman.

Dengan keahlian dalam manajemen projek, *teamwork*, dan keterampilan dalam mengoperasionalkan seperti *Google Workspace* dan *Microsoft Office*, ia juga memiliki publikasi akademik yang berjudul Pendidikan Inklusi pada Anak Berkebutuhan Khusus "Tunadaksa" di Jurnal Inovasi Akademik UGM. Ika terus berkomitmen pada pengembangan diri dan kontribusi bagi masyarakat melalui pendidikan dan pengabdian.

Analisis Pembangunan Jalan Tol di Yogyakarta: Manfaat serta Kerugiannya dari Perspektif Budaya dan Hukum Terhadap Pelestarian Situs Budaya

Luthfi Azizah Azhar

Fakultas Ilmu Budaya—Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Pembangunan Jalan Tol Solo—Yogyakarta—Bandara YIA Kulon Progo telah disepakati antara Sri Sultan dan pemerintah pusat. Proyek ini merupakan salah satu dari program Presiden Jokowi yang dimulai tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada 2024, menghubungkan Solo, Yogyakarta, dan Bandara YIA. Namun, terdapat kendala saat pemerintah pusat *'nembung'* kepada pemerintah Kota Yogyakarta yaitu pada Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Yogyakarta. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai alasan Sri Sultan yang awalnya kurang menyetujui rencana pemerintah yang akan membangun Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Bandara YIA ini serta apa alasan akhirnya pembangunan tersebut dapat dilaksanakan. Masalah ini akan dikaji dari sisi hukum dan sosial-budaya dengan objek analisis adalah rencana pembangunan Jalan Tol Solo—Yogyakarta–Bandara YIA, pendapat Sultan, dan dampaknya bagi masyarakat Jogja. Analisis menggunakan Teori Konflik Sosial-Budaya oleh Lewis A. Coser dan Teori Pembangunan Berkelanjutan oleh Gro Harlem Brundtland dengan ditinjau melalui beberapa literatur, berita, dan juga pendekatan faktual yang mendukung topik permasalahan. Hasil penelitian ini nantinya berupa rumusan terkait permasalahan, strategi, dan solusi terhadap objek penelitian. Rencana pembangunan jalan tol di Jogja yang pada rencana awal melewati sisi depan Candi Prambanan dinilai kurang tepat karena hal tersebut mengganggu situs kebudayaan yang telah ditetapkan sebagai Cagar. Sri Sultan juga kurang menyetujui jika pembangunan jalan tol berdampak pada alih milik lahan warga Jogja untuk dijadikan tol. Selain itu menurut Sultan, pembangunan ini kurang memberi keuntungan bagi masyarakat Jogja. Pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk kemudahan akses perjalanan darat antar kota, menurut Sri Sultan tetap harus memperhatikan kebermanfaatan dan pengaruhnya dalam jangka panjang. Bahwa jalan tol tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga kesejahtaraan masyarakat setempat. Melalui penelitian ini penulis ingin mengajak pembaca untuk lebih kritis menyikapi suatu permasalahan dengan mengacu pada *urban-planning* serta memperdalam budaya *unggah-ungguh* orang Jawa. Hal ini penting untuk melestarikan budaya dan ciri khas Yogyakarta. Seperti slogan yang biasa ditemui, "Jogja Berhati Nyaman".

Kata kunci: *jalan tol, yogyakarta, rencana pemerintah, pelestarian budaya*

1. Pengantar (introduction)

Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong perekonomian disekitar wilayah tersebut. Infrastruktur yang bertambah diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara (Sari, 2023). Salah satu contoh infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan oleh pemerintah Indonesia yakni pembangunan jalan tol. Jalan tol diharapkan dapat membantu mempersingkat perjalanan darat yang biasanya perjalanan antar kota ditempuh melewati jalan nasional. Salah satu proyek pembangunan jalan tol yang direncanakan oleh pemerintah era presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo.

Salah satu program kerja yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo dalam kabinet merah putih yaitu perluasan pembangunan tol di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini telah dilakukan sejak tahun pertama Presiden Jokowi menjabat bersama rekan-rekan kabinet merah putih. Perluasan pembangunan jalan tol mulai dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia dan pada program ini mencakup pula pembangunan jalan tol Jogja Solo yang akan menghubungkan sisi barat (Jakarta, Bandung, Jawa Tengah) dengan sisi Timur (Ngawi, Malang, Jawa Timur). Pada Jalan tol Jogja—Solo sendiri direncanakan akan dilakukan di tahun 2021 dan direncanakan selesai pada 2024.

Pambangunan tol bertujuan memperluas akses dan mempercepat ekonomi antar kota. Untuk hal tersebut, pemerintah menyiapkan dana yang cukup besar, terutama untuk Jawa. Meskipun demikian, proyek ini memicu pro dan kontra di masyarakat, sebagaimana kebijakan pemerintah lainnya. Penelitian ini berusaha untuk mengangkat isu permasalahan persetujuan perizinan pembangunan jalan tol Jogja-Solo antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu Sultan Hamengkubuwono IX selaku gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang telah direncanakan di awal tahun 2021 memiliki sedikit kendala terkait perizinan kepada pemerintah daerah. Rencana pemerintah membangun jalan tol sempat terdapat penundaan dari rencana awal karena belum adanya persetujuan dari Sri Sultan selaku Gubernur Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini akan dianalisis permasalahan pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang akan dikaji dari perspektif sosial, budaya, dan ekonomi. Pada rencana pembangunan jalan tol ini Sri Sultan selaku Gubernur Kota Yogyakarta mempertimbangkan rencana tersebut dari berbagai sisi, tidak hanya melihat dari sisi ekonomi saja, namun juga sosial-ekonomi dan budaya khususnya masyarakat Yogyakarta.

2. Landasan Teori

2.1 Teori Konflik Sosial-Budaya oleh Lewis A. Coser

Penelitian ini akan membahas analisis permasalahan perizinan pembangunan jalan tol Jogja—Solo yang akan dikaji dari perspektif Sosiologi menggunakan Teori Konflik Sosial-Budaya Lewis A. Coser. Mengutip dari (Nuraeni, 2022) sebagaimana yang dikatakan oleh Margaret M. Poloma, konflik sosial dibagi menjadi dua, yakni konflik realitas dan kedua, konflik non-realitas (Poloma, 2000). Analisis pada permasalahan ini juga akan digunakan dikaji dari sisi ekonomi untuk melengkapi proses analisis. Penelitian dari sisi ekonomi akan digunakan Teori Pembangunan Berkelanjutan dari Gro Harlem Brundtland. Tujuan dari penelitian ini adalah hendak mengambarkan kompleksitas Sri Sultan dalam mempertimbangkan pembangunan jalan tol Jogja—Solo. Analisis ini juga akan menjadi sebuah narasi kritik kepada pemerintah dan pemangku kebijakan, sehingga harapannya kedepannya penelitian ini dapat berguna untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam merencanakan dan membangun infrastruktur di Indonesia.

Ditinjau dari sisi sosial, Teori Konflik Sosial-Budaya Lewis A. Coser dipilih untuk menganalisis permasalahan pada topik penelitian ini. Lewis A. Coser adalah seorang sosiolog Amerika yang bernama lengkap Lewis Alfred Coser, lahir pada 27 November 1913 di Berlin, Jerman. Kontribusi Coser terhadap ilmu sosiologi salah satunya yaitu buku yang ditulisnya berjudul *Functions of Social Conflict* sebuah buku yang berasal dari tugas akhirnya berisi teori yang diadaptasi dari pemikiran George Simmel. Lewis meninggal pada usia 89 tahun pada 8 Juli 2003 di Cambridge, Massachusette.

Menurut (Nuraeni, 2022), Lewis A. Coser beranggapan bahwa konflik muncul karena adanya perbenturan atas dua kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan batasan terhadap perbedaan tujuan yang hendak diambil, hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan George Simmel. Mengutip dari Margaret M. Poloma, Teori konflik Coser pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1956 melalui karya yang diangkat dari tugas akhirnya, *The Function of Social* Conflict. Teori konflik yang dimaksud disebut juga teori fungsionalisme konflik, karena penekanannya pada fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat yang bersifat naturalis dan termasuk dalam kategori teori konflik modern (Nuraeni, 2022) mengutip Poloma, (2000).

Secara etimologi, konflik *(conflict)* berasal dari kata kerja bahasa latin, *conflique* yang artinya saling memukul atau pertentangan antara dua kekuatan (Ghufron, 2021). Ketika terjadi pertentangan, dua individu maupun kelompok dapat berlomba-lomba untuk mendapat atau memperjuangkan apa yang dapat membuat mereka bertahan hidup. Di dalam masyarakat,

mustahil menemukan masyarakat yang hidup tanpa konflik. Konflik itu sendiri terkadang perlu diciptakan untuk memperkuat stabilitas hidup bermasyarakat. Namun, konflik yang memang baru muncul karena adanya pertentangan antara kedua belah pihak juga tak jarang ditemui di lingkup masyarakat.

Lewis A. Coser memandang konflik dalam masyarakat tidak selalu memberi dampak yang destruktif. Coser menganggap konflik juga bisa terjadi dengan tujuan positif (Nursantari, 2018). Coser berpendapat bahwa adanya konflik tidak perlu dihindari karena konflik bisa menjadi salah satu bentuk interaksi sosial. Pernyataan ini selaras dengan pendapat yang disampaikan Simmel bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dasar, seperti halnya bentuk-bentuk yang lain misalnya kerja sama yang akan memunculkan cara-cara yang lain yang tak terhitung jumlahnya. (Basrowi, 2004)

Coser membagi konflik dasar menjadi dua tipe, yaitu konflik realitas dan konflik non realitas. Konflik realitas yakni konflik yang berasal dari sumber yang konkret atau bersifat material, sedangkan konflik non realistis adalah konflik yang terjadi karena dorongan yang tidak rasional dan cenderung berciri ideologis (Nursantari, 2018). Contoh konflik non realistis yakni konflik antaragama, antaretnis, dan konflik antarkepercayaan lainnya (Susan, 2009). Kemudian konflik realistis sendiri misalnya konflik atar individu yang saling mempertahankan keinginan terhadap sesuatu. Namun, konflik realistis juga dapat terjadi antar kelompok, tidak hanya sesama individu. Dua konsep konflik ini merupakan bagian dari sumbangan Coser mengenai teori konflik sosial yang diadaptasi dari pemikiran Simmel (Nursantari, 2018).

2.2 Teori Pembangunan Berkelanjutan oleh Gro Harlem Brundtland

Selain dilakukan pengkajian dari sisi sosial, penelitian terhadap analisis permasalahan pembangunan jalan tol Jogja—Solo ini juga akan dilihat dari sisi ekonomi. Pembangunan identik dengan kebutuhan pasar, yakni memungkinkan adanya pertumbuhan di daerah tersebut. Maka untuk memperkuat analisis, peneliti juga menyertakan analisa dari sisi ekonomi. Peneliti menggunakan Teori Pembangunan Berkelanjutan yang diperkenalkan oleh Gro Harlem Brundtland yang akan digunakan untuk menganalis dari sisi ekonomi.

Teori Pembangunan Berkelanjutan memanfaatkan prinsip-prinsip yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, energi, dan pemerataan untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. *Sustainability* atau berkelanjutan seperti yang dikemukakan oleh (Suryono, 2010) adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan generasi di masa yang akan datang (Tay & Rusmiwari, 2019). Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk melihat peluang di masa depan dengan memanfaatkan energi yang dimiliki saat ini. Pada

kasus ini, pembangunan tol yang menghubungkan Solo, Yogyakarta, dan Bandara Internasional Yogyakarta dilakukan dengan tujuan efisiensi dan juga mengingkatkan aksesibilitas. Namun demikian, tentu ada beberapa masalah yang muncul dalam proses perencanaan tersebut. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan dan juga upaya-upaya yang dilakukan kedua belah pihak, yakni pemerintah pusat sebagai perencana dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pemangku kebijakan daerah setempat (Yogyakarta) dalam mengkaji pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo ini.

Menurut (Fitriandari & Winata, 2021) istilah pembangunan berkelanjutan secara etimologis berasal dari dua suku kata, yaitu pembangunan dan berkelanjutan. Kata pertama yakni pembangunan, berasal dari kata dasar bangun yang kemudian mendapatkan imbuhan awalan pe- dan akhiran -an. Ketika mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran tersebut, kata bangun bermakna membangun yang artinya melakukan suatu usaha untuk memperbaiki kondisi masa kini dan masa lalu supaya terwujud sebagaimana cita-cita di masa depan. Proses membangun disini artinya dilakukan agar perbaikan tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Kemudian suku kata yang kedua, yakni kata berkelanjutan berasal dari kata lanjut yang mendapat imbuhan awalan ke- menjadi "kelanjutan" kemudian mendapat imbuhan awalan lagi ber- sehingga menjadi "berkelanjutan". Makna dari kata berkelanjutan setelag mendapatkan imbuhan tersebut artinya menjadi bersambung, atau terus-menerus (Fitriandari & Winata, 2021)

UU No. 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiduo, menegaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan trencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan yang bertujuan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang (Fitriandari & Winata, 2021). Pembangunan berkelanjutan atau *sustainability development* disini terdiri dari beberapa aspek, misalnya pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan tergantung pada tujuan apa yang hendak diraih. Pada implementasinya, tindakan yang bertujuan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta ketersediaan sarana pendukung lainnya.

Pembangunan Berkelanjutan pertama kali dikenalkan oleh Brundtland pada tahun 1987 (Fitriandari & Winata, 2021). Brundtland menyatakan pembangunan berkelanjutan hadir sebagai salah satu langkah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Fitriandari & Winata, 2021) dalam Bover et al., 2008). Menurut (Fitriandari & Winata,

2021) dalam Johnston, 2007) mengatakan bahwa model dasar pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai bentuk yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Saat ini konsep pembangunan berkelanjutan sudah banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Program-program yang menjadi fokus kerja Pemerintah Indonesia merupakan salah satu tujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Diantaranya misalnya pembangunan infrastruktur seperti fasilitas umum, pembangunan perumahan untuk mendukung kepemilikan rumah layak huni, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Implementasi dari pembangunan berkelanjutan yaitu mengoptimalkan proses pembangunan dengan cara memanfaatkan potensi dan kemampuan manusia beserta sumber daya yang ada (Fitriandari & Winata, 2021).

Salah satu program kerja pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu memperluas pembangunan jalan tol di Indonesia dengan tujuan kemudahan akses dan keterjangkauan distribusi barang. Program kerja ini menjadi salah satu Proyek Skala Nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama kabinet merah putih. Pembangunan jalan tol dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan pemanfaatan lahan untuk dialingfungsikan menjadi fasilitas umum. Pada kasus ini, pembangunan jalan tol merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Metodologi

Pendekatan pada penelitian ini sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas yakni akan ditinjau dari sisi sosial menggunakan Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser dan dari sisi ekonomi akan digunakan Teori Pembangunan Berkelanjutan Gro Harlem Brundtland. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu artikel-artikel berita di media daring untuk mengetahui perkembangan permasalahan antara pemerintah pusat dengan Gubernur Kota Yogyakarta. Selain itu artikel ilmiah dan tugas akhir dengan topik terkait juga digunakan untuk melengkapi analisis pada topik permasalahan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus dengan analisis interdisipliner yang mencakup pembahasan dari sisi sosial, budaya, dan ekonomi.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Perspektif Sosial

Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah. Menurut (Hidayat, et al., 2023) Infrastruktur

memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Keberadaan infrastruktur akan meningkatkan produksi terhadap industri di suatu wilayah. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus menggancarkan proyek pembangunan terhadap ketersediaan infrastruktur untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Salah satu pembangunan infrastruktur yang terus menjadi fokus pemerintah yakni pembangunan jalan tol.

Pembangunan jalan tol Jogja-Solo menjadi salah satu program kerja presiden Jokowi bersama kabinet merah putih yang telah direncanakan mulai tahun 2021 dan akan diperkirakan akan selesai pada tahun 2024. Keberadaan jalan tol ini diharapkan akan mempermudah akses jalan darat antar kota khususnya Solo-Jogja sampai bandara Internasional Yogyakarta di Wates, Kulon Progo. Rencana ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan kemacetan di jalur jalan raya nasional Jogja-Solo yang semakin ramai. Selama ini, akses perjalanan darat Solo-Jogja dapat ditempuh melalui jalan nasional. Akan tetapi, seiring bertambahnya kendaraan pribadi maupun kendaraan distribusi barang di wilayah tersebut, kini perjalanan darat Solo-Jogja dengan melewati jalan nasional bertambah padat.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan di jalan nasional tersebut adalah dengan membangun jalan tol Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) yang juga akan menghubungkan bandara Internasional Yogyakarta atau dikenal dengan NYIA. Namun dalam proses tersebut, rencana ini memiliki beberapa kendala. Gubernur Kota Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan banyak pertimbangan yang membuat pemerintah pusat khususnya kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu mengkaji ulang rencana ini.

Sri Sultan awalnya menolak pembangunan jalan tol Jogja-Solo karena dikhawatirkan mematikan UMKM di sepanjang jalan nasional. Padahal banyak usaha rakyat di kawasan ini yang bergantung pada arus lalu lintas darat. Selain itu, ada beberapa pertimbangan lain yang membuat Sri Sultan belum memberikan izin pembangunan jalan tol tersebut. Beberapa pertimbangan tersebut misalnya, terkait penggunaan lahan yang akan dialingfungsikan menjadi jalan tol, ataupun jalur keluar *(exit)* dan masuk *(enter)* mengingat banyak lahan di Kota Yogyakarta yang dimiliki warga setempat dan beberapa diantaranya adalah lahan pertanian.

Perihal pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut laporan dalam laman berita https://kumparan.com/ terdapat empat pesan yang disampaikan oleh Sri Sultan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan perihal pembangunan jalan tol Jogja-Solo. *Pertama,* perlu diperhatikan bahwa Yogyakarta memiliki beberapa situs kebudayaan yang bernilai arkeologis untuk dilestarikan keberadaannya. Pada hal ini, pembangunan jalan tol tidak boleh sampai

mengganggu keberadaan situs arkeologis tersebut. Jika pembangunan menabrak atau melewati situs arkeologis, maka konstruksi jalan tol yang harus mengalah; misalnya dibelokkan.

Kedua, Sri Sultan menyampaikan bahwa lahan pertanian di Yogyakarta kian menipis. Maka, pembangunan jalan tol jangan sampai memakan lahan pertanian milik warga, mengingat lahan pertanian adalah salah satu komoditas utama masyarakat Yogyakarta yang harus dipertahankan untuk kebutuhan pertanian yang keberadaannya kian terbatas. Pembangunan jalan tol tidak boleh mengurangi lahan pertanian warga, jadi jalan tol yang akan dibangun tidak justru mengurangi atau mengalihfungsikan lahan pertanian yang sudah ada untuk dimanfaatkan sebagai jalan tol. Pesan yang dimaksud oleh Sri Sultan disini adalah, pembangunan jalan tol bisa dilakukan dengan cara jalan layang (elevated) seperti yang ada di Jakarta.

Ketiga, sama seperti pesan sebelumnya, Sri Sultan berpesan jika pembangunan jalan tol harus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya. Sultan berharap, pembangunan infrastruktur harus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada poin ini, Sri Sultan menegaskan apabila hendak dibangun jalan tol, perlu dipastikan pintu masuk *(entry)* dan keluar *(exit)* tol akan berada dimana. Hal tersebut karena keberadaan pintu masuk dan keluar ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga setempat.

Keempat, pesan terakhir yang disampaikan oleh Sri Sultan terkait perencanaan pembangunan jalan tol, bahwa adanya jalan tol yang akan dibangun tidak memisahkan kelompok masyarakat. Artinya, jalan tol yang akan dibangun tidak memisahkan masyarakat yang tadinya berdampingan menjadi terpisah oleh jalan. Keempat pesan yang disampaikan oleh Sri Sultan perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dan jajarannya.

Dari keempat pesan yang bisa diartikan sebagai syarat pokok pembangunan jalan tol tersebut, terlihat bahwa Sri Sultan sangat betul-betul memperhatikan kondisi masyarakat Yogyakarta. Mulai dari perekonomian, kesejahteraan, keadilan, dan juga pemeliharaan. Poin terakhir yang dimaksud adalah merujuk pada nilai-nilai budaya arkeologis yang ada di Yogyakarta sendiri. Menurut laporan dalam Hops.id (2024), pembangunan jalan tol yang awalnya akan melewati tanah milik sultan (Sultan Ground) dianggap akan memberikan dampak negatif bagi keberadaan aset Keraton Yogyakarta. Sri Sultan tetap mengizinkan apabila tanah yang dimaksud digunakan atau difungsikan sebagai jalan tol. Namun status kepemilikannya tidak berarti melepaskan aset tersebut, yang berarti penggunaan lahan tersebut digunakan dengan sistem sewa dengan harga rendah atau justru tidak dibayar sekalipun. Sri Sultan tidak ingin aset yang telah ada tersebut hilang, akan tetapi disini bisa menjadi fasilitas umum.

Menyimak beberapa syarat yang disampaikan langsung oleh Sri Sultan tersebut, terlihat bahwa rencana pembangunan jalan tol Joglosemar Jogja-Solo-Semarang perlu diperhatikan betul-betul oleh pemerintah pusat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terlihat bahwa Sri Sultan sangat mengutamakan kesejahteraan warga Yogyakarta dan juga mempertahankan perekonomian warga setempat. Sri Sultan berharap pembangunan infrastruktur yang direncanakan tidak justru mematikan perekonomian yang telah ada, misalnya usaha-usaha kecil masyarakat yang berada di jalan nasional ataupun tidak mengurangi lahan pertanian warga yang justru akan berdampak pada pengurangan lahan aktif pertanian yang menjadi salah satu sumber utama warga Yogyakarta.

4.2 Perspektif Budaya

Sri Sultan menilai pembangunan jalan tol Jogja-Solo berpotensi mengganggu estetika Kota Yogyakarta, terutama karena rutenya melewati Candi Prambanan, salah satu ikon kota ini. Menurut (Prariyandiyani, Kurniawan, & Baiquni, 2021) salah satu dampak yang harus diperhitungkan dengan adanya pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta tepatnya di wilayah Kecamatan Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu potensi arkeologi yang dimiliki kecamatan ini. Peninggalan arkeologi yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya (CB) di wilayah ini meliputi beberapa komponen berupa sisa bangunan maupun temuan lepas yang terkubur oleh material hasil erupsi Gunung Merapi (Prariyandiyani, Kurniawan, & Baiquni, 2021).

Janati Prariyandai, dkk melalui artikel jurnal yang berjudul "Prediksi Dampak Jalan Tol terhadap Situs Arkeologi Kecamatan Kalasan" menganalisis dampak positif dan negatif yang ditimbulkan atas pembangunan jalan tol Solo-Jogja. Pada artikel tersebut memaparkan bahwa adanya pembangunan jalan tol Solo-Jogja akan menjadi persoalan yang patut disikapi secara serius mengingat banyaknya *cultural landmarks* khususnya di wilayah Sleman bagian timur. *Cultural Landmarks* yang dimaksud disini berupa monumen-monumen arkeologis yang kini sudah banyak ditetapkan sebagai cagar budaya (CB) (Prariyandiyani, Kurniawan, & Baiquni, 2021). Dalam artikel jurnal ini, disebutkan banyak peninggalan Arkeologi klasik yang berfokus pada peninggalan masa Hindu-Buddha yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Pembangunan jalan dalam hal ini jalan tol akan cukup berbeda dengan sekadar perluasan jalan nasional atau perbaikan jalan. Pembangunan jalan tol membutuhkan perhatian yang lebih mengingat aspek-aspek dari jalan tol tersebut misalnya pintu masuk *(entry)* dan pintu keluar *(exit)*, serta letak peristirahatan atau *rest area*. Pada permasalahan ini, Sri Sultan meminta aspek-aspek tersebut perlu dipertimbangkan secara baik. Maka jika dilihat saat ini,

pembangunan jalan tol Jogja-Solo tersebut disikapi dengan jalan layang *overpass* atau *flyover* yang kini di beberapa titik di Jogja sudah mulai terlihat digarap. Dengan cara tersebut harapannya pembangunan jalan tol dapat tetap terlaksana dengan baik dan hasilnya nanti sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan tetap mempertimbangkan letak atau posisi cagar budaya (CB) berada, sesuai dengan pertimbangan awal yang diminta oleh Sri Sultan.

4.3 Perspektif Ekonomi

Mengutip dari jurnal GAMAPI (Fisipol UGM, 2021) untuk mewujudkan rencana pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-NYIA, pemerintah melalui Kemenkeu (2020) telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp417,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Jumlah tersebut tentu tidaklah sedikit, mengingat alokasi dana tersebut tentu berasal dari pajak yang juga dibayar oleh masyarakat. Oleh karena itu, harapannya pemerintah dapat memaksimalkan rencana tersebut supaya dengan dana yang tidak sedikit itu dapat memberikan kebermanfaatan jangka panjang.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, proyek pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat mengurangi masalah kemacetan yang ada di jalan nasional. Namun, perlu disadari pula pertumbuhan tata kota dengan keterkaitannya perubahan pemanfaatan lahan akan memunculkan masalah yang lain. Maka dari itu dalam kasus ini, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sri Sultan terkait kegelisahan terhadap perizinan jalan tol yang melintasi Kota Yogyakarta betul-betul dikupas secara tajam dampak dan manfaat yang akan muncul. Mengingat Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota istimewa, yang terkenal akan budaya yang patut dilestarikan.

Pada tugas akhir yang ditulis oleh (Hadiyanti, 2023) berjudul "Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto terhadap Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" penulis meneliti dampak adanya jalan tol terhadap ekonomi warga setempat. Melalui penelitian ini dipaparkan bahwa pembangunan jalan tol tersebut berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Provinsi Jawa Timur. Penulis menggunakan metode penelitian survey yang dilaksanakan di wilayah Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan populasi sebanyak 269 kepala keluarga dan melibatkan 71 responden (Hadiyanti, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Hdiyanti tersebut memaparkan bahwa meskipun pada awalnya warga setempat merasa keberatan jika tempat tinggalnya harus dipindah karena terdampak pembangunan jalan tol. Beberapa faktor misalnya, tempat tinggal yang strategis, dekat dengan sanak keluarga, dan enggan mencari hunian yang baru, namun setelah dilakukan

musyawarah dan juga sosialisasi yag diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T), akhirnya tercipta kesepakatan bersama atas harga jual satuan tanah (Hadiyanti, 2023). Adanya pembangunan tersebut juga memunculkan dampak negatif diantaranya mengganggu stabilitas lingkungan sekitar, timbulnya polusi udara, serta polusi suara dari mesin alat-alat berat, serta terganggunya kehidupan ekonomi sosial pada maysrakat yang terdampak lahan pembebasan jalan tol. Hal ini karena, tentu masyarakat yang terdampak tidak secara langsung mendapat pekerjaan baru.

Meninjau dari ilmu sosiologi, Soerjono Soekanto, salah satu bapak Sosiologi menyatakan perubahan sosial dalam masyarakat dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain: *Pertama,* Ada keinginan umum terhadap suatu perubahan, *kedua,* adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin suatu masyarakat tersebut, *ketiga* pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat kemudian mengelola menjadi suatu tindakan atau program untuk kebermanfaatan bersama, *keempat* pemimpin tersebut harus menyatakan tujuan yang konkret kepada masyarakat, dan *kelima* harus ada momentum yang tepat, yakni ketika faktor dan sumber daya yang ada dinyatakan sudah tepat (Cahyono, 2016). Mengacu pada kelima syarat tersebut pembangunan jalan tol turut berkontribusi pada dampak sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan membuat masyarakat lebih adaptif dan kreatif dalam menghadapi tantangan yang ada.

Urgensi dan tinjauan historis

Sebagaimana rencana pembangunan yang telah direncanakan oleh Presiden Joko Widodo terkait perluasan jalan tol di Indonesia, salah satunya yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah membangun jalan tol di beberapa titik di Indonesia, misalnya di Pulau Sumatra jalan tol terdiri dari 15 ruas dan hingga saat ini masih terus dilakukan permbangunan untuk menyempurnakan rencana pembangunan jalan tol di Sumatra. Kemudian di Pulau Kalimantan, jalan tol juga telah dibangun yang menghubungkan Samarinda—Balikpapan. Jalan tol juga telah dibangun di Pulau Sulawesi, yang menghubungkan ujung utara pulau Sulawesi hingga ujung bagian tenggara sulawesi. Jalan tol tersebut menghubungkan provinsi sulawesi utara, provinsi gorontalo, provinsi sulawesi tengah, provinsi sulawesi barat, provinsi sulawesi selatan dan provinsi sulawesi tenggara. Pembangunan jalan tol tersebut telah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian telah diresmikan pada tahun 2008.

Di sisi Timur Indonesia, Presiden Joko Widodo juga telah berhasil membangun jalan tol di Papua yang dikenal dengan ajlan Trans Papua. Dikutip dari artikel berita di CNBC, "Jalan Trans-Papua masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ketika dicanangkan pembangunan pada 2015, Jalan Trans-Papua memiliki panjang total 3.535 Km yang terbagi di dua provinsi yakni di Provinsi Papua sepanjang 2.465 Km dan Papua Barat sepanjang 1.070 Km." (https://www.cnbcindonesia.com/news/20241023073945-4-582247/belah-gunung-hutan-jokowi-sukses-bangun-jalan-trans-papua-ribuan-km). Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai menjadi salah satu batu loncatan bagi Indonesia dalam pembangunan infrastruktur salah satunya jalan tol yang bertujuan memudahkan aksesibilitas.

Hal itu termasuk di Pulau Jawa sendiri. Jika mengulik dari sejarah bangsa Indonesia, pembangunan jalan tol di Indonesia memiliki pengaruh dari peninggalan Belanda yang telah membangun jalan dari Anyer—Panarukan oleh herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Timur. Meskipun pada catatan sejarah, pembangunan ini dinilai memunculkan sistem kerja paksa, namun adanya jalan Anyer—Panarukan ini memiliki andil yang cukup besar dalam akses distribusi barang pada masa kolonial.

Jika dapat dianalisis lebih mendalam lagi, dapat dilihat dari sisi ekonomi bahwa pembangunan jalan tol awalnya menguntungkan mereka yang "berada" karena tentu hanya orang-orang berada yang memiliki mobil ataupun kendaraan pribadi lainnya yang dapat memanfaatkan keberadaan jalan tol tersebut. Sama halnya dengan pembangunan jalan Anyer—Panarukan yang biasa dikenal dengan Jalan Daendels. Pembangunan jalan ini bermanfaat untuk distribusi barang d Pulau Jawa yang akan memudahkan para pemilik modal menyalurkan barang dagangannya—yang pada saat itu dodominasi oleh diaspora, atau orang-orang Belanda yang ingin menguasai rempah-rempah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tentu dalam penelitian ini tidak akan mengkaji secara lebih lanjut mengenai hal tersebut. Akan tetapi penulis hanya ingin mengemukakan realitas yang ada pada saat itu.

Belajar dari sisi historis tersebut, berkaitan dengan alasan Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pertimbangannya terkait pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang akan berdampak pada ekonomi warga dan juga kepemilikan lahan masyarakat Jogja. Jika dilihat, di Kota Yogyakarta saat ini sudah banyak berdiri bangunan-bangunan tinggi yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Sebut saja apartemen atau aparthouse yang mudah ditemukan di beberapa titik di Jogja, terkhusus mendekati daerah pendidikan—misalnya universitas. Tentu hal tersebut muncul dengan menjawab kebutuhan

pasar akan tempat tinggal bagi para pendatang dari luar jawa, khususnya untuk para mahasiswa yang datang dari luar Jawa. Investor melihat peluang ini untuk memanfaatkan lahan guna menyediakan tempat tinggal dengan dibangun apartemen bagi mereka yang membutuhkan. Jika dilihat, pembangunan apartemen di Jogja sudah menjamur dan beberapa titik masih terus dibangun. Sejalan dengan kemunculan kos atau indekos—tempat tinggal berbasis ekonomis mulai dari level sederhana hingga apartemen eksklusif dapat ditemukan dengan mudah di kota yang terkenal dengan kota pelajar ini.

Akan tetapi hal tersebut jika dilihat dari sisi kebutuhan pasar, pembangunan tempat tinggal ini ada karena kebutuhan akan tempat tinggal. Seperti halnya pembangunan perumahan atau rusun (rumah susun) yang sengaja dibangun oleh investor. Berbeda dengan jalan tol, rencana ini menjadi salah satu program kerja pemerintah Indonesia yang bertujuan memudahkan akses dan distribusi barang. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah; apakah hal ini termasuk masalah krusial yang harus dicarikan solusi secepatnya? Padahal jika menilik dari beberapa masalah lain di Yogyakarta seperti masalah sampah (kebersihan), peredaran miras yang kian marak (kesejahteraan), dan tunawisma (keadilan) juag menjadi beberapa masalah yang perlu disikapi secara serius.

Mungkin hal itulah yang menjadi pertimbangan utama Sri Sultan terkait alotnya perizinan pembangunan jalan tol di Jogja ini. Karena sudah menjadi rencana dari pemerintah pusat, dan nampaknya Sri Sultan tidak memiliki kuasa yang cukup berarti untuk mencegah rencana tersebut, pada kahirnya Sri Sultan pun memberi izin kepada pembangunan jalan tol Jogja-Solo tersebut. Menurut laporan berita pada laman Jogja Prov, “Sri Sultan menyampaikan sesuai kesepakatan kehadiran jalan tol ini diharapkan bisa membawa pertumbuhan ekonomi lokal khususnya wilayah yang dilalui yaitu DIY dan Jateng. Sehingga aspek keluar masuknya kendaraan harus diatur. Dan jangan sampai adanya jalan tol tersebut justru mematikan atau membuat usaha masyarakat kecil di jalan-jalan arteri menjadi berhenti atau tak bisa jualan.” (https://jogjaprov.go.id/). Tentu Sri Sultan memiliki pertimbangan tersendiri terkait rencana pembangunan jalan tol yang direncanakan pemerintah pusat.

Jika dikomparasikan dengan pemaparan sebelumnya yakni terkait keberadaan apartemen atau jenis hunian lainnya, pembangunan jalan tol dinilai penting jika dilihat dari sisi keterjangkauan akses. Adanya jalan tol akan menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Hal ini akan mendorong kemudahan akses dan juga distribusi barang—sebagaimana seperti yang dirasakan pada keberadaan Jalan Daendels yang dibangun pada masa kolonial. Jalan tol tidak hanya akan mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga akan

mendongkrak perekonomian warga dengan kemudahan akses distribusi barang. Namun di sisi lain, pembangunan jalan tol juga memiliki risiko yang lebih besar.

Mengambil contoh di wilayah lain, pembangunan jalan tol berdampak pada kepemilikan tanah warga setempat yang dialihfungsikan menjadi jalan tol. Hal tersebut berarti tanah yang dimiliki warga akan menjadi milik negara. Meskipun pada proses pemindah kepemilikan tersebut tetap mengikuti prosedur yang telah terkandung dalam undang-undang Negara Republik Indonesia, misalnya membayarkan sejumlah lahan yang dialihfungsikan atau mengganti daerah yang dialihfungsikan tersebut dengan sesuatu yang lain. Ini akan berdampak pada harga-harga barang di pasar. Pada daerah utama, harga yang dipatok akan lebih mahal dengan daerah pinggiran. Tentu ini akan menaikkan pendapatan masyarakat. Namun dengan berkurangnya lahan masyarakat setempat, berkurang pula kepemilikan lahan bagi warga lokal. Pembangunan jalan tol akan menjadikan daerah yang di klaim sebagai jalan tol akan sepenuhnya milik negara.

Penyelesaian Konflik ditinjau dari Teori Konflik Sosial-Budaya Lewis A. Coser

Melihat kembali permasalahan perencanaan pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat tersebut, terjadi konflik antarkelompok yang saling berselisih dengan tujuan yang berbeda. Rencana pembangunan jalan tol bagi pemerintah akan memperluas akses jalan tol di Pulau Jawa yang telah ada, yang itu berarti akan memberikan beberapa manfaat misalnya, mempermudah alur distribusi barang dan kemudahan akses antarwilayah. Namun di sisi lain, Sri Sultan selaku Gubernur Kota Yogyakarta merasa pembangunan jalan tol yang akan melewati Yogyakarta perlu dipertimbangkan secara betul-betul mengingat terdapat situs arkeologis di Yogyakarta. Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini termasuk konflik realitas antarkelompok yang memiliki perbedaan tujuan untuk meraih sesuatu hal.

Mengacu pada konflik Sosial-Budaya yang dicetuskan oleh Lewis A. Coser, konflik yang terjadi disini tidak selalu berdampak negatif. Konflik juga bisa menjadi salah satu alat interaksi antarkelompok, dalam hal ini yakni pemerintah pusat dengan Sri Sultan selaku Gubernur Kota Yogyakarta. Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari (Nuraeni, 2022). Penyebab munculnya konflik biasanya ada karena perbedaan tujuan antarkelompok. Indonesia sendiri terdiri atas individu-individu yang bermacam-macam. Perbedaan tujuan antarkelompok tersebut sangat mungkin memunculkan adanya konflik sosial. Terjadinya konflik sosial dapat dilihat dari faktor penyebab terjadinya konflik tersebut,

kemudian selanjutnya dapat dilakukan langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik.

Menurut Coser, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Pertama, **mediasi** yakni upaya penyelesaian konflik yang dilakukan melalui pihak ketiga dengan kesepakatan kedua pihak yang saling berselisih. Kedua, **arbritasi** yakni pengendalian konflik dengan menunjuk pihak ketiga sebagai pengambil keputusan tanpa persetujuan yang berpihak. Ketiga, **konversi**, yakni penyelesaian konflik dengan menjadikan salah satu pihak menyetujui keputusan pihak yang lain. Keempat, **toleransi** yakni penyelesaian konflik yang terjadi dengan sendirinya karena hubungan antarpihak yang saling bertikai (Nuraeni, 2022).

Pada permasalahan rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo ini, konflik yang terjadi dapat mereda atau diselesaikan dengan cara konversi dengan menetapkan beberapa syarat yang telah disepakati antarpihak. Konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dengan Sri Sutan selaku Gubernur Kota Yogyakarta ini dapat diselesaikan dengan musyawarah antarpihak kemudian salah satu pihak membuat kesepakatan yang kemudian disepakati oleh pihak yang lain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Sri Sultan memberikan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pada rencananya membangun jalan tol Jogja-Solo. Pemerintah pun menyepakati syarat-syarat yang dikemukakan oleh Sri Sultan mengingat rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo tetap harus dilakukan untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, rencana pembangunan jalan tol yang dikenal dengan Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) ini akan menghubungkan sisi Barat dengan Timur Pulau Jawa dimana Yogyakarta menjadi penghubung antarkeduanya telah masuk dalam salah satu program kerja kabinet Merah putih yang dipegang oleh Presiden Joko Widodo. Rencana pembangunan ini akan memperluas infrastruktur yang akan memberikan kebermanfaatan pengguna jalan yang akan mendorong aksesbilitas distribusi barang.

5. Simpulan

Konflik rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo oleh pemerintah yang pada awalnya kurang disetujui oleh Gubernur Kota Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X pada akhirnya memiliki titik terang. Sri Sultan yang awalnya keberatan dengan adanya rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang melewati Kota Yogyakarta, setelah melalui beberapa syarat dan peninjauan langsung di lapangan akhirnya mengizinkan pembangunan tersebut di pertengahan tahun 2024. Beberapa pertimbangan yang menjadi fokus oleh Sri Sultan yakni apa saja dampak dengan adanya pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Kemudian Sri Sultan juga

meminta perhatian terhadap akses keluar masuk jalan tol, serta persetujuan pembangunan jalan tol menggunakan konsep jalan layang dengan tujuan diantaranya agar tetap mempertahan lahan milik warga setempat dan pelestarian beberapa situs kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta. Kesepakatan kedua belah pihak terkait rencana ini terus dilakukan pemantauan oleh Sri Sultan agar rencana pembangunan jalan tol dapar berjalan sesuai rencana.

Penelitian dalam tulisan ini terbatas pada pengamatan pembangunan jalan tol Jogja-Solo disertai dengan pembacaan artikel terkait topik yang diangkat. Melalui pemaparan dalam tulisan akan cenderung bersifat faktual mengacu pada berita dan artikel jurnal yang dipilih untuk melengkapi hasil analisis. Harapan untuk penelitian selanjutnya yakni adanya penelitian secara langsung dari sisi masyarakat dan juga industri rumahan atau UMKM di sekitar daerah terdampak pembangunan tol ini. Penelitian yang dapat dilakukan misalnya dapat berupa angket yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan supaya mengetahui dampak pascapembangunan jalan tol selesai dan jalan tol tersebut mulai dapat dioperasikan.

6. Kata kunci

Jalan tol, jalan tol Jogja-Solo-NYIA, Sri Sultan, pemerintah pusat, ekonomi berkelanjutan, pembangunan, sosial, budaya

7. Gambar terkait



Sumber gambar: https://images.app.goo.gl/D49kAsNLd1GF4TdBA



Sumber gambar: https://statik.tempo.co/data/2024/09/19/id_1338192/1338192_720.jpg



Sumber gambar: https://asset.kompas.com/crops/kFMT3XxfkY9R4c4xKxmiOxaykR8=/0x0:1000x500/1200x800/data/photo/2019/01/10/2680607514.jpg



Sumber gambar: https://images.app.goo.gl/n9NYeVpPCpYiu8zr7



Sumber gambar: https://images.app.goo.gl/1xGed5QYBrvCqdrK8

Daftar Pustaka

Basrowi, M. d. (2004). *Teori Sosiologi dalam Tiga Paradigma.* Surabaya: Yayasan Kampusina Surabaya.

Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Publiciana, 9*, (1) 140-157.

Fitriandari, M., & Winata, H. (2021). Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Journal of Management Studies, 15*, 1-13.

Ghufron, G. (2021). Manajemen Konflik Dan Penyelesaiannya Dalam Pandangan. *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 8.

Hadiyanti, A. F. (2023). Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. 1-31. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Hidayat, N., Xanichal, H. A., Nazly, M., Karo-Karo, R. U., Gaol, & Lumbana, R. I. (2023). Pengaruh Dampak Sosial Terhadap Proyek Pembangunan Jalan Tol di Medan-Binjai. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 4*, 3301-3307.

Nuraeni, S. M. (2022). "Analisis Konflik Sosial dalam Novel Jalan Menikung karya Umar Kayam melalui Teori Lewis A. Coser". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Nursantari, A. R. (2018). "Konflik Sosial dalam Novel O Karya Eka Kurniawan (Kajian Konflik Sosial Lewis A. Coser)". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Bahasan dan Seni, Universitas Negeri Surabaya.

Poloma, M. M. (2000). *Sosiologi Kontemporer.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Prariyandiyani, J., Kurniawan, A., & Baiquni, M. (2021). Prediksi Dampak jalan Tol terhadap Situs Arkeologi di Kecamatan Kalasan. *Media Komunikasi Geografi, 22*(2), 155-170.

Sari, E. K. (2023). Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Kehidupan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Situ Gadung Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. *Skripsi.* Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Suryono. (2010). *Teori dan Isu Pembangunan.* Malang: UM Press.

Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik.* Jakarta: Kencana.

Tay, D. S., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 4.

Sumber laman:

Ryanthie. S. *Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya*. (2019). Diakses pada tanggal 18 Januari 2025 melalui https://www.tempo.co/ekonomi/sultan-pernah-menolak-jalan-tol-solo-yogyakarta-yang-diresmikan-presiden-jokowi-ini-alasannya-7947

Wismabrata, M. H. & Khairina. *5 Fakta Polemik Proyek Jalan Tol di Yogyakarta, Alasan Sri Sultan Menolak hingga Jalur ke YIA Selain Lewat Tol*. (2019). Diakses pada tanggal 16 Januari 2025 melalui https://regional.kompas.com/read/2019/06/20/08290151/5-fakta-polemik-proyek-jalan-tol-di-yogyakarta-alasan-sri-sultan-menolak?page=all#google_vignette

Purnama, W. H. *Awalnya bersikukuh menolak tol Yogyakarta, akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono X izinkan tol dibangun dengan syarat ini.* (2024). Diakses pada 16 Januari 2025 melalui https://www.hops.id/trending/29412779671/awalnya-bersikukuh-menolak-tol-di-yogyakarta-akhirnya-sri-sultan-hamengkubuwono-x-izinkan-tol-dibangun-dengan-syarat-ini

Agustinus. M. *Sri Sultan Tak Tolak Tol Melintasi Yogyakarta, Tapi Ada 4 Pesan.* (2019). Diakses pada tanggal 19 Januari 2025 melalui https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-sultan-tak-tolak-tol-melintasi-yogyakarta-tapi-ada-4-pesan-1rOxKp9QBYU/full

Tentang Penulis

Luthfi Azizah Azhar lahir di Bantul, Yogyakarta tahun 2002. Saat ini, penulis merupakan mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Lahir dan tumbuh di Kota Yogyakarta membentuk kepekaannya terhadap berbagai aspek tentang kota kelahirannya, baik dari fenomena sosial, pendidikan, dan juga ekonomi.

Kecintaannya terhadap literasi mendorong Luthfi untuk aktif membaca dan menulis. Baginya, membaca tidak sekadar aktivitas duduk dengan buku di tangan, tetapi juga proses mengamati dan memahami lingkungan sekitar. Selain itu, Luthfi juga menyukai kegiatan alam dan *travelling*, yang ia anggap sebagai sarana belajar beradaptasi dengan berbagai situasi. Melalui media sosial, Luthfi kerap membagikan gagasan dan pengalaman perjalanannya.

Pada tahun 2023, Luthfi mendapat kesempatan program pertukaran mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengalaman tersebut membuka wawasan baru terhadap perbedaan kondisi antara Indonesia dengan negara tetangga, sekaligus memperkaya perspektif akademiknya. Pengalaman menulis di simposium ini adalah pengalaman pertamanya dalam forum akademik. Harapannya langkah awal ini dapat membuka kesempatan lain untuk memperluas cakrawala dan sebagai kontribusi dalam dunia keilmuan. Berkuliah di jurusan Bahasa dan Sastra mendorong Luthfi untuk memperdalam wawasan tentang ilmu sejarah, antropologi manusia, bahasa, dan budaya. Penulis dapat dihubungi di Instagram @luthfiazizaha.

IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM KEBIJAKAN HILIRISASI EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI MENUJU INDONESIA EMAS 2045

M. Zikwan
ziksaririzik@gmail.com
Universitas Ibrahimy

Abstrak

Indonesia Emas 2045 merupakan visi ambisius yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan perekonomian yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut negara memerlukan transformasi ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Hilirisasi ekonomi merupakan langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hilirisasi ekonomi bertujuan meningkatkan nilai lebih dari potensi SDA dan mendorong kemandirian ekonomi. Namun, implementasi dari hilirisasi sering kali menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Disamping hal tersebut dilema juga terjadi dalam struktural sistem ekonomi Indonesia seperti; dominasi sumber daya alam dan ketergantungan terhadap investasi asing. Dalam konteks ini, prinsip maqashid syariah menawarkan kerangka etis dan strategis yang dapat memastikan kebijakan hilirisasi tidak selalu berorientasi pada pertumbuhan, namun menjamin keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sampai sejauh mana prinsip maqashid syariah dapat diimplementasikan dalam kebijakan hilirisasi ekonomi untuk mencapai ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. Pendekatan ini berfokus pada lima tujuan dari maqashid syariah yaitu memelihara agama (*hifz ad- din)*, memelihara jiwa (*hifz nafs)*, memelihara akal (*hifz al-aql)*, memelihara keturunan (*hifz an-nasl)*, dan memelihara harta (*hifz al-maal)*, dengan pertanya penelitian Bagaimana prinsip maqashid syariah dapat diintegrasikan dalam kebijakan hilirisasi ekonomi Indonesia? Gap penelitian ini berupaya mengisi terkait kurangnya kajian empiris tentang penerapan maqashid syariah dalam konteks hilirisasi ekonomi Indonesia.

Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menggali korelasi antara prinsip maqashid syariah dan kebijakan hilirisasi ekonomi, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk memastikan arah pembangunan ekonomi yang inklusif.

Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan prinsip maqashid syariah dalam kebijakan hilirisasi ekonomi dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. *Hifz al-Maal* menekankan optimalisasi nilai tambah sumber daya alam dengan distribusi manfaat yang adil, mengurangi ketergantungan pada investasi asing. *Hifz an-Nafs* berfokus pada penciptaan lapangan kerja layak serta perlindungan pekerja. *Hifz al-Aql* mendorong transfer teknologi dan pengembangan kapasitas manusia, memperkuat daya saing global. *Hifz an-Nasl* memastikan keberlanjutan lingkungan melalui eksploitasi sumber daya yang bertanggung jawab. *Hifz ad-Din* menjamin prinsip etis dalam pembangunan ekonomi, menghindari praktik eksploitatif. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi maqashid syariah dapat mengatasi dilema antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang, menjamin keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, maqashid syariah adalah kerangka etis yang relevan untuk mengarahkan hilirisasi ekonomi Indonesia menuju perekonomian inklusif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Hilirisasi Ekonomi*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi negara berkembang, maju serta mampu berdaya saing pada tahun 2045, yang dikenal sebagai Indonesia Emas 2045. Visi ini mencerminkan harapan bersama untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang bijak. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan ekonomi menjadi salah satu pilar utama yang harus diperkuat dengan kebijakan strategis yang mendukung pertumbuhan jangka panjang(Alifa & Zahidi, 2024). Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya membawa manfaat material, namun memenuhi prinsip keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, konsep keadilan dan keberlanjutan menjadi elemen kunci yang harus diprioritaskan. Keadilan ekonomi menekankan distribusi yang merata dari hasil pembangunan, sementara keberlanjutan memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat dari sumber daya yang tersedia. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berorientasi pada keadilan sosial diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut.

Salah satu langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui hilirisasi ekonomi. Hilirisasi bertujuan untuk menambah nilai ekonomis dari sumber daya lokal melalui proses pengolahan dan produksi dalam negeri. Kebijakan ini tidak hanya membuka peluang lapangan kerja baru, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. hilirisasi berkontribusi pada peningkatan kebutuhan domestik serta mendorong inovasi di berbagai sektor (Wau et al., 2024). Dengan menciptakan rantai nilai yang lebih panjang di dalam negeri, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonominya dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Hilirisasi ekonomi telah menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Indonesia, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Banyak kebijakan yang dirancang hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah secara ekonomi, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, dampak positif dari hilirisasi sering kali lebih dirasakan oleh kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya tetap tertinggal.

Selain itu, kebijakan hilirisasi yang ada cenderung lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang lebih luas. Pengelolaan sumber daya alam sering kali dilakukan dengan pendekatan eksploitasi, yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan serta berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi daya dukung lingkungan, tetapi juga mengabaikan kebutuhan generasi mendatang untuk menikmati manfaat yang sama dari sumber daya yang tersedia.

Tantangan lain yang muncul adalah kurangnya panduan praktis untuk mengimplementasikan Maqashid Syariah dalam konteks kebijakan hilirisasi. Hingga saat ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut lebih banyak bersifat teoritis, tanpa diikuti langkah-langkah konkret yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan publik. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam memastikan bahwa nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan benar-benar terwujud dalam setiap tahap hilirisasi ekonomi.

Dengan demikian, diperlukan eksplorasi lebih lanjut untuk menjawab bagaimana prinsip Maqashid Syariah dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kebijakan hilirisasi ekonomi. Integrasi ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut, memberikan panduan praktis, dan membantu mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mengatasi kesenjangan dalam kebijakan hilirisasi ekonomi, diperlukan integrasi prinsip Maqashid Syariah yang dapat memastikan keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan, dan keberlanjutan. Maqashid Syariah berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan transparansi ditegakkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan(Algifari & Andrini, 2024). Maqashid Syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam merancang kebijakan ekonomi, dengan menekankan perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan manusia. Dalam konteks hilirisasi, prinsip ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang idak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan distribusi manfaat secara lebih adil. Dengan demikian, integrasi prinsip ini dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan dalam implementasi hilirisasi ekonomi di Indonesia.

Prinsip Maqashid Syariah menawarkan pendekatan yang relevan dalam mendukung kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima aspek utama kehidupan manusia, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Widjaja, 2024). Dalam konteks ekonomi, Maqashid Syariah memberikan panduan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral, etika, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Maqashid Syariah dapat menjadi landasan filosofis yang kuat untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam kebijakan hilirisasi ekonomi memberikan dimensi tambahan yang mendukung keadilan dan keberlanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya kokoh secara material, tetapi juga tetapi juga memiliki nilai moral, menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, prinsip Maqashid Syariah yang memiliki panduan holistik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan hilirisasi ekonomi. Padahal, prinsip ini menawarkan pendekatan yang mengedepankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, termasuk harta dan keberlanjutan. Kurangnya kesadaran akan relevansi Maqashid Syariah dalam kebijakan ekonomi membuat peluang untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan, dan keberlanjutan sering terabaikan.

Pendekatan berbasis Maqashid Syariah penting untuk diterapkan karena memberikan landasan etis dan strategis dalam pengelolaan sumber daya agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat menghindari eksploitasi yang berlebihan. Selain itu, Maqashid Syariah mendorong keadilan dalam distribusi kekayaan, memastikan bahwa hasil dari hilirisasi ekonomi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi solusi dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan prinsip ini secara sistematis, kebijakan hilirisasi ekonomi dapat lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Implementasi yang tepat dari Maqashid Syariah dalam kebijakan ekonomi dapat menghasilkan ekosistem yang lebih sehat dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga menciptakan dampak sosial positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip Maqashid Syariah dapat diimplementasikan dalam kebijakan hilirisasi ekonomi sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif - analitis untuk mengkaji implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam kebijakan hilirisasi ekonomi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur sebagai sumber utama terhadap berbagai sumber, termasuk kebijakan pemerintah, teori ekonomi Islam, serta konsep keberlanjutan dan keadilan ekonomi. Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi keterkaitan antara prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan kebijakan hilirisasi yang telah diterapkan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi Maqashid Syariah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Selain studi literatur, kajian ini juga menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan penerapan kebijakan hilirisasi ekonomi di berbagai negara yang telah mengadopsi prinsip keadilan dan keberlanjutan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam konteks ekonomi Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan kajian untuk menilai sejauh mana kebijakan hilirisasi yang diterapkan saat ini telah sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.

Seluruh data dan analisis yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan.

Validitas kajian diperkuat dengan triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan objektivitas dan akurasi hasil analisis. Dengan metode yang digunakan, kajian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan solusi yang aplikatif bagi pembangunan ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan bagian dari rangkaian ushul fikih yang oleh sebagian ulama' didorong untuk memiliki peran serta wewenang yang banyak untuk memberikan solusi atas persoalan dalam Islam(Helim, 2019). Konsep Maqashid Syariah lahir sebagai landasan utama dalam hukum Islam, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia(Mubayyinah, 2019). Dalam sejarah perkembangannya, para ulama menggali esensi hukum Islam tidak hanya sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman yang mengutamakan kemaslahatan (maslahah). Prinsip ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menafsirkan hukum Islam secara lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman(Sidiq, 2017).

Pada dasarnya maqashid syariah merupakan sebuah tujuan diberikan pda setiap syariat yang telah dibuat oleh syari' (Allah)(Al-Fasi, 1993). Maqashid Syariah atau tujuan hukum Islam merupakan sasaran atau maksud yang terkandung di balik setiap ketetapan hukum dalam Islam(HS, 2018). Beberapa ulama' memberikan pengertian tentang maqashid syariah diataranya adalah menurut al-Fasi

المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية الغاية منها والأسرار التى وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

yang dimaksud maqashid syariah dalam Islam adalah tujuan utama dari syariat serta hikmah-hikmah yang terkandung dalam setiap ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat.

Al-Raisuni juga memberikan pandangan terhadap definisi maqashid syariah, bahmwa menurut al-Raisuni Maqashid syariah adalah:

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التى وضعها الشريعة لأجل تحقيقها لمصالحة العباد

maqasid syariah merupakan sekumpulan tujuan yang diusung oleh syariat guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Selain Al-fasi dan al-Raisuni, Muhammad Sa'd al-Yubi juga memberikan pandangan terhadap definisi maqashid syariah,

المقاصد هي المعانى والحكم ونحوها التى راعاها الشارع فى التشريع عموما وحصوصا من اجل تحقيق مصالح العباد

Maqashid al-Syariah merujuk pada makna, hikmah, dan nilai-nilai lain yang dijaga oleh pembuat syariat dalam setiap ketetapan hukumnya, baik yang bersifat umum maupun khusus, dengan tujuan mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama diatas, maqashid al-syariah memiliki peran penting dalam memahami tujuan dan hikmah di balik setiap hukum Islam. Sejalan dengan konsep tersebut, para cendekiawan Muslim juga mengembangkan klasifikasi maqashid al-syariah untuk lebih memperjelas tingkat kepentingannya dalam kehidupan manusia. Salah satu tokoh yang berkontribusi dalam pengklasifikasian ini adalah Imam al-Haramain, yang membagi maqashid al-syariah ke dalam tiga tingkatan utama.

Imam al-Haramain dikenal sebagai cendekiawan muslim mengelompokkan maqasid syariah ke dalam 3 kategori utama, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Imam al-Haramain dianggap sebagai sosok yang membagi dharuriyat menjadi lima aspek utama, yang dikenal sebagai *al-dharuriyat al-khams*, yakni: menjaga agama (*ad-diin*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal (*al-aql*), menjaga keturunan (*an-nasl*), dan menjaga harta (*al-mal*). Sementara itu, Abu Hamid al -Ghazali yang merupakan murid al-Haramain, awalnya membagi *al-dharuriyat al-khams* menjadi empat unsur, yaitu memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal *hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-budh'* i), dan memeliharas harta (*hifdz al-mal*). Dalam pembagian awalnya, *hifdzu al-din* (perlindungan agama) tidak disebutkan, namun dalam karya selanjutnya, al-Mustashfa al-Ghazali menambahkan unsur tersebut(Al-Ghazali, 2014).

Salah satu cendekiawan Muslim yang merapikan konsep maqashid al-syariah adalah al-Syathibi. Dalam karya monumentalnya, al-Muwafaqat, al-Syathibi mengalokasikan sebagian besar pembahasannya untuk menjelaskan maqashid al-syariah. Ia mengelompokkan maqashid menjadi 2 kategori utama, yaitu maqashid *as-syari'* (tujuan syariat) dan maqashid mukallaf (tujuan individu yang dibebani syariat)(Asy-Syathibi, n.d.). al-Syathibi merinci maqashid al-syari' menjadi empat aspek utama:

a. *Qashd as-Syari' fi Wadh'i as- Syari'ah* (maksud/Tujuan Allah Menetapkan Syariat), yaitu bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul al-mashalih wa dar'u al-mafashidi*). Dengan demikian, seluruh aturan yang ditetapkan Allah bertujuan demi kebaikan umat manusia.
b. *Qashd as- Syari' fi Wadh as- Syari'ah lil al-Ifhami* (maksud/Tujuan Allah dalam Menetapkan Syariat agar Dapat Dipahami). Dalam hal ini, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, Allah menurunkan syariat dalam bahasa Arab, sehingga pemahaman terhadap syariat memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa dan

struktur linguistik Arab. Kedua, syariat bersifat ummiyah, yang berarti pemahamannya tidak memerlukan ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, kimia, atau fisika.

c. *Qashd as- Syari' fi Wadh' as- Syari'ah li at-Taklifi biMuqtadhaha* (maksud/Tujuan Allah dalam Membuat Syariat Sesuai dengan Ketentuannya).
d. *Qashd as- Syar' fiDukhul al- Mukallaf tahta Ahkam as- Syari'ah* (Tujuan Allah Membebankan Syariat kepada Mukallaf), yaitu bahwa manusia diberikan kebebasan dalam menjalankan syariat, bukan karena keterpaksaan.

Pada dasarnya, mashlahah merupakan tujuan utama dari maqashid al-syariah, yaitu tercapainya kebaikan tanpa menyimpang dari ketentuan syariat. Al-Ghazali mendefinisikan mashlahah sebagai upaya menjaga tujuan syariat (maqashid al-syari'). Ia menegaskan bahwa:

> *"Setiap kemaslahatan yang tidak berkaitan dengan pemeliharaan tujuan agama yang sumbernya dari Qur'an, Hadis, konsensus ulama' atau Ijma' dan tidak sejalan dengan prinsip Islam, maka tidak dapat diterima (bathil). Sementara itu, mashlahah yang berlandaskan maqashid syariah bersumber dari Qur'an, Hadis, dan konsensus ulama' atau Ijma', dapat dijadikan dasar hukum Islam. Mashlahah semacam ini disebut mashlahah mursalah, bukan sekadar analogi (qiyas)*(Al-Ghazali, 2014).

Para pemikir kontemporer membagi mashlahah ke dalam dua kriteria utama. Pertama, mashlahah harus bersifat mutlak, bukan relatif atau subjektif, agar tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kedua, mashlahah bersifat universal (*kulliyah*), yang berarti prinsip universal ini tidak boleh bertentangan dengan bagian-bagian kecilnya (*juziyyat*). Al-Ghazali dalam al-Mustashfa menegaskan bahwa prinsip maqashid al-syariah bersifat universal, sehingga tidak hanya diakui dalam Islam, tetapi juga oleh berbagai agama lain. Sebagai penyempurna pemikiran ulama sebelumnya, al-Syathibi kemudian mengklasifikasikan maqashid al-syariah berdasarkan tingkat kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan manusia menjadi tiga kategori utama.

1. Mashlahah al-Dharuriyyat

Mashlahah al-dharuriyyah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu (mukallaf) guna mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan, bahkan dapat mengancam kehidupan manusia. Contoh dari kebutuhan ini mencakup aktivitas mendasar seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah lainnya (al-Syathibi). Dalam konteks muamalah, al-Syathibi menegaskan pentingnya adanya iwadh (imbal balik) dalam transaksi perpindahan kepemilikan.

Beberapa ulama memiliki perbedaan dalam menyusun urutan lima prinsip dasar (uṣūl al-khamsah). Imam al-Ghazālī menetapkan urutan tersebut dengan mendahulukan

pemeliharaan agama, diikuti oleh pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, harta(Al-Ghazali, 2014). Imam al-Rozi mengungkapkan susunan berbeda dalam menuturkan urutan lima prinsip dasar tersebut. dimulai dengan pemeliharaan jiwa, kemudian diikuti oleh perlindungan harta, keturunan, agama, dan akal(Al-Rāzī, n.d.). Meskipun terdapat perbedaan dalam urutan penyebutan lima prinsip dasar tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semuanya memiliki kedudukan dan peran yang setara. Dengan demikian, tidak ada satu pun yang lebih diutamakan dibanding yang lain. Imam al-Haramain mengelompokkan lima aspek utama dalam *al-dharuriyyat* yang harus dijaga dan dipelihara, yaitu:

a. Hifdzu al-Din (Menjaga Agama).

Agama mencakup ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, serta hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Seluruh ajaran ini terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan menjalankan semua ketentuan tersebut, seseorang dianggap menaati kehendak al-Shāri' dan termasuk dalam upaya menjaga agama(Khallaf, 1971). Aspek ini berkaitan dengan kewajiban individu dalam menjalankan ibadah yang telah disyariatkan. Al-Ghazali mendasarkan urgensi menjaga agama pada firman Allah dalam QS. Al-'Ankabut ayat 45,

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Shalat adalah kewajiban utama bagi setiap Muslim dan termasuk dalam kategori kebutuhan *al-dharuriyyah* (primer). Ketidaksungguhan dalam menjalankan shalat dapat mempengaruhi identitas keislaman seseorang, bahkan berpotensi mengeluarkannya dari Islam. Di sisi lain, pada tingkat *al-hajiyyah* (sekunder), keberlangsungan shalat yang optimal membutuhkan sarana pendukung, seperti masjid. Meskipun shalat dapat dilaksanakan di mana saja selama tempatnya suci, absennya masjid dapat menjadi kendala dalam pelaksanaannya(Wahyudi, 2007).

b. Hifdzu al-Nafs (Menjaga Jiwa).

Islam sangat menghargai kehidupan manusia dan mewajibkan setiap individu untuk melindungi dirinya serta orang lain. Oleh karena itu, tindakan membunuh, baik bubuh diri atau membunuh orang lain, dilarang keras. Hal ini telah disampaikan oleh Allah dalam QS. Al-Isra ayat 33, yang melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat serta menetapkan perlindungan hukum bagi ahli waris korban pembunuhan secara zalim.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

Janganlah kalian membunuh seseorang yang telah Allah haramkan (membunuhnya), kecuali dengan alasan yang telah dibenarkan. Siapa yang telah dibunuh secara aniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. namun, janganlah walinya itu) melebihi batas dalam melakukan pembunuhan (kishas). Sesungguhnya dia merupakan orang yang memperoleh pertolongan

c. Hifdzu al-‘Aql (Menjaga Akal).

Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lain, sehingga perlu dijaga kesehatannya. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi makanan dan minuman yang memabukkan karena dapat merusak fungsi akal. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur’an sebagai bagian dari upaya melindungi kemampuan berpikir manusia. Akal merupakan bagian vital dalam diri manusia yang memungkinkan mereka untuk membedakan, merasakan, dan memahami berbagai hal, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Akal tidak hanya berfungsi sebagai salah satu aspek tubuh, tetapi juga memiliki peran sebagai penggerak. Aktivitas akal inilah yang memungkinkan manusia mengendalikan dan mengarahkan anggota tubuh lainnya dalam menjalankan berbagai tindakan(‘Aṭīyah, 2003).

d. Hifdzu al-Nasl/al-‘Ird (Menjaga Keturunan dan Kehormatan).

Aspek ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan generasi melalui pernikahan yang sah menurut aturan agama dan negara serta mencegah praktik zina yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap individu dan menjadi bagian dari kehormatan (*al-‘ird*) yang harus dijaga. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar kepada anak yang lahir bersumber berdasarkan hubungan sah menurut agama serta hukum negara. Dalam upaya menjaga keturunan, Islam dengan tegas melarang perbuatan zina agar garis keturunan tetap terjaga dengan baik (Ḥirzillāh, 2005).

e. Hifdzu al-Mal (Menjaga Harta).

Islam mengatur agar kepemilikan dan pencarian harta dilakukan dengan cara yang halal. Larangan memperoleh harta secara tidak sah, seperti korupsi, pencurian, dan praktik ilegal lainnya, ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Mashlahah al-Hajiyyat

Mashlahah al-hajiyyah merupakan kebutuhan sekunder yang meskipun tidak bersifat wajib, keberadaannya dapat membantu mempermudah kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang tidak akan mengalami kehancuran, tetapi bisa menghadapi kesulitan. Contoh dari kebutuhan sekunder ini termasuk berbagai bentuk transaksi dalam fiqih muamalah seperti qiradh, musaqah, dan salam. Prinsip utama dari kategori ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, serta memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan (al-Syathibi).

3. Mashlahah al-Tahsiniyyat

Dalam istilah modern, mashlahah al-tahsiniyyat disebut sebagai kebutuhan tersier. Kategori ini mencakup tindakan atau kebiasaan yang dianjurkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang baik serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Mashlahah al-tahsiniyyat berperan sebagai penyempurna yang sifatnya fleksibel, dapat dilakukan ataupun ditinggalkan. Contoh yang diberikan al-Syathibi mencakup larangan jual beli barang najis serta prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya seperti air dan rumput.

Implikasi Maqashid al-Syariah

Pembahasan maqashid al-syariah oleh para ulama seperti al-Ghazali dan al-Syathibi, yang kemudian diikuti oleh para pemikir Muslim kontemporer, memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Kategorisasi maqashid ini bertujuan agar umat Islam dapat mendekati kondisi ideal dalam kehidupannya serta terus meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi, penerapan maqashid al-syariah memberikan perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam menekankan perlindungan terhadap iman, jiwa, akal, dan keturunan, yang tidak dikenal dalam sistem ekonomi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan kesejahteraan sosial.

Hilirisasi Ekonomi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hilirisasi merupakan tahapan pengolahan bahan mentah menjadi produk yang siap digunakan, sehingga menambah nilai suatu barang. Dalam skala nasional, hilirisasi berperan dalam meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki suatu negara. Sebelumnya, komoditas diekspor dalam bentuk

bahan mentah, tetapi dengan hilirisasi, komoditas tersebut diolah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Langkah ini berpotensi meningkatkan nilai ekspor dan secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Hilirisasi memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian suatu negara. Pertama, proses ini meningkatkan nilai tambah suatu produk, di mana bahan mentah diolah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi dengan kualitas dan harga jual yang lebih tinggi. Hal ini membuat produk lebih bernilai dan memiliki daya saing lebih besar di pasar. Kedua, hilirisasi berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baru karena membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam pengolahan bahan mentah. Dengan demikian, semakin banyak peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat. Ketiga, hilirisasi mendorong munculnya produk baru yang siap bersaing di pasar global, sehingga dapat meningkatkan ekspor dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat, strategi ini membantu menjaga stabilitas harga komoditas dalam negeri, terutama saat harga barang impor mengalami kenaikan signifikan. Dengan menjual produk bernilai tambah, produsen dapat mengurangi risiko fluktuasi harga bahan mentah. Kelima, hilirisasi berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional, karena ekspor produk olahan akan memberikan keuntungan bagi produsen yang pada akhirnya mendukung perkembangan ekonomi secara keseluruhan(Akhmadi, 2024).

Hilirisasi sering kali disebut sebagai down streaming atau value-adding, yang mengacu pada upaya untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan, sebaliknya, mendorong industri dalam negeri agar memanfaatkan bahan tersebut guna meningkatkan nilai tambah domestik serta menciptakan lapangan kerja(Deddy et al., 2023). Jika ekspor tetap diperlukan, maka yang dikirim ke luar negeri sebaiknya berupa produk jadi hasil dari pengolahan bahan baku. Sementara itu, menurut konsep keunggulan komparatif, Hirschman(Hirschman, 1958) menyarankan kebijakan yang lebih tepat dengan menitikberatkan pada perbaikan infrastruktur dan iklim investasi. Kebijakan ini tidak boleh mengandung unsur favoritisme, seperti menetapkan sektor, industri, atau bisnis tertentu sebagai prioritas. Selain itu, terdapat kemungkinan munculnya sektor-sektor baru yang saat ini belum ada, tetapi dapat berkembang seiring dengan perubahan keunggulan komparatif. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dapat mendukung transisi yang lebih mudah menuju industri dengan nilai tambah lebih tinggi tanpa intervensi politik yang berlebihan.

Pembahasan

Maqashid Syariah dan hilirisasi ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun kesejahteraan umat. Maqashid Syariah sebagai tujuan hukum Islam bertujuan untuk memastikan segala aspek kehidupan manusia berjalan dalam bingkai kemaslahatan. Sementara itu, hilirisasi ekonomi merupakan strategi pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, hilirisasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar yang selaras dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, pendekatan hilirisasi ekonomi yang berbasis maqashid syariah berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam kajian maqashid syariah, aspek ekonomi berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Lima prinsip utama dalam maqashid syariah, yakni perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (hifdzu al-mal), memiliki relevansi yang kuat dalam konsep hilirisasi ekonomi. Hilirisasi ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip maqashid syariah dapat mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam berbasis maqashid syariah dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Konsep hifdzu al-mal dalam maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga harta agar tidak disalahgunakan. Dalam konteks hilirisasi ekonomi, prinsip ini dapat diterapkan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan berorientasi pada nilai tambah. Hilirisasi yang baik akan menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Dengan demikian, pengembangan industri berbasis hilirisasi tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Hilirisasi ekonomi yang berbasis maqashid syariah juga berkontribusi dalam menjaga keadilan sosial. Prinsip maqashid syariah menekankan distribusi kekayaan yang adil dan merata, sehingga hilirisasi ekonomi harus dirancang agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dalam ekonomi Islam, konsep keadilan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi harus memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah guna menghindari ketimpangan sosial.

Salah satu tantangan dalam hilirisasi ekonomi adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Maqashid syariah mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam dan sumber daya yang ada.

Oleh karena itu, hilirisasi yang sesuai dengan maqashid syariah harus mempertimbangkan aspek lingkungan dengan menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam mengembangkan model hilirisasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis.

Dalam perspektif hifdzu al-nafs, hilirisasi ekonomi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Peningkatan sektor hilirisasi industri dapat mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, dengan berkembangnya industri hilirisasi, stabilitas ekonomi dapat terjaga sehingga masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan sejahtera. Hal ini selaras dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Prinsip hifdzu al-aql dalam maqashid syariah juga memiliki relevansi dalam hilirisasi ekonomi, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hilirisasi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan, sehingga pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam pengembangannya. Oleh karena itu, penerapan maqashid syariah dalam hilirisasi ekonomi dapat diwujudkan melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang mendorong inovasi dan produktivitas. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih berdaya dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Hilirisasi ekonomi juga dapat berperan dalam menjaga hifdzu al-nasl, yaitu perlindungan terhadap keturunan dan keluarga. Dengan adanya hilirisasi yang berorientasi pada nilai tambah, stabilitas ekonomi keluarga dapat meningkat. Pendapatan yang lebih stabil akan memberikan jaminan bagi generasi mendatang untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Dalam aspek hifdzu al-din, hilirisasi ekonomi yang berlandaskan maqashid syariah juga dapat memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam industri halal, hilirisasi dapat menciptakan produk bernilai tambah yang tetap sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. Dengan demikian, ekonomi yang berkembang tetap menjaga nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat bagi umat secara keseluruhan.

Keberhasilan hilirisasi ekonomi yang berbasis maqashid syariah sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang mendorong industri hilirisasi berbasis syariah, baik dalam bentuk insentif maupun regulasi

yang mendukung ekosistem industri halal dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan yang mendukung maqashid syariah dalam hilirisasi dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang adil dan berdaya saing.

Penerapan maqashid syariah dalam hilirisasi ekonomi juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan kemandirian dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, hilirisasi yang berbasis maqashid syariah dapat menjadi strategi efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Secara keseluruhan, integrasi maqashid syariah dalam hilirisasi ekonomi dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sejahtera. Prinsip-prinsip maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan hilirisasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan spiritual. Dengan pendekatan ini, hilirisasi ekonomi dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan umat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hubungan antara **Maqashid Syariah** dan **Hilirisasi Ekonomi**

Aspek	**Maqashid Syariah**	**Hilirisasi Ekonomi**	**Hubungan Keduanya**
Hifz al-Din	Prinsip ekonomi Islam yang mendukung keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.	Hilirisasi ekonomi dapat diterapkan dengan prinsip halal, adil, dan berkelanjutan sesuai syariah.	Hilirisasi yang berbasis ekonomi syariah memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam praktik ekonomi.
Hifz al-Nafs	Menjamin kesejahteraan dan perlindungan sosial dalam kehidupan ekonomi.	Hilirisasi membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Hilirisasi ekonomi yang berbasis syariah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan.
Hifz al-Aql	Pendidikan dan inovasi ekonomi berbasis syariah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan nilai tambah melalui inovasi dan pengembangan industri berbasis pengetahuan.	Keduanya menekankan pentingnya inovasi dan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan daya saing ekonomi
Hifz al-Nasl	Menjamin	Hilirisasi ekonomi	Konsep keberlanjutan

	keberlanjutan ekonomi untuk generasi mendatang dengan prinsip keberlanjutan dan etika bisnis.	menciptakan industri yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan jangka panjang.	dalam hilirisasi ekonomi selaras dengan maqashid syariah yang menekankan perlindungan generasi mendatang.
Hifz al-Mal	Mendorong sistem ekonomi yang adil, produktif, dan tidak eksploitatif.	Hilirisasi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan distribusi kekayaan yang lebih merata.	Hilirisasi ekonomi yang berbasis maqashid syariah mencegah eksploitasi dan ketimpangan ekonomi.

KESIMPULAN

maqashid syariah dan hilirisasi ekonomi memiliki hubungan erat dalam membangun kesejahteraan umat. Maqashid syariah sebagai tujuan hukum Islam tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga aspek ekonomi. Sementara itu, hilirisasi ekonomi bertujuan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Integrasi maqashid syariah dalam hilirisasi ekonomi menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam ekonomi Islam, hilirisasi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan maqashid syariah. Lima prinsip utama maqashid syariah, yaitu perlindungan agama (hifdzu al-din), jiwa (hifdzu al-nafs), akal (hifdzu al-aql), keturunan (hifdzu al-nasl), dan harta (hifdzu al-mal), menjadi dasar penting dalam membangun hilirisasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan pendekatan ini, eksploitasi sumber daya alam dapat dikendalikan dan distribusi ekonomi menjadi lebih merata.

Prinsip hifdzu al-mal menekankan pentingnya menjaga harta agar tidak disalahgunakan. Dalam konteks hilirisasi ekonomi, hal ini diterapkan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan berorientasi pada nilai tambah. Hilirisasi yang baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Hilirisasi ekonomi berbasis maqashid syariah juga berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Distribusi kekayaan yang adil memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi harus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menghindari ketimpangan sosial. Aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam hilirisasi ekonomi.

Maqashid syariah mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam, sehingga hilirisasi harus menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, model hilirisasi yang dikembangkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara ekologis. Keberhasilan hilirisasi ekonomi berbasis maqashid syariah sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah. Regulasi yang mendukung industri hilirisasi berbasis syariah, termasuk insentif dan penguatan ekosistem industri halal, dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang adil dan berdaya saing. Secara keseluruhan, integrasi maqashid syariah dalam hilirisasi ekonomi menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, hilirisasi ekonomi dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

‘Aṭīyah, J. al-D. (2003). *Naḥwa Taf‘īl Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Dār al-Fikr.

Akhmadi, F. (2024). Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Hatta: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 25–31. https://doi.org/10.62387/hatta.v2i1.18

Al-Fasi, A. (1993). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Dar al-Gharb al-Islami.

Al-Ghazali, A. H. (2014). *al-Mustashfa min ‘ilm al-Ushul*. Dar al-Kotob al- Ilmiyah.

Al-Rāzī, F. al-D. M. ibn ‘Umar ibn al-H. (n.d.). *al-Maḥṣūl fī ‘Ilm al-Uṣūl,*. Mu’assasat al-Risālah.

Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, *2*(3), 95–100. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804

Alifa, N. N., & Zahidi, M. S. (2024). Pengembangan Ekonomi Biru Sebagai Strategi Indonesia Menuju Ekonomi Maju. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *38*(1), 48–65. https://doi.org/10.52318/jisip.2024.v38.1.4

Asy-Syathibi. (n.d.). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*. Dara l-Ma’rifah.

Deddy, M. A., Adriyanto, A., & N, R. D. A. (2023). Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *7*(3), 2026–2032. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5137/http

Helim, A. (2019). *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam*

Metodologi Hukum Islam). Pustaka Pelajar.

Hirschman, A. (1958). *The Strategy of Economic Development*. Yale. University Press.

Ḥirzillāh, ‘Abd al-Qādir ibn. (2005). *al-Madkhal ilā ‘Ilm Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Maktabat al-Rushd Nāshirūn.

HS, A. W. (2018). Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, *9*(2), 219–230. https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260

Khallaf, A. W. (1971). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.

Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, *1*(1), 14–29. https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55

Sidiq, S. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *7*(1), 140–161.

Wahyudi, Y. (2007). *Ushul Fikih versus Hermeneutika*. Pesantren Nawesea Press.

Wau, F. T., Kiton, M. A., Wau, M., & Fau, J. F. (2024). ANALISIS STRATEGIS KEBIJAKAN HILIRISASI MINERAL: Implikasi Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal Publicuho*, *7*(3), 1215–1224. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.481

Widjaja, G. (2024). MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, *5*(1), 23–36. https://doi.org/https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355

M. Zikwan, S.Sy., MH.

Lahir disalahsatu provinsi pulau andalas tepatnya Desa Baru kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Prov. Jambi pada tanggal 08 September 1989. Pengalaman pendidikan sejak Pendidikan Dasar 110/VII Desa Baru dan MI Nurussa'adah, (2004) kemudian melanjutkan pendidikan Tsanawiyah Swasta di Pondok Pesantren Darussyafi'iyah Muaro Bulian (2007), Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta di Pondok Pesantren As'ad Olak Kemang Kota Jambi (2010), Madrasah Aliyah Diniyah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2013) menempuh pendidikan Tinggi pada program Studi Mu'amat di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Ibrahimy (2014) program Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy (2016). Saat ini penulis sebagai dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo. Penulis juga aktif dalam beberapak karya ilmiah dan beberapa conferensi Ilmiah. Disamping sebagai Dosen, penulis juga aktif memberikan bimbingan kajian fikih dan kitab kuning di madrasah I'dadiyah Pondok pesantren salafiyah syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Dibidang pengalaman kerja Penulis merupakan sekretaris program studi manajemen dan bisnis syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo.

Inspirasi Kedaulatan Wilayah dan Politik dari Kakawin Nagarakretagama: Perspektif Reorientasi Kedaulatan Nusantara Masa Kini

Masning Salamah

Universitas Indonesia

masningslmh@gmail.com

Abstrak

Kakawin Negarakretagama merupakan karya sastra Jawa Kuno yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365. Kakawin tersebut memberikan gambaran rinci mengenai kedaulatan wilayah dan politik Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Penelitian ini menjelaskan sistem diplomasi melalui upeti, pendekatan kedaulatan berbasis budaya, serta pengintegrasian wilayah Nusantara. Penelitian ini mengeksplorasi nilai-nilai kedaulatan Majapahit yang tercermin dalam *Kakawin Negarakretagama* dan merelevansikannya dengan tantangan kedaulatan politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia masa kini. Dalam konteks globalisasi dan ancaman terhadap kedaulatan wilayah, konsep kedaulatan terintegrasi Majapahit yang menekankan diplomasi dan kesatuan budaya menjadi inspirasi untuk reorientasi kedaulatan Indonesia modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai sejarah dari *Kakawin Negarakretagama* dapat menjadi panduan dalam memperkuat kedaulatan bangsa, menghadapi dinamika geopolitik, dan menjaga persatuan nasional.

Kata Kunci: Kakawin Negarakretagama; Majapahit; kedaulatan wilayah; kedaulatan politik; diplomasi budaya; reorientasi kedaulatan.

Abstract

The Kakawin Negarakretagama is an Old Javanese literary work authored by Mpu Prapanca in 1365. This kakawin provides a detailed depiction of the territorial sovereignty and political structure of the Majapahit Kingdom under the reign of King Hayam Wuruk. This study examines the diplomatic system through tribute, a sovereignty approach based on cultural integration, and the unification of the Nusantara region. It explores the values of Majapahit sovereignty reflected in the Kakawin Negarakretagama and their relevance to contemporary challenges in political, legal, economic, and cultural sovereignty in Indonesia. In the context of globalization and threats to territorial sovereignty, Majapahit's integrated sovereignty concept, emphasizing diplomacy and cultural unity, offers inspiration for reorienting modern Indonesian sovereignty. The study concludes that the historical values of the Kakawin Negarakretagama can serve as a guide to strengthening national sovereignty, navigating geopolitical dynamics, and maintaining national unity.

Keywords: *Kakawin Negarakretagama; Majapahit; territorial sovereignty; political sovereignty; cultural diplomacy; sovereignty reorientation.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kakawin Negarakretagama merupakan salah satu karya sastra Jawa Kuno yang paling termasyhur dan ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kakawin ini berisikan mengenai historis, budaya, dan sastra mengenai kehidupan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yang dikenal sebagai salah satu penguasa besar Nusantara pada puncak kejayaan Majapahit antara tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Sebagai sebuah *pujasastra,* kakawin ini bertujuan untuk memuliakan kebesaran raja serta kewibawaan kerajaan, dengan gaya penyajian yang menonjolkan keindahan bahasa Jawa Kuno dalam bentuk tembang.

Kakawin Negarakretagama menguraikan mengenai keadaan keraton, sistem pemerintahan, wilayah kekuasaan, perjalanan Raja Hayam Wuruk, dan tradisi keagamaan serta adat istiadat kerajaan. Dengan pembagian struktur yang rapi ke dalam 98 pupuh, kakawin ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama membahas tentang keluarga raja, wilayah Majapahit, beserta silsilah raja-raja sebelumnya, sedangkan bagian kedua mengisahkan perjalanan sang raja, penghormatan terhadap leluhur, hingga upacara keagamaan dan adat yang berulang secara berkala.

Kakawin ini ditemukan kembali pada tahun 1894 oleh J.L.A. Brandes, seorang filolog Belanda, di perpustakaan Raja Lombok. Penemuan ini menyelamatkan naskah *Negarakretagama* dari kehancuran, mengingat perpustakaan tersebut hampir dihancurkan oleh pasukan KNIL. Setelah disimpan di Belanda, naskah ini dikembalikan kepada Indonesia pada tahun 1973 dan kini menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Keberadaan kakawin ini semakin diakui secara global ketika pada tahun 2008 *Negarakretagama* dimasukkan ke dalam *"Memory of the World Programme"* oleh UNESCO, menegaskan posisinya sebagai warisan dunia.

Terdapat gambaran mengenai kedaulatan wilayah dan politik Kerajaan Majapahit semasa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dalam *Kakawin Negarakertagama.* Kakawin ini mencatat daftar wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Majapahit, mencakup berbagai daerah di Nusantara hingga kawasan di luar kepulauan Indonesia. Gambaran ini menunjukkan keberhasilan Majapahit dalam menyatukan wilayah yang luas melalui pendekatan politik dan budaya, menjadikannya simbol kejayaan geopolitik pada zamannya.

Selain menggambarkan luasnya wilayah kekuasaan, kakawin ini juga memberikan rincian mengenai struktur politik dan administratif Majapahit. Sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan baik terlihat dari pembagian peran antara raja, pejabat istana, dan para

pembesar daerah. Hal ini mencerminkan pemerintahan yang stabil dan efisien. Kakawin ini juga menyoroti kepemimpinan Raja Hayam Wuruk sebagai penguasa, yang memprioritaskan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyatnya.

Kakawin Negarakretagama mencatat pula kegiatan diplomatik yang dijalankan oleh Majapahit, termasuk hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Kakawin ini menunjukkan bahwa ekspansi wilayah tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui diplomasi dan pernikahan politik. Pendekatan ini menggambarkan kesadaran Majapahit akan pentingnya hubungan internasional untuk menjaga stabilitas dan pengaruhnya di kawasan.

Selain aspek politik dan administrasi, kakawin ini menampilkan Majapahit sebagai kerajaan yang menjalankan kekuasaan dengan dasar simbolis dan spiritual. Raja Hayam Wuruk digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki legitimasi ilahi, dipuji sebagai pembawa kesejahteraan dan kedamaian. Pandangan ini memperkuat citra Majapahit sebagai kerajaan yang dihormati oleh rakyatnya dan bawahan politiknya.

Relevansi nilai-nilai kedaulatan Majapahit yang tercermin dalam *Kakawin Negarakretagama* dengan tantangan kedaulatan Indonesia masa kini dapat dilihat dalam berbagai aspek penting yang masih sangat relevan hingga saat ini. Kakawin ini menggambarkan bagaimana Majapahit berhasil mengintegrasikan wilayah yang sangat luas melalui pendekatan diplomatik dan budaya, bukan hanya melalui kekuatan militer. Pendekatan ini penting bagi Indonesia yang kini menghadapi tantangan keberagaman budaya, etnis, dan agama. Dalam menjaga keutuhan negara, Indonesia bisa belajar dari Majapahit tentang pentingnya diplomasi dan penghargaan terhadap keragaman budaya sebagai dasar untuk memperkuat persatuan nasional, baik dalam konteks domestik maupun di kancah internasional.

Selain itu, *Kakawin Negarakretagama* juga menampilkan pentingnya kedaulatan wilayah dalam pemerintahan Majapahit, dimana kerajaan tersebut berhasil mengendalikan berbagai wilayah di Nusantara. Konsep kedaulatan wilayah ini sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan harus menghadapi tantangan untuk menjaga keutuhan wilayahnya di tengah globalisasi dan ancaman separatisme. Dalam hal ini, Indonesia harus terus memperkuat ketahanan wilayah dan integrasi nasional. Kepemimpinan Raja Hayam Wuruk yang digambarkan dalam Kakawin sebagai seorang pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan juga memiliki relevansi besar dengan tantangan Indonesia masa kini. Prinsip ini sangat penting dalam memastikan kebijakan pemerintah yang berfokus

pada pemerataan pembangunan dan pengentasan ketimpangan sosial-ekonomi, yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Selain itu, struktur pemerintahan Majapahit yang terorganisasi dengan baik, dengan pembagian peran yang jelas antara raja, pejabat istana, dan pembesar daerah, memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan. Meskipun Indonesia sudah mengadopsi sistem demokrasi, tantangan terkait korupsi, birokrasi yang lambat, dan ketegangan politik pusat-daerah masih perlu diatasi.

Kakawin ini juga menunjukkan bahwa Majapahit menjalankan kekuasaan dengan dasar spiritualitas dan legitimasi moral yang kuat. Meskipun konteks ini mungkin berbeda dalam Indonesia modern, prinsip bahwa kekuasaan harus memiliki legitimasi moral dan etika tetap relevan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat tergantung pada sejauh mana pemerintahan menjaga keadilan, kesejahteraan, dan moralitas.

B. Rumusan Masalah

Nilai-nilai kedaulatan Majapahit yang tercermin dalam *Kakawin Negarakretagama* dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan, menjaga persatuan nasional, dan menghadapi tantangan geopolitik serta dinamika global yang terus berkembang. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kedaulatan dan diplomasi yang tergambar dalam *Kakawin Negarakretagama*? Penelitian ini juga akan membahas bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan pada konteks kedaulatan Indonesia modern.

C. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak mengkaji mengenai *Kakawin Negarakretagama* yang digunakan sebagai objek utama penelitian ini, diantaranya adalah penelitian oleh Pradita dan Jendriadi (2023) yang membahas mengenai dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam buku *Kakawin Negarakertagama.* Kemudian Nur, Thomas, dan Naila (2023) yang membandingkan dua teks sejarah dua kerajaan *The Life of King Alfred* dan *Nagarakertagama.* Terdapat pula penelitian dari Prahasya Wijayanto, dan Setyani (2020) yang menjelaskan mengenai konsep capital city dalam *Kakawin Negarakertagama.*

Kemudian penelitian mengenai kedaulatan wilayah dan politik juga telah dikaji oleh Arsetyo (2021) yang membahas mengenai perundang-undangan hukum internasional, pengikatan hukum dan pengaruhnya terhadap negara-negara dan masyarakat internasional, Prasetyo (2023) yang membahas mengenai syarat kedaulatan wilayah sebagai berdirinya suatu negara dan pemberlakuan syarat sah berdirinya suatu negara berdasarkan Hukum Internasional, serta Satria (2022) yang membahas mengenai prinsip kedaulatan wilayah

negara terhadap masuknya pesawat tempur asing di wilayah udara Indonesia dan penerapan Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam mengatur pelanggaran wilayah udara.

Berdasarkan telaah penulis, masih belum terdapat penelitian yang mengkaji mengenai *Kakawin Negarakretagama* yang secara tajam menyoroti mengenai kedaulatan wilayah dan politk. Padahal, menurut sependek pengetahuan penulis, karya sastra Jawa dapat dijadikan inspirasi untuk kedaulatan Nusantara masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka dengan menganalisis teks *Kakawin Negarakretagama.* Penelitian kualitatif studi pustaka adalah metode penelitian yang berfokus pada eksplorasi informasi melalui kajian sumber-sumber pustaka. Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan berbagai referensi, kemudian mengklasifikasikan data sesuai dengan formula penelitian yang telah ditentukan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dan dikutip untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, yang kemudian dibahas melalui abstraksi dan interpretasi. Pendekatan dalam interpretasi bisa menggunakan berbagai metode, tergantung pada fokus penelitian, hingga akhirnya menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020).

Teks dari *Kakawin Negarekrtagama* akan diklasifikasikan berdasarkan beberapa data. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap teks yang sudah diklasifikasikan tersebut untuk memahami nilai-nilai kedaulatan yang ada pada masak Kerajaan Majapahit yang dapat direlevansikan terhadap dinamika kedaulatan Indonesia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam *Kakawin Negarakretagama* akan dianalisis dengan mengemukakan teks *Kakawin Negarakretagama* yang akan dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem diplomasi berbasis upeti, pendekatan budaya sebagai alat integrasi wilayah Nusantara, serta konsep kedaulatan terintegrasi.

1. Sistem diplomasi berbasis upeti dalam *Kakawin Negarakretagama*

Pupuh 14 dari *Kakawin Negarakretagama* memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai wilayah yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit. Dalam pupuh ini, Mpu Prapanca mencatat berbagai daerah dan kerajaan yang memberikan upeti sebagai bentuk penghormatan kepada Majapahit. Berikut adalah analisis dan bukti dari pupuh tersebut:

"Kandandangan, Landa, Samadang dan Tirem tak terlupakan... Malano tetap yang terpenting di pulau Tanjungpura."

Dalam frasa ini, Mpu Prapanca mencatat berbagai daerah yang berada di bawah pengaruh Majapahit, termasuk kawasan yang jauh di luar Jawa, seperti Malano di Tanjungpura. Ini menunjukkan bahwa Majapahit memiliki wilayah yang sangat luas, dan hubungan diplomatik dilakukan dengan kerajaan-kerajaan ini, yang salah satunya melalui pemberian upeti.

"Di Hujung Medini Pahang yang disebut paling dahulu... Jerai, Kanjapiniran, semua sudah lama terhimpun."

Dalam bagian ini, daerah-daerah yang terletak di Semenanjung Malaya, seperti Pahang, Langkasuka, Kelantan, dan Kedah disebutkan. Mereka juga terhimpun dalam pengaruh Majapahit, menunjukkan bahwa hubungan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan ini terjalin melalui mekanisme diplomatik, diantaranya pemberian upeti.

"Disebelah timur Jawa, seperti yang berikut: Bali dengan Negara yang penting Badahulu dan Lo Gajah... "

Frasa ini menyebutkan wilayah Bali dan daerah sekitar yang berada di bawah pengaruh Majapahit. Pemberian upeti dari kerajaan-kerajaan tersebut mencerminkan kesetiaan dan hubungan diplomatik dengan Majapahit.

"Tersebut pula pulau-pulau Makasar, Buton, Bangawi Kunir, Galian, serta Salayar... Wanda (n), Ambon atau pulau Maluku, Wanin, Seran, Timor..."

Ini menggambarkan kerajaan-kerajaan yang ada di luar Jawa, seperti Buton, Makassar, dan Maluku, yang juga terlibat dalam hubungan dengan Majapahit. Upeti dari daerah-daerah ini menunjukkan aliran kekuasaan dan pengaruh Majapahit atas wilayah-wilayah ini.

Untuk memahami pupuh 14 tersebut perlu dihubungkan dengan Pupuh 13 dan 15. Pada Pupuh 13 memberikan gambaran tentang wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Majapahit, mencatatkan hubungan antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dan sekitarnya. Kemudian pada Pupuh 14 memperinci hubungan tersebut, menyebutkan secara spesifik kerajaan-kerajaan yang memberi upeti dan mengakui pengaruh Majapahit. Dengan demikian, pupuh 14 memperkuat narasi yang ada dalam pupuh 13 mengenai sistem penguasaan dan pengaruh Majapahit yang luas.

Selain itu, Pupuh 15 yang melanjutkan pupuh 14 memberikan gambaran lebih lanjut mengenai administrasi dalam kerajaan, termasuk bagaimana pengaruh politik dan diplomasi dilaksanakan oleh Majapahit. Pupuh 14 menunjukkan wilayah-wilayah yang memberi upeti, sedangkan Pupuh 15 bisa jadi mencatatkan bagaimana upeti tersebut dikelola dan bagaimana

sistem pemerintahan Majapahit diatur untuk mempertahankan stabilitas dan kedaulatan wilayah.

2. Pendekatan budaya sebagai alat integrasi wilayah Nusantara dalam *Kakawin Negarakretagama*

Pupuh 13 dalam *Kakawin Negarakretagama* mencatat secara rinci wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit, baik yang ada di Nusantara maupun yang lebih jauh. Wilayah-wilayah seperti Melayu, Jambi, Palembang, Minangkabau, dan Siak, yang disebutkan dalam pupuh ini, menunjukkan betapa luasnya pengaruh Majapahit di kawasan Asia Tenggara. Frasa seperti *"Negara-negara Melayu yang telah tunduk"* dan *"Negara-negara di Pulau Tanjungnegara"* mengindikasikan bahwa hubungan antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan tersebut didasarkan pada pengakuan atas kekuasaan dan pengaruh politik Majapahit. Selain pengaruh militer, aspek budaya menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan wilayah, di mana hubungan yang terjalin di antara kerajaan-kerajaan tersebut tidak hanya bersifat politis tetapi juga melibatkan kesatuan budaya. Hal ini menggambarkan bahwa Majapahit mengintegrasikan berbagai wilayah melalui hubungan yang erat dalam aspek budaya, seperti bahasa, agama, dan adat istiadat, yang pada akhirnya memperkuat kesatuan wilayah di bawah kekuasaan Majapahit.

Pupuh 8 dan 15 melanjutkan gambaran mengenai struktur pemerintahan yang terorganisasi dengan baik, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan kesatuan budaya di seluruh wilayah Majapahit. Dalam Pupuh 8, digambarkan dengan sangat detail mengenai struktur keraton Majapahit, mulai dari tembok bata merah yang mengelilingi pura hingga pembagian fungsi-fungsi administratif dalam keraton, yang semuanya terorganisir dengan sangat rapi dan sistematis. Frasa seperti *"Pohon brahmastana berkaki bodi, berjajar panjang, rapi berbentuk aneka ragam"* dan *"Di sebelah timur, panggung luhur, lantainya berlapis batu, putih-putih mengkilat"* menggambarkan tatanan pemerintahan yang sangat terstruktur dan penuh simbolisme budaya, di mana setiap bagian dari keraton memiliki fungsinya masing-masing, termasuk bagian yang khusus untuk para pejabat, pendeta, serta prajurit. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya budaya dan sistem organisasi dalam pemerintahan yang terpusat, yang memungkinkan Majapahit untuk mengelola wilayahnya yang luas dengan efektif.

Sementara itu, Pupuh 15 lebih lanjut memperkenalkan hubungan diplomatik Majapahit dengan negara-negara asing, yang menggambarkan bagaimana sistem upeti

diterapkan untuk mempererat hubungan antar kerajaan. Frasa *"Negara sahabat"* dan *"Tiap musim tertentu mempersembahkan pajak upeti"* menunjukkan bahwa upeti adalah bagian dari sistem diplomasi yang lebih besar, yang juga menciptakan hubungan saling menghormati antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Siam, Campa, dan Kamboja. Dalam hal ini, upeti dijadikan sarana untuk mengintegrasikan wilayah dan memperkuat kedaulatan Majapahit melalui sistem politik dan budaya yang terjalin. Keseluruhan struktur pemerintahan dan sistem diplomasi berbasis upeti ini menjadi landasan bagi kesatuan wilayah dan kestabilan politik di Majapahit, yang terjaga melalui hubungan budaya dan administratif yang saling mendukung.

3. Konsep kedaulatan terintegrasi dalam *Kakawin Negarakretagama*

Pupuh 92 hingga 94 dalam *Kakawin Negarakretagama* memberikan gambaran mengenai Raja Hayam Wuruk sebagai pemimpin yang memiliki legitimasi ilahi dan kemampuan untuk menjaga kedamaian serta kesejahteraan kerajaan. Dalam Pupuh 92, pujian terhadap Raja Hayam Wuruk dimulai dengan penekanan pada kesejahteraan rakyat dan negara, yang tercapai karena kepemimpinan beliau. Frasa *"terang baginda sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan Negara"* menunjukkan perhatian Raja Hayam Wuruk terhadap kondisi rakyatnya, yang mencerminkan kualitas kepemimpinan yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga berakar pada dimensi spiritual. Hal ini diperkuat dengan penyebutan *"dengan suka rela berlaku bagai titisan Budha,"* yang mengaitkan Raja Hayam Wuruk dengan kesucian dan keagungan spiritual, sebagaimana yang diharapkan dari seorang pemimpin dengan legitimasi ilahi. Ini menggambarkan bahwa kekuasaan politik Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tidak hanya didasarkan pada otoritas politik, tetapi juga memiliki dasar yang sangat kuat dalam aspek spiritual dan budaya.

Pujian lebih lanjut diteruskan dalam Pupuh 92 dengan menyebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk dianggap sebagai *"titisan Bhatara Girinata untuk menjaga buana,"* yang mengaitkan beliau dengan kekuatan ilahi sebagai penjaga dunia. Frasa *"hilang dosanya orang yang dipandang dan musnah letanya abdi yang disapa"* menegaskan bahwa keberadaan dan kepemimpinan Raja Hayam Wuruk memiliki dampak yang sangat positif, bahkan bisa membawa keselamatan bagi orang-orang yang berada di bawah pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan Majapahit pada masa itu dipahami sebagai sebuah kekuasaan yang terintegrasi antara dimensi politik dan spiritual, di mana pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap dunia fisik tetapi juga terhadap harmoni spiritual dalam kerajaannya.

Pupuh 94 melanjutkan gambaran tersebut dengan memberikan penekanan pada pujian yang diterima oleh Raja Hayam Wuruk dari para pujangga. Dalam frasa *"Mendengar pujian para pujangga pura bergetar mencakar udara,"* ditekankan bahwa pujian terhadap Raja Hayam Wuruk begitu tinggi dan menggelegar, menggambarkan rasa hormat yang mendalam terhadap beliau sebagai pemimpin. Selain itu, dalam pujian ini juga ada doa yang dipanjatkan untuk kesejahteraan negara dan rakyat, yang menegaskan bahwa kekuasaan Raja Hayam Wuruk dipandang tidak hanya sebagai sebuah kedudukan politik, tetapi juga sebagai amanah untuk menjaga kebaikan bagi seluruh masyarakat dan kerajaan.

B. Pembahasan

Dalam bagian pembahasan akan diinterpretasikan lebih lanjut dari hasil dan analisis yang sudah dibahas sebelumnya. Interpretasi nilai-nilai kedaulatan Majapahit dalam konteks globalisasi dapat dilihat pada Pupuh 13 dan 14 yang menunjukkan bagaimana Majapahit mempertahankan kedaulatan wilayah melalui diplomasi dan pengaruh budaya, yang relevan dalam menghadapi globalisasi yang membutuhkan pendekatan inklusif dan kerjasama internasional. Selain itu pada Pupuh 8 dan 15 juga memperlihatkan struktur pemerintahan yang efisien dan terorganisasi dalam Majapahit memberikan contoh bagaimana negara dapat berfungsi secara efektif di tengah tantangan globalisasi, dengan tetap menjaga integritas dan stabilitas internal.

Pengaplikasian nilai yang terkandung dalam *Kakawin Negarakretagama* terhadap tantangan geopolitik dan dinamika kedaulatan modern Indonesia juga dapat diliha dalam Pupuh 14 yang menunjukkan diplomasi berbasis upeti dan aliansi dengan kerajaan lain memberikan contoh bagaimana Majapahit menjaga kedaulatan di tengah dinamika geopolitik yang lebih luas. Ini relevan dengan bagaimana Indonesia, dalam konteks modern, harus mengelola hubungan internasional dengan tetap menjaga kedaulatan dan kekuatan diplomatiknya. Selain itu, pada Pupuh 13 juga diperlihatkan pengintegrasian wilayah Nusantara melalui pendekatan budaya memberikan pelajaran penting tentang pentingnya identitas budaya sebagai perekat persatuan dalam menghadapi tantangan geopolitik.

Kemudian mengenai relevansi pendekatan diplomasi dan budaya dalam menjaga persatuan nasional dapat dilihat pada Pupuh 13 dan 14 yang menunjukkan diplomasi berbasis budaya dan upeti menunjukkan bahwa Majapahit membangun hubungan yang erat melalui budaya, sebuah pendekatan yang bisa menjadi model untuk menjaga persatuan nasional Indonesia di tengah keragaman budaya dan tantangan internal. Dalam Pupuh 8 dan 15 juga diperlihatkan struktur pemerintahan yang berbasis pada kerjasama antar daerah dengan

penghormatan terhadap budaya lokal menunjukkan bagaimana pentingnya pendekatan yang mengedepankan keberagaman dalam menjaga kesatuan bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Nilai-nilai kedaulatan Majapahit yang terkandung dalam *Kakawin Negarakretagama* dapat menjadi panduan untuk memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia dan menghadapi dinamika geopolitik saat ini. Melalui sistem diplomasi berbasis upeti, Majapahit menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat dijaga dengan hubungan saling menghormati dan kerjasama antar wilayah. Pendekatan budaya sebagai alat integrasi wilayah Nusantara juga memperlihatkan bahwa budaya dapat menjadi perekat persatuan yang kuat, bahkan di tengah keberagaman. Selain itu, konsep kedaulatan terintegrasi, yang mencakup dimensi politik dan spiritual, mengajarkan pentingnya menjaga harmoni antara kekuasaan duniawi dan tanggung jawab moral pemimpin dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan Majapahit dalam *Kakawin Negarakretagama* dapat memberikan wawasan penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Saran:

1. Pemanfaatan nilai-nilai budaya dan sejarah dalam kebijakan kedaulatan modern

   Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung dalam *Kakawin Negarakretagama* untuk memperkuat kebijakan kedaulatan nasional. Dalam menghadapi tantangan geopolitik dan globalisasi, pendekatan yang mengedepankan diplomasi budaya dan kerjasama antar bangsa, seperti yang diterapkan Majapahit, dapat menjadi model dalam menjaga persatuan dan integritas bangsa Indonesia.

2. Perlunya penelitian lanjutan mengenai integrasi budaya dan diplomasi sebagai strategi geopolitik Indonesia

   Penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara integrasi budaya dan diplomasi, serta bagaimana kedua elemen ini dapat dijadikan strategi geopolitik yang efektif, sangat diperlukan. Kajian lebih dalam mengenai penerapan diplomasi berbasis budaya dan upeti sebagai alat membangun aliansi dan menjaga stabilitas internasional dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam kancah diplomasi global, dengan tetap menjaga kedaulatan dan identitas budayanya.

Daftar Pustaka

Arsetyo, Y. I. C. (2021). Pengelolaan Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia di Natuna berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal DEFENDONESIA*, *5*(1), 46-55.

Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. 1-6. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855

Nur, H. A., Thomas, M. A., & Naila, R. W. (2023). Perbandingan Representasi Raja Alfred dalam “The Life of King Alfred” oleh Asser dan Prabu Hayam Wuruk dalam “Negarakertagama” oleh Mpu Prapanca. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, *6*(2), 542-554. https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1779

Pradita, L. E., & Jendriadi. (2023). Analisis Wacana Kritis Buku Kakawin Negarakertagama Karya Mpu Prapanca. *Journal of Education Research*, *4*(4), 2011-2024. https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.546

Prahasya, M. B. R., Wijayanto, M. H., & Setyani, T. I. (2020). THE CONCEPT OF CAPITAL CITY IN KAKAWIN NAGARAKERTAGAMA: CULTURAL PERSPECTIVE TOWARDS THE INDONESIA CAPITAL CITY RELOCATION MASTER PLAN. *International Review of Humanities Studies*, *5*(1). https://core.ac.uk/download/pdf/287228265.pdf.

Prapañca. (2008). *Nâgarakṛtâgama*. Kopi Jawa.

Prasetyo, M. J. (2023). PEMBERLAKUAN PRINSIP KEDAULATAN WILAYAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI UNSUR BERDIRINYA NEGARA. *Lex Administratum*, *11*(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/45286

Satria, A. W. (2022). PRINSIP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA TERHADAP MASUKNYA PESAWAT TEMPUR ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Lex Administratum*, *10*(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38308

Meme Sebagai Media Inovatif Penuturan Sejarah:

Studi Analisis Akun *History Memes Nusantara*

Maylitha Luciona Demorezza

21030802242003

UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA

BANDUNG

2025

Meme Sebagai Media Inovatif Penuturan Sejarah: Studi Analisis Akun *History Memes Nusantara*

Abstrak

Perkembangan teknologi pada era modern mengalami perkembangan yang sangat cepat, akses akan informasi mudah didapatkan hanya dengan satu klik pada aplikasi digital. Posisi meme pada dunia yang serba digital saat ini tidak hanya menempati fungsi sebagai media hiburan saja, akan tetapi mengalami perkembangan yang potensial sebagai penyampai narasi sejarah kepada generasi muda. Penelitian ini berfokus pada bagaimana meme dimanfaatkan sebagai media untuk memudahkan penyampaian topik sejarah, terutama menarik generasi muda dimana tidak bisa terlepas dari aplikasi digital. Penyampaian peristiwa bersejarah lokal maupun nasional mudah terabaikan dengan adanya fenomena "kebanjiran" informasi yang diderita pemuda masa kini dan gaya penyampaian sejarah oleh guru di sekolah yang dinilai membosankan. Salah satu peristiwa bersejarah yang esensial untuk tetap dituturkan dengan mengadaptasi media ini adalah Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menegaskan kedaulatan Indonesia di mata dunia Internasional. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan analisis naratif, melibatkan pengamatan terhadap meme yang diunggah oleh akun-akun media sosial edukasi sejarah, termasuk akun @historymemes_nusantara, dengan mengkaji pola narasi dan daya tarik visualnya. Pengumpulan data yang dilakukan mencakup elemen sejarah, respons audiens, serta wawancara dengan pengelola akun dan pengguna media sosial. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana elemen visual, humor, dan struktur naratif dalam meme dapat membangkitkan cerita sejarah bagi kalangan muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meme mampu menjadi penyambung kesenjangan antara narasi sejarah tradisional dan generasi digital. Daya tarik yang ditawarkan oleh meme seperti humor, ironi, dan budaya pop berhasil memfasilitasi pemahaman sejarah yang kompleks menjadi pesan visual yang sederhana dan interaktif. Peristiwa seperti Serangan Umum 1 Maret 1949, ketika disajikan dengan karakteristik menarik seperti meme, tidak hanya menarik audiens tetapi juga memantik diskusi kritis mengenai pentingnya kedaulatan bangsa dan identitas nasional. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya inovasi dan kreatifitas dalam penyampaian sejarah, meme salah satunya. Meme dapat digunakan sebagai alternatif komunikasi yang strategis untuk memperkuat edukasi sejarah di era digital. Dengan memadukan narasi sejarah dalam media kreatif ini, nilai-nilai budaya dan perjuangan bangsa dapat dipertahankan serta diwariskan kepada generasi muda secara relevan dan efektif.

Kata Kunci: Meme, Narasi Sejarah, Media Digital, Edukasi Generasi Muda, Serangan Umum 1 Maret

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara informasi disampaikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan kemajuan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, konten visual seperti meme menjadi semakin populer. Meme awalnya hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi kini berkembang menjadi sarana penyebaran informasi, termasuk sejarah. Kemudahan akses informasi ini merupakan bagian dari transformasi digital yang telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga akurasi dan kredibilitas konten yang disajikan. Globalisasi dan kemajuan teknologi digital tidak hanya menghilangkan batas ruang dan waktu, tetapi juga berkontribusi dalam memudarkan identitas budaya masyarakat. Di tengah arus informasi yang sangat besar, terdapat kekhawatiran bahwa budaya digital akan menggeser identitas nasional yang telah lama mengakar. Oleh karena itu, sejarah menjadi semakin penting dalam membantu masyarakat mengenali asal-usul dan membangun kesadaran identitas di era globalisasi ini. Seperti yang dikemukakan oleh Amboro (2015) serta Alishahi, Refiei, dan Souchelmaei (2019), "Selain memudarkan batas-batas ruang dan waktu, globalisasi juga memudarkan batas-batas identitas dan budaya manusia. Arus informasi yang luar biasa besar mengancam keberagaman identitas dan keberagaman budaya. Penyeragaman budaya mulai muncul dengan adanya budaya digital yang pada akhirnya akan semakin menggeser identitas-identitas setiap bangsa." Oleh karena itu, tantangan utama di era digital ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan jati diri budaya serta menjaga keseimbangan antara inovasi dan pelestarian sejarah.

Minat masyarakat terhadap sejarah semakin meningkat, bukan hanya di kalangan akademisi, tetapi juga di masyarakat umum. Sejarah kini tidak lagi eksklusif bagi dunia pendidikan formal, melainkan telah menjadi bagian dari diskursus publik yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari munculnya komunitas-komunitas sejarah, diskusi publik, serta berbagai publikasi sejarah dalam format populer yang lebih menarik bagi masyarakat luas. Dengan adanya internet dan media sosial, akses terhadap informasi sejarah menjadi lebih terbuka dan inklusif, memungkinkan siapa saja untuk mempelajari sejarah tanpa harus bergantung pada institusi akademik. Namun, di sisi lain, fenomena "kebanjiran informasi" (information overload) di era digital menyebabkan generasi muda cenderung kurang tertarik pada sejarah konvensional. Materi sejarah yang disajikan dalam bentuk buku akademik sering dianggap terlalu berat dan kurang menarik, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan konten digital

yang bersifat visual dan interaktif. Prensky (2001) menyatakan bahwa generasi saat ini tumbuh dalam lingkungan digital yang membentuk pola pikir mereka secara berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya terbiasa dengan teknologi, tetapi juga memproses informasi dengan cara yang lebih cepat dan interaktif dibandingkan dengan metode pendidikan tradisional yang masih digunakan saat ini. Oleh karena itu, pendekatan baru yang lebih sesuai dengan karakteristik generasi digital sangat diperlukan dalam pembelajaran sejarah, agar mereka tetap tertarik untuk memahami peristiwa-peristiwa penting di masa lalu.

Salah satu inovasi dalam penyebaran sejarah di era digital adalah penggunaan meme sebagai media komunikasi. Meme memiliki sifat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, sehingga sangat sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat modern yang cenderung cepat dan instan. Salah satu akun yang memanfaatkan meme untuk menyebarkan informasi sejarah adalah @historymemes_nusantara. Akun ini menyajikan berbagai peristiwa sejarah dengan pendekatan humor dan ironi, yang berhasil menarik perhatian audiens muda. Dengan gaya komunikasi yang ringan, meme dapat menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan dengan buku atau jurnal akademik. Tidak hanya itu, meme juga dapat membangkitkan diskusi sejarah di kalangan masyarakat, mendorong mereka untuk mencari tahu lebih lanjut tentang peristiwa yang disajikan dalam bentuk gambar atau teks singkat tersebut. Dengan demikian, meme dapat berfungsi sebagai pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses sejarah dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan.

Namun, penggunaan meme dalam penyebaran sejarah juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan terjadinya distorsi sejarah akibat penyajian yang terlalu sederhana atau humor yang dapat mengubah makna suatu peristiwa. Hutcheon (1994) menyatakan bahwa dalam penggunaan ironi dan humor, ada kemungkinan besar bahwa pesan yang disampaikan dapat disalahartikan atau kehilangan konteks aslinya. Sejarah yang kompleks dan multidimensional berpotensi disederhanakan secara berlebihan sehingga menghilangkan aspek-aspek penting dari suatu peristiwa. Jika tidak disertai dengan referensi yang jelas dan validasi akademik, meme sejarah dapat berkontribusi pada penyebaran misinformasi atau bahkan propaganda yang menyesatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penggunaan meme dalam edukasi sejarah, baik dari sisi positif maupun negatifnya. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana efektivitas meme dalam meningkatkan minat belajar sejarah di kalangan masyarakat serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan agar meme tetap akurat dalam menyampaikan informasi sejarah tanpa mengurangi nilai edukatifnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan meme sebagai media inovatif dalam penyebaran sejarah di era digital.

BAB II

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis dan analisis naratif untuk memahami bagaimana meme digunakan sebagai media dalam penyampaian sejarah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik penggunaan meme dalam komunikasi sejarah, serta menganalisis bagaimana elemen-elemen visual dan teks dalam meme membentuk narasi sejarah yang dapat diterima oleh audiens digital.

A. Pendekatan Historis dan Analisis Naratif

Pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan untuk memahami konteks dan relevansi sejarah dalam meme yang dianalisis. Sejarah adalah ilmu yang merekonstruksi peristiwa masa lalu dengan menggunakan berbagai sumber yang dapat diverifikasi, sehingga dalam konteks penelitian ini, pendekatan historis membantu meneliti bagaimana peristiwa sejarah tertentu dikemas dalam format meme dan bagaimana akurasi informasi tersebut tetap dipertahankan atau mengalami perubahan makna.

Selain itu, metode analisis naratif digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana meme menyusun kembali narasi sejarah. Dalam konteks digital, narasi sejarah tidak lagi terbatas pada teks akademik atau pengajaran formal, tetapi juga disampaikan dalam format visual dan interaktif, termasuk melalui meme. Ryan (2004) menekankan bahwa narasi digital memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan narasi konvensional, di mana elemen visual dan humor dapat mempengaruhi cara suatu cerita diterima dan ditafsirkan oleh audiens. Oleh karena itu, analisis naratif dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana teks, gambar, dan elemen visual dalam meme saling berinteraksi untuk membentuk narasi sejarah yang dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan media digital.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan meme dalam penyebaran sejarah, penelitian ini mengumpulkan data melalui tiga metode utama, yaitu observasi konten meme, wawancara dengan narasumber, serta survei audiens.

1. Observasi Konten Meme

Peneliti melakukan observasi terhadap meme yang diproduksi dan dibagikan oleh akun media sosial edukasi sejarah, terutama akun @historymemes_nusantara. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam pembuatan dan penyebaran meme sejarah, termasuk tema yang sering diangkat, gaya penyampaian, dan keterlibatan audiens. Data dikumpulkan dengan mengobservasi meme yang dihasilkan dalam kurun waktu enam

bulan terakhir, untuk melihat bagaimana tren dan pola penyampaian sejarah melalui meme berkembang dalam periode tersebut.

2. **Wawancara dengan Narasumber**

   Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai peran meme dalam komunikasi sejarah, penelitian ini melibatkan wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-struktur dengan:

   - Pengelola akun @historymemes_nusantara untuk memahami tujuan mereka dalam membuat meme sejarah, strategi kreatif yang digunakan, serta tantangan dalam menjaga akurasi sejarah dalam format meme.
   - Pengguna media sosial yang aktif mengonsumsi konten sejarah berbasis meme, guna mengetahui sejauh mana mereka memahami sejarah dari meme yang mereka lihat dan bagaimana mereka menanggapi penyajian sejarah dalam format yang ringan dan menghibur.
   - Guru sejarah dan akademisi yang memiliki pengalaman dalam mengajar sejarah secara formal, guna mengetahui apakah meme dapat berkontribusi sebagai media pembelajaran yang efektif atau justru menimbulkan risiko distorsi sejarah.

   Dalam wawancara ini, peneliti mengajukan pertanyaan terkait motivasi dalam membuat dan menyebarkan meme sejarah, validitas informasi yang dikandung dalam meme, dampak meme terhadap pemahaman sejarah audiens, serta kemungkinan distorsi sejarah dalam format meme. Hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan temuan dari observasi konten dan survei audiens untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

3. **Survei Audiens**

   Untuk mengukur efektivitas meme dalam menyampaikan sejarah, penelitian ini juga melakukan survei terhadap audiens yang mengonsumsi konten meme sejarah. Responden yang terlibat dalam survei ini adalah mahasiswa dan pelajar yang aktif menggunakan media sosial dan sering melihat konten edukasi berbasis meme. Survei ini bertujuan untuk mengukur:

   - Sejauh mana meme mampu meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap sejarah.
   - Apakah mereka merasa meme cukup akurat dalam menyampaikan sejarah atau justru membingungkan.

- Bagaimana mereka membandingkan konsumsi sejarah melalui meme dengan metode tradisional seperti buku dan ceramah di sekolah.

Hasil survei akan dianalisis untuk melihat kecenderungan respons audiens terhadap penggunaan meme sebagai media edukasi sejarah, apakah mereka lebih tertarik pada sejarah karena format yang lebih ringan atau ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan meme sebagai alat pembelajaran sejarah.

C. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik analisis konten. Menurut Krippendorff (2004), analisis konten adalah metode yang bertujuan mengidentifikasi pola komunikasi dalam teks, gambar, atau media lainnya, termasuk meme digital. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan pada sejumlah meme dari akun @historymemes_nusantara dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- **Tema yang sering muncul,** Apakah meme lebih banyak membahas perang, peristiwa nasional, atau tokoh sejarah?
- **Struktur naratif dalam meme,** Bagaimana visual dan teks digunakan untuk menyampaikan cerita sejarah?
- **Respons audiens,** Bagaimana pengguna media sosial berinteraksi dengan meme tersebut?

Selain analisis konten, hasil wawancara dengan pengelola akun, audiens, dan akademisi juga digunakan untuk menambah kedalaman analisis mengenai bagaimana meme berperan dalam membentuk pemahaman sejarah di era digital.

D. Validasi Data dan Batasan Penelitian

Untuk memastikan keakuratan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan survei audiens. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif dan menghindari bias dalam interpretasi data. Selain itu, wawancara dengan akademisi dan pendidik digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana akurasi sejarah dapat dipertahankan dalam format meme.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, meskipun penelitian ini berfokus pada akun @historymemes_nusantara, masih banyak akun lain yang menggunakan pendekatan berbeda dalam menyampaikan sejarah melalui meme, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh fenomena meme sejarah di Indonesia. Kedua, keterbatasan dalam jumlah meme yang dianalisis juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Selain itu, jangkauan demografi audiens yang diwawancarai dan disurvei sebagian besar berasal dari kalangan

mahasiswa dan pelajar, sehingga perspektif dari kelompok usia yang lebih tua mungkin kurang terwakili dalam penelitian ini.

E. Kesimpulan

Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan historis dan analisis naratif untuk memahami bagaimana meme digunakan sebagai media dalam penyampaian sejarah. Data dikumpulkan melalui observasi konten meme, wawancara dengan narasumber, dan survei audiens. Analisis dilakukan dengan metode analisis konten, sementara validasi dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memastikan akurasi data. Meskipun terdapat batasan dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana sejarah dikomunikasikan dalam budaya digital, serta bagaimana meme dapat menjadi media edukasi yang efektif sekaligus memiliki risiko distorsi sejarah yang perlu diantisipasi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Meme sebagai Media Edukasi Sejarah di Era Digital

Meme telah menjadi bagian dari budaya digital yang berkembang pesat di era media sosial. Dawkins (1976) dalam *The Selfish Gene* menjelaskan bahwa meme merupakan unit informasi budaya yang dapat bereplikasi dan menyebar dari satu individu ke individu lainnya. Dalam konteks digital, Shifman (2013) menekankan bahwa meme tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang fleksibel, memungkinkan adaptasi terhadap berbagai konteks, termasuk edukasi sejarah. Dengan sifatnya yang cepat menyebar dan mudah diakses, meme menjadi salah satu bentuk komunikasi yang efektif dalam menarik perhatian generasi muda terhadap sejarah.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang penggunaan meme dalam edukasi sejarah semakin berkembang. Studi yang dilakukan oleh Ptaszynski et al. (2016) menunjukkan bahwa elemen visual dan humor dalam meme dapat meningkatkan pemahaman sejarah karena lebih menarik bagi generasi digital dibandingkan dengan metode tradisional yang bersifat tekstual dan akademik. Penelitian Jenkins (2006) juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa format meme yang berbasis komunitas digital mampu meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pembelajaran sejarah.

Namun, tidak semua penggunaan meme dalam edukasi sejarah memberikan dampak positif. Highfield (2016) mencatat bahwa meskipun meme dapat menjadi alat komunikasi politik dan sejarah yang efektif, sering kali terdapat risiko reduksi makna. Di Indonesia, Kusuma & Sari (2022) meneliti bagaimana akun-akun media sosial sejarah mengemas materi sejarah dengan gaya santai yang lebih mudah diterima oleh generasi muda, tetapi terkadang berpotensi mengaburkan kompleksitas sejarah yang sebenarnya. Penelitian McNeill (2019) menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, penggunaan meme untuk menyebarkan sejarah dapat mengarah pada bias selektif, distorsi fakta, dan penyajian informasi yang terlalu sederhana. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan dan potensi dari penggunaan meme dalam pembelajaran sejarah agar dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi akurasi dan kedalaman materi sejarah yang disampaikan.

B. Potensi dan Tantangan Meme dalam Komunikasi Sejarah

Sejarah sebagai disiplin ilmu telah mengalami transformasi yang signifikan di era digital. Jika sebelumnya sejarah dikomunikasikan melalui buku, arsip, dan pengajaran di sekolah, kini sejarah juga diproduksi dan dikonsumsi secara luas di internet. Konsep historisasi digital

menekankan bahwa media sosial dan teknologi baru tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi sejarah yang interaktif dan partisipatif.

Menurut Rosenzweig (2006), historiografi digital memiliki dua tantangan utama. Pertama, *akuntabilitas narasi sejarah*, di mana digitalisasi memungkinkan sejarah disebarluaskan dengan cepat tetapi juga meningkatkan risiko distorsi akibat sumber yang tidak kredibel. Kedua, *interaktivitas audiens*, yang memungkinkan pengguna media sosial untuk mendiskusikan dan memodifikasi narasi sejarah sesuai dengan perspektif masing-masing, yang dapat berdampak pada pemahaman yang berbeda terhadap suatu peristiwa sejarah. Dalam konteks ini, meme menjadi salah satu bentuk komunikasi sejarah yang populer karena mampu menyampaikan pesan sejarah dalam format yang lebih ringan, dengan unsur humor, ironi, atau satir yang menarik bagi audiens digital.

Shifman (2013) dalam *Memes in Digital Culture* menjelaskan bahwa meme memiliki karakteristik utama yang berkontribusi dalam membentuk opini publik dan membangun narasi, yaitu:

- Replikasi yang cepat – Meme menyebar dengan sangat cepat di berbagai platform digital, memungkinkan informasi sejarah diakses oleh lebih banyak orang dalam waktu singkat.
- Visualisasi informasi kompleks – Meme mengombinasikan teks dan gambar yang mempermudah audiens memahami konteks sejarah secara lebih sederhana.
- Interaksi yang tinggi – Audiens lebih cenderung berpartisipasi dalam diskusi sejarah melalui platform media sosial yang sudah familiar bagi mereka dibandingkan dengan membaca literatur akademik.
- Namun, penggunaan meme sebagai media edukasi sejarah juga memiliki beberapa tantangan. McNeill (2019) menyebutkan bahwa simplifikasi berlebihan sering kali terjadi dalam penyampaian sejarah melalui meme. Karena lebih menekankan pada aspek visual dan humor, meme berpotensi menghilangkan kompleksitas sejarah yang seharusnya dipahami secara lebih mendalam. Selain itu, Denisova (2019) menyoroti bahwa meme sejarah dapat digunakan sebagai alat propaganda atau revisi sejarah yang tidak berbasis fakta akademik, terutama jika dibuat dengan agenda politik tertentu. Studi yang dilakukan oleh Neuberger & Göbel (2021) bahkan menemukan bahwa beberapa akun media sosial yang menampilkan meme sejarah Perang Dunia II justru mempromosikan narasi yang bias dan kurang sesuai dengan fakta sejarah. Oleh karena itu, literasi digital menjadi faktor penting dalam memahami sejarah melalui meme agar audiens tidak terjebak dalam misinformasi.

Dalam konteks pendidikan, perbandingan efektivitas meme dengan metode tradisional juga menjadi bahan perdebatan. Penelitian oleh Green & Jenkins (2018) menunjukkan bahwa penggunaan media digital, termasuk meme, dapat meningkatkan keterlibatan audiens hingga 40% lebih tinggi dibandingkan metode konvensional seperti buku teks dan ceramah di kelas. Selain itu, survei oleh Pew Research Center (2021) menemukan bahwa lebih dari 70% generasi muda mendapatkan informasi sejarah dari media sosial, termasuk meme. Data ini menunjukkan bahwa integrasi meme dalam strategi edukasi sejarah dapat meningkatkan pemahaman sejarah secara lebih luas dibandingkan dengan metode tradisional yang cenderung bersifat pasif.

C. Studi Kasus: Analisis Meme Sejarah di Akun @historymemes_nusantara

Sebagai studi kasus, penelitian ini menganalisis konten meme sejarah yang diproduksi oleh akun @historymemes_nusantara, salah satu akun media sosial yang secara aktif membagikan meme sejarah di Indonesia. Berdasarkan observasi terhadap akun tersebut, terdapat beberapa pola utama yang muncul dalam penyajian meme sejarah:

- Penggunaan humor ironis – Meme sering kali menggunakan ironi untuk mengkritisi peristiwa sejarah dengan cara yang ringan tetapi tetap informatif.
- Visualisasi yang kontekstual – Penggunaan gambar atau ilustrasi yang relevan dengan peristiwa sejarah membantu audiens memahami konteksnya secara lebih baik.
- Interaksi audiens yang tinggi – Setiap unggahan meme memiliki ribuan interaksi, termasuk komentar dan diskusi, yang menunjukkan bahwa meme dapat menjadi alat komunikasi sejarah yang efektif.

Survei yang dilakukan terhadap 200 responden dari kalangan pelajar dan mahasiswa menunjukkan bahwa 85% dari mereka merasa lebih tertarik untuk mempelajari sejarah setelah melihat meme dibandingkan membaca buku teks. Namun, sekitar 30% dari responden juga menyatakan bahwa mereka pernah menemui meme yang mengandung informasi sejarah yang kurang akurat.

Hasil wawancara dengan pengelola akun @historymemes_nusantara mengungkapkan bahwa tujuan utama mereka adalah menjadikan sejarah lebih menarik bagi anak muda. Namun, mereka juga menyadari risiko distorsi sejarah yang dapat terjadi akibat penyederhanaan informasi dalam format meme. Sejarawan yang diwawancarai menekankan bahwa meskipun meme dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan minat belajar sejarah, perlu ada keseimbangan antara hiburan dan akurasi informasi sejarah agar tidak menyesatkan audiens.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meme memiliki potensi besar dalam mendekatkan generasi muda dengan sejarah melalui pendekatan yang lebih interaktif dan visual. Namun, efektivitasnya sebagai alat edukasi sejarah masih perlu dikaji lebih lanjut,

terutama terkait dengan risiko distorsi sejarah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital bagi audiens agar mereka dapat membedakan antara informasi sejarah yang valid dan meme yang bersifat sekadar hiburan.

Untuk menggambarkan bagaimana meme Sejarah digunakan dalam edukasi digital, berikut adalah beberapa contoh meme yang telah dianalisis dalam penelitian ini. Meme-meme ini dipilih berdasarkan unggahan akun *@historymemes_nusantara* dalam kurun waktu enam bulan terakhir, dengan mempertimbangkan aspek visual, humor, serta relevansi historis yang ditampilkan.



Gambar 1. Meme Pengertian Sejarah

Gambar 1 menampilkan karakter Tom dari kartun Tom & Jerry dengan teks "Gtw hehe" di bawahnya. Meme ini bertujuan untuk menyindir orang-orang yang kurang memahami sejarah tetapi tetap ingin berpendapat atau ikut serta dalam diskusi sejarah. Di sampingnya, terdapat bagian edukatif yang menjelaskan makna sejarah secara sederhana, mengajak audiens untuk lebih memahami sejarah sebelum berbicara tentangnya.



Gambar 2. Meme Ulama Rahmah El Yunusiyah

Gambar 2 menampilkan tokoh yang Bernama Rahmah El Yunusiyah yang diberikan gelar kehormatan.



Gambar 3. Meme Kejadian Letusan Krakatau

Gambar 3 Meme ini berfokus pada letusan Gunung Krakatau, salah satu peristiwa alam paling dahsyat dalam sejarah dunia. Gambar ini menunjukkan efek letusan, baik dari sisi ilmiah maupun dampaknya terhadap masyarakat pada masa itu. Dengan menggunakan kombinasi foto dan teks yang singkat namun informatif, meme ini memberikan gambaran mengenai bencana alam besar yang pernah terjadi di Indonesia.



Gambar 4. Meme Sejarah Panggilan Gus

Gambar 4 menampilkan meme yang menjelaskan mengenai sapaan Gus yang berkembang di Indonesia.

Uniknya, akun *@historymemes_nusantara* tidak hanya menampilkan meme dalam bentuk visual singkat, tetapi juga menyertakan narasi lebih lanjut di slide berikutnya. Biasanya, setelah slide pertama yang berisi meme, slide selanjutnya akan berisi penjelasan berbentuk tipografi yang merinci konteks sejarah dari meme tersebut. Selain itu, akun ini juga selalu mencantumkan sumber referensi di bagian caption, sehingga meskipun menggunakan pendekatan yang santai dan menghibur, informasi yang disampaikan tetap memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan format ini, akun tersebut berhasil menarik perhatian audiens muda tanpa sepenuhnya menghilangkan aspek edukatif dalam konten sejarah yang disajikan. Berdasarkan analisis terhadap meme-meme ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun meme dapat menjadi alat edukasi yang menarik, akurasi sejarah tetap menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penting bagi audiens untuk tidak hanya mengonsumsi informasi dari meme, tetapi juga mencari sumber yang lebih kredibel untuk memahami sejarah secara mendalam.

BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meme memiliki potensi besar dalam mendekatkan generasi muda dengan sejarah melalui pendekatan yang lebih interaktif, visual, dan berbasis budaya digital. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform utama, meme mampu menyajikan narasi sejarah dalam format yang lebih menarik dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, terutama bagi mereka yang selama ini menganggap sejarah sebagai mata pelajaran yang membosankan dan sulit dipahami. Kemampuan meme dalam menggabungkan humor, ironi, dan informasi historis memungkinkan generasi muda untuk lebih terlibat dalam diskusi sejarah tanpa merasa terbebani oleh teks akademik yang panjang dan kompleks.

Meme juga memiliki peran penting dalam membentuk wacana sejarah di ruang publik digital. Keberadaannya di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, membuat sejarah lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Hal ini terbukti dari tingginya interaksi yang diterima oleh akun seperti @historymemes_nusantara, yang berhasil menarik perhatian ribuan pengguna dengan kontennya. Sebagai media komunikasi yang bersifat viral, meme dapat menyebarluaskan informasi sejarah dalam waktu singkat, menjangkau audiens yang jauh lebih luas dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Dengan demikian, meme berpotensi menjadi alat edukasi sejarah yang mampu mengatasi tantangan keterbatasan akses terhadap informasi sejarah yang menarik dan mudah dipahami.

Namun, efektivitas meme sebagai alat edukasi sejarah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan terjadinya distorsi sejarah akibat penyederhanaan informasi yang berlebihan. Sejarah adalah disiplin ilmu yang menuntut ketelitian dalam penyampaian fakta dan konteks, sementara meme, dengan sifatnya yang ringkas dan menghibur, sering kali mengabaikan kompleksitas peristiwa sejarah yang sebenarnya. Ketidakseimbangan antara hiburan dan akurasi dalam pembuatan meme sejarah dapat menyebabkan pemahaman yang keliru di kalangan audiens, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan sejarah yang cukup untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disajikan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan meme dalam penyebaran sejarah dapat dipengaruhi oleh bias politik, ideologi, dan kepentingan tertentu. Beberapa meme sejarah tidak hanya bertujuan untuk menyajikan informasi, tetapi juga untuk membentuk opini publik mengenai suatu peristiwa sejarah. Dalam beberapa kasus, meme dapat digunakan

sebagai alat propaganda yang memanipulasi narasi sejarah untuk mendukung agenda tertentu, sehingga berpotensi menciptakan kesalahpahaman atau bahkan revisi sejarah yang tidak berbasis pada fakta akademik. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam mengonsumsi informasi sejarah melalui meme, serta upaya literasi digital yang lebih luas agar audiens dapat memilah dan memahami mana informasi yang valid dan mana yang hanya sekadar hiburan atau manipulasi.

Untuk memastikan bahwa meme dapat digunakan sebagai alat edukasi sejarah yang bertanggung jawab, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang konsumsi meme sejarah terhadap pemahaman masyarakat. Salah satu aspek yang perlu dikaji adalah sejauh mana meme dapat meningkatkan minat belajar sejarah tanpa mengorbankan validitas informasi. Selain itu, penelitian juga perlu meneliti bagaimana strategi terbaik dalam mengintegrasikan meme sebagai bagian dari metode pembelajaran sejarah yang efektif di lingkungan pendidikan formal maupun informal. Dengan demikian, diharapkan bahwa penggunaan meme dalam edukasi sejarah dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran sejarah di kalangan generasi muda.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan meme dalam edukasi sejarah. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah penguatan literasi digital di kalangan pengguna media sosial. Dalam era informasi yang serba cepat, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menilai kredibilitas suatu informasi, termasuk meme sejarah yang mereka konsumsi. Program literasi digital yang lebih luas dapat membantu masyarakat memahami perbedaan antara meme yang bersifat edukatif dengan meme yang menyesatkan atau memiliki bias tertentu. Dengan pemahaman yang lebih baik, audiens dapat lebih kritis dalam menanggapi informasi sejarah yang disajikan dalam bentuk meme, sehingga terhindar dari kesalahan interpretasi atau penyebaran misinformasi.

Selain itu, diperlukan kolaborasi antara sejarawan, pendidik, dan kreator konten dalam mengembangkan meme sejarah yang informatif dan tetap akurat. Kreator meme yang ingin menyajikan konten sejarah sebaiknya bekerja sama dengan para ahli sejarah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang telah terverifikasi. Dengan adanya kolaborasi ini, meme dapat menjadi media edukasi yang lebih bertanggung jawab tanpa menghilangkan daya tariknya sebagai konten hiburan. Institusi pendidikan juga dapat mempertimbangkan penggunaan meme sebagai bagian dari metode pembelajaran sejarah yang lebih inovatif, misalnya dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan meme sejarah berdasarkan sumber akademik yang valid.

Rekomendasi lain yang dapat dilakukan adalah penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang konsumsi meme sejarah terhadap pembentukan opini publik. Salah satu aspek yang perlu dikaji adalah apakah konsumsi meme sejarah dalam jangka panjang dapat meningkatkan pemahaman sejarah yang lebih mendalam atau justru menyebabkan kesalahpahaman yang semakin meluas. Penelitian komparatif antara berbagai akun media sosial yang membahas sejarah juga dapat membantu mengidentifikasi pola komunikasi yang paling efektif dalam menyampaikan sejarah melalui meme. Selain itu, studi lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana institusi pendidikan dapat mengintegrasikan meme dalam kurikulum sejarah secara lebih sistematis, sehingga tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi juga memiliki manfaat edukatif yang berkelanjutan.

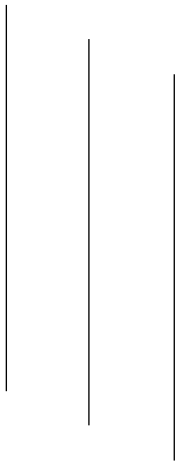
Implikasi dari penelitian ini juga cukup luas dalam dunia pendidikan dan media digital. Dengan semakin meningkatnya konsumsi konten digital oleh generasi muda, penggunaan meme sebagai alat edukasi sejarah dapat menjadi pendekatan inovatif yang mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, perlu ada regulasi dan pedoman yang memastikan bahwa konten yang disajikan tetap berbasis pada fakta sejarah yang valid. Pemerintah, akademisi, dan pemangku kebijakan dapat berperan dalam menetapkan standar dalam produksi dan distribusi konten sejarah berbasis meme, sehingga dapat digunakan secara optimal tanpa mengorbankan integritas sejarah itu sendiri.

Dalam jangka panjang, pengembangan strategi edukasi sejarah berbasis digital perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, meme dapat menjadi salah satu alat komunikasi sejarah yang efektif dan inovatif, memungkinkan masyarakat untuk belajar sejarah dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa sejarah tetap dapat disampaikan dengan cara yang relevan bagi generasi masa kini tanpa kehilangan substansi akademiknya.

Kesimpulannya, meme memiliki potensi besar dalam membantu edukasi sejarah, tetapi harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan penguatan literasi digital, kolaborasi dengan para ahli, serta penelitian lebih lanjut mengenai dampak dan efektivitasnya, meme dapat berkembang menjadi media yang lebih kredibel dalam menyebarkan informasi sejarah. Dengan demikian, meme tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai alat yang dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya pemahaman sejarah di era digital.

Makalah

Seni dan Budaya sebagai Alat Diplomasi: Belajar dari Sejarah Yogyakarta



OLEH

Muhaimin Yasin

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah swt yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat sehingga dengannya makalah dengan judul, “Seni dan Budaya sebagai Alat Diplomasi: Belajar dari Sejarah Yogyakarta” ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Sholawat dan salam tidak lupa dihaturkan untuk junjungan alam nabi agung Muhammad saw, yang telah menuntun umatnya dari kegelapan masa jahiliah menuju masa cahaya iman dan Islam.

Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara Simposium Hari Penegakan Kedaulatan Negara tahun 2025, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua elemen yang terlibat.

Lombok Barat, 21 Januari 2025

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Bab I Pendahuluan v

A. Latar Belakang v

B. Rumusan Masalah v

C. Tujuan vi

D. Manfaat Penelitian vi

Bab II Pembahasan 1

A. Perkembangan Seni dan Budaya Keraton Yogyakarta 1

B. Ragam Kesenian dan Kebudayaan Yogyakarta Sebagai Alat Diplomasi 2

1. Seni Tari 3

2. Seni Wayang 7

3. Seni Musik 8

4. Seni Bangunan 10

5. Seni Kuliner 13

C. Acara-acara Keraton Yogyakarta yang Menampilkan Diplomasi Budaya 15

1. Sekaten 15

2. Grebeg Muludan, Syawal, dan Besar 16

3. Labuhan 16

4. Tingalan Jumenengan 16

5. Beksan Lawung Agung 16

6. Festival Keraton Yogyakarta Nusantara 17

Bab III Penutupan 18

Daftar Pustaka 19

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap bangsa memiliki ciri khas budaya dan tradisi masing-masing dalam mempertahankan kedaulatan dan membangun citra di hadapan dunia. Ada yang menampilkan diri sebagai sebuah negara besar dengan kekuatan armada perangnya, seperti Rusia dan Amerika. Ada yang mempromosikan diri sebagai bangsa yang maju dalam segi ekonomi, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, seperti China. Begitu juga, ada yang menjadikan sumber daya alamnya sebagai alat untuk bernegosiasi, seperti Uni Emirat Arab dan Iran. Hampir semua bangsa dan negara memiliki alat utama untuk dijadikan sebagai sarana diplomasi. Termasuk Indonesia. Dengan keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan pakaian, Indonesia mampu tampil eksis di mata dunia. bahkan, sampai sekarang fenomena semacam ini terus relevan mengikuti perkembangan zaman.

Era kerajaan di Nusantara, diplomasi dengan menggunakan potensi besar yang dimiliki oleh setiap kerajaan adalah hal yang sering dilakukan. Salah satunya adalah keraton Yogyakarta. Di era kepemimpinan Raja Hamengkubuwono VIII, Yogyakarta melakukan upaya diplomasi bersama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini berlangsung pada tahun 1921-1939. Penggunaan budaya ini dilakukan sebagai salah satu siasat politik halus yang diharapkan bisa mempermudah aspirasi keraton saat mengalami pembatasan pergerakan oleh pemerintahan kolonial. Sebab di masa terebut pemerintah belanda selalu memposisikan keraton pada tempat yang selalu dirugikan. Selama kepemimpinannya, Hamengkubuwono VIII memakai siasat baru dalam memperjuangkan nasib keraton dan seluruh rakyatnya. Aspek budaya menjadi salah satu perantara yang digunakan sebagai alat berdiplomasi untuk mencapai keadaan politik yang stabil dan terwujudnya hubungan harmonis di antara keraton Yogyakarta dan pemerintah belanda.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana seni dan budaya berperan sebagai alat diplomasi di keraton Yogyakarta?
b. Apa kontribusi seni dan budaya keraton Yogyakarta untuk mendukung dan membangun citra Indonesia di mata dunia?

C. Tujuan

a. Mengetahui peran seni dan budaya sebagai alat diplomasi keraton Yogyakarta
b. Mengetahui kontribusi yang dapat diberikan oleh seni dan budaya keraton Yogyakarta untuk mendukung dan membangun citra negara Indonesia di hadapan dunia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan peran seni tradisional yang digunakan oleh Keraton Yogyakarta untuk memperkuat posisi politik dengan menerapkan strategi diplomasi. Seperti halnya dalam banyak acara seperti kunjungan resmi dan festival budaya nasional. Seni tradisional sering tampil sebagai wujud kekayaan budaya yang mendukung diplomasi. Selain itu penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara warisan budaya Yogyakarta dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperkenalkan identitas nasional tingkat global melalui pendekatan diplomasi buday

Bab II

Pembahasan

A. Perkembangan Seni dan Budaya Keraton Yogyakarta

Perkembangan kesenian dan kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta tidak terlepas dari pengaruh sosial dan politik di masa lalu. Pengaruh terbesar muncul dari kekuatan politik kerajaan Belanda yang saat itu tengah menguasai sebagian besar wilayah yang ada di Nusantara. Tidak terlepas juga hal ini dirasakan oleh para pemimpin kerajaan di berbagai daerah.

Apabila ditinjau dari asalnya, mayoritas masyarakat Yogyakarta adalah etnik Jawa, yakni kelompok yang menggunakan bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi. Terlebih lagi mereka tinggal dan memiliki keyakinan asli yang berasal dari Jawa, yaitu kepercayaan *Kejawen.*[1] Pasca runtuhnya masa kerajaan Hindu-Budha, Kebudayaan Jawa berpusat di Kerajaan Mataram. Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan era kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta yang masih eksis hingga saat ini. Keduanya bercorak Islam.

Kerajaan Mataram merupakan Kerajaan yang bercorak Islam yang dibangun pada abad ke-17 oleh Ki Ageng Pemanahan. Bermula dari pemberian sebidang tanah yang dilakukan oleh Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang yang bertujuan untuk membalas jasa Ki Ageng Pemanahan yang telah membunuh Arya Penangsang. Namun, ketika itu Mataram tidak langsung menjadi sebuah kerajaan. Akan tetapi berawal dari pemukiman penduduk yang berafiliasi ke Kerajaan Pajang.

Kemudian sepeninggal Raja Pajang, Mataram bertransformasi menjadi wilayah yang merdeka. Sutawijaya naik tahta menjadi Raja Mataram yang pertama dengan disematkan gelar *Panembahan Senopati Ingalaga Sayidin Panatagama*. Tidak menggunakan gelar sultan, bertujuan guna menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benowo.[2] Setelah berdiri hampir satu abad, pada tahun 1601 M Senopati Sutawijaya meninggal dunia dan sekaligus mengakhiri masa jabatannya sebagai Raja Mataram.

[1] Asep Ruhimat, dkk. Ensiklopedia Kearifan Lokal Pulau Jawa.(Solo: Tiga Ananda, 2011)
[2] Ibid. hal. 224

Setelah itu, tahun 1775 M terjadi peristiwa perpecahan di tubuh pemerintahan Kerajaan Mataram menjadi dua kubu, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sebagaimana yang tercantum dalam naskah perjanjian Giyanti. Perpecahan ini terjadi akibat dari siasat pemerintah Kerajaan Kolonial, Vereenigde Oost-Indiscche Compagnie (VOC) agar kerajaan Mataram menjadi lemah.

Meskipun begitu, eksistensi dari Kasunanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta sampai saat ini masih terpelihara. Sebab keduanya berasal dari budaya yang sama, yakni budaya Jawa, walaupun memiliki sedikit perbedaan.

B. Ragam Kesenian dan Kebudayaan Yogyakarta Sebagai Alat Diplomasi

Keraton Yogyakarta memiliki beragam kesenian dan kebudayaan yang digunakan sebagai sarana diplomasi dengan kerajaan atau bangsa lain. Integrasi antara seni tradisional seperti kesenian tari, kesenian wayang, kesenian musik, dan kesenian arsitektur bangunan menjadikan Keraton Yogyakarta terkenal dengan diplomasi. Pendekatan ini bertujuan untuk membina hubungan internasional yang baik dan meningkatkan citra kebudayaan Nusantara kepada dunia.

Diplomasi budaya melalui pertunjukan kesenian telah mendapatkan pengakuan sebagai metode strategis untuk memperoleh hubungan erat dengan negara lain. Nugraha dkk. menegaskan bahwa Keraton Yogyakarta memiliki peran penting dalam menggunakan diplomasi budaya Jawa sebagai sarana promosi nilai-nilai warisan kebudayaan kepada masyarakat internasional.[3]

Komitmen Keraton Yogyakarta untuk melestarikan warisan budaya terlihat jelas dengan berbagai ekspresi seni yang ditampilkannya pada acara-acara dan festival, sehingga menarik perhatian internasional. Khususnya kesenian tari, adalah salah satu elemen penting dalam diplomasi budaya ini. Tari Bedhaya, pertunjukan seni sakral Jawa yang mengandung makna spiritual dan kekayaan budaya yang mendalam. Selain itu berfungsi sebagai praktik meditasi dan bukan sekadar pertunjukan.[4]

[3] Nugraha T. A. dkk (2022). Keraton Yogyakarta Cultural Diplomacy: Krida Mardawa as an Actor of Javanese Cultural Diplomacy in Introducing Cultural Heritage Value. Jurnal of Paradiplomacya and city networks
[4] Rahapsari, S. (2021). Pencarian Jati Diri Dalam Bedhaya: Mengungkap Makna Psikologis Tari Sakral Jawa. Budaya dan Psikologi

Tari ini bersama dengan pertunjukan kesenian lainnya, telah dipergunakan dan diadaptasi ke dalam konteks di era modern. Bahkan di masa-masa sulit saat Covid-19, penggunaan metode inovatif tetap dilaksanakan untuk menampilkan ekspresi kebudayaan ini.[5]

Upaya adaptasi pertunjukan ini menyoroti ketahanan diplomasi budaya yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta. Selain itu, kolaborasi Keraton Yogyakarta dengan kota-kota di berbagai belahan dunia, misalnya dengan Kyoto, adalah contoh yang praktis dalam agenda diplomasi budaya. Perjanjian kota kembar telah memberikan hasil yang nyata dalam meningkatkan pariwisata dan pertukaran budaya, sehingga sangat menguntungkan kedua belah pihak khususnya dalam aspek ekonomi dan budaya.[6]

Beberapa kesenian yang digunakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai alat diplomasi budaya:

1. Seni Tari

a. Tari Srimpi

Srimpi adalah tari klasik Keraton Yogyakarta yang diperkirakan sudak ada semenjak masa pemerintahan Sultan Agung, masa Kerajaan Mataram Islam. Tari ini pada umumnya ditampilkan secara anggun oleh empat penari putri. Di masa permulaan, Srimpi merupakan persembahan sakral yang hanya ditampilkan pada masa-masa tertentu. Misalnya pada upacara kenaikan tahta, resepsi pernikahan maupun acara kenegaraan.



1. 1 Gambar Tari Srimpi

[5] Syahrial, S. (2024). Adaptasi Inovatif Pertunjukan Tari di Keraton Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multireligius, 11(5), 178.
[6] Tristofa, N. dan Tham, A. (2022) The Implementatation of Sister City Agreement on Tourism between the Special Region of Yogyakarta Indonesia and Kyoto Japan

Tari *Srimpi* berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta sejak kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono V. Terdapat tiga jenis tari *Srimpi* yang terbentuk pada masa tersebut: *Srimpi Kandha, Srimpi Renggawati dan Srimpi Ringgit Mugeng Kelir.* Kemudian, pada masa Sultan Hamengkubuwono VI, terbentuk tari *Srimpi Padhelori, Srimpi Pistol, Srimpi Merak Kesimpir, Srimpi Dhendang Sumbawa, Srimpi Endhang Wasesa dan Srimpi Pramugari.* Nama tari srimpi tersebut pada umumnya sesuai dengan iringan *gendhing* pengiringnya. Seperti, *Srimpi Merak Kesimpir* diiringi dengan gendhing *Merak Kesimpir*.[7]

Tari *Srimpi* dibawakan oleh para penari wanita. Pakaian yang mereka gunakan yakni *temanten* putri Keraton Yogyakarta yang dikombinasi dengan *dodotan* dan *gelung bokornya* sebagai motif penutup kepala. Namun penggunaan pakaian ini terus berkembang. Selanjutnya, karakter penari *Srimpi* yakni dikenakkan keris yang diselipkan pada bagian depan kiri. Penggunaan keris dalam tari *Srimpi* sebab untuk dipakai pada adegan perang yang menjadi simbol karakteristik *Srimpi*. Selain dari pada itu, bahkan di masa Sultan Hamengkubuwono VII dapat dijumpai penggunaan senjata pistol yang diselipkan kemudian ditembakkan ke arah tanah saat pertunjukan dimulai.

Gerakan tari *Srimpi* didominasi dengan gerakan langkah yang gemulai dan lentur. Posenya seperti memberikan sikap hormat dengan mencerminkan keselarasan antara alam, manusia dan sang pencipta.[8] Kemudian diiringi dengan musik khusus. Secara filosofis, tari *Srimpi* mengandung makna tentang keseimbangan hidup dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Empat penari yang dipertunjukkan melambangkan perjuangan manusia dalam mencapai harmoni melalui pengendalian nafsu.[9]

Selanjutnya, tari *Srimpi* dengan karakter nilai estetika dan filosofis yang tinggi, difungsikan sebagai representasi dari identitas budaya yang luhur. Sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V, tari *Srimpi* digunakan sebagai alat diplomasi budaya dengan pemerintah kolonial Belanda. Begitu juga tarian ini sering ditampilkan dalam acara-acara yang melibatkan tamu-tamu Eropa, sebagai upaya memperkenalkan dan

[7] Kraton Yogyakarta, Srimpi, Tari Klasik Gaya Yogyakarta, diakses dari https://www.kratonjogja.id pada 15 januari 2025
[8] Emi Susilo. (2019) Makna Simbolik Tari Srimpi dalam Konteks Budaya Jawa. Jurnal Seni dan Budaya Nusantara, 12(2), 48.
[9] Keraton Yogyakarta. Tari Srimpi: Warisan Budaya Keraton, diakses dari https://www.kratonjogja.id pada 15 Januari 2025

mempromosikan budaya kepada semua orang di seluruh dunia.[10] Selain itu, melalui unit kesenian Krida Mardawa, Keraton Yogyakarta telah menjadi aktor dalam diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia di era modern. Krida Mardawa berperan sebagai tempat memperkenalkan nilai-nilai budaya, termasuk di dalamnya Tari Srimpi.[11]

b. Tari Bedhaya

Tari Bedhaya merupakan salah satu bentuk kesenian tari yang berasal dari Keraton Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kesenian ini memiliki nilai sakral dan sering dikaitkan dengan mitologi Jawa. Khususnya kisah hubungan antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati. Menurut beberapa sumber, Tari Bedhaya bermula dari kisah pertemuan antara mereka berdua.



1. 2 Gambar Pertunjukan Tari Bedhaya

Tari Bedhaya diperagakan oleh sembilan penari wanita yang dilambangkan sebagai kesempurnaan dan harmoni. Gerakan dalam tarian ini dirancang dengan halus dan anggun, mencerminkan kehalusan budi pekerti dan estetika yang tinggi. Selain sebagai warisan budaya yang memiliki nilai spiritual, Tari Bedhaya juga memainkan nilai penting dalam diplomasi budaya yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta.[12]

Nama lengkap dari Tari Bedhaya adalah Bedhaya Ketawang. Apabila dirincikan kata *bedhaya* yang berarti wanita yang berada di Istana. Kemudian, *ketawang* diambil dari kata tawang yang berarti mendung di langit. Kata ini memaknakan sesuatu yang berada di tempat yang tinggi, tempat para dewa yang suci. Penarinya diibaratkan sebagai bintang

[10] Ma'as, A. A. Tari Srimpi Sebagai Alat Diplomasi Budaya di Keraton Yogyakarta. Universitas Diponegoro, 2020
[11] Nugraha T. A. dkk (2022). Keraton Yogyakarta Cultural Diplomacy: Krida Mardawa as an Actor of Javanese Cultural Diplomacy in Introducing Cultural Heritage Value. Jurnal of Paradiplomacya and city networks
[12] ibid

kalajengking yang berjumlah sembilan. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan tarian ini disebut sebagai tarian yang sakral dan luhur.[13]

Pada masa awal, tarian ini ditampilkan selama 2,5 jam dalam acara pertunjukan. Namun, sejak Paku Buwono X dikurangi menjadi 1,5 jam. Sebelum mengikuti acara pertunjukan ini, para kerabat kerajaan harus menyucikan diri secara lahir dan bathin maksimal satu hari sebelum acara tersebut dimulai. Ritual ini dilakukan sebab Bedhaya Ketawang diyakini sebagai pusaka suci. Kemudian sembilan penari diberikan peraturan yang sangat ketat, karena secara adat, mereka akan berhadapan langsung dengan Ratu Kidul. Dengan demikian, mereka harus mempersiapkan diri baik ketika melaksanakan latihan maupun dalam acara penampilan.[14]

Pendapat yang menerangkan tentang sejarah terbentuknya kesenian Tari Bedhaya pada masa awal datang dari berbagai persepsi. Ada yang mengatakan bahwa tari ini dibuat oleh Bathara Guru. Bermula, tujuh penari dikumpulkan untuk membawakan sebuah tarian yang dinamakan "Tarian Lenggot Bawa". Tarian ini diperagakan bersama dengan iringan dari irama musik *Gamelan* yang tersusun dari lima alat: *kendhang, kemanak, gong, kethuk,* dan *kenong.* Kemudian, acara ini diadakan saru tahun sekali, yaitu pada saat acara peresmian kenaikan tahta Pakubuwono.[15]

Selanjutnya, Tari Bedhaya berfunsdi sebagai media diplomasi budaya yang dipersembahkan oleh Keraton Yogyakarta. Dalam hal tersebut, tari ini digunakan sebagai media komunikasi budaya secara halus yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Brakel-Papenhuijzen berpendapat bahwa pertunjukan tari keraton Yogyakarta sering diundang oleh Belanda untuk acara resmi, namun pihak Keraton kerap kali menggunakan kesempatan ini untuk memproyeksikan kekuatan kultural sebagai alat diplomasi. Geraan yang terstruktur, kostum yang simbolis dan iringan musik gamelan yang megah dapat menegaskan hierarki sosial dan stabilitas kerajaan. Sehingga secara tidak langsung menyampaikan pesan tentang ketahanan politik dalam Keraton Yogyakarta.[16]

Sedangkan pada masa modern, Tari Bedhaya tetap digunakan sebagai media diplomasi budaya. Ketika Keraton Yogyakarta menghadapi dinamika politik Indonesia kontemporer,

[13] Hadiwidjojo. Bedhaya Ketawang Tarian Sakral di Candi-Candi (Jakarta, Balai Pustaka, 1981) hlm 21
[14] Ibid. hlm 15
[15] Ibid. hlm 17
[16] Brakel-Papenhuijzen, C. (1992). The Bedhaya Court Dances of Central Java. Leiden: Brill

tarian ini digunakan sebagai sarana untuk membangun jaringan dengan pemerintah pusat dan komunitas global. Lindsai (1995) mencatat bahwa pertunjukan Bedhaya dalam kunjungan kenegaraan atau festival internasional menjadi sarana memperkuat identitas keistimewaan Keraton Yogyakarta, sekaligus merawat otonomi budaya di tengah integrasi nasional.[17]

2. Seni Wayang

Sejarah awal kesenian Wayang, telah menjasi bagian integral dalam budaya Jawa sejak masa Hindu-Budha, namun penggunaannya sebagai alat diplomasi di Keraton Yogyakarta dimulai pada abad ke-18. Setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 M, pasca terbelahnya kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yakni Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, Sultan Hamengkubuwono I menjadikan Wayang sebagai legitimasi politik dan kebudayaan.[18] Pertunjukan wayang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, namun juga sebagai media penyampaian pesan filosofis dan strategis kepada rakyat maupun orang asing. Kini, Keraton Yogyakarta menciptakan standarisasi wayang yang menggambungkan nilai keislaman Jawa yang mencerminkan identitas baru Yogyakarta sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaa.



1. 3 Gambar Pertunjukan Wayang Wong

Petunjukan Wayang di Keraton Yogyakarta sering diadakan dalam acara resmi, seperti kunjungan pejabat kolonial atau utusan kerajaan lain. Dalang Keraton, seperti Ki Timbul Hadiprayitno, merancang lakon khusus yang mengandung pesan tersirat. Misalnya, lakon Srimulat yang menggambarkan keharmonisan antara pemimpin dan rakyat. Kemudian ada lakon Lahirnya Gatot Kaca yang menggambarkan dan menegaskan kekuatan militer

[17] Lindsay, J. (2005). Cultural Policy and the Performing Arts in Southeast Asia. Jurnal of the humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, 151 (4)
[18] Ricklefs, C. M. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Indonesia, Serambi Ilmu Semesta, 2008)

Keraton Yogyakarta.[19] Pertunjukan ini menjadi forum tidak langsung yang menyampaikan kepentingan politik tanpa konfrontasi secara terbuka.

Selanjutnya, Keraton Yogyakarta kerap kali menghadiahkan Wayang Kulit untuk tamu istimewa sebagai simbol persahabatan. Contohnya, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan set wayang kepada pemerintah Belanda pasca kemerdekaan Indonesia sebagai upaya rekonsiliasi.[20] Sedangkan di era kontemporer, Keraton Yogyakarta tetap memanfaatkan wayang untuk diplomasi budaya. Pada tahun 2003, UNESCO mengakui wayang sebagai 'Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity' yang didukung aktif oleh keraton melalui festival internasional.

3. Seni Musik

Keraton Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa, telah lama menggunakan musik sebagai instrumen diplomasi budaya untuk membangun hubungan baik dengan pihak luar, baik lokal maupun internasional. Seni musik khususnya tembang jawa dan gamelan menjadi media yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai filosofis, kearifan lokal dan identitas budaya Jawa secara halus dan universal.

Sejak masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono I, seni musik gamelan telah digunakan sebagai sarana komunikasi politik dan budaya. Gamelan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, namun juga sebagai simbol kekuasaan dan alat untuk memperkuat legitimasi kerajaan. Contohnya, pertunjukan gamelan sering diadakan saat menyambut tamu asing atau upacara kenegaraan, seperti yang tercantum dalam babad Giyanti.[21]



1. 4 Gambar Pertunjukan Gamelan

[19] Hughes-Freeland, F. Embodied Communities: Dance Traditions and Chang in Java (tt. Berghahn Books, 2008)
[20] Sedyawati, E. Pertumbuhan Seni Pertunjukan. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981)
[21] Soedarsono. Wayang Wong: The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta (Yogyakata: Gadjah Mada University Press, 1990)

Gamelan sebagai ansambel musik tradisional Jawa, sering digunakan oleh Keraton Yogyakarta dalam acara-acara resmi untuk menyambut tamu asing atau perwakilan pemerintah. Pada masa kolonial Belanda, gamelan dipentaskan dalam pertemuan diplomatik untuk menunjukkan keagungan budaya Jawa sekaligus menyemarakkan ketegangan politik. Misalnya, pada tahun 1920-an, keraton menggelar pagelaran gamelan untuk delegasi Belanda sebagai bentuk diplomasi halus (soft diplomacy) yang berguna untuk mempertahankan otonomi budaya.[22] Secara filosofis, gamelan menekankan keseimbangan (gending) dan kerja sama antar instrumen juga menjadi metafora diplomasi yang inklusif dan harmonis.[23]

Selanjutnya, tembang jawa, seperti *Macapat* dan *Sekar Ageng* berfungsi sebagai media komunikasi simbolis. Syair-syairnya mengandung ajaran moral, kisah sejarah atau pesan politik yang disampaikan secara halus. Contohnya tembang *Sinom* dan *Pucung* kerap digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono IX untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan kolonial tanpa konfrontasi secara langsung.[24] Sedangkan dalam konteks diplomasi kontemporer, tembang Jawa dipentaskan dalam festival Internasional untuk memperkenalkan nilai-nilai filosofi Jawa seperti tentang toleransi dan kesederhanaan.



1. 5 Gambar Pembacaan Tembang Macapat

Di era globalisasi, Keraton Yogyakarta terus mengoptimalka gamelan dan tembang sebagai alat diplomasi budaya. Pada 2021, gamelan diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda, yang tidak terlepas dari peran aktif Keraton dalam mempromosikannya. Pengakuan UNESCO tersebut mempertegas posisinya sebagai aset diplomasi yang mampu

[22] Sumarsam. Gamelan: Cultural Interaction and Musical Development in Central Jawa (Illinois: University of Chicago Press, 1995)
[23] Lindsay, J. Klasik, Kitsch, Kontemporer: Sebuah Studi tentang Seni Pertunjukan Jawa (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991)
[24] Florida, N. Writing the Past, Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java (London: Duke University Press, 1993)

menarik perhatian global. Keraton secara aktif berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dan lembaga internasional untuk menyelenggarakan pagelaran gamelan di foum seperti PBB atau festival budaya dunia untuk menyampaikan nilai-nilai harmoni dan kearifan lokal Jawa.[25]

Gamelan dan tembang Jawa digunakan sebagai jembatan dialog antar negara, terutama dalam program pertukaran budaya. Misalnya, Keraton berkerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Eropa dan Amerika untuk mengadakan workshop gamelan yang mengajarkan filosofi kerja sama melalui ansambel musik. Tembang Jawa juga dipentaskan dalam acara resmi untuk menyampaikan pesan perdamaian dan toleransi, seperti pada Festival Budaya ASEAN 2023. Dalam acara tersebut, tembang *Gambuh* dibawakan sebagai refleksi kehidupan manusia yang selaras dengan alam.

4. Seni Bangunan

Seni Bangunan di Keraton Yogyakarta juga berfungsi sebagai alat diplomasi budaya yang kaya akan makna dan nilai. Arsitektur Keraton tidak hanya mencerminkan nilai estetika, namun juga berperan dalam membangun hubungan diplomasi antara Keraton Yogyakarta dengan pihak luar. Dalam konteks ini, seni bangunan menjadi simbol kekuatan dan identitas budaya yang dapat memperkuat posisi Keraton dalam interaksi sosial dan politik.

Seni bangunan atau arsitektur ini juga mencerminkan akulturasi budaya yang telah terjadi selama berabad-abad lamanya. Gaya bangunan yang menggabungkan elemen Jawa, Eropa dan China, menunjukan bahwa Keraton Yogyakarta mampu untuk beradaptasi dengan pengaruh luar sambil tetap mempertahankan nilai-nilai lokal. Misalnya, bangunan seperti beragam Bangsal dan Gedhong yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal, akan tetapi berfungsi untuk tempat penyelenggaraan acara kenegaraan dan penjamuan tamu kehormatan.

Kawasan Keraton Yogyakarta adalah bangunan yang menjadi cagar budaya yang terdiri dari beberapa bangunan yang tersusun dan memiliki makna serta fungsi masing-masing. Tipologi bangunan ini terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah bangsal, yakni

[25] UNESCO. (2021). Gamelan. Daftar Warisan Budaya Takbenda. Diakses dari https://ich.unesco.org/ pada 15 Januari 2025

bangunan yang berdiri dengan tiang-tiang sebagai penopang dan tanpa atap. Kedua adalah gedhong, yaitu bangunan yang memiliki dinding sebagai penyangga.

a. Bangsal

Bangsal adalah bangunan yang mempunyai deretan tiang penyangga sebagai struktur atap. Dengan kata lain, tidak ada dinding yang menopang atap.[26] Dengan arsitekturnya yang khas, bangsal menjadi simbol identitas Keraton Yogyakarta yang kerap dihadirkan dalam pertukaran budaya global. Melalui pendekatan ini, Keraton tidak hanya mempromosikan keunikan budaya lokal namun juga memperkuat posisinya dalam percaturan politik budaya internasional.



1. 6 Gambar Bangunan Bangsal

Bangsal didesain sebagai ruang multifungsi yang mencerminkan hierarki sosial dan filosofi Jawa. Secara historis, bangsal digunakan untuk acara kerajaan seperti pertemuan resmi, upacara adat dan pertunjukan seni. Arsitekturnya yang terbuka dengan tiang-tiang kayu tanpa paku dan atap bersusun, melambangkan kesederhanaan dan keseimbangan alam.[27] Selain itu, Keraton Yogyakarta memiliki ragam ciri khas, nama dan penggunaan bangsal.

[26] Kraton Yogyakarta. Tata Ruang dan Bangunan Kawasan Inti Keraton Yogyakarta. Diakses dari https://kratonjogja.id pada 15 Januari 2025
[27] Wiryomartono, B. Perspectives on Traditional Settlements and Communities: Home, Form and Culture in Indonesia. Springer, 2024

Bangsal Pagelaran, memiliki fungsi sebagai ruang penerimaan tamu agung dan upacara adat besar seperti *Garebeg* atau *Sekaten*. Arsitekturnya yang terbuka dengan tiang kayu yang menjulang mencerminkan konsep keterbukaan dan kesetaraan dalam budaya Jawa.[28]

Bangsal Kencana, ruang ini merupakan tempat sakral di keraton. Sebab difungsikan sebagai tempat untuk ritual penobatan sultan dan upacara penting, seperti *Tingalan Dalem* (ulang tahun sultan). Bangunan ini dihiasi dengan ornamen emas yang melambangkan keagungan dan kewibawaan raja.[29]

Bangsal Witana, bangsal ini berdiri pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I, pada tahun 1756M dan memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan pusaka atau atribut kerajaan.

Bangsal Siti Hinggil, memiliki fungsi sebagai tempat penobatan Sultan Keraton Yogyakarta dan tempat Pisowanan Agung yang menjadi tempat diadakan acara pertemuan antara rakyat dan sultan.

Bangsal Pancaniti, memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan untuk Gamelan Sekaten Kyai Gunturmadu dan Kyai Nagawilaga sebelum dipindahkan ke Pagongan Masjid Gedhe.

Bangsal Srimangati, berfungsi sebagai tempat mementaskan seni kebudayaan Keraton Yogyakarta. Selain itu, bangsal ini juga difungsikan sebagai tempat sultan menerima tamu.

Bangsal Manguntur Tangkil, berfungsi sebagai tempat singgasana sultan saat berlangsungnya upacara pasowanan agung.

b. Gedhong

Gedhong, atau bangunan-bangunan dalam kompleks Keraton Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai simbol identitas Jawa yang kaya. Arsitektur gedhong menggabungkan unsur filosofis Jawa, Hindu-Budha dan Islam, mencerminkan akulturasi budaya yang menjadi ciri khas Keraton.

[28] Santoso, S. Arsitektur Tradisional Jawa: Konsep Kosmologi dan Simbolisme. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016)
[29] Wiryomartono, B. Perspectives on Traditional Settlements and Communities: Home, Form and Culture in Indonesia. Springer

Salah satu Gedhong yang menonjol adalah Gedhong Prabayeksa yang dianggap sebagai bangunan paling penting di kompleks Keraton Yogyakarta. Nama prabayeksa diambil dari kata ‘praba’ yang bermakna cahaya dan ‘yeksa’ yang bermakna besar, sehingga apabila digabungkan menjadi cahaya yang besar. Gedhong ini dibangun pada masa pemerintahan Hamengkubuwono I, kemudian digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka milik Keraton Yogyakarta.[30]



1. 7 Gambar Bangunan Gedhong

Selanjutnya adalah Gedhong Jene, yang juga dikenal sebagai Gedhong Kuning. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal sultan, terletak di sebelah barat Gedhong Purworetno. Kemudian ada Gedhong Kenanga, yakni sebuah gedung berlantai dua yang dikelilingi oleh tanaman kenanga. Selain itu ada juga Gedhong Kaca.

Gedhong-gedhong ini memiliki fungsi sebagai alat diplomasi budaya Keraton Yogyakarta. Gedhong Jene yang menjadi tempat tinggal sultan, juga digunakan sebagai tempat menjamu tamu penting. Gedhong Prabayeksa dijadikan sebagai tempat pelestarian pusaka, kemudian dikenalkan kepada tamu asing yang berkunjung ke Keraton. Gedhong Kenanga difungsikan juga sebagai tempat pertunjukan seni tradisional. Dan Gedhong Kaca yang berfungsi sebagai musium tempat menyimpan benda-benda keraton yang menampilkan jejak historisnya.

5. Seni Kuliner

Seni Kuliner adalah salah satu aspek kebudayaan yang memiliki potensi besar dalam diplomasi budaya. Keraton Yogyakarta sebagai pusat perkembangan budaya Jawa, memiliki ragam kuliner yang bisa menarik wisatawan, akan tetapi juga mampu menjadi alat diplomasi budaya yang sangat efektif. Diplomasi budaya melalui seni kuliner dikenal

[30] Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X. Keraton Yogyakarta. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ pada 15 Januari 2025

sebagai *gastrodiplomacy* memungkinkan suatu negara atau daerah untuk memperkenalkan identitas budaya melalui makanan.

Gastrodiplomasi merupakan strategi diplomasi publik yang memanfaatkan makanan sebagai media untuk membangun hubungan baik antara negara lain atau komunitas luar.[31] Yogyakarta, dengan beragam makanan khasnya seperti gudeg, bakpia, dan sate klathak, memainkan peranan strategis dalam menyebarkan warisan budaya ke dunia internasional. Kuliner tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya lokal namun menjadi sarana komunikasi yang baik dan efektif.

Menurut Hakim dan Hamidah, kuliner Yogyakarta memiliki aspek diplomasi budaya yang dapat meningkatkan kerja sama dalam sektor pariwisata dan budaya.[32] Festival kuliner, program pertukaran budaya, dan keikutsertaan dalam acara internasional adalah sarana utama untuk mengimplementasikan gastrodiplomasi.

Beberapa kuliner Keraton Yogyakarta yang dijadikan sebagai media diplomasi budaya, di antaranya:

Gudeg Keraton, makanan ini adalah khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan dicampur dengan beragam rempah-rempah. Versi gudeg keraton, memiliki citra rasa lebih khas dan kompleks, sering disajikan dalam acara besar kerajaan dan jamuan resmi.



1. 8 Gambar Gudeg Keraton

Nasi Blawong, salah satu kuliner khas berasal dari dapur Keraton Yogyakarta adalah Nasi Blawong. Makanan ini hanya disajikan dalam acara penting yang dilaksanakan di

[31] Nabila, R. Z. G. dkk. (2020) Gastrodiplomasi Sebagai Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Yogyakarta. Channel Jurnal Komunikasi

[32] Hakim dan Hamidah. (2022) Peran Kuliner Tradisional Dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan di Destinasi Pariwisata Prioritas Yogyakarta. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora

lingkungan keraton. Ciri khasnya adalah berwarna kemerahan khas yang berasal dari rempah-rempah khusus.

Sate Klathak, berbeda dengan sate pada umumnya, sate klathak adala sate yang hanya diberikan bumbu dengan garam dan dipanggang menggunakan besi sebagai tusuknya. Makanan ini juga sering dihidangkan dalam perjamuan resmi tamu kehormatan Keraton Yogyakarta.[33]



1. 9 Gambar Sate Klathak

Wedang Secang, minuman tradisional yang berasal dari Keraton Yogyakarta ini sering dihidangkan dalam acara kunjungan keraton, kenegaraan dan kebudayaan. Minuman ini terbuat dari olahan kayu secang, airnya berwarna merah khas dan dipercaya memiliki beragam manfaat.

C. Acara-acara Keraton Yogyakarta yang Menampilkan Diplomasi Budaya

Beragam acara yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta tidak hanya mempunyai makna spiritual dan jejak historis, akan tetapi juga berfungsi sebagai media diplomasi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan identitas dan warisan budaya Indonesia untuk negara internasional. Keraton Yogyakarta mengadakan berbagai macam acara yang dapat menarik perhatian wisatawan maupun delegasi asing. Beberapa acara yang berperan penting dalam diplomasi budaya tersebut antara lain:

1. Sekaten

Sekaten merupakan acara yang diselenggarakan rutin setiap tahun guna memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. Kegiatan ini mempunyai nilai historis dan spiritual, sehingga dapat menarik banyak wisatawan, baik lokal maupun manca negara. Dalam

[33] Nabila, R. Z. G. dkk. (2020) Gastrodiplomasi Sebagai Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Yogyakarta. Channel Jurnal Komunikasi

rangkaiannya, masyarakat dapat menyaksikan beragam pertunjukan seni, gamelan dan budaya yang merepresantikan kekayaan budaya Jawa.[34]

2. Grebeg Muludan, Syawal, dan Besar

Acara Grebeg merupakan tradisi perayaan yang diselenggarakan sebanyak tiga kali selama setahun, yakni pada peringatan Maulid Nabi (Muludan), Idul Fitri (Syawal) dan Idhul Adha (Besar). Grebeg ini adalah kegiatan yang melibatkan arak-arakan makanan yang terdiri dari hasil bumi dan kuliner yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, sebagai simbol kesejahteraan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menarik perhatian wisatawan asing serta menjadi media diplomasi budaya yang menggambarkan konsep berbagi dan harmoni sosial.[35]

3. Labuhan

Labuhan Keraton merupakan acara persembahan yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta di Pantai Parangtritis. Kegiatan ini mengandung nilai filosofis untuk menunjukkan hubungan manusia dengan alam. Wisatawan asing yang tertarik dengan ragam cerita mistis dapat mengikuti acara ini. Sehingga hal ini termasuk dalam bagian dari diplomasi budaya yang diselenggarakan.[36]

4. Tingalan Jumenengan

Tinggalan Jumenengan adalah upacara peringatan kenaikan tahta Sultan Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, Keraton mengadakan pertunjukan seni seperti tari klasik, wayang kulit dan prosesi adat yang dihadiri oleh para tamu kehormatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Acara ini menjadi sarana memperkenalkan budaya keraton untuk dunia internasional.

5. Beksan Lawung Agung

Beksan Lawung Agung merupakan jenis tarian yang dimainkan oleh para prajurit Keraton dalam sebuah acara kenegaraan. Pertunjukan tari ini melambangkan

[34] Sapphira, R. N. dkk. Partisipasi Masyarakat Kampung Kauman pada Tradisi Sekaten di Keraton Yogyakarta. Endagomi: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi
[35] Hakim dan Hamidah. (2022) Peran Kuliner Tradisional Dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan di Destinasi Pariwisata Prioritas Yogyakarta. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
[36] Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Upacara Labuhan. Budaya Jogja. Diakses dari https://budaya.jogjaprov.go.id/ pada 15 Januari 2025

kepahlawanan dan keberanian serta juga sering ditampilkan sebagai sarana diplomasi budaya untuk memperkenalkan seni tradisional.

6. Festival Keraton Yogyakarta Nusantara

Festival ini merupakan ajang pertemuan antarkeraton atau antarkerajaan di seluruh Indonesia. Selain itu, turut juga mengundang delegasi kerajaan dari manca negara. Tujuan diselenggarakannya adalah untuk memperkuat hubungan antar budaya dan mempromosikan pariwisata berbasis kebudayaan.

Bab III

Penutupan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa seni dan budaya memiliki peran strategis yang dapat digunakan sebagai alat diplomasi, terutama dalam konteks sejarah yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Perkembangan seni dan budaya dapat menunjukkan peran tradisi dapat digunakan menjadi media diplomasi yang bisa mewujudkan hubungan baik antara Keraton Yogyakarta dengan masyarakat lokal dan komunitas luar, baik nasional maupun internasional.

Beragam kesenian dan kebudayaan, seperti tari, wayang, musik, bangunan dan kuliner, tidak hanya sebatas menjadi identitas lokal, namun juga dapat digunakan menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai budaya kepada masyarakat asing. Kesenian ini dapat menjadi media yang menjembatani antara masyarakat Yogyakarta dengan masyarakat luar, mewujudkan pemahaman yang luas akan budaya.

Selain itu, persembahan acara seperti Sekaten, Grebeg Muludan, Labuhan dan festival budaya lainnya menunjukkan bahwa diplomasi dengan budaya tidak terbatas hanya berfungsi dalam konteks politik, namun juga mempererat hubungan antarbangsa melalui berbagai interaksi budaya yang harmoni. Acara-acara ini menjadi media untuk memperkenalkan tradisi Yogyakarta kepada dunia dan membangun citra daerah sebagai pusat kebudayaan.

Dengan demikian, pembelajaran dari sejarah Yogyakarta mengajarkan bahwa seni dan budaya bukan sebatas sesuatu yang menampilkan nilai estetika, namun juga alat strategis yang bisa membangun hubungan diplomatis yang kuat. Pada era modern, pendekatan diplomasi budaya ini tetap relevan dan dapat terus berkembang untuk mengenalkan identitas Indonesia di kancah dunia.

Daftar Pustaka

Asep Ruhimat, dkk. Ensiklopedia Kearifan Lokal Pulau Jawa.(Solo: Tiga Ananda, 2011)

Nugraha T. A. dkk (2022). Keraton Yogyakarta Cultural Diplomacy: Krida Mardawa as an Actor of Javanese Cultural Diplomacy in Introducing Cultural Heritage Value. Jurnal of Paradiplomacya and city networks

Rahapsari, S. (2021). Pencarian Jati Diri Dalam Bedhaya: Mengungkap Makna Psikologis Tari Sakral Jawa. Budaya dan Psikologi

Syahrial, S. (2024). Adaptasi Inovatif Pertunjukan Tari di Keraton Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multireligius,

Tristofa, N. dan Tham, A. (2022) The Implementatation of Sister City Agreement on Tourism between the Special Region of Yogyakarta Indonesia and Kyoto Japan

Kraton Yogyakarta, Srimpi, Tari Klasik Gaya Yogyakarta, diakses dari https://www.kratonjogja.id

Emi Susilo. (2019) Makna Simbolik Tari Srimpi dalam Konteks Budaya Jawa. Jurnal Seni dan Budaya Nusantara

Keraton Yogyakarta. Tari Srimpi: Warisan Budaya Keraton, diakses dari https://www.kratonjogja.id

Ma'as, A. A. Tari Srimpi Sebagai Alat Diplomasi Budaya di Keraton Yogyakarta. Universitas Diponegoro, 2020

Hadiwidjojo. Bedhaya Ketawang Tarian Sakral di Candi-Candi (Jakarta, Balai Pustaka, 1981)

Brakel-Papenhuijzen, C. (1992). The Bedhaya Court Dances of Central Java. Leiden: Brill

Lindsay, J. (2005). Cultural Policy and the Performing Arts in Southeast Asia. Jurnal of the humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, 151 (4)

Ricklefs, C. M. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Indonesia, Serambi Ilmu Semesta, 2008)

Hughes-Freeland, F. Embodied Communities: Dance Traditions and Chang in Java (tt. Berghahn Books, 2008)

Sedyawati, E. Pertumbuhan Seni Pertunjukan. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981)

Soedarsono. Wayang Wong: The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta (Yogyakata: Gadjah Mada University Press, 1990)

Sumarsam. Gamelan: Cultural Interaction and Musical Development in Central Jawa (Illinois: University of Chicago Press, 1995)

Florida, N. Writing the Past, Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java (London: Duke University Press, 1993)

UNESCO. (2021). Gamelan. Daftar Warisan Budaya Takbenda. Diakses dari https://ich.unesco.org/

Kraton Yogyakarta. Tata Ruang dan Bangunan Kawasan Inti Keraton Yogyakarta. Diakses dari https://kratonjogja.id

Santoso, S. Arsitektur Tradisional Jawa: Konsep Kosmologi dan Simbolisme. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016)

Wiryomartono, B. Perspectives on Traditional Settlements and Communities: Home, Form and Culture in Indonesia. Springer

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X. Keraton Yogyakarta. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/

Nabila, R. Z. G. dkk. (2020) Gastrodiplomasi Sebagai Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Yogyakarta. Channel Jurnal Komunikasi

Sapphira, R. N. dkk. Partisipasi Masyarakat Kampung Kauman pada Tradisi Sekaten di Keraton Yogyakarta. Endagomi: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi

Hakim dan Hamidah. (2022) Peran Kuliner Tradisional Dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan di Destinasi Pariwisata Prioritas Yogyakarta. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Upacara Labuhan. Budaya Jogja. Diakses dari https://budaya.jogjaprov.go.id/

KONSTITUSI KEBUDAYAAN DAN BUDAYA SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

Muhammad RM Fayasy Failaq[1], Dita Elvia Kusuma Putri[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, muhammadrmfayasyfailaq@ums.ac.d
[2] Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, ditaelviakusumaputri@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Globalisasi dan modernitas telah mengarahkan pada pudarnya eksistensi dan keberagaman budaya sebagaimana menjadi fenomena yang melanda negara-negara, ini juga menjadi tantangan besar untuk merawat budaya asli Indonesia. Konstitusi yang hadir sebagai *supreme law of the land*, sekalipun secara konseptual ditransplantasikan dari luar budaya Indonesia asli, dapat saja dijadikan solusi normatif untuk merawat eksistensi kebudayaan lokal dan nasional. Dua hal tersebut, kebudayaan dan konstitusi, akan menjadi dua objek utama dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mengkaji relevansi budaya sebagai identitas konstitusional. Kedua, menggambarkan eksistensi budaya sebagai klausul yang ada dalam konstitusi-konstitusi di Indonesia serta menganalisis solusi konstitusional ke depan untuk mengatasi degradasi kebudayaan lokal dan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), komparatif (*comparative approach*), historis (*historical approach*), dan perundang-undangan (*statute approach*). Data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan hasil penelitian sebelumnya pada topik terkait diperoleh melalui studi pustaka dan akan ditelaah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebudayaan dalam praktiknya dapat menjadi identitas konstitusional berupa nilai-nilai tertentu yang melekat pada teks konstitusi. Ini terbukti dengan beberapa konstitusi formal di dunia yang mengakomodir dan mengakui hadirnya kebudayaan sebagai bagian penting di dalamnya. Pada konteks Indonesia, tiga konstitusi yang berlaku semenjak 1945 berupa UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD NRI 1945 selalu mengakomodir klausul budaya dalam variasi penyebutan seperti hak, kewajiban bagi pemerintah, dan pengakuan akan adanya kebudayaan nasional. Terakhir, dalam upaya untuk mencegah degradasi budaya asli Indonesia, secara normatif cukup dilakukan mitigasi melalui taraf undang-undang dan penegakannya oleh Mahkamah Konstitusi yang saat ini telah dilakukan. Sekalipun demikian, perubahan konstitusi ke depan memerlukan penyempurnaan untuk pelindungan budaya pada beberapa aspek, di antara contohnya adalah perincian pengaturan klausul budaya dalam konstitusi, kewajiban bagi negara, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Daerah, dan alasan yang dapat membatasi Hak Asasi Manusia.
Kata Kunci: Budaya, Identitas Konstitusional, Kebudayaan, Konstitusi, Konstitusi Kebudayaan.

PENDAHULUAN

Budaya selalu memiliki definisi yang kompleks dan selalu diperdebatkan oleh para ahli dan antropologis selama berpuluh-puluh tahun. Clifford Geertz menyimpulkan budaya sebagai sekumpulan makna yang terorganisasi dalam berbagai sistem yang spesifik untuk setiap kelompok. Simbol tersebut pada hakikatnya merupakan sisyem

makna yang memberikan nilai-nilai dan aturan serta larangan yang harus dihormati. Dalam Kamus Merriam-Webster, terdapat sepuluh perbedaan definisi tradisional tentang budaya, yakni meliputi: "kepercayaan adat, bentuk sosial, dan ciri material dari kelompok ras, agama, atau sosial dan juga ciri khas kehidupan sehari-hari (seperti hiburan atau cara hidup) yang dianut oleh orang-orang di suatu tempat atau waktu".[1]

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mendefinisikan budaya sebagai "seperangkat ciri khas spiritual, material, intelektual, dan emosional masyarakat atau kelompok sosial, yang meliputi, tidak hanya seni dan sastra, tetapi juga gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan". Dengan demikian, budaya dapat digambarkan sebagai aspek kehidupan sosial yang kompleks dan beraneka ragam.[2] Manusia dan makna budaya saling bergantung, serta ketergantungan tersebut memberikan kerangka yang stabil namun dinamis untuk sosialisasi dan penerimaan sosial dari individu.[3] Kehidupan manusia sejak dahulu selalu mengandung keberagaman budaya yang luar biasa. Di antara keberagaman tersebut terdapat dalam lingkup sistem perkawinan, mata pencaharian, organisasi politik dan lembaga sosial antara budaya yang berbeda yang dipertahankan oleh variasi perilaku dan bahasa yang stabil dan konsisten.[4]

Globalisasi menghadirkan banyak permasalahan baru bagi dunia, di antaranya adalah pada sektor kebudayaan dan keberagaman budaya. Pada konteks ini, keberagaman budaya menghadirkan dilema dimana pada satu sisi terdapat keinginan untuk mempertahankan tradisi dan identitas lokal namun pada sisi lain tekanan tren global ingin mendorong kesamaan budaya.[5] Hanzhi Zhang dan Ruth Mace mencatatat bagaimana keragaman budaya menghilang dengan cepat dan berkelanjutan, bahkan secara masal. Mereka memperkirakan bahwa bahasa, sebagai salah satu produk budaya, sebanyak sembilan puluh persen akan menghilang. Pada praktiknya kepunahan budaya memang tidak selalu melibatkan kepunahan genetik hingga kematian, namun ini merupakan hasil dari disintegrasi entitas sosial dan pengentian perilaku khusus budaya.[6]

Tren kepunahan budaya[7] dalam masa-masa globalisasi ini tidak terlepas dari penyebaran budaya barat dan westernisasi yang melekat dalam globalisasi tersebut.

---

[1] Nabil Ahmed et al., "Cultural Loss and Climate Change – A New Field of Research" (DR-NTU (Data), 2023), https://doi.org/10.21979/N9/IZMNOV.
[2] Ahmed et al.
[3] Hanzhi Zhang and Ruth Mace, "Cultural Extinction in Evolutionary Perspective," *Evolutionary Human Sciences* 3 (2021): e30, https://doi.org/10.1017/ehs.2021.25.
[4] Zhang and Mace.
[5] Elwira Gross-Gołacka and Anna Martyniuk, "Globalisation and the Challenges of Managing Cultural Diversity: From Multiculturalism to Interculturalism," *Journal of Intercultural Management* 16, no. 3 (September 1, 2024): 37–57, https://doi.org/10.2478/joim-2024-0010.
[6] Zhang and Mace, "Cultural Extinction in Evolutionary Perspective."
[7] United Nation Department of Public Information (UNDPI) merilis beberapa highligt terkait dengan masyarakat adat dan budaya. Pertama, budaya adat terancam dengan kepunahan. Pada konteks ini masyarakat adat terus berlanjut mengalami kehilangan akses kepada tanah, teritori, dan sumber daya alam serta terus dikecualikan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Kebudayaannya terus dipandang sebagai inferior, tidak relevan dan sesuatu yang harus dihapus atau diubah. Kedua, sembilan puluh persen bahasa diprediksi akan menghilang dalam jangka waktu seratus tahun mendatang. Pada konteks bahasa,

Namun, itu tidak selalu mengarah pada homogenisasi sebagai akibat hilangnya budaya. Dalam beberapa sisi dapat menghasilkan kebangkitan dan promosi budaya serta tradisi dan budaya dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan memungkinkan penyebarannya secara global.[8]

Pada praktiknya terjadi pula globalisasi kultural (*cultural globalization*) yang mana membuka budaya-budaya baru yang memiliki hubungan erat antara ekonomi dan budaya yang memberi dampak pada ekonomisasi budaya dan budayaisasi ekonomi dalam bentuk-bentuk seperti industru budaya.[9] Sekalipun dapat membawa manfaat, ancaman ini akan tetap selalu hadir. Terlebih, kepunahan budaya memang selalu terjadi. Indonesia sebagai negara berbudaya dan menghormati kearifan lokal sebagaimana tertera dalam konstitusi-nya perlu untuk melakukan mitigasi atasnya selain turut memanfaatkan globalisasi untuk pengembangan budayanya.

Konstitusi yang hadir sebagai *supreme law of the land*, sekalipun secara konseptual ditransplantasikan[10] dari luar budaya Indonesia asli[11], dapat saja dijadikan solusi normatif untuk merawat eksistensi kebudayaan lokal dan nasional. Namun dalam praktiknya, konstitusi mewujudkan globalisasinya sendiri yang disebut oleh Tushnet sebagai "*globalization of constitutional law*". Ia menggambarkan, adanya praktik konvergensi dan harmonisasi dalam konstitusi-konstitusi domestik negara-negara yang terjadi baik secara *bottom-up* maupun secara *top-down*,[12] di Indonesia terjadi juga rekonstruksi tradisi pada beberapa aspek karena demokratisasi.[13] Pada poin ini, konstitusi pada satu sisi menjelma menjadi praktik yang secara tidak langsung dapat

---

sembilan puluh tujuh persen penutur berbicara hanya empat persen bahasa di dunia, sehingga bahasa-bahasa dengan penutur minoritas terus terancam berkurang. Ketiga, matinya bahasa berdampak pada komunitas. Bahasa yang hilang bukan hanya perihal alat komunikasi melainkan juga komponen kolektif dan identitas individu yang berkaitan dengan rasa kepemilikan akan komunitas. Keempat, makanan tradisional memperpanjang umur. Masyarakat adat pada aspek kesehatan dan keberlanjutan budaya berkaitan dengan cara mereka mengkonsumsi makanan tradisional. Kelima, nilai dari pengetahuan tradisional. Pengetahuan dan nilai ini telah dirusak oleh kolonisasi dan negara kolonial dengan sistem hukum, pengetahuan, dan cara pandangnya atas masyarakat tradisional. "State of The World's Indigenous Peoples" (United Nations Department of Public Information, 2010).

[8] Gross-Gołacka and Martyniuk, "Globalisation and the Challenges of Managing Cultural Diversity."

[9] Natalia Bogoliubova and Julia Nikolaeva, "Cultural Ties In A Globalization World: The Threats And Challenges," May 15, 2017, https://doi.org/10.5281/ZENODO.581758.

[10] Konstitusi formal modern pertama adalah konstitusi Amerika Serikat, setelahnya negara-negara dunia merasa perlu memiliki konstitusi serupa sekaligus banyak meniru dan mencontohnya. KC Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern* (Bandung: Nusa Media, 2018).

[11] Sebagai contoh pada negara Amerika yang memiliki konstitusi modern tertulis pertama di dunia serta yang merupakan tujukan utama dan pertama sistem presidensial. Aidul Fitriciada Azhari mencatat, sistem presidensial di Amerika yang disebarkan tidak hanya berdimensi struktural melainkan juga nilai budaya konstitusional yang juga turut terinternalisasi ketika mengadopsi sistem tersebut. Aidul Fitriciada Azhari, "Mekanisme Checks and Balances Dan Budaya," in *Bunga Rampai Komisi Yudisial* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), tushnet.

[12] Mark Tushnet, "The Inevitable Globalization of Constitutional Law," *Harvard Public Law Working Paper* 09, no. 06 (2008).

[13] Aidul Fitirciada mencatat, terjadi rekonstruksi beberapa tradisi dalam konteks dekolonialisasi (pasca kolonial) dan demokratisasi (pasca otoritarian) di Indonesia. Aidul Fitriciada Azhari, "Ideologi Dan Konstitusi Dalam Perkembangan Negara-Negara Bangsa Indonesia: Rekonstruksi Tradisi, Dekolonialisasi, Dan Demokratisasi.," *Media Hukum* 20, no. 1 (2013).

menyeregamkan dan mempengaruhi budaya global sehingga sistem-sistem hukum lokal dapat saja terpinggirkan, namun pada sisi lain 'seharunya' berperan untuk memelihara budaya lokal sebagai hak konstitusional sebagai materi pokok dalam konstitusi[14] yang tidak boleh hilang.

Apa itu konstitusi di sini perlu dibahas secara singkat. Konstitusi disebut sebagai hukum dasar (*grondwet*) yang menempati kedudukan tertinggi dalam tata urutan (hirarki) peraturan perundang-undangan. Djokosoetono menyampaikan tiga definisi konstitusi. Pada konteks materiil berbicara pada isi konstitusi yang memuat hukum dasar dari struktur dan fungsi negara. Pada konteks makna formal berbicara pada cara dan prosedur pembuatan. Pada konteks Undang-Undang Dasar secara teks formal.[15] Konstitusi dalam ketiga konteks ini lah, atau yang disebut oleh KC Wheare sebagai konstitusi formal[16] adalah yang dimaksud dalam penelitian ini.

Bagaimana ia dapat berperan dalam konteks degradasi budaya dalam globalisasi ini adalah dengan perannya sebagai hukum dasar yang telah disebutkan. Untuk memahami logika ini, kita dapat berangkat dari teori hirarki norma hukum dari Hans Kelsen yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky.[17] Dalam teori tersebut, konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar yang harus dirujuk oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, ketika aturan pada ranah konstitusi sudah mengatur suatu hal pokok maka peraturan lain akan secara sistematis terpola untuk mendukung aturan pada ranah konstitusi.

Adapun budaya yang akan dimaksudkan pada penelitian ini adalah pada konteks budaya status quo yang berpeluang untuk hilang akibat globalisasi dan modernisme sebagai permasalahan yang hadri di sini. Dengan demikian, budaya baru yang muncul akibat pergaulan antar budaya tidak dimaksudkan sebagai hal yang benar-benar harus diproteksi oleh klausul konstitusional. Terdapat dua konteks budaya yang harus diproteksi di sini, pertama adalah pada konteks budaya nasional dan kedua adalah budaya lokal. Budaya nasional menggambarkan identitas dan simbol yang diakui di seluruh negara Indonesia yang telah ada semenjak negara ini berdiri, sementara budaya lokal adalah nilai-nilai dan simbol yang berada di daerah-daerah di Indonesia.

Dalam konstitusi yang saat ini berlaku di Indonesia, budaya diakui dan disebut sebanyak enam kali yang mencakup budaya lokal dan nasional tersebut. Diantaranya

---

[14] Menurut Miriam Budiarjo, hak-hak asasi manusia merupakan salah satu materi muatan pokok dari konstitusi bersamaan dengan organisasi negara, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, dan larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka, 2009); Triwahyuningsih et al., "Constitutional Perspective of Human Rights Values in Local Wisdom in the Special Region of Yogyakarta (Study of Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XIV/2016)," *Jurnal Jurisprudence* 13, no. 1 (2023); Asnawi Mubarok et al., "The Relationship Of State Law And Customary Law: Reinforcement And Protection Of Customary Law In Constitutional Court Judgment," *Jurnal Jurisprudence*, December 18, 2023, 188–204, https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.2914.

[15] Laica Marzuki, "Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011).

[16] KC Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*.

[17] Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

dalam Pasal, 28C ayat (1) pada topik hak seni dan budaya, Pasal 28I ayat (3) pada topik identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, Judul Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 32 (1) tentang negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia, Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 tentang kewajiban bagi negara untuk menghormati bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional. Dengan penyebutan itu secara sekilas telah menggambarkan adanya proteksi secara konstitusional terhadap budaya.

Pada kenyataannya, sekalipun konstitusi secara umum telah melakukan proteksi konstitusional, permasalahan terhadap budaya terus menerus terjadi imbas globalisasi dan westernisasi, serta dalam asumsi peneliti dikarenakan secara normatif kerangka konstitusi masih terdapat celah yang dapat disempurnakan. Salah satu contoh saja dari permasalahan budaya tersebut di Indonesia, adalah adanya bahasa-bahasa daerah yang dideklarasikan punah karena ketiadaan penutur. Di antaranya adalah bahasa Tandia dan Mawes di Papua dan Papua Barat, Kajeli, Piru, Moksela, Palumata, Ternateno, Hukumina, Hoti, Serua, dan Nila di beberapa daerah di Maluku.[18] Lebih mirisnya, kehilangan bahasa sebagai produk budaya tersebut terjadi di daerah-daerah terpinggirkan di Indonesia. Kami tidak mengenyampingkan cara lain untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan ini, namun cara melalui kajian konstitusi adalah salah satu cara pokok yang dapat mensukseskan solusi-solusi lain sebab keberadaannya sebagai cara pandang pokok bernegara yang diatur secara normatif. Sebagai contoh, solusi pada ranah praktis oleh instansi tertentu dapat didukung secara struktural dan pendanaan akibat ketentuan konstitusi yang memberikan mandat lebih untuk memfokuskan pengentasan masalah pada sektor budaya.

Sebagai penutup bagian pendahuluan, tulisan ini akan berfokus pada tiga aspek utama kajian. Pertama, adalah mengkaji keberadaan budaya sebagai identitas konstitusional. Kajian pertama ini akan bersifat lebih konseptual untuk memperkenalkan bahwa budaya memang menempatkan posisi khusus dalam konstitusi secara teoritik dan praktiknya pada negara-negara. Kedua, menggambarkan eksistensi budaya sebagai klausul yang ada dalam konstitusi-konstitusi di Indonesia. Kajian kedua ini akan menggali dan mengidentifikasi keberadaannya semenjak konstitusi yang pertama berlaku di Indonesia. Ketiga, menganalisis solusi konstitusional ke depan untuk mengatasi degradasi kebudayaan lokal dan nasional. Kajian ketiga ini akan menghadirkan beberapa opsi solusi yang mengembangkan klausul budaya dalam konstitusi yang berangkat dari hasil kajian konseptual dan identifikasi pada kajian kedua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan peneltian hukum, khususnya hukum tata negara dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), komparatif (*comparative approach*), historis (*historical approach*), dan perundang-undangan (*statute approach*). Data dalam

[18] Antara, "11 Indigenous Languages Declared Extinct: Education Ministry A," *Jakarta Globe* (blog), 2024, https://jakartaglobe.id/news/11-indigenous-languages-declared-extinct-education-ministry.

penelitian ini berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan hasil penelitian sebelumnya pada topik terkait diperoleh melalui studi pustaka dan akan ditelaah secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. RELEVANSI BUDAYA SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSIONAL

George Jeffrey Jacobsohn dalam artikelnya berjudul Constitutional Identity mengutip yurisprudensi dari *landmark decission* Supreme Court India dalam *Minerva Mills Ltd. v. Union of India,* "*The Constitution is a presticious heritage; therefore you cannot destroy the identity*" (Konstitusi adalah warisan yang sangat berharga, oleh karena itu identitasnya tidak bisa dihancurkan).[19] Yurisprudensi tersebut menggambarkan salah satu prinsip yang berkembang di India berupa terdapat sebuah *basic structure* atau prinsip dasar dari konstitusi. Secara konseptual, ini mirip dengan yang dibicarakan sebagai identitas konstitusional.

Identitas konstitusional (atau identitas konstitusi) merupakan hal pokok yang harus dibicarakan terlebih dahulu pada tema ini sehingga dapat merangkai saran yang lebih lanjut kemudian. Apa yang disebut sebagai identitas konstitusional berada pada wilayah yang lebih fundamental daripada materi muatan konstitusi secara umum[20]. Sebab, tidak semua materi muatan konstitusi dapat dinilai sebagai identitas dari konstitusi atau identitas konstitusional, sementara materi muatan yang termasuk identitas konstitusional sudah tentu merupakan materi muatan yang pokok.[21] Dampaknya, materi muatan yang menjadi identitas konstitusional sudah pasti dapat dipertahankan dan dikreasikan secara lebih pokok dalam konstitusi. Pada konteks penelitian ini, apabila budaya merupakan identitas konstitusional, maka selain wajib dipertahankan, ia harus dikembangkan secara lebih ketat.

Michael Rosenfeld menjelaskan bahwa identitas konstitusional (*constitutional identity*) pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang diperdebatkan sebab tidak ada kesepakatan mengenai apa yang dimaksud atau yang dirujuk. Namun menurutnya, konsep ini berakat dari Aristoteles yang menegaskan bahwa identitas suatu negara tidak bergantung pada karakter fisiknya namun pada konstitusinya, sehingga dalam konteks kontemporer konsepsi ini berfokus pada fitur dan ketentuan aktual konstitusi seperti apakah konstitusi tersebut mengantu bentuk presidensial atau parlementer, kesatuan

---

[19] Gart Jeffrey Jacobsohn, "Constitutional Identity," *The Review of Politics* 68 (2006).
[20] Ide ini, pada mulanya berangkat dari karya Carl Schmitt dan Carl Bilfinger ketika membangun batasan-batasan amandemen dengan identitas konstitusi. Pada konteks Jerman, identitas konstitusi merupakan inti dari konstitusi yang tidak dapat diubah. Moh Rizaldi and Rizky Malinto Ramadani, "Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi?," *Proceedings Conference National Conference on Law Studies (NCOLS)* 2, no. 1 (2020).
[21] Identitas konstitusional disebut sebagai "kode genetik" dan "inti utama" dari konstitusi. Franko Johner, Indra Perwira, and Susi Dwi Harijanti, "Negara Bangsa Pos-Kolonial Sebagai Basis Dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018).

atau federal, sehingga hubungan konstitusi dan budaya, serta hubungan antara identitas konstitusi dengan identitas relevan lainnya seperti identitas nasional, agama, dan ideologi. Ia menggariskan, sejauh terdapat cita-cita konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan, maka konstitusi dimanapun pada dasarnya memiliki identitas yang sama.[22] Dari pemaparannya, tampak bahwa terdapat identitas yang sama yang berangkat dari ide pembatasan kekuasaan, serta memungkinkan identitas-identitas yang berbeda.

Konsep ini dapat dipahami secara analitik maupun secara normatif. Secara analitik, identitas konstitusional mempertanyakan apa yang diberikan secara spesifik oleh konstitusi pada aspek sosio-politik dan kultural, atau dapat dipahami sebagai identifikasi yang berfokus pada pondasi dasar dari kebijakan maupun hubungan antara kultur nasional dan dokumen konstitusi. Secara normatif, identitas konstitusional mengikat atau dapat memotivasi aktor-aktor konstitusional dan penafsir konstitusi untuk menghormati identitas tersebut yang berkaitan juga dengan konstitusioanlisme.[23] Berada pada maksud wilayah pembahasan yang normatif, Bertrand Mathieu mengaitkannya dengan aspek penegakan. Ia menyampaikan bahwa identitas konstitusional berkaitan dengan unsur-unsur penting dari identitas nasional yang telah diputuskan oleh suatu bangsa untuk diabadikan dalam konstitusi sehingga dapat mempengaruhi kepada penegakan hukum.[24] Pada poin ini, ia memaparkan bahwa identitas konstitusional yang diabadikan tersebut memiliki pengaruh lebih kepada penegakan dari materi muatan konstitusi terkait.

Sekalipun terdapat persamaan identitas antara satu negara dan negara yang lain, seperti corak umum pembatasan kekuasaan dalam pandangan Rosenfeld, identitas konstitusional merupakan nilai yang sangat mendasar dan ciri khas yang membedakan satu konstitusi negara dengan konstitusi negara yang lainnya. Corak ini diperoleh dari pengalaman terdahulu baik sejarah maupun politik.[25] Vakhtang Surguladze dkk. menggambarkan beberapa poin yang dapat dikatakan sebagai identitas konstitusional yakni[26]:

1. Komunitas religius (**identitas agama**). Dia memberikan contoh seperti bagaimana konstitusi Armenia, Yunani, dan negara-negara muslim memberikan tempat khusus bagi agama dalam konstitusinya.

---

[22] Michel Rosenfeld, "Constitutional Identity," in *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, by Michel Rosenfeld, ed. Michel Rosenfeld and András Sajó (Oxford University Press, 2012), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.013.0037.

[23] Christophe MAES, *The Notion of Constitutional Identity and Its Role in European Integration* (Brussels: Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies, 2024).

[24] Anikó Raisz, ed., *International Law From a Central European Perspective*, vol. 9, Legal Studies on Central Europe (Central European Academic Publishing, 2022), https://doi.org/10.54171/2022.ar.ilfcec.

[25] Nurul Maulinawaty Nadya Dewi, "Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia (The Protection of Constitutional Identity in Indonesia)," *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 1 (2020).

[26] Vakhtang Surguladze et al., "Constitutional Identity in the Modern States Practice," *Proceedings of the XIV European-Asian Law Congress "The Value of Law" (EAC-LAW 2020)*, 2020.

2. Kesamaan nasib (**identitas sejarah**). Dia memberikan contoh pernyataan nasib bersama dalam pembukaan konstitusi Rusia. Kemudian pernyataan nasib bersama bangsa-bangsa yang bergabung dalam German dalam konstitusi German.
3. Komunitas budaya (**Identitas peradaban**). Dia memberikan contoh konstitusi Kamboja, Cina, dan Vietnam yang menekankan aspek budaya.
4. Komunitas sistem sosial-politk (**Identitas sosial-politik**). Contohnya konstitusi Cina yang menempatkan identitas sosial-politik sosialis dan konstitusi Kuba.
5. Komunitas teritorial (**Identitas geografis**). Dia memberikan contoh Konstitusi Cina yang mengakomodir keberadaan Taiwan serta Konstitusi Laos yang menggambarkan karakteristik bangsanya yang lahir dari negara/tanah yang makmur.
6. Penentuan nasib sendiri (**Identitas diri bersama**). Contohnya adalah konstitusi Perancis yang membebaskan diri siapapun untuk dapat bergabung dalam Republik Perancis.
7. Komunitas Negara (**Identitas politik negara**). Contohnya adalah Konstitusi Makedonia, proklamasi kemerdekaan Republik Krusevo serta munculnya pemberontakan terhadap Kesulthanan Usmani dalam lintas etnis dan bangsa untuk kemerdekaan negaranya dari Usmani.

Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Surguladze dkk. tergambarkan bahwa budaya dapat dikategorikan sebagai identitas konstitusional yang ia ungkapkan dalam istilah identitas komunitas budaya atau identitas masyarakat. Selain itu, rasionalisasi budaya sebagai identitas konstitusional ditentukan oleh latar belakang historis di suatu negara.[27] Untuk menentukan hal tersebut di Indonesia, latar belakang tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu.

Sebelum menggalinya di Indonesia, perlu dipaparkan secara singkat eksistensi budaya sebagai identitas konstitusional pada negara-negara lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Surguladze dkk., salah satu contohnya adalah pada Konstitusi Kamboja yang mengaitkan adanya budaya dan Peradaban Angkor, Konstitusi China yang mengaitkan dengan adanya budaya lama, dan juga dalam Konstitusi Vietnam.[28] Pada *Prembule* Konstitusi Angola, kami menemukan penyebutan yang eksplisit akan budaya dan identitas, yakni: "*..Invoking the memory of our ancestors and calling upon the wisdom of the lessons of our shared history, our centuries-old roots and the cultures that have enriched our unity; Inspired by the best lessons in African tradition - the essence of Angolan culture and identity;..*"[29]. Selain itu, contoh lain terdapat pada *Prembule* Konstitusi Kamerun yang berbunyi "*We, the people of Cameroon, Proud of our linguistic and cultural diversity, an enriching feature of our national identity, but profoundly aware of the*

[27] Penulis sepakat dengan pandangan Nadya Dewi bahwa sejarah merupakan inti serta politik turut mempengaruhi identitas konstitusi sebuah negara. Keduanya turut membentuk memori kolektif. Nurul Maulinawaty Nadya Dewi, "Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia (The Protection of Constitutional Identity in Indonesia)."
[28] Vakhtang Surguladze et al., "Constitutional Identity in the Modern States Practice."
[29] Dapat diartikan: "..Mengingat kembali kenangan para leluhur kita dan mengambil hikmah dari pelajaran sejarah bersama kita, akar sejarah kita yang telah berusia berabad-abad dan budaya yang telah memperkaya persatuan kita; Terinspirasi oleh pelajaran terbaik dari tradisi Afrika - inti dari budaya dan identitas Angola"

imperative need to further consolidate our unity..."[30]. Terakhir, yang kami temukan pada *Prembule* Konstitusi Palau, "*We, the people of Palau proclaim and reaffirm our immemorial right to be supreme in these islands of Palau, our homeland. We renew our dedication to preserve and enhance our traditional heritage, our national identity and our respect for peace, freedom and justice for all mankind*"[31].

Apabila mengabaikan pembacaan atas latar historis, penyebutan identitas konstitusional seringkali tidak eksplisit menyebutkan diksi "identitas", sehingga proses pelacakannya seringkali tampak lebih rumit. Namun, sebagai materi muatan yang tampak lebih pokok, menurut penulis dapat diindetifikasi keberadaannya pada beberapa hal, yakni:

1. Pada *prembule* Undang-Undang Dasar (UUD);
2. Pada batang tubuh yang disebut secara eksplisit dengan adanya diksi identitas;
3. Pada batang tubuh yang menyebutkan sebagai ciri maupun negara secara terang;
4. Pada bagian yang tidak dapat diubah dari konstitusi; atau
5. Pada topik lain yang secara historis tergambarkan sebagai identitas yang melekat dengan sebuah negara.

Berikut beberapa contoh dari identitas konstitusional Indonesia dalam beberapa riset terdahulu:

Tabel I
Identitas konstitusional di Indonesia

No.	Identitas konstitusional	Letak
1.	Pancasila[32]	Prembule UUD 1945
2.	Permusyawaratan[33]	Prembule UUD 1945, batang tubuh
3.	Negara kesatuan[34]	Batang tubuh, bagian yang tidak dapat diubah dari konstitusi
4.	Bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan[35]	Batang tubuh

Sumber: diolah Penulis (2025)

[30] Dapat diartikan:.." Kami, rakyat Kamerun, bangga akan keberagaman bahasa dan budaya kami, ciri yang memperkaya identitas nasional kami, tetapi sangat menyadari kebutuhan penting untuk lebih mengokohkan persatuan kami..."

[31] Dapat diartikan: " Kami, rakyat Palau, menyatakan dan menegaskan kembali hak kami yang tak lekang oleh waktu untuk menjadi yang tertinggi di pulau-pulau Palau, tanah air kami. Kami memperbarui dedikasi kami untuk melestarikan dan meningkatkan warisan tradisional kami, identitas nasional kami, dan rasa hormat kami terhadap perdamaian, kebebasan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia".

[32] M Hafiz Ramdhani Barus and Irwansyah, "Pengamanan Atas Identitas Konstitusi Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024).

[33] Nur Rohim Yunus, "Gagasan Musyawarah Sebagai Identitas Konstitusi Indonesia," *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019).

[34] Ranggy Putranda Mahardika and Hananto Widodo, "Analisis Konsepsi Bentuk Negara Kesaturan Republik Indonesia Sebagai Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (Unamendable Provisions) Di Dalam Klausul Pasal 37 UUD 1945 Sebagai Identitas Konstitusi," *Novum Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2024).

[35] M Hafiz Ramdhani Barus and Irwansyah, "Pengamanan Atas Identitas Konstitusi Indonesia."

Dari tabel di atas, penelitian terdahulu yang mengkaji konstitusi Indonesia belum ada yang menggambarkan secara spesifik bahwa budaya merupakan salah satu identitas konstitusional. Namun, apabila dicerna secara implisit sebenarnya budaya merupakan bagian substantif dari Pancasila.[36] Sehingga, apabila Pancasila merupakan identitas dari konstitusi, maka seharusnya budaya juga termasuk.

Untuk benar-benar membuktikan bahwa budaya merupakan identitas konstitusional, perlu setidaknya menjawab hal berikut. Pertama, apakah ia melekat secara historis. Kedua, apakah ia disepakati secara politis. Ketiga, apakah ia dapat dihapus dari konstitusi. Tiga pertanyaan ini berangkat dari konsepsi identitas konstitusional yang memang ditarik dari aspek kesejarahan, perkembangan kehidupan politik, dan pada beberapa negara memang dimaksud agar tidak dapat diubah dari konstitusi.

Secara historis, sebelum Indonesia merdeka, terlebih dahulu terdapat suku-suku dan masyarakat adat tradisional yang telah eksis. Dalam pembentukan naskah UUD 1945, Yamin sebagai salah satu *founding parents of the constitution* termasuk yang membicarakan terkait masyarakat adat. Ia mengusulkan adanya hak atas tanah bagi persekutuan daerah-daerah tertentu. Soepomo juga berpendapat terkait hukum adat yang merupakan bagian integral dalam negara integralistik. Kelompok-kelompok masyarakat tradisional yang sudah memiliki budaya terlebih dahulu ditemukan di daerah-daerah pada marga, desa, dan nagari.[37] Bahkan tercatat, sebelum diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam wilayah Indonesia sudah terdapat kurang-lebih dua ratus lima puluh *zelfbesturende landschappen* dalam bentuk daerah-daerah swapraja atau daerah kerajaan serta *volksgemeenschappen* berupa pemerintahan desa-desa yang tersebar di seluruh Indonesia.[38]

Kesepakatan secara politik bangsa ini terkait budaya tentu tercermin dalam teks konstitusi sebagai resultan politik.[39] Sejak pertama kali berdiri, serta beberapa kali dilakukan amendemen maupun penggantian konstitusi, pengaturan terkait budaya dan kebudayaan tidak pernah hilang dan selalu disebut secara eksplisit. Arif Hidayat serta Jimly Asshiddiqie, Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, menyebut UUD 1945 dengan istilah konstitusi kebudayaan.[40] Pemaparan lebih lanjut terkait budaya dan konstitusi masa ke masa ini akan dipaparkan pada sub-pembahasan berikutnya.

---

[36] Pendapat Kaelan sebagaimana dikutip oleh Rizaldi dan Ramadani bahwa Pancasila sebagai dasar negara berasal dari nilai-nilai yang telah ada sejak dahulu kala berupa nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius. Moh Rizaldi and Rizky Malinto Ramadani, "Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi?"

[37] Resha Roshana Putri, "Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945," *Padjajaran Law Review* 5, no. 1 (2017).

[38] Irfan Nur Rahman et al., "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (May 20, 2016): 767, https://doi.org/10.31078/jk856.

[39] KC Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*.

[40] Arief Hidayat, "Indonesia Negara Berketuhanan," https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_14_02_arief_hidayat.pdf.

Lantas apakah budaya dapat dihilangkan (dekonstitusionalisasi[41]) dari teks konstitusi? Apabila menjawab ini secara normatif, teks konstitusi Indonesia hanya mengatur klausul yang tidak dapat diubah (*unamendable provission*) yang hanya berupa Negara Kesatuan berbentuk Republik. Selain itu, secara normatif mungkin saja dihilangkan. Pada poin ini, dengan asumsi bahwa identitas konstitusi melekat dengan *unamendable provision* akan menghasilkan kesimpulan bahwa budaya bukan identitas konstitusional, serta budaya dapat dihilangkan dari konstitusi. Kami termasuk yang tidak sepakat dengan ini, sebab apabila hanya memandangnya secara normatif, Pancasila yang tidak disebut dalam teks UUD mungkin juga disimpulkan bukan sebagai identitas konstitusi dan mungkin saja dihilangkan (sekalipun ia tidak dieksplisitkan dalam batang tubuh). Dengan demikian, memandang mungkin atau tidaknya budaya dihilangkan dari konstitusi adalah sepatutnya menjawabnya lebih dalam, tidak sebatas apa yang normatif tertera dalam batang tubuh UUD.

Terakhir, kita dapat mengaitkan antara identitas konstitusional dan identitas nasional sebuah negara. Bertrand Mathieu berpendapat tentang identitas konstitusional sebagai berikut: "*Constitutional identity corresponds to the essential elements of national identity that a people has decided to enshrine in its Constitution, thus giving them legal effect*" (Identitas konstitusional sesuai dengan unsur-unsur penting identitas nasional yang telah diputuskan oleh suatu bangsa untuk diabadikan dalam Konstitusinya, sehingga memberikan efek hukum). Pada konteks ini, menurut Mathieu identitas nasional adalah apa yang memungkinkan suatu komunitas politik untuk diidentifikasi.[42] Relasinya dengan identitas nasional ini perlu digambarkan lebih lanjut, apakah budaya termasuk identitas nasional? Budi Annisa Sidi menggambarkan bahwa identitas nasional indonesia diinterpretasikan, dialami, dan dipahami dari pertimbangan etno-regional, budaya, dan keberagaman agama. Ia menekankan, persatuan dalam multikulturalisme merupakan bagian dari identitas nasional.[43] Agus Supratikno menekankan, berdaarkan perspektif sosio-historis, Indonesia memiliki dua identitas yakni identitas primordial sebelum Indonesia terbentuk dan identitas nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terbentuk atas kesepakatan semua golongan dengan identitas primordialnya masing-masing.[44] Pendapat tersebut menggambarkan adanya penghargaan atas multikulturalisme yang menyatu atas nama Pancasila. Relasi antara

---

[41] Dekonstitusionalisasi dapat diartikan pada dua konteks, pertama penarikan diri peradilan yang melakukan constitutional review dari urusan tertentu, kedua menghapus ketentuan tertentu dari teks konstitusi formal. Berikut beberapa tulisan yang menggunakan istilah ini: Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria* (Sleman: STPN Press, 2014); Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010); Erwin Chremensky, "The Deconstitutionalization of Education," *Loyola University Chicago Law Journal* 36, no. 1 (2004).

[42] Raisz, *International Law From a Central European Perspective*.

[43] Budi Annisa Sidi, "Unity and Diversity: National Identity and Multiculturalism in Indonesia" (New Zealand, University of Otgo, 2020).

[44] Agus Supratikno, "Reinforcing Indonesian National Identity Based on Inclusiveness of Pancasila as a Way to Deal with the Identity Politics in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 6 (2022).

budaya dan identitas nasional[45] juga dapat menekankan bagaimana secara konseptual ia dapat dipahami sebagai identitas konstitusional.

B. IDENTIFIKASI KLAUSUL BUDAYA DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN PROSPEK PENGEMBANGAN DALAM AMENDEMEN

Kebudayaan adalah elemen penting bagi sebuah bangsa, karena kebudayaan ikut mendefinisikan identitas bangsa.[46] Begitu pun bagi bangsa Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman budaya. Hal ini juga disadari oleh para perumus konstitusi, terlihat dari sejumlah pasal dalam UUD 1945 yang menegaskan pentingnya perkembangan budaya dan turut menjadi landasan hukum bagi perkambangan kebudayaan masyarakat Indonesia. Eksistensi pentingnya kebudayaan juga tercermin dalam pendapat Sri Soeprapto dan Jirzanah: "Usaha menghadapi hidup masa kini serta membangun masyarakat di masa depan memerlukan kesinambungan dengan kehidupan kultural masa lampau. Kesadaran kontinyitas historis memperkuat kesadaran kultur suatu bangsa, sehingga terbentuklah rasa nasionalisme atau identitas diri bangsa. Pemupukan identitas nasional tidak dapat dijalankan tanpa menghidupkan kesadaran kultural.[47]

Lebih lanjut, Friedrich Carl von Savigny melalui bukunya *L'esprit des Lois* mengatakan adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukum bangsa tersebut. Artinya hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*).[48] Oleh karena itu, akan diuraikan terkait eksistensi budaya sebagai klausul yang ada dalam konstitusi. Konstitusi memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan maupun perlindungan hukum bagi masyarakat.[49] Sebagai negara hukum, konstitusi negara diletakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan menjadi UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.[50] Hierarki perundang-undangan konstitusi menempati urutan teratas (*grundnorm*) dalam segitiga atau lebih dikenal dengan teori *Stufenbau des recht.*[51] Hal demikian sebagaimana diatur

---

[45] Tiru Dame R Sagala merincikan terdapat sepuluh identitas nasional indonesia berupa: Bahasa nasional, bendera, lagu, simbol negara (Pancasila), motto "Bhineka Tunggal Ika". Filosofi dasar (Pancasila), UUD 1945, bentuk negara kesatuan-republik-demokrasi, konsep negara kepulauan, dan budaya lokal yang diterima sebagai budaya nasional. Tiru Dame R Sagala, "Indonesian National Identity," *Journal of Social, Justice, and Policy* 1, no. 1 (2022).

[46] Abd. Wahab A. Rahim, "Dominasi Budaya Populer: Penguatan Nilai-Nilai Budaya Melalui Pemanfaatan Media Sosial," *Journal of Religious and Social Science* 18, no. 4 (2024): 2354–65.

[47] Sri Soeprapto and Jirzanah, *Pengembangan Kebudayaan Sebagai Identitas Bangsa* (Jurnal Filsafat, 1996).

[48] *Atip Latipulhayat,' Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny', (2015), PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum. [197].*

[49] Seri Mughni Sulubara, T.Saiful Basri, and Iskandar, "Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 4 (2024), https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2653.

[50]Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 34, https://doi.org/10.31078/jk1612.

[51] Firmansyah et al., "Alasan Dilakukannya 4 Kali Amandemen UUD 1945 Tujuan Dan Sejarah Perkembangan," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2021): 5.

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yang mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

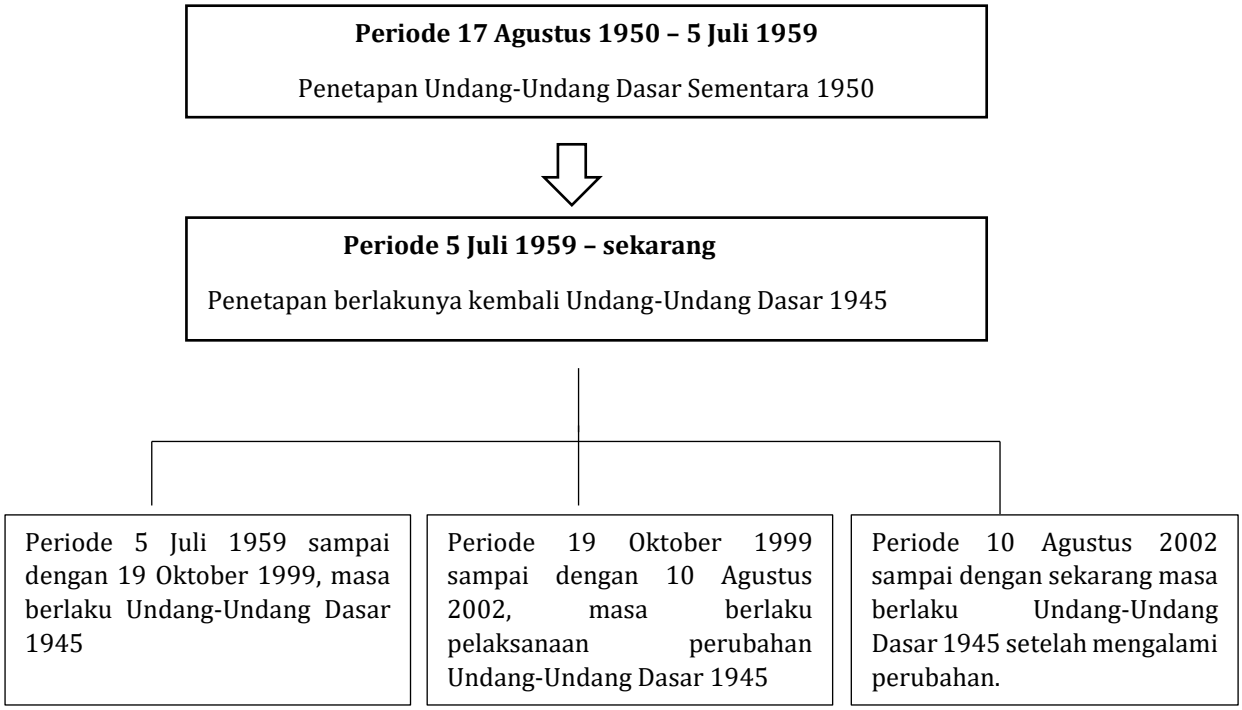
a. UUD NRI 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hierarki sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa Indonesia diwujudkan dalam bentuk UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang berkonsekuensi bahwa UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi, konstitusi menjadi sumber hukum dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.[52] Semua peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.[53] Dengan urgensi tersebut, kiranya untuk menggambarkan eksistensi budaya Indonesia maka akan diuraikan eksistensi budaya sebagai klausul yang ada dalam konstitusi-konstitusi di Indonesia. Pengaturan budaya dalam konstitusi, negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan Indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan identitas bangsa.[54] Adapun perkembangan konstitusi di Indonesia secara pendekatan histori adalah sebagai berikut:

Bagan 1.
Perkembangan Konstitusi di Indonesia



[52] Dina Rahmasari, Putri Balqis Salsabila, and TsabbitaAhmilul Husna, "Menemukenali Perwujudan Konstitusi Hijau Yang Bercorak Antroposentrisme Dan Penerapan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 2 (2023): 27.
[53] Aceng Muhammad Mahfud Ma'ruf and Hayatul Khairul Rahmat, "Pancasila Dalam Konteks Kenegaraan Republik Indonesia:Sebuah Kerangka Konseptual," *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 1, no. 2 (2023): 64.
[54] Saufa Ata Taqiyya, "Landasan Hukum Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Indonesia," *Hukum Online*, 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-perkembangan-kebudayaan-masyarakat-indonesia-lt62346e71a6d2e/.



Sumber : disusun oleh penulis (2025)

Lebih lanjut, mengenai pengaturan budaya dalam konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949

Pada periode ini berlaku Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).[55] Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), kemudian disahkan oleh (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.[56] Adapun dalam UUD 1945, ketentuan mengenai budaya secara ekplisit diatur dalam Pasal 32 UUD 1945, sebagai berikut:

> **Pasal 32 UUD 1945:** "*Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".*
>
> **Penjelasan Pasal 32 UUD 1945:** "*Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerahdaerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat*

[55] Nurhaliza N, Retno Dwi Anjani, and Vina Mardiana, "Sejarah Singkat Undang-Undang Dasar Sebagai Konstitusi Negara," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2024): 186–87.
[56] M.Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia* 2, no. 3 (2013): 121.

memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusian bangsa Indonesia".

2. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950

Pada periode ini berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).[57] Tahun 1949 terdapat perubahan konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan menjadi negara Serikat (federal), yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerja sama secara efektif, atau dengan kata lain negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian.[58] Adapun dengan berlakunya UUD RIS, pengaturan mengenai budaya dapat ditemukan dalam:

> **Pasal 38 UUD RIS:** "*Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan. Dengan mendjundjung asas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan".*

Selain, ketentuan yang eksplisit mengatur tentang budaya tersebut, dalam UUD RIS, terkait kebudayaan juga termuat dalam beberapa pasal sebagai berikut:

> **Pasal 144 Konstitusi RIS:** " *(1) Perkara perdata dan perkara hukuman perdata, semata-mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan2 jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang, termasuk dalamnja hakim daerah Swapradja, hakim adat dan hakim agama".*
>
> **Pasal 145 Konstitusi RIS: "***(2) Asas ini hanja berlaku terhadap pengadilan Swapradja dan pengadilan adat, sekadar telah diatur tjara meminta pertimbangan kepada hakim jang ditundjuk dengan undang-undang".*
>
> **Pasal 146 UUD RIS:** *"(1) Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan2nja dan dalam perkara hukuman harus menjebut aturan2 undang-undang dan aturan2 hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu".*

3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).[59] Konstitusi RIS tidak berumur panjang, hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke Negara

---

[57] Cecep Cahya Supena, "Tinjauan Historis Tentang Pelaksanaan Dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" 6, no. 4 (2020): 690–91.

[58] Dery Hendryan and Andriansyah Kartadinata, "Perkembangan Dan Perubahan Konstitusi Indonesia," *Viva Themis* 8, no. 1 (2025), https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3857.

[59] Leliya, Saiful Ansori, and Siti Maghfiroh, "Indonesian State Law in Its Historical Perspective and Development," *Pena Justisia* 23, no. 1 (2024), https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4143.

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[60] Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950.[61] Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat.[62] Ketentuan Negara Kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan.

Adapun dalam UUDS 1950, ketentuan mengenai budaya secara ekplisit diatur dalam UUDS 1950, sebagai berikut:

> **Pasal 40 UUDS 1950:** "*Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan".*
>
> **Pasal 104 UUDS 1950:** *"(2) Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturanaturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu".*

4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang

Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, yang termasuk dalam budaya meliputi kebudayaan nasional Indonesia yang harus dimajukan oleh negara di tengah peradaban dunia, serta nilai-nilai budaya yang dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat, dimana negara menjamin kebebasan masyarakat untuk melakukannya. Sejatinya, UUD NRI 1945 tidak memberikan definisi rinci tentang apa saja yang termasuk dalam budaya, namun memberikan kerangka umum untuk pemajuan dan pelestarian kebudayaan nasional Indonesia. Ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai budaya dapat diamati dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Amandemen Konstitusi terkait Pengaturan Budaya

Amandemen	Pengaturan	Bunyi
Perubahan kedua	Pasal 18B	*"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan*

[60] Fakhrian Yudiansyah et al., "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024), https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.273.
[61] *Ibid.*
[62] Ernawati Huroiroh et al., "Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Sosio Yustisia* 2, no. 1 (2022), https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.149.

		masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".
Perubahan Kedua	Pasal 28C ayat (1)	*"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".*
Perubahan Kedua	Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945	*"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".*
Perubahan Keempat	Pasal 32 UUD 1945	*(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.* *(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.*

Sumber : diolah penulis (2025)

UUD 1945 memiliki peran sebagai dasar untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri dan persatuan bangsa. Dengan adanya klausul-klausul ini dalam konstitusi, eksistensi budaya tidak hanya diakui tetapi juga dilindungi dan dipromosikan sebagai bagian integral dari identitas dan pembangunan nasional Indonesia. Selain itu, sejatinya budaya diatur dalam konstitusi Indonesia karena beberapa alasan penting:

1. Melindungi identitas bangsa: Berdasarkan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Ini menunjukkan pentingnya melindungi keragaman budaya sebagai bagian dari identitas nasional.
2. Memajukan kebudayaan nasional: Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Ini menjadi landasan hukum bagi upaya pengembangan dan pelestarian budaya.
3. Menjamin kebebasan budaya: Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 juga menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
4. Melindungi bahasa daerah: Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
5. Memperkuat persatuan dan kesatuan: Pengaturan budaya dalam konstitusi bertujuan untuk memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Mendorong pembangunan nasional: Pengaturan budaya dalam konstitusi menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional, yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Adapun perkembangan kebudayaan di Indonesia juga turut didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya (selanjutnya disebut UU 5/2017). Berdasarkan poin menimbang UU 5/2017 Pembentukan undang-undang ini didasari atas:

a. upaya Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945;
b. bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
c. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Lebih lanjut, tujuan pemajuan kebudayaan menurut Pasal 4 UU 5/2017, adalah untuk: "*a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; b. memperkaya keberagaman budaya; c. memperteguh jati diri bangsa; d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; e. mencerdaskan kehidupan bangsa; f. meningkatkan citra bangsa; g. mewujudkan masyarakat madani; h. meningkatkan kesejahteraan rakyat; i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia*". Kebudayaan nasional tentunya berkaitan erat dengan masyarakat Indonesia, dan eksistensi kebudayaan juga diakui sebagaimana dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan misalnya UU 5/2017.

Setelah mengidentifikasi, tergambarkan bahwa sejak awal merdeka dan memiliki konstitusi formal pertama kali, klausul dan pengaturan terkait budaya tidak pernah dihilangkan dari konstitusi. Sehingga, tampak kepekaan pembentuk konstitusi terhadap klausul budaya sudah cuckup baik. Namun berangkat dari persoalan yang telah dihantarkan pada latar belakang, proses degradasi budaya akibat modernisme dan dampak globalisasi harus dapat dicegah melalui mekanisme konstitusional. Dalam poin ini, konteks perbaikan adalah dengan menyempurnakan pengaturan dalam tingkat konstitusi. Sebagaimana adagium hukum *het recht hink achter de feiten aan* yang memiliki kedalaman makna bahwa hukum akan selalu tertinggal dengan perkembangan zaman.[63] Sebelum membahas lebih lanjut, berikut adalah beberapa celah pengaturan budaya dalam konstitusi Indonesia:

a. Definisi budaya yang terbatas. Pasal 32 UUD NRI 1945 tidak memberikan definisi yang komprehensif tentang apa yang termasuk dalam "budaya". Hal ini dapat

[63] Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Kencana, 2021).

menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda dan berpotensi mengabaikan aspek-aspek budaya tertentu.

b. Tidak diatur mengenai perlindungan hukum spesifik terkait kebudayaan. Meskipun UUD NRI 1945 menyebutkan tentang pemajuan kebudayaan, tidak ada ketentuan spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap warisan budaya benda dan tak benda.
c. Keterbatasan dalam pengaturan hak kekayaan intelektual budaya. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai hak kekayaan intelektual terkait pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam UUD 1945.
d. Kurangnya mekanisme pelestarian budaya. UUD NRI 1945 tidak merinci mekanisme konkret untuk pelestarian dan pengembangan budaya, yang dapat menyebabkan implementasi yang tidak efektif.
e. Ketidakjelasan pembagian wewenang. Tidak ada penjelasan rinci tentang pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pemajuan kebudayaan.
f. Minimnya pengaturan tentang pendanaan. Tidak ada ketentuan khusus mengenai alokasi anggaran untuk pemajuan kebudayaan dalam UUD 1945.
g. Kurangnya perlindungan terhadap masyarakat adat. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, tidak ada pengaturan spesifik tentang perlindungan budaya mereka.

Perlu dicatat bahwa beberapa kekurangan ini telah coba diatasi melalui peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun, karena UUD 1945 merupakan hukum tertinggi, penguatan pengaturan di tingkat konstitusi tetap diperlukan untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi perlindungan dan pengembangan budaya di Indonesia. Ini berangkat dari gambaran teoritik yang sudah kami paparkan di awal, bahwa aturan hukum tertinggi apabila mengatur dengan lebih baik, maka akan mempengaruhi aspek pengaturan peraturan di bawahnya, serta mempengaruhi bagaimana putusan peradilan menyikapi suatu kasus yang berkaitan dengan budaya.

Sebagai identitas konstitusional, ketentuan pengaturan terhadap budaya juga perlu, bahkan harus, lebih diprioritaskan baik secara implisit maupun eksplisit. Sebab, identitas konstitusional memang cenderung akan memberikan pengaruh lebih dari segi penegakan.[64] Sekalipun putusan peradilan konstitusi dalam *judicial review* yang mempraktikkan penafsiran konstitusi maupun kebiasaan ketatanegaraan sebagai kategori konstitusi non formal[65] dapat mengakomodasi pengaturan budaya yang lebih

---

[64] Christophe MAES, *The Notion of Constitutional Identity and Its Role in European Integration*; Raisz, *International Law From a Central European Perspective*.

[65] Lihat pandangan beberapa tulisan berikut terkait konstitusi formal, ajudikasi konstitusional, dan konvensi konstitusional yang mengkategoriasi konstitusi dalam praksis ketatanegaraan: Zainal Arifin Mochtar, "Inkonstitusionalitas Perppu Cipta Kerja," *Media Indonesia* (blog), 2023, https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/549640/inkonstitusionalitas-perppu-cipta-kerja; Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, Dan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014); Fajar Laksono Soeroso, "Linieritas Legislasi Dan Ajudikasi Konstitusional Dalam Penegakan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis Terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015).

baik, namun dalam segi penegakannya tidak akan memberikan pengaruh sebaik apabila itu memang diatur dalam konstitusi formal secara eksplisit. Amandemen konstitusi merupakan momentum yang tepat untuk mengupayakan pengaturan yang lebih baik. Untuk memberikan solusi konstitusional ke depan dalam mengatasi degradasi kebudayaan lokal dan nasional, kami menghadirkan beberapa opsi sebagai materi muatan yang perlu dikuatkan antara lain:

1. **Perincian:**
    a. Perlu dimasukkan definisi kebudayaan yang lebih rinci dan komprehensif dalam UUD 1945, mencakup aspek-aspek seperti adat istiadat, seni, bahasa, pengetahuan tradisional, dan kearifan lokal.
    b. Penguatan Pasal 32 UUD 1945 dengan menambahkan ketentuan spesifik tentang perlindungan hukum terhadap warisan budaya benda dan tak benda.
    c. Memasukkan ketentuan khusus mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terkait pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
    d. Memperkuat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan menambahkan ketentuan spesifik tentang perlindungan budaya masyarakat hukum adat.
    e. Memperkuat Pasal 31 UUD 1945 dengan menambahkan ketentuan tentang integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan nasional.
    f. Mencantumkan ketentuan yang menjamin dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya.
2. **Kewajiban negara:**
    a. Mencantumkan kewajiban negara untuk menyusun dan melaksanakan mekanisme konkret dalam pelestarian dan pengembangan budaya.
    b. Memperjelas pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pemajuan kebudayaan.
    c. Memasukkan ketentuan tentang kewajiban bagi negara untuk memberikan alokasi anggaran khusus untuk pemajuan kebudayaan, seperti yang telah dilakukan untuk pendidikan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
3. **Pemberdayaan fungsi parlemen:** Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislasi yang memiliki fungsi pada sektor kedaerahan perlu ditambah meliputi pula sektor kebudayaan, mengingat ini melekat dengan fungsi kedaerahan yang dimiliki oleh DPD.
4. **Materi pembatasan HAM:** Pasal 28J UUD NRI 1945 telah memberikan beberapa musabab dapat dilakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang. Sebagai identitas konstitusional, penting untuk menambahkan kebudayaan sebagai aspek pembatasan HAM.

KESIMPULAN

Diskursus budaya, modernisasi, serta globalisasi menuju kepada persoalan degradasi keragaman budaya dan potensi punahnya banyak budaya. Konstitusi dapat menjadi alat untuk mencegah sekaligus merekayasa pengaturan agar secara normatif hadir solusi yang ideal, di antara sebabnya apabila kebudayaan memang terbukti dikonsepkan dalam suatu negara sebagai identitas konstitusional. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa kebudayaan dapat menjadi identitas konstitusional berupa nilai-nilai tertentu yang melekat pada teks konstitusi. Ini terbukti dengan beberapa konstitusi formal di dunia yang mengakomodir dan mengakui hadirnya kebudayaan sebagai bagian penting di dalamnya dan menggambarkan ciri-cirinya sebagai identitas. Dengan kedudukan konseptual-filosofis sebagai identitas konstitusional, seharusnya ia menjadi aspek yang pokok dan ditegakkan secara lebih ketat. Di Indonesia, berangakat dari aspek kesejarahan, kesepakatan politik, dan karakter dalam konstitusi, tergambarkan bahwa budaya dapat dikategorikan sebagai identitas konstitusional. Tiga konstitusi formal yang pernah berlaku, berserta perubahannya, selalu mengakomodir materi muatan terkait kebudayaan dalam variasi penyebutan seperti hak, kewajiban bagi pemerintah, dan pengakuan akan adanya kebudayaan nasional. Terakhir, dalam upaya untuk mencegah degradasi budaya asli Indonesia, secara normatif cukup dilakukan mitigasi melalui taraf undang-undang dan penegakannya oleh Mahkamah Konstitusi yang saat ini telah dilakukan. Sekalipun demikian, perubahan konstitusi ke depan memerlukan penyempurnaan untuk pelindungan budaya pada beberapa aspek, di antara contohnya adalah perincian pengaturan klausul budaya dalam konstitusi, kewajiban bagi negara, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Daerah, dan alasan yang dapat membatasi Hak Asasi Manusia.

REFERENSI

Agus Supratikno. “Reinforcing Indonesian National Identity Based on Inclusiveness of Pancasila as a Way to Deal with the Identity Politics in Indonesia.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 6 (2022).

Ahmed, Nabil, Guigone Camus, Hervé Raimana Lallemant-Moe, and Lisa Rave. “Cultural Loss and Climate Change – A New Field of Research.” DR-NTU (Data), 2023. https://doi.org/10.21979/N9/IZMNOV.

Aidul Fitriciada Azhari. “Ideologi Dan Konstitusi Dalam Perkembangan Negara-Negara Bangsa Indonesia: Rekonstruksi Tradisi, Dekolonialisasi, Dan Demokratisasi.” *Media Hukum* 20, no. 1 (2013).

———. “Mekanisme Checks and Balances Dan Budaya.” In *Bunga Rampai Komisi Yudisial*, tushnet. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.

Antara. “11 Indigenous Languages Declared Extinct: Education Ministry A.” *Jakarta Globe* (blog), 2024. https://jakartaglobe.id/news/11-indigenous-languages-declared-extinct-education-ministry.

Arief Hidayat. “Indonesia Negara Berketuhanan.” n.d. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_14_02_arief_hidayat.pdf.

Asnawi Mubarok, Absori, Harun, and Sheela Jayabalan. “The Relationship Of State Law And Customary Law: Reinforcement And Protection Of Customary Law In Constitutional Court Judgment.” *Jurnal Jurisprudence*, December 18, 2023, 188–204. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.2914.

Bogoliubova, Natalia, and Julia Nikolaeva. “Cultural Ties In A Globalization World: The Threats And Challenges,” May 15, 2017. https://doi.org/10.5281/ZENODO.581758.

Budi Annisa Sidi. “Unity and Diversity: National Identity and Multiculturalism in Indonesia.” University of Otgo, 2020.

Christophe MAES. *The Notion of Constitutional Identity and Its Role in European Integration*. Brussels: Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies, 2024.

Erwin Chremensky. “The Deconstitutionalization of Education.” *Loyola University Chicago Law Journal* 36, no. 1 (2004).

Fajar Laksono Soeroso. “Linieritas Legislasi Dan Ajudikasi Konstitusional Dalam Penegakan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis Terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015).

Firmansyah, Diki Saputra, Fira Kumala, and Yoga Firmansyah. “Alasan Dilakukannya 4 Kali Amandemen UUD 1945 Tujuan Dan Sejarah Perkembangan.” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2021): 5.

Franko Johner, Indra Perwira, and Susi Dwi Harijanti. “Negara Bangsa Pos-Kolonial Sebagai Basis Dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018).

Gart Jeffrey Jacobsohn. “Constitutional Identity.” *The Review of Politics* 68 (2006).

Gross-Gołacka, Elwira, and Anna Martyniuk. “Globalisation and the Challenges of Managing Cultural Diversity: From Multiculturalism to Interculturalism.” *Journal of Intercultural Management* 16, no. 3 (September 1, 2024): 37–57. https://doi.org/10.2478/joim-2024-0010.

Hendryan, Dery, and Andriansyah Kartadinata. “Perkembangan Dan Perubahan Konstitusi Indonesia.” *Viva Themis* 8, no. 1 (2025). https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3857.

Huroiroh, Ernawati, Sakdi, Sulaiman, and Mochammad Fauzi. “Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Sosio Yustisia* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.149.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

———. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

KC Wheare. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Laica Marzuki. “Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011).

Leliya, Saiful Ansori, and Siti Maghfiroh. “Indonesian State Law in Its Historical Perspective and Development.” *Pena Justisia* 23, no. 1 (2024). https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4143.

M Hafiz Ramdhani Barus and Irwansyah. “Pengamanan Atas Identitas Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024).

Mark Tushnet. “The Inevitable Globalization of Constitutional Law.” *Harvard Public Law Working Paper* 09, no. 06 (2008).

Ma’ruf, Aceng Muhammad Mahfud, and Hayatul Khairul Rahmat. “Pancasila Dalam Konteks Kenegaraan Republik Indonesia:Sebuah Kerangka Konseptual.” *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 1, no. 2 (2023): 64.

Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka, 2009.

Moh Rizaldi and Rizky Malinto Ramadani. "Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi?" *Proceedings Conference National Conference on Law Studies (NCOLS)* 2, no. 1 (2020).

Mohammad Fajrul Falaakh. *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, Dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

N, Nurhaliza, Retno Dwi Anjani, and Vina Mardiana. "Sejarah Singkat Undang-Undang Dasar Sebagai Konstitusi Negara." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2024): 186–87.

Nur Rahman, Irfan, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, and Nallom Kurniawan. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (May 20, 2016): 767. https://doi.org/10.31078/jk856.

Nur Rohim Yunus. "Gagasan Musyawarah Sebagai Identitas Konstitusi Indonesia." *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019).

Nurul Maulinawaty Nadya Dewi. "Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia (The Protection of Constitutional Identity in Indonesia)." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 1 (2020).

Rahim, Abd. Wahab A. "Dominasi Budaya Populer: Penguatan Nilai-Nilai Budaya Melalui Pemanfaatan Media Sosial." *Journal of Religious and Social Science* 18, no. 4 (2024): 2354–65.

Rahmasari, Dina, Putri Balqis Salsabila, and TsabbitaAhmilul Husna. "Menemukenali Perwujudan Konstitusi Hijau Yang Bercorak Antroposentrisme Dan Penerapan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 2 (2023): 27.

Raisz, Anikó, ed. *International Law From a Central European Perspective*. Vol. 9. Legal Studies on Central Europe. Central European Academic Publishing, 2022. https://doi.org/10.54171/2022.ar.ilfcec.

Ranggy Putranda Mahardika and Hananto Widodo. "Analisis Konsepsi Bentuk Negara Kesaturan Republik Indonesia Sebagai Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (Unamendable Provisions) Di Dalam Klausul Pasal 37 UUD 1945 Sebagai Identitas Konstitusi." *Novum Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2024).

Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana, 2021.

Resha Roshana Putri. "Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945." *Padjajaran Law Review* 5, no. 1 (2017).

Rosenfeld, Michel. "Constitutional Identity." In *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, by Michel Rosenfeld, edited by Michel Rosenfeld and András Sajó. Oxford University Press, 2012. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.013.0037.

Santoso, M.Agus. "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia." *Yustisia* 2, no. 3 (2013): 121.

Soeprapto, Sri and Jirzanah. *Pengembangan Kebudayaan Sebagai Identitas Bangsa*. Jurnal Filsafat, 1996.

"State of The World's Indigenous Peoples." United Nations Department of Public Information, 2010.

Sulubara, Seri Mughni, T.Saiful Basri, and Iskandar. "Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 4 (2024). https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2653.

Supena, Cecep Cahya. “Tinjauan Historis Tentang Pelaksanaan Dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 6, no. 4 (2020): 690–91.

Taqiyya, Saufa Ata. “Landasan Hukum Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Indonesia.” *Hukum Online*, 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-perkembangan-kebudayaan-masyarakat-indonesia-lt62346e71a6d2e/.

Tiru Dame R Sagala. “Indonesian National Identity.” *Journal of Social, Justice, and Policy* 1, no. 1 (2022).

Triwahyuningsih, Siti Zuliyah, Uni Tsulasi Putri, Zulfiani Ayu Astutik, and Hanifah Febriani. “Constitutional Perspective of Human Rights Values in Local Wisdom in the Special Region of Yogyakarta (Study of Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XIV/2016).” *Jurnal Jurisprudence* 13, no. 1 (2023).

Vakhtang Surguladze, Natalya Frolova, Vladislav Panchenko, Andrey Gruzdev, and Ivan Makarchuk. “Constitutional Identity in the Modern States Practice.” *Proceedings of the XIV European-Asian Law Congress “The Value of Law” (EAC-LAW 2020)*, 2020.

Widiarto, Aan Eko. “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 34. https://doi.org/10.31078/jk1612.

Yance Arizona. *Konstitusionalisme Agraria*. Sleman: STPN Press, 2014.

Yudiansyah, Fakhrian, Eneng Rika, Laela Sari, Tegar Wahyu Hidayat, and Yeli Yana. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024). https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.273.

Zainal Arifin Mochtar. “Inkonstitusionalitas Perppu Cipta Kerja.” *Media Indonesia* (blog), 2023. https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/549640/inkonstitusionalitas-perppu-cipta-kerja.

Zhang, Hanzhi, and Ruth Mace. “Cultural Extinction in Evolutionary Perspective.” *Evolutionary Human Sciences* 3 (2021): e30. https://doi.org/10.1017/ehs.2021.25.

Genealogi "Pencurian" Sejarah KRT Sumodiningrat dan Tantangan Penyelamatan Kedaulatan Sejarah Bangsa Indonesia

Oleh: M. Yaser Arafat
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: arafatnisti@yahoo.com

KRT Sumodiningrat (1760-1812) merupakan tokoh Kraton Yogyakarta. Ia tercatat sebagai salah-satu korban Perang Sepehi (1812). Ayahnya adalah KRT Jayaningrat II. Sedangkan ibunya adalah Raden Ayu Jayaningrat, anak Sultan HB I. Makam KRT Sumodiningrat berada di Jejeran, Wonokromo, Bantul, Yogyakarta. Belum lama ini, muncul klaim yang menyatakan bahwa KRT Sumodiningrat adalah seorang keturunan Yaman yang bernama Hasan Bin Yahya. Tidak hanya itu, makam tokoh ini juga diklaim berada di Lamper Kidul, Semarang, Jawa Tengah, bukan di Jejeran. Sedangkan makam atas nama KRT Sumodiningrat yang berada di Jejeran, Bantul, itu, diklaim sebagai makam Ahmad Bin Yahya, adik Hasan. Klaim ini telah menyebar secara massif di berbagai wahana. Baik media tulis berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dan terutama media sosial seperti YouTube. Artikel ini akan mengkaji genealogi klaim tersebut dalam aspek praksis penjagaan kedaulatan sejarah bangsa Indonesia. Perspektif genealogi (*genealogy*) dipakai dalam pengertian ilmu sejarah dan antropologi tradisional, yaitu upaya untuk mengkaji evolusi dan jaringan klaim sejarah di atas dari sekelompok orang dalam lingkup diakronik (kesinambungan waktu) dan sinkronik (proses sosial). Selain itu, genealogi juga dipakai dalam kerangka analisis Foucauldian, yaitu sebagai upaya untuk menguak wacana, kuasa, retakan, dan jejaring klaim. Artikel ini menggunakan metode penelaahan berbagai literatur dan *netnography*, yaitu upaya penelusuran perkembangan diskursus tertentu yang terjadi di dunia maya. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa diskursus klaim sejarah atas KRT Sumodiningrat mulai muncul sejak tahun 2005. Selepas itu, klaim ini semakin meluas ke berbagai media historis seperti buku, majalah, artikel ilmiah mencakup jurnal dan tesis magister, hingga yang paling massif adalah siaran lewat YouTube. Klaim ini cenderung menguat dan dipercaya oleh kalangan religius karena ia muncul dari seorang tokoh religus-nasional, Muhammad Luthfi Bin Yahya dan jejaringnya. Ditemukan pula sejumlah aktor akademisi yang terlibat dalam penegakan klaim ini. Selain itu, bahwa klaim atas sejarah KRT Sumodiningrat tersebut merupakan sebuah upaya "pencurian" sejarah yang dilakukan secara tertib, halus, dan struktural. Artikel ini merekomendasikan agar pemerintah DI Yogyakarta, pemerintah Republik Indonesia, para ahli sejarah, dan budayawan segera bergerak melakukan upaya serius untuk menjaga sejarah KRT Sumodiningrat dalam rangka penegakan kedaulatan sejarah bangsa. Sebab peristiwa kematian KRT Sumodiningrat dalam Perang Sepehi tidak tercatat hanya sebagai peristiwa regional dan nasional, melainkan juga peristiwa internasional.

Kata kunci: KRT Sumodiningrat, Genealogi, Klaim Sejarah, Luthfi Bin Yahya

A. Latar Belakang

Sabtu, 20 Juni 1812, pagi hari, Kraton Yogyakarta jatuh. Pasukan Sepoy yang terdiri dari gabungan orang-orang India, Legiun Mangkunegaran, dan tentara Inggris memporak-porandakan istana yang lebih dari setengah abad sebelumnya dibangun oleh Sultan HB I. Sejarah mencatat peristiwa ini dengan istilah Perang Sepehi atau Geger Sepehi. Saat itu Pulau Jawa ada di bawah pemerintahan penjajah Inggris. Gubernur Jawa periode 1811-1816, Thomas Stamford Raffles, sangat gembira demi mendapat laporan bahwa ambisinya untuk menguasai seluruh Jawa telah tertunaikan.

Satu peristiwa penting yang hingga hari ini dikenang oleh masyarakat Yogyakarta adalah kematian Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Sumodiningrat. Saat Pasukan Sepoy menyerbu Yogyakarta, ia ditugaskan oleh Sultan HB II untuk menjadi panglima utama. Sosok inilah yang dijuluki *Singobarong* oleh masyarakat Yogyakarta sebagaimana terabadikan di dalam *Babad Ngayogyakarta* (1876) karya Pangeran Suryanegara dan Raden Adipati Danureja V. Dalam sejarah Kraton Yogyakarta, ia pernah menjabat sebagai *Bupati Jaba* kedua pada 1794 dan *Wedana Jero* pertama pada 1797 (Carey 2008, 188; 1980, 191). Sehari-hari ia juga bertindak sebagai penasehat militer utama Kraton Yogyakarta (Qomar 2023, 248).

KRT Sumodiningrat dilahirkan sekira 1760-an di wilayah Remame, Kedu Selatan. Ia merupakan anak KRT Jayaningrat, bupati Kedu Selatan. Ayahnya menikah dengan Raden Ayu Jayaningrat, anak keempat Sultan HB I (Dajapertama dan Dirdjasoebrata t.t., 13; Mandoyokusumo 1988, 10). Perkawinan ini membuahkan beberapa orang anak, di antaranya adalah KRT Sumodiningrat (*Serat Salasilah Para Loeloehoer Ing Kadanoeredjan* 1899, 207). Dengan demikian, ia adalah cucu Sultan HB I.

Nasab KRT Sumodiningrat terhubung kepada Kyai Ageng Penjawi, salah satu dari tiga tokoh pembuka Kerajaan Mataram Islam di selatan Jawa pada permulaan abad ke-16. Diurutkan dari atas, nasab KRT Sumodiningrat adalah sebagai berikut: Kyai Ageng Ngerang I → Kyai Ageng Ngerang II (Kyai Bodo Pajang) → Kyai Ageng Ngerang III (Ki Buyut Pati) → Kyai Ageng Panjawi (Kyai Ageng Pati) → Adipati Pragolapati I → Adipati Pragolapati II → Kyai Wonokriyo (Kyai Kriyan) → Demang Puspatruna/Demang Jawinata/Tumenggung Gajah Mada/Tumenggung Gajah Gede → Tumenggung Jawinata/Tumenggung Gajah Cilik → Adipati Jayaningrat/Gajah Tlena → Tumenggung Jayaningrat Manten/KRT Jayaningrat → KRT Sumodiningrat (*Serat Salasilah Para Loeloehoer Ing Kadanoeredjan* 1899, 163–64 & 201–8).

KRT Sumodiningrat wafat pada pagi hari terakhir Perang Sepehi, 20 Juni 1812. Peristiwa kewafatan ini diceritakan di dalam salah satu sumber primer sejarah, *Babad Sepehi* di Pupuh III, *Pada* I-VII. *Babad Sepehi* adalah karya sejarah yang ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat, anak Sultan HB II, yang memang langsung berada di tengah-tengah pertempuran (Mangkudiningrat; and Irawan 2018, 65–66). Karya ini mulai ditulis pada Selasa, 20 Rabi'ul Awal 1228 H tahun Ehe atau bertepatan dengan 23 Maret 1813 atau hanya kurang dari setahun setelah Perang Sepehi.

Babad Panular atau disebut juga *Babad Ngengreng* juga menceritakan kewafatan KRT Sumodiningrat. *Babad Panular* selesai ditulis pada 16 Mei 1816 atau sekira 4 tahun setelah Perang Sepehi. Pangeran Arya Panular (1771-1826) adalah putra Sultan HB I yang menjadi penasehat sekaligus mertua Sultan HB III. Ia menuliskan kesaksiannya di tengah-tengah

peristiwa Perang Sepehi. Bahkan di dalam peristiwa itu ia termasuk tokoh yang menyelamatkan Adipati Anom atau RM Surojo, yang kelak menjadi Sultan HB III. Pangeran Arya Panular menceritakan kewafatan KRT Sumodiningrat di dalam tembang ber*metrum Asmaradhana, Pupuh XI, Pada* atau bait ke-21 sampai ke-33 (Arya Panular 2017, 40–41).

Kematian KRT Sumodiningrat juga dikabarkan oleh sebuah koran kolonial yang terbit sekira 14 hari setelah Geger Sepehi, *Java Government Gazette* Vol. 1, No. 19, 4 Juli 1812. Nama sang panglima ini dieja dengan "Toomogong Semood Deningrat" (Arafat 2023a, 94). Keterangan tentang kewafatan KRT Sumodiningrat ini juga disaksikan langsung oleh Major William Thorn, Deputi Quarter-Master General Angkatan Darat Inggris yang ikut dalam ekspedisi pasukan British-Indian dalam penaklukan atas Jawa. Thorn, dalam catatan hariannya yang diterbitkan pada 1815 atau tiga tahun setelah Perang Sepehi, menceritakan kesaksian atas kewafatan KRT Sumodiningrat dalam lisan Inggris, "Toomoogong Senoot Diningrat" (Thorn 1815, 187).

Jenazah KRT Sumodiningrat dikubur pada pukul 10 malam. Para pengikutnya mengambil jenazahnya untuk dikuburkan di desa Jejeran (Arya Panular 2017, 41; *Serat Salasilah Para Loeloehoer Ing Kadanoeredjan* 1899, 207). Desa ini secara administratif, masuk dalam wilayah Wonokromo, Plered, Bantul, Yogyakarta. Wilayah ini adalah pemukiman religius yang didirikan oleh Kyai Jejer, leluhur KRT Sumodiningrat, sekira hampir 500 tahun lalu. Sepeninggal Kyai Jejer, wilayah Jejeran dirawat dan dijaga oleh Kyai Kriyan yang juga merupakan leluhur KRT Sumodiningrat.

Sejarah dan identitas KRT Sumodiningrat yang telah sangat jelas itu, sayangnya, dalam lebih dari satu dekade ini mengalami pengklaiman. Oleh Habib Luthfi Bin Yahya (HLY) dan Majelis Taklim Darul Hasyimi (MTDH), KRT Sumodiningrat diklaim sebagai seorang keturunan Arab-Yaman bernama Hasan bin Thoha Bin Yahya (Hasan). Makam KRT Sumodiningrat juga diklaim berada di Lamper Kidul, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan makam KRT Sumodiningrat yang berada di Jejeran, Bantul, diklaim sebagai makam Ahmad Bin Yahya (Ahmad), adik Hasan.

Klaim ini telah dibantah secara ilmiah oleh Arafat (2023). Paparan data perihal identitas KRT Sumodiningrat diutarakan oleh Arafat dengan sangat gamblang. Hanya saja, ada satu hal yang tidak dicakup oleh artikel ilmiah Arafat, yaitu genealogi klaim dan pengklaiman atas KRT Sumodiningrat itu. Artikel ini akan bekerja dengan perangkat analisis genealogis. Baik dalam pengertian ilmu sejarah, antropologi tradisional, dan analisis Foucauldian.

Pertama, kemunculan dan evolusi klaim dibaca dalam lingkup diakronik (kesinambungan waktu) dan sinkronik (proses sosial). Kedua, klaim atas KRT Sumodiningrat telah menjadi sejarah dalam perjalanan Indonesia. Dalam bahasa Foucault, sejarah adalah

sejarah hari ini (*history of the present*) (Foucault 1975, 30–31). Ia diceritakan saat ini dan di sini. Klaim sejarah terhadap KRT Sumodiningrat tidak tiba-tiba lahir di ruang publik. Ia dibentuk oleh serangkaian praktik (*practices*), lembaga (*institutions*), dan struktur (*structures*) (Taylor 2014, 87 & 112). Sebagai produsen kekuasaan, klaim itu beroperasi melalui manipulasi ideologis terhadap pikiran dan mencuci otak orang-orang agar dipercayai sebagai kebenaran.

Klaim ini, dengan demikian, merupa sebagai sesuatu yang terbentuk dalam berbagai strategi kekuasaan (*power*). Ia lantas berkembang menjadi objek keasyikan (*preoccupation*), perhatian (*concern*), perdebatan (*debate*), dan teguran (*admonition*). Karena itu, klaim sejarah ini dilihat bukan pada redaksi semantik atau sintaktiknya sebagai struktur formal sebuah wacana (*discourse*), melainkan pada apa yang dikatakan dan dipikirkan (*what is said and thought*) (Gutting 2005, 36).

Mengapa demikian? Sebab sebagai wacana, klaim tidak dalam kondisi yang stabil, melainkan selalu dalam kondisi kemungkinan (*condition of possibility*) (Foucault 2005, xxii). Karena itu, genealogi bertugas untuk 'mengidentifikasi kecelakaan-kecelakaan, penyimpangan-penyimpangan kecil –atau sebaliknya, pembalikan total– kesalahan-kesalahan, penilaian-penilaian yang salah, dan perhitungan-perhitungan yang salah yang melahirkan hal-hal yang terus ada dan dianggap memiliki nilai (EW II, 374). Oleh karena itu, genealogi menekankan upaya untuk melihat guncangan dan kejutan sejarah atau kejadian-kejadian yang terjadi secara tidak terduga dalam rangka "mempertahankan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ketepatan penyebarannya" (LCP, 146).

Artikel ini dikerjakan dengan menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, dan kajian Pustaka. Netnografi juga ditempuh dalam rangka penelusuran data-data di dunia maya. Sebab subjek kajian dalam artikel ini, yaitu pihak pengklaim sejarah, menggunakan strategi persebaran dan penyebaran klaimnya melalui *platform* media sosial seperti YouTube, Facebook, dan semisalnya. Otoetnografi juga dijalani di sini. Sebab saya sebagai penulis terlibat dalam upaya kritik terhadap klaim sejarah atas KRT Sumodiningrat.

B. Pembahasan dan Diskusi

1. Kronologi "Pencurian" Sejarah Sejak 2005 Sampai 2023

a. 2005: Majalah al-Kisah dan Klaim Pertama di Ruang Publik

Klaim Hasan Bin Yahya sebagai KRT Sumodiningrat di ruang publik muncul pertama kali di dalam Majalah al-Kisah Edisi 19 Th. 2-2005 M/1426 H. Sayangnya, hingga saat ini belum ditemukan bentuk fisik majalah ini. Meski demikian, isi dari pembahasan mengenai Hasan Bin Yahya terpublikasikan di website Pustaka Pejaten - Al-Habib Hasan Bin Yahya (Syekh Kramat Jati) (Majalah al-Kisah 2006). Majalah ini adalah bahan bacaan "islami" yang

dikenal sebagai media cetak yang sering menampilkan foto, kisah, dan ulasan perihal para habib baalawi. Majalah ini terbit pertama kali pada Juli 2003. Manajemennya dipimpin oleh Nuniek H. Musawa. Sedangkan pemimpin redaksinya adalah seorang pegiat literasi dari keluarga Baalawi[1] di Indonesia, Harun Musawa.

Diceritakan bahwa Hasan lahir di Cirebon dari pasangan Thoha bin Muhammad al-Qadhi bin Yahya dengan Fathimah binti Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Ihwal Hasan yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat atau Syekh Kramatjati diceritakan di dalam rubrik *Manaqib*,[2] yang berjudul Al-Habib Hasan Bin Yahya (Syekh Kramat Jati). Diceritakan di sana bahwa Hasan bin Thoha bin Yahya lebih dikenal dengan nama Syekh Kramat Jati dan Raden Tumenggung Sumodiningrat. Ia disebut sebagai *Wedono Lebet* Kerajaan dan menantu Sultan HB II. Meski demikian, tidak ada klaim tentang siapa istri Hasan di sini.

b. 2018: Klaim dari Lisan HLY di Ruang Publik dan Website MTDH

Klaim ini dipublikasikan ke ruang publik di acara Haul Hasan pada 1 Maret 2018 yang dihadiri beberapa tokoh lokal dan nasional. Walikota Semarang periode 2013-2022, Hendrar Priyadi dan Pangdam IV Diponegoro, Wuryanto, hadir dan menyampaikan kata sambutan. Akun YouTube MT Darul Hasyimi Jogja menyiarkan acara ini pada 1 Maret 2018 di tautan https://www.youtube.com/live/J-fR6A1YCbo?si=lk6kx7W7udqv4yUR. Tayangan *live streaming* acara ini hingga 23 Januari 2025 telah ditonton sebanyak 6247 kali.

Beberapa klaim yang menyelisihi sejarah diungkapkan pada saat pembacaan *manaqib* oleh Muhammadun dari Yayasan Glagahwangi. Pertama, klaim Hasan sebagai KRT Sumodiningrat. Kedua, klaim Hasan sebagai menantu Sultan HB II karena menikah dengan GKR Bendoro yang merupakan putri perkawinan sang sultan dengan *garwa padmi* (permaisuri) bernama Mas Ayu Rantamsari. Ketiga, klaim Hasan sebagai tokoh yang diamanahi jabatan *patih lebet* dan panglima besar Kraton Yogyakarta. Keempat, klaim bahwa Hasan adalah utusan khusus Sultan HB II untuk bertemu dengan Sunan Pakubuwono V dalam rangka persiapan melawan tentara Inggris pada 1810 di Wedi, Klaten. Kelima, klaim bahwa Hasan dan Sultan HB II bersama-sama menciptakan strategi perang *Capit Urang* yang dapat diterapkan diterapkan di laut dan darat.

Klaim pamungkas di acara ini berasal dari HLY. Ia menyampaikan bahwa Thaha, ayah Hasan, adalah menantu Sultan HB I. Karena Thaha berjasa dalam membebaskan Sultan HB I

---

[1] Baalawi adalah keturunan Muhammad bin Ali Baalawi, seorang keturunan Yaman. Keluarga Baalawi dikenal sebagai orang-orang yang nasabnya terhubungan dengan Husein, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bin Muhammad saw. Pada sekira 2021, Imaduddin Utsman meneliti keterputusan nasab Baalawi.

[2] *Manaqib* adalah tulisan yang berisi narasi tentang kelebihan seorang tokoh kudus. Sering pula disebut hagiografi.

dari penahanan di Penang. Lalu Thaha mengawal sang sultan hingga sampai ke Yogyakarta. Karena itu, kata HLY, Hasan juga terhitung sebagai keponakan Sultan HB II (MT Darul Hasyimi Jogja 2018a). Begini kata HLY:

> Habib Hasan bukan orang asing karena masih pernah keponakan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Dengan bakat yang luar biasa pemberani tapi bijaksana, ditarik sayid Hasan tersebut menjadi *wedono lebet* yang mengurusi, kalau sekarang mungkin paspampres yang akhirnya beliau diangkat menjadi *patih lebet* yang membawahi pasukan sandi dan akhirnya diangkat menjadi panglima besar. Wakil beliau Raden Ronggo yang telah gugur menjadi syuhada di Madiun. Tidak lama beliau setelah menyelesaikan untuk membangun kembali Ngayogyakarta bersama Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, timbul terjadi suatu kekacauan di Semarang. Maka diperintahkan Habib Hasan untuk mengatasi hal tersebut di Semarang. Lain dari pada itu membangun satu benteng yang kuat di daerah Jomblang untuk pertahanan daripada serangan atau rencana Dandles waktu itu sehingga beliau mendapat kekuasaan penuh dalam memimpin oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Dan beliau yang terakhir menetap di Semarang.

Pada 2018 ini pula, *website* www.darulhasyimijogja.org menurunkan tulisan pada 2018 berjudul "Manaqib Habib Hasan bin Thaha bin Yahya|Syaikh Kramatjati|Singobarong" ("Manaqib Habib Hasan Bin Thaha Bin Yahya|Syaikh Kramatjati|Singobarong" 2018). Di sana tertulis bahwa Hasan adalah anak Thaha Bin Yahya dan Fatimah Al-Idrus. Disebutkan pula bahwa Hasan menikah dengan GKR Bendoro atau yang lebih dikenal dengan nama Fatimah dan sering disebut dengan Kanjeng Ratu Kedaton. GKR Bendoro, dalam narasi klaim MTDH ini, adalah anak dari pernikahan Sultan HB II dengan permaisurinya, Mas Ayu Rantamsari.

c. 2019: Klaim dalam Kerja Ilmiah Siti Fatimah dan Zainul Milal Bizawie

Klaim Hasan adalah KRT Sumodiningrat masuk menjadi garapan karya ilmiah Siti Fatimah. Ia menulis tesis magister di Prodi Interdiciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), yang berjudul "Peran Habib Hasan Bin Thoha (KRT. Sumodiningrat) dalam Melestarikan Tradisi Islam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Pada Masa Sultan HB II, 1792-1819 M". Pada Jumat, 21 Juni 2019, tesis ini diujikan. Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A. bertindak sebagai Ketua Sidang sekaligus Penguji I. Jazilus Sakhok, M.A., Ph.D., dan Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag., bertugas sebagai Penguji II dan Penguji III. Tesis ini disahkan dengan nomor: B-172/Un.02/DPPs/PP.00.9/07/2019.

Otoritas yang dijadikan rujukan tesis ini adalah tokoh-tokoh kunci dalam pengklaiman atas KRT Sumodiningrat. Di antara mereka adalah HLY. Ada pula Uways Bin Yahya dan Husein Bahir Suryodipuro Bin Yahya yang masing-masing merupakan keturunan keenam dan ketujuh Hasan. Tesis ini juga diperkuat dengan wawancara penulisnya kepada Ahmad Athoillah, seorang sejarawan yang menulis tentang diaspora kaum Baalawi sebagai disertasi

doktoralnya di UGM Yogyakarta. Narasumber Fatimah lainnya adalah Sulistyo Eko Cahyono, Ketua MTDH yang ia sebut sebagai pakar sejarah Kraton Yogyakarta.

Disebutkan di tesis itu bahwa Hasan dilahirkan sekitar tahun 1765-an di Cirebon. Ayahnya adalah Thaha Bin Yahya. Ibunya adalah Fatimah Al-Idrus. Hasan menikah dengan Bendara Mas Ayu Rantamsari, putri sulung Sultan HB II dari istri resminya asal Madura, yakni Ratu Kedaton. Disebutkan pula bahwa Hasan wafat pada 1819 dan dimakamkan di sebelah pengimaman Masjid Al-Hidayah, Duku, Lamper Kidul, Semarang Selatan. Selanjutnya makam ini dikenal oleh Masyarakat setempat dengan sebutan Syekh Kramat Jati (Fatimah 2019, 33–34, 55–56). Selain itu, Hasan juga disebut sebagai tokoh yang menyempurnakan bacaan Tasbih Hadiningrat, sebuah kalimat puji-pujian yang ditulis oleh Sultan HB I.

Pada 2019 pula, terbit sebuah buku yang berjudul *Jejaring Ulama Diponegoro: Kolaborasi Santri dan Ksatria Membangun Islam Kebangsaan Awal Abad ke-19*. Buku ini ditulis oleh sejarawan Zainul Milal Bizawie. Di sana diklaim bahwa Hasan adalah KRT Sumodiningrat yang menjadi menantu Sultan HB II. Diceritakan bahwa Hasan memiliki pasukan khusus yang disebut Cipeuting. Pasukan ini berhasil menghabisi pasukan Raffles ketika menduduki Kesultanan Yogyakarta (Bizawie 2019, 212, 215).

Klaim Bizawie ini seirama dengan klaim sebelumnya. Bahwa Hasan adalah seorang yang gigih melawan penjajah. Hingga perjuangannya didengar oleh Sultan HB II yang takjub kepadanya. Akhirnya Hasan diangkat sebagai menantu Sultan HB II, dilantik menjadi Senopati Agung Mataram, dan panglima perang yang memimpin pasukan dengan jumlah mencapai 15 ribu prajurit. Pasukan itu terbagi tiga, yaitu pasukan darat, laut, dan cadangan masing-masing lima ribu orang.

Disebutkan pula bahwa Hasan bersama Raden Ronggo Prawirodirdjo, ayah Sentot Prawirodirdjo, saling bahu membahu mempertahankan wilayah Yogyakarta dari serangan tentara Belanda. Akhirnya Belanda kewalahan dan gagal menguasai Yogyakarta. Dilandasi oleh kekesalan terhadap Hasan, Belanda menyuruh orang-orang bayaran untuk menyamar sebagai Tumenggung Sumodiningrat. Sehingga banyak bermunculan orang-orang dengan nama Tumenggung Sumodiningrat, namun, palsu. Orang-orang bayaran ini ditugaskan untuk gemar mabuk-mabukan dan main judi dengan tujuan untuk menghancurkan nama baik Hasan. Terutama agar rakyat Yogyakarta membenci Hasan. Berkat kesigapannya, Hasan berhasil mengatasi upaya licik Belanda itu (Bizawie 2019, 214).

Hasan dikisahkan wafat pada 1818. Disebutkan pula bahwa Hasan adalah tokoh di balik munculnya perguruan pencak silat "Capit Ular". Sebelum wafat, Hasan menyerahkan perguruan pencak silat ini kepada putranya, Thoha di Ciledug, Cirebon, yang dikenal sebagai penyusun *Ratib Kubro*. Thoha lalu mengganti perguruan pencak silat ini dengan nama "Sipedi".

Pada tahun ini, klaim Hasan sebagai KRT Sumodiningrat juga disebarkan lewat dunia maya. Akun YouTube MT Darul Hasyimi Jogja menyiarkan *live streaming* acara haul Hasan di tautan https://www.youtube.com/live/eYYJTZb6lTg?si=FB2l5BDRu2VBlQYU. Hingga akhir 30 Januari 2025, tayangan ini telah ditonton sebanyak 8441 kali sejak disiarkan pada 23 Januari 2019. Acara haul ini dihadiri pula oleh Gubernur jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo dan tokoh-tokoh TNI-Polri. Tidak hanya itu, acara ini dihadiri pula oleh para ulama dari Yordania, Siria, dan dari negara Arab lainnya (MT Darul Hasyimi Jogja 2019).

d. 2020: Klaim dalam Catatan Santri Terdekat HLY

Muhdor Ahmad Assegaf (Muhdor) pada November 2020 menerbitkan buku *Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Luthfi Bin Yahya: Catatan Kekaguman dan Kecintaan Seorang Santri*. Buku ini diterbitkan oleh Abna Seiwun, Pemalang, Jawa Tengah bekerjasama dengan Anom Pustaka Yogyakarta. Pada Februari 2021, cetakan kedua buku ini terbit kembali.

Muhdor menyatakan di bagian Mukaddimah, bahwa tulisan-tulisan yang diterbitkan melalui buku itu merupakan catatan-catatan yang ia peroleh secara langsung dari guru mursyid dan guru besarnya, HLY. Catatan-catatan ini ia tulis selama lebih dari 15 tahun atau selama Muhdor mengabdi dan mengikuti HLY.[3] Baik di saat HLY berada di dalam rumah, sedang santai, menghadiri pengajian, maupun acara-acara lainnya. Bahan tulisan ini ada yang merupakan dikte langsung dari HLY. Ada pula yang disarikan dari berbagai cerita, nasihat, petuah, dan ceramah HLY (Assegaf 2021, v).

Ada tiga bahasan tentang Hasan yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat di buku ini. Pertama, dalam sebuah tulisan berjudul *Syekh Kramatjati* di halaman 323-325. Diceritakan di sana bahwa sosok Syekh Kramatjati adalah gelar seorang tokoh bernama Hasan bin Thoha Bin Yahya. Sosok ini dikatakan lahir di Cirebon pada 1736 dan meninggal di Semarang pada 1818. Ayahnya bernama Thaha Bin Yahya. Ibunya bernama Fatimah Al-Idrus. Anehnya, di halaman lain, Muhdor menyebut Hasan lahir pada 1754 (Assegaf 2021, 344).

Diceritakan bahwa kisah keberanian Hasan melawan penjajah terdengar oleh Sultan HB II. Dari sanalah Hasan dijadikan sebagai menantu sang Sultan. Atas prestasi Hasan dalam melawan penjajahan, akhirnya ia diangkat sebagai salah satu dari *Wedono Lebet* yang bergelar Tumenggung Sumodiningrat. Tidak lama setelah itu, pangkatnya dinaikkan lagi menjadi *Patih Lebet* yang bertugas sebagai koordinator dan sekaligus sebagai pimpinan para pejabat tinggi di bawahnya. Di sini Hasan bertugas mengurusi pemerintahan dalam istana.

[3] Dihitung mundur dari 2020, berarti sekira tahun 2005. Tepat dengan kemunculan klaim pertama Hasan sebagai KRT Sumodiningrat di ruang publik lewat Majalah al-Kisah sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa Hasan bersama dengan Raden Ronggo Prawirodirdjo III ditugaskan sebagai panglima besar yang memimpin 15.000 prajurit yang terbagi atas pasukan darat, pasukan laut, dan pasukan cadangan. Pasukan laut ini dikenal dengan nama Kesatuan Singobarong. Dari sinilah Hasan dikenal dengan julukan Singobarong. Ketika di Semarang terjadi kekacauan, Hasan ditugaskan untuk memadamkannya. Di sana Hasan mendirikan benteng pertahanan yang kuat di daerah Jomblang untuk mengantisipasi serangan penjajah.

Saat itulah Hasan diberikan kekuasaan penuh oleh Sultan HB II hingga akhirnya ia wafat di sana. Hasan lantas dikuburkan di depan pengimaman Masjid Al-Hidayah, Taman Duku Lamper, Semarang. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan Syekh Kramatjati. Julukan ini muncul karena pada 1949, ada kejadian pohon Jati yang sudah ditebang dan dicincang kayunya, namun, dapat berdiri utuh lagi setelah dilanda angin leisus.

Ihwal Hasan yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat juga ditampilkan pada halaman 343-345, dalam sebuah tulisan berjudul *Habib Hasan Singobarong dan Habib Husain Luar Batang*. Tulisan ini dibuka dengan ungkapan bahwa Muhdor mendapat cerita langsung dari HLY. Muhdor kembali menarasikan Hasan di dalam sebuah tulisan berjudul *Karamah Habib Hasan Singobarong*, pada halaman 350-351.

Dikisahkan di sana bahwa suatu ketika terjadi letusan Gunung Merapi. Biasanya bila gunung ini meletus, laharnya akan mengalir ke arah utara, yaitu Magelang dan sekitarnya. Saat itu, lahar Merapi justru mengalir ke arah selatan atau arah kota Yogyakarta. Lahar yang mengalir ke arah kota itu lantas meluap hingga membuat Selokan Mataram yang dibangun oleh Sultan HB I tidak dapat menampungnya. Hingga lahar itu mengalir terus dan sampai ke Tugu Yogyakarta.

Alkisah, ada seorang prajurit yang mengabarkan perihal kejadian itu kepada Hasan. Hasan lantas melapor kepada Sultan HB II yang segera memerintahkannya untuk mengatasi serangan lahar Gunung Merapi. Hasan lalu berdoa dan bermunajat kepada Allah swt setelah sebelumnya mengamati kondisi yang ada. Dengan *karamah*nya, Hasan membelokkan aliran lahar letusan Gunung Merapi. Sebelumnya aliran lahar itu mengalir ke arah Tugu, namun, berhasil dihalau hingga berbelok ke arah Kali Code. Padahal, dalam tulisan itu dikatakan bahwa tanah ke dataran Kali Code lebih tinggi dari pada dataran Tugu. Kraton pun menjadi aman.

Karamah Hasan pernah pula ditampakkan di Pekalongan. Saat itu Hasan mampu mengubah aliran Sungai Loji atau sungai Kupang yang menuju kampung Ledok. Lalu aliran sungai itu dibelokkan ke arah timur, lurus ke arah sebalah makam Sapuro. Hingga kampung Ledok dapat terhindar dari banjir. Atas dasar itu, HLY menyampaikan kepada para santrinya, jika ingin aman dari letusan gunung, dapat bertawassul dengan Hasan.

Pada tahun ini pula, Maulid Akbar dalam Rangka Haul Hasan dan Thoha diadakan di Semarang. *Manaqib* Hasan dan Thoha dibacakan di acara ini dan tersebar luas. Akun MT Darul Hasyimi Jogja menyiarkannya secara *live streaming* pada 25 Januari 2020 di tautan https://www.youtube.com/live/VLFiRE6-htc?si=DfZsMxHUBsKvp4Po (MT Darul Hasyimi Jogja 2020). Hingga akhir Januari 2025, tayangan ini telah ditonton sebanyak 11 ribu kali.

Acara ini juga disiarkan secara langsung oleh akun YouTube resmi Pemkot Semarang di tautan https://www.youtube.com/live/JvObaKY7OFg?si=dNjJiKdz4woYEM9N. Hingga akhir Januari 2025, tayangan ini telah ditonton sebanyak 5482 kali sejak disiarkan pada 25 Januari 2020 (Semarang Pemkot 2020). Akun ini benar-benar akun YouTube resmi Pemkot Semarang. Ditandai oleh logo Pemkot Sendiri. Tertulis pula deskripsinya yang tertulis: "Media berbagi informasi dalam bentuk video yang di kelola oleh Pemerintah Kota Semarang".

e. 2021: Klaim Tulisan HLY dan Publikasi Klaim Makam Jejeran

Ada sebuah buku berjudul *Sejarah Pekalongan (Pekalongan History)* yang ditulis oleh Kusnin Asa dan HLY. Buku bilingual ini diterbitkan oleh *Yayasan Peduli Sejarah Indonesia* dengan dukungan BPH Migas. Editor buku dengan tebal xxxiv + 306 halaman dan berbahan Art Paper atau kertas putih licin mengkilap ini adalah Yudhistira ANM Massardi dan Hery Wibowo. Beberapa tokoh nasional memberikan sambutan tertulis. Ada Soetrisno Bachir, M. Fanshurullah Asa (Kepala BPH Migas), Suryani (Rektor Universitas Pekalongan), Arsul Sani (Wakil Ketua MPR RI), dan beberapa tokoh lokal Pekalongan lainnya. Bupati Pekalongan periode 2006-2011, Siti Qomariah, memberikan kata pengantar tertulis.

HLY menyebut bahwa Hasan adalah tokoh ulama yang melanjutkan proses pengembangan Islam di Pekalongan abad 16-18 M. Hasan di sini diklaim sebagai menantu Sultan HB II. Hasan diklaim pula pernah membebaskan Sultan HB II di Penang, Malaysia. Setelah itu, Hasan diceritakan diangkat menjadi senopati agung Mataram dengan julukan *Senopati Agung Mataram Wedono Lebet*. Sedangkan gelar keulamaannya adalah *Syaikhul Akbar ing Tanah Jawa*. Adapun gelar kerajaannya adalah KRT Sumodiningrat. Lalu dikenal pula dengan gelar Syekh Kramatjati atau Singobarong. Hasan wafat di Semarang pada 1818. Anehnya, di halaman yang sama, HLY menulis bahwa Hasan wafat di Semarang pada 1824 (Asa and Yahya 2021, 159–60).

Pada tahun ini pula, diadakan Haul Hasan pada 18 Desember 2021. *Manaqib* Hasan lengkap dengan klaim seperti sebelumnya dibacakan oleh Sulistyo Eko Cahyono. Akun YouTube Majelis Azzahir yang merupakan jejaring HLY dan MTDH menayangkan siaran *live streaming* di tautan https://www.youtube.com/live/uQxj4alXTmY?si=Gb58MG4eK0wlu7AJ. Hingga akhir Januari 2025, tayangan ini telah ditonton sebanyak 119.051 kali (Majelis Azzahir

2021). Akun YouTube MT Darul Hasyimi Jogja juga menyiarkan acara ini di tautan https://www.youtube.com/live/2BodybreA_Q?feature=share. Hingga akhir Januari 2025, tayangan ini telah ditonton sebanyak 37.982 kali (MT Darul Hasyimi Jogja 2021).

Pemaparan manaqib Hasan di edisi acara haul ini memiliki penambahan klaim. Sulistyo Eko Cahyono mulai hitungan menit ke 2:29:00 sampai 2:57:20 memunculkan klaim bahwa makam KRT Sumodiningrat di Jejeran adalah makam adik Hasan, yaitu Ahmad. Dikatakan di sana bahwa Legiun Inggris menyerang Yogyakarta dan mencari Hasan di kediamannya di Jejeran, Bantul. Pada saat itu Hasan melakukan koordinasi di Keraton Ngayogyakarta. Sedangkan Ahmad yang tinggal di Suronatan, saat itu, sedang berada di Jejeran.

Pasukan Inggris mengepung rumah Hasan. Lalu Ahmad keluar dan mengaku sebagai Hasan kepada Inggris. Keluarga Hasan, termasuk Ahmad serta putra-putrinya ditahan dan meninggal pada 1812. Ahmad dimakamkan di Jejeran dan dikenal dengan nama KRT Sumodiningrat sebagai pengalihan agar pencarian Inggris terhadap Hasan mengendor. Makam Jejeran lalu dimitoskan sebagai makam yang angker. Sehingga Inggris tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang dimakamkan.

f. 2022: Klaim Akhmad Saefudin di Media Massa Cetak

Akhmad Saefudin menulis artikel dalam rubrik Opini Koran Tribun Timur Makassar, dengan judul *Mengkritisi Sejarah KRT Sumodiningrat (Pamanda Pangeran Diponegoro)*. Artikel ini terbit pada Selasa, 27 Desember 2022, halaman 15. Di sana, ia mengatakan bahwa nama asli KRT Sumodiningrat adalah Hasan Bin Yahya. Ayah Hasan adalah Thaha Bin Yahya. Ibunya adalah Fatimah Al-Idrus. Hasan dilahirkan pada 1736 dan meninggal pada 1835 di Semarang.

Hasan diklaim sebagai KRT Sumodiningrat dan menantu Sulan HB II. Semasa hidupnya, Hasan dikenal dengan nama Syekh Kramat Jati. Sejak 1760, ia diberi gelar KRT Sumodiningrat. Jabatan Hasan di Kraton Yogyakarta adalah Patih Lebet Keraton Mataram I pada 1794, atau Senopati Agung Ing Mataram pada 1808. Saefudin mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan analisis Peter Carey yang menyebut bahwa KRT Sumodiningrat wafat pada Perang Sepehi 1812 di Yogyakarta. Kata Saefudin, jika KRT Sumodiningrat wafat pada 1812 di Yogyakarta, lalu mengapa pula makamnya berada di Semarang?

Saefudin lantas mengajukan klaim baru berdasarkan cerita tentang Ahmad di atas. Bahwa sosok yang dibunuh oleh tentara Inggris bukanlah Hasan, melainkan Ahmad yang saat itu tergabung dalam Prajurit Suronatan. Ahmad ditangkap dan dibunuh saat ia berkunjung ke kediaman Hasan. Hanya saja paparan Saefudin ini berbeda dengan paparan Cahyono di atas. Pertama, Saefudin menyebut kematian Ahmad beberapa hari sebelum penyerangan Inggris ke

Keraton Yogyakarta (Akhmad Saefudin 2022). Kedua, Ahmad adalah kakak, bukan adik Hasan.

Acara haul Hasan diadakan pula di tahun ini. Sebagaimana biasanya, *manaqib* Hasan dibacakan dan disebarkan melalui dunia maya. Pemerintah Kota Semarang melalui akun YouTubenya, Semarang Pemkot, menyiarkan secara *live streaming* acara ini di tautan https://www.youtube.com/live/ClvM1U5HG1o?si=blzEm_0uJ8ITRZn1. Tayangan ini hingga akhir Januari 2025 telah ditonton sebanyak 5400 kali sejak ditayangkan pada 30 November 2022 (Semarang Pemkot 2022).

g. 2023: Klaim dalam Laporan Resmi Disbudpar Kota Semarang

Klaim bahwa Hasan adalah KRT Sumodiningrat berikut identitas lainnya terkait Kraton Yogyakarta juga muncul di dalam laporan resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang. Laporan yang tersebar luas di dunia maya dalam bentuk dokumen PDF ini berisi kajian tokoh dan peristiwa sejarah di Kota Semarang. Tertulis di sana bahwa laporan ini disusun untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya itu, klaim bahwa Hasan adalah KRT Sumodiningrat juga dipublikasikan secara resmi di *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Kota Semarang (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang 2024).

Laporan ini mengklaim bahwa Hasan adalah KRT Sumodiningrat yang berjuang melawan penjajah pada masa Pangeran Terboyo. Berikut kutipan lengkapnya:

> …As-Sayyid Al-Habib Hassan bin Thoha bin Yahya atau yang dikenal dengan Syekh Kramat Jati. Syekh Kramat Jati adalah kerturunan dari Habib Thoha. Habib Hasan lahir pada tahun 1736. Syekh Kramat Jati merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ia dijuluki Mbah Singo Barong karena sangat garang dan gagah seperti Singa saat berperang melawan penjajah. Habib Hasan memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Keraton Jogjakarta. Dia adalah menantu Sultan Hamengku Buwono II dan ipar Hamengku Buwono III. Karena itulah, ia mendapatkan gelar Raden Tumenggung Sumodiningrat dan kerap disebut Syekh Kramat Jati. Di Pekalongan beliau mendirikan pesantren dan masjid di Desa Keputran. Pengaruh Habib Hasan mulai dari Banten sampai Semarang sangat luar biasa. Sebelum meletusnya Perang Padri, pesantrennya sempat dibumihanguskan oleh penjajah. Habib Hasan pun berhijrah ke wilayah Jogjakarta. Lalu mengamankan perbatasan Jateng dan Jogjakarta pada tahun 1790-an. Berpindahnya Habib Hasan di Semarang berawal dari kekacauan yang tak bisa dihadapi Adipati Semarang. Ia diutus Sultan HB III untuk datang membantu. Setelah tugas tuntas, beliau tak berhenti begitu saja. Mbah Kramat Jati wafat pada tahun 1818 masehi dan dimakamkan di Jalan Taman Duku Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 2023, 76)

2. Injeksi Klaim Tokoh Bin Yahya Lainnya dalam Sejarah Kraton Yogyakarta

Klaim Hasan sebagai KRT Sumodiningrat tidak diinjeksi sendirian. Klaim itu ditopang oleh injeksi klaim tokoh-tokoh Bin Yahya lainnya dalam sejarah Kraton Yogyakarta. Misalnya

narasi klaim saudara Hasan, Abu Bakar Bin Yahya. Ia dikatakan berasal dari Gorot, Tarim, Yaman. Kedatangannya ke tanah Jawa pernah diramalkan oleh Abdurahman Al-Idrus, yang disebut sebagai mufti Kerajaan Mataram. Abdurahman memberikan isyarat kepada Sultan HB I bahwa yang akan memadamkan konflik berkepanjangan di Kerajaan Mataram adalah Abu Bakar.

Tidak berapa lama, Abu Bakar datang. Ia menyelesaikan konflik dengan membagi kerajaan menjadi dua. Pembagian itu dilakukan dengan cara membawa sebuah kendi berisi air dan naik di atas sajadah. Ia lalu mengikuti perjalanan sajadah itu sambil mengucurkan air dari kendi. Tempat-tempat kucuran air tersebut membentuk aliran yang kemudian dikenal dengan nama Kali Wedi sekaligus menjadi pembatas dua wilayah kerajaan, yaitu Kraton Yogyakarta dan Kraton Kartasura. Abu Bakar lalu dianugerahi gelar Pangeran atau Panembahan Tejo Jatikusumo atas jasanya ini.

Kisah ini gampang ditemukan di dunia maya. Ia telah menyebar secara luas. Disebutkan di dalam setiap tulisan yang memuat kisah mitis itu bahwa narasi tersebut disarikan dari Wawancara Kabag Humas Kabupaten Pekalongan dengan HLY. Anehnya, meski tanpa rujukan valid, Bizawie memuat narasi klaim ini di dalam bukunya (Bizawie 2019, 210–11). Padahal kisah ini lebih tampak sebagai *copy paste* dari kisah Mpu Baradah yang terbang dan menuangkan air untuk membagi wilayah Jawa di era Mataram Kuno (Aulia and Wisnu 2023).

Kisah di atas tidak pernah ditemukan sepanjang kisah berdirinya Kraton Yogyakarta dan Kraton Surakarta maupun Kraton Kartasura. Baik di *Babad Giyanti (Yasadipura 1938)*, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kraton Yogyakarta (Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun 1956; Soekanto 1952), maupun di karya ilmiah para sarjana seperti Ricklefs (2002), Margana (2010), maupun Suharmaji (2023). Padahal di Babad, dokumen, maupun karya ilmiah para sarjana itu, kisah-kisah mitis tentang pendirian Kraton Yogyakarta sekalipun tetap diceritakan.

Selain klaim kisah Abu Bakar di atas, sebenarnya ada klaim lain yang lebih dahsyat. Bahwa ayah Hasan, Thaha, diklaim sebagai menantu Sultan HB I. Tidak hanya itu, Thaha juga diklaim sebagai orang yang memegang peranan penting dalam penentuan Perjanjian Giyanti. Dikisahkan di dalam *manaqib* Thaha bahwa pada tahun 1745, Thaha diminta oleh Pangeran Mangkubumi untuk membantunya dalam memberantas Geger Pacinan di wilayah Mataram. Dikisahkan pula bahwa hubungan Pangeran Mangkubumi, yang kelak menjadi Sultan HB I, juga dibantu oleh Thaha dalam perang melawan VOC. Thaha juga diceritakan sebagai orang yang berperan di dalam Perjanjian Giyanti (1755) dan Perjanjian Salatiga (1757) antara Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyowo.

Setelah Kraton Yogyakarta berdiri, Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan HB I. Sang Sultan pertama ini lalu mengangkat Thaha sebagai *Wedana Lebet* yang mendampinginya dalam menjalankan roda pemerintahan di Yogyakarta. Thaha lantas diberi gelar Tumenggung Joyokusumo atau disebut pula diberi gelar KRT Notokusumo. Lalu Sultan HB I menikahkan Thaha dengan putrinya, Raden Ayu Jayaningrat pada 1747 atau 1755.

Disebutkan pula bahwa Thaha bersama pasukannya, pada 1870, membebaskan Sultan HB I dari pembuangannya di Penang Malaysia. Thaha mengawal sang sultan hingga kembali ke Yogyakarta. Setelah itu Thaha ditugaskan ke Semarang untuk mengamankan wilayah Pantai Utara yang menjadi salah satu penopang perdagangan Kesultanan Yogyakarta. Karena tinggal dan meninggal di daerah Depok, maka makamnya disebut Sayid Kramat Depok. Klaim ini telah dipublikasikan sejak peringatan Haul Thaha pada 2022 hingga 2024 dengan berbagai penambahan klaim setiap haulnya (MT Darul Hasyimi Jogja 2024; Semarang Pemkot 2024; MT Darul Hasyimi Jogja 2022b).

Sebagaimana publikasi klaim Hasan, klaim Thaha sebagai menantu Sultan HB I ini diterbitkan pula oleh Disbudpar Kota Semarang. Disebutkan di sana bahwa Thaha adalah guru besar para sultan, adipati, maupun senopati di wilayah Jawa. Bedanya, di narasi klaim ini, Thaha mendapatkan gelar KRT Ronggo Prawirokusumo, bukan KRT Joyokusumo maupun KRT Notokusumo. Disebutkan pula bahwa Thaha bersama Raden Kertoboso membantu perjuangan Pangeran Mangkubumi untuk mendirikan Kraton Yogyakarta.

Lebih aneh lagi, di Laporan Disbudpar Kota Semarang ini, disebutkan bahwa pada suatu ketika, Thaha mendengar bahwa Sultan HB I dibuang ke Penang oleh Belanda. Ia marah dan lalu menulis surat agar raja Yogyakarta itu harus segera dikembalikan. Jika tidak, maka Thaha bersama pasukannya akan mengobarkan peperangan di Asia Afrika. Berdasarkan permintaan itu, Sultan HB I dikembalikan dengan langsung diantar oleh Thaha ke Yogyakarta. Setelah itu, Thaha dinikahkan dengan salah satu putri Sultan HB I (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 2023, 73–74).

Anehnya, klaim bahwa Thaha adalah menantu Sultan HB I ini berubah-ubah. Athoillah, seorang sejarawan yang sangat dekat dengan HLY, menarasikan klaim berbeda berdasarkan wawancara dengan HLY. Bahwa yang berstatus sebagai menantu Sultan Hamengkubuwana II adalah Tahir bin Yahya (Athoillah 2019, 9). Thahir, dalam keterangan HLY, adalah julukan Thaha, ayah Hasan. Jadi di sini, Thaha diklaim sebagai bukan menantu Sultan HB I, melainkan Sultan HB II. Dengan demikian, klaim ini mematahkan klaim tentang Hasan yang dikatakan sebagai menantu Sultan HB II Thaha.

Selain itu, sebagaimana dilansir oleh Alatas, pada acara peringatan Haul Thaha di Semarang pada kisaran Januari 2013, HLY menyampaikan klaim bahwa yang menjadi menantu

Sultan HB II adalah Thaha, bukan Hasan (Alatas 2021, 194). Klaim ini tentu bertentangan dengan klaim selanjutnya yang menyatakan bahwa Hasan adalah menantu Sultan HB II. Sebab pada 2018, HLY telah menginjeksi klaim Thaha sebagai menantu Sultan HB I. katanya:

> …jadi yang bergelar Sayid Thahir itu bukan Habib Hasan nya, tapi yang bergelar Sayid Thahir adalah abahnya, Sayid Thaha. Nah, Ketika beliau membebaskan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kesatu, maka diminta oleh Kanjeng Sultan, Habib Thaha sudi kiranya untuk mengawal beliau di Ngayogyakarto. Maka dituruti dan diangkat menjadi menantu HB kaping sepindah. Ini runtute..(MT Darul Hasyimi Jogja 2018b)

Tentu saja kisah tentang Thaha sebagai menantu Sultan HB I ini tidak valid. Dokumen resmi Kraton Yogyakarta yang mencatat istri, anak, dan menantu Sultan HB I tidak satu lembarpun menampilkan nama Thaha atau Tumenggung Joyokusumo atau Tumenggung Notokusumo sebagai menantu Sultan HB I. Kekeliruan klaim itu lebih tersingkap lagi ketika disebutkan bahwa putri Sultan HB I yang dinikahkan dengan Thaha disebut bernama Raden Ayu Jayaningrat. Tentu saja tidak mungkin ada seorang istri bergelar "Raden Ayu Jayaningrat", namun, suaminya bergelar "Tumenggung Joyokusumo" atau "Tumenggung Notokusumo". Bahwa putri Sultan HB I bergelar "Raden Ayu Jayaningrat" itu berarti bahwa ia bersuamikan seorang bernama-gelar Tumenggung Jayaningrat (Mandoyokusumo 1988, 10).

Injeksi kisah Bin Yahya lainnya yang dihubungkan dengan sejarah Yogyakarta lainnya muncul dari upaya HLY dalam memunculkan narasi tentang salah-satu leluhurnya yang lain, yaitu Abu Bakar Bin Yahya. Dikisahkan bahwa sosok ini adalah ulama terkemuka di zaman Sunan Pakubuwana II. Ketika meninggal, ia dimakamkan di Kayugeritan. Masyarakat sekitar menyebutnya Mbah Angsono, seorang tokoh wali lokal yang dimuliakan oleh warga setempat. Setelah memunculkan narasi di atas, HLY membangun makam ini pada 2010 (Alatas 2020, 73–74; 2021, 203).

Pembukaan makam-makam tua yang belum diketahui identitasnya di tempat lain juga dilakukan oleh HLY dengan mengaitkannya sebagai tokoh yang berhubungan dengan Kraton Yogyakarta. Misalnya makam tua di Kedung Dowo, Batang, Jawa Tengah. Masyarakat mempercayai makam itu sebagai makam cikal-bakal desa setempat yang bernama Surgi Jatikusumo. Lalu HLY mempublikasikan bahwa makam itu adalah makam Muhammad bin Hasan Bin Yahya. Nama Surgi Jatikusumo diberikan oleh Sultan Yogyakarta untuk sosok tersebut (Alatas 2021, 203–4).

Salah-satu makam tanpa identitas lain juga telah dibuka atas nama Husein Bin Yahya yang dikaitkan dengan sejarah Kraton Yogyakarta. Makam ini berada di Ngawen, Gunung Kidul. Masyarakat sekitar menyebut makam ini dengan nama Mbah Tuwan. Ketika dibuka atas nama Husein Bin Yahya, makam ini disebut sebagai adik Hasan yang telah diklaim sebagai KRT Sumodiningrat. Husein diklaim sebagai tokoh yang merupakan salah-satu punggawa

Kraton Yogyakarta. Bersama Hasan dan Ahmad, ia berperang melawan penjajah (MT Darul Hasyimi Jogja 2022a). Dengan tersingkapnya kekeliruan klaim Hasan sebagai KRT Sumodiningrat dan juga tersingkapnya kekeliruan klaim makam Jejeran, maka klaim terhadap makam ini juga runtuh seketika.

Injeksi klaim keluarga Bin Yahya ke dalam sejarah Yogyakarta juga didapatkan dari seorang tokoh muda dari kawasan Bantul. Pada 22 April 2022, ia menghubungi saya perihal orang dekat HLY di Yogyakarta yang ingin menemuinya untuk merembuk perihal makam Panembahan Giriloyo di komplek pemakaman milik Kraton Yogyakarta (*Pasarean Kagungan Dalem*). Makam itu telah masyhur dikenal sebagai makam Panembahan Giriloyo, tokoh Kerajaan Cirebon yang menjadi menantu Sunan Amangkurat I di Kerajaaan Mataram Islam.

Menurut orang dekat HLY itu, berdasarkan penelusuran HLY yang telah melihat data langsung di perpustakaan pribadi Sultan Hamengkubuwono X, makam tersebut adalah makam Muhammad Al-Qodhi Bin Yahya, salah-satu leluhur HLY. Saat itu saya menyampaikan bahwa apakah dalam perembukan itu ada perwakilan dari Kraton Yogyakarta? Sang tokoh muda mengatakan tidak ada. Saya menyarankannya agar melapor ke Kraton. Lagi pula cukup aneh, makam yang sudah jelas tertera datanya di daftar *Pasarean Kagungan Dalem* Kraton Yogyakarta justru "digugat" tanpa melibatkan otoritas Kraton. Ternyata makam ini, oleh MTDH, telah diziarahi pada 2019 bukan atas nama Panembahan Giriloyo, melainkan atas nama Muhammad Al-Qodhi Bin Yahya.

3. Bantahan Ilmiah dan Penyingkapan Interkontradiksi

a. Bantahan Ilmiah atas Kekeliruan Klaim HLY, MTDH, dan Jejaringnya

Pada 6 Juli 2023, Arafat mempublikasikan hasil penelitian secara luas yang berisi bantahan atas klaim Hasan sebagai KRT Sumodiningrat. Hasil penelitian itu berbentuk makalah yang disebar secara luas. Ada pula publikasi ilmiah yang disebarkan dalam bentuk artikel di sebuah jurnal nasional terakreditasi. Kedua publikasi ini menandaskan bahwa klaim HLY, MTDH dan jejaringnya terbukti keliru (Arafat 2023b; 2023a). Dari keluarga Kraton Yogyakarta, GBPH Yudhaningrat, adik Sultan Hamengkubuwono X, juga menandaskan bahwa KRT Sumodiningrat bukan Hasan (AW Kertapati Channel 2023). Ada beberapa bantahan yang menggugurkan klaim bahwa Hasan adalah KRT Sumodiningrat.

Pertama, bahwa pihak pengklaim menarasikan kisah Hasan yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat, menantu Sultan HB II, dan berperang melawan tentara Inggris. Artinya, pihak pengklaim sedang membicarakan orang penting di Kraton Yogyakarta. Lucunya, paparan para pengklaim ini tidak satupun yang merujuk pada data primer, data sekunder, maupun data resmi tentang sang tokoh yang dikeluarkan oleh Kraton Yogyakarta. Dalam hal silsilah tokoh yang

diklaim sebagai KRT Sumodiningrat pun tidak merujuk pada silsilah yang dimiliki oleh Kraton Yogyakarta, melainkan milik HLY.

Kedua, karena itu ada perbedaan mutlak dalam identitas kelahiran dan silsilah antara Hasan dengan KRT Sumodiningrat atau sebaliknya. Silsilah anak-turun atau keluarga Kraton Yogyakarta dinyatakan sahih dengan penerbitan *Layang Kekancingan* atau Surat Keterangan dari *Tepas Darah Dalem*, yaitu lembaga di Karaton yang mengeluarkan surat keterangan tentang ketersambungan nasab seseorang kepada salah satu keluarga besar Kraton. Para pengklaim tidak menunjukkan keterangan nasab Hasan dari sumber-sumber itu jika sekiranya memang benar ia adalah KRT Sumodiningrat.

Ketiga, Hasan bukan Menantu Sultan HB II. Disebutkan oleh para pengklaim bahwa istri Hasan adalah GKR Bendoro, yang merupakan putri Sultan HB II dengan permaisurinya (*garwa padmi*), Mas Ayu Rantamsari. Padahal, Mas Ayu Rantamsari bukan *garwa padmi* atau permaisuri, melainkan istri selir Sultan HB II. Selain itu, GKR Bendoro bukan anak hasil perkawinan Sultan HB II dengan Mas Ayu Rantamsari, melainkan perkawinan dengan GKR Kedhaton (Mandoyokusumo 1988, 15). Ditambah lagi, perkawinan Sultan HB II dengan Mas Ayu Rantamsari hanya melahirkan satu anak laki-laki, yaitu BPH Tejokusumo yang kemudian mendapat nama BPH Hadinegoro (Dajapertama dan Dirdjasoebrata t.t., 20; Mandoyokusumo 1988, 24).

Keempat, KRT Sumodiningrat wafat pada 20 Juni 1812, hari terakhir Perang Sepehi. Ia dikeroyok dan dibunuh oleh tentara Sepoy bersama Legiun Mangkunegaran. Peristiwa ini diceritakan dengan sangat gamblang di sumber primer seperti *Babad Sepehi* dan *Babad Panular*. Penjelasan di bagian pembuka artikel ini telah sangat terang. Ditambah lagi, disebut pula di sana bahwa setelah wafat, jenazah KRT Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran, Wonokromo, Plered, Bantul, Yogyakarta.

Kelima, karena itu, makam KRT Sumodiningrat di Jejeran memang benar-benar makam KRT Sumodiningrat. Bukan makam Ahmad, adik Hasan. Narasi klaim mereka atas makam KRT Sumodiningrat di Jejeran sebagaimana telah dibabarkan di atas semakin mengkuadratkan kerancuan. Kuat sekali kesan karang-mengarang cerita di sana. KRT Sumodiningrat adalah cucu-buyut Kyai Kriyan. Bukti silsilah di atas sudah menunjukkan ketersambungan geneologis itu. Menjadi maklum bila jenazahnya dimakamkan di pemakaman leluhurnya sebagaimana telah menjadi tradisi pemakaman orang Jawa. Karena itu sangat ganjil jika dikatakan bahwa makam KRT Sumodiningrat di Jejeran merupakan makam Ahmad yang bukan "siapa-siapa" di kalangan trah Kyai Kriyan.

Keenam, kerancuan klaim makam Jejeran ini dapat dilacak dari paparan para pengklaim. Di dalam keterangan *manaqib* Hasan pada 2023, dikatakan bahwa Ahmad

meninggal pada Geger Sepehi 1812 karena ia mengaku sebagai KRT Sumodiningrat. Sedangkan di pembacaan *manaqib* Hasan pada 2022, dikatakan bahwa Ahmad meninggal pada Juni 1811 akibat serangan tentara Inggris. Tentu saja klaim ini bertentangan dengan sejarah. Sebab ekspedisi Inggris-India baru mendarat di Cilincing pada 3 Agustus 1811 (Carey 2017, 47). Bagaimana mungkin ada orang yang meninggal akibat dibunuh pada Juni 1811, sedangkan para pembunuhnya baru hadir di Jawa pada Agustus 1811.

Ketujuh, karena itu, semua cerita atau narasi tentang Hasan yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat, jelas merupakan karangan belaka. Ada satu lagi petunjuk lain untuk memastikan kerancuan tentang Hasan. Bahwa sebagaimana ditulis oleh Muhdor berdasarkan riwayat HLY, bahwa Hasan diklaim sebagai tokoh Kraton Yogyakarta yang mampu menggeser aliran lahar Gunung Merapi yang mengalir memenuhi Selokan Mataram. Padahal, Selokan Mataram baru dibangun atas inisiasi Sultan Hamengkubuwono IX pada 1942 hingga 1944 pada masa pendudukan Jepang. Sedangkan dalam klaim mereka, Hasan disebut hidup pada kisaran pertengahan 1760-an hingga jelang pertengahan 1835. Modus karang-mengarang klaim sejarah sangat kentara di sini.

Sampai di sini dapat ditarik kesimpulan penting. Sejumlah klaim atas KRT Sumodiningrat ini justru sangat rapuh, retak, dan tentu saja keliru. Dengan demikian, runtuh pula narasi jejaring klaim tokoh Bin Yahya yang terkait dengan sejarah Kraton Yogyakarta. Mulai dari Thaha, Abu Bakar, Muhammad Al-Qodhi, Husein, dan lainnya yang jelas merupakan kekeliruan belaka. Sebagaimana hancur pula narasi-narasi yang mengaitkan tokoh-tokoh itu dengan sejarah Kraton Yogyakarta.

b. Interkontradiksi Para Pengklaim

Ada interkontradiksi data di antara para pengklaim Hasan sebagai KRT Sumodiningrat dan kisah-kisah lainnya. Data tentang tahun lahir dan wafat Hasan, istrinya, hingga status kemenantuannya di Kraton Yogyakarta dinarasikan dengan sangat kontradiktif. Tabel interkontradiksi di bawah ini dapat dibaca untuk menunjukkan kekeliruan itu.

No.	Tahun	Juru Klaim	Media	Identitas Hasan				
				Tahun Lahir	Tahun Wafat	Ayah	Ibu	Istri
1	2005	Majalah al-Kisah	Media Cetak Populer	-	-	Thaha	Fatimah	-
2	2018	MTDH	Haul Hasan	-	-	Thaha	Fatimah	GKR Bendoro binti SHB II + Mas Ayu Rantamsari

3	2018	LBY	Haul Hasan	-	-	Thaha	Fatimah	-
4	2018	www.darulhasyimi.org	Website Internet			Thaha	Fatimah	GKR Bendoro binti SHB II + Mas Ayu Rantamsari
5	2019	Siti Fatimah	Tesis S2	1765	1819	Thaha	Fatimah	Mas Ayu Rantamsari
6	2019	Zainul Milal Bizawie	Buku Ilmiah	-	1819	Thaha	Fatimah	-
7	2019	MTDH	YoTube	-	-	Thaha	Fatimah	GKR Bendoro binti SHB II + Mas Ayu Rantamsari
8	2020	Muhdhor Assegaf	Buku	1736 1754	1818	Thaha	Fatimah	-
9	2020	MTDH	Haul Hasan	-	1835	Thaha	Fatimah	-
10	2021	LBY	Buku	-	1836 1824	Thaha	Fatimah	-
11	2021	MTDH	Haul Hasan	-	-	Thaha	Fatimah	-
12	2022	Akhmad Saefudin	Opini Tribunnews	1736	1835	Thaha	Fatimah	-
13	2022	MTDH & Pemkot Semarang	YouTube			Thaha	Fatimah	-
14	2023	Disbudpar Kota Semarang	Laporan Resmi	-	-	-	-	-

Tabel 1: Interkontradiksi Pengklaiman

Sederet interkontradiksi tentang Hasan di atas belum terhitung interkontradiksi tentang klaim Thaha sebagai menantu Sultan HB I. Satu kasus, misalnya, klaim HLY bahwa Hasan masih termasuk keponakan Sultan HB II sebagaimana telah dibabarkan pada penjelasan kronologi klaim tahun 2018 di atas. Tampak di sini bahwa Hasan diklaim sebagai keponakan Sultan HB II. Sebab Hasan adalah buah perkawinan Thaha dengan putri Sultan HB I. Tentu itu keliru. Sebab Hasan adalah anak dari perkawinan Thaha dan Fatimah Al-Idrus. Tabel di atas jelas sekali menunjukkan itu berdasarkan data di dalam *manaqib* Hasan. Dengan demikian, klaim Hasan adalah keponakan Sultan HB II ini mutlak keliru.

4. Tantangan Penjagaan Kedaulatan Sejarah

a. Perubahan *Manaqib* dalam Haul Hasan 2023

Pasca bantahan ilmiah meluncur ke ruang publik, klaim Hasan sebagai KRT Sumodiningrat digugat dan dirundung netizen. Meski demikian, publikasi bantahan ilmiah dan rundungan netizen tidak lantas menghentikan para pengklaim. Faktanya, pada 3 Desember 2023, haul Hasan kembali diadakan. Pamflet publikasi awal acara haul ini memuat logo Kraton Yogyakarta. Setelah ditelusuri oleh beberapa anggota *Trah Hamengkuwuanan*, ternyata logo itu dipakai tanpa seizin Kraton Yogyakarta. Lantas akun Facebook Majelis Taklim Darul Hasyimi menghapus unggahan *pamflet* pengumuman haul yang berlogo Kraton Yogyakarta itu. Selain itu di *backdrop* acara tidak lagi tertampil nama "KRT Sumodiningrat" sebagaimana sebelumnya, setiap haul, nama itu selalu disematkan pada identitas Hasan.

Hanya saja ada hal yang cukup "menggembirakan". Terdapat perubahan narasi di dalam *manaqib* Hasan. Pertama, ia tidak lagi disebut sebagai KRT Sumodiningrat. Kedua, tidak disebut pula bahwa Hasan adalah menantu Sultan HB II. Ketiga, tidak disebut lagi bahwa istri Hasan adalah GKR Bendoro. Keempat, tidak dikatakan lagi bahwa Hasan berperang melawan Inggris pada peristiwa Perang Sepehi. Sekalipun demikian, ada klaim bahwa Hasan adalah tokoh yang dicintai oleh Sultan HB II (MT Darul Hasyimi Jogja 2023). Klaim ini dijadikan bahan candaan *Trah Hamengkubuwanan*. Sebagai raja, Sultan HB II memang mencintai semua rakyatnya. Entah rakyat tersebut fiktif maupun nyata.[4]

b. Jejaring Politik

Paparan di atas telah menunjukkan bahwa pengklaiman Hasan sebagai KRT Sumodiningrat diaktori oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (2019-2024), tokoh nasional, dan ulama yang dihormati di Indonesia, yaitu LBY. Klaim ini lantas memasuki ruang-ruang kekuasaan bersamaan dengan jejaring tokoh ini dengan tokoh lainnya. Mulai dari pejabat tinggi negara, kepala daerah, ilmuwan, TNI-Polri, hingga ulama internasional.

Kasus pembangunan dan identifikasi makam Mbah Angsono di Kayugeritan, Pekalongan, menarik untuk disimak di sini. Bahwa peluang HLY membangun makam itu dan identifikasi Mbah Angsono sebagai Abu Bakar Bin Yahya yang merupakan leluhurnya, dimungkinkan terjadi karena jasanya dalam mendukung pencalonan Bupati Pekalongan saat itu, Siti Qomariah. Ketika Qomariah dikalahkan oleh Antono pada 2011, lantas proyek HLY dihentikan. Bahkan Antono mengatakan bahwa satu-satunya prestasi Qomariah adalah membangun rumah hantu (Alatas 2020, 74).

Kasus klaim yang berkemungkinan menguat ini juga dapat diamati dari keterlibatan Pemkot Semarang. Telah disampaikan di atas, bahwa Haul Hasan dan Haul Thaha telah menjadi

[4] Wawancara dengan DR, keturunan Sultan Hamengkuwono II, pada 5 Desember 2023.

bahan siaran akun YouTube resmi Pemerintah Kota Semarang. Bahkan acara Haul Hasan menjadi berita resmi di *website* Dewan Pertimbangan Presiden RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Https://jatengprov.go.id/ 2019; https://wantimpres.go.id/ 2022). Makam Hasan sendiri telah dimasukkan oleh Pemkot Semarang sebagai salah-satu destinasi wisata. Bagaimana mungkin sebuah institusi pemerintah tampil sebagai penyokong sejarah dan peristiwa yang tidak sahih?

YR, salah satu trah Sultan HB II, pada 5 April 2024 pernah langsung menghubungi nomor Hotline Pemkot Semarang. Ia menyampaikan data perihal kekeliruan klaim bahwa Hasan adalah KRT Sumodiningrat. Pada 9 April 2024, nomor tersebut baru membalas dengan kalimat: "terima kasih koreksinya. Akan kami teruskan kepada yang menangani". YM, salah satu jurnalis di Jakarta, juga pernah mengontak langsung nomor Walikota Semarang. Ia menyampaikan perihal kekeliruan historis tentang Hasan yang didukung oleh Pemkot Semarang. Sayangnya, YM tidak mendapatkan balasan.

c. Sejarah Berbasis Mimpi, *Terawangan*, dan Penyingkapan Gaib

Pasca bantahan ilmiah atas pengklaiman Hasan sebagai KRT Sumodiningrat, hingga saat ini tidak diketahui apa dasar argumentatif klaim itu. Hanya saja, beberapa klaim HLY atas makam-makam tua tanpa identitas dibangun di atas dasar mimpi dan terawangan. Kalimat "several visitational dreams from the spirit of the person buried in the old tomb (beberapa mimpi yang mendatangi dari ruh orang yang dimakamkan di kuburan tua)" yang dipakai oleh Alatas cukup menarik ketika ia menarasikan proyek pembangunan makam Mbah Angsono di Kayugeritan yang dijalankan berbasis mimpi. Katanya:

> "Almost a decade ago, Habib Luthfi received several visitational dreams from the spirit of the person buried in the old tomb. Following the dreams, he publicly identified the tomb as belonging to a historical saint, Abubakar bin Taha, who, according to Habib Luthfi, was a leading scholar in the court of the Javanese king Pakubuwana II (r. 1725-50)" (Alatas 2020, 73).

Atas dasat itu, Alatas menyebutkan bahwa HLY telah mempraktikkan pengungkapan sejarah Islam atau masa lalu Islam di Jawa. Praktik ini ditempuh HLY dengan mengidentifikasi makam-makam tua yang tidak beridentitas sebagai makam wali melalui metode mimpi. Proyek pembuatan sejarah (*making history*) ini menjadi dasar Alatas untuk menjuluki HLY sebagai *dreaming saint* (orang suci yang bermimpi) (Alatas 2020).

Muhdor juga menyebut bahwa HLY, dengan kepakarannya ini, tidak hanya mampu menganalisa dan merekonstruksi sejarah secara ilmiah melalui kajian pustaka dan kajian situs. HLY bahkan mampu "menganalisa secara tak kasat mata melalui indra keenam atau dengan kearifan dan mata batinnya" (Assegaf 2021, 3). Muhdor juga menandaskan bahwa metode

pengungkapan sejarah ala HLY ini ditandaskan pada praktik *rontgen* kuburan yang juga ditopang oleh kekuatan data.

> … Tapi ingat, Habib Luthfi tidak pernah memberikan susuatu bukan hanya dengan dalil ilmu.. meskipun Habib Luthfi punya kepandaian ilmu-ilmu ronsen tadi kuburan, punya ilmu kepandaian secara spiritual.. itu tapi Habib Luthfi punya data konkrit valid dari data. Itu kelebihannya di situ.
> … Setelah itu Habib Luthfi punya catatan sejarah. Saya menyaksikan beberapa kali.. beliau ini punya buku yang anda nggak ketahui. Buku-buku kraton baik di kraton... apa mana.. baik itu kraton… di kraton mana…. di kraton mana... eeee.... kraton di mana.. di Cirebonan itu datanya Habib Luthfi semua punya… aksara Jawa maupun Honocoroko dan sudah diterjemahkan.. dan Habib Luthfi punya tim penerjemahnya. Kemudian di Jogjakarta dia punya bahkan ini harus dicamkan.. di Leiden pun beliau punya. Beliau punya gambarnya. Makanya ada di dalam sini gambar Diponegoro yang asli dari Leiden.. itu Habib Luthfi nembus sana dan punya. Beliau juga punya data dari fotonya Habib Husen Luar Batang yang dari Leiden punya… dan Habib Luthfi punya data. Jadi bukan omong kosong. Secara batin spiritual beliau kuat.. secara keilmuan baik. Adapun konflik ya silakan konflik yang penting perlu dibuktikan secara keilmuan.
> … Habib Luthfi dengan di samping keilmuan secara rohaniahnya keilmuan ada konkrit secara bukunya ada valid..
> …ya coba nanti nanti ambil tanahnya.. coba nanti dicari sama beliau dan belau punya data. Itu yang penting itu yang harus dipahami. Habib Luthfi ilmunya bukan ilmu seperti orang yang mengkritisi.. dianggapnya mereka ini Habib Luthfi nggak puya referensi.. loh yang bisa masuk perpustakaan inti Kraton Cirebon, Kraton Jogja itu Habib Luthfi, mereka tidak bisa.. bahkan nuwunsewu… Habib Luthfi lebih tau dari orang kraton itu sendiri.. (Jati Sumo Negoro 2023)

Jadi, Muhdor menandaskan bahwa HLY tidak hanya mengandalkan pada ilmu *rontgen* kuburan, namun, juga pada kekuatan data. Lalu, dalam kasus klaim atas KRT Sumodiningrat dan klaim tokoh Bin Yahya lain yang dihubungkan dengan Kraton Yogyakarta, justru metode *rontgen* dan kekuatan data HLY ini tidak berbunyi. Faktanya, bantahan ilmiah terhadap pengklaiman atas KRT Sumodiningrat telah membuktikan bahwa mimpi atau *terawangan* dan sejenisnya bukanlah metode sahih untuk mengungkap sejarah.

Secara terang benderang tampak pula bahwa hasil eksplorasi mimpi atau terawangan justru tidak sebangun sejarah. Apalagi, sebagaimana telah dipaparkan di atas, pengklaiman berbasis terawangan atau mimpi itu malah justru mengalami interkontradiksi. Dalam hal tahun wafat Hasan, bahkan HLY bertentangan dengan dirinya sendiri. Lalu, data valid yang seperti apa yang dimaksudkan Muhdor?

Lagi pula, ketidaksahihan mimpi sebagai metode pengungkapan sejarah ini jelas menyalahi tradisi sejarah Islam yang mengharuskan penulisan sejarah berbasis tradisi *isnad* atau penyandaran jejaring riwayat dari satu sumber sahih ke sumber sahih lainnya dan satu periwayat terpercaya (*tsiqa*) ke satu periwayat terpercaya lainnya. Beberapa tokoh ulama yang ditemui oleh Alatas bahkan menegaskan bahwa sejarah yang diungkap dengan metode mimpi

lebih merupa sebagai kegiatan *membikin-bikin* sejarah. Sebab tidak ada *isnad* yang mendasari pengungkapan sejarah (Alatas 2020, 78–79).

d. Ketumpulan Para Ilmuwan

Pengklaiman atas KRT Sumodiningrat menandakan satu bukti penting betapa para ilmuwan juga terlibat di dalam jejaring para pengklaim. Sehingga metodologi atau kapasitas para ilmuwan itu tumpul seketika. Di antara mereka ada Zainul Milal Bizawie, Siti Fatimah, dan Akhmad Saefudin.

Dalam hal karya ilmiah berupa tesis magister yang ditulis oleh Siti Fatimah, ketumpulan itu sangat jelas tersaksikan. Ilmuwan ini berlatar belakang ilmu sejarah. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Strata 1 dalam ilmu sejarah di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FADIB) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat menulis tesis magisternya, sayangnya, keilmuan sejarah ini tidak ia pakai. Tentu sangat ganjil jika seorang sejarawan menulis sejarah orang Kraton Yogyakarta, namun, tidak merujuk pada data Kraton Yogyakarta. Ia malah menandaskan pengklaiman atas KRT Sumodiningrat. Menjadi wajar bila nilai akhir tesis yang ia peroleh ada B+. Sebaris nilai yang bahkan untuk kelas skripsi S1 saja tidak layak. Apalagi untuk kelas tesis S2.

Ketumpulan lainnya tampak pada karya ilmiah Zainul Milal Bizawie. Memang, ia tidak secara khusus membahas KRT Sumodiningrat. Hanya saja, narasinya yang menampilkan klaim bahwa KRT Sumodiningrat adalah sosok bernama Hasan jelas sekali sangat rancu untuk seorang ilmuwan berlatas belakang ilmu sejarah. Apalagi, di salah-satu halaman bukunya itu, ia telah menunjukkan silsilah dan sejarah KRT Sumodiningrat yang benar sebagaimana termaktub di dalam data primer maupun dokumen resmi Kraton Yogyakarta.

Bizawie menulis bahwa Tumenggung Sumodiningrat adalah anak putri Sultan Hamengkubowono I. Sedangkan ayahnya adalah keturunan dari garis bupati Mataram lama (Bizawie 2019, 77). Celakanya, di halaman lain, ia menulis bahwa Tumenggung Sumodiningrat adalah Hasan Bin Yahya, yang dilahirkan dari seorang ayah bernama Thaha Bin Yahya dan ibu bernama Fatimah Al-Idrus (Bizawie 2019, 212). Padahal, jelas sekali data ini tidak memiliki rujukan otoritatif. Sebagai sejarawan, seharusnya ia merujuk sumber otoritatif tentang sejarah tokoh Kraton Yogyakarta. Ternyata nalar sejarahnya tumpul di sini. Lebih aneh lagi, ia menandaskan bahwa ia merujuk pada mimpi. Katanya:

> Narasi lokal itu penting diungkap meskipun bersumber oral historis turun temurun ataupun mimpi dari seseorang yang terpercaya. Praktik Habib Luthfi misalnya, dalam mengidentifikasi makam-makam kuno sebagai makam wali melalui mimpi dan visi spiritualnya telah berjalan lama. Banyak kuburan kuno yang sebelumnya tidak dikenali dan mengidentifikasikannya dengan identitas baru di berbagai tempat di Jawa, Kalimantan, Batam, dan daerah lainnya ditemukan oleh Habib Luthfi. Ini artinya, Habib

> Luthfi telah melakukan *proyek history making* atau produksi sejarah dengan metode baru, yaitu melalui mimpi dan visi spiritual. Sejarah dalam konteks ini bukan sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tapi sejarah yang dibuat, dipikirkan, dan dimaterialisasi. Dalam hal ini, mimpi atau visi spiritual menempati posisi sentral dalam proses identifikasi situs sejarah…
> Membangun kembali narasi sejarah Islam di Indonesia, khususnya sejarah ulama Nusantara tidak mudah dan penuh tantangan karena historiografi kolonial dan nasionalis dianggap sama-sama menutupi dan menyisihkan sejarah ulama nusantara. Menghadapi ketiadaan sumber-sumber tertulis, maka perlu menggunakan praksis sejarah alternatif, seperti mimpi atau *insight* dari seorang terpercaya guna mengakses masa lalu (Bizawie 2019, 18–20).

Kutipan langsung di atas, jika dibaca secara utuh, jelas memuat kontradiksi. Di paragraf pertama di atas, tertulis kalimat: "sejarah dalam konteks ini bukan sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tapi sejarah yang dibuat, dipikirkan, dan dimaterialisasi". Sedangkan di paragraf akhir kutipan di atas, terdapat narasi kontradiktif yang berbunyi: "Menghadapi ketiadaan sumber-sumber tertulis, maka perlu menggunakan praksis sejarah alternatif, seperti mimpi atau *insight* dari seorang terpercaya guna mengakses masa lalu". Awalnya Bizawie mengatakan bahwa "sejarah dalam konteks ini bukanlah peristiwa yang terjadi di masa lalu", namun, di bagian akhir ia malah menyatakan bahwa mimpi atau *insight* adalah sumber sejarah untuk mengakses masa lalu. Aneh sekali.

Selain itu, bukankah data tentang Kraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono, KRT Sumodiningrat sebagai tokoh, dan terkait dengan peristiwa Perang Sepehi, telah sangat jelas sekali datanya? Naskah asli *Babad Sepehi* yang dittulis oleh Pangeran Mangkudiningrat dan *Babad Bedahing Yogyakarta* yang ditulis oleh Pangeran Arya Panular sangat gampang diperoleh. Bahkan dua karya sejarah itu sudah dialih-aksarakan dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin Bizawie mengatakan: "menghadapi ketiadaan sumber-sumber tertulis"?

Dalam posisi ini, kerja ilmiah Ahmad Athoillah cukup layak dihargai dan diacungi jempol. Disertasinya yang mengkaji tentang orang Arab Hadrami di Karesidenan Kedu dan Pekalongan Abad ke-19 dan ke-20, sama sekali tidak menyebut adanya sosok bernama Hasan sebagai KRT Sumodiningrat dan Thaha sebagai KRT Joyokusumo atau KRT Notokusumo yang dikuburkan di Semarang (Athoillah 2020). Padahal, ia adalah ilmuwan yang berada di dalam jejaring Petanesia (Pembela Tanah Air Indonesia), sebuah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh HLY. Bahkan, di dalam disertasinya, ia berterima kasih kepada HLY atas dukungannya dalam pengerjaan disertasi itu.

e. Kebebalan Klaim dan Tantangan Ber*tabayyun*[5]

[5] *Tabayyun* adalah upaya yang dilakukan untuk mencari keterangan tentang sesuatu, biasanya, kabar tertentu.

Apakah lantas pihak pengklaim Hasan sebagai KRT Sumodiningrat mau menginsafi kekeliruannya? Setelah dibantah, tersingkaplah bahwa klaim atas KRT Sumodiningrat tidak disebutkan berasal dari manuskrip atau literasi tertentu. Beberapa pengikut HLY yang terhubung dengan saya atau bergiat di media sosial, mengklaim bahwa data Hasan adalah KRT Sumodiningrat berasal dari manuskrip yang berada di perpustakaan pribadi Sultan Hamengkubuwono X. Tidak hanya itu, mereka menyatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk ke perpustakaan itu selain Sultan dan orang yang diizinkan oleh Sultan.

Suatu ketika, dari pihak Kraton Yogyakarta telah mendatangi lokasi makam Hasan yang diklaim sebagai makam KRT Sumodiningrat. Dalam rangka memastikan kebenaran sejarah. Berdasarkan keterangan salah-satu abdi dalem Kraton Yogyakarta, PS, yang menangani masalah peninggalan sejarah berupa makam, ia telah meminta pihak pengklaim untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa makam KRT Sumodiningrat memang berada di sana. Ternyata bukti itu tidak ada. Padahal, awalnya pihak pengklaim mengatakan bahwa mereka memiliki manuskrip yang menjelaskan hal itu. Hingga petugas dari kraton menunggu cukup lama, bukti tidak didatangkan.

Sang *abdi dalem* lantas membeberkan data makam KRT Sumodiningrat berdasarkan data yang tersimpan di Kraton Yogyakarta. Bahwa makam tokoh ini berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Ia juga menyampaikan data berbasis catatan silsilah yang sahih.[6] Sayangnya, pihak pengklaim tidak mengindahkan arahan dari *abdi dalem* tersebut. Acara haul dan pemaparan sejarah Hasan yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat tetap dilangsungkan. Pada suatu gelaran haul, *abdi dalem* Kraton Yogyakarta lainnya mengatakan bahwa pihak Kantor Urusan Pengulon Kraton Yogyakarta diundang ke acara, namun, data-data yang telah dipaparkan oleh Kraton Yogyakarta tidak dipakai.[7]

Para pendukung klaim juga melakukan berbagai manuver yang bersifat pembohongan publik. Sebuah akun YouTube berjudul Kanzus Sholawat Blora mengunggah video saat HLY mengisi acara pengajian Hadeging Nagari Yogyakarta di hadapan Sultan Hamengkubuwono X dan jajarannya. Akun itu men*dubbing* atau mengganti suara berikut isi ceramah HLY yang disampaikan di forum itu dengan suara dan isi ceramah HLY yang berisi klaim tentang Hasan adalah KRT Sumodiningrat di Semarang. Jadi videonya lain, suara ceramah yang di video juga lain. Akun ini lantas menghapus video tersebut dari *channel*nya. Tepat setelah AS, keturunan Sultan Hamengkubuwono VIII yang juga seorang *abdi dalem* merangkap panitia acara

[6] Satu di antara garis besar perbincangan dengan PS pada 16 September 2023 di Ndalem Yudhanegaran, Yogyakarta. Pada waktu yang sama GBPH Yudhaningrat selaku tuan rumah dan juga adik Sultan Hamengkubuwono X juga ikut di dalam perbincangan.
[7] Wawancara dengan JY pada 26 Desember 2024 di Gedongtengen, Yogyakarta.

perayaan Hadeging Nagari Yogyakarta 2017, menuntutnya untuk menghapus video palsu tersebut. Bila tidak, Kraton akan bertindak karena jelas isinya adalah penipuan.[8]

Pernah pula salah-satu perwakilan para pendukung klaim itu, AR, mengontak saya lewat akun Facebooknya. Katanya ia adalah satu di antara orang menyaksikan langsung pembukaan makam Hasan di Semarang. Ia menuntut saya untuk melakukan *tabayyun* ke Pekalongan atau langsung bertemu dan berhadapan dengan HLY. Bahkan ia mengatakan akan mengantar-jemput saya dari Yogyakarta-Pekalongan dan sebaliknya.

Saya menyampaikan kepadanya jawaban yang telah saya sampaikan di kesempatan luas. Bahwa bagaimana mungkin kekeliruan sejarah yang telah mereka edarkan dan disiarkan secara luas melalui akun YouTube maupun dari berbagai tulisan ilmiah itu hanya diselesaikan dengan *tabayyun*? Bagaimanapun, *tabayyun* itu personal. Sedangkan, sejarah keliru yang telah disampaikan ke ruang publik, harus dibantah dan diluruskan pula di ruang publik. Atas dasar itu, saya menantang balik AR dan seluruh pihak pengklaim untuk duduk berhadapan di majelis ilmiah terbuka dan disiarkan secara *live* ke seluruh jaringan.

Hingga artikel ini ditulis, tidak ada jawaban atas tantangan saya. Seperti halnya ketiadaan jawaban atas tantangan salah satu trah Sultan HB II, YR, kepada para pengklaim untuk berdebat secara terbuka demi menunjukkan kekeliruan sejarah ada di pihak mana. Padahal tantangan AR itu telah disiarkan secara luas di YouTube dan di berbagai *platform* media sosial. Hingga saat ini, tetap tidak ada jawaban atas tantangan itu.

Satu reaksi dari akun YouTube ngadep dampar malah semakin menyingkapkan kekeliruan para pengklaim. Akun ini menampilkan video seorang tokoh kyai di Pekalongan bernama Haidar Hasan. Di hadapan orang-orang yang mendengarkannya berbicara, ia mengatakan bahwa Hasan adalah KRT Sumodiningrat lengkap dengan identitas klaim para pendahulunya. Katanya bahwa KRT Sumodiningrat adalah Hasan jelas tercatat di data keluarga HLY.

Ternyata Haidar Hasan dan semua narasi yang membela klaim ini selalu menampilkan klaim juga. Tidak ada data bantahan atas bantahan terhadap klaim mereka. Bahkan mereka lagi-lagi menampilkan tesis magister Siti Fatimah dan paparan Sulistyo Eko Cahyono. Padahal, dua sumber klaim ini telah terbantahkan dengan data-data sahih. Lebih parah lagi, ia menyampaikan bahwa makam Hasan yang berada di Lamper Kidul, Semarang, itu merupakan tanah yang dihadiahkan oleh Sultan HB II kepada Hasan (ngadep dampar 2024a; 2024b). Sebuah pembelaan yang keliru tentunya. Sebab sejak era Sunan Pakubuwono I, Semarang telah diserahkan kepada VOC sebagai imbalan atas bantuan para penjajah itu dalam menangkap

[8] Wawancara dengan AS pada 15 November 2023 di Yogyakarta.

Sunan Amangkurat III Dari sini tampak bahwa pihak pengklaim KRT Sumodiningrat dan para pendukungnya ini sungguh bebal.

Kesimpulan

Analisis atas "pencurian" sejarah KRT Sumodiningrat di atas menunjukkan beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa "pencurian" ini tidak mewujud di ruang publik begitu saja. Kedua, ia telah lama hadir di ruang publik di dalam suasana yang tidak disadari bahkan oleh "pemilik" sejarah KRT Sumodiningrat, yaitu orang Jawa. Ketiga, ia merupa sebagai sebuah klaim sejarah yang memiliki asal-mula, proses, transformasi, agensi atau keaktoran. Tampak pula retakan-retakan sejarah pengklaiman tersebut sebagai sebuah fase.

Keempat, pengklaiman tersebut telah dimulai secara luas sejak 2005 hingga paling tidak 2023. Kelima, ada aktor yang terlibat dalam pencurian sejarah tersebut. Mulai dari ulama, birokrat, ilmuwan, hingga para pecinta masing-masing. Aktor yang secara sadar atau tidak, ikut tertarik karena menjadi bagian dari jejaring aktor utama, yaitu HLY dan MTDH. Keenam, di antara aktor-aktor yang terlibat tersebut terdapat para ilmuwan yang dalam kerja ilmiahnya justru mengalami ketumpulan.

Tantangan besar penjagaan kedaulatan sejarah ada di aspek ini. Bahwa sejarah ditentang oleh berbagai aktor yang berupaya untuk "membuat" sejarah berdasarkan versi terawangan, mimpi, fanatisme religius, dan keengganan untuk menerima data serta fakta sejarah. Aspek terakhir ini terbentuk dari sikap untuk tidak memedulikan data berupa manuskrip maupun pengetahuan sejarah yang telah dilestarikan sejak lama. Karena itu, Dinas Kebudayaan dan otoritas ilmiah, setidaknya memiliki upaya dalam rangka kultural demi penjagaan kedaulatan sejarah bangsa Indonesia.

Rujukan

Akhmad Saefudin. 2022. "Mengkritisi Sejarah KRT Sumodiningrat (Pamanda Pangeran Diponegoro)." *Koran Tribun Timur Makassar*, December 27, 2022.

Alatas, Ismail Fajrie. 2020. "Dreaming Saints: Exploratory Authority and Islamic Praxes of History in Central Java." *Journal of the Royal Anthropological Institute* 26 (1): 67–85.

———. 2021. *What Is Religious Authority?: Cultivating Islamic Communities in Indonesia*. United State of America: Princeton University Press.

Arafat, M Yaser. 2023a. "Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Sumadiningrat Bukan Habib Hasan Bin Thoha Bin Yahya: Analisis Kritis Di Balik Kesalahpahaman Sejarah." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 4 (2): 86–96.

Arafat, M. Yaser. 2023b. "KRT Sumadiningrat Bukan Habib Hasan Bin Thoha Bin Yahya." Yogyakarta.

Arya Panular, Pangeran. 2017. *Babad Ngengreng [Edisi Pelatinan Dan Terjemahan Peter Carey]*. Edited by Peter Carey. Jakarta: Buku Kompas.

Asa, Kusnin, and M L Yahya. 2021. *Sejarah Pekalongan (Pekalongan History)*. Pekalongan: Yayasan Peduli Sejarah Indonesia.

Assegaf, Muhdor Ahmad. 2021. *Cahaya Dari Nusantara: Maulana Habib Luthfi Bin Yahya: Catatan Kekaguman Dan Kecintaan Seorang Santri*. Pemalang: Abna' Seiwun.

Athoillah, Ahmad. 2020. “Arab-Tuwan Dan Arab-Raden: (Pencarian) Identitas Kolektif Arab-Jawa Di Pekalongan Dan Kedu Abad Ke-19 Dan Abad Ke-20.” Yogyakarta: Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Aulia, Fitrotun Nafisah, and Wisnu. 2023. “Kajian Historis Prasasti Dalam Jejak Kekuasaan Raja Airlangga DI Kota Lamongan Pada Abad Ke-11.” *Avatara* 14 (1).

AW Kertapati Channel. 2023. “GBPH YUDHANINGRAT !! TERKONFIRMASI !! MAKAM KRT SUMODININGRAT BUKAN MAKAM HABIB HASAN BIN YAHYA !!.” https://www.youtube.com/watch?v=h4fISkuUhXM&t=647s.

Bizawie, Zainul Milal. 2019. *Jejaring Ulama Diponegoro: Kolaborasi Santri Dan Ksatria Membangun Islam Kebangsaan Awal Abad Ke-19*. Jakarta: Pustaka Compass.

Carey, Peter. 1980. *The Archive of Yogyakarta, Volume I: Documents Relating to Politics and Internal Court Affairs*. Oxford: Oxford University Press.

———. 2008. *The Power of Prophecy; Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855*. Leiden: KITLV Press.

———. 2017. *Inggris Di Jawa 1811-1816*. Jakarta: Buku Kompas.

Dajapertama, R.M.Ng.;, and R.M.B. Dirdjasoebrata. n.d. *Serat “Radja-Poetra” (Babon Saking Swargi R.M. Toemenggung Sasrakoesoema Ing Kalasan-Ngajogyakarta*. Solo: Drukkerij “Melati” Keprabon.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. 2023. “Laporan Akhir Kajian Tentang Tokoh Dan Peristiwa Sejarah Di Kota Semarang.” Semarang.

Fatimah, Siti. 2019. “Peran Habib Hasan Bin Thoha (KRT. Sumodiningrat) Dalam Melestarikan Tradisi Islam Di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Pada Masa Sultan Hamengku Buwono II, 1792-1819 M.” Tesis Magister Interdiciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Foucault, Michel. 1975. “Discipline and Punish.” *A. Sheridan, Tr., Paris, FR, Gallimard*.

———. 2005. *The Order of Things*. Routledge.

Gutting, Gary. 2005. *The Cambridge Companion to Foucault*. Cambridge University Press.

Https://jatengprov.go.id/. 2019. “Pengajian Bisa Jadi Wahana Saling Mengingatkan.” 2019. https://jatengprov.go.id/publik/pengajian-bisa-jadi-wahana-saling-mengingatkan/.

https://wantimpres.go.id/. 2022. “Habib Luthfi Menghadiri Haul Habib Hasan Bin Thoha Bin Yahya Di Semarang.” 2022. https://wantimpres.go.id/id/2022/12/habib-luthfi-menghadiri-haul-habib-hasan-bin-thoha-bin-yahya-di-semarang/.

Jati Sumo Negoro. 2023. “KALAM JSN - DATA SEJARAH YANG DIMILIKI ABAH... WAJIB DITONTON !! Habib Muhdhor Assegaf.” https://www.youtube.com/watch?v=G33N6IIbb5o&t=83s.

Majalah al-Kisah. 2006. “Manaqib Al-Habib Hasan Bin Yahya (Syekh Kramat Jati).” Https://Sites.Google.Com/Site/Pustakapejaten/Manaqibbiografi/6-Habaib-Nusantara/al-Habib-Hasan-Bin-Yahya-Syekh-Kramat-Jati. February 16, 2006. https://sites.google.com/site/pustakapejaten/manaqibbiografi/6-habaib-nusantara/al-habib-hasan-bin-yahya-syekh-kramat-jati.

Majelis Azzahir. 2021. “Haul Habib Hasan Bin Thoha Bin Yahya Semarang Bersama AZZAHIR Pekalongan, 18 Desember 2021.” https://www.youtube.com/watch?v=uQxj4alXTmY.

“Manaqib Habib Hasan Bin Thaha Bin Yahya|Syaikh Kramatjati|Singobarong.” 2018. 2018. https://darulhasyimijogja.org/manaqib-habib-hasan-bin-thaha-bin-yahya-syaikh-kramatjati-singobarong/.

Mandoyokusumo, KPH. 1988a. *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat*. Yogyakarta: Musium Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

———. 1988b. “Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat.” *Musium Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta*.

Mangkudiningrat;, Pangeran, and Yudhi Irawan. 2018. *Babad Sepehi Suntingan Teks Dan Aspek Kesejarahan*. Jakarta: Perpustakaan Nasiional RI.

Margana, Sri. 2010. *Kraton Surakarta Dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

MT Darul Hasyimi Jogja. 2018a. “[LIVE] MAULID NABI MUHAMMAD SAW DALAM RANGKA HAUL HABIB HASAN BIN TOHA BIN YAHYA(SYEIKH KRAMAT JATI).” https://www.youtube.com/live/J-fR6A1YCbo.

———. 2018b. “‘SINGOBARONG? Habib Luthfi : Makna Haul Dan Sejarah Dari Syech Kramat Jati Tumenggung Sumodiningrat.’” https://youtu.be/fTSrc9PVKJY?si=oTKfuXV5_BwHdNRf.

———. 2019. “Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW & Haul Habib Hasan Bin Thoha Bin Yahya/Syaikh Kramatjati.” https://www.youtube.com/live/eYYJTZb6lTg.
———. 2020. “MAULID AKBAR Dalam Rangka Haul Habib Hasan Bin Yahya & Habib Thoha Bin Yahya.” https://www.youtube.com/live/VLFiRE6-htc.
———. 2021. “Peringatan Maulid Nabi Dan Haul KRT Sumodiningrat (Habib Hasan) Bersama Habib Luthfi Bin Yahya.” https://www.youtube.com/live/2BodybreA_Q?feature=share.
———. 2022a. “HAUL HABIB HUSEIN BIN THOHA BIN YAHYA DAN SYEKH ABIL HASAN AS SYADZILY, 5 JUNI 2022.” https://www.youtube.com/watch?v=PN0K54XK4Eg.
———. 2022b. “Haul Habib Thoha Bin Yahya Bersama Habib Luthfi.” https://www.youtube.com/live/WpFvRWX71uY.
———. 2023. “‘HAUL 2023’ HABIB HASAN BIN THOHA BIN YAHYA.” https://www.youtube.com/watch?v=3bpRk-JKtYY&t=9655s.
———. 2024. “MAULID NABI MUHAMMAD SAW & HAUL HABIB THOHA BIN MUHAMMAD BIN YAHYA.” https://www.youtube.com/watch?v=7zlrPXKBPFs&t=18s.
ngadep dampar. 2024a. “Data DBukti Makam Habib Hasan KRT Sumodiningrat Di Semarang, ASLI.” https://www.youtube.com/watch?v=EGfjmGaoPsY&t=3s.
———. 2024b. “Titik Terang 2 Makam KRT. Sumodiningrat / Habib Hasan Bin Thoha Bin Yahya.” https://www.youtube.com/watch?v=7vw9ZHjHE1U&t=82s.
Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun. 1956. *Kota Jogjakarta 200 Tahun*. Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang. 2024. “Sejarah Kota Semarang.” Https://Ppid.Semarangkota.Go.Id/Profil-Kota-Semarang/Sejarah-Kota-Semarang/. March 11, 2024.
Qomar, Akhlis Syamsal. 2023. *Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Ricklefs, Merle Calvin. 2002. *Yogyakarta Di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*. Yogyakarta: Matabangsa.
Semarang Pemkot. 2020. “MAULID NABI MUHAMMAD SAW & HAUL HABIB HASAN BIN THOHA BIN MUHAMMAD BIN YAHYA KRAMATJATI SEMARANG.” https://www.youtube.com/live/JvObaKY7OFg.
———. 2022. “HAUL HABIB HASAN BIN TOHA BIN YAHYA.” https://www.youtube.com/live/ClvM1U5HG1o.
———. 2024. “HAUL HABIB THOHA BIN MUHAMMAD BIN YAHYA.” https://www.youtube.com/watch?v=pfC_Z1ZF1NQ&t=11643s.
Serat Salasilah Para Loeloehoer Ing Kadanoeredjan. 1899.
Soekanto. 1952. *Sekitar Jogjakarta 1755-1825*. Yogyakarta.
Suharmaji, Lilik. 2023. *Mangkubumi: Raja Terbesar Kedua Penerus Mataram 1717-1792*. Yogyakarta: Matabangsa.
Taylor, Dianna. 2014. *Michel Foucault: Key Concepts*. Routledge.
Thorn, Major W. 1815. “Memoir of the Conquest of Java with the Subsequent Operations of the British Forces in the Orient.” London: T. Egerton, Military Library, Whitehall.
Yasadipura, Raden Ngabei. 1938. *Babad Giyanti*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mencontoh Kedaulatan Tanah Yogyakarta Untuk Kedaulatan Pangan Indonesia

(Kajian Historis dan Budaya)

MAKALAH

Neng Marlina Efendi

Alumni Universitas Gadjah Mada

SIMPOSIUM PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA

DINAS KEBUDAYAAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2025

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia yang memiliki aturan khusus sistem pemerintahannya. Termasuk dalam tata kelola tanah. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai Kesultanan Yogyakarta (Tanah Kasultanan) dan Tanah Pakualam bukanlah bagian dari tanah swatantra. Sehingga, tidak melanggar tata aturan hak tanah di Indonesia. Tanah-tanah yang berada pada kekuasaan Kesultanan inilah yang menjadi nilai kesejahteraan pangan bagi masyarakat Yogyakarta. Meski bukan hak milik pribadi, tetapi rakyat Yogyakarta boleh menggunakan tanah Kesultanan dengan status magersari. Tanah kesultanan tersebut digunakan untuk menunjang pemenuhan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan. Kedaulatan pangan berdampingan erat dengan pemenuhan hak tanah pada rakyat. Ketika rakyat memiliki lahan untuk diolah sebagai bahan pangan, maka pemenuhan pangan terjadi. Namun permasalahan di Indonesia, kedaulatan rakyat atas tanah harus bersinggungan dengan kaum kapital (pemilik modal) yang cenderung menggunakan tanah sebagai alat produksi mereka demi pemenuhan kapital-kapital baru. Seperti alih fungsi lahan yang menyebabkan penurunan pangan. Dalam penulisan makalah ini, penulis berfokus pada bagaimana sistem pengelolaan tanah oleh negara sebagai salah satu solusi pemenuhan pangan bagi rakyat Indonesia. Melalui sistem yang dikelola seperti yang dilakukan Yogyakarta, kedaulatan pangan dapat terwujud. Maka dari itu, penelitian ini mencoba menelusuri dan menjawab (1) Bagaimana upaya negara dalam reorientasi kedaulatan rakyat atas tanah? (2) Bagaimana sistem kepemilikan tanah di Yogyakarta dapat meningkatkan kesejahteraan pangan rakyat Yogyakarta? (3) Bagaimana kaitannya implementasi kedaulatan tanah atas rakyat melalui sistem kepemilikan tanah di Yogyakarta dengan kedaulatan pangan di Indonesia? Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan literatur yang lebih dalam mengkaji secara historis dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat atas tanah di Indonesia harus diatur lebih jelas oleh negara agar tanah tidak hanya dikuasai oleh pemilik modal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya perlindungan kedaulatan rakyat atas tanah. Terutama tata kelola tanah yang dikuasai oleh selain warga negara Indonesia. Tanah di Indonesia haruslah menjadi tanah rakyat Indonesia, sama halnya dengan tanah di Yogyakarta yang digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Yogyakarta.

Kata Kunci : Kedaulatan tanah, Kedaulatan pangan, Kedaulatan rakyat atas tanah

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Urgensi kepemilikan tanah pada masyarakat Indonesia menjadi masalah utama dalam upaya kesejahteraan pangan. Kepemilikan tanah yang beralih fungsi menjadi faktor produksi dalam sistem kapitalisme menyebabkan fungsi tanah tidak lagi sebatas untuk pemenuhan angka produksi pangan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, menjadi perkantoran, ataupun menjadi lahan non agraris mengakibatkan keterbatasan lahan untuk memproduksi bahan pangan. Kepemilikan tanah oleh kaum kapital ini mengubah sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang semula pada wilayah agraris menjadi wilayah industri atau sejenisnya. Hal ini menjadi kemelekatan bagi manusia dan industri non agraris. Ketika masyarakat tidak memiliki lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, maka harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli. Ketika masyarakat tidak memiliki lahan, ada pergantian fungsi ekonomi pada masyarakat tersebut yang semula menjadi produsen, distributor, dan konsumen beralih menjadi hanya sebagai konsumen. Kehilangan faktor produksi tersebut, membuat masyarakat harus mematuhi aturan pasar yang mengikat mereka. Aturan pasar artinya harga mengikat, sementara ketika memiliki lahan sebagian dari hasil panen dapat dijadikan sebagai konsumsi rumah tangga.

Tanah yang merupakan sumber daya esensial karena dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, sebetulnya sejak Indonesia merdeka telah diatur. Hal tersebut dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan tentang negara memiliki kuasa atas sumber daya alam yang ada di dalamnya dengan tujuan menyesejahterakan rakyat. Artinya sudah jelas bahwa sumber daya alam termasuk tanah digunakan negara untuk menjadi alat pencapaian kesejahteraan warganya. Perebutan ekonomi dan pasar menjadi salah satu alasan penting mengapa kedaulatan tanah sangat perlu diatur oleh negara dengan mewujudkan amanat UUD 1945. Perebutan ekonomi dan pasar dapat mengakibatkan perampasan tanah secara luas. Pola penguasaan tanah yang berdasar pada kepentingan pasar menyulitkan kedaulatan pangan terwujud. Kedaulatan pangan berdampingan dengan lahan dan pangan.

Menurut Maria S. W. Sumardjono dalam Ari Sukanti Hutagalung yang dikutip dalam artikel berjudul Kewenangan negara dalam penguasaan tanah : redistribusi tanah untuk rakyat yang ditulis oleh Denico Doly (Doly, 2017) menjelaskan bahwa adanya fenomena

yang mendasar perubahan fungsi lahan yang diamanatkan oleh UUD 1945 menjadi kepentingan kapital. Fenomena tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Tanah difungsikan sebagai mekanisme akumulasi modal yang berakibat terpinggirkannya hak-hak pemilik tanah pertanian;
2. Seiring dengan perkembangan kapitalisme, nilai tanah hanya dilihat berdasarkan nilai ekonomisnya (tanah sebagai komoditas), nilai nonekonomis menjadi di/terabaikan;
3. Perubahan fungsi tanah, tanah sebagai salah satu produksi utama menjadi sarana investasi dan alat spekulasi/akumulasi modal;
4. Globalisasi ekonomi mendorong kebijakan pertanahan yang semakin adaptif terhadap mekanisme pasar, namun belum diikuti dengan penguatan akses rakyat dan masyarakat hukum adat/tradisional/lokal terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah.

Negara melalui Kementerian ATR/BPN masih melakukan upaya kedaulatan tanah. Namun, yang dilakukan oleh negara masih sebatas hal-hal yang bersifat administrasi. Administrasi inilah yang menjadi cikal bakal konflik-konlifk pertanahan yang ada di Indonesia. Tak terkecuali Yogyakarta. Indonesia belum menyentuh hal yang substansial terkait dengan permasalahan kedaulatan tanah. Bahwa kedaulatan tanah berdampak terhadap kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan tanpa kedaulatan tanah bagi petani sangatlah sulit. Negara belum memberikan jaminan kuat atas kedaulatan tanah bagi para petani. Terlebih, praktik pembebasan lahan oleh negara yang bergandengan tangan dengan kaum kapital (swasta/perusahaan non negara).

Bali merupakan salah satu contoh wilayah di Indonesia yang sudah mulai terlihat pemindahan kepemilikan lahan dari warga lokal Bali ke warga luar Bali yang didominasi oleh kelompok-kelompok kapital dari negara-negara lain. Sehingga menyebabkan warga asli Bali kehilangan tanah dan menjadi kelas pekerja bagi warga negara asing. Tentu, ini menjadi masalah karena kedaulatan negara sedang diuji.

Tidak hanya Bali, Jakarta menjadi satu daerah di Indonesia yang hampir mustahil memiliki tanah dengan harga yang wajar. Di Jakarta, kepemilikan tanah didominasi oleh kaum kapital yang membuat harga tanah semakin tinggi. Pembangunan di Jakarta yang mengutamakan pembangunan fisik, yang mana tanah dijadikan alat faktor produksi seperti gedung perkantoran, perumahan berbentuk apartemen, hingga gedung-gedung hiburan. Alasan ekonomi yang mana tanah menjadi objek ekonomi dengan motif mencari keuntungan setinggi-tingginya. Ini berbanding terbalik dengan fungsi tanah dalam pengertian ideologi Indonesia. Secara amanat UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 33

ayat 3 bahwa tanah bertujuan untuk menjadi objek ekonomi yang menyejahterakan rakyat. Tanah digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemilik modal yang menjadikan alat pemuas ekonomi demi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini pula tentu tidak sejalan dengan ideologi Pancasila ketika tanah dijadikan sebagai alat keuntungan bagi kaum tertentu sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi golongan lain. Juga akan menyebabkan ketimpangan sosial yang mana rakyat yang tidak memiliki modal untuk memiliki tanah, semakin tidak memiliki tanah. Sementara pemilik modal semakin kaya karena memiliki tanah yang banyak. Hal ini tentu terjadi juga karena negara abai terhadap pendistribusian tanah pada rakyatnya.

Tanah juga menjadi alat sengketa yang sering terjadi di Indonesia. Pun di Yogyakarta. Meskipun Yogyakarta memiliki aturan khusus yang dilindungi oleh Undang Undang, tidak serta merta bebas dari sengketa tanah bahkan dengan negaranya sendiri. Seperti yang pernah terjadi ketika masyarakat Yogyakarta harus bertarung melawan TNI AD di Yogyakarta yang mengklaim tanah Sultan sebagai tanah milik negara[1].

Tanah dan pangan berdampingan erat kebutuhannya. Untuk mencapai kedaulatan pangan, dibutuhkan ketersediaan lahan. Permasalahan tanah harus melibatkan negara secara serius. Hukum agraria yang ketat diperlukan untuk memastikan kebermanfaatan tanah bagi kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjamin penambahan kekayaan pemilik modal. Salah satu contoh penggunaan tanah yang melibatkan otoritas negara adalah penggunaan tanah di Yogyakarta. Permasalahan tanah di Yogyakarta terutama pada tanah yang menjadi hak milik dari Keraton atau Kasultanan merupakan topik yang masih dianggap sensitif. Sistem pertanahan di Yogyakarta erat kaitannya dengan warisan leluhur yang diteruskan secara turun temurun. Secara historis, Yogyakarta masih mempertahankan konsep-konsep budaya yang kuat dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakatnya. Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Kedaulatan Tanah di Yogyakarta dapat menyejahterakan masyarakatnya?*

1.2. Rumusan Masalah

Dalam makalah ini, untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan, penulis telah merancang rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1) Bagaimana upaya negara dalam reorientasi kedaulatan rakyat atas tanah?
2) Bagaimana sistem kepemilikan tanah di Yogyakarta dapat meningkatkan kesejahteraan pangan rakyat Yogyakarta?

[1] Rumah di Sultan Ground Jadi Obyek Sengketa - Kompas.id diakses pada tanggal 18 Desember 2024 pada pukul 22.06 WIB

3) Bagaimana kaitan implementasi kedaulatan tanah atas Rakyat melalui sistem kepemilikan tanah di Yogyakarta dengan kedaulatan pangan di Indonesia?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Manfaat Penelitian

Dari berbagai kajian yang dilakukan penulis, diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat baik dari secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
    a. untuk meluaskan pengetahuan mengenai pemanfaatan tanah berbasis budaya dan historis
    b. untuk memberikan arah pemikiran baru terhadap kedaulatan tanah oleh negara melihat dari pengelolaan tanah secara warisan budaya dari Yogyakarta.
2. Manfaat Praktis
    a. hasil tulisan ini memiliki harapan dapat menjadi pemikiran baru mengenai pelaksanaan tata kelola tanah yang berbasis pada kepentingan rakyat.
    b. hasil tulisan ini memiliki harapan dapat menjadi menjadi sumber baru dan menjadi pelengkap bagi sumber yang belum ada, terutama yang berhubungan dengan kedaulatan tanah di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penjelasan dari latar belakang yang ada, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. menjelaskan mengenai bagaimana upaya negara dalam reorientasi kedaulatan tanah atas tanah.
2. menjelaskan mengenai sistem kepemilikan tanah di Yogyakarta yang dapat meningkatkan kesejahteraan pangan rakyat Yogyakarta.
3. menjelaskan kaitan implementasi kedaulatan tanah atas rakyat melalui sistem kepemilikan tanah di Yogyakarta dengan kedaulatan pangan di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Suharsimi Arikunto (Arikunto, 2006) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal yang telah disebutkan, yang hasilkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif (Purba & Simanjuntak, 2021, p. 19) merupakan suatu jenis penelitian

yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Tujuan penelitian deskriptif yakni menggambarkan secara secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Lebih lanjut dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sesuai dengan langkah-langkah penelitian sejarah sebagai berikut:

1. Heuristik merupakan langkah pengumpulan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini sumber ditemukan melalui studi literatur. Studi literatur adalah kajian sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel dalam jurnal, proseding seminar, dan arsip-arsip lainnya seperti dokumen UU, dokumen Peraturan Pemerintah, dan Pergub DIY.
2. Verifikasi merupakan langkah memberikan penilaian atas sumber yang telah dikumpulkan untuk mencari kesesuaian isi sumber-sumber yang dapat dijadikan data kredibel dan akurat.
3. Interpretasi merupakan langkah analisis terhadap data-data yang telah ditemukan menjadi suatu hipotesa baru atau gagasan baru.
4. Historiografi merupakan langkah pelaporan hasil interpretasi berupa makalah.

BAB II. TINJAUAN LITERATUR

Setelah mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan mencontoh kedaulatan tanah Yogyakarta untuk kedaulatan pangan Indonesia dari buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya berupa disertasi, tesis, dan skripsi, juga artikel-artikel dalam jurnal-jurnal. Hasil pengumpulan literatur yang telah diverifikasi hingga menghasilkan interpretasi inilah saya menemukan bahwa tidak sedikit penulis membahas mengenai tanah di Yogyakarta sebagai sistem khusus di bawah UU yang mengatur tentang tanah di Indonesia. Yogyakarta memiliki sistem tersendiri karena bentuk daerahnya yang bertanda istimewa. Sistem kekhususan di Yogyakarta tidak hanya persoalan tentang kepala daerah yang mana mereka tidak melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, tetapi juga tentang kepemilikan tanah yang diatur dalam tiga jenis kepemilikan tanah. Sistem kekhususan ini memberikan legitimasi pada tanah yang berada pada penguasaan Keraton Yogyakarta (keluarga Sultan).

Dari berbagai literatur yang saya temukan, kedaulatan tanah Yogyakarta hanya dapat ditemukan pada tanah yang merupakan Sultan Ground dan Pakualam Ground. Kedua jenis hak tanah ini diperuntukkan kepada masyarakat DIY untuk dimanfaatkan sebagai lahan penunjang kehidupan seperti perumahan dan lahan agraris pertanian. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Peminjaman lahan pun memiliki sistem tersendiri.

Beberapa literatur juga membahas mengenai budaya Keraton yang kaitannya dengan tanah. Sebagai wilayah yang memiliki kekhususan sistem pemerintahan daerah, Kraton identik dengan warisan budaya yang telah dijalankan sejak masa Kesultanan Mataram hingga terpecah dalam Perjanjian Gianti. Meskipun mengalami perubahan wilayah akibat perjanjian Giyanti, sistem budaya pada Keraton Ngayogyakarta (Yogyakarta) tetap dijalankan. Termasuk dalam sistem pertanahan. Warisan budaya tersebut ada pada sistem pemanfaatan lahan milik Kraton yang digunakan oleh masyarakat. Melalui sistem magersari. Warisan budaya dalam pengaturan tanah Kraton terlihat dalam serat kekancingan yang merupakan surat izin dari pihak Kraton untuk masyarakat yang mengajukan penggunaan lahan Sultan.

Dalam makalah ini, saya mengkaji bagaimana warisan budaya Kraton tentang penggunaan tanah sebagai upaya menjaga ketentraman dan kesejahteraan warga Yogyakarta. Literatur yang saya temukan lebih banyak membahas mengenai sistem perjanjian tanah ala Kraton Yogyakarta. Namun, dalam banyaknya literatur yang ditemukan, saya belum menemukan data yang mengaitkan Sistem Sultan Ground dengan peningkatan lahan di Indonesia.

2.1. Kedaulatan Tanah Yogyakarta untuk Kedaulatan Pangan Indonesia dalam literatur

Dalam kajian literatur yang saya lakukan, terdapat tiga tipologi berkaitan dengan pembahasan mencontoh kedaulatan tanah Yogyakarta untuk kedaulatan pangan Indonesia. Yaitu Kedaulatan tanah dan UU Kepemilikan tanah, Tanah dan warisan budaya leluhur, Sultan Ground dan Pakualaman Ground.

1. Kedaulatan tanah dan UU Kepemilikan tanah di Yogyakarta

   Tanah Sultan erat kaitannya dengan konsep Kerajaan yang umumnya diterapkan di wilayah Pulau Jawa yang mana Sultan sebagai pemimpin kerajaan yang menjadi pusat dari kerajaan tersebut. Sultan memiliki kekuasaan, kekuatan, dan juga pemilik dari semua yang terdapat pada kerajaan termasuk Sultan sebagai pemilik tanah. Jika dilihat dari pengertian tersebut, kedaulatan tanah hanya berlaku pada Sultan sebagai pemilik. Namun, pada tulisan ini penulis melihat bahwa penggunaan tanah yang dikuasai oleh Sultan tidak serta merta digunakan sebagai alat kapitalisasi. Semisal memberikan nominal tinggi pada masyarakat yang diberikan hak kelola atas tanah Sultan tersebut. Meskipun, tentu saja ini tidak bisa dihilangkan fakta bahwa kekuasaan Sultan atas tanah di Yogyakarta menjadi salah satu alat penerusan kelanggengan sistem pemerintahan Yogyakarta saat ini.

   Menurut Oka Mahendra (Mahendra, 1996) dalam bukunya berjudul menguak masalah hukum, demokrasi, dan pertanahan menjelaskan bahwa Secara yuridis, Pasal 9

ayat (2) UUPA menyatakan bahwa menguasai dan menggunakan tanah secara individual dimungkinkan dan diperbolehkan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 21, 29, 36, 42, dan 45 UUPA yang menguraikan tentang persyaratan pemegang hak atas tanah juga menunjukkan prinsip penguasaan dan penggunaan tanah secara individu. Namun, hak-hak atas tanah yang individu dan bersifat pribadi terkadang mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan atau unsur kemasyarakatan ada pada tiap hak atas tanah karena semua hak atas tanah secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa (hak bersama).

Astrid Paramudita Harianto (Harianto, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul ketentuan pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Asas Persamaan Hak Menurut Ketentuan UUPA menyebutkan bahwa secara historis, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Undang Undang Daerah Istimewa Yogyakarta (UURI No.3/1950 jo. UURI No.19/1950) yang dibentuk pada masa kemerdekaan. Undang Undang ini mengatur bahwa Yogyakarta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur Provinsinya sendiri, termasuk di dalamnya urusan pertanahan. Berdasar atas wewenangnya itu dan sambil menunggu dibentuknya Undang Undang Pokok mengenai Hukum Tanah Republik Indonesia, awalnya daerah Istimewa Yogyakarta pernah membentuk Peraturan Daerah tentang urusan pertanahan, saat ini sudah ada Undang Undang Keistimewaan DIY.

Ahmad Fadli dkk (Fadli & Ali, 2021) dalam artikelnya berjudul kedaulatan tanah berbasis kearifan lokal Desa Rejoagung kecamatan Semboro Kabupaten Jember menjelaskan tentang bagaimana warisan budaya mengatur tentang pertanahan sehingga mereka tetap mempertahankan kedaulatan tanahnya. Sistem tanah pada masyarakat Desa Rejoagung merupakan kearifan lokal dalam menjaga kedaulatan tanah mereka. Aturan tersebut adalah adanya pelarangan kepada masyarakat untuk tidak melakukan jual beli atau sewa tanah kepada orang luar desa Rejoagung. Aturan pada masyarakat Desa Rejoagung merupakan hukum adat yang dipatuhi bersama. Mereka memiliki tahapan sendiri ketika terpaksa menjual tanahnya. Pertama dilakukan adalah menawarkan tanah kepada saudara kandung, jika tidak ada ditawarkan pada saudara yang agak jauh. Ketika tidak ada keluarga "satu darah" maka penjual tanah menawarkan pada tetangga. Ketika tidak ada, maka tanah yang akan dijual diumumkan kepada warga desa Rejoagung.

Ahmad Fadli dkk juga menyoroti tentang bagaimana konflik tanah terjadi akibat dari ketidakpastian hukum dan sengketa hukum. Dua hal ini terjadi akibat distribusi tanah yang tidak berlandaskan keadilan ketika tanah dikuasai oleh pemilik modal.

Sementara di Desa Rejoagung, aturan hukum adat diberlakukan agar masyarakat tidak kehilangan tanah. Bagi masyarakat Desa Rejoagung, tanah ada penghidupan mereka sebagai petani. Maka, ketika tidak memiliki tanah kesulitan untuk mencari penghidupan. Warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi inilah yang harus dijadikan kesadaran bagi negara. Bahwa tanah tidak dikuasai oleh kaum pemilik modal dan sebagai langkah pencegahan terhadap konflik kepentingan tanah.

Sementara itu, menurut Budi Harsono (Harsono, 1995, p. 268) dalam bukunya berjudul Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya menjelaskan bahwa hak menguasai negara atas tanah diartikan sebagai konsep yang diberikan undang undang pokok agraria kepada lembaga hukum kongkret antara negara dan tanah Indonesia yang dijelaskan secara kompleks isi beserta tujuannya dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA.

Kedaulatan tanah untuk rakyat yang diatur dalam UUD mengatur mengenai konsepsi penguasaan negara yang menurut Anna Triningsih (Triningsih & Aditya, 2019) diartikan sebagai kedaulatan rakyat. rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin ”dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Dalam makna lain, penguasaan tanah oleh negara harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Tanah dan warisan budaya leluhur

Pada literatur yang ditemukan, penulis banyak menemukan kaitan sistem pertanahan di Yogyakarta dengan warisan budaya leluhur melalui sistem magersari. Setiap membahas mengenai sistem tanah di Yogyakarta, para penulis menjelaskan tentang sistem magersari. Sistem magersari merupakan sistem pertanahan yang sudah dijalankan secara turun temurun. Tanah Magersari adalah tanah di Yogyakarta yang disebut tanah Sultan yang boleh dimanfaatkan rakyatnya baik itu untuk menjadi tempat tinggal maupun pengelolaan tanah untuk pertanian dan lainnya.

Menurut Aghisna Nurfahmi Fauziah (Fauziah, 2017) dalam penelitiannya berjudul Aspek Hukum Tanah Magersari di Keraton Yogyakarta (Studi atas Status Tanah Keraton di Daerah Istimewa Yogyakarta) mendefinisikan magersari sebagai suatu hak yang diberikan kepada rakyat, kepada yang berkepentingan sebagai penghuni Sultan Ground dan antara penghuni Sultan Ground ada ikatan historis dan diberikan hanya kepada WNI pribumi dengan jangka waktu selama mereka menghuni. Hak magersari diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanah untuk lokasi tempat

tinggal. Bahwa magersari merupakan hak atas tanah yang diberikan kasultanan atau kadipaten kepada perorangan yang memiliki hubungan kerja atau historis dengan keraton yang dapat memanfaatkan tanah milik Keraton tersebut. Tanah magersari memiliki prosedur dan tata aturan sendiri sesuai dengan yang diatur oleh pihak keraton. Lanjutnya, tanah magersari dapat dialihkan hak atas tanahnya oleh perorangan atau lembaga pemerintah maupun swasta lainnya dengan izin dan persetujuan dari pihak kasultanan atau Kadipaten melalui ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Sultan Ground dan Pakualaman Ground

Dari berbagai literatur yang penulis temukan, di antaranya banyak menyebut tentang tanah di Yogyakarta sebagai Sultan Ground. Salah satunya menurut Prasetyo Aji (AJI, 2014) yang menyebutkan bahwa Sultan Ground diartikan sebagai tanah adat peninggalan turun temurun yang dimiliki oleh lembaga Keraton. Menurut Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K1/I.5/849/80 tanggal 24 Maret 1980 perihal Permohonan Status Tanah SG oleh *Pengageng Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo Karaton Ngayogyakarta* : tanah kasultanan keberadaannya diperkuat dan dipertegas sebagai hak milik bahkan tidak dipermasalahkan pengertian tentang tanah milik Sultan (sultan ground) maupun milik pemerintahan kasultanan (sultanaat ground).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (32) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang dimaksud dengan "tanah kadipaten (pakualaman Ground)", yang sering disebut Kagungan Dalem, yaitu tanah milik Kadipaten. Secara historis, Kadipaten Pakualaman hingga 15 Oktober 1951 adalah wilayah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (saat ini disebut Kabupaten Kulon Progo). Menurut Novi Achmadiah Rahmahsari (Rahmahsari, 2016) menyebutkan bahwa Status hukum Pakulalaman Ground menjadi jelas setelah diberlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta berdasarkan Keppres No. 33 Tahun 1984 tanggal 9 Mei 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 April 1984. Meskipun demikian, aturan ini perlu dikaji mendalam dikarenakan secara yuridis keistimewaan Pakualaman Ground di bidang pertanahan belum mendapatkan legitimasi dalam peraturan perundang-undangan setelah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984.

Menurut Merlinda Norma Puspita (Puspita, 2013) Sultan Ground dan Pakualam Ground memiliki ketentuannya masing-masing. Pada Sultan Ground terdapat dua jenis yang disebut dengan tanah Keprabon dan tanah non keprabon. Tanah Keprabon atau

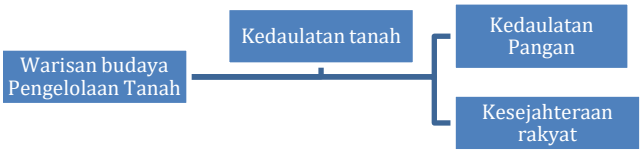
Kroon Sultanaat Grond atau Crown Domain atau Tanah Mahkota merupakan tanah-tanah Sultan yang tidak dapat diwariskan kepada siapa pun, dikarenakan tanah tersebut milik keraton Kasultanan Yogyakarta, seperti kepatihan, alun-alun, Pasar Ngasem, Masjid Agung dan sebagainya. Sementara itu, tanah non Keprabon atau tanah dede atau juga disebut dengan tanah milik kasultanan atau dikenal juga dengan istilah Rijks Sultanaad Ground adalah tanah-tanah yang haknya bisa dibebankan kepada rakyat, seperti untuk fasilitas umum (sekolah, rumah sakit, dll), tempat tinggal, tempat usaha, dan sebagainya.

2.2. Kekurangan Literatur

Dari sekian banyak literatur yang saya temukan, membuat saya membandingkan sistem pertanahan di Yogyakarta dengan sistem pertanahan di Indonesia. Meskipun memiliki berbagai cara untuk melindungi tanah warganya, Indonesia belum memiliki tata kelola pelarangan lahan terhadap individu atau kelompok tertentu yang tujuan penggunaan lahannya untuk membentuk akumulasi kapital perorangan dan merugikan masyarakat akibat dari perampasan tanah dan penyempitan tanah akibat pengumpulan tanah oleh kelompok kapital dengan tujuan investasi demi kekayaan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus peningkatan harga lahan yang sangat tinggi akibat tanah dikuasai oleh kaum kapital dan harga tanah semakin tidak masuk akal. Seperti wilayah Jakarta, ataupun Bali.

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar Kerangka Pemikiran



Sumber : diolah oleh penulis (2025)

BAB III. HASIL PENELITIAN

3.1. Upaya Negara dalam reorientasi kedaulatan rakyat atas tanah

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menjelaskan tentang konsep negara berkuasa atas tanah negara. Dalam UU tersebut, negara diberikan amanat untuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

> "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945)

Penguasaan negara terhadap tanah di antaranya berupa pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Bentuk penguasaan negara terhadap tanah ini perlu diatur secara khusus dalam sebuah undang undang yang mengatur tentang pertanahan. Reorientasi pada bidang pertanahan merupakan salah satu bentuk penataan ulang terhadap pemanfaatan dan pengelolaan tanah negara melalui pembaruan agraria. Tanah merupakan amanat UUD 1945 yang harus dikelola negara dengan sebaik-baiknya dan berasaskan kebermanfaatan pada masyarakat.

Tidak hanya UUD 1945, amanat untuk melindungi tanah di Indonesia juga diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Aturan ini juga sekaligus menghapus Agrarische Wet yang berlaku sejak 1870. UUPA memberikan tugas kepada negara untuk mengelola tanah secara adil dan keberpihakan pada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Secara jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa negara memiliki hak dan berwenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang dan hak negara pada tanah selanjutnya dijelaskan pada pasal 2 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Indonesia memiliki kewajiban menyelenggarakan aturan tentang pertanahan yang nilai gunanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun pada realitanya, seiring dengan perubahan pemerintahan dan kepentingan di dalamnya. Terdapat perubahan kebijakan tentang pertanahan yang semula bersifat kerakyatan menjadi bersifat kapitalisasi yang mana negara ikut terlibat dalam sistem yang pro kapitalis. Hal ini tentu mengakibatkan sulitnya negara mencapai kesejahteraan untuk semua rakyatnya. Sehingga selain melanggar amanat UUD 1945, juga tidak mengimplementasikan Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut karena kebijakan yang pro terhadap kapitalis tidak mencerminkan keadilan sosial.

Negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap ketersediaan lahan pangan. Secara statistik terdapat jarak yang tidak seimbang antara ketersediaan lahan untuk kebutuhan pangan dengan lahan yang digunakan untuk non pangan. Tanah merupakan hal mutlak bagi petani untuk membangun kedaulatan pangan. Lahan pertanian yang berkurang menyebabkan menurunnya angka hasil pertanian. Berdasarkan data statistik BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2024 menyebutkan bahwa adanya penurunan sebanyak 167,25 ribu hektare terhadap luas panen padi pada 2023. Luas panen padi tahun 2023 mencapai 10,21 juta hektare, yang mana angka ini 1.64 persen lebih rendah dibandingkan luas panen pada tahun 2024 yang mencapai sekitar 10,05 juta hektare.

Monopoli kepemilikan tanah menjadi masalah utama atas kelangkaan tanah bagi petani. Kelangkaan tanah ini pula yang mendasari menurunnya angka pertanian di Indonesia sehingga sulit untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Negara memiliki cita-cita untuk meningkatkan produksi pangan mencapai dua kali lipat setidaknya pada tahun 2050. Menurut WALHI saat ini golongan pengusaha menguasai sekitar 68% tanah dan aset tanah meliputi tanah perkebunan, tambang, tanah eksploitasi yang merusak lingkungan. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi para petani di Indonesia yang tak bertanah (landless). Petani landless di Indonesia tercatat sekitar 16 juta. Sehingga permasalahan kedaulatan tanah tidak hanya berdampak secara lingkup kecil hanya pada kaum petani. Melainkan menyeluruh yang menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan struktural. Mengapa hal ini dapat terjadi? karena ketiadaan ruang yang cukup untuk mereka yang tidak memiliki modal. Sementara para pemodal semakin menambah akumulasi kapital mereka melalui penguasaan tanah. Ini menjadi suatu bentuk "neokolonialisme" baru yang didukung oleh kebijakan negara. Padahal, negara melalui UUD 1945 dan diteruskan melalui UUPA sudah mengatur tentang upaya kedaulatan tanah di Indonesia. Dalam prinsip kedaulatan tanah di Indonesia melalui UUPA inilah mengatur tentang

(1) penghapusan klaim bahwa tanah rakyat dan masyarakat adat yang belum diakui sebagai tanah hak adalah milik negara (domein verklaring), (2) prioritas tanah bagi petani, buruh tani dan penggarap (the tillers), (3) larangan monopoli kepemilikan tanah oleh segelintir kelompok swasta, dan (4) SSA (Sumber Sumber Agraria) dikelola dalam usaha bersama yang bersifat gotong royong dalam wujud koperasi[2].

Negara memiliki berbagai kebijakan mengenai pertanahan sebagai berikut:

1. Bank Tanah

   Berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2021 pasal 1 menjelaskan tentang Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui geneis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Namun, bank tanah belum mencapai kedaulatan tanah bagi rakyat terutama petani. Bank tanah seperti lembaga yang dibentuk negara untuk memfasilitasi para pemilik modal dalam menggunakan tanah di Indonesia.

   Dalam PP Nomor 64 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa salah satu tugas bank tanah adalah melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung. Melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain, dan melakukan pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah. Bank tanah berpotensi menimbulkan upaya perampasan tanah yang baru karena memfasilitasi pemilik modal dalam mengakses tanah rakyat.

2. Food Estate

   Negara melakukan kebijakan food estate dengan tujuan mencapai kedaulatan pangan. Namun pada prakteknya, kedaulatan pangan yang ingin negara capai tidak melibatkan petani. Melainkan pemilik modal. Sehingga kebijakan ini erat kaitannya dengan kapitalisasi kelompok pemilik modal yang jika melihat dari pelaksanaanya serupa dengan sistem tanah paksa. Dalam kebijakan food estate, negara memproduksi bahan pangan yang didominasi oleh komoditas yang dapat mendatangkan keuntungan bagi negara. Komoditas yang datang dari permintaan pasar. Dalam food estate ini pula, negara menyerahkan tata kelola kepada perusahaan bukan petani.

---

[2] Dikutip dalam Tegakkan Konstitusionalisme Agraria untuk Kedaulatan dan Keselamatan Rakyat, Hentikan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Sejati! | WALHI diakses pada tanggal 4 Januari 2025 Pukul 01.15 WIB

3.2. Sistem Kepemilikan tanah di Yogyakarta dapat meningkatkan Kesejahteraan Pangan rakyat Yogyakarta

Secara historis, kedudukan tanah di Yogyakarta memiliki hukum mutlak raja. Sebelum adanya reorganisasi agraria, tanah yang di bawah Kasultanan menentukan bahwa di wilayah kerajaan adalah mutlak berada pada kekuasaan raja, raja memberikan hak meminjam yang disebut dengan *anggadhuh* untuk rakyatnya apabila ingin menggunakan dan memanfaatkan lahan tersebut. Hal tersebut sudah dilakukan raja secara turun temurun. Raja kemudian memberikan surat kekancingan sebagai bukti pemanfaatan lahan Sultan pada pemegang hak magersari.

Tidak disebutkan secara jelas sejak kapan serat kekancingan dijadikan sebagai penanda bagi penerima hak magersari atas tanah Kraton. Hal tersebut dikarenakan sistem mengenai pertanahan belum mengenal administrasi tanah seperti saat ini. Kemudian, pada masa kerajaan, tanah adalah milik Sultan. Jadi, secara tidak tertulis masyarakat mengetahui dan memahami bahwa itu adalah tanah Sultan. Meskipun demikian, Serat kekancingan tersirat dalam dokumen perjanjian antara Kesultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta sekitar tahun 1774. Dalam dokumen tersebut menyebutkan tentang masalah pertanahan.

> *Manawi wonten abdi dalem ageng utawi alit, amaosaken gadhahanipun siti dhusun dhateng Cina sasaminipun tiyang bangsa kulit pethak, unapa dene Jawi sami Jawi, inggi sami adamela jangji ingkang resi ingkang terang, sabarang jangjinipun kawrat kawontenan ing serat pratandha, dene yen wonten prakawisipun katur ing parentah ingkang kadamel angrampungi,punapa ing saungelipun serat pratandha wau punika, pundi ingkang boten anetepi dadosa kaandhapanipun kang sarta mawi kapatrapan dendha samurwatipun ing parentah* (Fauziah, 2017, p. 55).

Pada tahun Tahun 1918, hukum pertanahan Yogyakarta mengalami perubahan dengan adanya ketentuan reorganisasi agraria tahun 1914. Pada masa ini dikenal penggunaan serat kekancingan yang digunakan sebagai dokumen peminjaman tanah Sultan bagi pemegang hak magersari. Melalui Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 yang menyatakan kekuasaannya, yaitu:

> *"Semua bumi yang tidak terbukti dimiliki oleh Negara lain dengan hak eigendom adalah kepunyaan Kerajaan Ngayogyakarta."*

Rijksblad atau lembaran negara merupakan pemberian pemerintahan kolonial yang mengakui secara resmi Sultanaat Grond sebagai tanah milik kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini menjadi dasark hukum status tanah tersebut. Rijksblad 1918 menjadi dasar hukum atas status tanah yang dimiliki Kasultanan. Sumber hukum bagi tanah kas desa dan bengkok atau lungguh yang keduanya termasuk dalam hak anggaduh, dan pangarem-arem yang termasuk pensiunan perangkat desa, serta hak angganggo atau hak pakai.

Serat kekancingan kemudian mengalami kesulitan legalitas pasca Yogyakarta menjadi bagian dari NKRI. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya dokumen serat kekancingan yang ada, pada saat tersebut terdapat dokumen yang dianggap sebagai dokumen hak magersari yang tertulis angka tahun 1942 yang mana Indonesia belum merdeka. Dalam kurun waktu 1942-1946 hanya terdapat enam lembar dokumen pemegang hak magersari. Hingga kemudian Yogyakarta yang pada saat itu dibantu BPN melakukan pencatatan terhadap tanah-tanah magersari.

Perubahan kembali terjadi pasca Indonesia merdeka dan Yogyakarta menjadi bagian dari NKRI. Terdapat Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan urusan rumah tangga bagi DIY, misalnya urusan dalam Agraria yang terdapat pada Pasal 4. Kemudian diatur lebih lanjut mengenai urusan Agraria di Yogyakarta dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus Tahun 2012. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tidak cukup khusus untuk menjelaskan tentang tanah milik Sultan. Sehingga disahkan peraturan turunan dari UU Nomor 13 Tahun 2012 dalam wujud Peraturan Daerah Istimewa Daerah Yogyakarta Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Darah Istimewa Daerah Istimewa (Perdais) Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Aturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Yogyakarta untuk urusan pertanahan. Dalam perdais tersebut, Kadipaten dan Kasultanan berwenang dalam pengelolaan pemanfaatan tanah Kadipaten dan Kasultanan. Dalam kaitannya penataan ruang yang dilakukan pemerintah daerah dilakukan melalui dua program, yaitu (1) Program Penataan Tata Ruang Keistimewaan, dan (2) Program Penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan.

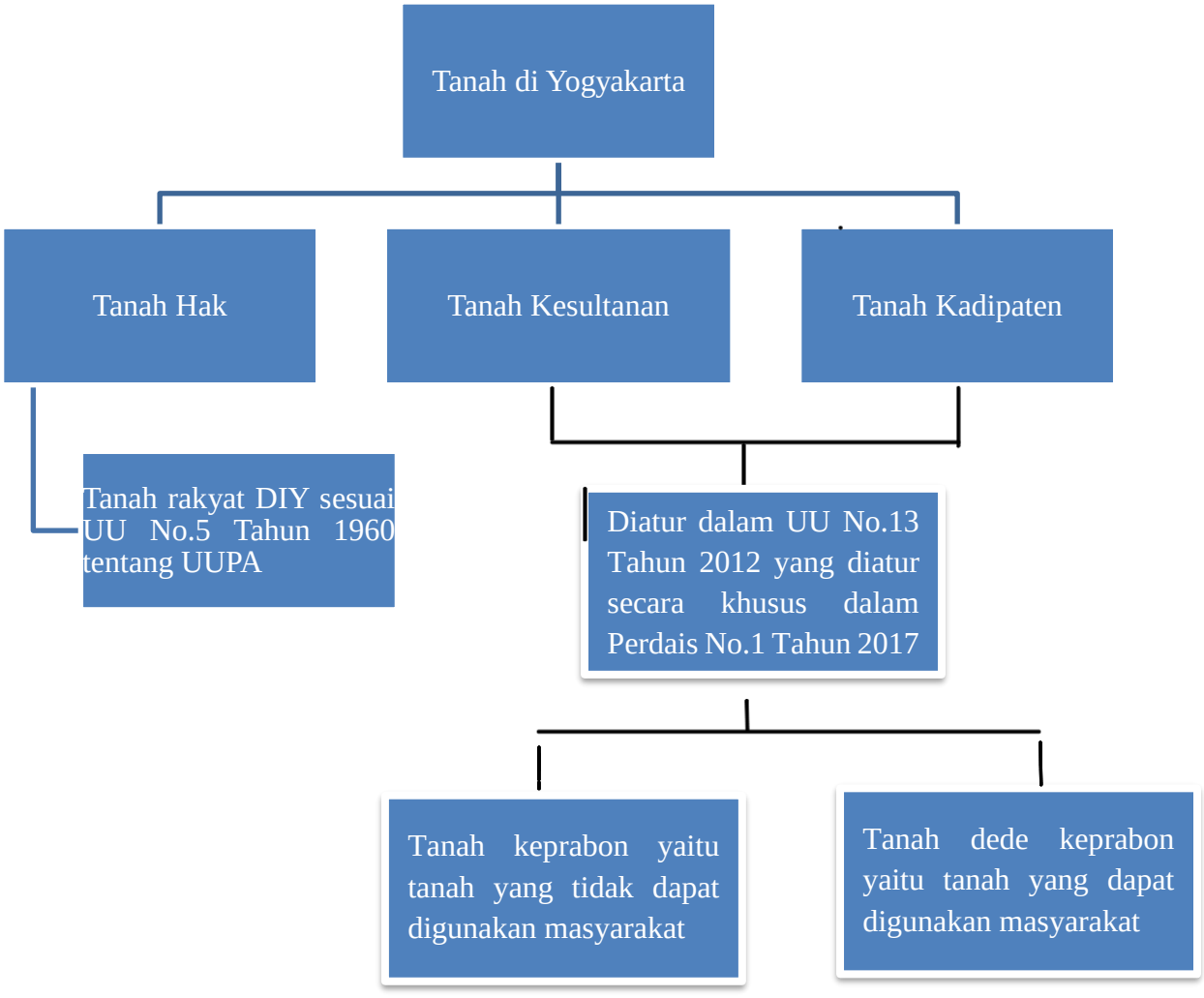
Serat Kekancingan mendapatkan legalitas kuat setelah adanya Perdais (Peraturan Daerah Istimewa) Yogyakarta yang dijelaskan pula dalam Bab 1 pasal 1 ayat 3 yang menyebut bahwa serat kekancingan adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat/institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui. Serat Kekancingan berupa magersari, ngindung, anganggo, dan anggaduh. Magersari merupakan hak sebagai pengguna tanah Sultan atau tanah kadipaten. Ngindung sifatnya perjanjian dalam jangka waktu tertentu yang disetujui bersama atas tanah sultan/tanah kadipaten. Anganggo sifatnya mandiri dan tanpa memungut hasil atas tanah sultan/tanah kadipaten yang digunakan. Anggaduh yaitu hak yang digunakan untuk mengelola, memungut, mengambil hasil dari tanah kepada desa dalam menyelenggarakan

pemerintah desa yang berlangsung dalam jangka waktu yang dipergunakan. Tanah anggaduh sesesuai dengan pasal 32 Perdais.

Yogyakarta merupakan satu wilayah di Indonesia yang memiliki keistimewaan dalam sistem pemerintahan daerahnya. Keistimewaan tersebut meliputi tata cara pemilihan pejabat internal atau pengisian jabatan, tugas, kedudukan dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, dan Tata Ruang. Termasuk juga tentang tata kelola pertanahan. Ketika berbicara terkait pertanahan Yogyakarta, erat kaitannya dengan konsep "Sultan Ground". Sultan Ground (Tanah Sultan) adalah konsep untuk menyebutkan tentang kepemilikan tanah di bawah kuasa Sultan Yogyakarta.

Posisi Keraton (Sultan) sebagai pemilik lahan di sebagian tanah di Yogyakarta memiliki posisi yang kuat setelah disahkannya UU No 13 Tahun 2012. Pada UU tersebut disebutkan bahwa Kesultanan/Kadipaten sebagai badan hukum khusus yang dapat memiliki tanah. Hak milik tanah oleh Keraton sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa "Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat memiliki hak milik beserta syarat-syaratnya. Hak milik ini diartikan sebagai hak yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Melalui sifat turun temurun, terkuat dan terpenuh maka sistem hak milik ini memiliki tingkatan paling tinggi.

Gambar 1. Tata Kelola Tanah di Yogyakarta



Sumber : diolah oleh penulis dari berbagai sumber (2025)

Tanah Keprabon merupakan tanah kasultanan maupun kadipaten yang digunakan untuk bangunan istana dan kelengkapannya. Tanah Keprabon kasultanan meliputi karaton, Alun-alun lor, alun-alun kidul, benteng, jagang, panggung krapyak, tugu pal putih, tamansari, pasar Beringharjo, kepatihan, pasareyan imogiri Ngayogyakarta, makam Sultan Agungan Ngayogyakarta, Makam Kutho Gedhe Ngayogyakarta sarta Hastarenggo, Pasareyan Giring, Makam Giriloyo, Makam Wot Galeh, Makam Pakuncen, Makam Banyu Sumurup, Makam Gunung Buthak, Makam Widoro Manis, Petilasan-Petilasan, Pasanggrahan-Pasanggrahan, dan Masjid-Masjid Kagungan Dalem.

Sementara tanah prabon yang merupakan tanah kadipaten meliputi Pura Pakualaman, Masjid Besar Pakualaman, Alun-alun Sewandanan, Kepatihan Pakualaman, Labuhan Glagah Kulon Progo, Makam Girigondo Kulon Progo, Rumah Bintaran Wetan, Makam Gunung Ketur, Rumah Dinas Kecamatan, Kompleks Pasareyan Sosrobahu, SD N Puro Pakualaman, Komplek Pasareyan dan Masjid Sonyaragi, Komplek LP Wirogunan, Rumah Jabatan Kepala LP Wirogunan, Makam Sentulrejo, dan Makam Prajurit Warungboto.

Sesuai dengan UU No.13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Yogyakarta yang secara khusus diatur dalam Peraturan DIY (Perdais) No. 1 Tahun 2017 yang berisikan peraturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah di wilayah DIY memiliki tujuan dalam pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Status hukum tersebut memberikan kekuatan atas tanah kesultanan yang sering disebut dengan Sultan Ground. Juga Pakualaman Ground untuk tanah kadipaten.

3.3. Kaitan Implementasi Kedaulatan Tanah atas Rakyat melalui sistem kepemilikan tanah di Yogyakarta dengan kedaulatan pangan di Indonesia

Sumber daya alam tanah merupakan sumber daya yang strategis bagi rakyat Indonesia. Manusia sangat bergantung pada tanah. Sementara tanah tidak dapat diproduksi terkecuali apabila ada diadakan sistem reklamasi. Secara budaya, tanah merupakan sesuatu yang sifatnya komunal dibutuhkan untuk mencapai kepentingan bersama. Namun, pada aspek ekonomi yang berbasis kapitalisme tanah menjadi nilai ekonomi yang individualistik. Perubahan nilai jual tanah yang semakin tinggi akibat penguasaan kaum kapital, dapat memicu konflik tanah.

Kerangka Kluckhoh mengenai lima masalah dasar hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia[3]

Masalah dasar dalam hidup	Orientasi nilai budaya		
Hakikat hidup	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik
Hakikat karya	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan, dan sebagainya	Karya itu untuk menambah karya
Persepsi manusia tentang waktu	Orientasi ke masa kini	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
Pandangan manusia terhadap alam	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat	Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam
Hakikat hubungan manusia terhadap alam	Orientasi kolateral (horizontal), rasa kebergantungan pada sesamanya (berjiwa gotong royong)	Orientasi vertikal, rasa kebergantungan pada tokoh-tokoh atasan dan berpangkat	Individualitas menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

Sumber : Buku Ilmu Budaya Dasar (Hal :27)

Pada sistem kapitalisme yang mana penguasa faktor produksi (dalam hal ini tanah) memiliki orientasi nilai budaya manusia yang cenderung individualisme. Individualisme dalam hakikat hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada sistem kapitalisme, individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri. Dalam makna lain dapat diartikan bahwa siapa yang memiliki kuasa atas tanah, maka semakin tinggi kepemilikan tanah yang didominasi oleh pemilik modal. Sementara sistem yang dilakukan oleh Yogyakarta (tanah milik keraton/sultan ground) memiliki orientasi kolateral (horizontal) rasa ketergantungan pada sesamanya (dalam arti berjiwa gotong royong). Hal tersebut tampak pada pemanfaatan tanah Yogyakarta yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun tanah-tanah tersebut dikuasai dan

[3] Dikutip dalam buku Ilmu Budaya Dasar karya Munandar Sulaeman hal : 27 (Sulaeman, 1993)

dimiliki oleh Sultan Yogyakarta. Namun penggunaannya tidak dikapitalisasi oleh Sultan. Melainkan secara bebas dengan syarat merupakan warga Yogyakarta dengan ketentuan lainnya, dengan tujuannya menyejahterakan warganya. Ini dilakukan sudah sejak lama dan meneruskan sistem warisan budaya leluhur Keraton Yogyakarta.

Tabel 2. Orientasi nilai budaya penggunaan tanah oleh Keraton Yogyakarta dengan Sistem Kapitalisasi tanah

Masalah dasar dalam hidup	Orientasi nilai budaya	
	Yogyakarta	Sistem Kapitalisasi Tanah oleh swasta
Hakikat hidup	Tanah digunakan untuk mencapai kehidupan yang baik	Tanah digunakan untuk pencapaian hidup lebih baik
Hakikat karya	Tanah digunakan dengan kebermanfaatan bersama	Tanah sebagai alat produksi untuk penambahan kapital baru
Persepsi manusia tentang waktu	Masa lalu mengajarkan kebijaksanaan untuk hidup lebih baik di masa kini dan masa depan	Orientasi ke masa depan
Pandangan manusia terhadap alam	Tanah digunakan sebagai alat untuk menjaga keselarasan dengan alam	Penguasaan tanah sebagai bentuk kekuasaan atas alam
Hakikat hubungan manusia terhadap alam	Tanah digunakan untuk kepentingan bersama	Tanah digunakan untuk memperkaya diri

Sumber : Hasil olah penulis dari kerangka Kluckhoh mengenai lima masalah dasar hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia (2025)

Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan



Gambar : Data sebaran dan luas tanah Sultan Ground

Sumber : akun instagram kominfo DIY dalam pameran tanah kasultanan 2024

Keseriusan Yogyakarta dalam meneruskan warisan budaya pertanahan dapat dilihat dari pembagian fungsi tanah yang didominasi untuk kepentingan rakyatnya. Tanah Kasultanan memiliki total luas tanah mencapai 27,3 juta meter persegi atau sama dengan 2.730 hektare. Dari keseluruhan total tanah tersebut, 77,53 persen (atau sekitar 2.116 hektare) digunakan untuk mencapai dan dimanfaatkan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat. 21,15 persen atau 577 hektare digunakan untuk kepentingan sosial, sisanya untuk pengembangan kebudayaan yang memakai fungsi tanah sekitar 1,32 persen atau sekitar 36 hektare.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Indonesia perlu memiliki sistem kedaulatan tanah berbasis budaya. Meskipun saat ini, terdapat masyarakat adat dan diatur di dalamnya terkait dengan perlindungan tanah adat dan sejenisnya. Namun, tidak sedikit kasus terdapat perampasan tanah adat oleh kelompok kapital atas nama negara. Sejak awal kemerdekaan dalam UUD 1945 tanah menjadi pembahasan yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat 3. Aturan ini menjelaskan tentang betapa pentingnya tanah sebagai sumber daya alam Indonesia yang harus dikelola demi kepentingan rakyat. Serta digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UUPA pasca kemerdekaan perlu dikembalikan ulang pada masa saat ini agar kedaulatan tanah menjadi milik rakyat Indonesia sepenuhnya, bukan milik sekelompok orang atas nama kapitalisme. Kedaulatan tanah haruslah menjadi milik rakyat, sebagaimana amanah dari UUD 1945 yang mendapatkan manfaat tanah adalah rakyat Indonesia. Kedaulatan tanah sangat memengaruhi keberhasilan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan ada pada keberhasilan para petani dalam mengelola tanah. Namun, petani tanpa tanah adalah suatu yang mustahil mencapai kedaulatan pangan.

Negara memiliki kuasa sepenuhnya atas tanah. Kuasa atas tanah ini bukan diartikan sebagai penguasaan tanah semena-mena, melainkan sesuai dengan amanat UUD 1945. Kuasa negara atas tanah ini harus keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, yang mana tanah digunakan oleh rakyat untuk menjaga keseimbangan pangan negara. Sehingga tercipta kedaulatan pangan. Negara tidak boleh menjaga lembaga yang memfasilitasi para kapital dalam sebuah kebijakan mengatasnamakan rakyat.

Negara perlu kiranya mencontoh warisan budaya masyarakat Indonesia seperti Yogyakarta dalam pengelolaan tanah yang berbasis pada kepentingan rakyat. Negara harus memahami pemaknaan tanah yang diartikan fundamental oleh masyarakat Indonesia. Seperti

tanah sebagai identitas, tanah sebagai ibu, dan tanah sebagai diri. Sehingga tanah tidak menjadi suatu bentuk kapitalisasi yang dapat merugikan rakyat.

4.2. Saran

Meskipun ada warga secara sukarela menjual tanahnya, tetapi harus ada perlindungan dari negara tentang kepemilikan tanah di Indonesia. Bagaimana cara negara melindungi kedaulatan tanah yang berkepentingan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Distribusi tanah yang tidak adil berpotensi menyebabkan konflik pertanahan di Indonesia. Serta kesulitan rakyat dalam memiliki lahan yang dapat digunakan untuk kepentingan pangan.

Perlu adanya tata kelola tanah yang berkepihakan kepada rakyat, bukan kepada pemilik modal yang hanya bertujuan untuk meningkatkan akumulasi kapital mereka. Indonesia dalam sejarahnya memiliki tata kelola tanah berdasarkan warisan budaya yang telah diakui melindungi tanah mereka. Perlindungan atas tanah mereka secara budaya ini menjadi cara mereka menjaga kedaulatan tanah.

Salah satu yang penting dalam penelitian ini adalah mengembalikan cara berpikir kita terhadap makna kedaulatan tanah yang nampak bias dalam pengambilan keputusan kebijakan negara. Oleh karena itu, melalui makalah ini diharapkan dapat menjadi satu kesadaran baru untuk mengembalikan orientasi kedaulatan negara atas tanah untuk mencapai kedaulatan pangan. Bahwa Aturan negara pada awal dibentuk serta aturan warisan budaya yang dapat menjaga kedaulatan tanah. Sehingga negara tidak hanya hadir bersifat administratif saja, melainkan ikut berperan dalam menjaga tanah rakyat dari perampasan tanah para kelompok pemilik modal.

Daftar Pustaka

AJI, D. P. (2014). *Pemetaan Potensi Penggunaan Tanah Sultan Ground di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.* Yogyakarta: SKRIPSI.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi VI.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Doly, D. (2017). Kewenangan negara dalam penguasaan tanah : redistribusi tanah untuk rakyat . *Negara Hukum*, 196.

Fadli, A., & Ali, Z. (2021). Kedaulatan tanah berbasis kearifan lokal Desa Rejoagung kecamatan Semboro Kabupaten Jember. *Jurnal Kewarganegaraan*, 801-810.

Fauziah, A. N. (2017). *Aspek Hukum Tanah Magersari di Keraton Yogyakarta .* Yogyakarta: SKRIPSI.

Harris, M.(1979). *Cultural Materialsm:The Struggle For a Science of Culture*. New York : Random House New York

Harianto, A. P. (2017). Ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada seorang WNI Non Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Asas Persamaan Hak menurut Ketentuan UUPA. *Jurnal Hukum*, 4.

Harsono, B. (1995). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Penerbit Djambatan.

Kay, C. (2009). Development strategies and rural development: exploring synergies. *The Journal of Peasant Studies*, 103–137.

Mahendra, 5. (1996). *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan.* Jakarta: Sinar Harapan.

Puspita, M. N. (2013). *Pemetaan Persebaran dan Penggunaan Tanah Sultan.* Yogyakarta: SKRIPSI .

Rahmahsari, N. A. (2016). Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo. *Lex Renaissance*, 97.

Sulaeman, M. (1993). *Ilmu Budaya Dasar (Suatu Pengantar).* Bandung: PT Eresco Bandung.

Triningsih, A., & Aditya, Z. F. (2019). Pembaharuan Penguasaan Hak atas Tanah dalam Perspektif Konstitusi . *Rechtsvinding media pembinaan hukum nasional*, 337.

Identitas Penulis

Neng Marlina Efendi merupakan alumni magister Antropologi UGM. Fokus terhadap kajian antropologi ekonomi. Beberapa tulisannya telah dimuat dalam jurnal di Indonesia. Salah satu yang terbaru yaitu artikel untuk Datum Indonesia dalam konferensi HAM 2023 yang diterbitkan November 2024, dan artikel pada Jurnal Bawaslu RI.

SINGO BARONG TAIWAN
SOFT DIPLOMACY DALAM WARISAN BUDAYA

Ratu Selvi Agnesia
Trans/Voice Project Indonesia-Taiwan

Abstrak

Buruh Migran Indonesia (BMI) pada beberapa fenomena tidak hanya menjadi pahlawan devisa bagi negara dan pencari nafkah bagi keluarga. Kasus ini berlaku pada "Singo Barong Taiwan" sebagai nama paguyuban Buruh Migran Indonesia (BMI) yang menjadikan seni pertunjukan tradisi Reog Ponorogo tidak hanya sebagai bagian identitas warisan budaya, tetapi turut menjadi media *soft diplomacy* di Taiwan.

Hal tersebut menjadi simbol dari bergesernya proses "merantau" dan migrasi ke luar negeri dengan mengandalkan tubuh dan keterampilan kerja, menjadi tidak hanya memiliki tujuan dengan alasan motif penarik dan pendorong secara ekonomi. Tetapi pergeseran motif ini terlihat dari momentum ketika pekerja migran turut membawa "budaya" untuk diperkenalkan dan disosialisasikan sebagai bagian s*oft diplomacy* dari hubungan internasional, khususnya dari kawasan Asia Tenggara ke Asia Timur.

Singo Barong Taiwan berdiri tahun 2014 oleh teman-teman Buruh Migran Indonesia yang juga bekerja sebagai seniman Reog Ponorogo di tempat asalnya di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Sebagai warisan asli budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda. Pada setiap kali pentas, paguyuban ini melibatkan 30 orang yang terdiri dari penari jatilan, penari tari patih dan panglima Singo Barong. Mereka biasa mengisi undangan pentas di acara silaturahmi perkumpulan BMI, peringatan hari kemerdekaan juga undangan dari pemerintahan dan masyarakat Taiwan yang sangat antusias terhadap kehadiran seni pertunjukan asli Indonesia.

Pada tulisan ini, saya sebagai peneliti yang melakukan penelitian di Taiwan selama empat bulan di tahun 2019, menggunakan metode etnografi untuk menelaah Singo Barong Taiwan

sebagai fenomena menarik dari praktik seni pertunjukan warisan budaya dan *soft diplomacy*. Tulisan ini akan membahas praktik pertunjukan tersebut dalam lingkup lebih holistik seperti persoalan identitas dan eksistensi Singo Barong Taiwan. Juga kendala-kendala yang dialami para pelaku untuk pembagian peran antara bekerja di sektor "kerah biru" dan berkarya sebagai seniman. Kebanyakan para pemain berprofesi sebagai asisten rumah tangga dan pekerja pabrik yang bekerja di tempat-tempat yang berbeda. Selain itu, persoalan tempat latihan pemain juga menjadi kendala yang signifikan.

Di samping itu, persoalan regenerasi pemain dan daya tahan (resiliensi) juga turut menjadi permasalahan di tubuh Paguyuban Singo Barong Taiwan. Peninjauan lain yang turut disoroti adalah manajemen paguyuban dan publikasi Singo Barong Taiwan. Upaya untuk bisa melakukan *soft diplomacy* dengan warga negara Taiwan dan lebih luas pemerintahan Taiwan, selain menarik animo sesama Buruh Migran Indonesia lain di Taiwan untuk menjadikan seni budaya Indonesia bergaung di Taiwan dan di dunia internasional.

Kata kunci: Singo Barong Taiwan, Identitas, *Soft Diplomacy*, Warisan Budaya

PENDAHULUAN

Kehadiran globalisasi memberikan ruang terjadinya mobilitas manusia di seluruh dunia. Fenomena globalisasi ini menciptakan migrasi yang berlangsung sejak lama dengan faktor penarik dan faktor pendorong yang bisa ditarik garis waktu sejak sejarah kolonialisme hadir di Indonesia. Dengan kata lain, rakyat Indonesia sejak sebelum masa revolusi dan kemerdekaan telah menjadi subjek sekaligus alat migrasi dalam wajah "buruh migran" berdasarkan kepentingan penguasa/penjajah pada masa tersebut.

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak zaman penjajahan terutama di suku Jawa. Migrasi suku Jawa ke luar negeri secara masif mulai terjadi antara tahun 1875 dan 1940 (Lockard, 1971). Suriname, New Caledonia dan Malaysia yang berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris pada saat itu menjadi daerah tujuan utama. Hal ini terkait dengan berkembangnya perkebunan-perkebunan yang membutuhkan pekerja di ketiga wilayah tersebut. Selain itu kondisi daerah asal terutama di Pulau Jawa pada waktu itu seperti jumlah pendidik yang semakin padat, kemiskinan waktu itu seperti jumlah penduduk yang semakin padat, kemiskinan dan luas lahan yang semakin berkurang membuat kehidupan

menjadi semakin sulit dan menjadi faktor pendorong sebagian orang Jawa untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik di tempat lain. (Geert, 1966 dalam Lockard, 1971).

Perkembangan modernisasi dan kebutuhan tenaga kerja membuat pergeseran tenaga kerja Indonesia bergeser ke negara lain. Pada penelitian LIPI "Migrasi sebagai investasi untuk peningkatan dasa saing pekerja migran Indonesia di pasar kerja global" (Aswatini, Fitranita, Rachmawati,Noveria, 2019) pada tahun 2017-2018, Saudi Arabia hanya merupakan negara tujuan keenam untuk PMI, sedangkan Hongkong dan Taiwan menjadi tujuan kedua terpenting setelah Malaysia. Keadaan ini, selain dipengaruhi kesempatan kerja yang terbuka di Taiwan sebagai perawat orang tua dan pengasuh bayi, juga dipengaruhi oleh adanya pembatasan pengiriman PMI informal, khususnya pembantu rumah tangga. Selain dari itu, standar gaji untuk pembantu rumah ttangga di negara-negara Timur Tengah juga relatif lebih rendah, dibandingkan di Hongkong dan Taiwan. Ini juga merupakan daya tarik bagi PMI, khususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan perawat orang tua untuk lebih memilih bekerja ke Taiwan.

Taiwan dan Indonesia telah menjadi mitra pembangunan yang hebat, menghasilkan hubungan antar manusia yang erat di banyak bidang. Seperti pidato yang dijelaskan Jhon Chen, duta besar Taiwan untuk Indonesia dalam release Taipei Economic and Trade Office (TETO, 2022) bahwa ada lebih dari 300.000 orang Indonesia yang bekerja atau belajar di Taiwan. Oleh karena itu, Taiwan menjadi tuan rumah bagi diaspora Indonesia terbesar ketiga di dunia. Menurut data terakhir, lebih dari sepertiga pekerja migran di Taiwan adalah orang Indonesia, dan mereka telah menjadi bagian integral dari masyarakat Taiwan. Jhon Chen menekankan bahwa Taiwan memperlakukan pekerja migran dan pekerja lokal secara setara. Semua pekerja Indonesia di Taiwan sama-sama menikmati sistem kesejahteraan sosial Taiwan dan skema Asuransi Kesehatan Nasional yang terkenal di dunia.

Realisasi sistem kesejahteraan nasinonal ini secara konkrit, salah satunya sejak 10 Agustus tahun 2022, upah minimum bulanan untuk pengasuh migran Indonesia di Taiwan telah dinaikkan dari 17.000 NTD menjadi 20.000 NTD, dari Rp8,5 juta menjadi Rp10 juta.

Taiwan atau yang dikenal sebagai "negeri formosa" memiliki hubungan internasional yang erat dengan negara-negara Asia Tenggara salah satunya dengan Indonesia. Khususnya sejak masa

pemerintahan Presiden Tsai Ing-Wen (2016-2024) sebagai presiden perempuan pertama yang banyak mendapat antusiasme dukungan rakyat, Taiwan sebagai negara demokrasi menggunakan Kebijakan baru ke arah selatan atau New Soutbound Policy (NSP). Dalam berita "Menggali potensi baru *New Southbound Policy* Taiwan" (Laraswati Ariadne Anwar, 2024). Kebijakan Taiwan untuk melihat ke selatan memiliki potensi besar untuk merekatkan hubungan antar masyarakat. Negara-negara ASEAN termasuk di dalam 18 negara mitra NSP bersama dengan India, Nepal, Bhutan, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia masuk ke dalam delapan negara prioritas. Hal ini karena di Taiwan ada 1 juta warga Asia Tenggara. Sebanyak 700.000 orang di antara mereka adalah pekerja migran, sisanya adalah mahasiswa. Angka ini di luar 500.000 warga Asia Tenggara yang menikah dengan warga Taiwan.

Menurut Alan Yang, Direktur Eksekutif Yayasan Pertukaran Taiwan-Asia (Taiwan-Asia Exchange Foundation/TAEF) bahwa "Kebijakan ini bisa dibilang "diplomasi hangat" ala Taiwan. Kami tidak akan bisa bersaing dengan negara adidaya dari segi kekuatan dan biaya, tetapi Taiwan memiliki banyak pengalaman dan ilmu yang bisa dibagi," Perbedaan dari kebijakan melihat ke selatan para presiden sebelumnya ialah NSP tidak hanya menekankan ekonomi dan perdagangan, tetapi juga hubungan antarmasyarakat. Total, ada 11 kementerian/lembaga di Taiwan yang terlibat.

Sebagai negara tujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik dari sumber ekonomi dengan gaji yang lebih tinggi dari Indonesia, Kebijakan NSP ini turut menguatkan berbagai regulasi salah satunya dengan peraturan yang mengatur hak-hak pekerja migran, termasuk dalam hal upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya dengan lebih baik sebagai upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja migran dari Asia Tenggara khususnya sebagai jembatan antara masyarakat Indonesia dan Taiwan.

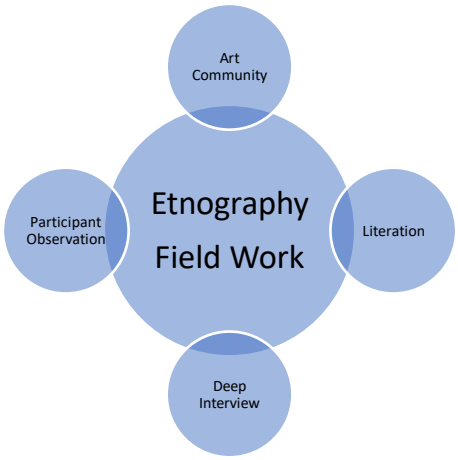
New Southbound Policy menguatkan hubungan antar masyarakat yang meluas ke pertukaran dan kolaborasi di semua aspek termasuk pengembangan sumber daya manusia. Termasuk, tidak seperti negara di Asia Timur lain, Taiwan juga menyediakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk pekerja migran, termasuk pelatihan bahasa dan keterampilan kerja, yang dapat meningkatkan peluang karir mereka baik di Taiwan maupun setelah mereka kembali ke Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia tersebut juga turut mewarnai kebebasan berekspresi pekerja migran dalam bidang kesenian dan literasi. Selama 4 bulan melakukan residensi Trans/Voice Project Indonesia-Taiwan (Juli-Oktober 2024) saya mengamati menjamurnya komunitas seni dari pekerja migran Indonesia dari berbagai lintas seni dan aktifnya lomba sastra migran dan kelas kepenulisan yang melahirkan penulis-penulis sastra migran.

Ketika pemerintah Taiwan menjadikan NSP sebagai kebijakan penguatan antar negara dan bidang, kehadiran dan aktifnya komunitas seni dari buruh migran Indonesia menjadi *soft diplomacy* dengan kesadaran memperkenalkan warisan budaya. Salah satu komunitas seni yang turut menjadi informan utama penelitian adalah paguyuban Singo Barong Taiwan asal Ponorogo-Jawa Timur yang aktif berkesenian di Taiwan sejak tahun 2014.

Makalah ini tidak hanya menjelaskan hubungan soft diplomasi, juga lebih lanjut akan memaparkan tujuan didirikan Singo Barong Taiwan sebagai paguyuban, artistik pertunjukan dan beberapa masalah regenerasi pemain dan daya tahan (resiliensi), manajemen dan media publikasi yang mereka gunakan untuk mempromosikan paguyuban. Selain, menjelaskan kehadiran paguyuban Singo Barong Taiwan untuk memperkuat dan melemahkan posisi tawar (*bargaining position*) buruh migran Indonesia di Taiwan.

Metode Penelitian



Makalah ini bersumber dari residensi program Trans/Voice Project Indonesia-Taiwan yang diinisiasi oleh para peneliti pekerja migran dan pekerja seni Taiwan Penulis mendapat undangan dari adalah Wu Ting Kuan dan Lan Yu Chen yang memiliki latar belakang kuliah

antropologi, selain keduanya seringkali datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian fokus pada Buruh Migran Indonesia (BMI).

Penelitian berlangsung selama 4 bulan dengan diwadahi program residensi Trans/Voice Project Indonesia-Taiwan (24 Mei-1 Oktober 2024). Penelitian awal fokus pada pemetaan komunitas seni dan komunitas sastra dari Buruh Migran Indonesia di Taiwan dan di dalamnya termasuk Paguyuban Singo Barong Taiwan (SBT). Sebagai subjek dan informan utama mewakili komunitas seni BMI (art community), melalui kerangka etnografi, dengan hadirnya Singo Barong Taiwan peneliti berusaha melakukan kerja lapangan untuk terlibat langsung (*Partisipant Observation*) dalam setiap pertunjukan, mendokumentasikan, menemukan semua variable, data, wawancara mendalam (*deep interview*) untuk mendapatkan informasi penting terkait informan.

James Spradley memaparkan karakteristik yang dimiliki etnografi di antaranya; pertama, menggali atau meneliti fenomena sosial. Dalam konteks ini, peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat tertentu dikaji secara mendalam. Kedua, data tidak terstruktur. Sebagai penelitian sosial dengan objek masyarakat tentu data yang bersumber dari masyarakat tidak dapat di ukur kepastiannya, dikarenakan data tersebut sebagai data empiris yang cenderung berbeda dalam persepsi antar personal dan kelompok sosial. Ketiga, kasus atau sampel sedikit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian etnografi menggunakan pendekatan induktif, artinya kesimpulan yang didapat didasarkan dari yang khusus menjadi umum. Keempat, dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dan tindakan manusia (*human action*). Hal ini yang paling menarik dari etnografi, yakni menarik kesimpulan atas sikap dan perilaku sosial suatu masyarakat.

Etnografi pada masa ini merupakan hasil sintesis dari pemikiran Spradley pada masa sebelumnya. Dalam pandangan Spradley etnografi tidak lagi dianggap sebagai metode untuk meneliti budaya luar (masyarakat kecil) yang terisolasi, tetapi masyarakat sendiri pula yang cukup multikultural. Pada intinya dari sintesis pemikiran Spradley ini berupaya untuk memperhatikan makna dari segala tindakan yang terjadi pada orang lain, dan ingin memahaminya melalui analisa kebudayaan. (Spradley: 1997)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Paguyuban Singo Barong Taiwan



Satu bulan sebelum Singo Barong Taiwan pentas di Pingtung, pada akhir Juni 2019, para personil berlatih di Toko Indo Cen Cen daerah Zhongli, Taiwan dalam rangka silaturahmi Singo Barong yang akan berlangsung di Taman Zhongli. Di lantai paling atas Toko Indo Cen Cen, sembari menunggu hujan reda, para personil terlihat duduk melingkar dan asik berbincang dalam bahasa Jawa. Sedangkan yang lain, Lorena dan Dinda, dua penari jatilan sedang asik berdandan dan bersiap memakai kostum.





Foto: Selvi Agnesia

“Kami sudah lama menyewa tempat ini buat kumpul dan simpan kostum, tapi kalau untuk latihan biasanya di taman saat minggu ketiga di setiap bulannya” ungkap Heri Budi Santoso, pimpinan Singo Barong Taiwan.

Dua topeng kepala Singo Barong berhias bulu merak terlihat gagah menghiasi dinding ruangan tersebut. Tidak mudah membawa kedua topeng ke Taiwan. Topeng pertama didatangkan pada tahun 2014 ketika tahun pertama Paguyuban Singo berdiri. Topeng kedua menyusul didatangkan pada tahun 2018. Dibutuhkan biaya hingga 1 juta dolar Taiwan atau sekitar Rp 500 juta untuk mendatangkan topeng tersebut. Heri dengan tegas mengungkapkan, biaya tersebut murni berasal dari bantuan teman-teman Pekerja Migran Indonesia. Penjelasan Heri membuat saya sempat berpikir soal tujuan teman-teman PMI ke Taiwan tentu saja untuk bekerja dan mencari uang, namun mengapa mereka tetap loyal dalam memberikan bantuan bagi eksistensi paguyuban Singo Barong.

Memasuki generasi ketiga dan tahun kelima berdirinya Singo Barong Taiwan di tahun 2019, paguyuban ini telah pentas keliling di beberapa kota seperti Hsinchu dan berkali-kali di Taipei. Kehadiran mereka selalu dinanti teman-teman Pekerja Migran Indonesia dan animo masyarakat berupa undangan pemerintah Taiwan juga cukup besar. Namun, hingga saat ini, kendala yang dialami kelompok berada pada soal dana dan regenerasi pemain. “Yang nonton kita banyak. Yang main susah.” jelas Heri.

Kesibukan bekerja para PMI yang sebagian besar bekerja di lingkup domestik cukup menjadi kendala untuk mengumpulkan orang kut serta bermain atau pentas. Tidak hanya mengandalkan talenta-talenta orang Ponorogo asli, mereka turut membuka siapapun orang awam yang bersungguh-sungguh untuk berlatih. Selesai masa kontrak di Taiwan, para anggota dan regenerasi juga tentunya akan berganti, maka pembinaan dalam kelompok tetap harus terus dijalankan.

Situasi tersebut sangat berbeda dengan keberlangsungan Reog Ponorogo di tempat kelahirannya Ponorogo, Jawa Timur. Setiap tahunnya, terutama bertepatan 1 Muharam, seni pertunjukan yang berlangsung dari cerita rakyat ini dihelat secara nasional dalam Festival Reog Ponorogo dari berbagai kelompok se-Indonesia. Reog Ponorogo pun sudah masuk sebagai

kurikulum pelajaran kesenian dan diberlakukan di setiap desa. Peran pemerintah begitu aktif, berbeda dengan kondisi yang dialami Singo Barong Taiwan.

“Bagaimanapun yang terpenting ini adalah warisan budaya” tegas Heri. Ia dan komunitasnya berharap semoga Reog Ponorogo dapat dikenal oleh masyarakat Taiwan, selain mempertahankan keberlangsungan seni pertunjukan Reog Ponorogo ke depannya agar masyarakat tetap bisa mengetahui bahwa ada Singo Barong di Taiwan. Singo Barong memiliki visi menjadi sebuah organisasi seni budaya yang menjadi wadah berkumpul semua Pekerja Migran Indonesia tanpa memandang ras, suku dan agama di Taiwan.

Manajemen Singo Barong Taiwan

Penjelasan tentang Paguyuban Singo Barong Taiwan tersebut telah saya tuliskan dalam hasil catatan lapangan ketika berkunjung ke tempat latihan yang dimuat di www.thinkarchipelago.com. Bahwa secara biografi singkat, paguyuban Singo Barong Taiwan didirikan tahun 2014, pada saat penelitian ini berlangsung sudah memasuki tahun kelima dan generasi ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Budi Santoso, ketua paguyuban dan pemain kendang di Singo Barong Taiwan, bahwa paguyuban ini didirikan sebagai organisasi yang menjadi wadah berkumpul semua Pekerja Migran Indonesia tanpa memandang ras, suku dan agama di Taiwan. Nilai unversalitas dan kesetaraan ini menjadi landasan berdirinya Singo Barong Taiwan.

Setiap pentas, para anggota yang terlibat dalam pertunjukan Singo Barong Taiwan kurang lebih berjumlah 30 orang, mereka rata-rata berprofesi sebagai asisten rumah tangga khususnya perempuan yang bekerja sebagai penari jathilan dan pekerja pabrik. Dengan profesi mereka tersebut, sulit untuk mendapatkan anggota yang dapat konsisten, juga keluar masuknya para personil Singo barong Taiwan sesuai kontrak, sehingga regenerasi pemain sulit dilakukan. Jejaring sesama pekerja migran khususnya dari Ponorogo dan Jawa Timur dimanfaatkan untuk membangun daya tahan (resiliensi) dari pemain. Di sisi lain, untuk membangun jejaring dan mempromosikan acara dan menjual merchandise seperti kaos acara dilakukan melalui akun media sosial facebook: Singo barong Taiwan. Akun ini dianggap sangat efektif untuk promosi acara dan menjaring penonton.

Pemasukan untuk keberlangsungan paguyuban ini paling besar adalah donasi teman-teman pekerja migran dan anggota sendiri, penjualan merchandise dan honorarium dari pengundang acara. Pada saat saya berkunjung pertama kali di lantai 3 di toko Indo chen-chen sebagai tempat kumpul dan latihan, saya langsung melihat dua barongan atau yang disebut Dhadak Merak. Seperti yang dijelaskan oleh Heri bahwa, dua topeng kepala Singo Barong berhias bulu merak tersebut didatangkan ke Taiwan dengan hasil donasi. Topeng pertama didatangkan pada tahun 2014 ketika tahun pertama Paguyuban Singo berdiri. Topeng kedua menyusul didatangkan pada tahun 2018. Dibutuhkan biaya hingga 1 juta dolar Taiwan atau sekitar Rp 500 juta untuk mendatangkan topeng tersebut. Heri dengan tegas mengungkapkan, biaya tersebut murni berasal dari bantuan teman-teman Pekerja Migran Indonesia. Di sisi lain, paguyuban ini seringkali melakukan penggalangan dana untuk teman-teman pekerja migran yang sakit atau meninggal dunia di Taiwan. Manajemen organisasi paguyuban Singo Barong Taiwan berada di dua sisi manajemen, yakni manajemen tradisional yang kekeluargaan selain manajemen yang lebih terorganisir.

Pertunjukan Singo Barong Taiwan



Foto: Sima Wu Ting Kuan

Ruang Hall Gungguan Elementary School, Pingtung County padat oleh ratusan pekerja migran Indonesia dari berbagai pelosok Taiwan. Selain orkes dangdut Om Ramesta yang cukup popular di kalangan PMI, kehadiran Paguyuban Singo Barong Taiwan menjadi bintang utama

dalam rangkaian acara silaturahmi organisasi Densus 87 Pingtung dan Putra Katong pada 21 Juli 2019.

“Kami membawa satu rombongan lebih 30 orang,” ungkap Heri Budi Santoso, Ketua Paguyuban Singo Barong Taiwan, saat ditemui sebelum pementasan penutup Singo Barong di Pingtung, Taiwan Selatan. Tidak sia-sia, besarnya pengabdian sebuah loyalitas pada seni tradisional Reog Ponorogo yang dibawa oleh teman-teman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merangkap sebagai seniman tersebut mendapatkan apresiasi besar di negeri Formosa.

Menjelang penutupan acara silaturahmi tersebut, pertunjukan Reog Ponorogo yang dinanti beraksi. Dimulai dari para penari jatilan yang bergerak gemulai mengikuti alunan musik dan nyanyian yang dibawakan para pengrawit. Gemulai gerak tarian yang dibawakan Lorena, Puput, Dinda, Anis dan lain-lain lambat tapi pasti semakin menarik para penonton bergeser ke depan hingga akhirnya terlihat beberapa pemuda menemani mereka menari, lembar demi lembar 100 dolar Taiwan diberikan sebagai saweran.

Tidak lama kemudian, giliran Tari Patih yang dibawakan dua orang penari laki-laki yang berperan sebagai panglima Singo Barong. Keduanya bergantian menari diselingi atraksi akrobat dan gerak gesture yang menghibur. Seusai tari jatilan dan tari patih, akhirnya dua sosok Singa berkepala burung merak yang ditunggu mulai beraksi.

Kedua sosok singa berkepala burung merak berdiri saling berhadapan, mereka mulai dengan mengibaskan kepalanya, kemudian satu sama lain bergerak bergantian. Alunan musik kendang, terompet, gong dan angklung membuat ritme gerak kedua Singo Barong semakin kencang.

Penonton dibuat terpukau sekaligus khawatir. Terutama penonton paling depan yang khawatir terkena kibasan. Ratusan layar handphone terlihat merekam aksi mereka. Tetapi amukan Singo Barong yang ditunggu ini tidak berlangsung lama. Sebab, tentu saja bukan perkara mudah bagi Rudi dan Hendrik, dua pemain di balik sosok Singo barong untuk membawa beban lebih dari 50 kilogram. Permainan mereka secara fisik mengandalkan kekuatan leher dan gigi.

Banyak pula yang mengira bahwa atraksi Reog Ponorogo melibatkan hal-hal mistis. Namun pada realitanya, para pemain Singo Barong berlatih hingga mampu mengendalikan dan memainkan Singo Barong dengan seimbang.

“Yang penting ada kesungguhan dan giginya gak ompong. Kalau giginya sudah ompong yah gak bisa soalnya memainkan harus digigit. Walaupun orangnya kecil, kalau mau belajar sungguh-sungguh dan tahu tekniknya pasti bisa,” ungkap Heri.

Tulisan di atas merupakan sepilahan pengalaman menonton Singo Barong Taiwan, yang secara pertunjukan dan artistik tidak terlalu berbeda dengan pertunjukan Reog Ponorogo di Indonesia. Kehadiran barongan, penari jathil, bujangganong, senggakan juga elemen lainnya. Adapun yang berbeda adalah ruang di mana mereka pentas di Taiwan, penonton dari pekerja migran dan warga Taiwan dan misi mereka mementaskan Singo barong Taiwan sebagai eksistensi warisan seni budaya reog ponorogo.

Warisan budaya yang sering disebutkan Heri sebagai ketua Singo barong Taiwan adalah “identitas” budaya sebagai fungsi akar dan kedirian, selain kebersamaan “senasib” di negeri perantauan. Di sisi lain, ketika mereka pentas, para penari jathilan seperti Lorena mengungkapkan bahwa perasan bangga menjadi “seniman” adalah hal yang memberikan kebanggaan. Berbeda saat mereka kembali bekerja, keterasingan diri dan dominasi dirasakan para anggota Singo barong, oleh sebab itulah paguyuban ini dibutuhkan dan memiliki orang-orang setia yang menghidupinya.

Barganning Position dan Soft Diplomacy



Dokumentasi: Sima Wu Ting Kuan

Pada tahun 2019 saat saya penelitian terdapat 270.997 Buruh Migran Indonesia di Taiwan (MOL, 2019), menempati posisi pertama jumlah terbesar selain Filipina, Thailand dan Vietnam. Selama di Taiwan dan berkunjung ke kota Taipei, Tainan, Taichung dan Taitung, saya menyaksikan berbagai pertunjukan dari komunitas seni pertunjukan, selain pertunjukan dangdut dan band dari pekerja migran indoensia.

Di acara festival seni budaya berjuluk “Sensasi Kebebasan” untuk memperingati kemerdekaan Indonesia 2019 diselenggarakan pada 18 Agustus 2019 di Halaman Taipei Main Station, TMS Dan National Taiwan Museum, saya menyaksikan pertunjukan Singo barong Taiwan, Tari Golek Sulung Dayung, Tari Lengger, Tari Peresean, Tari Batik Grinseng, Tari Sancang Gugat dan berbagai pertunjukan lainnya diselenggarakan oleh National Taiwan Museum Southeast Asia Educational, Scientific and Cultural Association, Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan (HIMMAS UTT) dan Universitas Terbuka Taiwan (UTT).

Terlibat pada acara “Sensasi Kebebasan” membuat saya melihat dengan nyata bahwa Indonesia sebagai sebuah identitas bisa hadir sekaligus dirayakan di negeri Formosa Taiwan, yakni melalui seni pertunjukan, salah satunya pertunjukan Singo Barong Taiwan.

Apa yang menjadi posisi tawar yang menguatkan dan melemahkan (*bargaining positition*) dengan kehadiran Singo barong Taiwan? Untuk elemen-elemen yang menguatkan adalah fungsi seni sendiri bagi yaitu: Ekspresi, entertainment (hiburan) dan identitas.

Paguyuban Singo barong Taiwan menjadikan seni reog ponorogo sebagai media ekspresi teman-teman Buruh Migran Indonesia dari pekerjaan formal atau juga rehat dari rutinitas/ *healing*. Ekpresi berkomunitas ini juga turut membangun ikatan kuat antar pekerja migran untuk saling guyub dan saling membantu seperti melalui donasi untuk mendatangkan kepala barongan dari Ponorogo ke Taiwan. Di sisi lain, ekspresi budaya reog ponorogo di Taiwan menunjukan warisan budaya yang dibanggakan oleh orang Indonesia, khususnya ponorogo, tidak hanya sekedar menghibur atau entertain namun menunjukan identitas asli budaya Indonesia secara internasional sebagai bagian dari seni sebagai media diplomasi.

Selanjutnya, yang menjadi posisi lemah atau kekurangan dari paguyuban Singo Barong Taiwan adalah regenerasi, keberlanjutan paguyuban (*sustainable*), ruang dan waktu seperti sulitnya menyesuaikan waktu untuk para anggota berkumpul dan keterbatasan ruang latihan dan pentas, manajemen dan support dari pemerintah Taiwan dan Indonesia, juga stereotype sebagai komunitas seni dari pekerja migran atau seni grassroot dari lapisan bawah

KESIMPULAN

Taiwan sejak masa pemerintahan Presiden Tsai Ing-Wen (2016-2024) menggunakan Kebijakan baru ke arah selatan atau New Soutbound Policy (NSP). Kebijakan Taiwan untuk melihat ke selatan memiliki potensi besar untuk merekatkan hubungan antar masyarakat Taiwan dan negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kebijakan “diplomasi hangat” ini juga turut memberikan kebebasan bagi pekerja migran Indonesia di Taiwan berekspresi lewat komunitas seni, salah satunya Paguyuban Singo Barong Taiwan.

Singo Barong Taiwan menjadikan seni sebagai media ekspresi, *entertainment* dan identitas sebagai warisan budaya dan *soft diplomacy* antara kedua negara. Permasalahan yang dihadapi Singo Barong Taiwan adalah regenerasi, keberlanjutan (sustainable), ruang dan waktu latihan/pentas, manajemen dan support pemerintah Taiwan dan Indonesia karena masih lebih banyak mengandalkan dari anggota dan teman-teman pekerja migran. Selain stereotype seni

dari lapisan bawah atau grassroot. Tetapi, Paguyuban Singo Barong Taiwan diakui menjadi duta budaya, selain ekspresi kerinduan Buruh Migran Indonesia pada kampung halaman.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/3014.html

https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/08/01/menggali-potensi-baru-new-southbound-policy-taiwan

P. Atkinson dan M. Hammersley, “Etnography and Participant Observation”, Handbook of Qualitative Research. (Thousand Oaks: Sage, 1994), 249-261, hlm. 250

James P. Spradley, Metode Etnografi, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm.40

https://arsipelago.id/2019/08/03/eksistensi-singo-barong-di-taiwan/

Workfore Development Agency, MOL July 2019

UJI PLAGIARISME TURNITIN

(Disediakan oleh Perpustakaan UI)

Rio Fernando Alexander

by Perpustakaan UI Uji Kemiripan 6

Submission date: 31-Jan-2025 03:32PM (UTC+0700)
Submission ID: 2557641845
File name: hubungan_Budaya_dan_Ekonomi_Kreatif_-_Rio_Fernando_Alexander.pdf (568.44K)
Word count: 7359
Character count: 47516

Rio Fernando Alexander

ORIGINALITY REPORT

3%	4%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ortax.org Internet Source	1%
2	artikelpendidikan.id Internet Source	1%
3	www.coursehero.com Internet Source	<1%
4	herdyantismi.blogspot.com Internet Source	<1%
5	peraturanpajak.com Internet Source	<1%
6	dokumen.tips Internet Source	<1%
7	repository.ar-raniry.ac.id	<1%

Halaman 29 / 30

STRATEGI PELESTARIAN BAHASA DAERAH MELALUI INSENTIF PAJAK BAGI INDUSTRI MUSIK MODERN: MEMBANGUN KETERHUBUNGAN BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, salah satunya adalah keberagaman bahasa daerah. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh nusantara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia (Lewis, Simons, & Fennig, 2016). Bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas budaya yang mencerminkan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Namun, globalisasi dan dominasi bahasa-bahasa mayoritas telah menyebabkan penurunan penggunaan bahasa daerah, bahkan di beberapa wilayah mengalami kepunahan (UNESCO, 2019). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bahasa daerah di Indonesia menghadapi ancaman serius berupa kepunahan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pengaruh globalisasi yang semakin kuat (Musgrave, 2014).

Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, urbanisasi, modernisasi, serta pengaruh kuat dari bahasa internasional seperti bahasa Inggris (Musgrave, 2014). Globalisasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola komunikasi dan preferensi bahasa generasi muda. Penggunaan bahasa asing semakin meluas dalam sektor pendidikan, bisnis, hingga media, sementara penggunaan bahasa daerah mengalami penurunan signifikan (Sneddon, 2003). Akibatnya, banyak generasi muda lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, yang semakin mempercepat pergeseran bahasa daerah (Lauder, 2019). Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi yang tepat, Indonesia berisiko kehilangan sebagian besar warisan linguistiknya, yang juga berdampak pada hilangnya kekayaan budaya dan identitas lokal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya pelestarian bahasa daerah yang inovatif dan efektif. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam media populer, seperti musik. Musik memiliki daya tarik yang universal dan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk generasi muda. Dengan memasukkan elemen bahasa daerah ke

dalam lagu-lagu pop, diharapkan dapat meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian bahasa daerah (Nettle & Romaine, 2000).

Penelitian ini mengusulkan pemberian insentif pajak bagi penyanyi dan pencipta lagu pop yang menggunakan bahasa daerah dalam karya mereka sebagai bagian dari strategi pelestarian bahasa daerah di Indonesia. Insentif pajak ini diharapkan dapat mendorong para pelaku industri musik untuk lebih aktif dalam menciptakan karya-karya yang tidak hanya inovatif secara musikal, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian bahasa daerah.

Selain sebagai alat pelestarian bahasa, langkah ini juga dapat mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Industri musik dapat berkembang melalui kolaborasi antara pemerintah, musisi, produser, dan komunitas budaya. Hal ini tidak hanya akan memperkaya kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga membuka peluang baru di pasar domestik dan internasional. Lagu-lagu yang memadukan unsur tradisi dan modernitas dapat memperkenalkan bahasa daerah ke panggung dunia, memperkuat diplomasi budaya Indonesia, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata berbasis budaya (Yampolsky, 1995).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Musik Daerah

Musik daerah atau musik tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang telah berkembang secara turun-temurun di suatu wilayah tertentu. Tumbijo dalam Kemdikbud (2017) menjelaskan bahwa musik tradisional adalah kesenian yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Senada dengan itu, Purnomo (2010) menyebutkan bahwa musik daerah merupakan musik yang muncul dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia, tetap dijaga keberadaannya oleh masyarakat, serta berfungsi sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Musik daerah memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis musik lain. Beberapa ciri khas musik daerah antara lain:

1. Penggunaan bahasa daerah

   Lirik lagu dalam musik daerah umumnya menggunakan bahasa atau dialek lokal, mencerminkan identitas budaya setempat.
2. Penggunaan alat musik tradisional

   Instrumen yang dimainkan dalam musik daerah biasanya merupakan alat musik khas daerah tersebut, seperti angklung, gamelan, atau sasando.
3. Melodi dan ritme yang khas

Setiap daerah memiliki pola melodi dan ritme unik yang mencerminkan kekayaan musikal masing-masing wilayah.

4. Fungsi dalam kehidupan sosial

   Musik daerah sering digunakan dalam berbagai acara adat, ritual keagamaan, serta upacara sosial sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh individu maupun badan usaha dalam suatu periode tertentu. Selain menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, pajak penghasilan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dalam masyarakat. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pajak penghasilan berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik serta mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil. Secara konseptual, pajak penghasilan dapat diklasifikasikan berdasarkan subjek pajaknya, yakni pajak penghasilan orang pribadi (*Personal Income Tax*) dan pajak penghasilan badan (*Corporate Income Tax*), sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi perpajakan di berbagai negara (James & Nobes, 2018).

2.3 Royalti

Royalti merupakan kompensasi finansial yang diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual sebagai imbalan atas penggunaan hak tersebut oleh pihak lain. Royalti dapat mencakup berbagai bentuk hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan hak atas sumber daya alam. Menurut Kitch (1977), royalti berperan dalam memberikan insentif bagi inovasi dan kreativitas dengan memastikan bahwa pencipta atau pemilik hak memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Dalam industri kreatif, royalti sering kali diterapkan dalam sektor musik, penerbitan, film, dan perangkat lunak, di mana pemilik hak memperoleh persentase dari pendapatan yang dihasilkan oleh penggunaan atau distribusi karya tersebut (Towse, 2019). Mekanisme penentuan royalti bervariasi tergantung pada jenis hak dan perjanjian antara pemilik hak dan pengguna. Dalam konteks hak cipta, royalti biasanya dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan kotor atau laba bersih yang diperoleh dari eksploitasi karya tersebut (Rosen, 1981).

2.4 Insentif Perpajakan

Insentif perpajakan adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pengurangan, pembebasan, atau keringanan pajak dengan tujuan untuk

mendorong aktivitas ekonomi tertentu, meningkatkan investasi, atau mendukung sektor-sektor strategis (OECD, 2021). Menurut Spitz, sebagaimana dikutip oleh Suandy (2006), terdapat empat jenis utama insentif pajak yang umum diterapkan oleh pemerintah, yaitu:

1. Pengecualian dari Pajak (*Tax Exemption*)

   Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk terbebas dari kewajiban pajak selama periode tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh bentuknya adalah *tax holiday*, di mana perusahaan atau individu tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu guna mendorong investasi.

2. Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

   Insentif ini memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak melalui berbagai pengeluaran yang dapat dikurangkan. Dalam beberapa kasus, jumlah yang dikurangkan bisa lebih besar dari yang seharusnya. Salah satu contoh dari bentuk insentif ini adalah konsep *double deduction*, di mana biaya tertentu diperhitungkan secara ganda dalam pengurangan pajak.

3. Pengurangan Tarif Pajak (*Tax Reduction*)

   Pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang lebih rendah dari tarif normal bagi kelompok wajib pajak tertentu. Insentif ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban pajak, misalnya melalui pengurangan tarif pajak penghasilan badan usaha untuk sektor tertentu.

4. Penangguhan Pembayaran Pajak (*Tax Deferral*)

   Jenis insentif ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menunda kewajiban pembayaran pajak hingga periode tertentu. Dengan demikian, wajib pajak memiliki fleksibilitas dalam mengatur arus kas sebelum memenuhi kewajiban pajaknya.

3. METODOLOGI

Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk memahami sebuah fenomena sosial dari berbagai pandangan (Creswel dan Creswel, 2018). Dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat menggunakan studi kasus dari musisi atau komunitas tertentu yang telah berhasil menggunakan bahasa daerah dalam karya musik mereka.

Dengan menyajikan contoh konkret, peneliti dapat menunjukkan dampak positif dari insentif pajak dan bagaimana hal ini berkontribusi pada pelestarian bahasa daerah.

Data pada penelitian kualitatif dikumpulkan melalui penelitian dokumen terkait, pengamatan terhadap perilaku, atau melakukan wawancara terhadap partisipan (2018). Penelitian ini menggunakan pengumpulan data studi kepustakaan, yang dilakukan melalui analisis terhadap berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, prosiding, regulasi, serta dokumen pada situs web terkait dengan kebijakan insentif pajak bagi industri musik modern.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif *illustrative method*, dimana terdapat kotak kosong yang diisi dengan contoh empiris dalam bentuk konsep teoritis (Neuman, 2014). Dalam konteks penelitian ini, *illustrative method* memungkinkan peneliti untuk menghubungkan data yang diperoleh dari literatur, wawancara, diskusi kelompok, dan observasi dengan teori yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelestarian bahasa daerah melalui insentif pajak bagi industri musik modern.

4. HASIL

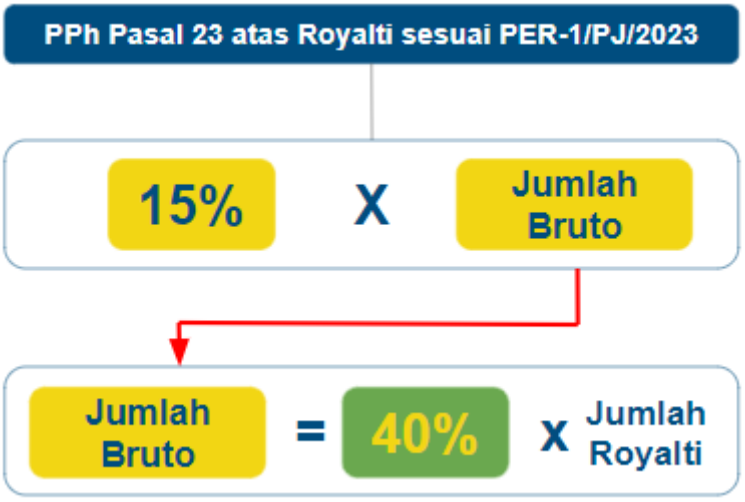
4.1 Status Quo Pengenaan Pajak atas Industri Musik di Indonesia

Umumnya, terdapat tiga aktor penting dalam industri musik, yaitu komposer, pencipta lagu (*songwriter*), dan penyanyi (pembawa lagu). Ketiga peran ini biasanya berdiri sendiri (dilakukan oleh individu yang berbeda-beda), tapi tak jarang ditemui dimana satu orang dapat menjalankan perannya sebagai komposer, pencipta lagu, dan penyanyi.

Komposer adalah individu yang menciptakan karya musik instrumental atau vokal melalui penulisan partitur dan aransemen. Komposer bertanggung jawab atas struktur musik dan harmoni dalam sebuah komposisi. Pencipta lagu bertugas untuk menulis lirik dan melodi yang menjadi dasar sebuah lagu. Mereka fokus pada pengembangan tema, pesan, dan emosi yang ingin disampaikan melalui lirik dan melodi. Penyanyi adalah individu yang mengekspresikan karya musik melalui vokal. Penyanyi bertugas untuk menyampaikan interpretasi emosional dan teknis dari sebuah lagu kepada pendengar.

Baik pencipta lagu dan komposer memiliki *passive income* dalam bentuk royalti, yaitu penghasilan atas kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan (Asmarani, 2024). Royalti berdasarkan definisi merupakan salah satu bentuk penghasilan, yang termasuk dalam objek pajak penghasilan (PPh). Penghasilan berupa

royalti dikenakan PPh Pasal 23, dengan tarif sebesar 15% dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan jumlah bruto dari royalti.



Gambar 2. PPh Pasal 23 atas Royalti sesuai PER-1/PJ/2023

Sumber: Ortax, 2023

Akan tetapi, perhitungan pajak royalti bagi orang pribadi (OP) berbeda dengan badan. Berdasarkan Perdirjen Pajak No. PER-1/PJ/2023, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bagi orang pribadi atas royalti adalah 40% dari jumlah bruto. Dengan demikian, penghitungan pajak royalti atas orang pribadi adalah dengan dikalikan tarif 15% dan 40% atas jumlah bruto royalti. Sehingga, orang pribadi yang menggunakan NPPN dikenakan tarif pajak royalti sebesar 6%. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas perhitungan NPPN yang dimaksud sebelumnya, pencipta lagu dan komposer harus menyampaikan bukti penerimaan surat (BPS) kepada pemotong PPh Pasal 23 sebagai pemberitahuan penggunaan NPPN.

Sebagai contoh, Nyonya X adalah seorang pencipta lagu yang membuat banyak lagu populer yang digunakan oleh berbagai perusahaan rekaman. Pada bulan Agustus 2024, atas penggunaan lagu dari PT Y, Nyonya X menerima penghasilan royalti sebesar Rp6.000.000.000,00. Surat pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang diterbitkan oleh salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah diserahkan oleh Nyonya X kepada PT Y. Atas penghasilan royalti yang dibayarkan oleh PT Y kepada Nyonya X, maka PT Y:

1. wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% x 40% x Rp6.000.000.000,00 = Rp 360.000.000,00;
2. wajib menerbitkan bukti atas pemotongan (bupot) PPh Pasal 23 terkait royalti dan memberikan bukti tersebut kepada Nyonya X; dan

3. wajib melakukan pelaporan atas bukti pemotongan PPh Pasal 23 tersebut dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

Pengenaan pajak bagi penyanyi ‘cukup berbeda’ dengan pengenaan pajak bagi komposer dan pencipta lagu. Penyanyi–dalam konteks ini adalah bukan pencipta lagu dan komposer–merupakan pekerjaan aktif, dimana penyanyi akan membawakan lagu di hadapan penonton secara langsung (*performance*).

Bagi penyanyi yang menerima penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan, pemberian jasa dan/atau kegiatan, maka akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan mengalikan penghasilan bruto dan tarif yang berlaku pada pasal 17 (Wulandari, 2022).[1] Sebagai contoh, PT X mengundang penyanyi terkenal Tuan Y untuk membawakan lima (5) lagu saat perayaan hari ayah. PT X memberikan honor sebesar Rp 10.000.000,00 setiap satu lagu yang dinyanyikan dan Tuan Y membawakan 5 lagu pada perayaan hari ayah tersebut.

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 60 - Rp 250 juta	15%
III	>Rp 250 - Rp 500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta - Rp 5 miliar	30%
V	>Rp 5 miliar	35%

Tabel 1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Sumber: UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh Pasal 17

Total penghasilan yang didapatkan oleh Tuan Y dari PT X pada perayaan hari ayah adalah sebesar Rp 50.000.000,00. Total penghasilan tersebut masuk dalam lapisan tarif pertama, sehingga besaran pajak yang dipotong PT X kepada Tuan Y adalah sebesar 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00.

Meskipun tidak mendapatkan royalti atas penciptaan karya musik, penyanyi juga tetap memiliki hak untuk mendapatkan royalti atas karya lain (diluar penciptaan karya musik), yaitu atas penjualan rekaman dan *streaming*. Royalti antara penyanyi berbeda dengan royalti yang diterima dengan royalti pencipta lagu. Dalam kasus ini, hanya penyanyi yang berperan sebagai artis rekaman (*recording artist*) yang berhak

[1] pengenaan pajak atas penyanyi berbeda-beda, bergantung pada kondisi penyanyi serta hubungan dengan pemberi kerja.

mendapatkan royalti. Besaran royalti yang diterima bergantung pada kontrak penyanyi sebagai artis rekaman (*recording artist*) dengan label rekaman (*record label*). Perhitungan pajak penghasilan atas royalti yang diterima oleh penyanyi memiliki sistem perhitungan yang sama, sebagaimana perhitungan pajak atas pencipta lagu dan komposer yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Selain ketiga aktor yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat aktor lain yang biasanya berperan sebagai penghubung antara ketiga aktor tersebut, yaitu label rekaman. Label rekaman memiliki peranan yang sangat penting di industri musik. Label rekaman bertugas untuk mengurus *end-to-end* karya dari para musisi, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Selain itu, label rekaman juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah *genre* musik yang akan dibawakan oleh musisi, termasuk dalam hal keputusan apakah musisi dapat menyertakan elemen musik tradisional atau instrumen kedaerahan dalam karya mereka.

Sebagai entitas bisnis, label rekaman diperlakukan sebagai badan hukum dalam perpajakan dan dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) atas penghasilan yang diterimanya. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, label rekaman dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari penjualan album, royalti, dan pendapatan lainnya. Label rekaman sebagai badan usaha dikenakan PPh Badan sebesar 22% dari laba kena pajak (tarif ini berlaku sejak 2022).

Selain PPh, label rekaman juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan produk musik, seperti album fisik dan digital, *merchandise*, serta tiket konser, dengan tarif sebesar 11%. Dalam konteks digital, transaksi musik melalui *platform streaming* atau unduhan juga telah masuk dalam cakupan PPN Produk Digital yang mewajibkan *platform* luar negeri seperti Spotify dan Apple Music untuk memungut PPN dari pelanggan Indonesia. Akan tetapi, label rekaman hanya memiliki kewajiban administratif dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dikarenakan sifat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan kepada konsumen akhir, sehingga bukan menjadi beban biaya bagi label rekaman.

Meskipun regulasi pajak ini telah mapan, kebijakan fiskal terhadap industri musik di Indonesia masih bersifat netral, tanpa adanya insentif yang secara khusus mendorong pertumbuhan industri ini dalam kaitannya dengan pelestarian budaya atau penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal. Sebagai bagian dari ekonomi kreatif, industri musik belum memperoleh perlakuan pajak yang diferensial dibandingkan sektor bisnis lainnya. Hal ini membuat label rekaman yang ingin mengembangkan

produksi musik berbasis kearifan lokal atau pelestarian budaya (atau produksi musik yang berpotensi menyertakan kearifan lokal dalam karya musisinya) masih harus menghadapi beban pajak yang sama dengan label rekaman yang berorientasi komersial semata.

Saat ini, label rekaman yang ingin mengembangkan musik dalam bahasa daerah tidak mendapatkan perlakuan pajak yang lebih ringan dibandingkan label yang berfokus pada musik berbahasa Indonesia atau asing. Beban yang harus ditanggung label rekaman di Indonesia sangat besar, mencakup beban pajak, biaya produksi, distribusi, pemasaran, serta tantangan hukum dan regulasi. Beban pajak menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas, terutama bagi label rekaman kecil dan independen. Tanpa insentif, label rekaman lebih cenderung memilih produksi musik yang memiliki prospek pasar yang lebih luas, seperti musik dalam bahasa nasional atau internasional, karena mereka tetap harus menanggung beban pajak yang sama meskipun ada tantangan dalam monetisasi musik berbahasa daerah.

4.2 Skema Insentif atas Warisan Budaya di Negara Lain

Irlandia menerapkan kebijakan pengecualian pajak bagi seniman (*Artist Tax Exemption*) sebagaimana diatur dalam Taxes Consolidation Act tahun 1997, Pasal 195. Kebijakan ini memungkinkan pengecualian pajak terhadap pendapatan yang dihasilkan dari berbagai bentuk karya seni, termasuk buku dan bentuk tulisan sejenis lainnya, pertunjukkan lakon, komposisi musik, lukisan atau bentuk lukisan sejenis lainnya, dan berbagai bentuk patung.

Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian pajak, suatu karya seni harus memenuhi kriteria orisinalitas dan kreativitas, serta memiliki atau secara umum diakui memiliki nilai budaya (*cultural merit*) atau nilai artistik (*artistic merit*). Kriteria nilai budaya terpenuhi apabila suatu karya, karena kualitas bentuk dan/atau isinya, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan budaya nasional maupun internasional. Kualitas bentuk merujuk pada teknik, gaya, dan estetika penyajian, sementara kualitas isi berkaitan dengan tema, pesan, dan makna yang terkandung dalam karya tersebut. Kedua aspek ini harus memenuhi standar tinggi agar diakui sebagai karya yang bernilai budaya. Lebih lanjut, sebuah karya dianggap memiliki kontribusi nyata terhadap budaya jika mampu mengangkat tema-tema penting yang relevan dengan masyarakat, mendorong dialog atau pemahaman lintas budaya, serta menyajikan perspektif baru yang dapat memperkaya pengalaman budaya masyarakat. Dampak yang dihasilkan oleh karya tersebut harus cukup besar sehingga dapat diakui dan dihargai oleh masyarakat luas.

Apabila suatu karya seni disetujui untuk memperoleh pengecualian pajak, maka pendapatan yang diperoleh dari penjualan atau produksi karya tersebut, termasuk karya-karya sejenis, dikecualikan dari pajak penghasilan. Selain penjualan, pendapatan tersebut termasuk pendanaan untuk menciptakan karya, biaya seniman untuk memamerkan karya, dan kontrak untuk komisi karya. Pengecualian Pajak Seniman tidak berlaku untuk pendapatan yang tidak secara langsung terkait dengan karya seni (Visual Artists Ireland, 2023)–seperti biaya untuk menyampaikan lokakarya (*workshops*), pembicaraan seniman (*talks*), atau kolaborasi (*collaboration*). Kebijakan ini menetapkan batas maksimum pendapatan yang dapat dikecualikan, yakni sebesar €50.000 per tahun. Jumlah ini mengalami peningkatan dari batas sebelumnya, yaitu €40.000 per tahun pada periode 2011 hingga 2014 (Meager, 2019).

Selain Irlandia, Québec di Kanada juga menerapkan insentif kepada seniman (*artist*). Québec, Ontario, dan British Columbia merupakan pusat industri budaya dan seni di Kanada. Di antara ketiga provinsi tersebut, Québec menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam mendukung sektor budaya melalui peningkatan alokasi pendanaan, penguatan peran serta fungsi Kementerian Budaya, serta pembentukan Conseil des Arts et des Lettres du Québec, sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung perkembangan seni dan budaya. Selain itu, Québec memiliki sistem perpajakan yang berbeda dengan provinsi lainnya, di mana pemungutan pajaknya dilakukan secara terpisah dari pajak federal.

Sebagai provinsi yang mayoritas berbahasa Prancis, Québec juga memiliki komunitas berbahasa Inggris yang cukup signifikan. Sejarahnya dipenuhi dengan evolusi budaya yang unik, yang dipengaruhi oleh akar kolonial Perancis dan pengaruh Inggris yang datang kemudian. Dualitas bahasa ini mencerminkan kompleksitas identitas budaya Québec, yang tetap berperan dalam konteks nasional Kanada, di mana bahasa Inggris dan Perancis keduanya diakui sebagai bahasa resmi negara. Oleh karena itu tidak mengherankan penamaan lembaga Conseil des Arts et des Lettres du Québec menggunakan bahasa Prancis.

Sebagai bentuk dukungan bagi seniman dan kreator, pemerintah Québec menerapkan kebijakan pengecualian pajak terhadap pendapatan yang berasal dari hak cipta (*copyright income*) melalui Québec Bill 108, sebuah amandemen terhadap Income Tax Act tahun 1995 (McAndrew, 2002). Kebijakan ini memungkinkan seniman memperoleh pembebasan pajak tahunan hingga batas tertentu dengan sistem bertingkat. Awalnya, seniman dapat menikmati pembebasan pajak sepenuhnya untuk pendapatan hak cipta hingga $15.000 CAD, sementara untuk pendapatan di atas

jumlah tersebut, besaran pengecualian pajak semakin berkurang hingga batas maksimal $30.000 CAD (Mathieu, 2000). Pada tahun 2001, batas maksimal pendapatan yang dibebaskan dari pajak dinaikkan menjadi $60.000 CAD, namun tetap menerapkan mekanisme skala bertingkat yang serupa. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana Québec memberikan insentif pajak bagi industri kreatif sebagai strategi untuk mendukung keberlanjutan ekonomi seniman dan kreator di wilayahnya.

Pengecualian pajak untuk para seniman (*artists*), pencipta (*creators*), dan produsen (*producers*) diberikan karena mereka memiliki peran yang sangat penting dalam industri budaya yang juga ekonominya signifikan, seperti musik, rekaman suara, penerbitan, dan pembuatan film. Meskipun seringkali mereka bekerja tanpa dibayar atau dengan bayaran yang tidak memadai, kontribusi mereka dianggap sangat penting, layaknya penelitian dan pengembangan (R&D) dalam bidang ilmiah, industri, dan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah Kanada ingin memberikan pengakuan dan dukungan yang sama kepada para inovator budaya seperti yang telah diberikan dalam bidang R&D lainnya (Standing Committee on Canadian Heritage, 1999).. Pengecualian pajak ini hanya berlaku untuk pendapatan hak cipta dari seniman, yang berarti hanya berlaku bagi "pencipta" yang karya seninya menghasilkan karya sastra, musik, atau karya seni (*artistic works*).

Korea Selatan juga menerapkan insentif untuk mendukung kelestarian budaya Korea Selatan. Salah satu sumber pendapatan Korea Selatan adalah melalui industri konten budaya (*Korea's cultural content industry*) dimana industri konten budaya Korea telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan mencatatkan penjualan sebesar KRW 137,5 triliun pada tahun 2021, yang meningkat 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya (Invest Korea, n.d.). Selain itu, ekspor dari industri ini mencapai USD 12,45 miliar, naik 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara jumlah perusahaan yang terlibat juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 9,1%, mencapai sekitar 108.000 perusahaan.

Untuk mendorong perkembangan industri ini lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan menawarkan berbagai insentif pajak, salah satunya adalah kredit pajak untuk biaya produksi konten video. Ketentuan ini merupakan satu-satunya kebijakan yang mencakup industri konten budaya dalam Undang-Undang Pengecualian Khusus Pajak yang dirancang untuk sektor manufaktur. Kredit pajak ini mencakup biaya produksi untuk berbagai jenis konten video, seperti film yang diputar di bioskop, drama televisi, animasi, dokumenter, program komedi, dan kini juga mencakup konten OTT. Kredit pajak ini memberikan pengurangan pajak pada perusahaan sesuai dengan ukuran

mereka, yaitu 10% untuk perusahaan kecil, 7% untuk perusahaan menengah, dan 3% untuk perusahaan besar, yang dapat dipotong dari pajak penghasilan atau pajak badan di tahun dimana konten pertama kali ditayangkan (KOCCA, 2022).

Perhitungan Kredit Pajak atas Produksi Konten Korea Selatan			
A.	**PPh Terutang**		RpYYY juta
B.	**Kredit Pajak:**		
	- Kredit pajak atas biaya proses produksi konten video (kategori perusahaan kecil) Biaya produksi = RpXXX juta Kredit pajak = 10% x RpXXX juta	(10% x RpXXX juta)	
	Jumlah PPh yang dapat dikreditkan		(10% x RpXXX juta)
C.	**PPh Terutang yang masih harus dibayar**		RpYYY juta - (10% x RpXXX juta)

Tabel 2. Mekanisme Kredit Pajak atas Produksi Konten Korea Selatan

Sumber: Penulis

Biaya produksi yang dapat dikurangkan meliputi biaya yang dikeluarkan selama tahap persiapan, produksi, dan pascaproduksi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, namun beberapa biaya seperti kontribusi ke badan publik, biaya iklan dan PR, serta biaya hiburan tidak termasuk dalam pengurangan ini. Sebagai bentuk keseriusan dan berdasarkan manfaat yang diterima Korea Selatan atas industri konten budaya, pengurangan pajak atas biaya produksi konten yang seharusnya berakhir pada tahun 2022 kemudian diperpanjang hingga tahun 2025 (Korea Bizwire, 2022).

Negara	**Jenis Insentif**	**Jenis Pajak**	**Jenis Karya Seni**	**Waktu Berlaku**	**Keterangan**
Irlandia	Pengecualian		Lima (5) jenis karya seni, termasuk musik.	Pendapatan dari **proses penjualan** atau **produksi** karya seni.	Pengecualian pajak atas musik dengan nilai budaya (*cultural merit*) hingga €50.000

	Pajak (*Tax Exemption*)	Pajak Penghasilan (*Income Tax*)			per tahun.
Québec, Canada			Karya seni, termasuk musik, rekaman suara, film, dsbnya.	Pendapatan atas **eksploitasi** hak cipta (*copyright income*)	Pengecualian pajak atas pendapatan hingga $60.000 CAD.
Korea Selatan	Kredit Pajak (*Tax Credit*)		Konten video, film, dan sejenisnya.	Kredit pajak terhadap PPh terutang atas **proses produksi**.	10% untuk perusahaan kecil, 7% untuk perusahaan menengah, dan 3% untuk perusahaan besar atas PPh badan saat tahun pertama konten ditayangkan.

Tabel 3. Perbandingan Kebijakan Insentif atas Budaya di Negara Lain

Sumber: Visual Artists Ireland (2023), McAndrew (2002), KOCCA (2022),

diolah kembali oleh penulis

4.3 Analisis Opsi Insentif Perpajakan

Pengecualian pajak (*tax exemption*) memberikan pembebasan terhadap kewajiban pajak dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks produksi lagu berbahasa daerah, *tax exemption* dapat diberikan dalam bentuk *tax holiday* bagi label rekaman atau musisi yang memproduksi dan merilis lagu dalam bahasa daerah. Namun, efektivitas *tax exemption* dalam industri musik cenderung lebih rendah dibandingkan sektor manufaktur atau investasi jangka panjang, karena industri musik lebih banyak melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum tentu memiliki penghasilan kena pajak tinggi untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kebijakan ini. Selain itu, *tax holiday* biasanya diberikan kepada perusahaan besar dengan investasi signifikan, sementara ekosistem musik lokal lebih banyak terdiri dari pelaku kreatif individu atau usaha kecil yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ini. Oleh karena itu, *tax exemption* kurang relevan sebagai skema insentif utama bagi industri musik daerah.

Pengurangan DPP melalui mekanisme *deduction* adalah salah satu bentuk insentif yang cukup relevan dalam mendukung produksi lagu berbahasa daerah. Dengan skema ini, biaya produksi, seperti biaya rekaman, aransemen, distribusi, promosi, dan royalti bagi pencipta lagu, dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Insentif ini akan memberikan manfaat langsung bagi produser dan musisi, karena mengurangi beban pajak yang mereka tanggung, sehingga lebih banyak investasi dapat dialokasikan untuk produksi lagu dalam bahasa daerah.

Misalnya, jika sebuah label rekaman mengeluarkan Rp100 juta untuk memproduksi lagu daerah, dengan skema *double deduction*, mereka dapat mengklaim pengurangan sebesar Rp200 juta dalam penghitungan pajak penghasilan. Hal ini akan meningkatkan daya tarik produksi lagu berbahasa daerah dibandingkan lagu dalam bahasa nasional atau asing yang tidak mendapatkan perlakuan serupa. Pengurangan DPP ini juga lebih fleksibel dan dapat diakses oleh berbagai skala industri, termasuk musisi independen yang sering kali menjadi pelopor dalam pelestarian musik daerah. Oleh karena itu, skema *deduction* dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendorong lebih banyak produksi lagu daerah.

Akan tetapi, pada dasarnya, bagi Wajib Pajak Badan, dapat mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan usaha untuk mendapatkan penghasilan (baik dari Indonesia maupun luar Indonesia). Biaya yang dikeluarkan untuk produksi lagu modern komersial dapat dijadikan pengurang saat melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan. Konsep ini menjadikan pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) melalui mekanisme *deduction* menjadi kurang relevan, sehingga *deduction* harus dilipatgandakan, baik dua kali, tiga kali, dan seterusnya.

Pengurangan tarif pajak juga dapat menjadi insentif yang menarik, terutama dalam konteks royalti bagi pencipta lagu dan penyanyi. Saat ini, royalti atas lagu dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 15% dari 40% jumlah bruto royalti sesuai dengan penghasilan individu atau badan usaha yang menerimanya. Dengan menerapkan tarif pajak yang lebih rendah untuk royalti lagu berbahasa daerah, musisi dan pencipta lagu akan memperoleh pendapatan bersih yang lebih besar, sehingga mendorong mereka untuk terus menciptakan dan memproduksi lagu dalam bahasa daerah.

Sebagai contoh, jika tarif pajak royalti yang berlaku di Indonesia adalah 15%, maka untuk lagu berbahasa daerah bisa diberikan insentif pengurangan menjadi 5-10%. Dengan demikian, pencipta lagu dan penyanyi memiliki motivasi lebih untuk menghasilkan karya dalam bahasa daerah, karena mereka mendapatkan penghasilan

bersih yang lebih tinggi dibandingkan lagu dalam bahasa nasional atau internasional. Pengurangan tarif pajak ini juga lebih mudah diimplementasikan dibandingkan *tax exemption* dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku industri musik.

Akan tetapi, pengurangan tarif ini tidak dapat diberlakukan selamanya. Pengurangan tarif pajak atas royalti sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada 16 Maret 2023 lalu melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 (Genda, 2023). Peraturan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk menggunakan norma atas perhitungan royalti yang diterima, yaitu sebesar 15% dikalikan 40% dari jumlah penghasilan royalti. Perhitungan ini menjadikan tarif efektif PPh 23 atas royalti adalah sebesar 6%.

Pemerintah dapat memberlakukan pengurangan tarif selama kurun waktu tertentu. Norma yang diatur dalam peraturan turunan atas royalti adalah sebesar 40%. Lagu berbahasa daerah daerah dapat menggunakan norma 60% - 80% atas royalti yang diterima selama kurun waktu 5 tahun pertama pasca lagu tersebut diedarkan. Hal ini dikarenakan label rekaman cenderung mempromosikan lagu-lagu yang baru diterbitkan dalam 3 hingga 5 tahun pertama. Selama 5 tahun pertama, melalui pengurangan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sering mendengar lagu tersebut dan menjadi terbiasa pada tahun keenam dan tahun selanjutnya.

4.4 Rekomendasi Kebijakan Insentif Pajak di Indonesia

Bahasa daerah dan musik tradisional merupakan dua elemen budaya yang saling melengkapi. Menciptakan lagu dalam bahasa daerah tanpa mengadaptasi musik tradisionalnya dapat menimbulkan ketimpangan budaya, karena keduanya berkembang dalam ekosistem yang saling mendukung. Musik daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengiring, tetapi juga mencerminkan identitas, intonasi, dan karakteristik unik dari bahasa tersebut. Jika sebuah lagu diciptakan dalam bahasa daerah tanpa menggunakan musik tradisionalnya, ada risiko kehilangan makna, nuansa, dan kedalaman ekspresi budaya yang seharusnya melekat dalam karya tersebut.

Untuk melestarikan bahasa daerah dalam industri musik modern di Indonesia, diperlukan kebijakan insentif pajak yang dapat mengakomodir bahasa dan musik daerah bagi pihak yang terlibat dalam proses produksi hingga distribusi lagu. Setelah melakukan komparasi dengan negara lain dan melakukan tinjauan teori, kebijakan insentif pajak yang sesuai adalah melalui kredit pajak bagi label rekaman yang telah mengeluarkan biaya untuk produksi lagu dengan bahasa dan musik daerah serta

pengurangan tarif pajak atas royalti bagi lagu yang direkam bagi penyanyi dan pengurangan tarif bagi penyanyi yang membawakan lagu tersebut.

Kategori Wajib Pajak	Wajib Pajak	Insentif
Badan	Label Rekaman	Kredit pajak
Orang Pribadi (OP)	Penyanyi	Pengecualian pajak
	Pencipta Lagu	Pengurangan tarif pajak (spesifik: norma) atas royalti
	Komposer	

Tabel 4. Rekomendasi Kebijakan Insentif Pajak

Sumber: Penulis

Kebijakan insentif pajak perlu mempertimbangkan dua aspek utama dalam proses penciptaan dan penyebaran musik, yakni: (1) tahapan produksi yang melibatkan pencipta lagu, komposer, dan label rekaman, serta (2) tahapan komersialisasi yang melibatkan penyanyi dan pelaku distribusi musik lainnya.

Label rekaman memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem musik nasional dengan mendanai produksi, pemasaran, dan distribusi karya musik. Oleh karena itu, pemberian insentif pajak bagi label rekaman diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam produksi musik, khususnya dalam memanfaatkan musik daerah sebagai bagian dari identitas budaya nasional. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pemberian kredit pajak berbasis investasi–sebagaimana di Korea Selatan–bagi label rekaman yang memproduksi lagu-lagu yang mengangkat musik daerah. Hal ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan daya saing industri musik nasional di pasar domestik dan internasional.
2. Mendorong keberagaman musik dengan memperluas penggunaan elemen musik tradisional dalam produksi lagu komersial.
3. Memperkuat perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu dan musisi yang berkontribusi dalam produksi musik berbasis budaya lokal.

Berdasarkan definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdapat tiga (3) jenis kriteria UMKM. Selain UMKM, berdasarkan skala usaha, terdapat pula Usaha Besar (UB) dengan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lebih besar dari UMKM menengah. Sementara, tarif kredit pajak di Korea

Selatan hanya mencakup tiga (3) jenis kriteria saja. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas kriteria tersebut.

Selain itu, perlu diatur pula terkait berapa ‘persentase kehadiran’ musik daerah dalam produksi lagu komersial tersebut melalui perhitungan norma. Apabila keseluruhan durasi lagu komersial memasukkan musik daerah (seperti gamelan), maka norma yang dikenakan adalah 80% dari biaya produksi musik keseluruhan. Apabila hanya setengah dari durasi lagu komersial, maka dikenakan norma sebesar 40%.

Contoh lagu komersial modern dengan ‘persentase kehadiran’ musik daerah yang tinggi adalah lagu Bandung oleh Yura Yunita. Lagu ini menggunakan bahasa sunda halus dalam seluruh lirik lagunya, tanpa satu katapun berbahasa Indonesia. Selain itu, instrumen musik lagu ini juga khas dengan alat musik Sunda, seperti suling. Sementara itu, lagu komersial modern dengan ‘persentase kehadiran’ musik daerah yang rendah adalah lagu Lathi oleh Sara Fajira dan Weird Genius. Lagu ini menggunakan bahasa inggris, serta dua (2) baris lirik dalam bahasa Jawa. Selain itu, lagu ini juga diiringi dengan sedikit instrumen musik khas Jawa, yaitu Gamelan.

Skala Usaha	**Tarif**	**Jumlah Bruto**	
		‘Persentase Kehadiran’ Musik Daerah (Durasi)	**Norma**
Mikro dan Kecil	10%	80% - 100%	80%
		50% - 79%	40%
		< 50%	20%
Menengah	7%	80% - 100%	80%
		50% - 79%	40%
		< 50%	20%
Besar	3%	80% - 100%	80%
		50% - 79%	40%
		< 50%	20%

Tabel 5. Rekomendasi Perhitungan Kredit Pajak bagi Label Rekaman

Sumber: Penulis

Perhitungan kredit pajak didapatkan dengan mengalikan tarif dengan jumlah bruto sehingga tarif efektif akan berbeda-beda bergantung pada durasi musik daerah

dalam lagu komersial modern yang diproduksi. Besaran kredit pajak kemudian dikurangkan dengan penghasilan terutang pada tahun pertama musik tersebut ditayangkan. Pemerintah dapat menyesuaikan apakah kredit pajak hanya akan berlaku pada tahun pertama saja atau dapat menjadi kredit pajak (hanya untuk lagu komersial modern berbasis musik daerah) hingga tahun ketiga dan seterusnya.

Melalui Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bagi orang pribadi atas royalti, orang pribadi yang menerima royalti dikenakan tarif royalti sebesar 6%. Hal ini dikarenakan besaran tarif 15% dikalikan dengan norma sebesar 40%. Baik pencipta lagu atau komposer mendapatkan perlakuan pajak yang sama atas royalti, sehingga pencipta lagu yang menyertakan bahasa daerah (‘persentase kehadiran’ bahasa daerah dalam durasi keseluruhan lagu) dan komposer yang menyertakan instrumen musik daerah (‘persentase kehadiran’ musik daerah dalam durasi keseluruhan lagu) mendapatkan norma yang lebih tinggi.

Apabila komposer memasukkan musik daerah (seperti gamelan) dalam keseluruhan durasi lagu komersial, maka norma yang dikenakan adalah 80% dari jumlah bruto. Apabila hanya setengah dari durasi lagu komersial, maka dikenakan norma sebesar 70%, serta norma sebesar 60% untuk durasi yang lebih sedikit. Mekanisme yang sama juga berlaku bagi pencipta lagu dengan bahasa daerah yang dimasukkan dalam lirik lagu. Perhitungan norma ini (sebelumnya 40%) mengakibatkan tarif efektif pajak yang lebih rendah, sehingga total keseluruhan royalti yang diterima oleh masing-masing komposer dan pencipta lagu menjadi lebih tinggi. Pemerintah juga dapat menyesuaikan apakah norma ini hanya akan berlaku sekali pada tahun pertama saja atau dapat menjadi norma sementara (hanya untuk lagu komersial modern berbasis musik daerah) hingga tahun ketiga dan seterusnya.

Tarif	**Jumlah Bruto**		
	‘Persentase Kehadiran’ Musik/Bahasa Daerah (Durasi)	**Norma Sesudah**	**Norma Sebelum**
15%	80% - 100%	80%	40%
	50% - 79%	70%	
	< 50%	60%	

Tabel 5. Rekomendasi Perhitungan Kredit Pajak bagi Komposer atau Pencipta Lagu

Sumber: Penulis

Terakhir, bagi penyanyi yang membawakan lagu komersial modern secara langsung juga mendapatkan insentif. Kebijakan ini selaras dengan kebijakan yang diterapkan di Irlandia dan Québec, dimana terdapat batasan atas pembebasan pajak. Batas penghasilan yang berlaku di Québec adalah $60.000 CAD atau Rp677.196.000 (C$1,000 CAD = Rp11.290 IDR pada 31 Januari 2025, 02:11). Sementara, batas penghasilan yang berlaku di Irlandia adalah €50.000 atau Rp847.510.000 (€1,000 EUR = Rp16.950 IDR pada 31 Januari 2025, 02:23). Berdasarkan prinsip *rule of thumb*, maka batas penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah Rp400.000.000. Sama seperti pada label rekaman, komposer dan pencipta lagu, pemerintah juga dapat menyesuaikan apakah batas penghasilan yang dikecualikan dari pajak ini hanya akan berlaku sekali pada tahun pertama saja atau dapat menjadi pengecualian sementara (hanya untuk lagu komersial modern berbasis musik daerah) hingga tahun ketiga dan seterusnya.

Pemberian insentif pajak bagi label rekaman, komposer, pencipta lagu, dan penyanyi dalam produksi lagu berbasis musik atau bahasa daerah memerlukan analisis mendalam terkait jangka waktu pemberlakuannya. Jika insentif ini hanya berlaku di tahun pertama, maka dampaknya terbatas pada stimulasi awal tanpa jaminan keberlanjutan. Sebaliknya, jika diberikan dalam jangka waktu lebih panjang, misalnya hingga tiga tahun, insentif dapat memberikan waktu bagi industri musik untuk menyesuaikan strategi bisnisnya agar lebih inklusif terhadap musik daerah.

Kredit pajak yang diterapkan dalam beberapa tahun pertama setelah peluncuran lagu berbasis musik daerah dapat mendorong industri untuk lebih aktif dalam produksi dan promosi musik daerah. Berdasarkan pola promosi industri musik, periode tiga hingga lima tahun pertama merupakan waktu paling kritis untuk membangun popularitas lagu. Oleh karena itu, insentif yang diberikan secara bertahap dalam kurun waktu tersebut akan lebih efektif dibandingkan jika hanya diterapkan di tahun pertama.

Dari perspektif fiskal, penerapan insentif dalam jangka waktu yang lebih panjang juga harus mempertimbangkan keberlanjutan penerimaan pajak negara. Jika insentif berlaku terlalu lama, potensi kehilangan penerimaan pajak bisa signifikan. Namun, jika insentif dirancang sebagai skema sementara yang dikombinasikan dengan peningkatan basis pajak dari sektor musik yang lebih berkembang, maka efek negatif terhadap penerimaan pajak dapat diminimalisir.

Selain itu, insentif pajak bagi penyanyi yang membawakan lagu berbasis musik daerah juga memerlukan evaluasi terhadap batas penghasilan yang dikenakan pengecualian pajak. Jika hanya berlaku sekali di tahun pertama, manfaatnya bagi seniman akan terbatas. Namun, jika diterapkan untuk beberapa tahun pertama, penyanyi memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempromosikan lagu-lagu berbasis musik daerah dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

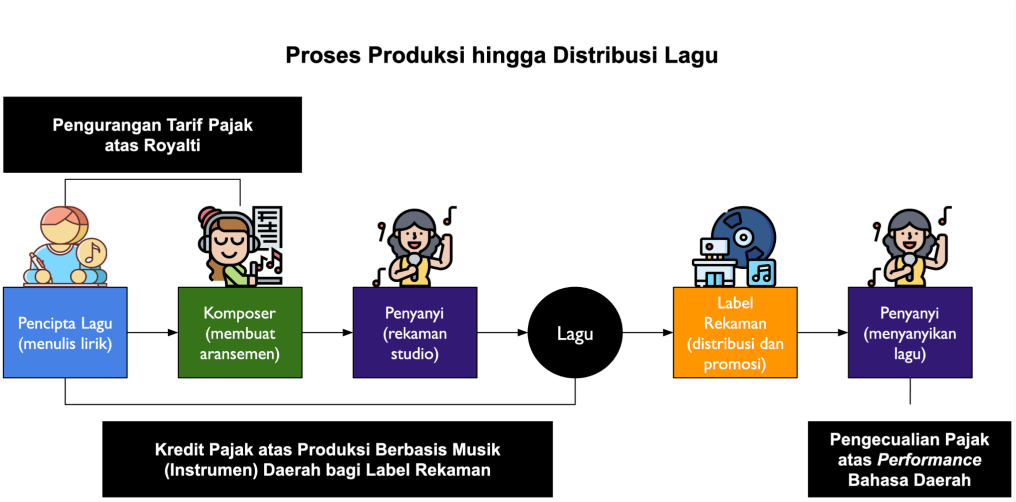
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kebijakan insentif pajak sebaiknya dirancang dalam skema bertahap dengan durasi optimal antara tiga hingga lima tahun. Pendekatan ini memungkinkan industri musik untuk menyesuaikan diri dan memastikan bahwa musik daerah tetap memiliki daya saing yang tinggi tanpa harus terus-menerus bergantung pada insentif fiskal dalam jangka panjang.

Untuk kemudahan administrasi serta keselarasan antara label rekaman, komposer, pencipta lagu dan penyanyi, maka batas insentif berlaku adalah tiga (3) tahun. Waktu ini dapat menjadi *win-win solution* bagi pemerintah dan pihak terkait, dimana pemerintah tetap dapat mengamankan penerimaan negara dan pihak terkait dapat memanfaatkan insentif dengan maksimal.

5. KESIMPULAN

Pelestarian bahasa daerah di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat globalisasi dan pergeseran penggunaan bahasa, terutama di kalangan generasi muda. Industri musik modern memiliki potensi besar dalam mendukung upaya pelestarian bahasa daerah melalui integrasi bahasa lokal dalam karya-karya musik populer. Namun, tanpa adanya insentif yang memadai, pelaku industri musik cenderung lebih memilih produksi dalam bahasa yang memiliki pasar lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak bagi industri musik modern dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong penggunaan bahasa daerah dalam skala yang lebih luas.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa bentuk insentif perpajakan yang dapat diterapkan, antara lain: (1) kredit pajak bagi label rekaman yang memproduksi lagu berbahasa daerah, (2) pengurangan tarif pajak atas royalti bagi pencipta lagu dan komposer yang mengintegrasikan elemen bahasa daerah dalam karyanya, serta (3) pengecualian pajak bagi penyanyi yang membawakan lagu berbahasa daerah dalam konser atau pertunjukan. Studi komparatif terhadap kebijakan di negara lain, seperti Irlandia, Kanada, dan Korea Selatan, menunjukkan bahwa insentif pajak dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus memperkuat industri kreatif.



Gambar 3. Mekanisme Insentif Pajak dari Proses Produksi hingga Distribusi

Sumber: Penulis

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, insentif pajak perlu dirancang dalam skema bertahap dengan durasi optimal antara tiga hingga lima tahun guna memberikan waktu bagi industri musik untuk menyesuaikan strategi bisnisnya. Selain itu, mekanisme insentif harus mempertimbangkan persentase kehadiran bahasa dan musik daerah dalam sebuah lagu untuk menentukan besaran manfaat yang diberikan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya akan berkontribusi pada pelestarian bahasa daerah tetapi juga menciptakan ekosistem industri musik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi insentif pajak bagi industri musik berbasis bahasa daerah juga perlu disertai dengan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan utama, yaitu pelestarian bahasa daerah, dapat tercapai secara optimal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri musik, dan komunitas budaya menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini. Dengan adanya insentif yang tepat, diharapkan bahasa daerah dapat tetap hidup dan berkembang dalam industri musik modern, sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia di kancah global.

6. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan implikasi kebijakan yang diajukan. Secara geografis, penelitian ini hanya berfokus pada Indonesia sebagai negara dengan keberagaman bahasa daerah dan industri musik yang berkembang, sehingga temuan dan rekomendasi yang dihasilkan belum tentu sepenuhnya berlaku di negara lain dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan perpajakan yang berbeda. Dari segi cakupan kebijakan,

penelitian ini membahas insentif pajak dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan atas royalti serta kredit pajak bagi label rekaman yang memproduksi lagu berbahasa daerah, tanpa menganalisis bentuk insentif lain seperti *tax holiday* atau *tax deferral* secara mendalam. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji strategi pelestarian bahasa daerah dalam konteks industri musik modern, sehingga sektor budaya lainnya seperti film, sastra, atau seni pertunjukan tidak menjadi bagian dari cakupan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan, sehingga temuan yang dihasilkan lebih bersifat eksploratif dan tidak mencerminkan estimasi kuantitatif atas dampak ekonomi dari implementasi kebijakan insentif pajak ini. Keterbatasan data empiris juga menjadi pertimbangan dalam penelitian ini, karena analisisnya bergantung pada data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, laporan kebijakan, dan studi kasus internasional, tanpa mengandalkan data primer seperti wawancara dengan pelaku industri musik atau analisis dampak empiris dari kebijakan serupa di negara lain. Selain itu, penelitian ini berasumsi bahwa regulasi perpajakan dan industri musik di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan selama periode penelitian, sehingga jika terjadi perubahan kebijakan yang mendasar, relevansi dan efektivitas rekomendasi dalam penelitian ini perlu dikaji ulang. Dengan mempertimbangkan batasan-batasan ini, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan secara lebih proporsional dalam perumusan kebijakan pelestarian bahasa daerah melalui mekanisme insentif pajak di industri musik.

Untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang dapat diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Pertama, penelitian ini dapat diperkuat dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur potensi dampak ekonomi dari kebijakan insentif pajak bagi industri musik yang menggunakan bahasa daerah. Dengan adanya data empiris atau simulasi ekonomi, penelitian ini akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam merekomendasikan kebijakan kepada pembuat regulasi.

Kedua, cakupan penelitian dapat diperluas dengan mempertimbangkan sektor ekonomi kreatif lainnya, seperti film, sastra, dan seni pertunjukan yang juga berperan dalam pelestarian bahasa daerah. Dengan pendekatan yang lebih holistik, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran insentif fiskal dalam mendukung keberlanjutan budaya lokal di berbagai sektor.

Ketiga, studi kasus dari negara lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan serupa dapat lebih dielaborasi, terutama dalam hal implementasi teknis, tantangan

yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam jangka panjang. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor keberhasilan yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia.

Keempat, penelitian ini dapat melibatkan data primer melalui wawancara dengan pelaku industri musik, seperti musisi, produser, dan pemangku kebijakan, untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai peluang dan tantangan penerapan insentif pajak dalam mendukung musik berbahasa daerah. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan akan lebih kontekstual dan aplikatif.

Terakhir, penelitian ini dapat mempertimbangkan aspek keberlanjutan kebijakan dengan mengusulkan mekanisme evaluasi terhadap efektivitas insentif pajak yang diberikan. Dengan adanya parameter evaluasi yang jelas, kebijakan ini dapat disesuaikan atau diperbaiki berdasarkan data dan hasil implementasi di lapangan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pelestarian bahasa daerah dan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asmarani, N. G. C. (2024, March 9). *Hari Musik Nasional, Begini Ketentuan Pajak Royalti bagi Komposer*. DDTC News. Retrieved January 29, 2025, from https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801171/hari-musik-nasional-begini-ketentuan-pajak-royalti-bagi-komposer

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Jumlah bahasa daerah di Indonesia (Resmi dari Badan Bahasa Kemendikbud). Bahasawan. Retrieved January 31, 2025, from https://bahasawan.id/t/jumlah-bahasa-daerah-di-indonesia-resmi-dari-badan-bahasa-kemendikbud/434

Bahari, I. N. (2023, April 16). *Terbaru! Cara Hitung dan Lapor Pajak Royalti bagi Orang Pribadi*. Ortax. https://ortax.org/terbaru-cara-hitung-dan-lapor-pajak-royalti-bagi-orang-pribadi

Erly Suandy. (2006), Perpajakan. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Genda, R. A. (2023, Mei 08). *Ahmad Dhani, Once Mekel, dan Pajak Royalti Lebih lanjut di: https://www.pajak.go.id/id/artikel/ahmad-dhani-once-mekel-dan-pajak-royalti*. Situs Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/ahmad-dhani-once-mekel-dan-pajak-royalti

Invest Korea. (n.d.). *Cultural Content | InvestKOREA(ENG)*. Invest Korea. Retrieved January 30, 2025, from https://www.investkorea.org/ik-en/cntnts/i-326/web.do

James, S., & Nobes, C. (2018). *The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice.* Fiscal Publications.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Musik Tradisional: Pengertian, Ciri, Fungsi, Jenis & Contoh. Diakses dari serupa.id.

Kitch, E. W. (1977). "The Nature and Function of the Patent System." *The Journal of Law and Economics*, 20(2), 265-290.

Korea Bizwire. (2022, Desember 26). *Gov't to Offer Tax Deduction for Streaming Content Production Costs*. The Korea Bizwire. http://koreabizwire.com/govt-to-offer-tax-deduction-for-streaming-content-production-costs/236523

Lauder, A. F. (2019). "Language Shift and Maintenance in Indonesia: A Sociolinguistic Perspective." Indonesian Journal of Applied Linguistics, 9(2), 101-115.

Lewis, M. P., Simons, G. F., & Fennig, C. D. (2016). Ethnologue: Languages of the World (19th ed.). SIL International.

Mathieu, M. (2000) Fiscalite des Arts et de al Culture: Breve Presentation des Mesures. Quebec: Ministere de al Culture et des Communications

McAndrew, C. (2002, December). *Artists, taxes and benefits an international review* (Research Report 28 ed.). Saskatchewan Arts Alliance. https://www.saskartsalliance.ca/wp-content/uploads/2022/08/mcandrew-report-2002-taxation.pdf

Meager, S. (2019, Februari 11). *Ireland's Artist Exemption Scheme - What You Need to Know*. faxback. https://www.taxback.com/blog/irelands-artist-exemption-scheme---what-you-need-to-know/

Musgrave, S. (2014). Language Shift and Language Maintenance in Indonesia. In Language Documentation and Description (Vol. 12, pp. 45-64). SOAS.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice.* McGraw-Hill.

Nettle, D., & Romaine, S. (2000). Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages. Oxford University Press.

OECD (2021), Tax Policy Reforms 2021: Special Edition on Tax Policy during the COVID-19 Pandemic, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/427d2616-en.

Purnomo, Wahyu & Subagyo, Fasih. (2010). Terampil Bermusik Untuk SMP dan MTs. Jakarta : PT Wangsa Jatra Lestari.

Rosen, S. (1981). *The Economics of Superstars*. The American Economic Review.

Rosida, S. (2024, February 12). *Begini Pajak Royalti Menyanyikan Lagu Orang | Direktorat Jenderal Pajak*. Situs Pajak Pajak. Retrieved January 29, 2025, from https://pajak.go.id/id/artikel/begini-pajak-royalti-menyanyikan-lagu-orang

Sneddon, J. N. (2003). The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society. UNSW Press.

Standing Committee on Canadian Heritage (1999) A Sense of Place, A Sense of Being. Canada: Government of Canada

Towse, R. (2019). *A Textbook of Cultural Economics*. Cambridge University Press.

UNESCO. (2019). Atlas of the World's Languages in Danger. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Visual Artists Ireland. (2023, Februari 28). *Artist Tax Exemption*. Visual Artists Ireland. https://visualartists.ie/how-to-manual/artist-tax-exemption/

Wulandari, M. (2022, Desember 13). *Pajak Profesi: Pajak atas Penghasilan Penyanyi*. pajakku. https://artikel.pajakku.com/pajak-profesi-pajak-atas-penghasilan-penyanyi/#:~:text=Berdasarkan%20peraturan%20terbaru%20pada%20Undang,Rp500.000.000%20dikenakan%20tarif%2025%25

Yampolsky, P. (1995). Forces for Change in the Regional Performing Arts of Indonesia. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 151(4), 700-725.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Rio Fernando adalah mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Ia merupakan *Co-Founder* & *Chief Product Officer* FisioMotion, *startup telephysiotherapy* berbasis AI pertama di Indonesia yang meraih berbagai penghargaan nasional dan internasional, termasuk Honorable Mention Award di International Startup Weekend Kuala Lumpur dan People's Choice Award di NUS Medical Grand Challenge Singapura. Keberhasilan FisioMotion turut diliput oleh media seperti ANTARA News dan SINDOnews.

Selain itu, Rio memiliki pengalaman kepemimpinan di berbagai bidang, termasuk sebagai Chief Operations Officer di *startup* edukasi yang berhasil meraih keuntungan lebih dari 300 juta rupiah. Ia juga aktif dalam organisasi kampus, seperti RISTEK, dimana ia memimpin pengembangan berbagai produk teknologi, serta BEM FIA UI sebagai bagian dari tim hubungan masyarakat.

Rio dikenal sebagai mahasiswa berprestasi dengan rekam jejak kompetisi yang mengesankan. Beberapa penghargaan yang telah diraihnya antara lain Mahasiswa Berprestasi II Fakultas Ilmu Administrasi 2024, 3rd Winner Deloitte Tax Challenge 2025, 2nd Winner Ideathon - Tons of Idea, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 2023, 2nd Winner ASEAN Youth Innovation Challenge 2023, dan BRI Creation Scholarship Awardee.

Email: riofern.alexander@gmail.com

Kedaulatan Budaya Indonesia melalui *Place Identity* pada Sumbu Filosofi Yogyakarta

Sekar Budi Dewani, Ratna Eka Suminar
Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Keberlanjutan dari suatu perencanaan menjadi hal yang penting dalam menjaga kedaulatan budaya. Konsep *place identity* yaitu keterkaitan antara identitas ruang dengan individu, kemudian menjadi landasan yang penting dalam mendorong kedaulatan budaya. Dalam konteks pembangunan, *place identity* dapat meningkatkan keuntungan secara kompetitif dan partisipasi masyarakat di dalamnya (Zimmerbauer, 2011). Pada Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, diperlukan identifikasi *place identity* baik dari segi tempat *(place)* maupun dari segi manusianya *(people)* untuk mendukung dan memperkuat kedaulatan budaya Indonesia, terlebih pada kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.

Penelitian secara umum dilakukan dengan metode deduktif kualitatif. Data primer diambil melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 102 responden yang berasal dan bertempat tinggal di ketiga titik utama Sumbu Filosofi Yogyakarta yakni penduduk Panggung Krapyak, Kraton Ngayogyakarta, dan Tugu. Analisis dilakukan dengan menggunakan penilaian dan deskriptif kualitatif untuk mengetahui juga mengevaluasi karakteristik *place identity* pada setiap titik berdasarkan atribut *place identity of place* dan *place identity of people*.

Berdasar penelitian, didapatkan bahwa titik Panggung Krapyak memiliki *place identity of place* bangunan Panggung Krapyak, dengan *identity of people* efikasi diri utamanya motivasi tinggal dikarenakan kondisi sosial lingkungan yang nyaman. Pada titik Kraton memiliki *place identity* Kraton Ngayogyakarta, dengan *identity of people* efikasi diri utamanya motivasi tinggal dikarenakan pentingnya kegiatan yang dilakukan di dalam Area Kraton. Sedangkan pada titik Tugu, memiliki *place identity* monumen Tugu, dengan *identity of people* kontinuitas. Dari ketiga titik, Panggung Krapyak menjadi titik dengan *place identity* terkuat, menggambarkan keterkaitan mendalam antara masyarakat dengan nilai budaya lokal yang ada.

Kata Kunci : kedaulatan budaya, *place Identity*, *place identity of place, place identity of people*, sumbu filosofi Yogyakarta

Pendahuluan

Keberlanjutan dari suatu perencanaan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Bukan hanya pemerintah atau pemberi kebijakan yang perlu ikut berpartisipasi dalam keberlanjutan perencanaan, tetapi juga masyarakat lokal atau masyarakat di dalam ruang tersebut. Ketika masyarakat setempat mampu ikut mengontrol kondisi ruangnya yang baik, maka keberlanjutan ruang tersebut dapat lebih terjamin karena masyarakat setempatlah yang mampu memahami dan mengetahui kondisi sebenarnya.

Mengetahui *place identity* (identitas tempat) pada seseorang, atau dengan kata lain memberi *place identity* dari seseorang yang tinggal di dalamnya, akan memberikan hubungan emosional khusus terhadap tempat tersebut karena tempat tersebut telah menjadi bagian dari diri seseorang di dalamnya (Heidari & Mirzaii, 2013). Melalui penciptaan rasa *place identity*, seseorang akan cenderung lebih memperhatikan perilaku yang ditimbulkan pada ruang tersebut. Orang akan lebih sadar atas akibat apa yang akan terjadi ketika melakukan suatu tindakan. Perasaan ini mampu menghasilkan pertimbangan dan pengendalian perilaku seseorang di ruangnya tanpa perlunya penjagaan atau kontrol dari pihak luar. Dengan begitu, perencanaan dan pembangunan dapat terkendali dengan cara yang lebih mudah dan efektif dari segi biaya maupun waktu.

Faktanya, identitas lokal sebagai budaya dalam masyarakat mulai luntur di era modern ini. Mudahnya pertukaran informasi dan kebudayaan melalui teknologi yang ada, memberikan kecenderungan masyarakat untuk mengadopsi nilai-nilai budaya dari negara lain. Contohnya dapat kita temui dengan mudah dimana beberapa *landmark* atau ikon daerah di Indonesia menggunakan *landmark* milik negara lain. Simpang Lima Gumul di Kediri, Jawa Timur menggunakan bangunan menyerupai *Arc de Triomphe* yang berada di Paris, Perancis sebagai penanda atau ikon daerah tersebut yang mana saat ini menjadi pusat ekonomi baru di Kabupaten Kediri. Ditemukan juga miniatur Patung Merlion Singapura, Jam *Big Ben* Inggris, Kincir Angin Belanda, Menara Eiffel Perancis, Bangunan Ka'bah, Hotel *Zam-Zam Tower* Arab Saudi, juga Kampung Eropa di sepanjang Jalan Pahlawan, pusat Kota Madiun, Jawa Timur. Menurut keterangan pemerintah kota setempat, tujuan dibuatnya miniatur – miniatur tersebut adalah untuk menghidupkan kembali perekonomian di Kota Madiun ditengah Pandemi COVID-19 (Azanella, 2021).

Replika – replika tersebut dapat menarik wisatawan, namun tidak menggambarkan identitas atau ciri khas asli yang dimiliki daerah setempat, tertutup oleh identitas yang diambil dari negara lain. Apabila kejadian ini terus berlanjut dalam jangka panjang, masyarakat dapat kehilangan identitasnya. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengidentifikasi identitas suatu

tempat menjadi hal yang penting untuk dilakukan untuk selanjutnya dapat lebih dilestarikan dan dipertahankan.

Dalam konteks pembangunan, *place identity* bahkan dapat meningkatkan keuntungan secara kompetitif dan partisipasi masyarakat di dalamnya (Zimmerbauer, 2011). Menurut Paasi (2001) macam *place identity* perlu dibagi menjadi dua, yakni *People's Place Identity* (Identitas tempat pada manusia) dan *Place Identity of a Place* (Identitas tempat pada suatu tempat). Banyak penelitian terkait *place identity*, menggunakan landasan konseptual salah satu dari *place identity of people* atau *place identity of place* (Peng dkk., 2020). Proses identifikasi *place identity* dapat dilihat dari 4 pokok identitas diri atau psikologi seseorang (Twigger-Ross & Uzzell, 1996). Disisi lain, seseorang dapat membedakan tempatnya dari tempat lain melalui elemen fisik, atribut budaya, sejarah, dan pengalaman (Peterson, 1988).

Tempat memerlukan jaminan atas keberlanjutan oleh manusia di dalamnya, terlebih pada kawasan bersejarah. Kawasan bersejarah memiliki nilai arti yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan lain. Hal ini menjadikan kawasan bersejarah memerlukan perhatian yang lebih melalui upaya pelestarian. Sebagai kota pusaka, Yogyakarta memiliki berbagai budaya dan sejarah yang dipegang hingga saat ini.

Sebagai warisan budaya yang telah diakui UNESCO, identifikasi *place identity* menjadi sangat perlu dilakukan untuk memberikan identitas pembeda yang dimiliki oleh Sumbu Filosofi. *Place identity* ini juga dapat mempertahankan kawasan dengan kearifan lokal walau berdampingan dengan ancaman perkembangan kota (Rahmat & Widjajanti, 2019). Dengan penciptaan *place identity* dari masyarakat di dalamnya, perencanaan, pembangunan, dan kebijakan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kondisi dan berlanjut hingga masa yang akan datang.

Identitas perlu dilihat dari kedua sisi, baik dari segi tempat juga masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dengan melihat dari segi tempat dan manusianya, identitas dapat tergambarkan secara lebih jelas. Identitas tersebut nantinya bukan hanya memperlihatkan dalam bentuk identitas rupa/fisik, tetapi juga ikatan batin masyarakat setempat yang menyertainya. Penelitian ini akan mendeskripsikan bentuk place identity pada titik Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta dan mengidentifikasi titik pada Sumbu Filosofi Yogyakarta dengan place identity terkuat.

Metode

Penelitian secara umum dilakukan dengan metode deduktif kualitatif. Data primer diambil melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 102 responden yang berasal dan bertempat tinggal di ketiga titik utama Sumbu Filosofi Yogyakarta yakni

penduduk Panggung Krapyak, Kraton Ngayogyakarta, dan Tugu. Analisis dilakukan dengan menggunakan penilaian dan deskriptif kualitatif untuk mengetahui juga mengevaluasi karakteristik place identity pada setiap titik berdasarkan atribut place identity of place dan place identity of people.

Pada *identity of place*, terdapat variabel ruang perasaan, ruang pentiptaan dan ruang hidup dari teori *Spatial Triad* oleh Lefebvre. Sedangkan pada *identity of people* terdapat variabel harga diri, kebanggaan, keunikan, efikasi diri oleh Breakwell, yang kemudian ditambahkan bersama Jaspal adanya variabel budaya. *Place identity of people* yang menggambarkan perasaan individu sebagai warga di lokasi penelitian, dianggap memiliki kemiripan pada ruang perasaan sebagai variabel *place identity of place*. Sehingga, pada penelitian ini variabel yang digunakan untuk identifikasi *place identity* adalah ruang penciptaan, ruang hidup, harga diri, kebanggaan, keunikan, efikasi diri, dan budaya.

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian: *Place Identity of Place*

Variabel	Indikator	Sub-Indikator	Parameter	Indikasi
Ruang Penciptaan	Ruang yang paling dominan	Ruang yang paling menonjol	Ruang/objek yang dianggap menonjol	Semakin mendominasi semakin baik
Ruang Hidup	Manfaat yang diberikan ruang	Tempat Berkumpul	Ruang yang paling fungsional	Semakin berfungsi semakin baik
		Tempat Bermain Anak	Ruang yang paling fungsional	Semakin berfungsi semakin baik
		Tempat Menghabiskan Waktu	Ruang yang paling fungsional	Semakin berfungsi semakin baik

Sumber: Penulis, 2023

Tabel 3. 2 Variabel penelitian: *Place Identity of People*

Variabel	Indikator	Parameter	Indikasi
Harga Diri	Kebanggaan terhadap tempat tinggal	Tingkat kebanggaan terhadap tempat tinggal	Semakin bangga semakin baik
Kontinuitas	Pengaruh tempat	Tempat tinggal memiliki peran	Semakin berlanjut

Variabel	Indikator	Parameter	Indikasi
	tinggal di masa lalu	dimasa lalu hingga saat ini	semakin baik
	Pengaruh tempat tinggal di masa kini	Tempat tinggal memiliki peran dimasa kini dan masa depan	Semakin berlanjut semakin baik
Keunikan	Perbedaan	Perbedaan dengan daerah lain	Semakin beda semakin baik
Efikasi Diri	Pemahaman	Seberapa memahami dengan daerah tempat tinggal	Semakin tinggi semakin baik
	Motivasi tinggal	Seberapa motivasi mempengaruhi lama tinggal	Semakin termotivasi semakin baik
	Aktivitas	Peran kegiatan dalam pemaknaan tempat tinggal	Semakin berperan semakin baik
Budaya/ Kebangsaan	Budaya	Pengaruh budaya yang mendominasi	Semakin berpengaruh semakin baik

Sumber: Penulis, 2023

Temuan dan Diskusi

Area Panggung Krapyak

Berdasar hasil kuesioner pada Area Panggung Krapyak, pada ruang penciptaan, didapatkan kemunculan tempat Panggung Krapyak dan Pondok Pesantren. Sedangkan pada ruang hidup, didapatkan kemunculan tempat berkumpul; (1) Rumah Pak RT, (2) lapangan, (3) rumah pribadi, (4) warung, (5) gudang kecil, (6) pondok pesantren, dan (7) ruang sekitar Panggung Krapyak, tempat bermain anak; (1) lapangan, (2) dekat pohon sawo, dan (3) rumah pribadi, juga tempat menghabiskan waktu; (1) rumah pribadi, (2) kantor, (3) warung, dan (4) pondok pesantren.

Place identity of place pada Area Panggung Krapyak terdapat pada variabel ruang penciptaan dengan ruang yang paling dominan adalah Panggung Krapyak. Hasil penilaian menunjukkan bahwa tempat Panggung Krapyak memiliki nilai tertinggi dengan nilai 93. Panggung Krapyak ini diketahui menjadi ruang penciptaan yang memiliki nilai pemaknaan tertinggi karena dikenal sebagai bangunan bersejarah dan letaknya yang berada di tengah permukiman.

> "*Panggung Krapyak, karena lokasinya di tengah, banyak cerita menarik, dan terkesan magis*." – (wawancara tanggal 7 Maret 2023 dengan responden P – 17)

"*Dulu itu tidak ada yang berani kearah selatan Kandang mba, dulu hutan terus banyak penunggunya*" – (wawancara tanggal 15 Maret 2023 dengan responden P – 25)

Panggung Krapyak menjadi salah satu bangunan yang menurut warga setempat adalah bangunan yang bersejarah. Warga mempercayai bahwa dulunya sekitar Panggung Krapyak cukup mistis karena sebelumnya merupakan sebuah hutan belantara yang merupakan area berburu milik Kraton Ngayogyakarta. Diketahuinya cerita tersebut oleh warga Area Panggung Krapyak memberikan kesan historis pada bangunan Panggung Krapyak. Lama tinggal sebagian besar warga Panggung Krapyak yang lebih dari 30 tahun, memberikan pandangan atas pelestarian ataupun pembangunan yang terjadi di Panggung Krapyak dan lingkungan sekitarnya. Sebelum bangunan Panggung Krapyak diajukan ke UNESCO sebagai salah satu bagian dari warisan budaya dunia, Panggung Krapyak sering dijadikan tempat tinggal sementara oleh para tunawisma. Keadaan ini disayangkan oleh warga sekitar karena bangunan yang bersejarah itu terkesan kumuh ataupun kotor. Semenjak diajukan ke UNESCO, terjadi revitalisasi berupa pengecatan, perbaikan, dan adanya larangan untuk memasuki Panggung Krapyak. Bentuk Panggung Krapyak yang berupa bangunan, memiliki ruang kosong di dalamnya, dan adanya tangga untuk naik ke atap panggung. Atap inilah yang menjadi lokasi Keluarga Kraton Ngayogyakarta berburu dengan cara memanah (Dinas Kebudayaan DIY, 2022). Ketika akses masuk Panggung Krapyak masih dibuka, warga dapat ikut menaiki tangga dan melihat pemandangan dari atap Panggung Krapyak.

"Dulu kalau pagi atau sore gitu liat matahari dari atap Kandang Menjangan itu bagus sekali mba, kelihatan jelas dan masih asri to lingkungan sekitarnya." – (wawancara tanggal 24 Februari 2023 dengan responden P – 7)

Panggung Krapyak dimaknai sebagai bangunan yang penting bagi warga setempat. Hal ini dikarenakan Panggung Krapyak sudah sedari dulu ada dan memiliki cerita turun temurun di dalamnya. Bangunan Panggung Krapyak memiliki kedekatan tersendiri dengan warga sekitar karena dapat digunakan secara fungsional. Halaman Panggung Krapyak kerap digunakan untuk acara desa seperti "Merti Desa". Lokasi Panggung Krapyak yang berada di tengah dan sekitarnya yang merupakan jalan lokal, menjadikan Panggung Krapyak lokasi yang strategis untuk melakukan berbagai kegiatan desa. Dalam kaitannya dengan pengajuan sumbu filosofi kepada UNESCO, bulan Juli tahun 2022 yang lalu, diadakan sosialisasi sumbu filosofi kepada warga Area Panggung Krapyak sebagai salah satu rangkaian acara Merti Desa. Kegiatan ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan pada warga Area Panggung

Krapyak terkait hubungan Panggung Krapyak kepada sumbu filosofi dan juga pembangunan yang akan terjadi kedepannya.

Pada variabel *ruang hidup* yang dianggap memiliki manfaat dengan nilai tertinggi yakni "Rumah Pribadi" sebagai tempat menghabiskan waktu dengan nilai 51. Pada Area Panggung Krapyak, rumah pribadi menjadi tempat yang dipilih untuk menghabiskan waktu yakni melakukan aktivitas sehari-hari ataupun berkumpul dengan warga lainnya. Berkaitan dengan manfaat sebagai tempat berkumpul, rumah pribadi ini menjadi tempat dilaksanakannya berbagai acara rutin desa seperti perkumpulan pemuda, pengajian, ataupun syukuran. Kegiatan tersebut diadakan secara bergantian di rumah-rumah warga. Selain acara rutin, warga banyak berkumpul di rumah-rumah pribadi untuk sekadar berbincang dan menghabiskan waktu.

Terkaitnya ruang hidup sebagai tempat menghabiskan waktu dan tempat berkumpul, juga terjadi pada tempat pondok pesantren dan warung. Pondok pesantren memiliki berbagai kegiatan utamanya terkait dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di Pondok Pesantren melibatkan warga setempat untuk hadir pada acara-acara tertentu. Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga setempat untuk berkumpul dan menghabiskan waktunya di pondok pesantren terutama pada bangunan masjidnya. Terdapat beberapa siswa pondok pesantren yang bertempat tinggal ataupun kos di rumah – rumah warga sekitar Area Panggung Krapyak. Hal ini mempengaruhi aktivitas di Area Panggung Krapyak yang juga ramai terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren. Warung yang terdapat pada sekitar Panggung Krapyak dan sekitar Pondok Pesantren juga kerap digunakan sebagai tempat berkumpul beberapa warga setempat. Lokasi yang strategis dan tempat yang nyaman dengan kemudahan akses ke berbagai kebutuhan, menjadikan warung sebagai pilihan tempat untuk berkumpul dan menghabiskan waktu.

Sebagai tempat bermain anak, warga Area Panggung Krapyak memilih untuk bermain pada teras rumah sebagai bagian dari rumah pribadi. Lingkungan Panggung Krapyak memiliki kepadatan yang cukup rendah terutama pada bagian timur. Rumah pada Area Panggung Krapyak sebagian besar memiliki halaman rumah. Halaman atau teras rumah inilah yang menjadi tempat bermain anak-anak di sana. Sebagai bagian dari rumah, teras rumah yang digunakan untuk tempat bermain anak-anak dipilih secara bergantian. Pilihan sering kali merujuk pada rumah dengan halaman yang luas. Selain teras rumah, ditemukan juga lapangan yang menjadi salah satu tempat bermain anak.

Dari hasil penilaian *place identity of people*, nilai tertinggi diperoleh pada efikasi diri dengan hasil 115. Menandakan bahwa pemaknaan warga setempat terhadap Area Panggung Krapyak disebabkan oleh *efikasi diri* utamanya pada motivasi tinggal. Motivasi tinggal bagi

warga Area Panggung Krapyak disebabkan oleh kondisi sosial yang ada. Kondisi sosial pada Area Panggung Krapyak dianggap nyaman yang mana menjadi alasan bagi warga setempat untuk tetap tinggal di Area Panggung Krapyak. Beberapa warga yang menjadikan Area Panggung Krapyak sebagai tempat untuk bekerja ataupun berjualan juga merasakan kenyamanan atas lingkungan sosial di Panggung Krapyak. Aktivitas yang dilakukan warga di Area Panggung Krapyak juga beragam, seperti berjualan, berkumpul, pengajian, dan belajar. Lingkungan Panggung Krapyak yang memiliki Pondok Pesantren menyebabkan beragamnya aktivitas warga setempat. Efikasi diri lainnya yakni pemahaman, dimiliki secara baik oleh warga setempat. Warga setempat menganggap sejarah yang melekat di daerah tempat tinggalnya, juga perubahan yang terjadi baik fisik ataupun sosial menjadi hal yang penting bagi mereka. Sejarah Panggung Krapyak sebagai tempat berburu sultan juga diketahui secara baik oleh warga setempat.

Harga diri menjadi variabel tertinggi setelah efikasi diri dengan nilai 99. Harga diri berhubungan dengan rasa bangga yang dimiliki individu sebagai bagian dari daerah tempat tinggalnya. Rasa bangga yang dimiliki warga setempat merupakan rasa yang muncul dari adanya perasaan nyaman. Area Panggung Krapyak dianggap memiliki warga yang rukun. Kerukunan yang ada, memberikan rasa nyaman maupun aman bagi warga setempat.

> *"Disini kalau ada yang ngunduh begitu, pasti dibantu warga setempat, acara itu lancar dan mudah jadinya"* – (wawancara tanggal 24 Februari 2023 dengan responden P – 6)

Adanya kerukunan antar warga yang mampu mempermudah berbagai aktivitas, memberikan rasa *kebanggaan* bagi warga yang tinggal di Area Panggung Krapyak. Sedangkan pada *kontinuitas,* pengaruh tempat tinggal masa kini sebagai tempat tinggal menjadi hal yang dianggap penting dan akan terus dilakukan oleh warga setempat. Pada variabel selanjutnya yakni *keunikan*, warga Area Panggung Krapyak tidak merasakan perbedaan tertentu terkait lingkungan tempat tinggalnya dibandingkan dengan daerah lain. Sedangkan pada variabel *budaya*, Budaya islam yang terbentuk dari banyaknya pondok pesantren di Area Panggung Krapyak mampu berpengaruh bagi warga yang mengikuti berbagai kegiatan pondok seperti pengajian.

Area Kraton

Berdasar hasil kuesioner pada Area Kraton, pada ruang penciptaan, didapatkan kemunculan tempat Kraton dan Alun-Alun Kidul. Sedangkan pada ruang hidup, didapatkan kemunculan tempat berkumpul; (1) sekitar Kraton, (2) Alun-Alun Kidul, (3) rumah pribadi,

(4) musholla, (5) Alun-Alun Utara, dan (6) cakruk, tempat bermain anak; (1) ruang kosong, (2) rumah pribadi, (3) cakruk, dan (4) Taman, juga tempat menghabiskan waktu; (1) sekitar Kraton, (2) rumah pribadi, (3) Alun-Alun Kidul, dan (4) Alun-Alun Utara.

Pada *place identity of place*, ditemukan Kraton sebagai ruang penciptaan merupakan tempat dengan nilai tertinggi. *Ruang penciptaan* merupakan ruang yang paling dominan yang dapat menggambarkan pemahaman akan pembentukan ruang yang terjadi (Lefebvre, 1991). Area Kraton sebagai bagian pusat kembalinya manusia kepada sang pencipta memiliki ruang penciptaan "Kraton" sebagai bangunan yang paling dominan. Kraton memiliki nilai tertinggi dari seluruh tempat pada Area Kraton sebagai *place identity of place* dengan nilai 80. Kraton Ngayogyakarta menjadi bangunan yang dirasakan masyarakat sekitar memang sebagai bangunan yang terkenal, karena merupakan titik pusat Kota Yogyakarta. Bangunan Kraton menjadi bangunan bersejarah yang hingga saat ini masih digunakan yang bahkan di dalamnya masih menerapkan budaya yang ada dari pertama kali dibangunnya Kraton, mulai dari cara berpakaian, pengaturan tanaman, tradisi, tingkah lagu, dan sebagainya (Dinas Kebudayaan DIY, 2022). Dengan digunakannya sistem penetapan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta atau Sri Sultan Hamengkubuwana, Kraton Ngayogyakarta hingga saat ini menjadi kerajaan dengan kedudukan yang paling tinggi di DIY.

> "*Kraton itu wibawanya kuat*" – (wawancara tanggal 7 Maret 2023 dengan responden K-39)
>
> "*Memang kerajaannya Yogyakarta."* – (wawancara tanggal 7 Maret 2023 dengan responden K-40)
>
> "*Menjadi bangunan utama bahkan di Jogja*." – (wawancara tanggal 7 Maret 2023 dengan responden K-42)

Dengan kedudukan tinggi yang dimiliki Kraton, keberadaan kraton yang lokasinya berdekatan dengan permukiman warga setempat dianggap memiliki wibawa tersendiri. Kraton Ngayogyakarta memiliki beberapa bangunan yang ada di dalam satu lingkungan Kraton dengan dibatasi oleh pagar putih di sekelilingnya sebagai penanda lingkungan Kraton. Dalam pengajuannya sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia, Alun-alun Utara sebagai bagian dari Kraton, dilakukan pembangunan pagar untuk mengembalikan wujud aslinya ketika dibangun pertama kali (Pertana, 2020). Namun, warga beranggapan bahwa dibangun kembalinya pagar di Alun-Alun Utara terkesan memberi batas interaksi antara warga dengan lingkungan Kraton. Alun-Alun Utara sebelumnya banyak digunakan untuk kegiatan tahunan seperti sekaten, pasar malam, juga beberapa konser musik. Pembangunan pagar dibarengi

juga dengan kegiatan-kegiatan tahunan tersebut tidak lagi digelar di Alun-Alun Utara. Tidak adanya kegiatan besar tahunan di Alun-Alun Utara, menjadikan warga setempat hanya mengikuti kegiatan yang ada di Kraton dan Alun-Alun Kidul.

Ramainya Kraton oleh wisatawan banyak dijadikan peluang bagi warga setempat untuk melakukan berbagai kegiatan usaha. Usaha yang dimiliki warga setempat berupa toko ataupun warung usaha dan pemasok atau melakukan kegiatan produksi di rumah pribadi untuk selanjutnya dijualkan ke warung-warung di sekitar Kraton. Ramainya wisatawan Kraton Ngayogyakarta dianggap warga sebagai konsumen atas usaha mereka, hal ini menyebabkan beberapa warga menganggap Kraton menjadi bangunan yang paling dominan karena jasa yang diberikan.

Kraton dengan nilai tertinggi pada penilaian *place identity of place,* yakni variabel ruang penciptaan sebagai gambaran pembentukan ruang yang terjadi, juga ditunjukkan pada kesadaran masyarakat atas aturan yang ada di sekitar Kraton. Aturan umum yang diketahui warga adalah bangunan tidak boleh lebih tinggi dari bangunan Kraton, atau dengan kata lain, larangan untuk membangun bangunan dengan lebih dari 1 lantai. Aturan ini menjadi aturan yang diketahui warga sekitar hingga saat ini. Pada setiap pembangunan yang terjadi di lingkungan Kraton, diperlukan surat ijin dari Kraton untuk menyatakan bahwa pembangunan boleh untuk dilakukan. Melalui aturan ini pula, pembentukan ruang yang ada di sekitar Kraton secara langsung diatur oleh Kraton dimana dapat terlihat kecenderungan bangunan permukiman yang memiliki kesamaan pada tinggi bangunannya.

Selain Kraton terdapat ruang yang juga dianggap menonjol yakni Alun-Alun Kidul. Alun-Alun Kidul memiliki hasil penilaian senilai 15. Alun-Alun Kidul dianggap sebagai ruang yang menonjol dikarenakan adanya kegiatan rutin yang bertempat di dalamnya. Setiap malam, Alun-Alun Kidul ramai oleh pedagang jajanan dan berbagai atraksi wisata. Wisatawan maupun penduduk lokal banyak mengunjungi Alun-Alun Kidul untuk wisata kuliner dan wisata lainnya seperti mobil gowes, dan menyebrangi beringin kembar. Alun-Alun Kidul dulunya memang merupakan alun-alun yang dipergunakan untuk kegiatan warga, ataupun gladi resik tradisi Kraton yang akan diadakan. Hal tersebutlah yang menyebabkan tidak dibangunnya pagar dan pelarangan aktivitas di Alun-Alun Kidul, melainkan lebih kepada pelestariannya.

Pada variabel selanjutnya yakni *ruang hidup,* digunakan indikator ruang yang paling memberikan manfaat bagi responden di Area Kraton. Ruang hidup menggambarkan tingkat kooperatif, manfaat, dan pengalaman yang diberikan ruang secara langsung. Manfaat yang diberikan ruang, kemudian dapat dilihat dari ruang untuk berkumpul, ruang bermain anak, dan juga ruang untuk menghabiskan waktu (Lefebvre, 1991). Hasil penilaian dari variabel ruang

hidup didapatkan nilai yang paling tinggi terdapat pada tempat menghabiskan waktu di "Rumah Pribadi" dengan nilai 47. Rumah pribadi menjadi ruang yang dirasakan oleh warga Area Kraton sebagai ruang yang bermanfaat untuk aktivitas sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan oleh warga Area Kraton ini dapat berupa berbincang, berkumpul, acara-acara tertentu, dan lain sebagainya. Pada Area Kraton, rumah pribadi milik warga banyak dijadikan tempat untuk melaksanakan beberapa kegiatan rutin seperti pengajian, ataupun acara syukuran. Di samping itu juga, dalam menghabiskan waktu warga sering kali bertamu di rumah – rumah pribadi milik warga lain secara bergantian, terutama warga yang tinggal berdekatan. Sebagai tempat menghabiskan waktu, "rumah pribadi" yang dimaksud termasuk pada ruang yang ada di sekitarnya seperti teras rumah.

Selain rumah pribadi, tempat menghabiskan waktu warga di Area Kraton juga terdapat pada Alun-Alun Utara, Alun-Alun Kidul, dan Sekitar Kraton. Tempat-tempat tersebut menjadi bagian dari Kraton yang dimanfaatkan dari peluang ekonominya. Responden yang menjadikan lingkungan Kraton sebagai tempat menghabiskan waktu mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai pengusaha. Sama halnya yang terjadi pada tempat Alun-Alun Kidul dan Utara, dimana beberapa warga Area Kraton berjualan di alun-alun sebagai salah satu pusat tempat wisata. Pada tempat Alun-Alun Kidul responden menghabiskan waktunya di tempat tersebut karena kegiatan atau atraksi wisata pada Alun-Alun Kidul berlangsung di malam hari. Adanya berbagai warung di Sekitar Kraton juga Alun-Alun, menjadikan beberapa warga Area Kraton memilih untuk melakukan kegiatan berkumpul di warung-warung yang ada.

Tempat "Rumah Pribadi" juga menjadi tempat dengan nilai tertinggi sebagai tempat berkumpul dan tempat bermain anak. Sebagai tempat berkumpul, rumah-rumah memiliki nilai 25, dimana pada Area Kraton, rumah yang di maksud adalah rumah pribadi dengan penggunaan yang bergantian dari satu rumah ke rumah lainnya. Tempat berkumpul ini, sama seperti tempat menghabiskan waktu dimana waktu yang digunakan untuk berkumpul dapat berupa sebuah acara rutin ataupun waktu sehari-hari untuk mengobrol dan yang lainnya. Acara rutin yang dimaksud terutama apabila diperlukannya persiapan tertentu atau yang sering disebut "*rewang*" yakni menyiapkan makanan minuman dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan acara. Hal ini terjadi ketika peneliti menemui beberapa responden pada Area Kraton bagian selatan yang mana sedang melakukan kegiatan memasak apem Bersama dengan warga lain dalam rangka acara "ruwahan".



Gambar 5. 1 Kegiatan Ruwahan di Area Kraton Ngayogyakarta

Sumber: Penulis (2023)

Sedangkan sebagai tempat bermain anak, rumah pribadi ini menjadi lokasi bermain anak terutama pada halaman/area depan rumah. Pemilihan lokasi rumah pribadi ini dapat disebabkan oleh tidak adanya taman bermain/ruang terbuka yang dapat digunakan anak-anak untuk bermain. Tidak adanya ruang untuk bermain anak ini utamanya di temukan pada bagian selatan dan barat Area Kraton. Anak – anak pada daerah tersebut akhirnya memanfaatkan ruang seadanya seperti cakruk, ruang-ruang kosong antar rumah sebagai tempat bermain. Apabila dilihat dari fisik bangunan bagian selatan dan barat Area Kraton memiliki permukiman yang cukup padat, menyebabkan ruang bermain khusus untuk anak-anak sulit ditemukan. Pada bagian timur Area Kraton ditemukan taman khusus untuk bermain anak. Taman tersebut pula disebutkan sebagai tempat bermain anak oleh warga sekitar lokasi tersebut. Taman tersebut digunakan secara fungsional untuk anak-anak bermain dan berkumpul, juga orang dewasa lainnya.



Gambar 5. 2 Tempat Bermain Anak di Area Kraton Ngayogyakarta

Sumber: Penulis (2023)

Pada *place identity of people* di Area Kraton, nilai tertinggi terdapat pada variabel efikasi diri. *Efikasi diri* ini dapat digambarkan dari pemahaman warga Kraton atas tempat

tinggal. motivasi tinggal di area tersebut, dan juga aktivitas yang dijalani di tempat tinggal (Breakwell, 1993). Nilai efikasi diri warga di Area Kraton memiliki hasil nilai 92. Dari efikasi diri tersebut, didapatkan bahwa nilai aktivitas memiliki nilai yang paling tinggi. Aktivitas pada Area Kraton seperti berkumpul dan berjualan memiliki pemaknaan tinggi oleh warga setempat. Pemaknaan ini menandakan adanya rasa membutuhkan atau adanya kepentingan warga terhadap aktivitas yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal yakni Area Kraton. Hingga saat ini, Area Kraton memiliki berbagai tradisi yang masih dilakukan, baik Kraton Ngayogyakarta melibatkan warganya dalam tradisi Kraton, maupun tradisi yang memang muncul di lingkungan warga seperti syukuran, ruwahan, dan tradisi lainnya. Budaya Kraton yang masih ada hingga saat ini juga menjadi daya tarik yang mendatangkan banyak wisatawan setiap harinya. Hal ini kemudian memunculkan peluang ekonomi pada Area Kraton. Hal ini menjadikan aktivitas yang dilakukan warga pada Area Kraton dimaknai secara baik oleh warga setempat. Di samping itu, motivasi tinggal warga pada Area Kraton juga dimaknai secara cukup baik. Selain untuk berjualan, motivasi pemilihan tempat tinggal di Area Kraton ditemukan juga karena mengikuti salah satu anggota keluarga, ataupun karena memang penduduk asli. Fakta ini menunjukkan adanya motivasi warga bertempat tinggal di Area Kraton dengan dorongan dari pihak lain, namun dimaknai secara penting oleh warga tersebut. Sedangkan pada pemahaman, lama tinggal warga Area Kraton yang sebagian besar lebih dari 30 tahun, memberikan pengetahuan akan perubahan lingkungan Kraton baik sosial maupun fisiknya. Warga Area Kraton memahami bagaimana lingkungan di sekitar Kraton beserta wisatanya terus berubah dari tahun ke tahun. Perubahan yang disampaikan seperti pembangunan pagar, pembersihan pedagang kaki lima, perubahan jalan setapak, dan yang lainnya. Selain perubahan warga Area Kraton juga cukup memahami bagaimana lingkungan fisik di Area Kraton memiliki aturan tersendiri, seperti bangunan yang tidak boleh berlantai dua beserta alasannya yang tidak boleh melebihi tinggi bangunan Kraton Ngayogyakarta. Pemahaman akan lingkungan sosial seperti mata pencaharian sebagian besar warga, tradisi-tradisi yang ada juga diketahui oleh warga setempat.

> "*Kraton terus dibagusin sedari dahulu*" – (wawancara tanggal 7 Maret 2023 dengan responden K-41).
>
> "*Dulu belum seramai sekarang, tetapi, lebih bersih sekarang*" – (wawancara tanggal 7 Maret 2023 dengan responden K-42).
>
> "*Warga banyak menjadi pelaku usaha dan abdi dalem*" – (wawancara tanggal 11 Maret 2023 dengan responden K-59).

Pemahaman, motivasi tinggal, dan aktivitas warga Area Kraton memiliki nilai pemaknaan tertinggi, menjadikan efikasi diri sebagai identitas warga. Efikasi diri merupakan daya yang dimiliki pribadi sebagai warga Area Kraton untuk mencapai tujuan dalam hal ini memajukan dan melestarikan Area Kraton.

Kebanggaan terhadap tempat tinggal menjadi indikator yang dapat menimbulkan kepercayadirian atau menjadi harga diri seorang individu sebagai bagian di dalamnya (Jaspal & Breakwell, 2014). Pada Area Kraton, warga memiliki rasa bangga atas lingkungan sosial yang terbentuk seperti kenyamanan dan kerukunan. Kebanggaan ini menjadi harga diri warga Area Kraton yang memiliki nilai 90. Lokasi Area Kraton yang berada pada pusat kota, menambah kebanggaan yang dimiliki sebagai warga Kota Yogyakarta. Bertempat tinggal di pusat kota memberikan kemudahan akses ke berbagai fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan. Akses yang mudah ini memberikan kenyamanan yang berujung pada harga diri warga di Area Kraton.

Pada variabel selanjutnya, kontinuitas dan keunikan memiliki nilai yang sama pada Area Kraton yakni senilai 86. *Kontinuitas* ditandai dengan bagaimana pengaruh tempat tinggal di masa lalu dan masa kini dan apakah pengaruh tersebut dirasa akan terus berlanjut kedepannya (Breakwell, 1993). Pada Area Kraton, pengaruh yang diberikan merupakan sebagai ruang aktivitas sehari-hari seperti bersekolah, bermain, dan berjualan. Pengaruh ini diingat sebagai memori atau pengalaman masa lalu yang melekat pada pribadi sebagai warga Area Kraton. Pengaruh yang terus berlanjut hingga kedepannya, dirasakan warga Area Kraton yakni pengaruh yang diberikan pada masa kini. Pengaruh tersebut merupakan manfaat Area Kraton terutama dari peluang ekonomi dan tempat tinggal. Sedangkan pada variabel *keunikan*, dirasakan bahwa bertempat tinggal di Area Kraton ini memiliki suasana tersendiri yakni suasana yang dibentuk dari budaya Kraton. Tetapi, beberapa warga juga beranggapan bahwa tinggal di Area Kraton dirasa sama saja dengan lingkungan lainnya.

Budaya dirasakan pada Area Kraton bukan sebagai hal yang begitu dimaknai. Pada variabel ini memiliki nilai yang terendah yakni 69. Pada Area Kraton tidak dirasakan adanya dominasi budaya ataupun agama tertentu. Walaupun menjalankan berbagai tradisi Islam ataupun Jawa, budaya tersebut dijalankan sebagai bentuk rutinitas, tanpa adanya rasa kewajiban tertentu. Warga Area Kraton tidak menjadikan budayanya sebagai identitas yang mempengaruhi aktivitas lainnya.

Area Tugu

Berdasar hasil kuesioner pada Area Tugu, pada ruang penciptaan, didapatkan kemunculan tempat Tugu, Kali Code, dan Pasar Kranggan. Sedangkan pada ruang hidup,

didapatkan kemunculan tempat berkumpul; (1) balai, (2) masjid, (3) warung, (4) di bawah pohon , dan (5) rumah pribadi, tempat bermain anak; (1) lapangan, (2) rumah pribadi, (3) gang, dan (4) masjid, juga tempat menghabiskan waktu; (1)rumah pribadi, (2) warung, dan (3) sekitar tugu.

Place identity of place pada Area Tugu memiliki kecenderungan nilai yang lebih rendah dibanding kedua area amatan lainnya. *Ruang penciptaan*, menjadi variabel dengan nilai tertinggi dimiliki tempat "Tugu" dengan nilai 69. Tugu Pal Putih merupakan ruang yang paling menonjol karena menjadi ikon Kota Yogyakarta. Terkenalnya monumen Tugu ini juga dirasakan oleh warga di Area Tugu. Monumen Tugu memiliki bentuk yang unik juga berlokasi di titik tengah 4 jalan besar membuat Tugu sangat mudah untuk terlihat. Monumen Tugu menjadi tempat yang dipilih sebagai ruang yang dominan, namun warga Area Tugu tidak menjadikan monumen Tugu sebuah hal yang penting dan berpengaruh bagi aktivitas sehari-hari mereka. Adanya monumen Tugu sejatinya menciptakan pengaruh pada peluang ekonomi dan adanya *landmark* yang menjadi ikon ataupun penanda dari Kota Yogyakarta. Tetapi, peluang ekonomi hanya digunakan oleh beberapa warga saja, sedangkan warga lainnya tidak memiliki pemaknaan tersendiri atas adanya monumen Tugu. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar warga Area Tugu menganggap adanya monumen Tugu tidak penting bagi diri mereka.

> *"Tidak penting, adanya Tugu hanya untuk dilihat saja, bukan hal yang bisa digunakan, tidak sebegitu pengaruhnya bagi kami, kecuali justru membuat kemacetan ketika liburan"* – (wawancara tanggal 14 Maret 2023 dengan responden T-70).

Selain tugu, terdapat ruang penciptaan pada tempat "Kali Code" dan "Pasar Kranggan". Kali Code merupakan kali yang lokasinya berdekatan dengan permukiman. Lokasi permukiman pada Area Tugu memiliki jarak kurang lebih 200 meter dari titik monumen Tugu. Permukiman pada bagian timur Area Tugu, berdampingan dengan aliran Kali Code.

> *"Pembangunan itu yang dibagusin selalu daerah Tugu kearah Kraton sana, padahal dekat sini ada Kali yang jelas – jelas belum beres, harusnya dibereskan dulu pengelolaannya."* – (wawancara tanggal 14 Maret 2023 dengan responden T-69).

Penataan pada Kali Code dianggap belum dilakukan secara maksimal. Beberapa warga merasa cemas akan belum bersihnya Kali Code. Letak Kali Code yang berdekatan dengan permukiman menciptakan kekhawatiran tersendiri atas belum terkelolanya Kali Code secara maksimal. Di samping itu, pada tempat Pasar Kranggan menjadi salah satu ruang penciptaan karena merupakan salah satu pusat ekonomi di dalam Area Tugu. Pasar Kranggan ini buka

sedari pagi hari hingga sore bahkan malam hari, hal ini menyebabkan cukup banyak orang yang mengunjungi Pasar Kranggan untuk memenuhi kebutuhan. Namun, secara keseluruhan ruang penciptaan pada Area Tugu didominasi oleh monumen Tugu sebagai ikon Kota Yogyakarta.

Pada variabel selanjutnya yakni *ruang hidup*, Area Tugu memiliki tempat "Rumah Pribadi" sebagai ruang hidupnya dengan skor 55. Rumah pribadi ini menjadi tempat menghabiskan waktu yang utama dibandingkan dengan warung maupun daerah sekitar Tugu. Sekitar Tugu kerap ramai oleh orang-orang yang melakukan berbagai aktivitas seperti duduk, berfoto, dan makan. Ramainya daerah sekitar Tugu ini merupakan keramaian yang terbentuk oleh wisatawan, sedangkan bagi warga setempat, tempat menghabiskan waktu yang dipilih adalah rumah pribadi.



Gambar 5. 3 Tempat Rumah Pribadi di Area Tugu

Sumber: Penulis (2023)

Berbeda dengan Area Panggung Krapyak dan Area Kraton, rumah pribadi yang dimaksud bukan merupakan tempat menghabiskan waktu untuk berbincang atau bertemu dengan warga lain, melainkan warga melakukan aktivitasnya secara individu di rumah masing-masing. Hal ini juga terjadi pada rumah pribadi sebagai tempat bermain anak, dimana anak-anak pada Area Tugu memiliki kecenderungan melakukan aktivitas bermainnya secara individu di rumahnya. Sebagai tempat bermain anak, ditemukan juga tempat seperti lapangan, gang atau ruang kosong, dan masjid sebagai tempat yang dijadikan anak-anak di Area Tugu bermain atau bertemu. Pada Area Tugu, utamanya ketika Ramadhan, anak-anak memiliki kegiatan rutin yaitu mengaji di masjid. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan anak-anak di Area Tugu untuk bertemu, bermain, sekaligus mengaji di masjid. Sedangkan untuk tempat

berkumpul, warga Area Tugu menggunakan bangunan yang secara fungsional memang dikhususkan untuk mengadakan acara seperti balai dan masjid, dibandingkan pada ruang-ruang terbuka.

Place identity of people yakni keterhubungan emosional subjektif individu terhadap tempat tinggalnya pada Area Tugu, variabel dengan nilai tertinggi dimiliki oleh kontinuitas bernilai 98,5. *Kontinuitas* menandakan adanya keberlanjutan dari pengaruh yang diberikan tempat tinggal bagi warganya baik di masa lalu maupun masa kini. Menandakan bahwa pada Area Tugu, warga di dalamnya akan terus melakukan aktivitas yang terpengaruh oleh lingkungan Tugu. Warga Area Tugu menjadikan pengaruh Area Tugu yang merupakan bagian dari sumbu filosofi sebagai tempat tinggal. Kedepannya warga Area Tugu akan terus bertempat tinggal di tempat tinggalnya saat ini. Keberlanjutan ini merupakan wujud bagaimana warga Area Tugu mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang akan terjadi utamanya di Area Tugu di masa mendatang.

Pada variabel *efikasi diri*, wara Area Tugu memiliki motivasi tinggal yang kuat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh warga setempat seperti berjualan, bermain, dan bekerja menjadi hal yang penting bagi mereka. Pentingnya aktivitas yang dilakukan menimbulkan besarnya motivasi tinggal warga di Area Tugu. Area Tugu bagi warga utamanya memiliki manfaat sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja. Pemahaman sebagai salah satu indikator pada variabel efikasi diri, tidak begitu dimiliki oleh warga Area Tugu. Sebagai tempat tinggal, warga setempat membutuhkan Area Tugu, namun belum memiliki pemahaman yang kuat atas tempat tinggalnya. Pemahaman ini akan dibutuhkan sebagai salah satu daya untuk dapat ikut serta memajukan Area Tugu. Belum kuatnya pemahaman warga Area Tugu atas lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan tidak maksimalnya usaha dalam mewujudkan tujuan terkait lingkungan tersebut.

Kebanggaan yang dimiliki warga Tugu disebabkan oleh lingkungan sosial yang terbentuk di dalamnya. Rasa bangga yang berujung pada harga diri ini dimiliki warga setempat atas lingkungan sosial yang dirasa nyaman. Warga pada Area Tugu didapati memiliki watak yang baik. Kenyamanan yang dirasakan oleh warga setempat ada pada bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa adanya masalah tertentu karena warga sekitar yang baik.

Warga pada Area Tugu, tidak merasakan adanya *keunikan* tersendiri selama bertempat tinggal. Keunikan ditandai dengan adanya perbedaan tertentu yang dirasakan oleh warga setempat. Perbedaan ini dapat ditemukan dari perbandingan antara Area Tugu dengan daerah lainnya. Pada Area Tugu, warga tidak menemukan perbedaan secara signifikan dengan daerah lain. Di samping itu, *budaya* yang mendominasi tidak ditemukan pada Area Tugu.

Beragamnya budaya maupun agama maupun latar belakang suku, tidak menjadi hal yang penting bagi warga Area Tugu.

Kekuatan Place Identity

Ketiga titik utama sumbu filosofi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik mempengaruhi kekuatan identitas yang dimiliki setiap titik. Pada hasil penilaian dan analisis *place identity of place* dan *place identity of people*, ditemukan nilai sebagai berikut

Tabel 5. 1 Hasil Penilaian *Place Identity* Titik Sumbu Filosofi Terkuat

Titik Sumbu Filosofis	***Identity of Place***	**Nilai**	***Identity of People***	**Nilai**	**Total Nilai**
Panggung Krapyak	Panggung Krapyak	93	Efikasi Diri	115	208
Kraton Ngayogyakarta	Kraton Ngayogyakarta	80	Efikasi Diri	92	172
Tugu	Tugu	69	Kontinuitas	98.5	167.5

Sumber: Penulis, 2023

Penilaian *place identity* pada tiga titik utama sumbu filosofi perlu dilihat dengan menilai *place identity of place* dan *place identity of people* (Paasi, 2001). Dengan menilai *place identity* dari sudut pandang tempat dan individunya, diketahui bahwa *place identity* di ketiga titik sumbu filosofi memiliki perbedaan nilai. Perbedaan nilai ini menunjukkan tingkat pemaknaan warga setempat atas identitas yang dimiliki. Total nilai *place identity* pada ketiga tempat, didapatkan Area Panggung Krapyak memiliki nilai tertinggi yakni 208. Bangunan Panggung Krapyak menjadi *identity of place* yang dimiliki warga di Area Panggung Krapyak dengan nilai 93. Nilai pemaknaan warga Area Panggung Krapyak menjadi nilai yang paling tinggi di antara ketiga titik sumbu filosofi. Bangunan Panggung Krapyak dimaknai sebagai bangunan yang bersejarah dan penanda pada area tersebut karena letaknya yang ada di tengah permukiman. Bangunan Panggung Krapyak atau yang sering disebut warga "Kandang Menjangan" ini dulunya merupakan lokasi arena berburu rusa oleh sultan atau bangsawan dari Kraton Ngayogyakarta (Dinas Kebudayaan DIY, 2022). Fungsi tersebut tidak lagi diterapkan saat ini, melainkan menjadi tempat yang digunakan untuk memperingati hari diangkatnya

sultan Kraton Ngayogyakarta. Masih digunakannya Panggung Krapyak ini menambah pemaknaan warga setempat atas bangunan Panggung Krapyak yang bersejarah dan menjadi bagian dari tradisi.

Sebelum dilakukan revitalisasi tahun 2020, Panggung Krapyak dibuka secara umum dan kerap kali didatangi oleh warga setempat untuk melihat pemandangan dari atas panggung. Selain itu, halaman Panggung Krapyak digunakan untuk berbagai acara desa seperti "merti desa". Acara rutin tersebut merupakan acara yang disambut hangat oleh warga setempat yang menjadikan acara tersebut ramai didatangi oleh warga sekitar. Halaman yang cukup luas, lokasi strategis yakni di tengah permukiman, dan dikelilingi oleh jalan lokal, menjadikan bangunan Panggung Krapyak memiliki aksesibilitas yang baik untuk menjadi tempat diadakannya acara atau tradisi setempat. Hal-hal tersebut mampu memberikan kedekatan tersendiri antara Panggung Krapyak dengan warga sekitar.

Berbeda dengan Panggung Krapyak dimana warga setempat sebagai tokoh yang menjalankan fungsi dari bangunan Panggung Krapyak, Kraton Ngayogyakarta memiliki orang-orangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas di dalam Kraton. Kraton Ngayogyakarta menjadi salah satu kraton yang masih berfungsi dan memiliki kedudukan tinggi hingga saat ini. Kraton Ngayogyakarta ini menjalankan fungsinya dengan orang yang terlibat merupakan orang – orang Kraton baik keluarga Kraton ataupun abdi dalem.

Bagi warga setempat, Kraton Ngayogyakarta memiliki kedudukan tinggi yang menimbulkan rasa segan atau hormat kepada Kraton Ngayogyakarta. Dalam hal ini, abdi dalem dibuka bagi siapapun yang mendaftar dan dapat menjadi perwakilan dari warga untuk menjalankan fungsi di dalam Kraton Ngayogyakarta. Pada penilaian, *identity of place* pada Area Kraton dimiliki oleh Kraton Ngayogyakarta dengan nilai 80. Sedangkan pada titik Tugu, didapatkan nilai yang paling rendah dari *identity of place* ketiga titik utama Sumbu Filosofi yakni 69 dengan tempat monumen Tugu. Tugu menjadi tempat yang paling dimaknai oleh warga Area Tugu dikarenakan menjadi monumen yang sudah terkenal dan yang paling menonjol dari Area Tugu. Namun, monumen Tugu tidak digunakan secara fungsional, melainkan lebih kepada ikon/penanda Kota Yogyakarta.

Lokasi Tugu berada pada titik tengah 4 jalan besar yang banyak dilewati oleh warga Yogyakarta, menyebabkan kurangnya interaksi yang diberikan tugu secara fungsional kepada warga setempat. Bagi warga Area Tugu, Tugu merupakan monumen yang lebih berpengaruh pada padatnya lalu lintas terutama ketika musim liburan karena ramainya wisatawan yang menggunakan jalan ataupun berkunjung ke Area Tugu.

Pada *place identity of people*, Panggung Krapyak memiliki nilai tertinggi yakni 115 pada identitas efikasi diri. Efikasi diri ini penting untuk dimiliki warga sebagai daya ataupun

kekuatan yang mendorong warga untuk mencapai keadaan yang lebih baik (Breakwell, 1993). Efikasi diri dapat dilihat melalui bagaimana warga setempat memaknai tempat tinggalnya berupa pemahaman, motivasi tinggal, dan aktivitas. Efikasi diri di Panggung Krapyak paling kuat pada motivasi tinggal. Motivasi tinggal warga Area Panggung Krapyak disebabkan oleh kondisi sosial warga seperti rasa nyaman.

Rasa nyaman ini ditimbulkan dari hubungan ataupun interaksi antar warga yang menjadikan rasa nyaman sebagai alasan untuk tinggal di Area Panggung Krapyak. Warga Area Panggung Krapyak juga memiliki pemahaman yang baik akan tempat tinggalnya, yang digambarkan dari penjelasan perubahan fisik maupun pengetahuan terkait sejarah yang melekat di sekitar tempat tinggal. Aktivitas yang yang dilakukan warga seperti berjualan dan berkumpul pada area tempat tinggal juga dianggap menjadi hal yang penting bagi warga Area Panggung Krapyak.

Efikasi diri pada titik Kraton Ngayogyakarta juga menjadi *identity of place* dengan nilai 92. Efikasi diri yang paling dimaknai oleh warga setempat adalah motivasi tinggal. Berbeda dengan Panggung Krapyak, motivasi tinggal pada Area Kraton berhubungan dengan aktivitas yang terjadi pada lingkungan tempat tinggal. Aktivitas utamanya berjualan, menjadi motivasi tinggal yang dipegang oleh warga setempat. Sedangkan pada pemahaman, warga memahami bagaimana perubahan lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Sedangkan pada titik Tugu, memiliki *identity of people* yakni kontinuitas dengan nilai 98,5. Dalam hal ini, didapatkan bahwa kedepannya warga Area Tugu akan terus bertempat tinggal di tempat tinggalnya saat ini dengan beradaptasi pada perkembangan dan perubahan yang ada.

Overview

Penentuan *place identity* dilihat dengan penilaian tertinggi dari tiap *identity of place* maupun *identity of people*. Pada ketiga titik utama sumbu filosofi, didapatkan *identity of place* nya merupakan bangunan ataupun monumen yang menjadi bagian dari sumbu filosofi itu sendiri.

Place Identity of Place Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta

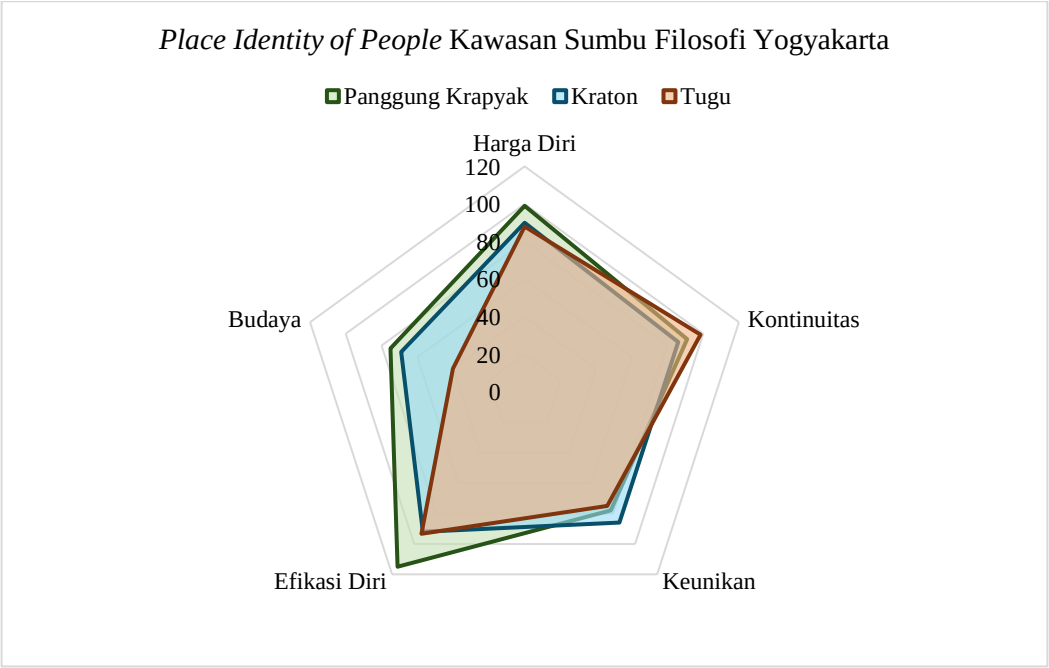
Titik Sumbu Filosofi	Ruang Penciptaan	Ruang Hidup		
	Ruang Dominan	Tempat Berkumpul	Tempat Bermain Anak	Tempat Menghabiskan Waktu
Titik Panggung Krapyak	 Panggung Krapyak	 Rumah Pribadi - Pondok	 Rumah Pribadi	 Rumah Pribadi
Titik Kraton	 Kraton Ngayogyakarta	 Rumah Pribadi	 Rumah Pribadi	 Rumah Pribadi
Titik Tugu	 Tugu	 Masjid	 Rumah Pribadi	 Rumah Pribadi

: *Identity of Place* Utama

Gambar *Place Identity of Place* Kawasan Sumbu Filosofi

Sumber: Penulis (2023)

Identity of place titik Panggung Krapyak adalah bangunan Panggung Krapyak, *identity of place* titik Kraton Ngayogyakarta adalah Kraton Ngayogyakarta, dan *identity of place* titik Tugu adalah monumen Tugu. Hal ini menunjukkan bahwa titik sumbu filosofi tersebut pada dasarnya telah muncul sebagai tempat yang dimaknai. Pemaknaan ketiga tempat sumbu filosofi oleh warga setempat adalah sebagai ruang penciptaan. Ruang penciptaan merupakan ruang memberikan pengaruhnya sehingga menjadi tempat yang mendominasi, dengan kata lain tempat yang paling "terlihat" atau menonjol bagi warga setempat (Lefebvre, 1991). Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada Kawasan Sumbu Filosofi, dimana akhirnya ketiga titik sumbu merupakan tempat yang paling mendominasi pada lingkungan sekitarnya. Dalam proses pengajuan sumbu filosofi untuk menjadi warisan budaya dunia, dilakukan berbagai pelestarian seperti revitalisasi untuk menguatkan kembali titik yang menjadi tokoh utama dalam filosofi. Pelestarian yang dilakukan contohnya pemasangan konblok pada halaman atau ruang sekitar titik di Tugu maupun Panggung Krapyak, pengecatan dan perbaikan pada Panggung Krapyak dan batas Kraton, ataupun pemberian lampu di setiap titik, dan pembangunan lainnya. Hal tersebut akhirnya memberikan pengaruh bagi warga setempat sehingga titik-titik tersebut dianggap memiliki makna yang melebihi tempat lainnya di sekitarnya. Fakta ini memberikan bukti bahwa sesungguhnya pelestarian dari pihak luar dapat menguatkan identitas yang telah dimiliki warga setempat. Pengetahuan terkait sumbu filosofi, memiliki potensi besar untuk diketahui warga setempat secara baik apabila terus dilakukan berbagai pelestarian ataupun pembangunan yang melibatkan warga setempat.



Gambar 5. 4 *Place Identity of People* Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta

Sumber: Penulis (2023)

Place identity of people Panggung Krapyak memiliki kesamaan dengan Kraton Ngayogyakarta yakni efikasi diri. Efikasi diri yang dimiliki warga setempat utamanya karena memiliki motivasi tinggal yang dianggap menjadi hal yang penting. Pada Panggung Krapyak, motivasi tinggal memiliki kaitan erat dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat, yang mana memberikan rasa nyaman. Sedangkan pada Kraton, motivasi tinggal berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan di lingkungan Kraton seperti berjualan ataupun bekerja. Hal ini sesuai dengan teori Breakwell, 1993 yakni motivasi tinggal, pemahaman, dan aktivitas, mampu menggambarkan efikasi diri yang nantinya menjadi daya bagi masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sedangkan pada titik Tugu, kontinuitas merupakan hal yang paling dimaknai secara individu oleh warga setempat. Dengan memberi arti warga Area Tugu akan terus bertempat tinggal di tempat tinggalnya saat ini. *Identity of people* ini akan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi. Efikasi diri pada Panggung Krapyak juga Kraton, dan kontinuitas pada Tugu, dapat didekati untuk perlibatan masyarakat yang maksimal dalam pelestarian sumbu filosofi.

Dari ketiga titik, Panggung Krapyak memiliki identitas yang paling kuat, dilanjutkan dengan Kraton Ngayogyakarta, dan yang paling lemah adalah Tugu. Kekuatan dari *place identity* dapat menjadi strategi utamanya pada program atau kebijakan yang diambil dalam proses pelestarian sumbu filosofi.

Kesimpulan

Identifikasi *place identity* dilakukan pada tiga titik utama Sumbu Filosofi Yogyakarta yakni Panggung Krapyak – Kraton Ngayogyakarta – Tugu. Melalui penelitian, didapatkan bahwa Panggung Krapyak memiliki bangunan Panggung Krapyak sebagai *identity of place* dan efikasi diri sebagai *identity of people*. Panggung Krapyak menjadi tempat yang dianggap bersejarah dan warganya memiliki efikasi diri utamanya motivasi tinggal yang tinggi dikarenakan kondisi sosial lingkungan yang nyaman. Pada titik Kraton Ngayogyakarta, *identity of place* yang dimiliki adalah Kraton Ngayogyakarta dengan efikasi diri sebagai *identity of people*. Kraton Ngayogyakarta memiliki kedudukan tinggi dan warga memiliki efikasi diri utamanya motivasi tinggal yang tinggi dikarenakan pentingnya kegiatan yang dilakukan didalam Area Kraton. Sedangkan pada titik Tugu, *identity of place* yang didapatkan adalah monumen Tugu dengan kontinuitas sebagai *identity of people*. Tugu merupakan ikon Kota Yogyakarta dimana warga Area Tugu secara kontinu akan terus bertempat tinggal di tempat tinggalnya saat ini.

Dari ketiga titik utama sumbu filosofi, diketahui Panggung Krapyak memiliki *place identity* terkuat. Pada urutan kedua dimiliki oleh Kraton Ngayogyakarta. Sedangkan *place identity* yang paling lemah terdapat pada Tugu. Kuatnya *place identity* akan berpengaruh pada bagaimana nantinya pembangunan dapat dilakukan secara maksimal melalui perlibatan masyarakat dengan pendekatan kekuatan identitas yang dimiliki.

Referensi

Altman, I., & Low, S. M. (Ed.). (1992). *Place Attachment*. Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-8753-4

Azanella, L. (2021, Januari 1). Ramai soal Patung Merlion di Madiun, Ini Penjelasannya... *Kompas.com*. https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/01/200500865/ramai-soal-patung-merlion-di-madiun-ini-penjelasannya-?page=all

Balai Pengelolaan Sumbu Filosofis Yogyakarta. (2023a). *Management Plan—The Comological Axis of Yogyakarta 2022*.

Breakwell, G. M. (1993). SOCIAL REPRESENTATIONS AND SOCIAL IDENTITY. *Papers on Social Representations*, *2*(3), 20.

Dinas Kebudayaan DIY. (2022). *Profil Yogyakarta: City of Philosophy* (4 ed.). Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis.

Ernawati, J. (2011). Faktor-Faktor Pembentuk Identitas Suatu Tempat. *Local Wisdom*, *3*(2), 9.

Hauge, Å. L. (2007). Identity and Place: A Critical Comparison of Three Identity Theories. *Architectural Science Review*, *50*(1), 44–51. https://doi.org/10.3763/asre.2007.5007

Heidari, A. A., & Mirzaii, S. (2013). *Place Identity and its informant parameters in Architectural studies*. 9.

Jaspal, R., & Breakwell, G. M. (2014). Identity Process Theory. *Cambridge University Press*.

Kraton Ngayogyakarta. (2022, Agustus). *Sumbu Filosofi Yogyakarta, Pengejawantahan Asal dan Tujuan Hidup* [Website Resmi Kraton Ngayogyakarta]. https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/21-sumbu-filosofi-yogyakarta-pengejawantahan-asal-dan-tujuan-hidup/

Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Blackwell.

Paasi, A. (2001). Europe as a Social Process and Discourse: Considerations of Place, Boundaries and Identity. *European Urban and Regional Studies*, *8*(1), 7–28. https://doi.org/10.1177/096977640100800102

Pemerintah Kota Yogyakarta. (2023b, Juli 8). *SEJARAH KOTA* [Website Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta]. https://www.jogjakota.go.id/page/sejarah-kota

Peng, J., Strijker, D., & Wu, Q. (2020). Place Identity: How Far Have We Come in Exploring Its Meanings? *Frontiers in Psychology*, *11*, 294. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00294

Peraturan Daerah Istimewa No 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. (t.t.).

Pertana, P. (2020, Juni 8). Alun-alun Utara Yogya Bakal Dipasangi Pagar Besi. *detik.com*. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5045776/alun-alun-utara-yogya-bakal-dipasangi-pagar-besi

Peterson, G. (1988). Local symbols and place identity: Tucson and Albuquerque. *The Social Science Journal*, *25*(4), 451–461. https://doi.org/10.1016/0362-3319(88)90024-9

Pratiwi, D. (2016). YOGYAKARTA CITY OF PHILOSOPHY. *Mayangkara*, *2*.

Proshansky, H. M. (1978). The City and Self-Identity. *Environment and Behavior*, *10*(2), 147–169. https://doi.org/10.1177/0013916578102002

Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. (1996). PLACE AND IDENTITY PROCESSES. *Journal of Environmental Psychology*, *16*(3), 205–220. https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0017

Zimmerbauer, K. (2011). From Image to Identity: Building Regions by Place Promotion. *European Planning Studies*, *19*(2), 243–260. https://doi.org/10.1080/09654313.2011.532667

Sekar Budi Dewani merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada yang meraih gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada awal 2024 lalu. Minatnya terhadap tata kota beserta budaya dan sejarah didalamnya, mendorong penulis untuk melakukan penelitian di tanah kelahirannya yakni DI Yogyakarta. Melalui berbagai pengalaman penulis dalam kegiatan bersama komunitas lokal Yogyakarta semasa kuliah, Ia memiliki sudut pandang yang kuat terhadap pelestarian dengan perlibatan masyarakat lokal secara langsung. Semasa kuliah hingga 2024, penulis bekerja sebagai Asisten Peneliti di Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional UGM. Saat ini Ia merupakan Tenaga Ahli di BAPPEDA DKI Jakarta. Dengan profesinya sebagai perencana kota, harapannya dapat terus mendapatkan pengalaman untuk ikut andil dalam perencanaan kota yang lebih baik dan berdampak baik secara berkelanjutan.

DIPLOMASI PECI HITAM:
Identitas Budaya dan Simbol Nasionalisme dalam Meneguhkan Kedaulatan RI Pasca-Indonesia Merdeka

Slamat Trisila
Masyarakat Sejarawan Indonesia Provinsi Bali

Makalah ini membahas konstruksi identitas budaya dan simbol nasionalis dalam memperkokoh kedaulatan negara dalam konteks sejarah politik kebudayaan Indonesia pascakemerdekaan melalui busana nasional. Tonggak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan awal menata pemerintahan, dasar dan bentuk negara, hingga penentuan jati diri bangsa. Salah satu bapak pendiri bangsa (*founding fathers*), yakni Sukarno menawarkan sekaligus mencontohkan untuk menggunakan peci hitam (kopiah) dalam berbusana resmi sebagai identitas bangsa Indonesia dan cerminan jiwa nasionalisme. Peci hitam yang berakar pada budaya Nusantara menjadi kebanggaan Sukarno sebagai pelengkap busana resminya dalam berbagai acara kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah kecil nan konsisten yang dilakukan Sukarno dan tokoh-tokoh nasional yang mengenakan peci hitam merupakan upaya mengawal kedaulatan Republik Indonesia yang masih baru lahir dalam menemukan jati diri dan pembentukan identitas nasional. Peci hitam tidak hanya berakar dari budaya asli Indonesia, namun menjadi budaya berseragam kenegaraan dan sebagai busana nasional paripurna yang semakin memperkokoh kedaulatan negara. Makalah ini dalam menganalisis dan membedah permasalahan akan menggunakan metode sejarah, yaitu pendekatan yang digunakan dalam studi sejarah melalui berapa tahap, antara lain (1) heuristik (pencarian dan pendataan sumber); (2) verifikasi (kritik sumber internal dan eksternal); (3) Intepretasi (penafsiran); dan (4) historiografi (penulisan sejarah). Tujuan penyusunan makalah ini, yakni mengungkap bentuk-bentuk dan pemaknaan penggunaan peci hitam dalam politik kebudayaan sejak era Indonesia Merdeka, baik sebagai identitas budaya maupun simbol nasionalis. Penulisan ini diharapkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai peci hitam yang melekat pada busana Sukarno dan tokoh-tokoh nasional setelah Indonesia Merdeka dalam upaya pembentukan identitas budaya bangsa dan memperkuat nasionalisme untuk meneguhkan kedaulatan negara yang terjaga dan relevan hingga kini.

Kata Kunci: busana nasional, identitas budaya, kedaulatan negara, nasionalisme

Pendahuluan

Busana dan aksesorisnya bagi manusia tidak hanya sebagai penutup badan atau tubuh, atau aurat bagi kalangan Muslim, tetapi lebih dari itu merupakan simbol kebesaran, tingkatan sosial, dan identitas suatu suku-bangsa. Di Indoneisa, dari Sabang sampai Merauke dapat dijumpai keragaman budaya dan adatnya yang dibalut dengan kekayaaan ragam busana dengan segala varian dan bahan yang digunakannya. Seperti yang dicatat Noerhardi (dalam Maziyah,

2022:12), bahwa cita rasa yang tinggi terhadap pemilihan busana yang dikenakan manusia Nusantara dapat dilacak pada panil-panil relief Karmawibhangga di Candi Borobudur yang menggambarkan kemewahan hingga kesederhanaan berdasarkan status sosial, semakin tinggi status sosialnya, maka busana dan perhiasan atau aksesorisnya semakin lengkap dan mewah.

Kelengkapan dalam busana yang tidak kalah penting adalah penutup kepala, bahkan penutup kepala menjadi simbol suatu kekuasaan. Berita Portugis, yang disampaikan Tome Pires, bahwa raja-raja Majapahit menggunakan busana dan mahkota emas dan berlian dalam pisowanan atau acara formal kerajaan menunjukkan lambang kebesaran dan kekakayaan kerajaan yang dipimpin. Gambaran mengenai penutup kepala sebagai kelengkapan busana juga diungkap oleh Rafles, terutama orang-orang Jawa di luar ruangan atau dalam perjalanan mereka mengenakan *tudang* atau pelindung kepada yang terbuat dari kain tebal atau beludru ketat menutupi kepala hampir sama dengan topi untuk berkuda. Sementara itu, sebagian para ulama Jawa sudah berpakaian serba putih dan mengenakan surban di kepala seperti orang Arab. Di Sunda, para penguasa wilayah (distrik) ketika tampil bersama dengan penguasa kolonial memakai topi beludru dengan bentuk yang cukup varian. Di Jawa bagian tengah dan timur, para penguasanya pada acara-acara tertentu biasanya menggunakan topi yang disebut *kuluk* (Raffles, 2014: 56). Dari cerita lisan, bahwa *kuluk* Jawa ini diperkenalkan oleh Sultan Hadiwijaya penguasa Pajang, dimana sultan terinspirasi dari topi model Arab yang terbuat dari kain halus, berwarna putih atau biru terang, dan bentuknya kaku karena dikanji. Pada acara-acara tertentu para punggawa Jawa lebih senang memakai topi beludru hitam (Raffles, 2014: 56) atau topi berpayung lebar (Crafurd, 2017:141).

Diduga bentuk *kuluk* dan topi beludru Jawa ini dipadukan membentuk semacam peci. Informasi tertua keberadaan peci, diungkap oleh Raja Ternate Zainal Abidin (1486-1500) semasa mudanya menimba ilmu agama Islam di Kedatuan Giri, sekembalinya ke Ternate membawa oleh-oleh salah satunya berupa peci (kopiah atau songkok).[1] Dengan demikian, peci sudah dikenal di Giri dan sekitar pantai utara Jawa, dimana Giri merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15 (Poesponegoro dan Notosusanto (eds.), 2010). Peci yang beredar dan digunakan dalam beribadah oleh orang-orang Islam berkembang menjadi bagian dari aksesosris berbusana terutama dipadukan dengan penggunaan sarung. Padu padan penggunaan antara peci dan sarung oleh para santri (murid) menjadi "uniform" tradisional di pesantren-pesantren di seluruh Jawa.

[1] Menurut KKBI Daring Peci (n) adala penutup kepala terbuat dari kain dan sebagainya, berbentuk meruncing kedua ujungnya; songkok= tudung kepala untuk kaum pria (biasanya dibuat dari beludru); Kopiah= peci (biasa dipakai orang Islam waktu salat).

Pada masa pergerakan, peci tidak hanya sebagai pelengkap busana santri Jawa, tetapi merambah hingga ke intelektual Jawa. Adalah pemuda Sukarno bersikukuh mengenakan peci sebagai identitas pemuda Indonesia yang revolusioner. Sukarno memantapkan diri selalu memakai peci dalam acara-acara terbuka dan rapa-rapat, pada akhirnya tidak hanya menjadi ciri khasnya, tetapi juga mencitrakan sebuah bangsa yang merdeka. Memakai peci hitam merupakan penggugah semangat perlawanan, seperti yang disampaikan Sukarno sendiri.

> Kemudian aku bersoal dengan diriku sendiri,
> "Jadi pengikutlah engkau, atau jadi pemimpin engkau?"
> "Aku pemimpin jawabku menegaskan, kalau begitu, buktikanlah" kataku lagi pada diriku.
> "Hayo maju, pakailah pecimu. Tairik nafasmu yang dalam dan masuk…sekarang!" (Adams, 1966:70)

Peci hitam yang dipakai oleh Sukarno menginspirasi tokoh-tokoh nasional lainnya untuk memakainya dalam setiap acara-acara formal atau kenegaraan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dari uraian di atas dapat disampaikan permasalahnnya sebagai berikut (1) Bagaimana historisitas Peci Hitam di Indonesia; (2) Bagaimana peci hitam menjadi identitas budaya dan simbol nasionalisme pasca-Indonesia merdeka (1945-1972).

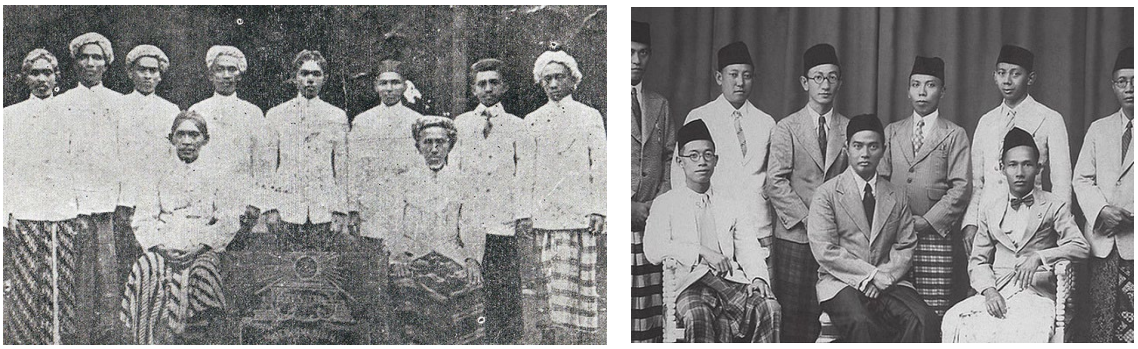
Metode Penelitian

Penelitian mengenai peci hitam dalam pembentukan identitas budaya dan simbol nasionalisme menggunakan studi pustaka, baik yang bersifat tekstual maupun visual. Untuk mendukung analisis yang lebih tajam digunakan metode sejarah yang terdiri atas 4 (empat) tahap yang secara umum dimulai dari heuristik, kritik sumber, interpretasi atau sintesa, dan tahap terakhir historiografi (Gottschalk, 1986:32). Langkah awal sebagai upaya menemukan sumber atau arsip sangat fundamental berupa foto-foto penggunaan peci oleh tokoh nasional pada masa awal kemerdekaan pada arsip Digital Libray KITLV. Pada tahap selanjutnya dilakukan melakukan kritik terhadap arsip yang bertujuan untuk meneliti otentisitas sumber, atau keaslian sumber, dan meneliti kredibilitas sumber. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap berbagai data arsip yang telah terkumpul. Tahapan terakhir adalah historiografi sebagai bagian dari upaya merangkai jalinan peristiwa masa lalu untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan.

Akar Historis Peci Hitam

Untuk menelusuri jejak keberadaan peci hitam tidak lepas dari pengaruh budaya Arab dalam hal menutup kepala. Meski akar kata peci dari bahasa Belanda, yaitu *pet* (topi) dan *je* (kecil), tetapi secara harfial dapat diartikan sebagai penutup kepala terbuat berbahan kain atau beludru, berbentuk meruncing kedua ujungnya. Pelacakan secara fisik jika sudah disebutkan di atas yakni sekitar abad ke-16 ketika pangeran Ternate sepulang dari belajar agama di Giri yang membawa buah tangan berupa peci atau mungkin lebih tepatnya kopiah karena Belanda belum masuk ke Nusantara secara menyeluruh.

Pemakaian peci hitam sangat lazim di kalangan santri-santri di pesantren yang sudah tumbuh sejak berdirinya pusat penyebaran Islam di Jawa, yakni Giri (Gresik) dan Ampel (Surabaya). Akan tetapi di kancah nasional, peci hitam belum mendapat tempat yang layak. Pada tahun 1912, ketika Oraganisasi Keagamaan Muhammdyah didirikan oleh KH M. Dahlan hanya seorang pengurus yang menggunakan peci hitam (lihat foto 1). Pada perkemabanganya, peci atau songkok dipakai tokoh-tokoh Muhammadiyah, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Mas Mansur, Hamka, dan Rasjidi, Berbeda dengan kelompok santri yang tidak dapat dilepaskan dari songkok atau peci, warga Muhammadiyah hanya menggunakan peci atau kopiah pada acara-acara formal, pengajian atau ketika jadi khotib dan penceramah.



A B

Foto 1. (A) Para pendiri Muhammadyah yang sebagai besar bersurban dan hanya seorang memakai peci tahun 1912, (B) Foto pengurus Muhammyah telah banyak memakai peci

Pada tahun yang sama bulan Desember tanggal 25, Tiga serangkai, yakni Douwes Dekker atau dikenal juga sebagai Danudirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara mendeklarasikan berdirinya Indishe Partij. Ketika mendeklarasikan Indeshe partij mereka tidak menggunakan peci, tetapi Ki Hajar Dewantara yang menggunakan penutup kepala berupa blangkon. Tidak sampai setahun partai tersebut dibubarkan dan para pemimpinnya diasingkan ke negeri belanda. Di Belanda mereka Pada

1913, rapat SDAP (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij*), pada saat itu Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara baru memakai peci sebagai bentuk perlawanan (lihat foto 2).



A B

Foto 2. (A) Para pendiri Indische partij Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan dr. CiptoMangunkusumo tahun 1912 di Batavia, (B) Setahun setelah Indische partij dibubarkan dan ketiganya diasingkan di Belanda dan bertemu dengan pimpinan SDAP .

Pada masa pergerakan, peci hitam menyeruak setelah Sukarno menghadiri kongres Jong Java, dan menggambarkan suasana hatinya, yakni.

> Salah satu bagian daripada egoisme ini adalah berkat suksesku dalam pemakaian petji, kopiah beluddr hitam jang mendjaditanda pengenalku, dan mendjadikannja sebagai lambang kebangsaan kami. Pengungkapan tabir ini terjadi dalam pertemuan jong Java, sesaat sebelum aku meninggalkan Surabaja. Sebelumnja telah terdjadi pembitjaraan jang hangat karena apa jang menamakan dirinja kaum intellegensia, jang menjauhkan diri dari saudara-saudaranya rakyat biasa, merasa terhina jika memakai blangkon, tutup kepala yang dipakai orang Jawa dengan sarung, atau petji yang baisa dipakai oleh tukang beca dan rakyat jelata lainnya. Mereka lebih menyukai buka tenda daripada memakai tutup kepala yang meruapakan pakaian sesungguhnya dari orang indonesia. Ini adalah cara dari kaum terpelajar ini mengejek dengan halus terhadap kelas-kelas yang lebih rendah (Adams, 1966: 69).

Meskipun Sukarno sangat percaya diri menggunakan peci hitam, akan tetapi orang lain dalam dunia pergerakan belum tentu mengikutinya. Hal ini, terjadi pada perdebatan antara Sukarno dan Ali Sastroamidjojo pada saat membahas segaram yang pantas untuk dipakai secara resmi anggota Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Dalam perdebatan tersebut, Sukarno tidak mendapat dukungan mayoritas perihal seragam dan atribut yang digunakan oleh anggota partai (Adams, 1966:108).



Foto 3. Keikutsertaan Sukarno dalam Kongres Jong Java di Surabaya.

Dukungan menggunakan peci hitam semakin semarak ketika Nahdlatul Ulama (NU) didirikan oleh Hasyim Ashari didukung oleh Wahab Hasbullah. Pada Saat pendirian NU para deklarator sebagian besar menggunakan peci hitam, basis dukungannya yang berasal dari pesantren-pesantren dan masyarakat pedesaan yang cukup akrab dengan busana sarungan dan berpeci. Hadirnya NU di arena politik terbuka secara nasional justru menambah tenar penggunaan peci hitam di kalangan masyarakat luas.



Foto 4. Pendirian Nahdlatul Ulama (NU) yang hampir semua memakai peci di Surabaya 1926.

Menakar Implikasi Peci Hitam

Momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan tonggak yang fundamental dalam memosisikan peci hitam seabgai busana kenegaraan, dimana pada saat Sukarno memakai peci hitam dan berdampingan Hatta membacakan proklamasi. Semua mata tertuju pengibaran bendera sang saka merah putih dan yang tidak kalah penting apa yang dibacakan dan busana yang dipakai Sukarno. Foto proklamasi yang dikumandangkan Sukarno dan Hatta serta para menteri yang hadir menggunakan busana Barat sebagian dikombinasikan dengan peci yang berpose di Jalan Peganggsaan Timur No. 56 Jakarta (Taylor, 2005: 161). Oleh karena itu, setidak-tidaknya ada dua hal untuk menakar arti penting peci hitam dalam konstruksi kebangsaan, yakni sebagai identitas budaya dan simbol nasionalisme.



Foto 5. Sang Proklamator (Sukarno – Hatta) memakai peci hitam pada tanggal 17 Agustus 1945

Sebagai Identitas Budaya

Peci dapat diposisikan sebagai penanda sosial seperti penutup kepala lainnya yang sudah lazim dikenal masyarakat, seperti kain, turban, topi, dan topi-topi resmi dengan bentuk khusus seperti dalam militer dan kepanduan. Pemerintah kolonial juga pernah berusaha memperkenalkan busana lelaki ala Eropa di Jawa. Menurut Taylor (dalam Schulte-Nordholt, 2005:122), bahwa interaksi antara busana Jawa dan Belanda periode 1800-1940, telah

didahului oleh pengaruh budaya Islam dan Cina. Para lelaki Jawa yang dekat dengan orang Belanda mulai memakai busana ala Eropa. Akan tetapi, ironinya blangkon atau peci tetap mendapat tempat, yakni lebih nyaman sebagai penutup kepala mereka.

Penggunaan peci atau songkok di Indonesia telah dianggap sebagai hasil akulturasi budaya. Warna-warna yang digunakan pada peci sebagian besar warana gelap atau hitam, meskepin ada juga peci dengan varian warna merah tua atau biru tua. Peci warana merah tua lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Turki, seperti yang dikenakan Cipto Mangunkusumo dalam pertemuan antara tiga serangkai dengan para pimpinan Partai Buruh Belanda tahun 1913.

Penggunaan peci hitam yang cukup masif di kalangan pesantren dan orang-orang kecil, seperti buruh, tukang becak, dan petani menunjukkan perkembangan infeioritas menuju keterbukan dan membanggakan seabgai hasil olah budaya. Pada level tertentu peci hitam diberi label atau hiasan dengan benang emas untuk menaikkan derajat atau status pemakainya. Artinya kedudukan peci jika sudah dimodifikasi secara elegan tidak dan berbahan kualitas unggul terutama beludru yang baik akan memengaruhi, baik nilai komersial maupun nilai prestisiusnya.

Nilai prestisius ini juga diungkapkan oleh Presiden Sukarno di sela-sela sidang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tahun 1959, tidak telalu serius tetapi penuh makna kepada Mbah Wahab. Hal ini diceritakan oleh KH Saifuddin Zuhri sebagai berikut.

> "Sebenarnya saya lebih senang berpakaian bebas. Pakaian seragam tera menyiksa. Tanyakan kepada bambang…! Telunjuknya ditujukan ke Kolonel Bambang Wijarnako sang ajudan yang marinir itu. Kalau sedang di luar kedinasan, saya pakai kaos oblong." Katanya (Sukarno) melanjutkan.
>
> "Saya berpakaian dengan segala tetek bengek yang katanya kebesaran penuh macam-macam atribut itu demi menjunjung tinggi Republik Indonesia. Kalau saya adalah Idham Chalid (Ketua Partai NU) atau Suwiryo (Ketua PNI) yang pemimpin-pemimpin partai itu, ohhh saya cukup pakai kemeja, paling-paling jas potongan kemeja."
>
> "Tapi dengan peci hitam," katanya meneruskan sambil menyambar peci di atas meja," tidak bisa saya tinggalkan. Kata orang, sekali lagi ini kata orang lho, dengan peci hitam ini saya lebih ganteng. Betul nggak, Pak Wahab Hasbullah?" pandangan diarahkan kepada KH Abdul Wahab Hasbullah Rais Aam Nahdlatul Ulama.
>
> "Memang, saudara dengan peci hitam itu, saudara tambah gagah, seperti muballigh NU!"meledak tawa riuh. "Itu sebabnya di Timur Tengah saudara mendapat tambahan Ahmad," jawab sang Kiai Abdul Wahab Hasbullah (Zuhri, 2013:594)

Guyonan ala pesantren memang membuat suasana sidang tidak menjadi tegang. Akan tetapi, pernyatan Kiai Wahab atas gelar "Ahmad' kepada Sukarno yang pada akhirnya mendapat pengakuan dari Raja Su'ud Arab Saudi, Presiden Gamal Abdul Naser Mesir,

Presiden Ben Bella Aljazair sebagai Muslim karena sealalu mengenakan peci hitam dalam kunjungan kenegarannya (Zuhri, 2013: 595). Oleh karena itu. Peci hitam juga berfungsi sebagai sarana diplomasi dalam memperkenalkan indentitas dan nasionalisme pemakainya.



Foto 6. Kabinet Pertama Sukarno – Hatta sebagian memakai peci

Sebagai Simbol Nasionalisme

Sejak masa pergerakan hingga Indonesia merdeka, Sukarno tidak pernah lepas dari peci hitamnya sebagai simbol perlawanan dari pada semangat nasionalisme yang menyatukan rakyat Indonesia dalam keberagaman untuk bersama menentang kolonialisme Belanda, baik secara fisik maupun secara mental. Perlawanan tanpa kekerasan, melainkan perlawanan melalui simbol-simbol. Peci hitam merupakan simbol kesederhanaan, simbol wong cilik, simbol kepolosan, dan simbol kekuatan energi (warna hitam). Perlunya simbo-simbol perlawanan disampaikan Sukarno sebagai berikut.

> ”…Kita memerlukan suatu lambang dari pada kepribadian Indonesia. Peci yang memberikan sifat khas perorangan ini, seperti yang dipakai oleh pekerja-pekerja bangsa Melayu, adalah asli kepunyaan rakyat kita… Hayolah saudara-saudara, mari kita angkat kita punya kepala tinggi-tinggi, dan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka” (Adams, 1966:70).

Sebagai tokoh nasionalis, Sukarno sadar betul bahwa menggunakan citra peci dalam setiap kegiatan kenegaraan merupakan bagian dari meneguhkan identitas bangsa dan memperkuat simbol nasionalisme (Suganda, 2015:196). Kegigihan dan konsistensi Sukarno

dalam memakai baju uniform lengkap dengan peci, kacamata hitam, dan tongkat komando menambah kepercayaan dirinya tinggi. Memang tampak seperti seragam militer, tetapi dengan busana dan aksesorinya yang lengkap menambah wibawa seorang pemimpin bangsa yang besar. Hal ini diutarakan Sukarno, yakni.

> "Pemimpin Indonesia haruslah seorang tokoh yang memerintah. Dia harus kelihatan berwibawa. Bagi suatu bangsa yang pernah ditaklukkan memang perlu hal-hal yang demikian itu. Rakyat kami sudah begitu terbiasa melihat orang-orang asing kulit putih mengenakan *uniform* yang hebat, yang dipandangnya sebagai lambang dari kekuasaan. Dan merekapun bagitu terbiasa melihat dirinya sendiri pakai sarung, seperti ia jadi tanda dari rasa rendah diri" (Adams, 1966: 109).



Foto 7. Presiden Sukarno mengenakan peci saat berpidato di Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960

Sukarno dengan semangat dan keyakinannya dalam berpenampilan selalu membuat decak kagum orang-orang di sekitarnya. Hal ini semakin menambah kharismanya dalam beroarasi, baik dalam acara nasional maupun internasional.

Untuk itu, dalam memperkuat posisi peci hitam sebagai simbol nasionalisme pemerintah Orde Baru telah mengeluarkan kebijkan untuk para pejabat tinggi negara memakai seragam Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang termaktub dalam Perpres No. 18 Tahun 1972. Seragam PSL didalamnya mencantum peci nasional (peci hitam) sebagai bagian yang wajib dikenakan dalam acara resmi kenegaraan, tidak memandang suku dan agama. Penerapan penggunaan peci nasional secara legal dan resmi ini merupakan langkah konkrit pemerintah dalam menempatkan peci hitam sebagai simbol nasionalisme.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, *Pertama*, peci hitam yang mempunyai akar budaya Nusantara dan mendapat pengaruh dari budaya Arab menghasilkan identitas budaya yang sesuai dengan jati diri bangsa. Peci hitam telah menjadi identitas budaya nasional meskipun mempunyai tautan yang erat dengan tradisi busana pesantren di kalangan Muslim, namun peci hitam telah diwakafkan kepada bangsa Indonesia sehingga dapat digunakan oleh siapapun warga negara Indonesia.

Kedua, peci hitam yang dirintis secara istiqomah digunakan oleh Sukarno sejak masa pergerakan hingga Indonesia merdeka dalam berbagai acara formal maupun informal, di dalam negeri ataupun di luar negeri telah menambah kewibawaan dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dengan penetapan secara legal melalui Perpres No.18 tahun 1972 mengenai seragam PSL di dalam tercantum peci hitam sebagai peci nasional justru memperkokoh kedudukan peci hitam dalam pengunaannya.

Dengan demikian, peci hitam tidak hanya sebatas spirit seperti zamannya Sukarno, tetapi berperan dalam upaya pembentukan identitas budaya bangsa dan memperkuat nasionalisme untuk meneguhkan kedaulatan negara tetap terjaga sepanjang masa karena mempunyai landasan hukum.

Daftar Pustaka

Adams, Cindy. 1966. *Bung Karno penyambung Lidah Rakyat.* (Terj. Abdul Bar Salim). Jakarta: Gunung Agung.

Carfwurd, John. 2017. *Sejarah kepulauan Nusantara: Kajian Budaya, Agama, Politik, Hukum, dan Ekonomi. Jilid 1*. Yogyakarta: Ombak.

Geertz, Clifford. 2013. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa.* Depok: Komunitas Bambu.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah.* Jakarta UI Press.

Kertamukti, Rama, 2013. "Komunikasi Simbol: Peci dan Pancasila." *Jurnal Komunikasi Profetik.* Vol. 6, No. 1, April.

Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-Batas Pembaran, Jilid 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.

Maziyah, Siti. 2022. *Kain di Jawa: Dari Mataram Kuno hingga Majapahit.* Semarang: Sinar Hidoep.

Monfries, John. 2018. *Raja di negara Republik: Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta.* Yogyakarta: Biography.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 1972 tentang Djenis-Djenis Pakaian Sipil.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed.). 2011. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia, jilid III.* Jakarta: Balai Pustaka.

Raffles, Th. Stamford. 2014. *The History of Java.* (terj. Eko Prasetyoningrum dkk.). Yogyakarta: Narasi.

Schulte-Nordholt, Henk (ed.). 2005. *Outward Appearances: Tren, Identitas, Kepentingan.* Yogyakarta: LKIS.

Suganda, Her. 2015. *Jejak Soekarno di Bandung (1921—1934)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Zuhri, Saifuddin. 2013. *Berangkat dari Pesantren (An Authorized Memories).* Yogyakarta: LKIS.

Retorika Visual Penegakan Kedaulatan Negara dalam Cerita Gambar

Terra Bajraghosa
Program Studi Desain Komunikasi Visual, Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Program Studi Doktor Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa,Universitas Gadjah Mada
terrabajraghosa@isi.ac.id

Abstrak

Karya seni tidak lahir dalam ruang hampa. Kondisi sosial, politik, dan budaya turut mempengaruhi kehadirannya. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi satu momen penting yang telah sering dihadirkan dalam sejumlah karya komik, yang sering pula disebut sebagai cergam; cerita gambar. Bahkan buku komik yang paling awal terbit di Indonesia, "Kisah Pendudukan Jogja" (1952), menuturkan peristiwa tersebut berdasar pengalaman nyata Abdulsallam, kreatornya dalam peristiwa tersebut. Kisah pendudukan militer Belanda dalam aksi polisionil sejak akhir tahun 1948 yang berujung pada Serangan Umum 1 Maret 1949, terus dihadirkan pada sejumlah judul cerita gambar lainnya dengan tujuan yang beragam. Komik berlatar belakang peristiwa tersebut hadir pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan juga terus menjadi inspirasi pada periode politik setelahnya. Seperti pada komik "Merebut Kota Perjuangan", "SO 1 Maret 1949", dan "Serangan Umum Satu Maret".

Tulisan ini menyoroti bagaimana retorika visual sejumlah cerita-gambar dengan kisah Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai penanda Penegak Kedaulatan Negara, menampilkan dinamika sejarah sebagai pantulan kondisi sosial, politik, dan budaya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menyampaikan ragam bentuk media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penegakan kedaulatan negara dan memaknainya dari sisi kajian budaya, khususnya kajian visual cerita gambar.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian konstruktif melalui sudut pandang Kajian Budaya yang menerapkan teori retorika citra yang disampaikan oleh Roland Barthes. Pembahasan disampaikan secara analitik-deskriptif, berpusat pada sejumlah citra visual dalam objek penelitian yang berupa komik berlatar belakang tema Serangan Umum 1 Maret 1949 yang memiliki potensi retorik-simbolik. Hasil menunjukkan bahwa sejumlah cerita gambar memilih penggambaran yang realistik dengan pendekatan historis-dokumentatif. Sejumlah momen kunci yang sama pada komik-komik tersebut ditampilkan melalui sudut pandang dan tata visual yang berbeda. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara retorik komik-komik yang menuturkan peristiwa Penegakan Kedaulatan Negara menampilkan visual yang mengarah pada bentuk pseudo-dokumentatif. Estetika narasi visualnya terbentuk oleh kondisi sosial-politik-budaya yang mempengaruhi pilihan plot cerita, tokoh utama, latar belakang, bentuk adegan dan pilihan bahasa dalam dialog dan narasi.

Kata kunci : Retorika Visual, Komik, Cerita Gambar, Penegakan Kedaulatan Negara

PENDAHULUAN

Karya seni tidak lahir dalam ruang hampa. Kondisi sosial, politik, dan budaya turut mempengaruhi kehadiran karya narasi visual dalam bentuk komik, yang sering pula disebut sebagai cergam; cerita gambar. Komik tampil memukau dengan mayoritas muatan gambar-gambar yang menuturkan kisah-kisah fantastis. Kekuatan tersebut melekat dan terus hadir pada komik yang berlatar kisah sejarah. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi salah satu momen penting yang telah sering menjadi inspirasi dan dihadirkan dalam sejumlah buku komik. Bahkan buku komik yang paling awal terbit di Indonesia, “Kisah Pendudukan Jogja” (1952), menuturkan peristiwa tersebut berdasar pengalaman nyata Abdulsallam, kreatornya dalam peristiwa tersebut. Kisah pendudukan militer Belanda dalam misi yang mereka sebut sebagai aksi polisionil sejak akhir tahun 1948, yang berujung pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, terus dihadirkan pada sejumlah judul cerita gambar lainnya dengan tujuan yang beragam. Komik berlatar belakang peristiwa tersebut hadir pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga terus menjadi inspirasi pada periode politik setelahnya. Selain “Kisah Pendudukan Jogja”, dapat ditemukan pula komik “SO 1 Maret 1949” (1982), “Merebut Kota Perjuangan” (1984), dan “Serangan Umum Satu Maret” (2009). Dalam komik-komik ini dapat ditemukan penggambaran upaya penegakan kedaulatan negara yang menarik untuk diamati bentuk dan strategi retorika visualnya.

Studi tentang komik Indonesia sudah banyak dilakukan secara akademis dari berbagai sudut pandang seperti Kajian Budaya, dan Sejarah (Ajidarma, 2017; Imanda 2002, Alkatiri, 2014). Studi tentang komik yang memuat kisah di seputar Serangan Umum 1 Maret 1949 cenderung membahas komik “Merebut Kota Perjuangan" (Putra, 2017; Ramdani, 2022). Studi mengenai retorika visual dari sejumlah komik dengan latar belakang kisah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang mempertimbangkan seni komik sebagai medium gambar sekuensial, belum banyak ditemukan.

Tujuan tulisan ini adalah untuk melengkapi penelitian terdahulu. Terutama untuk menyampaikan ragam bentuk media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penegakan kedaulatan negara dan memaknainya dari sisi kajian budaya, khususnya kajian visual cerita gambar. Untuk mengungkapkan retorika visual mengenai penegakan kedaulatan negara secara khusus akan berpegang pada 3 poin penting 1.Cara penggambaran dan penataan citra, 2.Relasi antara pesan kebahasaan dengan citra, 3.Konteks budaya yang terpantul dari retorika citra. Pemaparan tiga hal tersebut akan menjelaskan keragaman dan

retorika dari komik yang mengangkat satu tema yang sama dan mengungkap kontekstualisasi budayanya. Ketiga hal tersebut akan diuraikan dalam tulisan ini secara deskriptif ketika menyampaikan hasil dan membahas objek kajian, untuk menunjukkan apresiasi pada media komik baik bidang kajian maupun perancangan.

Tulisan ini berdasarkan argumen bahwa karya komik yang berhasil menyampaikan makna pesan cerita bergantung pada kerjasama antara citra teks dan citra gambar dalam penataan sekuensial, yang di dalamnya memuat pesan, dan gagasan, yang tidak terpisah dari kondisi yang melingkupinya (McCloud, 2000). Tulisan ini menyoroti seperti apa komik-komik yang berlatar peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan bagaimana retorika citra sebagai penanda Penegak Kedaulatan Negara, menampilkan dinamika sejarah sebagai pantulan kondisi sosial, politik, dan budaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi dasar munculnya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Penegakan Kedaulatan Negara pada umumnya diteliti dari sudut pandang sejarah. Herlina dkk. (2023) menyatakan bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan peristiwa penting perjuangan kemerdekaan sebagai tonggak yang menentukan penegakan kedaulatan negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, yang diinisiasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, disetujui oleh Jenderal Sudirman, dan dilaksanakan oleh Letkol Suharto sebagai kepala Wehrkreise III yang membawahi wilayah Yogyakarta. Pembandingan antara Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan Battle of Dien Bien Phu di Vietnam, oleh Ismanto dkk. (2024), menunjukkan bahwa keduanya menunjukkan kekuatan kepandaian strategi dan sifat adaptatif, di mana kemenangan perang tidak selalu bergantung pada kekuatan jumlah dan teknologi, dengan menggunakan taktik gerilya dan serbuan tiba-tiba yang berperan penting dalam membentuk sejarah dan memperoleh kemerdekaan ketika melawan kolonialisme. Strategi perang gerilya yang diterapkan dalam Serangan Umum 1 Maret menurut Pratama (2023) dapat mencapai keberhasilan karena melibatkan seluruh komponen bangsa seperti TNI, Kepolisian, Rakyat biasa, Pejuang, dan pihak Keraton, sehingga dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan merdeka.

Serangan Umum 1 Maret 1949 juga menginspirasi karya komik, dan telah menjadi bahan kajian akademis, khususnya membahas secara spesifik komik "Merebut Kota Perjuangan; S.U.1 Maret 1949" (1984) karya Wid NS dkk. "Komik Merebut Kota

Perjuangan" oleh Putra (2017) disebut sebagai instrumen politik pencitraan Soeharto yang pada tahun penerbitannya membutuhkan pencitraan ketika harga minyak dunia turun dan mengancam posisinya sebagai kepala negara. Penyelidikan Putra pada komik mendapati bahwa komik tersebut memiliki latar sejarah, bukan fiksi, akan tetapi sejumlah tokoh pada babak peristiwa dan hirarki perintah kemiliteran dihilangkan dari cerita, ketika porsi adegan, dialog, dan peran dalam cerita kebanyakan ditampilkan diemban oleh tokoh Suharto. Berikutnya, "Komik Merebut Kota Perjuangan" oleh Ramdani dkk. (2022) disebut menampilkan hegemoni tokoh Letkol Soeharto yang mengkonstruksi sosoknya sebagai tokoh sentral atau pahlawan yang paling berperan dalam masa revolusi fisik saat agresi militer Belanda II. Hegemoni ditemukan pada dominasi jumlah panel dan balon kata yang memusat pada tokoh Soeharto beserta peran aktifnya dalam menentukan cerita, aspek visualisasi yang menempatkan Soeharto sebagai tokoh pada garda depan perjuangan, dan dikuranginya peran tokoh kunci lain pada panggung narasi sejarah komik tersebut. Miyosa (2019) bagaimanapun mendapati bahwa sampul komik "Merebut Kota Perjuangan" menampilkan simbol perjuangan, dengan teks utama yang mendukung untuk menciptakan konteks dan ekspresi artistik, serta menyampaikan makna yang berhubungan dengan tema perjuangan, pergolakan, semangat pantang menyerah, serta memiliki ruh nasionalisme. Dapat disampaikan bahwa karya komik tidak sekadar berfungsi sebagai hiburan, namun dapat menyampaikan pesan-pesan ideologis.

Retorika Visual sebagai pendekatan berfokus pada proses dan kemampuan simbolik yang dimiliki oleh sebuah citra visual untuk berkomunikasi, sebagai perpaduan antara pengetahuan yang dimiliki dengan tanda-tanda yang ada pada suatu karya (Foss, 2004). Dalam media komik yang menggunakan kombinasi antara teks dan gambar untuk menyampaikan cerita, retorika visual mendayagunakan elemen-elemen visual yang ada tersebut untuk menyampaikan makna, gagasan yang kompleks, dan konsep yang abstrak, sehingga dapat diinterpretasi dan dapat lebih baik dalam diapresiasi penyampaian ceritanya oleh audiens yang berinteraksi dengan medium tersebut (MatAlim, 2024). Dalam retorika visual oleh Sonya Foss diungkapkan bahwa; warna, garis, tekstur, irama, dan elemen visual lainnya, pada sebuah artefak menjadi dasar untuk audience memahami citra, emosi atau ide yang dimaksud, yang sejalan dengan teori komik Scott McCloud bahwa perspektif, pergerakan, dan emosionalitas melekat di dalam goresan garis sebagai elemen dasar visual komik (Zarate, 2017). Komik sering menyampaikan pesan melalui penggunaan ilustrasi dan citra yang digunakan terhadap pembaca dengan konsep literasi visual, yaitu untuk berpikir secara visual, belajar secara visual, dan berkomunikasi secara visual, dengan penataan dan

sekuensi panel-panel dalam rangka menciptakan keterlibatan diri mereka sendiri ke dalam proses produksi makna (Bhattacharjee & Tripathi, 2018). Dapat disampaikan bahwa dalam medium komik, pilihan citra visual dalam rupa gambar ilustrasi, unsur teks, dan kombinasi penataan keduanya menentukan retorika visualnya; yaitu bagaimana komik tersebut mengkomunikasikan ceritanya dan menyampaikan pesan ideologisnya

METODE

Penelitian ini berfokus pada komik-komik yang memiliki tema Serangan Umum 1 Maret; yaitu (1) "Kisah Pendudukan Jogja" (1952), (2) "SO 1 Maret" (1982), (3) "Merebut Kota Perjuangan" (1984), dan (4) Serangan Umum Satu Maret (2009).

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian konstruktif melalui sudut pandang Kajian Budaya yang menerapkan teori retorika citra yang disampaikan oleh Roland Barthes. Pemikiran Roland Barthes mengenai Retorika Citra menjadi acuan penting dalam mengaji material retorika visual terutama pada pemahaman bahwa sebuah tanda merupakan paduan tak terpisahkan antara penanda dan petanda, di mana lapisan penanda-penanda merupakan lapis ekspresi dan petanda-petanda adalah lapis isi (Helmer & Hills, 2004; Budiman 2011).

Pembahasan disampaikan secara analitik-deskriptif, bersamaan dengan pemaparan hasil penelitian, yang berpusat pada sejumlah citra visual dalam objek penelitian pada komik berlatar belakang tema Serangan Umum 1 Maret 1949 yang memiliki potensi retorik-simbolik, baik itu berupa panel tunggal, panel berurutan, ataupun satu kesatuan halaman, yang digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan retorika visual yang mencerminkan konteks budaya sesuai sosial-budaya yang melingkupi buku-buku komik yang dikaji. Interpretasi akan melihat citra dalam dua tataran Retorika Citra Roland Barthes, yaitu (1) sebagai pesan harfiah dan (2) pesan simbolik, dengan mengikutsertakan pesan lingual dalam dua kemungkinan fungsi, antara (1) penambat pesan, atau (2) Pemancar pesan (Budiman, 2011).



Gambar 1. Komik-komik dengan tema Serangan Umum 1 Maret 1949
(a) "Kisah Pendudukan Jogja" (1952) (b) "SO 1 Maret" (1982),
(c) "Merebut Kota Perjuangan" (1984), dan (d) Serangan Umum Satu Maret (2009).

HASIL & PEMBAHASAN

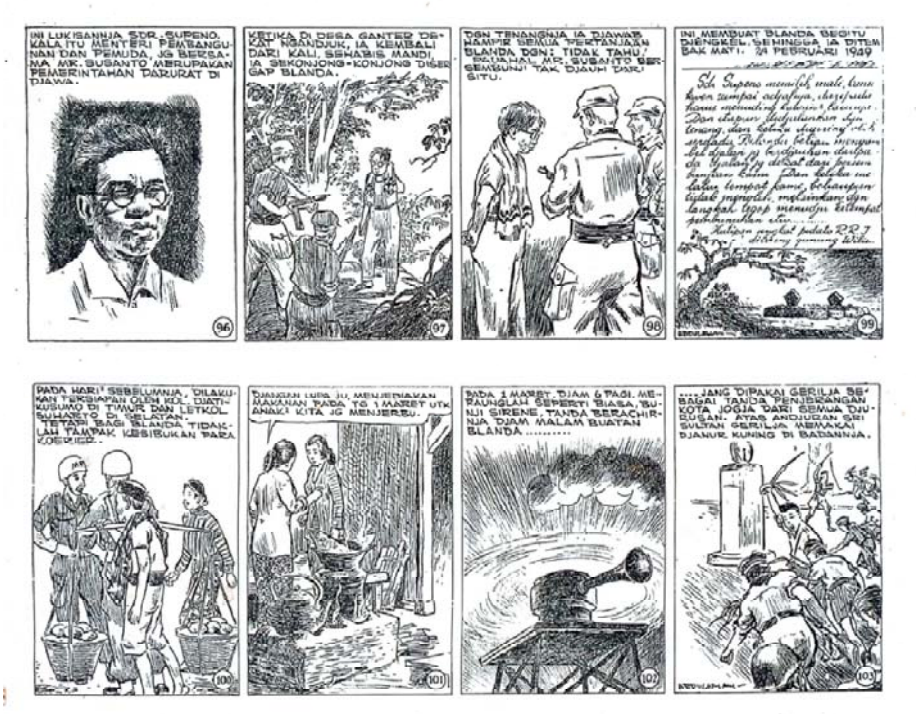
Kisah Pendudukan Jogja

Buku komik "Kisah Pendudukan Jogja; 19 Desember 1948 Sampai 29 Djuni 1949" merupakan kumpulan 30 komik strip karya Abdulsalam, yang sebelumnya tayang dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat, yang juga menjadi penerbit komik ini, pada tahun 1952. Dalam versi buku setiap halaman memuat 2 strip, atau rata-rata sebanyak 8 kotak panel. Terbit pada tahun 1952, Buku Komik "Kisah Pendudukan Jogja" sering disebut sebagai buku komik pertama di Indonesia. Halaman buku yang berukuran 18,5x22cm ini hanya satu muka dan tidak bolak-balik, dengan jumlah total 16 halaman. Sampulnya didominasi warna merah

dengan ilustrasi gaya blok yang menggambarkan empat pejuang republik yang membawa senjata sedang berlari di sekitar rumah pecinan Yogyakarta, secara perspektifis. Gaya blok dengan highlight ini tidak diterapkan untuk isi komik, yang menggunakan ilustrasi line drawing. Seperti lazimnya komik strip, "Kisah Pendudukan Jogja" memakai pola 4 panel dengan panel-panel yang rigid, mayoritas berukuran sama dan masing-masing diberi nomor, terdapat tanda nama Abdulsalam hanya pada setiap panel keempat (paling kanan dalam satu baris). Abdulsalam nampak merancang karyanya sebagai satu rangkaian yang panjang, yang membedakan dengan komik strip gag humor, sehingga hanya sekali saja memuat panel judul "Kisah Pendudukan Jogja", yaitu pada panel pertama. Di bawah teks judul yang hurufnya ditulis secara bersambung dengan latar belakang gelap, terdapat teks narasi tanpa bingkai; "Kisah Ini Kami Persembahkan Kepada Segenap Lapisan Rakjat Indonesia. Jg (Yang) Berdjoang Hanja Karena Keinsjapan Dan Jg Hingga Kini Belum Pula Mengetjap Kemerdekaan Dlm Arti Kata Jg Sebenar-Benarnja." Semua teks dalam komik ini ditulis secara kapital dalam ejaan tahun 1950. Mengingat ini merupakan karya tahun 1950-an, tiap panel lebih kerap menampilkan penataan teks dan gambar yang menyerupai tipe buku ilustrasi. Yang dimaksud adalah: satu uraian teks mendampingi satu gambar. Dan untuk itu, sekuensi yang digunakan antar panel kebanyakan masih menampilkan pola perpindahan adegan-ke-adegan, di mana masing-masing panel menjelaskan satu adegan dan panel berikutnya menjelaskan adegan yang berbeda, meskipun masih memiliki jalinan cerita.

Cerita diawali dengan serangan Belanda ke bandara Maguwo pada pagi hari tanggal 19 Desember 1949, yang kemudian mengalir ke kisah-kisah di seputar pendudukan Yogyakarta selama masa Agresi Militer kedua yang jarang terungkap pada karya-karya lainnya yang bertema sama. Misalnya kisah bagaimana pesawat pemburu Cocor Merah jenis P40 menembak sebuah mobil Fiat yang menewaskan 2 orang penumpangnya, atau bom seberat 25Kg yang jatuh di daerah Demak Ijo memakan 10 orang korban. Ada pula kisah Amir, pejuang republik yang ditahan di IVG atau kantor kepolisian di Ngupasan, menemukan granat ketika membersihkan ruang serdadu Belanda, dan mencoba meledakkannya ketika bertemu serdadu, hanya saja ternyata itu granat kosong, dan ketika melarikan diri melompat pagar, Amir akhirnya tewas tertembak oleh tentara Belanda. Salah satu strip yang memiliki sekuensi ala komik modern ada pada strip nomor 65-68, menampilkan kisah konvoi pasukan Belanda yang berhenti di tengah jalan karena terhalang oleh karung goni yang besar. Khawatir isinya bom, karung diperiksa dengan dibuka, dan tanpa disangka isinya adalah tawon *ndhas* Jw. : kepala), yang terkenal kuat sengatannya, dan menyebabkan konvoi pasukan tersebut tersengat lebah dan mengeluh "Aduh, gila ini. Ada perang semacam ini".

Bentuk perlawanan rakyat atau tentara gerilya nyatanya tidak melulu berupa serangan-serangan militer. Ada pula kisah mengenai mata-mata untuk Belanda, garong rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penduduk, dan juga rakyat Indonesia yang menjadi kolaborator Belanda, yang jarang disampaikan nantinya dalam komik-komik bertema sejenis. Menampilkan banyak kisah yang setara dengan *petite history*, komik ini tetap menceritakan benang merah Serangan Umum 1 Maret dan juga menceritakan tokoh-tokoh yang berperan seperti Suharto, Sri Sultan, dan Sudirman, meskipun dalam penuturan yang singkat. Nama Suharto hanya disebut dalam 2 narasi, dengan ilustrasi yang tidak secara langsung menunjukkan identifikasi sosoknya. Berbeda ketika menyampaikan kisah mengenai Supeno (Gambar 2), Menteri Pembangunan Dan Pemuda pada masa itu yang kepergok Belanda dan kemudian ditembak mati karena tidak bekerjasama ketika diinterogasi, terlebih dulu Abdulsalam menampilkan ilustrasi potretnya yang detail dan halus sebagai perkenalan.



Gambar 2. Kisah Pendudukan Jogja; Panel 96-99, terbunuhnya Supeno dan Panel 100-104; Persiapan dan mulainya Serangan Umum

Kisah persiapan dan pelaksanaan Serangan Umum pun hanya disampaikan hanya dalam 8 panel. Dimulai pada panel 100, yang menampilkan dua tentara patroli Belanda yang asyik berbincang dan dua sosok rakyat yang berjalan, satu digambarkan sebagai penjual

keliling, dan satu lagi memakai setelan beskap dan kain, lengkap dengan blangkon khas Yogyakarta. Narasi yang mendampingi "Pada hari-hari sebelumnya dilakukan persiapan oleh kolonel Djatikusumo di Timur dan letkol Suharto di Sealatan. Tetatpi bagi Belanda tidaklah tampak kesibukan para koerier". Teks ini memancarkan pesan yang bisa diartikan bahwa sosok penjual dan sosok berpakaian beskap mungkin saja kurir pejuang atau bahkan Suharto yang menyamar, seperti yang ada pada komik "Merebut Kota Perjuangan" ketika Suharto menemui Sultan. Panel berikutnya tampak kesibukan perempuan yang menyiapkan logistik, dan menariknya, justru kedua sosok prempuan berbaju kebaya luruik inilah yang menyampaikan tanggal penting '1 Maret' pada komik ini. Hal ini menunjukkan keterlibatan rakyat yang dipercaya dan mendukung perjuangan. Sirine gaok ditampilkan pada panel 102, menjadi tanda dimulainya serangan, dan disambung dengan gerak pejuang dengan latar belakang jam yang menjadi penanda daerah yang disebut Ngejaman, posisinya menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi di depan benteng Vredeburg. Nantinya rentetan panel akan menunjukkan pejuang yang menguasai kota, penjelasan infografis peta mengenai strategi mencegah datangnya bantuan Belanda, dan tentara Belanda yang tertembak. Babak serangan umum berakhir dengan narasi bahwa "Pada jam 10 pagi gerilya mundur lagi. Bukti tentang kekuatan mereka telah diberikan kepada dunia luar dan UNCI (Peninjau PBB)" yang menyertai ilustrasi satu daerah pecinan, terlihat dari gaya arsitektur rumahnya (mungkin yang dimaksud apakah Malioboro atau Jalan Margo Utomo) yang nampak lengang dengan dua baris barikade, tanpa nampak satupun sosok manusia. Komik "Kisah Pendudukan Jogja" ditutup dengan ilustrasi gabungan sosok Sudirman yang sedang memberi hormat dengan bagian bawahnya menampilkan pasukan yang memanggul tandunya, dengan teks narasi di bagian paling atas "Dgn Masuknya Djendr Sudirman Ke Dlm Kota, 10 Djuli 1949 Tamatlah Sudah Kisah Ini."

Mengalami langsung masa revolusi dan masa agresi Belanda, membuat Abdulsalam bersemangat menuangkan peristiwa pendudukan Yogyakarta ke dalam komik dengan berpegang pada catatan sejarah yang dipublikasi media dan cerita-cerita yang didengarnya, dan dengan ingatan yang masih segar; penggambaran mesin perang, kendaraan, senjata, model pakaian, hingga sosok dan wajah para tokoh-tokoh dalam cerita mampu dihadirkannya secara akurat (Hermanu, 2011). Mengalami langsung kejadian pendudukan Jogja oleh Belanda dan Serangan Umum, menjadikan karya Abdulsalam ini unik dan otentik, yang sedikit banyak lebih bisa dilekatkan pada sifat komik jurnalisme, ketimbang sebagai komik cerita biasa. Meskipun Abdulsalam telah melakukannya lebih dulu, Joe Sacco (2012) yang terkenal dengan komik jurnalismenya menyatakan bahwa selama keakuratan bisa

digambarkan, dia akan menggambar secara akurat, dan meskipun hadir di ruang kejadian peristiwa, sebagai penutur gambar, tetap akan ada ketidak sempurnaan dan tambalan-tambalan informasi tetap dibutuhkan. Penggambaran yang dilakukan oleh Abdulsalam, selain menunjukkan kepiawaian dalam menggambar, juga menunjukkan kemampuannya menyampaikan narasi. Sejumlah teks tidak terasa redundan dan melengkapi visualnya. Dari citra visual yang dihadirkan, sebagai buku, kumpulan komik strip ini terasa utuh sebagai rangkuman kisah perjuangan rakyat bersama pejuang, namun dapat dibayangkan ketika tampil secara harian atau berkala di Kedaulatan Rakyat, komik strip "Kisah Pendudukan Jogja" dapat menyerupai laporan peristiwa dalam bentuk cerita.

SO 1 Maret

Buku Komik berjudul "SO 1 Maret" diterbitkan Yayasan Telapak Semarang tahun 1982 dengan naskah cerita ditulis oleh Ary, dan ilustrasi oleh Masdi, dengan dukungan bahan dan petunjuk dari Jarahdam VII (Dinas Sejarah Militer) Kodam Diponegoro. Komik berukuran 28x21cm ini memiliki sampul berwarna; yang menampilkan sosok Sultan HB IX, Sudirman dan Suharto yang memegang senapan *bren gun*, dipadu dengan gambar Tugu Yogyakarta, sosok-sosok tentara Belanda, dan Republik Indonesia, dalam bingkai kobaran api, serta pesawat tempur dan pasukan terjun payung. Sebelum masuk ke cerita, terdapat ucapan terima kasih dari penerbit untuk lima pejabat yang memberikan sambutan di awal komik, yaitu; Sri Paku Alam VIII (Wakil Gubernur DIY), Supardjo Rustam (Gubernur Jawa Tengah), LetKol. Maryoto Triss (Kepala Dinas Sejarah Militer Kodam Diponegoro), Koestidjo (Kakanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah), dan Soegiarto (Walikota Yogyakarta). Isi buku sebanyak 56 halaman, menampilkan ilustrasi hitam putih teknik outline dengan arsir silang dan blok untuk menunjukkan dimensi. Sambutan ditulis pada lembar yang memiliki kop surat instansi masing-masing, memuat foto pejabat terkait, bertanda tangan disertai bubuhan cap. Karakter atau tokoh cerita digambar secara tradisional melalui gaya kartun dengan anatomi proporsional, dengan sejumlah eksagerasi pada bagian tangan, disertai setting bangunan dan unsur lain yang digambarkan secara simplisistik. Panel-panel dalam komik ini ditata secara dinamis dengan pembagian per halaman antara 2 kolom - 3 baris dan 2 kolom - 4 baris, dengan bentuk panel yang tidak selalu kotak. Sebagian panel dibingkai secara meliuk dan berbiku-biku, namun bentuk ini tidak secara khusus digunakan untuk menunjukkan kaitan dramatisasi dengan muatan adegannya.

Cerita komik "SO 1 Maret" secara garis besar menampilkan momen-momen peristiwa SU 1 Maret, mulai dari Serangan Belanda, upaya dan konsolidasi antara pihak tentara Indonesia dengan Sultan, serangan dan baku tembak antara Belanda dengan TNI, Peristiwa Serangan Umum, dan Keluarnya Belanda dari Yogyakarta / Indonesia. Tokoh utama yang ditampilkan adalah Suharto, yang digambarkan memakai pakaian tentara dengan lengan panjang yang digulung ke siku, dan memakai peci tentara hitam. Tokoh Suharto diberi bagian cukup banyak dalam kisah, baik dalam bingkai militeristik (memberi perintah, mengatur strategi, memimpin dan terlibat dalam baku tembak), maupun bingkai humanistik (pengorbanan keluarga, romansa). Dalam "SO 1 Maret" Suharto menjadi penggagas rencana Serangan Umum 1 Maret, yang disampaikan pada suatu perundingan bersama para perwira seperti Mayor Sarjono, Kapten Widodo, Kapten Sudarsono, Letnan Komarudin. Kedua panel ini berfokus pada sosok Suharto. Tokoh lain digambarkan pada latar-depan dengan posisi membelakangi pembaca atau ditampilkan secara semi-siluet, dan sebagian lagi di latar belakang dalam posisi berjejer, dan sebagian lagi tampil secara siluet, sehingga tidak teridentifikasi dengan jelas siapa siapanya. Balon kata dalam dua panel ini didominasi oleh ucapan Suharto mengenai waktu dan taktik serangan, dan seseorang dalam rupa semi-siluet ditunjukkan menjawab "Siap, Pak!". Penggambaran wajah tokoh Suharto dan tokoh lain dalam komik ini tidak konsisten dan pilihan teknik arsir dan blok yang kuat menambah kerancuan penggambaran tokoh-tokohnya. Antara militer Belanda dan Tentara Indonesia pun tidak digambarkan secara berbeda, arsiran silang yang penuh diterakan pada bagian seragam masing-masing pasukan. Pesan lingual berupa narasi dan ucapan dialog sangat membantu untuk menambatkan pemahaman pada sosok tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam panel-panel komik ini. Begitu juga dengan lokasi setting yang tidak digambarkan secara spesifik, sehingga pemahaman hanya bergantung pada penjelasan teks.

Adegan dimulainya serangan umum yang menjadi topik dan judul cerita ditampilkan pada satu baris panel yang melintangi pada halaman 45 komik ini. Pada sudut kiri ditampilkan teks "Dan begitu raung sirene lenyap dari udara" (sebagai tanda dimulainya serangan), menyertai gambar ledakan yang melemparkan sejumlah benda, yang tidak begitu jelas identifikasinya; menyerupai batu, papan-papan kayu, dan drum, disertai serpihan-serpihannya. Pada dua panel berikutnya baru ditampilkan pasukan yang sedang menembaki satu gedung dari kejauhan dan pasukan (juga memakai seragam) yang terkena tembakan. Keterangan narasi yang berada di tengah, di antara kedua panel ini menambat pada 'sifat serangan yang gencar', 'aksi para pejuang yang bersemangat', dan 'lokasi-lokasi pos Belanda

yang diserang'. Yaitu Hotel Tugu, malioboro, Benteng Vredeburg, Kantor Pos, dan Kota Baru, yang tidak dihadirkan visualisasinya.

Rangkaian adegan dan momen-momen tegaknya kedaulatan negara (perjanjian Roem-Royen ditandatangani, keluarnya Belanda dari Yogyakarta, hadirnya UNCI, kembalinya Sukarno dan perjumpaan dengan Sudirman) ditampilkan pada 3 halaman bagian akhir, di mana sejumlah foto hitam putih ditampilkan untuk menggantikan ilustrasi dalam panel-panel komik. Foto-foto menampilkan sosok-sosok yang saling berinteraksi, yang dijelaskan melalui teks narasi. Satu foto (Gambar 3) yang dijelaskan melalui teks narasi menunjukkan Sultan di sebelah kiri, disertai balon kata "Kerjakan!", dan di hadapannya berdiri Suharto membalas dalam balon kata "Lapor! TNI siap masuk kota Yogya!" yang didampingi oleh sejumlah personil militer lainnya. Urutan dialog ini rancu, dan bisa dianggap pembubuhan balon kata lebih mengikuti komposisi foto dengan Sultan berada di sebelah kiri Suharto, alih-alih mengikuti urutan ucapan, yaitu Suharto melapor dulu baru diberi perintah oleh Sultan, seperti yang tercantum pada keterangan teks narasi yang menyertai; "Setelah Pak Harto melapor kepada Sri Sultan, maka mulai masuklah TNI, ...". Komik ditutup dengan satu kolase foto menampilkan potongan foto Sultan, Suharto, dan Sudirman (berkuda) disertai gambar tugu Yogyakarta dan potongan quote dari (Letnan Jenderal) Sudirman:

"PELIHARALAH TENTARA NASIONAL INDONESIA
PELIHARALAH ANGKATAN PERANG KITA,
JANGAN SAMPAI TNI DIKUASAI
OLEH PARTAI POLITIK MANAPUN JUGA!"

Pemakaian elemen foto dapat dilihat sebagai upaya simbolis yang mencakup setidaknya 2 hal. Pertama untuk menunjukkan bahwa komik ini memang didukung dengan arsip-arsip sejarah berupa foto-foto aktual di seputar tahun 1949. Sebagaimana buku komik ini dibungkus sebagai komik sejarah, yang tercantum dalam sampul belakangnya. Kedua, pembaca diajak untuk menjadi saksi mata bahwa tokoh-tokoh dalam cerita yang dikerjakan dengan teknik ilustrasi gambar memang nyata dan ada, dan tokoh-tokoh inilah yang berperan dalam kisah yang baru saja dibaca. Pemakaian citra foto yang nyata, sekalipun hitam putih dan hanya ditampilkan di akhir, mempersuasi pembaca untuk mengaitkan bahwa nilai atau sikap kepahlawanan, ketegasan, pengorbanan, kepiawaian dalam mengatur siasat perang di dalam kisah komik "SO 1 Maret" merupakan fakta sejarah, sekalipun disampaikan dalam bentuk gambar.



Gambar 3. Halaman Komik "SO 1 Maret" yang mencantumkan foto

Merebut Kota Perjuangan (S.U. 1 Maret 1949)

Buku Komik "Merebut Kota Perjuangan" diterbitkan oleh Yayasan Sinar Asih Mataram dengan izin terbit DIT Binmas KODAK VII Metro Jaya tanggal 3 Januari 1985. Dengan nama pengarang: Marsoedi dkk.; Ilustrator: Wid NS (sketsa, pewarna, dan finishing), Hasyim Katamsi, Djoni Andrean, & Hasmi (Pewarna); Skenario: Hasmi & Marsoedi; fotografer: Agus SP; dan koordinator: Sudibyo. Komik "Merebut Kota Perjuangan" diketahui diterbitkan secara berulang antara tahun 1984-1985, setidaknya dalam dua ukuran; yang paling banyak ditemukan adalah ukuran 20,5x15cm, dan dalam format lebar berukuran 28x21cm. Keseluruhan komik setebal 60 halaman ini dicetak berwarna, dengan sampul yang menunjukkan seorang 'pejuang' berikat kepala merah putih, berpakaian kemeja robek dan celana yang digulung hingga ke lutut, memegang erat bambu runcing yang di atasnya berkibar bendera merah putih. Sosok ini secara langsung tidak hadir di dalam kisah komik, dan adegan yang dihadirkan pada sampul tidak ditemukan pada halaman isi komik. Sebelum

kisah dimulai pada halaman 1 disampaikan Pengantar oleh penerbit yang pada bagian bawahnya terdapat teks yang cukup membingungkan cara penempatan dan tujuannya, yang berbunyi "SAMBUTAN PEJUANG; KUPERSEMBAHKAN KARYAKU BAGI PARA PAHLAWAN DAN GENERASI PENERUS".

Setelah itu ditampilkan reproduksi teks proklamasi, dan sambutan-sambutan sejumlah tokoh yang disertai tanda tangannya . Yang pertama adalah surat "pengesahan" yang ditulis tangan oleh Presiden Suharto tertanggal 29 Juni 1983 lengkap dengan kop surat presiden bertinta emas, sambutan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan sambutan mantan Walikota Yogyakarta yang menjabat tahun 1947-1966. Yang mengesankan adalah ilustrasi dalam komik ini baik untuk sosok karakter, setting bangunan, dan unsur lainnya dikerjakan dengan gaya realistik-naturalis, melalui teknik campuran cat air, cat poster, dan gouache. Gaya realistik ini dapat ditemukan dan menjadi ciri pada karya-karya Wid NS terutama pada seri sejarah penerbit Ganesha dan Misurind, begitu juga pada karya Hasmi yang diterbitkan Misurind, setelah pembuatan komik ini. Bisa jadi komik ini adalah salah satu yang mengawali sistem produksi komik secara tim yang didukung dengan riset yang memadai dalam industri komik Indonesia. Akan tetapi, Ismono (2019) mencatat bahwa lamanya proses riset, pengerjaan, dan pemenuhan honorarium serta ongkos produksi yang tidak sesuai perjanjian dalam pembuatan komik, membuat para komikus papan atas tersebut untuk sementara waktu tidak bergairah membuat komik lagi dan berpengaruh pada perkembangan komik Indonesia di penghujung tahun 1980-an. Tata letak panel dalam komik ini beragam, namun kecenderungan berbentuk kotak, dan terdapat pula halaman splash yang memuat satu gambar utuh. Teks verbal ditulis tangan, untuk dialog ditampilkan pada balon kata, dan narasi pada kotak narasi, dan tidak ditemukan adanya onomatope yang divisualisasikan. Infografis berupa peta ditampilkan baik sebagai bagian dari kisah (hadir integral dalam panel cerita) maupun sebagai lampiran. Ilustrasi bersifat metaforik dan simbolis dihadirkan untuk mendampingi sejumlah narasi. Panel-panel 'insert' yang memuat extreme close-up objek atau tokoh, satu-dua kali dihadirkan untuk mendukung kejelasan suatu adegan. Dapat dikatakan komik ini memuat beragam jenis dan fungsi ilustrasi untuk mendukung penceritaan.

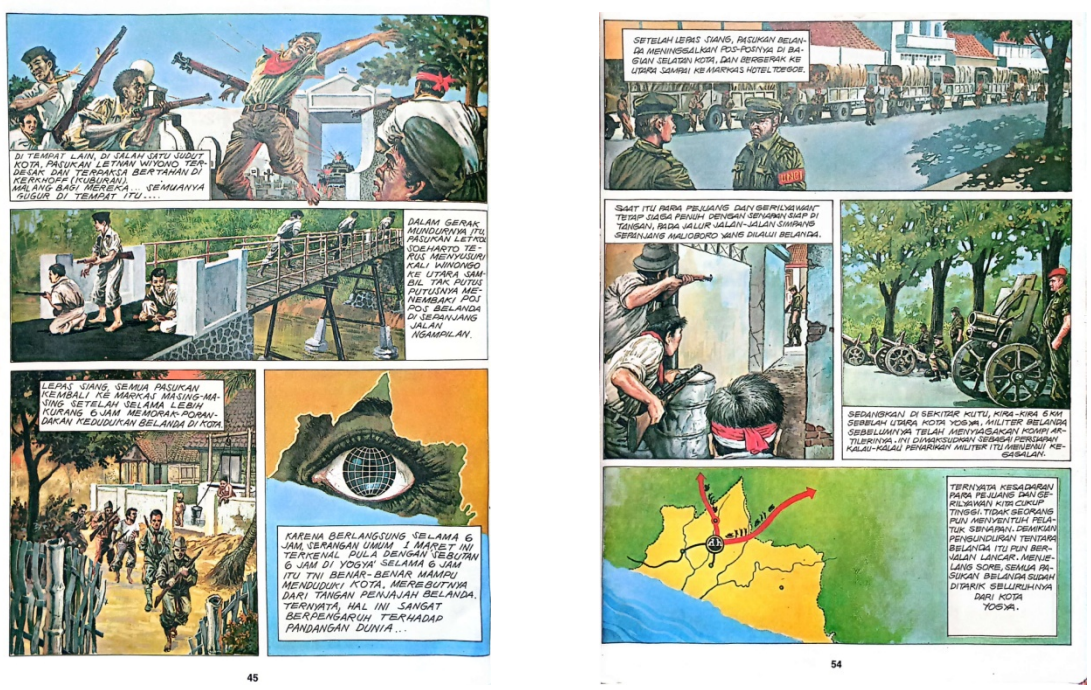
Cerita dimulai dari penjelasan mengenai kekalahan Jepang, Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hadirnya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri yang dianggap sebagai celah untuk Belanda kembali masuk ke Indonesia, pendudukan Yogyakarta melalui operasi militer Belanda, serangan-serangan gerilya dan balasan-balasan, peristiwa serangan umum, ketegangan setelah serangan umum, persetujuan gencatan senjata Belanda - Indonesia dan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta yang dikenal dengan istilah Perjanjian Roem-

Royen, hengkangnya Belanda dari Yogyakarta, dan diakhiri dengan pertemuan Sukarno dan Sudirman. Naratif komik ini telah dibahas dalam sejumlah kajian, yang umumnya melihat bagaimana komik ini digunakan untuk mengukuhkan kembali kekuasaan Orde Baru melalui pencitraan tokoh Letkol Suharto yang pada masa komik ini diterbitkan menjabat sebagai Presiden RI, melalui penelusuran pada jumlah kemunculan tokoh dalam panel, cara menampilkan postur dan gesturnya, serta pilihan dialog dan narasi, yang pada intinya menunjukkan bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menegakkan kembali kedaulatan negara Republik Indonesia tidak akan terjadi tanpa peran dan keterlibatannya (Putra, 2017). Komik ini sering dianggap sebagai karya menumental propaganda Orde Baru yang dipadankan dengan film bertema serupa berjudul "Janur Kuning".

Bagian dalam komik ini yang masih jarang dibahas adalah pilihan penggunaan ilustrasi bergaya realist-naturalistik dan penggunaan ilustrasi simbolis yang digunakan untuk menyampaikan penceritaan yang mengandung adanya gagasan dan konsep abstrak tertentu. Wid NS dan tim menghadirkan kemiripan para tokoh, setting bangunan, lokasi, kendaraan serta senjata melalui pilihan ilustrasi gaya realist-naturalistik membuat pembaca dapat mengenali tokoh secara baik, mengetahui situasi lokasi, bentuk bangunan yang menjadi setting pertempuran, dan memahami bentuk kendaraan serta senjata secara lebih detail. Meskipun mungkin ditata secara fantasi dan fiktif berdasar pengamatan, ilustrasi naturalistik pada satu sisi menghidupkan sifat realisme; yang (seolah-olah) menggambarkan, misalnya, suatu suasana kampung dengan apa adanya; di mana ada seorang ibu dan anak yang hendak menimba air di sumur, ketika serombongan pasukan yang menuju kembali ke markas melewati kebun di dekatnya dengan batas pagar bambu yang terjalin tidak rapi (Gambar 4).

Kemampuan Wid NS dan tim dalam menggambar para karakter secara mirip dengan tokoh aslinya, bangunan-bangunan lama yang menjadi setting adegan, termasuk detail unsur senjata, kendaraan, dan perlengkapan, serta pencahyaan, meningkatkan estetika karya komik Merebut Kota Perjuangan" ini sehingga medekati sifat fotografi sebagai media dokumentatif yang menempatkan pembaca sebagai 'saksi mata' atas suatu peristiwa. Menurut Hatfield (2005), melibatkan pembaca dalam komik bisa secara: *inside out* (mengalami); mengajak pembaca menjadi sang tokoh, dan outside in (mengamati), menempatkan pembaca sebagai penonton. Gaya realistik, di mana ikon gambar yang mewakili sesuatu sangat mirip dengan apa yang diwakilinya bagi McCloud (2000) menciptakan jarak untuk pembaca karena pembaca akan melihatnya sebagai sesuatu yang khusus. Dapat dikatakan kemudian bahwa "Merebut Kota Perjuangan" menyiapkan adegan sebaik mungkin untuk dinikmati sebagai sebuah event dari pengamat yang berjarak. Dalam konteks sejarah yang dikonstruksi, gaya

realistik menciptakan kesan sifat dokumentatif layaknya fotografi, sehingga mampu *make-believe* dan membuat pembaca (seolah) sebagai saksi mata. Narasi teks membantu mewujudkannya dengan menempatkan pilihan narasi deskriptif yang menambat pada jenis pesan yang diinginkan diterima oleh pembaca.



Gambar 4. Halaman 45 dan 54 Komik Merebut Kota Perjuangan, Ilustrasi Simbolis

Gaya realistik tersebut dapat pula digunakan untuk menyampaikan suatu ilustrasi simbolis. Masih pada halaman 45 (Gambar 4), setelah panel-panel lain memuat adegan peperangan, dalam panel ke-4, yang menjadi adegan terakhir babak Serangan Umum, memuat ilustrasi mata yang terbuka dengan pupil dan bola matanya yang membulat memuat garis-garis yang menyerupai gambaran globe bola dunia. Ilustrasi inipun juga ditorehkan secara realistik. Mata dengan alis, bulu mata, guratan, serta garis otot ini, terbingkai pada bentuk yang menunjukkan peta wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bergaris tepi kuning muda dengan latar belakang kuning tua dan pada bagian bawah berwarna biru untuk menunjukkan batas laut selatan pulau Jawa. Pesan lingual yang termuat dalam kotak narasi yang mendampingi ilustrasi ini berbunyi:

> "Karena berlangsung selama 6 jam, Serangan Umum 1 Maret ini terkenal pula dengan sebutan '6 jam di Yogya. Selama 6 jam itu TNI benar-benar mampu menduduki kota, merebutnya dari tangan penjajah Belanda. Ternyata hal ini sangat berpengaruh terhadap dunia..."

Pesan tekstual tersebut menambat makna bahwa mata dunia sedang memperhatikan Indonesia melalui serangan umum yang baru saja terjadi di Yogyakarta meskipun hanya menduduki kota selama 6 jam. Pada halaman 54, bentuk wilayah peta DIY kembali digunakan bersama dengan piktogram gapura pangurakan menuju Kraton Yogyakarta, tanda panah merah, dan piktogram tentara dan alat perang untuk menunjukkan telah keluarnya pasukan Belanda dari Yogyakarta menuju dua arah (Magelang dan Surakarta). Jika dikaitkan secara sekuensial, kedua simbol yang mewakili Yogyakarta tersebut menyampaikan hubungan sebab-akibat. Bahwa dengan serangan umum yang terjadi di Yogyakarta, dunia jadi memperhatikan adanya bangsa Indonesia yang masih terus memperjuangkan kemerdekaannya, sehingga kemudian melalui proses perundingan, kedaulatan negara Indonesia kembali ditegakkan, yang ditunjukkan dengan mundurnya Belanda dari Yogyakarta yang pada akhirnya meninggalkan Indonesia.

Serangan Umum Satu Maret

Komik "Serangan Umum Satu Maret" diterbitkan oleh Pustaka Lebah tahun 2009, berukuran 28x21cm dengan tata warna penuh pada sampul maupun isinya yang setebal 32 halaman dalam lini penerbitan 'Great Classic Collection'. Lini komik ini diketahui juga mengangkat beberapa peristiwa perang lainnya di Indonesia seperti "Surabaya '45", "Palagan Ambarawa" dan "Perang Diponegoro". Komik-komik Pustaka Lebah menurut informasi tidak dijual melalui jaringan toko buku, melainkan melalui jejaring komunitas keanggotaan dalam bentuk set. Penulis memperoleh kondisi bekasnya melalui lokapasar digital.

Komik "Serangan Umum Satu Maret" ini menampilkan sampul dengan gaya ilustrasi *painting* yang naturalistik, menggambarkan secara medium close up sosok Letkol Soeharto di belakang Jenderal Sudirman sebagai point of interest, disertai dengan deretan pesawat tempur dan ledakan, dengan tiga sosok di depannya (satu memakai seragam hijau adalah tentara Belanda dan 2 lainnya tentara Indonesia) dalam gestur memegang senapan berdampingan dengan barisan pejuang yang memanggul Sudirman dalam tandu. Dua halaman pembuka berupa sampul dalam yang juga memuat nama-nama keseluruhan tim redaksi penerbitan, dan pengantar yang berisikan rangkuman kronologi peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, beserta nama tokoh-tokoh, yang diberi tajuk " Serangan Umum 1 Maret; Indonesia Masih Terus Berjuang". Pada sampul dalam menampilkan sosok Sudirman yang berdiri secara heroik, tangan kanan menunjuk ke satu arah ditampilkan dengan perspektif yang agak hiperbolis, tangan kiri memegang tongkat, disertai nukilan dari isi komik halaman 29 yang

memuat puncak peristiwa serangan. Gambar Sudirman yang ada pada sampul dalam tersebut, digambar khusus layaknya ikon sosok superhero, dan tidak hadir di dalam isi komiknya. Bagian isi komik ini menampilkan gaya gambar yang cukup berbeda dengan pilihan yang digunakan dalam sampulnya. Gambar isi komik lebih ke arah toon-style dengan penggambaran realistik-proporsional, pilihan goresan line art yang cukup tebal, dengan pewarnaan digital model blok untuk menerapkan pembagian warna dasar, highlight, dan shadow. Panel-panel didominasi ilustrasi yang meggambarkan adegan-adegan aksi dalam peperangan, atau perbincangan antar tokoh yang digambar dengan sudut pandang medium close up dan medium shot, dan sesekali close-up ekstrim terutama untuk menunjukkan mimik wajah. Pandangan establish shot dapat ditemukan tetapi sangat sedikit. Dialog tampil dalam balon kata berwarna putih, sedangkan kotak narasi berwarna krem memuat caption penjelasan adegan, yang teksnya ditulis dengan font digital dalam huruf kapital. Dapat ditemukan sejumlah visualisasi onomatope berupa dramatisasi tipografis untuk menuliskan pilihan tiruan bunyi dengan font yang beragam, berwarna cerah, serta pilihan diksi yang populer dalam komik aksi seperti misalnya "RAT TATATA" untuk senapan mesin, BLAM! Untuk ledakan, dan "DOAR!" untuk tembakan. Gaya panel umumnya kotak dengan garis bingkai hitam dan beberapa dibiarkan tanpa garis, ditata secara dinamis dan saling berbeda pada tiap halaman. Elemen-elemen pada komik "Serangan Umum Satu Maret" ini secara keseluruhan mengingatkan pada gaya visual komik Amerika yang kebanyakan bergenre superhero, dan terdapat pula genre komik perang.

Berbeda dengan komik yang bertema serangan umum, cerita komik ini dimulai dengan pertemuan Abdul Haris Nasution yang dipanggil oleh Sudirman pada bulan Juni 1948, yang memintanya untuk menyiapkan satu strategi militer yang tepat ketika perundingan Belanda - Indonesia tidak menemukan kata sepakat. Cerita terus bergulir dengan pola perpindahan adegan ke adegan, yang juga menceritakan pergantian pimpinan di pihak Belanda serta pengaturan strategi untuk bisa kembali menguasai Indonesia. Cerita mulai masuk ke babak serangan Belanda ke Yogyakarta di akhir tahun 1948, penahanan para pemimpin, baku tembak dan perang gerilya pasukan TNI, persiapan serangan umum, serangan umum, dan kembalinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pada bagian persiapan serangan umum, komik ini memerlukan 7 halaman sehingga secara lebih detail dan bertahap menunjukkan proses bergulirnya gagasan serangan umum. Dimulai pada halaman 20 dengan gagasan berupa satu serangan yang cukup besar oleh Letkol Hutagalung yang dibicarakan dan mendapat persetujuan Sudirman dan kemudian dirundingkan dengan para panglima divisi dan kepala-kepala daerah, pemilihan wilayah Yogyakarta sebagai target

serangan oleh Kol. Bambang Sugeng pimpinan wilayah gerilya III, persiapan logistik hingga kebutuhan penyampaian berita, konsolidasi dengan wilayah gerilya lainnya di Banaran dan Solo, penunjukan Suharto yang memimpin brigade X sebagai pelaku serangan, dan hingga narasi yang menetapkan tanggal penyerangan pada 1 Maret 1949, hingga persiapan final yang kemudian berlanjut dengan adegan serangan umum itu sendiri pada halaman 26. Nama-nama sosok yang memimpin satu divisi atau bertanggung jawab pada bagian tertentu disebutkan dalam komik ini, bahkan terkadang ditampilkan dalam catatan kaki yang dimuat pada halaman bagian bawah yang kosong. Suharto dalam komik ini ditampilkan selalu sama dalam rupa karakter tentara berbaju setelan hijau lengkap dengan pecinya. Hanya dalam satu panel saja teks dialog yang diucapkan oleh tokoh ini, yaitu "Letnan Kolonel Soeharto melapor, Kolonel Bambang Soegeng!", menunjukkan identifikasi diri sebagai Suharto. Dalam 6 panel berbeda berikutnya ketika sosok 'Suharto' ditampilkan, tidak lagi disebutkan namanya, dan teks narasi yang menyertai gambar memancarkan keterangan berbeda yang saling melengkapi tanpa merujuk pada diri Suharto.



Gambar 5. Momen Serangan Umum Pada Komik "Serangan Umum Satu Maret"

Dalam adegan serangan umum (Gambar 5), satu panel memuat gambar sirene bahaya udara Belanda dengan onomatope "TEEEEET" disertai narasi "Mereka hanya perlu menantikan tanda menyerang". Disambung pada panel berikutnya narasi "Tanda itu pada pukul 06.00 pagi terdengar. Sirine berakhirnya jam malam di Yogyakarta!!!" yang menyertai

gambar tiga orang tentara Indonesia memegang senapan di latar belakang dan Suharto di bagian depan kanan sedang mengayunkan tangan dengan jari menunjuk hingga keluar dari panel. Sosoknya tidak digambarkan membawa senjata sama sekali dalam komik ini. Pada panel berikutnya tiga sosok tentara berseragam coklat yang memakai atribut scarf merah dan mengangkat senjata, ditampilkan lengkap dengan garis gerak yang menunjukkan kesan bergerak dengan tiba-tiba, disertai interjeksi "SERAAANG!!!" dengan tipografi warna putih-kuning cerah berbayang merah dalam bentuk yang tebal, italic, dan mengesankan sebagai teriakan. Narasi dalam panel ini menyebutkan; "Peristiwa yang kelak akan dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret pun dimulai". Dalam 2 panel berikutnya ditunjukkan pasukan Belanda yang belum siap (belum memakai seragam) kalang kabut, bahkan digambarkan mengejar dan menaiki bak truk dengan gaya ketakutan yang komedik, di antara desing peluru yang didampingi onomatope "RA TA TA TA TA". Meskipun tafsir auditif terbuka, namun pilihan diksi onomatope "TEEEEET" dirasa kurang cocok untuk mendeskripsikan bunyi sirene gaok yang memiliki kesan suara seperti meraung panjang dengan nada tinggi seperti ditampilkan pada video youtube channel Windu Dolandolan berjudul "Sirine Gaok Plengkung Gading" yang diupload bulan Maret 2023, yang merekam penyalaan sirene di atas Plengkung Gading sebagai tanda berbuka puasa pada saat itu. Sirene tersebut dipasang oleh Belanda di beberapa titik, di antaranya ada di Hotel Tugu, Pasar (Gedhe) Beringharjo, dan Plengkung Gading, awalnya sebagai alarm bahaya serangan udara saat perang pasifik, dan difungsikan sebagai penanda mulai dan selesainya jam malam saat agresi militer kedua di Yogyakarta (kebudayaan.kemdikbud.go.id). Pada saat serangan umum, bunyi sirene inilah yang digunakan oleh tentara Indonesia sebagai penanda dimulainya serangan pada pagi hari tanggal 1 Maret 1949. Sirene ini menjadi ikonik dan hadir dalam komik bertema sejenis. Unsur aksi dan komedi yang bertebaran dalam sepanjang cerita menunjukkan pilihan ideologi penerbitan ini untuk menempatkannya sebagai komik hiburan dengan tema sejarah-perang, yang menggunakan cover yang visualnya berbeda dengan isinya sebagai daya tarik awal untuk menggaet minat pembacanya, seperti dalam tradisi penerbitan komik Amerika.

Bukti keberhasilan serangan umum ditampilkan pada 2 halaman terakhir, dalam bentuk panel-panel yang menjalankan pola perpindahan adegan-ke-adegan antar lokasi dan waktu yang bebeda, namun sekaligus sebagai pola aspek-ke-aspek yang mendukung subjek 'keberhasilan Serangan Umum'. Ditampilkan mulai dari adegan yang menunjukkan penyebaran berita serangan melalui pemancar radio, anak kecil penjaja koran di India dengan narasi yang menjelaskan bahwa berita serangan umum 1 Maret menjadi berita utamanya, meninggalnya Jenderal Spoor secara mendadak, penarikan mundur pasukan Belanda bulan

Juli 1949, masuknya tentara Indonesia ke kota Yogyakarta, pertemuan Sukarno & Sudirman, hingga diadakannya konferensi meja bundar tanggal 23 Agustus-2 November (1949; tidak ditulis tahunnya dalam narasi) yang mencapai kesepakatan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Sebagai satu-satunya komik bertema serangan umum dalam studi kasus penelitian ini, yang terbit pada masa setelah reformasi, komik ini menampilkan narasi mengenai tokoh-tokoh Sejarah yang terlibat SU 1 Maret 1949 secara lebih menyeluruh, terutama dengan memasukkan versi Hutagalung dan Bambang Sugeng. Hal tersebut disebabkan oleh lebih terbuka dan tersedianya akses dokumen tentang peristiwa SU 1 Maret setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

KESIMPULAN

Penelitian yang menganalisis komik-komik dengan tema Serangan Umum 1 Maret menunjukkan bahwa kesamaan tema dalam suatu kisah nyatanya dapat ditampilkan secara retorik berbeda sesuai dengan tujuan pesan yang hendak dicapai. Didapati bahwa cerita gambar atau komik yang memilih penggambaran yang realistik mencoba melakukan pendekatan historis-dokumentatif kepada pembaca. pada komik yang gambarnya tidak dapat mendeskripsikan tokohnya dan persitiwa dengan baik, multimodal berupa foto ditambahkan, untuk persuasi konstruksi sejarah kepada pembaca. Seacara unik, komik yang pengarang dan poses berkaryanya tidak jauh dari persitiwa yang dikomikkan, memiliki kelebihan untuk menuturkannya secara lebih luwes, terlebih didukung dengan kemampuan penggambaran yang baik. Sejumlah momen kunci yang sama pada komik-komik tersebut ditampilkan melalui sudut pandang dan tata visual yang berbeda, dengan bentuk aksi, adegan, ataupun simbolisme. Secara retorik komik-komik yang menuturkan peristiwa Penegakan Kedaulatan Negara menampilkan visual yang mengarah pada bentuk pseudo-dokumentatif. Estetika narasi visualnya terbentuk oleh kondisi sosial-politik-budaya yang mempengaruhi pilihan plot cerita, tokoh utama, latar belakang, bentuk adegan dan pilihan bahasa dalam dialog dan narasi. Komik dapat dikonstruksi sebagai dokumen sejarah, bahan pengajaran, ataupun sekadar materi hiburan yang penuh aksi.

Sumbangsih keilmuan yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah pengetahuan tentang retorika visual komik, di mana citra yang dalam komik digunakan untuk memvisualisasikan tokoh, setting, dan unsur lain, yang ditampilkan sebagai unsur ekspresi tetap harus dirancang dengan baik, sehingga mampu menyampaikan maksud muatan pesannya. Pesan lingual dalam bentuk teks dialog, narasi, dan onoamtope digunakan untuk

mengarahkan komunikasi kepada maksud yang dituju. Pemahaman ini diharapkan berguna bagi ranah kajian dan juga ranah perancangan.

Penelitian ini masih terbatas pada pembahasan studi kasus yang kurang mendalam karena mencoba melakukan studi pada empat judul objek penelitian sekaligus. Pendalaman dapat secara spesifik dilakukan pada satu judul komik saja, sedangkan judul lain cukup dijadikan sebagai pembanding.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiman, Kris.(2004), *Semiotika Visual*, Buku Baik, Yogyakarta.

Foss, Sonja K. "Framing The Study of Visual Rhetoric: Toward a Transformation of Rhetorical Theory" dalam Hill, Charles A. & Marguerite Helmers (2004), *Defining Visual Rhetorics*, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London.

_____ "Theory of Visual Rhetoric" dalam Smith, Ken & Sandra Moriarty (2005), *Handbook of Visual Communication*, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London

Hatfield, Charles (2009) *Alternative Comics; An Emerging Literature*, University Of Mississipi Press, Jackson

Hill, Charles A. & Marguerite Helmers (2004), *Defining Visual Rhetorics*, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London.

Ismono, Henry (2019) *Hasmi Pencipta Legenda Gundala*, Metha Studio, Yogyakarta

McCloud, Scott (2000), *Understanding Comics; The Invisible Arts*, Kitchen Sink Press, Northhampton

Putra, Aldino Widya. (2017) *Komik Merebut Kota Perjuangan Sebagai Politik Pencitraan Soeharto*, PolGov, Yogyakarta

Jurnal

Ajidarma, Seno Gumira. (2017) *Politics of Identity in The Indonesian Wayang Comics*, Mudra Jurnal Seni Budaya, Vol.23 No.3

Alkatiri, Zeffry.(2014) *Parody Criticism Of The Military Regime Of The Indonesian New Order In Yogyakarta Underground Cxomics, 1995-2000*. International Kournal Of Comic Art Vol.16 No.2

Imanda, Tito.(2002) *Komik Indonesia Itu Maju; Tantangan Komikus Underground Indonesia*, Antropologi Indonesia Th XXVI No.69

Bhattacharjee, P., & Tripathi, P. (2018). *Decoding the Visual Rhetoric: Memory and Trauma in Lynda Barry's One! Hundred! Demons!*, World Journal of English Language, 8(2), 37

Herlina, Nina; Sofianto, Kunto & Falah, Miftahul (2023) *The March 1st, 1949, General Attack: A Defining Point Of Recognition Of Indonesia's Sovereignty*, Cogent Social Sciences, 9:1

Ismanto, Tri Yudha; Lutvie, Eko; Ahmad, Irdham. (2024) *Comparative Strategy Analysis: Battle of Dien Bien Phu 1954 Vs General Attack 1 March 1949 Reflections on The*

History of Decolonization, Journal of Indonesian Social Science Vol 5 No4 , April 2024

Mat Alim, Muliyati dkk.(2024), *The Visual Rhetoric in Comics for Reader Interpretation and Engagement to Meaning-Making in the Medium* , Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication Vol 40 No.3

Miyosa, Atmaja Septa (2019) *Kajian Komunikasi Visual Pada Desain Sampul Buku Komik Merebut Kota Perjuangan,* Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi , Vol 4 No1

Pratama, Sandyka. (2023) *Penerapan Strategi Perang Gerilya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta* , Jurnal Nirwasita Vol.4 No.1

Ramdani, Guruh; Marithasari, Haries & Soelistiyowati, Renny (2022) *Hegemoni Soeharto Dalam Buku Komik Merebut Kota Perjuangan, 1 Maret 1949,* Jurnal Desain Vol.9, No.3

Zarate, Tabitha Rose-Ann.(2019) *Utilizing Visual Rhetoric: A New Approach To Comics, Superheroes, And Red Suns.* Tesis

Kerangka Hukum Pengelolaan Kedaulatan Ruang Siber Indonesia

dalam Hukum Internasional:

Studi Kasus Pemberantasan Judi Online di Indonesia

Oleh

Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo[1]

Universitas Surakarta

Iyo210795@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini marak kejahatan yang terjadi di ranah siber Indonesia dengan salah satu kasus yang menjadi fokus dimasyarakat saat ini adalah mengenai judi online atau sering disingkat sebagai Judol. Hal ini meresahkan mengingat dampak resiko yang disebabkan oleh Judol tidak hanya resiko keuangan namun juga telah menuju ketataran yang lebih serius yaitu tataran kemanan wilayah siber Indonesia karena ditengarai beberapa situs Judol memiliki server di luar negeri. Di dalam Hukum Internasional telah banyak konvensi-konvensi yang mengatur mengenai kejahatan siber dan lintas negara, Lantas bagaimanakah Langkah-langkah pemerintah Indonesia didalam dalam menghadapi hal ini utamanya pada tataran peraturan atau kerangka hukumnya? Berdasarkan hal tersebut artikel ini akan membahas mengenai Kerangka Hukum Pengelolaan Kedaulatan Ruang Siber Indonesia dalam Hukum Internasional Studi Kasus Pemberantasan Judi Online di Indonesia, dengan rumusan masalah adalah bagimana kemudian Indonesia melakukan pemadanan kerangka hukumnya kedalam konvensi-konvensi Internasional utamanya yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan lintas negara? serta bagaimanakah dampak pemadaman tersebut dalam pembertansan kasus Judi Online di Indonesia? Dimana metode penelitian yang diambil adalah metode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian peninggalan sejarah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dimana hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah banyak meratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan dengan penanganan kejahatan lintas negara, akan tetapi didalam pelaksanaannya salah satu kendalanya adalah mengenai jurisdiksi baik jurisdiksi siber ataupun jurisdiksi nyata dimana permasalahan ini adalah permasalahan lintas negara yang harus disertai dengan kesepahaman politik Internasional antara Indonesia dan negara rekan dalam pembertantasan judi online, dimana hal serupa dapat dilihat dari Kerjasama Republik Rakyat Tiongkok dan Laos dalam pemberantasan penipuan dan judi online lintas negara, sehingga kesimpulannya adalah walapun banyak Hukum Internasional tetang pemberantasan kejahatan lintas negara yang telah diratifikasi oleh Indonesia akan tetapi agar efektif melaksanakan hal tersebut masih diperlukan

[1] Penulis adalah Dosen Hukum Internasional Universitas Surakarta, Aktivis di Lembaga Swadaya Masyarkat Indonesia Monitoring Procedural of Law (IMPLAW) Yogyakarta, Anggota Majelis Hukum dan Hukum Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta.

diplomasi serta Kerjasama antar negara didalam penaganan kejahatan lintas negara yang terjadi di ranah siber termasuk judi online.
Kata Kunci: *Judi Online*, *Ruang Siber Indonesia, Kedaulatan Ruang Siber*

Abstrac

Nowadays, cybercrime is rampant in Indonesia, with one of the cases currently in the spotlight being online gambling, often abbreviated as Judol. This is concerning given that the risks posed by Judol are not only financial but have also escalated to a more serious level, threatening the security of Indonesia's cyber domain, as some Judol sites are suspected to have servers located abroad. In International Law, there are many conventions that regulate cybercrime and transnational crime. So, what steps is the Indonesian government taking to address this issue, particularly in terms of regulations or legal frameworks? Based on this, this article will discuss the Legal Framework for Managing Indonesia's Cyber Sovereignty in International Law, focusing on the case study of combating online gambling in Indonesia. The problem formulation is how Indonesia aligns its legal framework with international conventions, especially those related to combating transnational crime, and what impact this alignment has on the fight against online gambling in Indonesia. The research method used is normative legal research, with a qualitative approach. The data utilized is secondary data obtained through literature studies, legal document analysis, and regulations related to the preservation of historical heritage, both at the national and international levels. The results of this research indicate that Indonesia has ratified many conventions related to handling transnational crime; however, one of the challenges in implementation is regarding jurisdiction, both cyber jurisdiction and real-world jurisdiction. This issue is a transnational problem that requires international political understanding between Indonesia and partner countries in combating online gambling. A similar situation can be seen in the cooperation between the People's Republic of China and Laos in combating transnational fraud and online gambling. Therefore, the conclusion is that although many international laws regarding the eradication of transnational crime have been ratified by Indonesia, effective implementation still requires diplomacy and cooperation between countries in addressing transnational crimes occurring in the cyber realm, including online gambling.

Kata Kunci: Judi Online, Ruang Siber Indonesia, Kedaulatan Ruang Siber

1. Latar Belakang

a. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya kejahatan siber. Salah satu kejahatan yang semakin marak di Indonesia adalah judi online. Judi online bukan hanya menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi membahayakan keamanan ruang siber nasional. Fenomena ini diperparah oleh fakta bahwa banyak situs judi online beroperasi dengan server yang berada di luar negeri, sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum nasional. Dalam era digital yang semakin canggih, perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara fundamental, membawa berbagai kemudahan dan efisiensi dalam komunikasi, transaksi, dan akses informasi. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula tantangan baru yang harus dihadapi, terutama

dalam hal keamanan siber dan penegakan hukum di dunia maya. Salah satu manifestasi negatif dari perkembangan teknologi ini adalah merebaknya praktik judi online, yang telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Data terbaru menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah pemain dan transaksi judi online di Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 4 juta pemain judi online di Indonesia, dengan total transaksi mencapai 168 juta dan perputaran dana sebesar Rp 327 triliun. Angka ini melonjak drastis pada tahun 2024, di mana jumlah pemain judi online meningkat menjadi 8,8 juta, dengan transaksi mencapai Rp 174,56 triliun hanya dalam semester pertama tahun tersebut.[2].

Peningkatan yang signifikan ini menggambarkan betapa masifnya pertumbuhan industri judi online di Indonesia dalam waktu singkat, mencerminkan kemudahan akses melalui perangkat digital dan internet yang telah memikat banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini, tanpa menyadari sepenuhnya risiko dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, judi online tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak dan remaja data yang dihimpun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan bahwa pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain, dengan total 80.000 orang. Sebaran pemain antara usia antara 10 tahun s.d. 20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, kemudian usia 21 sampai dengan 30 tahun 13% atau 520.000 orang. Usia 30 sampai dengan 50 tahun sebesar 40% atau 1.640.000 orang dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34% dengan jumlah 1.350.000 orang.[3]Fakta ini menunjukkan bahwa judi online bukan hanya menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi membahayakan masa depan generasi muda Indonesia.

Kerugian finansial yang ditimbulkan oleh judi online bukan hanya berdampak pada level individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas

[2] Admin, "GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online," July 26, 2024, https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html.
[3] Ibid

ekonomi masyarakat secara lebih luas. Lebih dari sekadar masalah ekonomi, judi online juga menjadi ancaman serius bagi keamanan ruang siber nasional. Operasi judi online seringkali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir yang memanfaatkan celah keamanan siber untuk melancarkan aksi mereka, termasuk pencurian data, penipuan, dan pencucian uang. Hal ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa sebagian besar situs judi online yang menyasar pasar Indonesia sebenarnya beroperasi dari luar negeri, memanfaatkan yurisdiksi hukum yang berbeda untuk menghindari jangkauan hukum Indonesia. Situasi ini menciptakan dilema bagi penegak hukum Indonesia dalam upaya memberantas praktik judi online, karena mereka harus berhadapan dengan kompleksitas yurisdiksi lintas negara dan keterbatasan dalam melacak serta memproses pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia.

Dalam upaya menangani masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah. Salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring melalui Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2024. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah judi online secara komprehensif. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (komdigi) telah aktif memblokir konten-konten terkait judi online. Dalam periode September 2023 saja, Kominfo berhasil memblokir lebih dari 60.582 konten yang terindikasi perjudian online.[4] Namun, meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, tantangan dalam pemberantasan judi online masih sangat besar. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah serangan siber yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2023, tercatat 29 juta serangan siber yang berhasil diblokir, dengan rata-rata lebih dari 80 ribu serangan terhadap situs web terjadi setiap

[4] Agustiyanti, "Menkominfo Berantas Judi Online, 60.582 Konten Diblokir," *Katadata.Co.Id*, September 23, 2023, https://katadata.co.id/digital/teknologi/650ec8d07cd54/menkominfo-berantas-judi-online-60582-konten-diblokir.

harinya.[5] Angka ini menunjukkan bahwa keamanan siber nasional masih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk judi online.

Dalam konteks global, komunitas internasional telah menyadari urgensi untuk mengatasi kejahatan siber lintas negara, termasuk judi online, melalui berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu yang paling signifikan adalah Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, yang menyediakan kerangka kerja sama internasional dalam menangani kejahatan siber. Konvensi ini bertujuan untuk menyelaraskan hukum nasional negara-negara anggota, meningkatkan teknik investigasi, dan memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber termasuk dengan pembentukan UN Convention on Cyber Crime 2024.

Namun, meskipun konvensi ini telah menjadi acuan global dalam penanganan kejahatan siber, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyesuaikan kerangka hukum nasional Indonesia dengan standar internasional yang ditetapkan dalam konvensi tersebut, tanpa mengorbankan kedaulatan hukum nasional. Proses harmonisasi hukum ini memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian yang hati-hati, mengingat adanya perbedaan sistem hukum, budaya, dan prioritas nasional. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal kapasitas teknis dan sumber daya manusia untuk menerapkan standar internasional dalam penegakan hukum siber. Hal ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan investigasi digital, forensik siber, dan pemahaman tentang teknologi terkini yang digunakan dalam kejahatan siber, termasuk judi online. Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah yurisdiksi dan kerja sama antarnegara dalam menangani kasus judi online lintas batas. Mengingat sifat transnasional dari kejahatan ini, diperlukan mekanisme kerja sama yang efektif antara Indonesia dengan negara-negara lain, terutama dalam hal pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan ekstradisi pelaku kejahatan. Namun, perbedaan sistem

[5] Muhammad Lugas Pribady, "29 Juta Serangan Siber Diblokir Di Indonesia Selama 2023," *Detikinet*, February 27, 2024, https://inet.detik.com/security/d-7214588/29-juta-serangan-siber-diblokir-di-indonesia-selama-2023.

hukum dan prioritas nasional antar negara seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan kerja sama yang efektif. Dalam upaya menyesuaikan kerangka hukum nasional dengan konvensi internasional, Indonesia perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, melakukan revisi dan pembaruan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan siber, termasuk UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta segala undang-undang yang berkaitan, untuk mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru dan menyesuaikan dengan standar internasional.

Kedua, memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, termasuk pembentukan unit khusus yang fokus pada penanganan judi online dan kejahatan siber lainnya. Ketiga, meningkatkan kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain, terutama dalam hal pertukaran informasi dan bantuan teknis dalam penegakan hukum siber. Keempat, melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan judi online, melalui program edukasi dan kesadaran publik tentang bahaya judi online dan kejahatan siber lainnya. Salah satu langkah penting yang diambil pemerintah adalah penguatan regulasi dan kerja sama lintas sektor. Ini termasuk pendidikan tentang risiko judi dan penguatan regulasi yang ada.

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim untuk mengatur dan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online. Dampak dari penyesuaian kerangka hukum Indonesia dengan konvensi internasional terhadap pemberantasan judi online diharapkan akan signifikan. Dengan adanya harmonisasi hukum, Indonesia akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam menangani kasus judi online, termasuk yang melibatkan unsur lintas negara. Hal ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku kejahatan. Selain itu, penyesuaian dengan standar internasional juga akan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara lain dalam upaya memberantas judi online. Ini termasuk kemudahan

dalam melakukan investigasi bersama, pertukaran bukti digital, dan proses ekstradisi pelaku kejahatan yang berada di luar negeri. Namun, perlu disadari bahwa penyesuaian kerangka hukum saja tidak cukup untuk mengatasi masalah judi online secara komprehensif. Diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat keamanan siber nasional, dan menyediakan alternatif yang positif bagi masyarakat untuk menghindari keterlibatan dalam praktik judi online. Lebih jauh lagi, Indonesia juga perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dari pemberantasan judi online.

Meskipun tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dan menegakkan hukum, perlu diperhatikan pula potensi dampak negatif seperti hilangnya sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat yang terlibat dalam industri perjudian ilegal. Oleh karena itu, strategi pemberantasan judi online harus diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja alternatif. Dalam konteks yang lebih luas, upaya pemberantasan judi online di Indonesia harus dilihat sebagai bagian dari strategi keamanan siber nasional yang lebih komprehensif. Ini mencakup penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan siber, dan pengembangan industri keamanan siber nasional. Dengan pendekatan holistik ini, Indonesia tidak hanya akan mampu mengatasi masalah judi online, tetapi juga meningkatkan ketahanan siber nasional secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan. Berdasakan hal tersebut kemudian penelitian ini akan mengambil judul

Kesimpulannya, penyesuaian kerangka hukum Indonesia dengan konvensi internasional dalam konteks pemberantasan judi online merupakan langkah penting namun kompleks yang memerlukan komitmen jangka panjang dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan. Melalui upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam memerangi kejahatan siber, melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online, dan pada akhirnya menciptakan ruang siber yang lebih aman dan bermanfaat bagi seluruh warga

negara. Dengan melihat data statistik dan upaya-upaya terkini yang dilakukan pemerintah, jelas bahwa masalah ini membutuhkan perhatian serius dan tindakan konkret dari semua pihak terkait. Hanya dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat berharap untuk mengatasi tantangan judi online dan menciptakan ruang siber yang lebih aman bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan mengambil judul Kerangka Hukum Pengelolaan Kedaulatan Ruang Siber Indonesia dalam Hukum Internasional"

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah

   a. bagimana Indonesia melakukan pemadanan kerangka hukumnya kedalam konvensi-konvensi Internasional utamanya yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan lintas negara?
   b. bagaimanakah dampak pemadaman tersebut dalam pembertansan kasus Judi Online di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian
   a. Mengetahui upaya penyelerasan anatar hukum Nasional dan Internasional utamnaya mengenai Hukum Pidana Siber dan dampak dalam Kedaultan siber Nasional
   b. Mengetahui optimalisasi penegakan hukum dalam tindak pidana Perjudian Online di ruang siber Nasional

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa/meneliti dari sumber hukum yang sudah ada dan tertulis berdasarkan kepustakaan seperti undang-undang yang berlaku, buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan proposal ini.

Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

5. Pembahasan

a. Wilayah dalam Dunia Siber

Cukup unik memang bahwa saat ini secara tidak sadar telah muncul wilayah baru yang disebut sebagai Wilayah Virtual atau *cyberspace*. Berdasarkan Cambridge Dictionary Wilayah Virtual atau *Cyberspace* adalah:

> the internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject.[6]

pendapat lainya menjelaskan bahwa *Cyberspace* adalah suatu ruang yang terbentuk dari interaksi manusia dan teknologi.[7] Nicholas Tsurigas dari Fakultas Hukum Sheffield berpendapat bahwa memungkinakan untuk melakukan klaim atas wilayah di Internet dengan cara mendirikan perbatasan melalui cara teknis untuk mengendalikan kegiatan dari luar atau untuk melindungi layanan nasional. [8] Didasarkan pada pendapat diatas, artinya dapat dimungkinkan suatu wilayah siber dikuasai oleh suatu negara tertentu. Lebih lanjut PBB melalui *United Nations Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security* atau UN GGE yang bertugas untuk menguraikan agenda keamanan siber global, dan memperkenalkan prinsip bahwa hukum internasional berlaku untuk ruang digital membuat beberapa konsesus yang disepakati bersama antar negara anggota PBB, akan tetapi tetap Menurut Hao Yeli seorang mantan perwira Tentara Rakyat Tiongkok mengatakan

---

[6] Cyberspace, Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cyberspace diakses pada 15 Maret 2019

[7] Triwahyuni,Dewi & Wulandari (2016), Tine, Strategi Keamanan Cyber Amerika Serikat, Jurnal Ilmu Politik dan KomunikasiVolume VI No. 1 / Juni 2016, jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-06-no-1/8-dewi-triwahyuni-tine-edited.pdf/pdf/8-dewi-triwahyuni-tine-edited.pdf Hal (pdf) 4 diakses pada 24 Maret 2019

[8] Tsagourias, Nicholas, Law, Borders and the Territorialisation of Cyberspace, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3213511 hal (pdf) 23

bahwa terjadi perbedaan-perbedaan tajam didalam menanggapi mengenai kedaulatan siber .[9]

Berdasarkan penelitian dari Hao Yeli, saat ini paling tidak ada 3 isu perdebatan hangat di Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai keamanan informasi Siber yang menyangkut mengenai kedaulatan Siber suatu negara antara lain[10]:

1. Pertama, kontradiksi antara kedaulatan dunia maya dan semangat internet; eksklusivitas kedaulatan negara klasik bertentangan dengan semangat internet, yang bertumpu pada konsep inter-konektivitas tanpa batas.
2. Kedua, kontradiksi antara Kedaulatan Siber dan HAM. Ini mencerminkan konflik antara prinsip kebebasan berbicara di internet , dan intervensi negara atas nama kedaulatan Sibernya, yang membatasi kebebasan informasi.
3. Yang ketiga adalah kontradiksi antara Kedaulatan Siber dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Dikatakan bahwa kedaulatan dunia maya akan memicu kontroversi pada pola pemerintahan antar-internet; yaitu, pemerintahan yang dipimpin pemerintah yang berdaulat akan menantang pola pemerintahan multi-partai yang ada

Perdebatan tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Bahkan *North Atlantic Treaty Organisation* atau NATO dan Amerika Serikat (AS) sendiri saat ini menganggap bahwa *cyberspace* juga merupakan *Battle Domain* sehingga NATO dan AS membuat pasukan siber.[11] Jeremy Black mengungkapkan bahwa :

> *"The issue of technology in conflict interests most modern commentators on war and plays a major role in account of military change, past, present and future.[12]"*

---

[9] Yeli Hao , (2017) A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty, Journal PRISM Volume 7, No 2 2017, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1044677.pdf (pdf) hal 112

[10] Ibid

[11] Ibid

[12] Black Jeremy, *War and Technology*, Indiana University Press 2013 Hal (Pdf) 3

Salah satu langkah nyata dari pelaksanaan kedaulatan siber ini dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Dimana Republik Rakyat Tiongkok melakukan sensor dan pelokalan konten terhadap Internet di negara Tiongkok. Tiongkok mulai "menasionalisasi" Internetnya. Langkah tersebut dapat dilihat dengan Tiongkok melakukan tindakan melakukan pelarangan atau pembatasan akses terhadap beberapa situs dan aplikasi global antara lain Google, Facebook, Instragram, Twitter, Whatsapp, dan beberapa layanan lainnya di matikan oleh pemerintah Tiongkok.[13] Media menyebut tindakan pemerintah Tiongkok ini dengan "The Great Firewall of China".[14]

Sebagai gantinya, beberapa perusahaan lokal di Tiongkok membuat situs dan aplikasi yang fungsinya serupa dengan situs yang diblokir seperti contohnya Sina Weibo, Renren dan Baidu menggantikan fungsi situs dan aplikasi yang telah diblokir diatas.[15] Kemudian seluruh data yang terkumpul didalam situs dan aplikasi diatas berdasarkan pemberitaan dari Forbes digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk penilaian terhadap *Social Credit Score*, bersama dengan keuangan individu, riwayat kesehatan, riwayat kredit, pembelian online, pembayaran pajak, dan masalah hukum yang dibantu dengan 200 juta kamera pengawas di penjuru negeri.[16] Apa yang dimaksud dengan *Social Credit Score* di Tiongkok? Sistem ini dimaksudkan sebagai penilaian seberapa "dapat dipercaya" seseorang berdasarkan sistem yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok yang berimbas kepada *reward* and *punishment* bagi seorang warganegara Tiongkok.[17]

---

[13] Santhika, Eka(2017), Selain Whatsapp, 8 Aplikasi Ini Juga Diblokir di China, 26 September 2017, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170926072510-185-244043/selain-whatsapp-8-aplikasi-ini-juga-diblokir-di-china diakses pada 19 Maret 2019

[14] Ibid

[15] Azis, Lukaman, Gak Ada Google dan 9 Hal yang Tidak Bisa Kamu Temukan di China, 2 Juni 2017, https://jalantikus.com/tips/hal-yang-tidak-bisa-kamu-temukan-di-china/ diakses pada 19 Maret 2019

[16] Marr, Bernard, (2019), Chinese Social Credit Score: Utopian Big Data Bliss Or Black Mirror On Steroids?, 21 January 2019, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/01/21/chinese-social-credit-score-utopian-big-data-bliss-or-black-mirror-on-steroids/#7878f54b48b8 diakses pada 19 Maret 2019

[17] Ibid

Berdasarkan pemberitaan dari BussinessInsider.com, contoh beberapa hal yang akan terjadi jika memiliki *Social Score* yang buruk adalah dikurangi kecepatan Internetnya, Dibatasi untuk masuk pekerjaan tertentu dan dilarang untuk memasuki sekolah-sekolah favorit bagi dirinya atau keluarganya.[18]

Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya Tiongkok sudah mengatur kedaulatan negara atas wilayah sibernya akan tetapi Tiongkok juga telah memanfaatkan wilayah sibernya untuk melaksanakan penegakan kedaulatan di wilayah "nyata" atau fisiknya, walaupun isu pelanggaran atas Hak asasi manusia oleh pemerintah Tiongkok masih menjadi isu yang masih diperdebatkan didalam pelaksanaan kebijakan siber pemerintah Tiongkok. Akan tetapi point terpenting yang dibahas adalah sudah adanya keseriusan dari suatu negara untuk menegakkan kedaulatan atas wilayah sibernya. Selain pemerintah Tiongkok berdasarkan tulisan Nicholas Tsagourias mengemukakan bahwa Pemerintah Korea Utara juga memiliki Sistem Internet Lokal yang disebut *Kwangmyong* dan Iran dengan *Halal Internet*.[19]

Menurut penelitian Nicholas Tsagourias isi dari Kwangmyong antara lain mesin pencari, *E-mail*, berita dan browser dan hanya memiliki 28 Situs.[20] Sedangkan "*Halal Internet*" Iran menggantikan sistem penyaringan internet yang ada dan didasarkan pada hosting domestik, protokol internet jaringan dan jaringan serat optik.[21]

b. Upaya penegakan Kedaulatan Siber Indonesia

Salah satu instrumen efektif dalam penegakan kedaulatan wilayah siber Indonesia adalah dengan menggunakan aturan perundang-undangan. Di Indonesia, beberapa instrumen inti dalam penguasaan wilayah siber Indonesia adalah dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2016 yang kemudian didukung dengan peraturan-peraturan kementerian, di antaranya

---

[18] Ma, Alexandra (2018), China has started ranking citizens with a creepy 'social credit' system — here's what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you, 29 October 2018, https://www.businessinsider.sg/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4/?r=US&IR=T diakses pada 19 Maret 2019

[19] Tsagourias, Nicholas, *Op.cit* hal (pdf) 22

[20] Ibid Hal 22-23

[21] Ibid Hal 23

peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau sekarang dikenal sebagai Kementerian Digital dan Komunikasi (Komdigi). UU ITE, yang merupakan revisi dari UU No. 11 tahun 2008, menjadi landasan hukum utama dalam mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan penting yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik di ruang siber, termasuk regulasi mengenai kejahatan siber, transaksi elektronik, perlindungan data, dan pengaturan konten digital. Salah satu aspek krusial dari UU ITE adalah penerapannya yang bersifat ekstrateritorial, yang berarti undang-undang ini dapat diterapkan pada tindakan yang dilakukan di luar Indonesia selama memiliki dampak di dalam negeri, suatu ketentuan yang sangat penting dalam menangani kejahatan siber lintas batas.

Sebagaimana pendapat dari Evelyn Julian Halim menyatakan bahwa[22]:

> *Prinsip ekstrateritorial dapat ditemui dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan menganut prinsip ini, maka subjek hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri, perusahaan multinasional dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Indonesia dapat diterapkan pengaturan ini.*

Namun, meskipun UU ITE telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya tidak luput dari kritik dan tantangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan pesat teknologi dan jenis-jenis baru ancaman siber, sehingga masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.[23]

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, dapat disalahgunakan

---

[22] Evelyne Julian Halim, "Prinsip Ekstrateritorial Dalam UU PDP: Tantangan Dan Implikasinya," *Hukum Online* (blog), Desember 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-ekstrateritorial-dalam-uu-pdp--tantangan-dan-implikasinya-lt6390111b768aa/.

[23] Adwi Mulyana Hadi, "Cyber Crime in Renewing The ITE Law to Realize The Goals of Legal Justice," *Jurnal of Law, Society and Islamic Civilization (Jolsie)* 12, no. 1 (April 30, 2024): 2, https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.851 97.

untuk membatasi kebebasan berekspresi, yang menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di era digital. [24]

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi UU ITE adalah keterbatasan sumber daya dan keahlian dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang kompleks, yang menggaris bawahi pentingnya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Dalam konteks ini, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi sangat penting dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan siber di Indonesia. Kominfo bertanggung jawab untuk merumuskan strategi perlindungan data sensitif dan informasi dari ancaman siber, serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pertahanan siber negara.

Salah satu inisiatif penting yang dilakukan oleh Kominfo adalah penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022, yang merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan perlindungan privasi pengguna dan mengatur pengelolaan data pribadi di era digital.[25]

UU PDP ini menjadi pelengkap penting bagi UU ITE dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia. Namun, implementasi UU PDP ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal penyelarasan dengan standar internasional seperti GDPR atau General data Protection Regulation dari Uni Eropa dan ketidakpastian mengenai pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, fragmentasi tanggung jawab di antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah dalam hal tata kelola keamanan siber telah menimbulkan

---

[24] Hadi.
[25] Nit, "UU Perlindungan Data Pribadi Untuk Ekosistem Digital Yang Aman, Terpercaya, Dan Inklusif Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa," *LKPP* (blog), Desember 2024, https://www.lkpp.go.id/read/bu/uu-perlindungan-data-pribadi-untuk-ekosistem-digital-yang-aman-terpercaya-dan-inklusif-di-bidang-pengadaan-barang-jasa.

tantangan dalam koordinasi dan efektivitas pencegahan insiden siber. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terpadu dalam mengelola keamanan siber nasional.

Dalam upaya untuk memperkuat pertahanan siber Indonesia, pemerintah telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memiliki peran vital dalam membentuk lanskap keamanan siber Indonesia. BSSN diberi mandat yang luas untuk mengawasi keamanan siber dan enkripsi di seluruh Indonesia, termasuk perlindungan data nasional dan implementasi langkah-langkah keamanan untuk melindungi infrastruktur Siber nasional sebagaimana amanat dari Pasal 2 dan 3 dari perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Sandi dan Saber Nasional.

Lembaga ini juga berperan penting dalam pengembangan dan penegakan regulasi keamanan siber, bekerja sama dengan badan pemerintah lainnya untuk menciptakan lingkungan regulasi yang kohesif yang mencakup berbagai aspek keamanan siber, termasuk perlindungan data dan respons terhadap insiden.

Salah satu inisiatif penting BSSN adalah pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) untuk merespons ancaman siber dan implementasi Program Intelijen Ancaman Siber (CTIP) untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi dan merespons ancaman siber.[26]

BSSN juga aktif dalam meningkatkan kesadaran publik tentang risiko keamanan siber dan mempromosikan literasi digital, bekerja sama dengan institusi pendidikan dan mitra sektor swasta untuk menyediakan pelatihan dan sumber daya yang bertujuan meningkatkan keterampilan keamanan siber tenaga kerja. Dalam konteks global, BSSN terlibat dalam kemitraan internasional untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber Indonesia, termasuk berpartisipasi dalam forum global dan berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk mengadopsi praktik

[26] RG, "KPI Tergabung Dalam Tim Tanggap Insiden Siber BSSN," *Komisi Peyiaran Indonesia* (blog), Agustus 2024, https://kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37474-kpi-tergabung-dalam-tim-tanggap-insiden-siber-bssn#:~:text=Computer%20Security%20Incident%20Response%20Team%20atau%20CSIRT)%20dibentuk,serta%20memastikan%20integritas%20dan%20ketersediaan%20sistem%20informasi%20organisasi.

terbaik dan standar keamanan siber. Salah satnya adalah dengan pertemuan dengan Singapura untuk belajar mengenai peningkatan kapasitas siber Indonesia.[27]

Meskipun demikian, BSSN juga menghadapi tantangan, termasuk kekurangan profesional keamanan siber yang terampil dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang lebih terpadu. Lembaga ini terus berupaya mengatasi masalah-masalah ini dengan mempromosikan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kolaborasi publik-swasta, dan mengadvokasi peningkatan investasi dalam infrastruktur keamanan siber.

Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan siber Indonesia, BSSN telah meluncurkan beberapa inisiatif penting. Salah satunya adalah Program Intelijen Ancaman Siber (CTIP) yang diluncurkan bekerja sama dengan perusahaan teknologi swasta.[28]

Program ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber Indonesia dengan menyediakan alat dan pelatihan canggih untuk mendeteksi dan mengurangi ancaman siber. BSSN juga telah bermitra dengan perusahaan teknologi untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam strategi keamanan sibernya. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mempertahankan diri dari ancaman siber yang canggih dengan memanfaatkan AI untuk deteksi dan respons ancaman.

Selain itu, BSSN telah menginisiasi program pelatihan untuk membangun kompetensi keamanan siber di sektor publik. Program-program ini berfokus pada membekali pejabat dan karyawan pemerintah dengan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi aset digital dan merespons insiden siber secara efektif. D

---

[27] Badan Siber dan andi Nasional, "Tingkatkan Kerja Sama Indonesia-Singapura Bidang Keamanan Siber, Kepala BSSN Bertemu Dengan Menteri Komunikasi Dan Informasi Singapura," Oktober 2023, https://www.bssn.go.id/tingkatkan-kerja-sama-indonesia-singapura-bidang-keamanan-siber-kepala-bssn-bertemu-dengan-menteri-komunikasi-dan-informasi-singapura/.
[28] Aprilia Khairul Amalia, "BSSN Gandeng Microsoft Guna Perangi Kejahatan Siber Di Indonesia," *Teknologi*, Agustus 2022, https://teknologi.id/bisnis-internasional/bssn-gandeng-microsoft-guna-perangi-kejahatan-siber-di-indonesia.

alam hal perkembangan regulasi, BSSN telah berperan penting dalam mendorong legislasi keamanan siber baru, seperti RUU Keamanan Siber, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengelola ancaman siber dan melindungi keamanan nasional. BSSN juga aktif berkolaborasi dengan entitas sektor swasta untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan siber di berbagai industri. Kemitraan publik-swasta ini sangat penting untuk berbagi intelijen ancaman dan mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan siber yang muncul. Namun, meskipun ada upaya-upaya ini, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam menegakkan kedaulatan wilayah sibernya. Data statistik menunjukkan bahwa ancaman siber di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022, BSSN mencatat hampir satu miliar kasus serangan siber, dengan lebih dari setengahnya terkait malware, kebocoran data menyumbang 15%, dan aktivitas trojan sekitar 10%. Situasi ini semakin memburuk pada paruh pertama tahun 2023, di mana Indonesia mengalami lebih dari 347 juta kasus serangan siber, dengan insiden ransomware menjadi sangat menonjol. Kerentanan Indonesia terhadap pelanggaran data dan serangan phishing juga sangat tinggi.[29]

Selain ancaman Siber tersebut ancaman yang berkaitan dengan perjudian Online juga tidak dapat diremehkan. Upaya penanggulangan perjudian online di Indonesia oleh Pemerintah dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan sebuah langkah komprehensif yang melibatkan berbagai aspek regulasi, teknologi, dan edukasi masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam memerangi fenomena ini, yang telah menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi negara. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 21 tahun 2024, yang bertujuan untuk

[29] Kartika Sury, "Ketahanan Siber Indonesia: Indonesia Di Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital ASEAN," accessed February 4, 2025, https://techforgoodinstitute.org/uncategorized/ketahanan-siber-indonesia-indonesia-di-pusat-pertumbuhan-ekonomi-digital-asean/.

mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap perjudian daring secara efektif dan efisien.

Satgas ini terdiri dari lintas kementerian dan lembaga, menunjukkan pendekatan holistik pemerintah dalam menangani masalah ini. Pemerintah telah menetapkan tiga prioritas utama dalam pemberantasan judi online, yaitu kerja sama dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran situs judi secara sistematis, penegakan hukum dan penelusuran aliran uang judi online termasuk koordinasi hukum lintas negara untuk menyasar aktivitas pencucian uang, serta kampanye dan edukasi publik tentang bahaya judi online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil tindakan tegas dengan memutus akses (take down) lebih dari 2.945.150 konten judi online dari 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024, serta mengajukan penutupan 555 akun e-wallet dan pemblokiran 5.779 rekening bank terkait judi online. [30]

Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghambat akses dan transaksi keuangan terkait perjudian online. Dalam aspek penegakan hukum, Polri telah melakukan langkah-langkah konkret dengan mengungkap 3.975 perkara dalam tiga tahun terakhir, melibatkan 5.982 tersangka, memblokir 40.642 situs, membekukan 4.196 rekening, dan menyita aset senilai Rp817,4 miliar. Angka-angka ini menggambarkan skala besar operasi penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas perjudian online.

BSSN, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, memainkan peran krusial dalam upaya penanggulangan ini. BSSN bertanggung jawab untuk mengecek kerentanan dari sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki pemerintah yang rentan disusupi oleh aktivitas perjudian online. Mereka telah melakukan pengamanan dan mengingatkan hampir 1.200 sistem untuk memperbaiki keamanan mereka. BSSN juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan "take down" terhadap

[30] Grace Gandhi, “Menkominfo Budi Arie Minta Akses Internet Judi Online Ke Kamboja-Filipina Diputus,” News, *Tempo.Co* (blog), June 24, 2024, https://www.tempo.co/ekonomi/menkominfo-budi-arie-minta-akses-internet-judi-online-ke-kamboja-filipina-diputus--46371.

aplikasi-aplikasi milik pemerintah yang disusupi judi online, serta berperan aktif dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Judi Online yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BSSN telah menyelenggarakan acara Kick Off Meeting Operasi Pemberantasan Judi Online yang dihadiri oleh berbagai perwakilan dari instansi terkait, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan strategi antar lembaga dalam upaya memberantas judi online. Dalam aspek teknologi, BSSN menyampaikan beberapa strategi dan teknologi yang akan digunakan untuk mendeteksi serta menutup situs-situs judi online yang ilegal, termasuk peningkatan kapasitas dan kesiapan teknis dari masing-masing instansi dalam menghadapi tantangan yang ada. BSSN juga berkomitmen untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk menanggulangi perjudian online, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa data dan informasi masyarakat terlindungi dari serangan siber yang berkaitan dengan perjudian online.

Dalam hal edukasi dan penyuluhan, BSSN berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya judi online dan cara melaporkan aktivitas mencurigakan, yang dilakukan melalui kolaborasi dengan instansi seperti Diskominfo Kabupaten Aceh Timur. Data kejadian perjudian online di Indonesia menunjukkan skala masalah yang signifikan. Selama periode 2017-2022, terdapat sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total nilai perputaran uang mencapai Rp190 triliun. Pada tahun 2023, jumlah transaksi meningkat menjadi 168 juta dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun. Dari segi demografi, Indonesia memiliki sekitar 4 juta pemain judi online, dengan 2% adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun dan 11% adalah remaja berusia 10-20 tahun. Berdasarkan estimasi WHO, prevalensi kecanduan judi pada orang dewasa berkisar antara 0,1% hingga 5,8%, yang berarti dengan populasi dewasa di Indonesia sekitar 187,4 juta jiwa, diperkirakan ada antara 187.000 hingga 10,9 juta orang yang berisiko kecanduan judi.

Pada tahun 2023, rata-rata penjudi di Indonesia menghabiskan sekitar Rp30,1 juta per tahun untuk berjudi, atau sekitar Rp2,5 juta per bulan. Tingkat

penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 79,5% dari total penduduk, dengan generasi Z dan post-Z memiliki penetrasi yang sangat tinggi, menjadi faktor yang memudahkan akses ke perjudian online. Meskipun pemerintah dan BSSN telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi perjudian online, data menunjukkan bahwa masalah ini masih signifikan dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Tantangan utama termasuk kompleksitas hukum, keterlibatan pejabat, dan rendahnya literasi keuangan di masyarakat. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi masalah perjudian online secara efektif. Ke depannya, pemerintah Indonesia berencana untuk terus memperkuat upaya penanggulangan perjudian online melalui berbagai strategi. Ini termasuk penguatan kerangka hukum dan regulasi untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh operator perjudian online, peningkatan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan memblokir situs perjudian ilegal, serta peningkatan kerja sama internasional untuk mengatasi sifat lintas batas dari perjudian online.

BSSN juga akan terus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman siber terkait perjudian online, termasuk pengembangan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap aktivitas perjudian online yang mencurigakan. Selain itu, fokus pada edukasi dan literasi digital akan diperkuat untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online dan cara melindungi diri dari eksploitasi. Dengan pendekatan multi-dimensi ini, pemerintah Indonesia dan BSSN berharap dapat secara signifikan mengurangi prevalensi perjudian online di negara ini, melindungi masyarakat dari dampak negatifnya, dan menjaga integritas ruang siber nasional.

c. Pemadanan kerangka hukumnya kedalam konvensi-konvensi Internasional utamanya yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan lintas negara

Pemadanan kerangka hukum nasional Indonesia dengan konvensi-konvensi internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, khususnya yang

berkaitan dengan judi online, merupakan upaya kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum dan kebijakan. Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam komunitas internasional, telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan standar internasional.

Salah satu konvensi internasional utama yang menjadi acuan adalah United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 15 November 2000 dan mulai berlaku pada 29 September 2003.

UNTOC menjadi instrumen utama dalam memerangi kejahatan terorganisir lintas negara, termasuk yang berkaitan dengan judi online. Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah dalam memerangi kejahatan terorganisir, termasuk pencucian uang, korupsi, dan obstruction of justice, yang seringkali terkait erat dengan operasi judi online ilegal. Dalam konteks Indonesia, upaya untuk menyelaraskan hukum nasional dengan UNTOC tercermin dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara khusus menargetkan aspek keuangan dari kejahatan terorganisir, termasuk yang berasal dari judi online. Selain itu, Indonesia juga telah mengembangkan kerangka hukum nasional yang berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 303 dan 303 bis KUHP secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara online, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp 25 juta. Sementara itu, Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur sanksi bagi siapa pun yang mendistribusikan atau membuat informasi elektronik yang bermuatan perjudian dapat diakses, dengan ancaman hukuman hingga enam tahun penjara.

Pasal perjudian dalam KUHP baru adalah Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal-pasal ini mengatur tindak pidana perjudian yang diatur dalam UU 1/2023 tentang

KUHP. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar dimana KUHP baru Indonesia ini banyak melakukan penyerapan terhadap Konvensi-konvensi Internasional yang telah ditanda-tangi oleh Indonesia termasuk United Nationa Convention against corruption beserta konvensi-konvensi HAM lainnya.[31] Meskipun demikian Indonesia belum maksimal didalam melakukan penyerapanya.[32]

Kerangka hukum ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan semangat konvensi internasional seperti UNTOC dan UNCOC, yang menekankan pentingnya kriminalisasi aktivitas yang terkait dengan kejahatan terorganisir lintas negara.

Secara implisit memang perjudian bukan menjadi salah satu hal yang diatur didalam UNTOC 2003, akan tetapi faktor pencucian Uang nya menjadi faktor mengapa perjudian tentap menjadi salah satu media pencucian uang, sebagaimana pendapat dari Marius Gunawan dari Indonesia Working Group of Forest Finance yang berpendapat bahwa [33]:

> Judi online memberikan platform yang ideal bagi pelaku untuk mencuci uang karena anonimitas dan kemudahan transaksi yang ditawarkannya. Beberapa modus operandi yang umum digunakan meliputi: 6 Penggunaan Identitas Palsu: Pelaku membuka akun judi online dengan identitas palsu atau fiktif untuk menyamarkan identitas asli mereka

Dimana lebih lanjut Marius Gunawan menjelaskan bahwa modus operandi pencucian uang yang dilakukan adalah dengan[34]:

> Judi online memfasilitasi pencucian uang dengan menyediakan mekanisme yang relatif mudah dan anonim. Berikut beberapa cara yang umum digunakan: 7 Cara yang lazim dilakukan adalah Pembukaan Banyak Akun: Pelaku sering membuka banyak akun di berbagai platform judi online menggunakan identitas palsu. Dana ilegal dimasukkan ke dalam akun-akun ini dan kemudian ditransfer antar akun untuk mempersulit pelacakan .

---

[31] Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, "Indonesia's New Criminal Code and Its Implicationof International Treaties of Human Rights Commitmentin Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 184.
[32] Arsetyo.
[33] Marius Gunawan, "Dapatkah Penegakan Hukum Pencucian Uang Memberantas Judi Online?" (Indonesia Working Group of Forest Finance, 2024), https://iwgff.or.id/wp-content/uploads/2024/08/artikel-Pencucian-uang-dan-Judi-online.pdf.
[34] Gunawan.

Dalam konteks regional, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam konvensi dan perjanjian ASEAN yang fokus pada pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan siber. ASEAN telah mengembangkan beberapa instrumen penting dalam hal ini, termasuk ASEAN Declaration on Transnational Crime (1997) yang menjadi tonggak penting dalam komitmen ASEAN untuk memerangi kejahatan transnasional.

Deklarasi ini diikuti oleh ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (1999), yang menyediakan kerangka strategis untuk upaya ASEAN melawan kejahatan transnasional, termasuk penguatan kerja sama regional, pengembangan kerangka hukum, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum. Selanjutnya, ASEAN Convention on Counter Terrorism (2007) dan ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (2004) memperkuat kerangka kerja sama regional dalam menangani kejahatan lintas negara, termasuk yang berkaitan dengan judi online.

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip dan komitmen yang terkandung dalam konvensi-konvensi ASEAN ini ke dalam kerangka hukum nasionalnya. Hal ini terlihat dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap perjudian daring secara efektif dan efisien.

Satgas ini melibatkan berbagai instansi lintas kementerian/lembaga, mencerminkan pendekatan komprehensif yang sejalan dengan semangat kerja sama regional ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan ASEAN Cyber Capacity Program menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi regional dalam menghadapi tantangan kejahatan siber, termasuk judi online.

Meskipun Indonesia telah melakukan upaya signifikan dalam menyelaraskan kerangka hukum nasionalnya dengan konvensi internasional dan regional, implementasi efektif masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sifat transnasional dari judi online, di mana operator sering beroperasi dari yurisdiksi di luar Indonesia yang memiliki regulasi perjudian yang lebih longgar. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani judi online sebagai kejahatan lintas negara, termasuk penguatan kerja sama internasional dan harmonisasi hukum dengan negara-negara lain. Tantangan lain termasuk kompleksitas teknologi yang digunakan oleh operator judi online, yang seringkali melampaui kemampuan hukum untuk beradaptasi. Perkembangan pesat teknologi internet dan metode perjudian online menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh operator judi online, mempersulit penegakan hukum nasional terhadap operator yang berbasis di luar negeri. Selain itu, keterlibatan oknum pejabat dan aparat penegak hukum dalam melindungi operasi perjudian juga menjadi hambatan serius dalam upaya pemberantasan judi online.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif seperti pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dan peningkatan kerja sama internasional. Namun, efektivitas upaya ini masih terbatas oleh kurangnya mekanisme kerja sama internasional yang kuat dalam penegakan hukum siber, serta keterbatasan sumber daya dan keahlian dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang kompleks.

Untuk meningkatkan efektivitas pemadanan kerangka hukum nasional dengan konvensi internasional dan regional dalam konteks judi online, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis lebih lanjut. Pertama, diperlukan revisi dan pembaruan undang-undang yang lebih spesifik dan menyeluruh untuk menangani judi online sebagai kejahatan transnasional, termasuk penguatan UU ITE dan pertimbangan untuk membuat undang-undang khusus yang menangani judi online secara komprehensif. Kedua, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang kejahatan siber dan judi online sangat penting, termasuk peningkatan pemahaman tentang teknologi yang digunakan dalam judi online dan

teknik investigasi digital. Ketiga, penguatan kerja sama internasional, baik melalui perjanjian bilateral maupun partisipasi aktif dalam forum-forum multilateral, perlu ditingkatkan. Ini termasuk peningkatan kapasitas dalam berbagi informasi intelijen, melakukan operasi bersama, dan memfasilitasi ekstradisi pelaku kejahatan lintas negara. Keempat, investasi dalam teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analisis big data dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas judi online ilegal. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat memainkan peran kunci dalam hal ini, dengan meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman siber terkait perjudian online. Terakhir, peningkatan edukasi dan kesadaran publik tentang risiko judi online dan implikasi hukumnya sangat penting.

Program edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor pendidikan dan media, dapat membantu mengurangi permintaan terhadap layanan judi online ilegal. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitasnya dalam memerangi judi online dan melindungi kepentingan nasionalnya di era digital, sambil tetap menyelaraskan kerangka hukumnya dengan standar internasional yang ditetapkan oleh konvensi-konvensi seperti UNTOC dan perjanjian-perjanjian ASEAN.

d. Dampak pemadaman Konvensi Internasional dalam Hukum Nasional dalam pembertansan kasus Judi Online di Indonesia

Pemadanan kerangka hukum nasional Indonesia dengan konvensi-konvensi internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan judi online, telah memberikan dampak signifikan terhadap upaya pemberantasan kasus judi online di Indonesia. Proses pemadanan ini melibatkan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional yang ditetapkan oleh berbagai konvensi, seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Budapest Convention on Cybercrime. UNTOC, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk memerangi kejahatan terorganisir lintas negara, termasuk yang berkaitan dengan judi online.

Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah dalam memerangi kejahatan terorganisir, termasuk pencucian uang, korupsi, dan obstruction of justice, yang seringkali terkait erat dengan operasi judi online ilegal. Sebagai hasil dari pemadanan UNTOC, Indonesia telah memperkuat undang-undang nasionalnya, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini secara spesifik melarang distribusi, transmisi, atau pembuatan konten elektronik yang bermuatan perjudian, dengan ancaman hukuman hingga enam tahun penjara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga telah diperkuat untuk menangani aspek keuangan dari kejahatan terorganisir, termasuk yang berasal dari judi online. Pemadanan ini telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelaku judi online dan memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan yurisdiksi lintas batas.

Dampak pemadanan konvensi internasional ke dalam hukum nasional Indonesia juga terlihat dalam peningkatan kerja sama internasional dan regional dalam upaya pemberantasan judi online. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional dan regional yang fokus pada pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan siber, seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang salah satu komitmennya adalah kerjsama antar negara ASEAN dalam pemberantasan Kejahatan lintas negara.[35]

Selain itu dalam Konfrensi Tingkat Tinggi ASEAN di Laos pada 2024 Judi Online menjadi salah satu bahasan yang kemudian akan diajukan ke Pertemuan ASEAN chiefs of national polic atau ASEANAPOL untuk menjadi kajian penegakan hukum bersama.[36] Terlebih ASEAN tidak hanya bergerak sendiri

[35] Admin, "ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC) KE-17," *Interpol Indonesia* (blog), Desember 2023, https://interpol.go.id/berita38.php.
[36] Celvin Moniaga Sipahutar, "ASEAN Summit in Laos Needs to Address Online Gambling," *Jakarta Globe*, June 28, 2024, https://jakartaglobe.id/news/asean-summit-in-laos-needs-to-address-online-gambling.

didalam hal ini juga diperkuat dengan Kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok dalam pemberantasan Judi Online dan Penipuan.[37]

Kerja sama ini telah memungkinkan Indonesia untuk berbagi informasi intelijen, melakukan operasi bersama, dan memfasilitasi ekstradisi pelaku kejahatan lintas negara. Hal ini sangat penting mengingat sifat transnasional dari judi online, di mana operator sering beroperasi dari yurisdiksi di luar Indonesia.

Melalui kerja sama ini, Indonesia telah berhasil melakukan beberapa operasi penindakan terhadap sindikat judi online internasional yang beroperasi di wilayah Indonesia. Selain itu, pemadanan konvensi internasional juga telah mendorong peningkatan kapasitas penegakan hukum di Indonesia. Melalui partisipasi dalam program-program pelatihan dan pertukaran pengetahuan internasional, aparat penegak hukum Indonesia telah meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus judi online yang semakin kompleks.

Meskipun pemadanan konvensi internasional telah memberikan dampak positif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemberantasan kasus judi online di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas teknologi yang digunakan oleh operator judi online. Perkembangan pesat teknologi internet dan metode perjudian online seringkali melampaui kemampuan hukum untuk beradaptasi, menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh operator judi online.

Tantangan lain adalah yurisdiksi lintas batas dan anonimitas yang ditawarkan oleh internet. Banyak situs judi online beroperasi dari negara-negara dengan regulasi perjudian yang lebih longgar, mempersulit penegakan hukum nasional terhadap operator yang berbasis di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memperkuat kerangka hukumnya, efektivitas penegakan hukum masih terbatas oleh kendala yurisdiksi.

---

[37] Times Reporter, "ASEAN, China Agree to Fight Online Fraud, Foster Cooperation," *Vientiane Times*, Oktober 2024, https://www.vientianetimes.org.la/freefreenews/freecontent_198_ASEAN_China_y24.php.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif seperti pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024. Satgas ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap perjudian daring secara efektif dan efisien, melibatkan berbagai instansi lintas kementerian/lembaga. Namun, efektivitas upaya ini masih terbatas oleh kurangnya mekanisme kerja sama internasional yang kuat dalam penegakan hukum siber, serta keterbatasan sumber daya dan keahlian dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang kompleks.

Untuk meningkatkan efektivitas pemadanan konvensi internasional dalam pemberantasan kasus judi online di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis lebih lanjut. Pertama, diperlukan revisi dan pembaruan undang-undang yang lebih spesifik dan menyeluruh untuk menangani judi online sebagai kejahatan transnasional, termasuk penguatan UU ITE dan pertimbangan untuk membuat undang-undang khusus yang menangani judi online secara komprehensif. Kedua, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang kejahatan siber dan judi online sangat penting, termasuk peningkatan pemahaman tentang teknologi yang digunakan dalam judi online dan teknik investigasi digital. Ketiga, penguatan kerja sama internasional, baik melalui perjanjian bilateral maupun partisipasi aktif dalam forum-forum multilateral, perlu ditingkatkan. Ini termasuk peningkatan kapasitas dalam berbagi informasi intelijen, melakukan operasi bersama, dan memfasilitasi ekstradisi pelaku kejahatan lintas negara. Keempat, investasi dalam teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analisis big data dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas judi online ilegal.

Salah satu contoh sukses pengeakan hukum terhadap kasus judi online secara bilateral adalah dengan aksi penngerebekan Pemerintah Laos yang bekerjasama dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok didalam melakakukan

Penggerebekan di Pusat Perjudian illegal di Laos yang menghasilkan 771 Orang yang terdiri dari berbagai bangsa termasuk WNI.[38]

Terakhir, peningkatan edukasi dan kesadaran publik tentang risiko judi online dan implikasi hukumnya sangat penting. Pada akhirnya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitasnya dalam memerangi judi online dan melindungi kepentingan nasionalnya di era digital, sambil tetap menyelaraskan kerangka hukumnya dengan standar internasional yang ditetapkan oleh konvensi-konvensi seperti UNTOC dan perjanjian-perjanjian ASEAN.

4. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Tulisan ini telah membahas kerangka hukum pengelolaan kedaulatan ruang siber Indonesia dalam konteks hukum internasional, dengan fokus terhadap pemberantasan perjudian online. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, terdapat dua hal pokok yang menjadi titik perhatian, yaitu bagaimana Indonesia melakukan pemadanan kerangka hukum dengan konvensi internasional yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan lintas negara dan dampak dari pemadanan tersebut terhadap kasus perjudian online.

Dalam upaya pertama, Indonesia telah banyak meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara, termasuk konvensi yang menyangkut kejahatan siber. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring melalui Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2024. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah judi online secara menyeluruh. Selain itu, kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan aktif

[38] Sebastian Stangio, "Lao, Chinese Officials Detain 771 in Raid on Golden Triangle Gambling Hub," *The Diplomat*, Agustus 2024, https://thediplomat.com/2024/08/lao-chinese-officials-detain-771-in-raid-on-golden-triangle-gambling-hub/.

dalam memblokir konten judi online, dengan ribuan konten berhasil ditangani dalam kurun waktu tertentu.

Namun, tantangan besar tetap ada. Kompleksitas yurisdiksi lintas negara menjadi dilema bagi penegak hukum, di mana sebagian besar pelaku perjudian online beroperasi dari luar negeri, sehingga sulit untuk menegakkan hukum. Keterlibatan pejabat dan rendahnya literasi keuangan di masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberantasan kejahatan ini. Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi masalah ini, mengingat sifat perjudian online yang sering kali melibatkan banyak negara.

Dari sisi kedua dalam rumusan masalah, dampak pemadanan kerangka hukum tersebut terhadap kasus perjudian online di Indonesia terasa signifikan. Dengan adanya penguatan regulasi dan penggunaan teknologi canggih dalam mendeteksi dan memblokir situs judi ilegal, pemerintah berharap dapat menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh operator perjudian. Namun, meskipun langkah-langkah ini sudah diambil, tantangan tetap mengintai, seperti meningkatnya jumlah serangan siber dan kejahatan di ranah digital.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memadankan kerangka hukumnya dengan konvensi internasional, masih banyak tugas yang harus diselesaikan untuk menghadapi kompleksitas dan dinamika kejahatan siber, terutama dalam konteks perjudian online.

b. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan perjudian online serta pengelolaan kedaulatan ruang siber Indonesia:

1. Penguatan Kerja Sama Internasional: Niscaya, kejahatan di ruang siber tidak mengenal batas negara. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi dengan negara lain dalam menanggulangi perjudian online. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi mengenai teknologi dan metode

penanganan yang lebih efektif serta pemuatan hukum yang mempermudah ekstradisi bagi pelaku kejahatan lintas negara.

2. Pendidikan dan Literasi Keuangan: Tingkat literasi keuangan yang rendah menjadi salah satu hambatan dalam penanganan perjudian online. Oleh karena itu, perlu adanya program pendidikan dan sosialisasi yang menyasar masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Program ini dapat mencakup pemahaman akan risiko perjudian online serta bagaimana menghindarinya.
3. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat, Indonesia harus memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk mendeteksi dan mengatasi perjudian online. Inovasi dalam teknologi siber harus terus dikembangkan untuk dapat bersaing dengan cara-cara yang digunakan oleh para pelaku kejahatan.
4. Regulasi yang Berkelanjutan: Pembaruan dan penguatan regulasi yang berfokus pada perjudian online harus dilakukan secara berkala. Hukum yang adaptif terhadap perubahan situasi dan teknologi di ruang siber akan lebih efektif dalam memberantas praktik ilegal di kawasan dunia maya.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Keterbatasan dalam penegakan hukum sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pengetahuan. Oleh karena itu, perlu diadakan program pelatihan untuk petugas penegak hukum mengenai aspek hukum dan teknologi terkait kejahatan siber.
6. Riset dan Data Analisis: Penyediaan data yang lebih komprehensif mengenai tren perjudian online dan dampaknya di masyarakat sangat penting. Penelitian yang mendalam akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam memberantas perjudian online dan melindungi kedaulatan ruang sibernya, sehingga masyarakat dapat beraktivitas online dengan lebih aman dan sehat.

5. Referensi

Admin. “ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC) KE-17.” *Interpol Indonesia* (blog), Desember 2023. https://interpol.go.id/berita38.php.

———. “GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online,” July 26, 2024. https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html.

Agustiyanti. “Menkominfo Berantas Judi Online, 60.582 Konten Diblokir.” *Katadata.Co.Id*, September 23, 2023. https://katadata.co.id/digital/teknologi/650ec8d07cd54/menkominfo-berantas-judi-online-60582-konten-diblokir.

Amalia, Aprilia Khairul. “BSSN Gandeng Microsoft Guna Perangi Kejahatan Siber Di Indonesia.” *Teknologi*, Agustus 2022. https://teknologi.id/bisnis-internasional/bssn-gandeng-microsoft-guna-perangi-kejahatan-siber-di-indonesia.

Arsetyo, Yulio Iqbal Cahyo. “Indonesia’s New Criminal Code and Its Implicationof International Treaties of Human Rights Commitmentin Indonesia.” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 184.

Badan Siber dan andi Nasional. “Tingkatkan Kerja Sama Indonesia-Singapura Bidang Keamanan Siber, Kepala BSSN Bertemu Dengan Menteri Komunikasi Dan Informasi Singapura,” Oktober 2023. https://www.bssn.go.id/tingkatkan-kerja-sama-indonesia-singapura-bidang-keamanan-siber-kepala-bssn-bertemu-dengan-menteri-komunikasi-dan-informasi-singapura/.

Gandhi, Grace. “Menkominfo Budi Arie Minta Akses Internet Judi Online Ke Kamboja-Filipina Diputus.” News. *Tempo.Co* (blog), June 24, 2024. https://www.tempo.co/ekonomi/menkominfo-budi-arie-minta-akses-internet-judi-online-ke-kamboja-filipina-diputus--46371.

Gunawan, Marius. “Dapatkah Penegakan Hukum Pencucian Uang Memberantas Judi Online?” Indonesia Working Group of Forest Finance, 2024. https://iwgff.or.id/wp-content/uploads/2024/08/artikel-Pencucian-uang-dan-Judi-online.pdf.

Hadi, Adwi Mulyana. “Cyber Crime in Renewing The ITE Law to Realize The Goals of Legal Justice.” *Jurnal of Law, Society and Islamic Civilization (Jolsie)* 12, no. 1 (April 30, 2024): 2. https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.851 97.

Halim, Evelyne Julian. “Prinsip Ekstrateritorial Dalam UU PDP: Tantangan Dan Implikasinya.” *Hukum Online* (blog), Desember 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-ekstrateritorial-dalam-uu-pdp--tantangan-dan-implikasinya-lt6390111b768aa/.

Nit. “UU Perlindungan Data Pribadi Untuk Ekosistem Digital Yang Aman, Terpercaya, Dan Inklusif Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa.” *LKPP* (blog), Desember 2024. https://www.lkpp.go.id/read/bu/uu-perlindungan-data-pribadi-untuk-ekosistem-digital-yang-aman-terpercaya-dan-inklusif-di-bidang-pengadaan-barang-jasa.

Pribady, Muhammad Lugas. “29 Juta Serangan Siber Diblokir Di Indonesia Selama 2023.” *Detikinet*, February 27, 2024.

https://inet.detik.com/security/d-7214588/29-juta-serangan-siber-diblokir-di-indonesia-selama-2023.

Reporter, Times. “ASEAN, China Agree to Fight Online Fraud, Foster Cooperation.” *Vientiane Times*, Oktober 2024. https://www.vientianetimes.org.la/freefreenews/freecontent_198_ASEAN_China_y24.php.

RG. “KPI Tergabung Dalam Tim Tanggap Insiden Siber BSSN.” *Komisi Peyiaran Indonesia* (blog), Agustus 2024. https://kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37474-kpi-tergabung-dalam-tim-tanggap-insiden-siber-bssn#:~:text=Computer%20Security%20Incident%20Response%20Team%20atau%20CSIRT)%20dibentuk,serta%20memastikan%20integritas%20dan%20ketersediaan%20sistem%20informasi%20organisasi.

Sipahutar, Celvin Moniaga. “ASEAN Summit in Laos Needs to Address Online Gambling.” *Jakarta Globe*, June 28, 2024. https://jakartaglobe.id/news/asean-summit-in-laos-needs-to-address-online-gambling.

Stangio, Sebastian. “Lao, Chinese Officials Detain 771 in Raid on Golden Triangle Gambling Hub.” *The Diplomat*, Agustus 2024. https://thediplomat.com/2024/08/lao-chinese-officials-detain-771-in-raid-on-golden-triangle-gambling-hub/.

Sury, Kartika. “Ketahanan Siber Indonesia: Indonesia Di Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital ASEAN.” Accessed February 4, 2025. https://techforgoodinstitute.org/uncategorized/ketahanan-siber-indonesia-indonesia-di-pusat-pertumbuhan-ekonomi-digital-asean/.

Cyberspace, Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cyberspace diakses pada 15 Maret 2019

Triwahyuni,Dewi & Wulandari (2016), Tine, Strategi Keamanan Cyber Amerika Serikat, Jurnal Ilmu Politik dan KomunikasiVolume VI No. 1 / Juni 2016, jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-06-no-1/8-dewi-triwahyuni-tine-edited.pdf/pdf/8-dewi-triwahyuni-tine-edited.pdf Hal (pdf) 4 diakses pada 24 Maret 2019

Tsagourias, Nicholas, Law, Borders and the Territorialisation of Cyberspace, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3213511 hal (pdf) 23

Yeli Hao , (2017) A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty, Journal PRISM Volume 7, No 2 2017, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1044677.pdf (pdf) hal 112

Black Jeremy, *War and Technology*, Indiana University Press 2013 Hal (Pdf) 3

Santhika, Eka(2017), Selain Whatsapp, 8 Aplikasi Ini Juga Diblokir di China, 26 September 2017, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170926072510-185-244043/selain-whatsapp-8-aplikasi-ini-juga-diblokir-di-china

Azis, Lukaman, Gak Ada Google dan 9 Hal yang Tidak Bisa Kamu Temukan di China, 2 Juni 2017, https://jalantikus.com/tips/hal-yang-tidak-bisa-kamu-temukan-di-china/

Marr, Bernard, (2019), Chinese Social Credit Score: Utopian Big Data Bliss Or Black Mirror On Steroids?, 21 January 2019, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/01/21/chinese-social-credit-score-utopian-big-data-bliss-or-black-mirror-on-steroids/#7878f54b48b8

Ma, Alexandra (2018), China has started ranking citizens with a creepy 'social credit' system — here's what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you, 29 October 2018, https://www.businessinsider.sg/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4/?r=US&IR=T

6. CV

Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo adalah Dosen Hukum Internasional Universitas Surakarta, Aktivis di Lembaga Swadaya Masyarkat Indonesia Monitoring Procedural of Law (IMPLAW) Yogyakarta, Anggota Majelis Hukum dan Hukum Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Lulus dari S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan S2 Double Degree di Magister Ilmu Hukum Internasional ASEAN Universitas Islam Indonesia dan General Law Magister of Law Youngsan University Republic Of Korea

Simposium
Penegakan Kedaulatan Negara
2025